



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Undang-Undang Nomor 100 Tahun 2024 tentang Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7037);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang



- Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 27. Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2019 Nomor 1447);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 36. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 95);



37. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Jasa Transportasi Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 70);
38. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 122);
39. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 106);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
41. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 114);
42. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Transportasi Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 128);
43. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 132);
44. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor



- 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 137);
45. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 160);
46. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 11);
47. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 162);
48. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 168);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR
dan
WALI KOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan terdiri atas:
- Laporan Realisasi Anggaran;
 - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - Laporan Operasional;
 - Laporan Perubahan Ekuitas;
 - Neraca;
 - Laporan Arus Kas; dan
 - Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.



Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

a.	Pendapatan	Rp3.170.497.628.555,24
b.	Belanja dan Transfer	Rp3.178.466.734.133,00
	Surplus/Defisit	Rp (7.969.105.577,76)
c.	Pembiayaan:	
	1. Penerimaan Daerah	Rp225.089.463.440,14
	2. Pengeluaran Daerah	Rp132.184.766.176,00
	Pembiayaan Netto	Rp92.904.697.264,14

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(22.212.419.518,76) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp3.192.710.048.074,00
 2. Realisasi Rp3.170.497.628.555,24
 - Selisih lebih/(Kurang) Rp(22.212.419.518,76)
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp(102.345.388.404,00) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran Belanja dan transfer setelah perubahan Rp3.280.812.122.537,00
 2. Realisasi Rp3.178.466.734.133,00
 - Selisih lebih/(Kurang) Rp(102.345.388.404,00)
- c. Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/(Defisit) sejumlah Rp80.132.968.885,24 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan Rp(88.102.074.463,00)
 2. Realisasi Rp(7.969.105.577,76)
 - Selisih lebih/(Kurang) Rp80.132.968.885,24
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan daerah sejumlah Rp126.693.242.981,14 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan Rp98.396.220.459,00
 2. Realisasi Rp225.089.463.440,14
 - Selisih lebih /(Kurang) Rp126.693.242.981,14



- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah sejumlah Rp121.890.620.180,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan Rp10.294.145.996,00
 - 2. Realisasi Rp132.184.766.176,00
Selisih lebih /(Kurang) Rp(121.890.620.180,00)
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp4.802.622.801,14 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp88.102.074.463,00
 - 2. Realisasi Rp92.904.697.264,14
Selisih lebih/(Kurang) Rp4.802.622.801,14

Pasal 4

Laporan Perubahan SAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp54.250.445.599,14
- b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp(54.255.954.664,14)
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Rp 84.935.591.686,38
- d. Koreksi Kesalahan Pembukaan Tahun Sebelumnya Rp(5.509.065,00)
- e. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp84.935.591.686,38

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri atas:

- a. Kegiatan Operasional Pendapatan - LO, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Pendapatan Asli Daerah -LO Rp1.613.207.035.756,08
 - 2. Pendapatan transfer - LO Rp1.701.821.239.565,00
 - 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah - LO Rp42.961.879.333,77
- Beban, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Beban Operasional Rp3.295.465.961.046,54
 - 2. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Rp1.660.750.000,00
- Surplus/Defisit Kegiatan Operasional Rp60.863.443.608,31



b. Kegiatan Non Operasional	
1. Surplus Kegiatan Non Operasional	Rp14.388.624.170,56
2. Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp0,00
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	Rp0,00
c. Pos luar biasa	
1. Pendapatan Luar Biasa	Rp0,00
2. Beban Luar biasa	Rp2.187.043.885,00
Surplus/Defisit Pos Luar Biasa	Rp(2.187.043.885,00)
d. Surplus/defisit-LO	Rp73.065.023.893,87

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, terdiri atas:

a. Ekuitas Awal	Rp10.613.114.672.934,97
b. Surplus Defisit-LO	Rp73.065.023.893,87
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp183.206.318.698,13
d. Ekuitas Akhir	Rp10.869.386.015.526,97

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e tanggal 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Jumlah asset	Rp11.042.144.290.257,76
b. Jumlah kewajiban	Rp172.758.274.730,79
c. Jumlah ekuitas	Rp10.869.386.015.526,97

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 2 Januari Tahun 2024	Rp54.510.496.495,14
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp391.009.463.166,24
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi asset non Keuangan	Rp(398.978.568.744,00)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan	Rp38.648.742.600,00
e. Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran	Rp(96.263.930,00)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2024	Rp85.093.869.587,38

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.



Pasal 10

Uraian lebih lanjut atas Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas;
 - 1. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
 - 2. Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - 3. Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;



- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah terdiri atas;
1. Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
2. Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 2 September 2025

WALI KOTA BOGOR,



Diundangkan di Bogor
pada tanggal 2 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR.



LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT
(6/162/2025)



No	Uraian	Halaman		
38	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	193	-	198
39	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	199	-	207
40	Dinas Lingkungan Hidup	208	-	215
41	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	216	-	220
42	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	221	-	227
43	Dinas Perhubungan	228	-	232
44	Dinas Komunikasi dan Informatika	233	-	238
45	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	239	-	244
46	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	245	-	248
47	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	249	-	253
48	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	254	-	258
49	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	259	-	264
50	Sekretariat Daerah (Unit Induk)			
51	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	265	-	266
52	Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia	267	-	268
53	Bagian Organisasi	269	-	270
54	Bagian Pemerintahan	271	-	273
55	Bagian Perekonomian	274	-	275
56	Bagian Kesejahteraan Rakyat	276	-	277
57	Bagian Administrasi Pembangunan	278	-	279
58	Bagian Umum	280	-	284
59	Bagian Pengadaan Barang Jasa	285	-	286
60	Sekretariat DPRD	287	-	294
61	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	295	-	300
62	Badan Keuangan dan Aset Daerah	301	-	307
63	Badan Pendapatan Daerah	308	-	312
64	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	313	-	318
65	Inspektorat	319	-	323
66	Kecamatan Bogor Utara (Unit Induk)	324	-	328
67	Kelurahan Tegal Gundil	329	-	330
68	Kelurahan Bantarjati	331	-	332
69	Kelurahan Cibuluh	333	-	334
70	Kelurahan Kedung Halang	335	-	336
71	Kelurahan Ciparigi	337	-	338
72	Kelurahan Ciluar	339	-	340
73	Kelurahan Tanah Baru	341	-	342
74	Kelurahan Cimahpar	343	-	344
75	Kecamatan Bogor Selatan	345	-	349
76	Kelurahan Batutulis	350	-	351
77	Kelurahan Bojongsarta	352	-	353
78	Kelurahan Bondongan	354	-	355
79	Kelurahan Cikaret	356	-	357
80	Kelurahan Cipaku	358	-	359
81	Kelurahan Empang	360	-	361
82	Kelurahan Genteng	362	-	363
83	Kelurahan Harjasari	364	-	365



LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR ISI

No	Uraian	Halaman
I	Peraturan Daerah	
Lampiran I.1	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2024	1 - 15
Lampiran I.2	Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024	16 - 17
Lampiran I.3	Rincian APBD Menurut Urusan Pemerinrah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024	
1	Dinas Pendidikan	18 - 27
2	Dinas Kesehatan	28 - 39
3	Puskesmas Bogor Selatan	40 - 43
4	Puskesmas Cipaku	44 - 47
5	Puskesmas Bondongun	48 - 51
6	Puskesmas Lawanggintung	52 - 56
7	Puskesmas Bogor Timur	57 - 60
8	Puskesmas Pulo Armin	61 - 64
9	Puskesmas Bogor Tengah	65 - 68
10	Puskesmas Sempur	69 - 72
11	Puskesmas Gang Aul	73 - 77
12	Puskesmas Belong	78 - 82
13	Puskesmas Merdeka	83 - 86
14	Puskesmas Semplak	87 - 90
15	Puskesmas Pancusan	91 - 94
16	Puskesmas Pasir Mulya	95 - 98
17	Puskesmas Gang Kelor	99 - 102
18	Puskesmas Sindang Barang	103 - 106
19	Puskesmas Bogor Utara	107 - 110
20	Puskesmas Tegal Gundil	111 - 115
21	Puskesmas Warung Jambu	116 - 119
22	Puskesmas Tanah Sareal	120 - 123
23	Puskesmas Pondok Rumpit	124 - 128
24	Puskesmas Kedung Badak	129 - 132
25	Puskesmas Kayumanis	133 - 136
26	Puskesmas Melarwangi	137 - 140
27	Puskesmas Mulyaharja	141 - 144
28	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	145 - 146
29	Rumah Sakit Umum Daerah	147 - 148
30	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	149 - 150
31	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	151 - 159
32	Dinas Perumahan Dan Permukiman	160 - 166
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	167 - 171
34	Satuan Polisi Pamong Praja	172 - 176
35	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	177 - 180
36	Dinas Sosial	181 - 187
37	Dinas Tenaga Kerja	188 - 192



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QR Code dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>

No	Uraian	Halaman
84	Kelurahan Kertamaya	366 - 367
85	Kelurahan Lawanggintung	368 - 369
86	Kelurahan Muarasari	370 - 371
87	Kelurahan Mulyaharja	372 - 373
88	Kelurahan Pakuan	374 - 375
89	Kelurahan Pamoyanan	376 - 377
90	Kelurahan Rancamaya	378 - 379
91	Kelurahan Ranggamekar	380 - 381
92	Kecamatan Bogor Timur	382 - 386
93	Kelurahan Baranangsiang	387 - 388
94	Kelurahan Sukasari	389 - 390
95	Kelurahan Katulampa	391 - 392
96	Kelurahan Tajur	393 - 394
97	Kelurahan Sindangrasa	395 - 396
98	Kelurahan Sindangsari	397 - 398
99	Kecamatan Bogor Barat	399 - 403
100	Kelurahan Balumbangjaya	404 - 405
101	Kelurahan Bubulak	406 - 407
102	Kelurahan Cilendek Barat	408 - 409
103	Kelurahan Cilendek timur	410 - 411
104	Kelurahan Curug	412 - 413
105	Kelurahan Curug Mekar	414 - 415
106	Kelurahan Gunung Batu	416 - 417
107	Kelurahan Loji	418 - 419
108	Kelurahan Margajaya	420 - 421
109	Kelurahan Menteng	422 - 423
110	Kelurahan Pasirjaya	424 - 425
111	Kelurahan Pasirkuda	426 - 427
112	Kelurahan Pasirmulya	428 - 429
113	Kelurahan Semplak	430 - 431
114	Kelurahan Sindangbarang	432 - 433
115	Kelurahan Situgede	434 - 435
116	Kecamatan Bogor Tengah	436 - 440
117	Kelurahan Babakan	441 - 442
118	Kelurahan Cibogor	443 - 444
119	Kelurahan Ciwaringin	445 - 446
120	Kelurahan Gudang	447 - 448
121	Kelurahan Kebon Kelapa	449 - 450
122	Kelurahan Paledang	451 - 452
123	Kelurahan Tegallega	453 - 454
124	Kelurahan Sempur	455 - 456
125	Kelurahan Babakan Pasar	457 - 458
126	Kelurahan Panaragan	459 - 460
127	Kelurahan Pabaton	461 - 462
128	Kecamatan Tanah Sareal	463 - 467
129	Kelurahan Tanah Sareal	468 - 469



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>

No	Uraian	Halaman
130	Kelurahan Kebon Pedes	470 - 471
131	Kelurahan Kedung Badak	472 - 473
132	Kelurahan Kedung Jaya	474 - 475
133	Kelurahan Kedung Waringin	476 - 477
134	Kelurahan Sukadamai	478 - 479
135	Kelurahan Sukaresmi	480 - 481
136	Kelurahan Cibadak	482 - 483
137	Kelurahan Mekarwangi	484 - 485
138	Kelurahan Kencana	486 - 487
139	Kelurahan Kayumanis	488 - 489
140	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	490 - 494
Lampiran I.4	Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024	495 595
Lampiran II	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	
Lampiran III	Laporan Operasional	
Lampiran IV	Laporan Perubahan Ekuitas	
Lampiran V	Neraca	
Lampiran VI	Laporan Arus Kas	
Lampiran VII	Catatan atas Laporan Keuangan	
Lampiran VIII	Daftar rekapitulasi piutang daerah	
Lampiran IX	Daftar rekapitulasi penyisihan piutang Daerah	
Lampiran X	Daftar rekapitulasi dan bergulir dan penyisihan dana bergulir	
Lampiran XI	Daftar penyertaan modal (investasi) daerah	
Lampiran XII	Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah	
Lampiran XIII	Daftar rekapitulasi aset tetap	
Lampiran XIV	Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan	
Lampiran XV	Daftar rekapitulasi aset lainnya	
Lampiran XVI	Daftar dana cadangan daerah	
Lampiran XVII	Daftar kewajiban jangka pendek	
Lampiran XVIII	Daftar kewajiban jangka panjang	
Lampiran XIX	Daftar Sub Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya	
Lampiran XX	Ikhtisar laporan keuangan BUMD / Perusahaan Daerah	
Lampiran XX.1	Ikhtisar laporan keuangan BUMD / Perusahaan Daerah (Neraca)	
Lampiran XX.2	Ikhtisar laporan keuangan BUMD / Perusahaan Daerah (Laporan Laba Rugi)	





PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	384.099.423.205,00	386.607.672.284,24	2.508.249.079,24	100,65
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	381.659.622.704,00	384.026.946.964,24	2.367.324.260,24	100,62
1.02.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	73.870.500.000,00	64.148.730.723,00	(9.721.769.277,00)	86,84
1.02.0.00.0.00.03.0000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	307.789.122.704,00	319.878.216.241,24	12.089.093.537,24	103,93
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	445.002.500,00	452.879.845,00	7.877.345,00	101,77
1.03.0.00.0.00.04.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	445.002.500,00	452.879.845,00	7.877.345,00	101,77
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.994.798.001,00	2.127.845.475,00	133.047.474,00	106,67
1.04.2.11.0.00.05.0000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1.994.798.001,00	2.127.845.475,00	133.047.474,00	106,67
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	31.118.030.404,00	28.967.668.666,00	(2.150.361.738,00)	93,09
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	700.000.000,00	813.828.000,00	113.828.000,00	116,26
2.09.3.27.3.25.12.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	700.000.000,00	813.828.000,00	113.828.000,00	116,26
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	14.814.660.497,00	14.684.064.054,00	(130.596.443,00)	99,12
2.11.1.03.0.00.13.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	14.814.660.497,00	14.684.064.054,00	(130.596.443,00)	99,12
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	4.550.808.000,00	2.808.643.000,00	(1.742.165.000,00)	61,72
2.15.0.00.0.00.16.0000	DINAS PERHUBUNGAN	4.550.808.000,00	2.808.643.000,00	(1.742.165.000,00)	61,72
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	9.802.561.907,00	9.107.831.612,00	(694.730.295,00)	92,91
2.18.0.00.0.00.19.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9.802.561.907,00	9.107.831.612,00	(694.730.295,00)	92,91



Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1.250.000.000,00	1.553.302.000,00	303.302.000,00	124,26
2.19.0.00.0.00.20.0000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.250.000.000,00	1.553.302.000,00	303.302.000,00	124,26
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	45.000.000,00	54.000.000,00	9.000.000,00	120,00
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	45.000.000,00	54.000.000,00	9.000.000,00	120,00
3.26.2.22.0.00.22.0000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	45.000.000,00	54.000.000,00	9.000.000,00	120,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2.777.447.594.465,00	2.754.868.287.605,00	(22.579.306.860,00)	99,19
5.02	KEUANGAN	2.777.447.594.465,00	2.754.868.287.605,00	(22.579.306.860,00)	99,19
5.02.0.00.0.00.26.0000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.784.759.489.327,00	1.766.282.949.235,00	(18.476.540.092,00)	98,96
5.02.0.00.0.00.27.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	992.688.105.138,00	988.585.338.370,00	(4.102.766.768,00)	99,59
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	3.192.710.048.074,00	3.170.497.628.555,24	(22.212.419.518,76)	99,30
5	BELANJA DAERAH				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.072.027.596.770,00	2.020.803.887.182,00	(51.223.709.588,00)	97,53
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	805.097.967.641,00	782.323.664.578,00	(22.774.303.063,00)	97,17
1.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN	805.097.967.641,00	782.323.664.578,00	(22.774.303.063,00)	97,17
	BELANJA OPERASI	646.465.864.001,00	632.394.257.049,00	(14.071.606.952,00)	97,82
	Belanja Pegawai	417.417.805.517,00	411.523.819.786,00	(5.893.985.731,00)	98,59
	Belanja Barang dan Jasa	144.574.032.484,00	137.910.962.933,00	(6.663.069.551,00)	95,39
	Belanja Hibah	79.332.930.000,00	77.943.678.330,00	(1.389.251.670,00)	98,25
	Belanja Bantuan Sosial	5.141.096.000,00	5.015.796.000,00	(125.300.000,00)	97,56
	BELANJA MODAL	158.632.103.640,00	149.929.407.529,00	(8.702.696.111,00)	94,51
	Belanja Modal Tanah	1.470.681.300,00	813.680.000,00	(657.001.300,00)	55,33
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.548.548.628,00	32.832.656.811,00	(715.891.817,00)	97,87
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	112.403.386.965,00	105.326.273.527,00	(7.077.113.438,00)	93,70
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	447.981.358,00	390.614.237,00	(57.367.121,00)	87,19
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.761.505.389,00	10.566.182.954,00	(195.322.435,00)	98,18
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	740.182.691.033,00	727.344.426.548,00	(12.838.264.485,00)	98,27
1.02.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	357.555.195.118,00	333.752.412.788,00	(23.802.782.330,00)	93,34
	BELANJA OPERASI	342.709.092.361,00	322.320.205.714,00	(20.388.886.647,00)	94,05
	Belanja Pegawai	149.207.649.336,00	142.386.298.238,00	(6.821.351.098,00)	95,43
	Belanja Barang dan Jasa	192.305.443.025,00	178.746.028.287,00	(13.559.414.738,00)	92,95
	Belanja Hibah	1.196.000.000,00	1.187.879.189,00	(8.120.811,00)	99,32
	BELANJA MODAL	14.846.102.757,00	11.432.207.074,00	(3.413.895.683,00)	77,00



Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.120.904.757,00	7.475.671.330,00	(2.645.233.427,00)	73,86
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.725.198.000,00	3.956.535.744,00	(768.662.256,00)	83,73
1.02.0.00.0.00.03.0000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	382.627.495.915,00	393.592.013.760,00	10.964.517.845,00	102,87
	BELANJA OPERASI	330.881.827.225,00	348.169.728.786,00	17.287.901.561,00	105,22
	Belanja Pegawai	63.892.333.737,00	58.260.354.926,00	(5.631.978.811,00)	91,19
	Belanja Barang dan Jasa	266.489.493.488,00	288.917.179.193,00	22.427.685.705,00	108,42
	Belanja Bunga	500.000.000,00	992.194.667,00	492.194.667,00	198,44
	BELANJA MODAL	51.745.668.690,00	45.422.284.974,00	(6.323.383.716,00)	87,78
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.745.668.690,00	45.422.284.974,00	(6.323.383.716,00)	87,78
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	NaN
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	247.699.823.411,00	238.521.266.748,00	(9.178.556.663,00)	96,29
1.03.0.00.0.00.04.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	233.502.470.271,00	225.379.025.584,00	(8.123.444.687,00)	96,52
	BELANJA OPERASI	101.176.974.946,00	97.653.721.349,00	(3.523.253.597,00)	96,52
	Belanja Pegawai	20.497.508.896,00	20.071.820.511,00	(425.688.385,00)	97,92
	Belanja Barang dan Jasa	80.679.466.050,00	77.581.900.838,00	(3.097.565.212,00)	96,16
	BELANJA MODAL	132.325.495.325,00	127.725.304.235,00	(4.600.191.090,00)	96,52
	Belanja Modal Tanah	2.834.412.000,00	560.621.000,00	(2.273.791.000,00)	19,78
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.517.720.900,00	15.652.357.325,00	(865.363.575,00)	94,76
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.673.307.448,00	8.550.030.791,00	(123.276.657,00)	98,58
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	104.300.054.977,00	102.962.295.119,00	(1.337.759.858,00)	98,72
2.11.1.03.0.00.13.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	14.197.353.140,00	13.142.241.164,00	(1.055.111.976,00)	92,57
	BELANJA OPERASI	7.114.843.011,00	6.679.690.667,00	(435.152.344,00)	93,88
	Belanja Pegawai	67.950.000,00	67.270.000,00	(680.000,00)	99,00
	Belanja Barang dan Jasa	7.046.893.011,00	6.612.420.667,00	(434.472.344,00)	93,83
	BELANJA MODAL	7.082.510.129,00	6.462.550.497,00	(619.959.632,00)	91,25
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.050.264.000,00	5.956.850.000,00	(93.414.000,00)	98,46
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	617.003.000,00	287.787.221,00	(329.215.779,00)	46,64
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	415.243.129,00	217.913.276,00	(197.329.853,00)	52,48
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	186.113.594.400,00	182.152.709.974,00	(3.960.884.426,00)	97,87
1.04.2.11.0.00.05.0000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	186.113.594.400,00	182.152.709.974,00	(3.960.884.426,00)	97,87
	BELANJA OPERASI	180.097.009.879,00	176.452.659.498,00	(3.644.350.381,00)	97,98
	Belanja Pegawai	15.498.974.317,00	15.083.765.625,00	(415.208.692,00)	97,32
	Belanja Barang dan Jasa	130.773.000.562,00	128.250.458.873,00	(2.522.541.689,00)	98,07



Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	Belanja Bantuan Sosial	33.825.035.000,00	33.118.435.000,00	(706.600.000,00)	97,91
	BELANJA MODAL	6.016.584.521,00	5.700.050.476,00	(316.534.045,00)	94,74
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.885.779.424,00	1.747.500.000,00	(138.279.424,00)	92,67
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	215.883.810,00	214.972.169,00	(911.641,00)	99,58
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.914.921.287,00	3.737.578.307,00	(177.342.980,00)	95,47
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	75.267.343.285,00	73.466.541.403,00	(1.800.801.882,00)	97,61
1.05.0.00.0.00.06.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	9.133.247.387,00	8.518.977.715,00	(614.269.672,00)	93,27
	BELANJA OPERASI	8.554.228.687,00	7.958.691.455,00	(595.537.232,00)	93,04
	Belanja Pegawai	3.808.196.027,00	3.799.820.095,00	(8.375.932,00)	99,78
	Belanja Barang dan Jasa	4.746.032.660,00	4.158.871.360,00	(587.161.300,00)	87,63
	BELANJA MODAL	579.018.700,00	560.286.260,00	(18.732.440,00)	96,76
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	579.018.700,00	560.286.260,00	(18.732.440,00)	96,76
1.05.0.00.0.00.07.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	48.657.113.615,00	48.350.053.690,00	(307.059.925,00)	99,37
	BELANJA OPERASI	48.488.505.515,00	48.223.112.690,00	(265.392.825,00)	99,45
	Belanja Pegawai	36.526.712.116,00	36.514.749.564,00	(11.962.552,00)	99,97
	Belanja Barang dan Jasa	11.961.793.399,00	11.708.363.126,00	(253.430.273,00)	97,88
	BELANJA MODAL	168.608.100,00	126.941.000,00	(41.667.100,00)	75,29
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	168.608.100,00	126.941.000,00	(41.667.100,00)	75,29
1.05.0.00.0.00.08.0000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	17.476.982.283,00	16.597.509.998,00	(879.472.285,00)	94,97
	BELANJA OPERASI	17.205.710.883,00	16.340.309.998,00	(865.400.885,00)	94,97
	Belanja Pegawai	13.194.949.805,00	12.663.890.558,00	(531.059.247,00)	95,98
	Belanja Barang dan Jasa	4.010.761.078,00	3.676.419.440,00	(334.341.638,00)	91,66
	BELANJA MODAL	271.271.400,00	257.200.000,00	(14.071.400,00)	94,81
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	271.271.400,00	257.200.000,00	(14.071.400,00)	94,81
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	17.666.177.000,00	16.995.277.931,00	(670.899.069,00)	96,20
1.06.0.00.0.00.09.0000	DINAS SOSIAL	17.666.177.000,00	16.995.277.931,00	(670.899.069,00)	96,20
	BELANJA OPERASI	17.479.317.800,00	16.812.521.531,00	(666.796.269,00)	96,19
	Belanja Pegawai	9.566.030.617,00	9.498.958.668,00	(67.071.949,00)	99,30
	Belanja Barang dan Jasa	7.683.787.183,00	7.084.062.863,00	(599.724.320,00)	92,19
	Belanja Hibah	229.500.000,00	229.500.000,00	0,00	100,00
	BELANJA MODAL	186.859.200,00	182.756.400,00	(4.102.800,00)	97,80
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	186.859.200,00	182.756.400,00	(4.102.800,00)	97,80
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	482.797.843.160,00	465.703.230.516,00	(17.094.612.644,00)	96,46



Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	18.858.897.124,00	18.407.697.187,00	(451.199.937,00)	97,61
2.07.0.00.0.00.10.0000	DINAS TENAGA KERJA	18.858.897.124,00	18.407.697.187,00	(451.199.937,00)	97,61
	BELANJA OPERASI	18.806.585.126,00	18.355.687.027,00	(450.898.099,00)	97,60
	Belanja Pegawai	8.951.946.399,00	8.818.719.257,00	(133.227.142,00)	98,51
	Belanja Barang dan Jasa	9.854.638.727,00	9.536.967.770,00	(317.670.957,00)	96,78
	BELANJA MODAL	52.311.998,00	52.010.160,00	(301.838,00)	99,42
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.311.998,00	52.010.160,00	(301.838,00)	99,42
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	15.102.343.905,00	14.738.749.941,00	(363.593.964,00)	97,59
2.08.2.13.0.00.11.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	15.102.343.905,00	14.738.749.941,00	(363.593.964,00)	97,59
	BELANJA OPERASI	14.980.204.805,00	14.616.650.441,00	(363.554.364,00)	97,57
	Belanja Pegawai	7.336.360.510,00	7.262.658.599,00	(73.701.911,00)	99,00
	Belanja Barang dan Jasa	7.262.944.295,00	6.973.091.842,00	(289.852.453,00)	96,01
	Belanja Hibah	380.900.000,00	380.900.000,00	0,00	100,00
	BELANJA MODAL	122.139.100,00	122.099.500,00	(39.600,00)	99,97
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	122.139.100,00	122.099.500,00	(39.600,00)	99,97
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	22.794.197.170,00	22.723.309.155,00	(70.888.015,00)	99,69
2.09.3.27.3.25.12.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	22.794.197.170,00	22.723.309.155,00	(70.888.015,00)	99,69
	BELANJA OPERASI	22.779.054.170,00	22.708.316.156,00	(70.738.014,00)	99,69
	Belanja Pegawai	15.186.743.367,00	15.172.530.148,00	(14.213.219,00)	99,91
	Belanja Barang dan Jasa	7.592.310.803,00	7.535.786.008,00	(56.524.795,00)	99,26
	BELANJA MODAL	15.143.000,00	14.992.999,00	(150.001,00)	99,01
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.143.000,00	14.992.999,00	(150.001,00)	99,01
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	75.648.400,00	75.536.708,00	(111.692,00)	99,85
4.01.2.13.2.10.23.0000	SEKRETARIAT DAERAH	75.648.400,00	75.536.708,00	(111.692,00)	99,85
	BELANJA OPERASI	75.648.400,00	75.536.708,00	(111.692,00)	99,85
	Belanja Pegawai	6.440.000,00	6.440.000,00	0,00	100,00
	Belanja Barang dan Jasa	69.208.400,00	69.096.708,00	(111.692,00)	99,84
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	136.334.153.061,00	128.684.117.662,00	(7.650.035.399,00)	94,39
1.04.2.11.0.00.05.0000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	15.024.888.733,00	14.728.328.009,00	(296.560.724,00)	98,03
	BELANJA OPERASI	9.153.348.730,00	9.039.009.679,00	(114.339.051,00)	98,75
	Belanja Pegawai	78.240.000,00	78.240.000,00	0,00	100,00
	Belanja Barang dan Jasa	9.075.108.730,00	8.960.769.679,00	(114.339.051,00)	98,74
	BELANJA MODAL	5.871.540.003,00	5.689.318.330,00	(182.221.673,00)	96,90



Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	Belanja Modal Tanah	1.120.054.000,00	1.103.416.100,00	(16.637.900,00)	98,51
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.211.000,00	12.059.040,00	(151.960,00)	98,76
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.739.275.003,00	4.573.843.190,00	(165.431.813,00)	96,51
2.11.1.03.0.00.13.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	121.309.264.328,00	113.955.789.653,00	(7.353.474.675,00)	93,94
	BELANJA OPERASI	113.807.710.228,00	106.663.092.268,00	(7.144.617.960,00)	93,72
	Belanja Pegawai	35.809.158.051,00	35.216.462.859,00	(592.695.192,00)	98,34
	Belanja Barang dan Jasa	77.998.552.177,00	71.446.629.409,00	(6.551.922.768,00)	91,60
	BELANJA MODAL	7.501.554.100,00	7.292.697.385,00	(208.856.715,00)	97,22
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.446.356.400,00	6.241.655.000,00	(204.701.400,00)	96,82
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	300.156.200,00	298.609.030,00	(1.547.170,00)	99,48
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	755.041.500,00	752.433.355,00	(2.608.145,00)	99,65
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	17.769.959.530,00	17.345.367.181,00	(424.592.349,00)	97,61
2.12.0.00.0.00.14.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	17.769.959.530,00	17.345.367.181,00	(424.592.349,00)	97,61
	BELANJA OPERASI	17.020.702.930,00	16.608.303.981,00	(412.398.949,00)	97,58
	Belanja Pegawai	11.041.161.326,00	10.991.326.702,00	(49.834.624,00)	99,55
	Belanja Barang dan Jasa	5.979.541.604,00	5.616.977.279,00	(362.564.325,00)	93,94
	BELANJA MODAL	749.256.600,00	737.063.200,00	(12.193.400,00)	98,37
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	749.256.600,00	737.063.200,00	(12.193.400,00)	98,37
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	41.797.256.974,00	40.637.588.852,00	(1.159.668.122,00)	97,23
4.01.2.13.2.10.23.0000	SEKRETARIAT DAERAH	220.400.000,00	219.595.907,00	(804.093,00)	99,64
	BELANJA OPERASI	220.400.000,00	219.595.907,00	(804.093,00)	99,64
	Belanja Barang dan Jasa	220.400.000,00	219.595.907,00	(804.093,00)	99,64
7.01.2.13.0.00.31.0000	KECAMATAN BOGOR UTARA	856.502.300,00	848.255.050,00	(8.247.250,00)	99,04
	BELANJA OPERASI	856.502.300,00	848.255.050,00	(8.247.250,00)	99,04
	Belanja Pegawai	235.940.000,00	235.940.000,00	0,00	100,00
	Belanja Barang dan Jasa	620.562.300,00	612.315.050,00	(8.247.250,00)	98,67
7.01.2.13.0.00.32.0000	KECAMATAN BOGOR SELATAN	37.895.634.374,00	36.768.048.435,00	(1.127.585.939,00)	97,02
	BELANJA OPERASI	36.626.590.574,00	35.504.378.435,00	(1.122.212.139,00)	96,94
	Belanja Pegawai	29.971.677.946,00	29.131.055.285,00	(840.622.661,00)	97,20
	Belanja Barang dan Jasa	6.654.912.628,00	6.373.323.150,00	(281.589.478,00)	95,77
	BELANJA MODAL	1.269.043.800,00	1.263.670.000,00	(5.373.800,00)	99,58
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.269.043.800,00	1.263.670.000,00	(5.373.800,00)	99,58
2.13.0.00.33.0000	KECAMATAN BOGOR TIMUR	589.211.900,00	589.211.900,00	0,00	100,00



Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	BELANJA OPERASI	589.211.900,00	589.211.900,00	0,00	100,00
	Belanja Pegawai	153.140.000,00	153.140.000,00	0,00	100,00
	Belanja Barang dan Jasa	436.071.900,00	436.071.900,00	0,00	100,00
7.01.2.13.0.00.34.0000	KECAMATAN BOGOR BARAT	25.749.400,00	25.749.400,00	0,00	100,00
	BELANJA OPERASI	25.749.400,00	25.749.400,00	0,00	100,00
	Belanja Pegawai	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	100,00
	Belanja Barang dan Jasa	22.719.400,00	22.719.400,00	0,00	100,00
7.01.2.13.0.00.35.0000	KECAMATAN BOGOR TENGAH	1.033.248.900,00	1.030.208.500,00	(3.040.400,00)	99,71
	BELANJA OPERASI	1.033.248.900,00	1.030.208.500,00	(3.040.400,00)	99,71
	Belanja Pegawai	212.940.000,00	212.940.000,00	0,00	100,00
	Belanja Barang dan Jasa	820.308.900,00	817.268.500,00	(3.040.400,00)	99,63
7.01.2.13.0.00.36.0000	KECAMATAN TANAH SAREAL	1.176.510.100,00	1.156.519.660,00	(19.990.440,00)	98,30
	BELANJA OPERASI	1.176.510.100,00	1.156.519.660,00	(19.990.440,00)	98,30
	Belanja Pegawai	321.880.000,00	317.970.000,00	(3.910.000,00)	98,79
	Belanja Barang dan Jasa	854.630.100,00	838.549.660,00	(16.080.440,00)	98,12
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	19.524.159.188,00	18.994.459.151,00	(529.700.037,00)	97,29
2.14.0.00.0.00.15.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	19.524.159.188,00	18.994.459.151,00	(529.700.037,00)	97,29
	BELANJA OPERASI	19.463.375.188,00	18.933.839.151,00	(529.536.037,00)	97,28
	Belanja Pegawai	6.547.018.873,00	6.528.028.309,00	(18.990.564,00)	99,71
	Belanja Barang dan Jasa	12.766.356.315,00	12.255.810.842,00	(510.545.473,00)	96,00
	Belanja Hibah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00
	BELANJA MODAL	60.784.000,00	60.620.000,00	(164.000,00)	99,73
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.784.000,00	60.620.000,00	(164.000,00)	99,73
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	115.414.966.020,00	110.276.308.685,00	(5.138.657.335,00)	95,55
2.15.0.00.0.00.16.0000	DINAS PERHUBUNGAN	115.414.966.020,00	110.276.308.685,00	(5.138.657.335,00)	95,55
	BELANJA OPERASI	114.621.571.882,00	109.528.781.945,00	(5.092.789.937,00)	95,56
	Belanja Pegawai	36.907.213.231,00	36.728.058.543,00	(179.154.688,00)	99,51
	Belanja Barang dan Jasa	77.714.358.651,00	72.800.723.402,00	(4.913.635.249,00)	93,68
	BELANJA MODAL	793.394.138,00	747.526.740,00	(45.867.398,00)	94,22
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	249.800.978,00	213.405.714,00	(36.395.264,00)	85,43
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	543.593.160,00	534.121.026,00	(9.472.134,00)	98,26
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	23.772.744.178,00	23.637.513.269,00	(135.230.909,00)	99,43
2.16.2.20.2.21.17.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	23.772.744.178,00	23.637.513.269,00	(135.230.909,00)	99,43



Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	BELANJA OPERASI	23.757.130.478,00	23.621.914.999,00	(135.215.479,00)	99,43
	Belanja Pegawai	12.990.110.892,00	12.978.075.063,00	(12.035.829,00)	99,91
	Belanja Barang dan Jasa	10.767.019.586,00	10.643.839.936,00	(123.179.650,00)	98,86
	BELANJA MODAL	15.613.700,00	15.598.270,00	(15.430,00)	99,90
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.613.700,00	15.598.270,00	(15.430,00)	99,90
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	1.039.296.250,00	1.030.450.860,00	(8.845.390,00)	99,15
2.17.3.30.3.31.18.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	1.039.296.250,00	1.030.450.860,00	(8.845.390,00)	99,15
	BELANJA OPERASI	1.039.296.250,00	1.030.450.860,00	(8.845.390,00)	99,15
	Belanja Pegawai	15.130.000,00	15.130.000,00	0,00	100,00
	Belanja Barang dan Jasa	984.166.250,00	975.320.860,00	(8.845.390,00)	99,10
	Belanja Hibah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	15.381.515.455,00	15.311.845.795,00	(69.669.660,00)	99,55
2.18.0.00.0.00.19.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	15.381.515.455,00	15.311.845.795,00	(69.669.660,00)	99,55
	BELANJA OPERASI	15.249.809.955,00	15.184.345.795,00	(65.464.160,00)	99,57
	Belanja Pegawai	11.109.125.951,00	11.092.593.087,00	(16.532.864,00)	99,85
	Belanja Barang dan Jasa	4.140.684.004,00	4.091.752.708,00	(48.931.296,00)	98,82
	BELANJA MODAL	131.705.500,00	127.500.000,00	(4.205.500,00)	96,81
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	131.705.500,00	127.500.000,00	(4.205.500,00)	96,81
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	30.999.677.845,00	30.433.136.127,00	(566.541.718,00)	98,17
2.19.0.00.0.00.20.0000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	30.999.677.845,00	30.433.136.127,00	(566.541.718,00)	98,17
	BELANJA OPERASI	29.088.878.945,00	28.523.044.827,00	(565.834.118,00)	98,05
	Belanja Pegawai	9.703.890.520,00	9.598.351.556,00	(105.538.964,00)	98,91
	Belanja Barang dan Jasa	8.749.988.425,00	8.289.693.271,00	(460.295.154,00)	94,74
	Belanja Hibah	10.635.000.000,00	10.635.000.000,00	0,00	100,00
	BELANJA MODAL	1.910.798.900,00	1.910.091.300,00	(707.600,00)	99,96
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.298.900,00	69.591.300,00	(707.600,00)	98,99
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.840.500.000,00	1.840.500.000,00	0,00	100,00
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	267.165.500,00	263.967.632,00	(3.197.868,00)	98,80
2.16.2.20.2.21.17.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	267.165.500,00	263.967.632,00	(3.197.868,00)	98,80
	BELANJA OPERASI	267.165.500,00	263.967.632,00	(3.197.868,00)	98,80
	Belanja Pegawai	14.760.000,00	14.760.000,00	0,00	100,00
	Belanja Barang dan Jasa	252.405.500,00	249.207.632,00	(3.197.868,00)	98,73
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	105.655.100,00	105.103.220,00	(551.880,00)	99,48



Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2.16.2.20.2.21.17.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	105.655.100,00	105.103.220,00	(551.880,00)	99,48
	BELANJA OPERASI	105.655.100,00	105.103.220,00	(551.880,00)	99,48
	Belanja Pegawai	11.720.000,00	11.720.000,00	0,00	100,00
	Belanja Barang dan Jasa	93.935.100,00	93.383.220,00	(551.880,00)	99,41
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	12.079.262.631,00	11.770.614.823,00	(308.647.808,00)	97,44
3.26.2.22.0.00.22.0000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	12.079.262.631,00	11.770.614.823,00	(308.647.808,00)	97,44
	BELANJA OPERASI	11.964.835.431,00	11.663.225.823,00	(301.609.608,00)	97,48
	Belanja Pegawai	8.589.647.920,00	8.455.161.827,00	(134.486.093,00)	98,43
	Belanja Barang dan Jasa	3.375.187.511,00	3.208.063.996,00	(167.123.515,00)	95,05
	BELANJA MODAL	114.427.200,00	107.389.000,00	(7.038.200,00)	93,85
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	114.427.200,00	107.389.000,00	(7.038.200,00)	93,85
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	1.063.411.100,00	1.020.541.369,00	(42.869.731,00)	95,97
2.24.2.23.0.00.21.0000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	1.063.411.100,00	1.020.541.369,00	(42.869.731,00)	95,97
	BELANJA OPERASI	874.881.900,00	861.795.569,00	(13.086.331,00)	98,50
	Belanja Pegawai	17.460.000,00	16.460.000,00	(1.000.000,00)	94,27
	Belanja Barang dan Jasa	857.421.900,00	845.335.569,00	(12.086.331,00)	98,59
	BELANJA MODAL	188.529.200,00	158.745.800,00	(29.783.400,00)	84,20
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.809.200,00	61.035.000,00	(774.200,00)	98,75
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	126.720.000,00	97.710.800,00	(29.009.200,00)	77,11
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	10.417.533.729,00	10.246.922.899,00	(170.610.830,00)	98,36
2.24.2.23.0.00.21.0000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	10.417.533.729,00	10.246.922.899,00	(170.610.830,00)	98,36
	BELANJA OPERASI	10.417.533.729,00	10.246.922.899,00	(170.610.830,00)	98,36
	Belanja Pegawai	8.137.685.218,00	8.041.736.837,00	(95.948.381,00)	98,82
	Belanja Barang dan Jasa	2.279.848.511,00	2.205.186.062,00	(74.662.449,00)	96,73
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	32.514.778.174,00	31.724.163.252,00	(790.614.922,00)	97,57
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.384.060.700,00	3.368.756.546,00	(15.304.154,00)	99,55
2.09.3.27.3.25.12.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	3.384.060.700,00	3.368.756.546,00	(15.304.154,00)	99,55
	BELANJA OPERASI	3.384.060.700,00	3.368.756.546,00	(15.304.154,00)	99,55
	Belanja Pegawai	16.710.000,00	16.710.000,00	0,00	100,00
	Belanja Barang dan Jasa	3.367.350.700,00	3.352.046.546,00	(15.304.154,00)	99,55
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	949.364.000,00	928.474.536,00	(20.889.464,00)	97,80
3.26.2.22.0.00.22.0000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	949.364.000,00	928.474.536,00	(20.889.464,00)	97,80
	BELANJA OPERASI	949.364.000,00	928.474.536,00	(20.889.464,00)	97,80



Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	Belanja Pegawai	29.110.000,00	29.110.000,00	0,00	100,00
	Belanja Barang dan Jasa	920.254.000,00	899.364.536,00	(20.889.464,00)	97,73
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	10.285.256.703,00	10.055.301.768,00	(229.954.935,00)	97,76
2.09.3.27.3.25.12.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	10.285.256.703,00	10.055.301.768,00	(229.954.935,00)	97,76
	BELANJA OPERASI	2.637.940.906,00	2.555.542.890,00	(82.398.016,00)	96,88
	Belanja Pegawai	54.240.000,00	51.520.000,00	(2.720.000,00)	94,99
	Belanja Barang dan Jasa	2.583.700.906,00	2.504.022.890,00	(79.678.016,00)	96,92
	BELANJA MODAL	7.647.315.797,00	7.499.758.878,00	(147.556.919,00)	98,07
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	4.750.000,00	(250.000,00)	95,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.367.315.797,00	7.222.717.570,00	(144.598.227,00)	98,04
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	197.935.738,00	(2.064.262,00)	98,97
	Belanja Modal Aset Lainnya	75.000.000,00	74.355.570,00	(644.430,00)	99,14
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	218.425.300,00	211.114.075,00	(7.311.225,00)	96,65
2.17.3.30.3.31.18.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	218.425.300,00	211.114.075,00	(7.311.225,00)	96,65
	BELANJA OPERASI	201.768.100,00	194.715.075,00	(7.053.025,00)	96,50
	Belanja Pegawai	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	100,00
	Belanja Barang dan Jasa	196.718.100,00	189.665.075,00	(7.053.025,00)	96,41
	BELANJA MODAL	16.657.200,00	16.399.000,00	(258.200,00)	98,45
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.657.200,00	16.399.000,00	(258.200,00)	98,45
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	17.677.671.471,00	17.160.516.327,00	(517.155.144,00)	97,07
2.17.3.30.3.31.18.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	17.677.671.471,00	17.160.516.327,00	(517.155.144,00)	97,07
	BELANJA OPERASI	17.677.671.471,00	17.160.516.327,00	(517.155.144,00)	97,07
	Belanja Pegawai	14.314.840.339,00	14.077.036.289,00	(237.804.050,00)	98,34
	Belanja Barang dan Jasa	3.362.831.132,00	3.083.480.038,00	(279.351.094,00)	91,69
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	271.028.330.182,00	254.579.598.530,00	(16.448.731.652,00)	93,93
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	119.553.806.344,00	115.845.745.491,00	(3.708.060.853,00)	96,90
4.01.2.13.2.10.23.0000	SEKRETARIAT DAERAH	119.553.806.344,00	115.845.745.491,00	(3.708.060.853,00)	96,90
	BELANJA OPERASI	116.200.055.844,00	112.591.843.135,00	(3.608.212.709,00)	96,89
	Belanja Pegawai	50.660.255.560,00	49.903.472.944,00	(756.782.616,00)	98,51
	Belanja Barang dan Jasa	42.086.444.674,00	40.241.119.581,00	(1.845.325.093,00)	95,62
	Belanja Hibah	17.638.542.110,00	17.001.462.110,00	(637.080.000,00)	96,39
	Belanja Bantuan Sosial	5.814.813.500,00	5.445.788.500,00	(369.025.000,00)	93,65



Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	BELANJA MODAL	3.353.750.500,00	3.253.902.356,00	(99.848.144,00)	97,02
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.353.750.500,00	3.253.902.356,00	(99.848.144,00)	97,02
4.02	SEKRETARIAT DPRD	151.474.523.838,00	138.733.853.039,00	(12.740.670.799,00)	91,59
4.02.0.00.0.00.24.0000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	151.474.523.838,00	138.733.853.039,00	(12.740.670.799,00)	91,59
	BELANJA OPERASI	149.956.219.638,00	137.228.238.639,00	(12.727.980.999,00)	91,51
	Belanja Pegawai	60.616.212.110,00	59.501.494.349,00	(1.114.717.761,00)	98,16
	Belanja Barang dan Jasa	89.340.007.528,00	77.726.744.290,00	(11.613.263.238,00)	87,00
	BELANJA MODAL	1.518.304.200,00	1.505.614.400,00	(12.689.800,00)	99,16
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.488.844.200,00	1.476.334.400,00	(12.509.800,00)	99,16
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	29.460.000,00	29.280.000,00	(180.000,00)	99,39
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	135.888.516.090,00	126.286.250.436,00	(9.602.265.654,00)	92,93
5.01	PERENCANAAN	21.381.828.735,00	21.116.783.188,00	(265.045.547,00)	98,76
5.01.5.05.0.00.25.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	21.381.828.735,00	21.116.783.188,00	(265.045.547,00)	98,76
	BELANJA OPERASI	21.307.587.535,00	21.042.974.848,00	(264.612.687,00)	98,76
	Belanja Pegawai	14.783.284.492,00	14.773.964.442,00	(9.320.050,00)	99,94
	Belanja Barang dan Jasa	6.524.303.043,00	6.269.010.406,00	(255.292.637,00)	96,09
	BELANJA MODAL	74.241.200,00	73.808.340,00	(432.860,00)	99,42
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.241.200,00	73.808.340,00	(432.860,00)	99,42
5.02	KEUANGAN	89.289.473.134,00	81.646.290.799,00	(7.643.182.335,00)	91,44
5.02.0.00.0.00.26.0000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	41.513.243.298,00	34.948.016.287,00	(6.565.227.011,00)	84,19
	BELANJA OPERASI	30.298.741.029,00	27.915.157.108,00	(2.383.583.921,00)	92,13
	Belanja Pegawai	13.905.766.148,00	13.317.482.934,00	(588.283.214,00)	95,77
	Belanja Barang dan Jasa	9.392.974.881,00	8.562.122.246,00	(830.852.635,00)	91,15
	Belanja Bunga	7.000.000.000,00	6.035.551.928,00	(964.448.072,00)	86,22
	BELANJA MODAL	3.193.800.000,00	3.184.165.294,00	(9.634.706,00)	99,70
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.733.058.000,00	1.730.501.169,00	(2.556.831,00)	99,85
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.460.742.000,00	1.453.664.125,00	(7.077.875,00)	99,52
	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.359.952.269,00	2.187.943.885,00	(4.172.008.384,00)	34,40
	Belanja Tidak Terduga	6.359.952.269,00	2.187.943.885,00	(4.172.008.384,00)	34,40
	BELANJA TRANSFER	1.660.750.000,00	1.660.750.000,00	0,00	100,00
	Belanja Bantuan Keuangan	1.660.750.000,00	1.660.750.000,00	0,00	100,00
5.02.0.00.0.00.27.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	47.776.229.836,00	46.698.274.512,00	(1.077.955.324,00)	97,74
	BELANJA OPERASI	46.956.925.836,00	45.886.949.512,00	(1.069.976.324,00)	97,72



Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	Belanja Pegawai	36.537.410.611,00	35.691.854.742,00	(845.555.869,00)	97,69
	Belanja Barang dan Jasa	10.419.515.225,00	10.195.094.770,00	(224.420.455,00)	97,85
	BELANJA MODAL	819.304.000,00	811.325.000,00	(7.979.000,00)	99,03
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	819.304.000,00	811.325.000,00	(7.979.000,00)	99,03
5.03	KEPEGAWAIAN	21.462.483.633,00	19.976.776.271,00	(1.485.707.362,00)	93,08
5.03.5.04.0.00.28.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	21.462.483.633,00	19.976.776.271,00	(1.485.707.362,00)	93,08
	BELANJA OPERASI	21.083.320.733,00	19.601.276.271,00	(1.482.044.462,00)	92,97
	Belanja Pegawai	15.958.067.715,00	15.755.152.669,00	(202.915.046,00)	98,73
	Belanja Barang dan Jasa	5.125.253.018,00	3.846.123.602,00	(1.279.129.416,00)	75,04
	BELANJA MODAL	379.162.900,00	375.500.000,00	(3.662.900,00)	99,03
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	379.162.900,00	375.500.000,00	(3.662.900,00)	99,03
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.227.220.518,00	2.051.784.288,00	(175.436.230,00)	92,12
5.03.5.04.0.00.28.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.227.220.518,00	2.051.784.288,00	(175.436.230,00)	92,12
	BELANJA OPERASI	2.227.220.518,00	2.051.784.288,00	(175.436.230,00)	92,12
	Belanja Pegawai	22.920.000,00	22.920.000,00	0,00	100,00
	Belanja Barang dan Jasa	2.204.300.518,00	2.028.864.288,00	(175.436.230,00)	92,04
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.527.510.070,00	1.494.615.890,00	(32.894.180,00)	97,85
5.01.5.05.0.00.25.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	1.527.510.070,00	1.494.615.890,00	(32.894.180,00)	97,85
	BELANJA OPERASI	1.527.510.070,00	1.494.615.890,00	(32.894.180,00)	97,85
	Belanja Pegawai	27.070.000,00	24.170.000,00	(2.900.000,00)	89,29
	Belanja Barang dan Jasa	1.500.440.070,00	1.470.445.890,00	(29.994.180,00)	98,00
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	26.684.931.353,00	25.789.260.060,00	(895.671.293,00)	96,64
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	26.684.931.353,00	25.789.260.060,00	(895.671.293,00)	96,64
6.01.0.00.0.00.29.0000	INSPEKTORAT	26.684.931.353,00	25.789.260.060,00	(895.671.293,00)	96,64
	BELANJA OPERASI	25.720.602.853,00	24.872.328.060,00	(848.274.793,00)	96,70
	Belanja Pegawai	21.452.550.464,00	21.421.304.940,00	(31.245.524,00)	99,85
	Belanja Barang dan Jasa	4.268.052.389,00	3.451.023.120,00	(817.029.269,00)	80,86
	BELANJA MODAL	964.328.500,00	916.932.000,00	(47.396.500,00)	95,09
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	964.328.500,00	916.932.000,00	(47.396.500,00)	95,09
7	UNSUR KEWILAYAHAN	176.336.475.190,00	172.204.218.732,00	(4.132.256.458,00)	97,66
7.01	KECAMATAN	176.336.475.190,00	172.204.218.732,00	(4.132.256.458,00)	97,66
7.01.2.13.0.00.31.0000	KECAMATAN BOGOR UTARA	28.291.407.415,00	27.888.533.188,00	(402.874.227,00)	98,58
	BELANJA OPERASI	25.563.656.015,00	25.393.984.972,00	(169.671.043,00)	99,34



Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	Belanja Pegawai	16.902.365.299,00	16.834.083.940,00	(68.281.359,00)	99,60
	Belanja Barang dan Jasa	8.661.290.716,00	8.559.901.032,00	(101.389.684,00)	98,83
	BELANJA MODAL	2.727.751.400,00	2.494.548.216,00	(233.203.184,00)	91,45
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	791.441.500,00	618.875.000,00	(172.566.500,00)	78,20
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	977.432.000,00	925.996.841,00	(51.435.159,00)	94,74
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	958.877.900,00	949.676.375,00	(9.201.525,00)	99,04
7.01.2.13.0.00.32.0000	KECAMATAN BOGOR SELATAN	8.859.536.670,00	8.703.056.440,00	(156.480.230,00)	98,23
	BELANJA OPERASI	8.146.660.770,00	8.017.493.244,00	(129.167.526,00)	98,41
	Belanja Pegawai	173.420.000,00	154.560.000,00	(18.860.000,00)	89,12
	Belanja Barang dan Jasa	7.973.240.770,00	7.862.933.244,00	(110.307.526,00)	98,62
	BELANJA MODAL	712.875.900,00	685.563.196,00	(27.312.704,00)	96,17
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	712.875.900,00	685.563.196,00	(27.312.704,00)	96,17
7.01.2.13.0.00.33.0000	KECAMATAN BOGOR TIMUR	22.740.514.310,00	21.936.300.217,00	(804.214.093,00)	96,46
	BELANJA OPERASI	21.675.561.740,00	20.879.347.291,00	(796.214.449,00)	96,33
	Belanja Pegawai	13.731.523.696,00	13.192.859.144,00	(538.664.552,00)	96,08
	Belanja Barang dan Jasa	7.944.038.044,00	7.686.488.147,00	(257.549.897,00)	96,76
	BELANJA MODAL	1.064.952.570,00	1.056.952.926,00	(7.999.644,00)	99,25
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	846.235.700,00	840.650.000,00	(5.585.700,00)	99,34
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	93.716.870,00	91.982.415,00	(1.734.455,00)	98,15
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	125.000.000,00	124.320.511,00	(679.489,00)	99,46
7.01.2.13.0.00.34.0000	KECAMATAN BOGOR BARAT	44.645.139.114,00	43.828.923.484,00	(816.215.630,00)	98,17
	BELANJA OPERASI	41.888.034.474,00	41.130.803.484,00	(757.230.990,00)	98,19
	Belanja Pegawai	29.567.229.742,00	29.089.888.522,00	(477.341.220,00)	98,39
	Belanja Barang dan Jasa	12.320.804.732,00	12.040.914.962,00	(279.889.770,00)	97,73
	BELANJA MODAL	2.757.104.640,00	2.698.120.000,00	(58.984.640,00)	97,86
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	829.517.100,00	778.922.960,00	(50.594.140,00)	93,90
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	583.957.340,00	582.226.098,00	(1.731.242,00)	99,70
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.343.630.200,00	1.336.970.942,00	(6.659.258,00)	99,50
7.01.2.13.0.00.35.0000	KECAMATAN BOGOR TENGAH	34.056.476.697,00	33.247.903.100,00	(808.573.597,00)	97,63
	BELANJA OPERASI	30.664.531.997,00	30.401.258.609,00	(263.273.388,00)	99,14
	Belanja Pegawai	21.576.745.744,00	21.376.699.148,00	(200.046.596,00)	99,07
	Belanja Barang dan Jasa	9.087.786.253,00	9.024.559.461,00	(63.226.792,00)	99,30
	BELANJA MODAL	3.391.944.700,00	2.846.644.491,00	(545.300.209,00)	83,92
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	812.917.700,00	803.557.900,00	(9.359.800,00)	98,85



Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.579.027.000,00	2.043.086.591,00	(535.940.409,00)	79,22
7.01.2.13.0.00.36.0000	KECAMATAN TANAH SAREAL	37.743.400.984,00	36.599.502.303,00	(1.143.898.681,00)	96,97
	BELANJA OPERASI	31.649.153.545,00	30.968.718.908,00	(680.434.637,00)	97,85
	Belanja Pegawai	21.654.806.229,00	21.292.716.097,00	(362.090.132,00)	98,33
	Belanja Barang dan Jasa	9.994.347.316,00	9.676.002.811,00	(318.344.505,00)	96,81
	BELANJA MODAL	6.094.247.439,00	5.630.783.395,00	(463.464.044,00)	92,40
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.307.922.979,00	1.300.500.000,00	(7.422.979,00)	99,43
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.397.919.070,00	2.956.087.795,00	(441.831.275,00)	87,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.388.405.390,00	1.374.195.600,00	(14.209.790,00)	98,98
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	83.533.651.618,00	81.376.125.425,00	(2.157.526.193,00)	97,42
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	83.533.651.618,00	81.376.125.425,00	(2.157.526.193,00)	97,42
8.01.0.00.0.00.30.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	83.533.651.618,00	81.376.125.425,00	(2.157.526.193,00)	97,42
	BELANJA OPERASI	82.304.225.918,00	80.156.467.427,00	(2.147.758.491,00)	97,39
	Belanja Pegawai	5.861.556.617,00	5.474.638.704,00	(386.917.913,00)	93,40
	Belanja Barang dan Jasa	5.967.790.915,00	5.730.912.965,00	(236.877.950,00)	96,03
	Belanja Hibah	70.474.878.386,00	68.950.915.758,00	(1.523.962.628,00)	97,84
	BELANJA MODAL	1.229.425.700,00	1.219.657.998,00	(9.767.702,00)	99,21
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	920.525.600,00	911.490.959,00	(9.034.641,00)	99,02
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	308.900.100,00	308.167.039,00	(733.061,00)	99,76
	JUMLAH BELANJA DAERAH	3.280.812.122.537,00	3.178.466.734.133,00	(102.345.388.404,00)	96,88
	SURPLUS / (DEFISIT)	(88.102.074.463,00)	(7.969.105.577,76)	80.132.968.885,24	9,05
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	0,00	126.700.000.000,00	126.700.000.000,00	
1.02.0.00.0.00.03.0000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	0,00	126.700.000.000,00	126.700.000.000,00	
5.02	KEUANGAN	98.396.220.459,00	225.089.463.440,14	126.693.242.981,14	228,76
5.02.0.00.0.00.26.0000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	98.396.220.459,00	98.389.463.440,14	(6.757.018,86)	99,99
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	98.396.220.459,00	225.089.463.440,14	126.693.242.981,14	228,76
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	98.396.220.459,00	351.789.463.440,14	253.393.242.981,14	357,52
1.02.0.00.0.00.03.0000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	0,00	126.700.000.000,00	126.700.000.000,00	



Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
5.02	KEUANGAN	108.690.366.455,00	357.274.229.616,14	248.583.863.161,14	328,71
5.02.0.00.0.00.26.0000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	10.294.145.996,00	5.484.766.176,00	(4.809.379.820,00)	53,28
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.294.145.996,00	132.184.766.176,00	121.890.620.180,00	1.284,0
	PEMBIAYAAN NETTO	88.102.074.463,00	92.904.697.264,14	4.802.622.801,14	105,45
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	84.935.591.686,38	84.935.591.686,38	0,00

WALI KOTA BOGOR,





PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.461.100.063.862,00	1.458.619.452.757,24	99,83	1.338.618.268.168,80
4.1.01	Pajak Daerah	984.800.000.000,00	973.768.860.850,00	98,88	897.753.380.910,00
4.1.02	Retribusi Daerah	417.231.785.419,00	417.445.452.990,24	100,05	31.081.390.548,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	34.537.163.762,00	34.287.163.763,00	99,28	33.960.776.435,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	24.531.114.681,00	33.117.975.154,00	135,00	375.822.720.275,80
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.731.609.984.212,00	1.711.878.175.798,00	98,86	1.628.857.302.371,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.380.642.513.566,00	1.369.427.755.442,00	99,19	1.249.655.329.523,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	350.967.470.646,00	342.450.420.356,00	97,57	379.201.972.848,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	3.192.710.048.074,00	3.170.497.628.555,24	99,30	2.967.475.570.539,80
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	2.846.195.789.921,00	2.774.250.053.629,00	97,47	2.508.123.306.971,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.270.881.665.338,00	1.242.957.964.907,00	97,80	1.063.654.426.888,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.342.955.429.587,00	1.304.164.987.240,00	97,11	1.236.457.277.949,00
5.1.03	Belanja Bunga	7.500.000.000,00	7.027.746.595,00	93,70	6.191.682.700,00
5.1.05	Belanja Hibah	180.077.750.496,00	176.519.335.387,00	98,02	147.381.004.434,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	44.780.944.500,00	43.580.019.500,00	97,32	54.438.915.000,00
5.2	BELANJA MODAL	426.595.630.347,00	400.367.986.619,00	93,85	518.164.968.738,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.425.147.300,00	2.477.717.100,00	45,67	1.287.152.960,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	144.788.452.254,00	133.226.642.367,00	92,01	97.928.993.032,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150.827.313.763,00	141.166.601.172,00	93,59	178.951.840.395,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	114.562.031.641,00	112.729.496.656,00	98,40	238.985.747.391,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.917.685.389,00	10.693.173.754,00	97,94	911.157.960,00



Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	75.000.000,00	74.355.570,00	99,14	100.077.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.359.952.269,00	2.187.943.885,00	34,40	1.066.654.400,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.359.952.269,00	2.187.943.885,00	34,40	1.066.654.400,00
5.4	BELANJA TRANSFER	1.660.750.000,00	1.660.750.000,00	100,00	1.660.750.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.660.750.000,00	1.660.750.000,00	100,00	1.660.750.000,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	3.280.812.122.537,00	3.178.466.734.133,00	96,88	3.029.015.680.109,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(88.102.074.463,00)	(7.969.105.577,76)	9,05	(61.540.109.569,20)
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	98.396.220.459,00	225.089.463.440,14	228,76	192.611.572.644,34
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	54.250.445.599,00	54.255.954.664,14	100,01	161.360.978.068,34
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	38.648.742.600,00	38.648.742.600,00	100,00	25.765.828.400,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	126.700.000.000,00	0,00	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.497.032.260,00	5.484.766.176,00	99,78	5.484.766.176,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.294.145.996,00	132.184.766.176,00	1.284,08	76.821.017.476,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	71.336.251.300,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	10.294.145.996,00	132.184.766.176,00	1.284,08	5.484.766.176,00
	PEMBIAYAAN NETTO	88.102.074.463,00	92.904.697.264,14	105,45	115.790.555.168,34
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	84.935.591.686,38	0,00	54.250.445.599,14

WALI KOTA BOGOR,





1.01.0.00.0.00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN

SEMUA SUB UNIT



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Satuan Kerja : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit : - SEMUA SUB UNIT

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	425.907.279.464,00	419.386.523.970,00	(6.520.755.494,00)	98,47	
1.01.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	67.660.000,00	67.570.000,00	(90.000,00)	99,87	
1.01.01.2.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	67.660.000,00	67.570.000,00	(90.000,00)	99,87	
1.01.01.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	67.660.000,00	67.570.000,00	(90.000,00)	99,87	
1.01.01.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.660.000,00	67.570.000,00	(90.000,00)	99,87	
1.01.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	417.248.365.417,00	411.357.999.786,00	(5.890.365.631,00)	98,59	
1.01.01.2.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	417.172.125.517,00	411.294.939.786,00	(5.877.185.731,00)	98,59	
1.01.01.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	417.172.125.517,00	411.294.939.786,00	(5.877.185.731,00)	98,59	
1.01.01.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	417.172.125.517,00	411.294.939.786,00	(5.877.185.731,00)	98,59	
1.01.01.2.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	76.239.900,00	63.060.000,00	(13.179.900,00)	82,71	
1.01.01.2.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	76.239.900,00	63.060.000,00	(13.179.900,00)	82,71	
1.01.01.2.02.0007.5.1.01	Belanja Pegawai	75.240.000,00	62.160.000,00	(13.080.000,00)	82,62	
1.01.01.2.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	999.900,00	900.000,00	(99.900,00)	90,01	
1.01.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	4.531.527.000,00	4.042.805.394,00	(488.721.606,00)	89,22	
1.01.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	162.302.500,00	142.692.000,00	(19.610.500,00)	87,92	
1.01.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	162.302.500,00	142.692.000,00	(19.610.500,00)	87,92	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.302.500,00	142.692.000,00	(19.610.500,00)	87,92	
1.01.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	122.686.100,00	117.356.200,00	(5.329.900,00)	95,66	
1.01.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	122.686.100,00	117.356.200,00	(5.329.900,00)	95,66	
1.01.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.686.100,00	117.356.200,00	(5.329.900,00)	95,66	
1.01.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	216.225.000,00	212.325.000,00	(3.900.000,00)	98,20	
1.01.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	216.225.000,00	212.325.000,00	(3.900.000,00)	98,20	
1.01.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.225.000,00	212.325.000,00	(3.900.000,00)	98,20	
1.01.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	14.841.000,00	14.832.000,00	(9.000,00)	99,94	
1.01.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	14.841.000,00	14.832.000,00	(9.000,00)	99,94	
1.01.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.841.000,00	14.832.000,00	(9.000,00)	99,94	
1.01.01.2.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	1.734.511.400,00	1.412.451.194,00	(322.060.206,00)	81,43	
1.01.01.2.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	1.734.511.400,00	1.412.451.194,00	(322.060.206,00)	81,43	
1.01.01.2.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.734.511.400,00	1.412.451.194,00	(322.060.206,00)	81,43	
1.01.01.2.06.0011	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	2.280.961.000,00	2.143.149.000,00	(137.812.000,00)	93,96	
1.01.01.2.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	2.280.961.000,00	2.143.149.000,00	(137.812.000,00)	93,96	
1.01.01.2.06.0011.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.2.06.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.280.961.000,00	2.143.149.000,00	(137.812.000,00)	93,96	
1.01.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	422.141.300,00	420.208.000,00	(1.933.300,00)	99,54	
1.01.01.2.07.0006	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	422.141.300,00	420.208.000,00	(1.933.300,00)	99,54	
1.01.01.2.07.0006.5.1	BELANJA OPERASI	41.520.000,00	41.520.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.2.07.0006.5.1.01	Belanja Pegawai	26.520.000,00	26.520.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.2.07.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.2.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	380.621.300,00	378.688.000,00	(1.933.300,00)	99,49	
1.01.01.2.07.0006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	380.621.300,00	378.688.000,00	(1.933.300,00)	99,49	
1.01.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.526.560.747,00	2.419.627.603,00	(106.933.144,00)	95,77	
1.01.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	387.660.835,00	351.573.021,00	(36.087.814,00)	90,69	
1.01.01.2.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	387.660.835,00	351.573.021,00	(36.087.814,00)	90,69	
1.01.01.2.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	387.660.835,00	351.573.021,00	(36.087.814,00)	90,69	
1.01.01.2.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.138.899.912,00	2.068.054.582,00	(70.845.330,00)	96,69	
1.01.01.2.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	2.138.899.912,00	2.068.054.582,00	(70.845.330,00)	96,69	
1.01.01.2.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.138.899.912,00	2.068.054.582,00	(70.845.330,00)	96,69	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.111.025.000,00	1.078.313.187,00	(32.711.813,00)	97,06	
1.01.01.2.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	141.900.000,00	138.407.559,00	(3.492.441,00)	97,54	
1.01.01.2.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	141.900.000,00	138.407.559,00	(3.492.441,00)	97,54	
1.01.01.2.09.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.900.000,00	138.407.559,00	(3.492.441,00)	97,54	
1.01.01.2.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	369.125.000,00	343.357.560,00	(25.767.440,00)	93,02	
1.01.01.2.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	369.125.000,00	343.357.560,00	(25.767.440,00)	93,02	
1.01.01.2.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	369.125.000,00	343.357.560,00	(25.767.440,00)	93,02	
1.01.01.2.09.0009	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	600.000.000,00	596.548.068,00	(3.451.932,00)	99,42	
1.01.01.2.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	600.000.000,00	596.548.068,00	(3.451.932,00)	99,42	
1.01.01.2.09.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000,00	596.548.068,00	(3.451.932,00)	99,42	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	379.190.688.177,00	362.937.140.608,00	(16.253.547.569,00)	95,71	
1.01.02.2.01	PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	194.640.884.696,00	186.251.804.950,00	(8.389.079.746,00)	95,69	
1.01.02.2.01.0003	PEMBANGUNAN RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU	600.000.000,00	583.787.181,00	(16.212.819,00)	97,30	
1.01.02.2.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	3.909.900,00	3.909.900,00	0,00	100,00	
1.01.02.2.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.909.900,00	3.909.900,00	0,00	100,00	
1.01.02.2.01.0003.5.2	BELANJA MODAL	596.090.100,00	579.877.281,00	(16.212.819,00)	97,28	
1.01.02.2.01.0003.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	596.090.100,00	579.877.281,00	(16.212.819,00)	97,28	
1.01.02.2.01.0005	PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH	1.000.000.000,00	969.665.320,00	(30.334.680,00)	96,97	
1.01.02.2.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	2.119.800,00	2.119.800,00	0,00	100,00	
1.01.02.2.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.119.800,00	2.119.800,00	0,00	100,00	
1.01.02.2.01.0005.5.2	BELANJA MODAL	997.880.200,00	967.545.520,00	(30.334.680,00)	96,96	
1.01.02.2.01.0005.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	997.880.200,00	967.545.520,00	(30.334.680,00)	96,96	
1.01.02.2.01.0006	PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	5.468.149.500,00	3.643.613.013,00	(1.824.536.487,00)	66,63	
1.01.02.2.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	166.945.300,00	64.739.500,00	(102.205.800,00)	38,78	
1.01.02.2.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.945.300,00	64.739.500,00	(102.205.800,00)	38,78	
1.01.02.2.01.0006.5.2	BELANJA MODAL	5.301.204.200,00	3.578.873.513,00	(1.722.330.687,00)	67,51	
1.01.02.2.01.0006.5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.470.681.300,00	813.680.000,00	(657.001.300,00)	55,33	
1.01.02.2.01.0006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	591.642.320,00	433.028.000,00	(158.614.320,00)	73,19	
1.01.02.2.01.0006.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.238.880.580,00	2.332.165.513,00	(906.715.067,00)	72,01	
1.01.02.2.01.0014	PENGADAAN MEBEL SEKOLAH	5.265.064.000,00	4.899.794.000,00	(365.270.000,00)	93,06	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.02.2.01.0014.5.2	BELANJA MODAL	5.265.064.000,00	4.899.794.000,00	(365.270.000,00)	93,06	
1.01.02.2.01.0014.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.265.064.000,00	4.899.794.000,00	(365.270.000,00)	93,06	
1.01.02.2.01.0019	PEMELIHARAAN RUTIN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	3.010.896.500,00	3.004.173.511,00	(6.722.989,00)	99,78	
1.01.02.2.01.0019.5.1	BELANJA OPERASI	3.010.896.500,00	3.004.173.511,00	(6.722.989,00)	99,78	
1.01.02.2.01.0019.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.010.896.500,00	3.004.173.511,00	(6.722.989,00)	99,78	
1.01.02.2.01.0021	PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR	22.033.820.000,00	21.863.615.812,00	(170.204.188,00)	99,23	
1.01.02.2.01.0021.5.1	BELANJA OPERASI	22.033.820.000,00	21.863.615.812,00	(170.204.188,00)	99,23	
1.01.02.2.01.0021.5.1.05	Belanja Hibah	21.772.320.000,00	21.602.115.812,00	(170.204.188,00)	99,22	
1.01.02.2.01.0021.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	261.500.000,00	261.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.2.01.0025	PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	235.515.700,00	214.982.800,00	(20.532.900,00)	91,28	
1.01.02.2.01.0025.5.1	BELANJA OPERASI	235.515.700,00	214.982.800,00	(20.532.900,00)	91,28	
1.01.02.2.01.0025.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.515.700,00	214.982.800,00	(20.532.900,00)	91,28	
1.01.02.2.01.0026	PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	2.906.411.440,00	2.865.625.734,00	(40.785.706,00)	98,60	
1.01.02.2.01.0026.5.1	BELANJA OPERASI	2.906.411.440,00	2.865.625.734,00	(40.785.706,00)	98,60	
1.01.02.2.01.0026.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.906.411.440,00	2.865.625.734,00	(40.785.706,00)	98,60	
1.01.02.2.01.0027	PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	502.210.800,00	500.487.600,00	(1.723.200,00)	99,66	
1.01.02.2.01.0027.5.1	BELANJA OPERASI	502.210.800,00	500.487.600,00	(1.723.200,00)	99,66	
1.01.02.2.01.0027.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	502.210.800,00	500.487.600,00	(1.723.200,00)	99,66	
1.01.02.2.01.0028	PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH	332.316.600,00	312.788.100,00	(19.528.500,00)	94,12	
1.01.02.2.01.0028.5.1	BELANJA OPERASI	332.316.600,00	312.788.100,00	(19.528.500,00)	94,12	
1.01.02.2.01.0028.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	332.316.600,00	312.788.100,00	(19.528.500,00)	94,12	
1.01.02.2.01.0029	PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR	110.792.964.660,00	107.835.773.465,00	(2.957.191.195,00)	97,33	
1.01.02.2.01.0029.5.1	BELANJA OPERASI	82.265.933.177,00	79.502.672.942,00	(2.763.260.235,00)	96,64	
1.01.02.2.01.0029.5.1.01	Belanja Pegawai	39.840.000,00	39.840.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.2.01.0029.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.226.093.177,00	79.462.832.942,00	(2.763.260.235,00)	96,64	
1.01.02.2.01.0029.5.2	BELANJA MODAL	28.527.031.483,00	28.333.100.523,00	(193.930.960,00)	99,32	
1.01.02.2.01.0029.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.640.938.283,00	19.635.296.669,00	(5.641.614,00)	99,97	
1.01.02.2.01.0029.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.886.093.200,00	8.697.803.854,00	(188.289.346,00)	97,88	
1.01.02.2.01.0030	PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR	818.919.600,00	803.242.000,00	(15.677.600,00)	98,09	
1.01.02.2.01.0030.5.1	BELANJA OPERASI	818.919.600,00	803.242.000,00	(15.677.600,00)	98,09	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.02.2.01.0030.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	818.919.600,00	803.242.000,00	(15.677.600,00)	98,09	
1.01.02.2.01.0047	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU	11.200.000.000,00	10.201.796.707,00	(998.203.293,00)	91,09	
1.01.02.2.01.0047.5.1	BELANJA OPERASI	7.296.000,00	7.296.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.2.01.0047.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.296.000,00	7.296.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.2.01.0047.5.2	BELANJA MODAL	11.192.704.000,00	10.194.500.707,00	(998.203.293,00)	91,08	
1.01.02.2.01.0047.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.192.704.000,00	10.194.500.707,00	(998.203.293,00)	91,08	
1.01.02.2.01.0050	PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK	824.020.600,00	807.238.600,00	(16.782.000,00)	97,96	
1.01.02.2.01.0050.5.1	BELANJA OPERASI	824.020.600,00	807.238.600,00	(16.782.000,00)	97,96	
1.01.02.2.01.0050.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	824.020.600,00	807.238.600,00	(16.782.000,00)	97,96	
1.01.02.2.01.0051	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH	29.650.595.296,00	27.745.221.107,00	(1.905.374.189,00)	93,57	
1.01.02.2.01.0051.5.1	BELANJA OPERASI	30.254.200,00	29.325.400,00	(928.800,00)	96,93	
1.01.02.2.01.0051.5.1.01	Belanja Pegawai	7.480.000,00	7.480.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.2.01.0051.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.774.200,00	21.845.400,00	(928.800,00)	95,92	
1.01.02.2.01.0051.5.2	BELANJA MODAL	29.620.341.096,00	27.715.895.707,00	(1.904.445.389,00)	93,57	
1.01.02.2.01.0051.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.620.341.096,00	27.715.895.707,00	(1.904.445.389,00)	93,57	
1.01.02.2.02	PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	144.639.785.071,00	137.942.875.659,00	(6.696.909.412,00)	95,37	
1.01.02.2.02.0001	PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)	56.623.947.321,00	54.016.495.153,00	(2.607.452.168,00)	95,40	
1.01.02.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	306.764.000,00	298.953.860,00	(7.810.140,00)	97,45	
1.01.02.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	44.640.000,00	40.920.000,00	(3.720.000,00)	91,67	
1.01.02.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.124.000,00	258.033.860,00	(4.090.140,00)	98,44	
1.01.02.2.02.0001.5.2	BELANJA MODAL	56.317.183.321,00	53.717.541.293,00	(2.599.642.028,00)	95,38	
1.01.02.2.02.0001.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56.317.183.321,00	53.717.541.293,00	(2.599.642.028,00)	95,38	
1.01.02.2.02.0014	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH	8.092.682.168,00	7.564.758.197,00	(527.923.971,00)	93,48	
1.01.02.2.02.0014.5.1	BELANJA OPERASI	113.837.500,00	112.655.000,00	(1.182.500,00)	98,96	
1.01.02.2.02.0014.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.837.500,00	12.655.000,00	(1.182.500,00)	91,45	
1.01.02.2.02.0014.5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.2.02.0014.5.2	BELANJA MODAL	7.978.844.668,00	7.452.103.197,00	(526.741.471,00)	93,40	
1.01.02.2.02.0014.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.978.844.668,00	7.452.103.197,00	(526.741.471,00)	93,40	
1.01.02.2.02.0024	REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	1.386.828.800,00	1.384.091.188,00	(2.737.612,00)	99,80	
1.01.02.2.02.0024.5.1	BELANJA OPERASI	9.088.800,00	9.088.800,00	0,00	100,00	
1.01.02.2.02.0024.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.088.800,00	9.088.800,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.02.2.02.0024.5.2	BELANJA MODAL	1.377.740.000,00	1.375.002.388,00	(2.737.612,00)	99,80	
1.01.02.2.02.0024.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.377.740.000,00	1.375.002.388,00	(2.737.612,00)	99,80	
1.01.02.2.02.0025	PENGADAAN MEBEL SEKOLAH	1.004.405.190,00	960.537.500,00	(43.867.690,00)	95,63	
1.01.02.2.02.0025.5.1	BELANJA OPERASI	16.861.500,00	16.307.500,00	(554.000,00)	96,71	
1.01.02.2.02.0025.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.861.500,00	16.307.500,00	(554.000,00)	96,71	
1.01.02.2.02.0025.5.2	BELANJA MODAL	987.543.690,00	944.230.000,00	(43.313.690,00)	95,61	
1.01.02.2.02.0025.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	987.543.690,00	944.230.000,00	(43.313.690,00)	95,61	
1.01.02.2.02.0032	PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	35.544.236.000,00	34.652.101.618,00	(892.134.382,00)	97,49	
1.01.02.2.02.0032.5.1	BELANJA OPERASI	35.544.236.000,00	34.652.101.618,00	(892.134.382,00)	97,49	
1.01.02.2.02.0032.5.1.05	Belanja Hibah	31.815.640.000,00	31.048.805.618,00	(766.834.382,00)	97,59	
1.01.02.2.02.0032.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.728.596.000,00	3.603.296.000,00	(125.300.000,00)	96,64	
1.01.02.2.02.0038	PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	1.357.987.600,00	1.242.283.925,00	(115.703.675,00)	91,48	
1.01.02.2.02.0038.5.1	BELANJA OPERASI	1.357.987.600,00	1.242.283.925,00	(115.703.675,00)	91,48	
1.01.02.2.02.0038.5.1.01	Belanja Pegawai	7.640.000,00	7.640.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.2.02.0038.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.350.347.600,00	1.234.643.925,00	(115.703.675,00)	91,43	
1.01.02.2.02.0039	PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	2.369.588.360,00	2.129.912.518,00	(239.675.842,00)	89,89	
1.01.02.2.02.0039.5.1	BELANJA OPERASI	2.369.588.360,00	2.129.912.518,00	(239.675.842,00)	89,89	
1.01.02.2.02.0039.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.369.588.360,00	2.129.912.518,00	(239.675.842,00)	89,89	
1.01.02.2.02.0040	PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	665.234.800,00	659.274.300,00	(5.960.500,00)	99,10	
1.01.02.2.02.0040.5.1	BELANJA OPERASI	665.234.800,00	659.274.300,00	(5.960.500,00)	99,10	
1.01.02.2.02.0040.5.1.01	Belanja Pegawai	6.440.000,00	6.440.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.2.02.0040.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	658.794.800,00	652.834.300,00	(5.960.500,00)	99,10	
1.01.02.2.02.0041	PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH	530.091.100,00	504.361.000,00	(25.730.100,00)	95,15	
1.01.02.2.02.0041.5.1	BELANJA OPERASI	530.091.100,00	504.361.000,00	(25.730.100,00)	95,15	
1.01.02.2.02.0041.5.1.01	Belanja Pegawai	7.640.000,00	7.640.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.2.02.0041.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	522.451.100,00	496.721.000,00	(25.730.100,00)	95,08	
1.01.02.2.02.0042	PENGLOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	36.064.264.332,00	33.859.835.160,00	(2.204.429.172,00)	93,89	
1.01.02.2.02.0042.5.1	BELANJA OPERASI	28.418.787.508,00	26.240.045.018,00	(2.178.742.490,00)	92,33	
1.01.02.2.02.0042.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.418.787.508,00	26.240.045.018,00	(2.178.742.490,00)	92,33	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.02.2.02.0042.5.2	BELANJA MODAL	7.645.476.824,00	7.619.790.142,00	(25.686.682,00)	99,66	
1.01.02.2.02.0042.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.770.064.635,00	5.751.411.042,00	(18.653.593,00)	99,68	
1.01.02.2.02.0042.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.875.412.189,00	1.868.379.100,00	(7.033.089,00)	99,62	
1.01.02.2.02.0043	PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	456.058.600,00	447.272.100,00	(8.786.500,00)	98,07	
1.01.02.2.02.0043.5.1	BELANJA OPERASI	456.058.600,00	447.272.100,00	(8.786.500,00)	98,07	
1.01.02.2.02.0043.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	456.058.600,00	447.272.100,00	(8.786.500,00)	98,07	
1.01.02.2.02.0058	PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK	544.460.800,00	521.953.000,00	(22.507.800,00)	95,87	
1.01.02.2.02.0058.5.1	BELANJA OPERASI	544.460.800,00	521.953.000,00	(22.507.800,00)	95,87	
1.01.02.2.02.0058.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	544.460.800,00	521.953.000,00	(22.507.800,00)	95,87	
1.01.02.2.03	PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)	17.559.410.552,00	17.224.375.270,00	(335.035.282,00)	98,09	
1.01.02.2.03.0002	PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PAUD	538.543.000,00	485.452.129,00	(53.090.871,00)	90,14	
1.01.02.2.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	324.440.000,00	299.150.000,00	(25.290.000,00)	92,21	
1.01.02.2.03.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.600.000,00	17.800.000,00	(8.800.000,00)	66,92	
1.01.02.2.03.0002.5.1.05	Belanja Hibah	297.840.000,00	281.350.000,00	(16.490.000,00)	94,46	
1.01.02.2.03.0002.5.2	BELANJA MODAL	214.103.000,00	186.302.129,00	(27.800.871,00)	87,02	
1.01.02.2.03.0002.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110.380.000,00	82.800.000,00	(27.580.000,00)	75,01	
1.01.02.2.03.0002.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	103.723.000,00	103.502.129,00	(220.871,00)	99,79	
1.01.02.2.03.0007	PENGADAAN MEBEL PAUD	283.696.500,00	222.703.000,00	(60.993.500,00)	78,50	
1.01.02.2.03.0007.5.1	BELANJA OPERASI	4.822.500,00	4.822.500,00	0,00	100,00	
1.01.02.2.03.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.822.500,00	4.822.500,00	0,00	100,00	
1.01.02.2.03.0007.5.2	BELANJA MODAL	278.874.000,00	217.880.500,00	(60.993.500,00)	78,13	
1.01.02.2.03.0007.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	278.874.000,00	217.880.500,00	(60.993.500,00)	78,13	
1.01.02.2.03.0011	PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK PAUD	9.619.049.552,00	9.432.650.972,00	(186.398.580,00)	98,06	
1.01.02.2.03.0011.5.1	BELANJA OPERASI	9.619.049.552,00	9.432.650.972,00	(186.398.580,00)	98,06	
1.01.02.2.03.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	623.779.552,00	619.786.072,00	(3.993.480,00)	99,36	
1.01.02.2.03.0011.5.1.05	Belanja Hibah	8.995.270.000,00	8.812.864.900,00	(182.405.100,00)	97,97	
1.01.02.2.03.0015	PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PAUD	5.149.440.000,00	5.148.840.000,00	(600.000,00)	99,99	
1.01.02.2.03.0015.5.1	BELANJA OPERASI	5.149.440.000,00	5.148.840.000,00	(600.000,00)	99,99	
1.01.02.2.03.0015.5.1.01	Belanja Pegawai	30.240.000,00	30.240.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.2.03.0015.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.119.200.000,00	5.118.600.000,00	(600.000,00)	99,99	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.02.2.03.0016	PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN PAUD	931.198.000,00	921.608.000,00	(9.590.000,00)	98,97	
1.01.02.2.03.0016.5.1	BELANJA OPERASI	931.198.000,00	921.608.000,00	(9.590.000,00)	98,97	
1.01.02.2.03.0016.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	931.198.000,00	921.608.000,00	(9.590.000,00)	98,97	
1.01.02.2.03.0017	PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN PAUD	265.728.100,00	263.359.600,00	(2.368.500,00)	99,11	
1.01.02.2.03.0017.5.1	BELANJA OPERASI	265.728.100,00	263.359.600,00	(2.368.500,00)	99,11	
1.01.02.2.03.0017.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	265.728.100,00	263.359.600,00	(2.368.500,00)	99,11	
1.01.02.2.03.0018	PENGELOLAAN DANA BOP PAUD	354.050.000,00	347.029.869,00	(7.020.131,00)	98,02	
1.01.02.2.03.0018.5.1	BELANJA OPERASI	235.891.900,00	236.551.769,00	659.869,00	100,28	
1.01.02.2.03.0018.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.891.900,00	236.551.769,00	659.869,00	100,28	
1.01.02.2.03.0018.5.2	BELANJA MODAL	118.158.100,00	110.478.100,00	(7.680.000,00)	93,50	
1.01.02.2.03.0018.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	118.158.100,00	110.478.100,00	(7.680.000,00)	93,50	
1.01.02.2.03.0019	PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOP PAUD	417.705.400,00	402.731.700,00	(14.973.700,00)	96,42	
1.01.02.2.03.0019.5.1	BELANJA OPERASI	417.705.400,00	402.731.700,00	(14.973.700,00)	96,42	
1.01.02.2.03.0019.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	417.705.400,00	402.731.700,00	(14.973.700,00)	96,42	
1.01.02.2.04	PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	22.350.607.858,00	21.518.084.729,00	(832.523.129,00)	96,28	
1.01.02.2.04.0010	PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK NONFORMAL/KESETARAAN	18.138.910.000,00	17.500.702.000,00	(638.208.000,00)	96,48	
1.01.02.2.04.0010.5.1	BELANJA OPERASI	18.138.910.000,00	17.500.702.000,00	(638.208.000,00)	96,48	
1.01.02.2.04.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.226.050.000,00	841.160.000,00	(384.890.000,00)	68,61	
1.01.02.2.04.0010.5.1.05	Belanja Hibah	15.761.860.000,00	15.508.542.000,00	(253.318.000,00)	98,39	
1.01.02.2.04.0010.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.151.000.000,00	1.151.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.2.04.0014	PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	1.053.599.800,00	1.053.299.800,00	(300.000,00)	99,97	
1.01.02.2.04.0014.5.1	BELANJA OPERASI	1.053.599.800,00	1.053.299.800,00	(300.000,00)	99,97	
1.01.02.2.04.0014.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.053.599.800,00	1.053.299.800,00	(300.000,00)	99,97	
1.01.02.2.04.0015	PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	231.873.900,00	231.168.900,00	(705.000,00)	99,70	
1.01.02.2.04.0015.5.1	BELANJA OPERASI	231.873.900,00	231.168.900,00	(705.000,00)	99,70	
1.01.02.2.04.0015.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.873.900,00	231.168.900,00	(705.000,00)	99,70	
1.01.02.2.04.0016	PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN	736.480.800,00	727.294.800,00	(9.186.000,00)	98,75	
1.01.02.2.04.0016.5.1	BELANJA OPERASI	736.480.800,00	727.294.800,00	(9.186.000,00)	98,75	
1.01.02.2.04.0016.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.480.800,00	137.294.800,00	(9.186.000,00)	93,73	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.02.2.04.0016.5.1.05	Belanja Hibah	590.000.000,00	590.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.2.04.0017	PENGELOLAAN DANA BOP SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN	287.580.000,00	287.580.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.2.04.0017.5.1	BELANJA OPERASI	84.800.500,00	84.800.500,00	0,00	100,00	
1.01.02.2.04.0017.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.800.500,00	84.800.500,00	0,00	100,00	
1.01.02.2.04.0017.5.2	BELANJA MODAL	202.779.500,00	202.779.500,00	0,00	100,00	
1.01.02.2.04.0017.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	202.779.500,00	202.779.500,00	0,00	100,00	
1.01.02.2.04.0018	PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOP SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN	92.197.000,00	87.456.400,00	(4.740.600,00)	94,86	
1.01.02.2.04.0018.5.1	BELANJA OPERASI	92.197.000,00	87.456.400,00	(4.740.600,00)	94,86	
1.01.02.2.04.0018.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.197.000,00	87.456.400,00	(4.740.600,00)	94,86	
1.01.02.2.04.0041	REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	653.527.558,00	569.948.237,00	(83.579.321,00)	87,21	
1.01.02.2.04.0041.5.1	BELANJA OPERASI	3.063.400,00	3.063.000,00	(400,00)	99,99	
1.01.02.2.04.0041.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.063.400,00	3.063.000,00	(400,00)	99,99	
1.01.02.2.04.0041.5.2	BELANJA MODAL	650.464.158,00	566.885.237,00	(83.578.921,00)	87,15	
1.01.02.2.04.0041.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	202.482.800,00	176.271.000,00	(26.211.800,00)	87,05	
1.01.02.2.04.0041.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	447.981.358,00	390.614.237,00	(57.367.121,00)	87,19	
1.01.02.2.04.0046	PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK	176.438.800,00	172.494.800,00	(3.944.000,00)	97,76	
1.01.02.2.04.0046.5.1	BELANJA OPERASI	176.438.800,00	172.494.800,00	(3.944.000,00)	97,76	
1.01.02.2.04.0046.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.438.800,00	172.494.800,00	(3.944.000,00)	97,76	
1.01.02.2.04.0050	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH	980.000.000,00	888.139.792,00	(91.860.208,00)	90,63	
1.01.02.2.04.0050.5.2	BELANJA MODAL	980.000.000,00	888.139.792,00	(91.860.208,00)	90,63	
1.01.02.2.04.0050.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	980.000.000,00	888.139.792,00	(91.860.208,00)	90,63	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	805.097.967.641,00	782.323.664.578,00	(22.774.303.063,00)	97,17	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(805.097.967.641,00)	(782.323.664.578,00)	22.774.303.063,00	97,17	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(805.097.967.641,00)	(782.323.664.578,00)	22.774.303.063,00	97,17	





1.02.0.00.0.00.02.0000

DINAS KESEHATAN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Satuan Kerja : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	73.870.500.000,00	0,00	(73.870.500.000,00)	0,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1.02	Retribusi Daerah	73.870.500.000,00	0,00	(73.870.500.000,00)	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	73.870.500.000,00	0,00	(73.870.500.000,00)	0,00	
5	BELANJA DAERAH					
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	117.750.017.055,00	114.735.751.601,00	(3.014.265.454,00)	97,44	
1.02.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	159.268.100,00	159.268.100,00	0,00	100,00	
1.02.01.2.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	104.536.800,00	104.536.800,00	0,00	100,00	
1.02.01.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	104.536.800,00	104.536.800,00	0,00	100,00	
1.02.01.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.536.800,00	104.536.800,00	0,00	100,00	
1.02.01.2.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	54.731.300,00	54.731.300,00	0,00	100,00	
1.02.01.2.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	54.731.300,00	54.731.300,00	0,00	100,00	
1.02.01.2.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.731.300,00	54.731.300,00	0,00	100,00	
1.02.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	106.526.661.356,00	104.844.477.742,00	(1.682.183.614,00)	98,42	
1.02.01.2.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	104.944.091.356,00	103.281.306.553,00	(1.662.784.803,00)	98,42	
1.02.01.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	104.944.091.356,00	103.281.306.553,00	(1.662.784.803,00)	98,42	
1.02.01.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	104.944.091.356,00	103.281.306.553,00	(1.662.784.803,00)	98,42	
1.02.01.2.02.0003	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN RENCANA PENGUNJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	1.518.370.000,00	1.498.971.189,00	(19.398.811,00)	98,72	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.01.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.518.370.000,00	1.498.971.189,00	(19.398.811,00)	98,72	
1.02.01.2.02.0003.5.1.01	Belanja Pegawai	22.920.000,00	22.920.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.450.000,00	288.172.000,00	(11.278.000,00)	96,23	
1.02.01.2.02.0003.5.1.05	Belanja Hibah	1.196.000.000,00	1.187.879.189,00	(8.120.811,00)	99,32	
1.02.01.2.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	64.200.000,00	64.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.2.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	64.200.000,00	64.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.2.02.0007.5.1.01	Belanja Pegawai	64.200.000,00	64.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	3.122.847.745,00	2.827.534.817,00	(295.312.928,00)	90,54	
1.02.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	316.392.500,00	313.529.500,00	(2.863.000,00)	99,10	
1.02.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	316.392.500,00	313.529.500,00	(2.863.000,00)	99,10	
1.02.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.392.500,00	313.529.500,00	(2.863.000,00)	99,10	
1.02.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	326.317.570,00	317.941.100,00	(8.376.470,00)	97,43	
1.02.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	326.317.570,00	317.941.100,00	(8.376.470,00)	97,43	
1.02.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	326.317.570,00	317.941.100,00	(8.376.470,00)	97,43	
1.02.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	288.902.575,00	282.956.200,00	(5.946.375,00)	97,94	
1.02.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	288.902.575,00	282.956.200,00	(5.946.375,00)	97,94	
1.02.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	288.902.575,00	282.956.200,00	(5.946.375,00)	97,94	
1.02.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	1.323.675.100,00	1.276.469.500,00	(47.205.600,00)	96,43	
1.02.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.323.675.100,00	1.276.469.500,00	(47.205.600,00)	96,43	
1.02.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	26.520.000,00	26.520.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.297.155.100,00	1.249.949.500,00	(47.205.600,00)	96,36	
1.02.01.2.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	867.560.000,00	636.638.517,00	(230.921.483,00)	73,38	
1.02.01.2.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	867.560.000,00	636.638.517,00	(230.921.483,00)	73,38	
1.02.01.2.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	867.560.000,00	636.638.517,00	(230.921.483,00)	73,38	
1.02.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.716.396.282,00	3.017.616.500,00	(698.779.782,00)	81,20	
1.02.01.2.07.0005	PENGADAAN MEBEL	578.011.583,00	451.708.000,00	(126.303.583,00)	78,15	
1.02.01.2.07.0005.5.1	BELANJA OPERASI	956.000,00	0,00	(956.000,00)	0,00	
1.02.01.2.07.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	956.000,00	0,00	(956.000,00)	0,00	
1.02.01.2.07.0005.5.2	BELANJA MODAL	577.055.583,00	451.708.000,00	(125.347.583,00)	78,28	
1.02.01.2.07.0005.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	577.055.583,00	451.708.000,00	(125.347.583,00)	78,28	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.01.2.07.0007	PENGADAAN ASET TETAP LAINNYA	2.309.752.900,00	1.743.028.000,00	(566.724.900,00)	75,46	
1.02.01.2.07.0007.5.2	BELANJA MODAL	2.309.752.900,00	1.743.028.000,00	(566.724.900,00)	75,46	
1.02.01.2.07.0007.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.309.752.900,00	1.743.028.000,00	(566.724.900,00)	75,46	
1.02.01.2.07.0011	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	828.631.799,00	822.880.500,00	(5.751.299,00)	99,31	
1.02.01.2.07.0011.5.1	BELANJA OPERASI	513.660.300,00	510.500.000,00	(3.160.300,00)	99,38	
1.02.01.2.07.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	513.660.300,00	510.500.000,00	(3.160.300,00)	99,38	
1.02.01.2.07.0011.5.2	BELANJA MODAL	314.971.499,00	312.380.500,00	(2.590.999,00)	99,18	
1.02.01.2.07.0011.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	314.971.499,00	312.380.500,00	(2.590.999,00)	99,18	
1.02.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.119.690.072,00	2.003.525.757,00	(116.164.315,00)	94,52	
1.02.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	698.200.000,00	648.867.779,00	(49.332.221,00)	92,93	
1.02.01.2.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	698.200.000,00	648.867.779,00	(49.332.221,00)	92,93	
1.02.01.2.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	698.200.000,00	648.867.779,00	(49.332.221,00)	92,93	
1.02.01.2.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.421.490.072,00	1.354.657.978,00	(66.832.094,00)	95,30	
1.02.01.2.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.421.490.072,00	1.354.657.978,00	(66.832.094,00)	95,30	
1.02.01.2.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.421.490.072,00	1.354.657.978,00	(66.832.094,00)	95,30	
1.02.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.105.153.500,00	1.883.328.685,00	(221.824.815,00)	89,46	
1.02.01.2.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	455.100.000,00	366.157.609,00	(88.942.391,00)	80,46	
1.02.01.2.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	455.100.000,00	366.157.609,00	(88.942.391,00)	80,46	
1.02.01.2.09.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	455.100.000,00	366.157.609,00	(88.942.391,00)	80,46	
1.02.01.2.09.0007	PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA	514.203.500,00	405.178.085,00	(109.025.415,00)	78,80	
1.02.01.2.09.0007.5.1	BELANJA OPERASI	514.203.500,00	405.178.085,00	(109.025.415,00)	78,80	
1.02.01.2.09.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	514.203.500,00	405.178.085,00	(109.025.415,00)	78,80	
1.02.01.2.09.0009	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	1.135.850.000,00	1.111.992.991,00	(23.857.009,00)	97,90	
1.02.01.2.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	1.135.850.000,00	1.111.992.991,00	(23.857.009,00)	97,90	
1.02.01.2.09.0009.5.1.01	Belanja Pegawai	22.680.000,00	12.020.000,00	(10.660.000,00)	53,00	
1.02.01.2.09.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.113.170.000,00	1.099.972.991,00	(13.197.009,00)	98,81	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	127.500.395.312,00	120.022.792.906,00	(7.477.602.406,00)	94,14	
1.02.02.2.01	PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.108.157.043,00	19.745.954.814,00	(4.362.202.229,00)	81,91	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.2.01.0002	PEMBANGUNAN PUSKESMAS	4.808.985.800,00	4.113.079.144,00	(695.906.656,00)	85,53	
1.02.02.2.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	183.475.800,00	156.543.400,00	(26.932.400,00)	85,32	
1.02.02.2.01.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	56.760.000,00	46.680.000,00	(10.080.000,00)	82,24	
1.02.02.2.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.715.800,00	109.863.400,00	(16.852.400,00)	86,70	
1.02.02.2.01.0002.5.2	BELANJA MODAL	4.625.510.000,00	3.956.535.744,00	(668.974.256,00)	85,54	
1.02.02.2.01.0002.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.625.510.000,00	3.956.535.744,00	(668.974.256,00)	85,54	
1.02.02.2.01.0007	PENGEMBANGAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	159.446.490,00	59.674.200,00	(99.772.290,00)	37,43	
1.02.02.2.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	59.758.490,00	59.674.200,00	(84.290,00)	99,86	
1.02.02.2.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.758.490,00	59.674.200,00	(84.290,00)	99,86	
1.02.02.2.01.0007.5.2	BELANJA MODAL	99.688.000,00	0,00	(99.688.000,00)	0,00	
1.02.02.2.01.0007.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	99.688.000,00	0,00	(99.688.000,00)	0,00	
1.02.02.2.01.0009	REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PUSKESMAS	1.008.241.200,00	980.959.120,00	(27.282.080,00)	97,29	
1.02.02.2.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	1.008.241.200,00	980.959.120,00	(27.282.080,00)	97,29	
1.02.02.2.01.0009.5.1.01	Belanja Pegawai	17.010.000,00	8.090.000,00	(8.920.000,00)	47,56	
1.02.02.2.01.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	991.231.200,00	972.869.120,00	(18.362.080,00)	98,15	
1.02.02.2.01.0011	REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN RUMAH DINAS TENAGA KESEHATAN	779.654.000,00	748.295.448,00	(31.358.552,00)	95,98	
1.02.02.2.01.0011.5.1	BELANJA OPERASI	779.654.000,00	748.295.448,00	(31.358.552,00)	95,98	
1.02.02.2.01.0011.5.1.01	Belanja Pegawai	17.010.000,00	12.930.000,00	(4.080.000,00)	76,01	
1.02.02.2.01.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	762.644.000,00	735.365.448,00	(27.278.552,00)	96,42	
1.02.02.2.01.0014	PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	3.320.335.173,00	2.836.637.500,00	(483.697.673,00)	85,43	
1.02.02.2.01.0014.5.1	BELANJA OPERASI	31.042.500,00	29.576.000,00	(1.466.500,00)	95,28	
1.02.02.2.01.0014.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.02.2.01.0014.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.042.500,00	29.576.000,00	(1.466.500,00)	95,28	
1.02.02.2.01.0014.5.2	BELANJA MODAL	3.289.292.673,00	2.807.061.500,00	(482.231.173,00)	85,34	
1.02.02.2.01.0014.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.289.292.673,00	2.807.061.500,00	(482.231.173,00)	85,34	
1.02.02.2.01.0015	PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN ALAT KALIBRASI	396.673.900,00	356.210.500,00	(40.463.400,00)	89,80	
1.02.02.2.01.0015.5.1	BELANJA OPERASI	396.673.900,00	356.210.500,00	(40.463.400,00)	89,80	
1.02.02.2.01.0015.5.1.01	Belanja Pegawai	23.970.000,00	5.640.000,00	(18.330.000,00)	23,53	
1.02.02.2.01.0015.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	372.703.900,00	350.570.500,00	(22.133.400,00)	94,06	
1.02.02.2.01.0020	PEMELIHARAAN RUTIN DAN BERKALA ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	61.855.000,00	60.010.000,00	(1.845.000,00)	97,02	
1.02.02.2.01.0020.5.1	BELANJA OPERASI	61.855.000,00	60.010.000,00	(1.845.000,00)	97,02	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.2.01.0020.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.855.000,00	60.010.000,00	(1.845.000,00)	97,02	
1.02.02.2.01.0023	PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI,, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN	13.432.702.280,00	10.477.007.092,00	(2.955.695.188,00)	78,00	
1.02.02.2.01.0023.5.1	BELANJA OPERASI	13.432.702.280,00	10.477.007.092,00	(2.955.695.188,00)	78,00	
1.02.02.2.01.0023.5.1.01	Belanja Pegawai	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.01.0023.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.400.302.280,00	10.444.607.092,00	(2.955.695.188,00)	77,94	
1.02.02.2.01.0024	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR MELALUI PENDEKATAN KELUARGA	27.765.000,00	27.667.800,00	(97.200,00)	99,65	
1.02.02.2.01.0024.5.1	BELANJA OPERASI	27.765.000,00	27.667.800,00	(97.200,00)	99,65	
1.02.02.2.01.0024.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.765.000,00	27.667.800,00	(97.200,00)	99,65	
1.02.02.2.01.0026	DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN, OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN KE FASILITAS KESEHATAN	112.498.200,00	86.414.010,00	(26.084.190,00)	76,81	
1.02.02.2.01.0026.5.1	BELANJA OPERASI	112.498.200,00	86.414.010,00	(26.084.190,00)	76,81	
1.02.02.2.01.0026.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.498.200,00	86.414.010,00	(26.084.190,00)	76,81	
1.02.02.2.02	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	101.582.156.669,00	98.483.197.570,00	(3.098.959.099,00)	96,95	
1.02.02.2.02.0001	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.02.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.02.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.02.2.02.0003	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	183.750.000,00	183.750.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	183.750.000,00	183.750.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.750.000,00	183.750.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0004	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA	6.799.800,00	6.799.800,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	6.799.800,00	6.799.800,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.799.800,00	6.799.800,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0005	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0006	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	71.356.000,00	68.648.500,00	(2.707.500,00)	96,21	
1.02.02.2.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	71.356.000,00	68.648.500,00	(2.707.500,00)	96,21	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.2.02.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.356.000,00	68.648.500,00	(2.707.500,00)	96,21	
1.02.02.2.02.0007	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0008	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0009	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	1.613.467.200,00	1.613.267.100,00	(200.100,00)	99,99	
1.02.02.2.02.0009.5.1	BELANJA OPERASI	1.613.467.200,00	1.613.267.100,00	(200.100,00)	99,99	
1.02.02.2.02.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.613.467.200,00	1.613.267.100,00	(200.100,00)	99,99	
1.02.02.2.02.0010	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	26.280.000,00	24.960.000,00	(1.320.000,00)	94,98	
1.02.02.2.02.0010.5.1	BELANJA OPERASI	26.280.000,00	24.960.000,00	(1.320.000,00)	94,98	
1.02.02.2.02.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.280.000,00	24.960.000,00	(1.320.000,00)	94,98	
1.02.02.2.02.0011	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	1.684.032.136,00	1.659.930.250,00	(24.101.886,00)	98,57	
1.02.02.2.02.0011.5.1	BELANJA OPERASI	1.684.032.136,00	1.659.930.250,00	(24.101.886,00)	98,57	
1.02.02.2.02.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.684.032.136,00	1.659.930.250,00	(24.101.886,00)	98,57	
1.02.02.2.02.0012	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	84.650.000,00	83.050.000,00	(1.600.000,00)	98,11	
1.02.02.2.02.0012.5.1	BELANJA OPERASI	84.650.000,00	83.050.000,00	(1.600.000,00)	98,11	
1.02.02.2.02.0012.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.650.000,00	83.050.000,00	(1.600.000,00)	98,11	
1.02.02.2.02.0014	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK TERDAMPAK KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN/ATAU BERPOTENSI BENCANA	310.800.000,00	310.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0014.5.1	BELANJA OPERASI	310.800.000,00	310.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0014.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	310.800.000,00	310.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0015	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	6.775.932.400,00	6.445.381.400,00	(330.551.000,00)	95,12	
1.02.02.2.02.0015.5.1	BELANJA OPERASI	6.775.932.400,00	6.445.381.400,00	(330.551.000,00)	95,12	
1.02.02.2.02.0015.5.1.01	Belanja Pegawai	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0015.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.775.252.400,00	6.444.701.400,00	(330.551.000,00)	95,12	
1.02.02.2.02.0016	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0016.5.1	BELANJA OPERASI	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0016.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.2.02.0016.5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.02.2.02.0016.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.02.2.02.0017	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	1.115.671.800,00	1.110.190.700,00	(5.481.100,00)	99,51	
1.02.02.2.02.0017.5.1	BELANJA OPERASI	1.115.671.800,00	1.110.190.700,00	(5.481.100,00)	99,51	
1.02.02.2.02.0017.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.115.671.800,00	1.110.190.700,00	(5.481.100,00)	99,51	
1.02.02.2.02.0018	PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN	400.808.700,00	396.867.707,00	(3.940.993,00)	99,02	
1.02.02.2.02.0018.5.1	BELANJA OPERASI	400.808.700,00	396.867.707,00	(3.940.993,00)	99,02	
1.02.02.2.02.0018.5.1.01	Belanja Pegawai	5.070.000,00	5.070.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0018.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	395.738.700,00	391.797.707,00	(3.940.993,00)	99,00	
1.02.02.2.02.0019	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL, AKUPUNTUR, ASUHAN MANDIRI, DAN TRADISIONAL LAINNYA	4.999.900,00	4.956.220,00	(43.680,00)	99,13	
1.02.02.2.02.0019.5.1	BELANJA OPERASI	4.999.900,00	4.956.220,00	(43.680,00)	99,13	
1.02.02.2.02.0019.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.999.900,00	4.956.220,00	(43.680,00)	99,13	
1.02.02.2.02.0020	PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	66.917.000,00	63.466.900,00	(3.450.100,00)	94,84	
1.02.02.2.02.0020.5.1	BELANJA OPERASI	66.917.000,00	63.466.900,00	(3.450.100,00)	94,84	
1.02.02.2.02.0020.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.917.000,00	63.466.900,00	(3.450.100,00)	94,84	
1.02.02.2.02.0021	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK)	11.610.000,00	10.535.000,00	(1.075.000,00)	90,74	
1.02.02.2.02.0021.5.1	BELANJA OPERASI	11.610.000,00	10.535.000,00	(1.075.000,00)	90,74	
1.02.02.2.02.0021.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.610.000,00	10.535.000,00	(1.075.000,00)	90,74	
1.02.02.2.02.0022	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA DAN NAPZA	76.117.800,00	74.555.700,00	(1.562.100,00)	97,95	
1.02.02.2.02.0022.5.1	BELANJA OPERASI	76.117.800,00	74.555.700,00	(1.562.100,00)	97,95	
1.02.02.2.02.0022.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.117.800,00	74.555.700,00	(1.562.100,00)	97,95	
1.02.02.2.02.0025	PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	1.206.967.105,00	1.110.299.925,00	(96.667.180,00)	91,99	
1.02.02.2.02.0025.5.1	BELANJA OPERASI	1.206.967.105,00	1.110.299.925,00	(96.667.180,00)	91,99	
1.02.02.2.02.0025.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.206.967.105,00	1.110.299.925,00	(96.667.180,00)	91,99	
1.02.02.2.02.0026	PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	86.514.920.798,00	83.952.686.490,00	(2.562.234.308,00)	97,04	
1.02.02.2.02.0026.5.1	BELANJA OPERASI	86.514.920.798,00	83.952.686.490,00	(2.562.234.308,00)	97,04	
1.02.02.2.02.0026.5.1.01	Belanja Pegawai	45.320.000,00	45.320.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0026.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.469.600.798,00	83.907.366.490,00	(2.562.234.308,00)	97,04	
1.02.02.2.02.0028	PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN PENYAKIT POTENSIAL KLB KE LABORATORIUM RUJUKAN/NASIONAL	4.680.000,00	4.428.000,00	(252.000,00)	94,62	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.2.02.0028.5.1	BELANJA OPERASI	4.680.000,00	4.428.000,00	(252.000,00)	94,62	
1.02.02.2.02.0028.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.680.000,00	4.428.000,00	(252.000,00)	94,62	
1.02.02.2.02.0029	PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA SEHAT	325.566.000,00	313.546.000,00	(12.020.000,00)	96,31	
1.02.02.2.02.0029.5.1	BELANJA OPERASI	325.566.000,00	313.546.000,00	(12.020.000,00)	96,31	
1.02.02.2.02.0029.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	325.566.000,00	313.546.000,00	(12.020.000,00)	96,31	
1.02.02.2.02.0034	OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	16.305.000,00	16.155.000,00	(150.000,00)	99,08	
1.02.02.2.02.0034.5.1	BELANJA OPERASI	16.305.000,00	16.155.000,00	(150.000,00)	99,08	
1.02.02.2.02.0034.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.305.000,00	16.155.000,00	(150.000,00)	99,08	
1.02.02.2.02.0035	PELAKSANAAN AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA	134.220.000,00	132.990.000,00	(1.230.000,00)	99,08	
1.02.02.2.02.0035.5.1	BELANJA OPERASI	134.220.000,00	132.990.000,00	(1.230.000,00)	99,08	
1.02.02.2.02.0035.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.220.000,00	132.990.000,00	(1.230.000,00)	99,08	
1.02.02.2.02.0037	PELAKSANAAN KEWASPADAAN DINI DAN RESPON WABAH	128.729.700,00	97.675.110,00	(31.054.590,00)	75,88	
1.02.02.2.02.0037.5.1	BELANJA OPERASI	128.729.700,00	97.675.110,00	(31.054.590,00)	75,88	
1.02.02.2.02.0037.5.1.01	Belanja Pegawai	29.160.000,00	29.160.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0037.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.569.700,00	68.515.110,00	(31.054.590,00)	68,81	
1.02.02.2.02.0038	PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM PENANGANAN GAWAT DARURAT TERPADU (SPGDT)	559.270.330,00	543.840.768,00	(15.429.562,00)	97,24	
1.02.02.2.02.0038.5.1	BELANJA OPERASI	559.270.330,00	543.840.768,00	(15.429.562,00)	97,24	
1.02.02.2.02.0038.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	559.270.330,00	543.840.768,00	(15.429.562,00)	97,24	
1.02.02.2.02.0040	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	17.700.000,00	16.000.000,00	(1.700.000,00)	90,40	
1.02.02.2.02.0040.5.1	BELANJA OPERASI	17.700.000,00	16.000.000,00	(1.700.000,00)	90,40	
1.02.02.2.02.0040.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.700.000,00	16.000.000,00	(1.700.000,00)	90,40	
1.02.02.2.02.0041	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	31.900.000,00	31.900.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0041.5.1	BELANJA OPERASI	31.900.000,00	31.900.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0041.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.900.000,00	31.900.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0042	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA	34.358.000,00	32.170.000,00	(2.188.000,00)	93,63	
1.02.02.2.02.0042.5.1	BELANJA OPERASI	34.358.000,00	32.170.000,00	(2.188.000,00)	93,63	
1.02.02.2.02.0042.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.358.000,00	32.170.000,00	(2.188.000,00)	93,63	
1.02.02.2.02.0046	PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	123.747.000,00	123.747.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0046.5.1	BELANJA OPERASI	123.747.000,00	123.747.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0046.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.747.000,00	123.747.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.2.03	PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI	1.658.707.200,00	1.652.374.122,00	(6.333.078,00)	99,62	
1.02.02.2.03.0002	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN	1.658.707.200,00	1.652.374.122,00	(6.333.078,00)	99,62	
1.02.02.2.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.658.707.200,00	1.652.374.122,00	(6.333.078,00)	99,62	
1.02.02.2.03.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	46.800.000,00	45.440.000,00	(1.360.000,00)	97,09	
1.02.02.2.03.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.611.907.200,00	1.606.934.122,00	(4.973.078,00)	99,69	
1.02.02.2.04	PENERBITAN IZIN RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	151.374.400,00	141.266.400,00	(10.108.000,00)	93,32	
1.02.02.2.04.0003	PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN	141.263.000,00	131.155.000,00	(10.108.000,00)	92,84	
1.02.02.2.04.0003.5.1	BELANJA OPERASI	141.263.000,00	131.155.000,00	(10.108.000,00)	92,84	
1.02.02.2.04.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.263.000,00	131.155.000,00	(10.108.000,00)	92,84	
1.02.02.2.04.0004	PENYIAPAN PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	10.111.400,00	10.111.400,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.04.0004.5.1	BELANJA OPERASI	10.111.400,00	10.111.400,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.04.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.111.400,00	10.111.400,00	0,00	100,00	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3.793.080.130,00	3.330.393.110,00	(462.687.020,00)	87,80	
1.02.03.2.01	PEMBERIAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.03.2.01.0002	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN SERTA TINDAK LANJUT PERIZINAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.03.2.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.03.2.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.03.2.02	PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA	2.394.637.740,00	2.304.198.820,00	(90.438.920,00)	96,22	
1.02.03.2.02.0001	PERENCANAAN DAN DISTRIBUSI SERTA PEMERATAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	13.237.200,00	11.622.000,00	(1.615.200,00)	87,80	
1.02.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	13.237.200,00	11.622.000,00	(1.615.200,00)	87,80	
1.02.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.237.200,00	11.622.000,00	(1.615.200,00)	87,80	
1.02.03.2.02.0002	PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SESUAI STANDAR	2.192.993.040,00	2.108.345.320,00	(84.647.720,00)	96,14	
1.02.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	2.192.993.040,00	2.108.345.320,00	(84.647.720,00)	96,14	
1.02.03.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.192.993.040,00	2.108.345.320,00	(84.647.720,00)	96,14	
1.02.03.2.02.0003	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	188.407.500,00	184.231.500,00	(4.176.000,00)	97,78	
1.02.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	188.407.500,00	184.231.500,00	(4.176.000,00)	97,78	
1.02.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.407.500,00	184.231.500,00	(4.176.000,00)	97,78	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.03.2.03	PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.394.842.390,00	1.022.594.290,00	(372.248.100,00)	73,31	
1.02.03.2.03.0001	PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.394.842.390,00	1.022.594.290,00	(372.248.100,00)	73,31	
1.02.03.2.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.394.842.390,00	1.022.594.290,00	(372.248.100,00)	73,31	
1.02.03.2.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.394.842.390,00	1.022.594.290,00	(372.248.100,00)	73,31	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	873.649.100,00	754.631.324,00	(119.017.776,00)	86,38	
1.02.04.2.01	PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)	82.981.600,00	79.381.600,00	(3.600.000,00)	95,66	
1.02.04.2.01.0001	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PERIZINAN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN, DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)	82.981.600,00	79.381.600,00	(3.600.000,00)	95,66	
1.02.04.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	82.981.600,00	79.381.600,00	(3.600.000,00)	95,66	
1.02.04.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.981.600,00	79.381.600,00	(3.600.000,00)	95,66	
1.02.04.2.02	PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI UNTUK SARANA PRODUKSI ALAT KESEHATAN KELAS 1 TERTENTU DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA KELAS 1 TERTENTU PERUSAHAAN RUMAH TANGGA	10.185.200,00	2.849.400,00	(7.335.800,00)	27,98	
1.02.04.2.02.0001	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN SERTIFIKAT PRODUKSI ALAT KESEHATAN KELAS 1 TERTENTU DAN PKRT KELAS 1 TERTENTU PERUSAHAAN RUMAH TANGGA	10.185.200,00	2.849.400,00	(7.335.800,00)	27,98	
1.02.04.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	10.185.200,00	2.849.400,00	(7.335.800,00)	27,98	
1.02.04.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.185.200,00	2.849.400,00	(7.335.800,00)	27,98	
1.02.04.2.03	PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA	437.777.400,00	405.395.400,00	(32.382.000,00)	92,60	
1.02.04.2.03.0001	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA	437.777.400,00	405.395.400,00	(32.382.000,00)	92,60	
1.02.04.2.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	437.777.400,00	405.395.400,00	(32.382.000,00)	92,60	
1.02.04.2.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	437.777.400,00	405.395.400,00	(32.382.000,00)	92,60	
1.02.04.2.04	PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) ANTARA LAIN JASA BOGA, RUMAH MAKAN/RESTORAN DAN DEPOT AIR MINUM (DAM)	82.191.000,00	81.561.000,00	(630.000,00)	99,23	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.04.2.04.0001	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) ANTARA LAIN JASA BOGA, RUMAH MAKAN/RESTORAN DAN DEPOT AIR MINUM (DAM)	82.191.000,00	81.561.000,00	(630.000,00)	99,23	
1.02.04.2.04.0001.5.1	BELANJA OPERASI	82.191.000,00	81.561.000,00	(630.000,00)	99,23	
1.02.04.2.04.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.191.000,00	81.561.000,00	(630.000,00)	99,23	
1.02.04.2.05	PENERBITAN STIKER PEMBINAAN PADA MAKANAN JAJANAN DAN SENTRA MAKANAN JAJANAN	69.999.900,00	56.245.000,00	(13.754.900,00)	80,35	
1.02.04.2.05.0001	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENERBITAN STIKER PEMBINAAN PADA MAKANAN JAJANAN DAN SENTRA MAKANAN JAJANAN	69.999.900,00	56.245.000,00	(13.754.900,00)	80,35	
1.02.04.2.05.0001.5.1	BELANJA OPERASI	69.999.900,00	56.245.000,00	(13.754.900,00)	80,35	
1.02.04.2.05.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.999.900,00	56.245.000,00	(13.754.900,00)	80,35	
1.02.04.2.06	PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUKSI DAN PRODUK MAKANAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA	190.514.000,00	129.198.924,00	(61.315.076,00)	67,82	
1.02.04.2.06.0001	PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUK MAKANAN-MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG BEREDAR DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN	190.514.000,00	129.198.924,00	(61.315.076,00)	67,82	
1.02.04.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	190.514.000,00	129.198.924,00	(61.315.076,00)	67,82	
1.02.04.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.514.000,00	129.198.924,00	(61.315.076,00)	67,82	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	13.843.122.000,00	13.315.368.375,00	(527.753.625,00)	96,19	
1.02.05.2.01	ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	56.968.000,00	56.968.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.01.0001	PENINGKATAN UPAYA PROMOSI KESEHATAN, ADVOKASI, KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	56.968.000,00	56.968.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	56.968.000,00	56.968.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.968.000,00	56.968.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.02	PELAKSANAAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	164.990.000,00	162.199.600,00	(2.790.400,00)	98,31	
1.02.05.2.02.0001	PENYELENGGARAAN PROMOSI KESEHATAN DAN GERAKAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT	164.990.000,00	162.199.600,00	(2.790.400,00)	98,31	
1.02.05.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	164.990.000,00	162.199.600,00	(2.790.400,00)	98,31	
1.02.05.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.300.000,00	160.509.600,00	(2.790.400,00)	98,29	
1.02.05.2.03	PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.621.164.000,00	13.096.200.775,00	(524.963.225,00)	96,15	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.05.2.03.0001	BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	13.621.164.000,00	13.096.200.775,00	(524.963.225,00)	96,15	
1.02.05.2.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	13.621.164.000,00	13.096.200.775,00	(524.963.225,00)	96,15	
1.02.05.2.03.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	33.810.000,00	33.810.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.587.354.000,00	13.062.390.775,00	(524.963.225,00)	96,14	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	263.760.263.597,00	252.158.937.316,00	(11.601.326.281,00)	95,60	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(189.889.763.597,00)	(252.158.937.316,00)	(62.269.173.719,00)	132,79	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(189.889.763.597,00)	(252.158.937.316,00)	(62.269.173.719,00)	132,79	





1.02.0.00.0.00.02.0000

DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS BOGOR SELATAN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Satuan Kerja : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0001 PUSKESMAS BOGOR SELATAN

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	3.210.537.845,00	3.210.537.845,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	3.161.947.874,00	3.161.947.874,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	48.589.971,00	48.589.971,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	0,00	3.210.537.845,00	3.210.537.845,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH					
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.342.781.380,00	3.184.201.340,00	(1.158.580.040,00)	73,32	
1.02.01.2.10	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	4.342.781.380,00	3.184.201.340,00	(1.158.580.040,00)	73,32	
1.02.01.2.10.0001	PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	4.342.781.380,00	3.184.201.340,00	(1.158.580.040,00)	73,32	
1.02.01.2.10.0001.5.1	BELANJA OPERASI	4.043.136.310,00	3.051.314.830,00	(991.821.480,00)	75,47	
1.02.01.2.10.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	2.497.952.416,00	1.903.769.571,00	(594.182.845,00)	76,21	
1.02.01.2.10.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.545.183.894,00	1.147.545.259,00	(397.638.635,00)	74,27	
1.02.01.2.10.0001.5.2	BELANJA MODAL	299.645.070,00	132.886.510,00	(166.758.560,00)	44,35	
1.02.01.2.10.0001.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	299.645.070,00	132.886.510,00	(166.758.560,00)	44,35	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	487.554.520,00	486.154.520,00	(1.400.000,00)	99,71	
1.02.02.2.02	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	487.554.520,00	486.154.520,00	(1.400.000,00)	99,71	
1.02.02.2.02.0001	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0005	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0011	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0011.5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0015	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	102.887.000,00	102.887.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0015.5.1	BELANJA OPERASI	102.887.000,00	102.887.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0015.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.887.000,00	102.887.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0017	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0017.5.1	BELANJA OPERASI	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0017.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0020	PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	11.175.000,00	11.175.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0020.5.1	BELANJA OPERASI	11.175.000,00	11.175.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0020.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.175.000,00	11.175.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0025	PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	47.240.000,00	45.840.000,00	(1.400.000,00)	97,04	
1.02.02.2.02.0025.5.1	BELANJA OPERASI	47.240.000,00	45.840.000,00	(1.400.000,00)	97,04	
1.02.02.2.02.0025.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.240.000,00	45.840.000,00	(1.400.000,00)	97,04	
1.02.02.2.02.0033	OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	173.427.520,00	173.427.520,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0033.5.1	BELANJA OPERASI	173.427.520,00	173.427.520,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0033.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.427.520,00	173.427.520,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0034	OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.2.02.0034.5.1	BELANJA OPERASI	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0034.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0036	INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0036.5.1	BELANJA OPERASI	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0036.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040.5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0041	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0041.5.1	BELANJA OPERASI	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0041.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044.5.1	BELANJA OPERASI	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0046	PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	81.800.000,00	81.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0046.5.1	BELANJA OPERASI	81.800.000,00	81.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0046.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.800.000,00	81.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	17.975.000,00	17.975.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03	PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.975.000,00	17.975.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03.0001	BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	17.975.000,00	17.975.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	17.975.000,00	17.975.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.975.000,00	17.975.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	4.848.310.900,00	3.688.330.860,00	(1.159.980.040,00)	76,07	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.848.310.900,00)	(477.793.015,00)	4.370.517.885,00	9,85	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(4.848.310.900,00)	(477.793.015,00)	4.370.517.885,00	9,85	





1.02.0.00.0.00.02.0000

DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS CIPAKU



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Satuan Kerja : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0002 PUSKESMAS CIPAKU

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	3.760.900.144,00	3.760.900.144,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	3.702.704.768,00	3.702.704.768,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	58.195.376,00	58.195.376,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	0,00	3.760.900.144,00	3.760.900.144,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH					
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.717.365.030,00	3.631.987.531,00	(85.377.499,00)	97,70	
1.02.01.2.10	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	3.717.365.030,00	3.631.987.531,00	(85.377.499,00)	97,70	
1.02.01.2.10.0001	PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	3.717.365.030,00	3.631.987.531,00	(85.377.499,00)	97,70	
1.02.01.2.10.0001.5.1	BELANJA OPERASI	3.492.014.530,00	3.454.417.131,00	(37.597.399,00)	98,92	
1.02.01.2.10.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	2.264.720.002,00	2.232.956.022,00	(31.763.980,00)	98,60	
1.02.01.2.10.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.227.294.528,00	1.221.461.109,00	(5.833.419,00)	99,52	
1.02.01.2.10.0001.5.2	BELANJA MODAL	225.350.500,00	177.570.400,00	(47.780.100,00)	78,80	
1.02.01.2.10.0001.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	225.350.500,00	177.570.400,00	(47.780.100,00)	78,80	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.059.104.520,00	989.163.000,00	(69.941.520,00)	93,40	
1.02.02.2.02	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.059.104.520,00	989.163.000,00	(69.941.520,00)	93,40	
1.02.02.2.02.0001	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	21.450.000,00	21.450.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	21.450.000,00	21.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.450.000,00	21.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0005	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	16.550.000,00	16.550.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	16.550.000,00	16.550.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.550.000,00	16.550.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0011	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0011.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0015	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	405.431.000,00	339.823.000,00	(65.608.000,00)	83,82	
1.02.02.2.02.0015.5.1	BELANJA OPERASI	405.431.000,00	339.823.000,00	(65.608.000,00)	83,82	
1.02.02.2.02.0015.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	405.431.000,00	339.823.000,00	(65.608.000,00)	83,82	
1.02.02.2.02.0017	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	22.950.000,00	22.950.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0017.5.1	BELANJA OPERASI	22.950.000,00	22.950.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0017.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.950.000,00	22.950.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0020	PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	14.875.000,00	14.875.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0020.5.1	BELANJA OPERASI	14.875.000,00	14.875.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0020.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.875.000,00	14.875.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0025	PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	80.190.000,00	76.090.000,00	(4.100.000,00)	94,89	
1.02.02.2.02.0025.5.1	BELANJA OPERASI	80.190.000,00	76.090.000,00	(4.100.000,00)	94,89	
1.02.02.2.02.0025.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.190.000,00	76.090.000,00	(4.100.000,00)	94,89	
1.02.02.2.02.0033	OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	279.333.520,00	279.100.000,00	(233.520,00)	99,92	
1.02.02.2.02.0033.5.1	BELANJA OPERASI	279.333.520,00	279.100.000,00	(233.520,00)	99,92	
1.02.02.2.02.0033.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	279.333.520,00	279.100.000,00	(233.520,00)	99,92	
1.02.02.2.02.0034	OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.2.02.0034.5.1	BELANJA OPERASI	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0034.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0036	INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0036.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0036.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0041	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0041.5.1	BELANJA OPERASI	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0041.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044.5.1	BELANJA OPERASI	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0046	PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	188.900.000,00	188.900.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0046.5.1	BELANJA OPERASI	188.900.000,00	188.900.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0046.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.900.000,00	188.900.000,00	0,00	100,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	38.075.000,00	38.075.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03	PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.075.000,00	38.075.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03.0001	BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	38.075.000,00	38.075.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	38.075.000,00	38.075.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.075.000,00	38.075.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	4.814.544.550,00	4.659.225.531,00	(155.319.019,00)	96,77	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.814.544.550,00)	(898.325.387,00)	3.916.219.163,00	18,66	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(4.814.544.550,00)	(898.325.387,00)	3.916.219.163,00	18,66	





1.02.0.00.0.00.02.0000

**DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BONDONGAN**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Satuan Kerja : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0003 PUSKESMAS BONDONGAN

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	2.451.966.867,00	2.451.966.867,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	2.442.173.445,00	2.442.173.445,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	9.793.422,00	9.793.422,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	0,00	2.451.966.867,00	2.451.966.867,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH					
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.280.995.679,00	2.466.262.270,00	(814.733.409,00)	75,17	
1.02.01.2.10	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	3.280.995.679,00	2.466.262.270,00	(814.733.409,00)	75,17	
1.02.01.2.10.0001	PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	3.280.995.679,00	2.466.262.270,00	(814.733.409,00)	75,17	
1.02.01.2.10.0001.5.1	BELANJA OPERASI	3.239.053.111,00	2.464.197.670,00	(774.855.441,00)	76,08	
1.02.01.2.10.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	1.776.207.299,00	1.523.627.213,00	(252.580.086,00)	85,78	
1.02.01.2.10.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.462.845.812,00	940.570.457,00	(522.275.355,00)	64,30	
1.02.01.2.10.0001.5.2	BELANJA MODAL	41.942.568,00	2.064.600,00	(39.877.968,00)	4,92	
1.02.01.2.10.0001.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.942.568,00	2.064.600,00	(39.877.968,00)	4,92	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	694.748.520,00	674.162.500,00	(20.586.020,00)	97,04	
1.02.02.2.02	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	694.748.520,00	674.162.500,00	(20.586.020,00)	97,04	
1.02.02.2.02.0001	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0005	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	30.000.000,00	28.050.000,00	(1.950.000,00)	93,50	
1.02.02.2.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	28.050.000,00	(1.950.000,00)	93,50	
1.02.02.2.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	28.050.000,00	(1.950.000,00)	93,50	
1.02.02.2.02.0011	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0011.5.1	BELANJA OPERASI	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0015	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	151.715.000,00	147.492.500,00	(4.222.500,00)	97,22	
1.02.02.2.02.0015.5.1	BELANJA OPERASI	151.715.000,00	147.492.500,00	(4.222.500,00)	97,22	
1.02.02.2.02.0015.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.715.000,00	147.492.500,00	(4.222.500,00)	97,22	
1.02.02.2.02.0017	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	17.450.000,00	17.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0017.5.1	BELANJA OPERASI	17.450.000,00	17.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0017.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.450.000,00	17.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0020	PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	15.975.000,00	15.775.000,00	(200.000,00)	98,75	
1.02.02.2.02.0020.5.1	BELANJA OPERASI	15.975.000,00	15.775.000,00	(200.000,00)	98,75	
1.02.02.2.02.0020.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.975.000,00	15.775.000,00	(200.000,00)	98,75	
1.02.02.2.02.0025	PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	67.490.000,00	65.040.000,00	(2.450.000,00)	96,37	
1.02.02.2.02.0025.5.1	BELANJA OPERASI	67.490.000,00	65.040.000,00	(2.450.000,00)	96,37	
1.02.02.2.02.0025.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.490.000,00	65.040.000,00	(2.450.000,00)	96,37	
1.02.02.2.02.0033	OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	207.043.520,00	196.905.000,00	(10.138.520,00)	95,10	
1.02.02.2.02.0033.5.1	BELANJA OPERASI	207.043.520,00	196.905.000,00	(10.138.520,00)	95,10	
1.02.02.2.02.0033.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.043.520,00	196.905.000,00	(10.138.520,00)	95,10	
1.02.02.2.02.0034	OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.2.02.0034.5.1	BELANJA OPERASI	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0034.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0036	INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	1.500.000,00	400.000,00	(1.100.000,00)	26,67	
1.02.02.2.02.0036.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	400.000,00	(1.100.000,00)	26,67	
1.02.02.2.02.0036.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	400.000,00	(1.100.000,00)	26,67	
1.02.02.2.02.0040	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040.5.1	BELANJA OPERASI	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0041	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0041.5.1	BELANJA OPERASI	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0041.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	3.300.000,00	2.775.000,00	(525.000,00)	84,09	
1.02.02.2.02.0044.5.1	BELANJA OPERASI	3.300.000,00	2.775.000,00	(525.000,00)	84,09	
1.02.02.2.02.0044.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	2.775.000,00	(525.000,00)	84,09	
1.02.02.2.02.0046	PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	157.100.000,00	157.100.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0046.5.1	BELANJA OPERASI	157.100.000,00	157.100.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0046.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.100.000,00	157.100.000,00	0,00	100,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	24.450.000,00	24.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03	PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.450.000,00	24.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03.0001	BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	24.450.000,00	24.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	24.450.000,00	24.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.450.000,00	24.450.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	4.000.194.199,00	3.164.874.770,00	(835.319.429,00)	79,12	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.000.194.199,00)	(712.907.903,00)	3.287.286.296,00	17,82	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(4.000.194.199,00)	(712.907.903,00)	3.287.286.296,00	17,82	





1.02.0.00.0.00.02.0000

DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS LAWANG GINTUNG



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Satuan Kerja : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0004 PUSKESMAS LAWANG GINTUNG

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	1.782.391.460,00	1.782.391.460,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	1.772.437.527,00	1.772.437.527,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	9.953.933,00	9.953.933,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	0,00	1.782.391.460,00	1.782.391.460,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH					
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.126.012.053,00	1.839.484.648,00	(286.527.405,00)	86,52	
1.02.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	55.826.456,00	55.707.059,00	(119.397,00)	99,79	
1.02.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.888.900,00	2.886.222,00	(2.678,00)	99,91	
1.02.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	2.888.900,00	2.886.222,00	(2.678,00)	99,91	
1.02.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.888.900,00	2.886.222,00	(2.678,00)	99,91	
1.02.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	43.969.756,00	43.939.838,00	(29.918,00)	99,93	
1.02.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	43.969.756,00	43.939.838,00	(29.918,00)	99,93	
1.02.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.969.756,00	43.939.838,00	(29.918,00)	99,93	
1.02.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	8.967.800,00	8.880.999,00	(86.801,00)	99,03	
1.02.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	8.967.800,00	8.880.999,00	(86.801,00)	99,03	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.967.800,00	8.880.999,00	(86.801,00)	99,03	
1.02.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	13.312.800,00	13.312.800,00	0,00	100,00	
1.02.01.2.07.0007	PENGADAAN ASET TETAP LAINNYA	13.312.800,00	13.312.800,00	0,00	100,00	
1.02.01.2.07.0007.5.2	BELANJA MODAL	13.312.800,00	13.312.800,00	0,00	100,00	
1.02.01.2.07.0007.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.312.800,00	13.312.800,00	0,00	100,00	
1.02.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	16.467.200,00	14.436.643,00	(2.030.557,00)	87,67	
1.02.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	16.467.200,00	14.436.643,00	(2.030.557,00)	87,67	
1.02.01.2.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	16.467.200,00	14.436.643,00	(2.030.557,00)	87,67	
1.02.01.2.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.467.200,00	14.436.643,00	(2.030.557,00)	87,67	
1.02.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.760.000,00	8.651.775,00	(108.225,00)	98,76	
1.02.01.2.09.0007	PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA	8.760.000,00	8.651.775,00	(108.225,00)	98,76	
1.02.01.2.09.0007.5.1	BELANJA OPERASI	8.760.000,00	8.651.775,00	(108.225,00)	98,76	
1.02.01.2.09.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.760.000,00	8.651.775,00	(108.225,00)	98,76	
1.02.01.2.10	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	2.031.645.597,00	1.747.376.371,00	(284.269.226,00)	86,01	
1.02.01.2.10.0001	PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	2.031.645.597,00	1.747.376.371,00	(284.269.226,00)	86,01	
1.02.01.2.10.0001.5.1	BELANJA OPERASI	2.004.094.197,00	1.719.826.427,00	(284.267.770,00)	85,82	
1.02.01.2.10.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	1.564.740.637,00	1.283.509.764,00	(281.230.873,00)	82,03	
1.02.01.2.10.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	439.353.560,00	436.316.663,00	(3.036.897,00)	99,31	
1.02.01.2.10.0001.5.2	BELANJA MODAL	27.551.400,00	27.549.944,00	(1.456,00)	99,99	
1.02.01.2.10.0001.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.551.400,00	27.549.944,00	(1.456,00)	99,99	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	742.335.064,00	705.395.054,00	(36.940.010,00)	95,02	
1.02.02.2.01	PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	55.633.544,00	55.630.746,00	(2.798,00)	99,99	
1.02.02.2.01.0023	PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI,, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN	55.633.544,00	55.630.746,00	(2.798,00)	99,99	
1.02.02.2.01.0023.5.1	BELANJA OPERASI	55.633.544,00	55.630.746,00	(2.798,00)	99,99	
1.02.02.2.01.0023.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.633.544,00	55.630.746,00	(2.798,00)	99,99	
1.02.02.2.02	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	686.701.520,00	649.764.308,00	(36.937.212,00)	94,62	
1.02.02.2.02.0001	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.2.02.0002	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0005	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	22.150.000,00	22.100.000,00	(50.000,00)	99,77	
1.02.02.2.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	22.150.000,00	22.100.000,00	(50.000,00)	99,77	
1.02.02.2.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.150.000,00	22.100.000,00	(50.000,00)	99,77	
1.02.02.2.02.0011	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0011.5.1	BELANJA OPERASI	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFeksi HIV	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0015	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	127.799.000,00	127.691.500,00	(107.500,00)	99,92	
1.02.02.2.02.0015.5.1	BELANJA OPERASI	127.799.000,00	127.691.500,00	(107.500,00)	99,92	
1.02.02.2.02.0015.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.799.000,00	127.691.500,00	(107.500,00)	99,92	
1.02.02.2.02.0017	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	20.200.000,00	19.800.000,00	(400.000,00)	98,02	
1.02.02.2.02.0017.5.1	BELANJA OPERASI	20.200.000,00	19.800.000,00	(400.000,00)	98,02	
1.02.02.2.02.0017.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.200.000,00	19.800.000,00	(400.000,00)	98,02	
1.02.02.2.02.0020	PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	13.475.000,00	11.475.000,00	(2.000.000,00)	85,16	
1.02.02.2.02.0020.5.1	BELANJA OPERASI	13.475.000,00	11.475.000,00	(2.000.000,00)	85,16	
1.02.02.2.02.0020.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.475.000,00	11.475.000,00	(2.000.000,00)	85,16	
1.02.02.2.02.0025	PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	67.640.000,00	64.990.000,00	(2.650.000,00)	96,08	
1.02.02.2.02.0025.5.1	BELANJA OPERASI	67.640.000,00	64.990.000,00	(2.650.000,00)	96,08	
1.02.02.2.02.0025.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.640.000,00	64.990.000,00	(2.650.000,00)	96,08	
1.02.02.2.02.0033	OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	240.562.520,00	210.492.808,00	(30.069.712,00)	87,50	
1.02.02.2.02.0033.5.1	BELANJA OPERASI	240.562.520,00	210.492.808,00	(30.069.712,00)	87,50	
1.02.02.2.02.0033.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.562.520,00	210.492.808,00	(30.069.712,00)	87,50	
1.02.02.2.02.0034	OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	4.425.000,00	2.965.000,00	(1.460.000,00)	67,01	
1.02.02.2.02.0034.5.1	BELANJA OPERASI	4.425.000,00	2.965.000,00	(1.460.000,00)	67,01	
1.02.02.2.02.0034.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.425.000,00	2.965.000,00	(1.460.000,00)	67,01	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.2.02.0036	INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0036.5.1	BELANJA OPERASI	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0036.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	7.200.000,00	7.000.000,00	(200.000,00)	97,22	
1.02.02.2.02.0040.5.1	BELANJA OPERASI	7.200.000,00	7.000.000,00	(200.000,00)	97,22	
1.02.02.2.02.0040.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.000.000,00	(200.000,00)	97,22	
1.02.02.2.02.0041	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0041.5.1	BELANJA OPERASI	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0041.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044.5.1	BELANJA OPERASI	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0046	PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	131.300.000,00	131.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0046.5.1	BELANJA OPERASI	131.300.000,00	131.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0046.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.300.000,00	131.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	31.375.000,00	29.775.000,00	(1.600.000,00)	94,90	
1.02.05.2.03	PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.375.000,00	29.775.000,00	(1.600.000,00)	94,90	
1.02.05.2.03.0001	BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	31.375.000,00	29.775.000,00	(1.600.000,00)	94,90	
1.02.05.2.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	31.375.000,00	29.775.000,00	(1.600.000,00)	94,90	
1.02.05.2.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.375.000,00	29.775.000,00	(1.600.000,00)	94,90	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2.899.722.117,00	2.574.654.702,00	(325.067.415,00)	88,79	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.899.722.117,00)	(792.263.242,00)	2.107.458.875,00	27,32	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(2.899.722.117,00)	(792.263.242,00)	2.107.458.875,00	27,32	





1.02.0.00.0.00.02.0000

DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS BOGOR TIMUR



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Satuan Kerja : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0005 PUSKESMAS BOGOR TIMUR

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	4.096.780.655,00	4.096.780.655,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	4.008.086.693,00	4.008.086.693,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	88.693.962,00	88.693.962,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	0,00	4.096.780.655,00	4.096.780.655,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH					
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.946.099.976,00	4.136.192.412,00	(809.907.564,00)	83,63	
1.02.01.2.10	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	4.946.099.976,00	4.136.192.412,00	(809.907.564,00)	83,63	
1.02.01.2.10.0001	PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	4.946.099.976,00	4.136.192.412,00	(809.907.564,00)	83,63	
1.02.01.2.10.0001.5.1	BELANJA OPERASI	4.646.862.096,00	3.906.605.508,00	(740.256.588,00)	84,07	
1.02.01.2.10.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	2.560.755.664,00	2.184.183.543,00	(376.572.121,00)	85,29	
1.02.01.2.10.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.086.106.432,00	1.722.421.965,00	(363.684.467,00)	82,57	
1.02.01.2.10.0001.5.2	BELANJA MODAL	299.237.880,00	229.586.904,00	(69.650.976,00)	76,72	
1.02.01.2.10.0001.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	299.237.880,00	229.586.904,00	(69.650.976,00)	76,72	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	669.012.520,00	661.362.500,00	(7.650.020,00)	98,86	
1.02.02.2.02	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	669.012.520,00	661.362.500,00	(7.650.020,00)	98,86	
1.02.02.2.02.0001	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	25.350.000,00	25.350.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	25.350.000,00	25.350.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.350.000,00	25.350.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0005	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	43.900.000,00	43.900.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	43.900.000,00	43.900.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.900.000,00	43.900.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0011	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0011.5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0015	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	179.399.000,00	172.049.000,00	(7.350.000,00)	95,90	
1.02.02.2.02.0015.5.1	BELANJA OPERASI	179.399.000,00	172.049.000,00	(7.350.000,00)	95,90	
1.02.02.2.02.0015.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.399.000,00	172.049.000,00	(7.350.000,00)	95,90	
1.02.02.2.02.0017	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0017.5.1	BELANJA OPERASI	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0017.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0020	PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	11.175.000,00	11.175.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0020.5.1	BELANJA OPERASI	11.175.000,00	11.175.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0020.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.175.000,00	11.175.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0025	PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	58.390.000,00	58.390.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0025.5.1	BELANJA OPERASI	58.390.000,00	58.390.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0025.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.390.000,00	58.390.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0033	OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	174.673.520,00	174.373.500,00	(300.020,00)	99,83	
1.02.02.2.02.0033.5.1	BELANJA OPERASI	174.673.520,00	174.373.500,00	(300.020,00)	99,83	
1.02.02.2.02.0033.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.673.520,00	174.373.500,00	(300.020,00)	99,83	
1.02.02.2.02.0034	OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.2.02.0034.5.1	BELANJA OPERASI	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0034.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0036	INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0036.5.1	BELANJA OPERASI	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0036.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040.5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0041	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0041.5.1	BELANJA OPERASI	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0041.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044.5.1	BELANJA OPERASI	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0046	PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	136.400.000,00	136.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0046.5.1	BELANJA OPERASI	136.400.000,00	136.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0046.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.400.000,00	136.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	17.975.000,00	17.975.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03	PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.975.000,00	17.975.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03.0001	BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	17.975.000,00	17.975.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	17.975.000,00	17.975.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.975.000,00	17.975.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	5.633.087.496,00	4.815.529.912,00	(817.557.584,00)	85,49	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.633.087.496,00)	(718.749.257,00)	4.914.338.239,00	12,76	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(5.633.087.496,00)	(718.749.257,00)	4.914.338.239,00	12,76	





1.02.0.00.0.00.02.0000

**DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PULO ARMYN**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Satuan Kerja : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0006 PUSKESMAS PULO ARMYN

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	2.462.140.858,00	2.462.140.858,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	2.441.152.903,00	2.441.152.903,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	20.987.955,00	20.987.955,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	0,00	2.462.140.858,00	2.462.140.858,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH					
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.614.158.509,00	2.373.756.311,00	(240.402.198,00)	90,80	
1.02.01.2.10	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	2.614.158.509,00	2.373.756.311,00	(240.402.198,00)	90,80	
1.02.01.2.10.0001	PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	2.614.158.509,00	2.373.756.311,00	(240.402.198,00)	90,80	
1.02.01.2.10.0001.5.1	BELANJA OPERASI	2.502.869.842,00	2.362.181.311,00	(140.688.531,00)	94,38	
1.02.01.2.10.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	1.369.088.691,00	1.366.704.886,00	(2.383.805,00)	99,83	
1.02.01.2.10.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.133.781.151,00	995.476.425,00	(138.304.726,00)	87,80	
1.02.01.2.10.0001.5.2	BELANJA MODAL	111.288.667,00	11.575.000,00	(99.713.667,00)	10,40	
1.02.01.2.10.0001.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	111.288.667,00	11.575.000,00	(99.713.667,00)	10,40	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	777.397.520,00	689.411.881,00	(87.985.639,00)	88,68	
1.02.02.2.02	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	777.397.520,00	689.411.881,00	(87.985.639,00)	88,68	
1.02.02.2.02.0001	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	19.500.000,00	13.600.000,00	(5.900.000,00)	69,74	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	19.500.000,00	13.600.000,00	(5.900.000,00)	69,74	
1.02.02.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	13.600.000,00	(5.900.000,00)	69,74	
1.02.02.2.02.0002	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0005	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	25.550.000,00	23.850.000,00	(1.700.000,00)	93,35	
1.02.02.2.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	25.550.000,00	23.850.000,00	(1.700.000,00)	93,35	
1.02.02.2.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.550.000,00	23.850.000,00	(1.700.000,00)	93,35	
1.02.02.2.02.0011	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	7.200.000,00	5.900.000,00	(1.300.000,00)	81,94	
1.02.02.2.02.0011.5.1	BELANJA OPERASI	7.200.000,00	5.900.000,00	(1.300.000,00)	81,94	
1.02.02.2.02.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	5.900.000,00	(1.300.000,00)	81,94	
1.02.02.2.02.0012	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	2.000.000,00	1.250.000,00	(750.000,00)	62,50	
1.02.02.2.02.0012.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.250.000,00	(750.000,00)	62,50	
1.02.02.2.02.0012.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.250.000,00	(750.000,00)	62,50	
1.02.02.2.02.0015	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	194.327.000,00	157.842.000,00	(36.485.000,00)	81,22	
1.02.02.2.02.0015.5.1	BELANJA OPERASI	194.327.000,00	157.842.000,00	(36.485.000,00)	81,22	
1.02.02.2.02.0015.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.327.000,00	157.842.000,00	(36.485.000,00)	81,22	
1.02.02.2.02.0017	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	20.200.000,00	19.350.000,00	(850.000,00)	95,79	
1.02.02.2.02.0017.5.1	BELANJA OPERASI	20.200.000,00	19.350.000,00	(850.000,00)	95,79	
1.02.02.2.02.0017.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.200.000,00	19.350.000,00	(850.000,00)	95,79	
1.02.02.2.02.0020	PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	18.475.000,00	18.475.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0020.5.1	BELANJA OPERASI	18.475.000,00	18.475.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0020.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.475.000,00	18.475.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0025	PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	77.190.000,00	77.040.000,00	(150.000,00)	99,81	
1.02.02.2.02.0025.5.1	BELANJA OPERASI	77.190.000,00	77.040.000,00	(150.000,00)	99,81	
1.02.02.2.02.0025.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.190.000,00	77.040.000,00	(150.000,00)	99,81	
1.02.02.2.02.0033	OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	255.780.520,00	247.604.881,00	(8.175.639,00)	96,80	
1.02.02.2.02.0033.5.1	BELANJA OPERASI	255.780.520,00	247.604.881,00	(8.175.639,00)	96,80	
1.02.02.2.02.0033.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.780.520,00	247.604.881,00	(8.175.639,00)	96,80	
1.02.02.2.02.0034	OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	4.425.000,00	0,00	(4.425.000,00)	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.2.02.0034.5.1	BELANJA OPERASI	4.425.000,00	0,00	(4.425.000,00)	0,00	
1.02.02.2.02.0034.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.425.000,00	0,00	(4.425.000,00)	0,00	
1.02.02.2.02.0036	INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	1.600.000,00	1.500.000,00	(100.000,00)	93,75	
1.02.02.2.02.0036.5.1	BELANJA OPERASI	1.600.000,00	1.500.000,00	(100.000,00)	93,75	
1.02.02.2.02.0036.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.500.000,00	(100.000,00)	93,75	
1.02.02.2.02.0040	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	7.200.000,00	6.050.000,00	(1.150.000,00)	84,03	
1.02.02.2.02.0040.5.1	BELANJA OPERASI	7.200.000,00	6.050.000,00	(1.150.000,00)	84,03	
1.02.02.2.02.0040.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	6.050.000,00	(1.150.000,00)	84,03	
1.02.02.2.02.0041	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	3.750.000,00	1.650.000,00	(2.100.000,00)	44,00	
1.02.02.2.02.0041.5.1	BELANJA OPERASI	3.750.000,00	1.650.000,00	(2.100.000,00)	44,00	
1.02.02.2.02.0041.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	1.650.000,00	(2.100.000,00)	44,00	
1.02.02.2.02.0044	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044.5.1	BELANJA OPERASI	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0046	PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	132.000.000,00	107.100.000,00	(24.900.000,00)	81,14	
1.02.02.2.02.0046.5.1	BELANJA OPERASI	132.000.000,00	107.100.000,00	(24.900.000,00)	81,14	
1.02.02.2.02.0046.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.000.000,00	107.100.000,00	(24.900.000,00)	81,14	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	31.375.000,00	24.750.000,00	(6.625.000,00)	78,88	
1.02.05.2.03	PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.375.000,00	24.750.000,00	(6.625.000,00)	78,88	
1.02.05.2.03.0001	BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	31.375.000,00	24.750.000,00	(6.625.000,00)	78,88	
1.02.05.2.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	31.375.000,00	24.750.000,00	(6.625.000,00)	78,88	
1.02.05.2.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.375.000,00	24.750.000,00	(6.625.000,00)	78,88	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	3.422.931.029,00	3.087.918.192,00	(335.012.837,00)	90,21	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.422.931.029,00)	(625.777.334,00)	2.797.153.695,00	18,28	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(3.422.931.029,00)	(625.777.334,00)	2.797.153.695,00	18,28	





1.02.0.00.0.00.02.0000

DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS BOGOR TENGAH



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Satuan Kerja : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0007 PUSKESMAS BOGOR TENGAH

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	2.000.684.966,00	2.000.684.966,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	1.923.955.308,00	1.923.955.308,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	76.729.658,00	76.729.658,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	0,00	2.000.684.966,00	2.000.684.966,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH					
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.511.252.974,00	2.166.439.811,00	(344.813.163,00)	86,27	
1.02.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	77.063.500,00	76.640.550,00	(422.950,00)	99,45	
1.02.01.2.07.0007	PENGADAAN ASET TETAP LAINNYA	77.063.500,00	76.640.550,00	(422.950,00)	99,45	
1.02.01.2.07.0007.5.1	BELANJA OPERASI	347.000,00	0,00	(347.000,00)	0,00	
1.02.01.2.07.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	347.000,00	0,00	(347.000,00)	0,00	
1.02.01.2.07.0007.5.2	BELANJA MODAL	76.716.500,00	76.640.550,00	(75.950,00)	99,90	
1.02.01.2.07.0007.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.716.500,00	76.640.550,00	(75.950,00)	99,90	
1.02.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	72.936.500,00	64.127.660,00	(8.808.840,00)	87,92	
1.02.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	72.936.500,00	64.127.660,00	(8.808.840,00)	87,92	
1.02.01.2.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	72.936.500,00	64.127.660,00	(8.808.840,00)	87,92	
1.02.01.2.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.936.500,00	64.127.660,00	(8.808.840,00)	87,92	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.2.09.0007	PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.2.09.0007.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.2.09.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.2.10	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	2.361.252.974,00	2.025.671.601,00	(335.581.373,00)	85,79	
1.02.01.2.10.0001	PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	2.361.252.974,00	2.025.671.601,00	(335.581.373,00)	85,79	
1.02.01.2.10.0001.5.1	BELANJA OPERASI	2.330.252.974,00	1.995.621.601,00	(334.631.373,00)	85,64	
1.02.01.2.10.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	1.455.290.245,00	1.349.090.386,00	(106.199.859,00)	92,70	
1.02.01.2.10.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	874.962.729,00	646.531.215,00	(228.431.514,00)	73,89	
1.02.01.2.10.0001.5.2	BELANJA MODAL	31.000.000,00	30.050.000,00	(950.000,00)	96,94	
1.02.01.2.10.0001.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.000.000,00	30.050.000,00	(950.000,00)	96,94	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	377.186.520,00	360.302.534,00	(16.883.986,00)	95,52	
1.02.02.2.02	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	377.186.520,00	360.302.534,00	(16.883.986,00)	95,52	
1.02.02.2.02.0001	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0005	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	12.000.000,00	10.800.000,00	(1.200.000,00)	90,00	
1.02.02.2.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	10.800.000,00	(1.200.000,00)	90,00	
1.02.02.2.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	10.800.000,00	(1.200.000,00)	90,00	
1.02.02.2.02.0011	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0011.5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0015	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	43.859.000,00	40.462.000,00	(3.397.000,00)	92,25	
1.02.02.2.02.0015.5.1	BELANJA OPERASI	43.859.000,00	40.462.000,00	(3.397.000,00)	92,25	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.2.02.0015.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.859.000,00	40.462.000,00	(3.397.000,00)	92,25	
1.02.02.2.02.0017	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0017.5.1	BELANJA OPERASI	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0017.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0020	PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	9.875.000,00	8.750.000,00	(1.125.000,00)	88,61	
1.02.02.2.02.0020.5.1	BELANJA OPERASI	9.875.000,00	8.750.000,00	(1.125.000,00)	88,61	
1.02.02.2.02.0020.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.875.000,00	8.750.000,00	(1.125.000,00)	88,61	
1.02.02.2.02.0025	PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	31.620.000,00	28.720.000,00	(2.900.000,00)	90,83	
1.02.02.2.02.0025.5.1	BELANJA OPERASI	31.620.000,00	28.720.000,00	(2.900.000,00)	90,83	
1.02.02.2.02.0025.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.620.000,00	28.720.000,00	(2.900.000,00)	90,83	
1.02.02.2.02.0033	OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	192.607.520,00	184.550.734,00	(8.056.786,00)	95,82	
1.02.02.2.02.0033.5.1	BELANJA OPERASI	192.607.520,00	184.550.734,00	(8.056.786,00)	95,82	
1.02.02.2.02.0033.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.607.520,00	184.550.734,00	(8.056.786,00)	95,82	
1.02.02.2.02.0034	OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	4.425.000,00	4.219.800,00	(205.200,00)	95,36	
1.02.02.2.02.0034.5.1	BELANJA OPERASI	4.425.000,00	4.219.800,00	(205.200,00)	95,36	
1.02.02.2.02.0034.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.425.000,00	4.219.800,00	(205.200,00)	95,36	
1.02.02.2.02.0036	INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0036.5.1	BELANJA OPERASI	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0036.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040.5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0041	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0041.5.1	BELANJA OPERASI	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0041.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044.5.1	BELANJA OPERASI	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0046	PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	45.200.000,00	45.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0046.5.1	BELANJA OPERASI	45.200.000,00	45.200.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.2.02.0046.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.200.000,00	45.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	17.975.000,00	17.975.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03	PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.975.000,00	17.975.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03.0001	BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	17.975.000,00	17.975.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	17.975.000,00	17.975.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.975.000,00	17.975.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2.906.414.494,00	2.544.717.345,00	(361.697.149,00)	87,56	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.906.414.494,00)	(544.032.379,00)	2.362.382.115,00	18,72	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.906.414.494,00)	(544.032.379,00)	2.362.382.115,00	18,72	





1.02.0.00.0.00.02.0000

DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS SEMPUR



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Satuan Kerja : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0008 PUSKESMAS SEMPUR

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	1.620.058.161,00	1.620.058.161,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	1.606.234.873,00	1.606.234.873,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	13.823.288,00	13.823.288,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	0,00	1.620.058.161,00	1.620.058.161,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH					
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.974.470.951,00	1.656.371.443,00	(318.099.508,00)	83,89	
1.02.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	24.126.400,00	24.126.400,00	0,00	100,00	
1.02.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	24.126.400,00	24.126.400,00	0,00	100,00	
1.02.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	24.126.400,00	24.126.400,00	0,00	100,00	
1.02.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.126.400,00	24.126.400,00	0,00	100,00	
1.02.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	45.703.700,00	45.703.700,00	0,00	100,00	
1.02.01.2.07.0007	PENGADAAN ASET TETAP LAINNYA	45.703.700,00	45.703.700,00	0,00	100,00	
1.02.01.2.07.0007.5.2	BELANJA MODAL	45.703.700,00	45.703.700,00	0,00	100,00	
1.02.01.2.07.0007.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.703.700,00	45.703.700,00	0,00	100,00	
1.02.01.2.10	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	1.904.640.851,00	1.586.541.343,00	(318.099.508,00)	83,30	
1.02.01.2.10.0001	PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	1.904.640.851,00	1.586.541.343,00	(318.099.508,00)	83,30	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.01.2.10.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.790.394.961,00	1.532.941.343,00	(257.453.618,00)	85,62	
1.02.01.2.10.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	1.050.018.873,00	947.870.111,00	(102.148.762,00)	90,27	
1.02.01.2.10.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	740.376.088,00	585.071.232,00	(155.304.856,00)	79,02	
1.02.01.2.10.0001.5.2	BELANJA MODAL	114.245.890,00	53.600.000,00	(60.645.890,00)	46,92	
1.02.01.2.10.0001.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	114.245.890,00	53.600.000,00	(60.645.890,00)	46,92	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	663.211.820,00	663.211.820,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.01	PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80.057.300,00	80.057.300,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.01.0014	PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	14.666.300,00	14.666.300,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.01.0014.5.2	BELANJA MODAL	14.666.300,00	14.666.300,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.01.0014.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.666.300,00	14.666.300,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.01.0023	PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI,, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN	65.391.000,00	65.391.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.01.0023.5.1	BELANJA OPERASI	65.391.000,00	65.391.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.01.0023.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.391.000,00	65.391.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	583.154.520,00	583.154.520,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0001	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0005	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	22.650.000,00	22.650.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	22.650.000,00	22.650.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.650.000,00	22.650.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0011	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0011.5.1	BELANJA OPERASI	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFeksi HIV	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.2.02.0012.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0015	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	111.731.000,00	111.731.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0015.5.1	BELANJA OPERASI	111.731.000,00	111.731.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0015.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.731.000,00	111.731.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0017	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	17.450.000,00	17.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0017.5.1	BELANJA OPERASI	17.450.000,00	17.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0017.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.450.000,00	17.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0020	PENGLOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	15.775.000,00	15.775.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0020.5.1	BELANJA OPERASI	15.775.000,00	15.775.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0020.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.775.000,00	15.775.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0025	PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	46.340.000,00	46.340.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0025.5.1	BELANJA OPERASI	46.340.000,00	46.340.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0025.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.340.000,00	46.340.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0033	OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	207.583.520,00	207.583.520,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0033.5.1	BELANJA OPERASI	207.583.520,00	207.583.520,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0033.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.583.520,00	207.583.520,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0034	OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0034.5.1	BELANJA OPERASI	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0034.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0036	INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0036.5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0036.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040.5.1	BELANJA OPERASI	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0041	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0041.5.1	BELANJA OPERASI	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0041.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044.5.1	BELANJA OPERASI	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.2.02.0044.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0046	PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	113.900.000,00	113.900.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0046.5.1	BELANJA OPERASI	113.900.000,00	113.900.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0046.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.900.000,00	113.900.000,00	0,00	100,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	24.675.000,00	24.675.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03	PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.675.000,00	24.675.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03.0001	BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	24.675.000,00	24.675.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	24.675.000,00	24.675.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.675.000,00	24.675.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2.662.357.771,00	2.344.258.263,00	(318.099.508,00)	88,05	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.662.357.771,00)	(724.200.102,00)	1.938.157.669,00	27,20	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.662.357.771,00)	(724.200.102,00)	1.938.157.669,00	27,20	





1.02.0.00.0.00.02.0000

DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS GANG AUT



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Satuan Kerja : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0009 PUSKESMAS GANG AUT

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	1.085.383.719,00	1.085.383.719,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	1.078.677.618,00	1.078.677.618,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	6.706.101,00	6.706.101,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	0,00	1.085.383.719,00	1.085.383.719,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH					
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.457.056.937,00	1.252.271.299,00	(204.785.638,00)	85,95	
1.02.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	71.005.000,00	70.961.500,00	(43.500,00)	99,94	
1.02.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.610.800,00	4.610.000,00	(800,00)	99,98	
1.02.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	4.610.800,00	4.610.000,00	(800,00)	99,98	
1.02.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.610.800,00	4.610.000,00	(800,00)	99,98	
1.02.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	52.928.500,00	52.914.500,00	(14.000,00)	99,97	
1.02.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	52.928.500,00	52.914.500,00	(14.000,00)	99,97	
1.02.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.928.500,00	52.914.500,00	(14.000,00)	99,97	
1.02.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	11.925.700,00	11.897.000,00	(28.700,00)	99,76	
1.02.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	11.925.700,00	11.897.000,00	(28.700,00)	99,76	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.925.700,00	11.897.000,00	(28.700,00)	99,76	
1.02.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.2.07.0007	PENGADAAN ASET TETAP LAINNYA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.2.07.0007.5.2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.2.07.0007.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	9.325.000,00	7.214.173,00	(2.110.827,00)	77,36	
1.02.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	9.325.000,00	7.214.173,00	(2.110.827,00)	77,36	
1.02.01.2.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	9.325.000,00	7.214.173,00	(2.110.827,00)	77,36	
1.02.01.2.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.325.000,00	7.214.173,00	(2.110.827,00)	77,36	
1.02.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.830.000,00	4.691.250,00	(138.750,00)	97,13	
1.02.01.2.09.0007	PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA	4.830.000,00	4.691.250,00	(138.750,00)	97,13	
1.02.01.2.09.0007.5.1	BELANJA OPERASI	4.830.000,00	4.691.250,00	(138.750,00)	97,13	
1.02.01.2.09.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.830.000,00	4.691.250,00	(138.750,00)	97,13	
1.02.01.2.10	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	1.356.896.937,00	1.154.404.376,00	(202.492.561,00)	85,08	
1.02.01.2.10.0001	PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	1.356.896.937,00	1.154.404.376,00	(202.492.561,00)	85,08	
1.02.01.2.10.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.318.896.937,00	1.116.404.376,00	(202.492.561,00)	84,65	
1.02.01.2.10.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	892.303.066,00	719.144.661,00	(173.158.405,00)	80,59	
1.02.01.2.10.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	426.593.871,00	397.259.715,00	(29.334.156,00)	93,12	
1.02.01.2.10.0001.5.2	BELANJA MODAL	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.2.10.0001.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	543.560.520,00	538.095.520,00	(5.465.000,00)	98,99	
1.02.02.2.01	PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	49.840.000,00	48.725.000,00	(1.115.000,00)	97,76	
1.02.02.2.01.0009	REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PUSKESMAS	49.840.000,00	48.725.000,00	(1.115.000,00)	97,76	
1.02.02.2.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	49.840.000,00	48.725.000,00	(1.115.000,00)	97,76	
1.02.02.2.01.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.840.000,00	48.725.000,00	(1.115.000,00)	97,76	
1.02.02.2.02	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	493.720.520,00	489.370.520,00	(4.350.000,00)	99,12	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.2.02.0001	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0005	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0011	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0011.5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	75,00	
1.02.02.2.02.0012.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	75,00	
1.02.02.2.02.0012.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	75,00	
1.02.02.2.02.0015	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	106.895.000,00	106.895.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0015.5.1	BELANJA OPERASI	106.895.000,00	106.895.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0015.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.895.000,00	106.895.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0017	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0017.5.1	BELANJA OPERASI	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0017.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0020	PENGLOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	13.475.000,00	13.475.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0020.5.1	BELANJA OPERASI	13.475.000,00	13.475.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0020.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.475.000,00	13.475.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0025	PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	44.590.000,00	42.190.000,00	(2.400.000,00)	94,62	
1.02.02.2.02.0025.5.1	BELANJA OPERASI	44.590.000,00	42.190.000,00	(2.400.000,00)	94,62	
1.02.02.2.02.0025.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.590.000,00	42.190.000,00	(2.400.000,00)	94,62	
1.02.02.2.02.0033	OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	175.585.520,00	175.185.520,00	(400.000,00)	99,77	
1.02.02.2.02.0033.5.1	BELANJA OPERASI	175.585.520,00	175.185.520,00	(400.000,00)	99,77	
1.02.02.2.02.0033.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.585.520,00	175.185.520,00	(400.000,00)	99,77	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.2.02.0034	OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0034.5.1	BELANJA OPERASI	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0034.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0036	INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0036.5.1	BELANJA OPERASI	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0036.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040.5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0041	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	0,00	
1.02.02.2.02.0041.5.1	BELANJA OPERASI	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	0,00	
1.02.02.2.02.0041.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	0,00	
1.02.02.2.02.0044	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044.5.1	BELANJA OPERASI	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0046	PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	81.800.000,00	81.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0046.5.1	BELANJA OPERASI	81.800.000,00	81.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0046.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.800.000,00	81.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	17.975.000,00	17.975.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03	PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.975.000,00	17.975.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03.0001	BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	17.975.000,00	17.975.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	17.975.000,00	17.975.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.975.000,00	17.975.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2.018.592.457,00	1.808.341.819,00	(210.250.638,00)	89,58	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.018.592.457,00)	(722.958.100,00)	1.295.634.357,00	35,81	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(2.018.592.457,00)	(722.958.100,00)	1.295.634.357,00	35,81	





1.02.0.00.0.00.02.0000

DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS BELONG



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Satuan Kerja : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0010 PUSKESMAS BELONG

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	693.910.874,00	693.910.874,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	684.435.857,00	684.435.857,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	9.475.017,00	9.475.017,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	0,00	693.910.874,00	693.910.874,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH					
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	852.733.013,00	778.642.971,00	(74.090.042,00)	91,31	
1.02.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	38.649.488,00	38.639.838,00	(9.650,00)	99,98	
1.02.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	8.729.300,00	8.729.057,00	(243,00)	100,00	
1.02.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	8.729.300,00	8.729.057,00	(243,00)	100,00	
1.02.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.729.300,00	8.729.057,00	(243,00)	100,00	
1.02.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	19.522.688,00	19.513.281,00	(9.407,00)	99,95	
1.02.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	19.522.688,00	19.513.281,00	(9.407,00)	99,95	
1.02.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.522.688,00	19.513.281,00	(9.407,00)	99,95	
1.02.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	9.103.900,00	9.103.900,00	0,00	100,00	
1.02.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	9.103.900,00	9.103.900,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.103.900,00	9.103.900,00	0,00	100,00	
1.02.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	1.293.600,00	1.293.600,00	0,00	100,00	
1.02.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.293.600,00	1.293.600,00	0,00	100,00	
1.02.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.293.600,00	1.293.600,00	0,00	100,00	
1.02.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	33.346.100,00	33.301.729,00	(44.371,00)	99,87	
1.02.01.2.07.0005	PENGADAAN MEBEL	7.060.100,00	7.016.809,00	(43.291,00)	99,39	
1.02.01.2.07.0005.5.2	BELANJA MODAL	7.060.100,00	7.016.809,00	(43.291,00)	99,39	
1.02.01.2.07.0005.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.060.100,00	7.016.809,00	(43.291,00)	99,39	
1.02.01.2.07.0007	PENGADAAN ASET TETAP LAINNYA	26.286.000,00	26.284.920,00	(1.080,00)	100,00	
1.02.01.2.07.0007.5.2	BELANJA MODAL	26.286.000,00	26.284.920,00	(1.080,00)	100,00	
1.02.01.2.07.0007.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.286.000,00	26.284.920,00	(1.080,00)	100,00	
1.02.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.610.000,00	5.610.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.2.09.0007	PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA	5.610.000,00	5.610.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.2.09.0007.5.1	BELANJA OPERASI	5.610.000,00	5.610.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.2.09.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.610.000,00	5.610.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.2.10	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	775.127.425,00	701.091.404,00	(74.036.021,00)	90,45	
1.02.01.2.10.0001	PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	775.127.425,00	701.091.404,00	(74.036.021,00)	90,45	
1.02.01.2.10.0001.5.1	BELANJA OPERASI	747.427.715,00	691.641.694,00	(55.786.021,00)	92,54	
1.02.01.2.10.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	555.356.520,00	516.622.255,00	(38.734.265,00)	93,03	
1.02.01.2.10.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.071.195,00	175.019.439,00	(17.051.756,00)	91,12	
1.02.01.2.10.0001.5.2	BELANJA MODAL	27.699.710,00	9.449.710,00	(18.250.000,00)	34,11	
1.02.01.2.10.0001.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.699.710,00	9.449.710,00	(18.250.000,00)	34,11	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	386.310.932,00	386.039.928,00	(271.004,00)	99,93	
1.02.02.2.01	PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	70.994.412,00	70.756.247,00	(238.165,00)	99,66	
1.02.02.2.01.0009	REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PUSKESMAS	30.438.000,00	30.438.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	30.438.000,00	30.438.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.01.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.438.000,00	30.438.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.01.0014	PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	3.722.000,00	3.721.941,00	(59,00)	100,00	
1.02.02.2.01.0014.5.2	BELANJA MODAL	3.722.000,00	3.721.941,00	(59,00)	100,00	
1.02.02.2.01.0014.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.722.000,00	3.721.941,00	(59,00)	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.2.01.0023	PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI,, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN	36.834.412,00	36.596.306,00	(238.106,00)	99,35	
1.02.02.2.01.0023.5.1	BELANJA OPERASI	36.834.412,00	36.596.306,00	(238.106,00)	99,35	
1.02.02.2.01.0023.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.834.412,00	36.596.306,00	(238.106,00)	99,35	
1.02.02.2.02	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	315.316.520,00	315.283.681,00	(32.839,00)	99,99	
1.02.02.2.02.0001	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0005	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0011	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0011.5.1	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0015	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	62.807.000,00	62.807.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0015.5.1	BELANJA OPERASI	62.807.000,00	62.807.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0015.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.807.000,00	62.807.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0017	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	11.950.000,00	11.950.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0017.5.1	BELANJA OPERASI	11.950.000,00	11.950.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0017.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.950.000,00	11.950.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0020	PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	12.275.000,00	12.275.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0020.5.1	BELANJA OPERASI	12.275.000,00	12.275.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0020.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.275.000,00	12.275.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0025	PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	21.380.000,00	21.380.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.2.02.0025.5.1	BELANJA OPERASI	21.380.000,00	21.380.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0025.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.380.000,00	21.380.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0033	OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	136.279.520,00	136.246.681,00	(32.839,00)	99,98	
1.02.02.2.02.0033.5.1	BELANJA OPERASI	136.279.520,00	136.246.681,00	(32.839,00)	99,98	
1.02.02.2.02.0033.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.279.520,00	136.246.681,00	(32.839,00)	99,98	
1.02.02.2.02.0034	OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0034.5.1	BELANJA OPERASI	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0034.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0036	INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0036.5.1	BELANJA OPERASI	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0036.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040.5.1	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0041	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0041.5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0041.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044.5.1	BELANJA OPERASI	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0046	PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	46.100.000,00	46.100.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0046.5.1	BELANJA OPERASI	46.100.000,00	46.100.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0046.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.100.000,00	46.100.000,00	0,00	100,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03	PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03.0001	BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
	JUMLAH BELANJA DAERAH	1.250.093.945,00	1.175.732.899,00	(74.361.046,00)	94,05	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.250.093.945,00)	(481.822.025,00)	768.271.920,00	38,54	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.250.093.945,00)	(481.822.025,00)	768.271.920,00	38,54	





1.02.0.00.0.00.02.0000

**DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MERDEKA**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Satuan Kerja : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0011 PUSKESMAS MERDEKA

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	2.143.768.223,00	2.143.768.223,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	2.120.165.754,00	2.120.165.754,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	23.602.469,00	23.602.469,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	0,00	2.143.768.223,00	2.143.768.223,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH					
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.561.898.012,00	2.270.589.019,00	(291.308.993,00)	88,63	
1.02.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	49.422.275,00	49.252.401,00	(169.874,00)	99,66	
1.02.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.231.000,00	3.231.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	3.231.000,00	3.231.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.231.000,00	3.231.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	30.890.275,00	30.731.716,00	(158.559,00)	99,49	
1.02.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	30.890.275,00	30.731.716,00	(158.559,00)	99,49	
1.02.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.890.275,00	30.731.716,00	(158.559,00)	99,49	
1.02.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	15.301.000,00	15.289.685,00	(11.315,00)	99,93	
1.02.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	15.301.000,00	15.289.685,00	(11.315,00)	99,93	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.301.000,00	15.289.685,00	(11.315,00)	99,93	
1.02.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	30.462.333,00	24.197.540,00	(6.264.793,00)	79,43	
1.02.01.2.07.0007	PENGADAAN ASET TETAP LAINNYA	30.462.333,00	24.197.540,00	(6.264.793,00)	79,43	
1.02.01.2.07.0007.5.2	BELANJA MODAL	30.462.333,00	24.197.540,00	(6.264.793,00)	79,43	
1.02.01.2.07.0007.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.462.333,00	24.197.540,00	(6.264.793,00)	79,43	
1.02.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	69.915.992,00	66.721.889,00	(3.194.103,00)	95,43	
1.02.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	69.915.992,00	66.721.889,00	(3.194.103,00)	95,43	
1.02.01.2.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	69.915.992,00	66.721.889,00	(3.194.103,00)	95,43	
1.02.01.2.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.915.992,00	66.721.889,00	(3.194.103,00)	95,43	
1.02.01.2.10	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	2.412.097.412,00	2.130.417.189,00	(281.680.223,00)	88,32	
1.02.01.2.10.0001	PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	2.412.097.412,00	2.130.417.189,00	(281.680.223,00)	88,32	
1.02.01.2.10.0001.5.1	BELANJA OPERASI	2.324.971.717,00	2.043.354.839,00	(281.616.878,00)	87,89	
1.02.01.2.10.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	1.621.539.428,00	1.350.877.139,00	(270.662.289,00)	83,31	
1.02.01.2.10.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	703.432.289,00	692.477.700,00	(10.954.589,00)	98,44	
1.02.01.2.10.0001.5.2	BELANJA MODAL	87.125.695,00	87.062.350,00	(63.345,00)	99,93	
1.02.01.2.10.0001.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.125.695,00	87.062.350,00	(63.345,00)	99,93	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	665.049.520,00	572.721.101,00	(92.328.419,00)	86,12	
1.02.02.2.01	PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.02.2.01.0009	REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PUSKESMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.02.2.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.02.2.01.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.02.2.02	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	665.049.520,00	572.721.101,00	(92.328.419,00)	86,12	
1.02.02.2.02.0001	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0005	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	28.800.000,00	23.850.000,00	(4.950.000,00)	82,81	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.2.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	28.800.000,00	23.850.000,00	(4.950.000,00)	82,81	
1.02.02.2.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	23.850.000,00	(4.950.000,00)	82,81	
1.02.02.2.02.0011	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0011.5.1	BELANJA OPERASI	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0015	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	172.571.000,00	131.081.500,00	(41.489.500,00)	75,96	
1.02.02.2.02.0015.5.1	BELANJA OPERASI	172.571.000,00	131.081.500,00	(41.489.500,00)	75,96	
1.02.02.2.02.0015.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.571.000,00	131.081.500,00	(41.489.500,00)	75,96	
1.02.02.2.02.0017	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	17.450.000,00	17.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0017.5.1	BELANJA OPERASI	17.450.000,00	17.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0017.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.450.000,00	17.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0020	PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	10.375.000,00	9.775.000,00	(600.000,00)	94,22	
1.02.02.2.02.0020.5.1	BELANJA OPERASI	10.375.000,00	9.775.000,00	(600.000,00)	94,22	
1.02.02.2.02.0020.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.375.000,00	9.775.000,00	(600.000,00)	94,22	
1.02.02.2.02.0025	PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	54.940.000,00	51.740.000,00	(3.200.000,00)	94,18	
1.02.02.2.02.0025.5.1	BELANJA OPERASI	54.940.000,00	51.740.000,00	(3.200.000,00)	94,18	
1.02.02.2.02.0025.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.940.000,00	51.740.000,00	(3.200.000,00)	94,18	
1.02.02.2.02.0033	OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	250.938.520,00	210.049.601,00	(40.888.919,00)	83,71	
1.02.02.2.02.0033.5.1	BELANJA OPERASI	250.938.520,00	210.049.601,00	(40.888.919,00)	83,71	
1.02.02.2.02.0033.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.938.520,00	210.049.601,00	(40.888.919,00)	83,71	
1.02.02.2.02.0034	OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0034.5.1	BELANJA OPERASI	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0034.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0036	INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	0,00	
1.02.02.2.02.0036.5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	0,00	
1.02.02.2.02.0036.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.2.02.0040	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040.5.1	BELANJA OPERASI	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0041	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0041.5.1	BELANJA OPERASI	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0041.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044.5.1	BELANJA OPERASI	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0046	PENGLOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	101.900.000,00	101.900.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0046.5.1	BELANJA OPERASI	101.900.000,00	101.900.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0046.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.900.000,00	101.900.000,00	0,00	100,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	24.675.000,00	24.675.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03	PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.675.000,00	24.675.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03.0001	BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	24.675.000,00	24.675.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	24.675.000,00	24.675.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.675.000,00	24.675.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	3.251.622.532,00	2.867.985.120,00	(383.637.412,00)	88,20	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.251.622.532,00)	(724.216.897,00)	2.527.405.635,00	22,27	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.251.622.532,00)	(724.216.897,00)	2.527.405.635,00	22,27	





1.02.0.00.0.00.02.0000

**DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SEMPLAK**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Satuan Kerja : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0012 PUSKESMAS SEMPLAK

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	2.729.895.251,00	2.729.895.251,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	2.718.489.760,00	2.718.489.760,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	11.405.491,00	11.405.491,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	0,00	2.729.895.251,00	2.729.895.251,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH					
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.521.158.390,00	2.729.653.052,00	(791.505.338,00)	77,52	
1.02.01.2.10	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	3.521.158.390,00	2.729.653.052,00	(791.505.338,00)	77,52	
1.02.01.2.10.0001	PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	3.521.158.390,00	2.729.653.052,00	(791.505.338,00)	77,52	
1.02.01.2.10.0001.5.1	BELANJA OPERASI	3.240.369.390,00	2.610.766.395,00	(629.602.995,00)	80,57	
1.02.01.2.10.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	1.838.455.223,00	1.640.553.886,00	(197.901.337,00)	89,24	
1.02.01.2.10.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.401.914.167,00	970.212.509,00	(431.701.658,00)	69,21	
1.02.01.2.10.0001.5.2	BELANJA MODAL	280.789.000,00	118.886.657,00	(161.902.343,00)	42,34	
1.02.01.2.10.0001.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	280.789.000,00	118.886.657,00	(161.902.343,00)	42,34	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	626.134.520,00	612.379.500,00	(13.755.020,00)	97,80	
1.02.02.2.02	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	626.134.520,00	612.379.500,00	(13.755.020,00)	97,80	
1.02.02.2.02.0001	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0005	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	19.650.000,00	19.650.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	19.650.000,00	19.650.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.650.000,00	19.650.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0011	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0011.5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0015	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	161.771.000,00	153.669.500,00	(8.101.500,00)	94,99	
1.02.02.2.02.0015.5.1	BELANJA OPERASI	161.771.000,00	153.669.500,00	(8.101.500,00)	94,99	
1.02.02.2.02.0015.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.771.000,00	153.669.500,00	(8.101.500,00)	94,99	
1.02.02.2.02.0017	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	17.450.000,00	16.350.000,00	(1.100.000,00)	93,70	
1.02.02.2.02.0017.5.1	BELANJA OPERASI	17.450.000,00	16.350.000,00	(1.100.000,00)	93,70	
1.02.02.2.02.0017.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.450.000,00	16.350.000,00	(1.100.000,00)	93,70	
1.02.02.2.02.0020	PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	12.175.000,00	12.175.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0020.5.1	BELANJA OPERASI	12.175.000,00	12.175.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0020.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.175.000,00	12.175.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0025	PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	53.890.000,00	51.740.000,00	(2.150.000,00)	96,01	
1.02.02.2.02.0025.5.1	BELANJA OPERASI	53.890.000,00	51.740.000,00	(2.150.000,00)	96,01	
1.02.02.2.02.0025.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.890.000,00	51.740.000,00	(2.150.000,00)	96,01	
1.02.02.2.02.0033	OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	206.323.520,00	205.870.000,00	(453.520,00)	99,78	
1.02.02.2.02.0033.5.1	BELANJA OPERASI	206.323.520,00	205.870.000,00	(453.520,00)	99,78	
1.02.02.2.02.0033.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.323.520,00	205.870.000,00	(453.520,00)	99,78	
1.02.02.2.02.0034	OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.2.02.0034.5.1	BELANJA OPERASI	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0034.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0036	INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0036.5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0036.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040.5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0041	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	2.250.000,00	300.000,00	(1.950.000,00)	13,33	
1.02.02.2.02.0041.5.1	BELANJA OPERASI	2.250.000,00	300.000,00	(1.950.000,00)	13,33	
1.02.02.2.02.0041.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	300.000,00	(1.950.000,00)	13,33	
1.02.02.2.02.0044	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044.5.1	BELANJA OPERASI	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0046	PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	111.200.000,00	111.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0046.5.1	BELANJA OPERASI	111.200.000,00	111.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0046.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.200.000,00	111.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	24.675.000,00	24.675.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03	PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.675.000,00	24.675.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03.0001	BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	24.675.000,00	24.675.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	24.675.000,00	24.675.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.675.000,00	24.675.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	4.171.967.910,00	3.366.707.552,00	(805.260.358,00)	80,70	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.171.967.910,00)	(636.812.301,00)	3.535.155.609,00	15,26	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(4.171.967.910,00)	(636.812.301,00)	3.535.155.609,00	15,26	





1.02.0.00.0.00.02.0000

**DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PANCASAN**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Satuan Kerja : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0013 PUSKESMAS PANCASAN

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	2.467.304.981,00	2.467.304.981,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	2.463.110.019,00	2.463.110.019,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	4.194.962,00	4.194.962,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	0,00	2.467.304.981,00	2.467.304.981,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH					
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.565.393.730,00	2.429.877.087,00	(135.516.643,00)	94,72	
1.02.01.2.10	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	2.565.393.730,00	2.429.877.087,00	(135.516.643,00)	94,72	
1.02.01.2.10.0001	PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	2.565.393.730,00	2.429.877.087,00	(135.516.643,00)	94,72	
1.02.01.2.10.0001.5.1	BELANJA OPERASI	2.520.982.622,00	2.389.397.941,00	(131.584.681,00)	94,78	
1.02.01.2.10.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	1.462.882.945,00	1.462.301.754,00	(581.191,00)	99,96	
1.02.01.2.10.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.058.099.677,00	927.096.187,00	(131.003.490,00)	87,62	
1.02.01.2.10.0001.5.2	BELANJA MODAL	44.411.108,00	40.479.146,00	(3.931.962,00)	91,15	
1.02.01.2.10.0001.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.411.108,00	40.479.146,00	(3.931.962,00)	91,15	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	484.015.520,00	456.609.000,00	(27.406.520,00)	94,34	
1.02.02.2.02	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	484.015.520,00	456.609.000,00	(27.406.520,00)	94,34	
1.02.02.2.02.0001	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	15.600.000,00	15.150.000,00	(450.000,00)	97,12	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	15.600.000,00	15.150.000,00	(450.000,00)	97,12	
1.02.02.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	15.150.000,00	(450.000,00)	97,12	
1.02.02.2.02.0002	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0005	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	16.000.000,00	12.100.000,00	(3.900.000,00)	75,62	
1.02.02.2.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	16.000.000,00	12.100.000,00	(3.900.000,00)	75,62	
1.02.02.2.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	12.100.000,00	(3.900.000,00)	75,62	
1.02.02.2.02.0011	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	3.600.000,00	2.200.000,00	(1.400.000,00)	61,11	
1.02.02.2.02.0011.5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	2.200.000,00	(1.400.000,00)	61,11	
1.02.02.2.02.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	2.200.000,00	(1.400.000,00)	61,11	
1.02.02.2.02.0012	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0015	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	100.955.000,00	92.562.000,00	(8.393.000,00)	91,69	
1.02.02.2.02.0015.5.1	BELANJA OPERASI	100.955.000,00	92.562.000,00	(8.393.000,00)	91,69	
1.02.02.2.02.0015.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.955.000,00	92.562.000,00	(8.393.000,00)	91,69	
1.02.02.2.02.0017	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0017.5.1	BELANJA OPERASI	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0017.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0020	PENGLOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	10.975.000,00	10.375.000,00	(600.000,00)	94,53	
1.02.02.2.02.0020.5.1	BELANJA OPERASI	10.975.000,00	10.375.000,00	(600.000,00)	94,53	
1.02.02.2.02.0020.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.975.000,00	10.375.000,00	(600.000,00)	94,53	
1.02.02.2.02.0025	PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	51.390.000,00	45.440.000,00	(5.950.000,00)	88,42	
1.02.02.2.02.0025.5.1	BELANJA OPERASI	51.390.000,00	45.440.000,00	(5.950.000,00)	88,42	
1.02.02.2.02.0025.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.390.000,00	45.440.000,00	(5.950.000,00)	88,42	
1.02.02.2.02.0033	OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	171.670.520,00	171.157.000,00	(513.520,00)	99,70	
1.02.02.2.02.0033.5.1	BELANJA OPERASI	171.670.520,00	171.157.000,00	(513.520,00)	99,70	
1.02.02.2.02.0033.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.670.520,00	171.157.000,00	(513.520,00)	99,70	
1.02.02.2.02.0034	OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.2.02.0034.5.1	BELANJA OPERASI	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0034.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0036	INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	800.000,00	750.000,00	(50.000,00)	93,75	
1.02.02.2.02.0036.5.1	BELANJA OPERASI	800.000,00	750.000,00	(50.000,00)	93,75	
1.02.02.2.02.0036.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	750.000,00	(50.000,00)	93,75	
1.02.02.2.02.0040	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	3.600.000,00	1.950.000,00	(1.650.000,00)	54,17	
1.02.02.2.02.0040.5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	1.950.000,00	(1.650.000,00)	54,17	
1.02.02.2.02.0040.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	1.950.000,00	(1.650.000,00)	54,17	
1.02.02.2.02.0041	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0041.5.1	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0041.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044.5.1	BELANJA OPERASI	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0046	PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	81.200.000,00	76.700.000,00	(4.500.000,00)	94,46	
1.02.02.2.02.0046.5.1	BELANJA OPERASI	81.200.000,00	76.700.000,00	(4.500.000,00)	94,46	
1.02.02.2.02.0046.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.200.000,00	76.700.000,00	(4.500.000,00)	94,46	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	17.750.000,00	17.750.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03	PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.750.000,00	17.750.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03.0001	BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	17.750.000,00	17.750.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	17.750.000,00	17.750.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.750.000,00	17.750.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	3.067.159.250,00	2.904.236.087,00	(162.923.163,00)	94,69	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.067.159.250,00)	(436.931.106,00)	2.630.228.144,00	14,25	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(3.067.159.250,00)	(436.931.106,00)	2.630.228.144,00	14,25	





1.02.0.00.0.00.02.0000

**DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PASIR MULYA**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Satuan Kerja : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0014 PUSKESMAS PASIR MULYA

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	3.097.733.826,00	3.097.733.826,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	3.035.831.908,00	3.035.831.908,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	61.901.918,00	61.901.918,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	0,00	3.097.733.826,00	3.097.733.826,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH					
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.668.006.952,00	3.217.651.663,00	(450.355.289,00)	87,72	
1.02.01.2.10	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	3.668.006.952,00	3.217.651.663,00	(450.355.289,00)	87,72	
1.02.01.2.10.0001	PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	3.668.006.952,00	3.217.651.663,00	(450.355.289,00)	87,72	
1.02.01.2.10.0001.5.1	BELANJA OPERASI	3.496.726.149,00	3.122.263.113,00	(374.463.036,00)	89,29	
1.02.01.2.10.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	2.097.844.272,00	2.007.256.719,00	(90.587.553,00)	95,68	
1.02.01.2.10.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.398.881.877,00	1.115.006.394,00	(283.875.483,00)	79,71	
1.02.01.2.10.0001.5.2	BELANJA MODAL	171.280.803,00	95.388.550,00	(75.892.253,00)	55,69	
1.02.01.2.10.0001.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	171.280.803,00	95.388.550,00	(75.892.253,00)	55,69	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	627.630.520,00	570.962.020,00	(56.668.500,00)	90,97	
1.02.02.2.02	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	627.630.520,00	570.962.020,00	(56.668.500,00)	90,97	
1.02.02.2.02.0001	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	13.650.000,00	13.650.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	13.650.000,00	13.650.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.650.000,00	13.650.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0005	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	29.050.000,00	28.200.000,00	(850.000,00)	97,07	
1.02.02.2.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	29.050.000,00	28.200.000,00	(850.000,00)	97,07	
1.02.02.2.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.050.000,00	28.200.000,00	(850.000,00)	97,07	
1.02.02.2.02.0011	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0011.5.1	BELANJA OPERASI	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0015	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	157.907.000,00	107.038.500,00	(50.868.500,00)	67,79	
1.02.02.2.02.0015.5.1	BELANJA OPERASI	157.907.000,00	107.038.500,00	(50.868.500,00)	67,79	
1.02.02.2.02.0015.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.907.000,00	107.038.500,00	(50.868.500,00)	67,79	
1.02.02.2.02.0017	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	17.450.000,00	17.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0017.5.1	BELANJA OPERASI	17.450.000,00	17.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0017.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.450.000,00	17.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0020	PENGLOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	12.175.000,00	12.175.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0020.5.1	BELANJA OPERASI	12.175.000,00	12.175.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0020.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.175.000,00	12.175.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0025	PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	60.240.000,00	58.940.000,00	(1.300.000,00)	97,84	
1.02.02.2.02.0025.5.1	BELANJA OPERASI	60.240.000,00	58.940.000,00	(1.300.000,00)	97,84	
1.02.02.2.02.0025.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.240.000,00	58.940.000,00	(1.300.000,00)	97,84	
1.02.02.2.02.0033	OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	207.583.520,00	207.583.520,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0033.5.1	BELANJA OPERASI	207.583.520,00	207.583.520,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0033.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.583.520,00	207.583.520,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0034	OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.2.02.0034.5.1	BELANJA OPERASI	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0034.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0036	INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0036.5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0036.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040.5.1	BELANJA OPERASI	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0041	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	3.150.000,00	0,00	(3.150.000,00)	0,00	
1.02.02.2.02.0041.5.1	BELANJA OPERASI	3.150.000,00	0,00	(3.150.000,00)	0,00	
1.02.02.2.02.0041.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	0,00	(3.150.000,00)	0,00	
1.02.02.2.02.0044	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044.5.1	BELANJA OPERASI	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0046	PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	101.900.000,00	101.400.000,00	(500.000,00)	99,51	
1.02.02.2.02.0046.5.1	BELANJA OPERASI	101.900.000,00	101.400.000,00	(500.000,00)	99,51	
1.02.02.2.02.0046.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.900.000,00	101.400.000,00	(500.000,00)	99,51	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	24.675.000,00	24.675.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03	PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.675.000,00	24.675.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03.0001	BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	24.675.000,00	24.675.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	24.675.000,00	24.675.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.675.000,00	24.675.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	4.320.312.472,00	3.813.288.683,00	(507.023.789,00)	88,26	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.320.312.472,00)	(715.554.857,00)	3.604.757.615,00	16,56	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(4.320.312.472,00)	(715.554.857,00)	3.604.757.615,00	16,56	





1.02.0.00.0.00.02.0000

**DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS GANG KELOR**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Satuan Kerja : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0015 PUSKESMAS GANG KELOR

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	2.705.591.391,00	2.705.591.391,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	2.686.283.153,00	2.686.283.153,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	19.308.238,00	19.308.238,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	0,00	2.705.591.391,00	2.705.591.391,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH					
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.951.038.465,00	2.703.441.994,00	(247.596.471,00)	91,61	
1.02.01.2.10	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	2.951.038.465,00	2.703.441.994,00	(247.596.471,00)	91,61	
1.02.01.2.10.0001	PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	2.951.038.465,00	2.703.441.994,00	(247.596.471,00)	91,61	
1.02.01.2.10.0001.5.1	BELANJA OPERASI	2.732.445.910,00	2.597.403.909,00	(135.042.001,00)	95,06	
1.02.01.2.10.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	1.784.114.580,00	1.720.337.048,00	(63.777.532,00)	96,43	
1.02.01.2.10.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	948.331.330,00	877.066.861,00	(71.264.469,00)	92,49	
1.02.01.2.10.0001.5.2	BELANJA MODAL	218.592.555,00	106.038.085,00	(112.554.470,00)	48,51	
1.02.01.2.10.0001.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	218.592.555,00	106.038.085,00	(112.554.470,00)	48,51	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	914.301.520,00	910.575.694,00	(3.725.826,00)	99,59	
1.02.02.2.02	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	914.301.520,00	910.575.694,00	(3.725.826,00)	99,59	
1.02.02.2.02.0001	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0005	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	26.150.000,00	26.150.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	26.150.000,00	26.150.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.150.000,00	26.150.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0011	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0011.5.1	BELANJA OPERASI	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0015	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	401.363.000,00	401.363.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0015.5.1	BELANJA OPERASI	401.363.000,00	401.363.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0015.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	401.363.000,00	401.363.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0017	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	17.450.000,00	17.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0017.5.1	BELANJA OPERASI	17.450.000,00	17.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0017.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.450.000,00	17.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0020	PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	12.275.000,00	12.275.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0020.5.1	BELANJA OPERASI	12.275.000,00	12.275.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0020.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.275.000,00	12.275.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0025	PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	66.640.000,00	64.040.000,00	(2.600.000,00)	96,10	
1.02.02.2.02.0025.5.1	BELANJA OPERASI	66.640.000,00	64.040.000,00	(2.600.000,00)	96,10	
1.02.02.2.02.0025.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.640.000,00	64.040.000,00	(2.600.000,00)	96,10	
1.02.02.2.02.0033	OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	208.598.520,00	208.522.694,00	(75.826,00)	99,96	
1.02.02.2.02.0033.5.1	BELANJA OPERASI	208.598.520,00	208.522.694,00	(75.826,00)	99,96	
1.02.02.2.02.0033.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.598.520,00	208.522.694,00	(75.826,00)	99,96	
1.02.02.2.02.0034	OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.2.02.0034.5.1	BELANJA OPERASI	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0034.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0036	INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0036.5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0036.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040.5.1	BELANJA OPERASI	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0041	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	1.200.000,00	150.000,00	(1.050.000,00)	12,50	
1.02.02.2.02.0041.5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	150.000,00	(1.050.000,00)	12,50	
1.02.02.2.02.0041.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	150.000,00	(1.050.000,00)	12,50	
1.02.02.2.02.0044	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044.5.1	BELANJA OPERASI	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0046	PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	130.700.000,00	130.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0046.5.1	BELANJA OPERASI	130.700.000,00	130.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0046.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.700.000,00	130.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	24.675.000,00	24.675.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03	PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.675.000,00	24.675.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03.0001	BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	24.675.000,00	24.675.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	24.675.000,00	24.675.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.675.000,00	24.675.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	3.890.014.985,00	3.638.692.688,00	(251.322.297,00)	93,54	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.890.014.985,00)	(933.101.297,00)	2.956.913.688,00	23,99	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(3.890.014.985,00)	(933.101.297,00)	2.956.913.688,00	23,99	





1.02.0.00.0.00.02.0000

DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS SINDANG BARANG



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Satuan Kerja : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0016 PUSKESMAS SINDANG BARANG

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	3.488.817.239,00	3.488.817.239,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	3.392.514.829,00	3.392.514.829,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	96.302.410,00	96.302.410,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	0,00	3.488.817.239,00	3.488.817.239,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH					
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.575.238.663,00	3.484.773.412,00	(1.090.465.251,00)	76,17	
1.02.01.2.10	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	4.575.238.663,00	3.484.773.412,00	(1.090.465.251,00)	76,17	
1.02.01.2.10.0001	PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	4.575.238.663,00	3.484.773.412,00	(1.090.465.251,00)	76,17	
1.02.01.2.10.0001.5.1	BELANJA OPERASI	4.400.370.567,00	3.400.795.562,00	(999.575.005,00)	77,28	
1.02.01.2.10.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	3.001.424.619,00	2.237.614.553,00	(763.810.066,00)	74,55	
1.02.01.2.10.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.398.945.948,00	1.163.181.009,00	(235.764.939,00)	83,15	
1.02.01.2.10.0001.5.2	BELANJA MODAL	174.868.096,00	83.977.850,00	(90.890.246,00)	48,02	
1.02.01.2.10.0001.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	174.868.096,00	83.977.850,00	(90.890.246,00)	48,02	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.255.632.520,00	1.088.000.000,00	(167.632.520,00)	86,65	
1.02.02.2.02	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.255.632.520,00	1.088.000.000,00	(167.632.520,00)	86,65	
1.02.02.2.02.0001	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0005	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0011	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0011.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	50,00	
1.02.02.2.02.0012.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	50,00	
1.02.02.2.02.0012.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	50,00	
1.02.02.2.02.0015	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	533.159.000,00	388.200.000,00	(144.959.000,00)	72,81	
1.02.02.2.02.0015.5.1	BELANJA OPERASI	533.159.000,00	388.200.000,00	(144.959.000,00)	72,81	
1.02.02.2.02.0015.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	533.159.000,00	388.200.000,00	(144.959.000,00)	72,81	
1.02.02.2.02.0017	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	22.950.000,00	22.950.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0017.5.1	BELANJA OPERASI	22.950.000,00	22.950.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0017.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.950.000,00	22.950.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0020	PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	17.575.000,00	17.475.000,00	(100.000,00)	99,43	
1.02.02.2.02.0020.5.1	BELANJA OPERASI	17.575.000,00	17.475.000,00	(100.000,00)	99,43	
1.02.02.2.02.0020.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.575.000,00	17.475.000,00	(100.000,00)	99,43	
1.02.02.2.02.0025	PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	96.440.000,00	91.640.000,00	(4.800.000,00)	95,02	
1.02.02.2.02.0025.5.1	BELANJA OPERASI	96.440.000,00	91.640.000,00	(4.800.000,00)	95,02	
1.02.02.2.02.0025.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.440.000,00	91.640.000,00	(4.800.000,00)	95,02	
1.02.02.2.02.0033	OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	279.233.520,00	279.110.000,00	(123.520,00)	99,96	
1.02.02.2.02.0033.5.1	BELANJA OPERASI	279.233.520,00	279.110.000,00	(123.520,00)	99,96	
1.02.02.2.02.0033.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	279.233.520,00	279.110.000,00	(123.520,00)	99,96	
1.02.02.2.02.0034	OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.2.02.0034.5.1	BELANJA OPERASI	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0034.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0036	INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	50,00	
1.02.02.2.02.0036.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	50,00	
1.02.02.2.02.0036.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	50,00	
1.02.02.2.02.0040	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0041	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	3.900.000,00	900.000,00	(3.000.000,00)	23,08	
1.02.02.2.02.0041.5.1	BELANJA OPERASI	3.900.000,00	900.000,00	(3.000.000,00)	23,08	
1.02.02.2.02.0041.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	900.000,00	(3.000.000,00)	23,08	
1.02.02.2.02.0044	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044.5.1	BELANJA OPERASI	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0046	PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	208.400.000,00	196.250.000,00	(12.150.000,00)	94,17	
1.02.02.2.02.0046.5.1	BELANJA OPERASI	208.400.000,00	196.250.000,00	(12.150.000,00)	94,17	
1.02.02.2.02.0046.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.400.000,00	196.250.000,00	(12.150.000,00)	94,17	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	38.075.000,00	38.075.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03	PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.075.000,00	38.075.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03.0001	BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	38.075.000,00	38.075.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	38.075.000,00	38.075.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.075.000,00	38.075.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	5.868.946.183,00	4.610.848.412,00	(1.258.097.771,00)	78,56	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.868.946.183,00)	(1.122.031.173,00)	4.746.915.010,00	19,12	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(5.868.946.183,00)	(1.122.031.173,00)	4.746.915.010,00	19,12	





1.02.0.00.0.00.02.0000

**DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BOGOR UTARA**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Satuan Kerja : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0017 PUSKESMAS BOGOR UTARA

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	3.728.855.893,00	3.728.855.893,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	3.672.242.535,00	3.672.242.535,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	56.613.358,00	56.613.358,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	0,00	3.728.855.893,00	3.728.855.893,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH					
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.680.529.604,00	3.726.844.965,00	(953.684.639,00)	79,62	
1.02.01.2.10	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	4.680.529.604,00	3.726.844.965,00	(953.684.639,00)	79,62	
1.02.01.2.10.0001	PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	4.680.529.604,00	3.726.844.965,00	(953.684.639,00)	79,62	
1.02.01.2.10.0001.5.1	BELANJA OPERASI	4.307.588.798,00	3.567.076.171,00	(740.512.627,00)	82,81	
1.02.01.2.10.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	2.482.629.778,00	2.103.808.900,00	(378.820.878,00)	84,74	
1.02.01.2.10.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.824.959.020,00	1.463.267.271,00	(361.691.749,00)	80,18	
1.02.01.2.10.0001.5.2	BELANJA MODAL	372.940.806,00	159.768.794,00	(213.172.012,00)	42,84	
1.02.01.2.10.0001.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	372.940.806,00	159.768.794,00	(213.172.012,00)	42,84	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	870.646.520,00	835.429.400,00	(35.217.120,00)	95,96	
1.02.02.2.02	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	870.646.520,00	835.429.400,00	(35.217.120,00)	95,96	
1.02.02.2.02.0001	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0005	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0011	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0011.5.1	BELANJA OPERASI	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0015	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	324.383.000,00	289.166.000,00	(35.217.000,00)	89,14	
1.02.02.2.02.0015.5.1	BELANJA OPERASI	324.383.000,00	289.166.000,00	(35.217.000,00)	89,14	
1.02.02.2.02.0015.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	324.383.000,00	289.166.000,00	(35.217.000,00)	89,14	
1.02.02.2.02.0017	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	17.450.000,00	17.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0017.5.1	BELANJA OPERASI	17.450.000,00	17.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0017.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.450.000,00	17.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0020	PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	15.775.000,00	15.775.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0020.5.1	BELANJA OPERASI	15.775.000,00	15.775.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0020.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.775.000,00	15.775.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0025	PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	67.290.000,00	67.290.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0025.5.1	BELANJA OPERASI	67.290.000,00	67.290.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0025.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.290.000,00	67.290.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0033	OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	209.023.520,00	209.023.400,00	(120,00)	100,00	
1.02.02.2.02.0033.5.1	BELANJA OPERASI	209.023.520,00	209.023.400,00	(120,00)	100,00	
1.02.02.2.02.0033.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.023.520,00	209.023.400,00	(120,00)	100,00	
1.02.02.2.02.0034	OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.2.02.0034.5.1	BELANJA OPERASI	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0034.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0036	INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0036.5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0036.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040.5.1	BELANJA OPERASI	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0041	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0041.5.1	BELANJA OPERASI	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0041.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044.5.1	BELANJA OPERASI	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0046	PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	140.300.000,00	140.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0046.5.1	BELANJA OPERASI	140.300.000,00	140.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0046.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.300.000,00	140.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	24.675.000,00	24.675.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03	PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.675.000,00	24.675.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03.0001	BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	24.675.000,00	24.675.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	24.675.000,00	24.675.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.675.000,00	24.675.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	5.575.851.124,00	4.586.949.365,00	(988.901.759,00)	82,26	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.575.851.124,00)	(858.093.472,00)	4.717.757.652,00	15,39	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(5.575.851.124,00)	(858.093.472,00)	4.717.757.652,00	15,39	





1.02.0.00.0.00.02.0000

**DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS TEGAL GUNDIL**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Satuan Kerja : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0018 PUSKESMAS TEGAL GUNDIL

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	2.131.013.415,00	2.131.013.415,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	2.120.285.605,00	2.120.285.605,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	10.727.810,00	10.727.810,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	0,00	2.131.013.415,00	2.131.013.415,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH					
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.831.682.347,00	2.246.806.916,00	(584.875.431,00)	79,35	
1.02.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	25.214.300,00	25.103.666,00	(110.634,00)	99,56	
1.02.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.873.200,00	4.820.800,00	(52.400,00)	98,92	
1.02.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	4.873.200,00	4.820.800,00	(52.400,00)	98,92	
1.02.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.873.200,00	4.820.800,00	(52.400,00)	98,92	
1.02.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	15.497.900,00	15.439.666,00	(58.234,00)	99,62	
1.02.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	15.497.900,00	15.439.666,00	(58.234,00)	99,62	
1.02.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.497.900,00	15.439.666,00	(58.234,00)	99,62	
1.02.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	4.843.200,00	4.843.200,00	0,00	100,00	
1.02.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	4.843.200,00	4.843.200,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.843.200,00	4.843.200,00	0,00	100,00	
1.02.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	41.011.700,00	40.709.500,00	(302.200,00)	99,26	
1.02.01.2.07.0007	PENGADAAN ASET TETAP LAINNYA	41.011.700,00	40.709.500,00	(302.200,00)	99,26	
1.02.01.2.07.0007.5.2	BELANJA MODAL	41.011.700,00	40.709.500,00	(302.200,00)	99,26	
1.02.01.2.07.0007.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.011.700,00	40.709.500,00	(302.200,00)	99,26	
1.02.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	60.948.220,00	60.188.751,00	(759.469,00)	98,75	
1.02.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	60.948.220,00	60.188.751,00	(759.469,00)	98,75	
1.02.01.2.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	60.948.220,00	60.188.751,00	(759.469,00)	98,75	
1.02.01.2.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.948.220,00	60.188.751,00	(759.469,00)	98,75	
1.02.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	14.030.000,00	14.024.850,00	(5.150,00)	99,96	
1.02.01.2.09.0007	PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA	14.030.000,00	14.024.850,00	(5.150,00)	99,96	
1.02.01.2.09.0007.5.1	BELANJA OPERASI	14.030.000,00	14.024.850,00	(5.150,00)	99,96	
1.02.01.2.09.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.030.000,00	14.024.850,00	(5.150,00)	99,96	
1.02.01.2.10	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	2.690.478.127,00	2.106.780.149,00	(583.697.978,00)	78,31	
1.02.01.2.10.0001	PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	2.690.478.127,00	2.106.780.149,00	(583.697.978,00)	78,31	
1.02.01.2.10.0001.5.1	BELANJA OPERASI	2.677.078.127,00	2.093.545.149,00	(583.532.978,00)	78,20	
1.02.01.2.10.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	2.021.923.507,00	1.478.760.165,00	(543.163.342,00)	73,14	
1.02.01.2.10.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	655.154.620,00	614.784.984,00	(40.369.636,00)	93,84	
1.02.01.2.10.0001.5.2	BELANJA MODAL	13.400.000,00	13.235.000,00	(165.000,00)	98,77	
1.02.01.2.10.0001.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.400.000,00	13.235.000,00	(165.000,00)	98,77	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	598.522.313,00	587.618.793,00	(10.903.520,00)	98,18	
1.02.02.2.01	PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.781.793,00	8.781.793,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.01.0023	PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI,, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN	8.781.793,00	8.781.793,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.01.0023.5.1	BELANJA OPERASI	8.781.793,00	8.781.793,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.01.0023.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.781.793,00	8.781.793,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	589.740.520,00	578.837.000,00	(10.903.520,00)	98,15	
1.02.02.2.02.0001	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	21.450.000,00	21.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	21.450.000,00	21.450.000,00	0,00	100,00	
2.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.450.000,00	21.450.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.2.02.0002	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0005	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	32.750.000,00	30.350.000,00	(2.400.000,00)	92,67	
1.02.02.2.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	32.750.000,00	30.350.000,00	(2.400.000,00)	92,67	
1.02.02.2.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.750.000,00	30.350.000,00	(2.400.000,00)	92,67	
1.02.02.2.02.0011	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0011.5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0015	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	146.987.000,00	140.537.000,00	(6.450.000,00)	95,61	
1.02.02.2.02.0015.5.1	BELANJA OPERASI	146.987.000,00	140.537.000,00	(6.450.000,00)	95,61	
1.02.02.2.02.0015.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.987.000,00	140.537.000,00	(6.450.000,00)	95,61	
1.02.02.2.02.0017	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0017.5.1	BELANJA OPERASI	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0017.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0020	PENGLOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	13.275.000,00	13.275.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0020.5.1	BELANJA OPERASI	13.275.000,00	13.275.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0020.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.275.000,00	13.275.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0025	PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	48.740.000,00	47.990.000,00	(750.000,00)	98,46	
1.02.02.2.02.0025.5.1	BELANJA OPERASI	48.740.000,00	47.990.000,00	(750.000,00)	98,46	
1.02.02.2.02.0025.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.740.000,00	47.990.000,00	(750.000,00)	98,46	
1.02.02.2.02.0033	OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	173.413.520,00	173.410.000,00	(3.520,00)	100,00	
1.02.02.2.02.0033.5.1	BELANJA OPERASI	173.413.520,00	173.410.000,00	(3.520,00)	100,00	
1.02.02.2.02.0033.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.413.520,00	173.410.000,00	(3.520,00)	100,00	
1.02.02.2.02.0034	OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0034.5.1	BELANJA OPERASI	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0034.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.2.02.0036	INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	800.000,00	200.000,00	(600.000,00)	25,00	
1.02.02.2.02.0036.5.1	BELANJA OPERASI	800.000,00	200.000,00	(600.000,00)	25,00	
1.02.02.2.02.0036.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	200.000,00	(600.000,00)	25,00	
1.02.02.2.02.0040	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040.5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0041	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	1.800.000,00	1.100.000,00	(700.000,00)	61,11	
1.02.02.2.02.0041.5.1	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	1.100.000,00	(700.000,00)	61,11	
1.02.02.2.02.0041.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.100.000,00	(700.000,00)	61,11	
1.02.02.2.02.0044	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044.5.1	BELANJA OPERASI	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0046	PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	117.200.000,00	117.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0046.5.1	BELANJA OPERASI	117.200.000,00	117.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0046.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.200.000,00	117.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	17.975.000,00	17.975.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03	PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.975.000,00	17.975.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03.0001	BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	17.975.000,00	17.975.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	17.975.000,00	17.975.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.975.000,00	17.975.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	3.448.179.660,00	2.852.400.709,00	(595.778.951,00)	82,72	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.448.179.660,00)	(721.387.294,00)	2.726.792.366,00	20,92	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(3.448.179.660,00)	(721.387.294,00)	2.726.792.366,00	20,92	





1.02.0.00.0.00.02.0000

DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS WARUNG JAMBU



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Satuan Kerja : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0019 PUSKESMAS WARUNG JAMBU

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	2.673.393.653,00	2.673.393.653,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	2.669.544.637,00	2.669.544.637,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	3.849.016,00	3.849.016,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	0,00	2.673.393.653,00	2.673.393.653,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH					
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.391.528.552,00	2.661.373.920,00	(730.154.632,00)	78,47	
1.02.01.2.10	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	3.391.528.552,00	2.661.373.920,00	(730.154.632,00)	78,47	
1.02.01.2.10.0001	PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	3.391.528.552,00	2.661.373.920,00	(730.154.632,00)	78,47	
1.02.01.2.10.0001.5.1	BELANJA OPERASI	3.251.273.826,00	2.596.712.270,00	(654.561.556,00)	79,87	
1.02.01.2.10.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	1.971.647.376,00	1.581.737.404,00	(389.909.972,00)	80,22	
1.02.01.2.10.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.279.626.450,00	1.014.974.866,00	(264.651.584,00)	79,32	
1.02.01.2.10.0001.5.2	BELANJA MODAL	140.254.726,00	64.661.650,00	(75.593.076,00)	46,10	
1.02.01.2.10.0001.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	140.254.726,00	64.661.650,00	(75.593.076,00)	46,10	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	738.562.520,00	677.562.118,00	(61.000.402,00)	91,74	
1.02.02.2.02	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	738.562.520,00	677.562.118,00	(61.000.402,00)	91,74	
1.02.02.2.02.0001	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	40.950.000,00	40.950.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	40.950.000,00	40.950.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.950.000,00	40.950.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0005	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	25.700.000,00	24.500.000,00	(1.200.000,00)	95,33	
1.02.02.2.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	25.700.000,00	24.500.000,00	(1.200.000,00)	95,33	
1.02.02.2.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.700.000,00	24.500.000,00	(1.200.000,00)	95,33	
1.02.02.2.02.0011	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0011.5.1	BELANJA OPERASI	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0015	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	170.099.000,00	131.663.600,00	(38.435.400,00)	77,40	
1.02.02.2.02.0015.5.1	BELANJA OPERASI	170.099.000,00	131.663.600,00	(38.435.400,00)	77,40	
1.02.02.2.02.0015.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.099.000,00	131.663.600,00	(38.435.400,00)	77,40	
1.02.02.2.02.0017	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	17.450.000,00	17.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0017.5.1	BELANJA OPERASI	17.450.000,00	17.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0017.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.450.000,00	17.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0020	PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	15.775.000,00	13.375.000,00	(2.400.000,00)	84,79	
1.02.02.2.02.0020.5.1	BELANJA OPERASI	15.775.000,00	13.375.000,00	(2.400.000,00)	84,79	
1.02.02.2.02.0020.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.775.000,00	13.375.000,00	(2.400.000,00)	84,79	
1.02.02.2.02.0025	PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	70.640.000,00	61.690.000,00	(8.950.000,00)	87,33	
1.02.02.2.02.0025.5.1	BELANJA OPERASI	70.640.000,00	61.690.000,00	(8.950.000,00)	87,33	
1.02.02.2.02.0025.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.640.000,00	61.690.000,00	(8.950.000,00)	87,33	
1.02.02.2.02.0033	OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	208.123.520,00	207.575.026,00	(548.494,00)	99,74	
1.02.02.2.02.0033.5.1	BELANJA OPERASI	208.123.520,00	207.575.026,00	(548.494,00)	99,74	
1.02.02.2.02.0033.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.123.520,00	207.575.026,00	(548.494,00)	99,74	
1.02.02.2.02.0034	OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.2.02.0034.5.1	BELANJA OPERASI	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0034.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0036	INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0036.5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0036.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040.5.1	BELANJA OPERASI	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0041	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	2.700.000,00	2.550.000,00	(150.000,00)	94,44	
1.02.02.2.02.0041.5.1	BELANJA OPERASI	2.700.000,00	2.550.000,00	(150.000,00)	94,44	
1.02.02.2.02.0041.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	2.550.000,00	(150.000,00)	94,44	
1.02.02.2.02.0044	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044.5.1	BELANJA OPERASI	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0046	PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	161.600.000,00	152.283.492,00	(9.316.508,00)	94,23	
1.02.02.2.02.0046.5.1	BELANJA OPERASI	161.600.000,00	152.283.492,00	(9.316.508,00)	94,23	
1.02.02.2.02.0046.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.600.000,00	152.283.492,00	(9.316.508,00)	94,23	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	24.675.000,00	24.375.000,00	(300.000,00)	98,78	
1.02.05.2.03	PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.675.000,00	24.375.000,00	(300.000,00)	98,78	
1.02.05.2.03.0001	BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	24.675.000,00	24.375.000,00	(300.000,00)	98,78	
1.02.05.2.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	24.675.000,00	24.375.000,00	(300.000,00)	98,78	
1.02.05.2.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.675.000,00	24.375.000,00	(300.000,00)	98,78	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	4.154.766.072,00	3.363.311.038,00	(791.455.034,00)	80,95	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.154.766.072,00)	(689.917.385,00)	3.464.848.687,00	16,61	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(4.154.766.072,00)	(689.917.385,00)	3.464.848.687,00	16,61	





1.02.0.00.0.00.02.0000

**DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS TANAH SAREAL**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Satuan Kerja : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0020 PUSKESMAS TANAH SAREAL

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	2.631.725.493,00	2.631.725.493,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	2.623.495.696,00	2.623.495.696,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	8.229.797,00	8.229.797,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	0,00	2.631.725.493,00	2.631.725.493,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH					
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.250.179.133,00	2.631.511.130,00	(618.668.003,00)	80,97	
1.02.01.2.10	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	3.250.179.133,00	2.631.511.130,00	(618.668.003,00)	80,97	
1.02.01.2.10.0001	PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	3.250.179.133,00	2.631.511.130,00	(618.668.003,00)	80,97	
1.02.01.2.10.0001.5.1	BELANJA OPERASI	3.072.081.433,00	2.500.031.230,00	(572.050.203,00)	81,38	
1.02.01.2.10.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	1.702.020.000,00	1.485.368.575,00	(216.651.425,00)	87,27	
1.02.01.2.10.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.370.061.433,00	1.014.662.655,00	(355.398.778,00)	74,06	
1.02.01.2.10.0001.5.2	BELANJA MODAL	178.097.700,00	131.479.900,00	(46.617.800,00)	73,82	
1.02.01.2.10.0001.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	178.097.700,00	131.479.900,00	(46.617.800,00)	73,82	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	319.718.520,00	315.635.000,00	(4.083.520,00)	98,72	
1.02.02.2.02	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	319.718.520,00	315.635.000,00	(4.083.520,00)	98,72	
1.02.02.2.02.0001	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0005	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0011	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0011.5.1	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	1.000.000,00	750.000,00	(250.000,00)	75,00	
1.02.02.2.02.0012.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	750.000,00	(250.000,00)	75,00	
1.02.02.2.02.0012.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	750.000,00	(250.000,00)	75,00	
1.02.02.2.02.0015	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	54.995.000,00	54.245.000,00	(750.000,00)	98,64	
1.02.02.2.02.0015.5.1	BELANJA OPERASI	54.995.000,00	54.245.000,00	(750.000,00)	98,64	
1.02.02.2.02.0015.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.995.000,00	54.245.000,00	(750.000,00)	98,64	
1.02.02.2.02.0017	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	11.950.000,00	10.750.000,00	(1.200.000,00)	89,96	
1.02.02.2.02.0017.5.1	BELANJA OPERASI	11.950.000,00	10.750.000,00	(1.200.000,00)	89,96	
1.02.02.2.02.0017.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.950.000,00	10.750.000,00	(1.200.000,00)	89,96	
1.02.02.2.02.0020	PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	9.675.000,00	8.975.000,00	(700.000,00)	92,76	
1.02.02.2.02.0020.5.1	BELANJA OPERASI	9.675.000,00	8.975.000,00	(700.000,00)	92,76	
1.02.02.2.02.0020.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.675.000,00	8.975.000,00	(700.000,00)	92,76	
1.02.02.2.02.0025	PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	22.940.000,00	22.090.000,00	(850.000,00)	96,29	
1.02.02.2.02.0025.5.1	BELANJA OPERASI	22.940.000,00	22.090.000,00	(850.000,00)	96,29	
1.02.02.2.02.0025.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.940.000,00	22.090.000,00	(850.000,00)	96,29	
1.02.02.2.02.0033	OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	142.483.520,00	142.150.000,00	(333.520,00)	99,77	
1.02.02.2.02.0033.5.1	BELANJA OPERASI	142.483.520,00	142.150.000,00	(333.520,00)	99,77	
1.02.02.2.02.0033.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.483.520,00	142.150.000,00	(333.520,00)	99,77	
1.02.02.2.02.0034	OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.2.02.0034.5.1	BELANJA OPERASI	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0034.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0036	INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0036.5.1	BELANJA OPERASI	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0036.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040.5.1	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0041	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0041.5.1	BELANJA OPERASI	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0041.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044.5.1	BELANJA OPERASI	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0046	PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0046.5.1	BELANJA OPERASI	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0046.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	11.275.000,00	9.875.000,00	(1.400.000,00)	87,58	
1.02.05.2.03	PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.275.000,00	9.875.000,00	(1.400.000,00)	87,58	
1.02.05.2.03.0001	BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	11.275.000,00	9.875.000,00	(1.400.000,00)	87,58	
1.02.05.2.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	11.275.000,00	9.875.000,00	(1.400.000,00)	87,58	
1.02.05.2.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.275.000,00	9.875.000,00	(1.400.000,00)	87,58	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	3.581.172.653,00	2.957.021.130,00	(624.151.523,00)	82,57	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.581.172.653,00)	(325.295.637,00)	3.255.877.016,00	9,08	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(3.581.172.653,00)	(325.295.637,00)	3.255.877.016,00	9,08	





1.02.0.00.0.00.02.0000

DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS PONDOK RUMPUT



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Satuan Kerja : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0021 PUSKESMAS PONDOK RUMPUT

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	1.058.988.140,00	1.058.988.140,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	1.051.734.895,00	1.051.734.895,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	7.253.245,00	7.253.245,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	0,00	1.058.988.140,00	1.058.988.140,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH					
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.312.338.334,00	1.186.855.484,00	(125.482.850,00)	90,44	
1.02.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	80.052.600,00	79.013.699,00	(1.038.901,00)	98,70	
1.02.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	22.318.200,00	21.500.324,00	(817.876,00)	96,34	
1.02.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	22.318.200,00	21.500.324,00	(817.876,00)	96,34	
1.02.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.318.200,00	21.500.324,00	(817.876,00)	96,34	
1.02.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	35.989.100,00	35.768.367,00	(220.733,00)	99,39	
1.02.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	35.989.100,00	35.768.367,00	(220.733,00)	99,39	
1.02.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.989.100,00	35.768.367,00	(220.733,00)	99,39	
1.02.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	21.745.300,00	21.745.008,00	(292,00)	100,00	
1.02.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	21.745.300,00	21.745.008,00	(292,00)	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.745.300,00	21.745.008,00	(292,00)	100,00	
1.02.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	40.993.800,00	40.020.000,00	(973.800,00)	97,62	
1.02.01.2.07.0007	PENGADAAN ASET TETAP LAINNYA	40.993.800,00	40.020.000,00	(973.800,00)	97,62	
1.02.01.2.07.0007.5.1	BELANJA OPERASI	1.388.600,00	1.383.000,00	(5.600,00)	99,60	
1.02.01.2.07.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.388.600,00	1.383.000,00	(5.600,00)	99,60	
1.02.01.2.07.0007.5.2	BELANJA MODAL	39.605.200,00	38.637.000,00	(968.200,00)	97,56	
1.02.01.2.07.0007.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.605.200,00	38.637.000,00	(968.200,00)	97,56	
1.02.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	14.664.000,00	12.960.700,00	(1.703.300,00)	88,38	
1.02.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	14.664.000,00	12.960.700,00	(1.703.300,00)	88,38	
1.02.01.2.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	14.664.000,00	12.960.700,00	(1.703.300,00)	88,38	
1.02.01.2.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.664.000,00	12.960.700,00	(1.703.300,00)	88,38	
1.02.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	31.690.000,00	30.100.800,00	(1.589.200,00)	94,99	
1.02.01.2.09.0007	PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA	31.690.000,00	30.100.800,00	(1.589.200,00)	94,99	
1.02.01.2.09.0007.5.1	BELANJA OPERASI	31.690.000,00	30.100.800,00	(1.589.200,00)	94,99	
1.02.01.2.09.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.690.000,00	30.100.800,00	(1.589.200,00)	94,99	
1.02.01.2.10	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	1.144.937.934,00	1.024.760.285,00	(120.177.649,00)	89,50	
1.02.01.2.10.0001	PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	1.144.937.934,00	1.024.760.285,00	(120.177.649,00)	89,50	
1.02.01.2.10.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.144.937.934,00	1.024.760.285,00	(120.177.649,00)	89,50	
1.02.01.2.10.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	930.518.379,00	813.313.069,00	(117.205.310,00)	87,40	
1.02.01.2.10.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	214.419.555,00	211.447.216,00	(2.972.339,00)	98,61	
1.02.01.2.10.0001.5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.2.10.0001.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	724.979.325,00	715.948.969,00	(9.030.356,00)	98,75	
1.02.02.2.01	PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	257.688.805,00	255.026.969,00	(2.661.836,00)	98,97	
1.02.02.2.01.0014	PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	27.777.900,00	26.301.597,00	(1.476.303,00)	94,69	
1.02.02.2.01.0014.5.1	BELANJA OPERASI	18.997.300,00	17.520.997,00	(1.476.303,00)	92,23	
1.02.02.2.01.0014.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.997.300,00	17.520.997,00	(1.476.303,00)	92,23	
1.02.02.2.01.0014.5.2	BELANJA MODAL	8.780.600,00	8.780.600,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.01.0014.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.780.600,00	8.780.600,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.2.01.0023	PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI,, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN	229.910.905,00	228.725.372,00	(1.185.533,00)	99,48	
1.02.02.2.01.0023.5.1	BELANJA OPERASI	229.910.905,00	228.725.372,00	(1.185.533,00)	99,48	
1.02.02.2.01.0023.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	229.910.905,00	228.725.372,00	(1.185.533,00)	99,48	
1.02.02.2.02	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	467.290.520,00	460.922.000,00	(6.368.520,00)	98,64	
1.02.02.2.02.0001	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0005	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0011	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0011.5.1	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0015	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	194.423.000,00	189.923.000,00	(4.500.000,00)	97,69	
1.02.02.2.02.0015.5.1	BELANJA OPERASI	194.423.000,00	189.923.000,00	(4.500.000,00)	97,69	
1.02.02.2.02.0015.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.423.000,00	189.923.000,00	(4.500.000,00)	97,69	
1.02.02.2.02.0017	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	11.950.000,00	11.950.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0017.5.1	BELANJA OPERASI	11.950.000,00	11.950.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0017.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.950.000,00	11.950.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0020	PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	9.775.000,00	9.775.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0020.5.1	BELANJA OPERASI	9.775.000,00	9.775.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0020.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.775.000,00	9.775.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0025	PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	26.390.000,00	26.090.000,00	(300.000,00)	98,86	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.2.02.0025.5.1	BELANJA OPERASI	26.390.000,00	26.090.000,00	(300.000,00)	98,86	
1.02.02.2.02.0025.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.390.000,00	26.090.000,00	(300.000,00)	98,86	
1.02.02.2.02.0033	OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	134.177.520,00	133.809.000,00	(368.520,00)	99,73	
1.02.02.2.02.0033.5.1	BELANJA OPERASI	134.177.520,00	133.809.000,00	(368.520,00)	99,73	
1.02.02.2.02.0033.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.177.520,00	133.809.000,00	(368.520,00)	99,73	
1.02.02.2.02.0034	OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0034.5.1	BELANJA OPERASI	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0034.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0036	INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0036.5.1	BELANJA OPERASI	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0036.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040.5.1	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0041	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	0,00	
1.02.02.2.02.0041.5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	0,00	
1.02.02.2.02.0041.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	0,00	
1.02.02.2.02.0044	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044.5.1	BELANJA OPERASI	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0046	PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	52.200.000,00	52.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0046.5.1	BELANJA OPERASI	52.200.000,00	52.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0046.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.200.000,00	52.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03	PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03.0001	BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2.048.367.659,00	1.913.854.453,00	(134.513.206,00)	93,43	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.048.367.659,00)	(854.866.313,00)	1.193.501.346,00	41,73	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.048.367.659,00)	(854.866.313,00)	1.193.501.346,00	41,73	





1.02.0.00.0.00.02.0000

DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS KEDUNG BADA



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Satuan Kerja : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0022 PUSKESMAS KEDUNG BADAK

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	2.967.068.627,00	2.967.068.627,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	2.925.399.066,00	2.925.399.066,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	41.669.561,00	41.669.561,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	0,00	2.967.068.627,00	2.967.068.627,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH					
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.057.591.208,00	2.794.383.869,00	(263.207.339,00)	91,39	
1.02.01.2.10	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	3.057.591.208,00	2.794.383.869,00	(263.207.339,00)	91,39	
1.02.01.2.10.0001	PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	3.057.591.208,00	2.794.383.869,00	(263.207.339,00)	91,39	
1.02.01.2.10.0001.5.1	BELANJA OPERASI	2.966.104.608,00	2.711.478.869,00	(254.625.739,00)	91,42	
1.02.01.2.10.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	1.852.135.569,00	1.793.107.818,00	(59.027.751,00)	96,81	
1.02.01.2.10.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.113.969.039,00	918.371.051,00	(195.597.988,00)	82,44	
1.02.01.2.10.0001.5.2	BELANJA MODAL	91.486.600,00	82.905.000,00	(8.581.600,00)	90,62	
1.02.01.2.10.0001.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91.486.600,00	82.905.000,00	(8.581.600,00)	90,62	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	890.609.520,00	872.459.520,00	(18.150.000,00)	97,96	
1.02.02.2.02	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	890.609.520,00	872.459.520,00	(18.150.000,00)	97,96	
1.02.02.2.02.0001	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0005	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	30.400.000,00	28.800.000,00	(1.600.000,00)	94,74	
1.02.02.2.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	30.400.000,00	28.800.000,00	(1.600.000,00)	94,74	
1.02.02.2.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.400.000,00	28.800.000,00	(1.600.000,00)	94,74	
1.02.02.2.02.0011	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0011.5.1	BELANJA OPERASI	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0015	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	347.411.000,00	335.561.000,00	(11.850.000,00)	96,59	
1.02.02.2.02.0015.5.1	BELANJA OPERASI	347.411.000,00	335.561.000,00	(11.850.000,00)	96,59	
1.02.02.2.02.0015.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	347.411.000,00	335.561.000,00	(11.850.000,00)	96,59	
1.02.02.2.02.0017	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	17.450.000,00	17.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0017.5.1	BELANJA OPERASI	17.450.000,00	17.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0017.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.450.000,00	17.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0020	PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	15.875.000,00	15.875.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0020.5.1	BELANJA OPERASI	15.875.000,00	15.875.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0020.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.875.000,00	15.875.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0025	PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	66.890.000,00	64.490.000,00	(2.400.000,00)	96,41	
1.02.02.2.02.0025.5.1	BELANJA OPERASI	66.890.000,00	64.490.000,00	(2.400.000,00)	96,41	
1.02.02.2.02.0025.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.890.000,00	64.490.000,00	(2.400.000,00)	96,41	
1.02.02.2.02.0033	OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	212.458.520,00	212.458.520,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0033.5.1	BELANJA OPERASI	212.458.520,00	212.458.520,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0033.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	212.458.520,00	212.458.520,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0034	OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.2.02.0034.5.1	BELANJA OPERASI	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0034.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0036	INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0036.5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0036.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040.5.1	BELANJA OPERASI	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0041	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0041.5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0041.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044.5.1	BELANJA OPERASI	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0046	PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	140.300.000,00	138.000.000,00	(2.300.000,00)	98,36	
1.02.02.2.02.0046.5.1	BELANJA OPERASI	140.300.000,00	138.000.000,00	(2.300.000,00)	98,36	
1.02.02.2.02.0046.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.300.000,00	138.000.000,00	(2.300.000,00)	98,36	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	24.675.000,00	24.675.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03	PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.675.000,00	24.675.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03.0001	BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	24.675.000,00	24.675.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	24.675.000,00	24.675.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.675.000,00	24.675.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	3.972.875.728,00	3.691.518.389,00	(281.357.339,00)	92,92	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.972.875.728,00)	(724.449.762,00)	3.248.425.966,00	18,23	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(3.972.875.728,00)	(724.449.762,00)	3.248.425.966,00	18,23	





1.02.0.00.0.00.02.0000

DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS KAYU MANIS



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Satuan Kerja : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0023 PUSKESMAS KAYU MANIS

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	2.586.088.924,00	2.586.088.924,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	2.564.318.930,00	2.564.318.930,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	21.769.994,00	21.769.994,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	0,00	2.586.088.924,00	2.586.088.924,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH					
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.988.086.187,00	2.586.623.467,00	(401.462.720,00)	86,56	
1.02.01.2.10	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	2.988.086.187,00	2.586.623.467,00	(401.462.720,00)	86,56	
1.02.01.2.10.0001	PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	2.988.086.187,00	2.586.623.467,00	(401.462.720,00)	86,56	
1.02.01.2.10.0001.5.1	BELANJA OPERASI	2.829.124.505,00	2.522.208.367,00	(306.916.138,00)	89,15	
1.02.01.2.10.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	1.650.760.000,00	1.648.010.329,00	(2.749.671,00)	99,83	
1.02.01.2.10.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.178.364.505,00	874.198.038,00	(304.166.467,00)	74,19	
1.02.01.2.10.0001.5.2	BELANJA MODAL	158.961.682,00	64.415.100,00	(94.546.582,00)	40,52	
1.02.01.2.10.0001.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	158.961.682,00	64.415.100,00	(94.546.582,00)	40,52	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	814.030.520,00	799.073.800,00	(14.956.720,00)	98,16	
1.02.02.2.02	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	814.030.520,00	799.073.800,00	(14.956.720,00)	98,16	
1.02.02.2.02.0001	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	35.100.000,00	35.100.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	35.100.000,00	35.100.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.100.000,00	35.100.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0005	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	42.450.000,00	42.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	42.450.000,00	42.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.450.000,00	42.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0011	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0011.5.1	BELANJA OPERASI	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0015	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	258.947.000,00	247.280.500,00	(11.666.500,00)	95,49	
1.02.02.2.02.0015.5.1	BELANJA OPERASI	258.947.000,00	247.280.500,00	(11.666.500,00)	95,49	
1.02.02.2.02.0015.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	258.947.000,00	247.280.500,00	(11.666.500,00)	95,49	
1.02.02.2.02.0017	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	17.450.000,00	17.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0017.5.1	BELANJA OPERASI	17.450.000,00	17.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0017.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.450.000,00	17.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0020	PENGLOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	15.490.000,00	15.240.000,00	(250.000,00)	98,39	
1.02.02.2.02.0020.5.1	BELANJA OPERASI	15.490.000,00	15.240.000,00	(250.000,00)	98,39	
1.02.02.2.02.0020.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.490.000,00	15.240.000,00	(250.000,00)	98,39	
1.02.02.2.02.0025	PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	77.490.000,00	77.340.000,00	(150.000,00)	99,81	
1.02.02.2.02.0025.5.1	BELANJA OPERASI	77.490.000,00	77.340.000,00	(150.000,00)	99,81	
1.02.02.2.02.0025.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.490.000,00	77.340.000,00	(150.000,00)	99,81	
1.02.02.2.02.0033	OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	205.028.520,00	203.238.300,00	(1.790.220,00)	99,13	
1.02.02.2.02.0033.5.1	BELANJA OPERASI	205.028.520,00	203.238.300,00	(1.790.220,00)	99,13	
1.02.02.2.02.0033.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.028.520,00	203.238.300,00	(1.790.220,00)	99,13	
1.02.02.2.02.0034	OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.2.02.0034.5.1	BELANJA OPERASI	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0034.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0036	INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0036.5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0036.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040.5.1	BELANJA OPERASI	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0041	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0041.5.1	BELANJA OPERASI	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0041.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0046	PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	135.500.000,00	134.400.000,00	(1.100.000,00)	99,19	
1.02.02.2.02.0046.5.1	BELANJA OPERASI	135.500.000,00	134.400.000,00	(1.100.000,00)	99,19	
1.02.02.2.02.0046.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.500.000,00	134.400.000,00	(1.100.000,00)	99,19	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	24.675.000,00	24.625.000,00	(50.000,00)	99,80	
1.02.05.2.03	PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.675.000,00	24.625.000,00	(50.000,00)	99,80	
1.02.05.2.03.0001	BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	24.675.000,00	24.625.000,00	(50.000,00)	99,80	
1.02.05.2.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	24.675.000,00	24.625.000,00	(50.000,00)	99,80	
1.02.05.2.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.675.000,00	24.625.000,00	(50.000,00)	99,80	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	3.826.791.707,00	3.410.322.267,00	(416.469.440,00)	89,12	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.826.791.707,00)	(824.233.343,00)	3.002.558.364,00	21,54	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(3.826.791.707,00)	(824.233.343,00)	3.002.558.364,00	21,54	





1.02.0.00.0.00.02.0000

**DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MEKARWANGI**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Satuan Kerja : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0024 PUSKESMAS MEKARWANGI

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	3.468.539.194,00	3.468.539.194,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	3.412.892.836,00	3.412.892.836,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	55.646.358,00	55.646.358,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	0,00	3.468.539.194,00	3.468.539.194,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH					
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.228.650.936,00	3.216.651.559,00	(11.999.377,00)	99,63	
1.02.01.2.10	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	3.228.650.936,00	3.216.651.559,00	(11.999.377,00)	99,63	
1.02.01.2.10.0001	PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	3.228.650.936,00	3.216.651.559,00	(11.999.377,00)	99,63	
1.02.01.2.10.0001.5.1	BELANJA OPERASI	3.186.250.936,00	3.179.061.039,00	(7.189.897,00)	99,77	
1.02.01.2.10.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	1.923.982.839,00	1.923.615.998,00	(366.841,00)	99,98	
1.02.01.2.10.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.262.268.097,00	1.255.445.041,00	(6.823.056,00)	99,46	
1.02.01.2.10.0001.5.2	BELANJA MODAL	42.400.000,00	37.590.520,00	(4.809.480,00)	88,66	
1.02.01.2.10.0001.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.400.000,00	37.590.520,00	(4.809.480,00)	88,66	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	801.022.520,00	722.933.500,00	(78.089.020,00)	90,25	
1.02.02.2.02	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	801.022.520,00	722.933.500,00	(78.089.020,00)	90,25	
1.02.02.2.02.0001	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	37.050.000,00	37.050.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	37.050.000,00	37.050.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.050.000,00	37.050.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0005	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	37.300.000,00	37.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	37.300.000,00	37.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.300.000,00	37.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0011	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0011.5.1	BELANJA OPERASI	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0015	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	262.199.000,00	184.218.500,00	(77.980.500,00)	70,26	
1.02.02.2.02.0015.5.1	BELANJA OPERASI	262.199.000,00	184.218.500,00	(77.980.500,00)	70,26	
1.02.02.2.02.0015.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.199.000,00	184.218.500,00	(77.980.500,00)	70,26	
1.02.02.2.02.0017	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	17.450.000,00	17.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0017.5.1	BELANJA OPERASI	17.450.000,00	17.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0017.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.450.000,00	17.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0020	PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	12.275.000,00	12.175.000,00	(100.000,00)	99,19	
1.02.02.2.02.0020.5.1	BELANJA OPERASI	12.275.000,00	12.175.000,00	(100.000,00)	99,19	
1.02.02.2.02.0020.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.275.000,00	12.175.000,00	(100.000,00)	99,19	
1.02.02.2.02.0025	PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	60.340.000,00	60.340.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0025.5.1	BELANJA OPERASI	60.340.000,00	60.340.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0025.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.340.000,00	60.340.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0033	OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	213.883.520,00	213.875.000,00	(8.520,00)	100,00	
1.02.02.2.02.0033.5.1	BELANJA OPERASI	213.883.520,00	213.875.000,00	(8.520,00)	100,00	
1.02.02.2.02.0033.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	213.883.520,00	213.875.000,00	(8.520,00)	100,00	
1.02.02.2.02.0034	OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.2.02.0034.5.1	BELANJA OPERASI	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0034.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0036	INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0036.5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0036.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040.5.1	BELANJA OPERASI	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0041	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0041.5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0041.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044.5.1	BELANJA OPERASI	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0046	PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	132.800.000,00	132.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0046.5.1	BELANJA OPERASI	132.800.000,00	132.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0046.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.800.000,00	132.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	24.675.000,00	24.675.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03	PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.675.000,00	24.675.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03.0001	BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	24.675.000,00	24.675.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	24.675.000,00	24.675.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.675.000,00	24.675.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	4.054.348.456,00	3.964.260.059,00	(90.088.397,00)	97,78	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.054.348.456,00)	(495.720.865,00)	3.558.627.591,00	12,23	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(4.054.348.456,00)	(495.720.865,00)	3.558.627.591,00	12,23	





1.02.0.00.0.00.02.0000

**DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MULYAHARJA**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Satuan Kerja : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0025 PUSKESMAS MULYAHARJA

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	1.966.196.571,00	1.966.196.571,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	1.962.519.728,00	1.962.519.728,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	3.676.843,00	3.676.843,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	0,00	1.966.196.571,00	1.966.196.571,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH					
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.399.296.947,00	2.104.903.478,00	(294.393.469,00)	87,73	
1.02.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	40.129.800,00	40.073.867,00	(55.933,00)	99,86	
1.02.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	40.129.800,00	40.073.867,00	(55.933,00)	99,86	
1.02.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	40.129.800,00	40.073.867,00	(55.933,00)	99,86	
1.02.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.129.800,00	40.073.867,00	(55.933,00)	99,86	
1.02.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	48.871.100,00	48.600.000,00	(271.100,00)	99,45	
1.02.01.2.07.0007	PENGADAAN ASET TETAP LAINNYA	48.871.100,00	48.600.000,00	(271.100,00)	99,45	
1.02.01.2.07.0007.5.2	BELANJA MODAL	48.871.100,00	48.600.000,00	(271.100,00)	99,45	
1.02.01.2.07.0007.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.871.100,00	48.600.000,00	(271.100,00)	99,45	
1.02.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	37.699.100,00	31.627.895,00	(6.071.205,00)	83,90	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	37.699.100,00	31.627.895,00	(6.071.205,00)	83,90	
1.02.01.2.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	37.699.100,00	31.627.895,00	(6.071.205,00)	83,90	
1.02.01.2.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.699.100,00	31.627.895,00	(6.071.205,00)	83,90	
1.02.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	23.300.000,00	23.084.000,00	(216.000,00)	99,07	
1.02.01.2.09.0007	PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA	23.300.000,00	23.084.000,00	(216.000,00)	99,07	
1.02.01.2.09.0007.5.1	BELANJA OPERASI	23.300.000,00	23.084.000,00	(216.000,00)	99,07	
1.02.01.2.09.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.300.000,00	23.084.000,00	(216.000,00)	99,07	
1.02.01.2.10	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	2.249.296.947,00	1.961.517.716,00	(287.779.231,00)	87,21	
1.02.01.2.10.0001	PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	2.249.296.947,00	1.961.517.716,00	(287.779.231,00)	87,21	
1.02.01.2.10.0001.5.1	BELANJA OPERASI	2.181.233.634,00	1.961.517.716,00	(219.715.918,00)	89,93	
1.02.01.2.10.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	1.485.166.052,00	1.434.199.916,00	(50.966.136,00)	96,57	
1.02.01.2.10.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	696.067.582,00	527.317.800,00	(168.749.782,00)	75,76	
1.02.01.2.10.0001.5.2	BELANJA MODAL	68.063.313,00	0,00	(68.063.313,00)	0,00	
1.02.01.2.10.0001.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.063.313,00	0,00	(68.063.313,00)	0,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	610.122.520,00	599.861.675,00	(10.260.845,00)	98,32	
1.02.02.2.02	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	610.122.520,00	599.861.675,00	(10.260.845,00)	98,32	
1.02.02.2.02.0001	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	17.550.000,00	17.550.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	17.550.000,00	17.550.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.550.000,00	17.550.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0005	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	21.400.000,00	21.200.000,00	(200.000,00)	99,07	
1.02.02.2.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	21.400.000,00	21.200.000,00	(200.000,00)	99,07	
1.02.02.2.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.400.000,00	21.200.000,00	(200.000,00)	99,07	
1.02.02.2.02.0011	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0011.5.1	BELANJA OPERASI	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0012.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.2.02.0012.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0015	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	218.219.000,00	212.882.500,00	(5.336.500,00)	97,55	
1.02.02.2.02.0015.5.1	BELANJA OPERASI	218.219.000,00	212.882.500,00	(5.336.500,00)	97,55	
1.02.02.2.02.0015.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	218.219.000,00	212.882.500,00	(5.336.500,00)	97,55	
1.02.02.2.02.0017	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0017.5.1	BELANJA OPERASI	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0017.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0020	PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	10.975.000,00	10.925.000,00	(50.000,00)	99,54	
1.02.02.2.02.0020.5.1	BELANJA OPERASI	10.975.000,00	10.925.000,00	(50.000,00)	99,54	
1.02.02.2.02.0020.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.975.000,00	10.925.000,00	(50.000,00)	99,54	
1.02.02.2.02.0025	PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	53.440.000,00	53.440.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0025.5.1	BELANJA OPERASI	53.440.000,00	53.440.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0025.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.440.000,00	53.440.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0033	OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	172.513.520,00	167.839.175,00	(4.674.345,00)	97,29	
1.02.02.2.02.0033.5.1	BELANJA OPERASI	172.513.520,00	167.839.175,00	(4.674.345,00)	97,29	
1.02.02.2.02.0033.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.513.520,00	167.839.175,00	(4.674.345,00)	97,29	
1.02.02.2.02.0034	OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0034.5.1	BELANJA OPERASI	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0034.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0036	INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0036.5.1	BELANJA OPERASI	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0036.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040.5.1	BELANJA OPERASI	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0040.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0041	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0041.5.1	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0041.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0044.5.1	BELANJA OPERASI	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02.2.02.0044.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0046	PENGLOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	83.600.000,00	83.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0046.5.1	BELANJA OPERASI	83.600.000,00	83.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.2.02.0046.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.600.000,00	83.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	17.975.000,00	17.975.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03	PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.975.000,00	17.975.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03.0001	BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	17.975.000,00	17.975.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	17.975.000,00	17.975.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.2.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.975.000,00	17.975.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	3.027.394.467,00	2.722.740.153,00	(304.654.314,00)	89,94	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.027.394.467,00)	(756.543.582,00)	2.270.850.885,00	24,99	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.027.394.467,00)	(756.543.582,00)	2.270.850.885,00	24,99	





1.02.0.00.0.00.02.0000

DINAS KESEHATAN

UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Satuan Kerja : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0026 UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	1.138.994.353,00	1.138.994.353,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	1.095.071.700,00	1.095.071.700,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	43.922.653,00	43.922.653,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	0,00	1.138.994.353,00	1.138.994.353,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH					
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.078.911.705,00	1.065.755.074,00	(13.156.631,00)	98,78	
1.02.01.2.10	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	1.078.911.705,00	1.065.755.074,00	(13.156.631,00)	98,78	
1.02.01.2.10.0001	PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	1.078.911.705,00	1.065.755.074,00	(13.156.631,00)	98,78	
1.02.01.2.10.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.078.911.705,00	1.065.755.074,00	(13.156.631,00)	98,78	
1.02.01.2.10.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.2.10.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.074.831.705,00	1.061.675.074,00	(13.156.631,00)	98,78	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	1.078.911.705,00	1.065.755.074,00	(13.156.631,00)	98,78	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.078.911.705,00)	73.239.279,00	1.152.150.984,00	(6,79)	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(1.078.911.705,00)	73.239.279,00	1.152.150.984,00	(6,79)	





1.02.0.00.0.00.03.0000

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Satuan Kerja : 1.02.0.00.0.00.03.0000 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.707.180.401,00	18.258.203.336,00	(448.977.065,00)	97,60	
1.02.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	18.707.180.401,00	18.258.203.336,00	(448.977.065,00)	97,60	
1.02.01.2.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	18.707.180.401,00	18.258.203.336,00	(448.977.065,00)	97,60	
1.02.01.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	18.707.180.401,00	18.258.203.336,00	(448.977.065,00)	97,60	
1.02.01.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	18.707.180.401,00	18.258.203.336,00	(448.977.065,00)	97,60	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	39.381.010.841,00	39.266.988.308,00	(114.022.533,00)	99,71	
1.02.02.2.01	PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	39.381.010.841,00	39.266.988.308,00	(114.022.533,00)	99,71	
1.02.02.2.01.0014	PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	39.381.010.841,00	39.266.988.308,00	(114.022.533,00)	99,71	
1.02.02.2.01.0014.5.2	BELANJA MODAL	39.381.010.841,00	39.266.988.308,00	(114.022.533,00)	99,71	
1.02.02.2.01.0014.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.381.010.841,00	39.266.988.308,00	(114.022.533,00)	99,71	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	58.088.191.242,00	57.525.191.644,00	(562.999.598,00)	99,03	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(58.088.191.242,00)	(57.525.191.644,00)	562.999.598,00	99,03	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(58.088.191.242,00)	(57.525.191.644,00)	562.999.598,00	99,03	





1.02.0.00.0.00.03.0000

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH-BLUD



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Satuan Kerja : 1.02.0.00.0.00.03.0000 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Sub Unit : 1.02.0.00.0.00.03.0001 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH-BLUD

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
1.02.0.00.0.00.03.0000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	307.789.122.704,00	319.878.216.241,24	12.089.093.537,24	103,93	
1.02.0.00.0.00.03.0000.4.1.02	Retribusi Daerah	307.789.122.704,00	319.878.216.241,24	12.089.093.537,24	103,93	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	307.789.122.704,00	319.878.216.241,24	12.089.093.537,24	103,93	
5	BELANJA DAERAH					
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	324.539.304.673,00	336.066.822.116,00	11.527.517.443,00	103,55	
1.02.02.2.02	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	324.539.304.673,00	336.066.822.116,00	11.527.517.443,00	103,55	
1.02.02.2.02.0032	OPERASIONAL PELAYANAN RUMAH SAKIT	324.539.304.673,00	336.066.822.116,00	11.527.517.443,00	103,55	
1.02.02.2.02.0032.5.1	BELANJA OPERASI	312.174.646.824,00	329.911.525.450,00	17.736.878.626,00	105,68	
1.02.02.2.02.0032.5.1.01	Belanja Pegawai	45.185.153.336,00	40.002.151.590,00	(5.183.001.746,00)	88,53	
1.02.02.2.02.0032.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	266.489.493.488,00	288.917.179.193,00	22.427.685.705,00	108,42	
1.02.02.2.02.0032.5.1.03	Belanja Bunga	500.000.000,00	992.194.667,00	492.194.667,00	198,44	
1.02.02.2.02.0032.5.2	BELANJA MODAL	12.364.657.849,00	6.155.296.666,00	(6.209.361.183,00)	49,78	
1.02.02.2.02.0032.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.364.657.849,00	6.155.296.666,00	(6.209.361.183,00)	49,78	
1.02.02.2.02.0032.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	324.539.304.673,00	336.066.822.116,00	11.527.517.443,00	103,55	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
SURPLUS / (DEFISIT)		(16.750.181.969,00)	(16.188.605.874,76)	561.576.094,24	96,65	
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
1.02.0.00.0.00.03.0000.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	126.700.000.000,00	126.700.000.000,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.03.0000.6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	126.700.000.000,00	126.700.000.000,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.03.0000.6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	126.700.000.000,00	126.700.000.000,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.03.0000.6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	126.700.000.000,00	126.700.000.000,00	0,00	
PEMBIAYAAN NETTO		0,00	0,00	0,00	0,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(16.750.181.969,00)	(16.188.605.874,76)	561.576.094,24	96,65	





1.03.0.00.0.00.04.0000

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Satuan Kerja : 1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
1.03.0.00.0.00.04.0000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	445.002.500,00	452.879.845,00	7.877.345,00	101,77	
1.03.0.00.0.00.04.0000.4.1.02	Retribusi Daerah	445.000.000,00	452.877.345,00	7.877.345,00	101,77	
1.03.0.00.0.00.04.0000.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	445.002.500,00	452.879.845,00	7.877.345,00	101,77	
5	BELANJA DAERAH					
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	48.634.167.900,00	46.265.547.623,00	(2.368.620.277,00)	95,13	
1.03.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	20.178.038.896,00	19.921.240.511,00	(256.798.385,00)	98,73	
1.03.01.2.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	20.003.978.896,00	19.778.620.511,00	(225.358.385,00)	98,87	
1.03.01.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	20.003.978.896,00	19.778.620.511,00	(225.358.385,00)	98,87	
1.03.01.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	20.003.978.896,00	19.778.620.511,00	(225.358.385,00)	98,87	
1.03.01.2.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	174.060.000,00	142.620.000,00	(31.440.000,00)	81,94	
1.03.01.2.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	174.060.000,00	142.620.000,00	(31.440.000,00)	81,94	
1.03.01.2.02.0007.5.1.01	Belanja Pegawai	117.960.000,00	86.520.000,00	(31.440.000,00)	73,35	
1.03.01.2.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.100.000,00	56.100.000,00	0,00	100,00	
1.03.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	79.151.000,00	77.148.800,00	(2.002.200,00)	97,47	
1.03.01.2.05.0002	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	79.151.000,00	77.148.800,00	(2.002.200,00)	97,47	
1.03.01.2.05.0002.5.1	BELANJA OPERASI	79.151.000,00	77.148.800,00	(2.002.200,00)	97,47	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03.01.2.05.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.151.000,00	77.148.800,00	(2.002.200,00)	97,47	
1.03.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	3.272.428.100,00	3.173.745.210,00	(98.682.890,00)	96,98	
1.03.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	99.906.600,00	99.013.000,00	(893.600,00)	99,11	
1.03.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	99.906.600,00	99.013.000,00	(893.600,00)	99,11	
1.03.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.906.600,00	99.013.000,00	(893.600,00)	99,11	
1.03.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.282.899.800,00	1.276.012.450,00	(6.887.350,00)	99,46	
1.03.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	424.530.700,00	421.917.450,00	(2.613.250,00)	99,38	
1.03.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	424.530.700,00	421.917.450,00	(2.613.250,00)	99,38	
1.03.01.2.06.0002.5.2	BELANJA MODAL	858.369.100,00	854.095.000,00	(4.274.100,00)	99,50	
1.03.01.2.06.0002.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	858.369.100,00	854.095.000,00	(4.274.100,00)	99,50	
1.03.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	650.354.700,00	645.245.900,00	(5.108.800,00)	99,21	
1.03.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	79.857.600,00	76.985.900,00	(2.871.700,00)	96,40	
1.03.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.857.600,00	76.985.900,00	(2.871.700,00)	96,40	
1.03.01.2.06.0003.5.2	BELANJA MODAL	570.497.100,00	568.260.000,00	(2.237.100,00)	99,61	
1.03.01.2.06.0003.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	570.497.100,00	568.260.000,00	(2.237.100,00)	99,61	
1.03.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	49.668.000,00	49.344.000,00	(324.000,00)	99,35	
1.03.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	49.668.000,00	49.344.000,00	(324.000,00)	99,35	
1.03.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.668.000,00	49.344.000,00	(324.000,00)	99,35	
1.03.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGAANDAN	119.869.000,00	118.975.500,00	(893.500,00)	99,25	
1.03.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	119.869.000,00	118.975.500,00	(893.500,00)	99,25	
1.03.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.869.000,00	118.975.500,00	(893.500,00)	99,25	
1.03.01.2.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	1.069.730.000,00	985.154.360,00	(84.575.640,00)	92,09	
1.03.01.2.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	1.069.730.000,00	985.154.360,00	(84.575.640,00)	92,09	
1.03.01.2.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.069.730.000,00	985.154.360,00	(84.575.640,00)	92,09	
1.03.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	14.993.882.700,00	14.130.147.000,00	(863.735.700,00)	94,24	
1.03.01.2.07.0003	PENGADAAN ALAT BESAR	14.993.882.700,00	14.130.147.000,00	(863.735.700,00)	94,24	
1.03.01.2.07.0003.5.1	BELANJA OPERASI	8.160.000,00	0,00	(8.160.000,00)	0,00	
1.03.01.2.07.0003.5.1.01	Belanja Pegawai	8.160.000,00	0,00	(8.160.000,00)	0,00	
1.03.01.2.07.0003.5.2	BELANJA MODAL	14.985.722.700,00	14.130.147.000,00	(855.575.700,00)	94,29	
1.03.01.2.07.0003.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.985.722.700,00	14.130.147.000,00	(855.575.700,00)	94,29	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.714.212.032,00	4.172.775.201,00	(541.436.831,00)	88,51	
1.03.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	736.493.488,00	510.372.701,00	(226.120.787,00)	69,30	
1.03.01.2.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	736.493.488,00	510.372.701,00	(226.120.787,00)	69,30	
1.03.01.2.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	736.493.488,00	510.372.701,00	(226.120.787,00)	69,30	
1.03.01.2.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	3.977.718.544,00	3.662.402.500,00	(315.316.044,00)	92,07	
1.03.01.2.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	3.977.718.544,00	3.662.402.500,00	(315.316.044,00)	92,07	
1.03.01.2.08.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	8.160.000,00	0,00	(8.160.000,00)	0,00	
1.03.01.2.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.969.558.544,00	3.662.402.500,00	(307.156.044,00)	92,26	
1.03.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.396.455.172,00	4.790.490.901,00	(605.964.271,00)	88,77	
1.03.01.2.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	402.732.000,00	351.436.456,00	(51.295.544,00)	87,26	
1.03.01.2.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	402.732.000,00	351.436.456,00	(51.295.544,00)	87,26	
1.03.01.2.09.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	402.732.000,00	351.436.456,00	(51.295.544,00)	87,26	
1.03.01.2.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	4.090.405.172,00	3.586.255.571,00	(504.149.601,00)	87,67	
1.03.01.2.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	4.090.405.172,00	3.586.255.571,00	(504.149.601,00)	87,67	
1.03.01.2.09.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.090.405.172,00	3.586.255.571,00	(504.149.601,00)	87,67	
1.03.01.2.09.0009	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	697.818.000,00	649.098.874,00	(48.719.126,00)	93,02	
1.03.01.2.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	697.818.000,00	649.098.874,00	(48.719.126,00)	93,02	
1.03.01.2.09.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	697.818.000,00	649.098.874,00	(48.719.126,00)	93,02	
1.03.01.2.09.0010	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	205.500.000,00	203.700.000,00	(1.800.000,00)	99,12	
1.03.01.2.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	205.500.000,00	203.700.000,00	(1.800.000,00)	99,12	
1.03.01.2.09.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.500.000,00	203.700.000,00	(1.800.000,00)	99,12	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	46.826.033.196,00	46.124.257.356,00	(701.775.840,00)	98,50	
1.03.02.2.01	PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	36.119.233.196,00	35.935.829.066,00	(183.404.130,00)	99,49	
1.03.02.2.01.0093	NORMALISASI/RESTORASI SUNGAI	1.428.582.400,00	1.403.560.000,00	(25.022.400,00)	98,25	
1.03.02.2.01.0093.5.1	BELANJA OPERASI	1.428.582.400,00	1.403.560.000,00	(25.022.400,00)	98,25	
1.03.02.2.01.0093.5.1.01	Belanja Pegawai	24.280.000,00	0,00	(24.280.000,00)	0,00	
1.03.02.2.01.0093.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.404.302.400,00	1.403.560.000,00	(742.400,00)	99,95	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03.02.2.01.0101	PENINGKATAN BANGUNAN PERKUATAN TEBING	15.556.434.845,00	15.487.099.050,00	(69.335.795,00)	99,55	
1.03.02.2.01.0101.5.1	BELANJA OPERASI	37.080.000,00	7.200.000,00	(29.880.000,00)	19,42	
1.03.02.2.01.0101.5.1.01	Belanja Pegawai	37.080.000,00	7.200.000,00	(29.880.000,00)	19,42	
1.03.02.2.01.0101.5.2	BELANJA MODAL	15.519.354.845,00	15.479.899.050,00	(39.455.795,00)	99,75	
1.03.02.2.01.0101.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.519.354.845,00	15.479.899.050,00	(39.455.795,00)	99,75	
1.03.02.2.01.0110	REHABILITASI BANGUNAN PERKUATAN TEBING	17.339.792.236,00	17.269.387.021,00	(70.405.215,00)	99,59	
1.03.02.2.01.0110.5.1	BELANJA OPERASI	2.720.000,00	2.040.000,00	(680.000,00)	75,00	
1.03.02.2.01.0110.5.1.01	Belanja Pegawai	2.720.000,00	2.040.000,00	(680.000,00)	75,00	
1.03.02.2.01.0110.5.2	BELANJA MODAL	17.337.072.236,00	17.267.347.021,00	(69.725.215,00)	99,60	
1.03.02.2.01.0110.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17.337.072.236,00	17.267.347.021,00	(69.725.215,00)	99,60	
1.03.02.2.01.0120	PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KONSTRUKSI PENGENDALI BANJIR, LAHAR, DAN PENGAMAN PANTAI	1.794.423.715,00	1.775.782.995,00	(18.640.720,00)	98,96	
1.03.02.2.01.0120.5.1	BELANJA OPERASI	1.794.423.715,00	1.775.782.995,00	(18.640.720,00)	98,96	
1.03.02.2.01.0120.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.794.423.715,00	1.775.782.995,00	(18.640.720,00)	98,96	
1.03.02.2.02	PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.706.800.000,00	10.188.428.290,00	(518.371.710,00)	95,16	
1.03.02.2.02.0021	OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN	10.706.800.000,00	10.188.428.290,00	(518.371.710,00)	95,16	
1.03.02.2.02.0021.5.1	BELANJA OPERASI	10.706.800.000,00	10.188.428.290,00	(518.371.710,00)	95,16	
1.03.02.2.02.0021.5.1.01	Belanja Pegawai	34.640.000,00	29.000.000,00	(5.640.000,00)	83,72	
1.03.02.2.02.0021.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.672.160.000,00	10.159.428.290,00	(512.731.710,00)	95,20	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	20.283.276.721,00	19.927.312.298,00	(355.964.423,00)	98,25	
1.03.05.2.01	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.283.276.721,00	19.927.312.298,00	(355.964.423,00)	98,25	
1.03.05.2.01.0022	PEMBANGUNAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) TERPUSAT SKALA PERMUKIMAN	2.274.670.000,00	2.220.908.986,00	(53.761.014,00)	97,64	
1.03.05.2.01.0022.5.1	BELANJA OPERASI	2.274.670.000,00	2.220.908.986,00	(53.761.014,00)	97,64	
1.03.05.2.01.0022.5.1.01	Belanja Pegawai	24.670.000,00	0,00	(24.670.000,00)	0,00	
1.03.05.2.01.0022.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000.000,00	2.220.908.986,00	(29.091.014,00)	98,71	
1.03.05.2.01.0027	PENINGKATAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) TERPUSAT SKALA PERMUKIMAN BERBASIS MASYARAKAT	803.922.500,00	792.182.025,00	(11.740.475,00)	98,54	
1.03.05.2.01.0027.5.1	BELANJA OPERASI	705.021.500,00	693.281.025,00	(11.740.475,00)	98,33	
1.03.05.2.01.0027.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	705.021.500,00	693.281.025,00	(11.740.475,00)	98,33	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03.05.2.01.0027.5.2	BELANJA MODAL	98.901.000,00	98.901.000,00	0,00	100,00	
1.03.05.2.01.0027.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	98.901.000,00	98.901.000,00	0,00	100,00	
1.03.05.2.01.0033	PENYEDIAAN JASA PENYEDOTAN LUMPUR TINJA	1.437.929.000,00	1.339.448.148,00	(98.480.852,00)	93,15	
1.03.05.2.01.0033.5.1	BELANJA OPERASI	532.020.000,00	519.846.688,00	(12.173.312,00)	97,71	
1.03.05.2.01.0033.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	532.020.000,00	519.846.688,00	(12.173.312,00)	97,71	
1.03.05.2.01.0033.5.2	BELANJA MODAL	905.909.000,00	819.601.460,00	(86.307.540,00)	90,47	
1.03.05.2.01.0033.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	905.909.000,00	819.601.460,00	(86.307.540,00)	90,47	
1.03.05.2.01.0038	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD)	1.226.680.000,00	1.188.354.245,00	(38.325.755,00)	96,88	
1.03.05.2.01.0038.5.1	BELANJA OPERASI	1.226.680.000,00	1.188.354.245,00	(38.325.755,00)	96,88	
1.03.05.2.01.0038.5.1.01	Belanja Pegawai	22.920.000,00	15.280.000,00	(7.640.000,00)	66,67	
1.03.05.2.01.0038.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.203.760.000,00	1.173.074.245,00	(30.685.755,00)	97,45	
1.03.05.2.01.0039	PENYEDIAAN SUB SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) SETEMPAT	14.540.075.221,00	14.386.418.894,00	(153.656.327,00)	98,94	
1.03.05.2.01.0039.5.1	BELANJA OPERASI	14.540.075.221,00	14.386.418.894,00	(153.656.327,00)	98,94	
1.03.05.2.01.0039.5.1.01	Belanja Pegawai	19.200.000,00	0,00	(19.200.000,00)	0,00	
1.03.05.2.01.0039.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.520.875.221,00	14.386.418.894,00	(134.456.327,00)	99,07	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	22.581.543.051,00	22.361.375.604,00	(220.167.447,00)	99,03	
1.03.06.2.01	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.581.543.051,00	22.361.375.604,00	(220.167.447,00)	99,03	
1.03.06.2.01.0024	PENINGKATAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN	10.214.985.450,00	10.089.565.799,00	(125.419.651,00)	98,77	
1.03.06.2.01.0024.5.1	BELANJA OPERASI	8.160.000,00	6.800.000,00	(1.360.000,00)	83,33	
1.03.06.2.01.0024.5.1.01	Belanja Pegawai	8.160.000,00	6.800.000,00	(1.360.000,00)	83,33	
1.03.06.2.01.0024.5.2	BELANJA MODAL	10.206.825.450,00	10.082.765.799,00	(124.059.651,00)	98,78	
1.03.06.2.01.0024.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.206.825.450,00	10.082.765.799,00	(124.059.651,00)	98,78	
1.03.06.2.01.0029	PEMBANGUNAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN	9.297.086.891,00	9.231.388.190,00	(65.698.701,00)	99,29	
1.03.06.2.01.0029.5.1	BELANJA OPERASI	8.160.000,00	0,00	(8.160.000,00)	0,00	
1.03.06.2.01.0029.5.1.01	Belanja Pegawai	8.160.000,00	0,00	(8.160.000,00)	0,00	
1.03.06.2.01.0029.5.2	BELANJA MODAL	9.288.926.891,00	9.231.388.190,00	(57.538.701,00)	99,38	
1.03.06.2.01.0029.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.288.926.891,00	9.231.388.190,00	(57.538.701,00)	99,38	
1.03.06.2.01.0030	PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SISTEM DRAINASE PERKOTAAN	1.094.306.710,00	1.073.907.240,00	(20.399.470,00)	98,14	
1.03.06.2.01.0030.5.1	BELANJA OPERASI	1.094.306.710,00	1.073.907.240,00	(20.399.470,00)	98,14	
1.03.06.2.01.0030.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.094.306.710,00	1.073.907.240,00	(20.399.470,00)	98,14	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03.06.2.01.0031	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN	1.975.164.000,00	1.966.514.375,00	(8.649.625,00)	99,56	
1.03.06.2.01.0031.5.1	BELANJA OPERASI	1.975.164.000,00	1.966.514.375,00	(8.649.625,00)	99,56	
1.03.06.2.01.0031.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.975.164.000,00	1.966.514.375,00	(8.649.625,00)	99,56	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	9.680.007.448,00	9.196.400.116,00	(483.607.332,00)	95,00	
1.03.08.2.01	PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	9.680.007.448,00	9.196.400.116,00	(483.607.332,00)	95,00	
1.03.08.2.01.0021	PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN, PELESTARIAAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.818.835.448,00	8.672.184.791,00	(146.650.657,00)	98,34	
1.03.08.2.01.0021.5.1	BELANJA OPERASI	145.528.000,00	122.154.000,00	(23.374.000,00)	83,94	
1.03.08.2.01.0021.5.1.01	Belanja Pegawai	45.840.000,00	22.920.000,00	(22.920.000,00)	50,00	
1.03.08.2.01.0021.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.688.000,00	99.234.000,00	(454.000,00)	99,54	
1.03.08.2.01.0021.5.2	BELANJA MODAL	8.673.307.448,00	8.550.030.791,00	(123.276.657,00)	98,58	
1.03.08.2.01.0021.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.673.307.448,00	8.550.030.791,00	(123.276.657,00)	98,58	
1.03.08.2.01.0022	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG	105.172.000,00	101.215.325,00	(3.956.675,00)	96,24	
1.03.08.2.01.0022.5.1	BELANJA OPERASI	2.040.000,00	1.360.000,00	(680.000,00)	66,67	
1.03.08.2.01.0022.5.1.01	Belanja Pegawai	2.040.000,00	1.360.000,00	(680.000,00)	66,67	
1.03.08.2.01.0022.5.2	BELANJA MODAL	103.132.000,00	99.855.325,00	(3.276.675,00)	96,82	
1.03.08.2.01.0022.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	103.132.000,00	99.855.325,00	(3.276.675,00)	96,82	
1.03.08.2.01.0023	PENYELENGGARAAN PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG), SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF), SURAT BUKTI KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG (SBKBG), RENCANA TEKNIS PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG (RTB), TIM PROFESI AHLI (TPA), TIM PENILAI TEKNIS (TPT), PENILIK, DAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG MELALUI SIMBG	756.000.000,00	423.000.000,00	(333.000.000,00)	55,95	
1.03.08.2.01.0023.5.1	BELANJA OPERASI	756.000.000,00	423.000.000,00	(333.000.000,00)	55,95	
1.03.08.2.01.0023.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	756.000.000,00	423.000.000,00	(333.000.000,00)	55,95	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	84.161.447.405,00	80.296.598.812,00	(3.864.848.593,00)	95,41	
1.03.10.2.01	PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA	84.161.447.405,00	80.296.598.812,00	(3.864.848.593,00)	95,41	
1.03.10.2.01.0029	PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN SERTA PERENCANAAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN	6.669.961.070,00	4.051.362.920,00	(2.618.598.150,00)	60,74	
1.03.10.2.01.0029.5.1	BELANJA OPERASI	3.638.299.850,00	3.293.492.700,00	(344.807.150,00)	90,52	
1.03.10.2.01.0029.5.1.01	Belanja Pegawai	35.680.000,00	35.000.000,00	(680.000,00)	98,09	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03.10.2.01.0029.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.602.619.850,00	3.258.492.700,00	(344.127.150,00)	90,45	
1.03.10.2.01.0029.5.2	BELANJA MODAL	3.031.661.220,00	757.870.220,00	(2.273.791.000,00)	25,00	
1.03.10.2.01.0029.5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.834.412.000,00	560.621.000,00	(2.273.791.000,00)	19,78	
1.03.10.2.01.0029.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	197.249.220,00	197.249.220,00	0,00	100,00	
1.03.10.2.01.0032	PEMBANGUNAN JALAN	2.619.885.750,00	2.428.808.330,00	(191.077.420,00)	92,71	
1.03.10.2.01.0032.5.1	BELANJA OPERASI	36.250.000,00	35.500.000,00	(750.000,00)	97,93	
1.03.10.2.01.0032.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.250.000,00	35.500.000,00	(750.000,00)	97,93	
1.03.10.2.01.0032.5.2	BELANJA MODAL	2.583.635.750,00	2.393.308.330,00	(190.327.420,00)	92,63	
1.03.10.2.01.0032.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.583.635.750,00	2.393.308.330,00	(190.327.420,00)	92,63	
1.03.10.2.01.0033	REKONSTRUKSI JALAN	24.829.187.893,00	24.511.186.169,00	(318.001.724,00)	98,72	
1.03.10.2.01.0033.5.1	BELANJA OPERASI	8.160.000,00	5.440.000,00	(2.720.000,00)	66,67	
1.03.10.2.01.0033.5.1.01	Belanja Pegawai	8.160.000,00	5.440.000,00	(2.720.000,00)	66,67	
1.03.10.2.01.0033.5.2	BELANJA MODAL	24.821.027.893,00	24.505.746.169,00	(315.281.724,00)	98,73	
1.03.10.2.01.0033.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	24.821.027.893,00	24.505.746.169,00	(315.281.724,00)	98,73	
1.03.10.2.01.0034	PEMELIHARAAN BERKALA JALAN	18.231.670.386,00	18.122.934.707,00	(108.735.679,00)	99,40	
1.03.10.2.01.0034.5.2	BELANJA MODAL	18.231.670.386,00	18.122.934.707,00	(108.735.679,00)	99,40	
1.03.10.2.01.0034.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	18.231.670.386,00	18.122.934.707,00	(108.735.679,00)	99,40	
1.03.10.2.01.0038	PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN	1.625.000.000,00	1.616.906.727,00	(8.093.273,00)	99,50	
1.03.10.2.01.0038.5.1	BELANJA OPERASI	1.625.000.000,00	1.616.906.727,00	(8.093.273,00)	99,50	
1.03.10.2.01.0038.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.625.000.000,00	1.616.906.727,00	(8.093.273,00)	99,50	
1.03.10.2.01.0039	REHABILITASI JEMBATAN	3.165.573.806,00	3.067.727.755,00	(97.846.051,00)	96,91	
1.03.10.2.01.0039.5.2	BELANJA MODAL	3.165.573.806,00	3.067.727.755,00	(97.846.051,00)	96,91	
1.03.10.2.01.0039.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.165.573.806,00	3.067.727.755,00	(97.846.051,00)	96,91	
1.03.10.2.01.0040	PEMBANGUNAN JEMBATAN	2.020.168.500,00	1.771.686.418,00	(248.482.082,00)	87,70	
1.03.10.2.01.0040.5.1	BELANJA OPERASI	76.260.000,00	76.260.000,00	0,00	100,00	
1.03.10.2.01.0040.5.1.01	Belanja Pegawai	37.760.000,00	37.760.000,00	0,00	100,00	
1.03.10.2.01.0040.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	100,00	
1.03.10.2.01.0040.5.2	BELANJA MODAL	1.943.908.500,00	1.695.426.418,00	(248.482.082,00)	87,22	
1.03.10.2.01.0040.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.943.908.500,00	1.695.426.418,00	(248.482.082,00)	87,22	
1.03.10.2.01.0046	PEMELIHARAAN RUTIN JALAN	25.000.000.000,00	24.725.985.786,00	(274.014.214,00)	98,90	
1.03.10.2.01.0046.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000.000,00	24.725.985.786,00	(274.014.214,00)	98,90	
1.03.10.2.01.0046.5.1.01	Belanja Pegawai	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03.10.2.01.0046.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.956.800.000,00	24.682.785.786,00	(274.014.214,00)	98,90	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	435.994.550,00	379.504.300,00	(56.490.250,00)	87,04	
1.03.11.2.01	PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI	200.000.000,00	170.210.300,00	(29.789.700,00)	85,11	
1.03.11.2.01.0010	FASILITASI SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI KUALIFIKASI JABATAN OPERATOR DAN TEKNISI ATAU ANALIS	200.000.000,00	170.210.300,00	(29.789.700,00)	85,11	
1.03.11.2.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	170.210.300,00	(29.789.700,00)	85,11	
1.03.11.2.01.0010.5.1.01	Belanja Pegawai	3.380.000,00	680.000,00	(2.700.000,00)	20,12	
1.03.11.2.01.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	196.620.000,00	169.530.300,00	(27.089.700,00)	86,22	
1.03.11.2.02	PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	160.994.550,00	159.340.500,00	(1.654.050,00)	98,97	
1.03.11.2.02.0013	PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI JASA KONSTRUKSI CAKUPAN KABUPATEN/KOTA	160.994.550,00	159.340.500,00	(1.654.050,00)	98,97	
1.03.11.2.02.0013.5.1	BELANJA OPERASI	160.994.550,00	159.340.500,00	(1.654.050,00)	98,97	
1.03.11.2.02.0013.5.1.01	Belanja Pegawai	1.360.000,00	0,00	(1.360.000,00)	0,00	
1.03.11.2.02.0013.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.634.550,00	159.340.500,00	(294.050,00)	99,82	
1.03.11.2.04	PENGAWASAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN DAN TERTIB PEMANFAATAN JASA KONSTRUKSI	75.000.000,00	49.953.500,00	(25.046.500,00)	66,60	
1.03.11.2.04.0006	PEMBINAAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN, DAN TERTIB PEMANFAATAN PRODUK JASA KONSTRUKSI	75.000.000,00	49.953.500,00	(25.046.500,00)	66,60	
1.03.11.2.04.0006.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	49.953.500,00	(25.046.500,00)	66,60	
1.03.11.2.04.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	49.953.500,00	(25.046.500,00)	66,60	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	900.000.000,00	828.029.475,00	(71.970.525,00)	92,00	
1.03.12.2.01	PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA	300.000.000,00	279.750.525,00	(20.249.475,00)	93,25	
1.03.12.2.01.0005	PELAKSANAAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RTRW KABUPATEN/KOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.12.2.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.12.2.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.12.2.01.0006	PELAKSANAAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RDTR KABUPATEN/KOTA	300.000.000,00	279.750.525,00	(20.249.475,00)	93,25	
1.03.12.2.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	279.750.525,00	(20.249.475,00)	93,25	
1.03.12.2.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	279.750.525,00	(20.249.475,00)	93,25	
1.03.12.2.01.0012	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEDOMAN BIDANG PENATAAN RUANG	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.12.2.01.0012.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.12.2.01.0012.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03.12.2.03	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	300.000.000,00	269.619.000,00	(30.381.000,00)	89,87	
1.03.12.2.03.0005	PELAKSANAAN SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	300.000.000,00	269.619.000,00	(30.381.000,00)	89,87	
1.03.12.2.03.0005.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	269.619.000,00	(30.381.000,00)	89,87	
1.03.12.2.03.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	269.619.000,00	(30.381.000,00)	89,87	
1.03.12.2.04	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	300.000.000,00	278.659.950,00	(21.340.050,00)	92,89	
1.03.12.2.04.0004	KOORDINASI PELAKSANAAN PENATAAN RUANG	300.000.000,00	278.659.950,00	(21.340.050,00)	92,89	
1.03.12.2.04.0004.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	278.659.950,00	(21.340.050,00)	92,89	
1.03.12.2.04.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	278.659.950,00	(21.340.050,00)	92,89	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	233.502.470.271,00	225.379.025.584,00	(8.123.444.687,00)	96,52	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(233.057.467.771,00)	(224.926.145.739,00)	8.131.322.032,00	96,51	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(233.057.467.771,00)	(224.926.145.739,00)	8.131.322.032,00	96,51	





1.04.2.11.0.00.05.0000

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Satuan Kerja : 1.04.2.11.0.00.05.0000 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
1.04.2.11.0.00.05.0000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.994.798.001,00	2.127.845.475,00	133.047.474,00	106,67	
1.04.2.11.0.00.05.0000.4.1.02	Retribusi Daerah	1.972.171.500,00	2.082.376.500,00	110.205.000,00	105,59	
1.04.2.11.0.00.05.0000.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	22.626.501,00	45.468.975,00	22.842.474,00	200,95	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.994.798.001,00	2.127.845.475,00	133.047.474,00	106,67	
5	BELANJA DAERAH					
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.449.876.912,00	39.163.078.210,00	(2.286.798.702,00)	94,48	
1.04.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	107.142.220,00	106.263.100,00	(879.120,00)	99,18	
1.04.01.2.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	5.152.800,00	5.152.800,00	0,00	100,00	
1.04.01.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	5.152.800,00	5.152.800,00	0,00	100,00	
1.04.01.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.152.800,00	5.152.800,00	0,00	100,00	
1.04.01.2.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00	
1.04.01.2.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00	
1.04.01.2.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00	
1.04.01.2.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	98.839.420,00	97.960.300,00	(879.120,00)	99,11	
1.04.01.2.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	98.839.420,00	97.960.300,00	(879.120,00)	99,11	
1.04.01.2.01.0007.5.1.01	Belanja Pegawai	11.110.000,00	11.110.000,00	0,00	100,00	
1.04.01.2.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.729.420,00	86.850.300,00	(879.120,00)	99,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.04.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	15.282.055.217,00	14.880.216.525,00	(401.838.692,00)	97,37	
1.04.01.2.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	15.155.464.317,00	14.757.825.625,00	(397.638.692,00)	97,38	
1.04.01.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	15.155.464.317,00	14.757.825.625,00	(397.638.692,00)	97,38	
1.04.01.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	15.155.464.317,00	14.757.825.625,00	(397.638.692,00)	97,38	
1.04.01.2.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	1.259.600,00	1.259.600,00	0,00	100,00	
1.04.01.2.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	1.259.600,00	1.259.600,00	0,00	100,00	
1.04.01.2.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.259.600,00	1.259.600,00	0,00	100,00	
1.04.01.2.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	125.331.300,00	121.131.300,00	(4.200.000,00)	96,65	
1.04.01.2.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	125.331.300,00	121.131.300,00	(4.200.000,00)	96,65	
1.04.01.2.02.0007.5.1.01	Belanja Pegawai	124.200.000,00	120.000.000,00	(4.200.000,00)	96,62	
1.04.01.2.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.131.300,00	1.131.300,00	0,00	100,00	
1.04.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.2.03.0006	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.2.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.2.03.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	156.338.500,00	153.898.250,00	(2.440.250,00)	98,44	
1.04.01.2.05.0002	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	156.338.500,00	153.898.250,00	(2.440.250,00)	98,44	
1.04.01.2.05.0002.5.1	BELANJA OPERASI	156.338.500,00	153.898.250,00	(2.440.250,00)	98,44	
1.04.01.2.05.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.338.500,00	153.898.250,00	(2.440.250,00)	98,44	
1.04.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	481.650.000,00	450.661.035,00	(30.988.965,00)	93,57	
1.04.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	11.987.500,00	11.927.500,00	(60.000,00)	99,50	
1.04.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	11.987.500,00	11.927.500,00	(60.000,00)	99,50	
1.04.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.987.500,00	11.927.500,00	(60.000,00)	99,50	
1.04.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	174.217.800,00	170.297.700,00	(3.920.100,00)	97,75	
1.04.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	174.217.800,00	170.297.700,00	(3.920.100,00)	97,75	
1.04.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.217.800,00	170.297.700,00	(3.920.100,00)	97,75	
1.04.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	40.428.800,00	40.333.400,00	(95.400,00)	99,76	
1.04.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	40.428.800,00	40.333.400,00	(95.400,00)	99,76	
1.04.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.428.800,00	40.333.400,00	(95.400,00)	99,76	
1.04.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	84.836.900,00	84.714.900,00	(122.000,00)	99,86	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.04.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	84.836.900,00	84.714.900,00	(122.000,00)	99,86	
1.04.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.836.900,00	84.714.900,00	(122.000,00)	99,86	
1.04.01.2.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	170.179.000,00	143.387.535,00	(26.791.465,00)	84,26	
1.04.01.2.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	170.179.000,00	143.387.535,00	(26.791.465,00)	84,26	
1.04.01.2.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.179.000,00	143.387.535,00	(26.791.465,00)	84,26	
1.04.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.880.125.024,00	1.741.414.000,00	(138.711.024,00)	92,62	
1.04.01.2.07.0001	PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	1.376.332.124,00	1.259.900.000,00	(116.432.124,00)	91,54	
1.04.01.2.07.0001.5.2	BELANJA MODAL	1.376.332.124,00	1.259.900.000,00	(116.432.124,00)	91,54	
1.04.01.2.07.0001.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.376.332.124,00	1.259.900.000,00	(116.432.124,00)	91,54	
1.04.01.2.07.0006	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	503.792.900,00	481.514.000,00	(22.278.900,00)	95,58	
1.04.01.2.07.0006.5.1	BELANJA OPERASI	16.766.400,00	16.314.000,00	(452.400,00)	97,30	
1.04.01.2.07.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.766.400,00	16.314.000,00	(452.400,00)	97,30	
1.04.01.2.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	487.026.500,00	465.200.000,00	(21.826.500,00)	95,52	
1.04.01.2.07.0006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	487.026.500,00	465.200.000,00	(21.826.500,00)	95,52	
1.04.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	18.699.781.151,00	18.387.977.370,00	(311.803.781,00)	98,33	
1.04.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.081.082.315,00	853.021.388,00	(228.060.927,00)	78,90	
1.04.01.2.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.081.082.315,00	853.021.388,00	(228.060.927,00)	78,90	
1.04.01.2.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.081.082.315,00	853.021.388,00	(228.060.927,00)	78,90	
1.04.01.2.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	17.618.698.836,00	17.534.955.982,00	(83.742.854,00)	99,52	
1.04.01.2.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	17.618.698.836,00	17.534.955.982,00	(83.742.854,00)	99,52	
1.04.01.2.08.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	70.080.000,00	70.080.000,00	0,00	100,00	
1.04.01.2.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.548.618.836,00	17.464.875.982,00	(83.742.854,00)	99,52	
1.04.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.842.784.800,00	3.442.647.930,00	(1.400.136.870,00)	71,09	
1.04.01.2.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	4.320.112.600,00	2.925.865.368,00	(1.394.247.232,00)	67,73	
1.04.01.2.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	4.320.112.600,00	2.925.865.368,00	(1.394.247.232,00)	67,73	
1.04.01.2.09.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.320.112.600,00	2.925.865.368,00	(1.394.247.232,00)	67,73	
1.04.01.2.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	162.580.000,00	162.127.550,00	(452.450,00)	99,72	
1.04.01.2.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	162.580.000,00	162.127.550,00	(452.450,00)	99,72	
1.04.01.2.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.580.000,00	162.127.550,00	(452.450,00)	99,72	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.04.01.2.09.0009	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	360.092.200,00	354.655.012,00	(5.437.188,00)	98,49	
1.04.01.2.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	360.092.200,00	354.655.012,00	(5.437.188,00)	98,49	
1.04.01.2.09.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.092.200,00	354.655.012,00	(5.437.188,00)	98,49	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	5.247.333.354,00	5.105.247.380,00	(142.085.974,00)	97,29	
1.04.02.2.01	PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	292.577.700,00	291.225.600,00	(1.352.100,00)	99,54	
1.04.02.2.01.0003	PENGUMPULAN DATA RUMAH KORBAN BENCANA KEJADIAN SEBELUMNYA YANG BELUM TERTANGANI	97.525.900,00	97.319.400,00	(206.500,00)	99,79	
1.04.02.2.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	97.525.900,00	97.319.400,00	(206.500,00)	99,79	
1.04.02.2.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.525.900,00	97.319.400,00	(206.500,00)	99,79	
1.04.02.2.01.0004	PENDATAAN TINGKAT KERUSAKAN RUMAH AKIBAT BENCANA	97.525.900,00	96.620.100,00	(905.800,00)	99,07	
1.04.02.2.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	97.525.900,00	96.620.100,00	(905.800,00)	99,07	
1.04.02.2.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.525.900,00	96.620.100,00	(905.800,00)	99,07	
1.04.02.2.01.0010	PENDATAAN DAN VERIFIKASI CALON PENERIMA RUMAH BAGI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	97.525.900,00	97.286.100,00	(239.800,00)	99,75	
1.04.02.2.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	97.525.900,00	97.286.100,00	(239.800,00)	99,75	
1.04.02.2.01.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.525.900,00	97.286.100,00	(239.800,00)	99,75	
1.04.02.2.03	PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	952.268.654,00	834.012.133,00	(118.256.521,00)	87,58	
1.04.02.2.03.0012	PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS BESERTA PSU BAGI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	952.268.654,00	834.012.133,00	(118.256.521,00)	87,58	
1.04.02.2.03.0012.5.1	BELANJA OPERASI	169.151.800,00	168.614.295,00	(537.505,00)	99,68	
1.04.02.2.03.0012.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.151.800,00	168.614.295,00	(537.505,00)	99,68	
1.04.02.2.03.0012.5.2	BELANJA MODAL	783.116.854,00	665.397.838,00	(117.719.016,00)	84,97	
1.04.02.2.03.0012.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.02.2.03.0012.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	783.116.854,00	665.397.838,00	(117.719.016,00)	84,97	
1.04.02.2.05	PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS	4.000.461.100,00	3.978.997.147,00	(21.463.953,00)	99,46	
1.04.02.2.05.0001	FASILITASI PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN PEMILIK/PENGHUNI RUMAH SUSUN	358.725.800,00	357.007.517,00	(1.718.283,00)	99,52	
1.04.02.2.05.0001.5.1	BELANJA OPERASI	358.725.800,00	357.007.517,00	(1.718.283,00)	99,52	
1.04.02.2.05.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	358.725.800,00	357.007.517,00	(1.718.283,00)	99,52	
1.04.02.2.05.0002	PENATAUSAHAAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS	3.641.735.300,00	3.621.989.630,00	(19.745.670,00)	99,46	
1.04.02.2.05.0002.5.1	BELANJA OPERASI	3.641.735.300,00	3.621.989.630,00	(19.745.670,00)	99,46	
1.04.02.2.05.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	26.520.000,00	24.310.000,00	(2.210.000,00)	91,67	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.04.02.2.05.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.615.215.300,00	3.597.679.630,00	(17.535.670,00)	99,51	
1.04.02.2.06	PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2.025.900,00	1.012.500,00	(1.013.400,00)	49,98	
1.04.02.2.06.0003	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2.025.900,00	1.012.500,00	(1.013.400,00)	49,98	
1.04.02.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	2.025.900,00	1.012.500,00	(1.013.400,00)	49,98	
1.04.02.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.025.900,00	1.012.500,00	(1.013.400,00)	49,98	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	4.984.132.900,00	4.967.652.568,00	(16.480.332,00)	99,67	
1.04.03.2.02	PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	133.283.000,00	131.843.910,00	(1.439.090,00)	98,92	
1.04.03.2.02.0004	PENYADARAN PUBLIK PENCEGAHAN TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH	77.000.000,00	76.925.910,00	(74.090,00)	99,90	
1.04.03.2.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	77.000.000,00	76.925.910,00	(74.090,00)	99,90	
1.04.03.2.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.000.000,00	76.925.910,00	(74.090,00)	99,90	
1.04.03.2.02.0012	PEMBENTUKAN/PEMBINAAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT DI PERMUKIMAN KUMUH	56.283.000,00	54.918.000,00	(1.365.000,00)	97,57	
1.04.03.2.02.0012.5.1	BELANJA OPERASI	56.283.000,00	54.918.000,00	(1.365.000,00)	97,57	
1.04.03.2.02.0012.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.283.000,00	54.918.000,00	(1.365.000,00)	97,57	
1.04.03.2.03	PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	4.850.849.900,00	4.835.808.658,00	(15.041.242,00)	99,69	
1.04.03.2.03.0007	PENDATAAN DAN VERIFIKASI PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	97.000.000,00	96.604.800,00	(395.200,00)	99,59	
1.04.03.2.03.0007.5.1	BELANJA OPERASI	97.000.000,00	96.604.800,00	(395.200,00)	99,59	
1.04.03.2.03.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.000.000,00	96.604.800,00	(395.200,00)	99,59	
1.04.03.2.03.0013	PELAKSANAAN PEMUGARAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	4.753.849.900,00	4.739.203.858,00	(14.646.042,00)	99,69	
1.04.03.2.03.0013.5.1	BELANJA OPERASI	4.753.849.900,00	4.739.203.858,00	(14.646.042,00)	99,69	
1.04.03.2.03.0013.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.753.849.900,00	4.739.203.858,00	(14.646.042,00)	99,69	
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	34.480.562.000,00	33.757.240.700,00	(723.321.300,00)	97,90	
1.04.04.2.01	PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PADA DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.480.562.000,00	33.757.240.700,00	(723.321.300,00)	97,90	
1.04.04.2.01.0001	PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI UNTUK PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH DI LUAR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	34.480.562.000,00	33.757.240.700,00	(723.321.300,00)	97,90	
1.04.04.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	34.480.562.000,00	33.757.240.700,00	(723.321.300,00)	97,90	
1.04.04.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	655.527.000,00	638.805.700,00	(16.721.300,00)	97,45	
1.04.04.2.01.0001.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	33.825.035.000,00	33.118.435.000,00	(706.600.000,00)	97,91	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	99.951.689.234,00	99.159.491.116,00	(792.198.118,00)	99,21	
1.04.05.2.01	URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN	99.951.689.234,00	99.159.491.116,00	(792.198.118,00)	99,21	
1.04.05.2.01.0001	PERENCANAAN PENYEDIAAN PSU PERUMAHAN	92.025.900,00	91.813.800,00	(212.100,00)	99,77	
1.04.05.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	92.025.900,00	91.813.800,00	(212.100,00)	99,77	
1.04.05.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.025.900,00	91.813.800,00	(212.100,00)	99,77	
1.04.05.2.01.0002	PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERUMAHAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI HUNIAN	99.717.503.334,00	98.925.517.316,00	(791.986.018,00)	99,21	
1.04.05.2.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	96.347.394.291,00	95.615.964.678,00	(731.429.613,00)	99,24	
1.04.05.2.01.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	111.600.000,00	100.440.000,00	(11.160.000,00)	90,00	
1.04.05.2.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.235.794.291,00	95.515.524.678,00	(720.269.613,00)	99,25	
1.04.05.2.01.0002.5.2	BELANJA MODAL	3.370.109.043,00	3.309.552.638,00	(60.556.405,00)	98,20	
1.04.05.2.01.0002.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.420.800,00	22.400.000,00	(20.800,00)	99,91	
1.04.05.2.01.0002.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	215.883.810,00	214.972.169,00	(911.641,00)	99,58	
1.04.05.2.01.0002.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.131.804.433,00	3.072.180.469,00	(59.623.964,00)	98,10	
1.04.05.2.01.0003	KOORDINASI DAN SINKRONISASI DALAM RANGKA PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN	142.160.000,00	142.160.000,00	0,00	100,00	
1.04.05.2.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	142.160.000,00	142.160.000,00	0,00	100,00	
1.04.05.2.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.160.000,00	142.160.000,00	0,00	100,00	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	15.024.888.733,00	14.728.328.009,00	(296.560.724,00)	98,03	
2.11.04.2.01	PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA	15.024.888.733,00	14.728.328.009,00	(296.560.724,00)	98,03	
2.11.04.2.01.0001	PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	298.637.700,00	294.684.745,00	(3.952.955,00)	98,68	
2.11.04.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	298.637.700,00	294.684.745,00	(3.952.955,00)	98,68	
2.11.04.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	298.637.700,00	294.684.745,00	(3.952.955,00)	98,68	
2.11.04.2.01.0004	PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	4.810.899.316,00	4.724.627.152,00	(86.272.164,00)	98,21	
2.11.04.2.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	4.810.899.316,00	4.724.627.152,00	(86.272.164,00)	98,21	
2.11.04.2.01.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.04.2.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.810.899.316,00	4.724.627.152,00	(86.272.164,00)	98,21	
2.11.04.2.01.0006	PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN SDM DALAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	112.009.300,00	107.932.500,00	(4.076.800,00)	96,36	
2.11.04.2.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	112.009.300,00	107.932.500,00	(4.076.800,00)	96,36	
2.11.04.2.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.009.300,00	107.932.500,00	(4.076.800,00)	96,36	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.11.04.2.01.0007	PENGLOLAAN SARANA DAN PRASARANA KEANEKARAGAMAN HAYATI	3.151.929.300,00	3.133.469.098,00	(18.460.202,00)	99,41	
2.11.04.2.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	3.139.718.300,00	3.121.410.058,00	(18.308.242,00)	99,42	
2.11.04.2.01.0007.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.04.2.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.139.718.300,00	3.121.410.058,00	(18.308.242,00)	99,42	
2.11.04.2.01.0007.5.2	BELANJA MODAL	12.211.000,00	12.059.040,00	(151.960,00)	98,76	
2.11.04.2.01.0007.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.211.000,00	12.059.040,00	(151.960,00)	98,76	
2.11.04.2.01.0008	PENGLOLAAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAINNYA	6.651.413.117,00	6.467.614.514,00	(183.798.603,00)	97,24	
2.11.04.2.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	792.084.114,00	790.355.224,00	(1.728.890,00)	99,78	
2.11.04.2.01.0008.5.1.01	Belanja Pegawai	78.240.000,00	78.240.000,00	0,00	100,00	
2.11.04.2.01.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	713.844.114,00	712.115.224,00	(1.728.890,00)	99,76	
2.11.04.2.01.0008.5.2	BELANJA MODAL	5.859.329.003,00	5.677.259.290,00	(182.069.713,00)	96,89	
2.11.04.2.01.0008.5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.120.054.000,00	1.103.416.100,00	(16.637.900,00)	98,51	
2.11.04.2.01.0008.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.739.275.003,00	4.573.843.190,00	(165.431.813,00)	96,51	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	201.138.483.133,00	196.881.037.983,00	(4.257.445.150,00)	97,88	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(199.143.685.132,00)	(194.753.192.508,00)	4.390.492.624,00	97,80	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(199.143.685.132,00)	(194.753.192.508,00)	4.390.492.624,00	97,80	





1.05.0.00.0.00.06.0000

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Kerja : 1.05.0.00.0.00.06.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.865.613.987,00	7.336.128.305,00	(529.485.682,00)	93,27	
1.05.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	4.629.600,00	2.300.000,00	(2.329.600,00)	49,68	
1.05.01.2.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	4.629.600,00	2.300.000,00	(2.329.600,00)	49,68	
1.05.01.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	4.629.600,00	2.300.000,00	(2.329.600,00)	49,68	
1.05.01.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.629.600,00	2.300.000,00	(2.329.600,00)	49,68	
1.05.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.761.826.027,00	3.761.610.095,00	(215.932,00)	99,99	
1.05.01.2.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.717.426.027,00	3.717.210.095,00	(215.932,00)	99,99	
1.05.01.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	3.717.426.027,00	3.717.210.095,00	(215.932,00)	99,99	
1.05.01.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	3.717.426.027,00	3.717.210.095,00	(215.932,00)	99,99	
1.05.01.2.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	100,00	
1.05.01.2.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	100,00	
1.05.01.2.02.0007.5.1.01	Belanja Pegawai	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	100,00	
1.05.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	220.103.700,00	209.339.110,00	(10.764.590,00)	95,11	
1.05.01.2.05.0002	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	220.103.700,00	209.339.110,00	(10.764.590,00)	95,11	
1.05.01.2.05.0002.5.1	BELANJA OPERASI	220.103.700,00	209.339.110,00	(10.764.590,00)	95,11	
1.05.01.2.05.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	7.940.000,00	3.100.000,00	(4.840.000,00)	39,04	
1.05.01.2.05.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	212.163.700,00	206.239.110,00	(5.924.590,00)	97,21	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	511.063.700,00	346.846.309,00	(164.217.391,00)	67,87	
1.05.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	8.915.100,00	8.383.600,00	(531.500,00)	94,04	
1.05.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	8.915.100,00	8.383.600,00	(531.500,00)	94,04	
1.05.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.915.100,00	8.383.600,00	(531.500,00)	94,04	
1.05.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	66.713.100,00	52.365.600,00	(14.347.500,00)	78,49	
1.05.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	66.713.100,00	52.365.600,00	(14.347.500,00)	78,49	
1.05.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.713.100,00	52.365.600,00	(14.347.500,00)	78,49	
1.05.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	17.269.100,00	12.495.000,00	(4.774.100,00)	72,35	
1.05.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	17.269.100,00	12.495.000,00	(4.774.100,00)	72,35	
1.05.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.269.100,00	12.495.000,00	(4.774.100,00)	72,35	
1.05.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	116.603.800,00	85.472.800,00	(31.131.000,00)	73,30	
1.05.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	116.603.800,00	85.472.800,00	(31.131.000,00)	73,30	
1.05.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.603.800,00	85.472.800,00	(31.131.000,00)	73,30	
1.05.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	26.822.600,00	8.790.600,00	(18.032.000,00)	32,77	
1.05.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	26.822.600,00	8.790.600,00	(18.032.000,00)	32,77	
1.05.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.822.600,00	8.790.600,00	(18.032.000,00)	32,77	
1.05.01.2.06.0006	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	12.000.000,00	11.940.000,00	(60.000,00)	99,50	
1.05.01.2.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	11.940.000,00	(60.000,00)	99,50	
1.05.01.2.06.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.940.000,00	(60.000,00)	99,50	
1.05.01.2.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	262.740.000,00	167.398.709,00	(95.341.291,00)	63,71	
1.05.01.2.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	262.740.000,00	167.398.709,00	(95.341.291,00)	63,71	
1.05.01.2.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.740.000,00	167.398.709,00	(95.341.291,00)	63,71	
1.05.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	194.531.000,00	186.946.460,00	(7.584.540,00)	96,10	
1.05.01.2.07.0005	PENGADAAN MEBEL	89.439.900,00	88.178.400,00	(1.261.500,00)	98,59	
1.05.01.2.07.0005.5.2	BELANJA MODAL	89.439.900,00	88.178.400,00	(1.261.500,00)	98,59	
1.05.01.2.07.0005.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89.439.900,00	88.178.400,00	(1.261.500,00)	98,59	
1.05.01.2.07.0010	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	105.091.100,00	98.768.060,00	(6.323.040,00)	93,98	
1.05.01.2.07.0010.5.2	BELANJA MODAL	105.091.100,00	98.768.060,00	(6.323.040,00)	93,98	
1.05.01.2.07.0010.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	105.091.100,00	98.768.060,00	(6.323.040,00)	93,98	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.165.896.360,00	2.115.014.737,00	(50.881.623,00)	97,65	
1.05.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	140.085.000,00	136.665.363,00	(3.419.637,00)	97,56	
1.05.01.2.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	140.085.000,00	136.665.363,00	(3.419.637,00)	97,56	
1.05.01.2.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.085.000,00	136.665.363,00	(3.419.637,00)	97,56	
1.05.01.2.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.025.811.360,00	1.978.349.374,00	(47.461.986,00)	97,66	
1.05.01.2.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	2.025.811.360,00	1.978.349.374,00	(47.461.986,00)	97,66	
1.05.01.2.08.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	22.920.000,00	21.010.000,00	(1.910.000,00)	91,67	
1.05.01.2.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.002.891.360,00	1.957.339.374,00	(45.551.986,00)	97,73	
1.05.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.007.563.600,00	714.071.594,00	(293.492.006,00)	70,87	
1.05.01.2.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	42.090.000,00	37.022.665,00	(5.067.335,00)	87,96	
1.05.01.2.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	42.090.000,00	37.022.665,00	(5.067.335,00)	87,96	
1.05.01.2.09.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.090.000,00	37.022.665,00	(5.067.335,00)	87,96	
1.05.01.2.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	646.802.000,00	378.432.123,00	(268.369.877,00)	58,51	
1.05.01.2.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	646.802.000,00	378.432.123,00	(268.369.877,00)	58,51	
1.05.01.2.09.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	646.802.000,00	378.432.123,00	(268.369.877,00)	58,51	
1.05.01.2.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	90.985.600,00	72.490.249,00	(18.495.351,00)	79,67	
1.05.01.2.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	90.985.600,00	72.490.249,00	(18.495.351,00)	79,67	
1.05.01.2.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.985.600,00	72.490.249,00	(18.495.351,00)	79,67	
1.05.01.2.09.0009	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	227.686.000,00	226.126.557,00	(1.559.443,00)	99,32	
1.05.01.2.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	227.686.000,00	226.126.557,00	(1.559.443,00)	99,32	
1.05.01.2.09.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.686.000,00	226.126.557,00	(1.559.443,00)	99,32	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.267.633.400,00	1.182.849.410,00	(84.783.990,00)	93,31	
1.05.03.2.02	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	447.545.500,00	424.539.500,00	(23.006.000,00)	94,86	
1.05.03.2.02.0016	PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA KABUPATEN/KOTA	250.853.500,00	230.539.500,00	(20.314.000,00)	91,90	
1.05.03.2.02.0016.5.1	BELANJA OPERASI	250.853.500,00	230.539.500,00	(20.314.000,00)	91,90	
1.05.03.2.02.0016.5.1.01	Belanja Pegawai	15.510.000,00	14.100.000,00	(1.410.000,00)	90,91	
1.05.03.2.02.0016.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.343.500,00	216.439.500,00	(18.904.000,00)	91,97	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05.03.2.02.0017	PENGENDALIAN OPERASI DAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA KABUPATEN/KOTA	196.692.000,00	194.000.000,00	(2.692.000,00)	98,63	
1.05.03.2.02.0017.5.2	BELANJA MODAL	196.692.000,00	194.000.000,00	(2.692.000,00)	98,63	
1.05.03.2.02.0017.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	196.692.000,00	194.000.000,00	(2.692.000,00)	98,63	
1.05.03.2.03	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	799.087.900,00	737.309.910,00	(61.777.990,00)	92,27	
1.05.03.2.03.0003	PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	196.973.800,00	181.297.700,00	(15.676.100,00)	92,04	
1.05.03.2.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	36.800.000,00	29.100.000,00	(7.700.000,00)	79,08	
1.05.03.2.03.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.800.000,00	29.100.000,00	(7.700.000,00)	79,08	
1.05.03.2.03.0003.5.2	BELANJA MODAL	160.173.800,00	152.197.700,00	(7.976.100,00)	95,02	
1.05.03.2.03.0003.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	160.173.800,00	152.197.700,00	(7.976.100,00)	95,02	
1.05.03.2.03.0009	PENYEDIAAN LOGISTIK PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	602.114.100,00	556.012.210,00	(46.101.890,00)	92,34	
1.05.03.2.03.0009.5.1	BELANJA OPERASI	574.492.200,00	528.870.110,00	(45.622.090,00)	92,06	
1.05.03.2.03.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	574.492.200,00	528.870.110,00	(45.622.090,00)	92,06	
1.05.03.2.03.0009.5.2	BELANJA MODAL	27.621.900,00	27.142.100,00	(479.800,00)	98,26	
1.05.03.2.03.0009.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.621.900,00	27.142.100,00	(479.800,00)	98,26	
1.05.03.2.04	PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.03.2.04.0010	KOORDINASI PENANGANAN PASCABENCANA KABUPATEN/KOTA	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.03.2.04.0010.5.1	BELANJA OPERASI	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.03.2.04.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	9.133.247.387,00	8.518.977.715,00	(614.269.672,00)	93,27	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.133.247.387,00)	(8.518.977.715,00)	614.269.672,00	93,27	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(9.133.247.387,00)	(8.518.977.715,00)	614.269.672,00	93,27	





1.05.0.00.0.00.07.0000

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Kerja : 1.05.0.00.0.00.07.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	45.177.057.576,00	45.053.347.367,00	(123.710.209,00)	99,73	
1.05.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	5.999.800,00	5.999.800,00	0,00	100,00	
1.05.01.2.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.01.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.01.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.05.01.2.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	3.499.800,00	3.499.800,00	0,00	100,00	
1.05.01.2.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	3.499.800,00	3.499.800,00	0,00	100,00	
1.05.01.2.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.499.800,00	3.499.800,00	0,00	100,00	
1.05.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	36.350.492.116,00	36.350.449.564,00	(42.552,00)	100,00	
1.05.01.2.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	36.350.492.116,00	36.350.449.564,00	(42.552,00)	100,00	
1.05.01.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	36.350.492.116,00	36.350.449.564,00	(42.552,00)	100,00	
1.05.01.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	36.350.492.116,00	36.350.449.564,00	(42.552,00)	100,00	
1.05.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.611.033.300,00	1.608.136.981,00	(2.896.319,00)	99,82	
1.05.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	123.636.000,00	123.467.750,00	(168.250,00)	99,86	
1.05.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	123.636.000,00	123.467.750,00	(168.250,00)	99,86	
1.05.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.636.000,00	123.467.750,00	(168.250,00)	99,86	
1.05.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	29.995.900,00	29.975.100,00	(20.800,00)	99,93	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	29.995.900,00	29.975.100,00	(20.800,00)	99,93	
1.05.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.995.900,00	29.975.100,00	(20.800,00)	99,93	
1.05.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	1.226.321.200,00	1.223.770.000,00	(2.551.200,00)	99,79	
1.05.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.226.321.200,00	1.223.770.000,00	(2.551.200,00)	99,79	
1.05.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.226.321.200,00	1.223.770.000,00	(2.551.200,00)	99,79	
1.05.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	91.722.200,00	91.681.400,00	(40.800,00)	99,96	
1.05.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	91.722.200,00	91.681.400,00	(40.800,00)	99,96	
1.05.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.722.200,00	91.681.400,00	(40.800,00)	99,96	
1.05.01.2.06.0006	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	41.600.000,00	41.580.000,00	(20.000,00)	99,95	
1.05.01.2.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	41.600.000,00	41.580.000,00	(20.000,00)	99,95	
1.05.01.2.06.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.600.000,00	41.580.000,00	(20.000,00)	99,95	
1.05.01.2.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	97.758.000,00	97.662.731,00	(95.269,00)	99,90	
1.05.01.2.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	97.758.000,00	97.662.731,00	(95.269,00)	99,90	
1.05.01.2.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.758.000,00	97.662.731,00	(95.269,00)	99,90	
1.05.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	58.851.400,00	58.400.000,00	(451.400,00)	99,23	
1.05.01.2.07.0007	PENGADAAN ASET TETAP LAINNYA	58.851.400,00	58.400.000,00	(451.400,00)	99,23	
1.05.01.2.07.0007.5.2	BELANJA MODAL	58.851.400,00	58.400.000,00	(451.400,00)	99,23	
1.05.01.2.07.0007.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.851.400,00	58.400.000,00	(451.400,00)	99,23	
1.05.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.328.989.960,00	5.225.028.744,00	(103.961.216,00)	98,05	
1.05.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	221.675.155,00	130.467.899,00	(91.207.256,00)	58,86	
1.05.01.2.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	221.675.155,00	130.467.899,00	(91.207.256,00)	58,86	
1.05.01.2.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	221.675.155,00	130.467.899,00	(91.207.256,00)	58,86	
1.05.01.2.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	5.107.314.805,00	5.094.560.845,00	(12.753.960,00)	99,75	
1.05.01.2.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	5.107.314.805,00	5.094.560.845,00	(12.753.960,00)	99,75	
1.05.01.2.08.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	110.760.000,00	110.760.000,00	0,00	100,00	
1.05.01.2.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.996.554.805,00	4.983.800.845,00	(12.753.960,00)	99,74	
1.05.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.821.691.000,00	1.805.332.278,00	(16.358.722,00)	99,10	
1.05.01.2.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	1.708.841.200,00	1.693.659.997,00	(15.181.203,00)	99,11	
1.05.01.2.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.708.841.200,00	1.693.659.997,00	(15.181.203,00)	99,11	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05.01.2.09.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.708.841.200,00	1.693.659.997,00	(15.181.203,00)	99,11	
1.05.01.2.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	82.249.800,00	81.607.800,00	(642.000,00)	99,22	
1.05.01.2.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	82.249.800,00	81.607.800,00	(642.000,00)	99,22	
1.05.01.2.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.249.800,00	81.607.800,00	(642.000,00)	99,22	
1.05.01.2.09.0009	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	30.600.000,00	30.064.481,00	(535.519,00)	98,25	
1.05.01.2.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	30.600.000,00	30.064.481,00	(535.519,00)	98,25	
1.05.01.2.09.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.600.000,00	30.064.481,00	(535.519,00)	98,25	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.480.056.039,00	3.296.706.323,00	(183.349.716,00)	94,73	
1.05.02.2.01	PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.070.275.100,00	2.031.452.100,00	(38.823.000,00)	98,12	
1.05.02.2.01.0003	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN/KOTA	1.315.563.800,00	1.315.510.600,00	(53.200,00)	100,00	
1.05.02.2.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.315.563.800,00	1.315.510.600,00	(53.200,00)	100,00	
1.05.02.2.01.0003.5.1.01	Belanja Pegawai	22.920.000,00	22.920.000,00	0,00	100,00	
1.05.02.2.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.292.643.800,00	1.292.590.600,00	(53.200,00)	100,00	
1.05.02.2.01.0004	PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	185.730.000,00	179.639.000,00	(6.091.000,00)	96,72	
1.05.02.2.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	185.730.000,00	179.639.000,00	(6.091.000,00)	96,72	
1.05.02.2.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.730.000,00	179.639.000,00	(6.091.000,00)	96,72	
1.05.02.2.01.0005	PENINGKATAN KAPASITAS SDM SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERMASUK DALAM PELAKSANAAN TUGAS YANG BERNUANSIA HAK ASASI MANUSIA	266.803.000,00	240.906.000,00	(25.897.000,00)	90,29	
1.05.02.2.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	266.803.000,00	240.906.000,00	(25.897.000,00)	90,29	
1.05.02.2.01.0005.5.1.01	Belanja Pegawai	13.530.000,00	4.230.000,00	(9.300.000,00)	31,26	
1.05.02.2.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	253.273.000,00	236.676.000,00	(16.597.000,00)	93,45	
1.05.02.2.01.0006	KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM TEKNIK PENCEGAHAN DAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	150.959.800,00	150.564.000,00	(395.800,00)	99,74	
1.05.02.2.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	150.959.800,00	150.564.000,00	(395.800,00)	99,74	
1.05.02.2.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.959.800,00	150.564.000,00	(395.800,00)	99,74	
1.05.02.2.01.0015	PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI, PENGAMANAN, DAN PENGAWALAN	100.499.800,00	99.760.300,00	(739.500,00)	99,26	
1.05.02.2.01.0015.5.1	BELANJA OPERASI	100.499.800,00	99.760.300,00	(739.500,00)	99,26	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05.02.2.01.0015.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.499.800,00	99.760.300,00	(739.500,00)	99,26	
1.05.02.2.01.0016	PENINDAKAN ATAS GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BERDASARKAN PERDA DAN PERKADA MELALUI PENERTIBAN DAN PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA	45.718.700,00	45.072.200,00	(646.500,00)	98,59	
1.05.02.2.01.0016.5.1	BELANJA OPERASI	45.718.700,00	45.072.200,00	(646.500,00)	98,59	
1.05.02.2.01.0016.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.718.700,00	45.072.200,00	(646.500,00)	98,59	
1.05.02.2.01.0017	PENYEDIAAN LAYANAN DASAR DALAM RANGKA DAMPAK PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERTURAN KEPALA DAERAH	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
1.05.02.2.01.0017.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
1.05.02.2.01.0017.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
1.05.02.2.02	PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA	1.394.780.939,00	1.250.484.223,00	(144.296.716,00)	89,65	
1.05.02.2.02.0010	SOSIALISASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	550.059.113,00	535.050.684,00	(15.008.429,00)	97,27	
1.05.02.2.02.0010.5.1	BELANJA OPERASI	550.059.113,00	535.050.684,00	(15.008.429,00)	97,27	
1.05.02.2.02.0010.5.1.01	Belanja Pegawai	12.090.000,00	10.880.000,00	(1.210.000,00)	89,99	
1.05.02.2.02.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	537.969.113,00	524.170.684,00	(13.798.429,00)	97,44	
1.05.02.2.02.0011	PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	839.721.926,00	711.319.539,00	(128.402.387,00)	84,71	
1.05.02.2.02.0011.5.1	BELANJA OPERASI	729.965.226,00	642.778.539,00	(87.186.687,00)	88,06	
1.05.02.2.02.0011.5.1.01	Belanja Pegawai	16.920.000,00	15.510.000,00	(1.410.000,00)	91,67	
1.05.02.2.02.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	713.045.226,00	627.268.539,00	(85.776.687,00)	87,97	
1.05.02.2.02.0011.5.2	BELANJA MODAL	109.756.700,00	68.541.000,00	(41.215.700,00)	62,45	
1.05.02.2.02.0011.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	109.756.700,00	68.541.000,00	(41.215.700,00)	62,45	
1.05.02.2.02.0012	PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	4.999.900,00	4.114.000,00	(885.900,00)	82,28	
1.05.02.2.02.0012.5.1	BELANJA OPERASI	4.999.900,00	4.114.000,00	(885.900,00)	82,28	
1.05.02.2.02.0012.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.999.900,00	4.114.000,00	(885.900,00)	82,28	
1.05.02.2.03	PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KABUPATEN/KOTA	15.000.000,00	14.770.000,00	(230.000,00)	98,47	
1.05.02.2.03.0006	PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN KARIER PPNS	15.000.000,00	14.770.000,00	(230.000,00)	98,47	
1.05.02.2.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.770.000,00	(230.000,00)	98,47	
1.05.02.2.03.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.770.000,00	(230.000,00)	98,47	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	48.657.113.615,00	48.350.053.690,00	(307.059.925,00)	99,37	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(48.657.113.615,00)	(48.350.053.690,00)	307.059.925,00	99,37	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(48.657.113.615,00)	(48.350.053.690,00)	307.059.925,00	99,37	





1.05.0.00.0.00.08.0000

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Kerja : 1.05.0.00.0.00.08.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.523.539.483,00	15.728.193.148,00	(795.346.335,00)	95,19	
1.05.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	9.168.400,00	7.098.500,00	(2.069.900,00)	77,42	
1.05.01.2.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	9.168.400,00	7.098.500,00	(2.069.900,00)	77,42	
1.05.01.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	9.168.400,00	7.098.500,00	(2.069.900,00)	77,42	
1.05.01.2.01.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	0,00	(2.020.000,00)	0,00	
1.05.01.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.148.400,00	7.098.500,00	(49.900,00)	99,30	
1.05.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	13.136.179.805,00	12.621.750.558,00	(514.429.247,00)	96,08	
1.05.01.2.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	13.082.899.805,00	12.569.330.558,00	(513.569.247,00)	96,07	
1.05.01.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	13.082.899.805,00	12.569.330.558,00	(513.569.247,00)	96,07	
1.05.01.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	13.082.899.805,00	12.569.330.558,00	(513.569.247,00)	96,07	
1.05.01.2.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	53.280.000,00	52.420.000,00	(860.000,00)	98,39	
1.05.01.2.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	53.280.000,00	52.420.000,00	(860.000,00)	98,39	
1.05.01.2.02.0007.5.1.01	Belanja Pegawai	53.280.000,00	52.420.000,00	(860.000,00)	98,39	
1.05.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	118.599.500,00	117.875.000,00	(724.500,00)	99,39	
1.05.01.2.05.0002	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	118.599.500,00	117.875.000,00	(724.500,00)	99,39	
1.05.01.2.05.0002.5.1	BELANJA OPERASI	118.599.500,00	117.875.000,00	(724.500,00)	99,39	
1.05.01.2.05.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.599.500,00	117.875.000,00	(724.500,00)	99,39	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	379.320.900,00	333.639.703,00	(45.681.197,00)	87,96	
1.05.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	40.151.500,00	37.204.000,00	(2.947.500,00)	92,66	
1.05.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	40.151.500,00	37.204.000,00	(2.947.500,00)	92,66	
1.05.01.2.06.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	680.000,00	0,00	(680.000,00)	0,00	
1.05.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.471.500,00	37.204.000,00	(2.267.500,00)	94,26	
1.05.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	23.306.400,00	17.717.800,00	(5.588.600,00)	76,02	
1.05.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	23.306.400,00	17.717.800,00	(5.588.600,00)	76,02	
1.05.01.2.06.0003.5.1.01	Belanja Pegawai	1.360.000,00	0,00	(1.360.000,00)	0,00	
1.05.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.946.400,00	17.717.800,00	(4.228.600,00)	80,73	
1.05.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	28.515.000,00	28.179.494,00	(335.506,00)	98,82	
1.05.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	28.515.000,00	28.179.494,00	(335.506,00)	98,82	
1.05.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.515.000,00	28.179.494,00	(335.506,00)	98,82	
1.05.01.2.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	287.348.000,00	250.538.409,00	(36.809.591,00)	87,19	
1.05.01.2.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	287.348.000,00	250.538.409,00	(36.809.591,00)	87,19	
1.05.01.2.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	287.348.000,00	250.538.409,00	(36.809.591,00)	87,19	
1.05.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	59.263.500,00	58.170.000,00	(1.093.500,00)	98,15	
1.05.01.2.07.0006	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	59.263.500,00	58.170.000,00	(1.093.500,00)	98,15	
1.05.01.2.07.0006.5.1	BELANJA OPERASI	680.000,00	0,00	(680.000,00)	0,00	
1.05.01.2.07.0006.5.1.01	Belanja Pegawai	680.000,00	0,00	(680.000,00)	0,00	
1.05.01.2.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	58.583.500,00	58.170.000,00	(413.500,00)	99,29	
1.05.01.2.07.0006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.583.500,00	58.170.000,00	(413.500,00)	99,29	
1.05.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.312.021.378,00	1.300.965.112,00	(11.056.266,00)	99,16	
1.05.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	126.191.290,00	115.322.164,00	(10.869.126,00)	91,39	
1.05.01.2.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	126.191.290,00	115.322.164,00	(10.869.126,00)	91,39	
1.05.01.2.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.191.290,00	115.322.164,00	(10.869.126,00)	91,39	
1.05.01.2.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.185.830.088,00	1.185.642.948,00	(187.140,00)	99,98	
1.05.01.2.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.185.830.088,00	1.185.642.948,00	(187.140,00)	99,98	
1.05.01.2.08.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	22.920.000,00	22.920.000,00	0,00	100,00	
1.05.01.2.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.162.910.088,00	1.162.722.948,00	(187.140,00)	99,98	
1.05.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.508.986.000,00	1.288.694.275,00	(220.291.725,00)	85,40	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05.01.2.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	1.111.480.000,00	895.259.931,00	(216.220.069,00)	80,55	
1.05.01.2.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.111.480.000,00	895.259.931,00	(216.220.069,00)	80,55	
1.05.01.2.09.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.111.480.000,00	895.259.931,00	(216.220.069,00)	80,55	
1.05.01.2.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	38.720.000,00	37.810.000,00	(910.000,00)	97,65	
1.05.01.2.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	38.720.000,00	37.810.000,00	(910.000,00)	97,65	
1.05.01.2.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.720.000,00	37.810.000,00	(910.000,00)	97,65	
1.05.01.2.09.0010	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	358.786.000,00	355.624.344,00	(3.161.656,00)	99,12	
1.05.01.2.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	358.786.000,00	355.624.344,00	(3.161.656,00)	99,12	
1.05.01.2.09.0010.5.1.01	Belanja Pegawai	4.860.000,00	3.500.000,00	(1.360.000,00)	72,02	
1.05.01.2.09.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	353.926.000,00	352.124.344,00	(1.801.656,00)	99,49	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	953.442.800,00	869.316.850,00	(84.125.950,00)	91,18	
1.05.04.2.01	PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	276.477.800,00	272.754.200,00	(3.723.600,00)	98,65	
1.05.04.2.01.0007	PEMBINAAN APARATUR PEMADAM KEBAKARAN	171.198.500,00	171.198.500,00	0,00	100,00	
1.05.04.2.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	171.198.500,00	171.198.500,00	0,00	100,00	
1.05.04.2.01.0007.5.1.01	Belanja Pegawai	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	100,00	
1.05.04.2.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.568.500,00	167.568.500,00	0,00	100,00	
1.05.04.2.01.0017	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN ALAT PELINDUNG DIRI	105.279.300,00	101.555.700,00	(3.723.600,00)	96,46	
1.05.04.2.01.0017.5.1	BELANJA OPERASI	38.856.300,00	38.550.700,00	(305.600,00)	99,21	
1.05.04.2.01.0017.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.856.300,00	38.550.700,00	(305.600,00)	99,21	
1.05.04.2.01.0017.5.2	BELANJA MODAL	66.423.000,00	63.005.000,00	(3.418.000,00)	94,85	
1.05.04.2.01.0017.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.423.000,00	63.005.000,00	(3.418.000,00)	94,85	
1.05.04.2.04	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN	479.534.800,00	417.707.650,00	(61.827.150,00)	87,11	
1.05.04.2.04.0001	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN MELALUI SOSIALISASI DAN EDUKASI MASYARAKAT	269.999.700,00	214.533.650,00	(55.466.050,00)	79,46	
1.05.04.2.04.0001.5.1	BELANJA OPERASI	269.999.700,00	214.533.650,00	(55.466.050,00)	79,46	
1.05.04.2.04.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	14.680.000,00	8.460.000,00	(6.220.000,00)	57,63	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05.04.2.04.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.319.700,00	206.073.650,00	(49.246.050,00)	80,71	
1.05.04.2.04.0002	PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN	110.561.100,00	105.194.000,00	(5.367.100,00)	95,15	
1.05.04.2.04.0002.5.1	BELANJA OPERASI	110.561.100,00	105.194.000,00	(5.367.100,00)	95,15	
1.05.04.2.04.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	7.940.000,00	3.630.000,00	(4.310.000,00)	45,72	
1.05.04.2.04.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.621.100,00	101.564.000,00	(1.057.100,00)	98,97	
1.05.04.2.04.0003	DUKUNGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN MELALUI PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA	98.974.000,00	97.980.000,00	(994.000,00)	99,00	
1.05.04.2.04.0003.5.1	BELANJA OPERASI	98.974.000,00	97.980.000,00	(994.000,00)	99,00	
1.05.04.2.04.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.974.000,00	97.980.000,00	(994.000,00)	99,00	
1.05.04.2.05	PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA	197.430.200,00	178.855.000,00	(18.575.200,00)	90,59	
1.05.04.2.05.0005	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA/PENYELAMATAN DAN EVAKUASI	197.430.200,00	178.855.000,00	(18.575.200,00)	90,59	
1.05.04.2.05.0005.5.1	BELANJA OPERASI	51.165.300,00	42.830.000,00	(8.335.300,00)	83,71	
1.05.04.2.05.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.165.300,00	42.830.000,00	(8.335.300,00)	83,71	
1.05.04.2.05.0005.5.2	BELANJA MODAL	146.264.900,00	136.025.000,00	(10.239.900,00)	93,00	
1.05.04.2.05.0005.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	146.264.900,00	136.025.000,00	(10.239.900,00)	93,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	17.476.982.283,00	16.597.509.998,00	(879.472.285,00)	94,97	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(17.476.982.283,00)	(16.597.509.998,00)	879.472.285,00	94,97	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(17.476.982.283,00)	(16.597.509.998,00)	879.472.285,00	94,97	





1.06.0.00.0.00.09.0000

DINAS SOSIAL



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Satuan Kerja : 1.06.0.00.0.00.09.0000 DINAS SOSIAL

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.261.705.318,00	12.086.002.953,00	(175.702.365,00)	98,57	
1.06.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	53.881.000,00	52.979.800,00	(901.200,00)	98,33	
1.06.01.2.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	43.999.900,00	43.098.850,00	(901.050,00)	97,95	
1.06.01.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	43.999.900,00	43.098.850,00	(901.050,00)	97,95	
1.06.01.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.999.900,00	43.098.850,00	(901.050,00)	97,95	
1.06.01.2.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	3.799.800,00	3.799.800,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	3.799.800,00	3.799.800,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.799.800,00	3.799.800,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	6.081.300,00	6.081.150,00	(150,00)	100,00	
1.06.01.2.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	6.081.300,00	6.081.150,00	(150,00)	100,00	
1.06.01.2.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.081.300,00	6.081.150,00	(150,00)	100,00	
1.06.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	9.455.367.617,00	9.392.074.668,00	(63.292.949,00)	99,33	
1.06.01.2.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	9.423.910.617,00	9.360.618.668,00	(63.291.949,00)	99,33	
1.06.01.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	9.423.910.617,00	9.360.618.668,00	(63.291.949,00)	99,33	
1.06.01.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	9.423.910.617,00	9.360.618.668,00	(63.291.949,00)	99,33	
1.06.01.2.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	31.457.000,00	31.456.000,00	(1.000,00)	100,00	
1.06.01.2.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	31.457.000,00	31.456.000,00	(1.000,00)	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06.01.2.02.0007.5.1.01	Belanja Pegawai	24.240.000,00	24.240.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.217.000,00	7.216.000,00	(1.000,00)	99,99	
1.06.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	643.200.377,00	614.836.413,00	(28.363.964,00)	95,59	
1.06.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	21.610.707,00	21.610.707,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	21.610.707,00	21.610.707,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.610.707,00	21.610.707,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	323.440.700,00	317.255.000,00	(6.185.700,00)	98,09	
1.06.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	323.440.700,00	317.255.000,00	(6.185.700,00)	98,09	
1.06.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	323.440.700,00	317.255.000,00	(6.185.700,00)	98,09	
1.06.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	44.128.770,00	41.146.400,00	(2.982.370,00)	93,24	
1.06.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	44.128.770,00	41.146.400,00	(2.982.370,00)	93,24	
1.06.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.128.770,00	41.146.400,00	(2.982.370,00)	93,24	
1.06.01.2.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	254.020.200,00	234.824.306,00	(19.195.894,00)	92,44	
1.06.01.2.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	254.020.200,00	234.824.306,00	(19.195.894,00)	92,44	
1.06.01.2.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	254.020.200,00	234.824.306,00	(19.195.894,00)	92,44	
1.06.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	245.837.600,00	236.249.600,00	(9.588.000,00)	96,10	
1.06.01.2.07.0005	PENGADAAN MEBEL	80.662.000,00	79.661.700,00	(1.000.300,00)	98,76	
1.06.01.2.07.0005.5.1	BELANJA OPERASI	6.561.300,00	6.561.300,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.07.0005.5.1.01	Belanja Pegawai	5.670.000,00	5.670.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.07.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	891.300,00	891.300,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.07.0005.5.2	BELANJA MODAL	74.100.700,00	73.100.400,00	(1.000.300,00)	98,65	
1.06.01.2.07.0005.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.100.700,00	73.100.400,00	(1.000.300,00)	98,65	
1.06.01.2.07.0006	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	165.175.600,00	156.587.900,00	(8.587.700,00)	94,80	
1.06.01.2.07.0006.5.1	BELANJA OPERASI	52.417.100,00	46.931.900,00	(5.485.200,00)	89,54	
1.06.01.2.07.0006.5.1.01	Belanja Pegawai	5.670.000,00	1.890.000,00	(3.780.000,00)	33,33	
1.06.01.2.07.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.747.100,00	45.041.900,00	(1.705.200,00)	96,35	
1.06.01.2.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	112.758.500,00	109.656.000,00	(3.102.500,00)	97,25	
1.06.01.2.07.0006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112.758.500,00	109.656.000,00	(3.102.500,00)	97,25	
1.06.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.150.910.924,00	1.101.018.473,00	(49.892.451,00)	95,66	
1.06.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	225.714.285,00	212.778.879,00	(12.935.406,00)	94,27	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06.01.2.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	225.714.285,00	212.778.879,00	(12.935.406,00)	94,27	
1.06.01.2.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.714.285,00	212.778.879,00	(12.935.406,00)	94,27	
1.06.01.2.08.0003	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	116.157.479,00	113.082.700,00	(3.074.779,00)	97,35	
1.06.01.2.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	116.157.479,00	113.082.700,00	(3.074.779,00)	97,35	
1.06.01.2.08.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.157.479,00	113.082.700,00	(3.074.779,00)	97,35	
1.06.01.2.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	809.039.160,00	775.156.894,00	(33.882.266,00)	95,81	
1.06.01.2.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	809.039.160,00	775.156.894,00	(33.882.266,00)	95,81	
1.06.01.2.08.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	26.520.000,00	26.520.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	782.519.160,00	748.636.894,00	(33.882.266,00)	95,67	
1.06.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	712.507.800,00	688.843.999,00	(23.663.801,00)	96,68	
1.06.01.2.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	272.190.000,00	249.889.830,00	(22.300.170,00)	91,81	
1.06.01.2.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	272.190.000,00	249.889.830,00	(22.300.170,00)	91,81	
1.06.01.2.09.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	272.190.000,00	249.889.830,00	(22.300.170,00)	91,81	
1.06.01.2.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	103.459.800,00	103.449.650,00	(10.150,00)	99,99	
1.06.01.2.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	103.459.800,00	103.449.650,00	(10.150,00)	99,99	
1.06.01.2.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.459.800,00	103.449.650,00	(10.150,00)	99,99	
1.06.01.2.09.0009	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	336.858.000,00	335.504.519,00	(1.353.481,00)	99,60	
1.06.01.2.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	336.858.000,00	335.504.519,00	(1.353.481,00)	99,60	
1.06.01.2.09.0009.5.1.01	Belanja Pegawai	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	100,00	
1.06.01.2.09.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	335.168.000,00	333.814.519,00	(1.353.481,00)	99,60	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	272.736.800,00	264.981.800,00	(7.755.000,00)	97,16	
1.06.02.2.02	PENGUMPULAN SUMBANGAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.194.000,00	1.194.000,00	0,00	100,00	
1.06.02.2.02.0001	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENERBITAN IZIN UNDIAN GRATIS BERHADIAH DAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG	1.194.000,00	1.194.000,00	0,00	100,00	
1.06.02.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.194.000,00	1.194.000,00	0,00	100,00	
1.06.02.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.194.000,00	1.194.000,00	0,00	100,00	
1.06.02.2.03	PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	271.542.800,00	263.787.800,00	(7.755.000,00)	97,14	
1.06.02.2.03.0001	PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	183.687.000,00	178.557.000,00	(5.130.000,00)	97,21	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06.02.2.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	183.687.000,00	178.557.000,00	(5.130.000,00)	97,21	
1.06.02.2.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.687.000,00	178.557.000,00	(5.130.000,00)	97,21	
1.06.02.2.03.0004	PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	67.349.600,00	67.349.600,00	0,00	100,00	
1.06.02.2.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	67.349.600,00	67.349.600,00	0,00	100,00	
1.06.02.2.03.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	14.520.000,00	14.520.000,00	0,00	100,00	
1.06.02.2.03.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.829.600,00	2.829.600,00	0,00	100,00	
1.06.02.2.03.0004.5.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
1.06.02.2.03.0005	PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGUATAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3)	20.506.200,00	17.881.200,00	(2.625.000,00)	87,20	
1.06.02.2.03.0005.5.1	BELANJA OPERASI	20.506.200,00	17.881.200,00	(2.625.000,00)	87,20	
1.06.02.2.03.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.506.200,00	17.881.200,00	(2.625.000,00)	87,20	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.536.379.300,00	1.268.232.850,00	(268.146.450,00)	82,55	
1.06.04.2.01	REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL	1.139.063.300,00	877.661.600,00	(261.401.700,00)	77,05	
1.06.04.2.01.0002	PENYEDIAAN SANDANG	52.480.000,00	49.514.800,00	(2.965.200,00)	94,35	
1.06.04.2.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	52.480.000,00	49.514.800,00	(2.965.200,00)	94,35	
1.06.04.2.01.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	21.010.000,00	21.010.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.470.000,00	28.504.800,00	(2.965.200,00)	90,58	
1.06.04.2.01.0003	PENYEDIAAN ALAT BANTU	896.112.300,00	641.242.800,00	(254.869.500,00)	71,56	
1.06.04.2.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	896.112.300,00	641.242.800,00	(254.869.500,00)	71,56	
1.06.04.2.01.0003.5.1.01	Belanja Pegawai	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	894.022.300,00	639.152.800,00	(254.869.500,00)	71,49	
1.06.04.2.01.0005	PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL, DAN SOSIAL	98.400.000,00	98.400.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	98.400.000,00	98.400.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.400.000,00	98.400.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.0006	PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DAN MASYARAKAT	84.871.000,00	81.304.000,00	(3.567.000,00)	95,80	
1.06.04.2.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	84.871.000,00	81.304.000,00	(3.567.000,00)	95,80	
1.06.04.2.01.0006.5.1.01	Belanja Pegawai	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.181.000,00	79.614.000,00	(3.567.000,00)	95,71	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06.04.2.01.0011	PEMBERIAN PELAYANAN PENELUSURAN KELUARGA	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.0011.5.1	BELANJA OPERASI	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.01.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.02	REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL	397.316.000,00	390.571.250,00	(6.744.750,00)	98,30	
1.06.04.2.02.0001	PEMBERIAN LAYANAN DATA DAN PENGADUAN	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.02.0002	PEMBERIAN LAYANAN KEDARURATAN	234.000.000,00	234.000.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	234.000.000,00	234.000.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	234.000.000,00	234.000.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.02.0004	PENYEDIAAN SANDANG	29.536.000,00	28.225.000,00	(1.311.000,00)	95,56	
1.06.04.2.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	29.536.000,00	28.225.000,00	(1.311.000,00)	95,56	
1.06.04.2.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.536.000,00	28.225.000,00	(1.311.000,00)	95,56	
1.06.04.2.02.0006	PENYEDIAAN PERBEKALAN KESEHATAN DI LUAR PANTI	6.380.000,00	6.356.250,00	(23.750,00)	99,63	
1.06.04.2.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	6.380.000,00	6.356.250,00	(23.750,00)	99,63	
1.06.04.2.02.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.380.000,00	6.356.250,00	(23.750,00)	99,63	
1.06.04.2.02.0007	PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL, DAN SOSIAL	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.02.0008	PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA	43.400.000,00	37.990.000,00	(5.410.000,00)	87,53	
1.06.04.2.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	43.400.000,00	37.990.000,00	(5.410.000,00)	87,53	
1.06.04.2.02.0008.5.1.01	Belanja Pegawai	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	100,00	
1.06.04.2.02.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.710.000,00	36.300.000,00	(5.410.000,00)	87,03	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2.398.084.182,00	2.221.015.020,00	(177.069.162,00)	92,62	
1.06.05.2.01	PEMELIHARAAN ANAK-ANAK TERLANTAR	67.379.800,00	67.072.000,00	(307.800,00)	99,54	
1.06.05.2.01.0001	PENJANGKAUAN ANAK-ANAK TERLANTAR	20.163.800,00	20.163.800,00	0,00	100,00	
1.06.05.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	20.163.800,00	20.163.800,00	0,00	100,00	
1.06.05.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.163.800,00	20.163.800,00	0,00	100,00	
1.06.05.2.01.0002	RUJUKAN ANAK-ANAK TERLANTAR	22.134.000,00	21.826.200,00	(307.800,00)	98,61	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06.05.2.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	22.134.000,00	21.826.200,00	(307.800,00)	98,61	
1.06.05.2.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.134.000,00	21.826.200,00	(307.800,00)	98,61	
1.06.05.2.01.0003	PEMANTAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMELIHARAAN ANAK TERLANTAR	25.082.000,00	25.082.000,00	0,00	100,00	
1.06.05.2.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	25.082.000,00	25.082.000,00	0,00	100,00	
1.06.05.2.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.082.000,00	25.082.000,00	0,00	100,00	
1.06.05.2.02	PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.330.704.382,00	2.153.943.020,00	(176.761.362,00)	92,42	
1.06.05.2.02.0001	PENDATAAN FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	822.409.900,00	797.396.300,00	(25.013.600,00)	96,96	
1.06.05.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	822.409.900,00	797.396.300,00	(25.013.600,00)	96,96	
1.06.05.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	8.460.000,00	8.460.000,00	0,00	100,00	
1.06.05.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	813.949.900,00	788.936.300,00	(25.013.600,00)	96,93	
1.06.05.2.02.0003	FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA	402.489.400,00	387.417.200,00	(15.072.200,00)	96,26	
1.06.05.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	402.489.400,00	387.417.200,00	(15.072.200,00)	96,26	
1.06.05.2.02.0003.5.1.01	Belanja Pegawai	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	100,00	
1.06.05.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	395.229.400,00	380.157.200,00	(15.072.200,00)	96,19	
1.06.05.2.02.0004	FASILITASI BANTUAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT	1.105.805.082,00	969.129.520,00	(136.675.562,00)	87,64	
1.06.05.2.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.105.805.082,00	969.129.520,00	(136.675.562,00)	87,64	
1.06.05.2.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.105.805.082,00	969.129.520,00	(136.675.562,00)	87,64	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.147.124.600,00	1.106.483.700,00	(40.640.900,00)	96,46	
1.06.06.2.01	PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA	730.595.600,00	690.954.700,00	(39.640.900,00)	94,57	
1.06.06.2.01.0001	PENYEDIAAN MAKANAN	608.481.100,00	571.887.200,00	(36.593.900,00)	93,99	
1.06.06.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	608.481.100,00	571.887.200,00	(36.593.900,00)	93,99	
1.06.06.2.01.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	21.610.000,00	21.610.000,00	0,00	100,00	
1.06.06.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	586.871.100,00	550.277.200,00	(36.593.900,00)	93,76	
1.06.06.2.01.0002	PENYEDIAAN SANDANG	80.128.500,00	77.856.500,00	(2.272.000,00)	97,16	
1.06.06.2.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	80.128.500,00	77.856.500,00	(2.272.000,00)	97,16	
1.06.06.2.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.128.500,00	77.856.500,00	(2.272.000,00)	97,16	
1.06.06.2.01.0003	PENYEDIAAN TEMPAT PENAMPUNGAN PENGUNGSI	2.287.600,00	2.282.000,00	(5.600,00)	99,76	
1.06.06.2.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	2.287.600,00	2.282.000,00	(5.600,00)	99,76	
1.06.06.2.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.287.600,00	2.282.000,00	(5.600,00)	99,76	
1.06.06.2.01.0004	PENANGANAN KHUSUS BAGI KELOMPOK RENTAN	24.053.400,00	23.284.000,00	(769.400,00)	96,80	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06.06.2.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	24.053.400,00	23.284.000,00	(769.400,00)	96,80	
1.06.06.2.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.053.400,00	23.284.000,00	(769.400,00)	96,80	
1.06.06.2.01.0005	PELAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL	15.645.000,00	15.645.000,00	0,00	100,00	
1.06.06.2.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	15.645.000,00	15.645.000,00	0,00	100,00	
1.06.06.2.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.645.000,00	15.645.000,00	0,00	100,00	
1.06.06.2.02	PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	416.529.000,00	415.529.000,00	(1.000.000,00)	99,76	
1.06.06.2.02.0002	KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN TARUNA SIAGA BENCANA	416.529.000,00	415.529.000,00	(1.000.000,00)	99,76	
1.06.06.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	416.529.000,00	415.529.000,00	(1.000.000,00)	99,76	
1.06.06.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.029.000,00	236.029.000,00	(1.000.000,00)	99,58	
1.06.06.2.02.0002.5.1.05	Belanja Hibah	179.500.000,00	179.500.000,00	0,00	100,00	
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	50.146.800,00	48.561.608,00	(1.585.192,00)	96,84	
1.06.07.2.01	PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA	50.146.800,00	48.561.608,00	(1.585.192,00)	96,84	
1.06.07.2.01.0002	PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA	50.146.800,00	48.561.608,00	(1.585.192,00)	96,84	
1.06.07.2.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	50.146.800,00	48.561.608,00	(1.585.192,00)	96,84	
1.06.07.2.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.146.800,00	48.561.608,00	(1.585.192,00)	96,84	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	17.666.177.000,00	16.995.277.931,00	(670.899.069,00)	96,20	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(17.666.177.000,00)	(16.995.277.931,00)	670.899.069,00	96,20	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(17.666.177.000,00)	(16.995.277.931,00)	670.899.069,00	96,20	





2.07.0.00.0.00.10.0000

DINAS TENAGA KERJA



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Satuan Kerja : 2.07.0.00.0.00.10.0000 DINAS TENAGA KERJA

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.114.872.675,00	10.888.162.659,00	(226.710.016,00)	97,96	
2.07.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	7.322.377,00	6.695.000,00	(627.377,00)	91,43	
2.07.01.2.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	7.322.377,00	6.695.000,00	(627.377,00)	91,43	
2.07.01.2.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	7.322.377,00	6.695.000,00	(627.377,00)	91,43	
2.07.01.2.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.322.377,00	6.695.000,00	(627.377,00)	91,43	
2.07.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	8.838.886.399,00	8.731.699.257,00	(107.187.142,00)	98,79	
2.07.01.2.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	8.798.696.399,00	8.691.919.257,00	(106.777.142,00)	98,79	
2.07.01.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	8.798.696.399,00	8.691.919.257,00	(106.777.142,00)	98,79	
2.07.01.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	8.798.696.399,00	8.691.919.257,00	(106.777.142,00)	98,79	
2.07.01.2.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	40.190.000,00	39.780.000,00	(410.000,00)	98,98	
2.07.01.2.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	40.190.000,00	39.780.000,00	(410.000,00)	98,98	
2.07.01.2.02.0007.5.1.01	Belanja Pegawai	38.690.000,00	38.690.000,00	0,00	100,00	
2.07.01.2.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.090.000,00	(410.000,00)	72,67	
2.07.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	866.500.365,00	806.379.344,00	(60.121.021,00)	93,06	
2.07.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	135.380.700,00	122.007.000,00	(13.373.700,00)	90,12	
2.07.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	135.380.700,00	122.007.000,00	(13.373.700,00)	90,12	
2.07.01.2.06.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	12.120.000,00	2.020.000,00	(10.100.000,00)	16,67	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.07.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.260.700,00	119.987.000,00	(3.273.700,00)	97,34	
2.07.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	19.998.400,00	18.691.200,00	(1.307.200,00)	93,46	
2.07.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	19.998.400,00	18.691.200,00	(1.307.200,00)	93,46	
2.07.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.998.400,00	18.691.200,00	(1.307.200,00)	93,46	
2.07.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	57.655.000,00	51.040.000,00	(6.615.000,00)	88,53	
2.07.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	57.655.000,00	51.040.000,00	(6.615.000,00)	88,53	
2.07.01.2.06.0005.5.1.01	Belanja Pegawai	12.120.000,00	9.090.000,00	(3.030.000,00)	75,00	
2.07.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.535.000,00	41.950.000,00	(3.585.000,00)	92,13	
2.07.01.2.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	653.466.265,00	614.641.144,00	(38.825.121,00)	94,06	
2.07.01.2.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	653.466.265,00	614.641.144,00	(38.825.121,00)	94,06	
2.07.01.2.06.0009.5.1.01	Belanja Pegawai	27.480.000,00	27.480.000,00	0,00	100,00	
2.07.01.2.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	625.986.265,00	587.161.144,00	(38.825.121,00)	93,80	
2.07.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	52.311.998,00	52.010.160,00	(301.838,00)	99,42	
2.07.01.2.07.0006	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	52.311.998,00	52.010.160,00	(301.838,00)	99,42	
2.07.01.2.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	52.311.998,00	52.010.160,00	(301.838,00)	99,42	
2.07.01.2.07.0006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.311.998,00	52.010.160,00	(301.838,00)	99,42	
2.07.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	889.152.448,00	834.116.594,00	(55.035.854,00)	93,81	
2.07.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	159.775.000,00	151.361.818,00	(8.413.182,00)	94,73	
2.07.01.2.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	159.775.000,00	151.361.818,00	(8.413.182,00)	94,73	
2.07.01.2.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.775.000,00	151.361.818,00	(8.413.182,00)	94,73	
2.07.01.2.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	729.377.448,00	682.754.776,00	(46.622.672,00)	93,61	
2.07.01.2.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	729.377.448,00	682.754.776,00	(46.622.672,00)	93,61	
2.07.01.2.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	729.377.448,00	682.754.776,00	(46.622.672,00)	93,61	
2.07.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	460.699.088,00	457.262.304,00	(3.436.784,00)	99,25	
2.07.01.2.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	141.380.000,00	138.598.280,00	(2.781.720,00)	98,03	
2.07.01.2.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	141.380.000,00	138.598.280,00	(2.781.720,00)	98,03	
2.07.01.2.09.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.380.000,00	138.598.280,00	(2.781.720,00)	98,03	
2.07.01.2.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	68.060.000,00	68.060.000,00	0,00	100,00	
2.07.01.2.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	68.060.000,00	68.060.000,00	0,00	100,00	
2.07.01.2.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.060.000,00	68.060.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.07.01.2.09.0009	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	251.259.088,00	250.604.024,00	(655.064,00)	99,74	
2.07.01.2.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	251.259.088,00	250.604.024,00	(655.064,00)	99,74	
2.07.01.2.09.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	251.259.088,00	250.604.024,00	(655.064,00)	99,74	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	3.361.788.719,00	3.253.003.128,00	(108.785.591,00)	96,76	
2.07.03.2.01	PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI	3.332.725.719,00	3.227.585.128,00	(105.140.591,00)	96,85	
2.07.03.2.01.0001	PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASSTER KOMPETENSI	3.332.725.719,00	3.227.585.128,00	(105.140.591,00)	96,85	
2.07.03.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	3.332.725.719,00	3.227.585.128,00	(105.140.591,00)	96,85	
2.07.03.2.01.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	22.920.000,00	22.920.000,00	0,00	100,00	
2.07.03.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.309.805.719,00	3.204.665.128,00	(105.140.591,00)	96,82	
2.07.03.2.02	PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA	9.627.900,00	9.049.000,00	(578.900,00)	93,99	
2.07.03.2.02.0001	PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA	9.627.900,00	9.049.000,00	(578.900,00)	93,99	
2.07.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	9.627.900,00	9.049.000,00	(578.900,00)	93,99	
2.07.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.627.900,00	9.049.000,00	(578.900,00)	93,99	
2.07.03.2.04	KONSULTANSI PRODUKTIVITAS PADA PERUSAHAAN KECIL	19.435.100,00	16.369.000,00	(3.066.100,00)	84,22	
2.07.03.2.04.0001	PELAKSANAAN KONSULTASI PRODUKTIVITAS KEPADA PERUSAHAAN KECIL	19.435.100,00	16.369.000,00	(3.066.100,00)	84,22	
2.07.03.2.04.0001.5.1	BELANJA OPERASI	19.435.100,00	16.369.000,00	(3.066.100,00)	84,22	
2.07.03.2.04.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.435.100,00	16.369.000,00	(3.066.100,00)	84,22	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	4.252.135.930,00	4.141.280.000,00	(110.855.930,00)	97,39	
2.07.04.2.01	PELAYANAN ANTAR KERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.005.379.930,00	3.988.291.000,00	(17.088.930,00)	99,57	
2.07.04.2.01.0002	PELAYANAN ANTAR KERJA	3.999.375.930,00	3.982.955.000,00	(16.420.930,00)	99,59	
2.07.04.2.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	3.999.375.930,00	3.982.955.000,00	(16.420.930,00)	99,59	
2.07.04.2.01.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	30.240.000,00	16.920.000,00	(13.320.000,00)	55,95	
2.07.04.2.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.969.135.930,00	3.966.035.000,00	(3.100.930,00)	99,92	
2.07.04.2.01.0003	PENYULUHAN DAN BIMBINGAN JABATAN BAGI PENCARI KERJA	3.720.000,00	3.480.000,00	(240.000,00)	93,55	
2.07.04.2.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	3.720.000,00	3.480.000,00	(240.000,00)	93,55	
2.07.04.2.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.720.000,00	3.480.000,00	(240.000,00)	93,55	
2.07.04.2.01.0004	PENYELENGGARAAN UNIT LAYANAN DISABILITAS KETENAGAKERJAAN	2.284.000,00	1.856.000,00	(428.000,00)	81,26	
2.07.04.2.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	2.284.000,00	1.856.000,00	(428.000,00)	81,26	
2.07.04.2.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.284.000,00	1.856.000,00	(428.000,00)	81,26	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.07.04.2.03	PENGLOLAAN INFORMASI PASAR KERJA	246.756.000,00	152.989.000,00	(93.767.000,00)	62,00	
2.07.04.2.03.0001	PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL APLIKASI INFORMASI PASAR KERJA ONLINE	50.000.000,00	49.395.000,00	(605.000,00)	98,79	
2.07.04.2.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.395.000,00	(605.000,00)	98,79	
2.07.04.2.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.395.000,00	(605.000,00)	98,79	
2.07.04.2.03.0002	PELAYANAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI PASAR KERJA ONLINE	192.280.000,00	99.308.000,00	(92.972.000,00)	51,65	
2.07.04.2.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	192.280.000,00	99.308.000,00	(92.972.000,00)	51,65	
2.07.04.2.03.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.280.000,00	99.308.000,00	(92.972.000,00)	51,65	
2.07.04.2.03.0003	JOB FAIR/BURSA KERJA	4.476.000,00	4.286.000,00	(190.000,00)	95,76	
2.07.04.2.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	4.476.000,00	4.286.000,00	(190.000,00)	95,76	
2.07.04.2.03.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.476.000,00	4.286.000,00	(190.000,00)	95,76	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	130.099.800,00	125.251.400,00	(4.848.400,00)	96,27	
2.07.05.2.01	PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	113.396.700,00	109.585.500,00	(3.811.200,00)	96,64	
2.07.05.2.01.0003	PENYELENGGARAAN PENDATAAN DAN INFORMASI SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SERTA PENGUPAHAN	113.396.700,00	109.585.500,00	(3.811.200,00)	96,64	
2.07.05.2.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	113.396.700,00	109.585.500,00	(3.811.200,00)	96,64	
2.07.05.2.01.0003.5.1.01	Belanja Pegawai	9.680.000,00	9.680.000,00	0,00	100,00	
2.07.05.2.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.716.700,00	99.905.500,00	(3.811.200,00)	96,33	
2.07.05.2.02	PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.703.100,00	15.665.900,00	(1.037.200,00)	93,79	
2.07.05.2.02.0001	PENCEGAHAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.703.100,00	15.665.900,00	(1.037.200,00)	93,79	
2.07.05.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	16.703.100,00	15.665.900,00	(1.037.200,00)	93,79	
2.07.05.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.703.100,00	15.665.900,00	(1.037.200,00)	93,79	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	18.858.897.124,00	18.407.697.187,00	(451.199.937,00)	97,61	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(18.858.897.124,00)	(18.407.697.187,00)	451.199.937,00	97,61	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(18.858.897.124,00)	(18.407.697.187,00)	451.199.937,00	97,61	





2.08.2.13.0.00.11.0000

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Satuan Kerja : 2.08.2.13.0.00.11.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.606.788.950,00	9.491.495.961,00	(115.292.989,00)	98,80	
2.08.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	20.134.600,00	20.134.600,00	0,00	100,00	
2.08.01.2.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	20.134.600,00	20.134.600,00	0,00	100,00	
2.08.01.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	20.134.600,00	20.134.600,00	0,00	100,00	
2.08.01.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.134.600,00	20.134.600,00	0,00	100,00	
2.08.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	7.219.240.510,00	7.153.998.599,00	(65.241.911,00)	99,10	
2.08.01.2.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	7.153.240.510,00	7.087.998.599,00	(65.241.911,00)	99,09	
2.08.01.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	7.153.240.510,00	7.087.998.599,00	(65.241.911,00)	99,09	
2.08.01.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	7.153.240.510,00	7.087.998.599,00	(65.241.911,00)	99,09	
2.08.01.2.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	100,00	
2.08.01.2.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	100,00	
2.08.01.2.02.0007.5.1.01	Belanja Pegawai	64.200.000,00	64.200.000,00	0,00	100,00	
2.08.01.2.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
2.08.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	940.966.100,00	916.832.740,00	(24.133.360,00)	97,44	
2.08.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.222.100,00	3.222.100,00	0,00	100,00	
2.08.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	3.222.100,00	3.222.100,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.08.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.222.100,00	3.222.100,00	0,00	100,00	
2.08.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	143.109.300,00	143.098.400,00	(10.900,00)	99,99	
2.08.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	143.109.300,00	143.098.400,00	(10.900,00)	99,99	
2.08.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.109.300,00	143.098.400,00	(10.900,00)	99,99	
2.08.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	19.438.900,00	19.431.200,00	(7.700,00)	99,96	
2.08.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	19.438.900,00	19.431.200,00	(7.700,00)	99,96	
2.08.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.438.900,00	19.431.200,00	(7.700,00)	99,96	
2.08.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	580.150.000,00	578.770.000,00	(1.380.000,00)	99,76	
2.08.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	580.150.000,00	578.770.000,00	(1.380.000,00)	99,76	
2.08.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	22.920.000,00	22.920.000,00	0,00	100,00	
2.08.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	557.230.000,00	555.850.000,00	(1.380.000,00)	99,75	
2.08.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	10.058.800,00	10.058.600,00	(200,00)	100,00	
2.08.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	10.058.800,00	10.058.600,00	(200,00)	100,00	
2.08.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.058.800,00	10.058.600,00	(200,00)	100,00	
2.08.01.2.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	184.987.000,00	162.252.440,00	(22.734.560,00)	87,71	
2.08.01.2.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	184.987.000,00	162.252.440,00	(22.734.560,00)	87,71	
2.08.01.2.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.987.000,00	162.252.440,00	(22.734.560,00)	87,71	
2.08.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	126.219.100,00	126.179.500,00	(39.600,00)	99,97	
2.08.01.2.07.0006	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	126.219.100,00	126.179.500,00	(39.600,00)	99,97	
2.08.01.2.07.0006.5.1	BELANJA OPERASI	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	100,00	
2.08.01.2.07.0006.5.1.01	Belanja Pegawai	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	100,00	
2.08.01.2.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	122.139.100,00	122.099.500,00	(39.600,00)	99,97	
2.08.01.2.07.0006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	122.139.100,00	122.099.500,00	(39.600,00)	99,97	
2.08.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	902.652.640,00	886.109.138,00	(16.543.502,00)	98,17	
2.08.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	139.212.400,00	129.594.571,00	(9.617.829,00)	93,09	
2.08.01.2.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	139.212.400,00	129.594.571,00	(9.617.829,00)	93,09	
2.08.01.2.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.212.400,00	129.594.571,00	(9.617.829,00)	93,09	
2.08.01.2.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	763.440.240,00	756.514.567,00	(6.925.673,00)	99,09	
2.08.01.2.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	763.440.240,00	756.514.567,00	(6.925.673,00)	99,09	
2.08.01.2.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	763.440.240,00	756.514.567,00	(6.925.673,00)	99,09	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.08.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	397.576.000,00	388.241.384,00	(9.334.616,00)	97,65	
2.08.01.2.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	17.500.000,00	8.570.400,00	(8.929.600,00)	48,97	
2.08.01.2.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	17.500.000,00	8.570.400,00	(8.929.600,00)	48,97	
2.08.01.2.09.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	8.570.400,00	(8.929.600,00)	48,97	
2.08.01.2.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	243.550.000,00	243.224.984,00	(325.016,00)	99,87	
2.08.01.2.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	243.550.000,00	243.224.984,00	(325.016,00)	99,87	
2.08.01.2.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	243.550.000,00	243.224.984,00	(325.016,00)	99,87	
2.08.01.2.09.0009	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	136.526.000,00	136.446.000,00	(80.000,00)	99,94	
2.08.01.2.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	136.526.000,00	136.446.000,00	(80.000,00)	99,94	
2.08.01.2.09.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.526.000,00	136.446.000,00	(80.000,00)	99,94	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	877.818.700,00	869.668.500,00	(8.150.200,00)	99,07	
2.08.02.2.01	PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	64.846.000,00	64.846.000,00	0,00	100,00	
2.08.02.2.01.0003	ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PUG TERMASUK PPRG	64.846.000,00	64.846.000,00	0,00	100,00	
2.08.02.2.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	64.846.000,00	64.846.000,00	0,00	100,00	
2.08.02.2.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.846.000,00	64.846.000,00	0,00	100,00	
2.08.02.2.02	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	450.189.100,00	447.697.500,00	(2.491.600,00)	99,45	
2.08.02.2.02.0002	ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DAN POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI	450.189.100,00	447.697.500,00	(2.491.600,00)	99,45	
2.08.02.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	450.189.100,00	447.697.500,00	(2.491.600,00)	99,45	
2.08.02.2.02.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
2.08.02.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	426.789.100,00	424.297.500,00	(2.491.600,00)	99,42	
2.08.02.2.03	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	362.783.600,00	357.125.000,00	(5.658.600,00)	98,44	
2.08.02.2.03.0002	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	362.783.600,00	357.125.000,00	(5.658.600,00)	98,44	
2.08.02.2.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	362.783.600,00	357.125.000,00	(5.658.600,00)	98,44	
2.08.02.2.03.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	362.783.600,00	357.125.000,00	(5.658.600,00)	98,44	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	735.430.200,00	551.230.200,00	(184.200.000,00)	74,95	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.08.03.2.01	PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	56.526.000,00	56.126.000,00	(400.000,00)	99,29	
2.08.03.2.01.0001	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	56.526.000,00	56.126.000,00	(400.000,00)	99,29	
2.08.03.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	56.526.000,00	56.126.000,00	(400.000,00)	99,29	
2.08.03.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.526.000,00	56.126.000,00	(400.000,00)	99,29	
2.08.03.2.02	PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	678.904.200,00	495.104.200,00	(183.800.000,00)	72,93	
2.08.03.2.02.0001	PENYEDIAAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	678.904.200,00	495.104.200,00	(183.800.000,00)	72,93	
2.08.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	678.904.200,00	495.104.200,00	(183.800.000,00)	72,93	
2.08.03.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	16.920.000,00	16.920.000,00	0,00	100,00	
2.08.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	661.984.200,00	478.184.200,00	(183.800.000,00)	72,23	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	3.233.134.855,00	3.186.644.380,00	(46.490.475,00)	98,56	
2.08.04.2.01	PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	69.145.429,00	68.501.429,00	(644.000,00)	99,07	
2.08.04.2.01.0003	PENGEMBANGAN KEGIATAN MASYARAKAT UNTUK PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	69.145.429,00	68.501.429,00	(644.000,00)	99,07	
2.08.04.2.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	69.145.429,00	68.501.429,00	(644.000,00)	99,07	
2.08.04.2.01.0003.5.1.01	Belanja Pegawai	7.310.000,00	7.310.000,00	0,00	100,00	
2.08.04.2.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.835.429,00	61.191.429,00	(644.000,00)	98,96	
2.08.04.2.02	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN HAK ANAK YANG WILAYAH KERJANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.163.989.426,00	3.118.142.951,00	(45.846.475,00)	98,55	
2.08.04.2.02.0001	ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.023.328.426,00	983.167.600,00	(40.160.826,00)	96,08	
2.08.04.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.023.328.426,00	983.167.600,00	(40.160.826,00)	96,08	
2.08.04.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	7.310.000,00	7.310.000,00	0,00	100,00	
2.08.04.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.016.018.426,00	975.857.600,00	(40.160.826,00)	96,05	
2.08.04.2.02.0002	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.938.408.000,00	1.932.722.351,00	(5.685.649,00)	99,71	
2.08.04.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.938.408.000,00	1.932.722.351,00	(5.685.649,00)	99,71	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.08.04.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.938.408.000,00	1.932.722.351,00	(5.685.649,00)	99,71	
2.08.04.2.02.0003	PENGUATAN JEJARING ANTAR LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	202.253.000,00	202.253.000,00	0,00	100,00	
2.08.04.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	202.253.000,00	202.253.000,00	0,00	100,00	
2.08.04.2.02.0003.5.1.01	Belanja Pegawai	7.310.000,00	7.310.000,00	0,00	100,00	
2.08.04.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.943.000,00	194.943.000,00	0,00	100,00	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	112.706.500,00	112.606.200,00	(100.300,00)	99,91	
2.08.05.2.01	PENGUMPULAN, PENGOLAHAN ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	112.706.500,00	112.606.200,00	(100.300,00)	99,91	
2.08.05.2.01.0001	PENYEDIAAN DATA GENDER DAN ANAK DI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	112.706.500,00	112.606.200,00	(100.300,00)	99,91	
2.08.05.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	112.706.500,00	112.606.200,00	(100.300,00)	99,91	
2.08.05.2.01.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	8.670.000,00	8.670.000,00	0,00	100,00	
2.08.05.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.036.500,00	103.936.200,00	(100.300,00)	99,90	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	536.464.700,00	527.104.700,00	(9.360.000,00)	98,26	
2.08.06.2.01	PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	36.101.900,00	36.101.900,00	0,00	100,00	
2.08.06.2.01.0001	ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PEMENUHAN HAK ANAK PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, MEDIA DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	36.101.900,00	36.101.900,00	0,00	100,00	
2.08.06.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	36.101.900,00	36.101.900,00	0,00	100,00	
2.08.06.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.101.900,00	36.101.900,00	0,00	100,00	
2.08.06.2.02	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	500.362.800,00	491.002.800,00	(9.360.000,00)	98,13	
2.08.06.2.02.0001	PENYEDIAAN LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	119.462.800,00	110.102.800,00	(9.360.000,00)	92,16	
2.08.06.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	119.462.800,00	110.102.800,00	(9.360.000,00)	92,16	
2.08.06.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	21.000.000,00	12.540.000,00	(8.460.000,00)	59,71	
2.08.06.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.462.800,00	97.562.800,00	(900.000,00)	99,09	
2.08.06.2.02.0004	PENGUATAN JEJARING ANTAR LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	380.900.000,00	380.900.000,00	0,00	100,00	
2.08.06.2.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	380.900.000,00	380.900.000,00	0,00	100,00	
2.08.06.2.02.0004.5.1.05	Belanja Hibah	380.900.000,00	380.900.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
	JUMLAH BELANJA DAERAH	15.102.343.905,00	14.738.749.941,00	(363.593.964,00)	97,59	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(15.102.343.905,00)	(14.738.749.941,00)	363.593.964,00	97,59	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(15.102.343.905,00)	(14.738.749.941,00)	363.593.964,00	97,59	





2.09.3.27.3.25.12.0000

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Satuan Kerja : 2.09.3.27.3.25.12.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
2.09.3.27.3.25.12.0000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	700.000.000,00	813.828.000,00	113.828.000,00	116,26	
2.09.3.27.3.25.12.0000.4.1.02	Retribusi Daerah	700.000.000,00	813.828.000,00	113.828.000,00	116,26	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	700.000.000,00	813.828.000,00	113.828.000,00	116,26	
5	BELANJA DAERAH					
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.593.490.915,00	17.555.313.605,00	(38.177.310,00)	99,78	
2.09.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	100,00	
2.09.01.2.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	100,00	
2.09.01.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	100,00	
2.09.01.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	100,00	
2.09.01.2.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
2.09.01.2.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
2.09.01.2.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
2.09.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	15.134.560.367,00	15.122.037.148,00	(12.523.219,00)	99,92	
2.09.01.2.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	15.084.224.367,00	15.072.940.148,00	(11.284.219,00)	99,93	
2.09.01.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	15.084.224.367,00	15.072.940.148,00	(11.284.219,00)	99,93	
2.09.01.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	15.084.224.367,00	15.072.940.148,00	(11.284.219,00)	99,93	
2.09.01.2.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	50.336.000,00	49.097.000,00	(1.239.000,00)	97,54	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.09.01.2.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	50.336.000,00	49.097.000,00	(1.239.000,00)	97,54	
2.09.01.2.02.0007.5.1.01	Belanja Pegawai	50.159.000,00	48.920.000,00	(1.239.000,00)	97,53	
2.09.01.2.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.000,00	177.000,00	0,00	100,00	
2.09.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	487.366.000,00	487.274.670,00	(91.330,00)	99,98	
2.09.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	23.112.900,00	23.112.900,00	0,00	100,00	
2.09.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	23.112.900,00	23.112.900,00	0,00	100,00	
2.09.01.2.06.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	100,00	
2.09.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.422.900,00	21.422.900,00	0,00	100,00	
2.09.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	32.746.600,00	32.746.600,00	0,00	100,00	
2.09.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	32.746.600,00	32.746.600,00	0,00	100,00	
2.09.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.746.600,00	32.746.600,00	0,00	100,00	
2.09.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	19.247.300,00	19.247.300,00	0,00	100,00	
2.09.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	19.247.300,00	19.247.300,00	0,00	100,00	
2.09.01.2.06.0003.5.1.01	Belanja Pegawai	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	100,00	
2.09.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.557.300,00	17.557.300,00	0,00	100,00	
2.09.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	25.003.800,00	25.000.200,00	(3.600,00)	99,99	
2.09.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	25.003.800,00	25.000.200,00	(3.600,00)	99,99	
2.09.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.003.800,00	25.000.200,00	(3.600,00)	99,99	
2.09.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGAANDAN	14.541.400,00	14.541.400,00	0,00	100,00	
2.09.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	14.541.400,00	14.541.400,00	0,00	100,00	
2.09.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.541.400,00	14.541.400,00	0,00	100,00	
2.09.01.2.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	372.714.000,00	372.626.270,00	(87.730,00)	99,98	
2.09.01.2.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	372.714.000,00	372.626.270,00	(87.730,00)	99,98	
2.09.01.2.06.0009.5.1.01	Belanja Pegawai	28.410.000,00	28.410.000,00	0,00	100,00	
2.09.01.2.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	344.304.000,00	344.216.270,00	(87.730,00)	99,97	
2.09.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	16.833.000,00	16.682.999,00	(150.001,00)	99,11	
2.09.01.2.07.0006	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	16.833.000,00	16.682.999,00	(150.001,00)	99,11	
2.09.01.2.07.0006.5.1	BELANJA OPERASI	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	100,00	
2.09.01.2.07.0006.5.1.01	Belanja Pegawai	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	100,00	
2.09.01.2.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	15.143.000,00	14.992.999,00	(150.001,00)	99,01	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.09.01.2.07.0006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.143.000,00	14.992.999,00	(150.001,00)	99,01	
2.09.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.533.836.948,00	1.509.108.297,00	(24.728.651,00)	98,39	
2.09.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	392.353.500,00	383.709.329,00	(8.644.171,00)	97,80	
2.09.01.2.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	392.353.500,00	383.709.329,00	(8.644.171,00)	97,80	
2.09.01.2.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	392.353.500,00	383.709.329,00	(8.644.171,00)	97,80	
2.09.01.2.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.141.483.448,00	1.125.398.968,00	(16.084.480,00)	98,59	
2.09.01.2.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.141.483.448,00	1.125.398.968,00	(16.084.480,00)	98,59	
2.09.01.2.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.141.483.448,00	1.125.398.968,00	(16.084.480,00)	98,59	
2.09.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	415.944.600,00	415.260.491,00	(684.109,00)	99,84	
2.09.01.2.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	302.308.600,00	301.673.491,00	(635.109,00)	99,79	
2.09.01.2.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	302.308.600,00	301.673.491,00	(635.109,00)	99,79	
2.09.01.2.09.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	302.308.600,00	301.673.491,00	(635.109,00)	99,79	
2.09.01.2.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	63.656.000,00	63.622.000,00	(34.000,00)	99,95	
2.09.01.2.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	63.656.000,00	63.622.000,00	(34.000,00)	99,95	
2.09.01.2.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.656.000,00	63.622.000,00	(34.000,00)	99,95	
2.09.01.2.09.0011	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	49.980.000,00	49.965.000,00	(15.000,00)	99,97	
2.09.01.2.09.0011.5.1	BELANJA OPERASI	49.980.000,00	49.965.000,00	(15.000,00)	99,97	
2.09.01.2.09.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.980.000,00	49.965.000,00	(15.000,00)	99,97	
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	13.930.000,00	13.770.000,00	(160.000,00)	98,85	
2.09.02.2.01	PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN SELURUH PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN SESUAI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.930.000,00	13.770.000,00	(160.000,00)	98,85	
2.09.02.2.01.0003	PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN LAINNYA	13.930.000,00	13.770.000,00	(160.000,00)	98,85	
2.09.02.2.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	13.930.000,00	13.770.000,00	(160.000,00)	98,85	
2.09.02.2.01.0003.5.1.01	Belanja Pegawai	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	100,00	
2.09.02.2.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.240.000,00	12.080.000,00	(160.000,00)	98,69	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	4.113.286.052,00	4.089.656.302,00	(23.629.750,00)	99,43	
2.09.03.2.01	PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN	4.042.102.500,00	4.018.688.402,00	(23.414.098,00)	99,42	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.09.03.2.01.0003	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN DISTRIBUSI PANGAN POKOK DAN PANGAN LAINNYA	4.006.242.500,00	3.984.153.902,00	(22.088.598,00)	99,45	
2.09.03.2.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	4.006.242.500,00	3.984.153.902,00	(22.088.598,00)	99,45	
2.09.03.2.01.0003.5.1.01	Belanja Pegawai	5.730.000,00	4.040.000,00	(1.690.000,00)	70,51	
2.09.03.2.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.512.500,00	3.980.113.902,00	(20.398.598,00)	99,49	
2.09.03.2.01.0015	PEMANTAUAN HARGA DAN PASOKAN PANGAN	560.000,00	0,00	(560.000,00)	0,00	
2.09.03.2.01.0015.5.1	BELANJA OPERASI	560.000,00	0,00	(560.000,00)	0,00	
2.09.03.2.01.0015.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	560.000,00	0,00	(560.000,00)	0,00	
2.09.03.2.01.0016	PENYUSUNAN NERACA BAHAN MAKANAN (NBM)	35.300.000,00	34.534.500,00	(765.500,00)	97,83	
2.09.03.2.01.0016.5.1	BELANJA OPERASI	35.300.000,00	34.534.500,00	(765.500,00)	97,83	
2.09.03.2.01.0016.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.300.000,00	34.534.500,00	(765.500,00)	97,83	
2.09.03.2.02	PENGELOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN/KOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.03.2.02.0003	PENGADAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.03.2.02.0003.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.03.2.04	PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI	71.183.552,00	70.967.900,00	(215.652,00)	99,70	
2.09.03.2.04.0001	PENYUSUNAN DAN PENETAPAN TARGET KONSUMSI PANGAN PER KAPITA PER TAHUN	30.421.800,00	30.421.800,00	0,00	100,00	
2.09.03.2.04.0001.5.1	BELANJA OPERASI	30.421.800,00	30.421.800,00	0,00	100,00	
2.09.03.2.04.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.421.800,00	30.421.800,00	0,00	100,00	
2.09.03.2.04.0002	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL	40.761.752,00	40.546.100,00	(215.652,00)	99,47	
2.09.03.2.04.0002.5.1	BELANJA OPERASI	40.761.752,00	40.546.100,00	(215.652,00)	99,47	
2.09.03.2.04.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	5.730.000,00	5.730.000,00	0,00	100,00	
2.09.03.2.04.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.031.752,00	34.816.100,00	(215.652,00)	99,38	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1.054.222.500,00	1.048.575.298,00	(5.647.202,00)	99,46	
2.09.04.2.01	PENYUSUNAN PETA KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN	12.650.000,00	12.650.000,00	0,00	100,00	
2.09.04.2.01.0001	PENYUSUNAN, PEMUTAKHIRAN DAN ANALISIS PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN	12.650.000,00	12.650.000,00	0,00	100,00	
2.09.04.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	12.650.000,00	12.650.000,00	0,00	100,00	
2.09.04.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.650.000,00	12.650.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.09.04.2.02	PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	1.041.572.500,00	1.035.925.298,00	(5.647.202,00)	99,46	
2.09.04.2.02.0002	PELAKSANAAN PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PADA KERAWANAN PANGAN YANG MENCAKUP DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.036.502.500,00	1.030.855.398,00	(5.647.102,00)	99,46	
2.09.04.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.036.502.500,00	1.030.855.398,00	(5.647.102,00)	99,46	
2.09.04.2.02.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	100,00	
2.09.04.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.034.812.500,00	1.029.165.398,00	(5.647.102,00)	99,45	
2.09.04.2.02.0003	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENANGANAN KERAWANAN PANGAN DAN GIZI KABUPATEN/KOTA	5.070.000,00	5.069.900,00	(100,00)	100,00	
2.09.04.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	5.070.000,00	5.069.900,00	(100,00)	100,00	
2.09.04.2.02.0003.5.1.01	Belanja Pegawai	4.040.000,00	4.040.000,00	0,00	100,00	
2.09.04.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.030.000,00	1.029.900,00	(100,00)	99,99	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	19.267.703,00	15.993.950,00	(3.273.753,00)	83,01	
2.09.05.2.01	PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.267.703,00	15.993.950,00	(3.273.753,00)	83,01	
2.09.05.2.01.0007	PENYEDIAAN SARANA PENGUJIAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.267.703,00	15.993.950,00	(3.273.753,00)	83,01	
2.09.05.2.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	19.267.703,00	15.993.950,00	(3.273.753,00)	83,01	
2.09.05.2.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.267.703,00	15.993.950,00	(3.273.753,00)	83,01	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.322.463.100,00	3.307.548.946,00	(14.914.154,00)	99,55	
3.25.04.2.02	PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL	62.306.800,00	62.306.800,00	0,00	100,00	
3.25.04.2.02.0004	PEMBERIAN PENDAMPINGAN, KEMUDAHAN AKSES ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN INFORMASI, SERTA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	62.306.800,00	62.306.800,00	0,00	100,00	
3.25.04.2.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	62.306.800,00	62.306.800,00	0,00	100,00	
3.25.04.2.02.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	100,00	
3.25.04.2.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.616.800,00	60.616.800,00	0,00	100,00	
3.25.04.2.04	PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN	3.260.156.300,00	3.245.242.146,00	(14.914.154,00)	99,54	
3.25.04.2.04.0002	PENYEDIAAN PRASARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.239.206.300,00	3.224.762.646,00	(14.443.654,00)	99,55	
3.25.04.2.04.0002.5.1	BELANJA OPERASI	3.239.206.300,00	3.224.762.646,00	(14.443.654,00)	99,55	
3.25.04.2.04.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	100,00	
3.25.04.2.04.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.229.506.300,00	3.215.062.646,00	(14.443.654,00)	99,55	
3.25.04.2.04.0004	PENGELOLAAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN BUDIDAYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.950.000,00	20.479.500,00	(470.500,00)	97,75	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.25.04.2.04.0004.5.1	BELANJA OPERASI	20.950.000,00	20.479.500,00	(470.500,00)	97,75	
3.25.04.2.04.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.950.000,00	20.479.500,00	(470.500,00)	97,75	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	61.597.600,00	61.207.600,00	(390.000,00)	99,37	
3.25.06.2.02	PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL	61.597.600,00	61.207.600,00	(390.000,00)	99,37	
3.25.06.2.02.0001	PELAKSANAAN BIMBINGAN DAN PENERAPAN PERSYARATAN ATAU STANDAR PADA USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL	61.597.600,00	61.207.600,00	(390.000,00)	99,37	
3.25.06.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	61.597.600,00	61.207.600,00	(390.000,00)	99,37	
3.25.06.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	5.320.000,00	5.320.000,00	0,00	100,00	
3.25.06.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.277.600,00	55.887.600,00	(390.000,00)	99,31	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	7.481.415.403,00	7.315.059.230,00	(166.356.173,00)	97,78	
3.27.02.2.01	PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN	718.501.500,00	716.945.070,00	(1.556.430,00)	99,78	
3.27.02.2.01.0001	PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI	595.000.000,00	594.354.570,00	(645.430,00)	99,89	
3.27.02.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	520.000.000,00	519.999.000,00	(1.000,00)	100,00	
3.27.02.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	520.000.000,00	519.999.000,00	(1.000,00)	100,00	
3.27.02.2.01.0001.5.2	BELANJA MODAL	75.000.000,00	74.355.570,00	(644.430,00)	99,14	
3.27.02.2.01.0001.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	75.000.000,00	74.355.570,00	(644.430,00)	99,14	
3.27.02.2.01.0002	PENDAMPINGAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN	123.501.500,00	122.590.500,00	(911.000,00)	99,26	
3.27.02.2.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	123.501.500,00	122.590.500,00	(911.000,00)	99,26	
3.27.02.2.01.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	5.320.000,00	5.320.000,00	0,00	100,00	
3.27.02.2.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.181.500,00	117.270.500,00	(911.000,00)	99,23	
3.27.02.2.02	PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	6.762.913.903,00	6.598.114.160,00	(164.799.743,00)	97,56	
3.27.02.2.02.0002	PENINGKATAN KUALITAS SDG HEWAN/TANAMAN	151.496.000,00	138.814.600,00	(12.681.400,00)	91,63	
3.27.02.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	151.496.000,00	138.814.600,00	(12.681.400,00)	91,63	
3.27.02.2.02.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	5.110.000,00	5.110.000,00	0,00	100,00	
3.27.02.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.386.000,00	133.704.600,00	(12.681.400,00)	91,34	
3.27.02.2.02.0003	PEMANFAATAN SDG HEWAN/TANAMAN	6.611.417.903,00	6.459.299.560,00	(152.118.343,00)	97,70	
3.27.02.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	217.887.106,00	187.495.206,00	(30.391.900,00)	86,05	
3.27.02.2.02.0003.5.1.01	Belanja Pegawai	27.620.000,00	24.900.000,00	(2.720.000,00)	90,15	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.27.02.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.267.106,00	162.595.206,00	(27.671.900,00)	85,46	
3.27.02.2.02.0003.5.2	BELANJA MODAL	6.393.530.797,00	6.271.804.354,00	(121.726.443,00)	98,10	
3.27.02.2.02.0003.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.193.530.797,00	6.073.868.616,00	(119.662.181,00)	98,07	
3.27.02.2.02.0003.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	197.935.738,00	(2.064.262,00)	98,97	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.699.423.700,00	1.653.532.225,00	(45.891.475,00)	97,30	
3.27.03.2.02	PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN	1.699.423.700,00	1.653.532.225,00	(45.891.475,00)	97,30	
3.27.03.2.02.0015	PEMBANGUNAN, REHABILITASI, PEMELIHARAAN DAN OPERASIONALISASI RUMAH POTONG HEWAN	1.699.423.700,00	1.653.532.225,00	(45.891.475,00)	97,30	
3.27.03.2.02.0015.5.1	BELANJA OPERASI	520.638.700,00	499.933.271,00	(20.705.429,00)	96,02	
3.27.03.2.02.0015.5.1.01	Belanja Pegawai	7.770.000,00	7.770.000,00	0,00	100,00	
3.27.03.2.02.0015.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	512.868.700,00	492.163.271,00	(20.705.429,00)	95,96	
3.27.03.2.02.0015.5.2	BELANJA MODAL	1.178.785.000,00	1.153.598.954,00	(25.186.046,00)	97,86	
3.27.03.2.02.0015.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	4.750.000,00	(250.000,00)	95,00	
3.27.03.2.02.0015.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.173.785.000,00	1.148.848.954,00	(24.936.046,00)	97,88	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	199.438.400,00	190.325.153,00	(9.113.247,00)	95,43	
3.27.04.2.01	PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	92.558.800,00	85.634.900,00	(6.923.900,00)	92,52	
3.27.04.2.01.0008	PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN MENULAR DAN ZOONOSIS DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	92.558.800,00	85.634.900,00	(6.923.900,00)	92,52	
3.27.04.2.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	92.558.800,00	85.634.900,00	(6.923.900,00)	92,52	
3.27.04.2.01.0008.5.1.01	Belanja Pegawai	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00	100,00	
3.27.04.2.01.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.038.800,00	80.114.900,00	(6.923.900,00)	92,05	
3.27.04.2.02	PENGAWASAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.491.000,00	14.050.300,00	(440.700,00)	96,96	
3.27.04.2.02.0004	PENGAWASAN ATAS PENERAPAN PERSYARATAN TEKNIS UNTUK PEMASUKAN DAN/ATAU PENGELUARAN HEWAN, PRODUK HEWAN DAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT HEWAN LAINNYA (HPM)	14.491.000,00	14.050.300,00	(440.700,00)	96,96	
3.27.04.2.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	14.491.000,00	14.050.300,00	(440.700,00)	96,96	
3.27.04.2.02.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	100,00	
3.27.04.2.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.591.000,00	11.150.300,00	(440.700,00)	96,20	
3.27.04.2.04	PENERAPAN DAN PENGAWASAN PERSYARATAN TEKNIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	92.388.600,00	90.639.953,00	(1.748.647,00)	98,11	
3.27.04.2.04.0002	PENGAWASAN PEREDARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN	51.618.300,00	51.422.300,00	(196.000,00)	99,62	
3.27.04.2.04.0002.5.1	BELANJA OPERASI	51.618.300,00	51.422.300,00	(196.000,00)	99,62	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.27.04.2.04.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.618.300,00	51.422.300,00	(196.000,00)	99,62	
3.27.04.2.04.0004	PENGUJIAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	40.770.300,00	39.217.653,00	(1.552.647,00)	96,19	
3.27.04.2.04.0004.5.1	BELANJA OPERASI	40.770.300,00	39.217.653,00	(1.552.647,00)	96,19	
3.27.04.2.04.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.770.300,00	39.217.653,00	(1.552.647,00)	96,19	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	9.981.900,00	9.614.600,00	(367.300,00)	96,32	
3.27.05.2.01	PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA	9.981.900,00	9.614.600,00	(367.300,00)	96,32	
3.27.05.2.01.0001	PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN (OPT) TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN	9.981.900,00	9.614.600,00	(367.300,00)	96,32	
3.27.05.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	9.981.900,00	9.614.600,00	(367.300,00)	96,32	
3.27.05.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.981.900,00	9.614.600,00	(367.300,00)	96,32	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	894.997.300,00	886.770.560,00	(8.226.740,00)	99,08	
3.27.07.2.01	PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN	894.997.300,00	886.770.560,00	(8.226.740,00)	99,08	
3.27.07.2.01.0001	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA	9.479.800,00	8.468.400,00	(1.011.400,00)	89,33	
3.27.07.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	9.479.800,00	8.468.400,00	(1.011.400,00)	89,33	
3.27.07.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.479.800,00	8.468.400,00	(1.011.400,00)	89,33	
3.27.07.2.01.0002	PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PETANI DI KECAMATAN DAN DESA	49.039.800,00	44.589.800,00	(4.450.000,00)	90,93	
3.27.07.2.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	49.039.800,00	44.589.800,00	(4.450.000,00)	90,93	
3.27.07.2.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.039.800,00	44.589.800,00	(4.450.000,00)	90,93	
3.27.07.2.01.0003	PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN PERTANIAN	836.477.700,00	833.712.360,00	(2.765.340,00)	99,67	
3.27.07.2.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	836.477.700,00	833.712.360,00	(2.765.340,00)	99,67	
3.27.07.2.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	836.477.700,00	833.712.360,00	(2.765.340,00)	99,67	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	36.463.514.573,00	36.147.367.469,00	(316.147.104,00)	99,13	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(35.763.514.573,00)	(35.333.539.469,00)	429.975.104,00	98,80	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(35.763.514.573,00)	(35.333.539.469,00)	429.975.104,00	98,80	





2.11.1.03.0.00.13.0000

DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Satuan Kerja : 2.11.1.03.0.00.13.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
2.11.1.03.0.00.13.0000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	14.814.660.497,00	14.684.064.054,00	(130.596.443,00)	99,12	
2.11.1.03.0.00.13.0000.4.1.02	Retribusi Daerah	14.813.571.600,00	14.682.315.717,00	(131.255.883,00)	99,11	
2.11.1.03.0.00.13.0000.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.088.897,00	1.748.337,00	659.440,00	160,56	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	14.814.660.497,00	14.684.064.054,00	(130.596.443,00)	99,12	
5	BELANJA DAERAH					
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	14.197.353.140,00	13.142.241.164,00	(1.055.111.976,00)	92,57	
1.03.04.2.01	PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.197.353.140,00	13.142.241.164,00	(1.055.111.976,00)	92,57	
1.03.04.2.01.0010	PEMBANGUNAN TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.060.880.000,00	534.060.497,00	(526.819.503,00)	50,34	
1.03.04.2.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	28.633.871,00	28.360.000,00	(273.871,00)	99,04	
1.03.04.2.01.0010.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.04.2.01.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.633.871,00	28.360.000,00	(273.871,00)	99,04	
1.03.04.2.01.0010.5.2	BELANJA MODAL	1.032.246.129,00	505.700.497,00	(526.545.632,00)	48,99	
1.03.04.2.01.0010.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	617.003.000,00	287.787.221,00	(329.215.779,00)	46,64	
1.03.04.2.01.0010.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	415.243.129,00	217.913.276,00	(197.329.853,00)	52,48	
1.03.04.2.01.0013	PENINGKATAN TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.669.364.600,00	1.448.427.828,00	(220.936.772,00)	86,77	
1.03.04.2.01.0013.5.1	BELANJA OPERASI	1.669.364.600,00	1.448.427.828,00	(220.936.772,00)	86,77	
1.03.04.2.01.0013.5.1.01	Belanja Pegawai	43.640.000,00	42.960.000,00	(680.000,00)	98,44	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03.04.2.01.0013.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.625.724.600,00	1.405.467.828,00	(220.256.772,00)	86,45	
1.03.04.2.01.0016	OPTIMALISASI TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.787.899.700,00	1.619.722.822,00	(168.176.878,00)	90,59	
1.03.04.2.01.0016.5.1	BELANJA OPERASI	1.787.899.700,00	1.619.722.822,00	(168.176.878,00)	90,59	
1.03.04.2.01.0016.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.04.2.01.0016.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.787.899.700,00	1.619.722.822,00	(168.176.878,00)	90,59	
1.03.04.2.01.0017	PENYEDIAAN SARANA PENDUKUNG TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	9.679.208.840,00	9.540.030.017,00	(139.178.823,00)	98,56	
1.03.04.2.01.0017.5.1	BELANJA OPERASI	3.628.944.840,00	3.583.180.017,00	(45.764.823,00)	98,74	
1.03.04.2.01.0017.5.1.01	Belanja Pegawai	24.310.000,00	24.310.000,00	0,00	100,00	
1.03.04.2.01.0017.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.604.634.840,00	3.558.870.017,00	(45.764.823,00)	98,73	
1.03.04.2.01.0017.5.2	BELANJA MODAL	6.050.264.000,00	5.956.850.000,00	(93.414.000,00)	98,46	
1.03.04.2.01.0017.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.050.264.000,00	5.956.850.000,00	(93.414.000,00)	98,46	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	109.093.841.428,00	102.092.596.787,00	(7.001.244.641,00)	93,58	
2.11.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	118.990.000,00	118.379.300,00	(610.700,00)	99,49	
2.11.01.2.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	118.990.000,00	118.379.300,00	(610.700,00)	99,49	
2.11.01.2.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	118.990.000,00	118.379.300,00	(610.700,00)	99,49	
2.11.01.2.01.0007.5.1.01	Belanja Pegawai	12.780.000,00	12.780.000,00	0,00	100,00	
2.11.01.2.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.210.000,00	105.599.300,00	(610.700,00)	99,43	
2.11.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	35.534.118.051,00	35.036.612.859,00	(497.505.192,00)	98,60	
2.11.01.2.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	35.424.198.051,00	34.946.272.859,00	(477.925.192,00)	98,65	
2.11.01.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	35.424.198.051,00	34.946.272.859,00	(477.925.192,00)	98,65	
2.11.01.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	35.424.198.051,00	34.946.272.859,00	(477.925.192,00)	98,65	
2.11.01.2.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	109.920.000,00	90.340.000,00	(19.580.000,00)	82,19	
2.11.01.2.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	109.920.000,00	90.340.000,00	(19.580.000,00)	82,19	
2.11.01.2.02.0007.5.1.01	Belanja Pegawai	109.920.000,00	90.340.000,00	(19.580.000,00)	82,19	
2.11.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.785.809.300,00	1.671.447.267,00	(114.362.033,00)	93,60	
2.11.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	859.126.600,00	846.657.600,00	(12.469.000,00)	98,55	
2.11.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	859.126.600,00	846.657.600,00	(12.469.000,00)	98,55	
2.11.01.2.06.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	2.090.000,00	0,00	(2.090.000,00)	0,00	
2.11.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	857.036.600,00	846.657.600,00	(10.379.000,00)	98,79	
2.11.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	84.686.800,00	79.427.850,00	(5.258.950,00)	93,79	
1.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	84.686.800,00	79.427.850,00	(5.258.950,00)	93,79	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.11.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.686.800,00	79.427.850,00	(5.258.950,00)	93,79	
2.11.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	362.310.000,00	322.835.000,00	(39.475.000,00)	89,10	
2.11.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	362.310.000,00	322.835.000,00	(39.475.000,00)	89,10	
2.11.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	8.360.000,00	1.360.000,00	(7.000.000,00)	16,27	
2.11.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	353.950.000,00	321.475.000,00	(32.475.000,00)	90,82	
2.11.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	100.015.099,00	94.374.000,00	(5.641.099,00)	94,36	
2.11.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	100.015.099,00	94.374.000,00	(5.641.099,00)	94,36	
2.11.01.2.06.0005.5.1.01	Belanja Pegawai	1.690.000,00	680.000,00	(1.010.000,00)	40,24	
2.11.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.325.099,00	93.694.000,00	(4.631.099,00)	95,29	
2.11.01.2.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	379.670.801,00	328.152.817,00	(51.517.984,00)	86,43	
2.11.01.2.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	379.670.801,00	328.152.817,00	(51.517.984,00)	86,43	
2.11.01.2.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	379.670.801,00	328.152.817,00	(51.517.984,00)	86,43	
2.11.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	593.543.600,00	586.415.000,00	(7.128.600,00)	98,80	
2.11.01.2.07.0011	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	593.543.600,00	586.415.000,00	(7.128.600,00)	98,80	
2.11.01.2.07.0011.5.1	BELANJA OPERASI	2.290.000,00	0,00	(2.290.000,00)	0,00	
2.11.01.2.07.0011.5.1.01	Belanja Pegawai	2.290.000,00	0,00	(2.290.000,00)	0,00	
2.11.01.2.07.0011.5.2	BELANJA MODAL	591.253.600,00	586.415.000,00	(4.838.600,00)	99,18	
2.11.01.2.07.0011.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	591.253.600,00	586.415.000,00	(4.838.600,00)	99,18	
2.11.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	43.316.462.688,00	41.557.178.277,00	(1.759.284.411,00)	95,94	
2.11.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	354.355.000,00	343.781.087,00	(10.573.913,00)	97,02	
2.11.01.2.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	354.355.000,00	343.781.087,00	(10.573.913,00)	97,02	
2.11.01.2.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	354.355.000,00	343.781.087,00	(10.573.913,00)	97,02	
2.11.01.2.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	42.962.107.688,00	41.213.397.190,00	(1.748.710.498,00)	95,93	
2.11.01.2.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	42.962.107.688,00	41.213.397.190,00	(1.748.710.498,00)	95,93	
2.11.01.2.08.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	59.760.000,00	59.760.000,00	0,00	100,00	
2.11.01.2.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.902.347.688,00	41.153.637.190,00	(1.748.710.498,00)	95,92	
2.11.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	27.744.917.789,00	23.122.564.084,00	(4.622.353.705,00)	83,34	
2.11.01.2.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	26.957.289.789,00	22.410.440.632,00	(4.546.849.157,00)	83,13	
2.11.01.2.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	26.957.289.789,00	22.410.440.632,00	(4.546.849.157,00)	83,13	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.11.01.2.09.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	21.960.000,00	20.600.000,00	(1.360.000,00)	93,81	
2.11.01.2.09.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.935.329.789,00	22.389.840.632,00	(4.545.489.157,00)	83,12	
2.11.01.2.09.0009	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	496.788.000,00	468.918.807,00	(27.869.193,00)	94,39	
2.11.01.2.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	496.788.000,00	468.918.807,00	(27.869.193,00)	94,39	
2.11.01.2.09.0009.5.1.01	Belanja Pegawai	14.050.000,00	0,00	(14.050.000,00)	0,00	
2.11.01.2.09.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	482.738.000,00	468.918.807,00	(13.819.193,00)	97,14	
2.11.01.2.09.0011	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	290.840.000,00	243.204.645,00	(47.635.355,00)	83,62	
2.11.01.2.09.0011.5.1	BELANJA OPERASI	290.840.000,00	243.204.645,00	(47.635.355,00)	83,62	
2.11.01.2.09.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	290.840.000,00	243.204.645,00	(47.635.355,00)	83,62	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	678.840.000,00	662.159.300,00	(16.680.700,00)	97,54	
2.11.02.2.01	RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KABUPATEN/KOTA	235.840.000,00	223.606.300,00	(12.233.700,00)	94,81	
2.11.02.2.01.0003	PENETAPAN RPPLH KABUPATEN/KOTA	235.840.000,00	223.606.300,00	(12.233.700,00)	94,81	
2.11.02.2.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	235.840.000,00	223.606.300,00	(12.233.700,00)	94,81	
2.11.02.2.01.0003.5.1.01	Belanja Pegawai	11.910.000,00	10.500.000,00	(1.410.000,00)	88,16	
2.11.02.2.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	223.930.000,00	213.106.300,00	(10.823.700,00)	95,17	
2.11.02.2.02	PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KABUPATEN/KOTA	443.000.000,00	438.553.000,00	(4.447.000,00)	99,00	
2.11.02.2.02.0002	PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS RPJPD/RPJMD	443.000.000,00	438.553.000,00	(4.447.000,00)	99,00	
2.11.02.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	443.000.000,00	438.553.000,00	(4.447.000,00)	99,00	
2.11.02.2.02.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	2.090.000,00	680.000,00	(1.410.000,00)	32,54	
2.11.02.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	440.910.000,00	437.873.000,00	(3.037.000,00)	99,31	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.040.948.000,00	1.003.026.950,00	(37.921.050,00)	96,36	
2.11.03.2.01	PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	940.948.000,00	908.035.800,00	(32.912.200,00)	96,50	
2.11.03.2.01.0001	KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN TERHADAP MEDIA TANAH, AIR, UDARA, DAN LAUT	790.948.000,00	773.069.100,00	(17.878.900,00)	97,74	
2.11.03.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	790.948.000,00	773.069.100,00	(17.878.900,00)	97,74	
2.11.03.2.01.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	37.640.000,00	33.060.000,00	(4.580.000,00)	87,83	
2.11.03.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	753.308.000,00	740.009.100,00	(13.298.900,00)	98,23	
2.11.03.2.01.0002	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA, MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM	150.000.000,00	134.966.700,00	(15.033.300,00)	89,98	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.11.03.2.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	134.966.700,00	(15.033.300,00)	89,98	
2.11.03.2.01.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	4.990.000,00	0,00	(4.990.000,00)	0,00	
2.11.03.2.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.010.000,00	134.966.700,00	(10.043.300,00)	93,07	
2.11.03.2.03	PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	100.000.000,00	94.991.150,00	(5.008.850,00)	94,99	
2.11.03.2.03.0013	KOORDINASI DAN SINKRONISASI REHABILITASI	100.000.000,00	94.991.150,00	(5.008.850,00)	94,99	
2.11.03.2.03.0013.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	94.991.150,00	(5.008.850,00)	94,99	
2.11.03.2.03.0013.5.1.01	Belanja Pegawai	3.380.000,00	1.690.000,00	(1.690.000,00)	50,00	
2.11.03.2.03.0013.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.620.000,00	93.301.150,00	(3.318.850,00)	96,57	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	150.000.000,00	146.912.340,00	(3.087.660,00)	97,94	
2.11.04.2.01	PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA	150.000.000,00	146.912.340,00	(3.087.660,00)	97,94	
2.11.04.2.01.0001	PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	150.000.000,00	146.912.340,00	(3.087.660,00)	97,94	
2.11.04.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	146.912.340,00	(3.087.660,00)	97,94	
2.11.04.2.01.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	3.380.000,00	1.690.000,00	(1.690.000,00)	50,00	
2.11.04.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.620.000,00	145.222.340,00	(1.397.660,00)	99,05	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	146.536.400,00	128.585.907,00	(17.950.493,00)	87,75	
2.11.05.2.01	PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3	146.536.400,00	128.585.907,00	(17.950.493,00)	87,75	
2.11.05.2.01.0002	VERIFIKASI LAPANGAN UNTUK MEMASTIKAN PEMENUHAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3	146.536.400,00	128.585.907,00	(17.950.493,00)	87,75	
2.11.05.2.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	146.536.400,00	128.585.907,00	(17.950.493,00)	87,75	
2.11.05.2.01.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	5.670.000,00	3.780.000,00	(1.890.000,00)	66,67	
2.11.05.2.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.866.400,00	124.805.907,00	(16.060.493,00)	88,60	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	150.000.000,00	148.664.540,00	(1.335.460,00)	99,11	
2.11.06.2.01	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	150.000.000,00	148.664.540,00	(1.335.460,00)	99,11	
2.11.06.2.01.0001	FASILITASI PEMENUHAN KETENTUAN DAN KEWAJIBAN IZIN LINGKUNGAN DAN/ATAU IZIN PPLH	150.000.000,00	148.664.540,00	(1.335.460,00)	99,11	
2.11.06.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	148.664.540,00	(1.335.460,00)	99,11	
2.11.06.2.01.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	6.410.000,00	5.730.000,00	(680.000,00)	89,39	
2.11.06.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.590.000,00	142.934.540,00	(655.460,00)	99,54	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	449.851.500,00	441.529.020,00	(8.322.480,00)	98,15	
2.11.08.2.01	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	449.851.500,00	441.529.020,00	(8.322.480,00)	98,15	
2.11.08.2.01.0002	PENDAMPINGAN GERAKAN PEDULI LINGKUNGAN HIDUP	7.851.500,00	7.171.500,00	(680.000,00)	91,34	
2.11.08.2.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	7.851.500,00	7.171.500,00	(680.000,00)	91,34	
2.11.08.2.01.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	4.310.000,00	3.630.000,00	(680.000,00)	84,22	
2.11.08.2.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.541.500,00	3.541.500,00	0,00	100,00	
2.11.08.2.01.0002.5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.08.2.01.0002.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.08.2.01.0003	PENYELENGGARAAN PENYULUHAN DAN KAMPANYE LINGKUNGAN HIDUP	193.500.000,00	190.087.720,00	(3.412.280,00)	98,24	
2.11.08.2.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	193.500.000,00	190.087.720,00	(3.412.280,00)	98,24	
2.11.08.2.01.0003.5.1.01	Belanja Pegawai	3.100.000,00	680.000,00	(2.420.000,00)	21,94	
2.11.08.2.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.400.000,00	189.407.720,00	(992.280,00)	99,48	
2.11.08.2.01.0005	PENINGKATAN KAPASITAS DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL/LEMBAGA MASYARAKAT/KOMUNITAS/KELOMPOK MASYARAKAT	248.500.000,00	244.269.800,00	(4.230.200,00)	98,30	
2.11.08.2.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	248.500.000,00	244.269.800,00	(4.230.200,00)	98,30	
2.11.08.2.01.0005.5.1.01	Belanja Pegawai	4.180.000,00	2.770.000,00	(1.410.000,00)	66,27	
2.11.08.2.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.320.000,00	241.499.800,00	(2.820.200,00)	98,85	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	507.325.000,00	498.275.500,00	(9.049.500,00)	98,22	
2.11.09.2.01	PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	507.325.000,00	498.275.500,00	(9.049.500,00)	98,22	
2.11.09.2.01.0001	PENILAIAN KINERJA MASYARAKAT/LEMBAGA MASYARAKAT/DUNIA USAHA/DUNIA PENDIDIKAN/FILANTROPI DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	507.325.000,00	498.275.500,00	(9.049.500,00)	98,22	
2.11.09.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	507.325.000,00	498.275.500,00	(9.049.500,00)	98,22	
2.11.09.2.01.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	11.150.000,00	4.710.000,00	(6.440.000,00)	42,24	
2.11.09.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	496.175.000,00	493.565.500,00	(2.609.500,00)	99,47	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	30.000.000,00	28.700.988,00	(1.299.012,00)	95,67	
2.11.10.2.01	PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KABUPATEN/KOTA	30.000.000,00	28.700.988,00	(1.299.012,00)	95,67	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.11.10.2.01.0004	PENGLOLAAN PENGADUAN PERMASALAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT KABUPATEN/KOTA	30.000.000,00	28.700.988,00	(1.299.012,00)	95,67	
2.11.10.2.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	28.700.988,00	(1.299.012,00)	95,67	
2.11.10.2.01.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	5.730.000,00	5.730.000,00	0,00	100,00	
2.11.10.2.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.270.000,00	22.970.988,00	(1.299.012,00)	94,65	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	9.061.922.000,00	8.805.338.321,00	(256.583.679,00)	97,17	
2.11.11.2.01	PENGLOLAAN SAMPAH	9.061.922.000,00	8.805.338.321,00	(256.583.679,00)	97,17	
2.11.11.2.01.0007	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI TPA/TPST/SPA KABUPATEN/KOTA	7.707.335.000,00	7.496.465.570,00	(210.869.430,00)	97,26	
2.11.11.2.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	797.034.500,00	790.183.185,00	(6.851.315,00)	99,14	
2.11.11.2.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	797.034.500,00	790.183.185,00	(6.851.315,00)	99,14	
2.11.11.2.01.0007.5.2	BELANJA MODAL	6.910.300.500,00	6.706.282.385,00	(204.018.115,00)	97,05	
2.11.11.2.01.0007.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.855.102.800,00	5.655.240.000,00	(199.862.800,00)	96,59	
2.11.11.2.01.0007.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	300.156.200,00	298.609.030,00	(1.547.170,00)	99,48	
2.11.11.2.01.0007.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	755.041.500,00	752.433.355,00	(2.608.145,00)	99,65	
2.11.11.2.01.0013	PENGURANGAN SAMPAH MELALUI PEMANFAATAN KEMBALI SAMPAH	1.132.084.500,00	1.121.217.751,00	(10.866.749,00)	99,04	
2.11.11.2.01.0013.5.1	BELANJA OPERASI	1.132.084.500,00	1.121.217.751,00	(10.866.749,00)	99,04	
2.11.11.2.01.0013.5.1.01	Belanja Pegawai	9.000.000,00	5.180.000,00	(3.820.000,00)	57,56	
2.11.11.2.01.0013.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.123.084.500,00	1.116.037.751,00	(7.046.749,00)	99,37	
2.11.11.2.01.0015	PENANGANAN SAMPAH MELALUI PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENANGANAN SAMPAH	222.502.500,00	187.655.000,00	(34.847.500,00)	84,34	
2.11.11.2.01.0015.5.1	BELANJA OPERASI	222.502.500,00	187.655.000,00	(34.847.500,00)	84,34	
2.11.11.2.01.0015.5.1.01	Belanja Pegawai	39.120.000,00	4.840.000,00	(34.280.000,00)	12,37	
2.11.11.2.01.0015.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.382.500,00	182.815.000,00	(567.500,00)	99,69	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	135.506.617.468,00	127.098.030.817,00	(8.408.586.651,00)	93,79	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(120.691.956.971,00)	(112.413.966.763,00)	8.277.990.208,00	93,14	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(120.691.956.971,00)	(112.413.966.763,00)	8.277.990.208,00	93,14	





2.12.0.00.0.00.14.0000

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL
Satuan Kerja : 2.12.0.00.0.00.14.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.223.093.030,00	14.104.668.026,00	(118.425.004,00)	99,17	
2.12.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	86.746.900,00	86.310.000,00	(436.900,00)	99,50	
2.12.01.2.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	86.746.900,00	86.310.000,00	(436.900,00)	99,50	
2.12.01.2.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	86.746.900,00	86.310.000,00	(436.900,00)	99,50	
2.12.01.2.01.0007.5.1.01	Belanja Pegawai	12.120.000,00	12.120.000,00	0,00	100,00	
2.12.01.2.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.626.900,00	74.190.000,00	(436.900,00)	99,41	
2.12.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	11.002.931.326,00	10.953.096.702,00	(49.834.624,00)	99,55	
2.12.01.2.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	10.952.671.326,00	10.907.136.702,00	(45.534.624,00)	99,58	
2.12.01.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	10.952.671.326,00	10.907.136.702,00	(45.534.624,00)	99,58	
2.12.01.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	10.952.671.326,00	10.907.136.702,00	(45.534.624,00)	99,58	
2.12.01.2.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	50.260.000,00	45.960.000,00	(4.300.000,00)	91,44	
2.12.01.2.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	50.260.000,00	45.960.000,00	(4.300.000,00)	91,44	
2.12.01.2.02.0007.5.1.01	Belanja Pegawai	47.260.000,00	42.960.000,00	(4.300.000,00)	90,90	
2.12.01.2.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.12.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	666.032.500,00	641.521.782,00	(24.510.718,00)	96,32	
2.12.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	17.499.800,00	16.631.700,00	(868.100,00)	95,04	
2.12.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	17.499.800,00	16.631.700,00	(868.100,00)	95,04	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.12.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.499.800,00	16.631.700,00	(868.100,00)	95,04	
2.12.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	30.469.100,00	28.209.500,00	(2.259.600,00)	92,58	
2.12.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	30.469.100,00	28.209.500,00	(2.259.600,00)	92,58	
2.12.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.469.100,00	28.209.500,00	(2.259.600,00)	92,58	
2.12.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	244.593.500,00	226.661.500,00	(17.932.000,00)	92,67	
2.12.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	244.593.500,00	226.661.500,00	(17.932.000,00)	92,67	
2.12.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.593.500,00	226.661.500,00	(17.932.000,00)	92,67	
2.12.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	21.612.000,00	21.500.000,00	(112.000,00)	99,48	
2.12.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	21.612.000,00	21.500.000,00	(112.000,00)	99,48	
2.12.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.612.000,00	21.500.000,00	(112.000,00)	99,48	
2.12.01.2.06.0008	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	79.459.800,00	79.379.700,00	(80.100,00)	99,90	
2.12.01.2.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	79.459.800,00	79.379.700,00	(80.100,00)	99,90	
2.12.01.2.06.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.459.800,00	79.379.700,00	(80.100,00)	99,90	
2.12.01.2.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	272.398.300,00	269.139.382,00	(3.258.918,00)	98,80	
2.12.01.2.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	272.398.300,00	269.139.382,00	(3.258.918,00)	98,80	
2.12.01.2.06.0009.5.1.01	Belanja Pegawai	16.920.000,00	16.920.000,00	0,00	100,00	
2.12.01.2.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.478.300,00	252.219.382,00	(3.258.918,00)	98,72	
2.12.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	323.392.000,00	316.671.600,00	(6.720.400,00)	97,92	
2.12.01.2.07.0006	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	323.392.000,00	316.671.600,00	(6.720.400,00)	97,92	
2.12.01.2.07.0006.5.1	BELANJA OPERASI	1.498.400,00	1.498.400,00	0,00	100,00	
2.12.01.2.07.0006.5.1.01	Belanja Pegawai	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
2.12.01.2.07.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	818.400,00	818.400,00	0,00	100,00	
2.12.01.2.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	321.893.600,00	315.173.200,00	(6.720.400,00)	97,91	
2.12.01.2.07.0006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	321.893.600,00	315.173.200,00	(6.720.400,00)	97,91	
2.12.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.595.859.104,00	1.570.352.533,00	(25.506.571,00)	98,40	
2.12.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	288.526.776,00	263.102.897,00	(25.423.879,00)	91,19	
2.12.01.2.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	288.526.776,00	263.102.897,00	(25.423.879,00)	91,19	
2.12.01.2.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	288.526.776,00	263.102.897,00	(25.423.879,00)	91,19	
2.12.01.2.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.307.332.328,00	1.307.249.636,00	(82.692,00)	99,99	
2.12.01.2.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.307.332.328,00	1.307.249.636,00	(82.692,00)	99,99	
2.12.01.2.08.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.12.01.2.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.306.652.328,00	1.306.569.636,00	(82.692,00)	99,99	
2.12.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	548.131.200,00	536.715.409,00	(11.415.791,00)	97,92	
2.12.01.2.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	154.740.000,00	145.675.460,00	(9.064.540,00)	94,14	
2.12.01.2.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	154.740.000,00	145.675.460,00	(9.064.540,00)	94,14	
2.12.01.2.09.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.740.000,00	145.675.460,00	(9.064.540,00)	94,14	
2.12.01.2.09.0009	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	234.296.000,00	232.851.549,00	(1.444.451,00)	99,38	
2.12.01.2.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	234.296.000,00	232.851.549,00	(1.444.451,00)	99,38	
2.12.01.2.09.0009.5.1.01	Belanja Pegawai	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
2.12.01.2.09.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	233.616.000,00	232.171.549,00	(1.444.451,00)	99,38	
2.12.01.2.09.0010	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	159.095.200,00	158.188.400,00	(906.800,00)	99,43	
2.12.01.2.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	159.095.200,00	158.188.400,00	(906.800,00)	99,43	
2.12.01.2.09.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.095.200,00	158.188.400,00	(906.800,00)	99,43	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	3.016.881.800,00	2.714.314.850,00	(302.566.950,00)	89,97	
2.12.02.2.01	PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	9.770.000,00	8.750.000,00	(1.020.000,00)	89,56	
2.12.02.2.01.0001	PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN DAN RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	9.770.000,00	8.750.000,00	(1.020.000,00)	89,56	
2.12.02.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	9.770.000,00	8.750.000,00	(1.020.000,00)	89,56	
2.12.02.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.770.000,00	8.750.000,00	(1.020.000,00)	89,56	
2.12.02.2.01.0002	PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12.02.2.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12.02.2.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12.02.2.03	PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK	3.007.111.800,00	2.705.564.850,00	(301.546.950,00)	89,97	
2.12.02.2.03.0003	FASILITASI PENDAFTARAN PENDUDUK	3.007.111.800,00	2.705.564.850,00	(301.546.950,00)	89,97	
2.12.02.2.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	2.579.748.800,00	2.283.674.850,00	(296.073.950,00)	88,52	
2.12.02.2.03.0003.5.1.01	Belanja Pegawai	2.590.000,00	2.590.000,00	0,00	100,00	
2.12.02.2.03.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.577.158.800,00	2.281.084.850,00	(296.073.950,00)	88,51	
2.12.02.2.03.0003.5.2	BELANJA MODAL	427.363.000,00	421.890.000,00	(5.473.000,00)	98,72	
2.12.02.2.03.0003.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	427.363.000,00	421.890.000,00	(5.473.000,00)	98,72	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	161.138.500,00	159.524.475,00	(1.614.025,00)	99,00	
2.12.03.2.01	PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.12.03.2.01.0001	PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA PENTING	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
2.12.03.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
2.12.03.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
2.12.03.2.01.0002	PENINGKATAN DALAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12.03.2.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12.03.2.01.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12.03.2.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12.03.2.02	PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL	116.138.500,00	114.524.475,00	(1.614.025,00)	98,61	
2.12.03.2.02.0006	FASILITASI TERKAIT PENCATATAN SIPIL	116.138.500,00	114.524.475,00	(1.614.025,00)	98,61	
2.12.03.2.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	116.138.500,00	114.524.475,00	(1.614.025,00)	98,61	
2.12.03.2.02.0006.5.1.01	Belanja Pegawai	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	100,00	
2.12.03.2.02.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.248.500,00	112.634.475,00	(1.614.025,00)	98,59	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	340.376.200,00	338.389.830,00	(1.986.370,00)	99,42	
2.12.04.2.01	PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN	237.916.400,00	236.047.530,00	(1.868.870,00)	99,21	
2.12.04.2.01.0001	PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN	95.276.400,00	94.276.800,00	(999.600,00)	98,95	
2.12.04.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	95.276.400,00	94.276.800,00	(999.600,00)	98,95	
2.12.04.2.01.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	100,00	
2.12.04.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.386.400,00	92.386.800,00	(999.600,00)	98,93	
2.12.04.2.01.0003	INVENTARISASI DATA UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DAERAH	142.640.000,00	141.770.730,00	(869.270,00)	99,39	
2.12.04.2.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	142.640.000,00	141.770.730,00	(869.270,00)	99,39	
2.12.04.2.01.0003.5.1.01	Belanja Pegawai	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	100,00	
2.12.04.2.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.750.000,00	139.880.730,00	(869.270,00)	99,38	
2.12.04.2.03	PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	102.459.800,00	102.342.300,00	(117.500,00)	99,89	
2.12.04.2.03.0007	KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN DAN MASYARAKAT	102.459.800,00	102.342.300,00	(117.500,00)	99,89	
2.12.04.2.03.0007.5.1	BELANJA OPERASI	102.459.800,00	102.342.300,00	(117.500,00)	99,89	
2.12.04.2.03.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.459.800,00	102.342.300,00	(117.500,00)	99,89	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	28.470.000,00	28.470.000,00	0,00	100,00	
2.12.05.2.01	PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN	28.470.000,00	28.470.000,00	0,00	100,00	
2.12.05.2.01.0001	PENYEDIAAN DATA KEPENDUDUKAN KABUPATEN/KOTA	28.470.000,00	28.470.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.12.05.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	28.470.000,00	28.470.000,00	0,00	100,00	
2.12.05.2.01.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	100,00	
2.12.05.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.580.000,00	26.580.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	17.769.959.530,00	17.345.367.181,00	(424.592.349,00)	97,61	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(17.769.959.530,00)	(17.345.367.181,00)	424.592.349,00	97,61	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(17.769.959.530,00)	(17.345.367.181,00)	424.592.349,00	97,61	





2.14.0.00.0.00.15.0000

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Satuan Kerja : 2.14.0.00.0.00.15.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.369.066.709,00	8.237.693.563,00	(131.373.146,00)	98,43	
2.14.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.505.332.873,00	6.495.182.309,00	(10.150.564,00)	99,84	
2.14.01.2.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	6.426.988.873,00	6.416.838.309,00	(10.150.564,00)	99,84	
2.14.01.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	6.426.988.873,00	6.416.838.309,00	(10.150.564,00)	99,84	
2.14.01.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	6.426.988.873,00	6.416.838.309,00	(10.150.564,00)	99,84	
2.14.01.2.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	78.344.000,00	78.344.000,00	0,00	100,00	
2.14.01.2.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	78.344.000,00	78.344.000,00	0,00	100,00	
2.14.01.2.02.0007.5.1.01	Belanja Pegawai	42.980.000,00	42.980.000,00	0,00	100,00	
2.14.01.2.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.364.000,00	35.364.000,00	0,00	100,00	
2.14.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	752.289.300,00	665.072.433,00	(87.216.867,00)	88,41	
2.14.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	61.859.700,00	51.943.750,00	(9.915.950,00)	83,97	
2.14.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	61.859.700,00	51.943.750,00	(9.915.950,00)	83,97	
2.14.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.859.700,00	51.943.750,00	(9.915.950,00)	83,97	
2.14.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	147.275.900,00	138.607.500,00	(8.668.400,00)	94,11	
2.14.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	86.491.900,00	77.987.500,00	(8.504.400,00)	90,17	
2.14.01.2.06.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	100,00	
2.14.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.881.900,00	76.377.500,00	(8.504.400,00)	89,98	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.14.01.2.06.0002.5.2	BELANJA MODAL	60.784.000,00	60.620.000,00	(164.000,00)	99,73	
2.14.01.2.06.0002.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.784.000,00	60.620.000,00	(164.000,00)	99,73	
2.14.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	14.181.700,00	14.181.700,00	0,00	100,00	
2.14.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	14.181.700,00	14.181.700,00	0,00	100,00	
2.14.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.181.700,00	14.181.700,00	0,00	100,00	
2.14.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	241.420.000,00	236.620.000,00	(4.800.000,00)	98,01	
2.14.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	241.420.000,00	236.620.000,00	(4.800.000,00)	98,01	
2.14.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	21.010.000,00	21.010.000,00	0,00	100,00	
2.14.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.410.000,00	215.610.000,00	(4.800.000,00)	97,82	
2.14.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	45.000.000,00	37.684.000,00	(7.316.000,00)	83,74	
2.14.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	37.684.000,00	(7.316.000,00)	83,74	
2.14.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	37.684.000,00	(7.316.000,00)	83,74	
2.14.01.2.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	242.552.000,00	186.035.483,00	(56.516.517,00)	76,70	
2.14.01.2.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	242.552.000,00	186.035.483,00	(56.516.517,00)	76,70	
2.14.01.2.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	242.552.000,00	186.035.483,00	(56.516.517,00)	76,70	
2.14.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	467.764.536,00	439.765.604,00	(27.998.932,00)	94,01	
2.14.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	80.195.000,00	76.998.630,00	(3.196.370,00)	96,01	
2.14.01.2.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	80.195.000,00	76.998.630,00	(3.196.370,00)	96,01	
2.14.01.2.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.195.000,00	76.998.630,00	(3.196.370,00)	96,01	
2.14.01.2.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	387.569.536,00	362.766.974,00	(24.802.562,00)	93,60	
2.14.01.2.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	387.569.536,00	362.766.974,00	(24.802.562,00)	93,60	
2.14.01.2.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	387.569.536,00	362.766.974,00	(24.802.562,00)	93,60	
2.14.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	643.680.000,00	637.673.217,00	(6.006.783,00)	99,07	
2.14.01.2.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	289.040.000,00	284.969.305,00	(4.070.695,00)	98,59	
2.14.01.2.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	289.040.000,00	284.969.305,00	(4.070.695,00)	98,59	
2.14.01.2.09.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.040.000,00	284.969.305,00	(4.070.695,00)	98,59	
2.14.01.2.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	104.640.000,00	103.014.900,00	(1.625.100,00)	98,45	
2.14.01.2.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	104.640.000,00	103.014.900,00	(1.625.100,00)	98,45	
2.14.01.2.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.640.000,00	103.014.900,00	(1.625.100,00)	98,45	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.14.01.2.09.0009	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	250.000.000,00	249.689.012,00	(310.988,00)	99,88	
2.14.01.2.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	249.689.012,00	(310.988,00)	99,88	
2.14.01.2.09.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	249.689.012,00	(310.988,00)	99,88	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	660.720.000,00	642.008.795,00	(18.711.205,00)	97,17	
2.14.02.2.01	PEMADUAN DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK	91.120.000,00	91.104.900,00	(15.100,00)	99,98	
2.14.02.2.01.0007	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN MATERI PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN JALUR PENDIDIKAN FORMAL SESUAI ISU LOKAL KABUPATEN/KOTA	51.120.000,00	51.105.000,00	(15.000,00)	99,97	
2.14.02.2.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	51.120.000,00	51.105.000,00	(15.000,00)	99,97	
2.14.02.2.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.120.000,00	51.105.000,00	(15.000,00)	99,97	
2.14.02.2.01.0018	PENGUATAN KERJA SAMA PELAKSANAAN PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN JALUR PENDIDIKAN NONFORMAL	40.000.000,00	39.999.900,00	(100,00)	100,00	
2.14.02.2.01.0018.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.999.900,00	(100,00)	100,00	
2.14.02.2.01.0018.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.999.900,00	(100,00)	100,00	
2.14.02.2.02	PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	569.600.000,00	550.903.895,00	(18.696.105,00)	96,72	
2.14.02.2.02.0002	PENYEDIAAN DAN PENGOLAHAN DATA KEPENDUDUKAN	166.275.000,00	159.675.000,00	(6.600.000,00)	96,03	
2.14.02.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	166.275.000,00	159.675.000,00	(6.600.000,00)	96,03	
2.14.02.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.275.000,00	159.675.000,00	(6.600.000,00)	96,03	
2.14.02.2.02.0009	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KELUARGA	58.860.000,00	57.143.895,00	(1.716.105,00)	97,08	
2.14.02.2.02.0009.5.1	BELANJA OPERASI	58.860.000,00	57.143.895,00	(1.716.105,00)	97,08	
2.14.02.2.02.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.860.000,00	57.143.895,00	(1.716.105,00)	97,08	
2.14.02.2.02.0011	PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI KELUARGA	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	100,00	
2.14.02.2.02.0011.5.1	BELANJA OPERASI	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	100,00	
2.14.02.2.02.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	100,00	
2.14.02.2.02.0012	PENCATATAN DAN PENGUMPULAN DATA KELUARGA	67.200.000,00	67.200.000,00	0,00	100,00	
2.14.02.2.02.0012.5.1	BELANJA OPERASI	67.200.000,00	67.200.000,00	0,00	100,00	
2.14.02.2.02.0012.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.200.000,00	67.200.000,00	0,00	100,00	
2.14.02.2.02.0013	PENGOLAHAN DAN PELAPORAN DATA PENGENDALIAN LAPANGAN DAN PELAYANAN KB	66.000.000,00	61.875.000,00	(4.125.000,00)	93,75	
2.14.02.2.02.0013.5.1	BELANJA OPERASI	66.000.000,00	61.875.000,00	(4.125.000,00)	93,75	
2.14.02.2.02.0013.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00	61.875.000,00	(4.125.000,00)	93,75	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.14.02.2.02.0015	PEMBENTUKAN DAN OPERASIONALISASI RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DI KAMPUNG KB UNTUK MEMPERKUAT INTEGRASI PROGRAM BANGGA KENCANA DI SEKTOR LAIN	127.415.000,00	121.370.000,00	(6.045.000,00)	95,26	
2.14.02.2.02.0015.5.1	BELANJA OPERASI	127.415.000,00	121.370.000,00	(6.045.000,00)	95,26	
2.14.02.2.02.0015.5.1.01	Belanja Pegawai	16.920.000,00	14.520.000,00	(2.400.000,00)	85,82	
2.14.02.2.02.0015.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.495.000,00	106.850.000,00	(3.645.000,00)	96,70	
2.14.02.2.02.0020	PENYUSUNAN PROFIL PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA BERENCANA (BANGGA KENCANA)	43.050.000,00	42.840.000,00	(210.000,00)	99,51	
2.14.02.2.02.0020.5.1	BELANJA OPERASI	43.050.000,00	42.840.000,00	(210.000,00)	99,51	
2.14.02.2.02.0020.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.050.000,00	42.840.000,00	(210.000,00)	99,51	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4.140.995.779,00	4.068.029.993,00	(72.965.786,00)	98,24	
2.14.03.2.01	PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL	934.324.200,00	898.792.080,00	(35.532.120,00)	96,20	
2.14.03.2.01.0008	PENGENDALIAN PROGRAM KKBPK	92.600.000,00	92.260.000,00	(340.000,00)	99,63	
2.14.03.2.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	92.600.000,00	92.260.000,00	(340.000,00)	99,63	
2.14.03.2.01.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.600.000,00	92.260.000,00	(340.000,00)	99,63	
2.14.03.2.01.0009	PENYEDIAAN DAN DISTRIBUSI SARANA KIE PROGRAM BANGGA KENCANA	46.240.000,00	45.908.100,00	(331.900,00)	99,28	
2.14.03.2.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	46.240.000,00	45.908.100,00	(331.900,00)	99,28	
2.14.03.2.01.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.240.000,00	45.908.100,00	(331.900,00)	99,28	
2.14.03.2.01.0010	PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN BANGGA KENCANA	59.200.000,00	58.746.280,00	(453.720,00)	99,23	
2.14.03.2.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	59.200.000,00	58.746.280,00	(453.720,00)	99,23	
2.14.03.2.01.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.200.000,00	58.746.280,00	(453.720,00)	99,23	
2.14.03.2.01.0011	PELAKSANAAN MEKANISME OPERASIONAL PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI RAPAT KOORDINASI KECAMATAN (RAKORCAM), RAPAT KOORDINASI DESA (RAKORDES), DAN MINI LOKAKARYA (MINILOK)	90.000.000,00	89.970.000,00	(30.000,00)	99,97	
2.14.03.2.01.0011.5.1	BELANJA OPERASI	90.000.000,00	89.970.000,00	(30.000,00)	99,97	
2.14.03.2.01.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	89.970.000,00	(30.000,00)	99,97	
2.14.03.2.01.0012	PROMOSI DAN KIE PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK SERTA MEDIA LUAR RUANG	100.000.000,00	83.333.000,00	(16.667.000,00)	83,33	
2.14.03.2.01.0012.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	83.333.000,00	(16.667.000,00)	83,33	
2.14.03.2.01.0012.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	83.333.000,00	(16.667.000,00)	83,33	
2.14.03.2.01.0014	ADVOKASI PROGRAM BANGGA KENCANA OLEH POKJA ADVOKASI KEPADA STAKEHOLDERS DAN MITRA KERJA	546.284.200,00	528.574.700,00	(17.709.500,00)	96,76	
2.14.03.2.01.0014.5.1	BELANJA OPERASI	546.284.200,00	528.574.700,00	(17.709.500,00)	96,76	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.14.03.2.01.0014.5.1.01	Belanja Pegawai	18.190.000,00	11.750.000,00	(6.440.000,00)	64,60	
2.14.03.2.01.0014.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	528.094.200,00	516.824.700,00	(11.269.500,00)	97,87	
2.14.03.2.02	PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB)	229.600.000,00	229.600.000,00	0,00	100,00	
2.14.03.2.02.0004	PENGGERAKAN KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (IMP)	217.600.000,00	217.600.000,00	0,00	100,00	
2.14.03.2.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	217.600.000,00	217.600.000,00	0,00	100,00	
2.14.03.2.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	217.600.000,00	217.600.000,00	0,00	100,00	
2.14.03.2.02.0005	PEMBINAAN IMP DAN PROGRAM BANGGA KENCANA DI LINI LAPANGAN OLEH PKB/PLKB	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
2.14.03.2.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
2.14.03.2.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
2.14.03.2.03	PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.515.170.280,00	1.485.879.192,00	(29.291.088,00)	98,07	
2.14.03.2.03.0001	PENGENDALIAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB KE FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA	50.400.000,00	50.390.670,00	(9.330,00)	99,98	
2.14.03.2.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	50.400.000,00	50.390.670,00	(9.330,00)	99,98	
2.14.03.2.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.400.000,00	50.390.670,00	(9.330,00)	99,98	
2.14.03.2.03.0003	PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)	1.335.572.280,00	1.324.468.022,00	(11.104.258,00)	99,17	
2.14.03.2.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.335.572.280,00	1.324.468.022,00	(11.104.258,00)	99,17	
2.14.03.2.03.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.335.572.280,00	1.324.468.022,00	(11.104.258,00)	99,17	
2.14.03.2.03.0006	PENYEDIAAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB	94.998.000,00	76.847.500,00	(18.150.500,00)	80,89	
2.14.03.2.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	94.998.000,00	76.847.500,00	(18.150.500,00)	80,89	
2.14.03.2.03.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.998.000,00	76.847.500,00	(18.150.500,00)	80,89	
2.14.03.2.03.0008	PEMBINAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA	34.200.000,00	34.173.000,00	(27.000,00)	99,92	
2.14.03.2.03.0008.5.1	BELANJA OPERASI	34.200.000,00	34.173.000,00	(27.000,00)	99,92	
2.14.03.2.03.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.200.000,00	34.173.000,00	(27.000,00)	99,92	
2.14.03.2.04	PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB	1.461.901.299,00	1.453.758.721,00	(8.142.578,00)	99,44	
2.14.03.2.04.0002	INTEGRASI PEMBANGUNAN LINTAS SEKTOR DI KAMPUNG KB	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
2.14.03.2.04.0002.5.1	BELANJA OPERASI	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
2.14.03.2.04.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.14.03.2.04.0005	FASILITASI PENGELOLAAN DAPUR SEHAT ATASI STUNTING (DASHAT) DI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS	330.491.999,00	325.158.721,00	(5.333.278,00)	98,39	
2.14.03.2.04.0005.5.1	BELANJA OPERASI	330.491.999,00	325.158.721,00	(5.333.278,00)	98,39	
2.14.03.2.04.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	330.491.999,00	325.158.721,00	(5.333.278,00)	98,39	
2.14.03.2.04.0006	PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM BANGGA KENCANA DI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS	1.127.659.300,00	1.124.850.000,00	(2.809.300,00)	99,75	
2.14.03.2.04.0006.5.1	BELANJA OPERASI	1.127.659.300,00	1.124.850.000,00	(2.809.300,00)	99,75	
2.14.03.2.04.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.127.659.300,00	1.124.850.000,00	(2.809.300,00)	99,75	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	6.353.376.700,00	6.046.726.800,00	(306.649.900,00)	95,17	
2.14.04.2.01	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	5.840.178.400,00	5.538.255.000,00	(301.923.400,00)	94,83	
2.14.04.2.01.0018	PENGADAAN SARANA KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA)	300.000.000,00	234.900.000,00	(65.100.000,00)	78,30	
2.14.04.2.01.0018.5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	234.900.000,00	(65.100.000,00)	78,30	
2.14.04.2.01.0018.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	234.900.000,00	(65.100.000,00)	78,30	
2.14.04.2.01.0024	PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL BAGI PENGELOLA DAN PELAKSANA (KADER) KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA)	5.065.200.000,00	4.828.415.000,00	(236.785.000,00)	95,33	
2.14.04.2.01.0024.5.1	BELANJA OPERASI	5.065.200.000,00	4.828.415.000,00	(236.785.000,00)	95,33	
2.14.04.2.01.0024.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.065.200.000,00	4.828.415.000,00	(236.785.000,00)	95,33	
2.14.04.2.01.0026	PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL BAGI KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA)	378.150.000,00	378.150.000,00	0,00	100,00	
2.14.04.2.01.0026.5.1	BELANJA OPERASI	378.150.000,00	378.150.000,00	0,00	100,00	
2.14.04.2.01.0026.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	378.150.000,00	378.150.000,00	0,00	100,00	
2.14.04.2.01.0028	PEMBENTUKAN KELOMPOK KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BINA KELUARGA BALITA (BKB), BINA KELUARGA REMAJA (BKR), PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA (PIK-R) BINA KELUARGA LANSIA (BKL), USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA) DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA)	96.828.400,00	96.790.000,00	(38.400,00)	99,96	
2.14.04.2.01.0028.5.1	BELANJA OPERASI	96.828.400,00	96.790.000,00	(38.400,00)	99,96	
2.14.04.2.01.0028.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.828.400,00	96.790.000,00	(38.400,00)	99,96	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.14.04.2.02	PELAKSANAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA DALAM PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	513.198.300,00	508.471.800,00	(4.726.500,00)	99,08	
2.14.04.2.02.0003	PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS MITRA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PENGELOLAAN PROGRAM KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA/UPPKS)	513.198.300,00	508.471.800,00	(4.726.500,00)	99,08	
2.14.04.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	513.198.300,00	508.471.800,00	(4.726.500,00)	99,08	
2.14.04.2.02.0003.5.1.01	Belanja Pegawai	19.320.000,00	19.320.000,00	0,00	100,00	
2.14.04.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	343.878.300,00	339.151.800,00	(4.726.500,00)	98,63	
2.14.04.2.02.0003.5.1.05	Belanja Hibah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	19.524.159.188,00	18.994.459.151,00	(529.700.037,00)	97,29	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(19.524.159.188,00)	(18.994.459.151,00)	529.700.037,00	97,29	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(19.524.159.188,00)	(18.994.459.151,00)	529.700.037,00	97,29	





2.15.0.00.0.00.16.0000

DINAS PERHUBUNGAN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Satuan Kerja : 2.15.0.00.0.00.16.0000 DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
2.15.0.00.0.00.16.0000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.550.808.000,00	2.808.643.000,00	(1.742.165.000,00)	61,72	
2.15.0.00.0.00.16.0000.4.1.02	Retribusi Daerah	4.550.808.000,00	2.808.643.000,00	(1.742.165.000,00)	61,72	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	4.550.808.000,00	2.808.643.000,00	(1.742.165.000,00)	61,72	
5	BELANJA DAERAH					
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	87.457.201.477,00	85.484.553.951,00	(1.972.647.526,00)	97,74	
2.15.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	20.396.000,00	20.396.000,00	0,00	100,00	
2.15.01.2.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	20.396.000,00	20.396.000,00	0,00	100,00	
2.15.01.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	20.396.000,00	20.396.000,00	0,00	100,00	
2.15.01.2.01.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	100,00	
2.15.01.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.296.000,00	10.296.000,00	0,00	100,00	
2.15.01.2.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.15.01.2.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.15.01.2.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.15.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	36.728.307.231,00	36.551.062.543,00	(177.244.688,00)	99,52	
2.15.01.2.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	36.623.463.231,00	36.446.218.543,00	(177.244.688,00)	99,52	
2.15.01.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	36.623.463.231,00	36.446.218.543,00	(177.244.688,00)	99,52	
2.15.01.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	36.623.463.231,00	36.446.218.543,00	(177.244.688,00)	99,52	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.15.01.2.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	104.844.000,00	104.844.000,00	0,00	100,00	
2.15.01.2.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	104.844.000,00	104.844.000,00	0,00	100,00	
2.15.01.2.02.0007.5.1.01	Belanja Pegawai	103.320.000,00	103.320.000,00	0,00	100,00	
2.15.01.2.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.524.000,00	1.524.000,00	0,00	100,00	
2.15.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	376.506.175,00	350.024.533,00	(26.481.642,00)	92,97	
2.15.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	12.042.000,00	11.750.000,00	(292.000,00)	97,58	
2.15.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	12.042.000,00	11.750.000,00	(292.000,00)	97,58	
2.15.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.042.000,00	11.750.000,00	(292.000,00)	97,58	
2.15.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	63.562.400,00	62.528.450,00	(1.033.950,00)	98,37	
2.15.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	63.562.400,00	62.528.450,00	(1.033.950,00)	98,37	
2.15.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.562.400,00	62.528.450,00	(1.033.950,00)	98,37	
2.15.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	36.213.300,00	30.768.700,00	(5.444.600,00)	84,97	
2.15.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	36.213.300,00	30.768.700,00	(5.444.600,00)	84,97	
2.15.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.213.300,00	30.768.700,00	(5.444.600,00)	84,97	
2.15.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	43.658.200,00	41.059.400,00	(2.598.800,00)	94,05	
2.15.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	43.658.200,00	41.059.400,00	(2.598.800,00)	94,05	
2.15.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.658.200,00	41.059.400,00	(2.598.800,00)	94,05	
2.15.01.2.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	221.030.275,00	203.917.983,00	(17.112.292,00)	92,26	
2.15.01.2.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	221.030.275,00	203.917.983,00	(17.112.292,00)	92,26	
2.15.01.2.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	221.030.275,00	203.917.983,00	(17.112.292,00)	92,26	
2.15.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	47.115.120.571,00	46.019.277.579,00	(1.095.842.992,00)	97,67	
2.15.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	37.524.811.166,00	36.500.591.113,00	(1.024.220.053,00)	97,27	
2.15.01.2.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	37.524.811.166,00	36.500.591.113,00	(1.024.220.053,00)	97,27	
2.15.01.2.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.524.811.166,00	36.500.591.113,00	(1.024.220.053,00)	97,27	
2.15.01.2.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	9.590.309.405,00	9.518.686.466,00	(71.622.939,00)	99,25	
2.15.01.2.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	9.590.309.405,00	9.518.686.466,00	(71.622.939,00)	99,25	
2.15.01.2.08.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	68.640.000,00	68.640.000,00	0,00	100,00	
2.15.01.2.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.521.669.405,00	9.450.046.466,00	(71.622.939,00)	99,25	
2.15.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.216.871.500,00	2.543.793.296,00	(673.078.204,00)	79,08	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.15.01.2.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	3.165.036.300,00	2.492.193.296,00	(672.843.004,00)	78,74	
2.15.01.2.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	3.165.036.300,00	2.492.193.296,00	(672.843.004,00)	78,74	
2.15.01.2.09.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.165.036.300,00	2.492.193.296,00	(672.843.004,00)	78,74	
2.15.01.2.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	51.835.200,00	51.600.000,00	(235.200,00)	99,55	
2.15.01.2.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	51.835.200,00	51.600.000,00	(235.200,00)	99,55	
2.15.01.2.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.835.200,00	51.600.000,00	(235.200,00)	99,55	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	27.957.764.543,00	24.791.754.734,00	(3.166.009.809,00)	88,68	
2.15.02.2.02	PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	26.290.293.534,00	23.219.586.198,00	(3.070.707.336,00)	88,32	
2.15.02.2.02.0001	PEMBANGUNAN PRASARANA JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	87.552.200,00	86.607.750,00	(944.450,00)	98,92	
2.15.02.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	87.552.200,00	86.607.750,00	(944.450,00)	98,92	
2.15.02.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.552.200,00	86.607.750,00	(944.450,00)	98,92	
2.15.02.2.02.0002	PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	26.202.741.334,00	23.132.978.448,00	(3.069.762.886,00)	88,28	
2.15.02.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	25.659.148.174,00	22.598.857.422,00	(3.060.290.752,00)	88,07	
2.15.02.2.02.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	64.210.000,00	62.300.000,00	(1.910.000,00)	97,03	
2.15.02.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.594.938.174,00	22.536.557.422,00	(3.058.380.752,00)	88,05	
2.15.02.2.02.0002.5.2	BELANJA MODAL	543.593.160,00	534.121.026,00	(9.472.134,00)	98,26	
2.15.02.2.02.0002.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	543.593.160,00	534.121.026,00	(9.472.134,00)	98,26	
2.15.02.2.03	PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C	140.320.400,00	140.173.900,00	(146.500,00)	99,90	
2.15.02.2.03.0011	REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN TERMINAL TIPE C (FASILITAS UTAMA DAN PENUNJANG)	140.320.400,00	140.173.900,00	(146.500,00)	99,90	
2.15.02.2.03.0011.5.1	BELANJA OPERASI	140.320.400,00	140.173.900,00	(146.500,00)	99,90	
2.15.02.2.03.0011.5.1.01	Belanja Pegawai	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	100,00	
2.15.02.2.03.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.220.400,00	130.073.900,00	(146.500,00)	99,89	
2.15.02.2.05	PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	472.067.200,00	464.829.950,00	(7.237.250,00)	98,47	
2.15.02.2.05.0001	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	71.000.000,00	70.380.000,00	(620.000,00)	99,13	
2.15.02.2.05.0001.5.1	BELANJA OPERASI	71.000.000,00	70.380.000,00	(620.000,00)	99,13	
2.15.02.2.05.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.000.000,00	70.380.000,00	(620.000,00)	99,13	
2.15.02.2.05.0007	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	331.067.200,00	325.185.950,00	(5.881.250,00)	98,22	
2.15.02.2.05.0007.5.1	BELANJA OPERASI	331.067.200,00	325.185.950,00	(5.881.250,00)	98,22	
2.15.02.2.05.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	331.067.200,00	325.185.950,00	(5.881.250,00)	98,22	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.15.02.2.05.0010	MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	70.000.000,00	69.264.000,00	(736.000,00)	98,95	
2.15.02.2.05.0010.5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	69.264.000,00	(736.000,00)	98,95	
2.15.02.2.05.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	69.264.000,00	(736.000,00)	98,95	
2.15.02.2.06	PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA	712.439.409,00	627.942.066,00	(84.497.343,00)	88,14	
2.15.02.2.06.0015	FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
2.15.02.2.06.0015.5.1	BELANJA OPERASI	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
2.15.02.2.06.0015.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
2.15.02.2.06.0016	PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERLENGKAPAN JALAN DALAM RANGKA MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS	706.139.409,00	621.642.066,00	(84.497.343,00)	88,03	
2.15.02.2.06.0016.5.1	BELANJA OPERASI	456.338.431,00	408.236.352,00	(48.102.079,00)	89,46	
2.15.02.2.06.0016.5.1.01	Belanja Pegawai	20.310.000,00	20.310.000,00	0,00	100,00	
2.15.02.2.06.0016.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	436.028.431,00	387.926.352,00	(48.102.079,00)	88,97	
2.15.02.2.06.0016.5.2	BELANJA MODAL	249.800.978,00	213.405.714,00	(36.395.264,00)	85,43	
2.15.02.2.06.0016.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	249.800.978,00	213.405.714,00	(36.395.264,00)	85,43	
2.15.02.2.08	AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ DI JALAN	34.400.000,00	34.400.000,00	0,00	100,00	
2.15.02.2.08.0003	PELAKSANAAN INSPEKSI, AUDIT DAN PEMANTAUAN TERMINAL	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	100,00	
2.15.02.2.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	100,00	
2.15.02.2.08.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	100,00	
2.15.02.2.08.0009	PELAKSANAAN PENGAWASAN MELALUI UJI PETIK TERHADAP UNIT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR INSPEKSI, AUDIT DAN PEMANTAUAN UNIT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	100,00	
2.15.02.2.08.0009.5.1	BELANJA OPERASI	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	100,00	
2.15.02.2.08.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	100,00	
2.15.02.2.09	PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	213.848.600,00	210.683.620,00	(3.164.980,00)	98,52	
2.15.02.2.09.0003	PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	213.848.600,00	210.683.620,00	(3.164.980,00)	98,52	
2.15.02.2.09.0003.5.1	BELANJA OPERASI	213.848.600,00	210.683.620,00	(3.164.980,00)	98,52	
2.15.02.2.09.0003.5.1.01	Belanja Pegawai	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00	100,00	
2.15.02.2.09.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.788.600,00	204.623.620,00	(3.164.980,00)	98,48	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.15.02.2.11	PENETAPAN RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PERKOTAAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	94.395.400,00	94.139.000,00	(256.400,00)	99,73	
2.15.02.2.11.0002	PENETAPAN KEBIJAKAN DAN SOSIALISASI RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PERKOTAAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	94.395.400,00	94.139.000,00	(256.400,00)	99,73	
2.15.02.2.11.0002.5.1	BELANJA OPERASI	94.395.400,00	94.139.000,00	(256.400,00)	99,73	
2.15.02.2.11.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00	
2.15.02.2.11.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.385.400,00	93.129.000,00	(256.400,00)	99,73	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	115.414.966.020,00	110.276.308.685,00	(5.138.657.335,00)	95,55	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(110.864.158.020,00)	(107.467.665.685,00)	3.396.492.335,00	96,94	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(110.864.158.020,00)	(107.467.665.685,00)	3.396.492.335,00	96,94	





2.16.2.20.2.21.17.0000

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Satuan Kerja : 2.16.2.20.2.21.17.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.805.610.153,00	15.692.001.742,00	(113.608.411,00)	99,28	
2.16.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	8.349.600,00	8.343.426,00	(6.174,00)	99,93	
2.16.01.2.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	8.349.600,00	8.343.426,00	(6.174,00)	99,93	
2.16.01.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	8.349.600,00	8.343.426,00	(6.174,00)	99,93	
2.16.01.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.349.600,00	8.343.426,00	(6.174,00)	99,93	
2.16.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	12.828.048.892,00	12.816.693.063,00	(11.355.829,00)	99,91	
2.16.01.2.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	12.775.250.892,00	12.763.895.063,00	(11.355.829,00)	99,91	
2.16.01.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	12.775.250.892,00	12.763.895.063,00	(11.355.829,00)	99,91	
2.16.01.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	12.775.250.892,00	12.763.895.063,00	(11.355.829,00)	99,91	
2.16.01.2.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	52.798.000,00	52.798.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.2.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	52.798.000,00	52.798.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.2.02.0007.5.1.01	Belanja Pegawai	52.210.000,00	52.210.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.2.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	588.000,00	588.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	364.138.300,00	363.627.627,00	(510.673,00)	99,86	
2.16.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	6.119.200,00	6.023.000,00	(96.200,00)	98,43	
2.16.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	6.119.200,00	6.023.000,00	(96.200,00)	98,43	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.16.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.119.200,00	6.023.000,00	(96.200,00)	98,43	
2.16.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	92.265.500,00	92.108.192,00	(157.308,00)	99,83	
2.16.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	92.265.500,00	92.108.192,00	(157.308,00)	99,83	
2.16.01.2.06.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	14.520.000,00	14.520.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.745.500,00	77.588.192,00	(157.308,00)	99,80	
2.16.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	15.218.600,00	15.181.500,00	(37.100,00)	99,76	
2.16.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	15.218.600,00	15.181.500,00	(37.100,00)	99,76	
2.16.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.218.600,00	15.181.500,00	(37.100,00)	99,76	
2.16.01.2.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	250.535.000,00	250.314.935,00	(220.065,00)	99,91	
2.16.01.2.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	250.535.000,00	250.314.935,00	(220.065,00)	99,91	
2.16.01.2.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.535.000,00	250.314.935,00	(220.065,00)	99,91	
2.16.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	61.514.569,00	61.466.000,00	(48.569,00)	99,92	
2.16.01.2.07.0006	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	59.564.569,00	59.528.000,00	(36.569,00)	99,94	
2.16.01.2.07.0006.5.1	BELANJA OPERASI	58.952.669,00	58.918.000,00	(34.669,00)	99,94	
2.16.01.2.07.0006.5.1.01	Belanja Pegawai	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
2.16.01.2.07.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.272.669,00	58.238.000,00	(34.669,00)	99,94	
2.16.01.2.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	611.900,00	610.000,00	(1.900,00)	99,69	
2.16.01.2.07.0006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	611.900,00	610.000,00	(1.900,00)	99,69	
2.16.01.2.07.0010	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	1.950.000,00	1.938.000,00	(12.000,00)	99,38	
2.16.01.2.07.0010.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16.01.2.07.0010.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16.01.2.07.0010.5.2	BELANJA MODAL	1.950.000,00	1.938.000,00	(12.000,00)	99,38	
2.16.01.2.07.0010.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.950.000,00	1.938.000,00	(12.000,00)	99,38	
2.16.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.260.198.792,00	2.165.678.994,00	(94.519.798,00)	95,82	
2.16.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	9.000.000,00	3.144.722,00	(5.855.278,00)	34,94	
2.16.01.2.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	3.144.722,00	(5.855.278,00)	34,94	
2.16.01.2.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	3.144.722,00	(5.855.278,00)	34,94	
2.16.01.2.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.251.198.792,00	2.162.534.272,00	(88.664.520,00)	96,06	
2.16.01.2.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	2.251.198.792,00	2.162.534.272,00	(88.664.520,00)	96,06	
2.16.01.2.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.251.198.792,00	2.162.534.272,00	(88.664.520,00)	96,06	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.16.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	283.360.000,00	276.192.632,00	(7.167.368,00)	97,47	
2.16.01.2.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	223.340.000,00	216.177.632,00	(7.162.368,00)	96,79	
2.16.01.2.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	223.340.000,00	216.177.632,00	(7.162.368,00)	96,79	
2.16.01.2.09.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	223.340.000,00	216.177.632,00	(7.162.368,00)	96,79	
2.16.01.2.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	60.020.000,00	60.015.000,00	(5.000,00)	99,99	
2.16.01.2.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	60.020.000,00	60.015.000,00	(5.000,00)	99,99	
2.16.01.2.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.020.000,00	60.015.000,00	(5.000,00)	99,99	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.553.654.289,00	3.552.595.837,00	(1.058.452,00)	99,97	
2.16.02.2.01	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.553.654.289,00	3.552.595.837,00	(1.058.452,00)	99,97	
2.16.02.2.01.0005	PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	344.226.132,00	343.497.362,00	(728.770,00)	99,79	
2.16.02.2.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	344.226.132,00	343.497.362,00	(728.770,00)	99,79	
2.16.02.2.01.0005.5.1.01	Belanja Pegawai	9.820.000,00	9.820.000,00	0,00	100,00	
2.16.02.2.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	334.406.132,00	333.677.362,00	(728.770,00)	99,78	
2.16.02.2.01.0006	PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	317.664.557,00	317.334.875,00	(329.682,00)	99,90	
2.16.02.2.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	317.664.557,00	317.334.875,00	(329.682,00)	99,90	
2.16.02.2.01.0006.5.1.01	Belanja Pegawai	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
2.16.02.2.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	307.164.557,00	306.834.875,00	(329.682,00)	99,89	
2.16.02.2.01.0007	LAYANAN HUBUNGAN MEDIA	2.891.763.600,00	2.891.763.600,00	0,00	100,00	
2.16.02.2.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	2.891.763.600,00	2.891.763.600,00	0,00	100,00	
2.16.02.2.01.0007.5.1.01	Belanja Pegawai	19.320.000,00	19.320.000,00	0,00	100,00	
2.16.02.2.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.872.443.600,00	2.872.443.600,00	0,00	100,00	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	4.413.479.736,00	4.392.915.690,00	(20.564.046,00)	99,53	
2.16.03.2.01	PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.934.345.652,00	2.933.675.335,00	(670.317,00)	99,98	
2.16.03.2.01.0002	PENATALAKSANAAN DAN PENGAWASAN NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	66.540.000,00	66.527.280,00	(12.720,00)	99,98	
2.16.03.2.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	66.540.000,00	66.527.280,00	(12.720,00)	99,98	
2.16.03.2.01.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16.03.2.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.540.000,00	66.527.280,00	(12.720,00)	99,98	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.16.03.2.01.0003	PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH	2.867.805.652,00	2.867.148.055,00	(657.597,00)	99,98	
2.16.03.2.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	2.854.753.852,00	2.854.097.785,00	(656.067,00)	99,98	
2.16.03.2.01.0003.5.1.01	Belanja Pegawai	46.520.000,00	46.520.000,00	0,00	100,00	
2.16.03.2.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.808.233.852,00	2.807.577.785,00	(656.067,00)	99,98	
2.16.03.2.01.0003.5.2	BELANJA MODAL	13.051.800,00	13.050.270,00	(1.530,00)	99,99	
2.16.03.2.01.0003.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.051.800,00	13.050.270,00	(1.530,00)	99,99	
2.16.03.2.02	PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.479.134.084,00	1.459.240.355,00	(19.893.729,00)	98,66	
2.16.03.2.02.0003	PENGELOLAAN PUSAT DATA PEMERINTAHAN DAERAH	210.208.400,00	210.008.400,00	(200.000,00)	99,90	
2.16.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	210.208.400,00	210.008.400,00	(200.000,00)	99,90	
2.16.03.2.02.0003.5.1.01	Belanja Pegawai	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	100,00	
2.16.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.058.400,00	200.858.400,00	(200.000,00)	99,90	
2.16.03.2.02.0004	PENYELENGGARAAN SISTEM KOMUNIKASI INTRA PEMERINTAH DAERAH	31.328.000,00	31.328.000,00	0,00	100,00	
2.16.03.2.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	31.328.000,00	31.328.000,00	0,00	100,00	
2.16.03.2.02.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
2.16.03.2.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.648.000,00	30.648.000,00	0,00	100,00	
2.16.03.2.02.0006	KOORDINASI DAN SINKRONISASI DATA DAN INFORMASI ELEKTRONIK	416.540.184,00	400.569.333,00	(15.970.851,00)	96,17	
2.16.03.2.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	416.540.184,00	400.569.333,00	(15.970.851,00)	96,17	
2.16.03.2.02.0006.5.1.01	Belanja Pegawai	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
2.16.03.2.02.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	413.240.184,00	397.269.333,00	(15.970.851,00)	96,14	
2.16.03.2.02.0007	PENGEMBANGAN APLIKASI DAN PROSES BISNIS PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK	349.971.200,00	349.004.440,00	(966.760,00)	99,72	
2.16.03.2.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	349.971.200,00	349.004.440,00	(966.760,00)	99,72	
2.16.03.2.02.0007.5.1.01	Belanja Pegawai	29.460.000,00	28.780.000,00	(680.000,00)	97,69	
2.16.03.2.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	320.511.200,00	320.224.440,00	(286.760,00)	99,91	
2.16.03.2.02.0010	PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH	413.028.700,00	412.528.446,00	(500.254,00)	99,88	
2.16.03.2.02.0010.5.1	BELANJA OPERASI	413.028.700,00	412.528.446,00	(500.254,00)	99,88	
2.16.03.2.02.0010.5.1.01	Belanja Pegawai	11.960.000,00	11.960.000,00	0,00	100,00	
2.16.03.2.02.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	401.068.700,00	400.568.446,00	(500.254,00)	99,88	
2.16.03.2.02.0012	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM SPBE	58.057.600,00	55.801.736,00	(2.255.864,00)	96,11	
2.16.03.2.02.0012.5.1	BELANJA OPERASI	58.057.600,00	55.801.736,00	(2.255.864,00)	96,11	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.16.03.2.02.0012.5.1.01	Belanja Pegawai	6.740.000,00	6.740.000,00	0,00	100,00	
2.16.03.2.02.0012.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.317.600,00	49.061.736,00	(2.255.864,00)	95,60	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	267.165.500,00	263.967.632,00	(3.197.868,00)	98,80	
2.20.02.2.01	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	267.165.500,00	263.967.632,00	(3.197.868,00)	98,80	
2.20.02.2.01.0001	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, ANALISIS DAN DISEMINASI DATA STATISTIK SEKTORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.20.02.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.20.02.2.01.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.20.02.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.20.02.2.01.0002	PENINGKATAN KAPASITAS SDM PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN MUTU STATISTIK DAERAH YANG TERINTEGRASI	71.344.000,00	68.997.000,00	(2.347.000,00)	96,71	
2.20.02.2.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	71.344.000,00	68.997.000,00	(2.347.000,00)	96,71	
2.20.02.2.01.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	100,00	
2.20.02.2.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.314.000,00	65.967.000,00	(2.347.000,00)	96,56	
2.20.02.2.01.0003	MEMBANGUN METADATA STATISTIK SEKTORAL	94.218.000,00	93.746.332,00	(471.668,00)	99,50	
2.20.02.2.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	94.218.000,00	93.746.332,00	(471.668,00)	99,50	
2.20.02.2.01.0003.5.1.01	Belanja Pegawai	6.410.000,00	6.410.000,00	0,00	100,00	
2.20.02.2.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.808.000,00	87.336.332,00	(471.668,00)	99,46	
2.20.02.2.01.0005	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR	101.603.500,00	101.224.300,00	(379.200,00)	99,63	
2.20.02.2.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	101.603.500,00	101.224.300,00	(379.200,00)	99,63	
2.20.02.2.01.0005.5.1.01	Belanja Pegawai	5.320.000,00	5.320.000,00	0,00	100,00	
2.20.02.2.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.283.500,00	95.904.300,00	(379.200,00)	99,61	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	105.655.100,00	105.103.220,00	(551.880,00)	99,48	
2.21.02.2.01	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	105.655.100,00	105.103.220,00	(551.880,00)	99,48	
2.21.02.2.01.0003	PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BERBASIS ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK	105.655.100,00	105.103.220,00	(551.880,00)	99,48	
2.21.02.2.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	105.655.100,00	105.103.220,00	(551.880,00)	99,48	
2.21.02.2.01.0003.5.1.01	Belanja Pegawai	11.720.000,00	11.720.000,00	0,00	100,00	
2.21.02.2.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.935.100,00	93.383.220,00	(551.880,00)	99,41	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	24.145.564.778,00	24.006.584.121,00	(138.980.657,00)	99,42	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
SURPLUS / (DEFISIT)		(24.145.564.778,00)	(24.006.584.121,00)	138.980.657,00	99,42	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(24.145.564.778,00)	(24.006.584.121,00)	138.980.657,00	99,42	





2.17.3.30.3.31.18.0000

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Satuan Kerja : 2.17.3.30.3.31.18.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00	
2.17.02.2.01	PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00	
2.17.02.2.01.0001	FASILITASI PEMENUHAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM DAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00	
2.17.02.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00	
2.17.02.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	59.830.000,00	59.269.400,00	(560.600,00)	99,06	
2.17.03.2.01	PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI, KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA	59.830.000,00	59.269.400,00	(560.600,00)	99,06	
2.17.03.2.01.0004	PELAKSANAAN PROSES PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DAERAH KABUPATEN/KOTA	59.830.000,00	59.269.400,00	(560.600,00)	99,06	
2.17.03.2.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	59.830.000,00	59.269.400,00	(560.600,00)	99,06	
2.17.03.2.01.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	100,00	
2.17.03.2.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.800.000,00	56.239.400,00	(560.600,00)	99,01	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	359.863.000,00	358.195.000,00	(1.668.000,00)	99,54	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.17.05.2.01	PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN BAGI KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	359.863.000,00	358.195.000,00	(1.668.000,00)	99,54	
2.17.05.2.01.0001	PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERKOPERASIAN SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI	359.863.000,00	358.195.000,00	(1.668.000,00)	99,54	
2.17.05.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	359.863.000,00	358.195.000,00	(1.668.000,00)	99,54	
2.17.05.2.01.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	100,00	
2.17.05.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	352.813.000,00	351.145.000,00	(1.668.000,00)	99,53	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	43.030.000,00	43.030.000,00	0,00	100,00	
2.17.06.2.01	PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	43.030.000,00	43.030.000,00	0,00	100,00	
2.17.06.2.01.0005	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS, NILAI TAMBAH, AKSES PASAR, AKSES PEMBIAYAAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN, PENATAAN MANAJEMEN, STANDARISASI, DAN RESTRUKTURISASI USAHA	43.030.000,00	43.030.000,00	0,00	100,00	
2.17.06.2.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	43.030.000,00	43.030.000,00	0,00	100,00	
2.17.06.2.01.0005.5.1.01	Belanja Pegawai	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	100,00	
2.17.06.2.01.0005.5.1.05	Belanja Hibah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	185.652.000,00	184.455.000,00	(1.197.000,00)	99,36	
2.17.07.2.01	PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN	185.652.000,00	184.455.000,00	(1.197.000,00)	99,36	
2.17.07.2.01.0014	PENYUSUNAN BASIS DATA USAHA MIKRO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17.07.2.01.0014.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17.07.2.01.0014.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17.07.2.01.0015	PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN UMKM SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM UMKM DAN KEWIRAUSAHAAN MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	185.652.000,00	184.455.000,00	(1.197.000,00)	99,36	
2.17.07.2.01.0015.5.1	BELANJA OPERASI	185.652.000,00	184.455.000,00	(1.197.000,00)	99,36	
2.17.07.2.01.0015.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.652.000,00	184.455.000,00	(1.197.000,00)	99,36	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	373.421.250,00	368.001.460,00	(5.419.790,00)	98,55	
2.17.08.2.01	PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL	373.421.250,00	368.001.460,00	(5.419.790,00)	98,55	
2.17.08.2.01.0006	PRODUKSI DAN PENGOLAHAN, PEMASARAN, SUMBER DAYA MANUSIA, SERTA DESAIN DAN TEKNOLOGI	373.421.250,00	368.001.460,00	(5.419.790,00)	98,55	
2.17.08.2.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	373.421.250,00	368.001.460,00	(5.419.790,00)	98,55	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.17.08.2.01.0006.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00	
2.17.08.2.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	371.401.250,00	365.981.460,00	(5.419.790,00)	98,54	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	33.840.000,00	33.660.000,00	(180.000,00)	99,47	
3.30.03.2.02	PEMBINAAN TERHADAP PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KERJANYA	33.840.000,00	33.660.000,00	(180.000,00)	99,47	
3.30.03.2.02.0001	PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	33.840.000,00	33.660.000,00	(180.000,00)	99,47	
3.30.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	33.840.000,00	33.660.000,00	(180.000,00)	99,47	
3.30.03.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00	
3.30.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.830.000,00	32.650.000,00	(180.000,00)	99,45	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	14.310.000,00	14.310.000,00	0,00	100,00	
3.30.04.2.02	PENGENDALIAN HARGA, DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR KABUPATEN/KOTA	14.310.000,00	14.310.000,00	0,00	100,00	
3.30.04.2.02.0003	PELAKSANAAN OPERASI PASAR REGULER DAN PASAR KHUSUS YANG BERDAMPAK DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA	14.310.000,00	14.310.000,00	0,00	100,00	
3.30.04.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	14.310.000,00	14.310.000,00	0,00	100,00	
3.30.04.2.02.0003.5.1.01	Belanja Pegawai	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	100,00	
3.30.04.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.280.000,00	11.280.000,00	0,00	100,00	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	80.324.300,00	79.886.100,00	(438.200,00)	99,45	
3.30.06.2.01	PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG, DAN PENGAWASAN	80.324.300,00	79.886.100,00	(438.200,00)	99,45	
3.30.06.2.01.0001	PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG	50.034.300,00	49.776.100,00	(258.200,00)	99,48	
3.30.06.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	33.377.100,00	33.377.100,00	0,00	100,00	
3.30.06.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.377.100,00	33.377.100,00	0,00	100,00	
3.30.06.2.01.0001.5.2	BELANJA MODAL	16.657.200,00	16.399.000,00	(258.200,00)	98,45	
3.30.06.2.01.0001.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.657.200,00	16.399.000,00	(258.200,00)	98,45	
3.30.06.2.01.0002	PENGAWASAN/PENYULUHAN METROLOGI LEGAL	30.290.000,00	30.110.000,00	(180.000,00)	99,41	
3.30.06.2.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	30.290.000,00	30.110.000,00	(180.000,00)	99,41	
3.30.06.2.01.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00	
3.30.06.2.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.280.000,00	29.100.000,00	(180.000,00)	99,39	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	89.951.000,00	83.257.975,00	(6.693.025,00)	92,56	
3.30.07.2.01	PELAKSANAAN PROMOSI, PEMASARAN DAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI	89.951.000,00	83.257.975,00	(6.693.025,00)	92,56	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.30.07.2.01.0005	PELAKSANAAN PROMOSI PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA	89.951.000,00	83.257.975,00	(6.693.025,00)	92,56	
3.30.07.2.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	89.951.000,00	83.257.975,00	(6.693.025,00)	92,56	
3.30.07.2.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.951.000,00	83.257.975,00	(6.693.025,00)	92,56	
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.422.660.971,00	16.906.370.827,00	(516.290.144,00)	97,04	
3.31.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	14.276.560.339,00	14.038.756.289,00	(237.804.050,00)	98,33	
3.31.01.2.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	14.238.640.339,00	14.000.836.289,00	(237.804.050,00)	98,33	
3.31.01.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	14.238.640.339,00	14.000.836.289,00	(237.804.050,00)	98,33	
3.31.01.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	14.238.640.339,00	14.000.836.289,00	(237.804.050,00)	98,33	
3.31.01.2.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	37.920.000,00	37.920.000,00	0,00	100,00	
3.31.01.2.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	37.920.000,00	37.920.000,00	0,00	100,00	
3.31.01.2.02.0007.5.1.01	Belanja Pegawai	37.920.000,00	37.920.000,00	0,00	100,00	
3.31.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	990.747.800,00	862.023.631,00	(128.724.169,00)	87,01	
3.31.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	36.618.000,00	36.618.000,00	0,00	100,00	
3.31.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	36.618.000,00	36.618.000,00	0,00	100,00	
3.31.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.618.000,00	36.618.000,00	0,00	100,00	
3.31.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	101.395.500,00	101.338.100,00	(57.400,00)	99,94	
3.31.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	101.395.500,00	101.338.100,00	(57.400,00)	99,94	
3.31.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.395.500,00	101.338.100,00	(57.400,00)	99,94	
3.31.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	77.185.000,00	67.461.700,00	(9.723.300,00)	87,40	
3.31.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	77.185.000,00	67.461.700,00	(9.723.300,00)	87,40	
3.31.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.185.000,00	67.461.700,00	(9.723.300,00)	87,40	
3.31.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	46.215.000,00	44.400.000,00	(1.815.000,00)	96,07	
3.31.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	46.215.000,00	44.400.000,00	(1.815.000,00)	96,07	
3.31.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.215.000,00	44.400.000,00	(1.815.000,00)	96,07	
3.31.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	104.656.300,00	101.259.190,00	(3.397.110,00)	96,75	
3.31.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	104.656.300,00	101.259.190,00	(3.397.110,00)	96,75	
3.31.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.656.300,00	101.259.190,00	(3.397.110,00)	96,75	
3.31.01.2.06.0006	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	26.000.000,00	13.500.000,00	(12.500.000,00)	51,92	
3.31.01.2.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	26.000.000,00	13.500.000,00	(12.500.000,00)	51,92	
3.31.01.2.06.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	13.500.000,00	(12.500.000,00)	51,92	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.31.01.2.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	598.678.000,00	497.446.641,00	(101.231.359,00)	83,09	
3.31.01.2.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	598.678.000,00	497.446.641,00	(101.231.359,00)	83,09	
3.31.01.2.06.0009.5.1.01	Belanja Pegawai	26.520.000,00	26.520.000,00	0,00	100,00	
3.31.01.2.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	572.158.000,00	470.926.641,00	(101.231.359,00)	82,31	
3.31.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.282.656.832,00	1.186.257.514,00	(96.399.318,00)	92,48	
3.31.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	361.535.120,00	288.959.282,00	(72.575.838,00)	79,93	
3.31.01.2.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	361.535.120,00	288.959.282,00	(72.575.838,00)	79,93	
3.31.01.2.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	361.535.120,00	288.959.282,00	(72.575.838,00)	79,93	
3.31.01.2.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	921.121.712,00	897.298.232,00	(23.823.480,00)	97,41	
3.31.01.2.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	921.121.712,00	897.298.232,00	(23.823.480,00)	97,41	
3.31.01.2.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	921.121.712,00	897.298.232,00	(23.823.480,00)	97,41	
3.31.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	872.696.000,00	819.333.393,00	(53.362.607,00)	93,89	
3.31.01.2.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	455.440.000,00	404.630.120,00	(50.809.880,00)	88,84	
3.31.01.2.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	455.440.000,00	404.630.120,00	(50.809.880,00)	88,84	
3.31.01.2.09.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	455.440.000,00	404.630.120,00	(50.809.880,00)	88,84	
3.31.01.2.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	97.290.000,00	97.290.000,00	0,00	100,00	
3.31.01.2.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	97.290.000,00	97.290.000,00	0,00	100,00	
3.31.01.2.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.290.000,00	97.290.000,00	0,00	100,00	
3.31.01.2.09.0009	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	319.966.000,00	317.413.273,00	(2.552.727,00)	99,20	
3.31.01.2.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	319.966.000,00	317.413.273,00	(2.552.727,00)	99,20	
3.31.01.2.09.0009.5.1.01	Belanja Pegawai	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	100,00	
3.31.01.2.09.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	318.076.000,00	315.523.273,00	(2.552.727,00)	99,20	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	255.010.500,00	254.145.500,00	(865.000,00)	99,66	
3.31.02.2.01	PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	255.010.500,00	254.145.500,00	(865.000,00)	99,66	
3.31.02.2.01.0003	KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI	138.080.000,00	137.600.000,00	(480.000,00)	99,65	
3.31.02.2.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	138.080.000,00	137.600.000,00	(480.000,00)	99,65	
3.31.02.2.01.0003.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.31.02.2.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.080.000,00	137.600.000,00	(480.000,00)	99,65	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.31.02.2.01.0005	KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT	116.930.500,00	116.545.500,00	(385.000,00)	99,67	
3.31.02.2.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	116.930.500,00	116.545.500,00	(385.000,00)	99,67	
3.31.02.2.01.0005.5.1.01	Belanja Pegawai	9.870.000,00	9.870.000,00	0,00	100,00	
3.31.02.2.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.060.500,00	106.675.500,00	(385.000,00)	99,64	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	18.935.393.021,00	18.402.081.262,00	(533.311.759,00)	97,18	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(18.935.393.021,00)	(18.402.081.262,00)	533.311.759,00	97,18	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(18.935.393.021,00)	(18.402.081.262,00)	533.311.759,00	97,18	





2.18.0.00.0.00.19.0000

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Satuan Kerja : 2.18.0.00.0.00.19.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
2.18.0.00.0.00.19.0000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.802.561.907,00	9.107.831.612,00	(694.730.295,00)	92,91	
2.18.0.00.0.00.19.0000.4.1.02	Retribusi Daerah	9.761.138.309,00	9.061.545.776,00	(699.592.533,00)	92,83	
2.18.0.00.0.00.19.0000.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	41.423.598,00	46.285.836,00	4.862.238,00	111,74	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	9.802.561.907,00	9.107.831.612,00	(694.730.295,00)	92,91	
5	BELANJA DAERAH					
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.830.069.211,00	12.775.653.467,00	(54.415.744,00)	99,58	
2.18.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	33.175.600,00	33.175.600,00	0,00	100,00	
2.18.01.2.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	33.175.600,00	33.175.600,00	0,00	100,00	
2.18.01.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	33.175.600,00	33.175.600,00	0,00	100,00	
2.18.01.2.01.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00	
2.18.01.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.155.600,00	31.155.600,00	0,00	100,00	
2.18.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	11.069.025.951,00	11.056.903.087,00	(12.122.864,00)	99,89	
2.18.01.2.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	11.020.995.951,00	11.010.893.087,00	(10.102.864,00)	99,91	
2.18.01.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	11.020.995.951,00	11.010.893.087,00	(10.102.864,00)	99,91	
2.18.01.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	11.020.995.951,00	11.010.893.087,00	(10.102.864,00)	99,91	
2.18.01.2.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	48.030.000,00	46.010.000,00	(2.020.000,00)	95,79	
2.18.01.2.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	48.030.000,00	46.010.000,00	(2.020.000,00)	95,79	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.18.01.2.02.0007.5.1.01	Belanja Pegawai	43.980.000,00	41.960.000,00	(2.020.000,00)	95,41	
2.18.01.2.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	100,00	
2.18.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	310.215.900,00	293.081.904,00	(17.133.996,00)	94,48	
2.18.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	60.330.300,00	60.330.300,00	0,00	100,00	
2.18.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	60.330.300,00	60.330.300,00	0,00	100,00	
2.18.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.330.300,00	60.330.300,00	0,00	100,00	
2.18.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	42.848.600,00	42.761.800,00	(86.800,00)	99,80	
2.18.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	42.848.600,00	42.761.800,00	(86.800,00)	99,80	
2.18.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.848.600,00	42.761.800,00	(86.800,00)	99,80	
2.18.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	14.812.000,00	14.812.000,00	0,00	100,00	
2.18.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	14.812.000,00	14.812.000,00	0,00	100,00	
2.18.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.812.000,00	14.812.000,00	0,00	100,00	
2.18.01.2.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	192.225.000,00	175.177.804,00	(17.047.196,00)	91,13	
2.18.01.2.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	192.225.000,00	175.177.804,00	(17.047.196,00)	91,13	
2.18.01.2.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.225.000,00	175.177.804,00	(17.047.196,00)	91,13	
2.18.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	130.605.000,00	126.000.000,00	(4.605.000,00)	96,47	
2.18.01.2.07.0006	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	130.605.000,00	126.000.000,00	(4.605.000,00)	96,47	
2.18.01.2.07.0006.5.1	BELANJA OPERASI	399.500,00	0,00	(399.500,00)	0,00	
2.18.01.2.07.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	399.500,00	0,00	(399.500,00)	0,00	
2.18.01.2.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	130.205.500,00	126.000.000,00	(4.205.500,00)	96,77	
2.18.01.2.07.0006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	130.205.500,00	126.000.000,00	(4.205.500,00)	96,77	
2.18.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.027.136.760,00	1.012.291.326,00	(14.845.434,00)	98,55	
2.18.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	8.706.000,00	6.670.286,00	(2.035.714,00)	76,62	
2.18.01.2.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	8.706.000,00	6.670.286,00	(2.035.714,00)	76,62	
2.18.01.2.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.706.000,00	6.670.286,00	(2.035.714,00)	76,62	
2.18.01.2.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.018.430.760,00	1.005.621.040,00	(12.809.720,00)	98,74	
2.18.01.2.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.018.430.760,00	1.005.621.040,00	(12.809.720,00)	98,74	
2.18.01.2.08.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	28.510.000,00	24.100.000,00	(4.410.000,00)	84,53	
2.18.01.2.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	989.920.760,00	981.521.040,00	(8.399.720,00)	99,15	
2.18.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	259.910.000,00	254.201.550,00	(5.708.450,00)	97,80	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.18.01.2.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	227.340.000,00	221.641.800,00	(5.698.200,00)	97,49	
2.18.01.2.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	227.340.000,00	221.641.800,00	(5.698.200,00)	97,49	
2.18.01.2.09.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.340.000,00	221.641.800,00	(5.698.200,00)	97,49	
2.18.01.2.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	32.570.000,00	32.559.750,00	(10.250,00)	99,97	
2.18.01.2.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	32.570.000,00	32.559.750,00	(10.250,00)	99,97	
2.18.01.2.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.570.000,00	32.559.750,00	(10.250,00)	99,97	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	142.330.000,00	140.155.140,00	(2.174.860,00)	98,47	
2.18.02.2.02	PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA	142.330.000,00	140.155.140,00	(2.174.860,00)	98,47	
2.18.02.2.02.0004	PENYUSUNAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA	142.330.000,00	140.155.140,00	(2.174.860,00)	98,47	
2.18.02.2.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	142.330.000,00	140.155.140,00	(2.174.860,00)	98,47	
2.18.02.2.02.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00	100,00	
2.18.02.2.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.270.000,00	134.095.140,00	(2.174.860,00)	98,40	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	39.302.300,00	39.302.300,00	0,00	100,00	
2.18.03.2.01	PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	39.302.300,00	39.302.300,00	0,00	100,00	
2.18.03.2.01.0002	PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	39.302.300,00	39.302.300,00	0,00	100,00	
2.18.03.2.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	39.302.300,00	39.302.300,00	0,00	100,00	
2.18.03.2.01.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	4.040.000,00	4.040.000,00	0,00	100,00	
2.18.03.2.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.262.300,00	35.262.300,00	0,00	100,00	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.854.635.944,00	1.854.635.944,00	0,00	100,00	
2.18.04.2.01	PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1.854.635.944,00	1.854.635.944,00	0,00	100,00	
2.18.04.2.01.0006	PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	1.854.635.944,00	1.854.635.944,00	0,00	100,00	
2.18.04.2.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	1.853.135.944,00	1.853.135.944,00	0,00	100,00	
2.18.04.2.01.0006.5.1.01	Belanja Pegawai	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	100,00	
2.18.04.2.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.849.615.944,00	1.849.615.944,00	0,00	100,00	
2.18.04.2.01.0006.5.2	BELANJA MODAL	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
2.18.04.2.01.0006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	415.178.000,00	403.608.644,00	(11.569.356,00)	97,21	
2.18.05.2.01	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	415.178.000,00	403.608.644,00	(11.569.356,00)	97,21	
2.18.05.2.01.0005	BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA	405.678.000,00	394.108.644,00	(11.569.356,00)	97,15	
2.18.05.2.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	405.678.000,00	394.108.644,00	(11.569.356,00)	97,15	
2.18.05.2.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	405.678.000,00	394.108.644,00	(11.569.356,00)	97,15	
2.18.05.2.01.0006	PENGAWASAN PENANAMAN MODAL	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00	
2.18.05.2.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00	
2.18.05.2.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	100.000.000,00	98.490.300,00	(1.509.700,00)	98,49	
2.18.06.2.01	PENGLOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	100.000.000,00	98.490.300,00	(1.509.700,00)	98,49	
2.18.06.2.01.0002	PENGOLAHAN, PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	100.000.000,00	98.490.300,00	(1.509.700,00)	98,49	
2.18.06.2.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	98.490.300,00	(1.509.700,00)	98,49	
2.18.06.2.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	98.490.300,00	(1.509.700,00)	98,49	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	15.381.515.455,00	15.311.845.795,00	(69.669.660,00)	99,55	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.578.953.548,00)	(6.204.014.183,00)	(625.060.635,00)	111,20	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(5.578.953.548,00)	(6.204.014.183,00)	(625.060.635,00)	111,20	





2.19.0.00.0.00.20.0000

DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Satuan Kerja : 2.19.0.00.0.00.20.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
2.19.0.00.0.00.20.0000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.250.000.000,00	1.553.302.000,00	303.302.000,00	124,26	
2.19.0.00.0.00.20.0000.4.1.02	Retribusi Daerah	1.250.000.000,00	1.553.302.000,00	303.302.000,00	124,26	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.250.000.000,00	1.553.302.000,00	303.302.000,00	124,26	
5	BELANJA DAERAH					
2.19.0.00.0.00.20.0000	NAMA SUB KEGIATAN TIDAK JELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.19.0.00.0.00.20.0000.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.19.0.00.0.00.20.0000.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.673.332.345,00	12.154.272.902,00	(519.059.443,00)	95,90	
2.19.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	9.526.920.520,00	9.466.131.556,00	(60.788.964,00)	99,36	
2.19.01.2.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	9.526.920.520,00	9.466.131.556,00	(60.788.964,00)	99,36	
2.19.01.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	9.526.920.520,00	9.466.131.556,00	(60.788.964,00)	99,36	
2.19.01.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	9.526.920.520,00	9.466.131.556,00	(60.788.964,00)	99,36	
2.19.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.217.953.900,00	1.090.646.741,00	(127.307.159,00)	89,55	
2.19.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	30.272.600,00	30.272.600,00	0,00	100,00	
2.19.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	30.272.600,00	30.272.600,00	0,00	100,00	
2.19.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.272.600,00	30.272.600,00	0,00	100,00	
2.19.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	61.459.200,00	60.643.800,00	(815.400,00)	98,67	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.19.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	61.459.200,00	60.643.800,00	(815.400,00)	98,67	
2.19.01.2.06.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	2.370.000,00	1.690.000,00	(680.000,00)	71,31	
2.19.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.089.200,00	58.953.800,00	(135.400,00)	99,77	
2.19.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	33.250.500,00	33.250.500,00	0,00	100,00	
2.19.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	33.250.500,00	33.250.500,00	0,00	100,00	
2.19.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.250.500,00	33.250.500,00	0,00	100,00	
2.19.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	135.360.000,00	134.902.400,00	(457.600,00)	99,66	
2.19.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	135.360.000,00	134.902.400,00	(457.600,00)	99,66	
2.19.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.360.000,00	134.902.400,00	(457.600,00)	99,66	
2.19.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	31.497.600,00	31.493.850,00	(3.750,00)	99,99	
2.19.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	31.497.600,00	31.493.850,00	(3.750,00)	99,99	
2.19.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.497.600,00	31.493.850,00	(3.750,00)	99,99	
2.19.01.2.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	926.114.000,00	800.083.591,00	(126.030.409,00)	86,39	
2.19.01.2.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	926.114.000,00	800.083.591,00	(126.030.409,00)	86,39	
2.19.01.2.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	926.114.000,00	800.083.591,00	(126.030.409,00)	86,39	
2.19.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	113.241.300,00	80.011.300,00	(33.230.000,00)	70,66	
2.19.01.2.07.0006	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	113.241.300,00	80.011.300,00	(33.230.000,00)	70,66	
2.19.01.2.07.0006.5.1	BELANJA OPERASI	102.480.000,00	69.300.000,00	(33.180.000,00)	67,62	
2.19.01.2.07.0006.5.1.01	Belanja Pegawai	102.480.000,00	69.300.000,00	(33.180.000,00)	67,62	
2.19.01.2.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	10.761.300,00	10.711.300,00	(50.000,00)	99,54	
2.19.01.2.07.0006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.761.300,00	10.711.300,00	(50.000,00)	99,54	
2.19.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.668.336.625,00	1.370.743.241,00	(297.593.384,00)	82,16	
2.19.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.341.068.545,00	1.043.687.801,00	(297.380.744,00)	77,83	
2.19.01.2.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.341.068.545,00	1.043.687.801,00	(297.380.744,00)	77,83	
2.19.01.2.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.341.068.545,00	1.043.687.801,00	(297.380.744,00)	77,83	
2.19.01.2.08.0003	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	60.900.000,00	60.900.000,00	0,00	100,00	
2.19.01.2.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	60.900.000,00	60.900.000,00	0,00	100,00	
2.19.01.2.08.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.900.000,00	60.900.000,00	0,00	100,00	
2.19.01.2.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	266.368.080,00	266.155.440,00	(212.640,00)	99,92	
2.19.01.2.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	266.368.080,00	266.155.440,00	(212.640,00)	99,92	
2.19.01.2.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	266.368.080,00	266.155.440,00	(212.640,00)	99,92	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.19.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	146.880.000,00	146.740.064,00	(139.936,00)	99,90	
2.19.01.2.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	146.880.000,00	146.740.064,00	(139.936,00)	99,90	
2.19.01.2.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	146.880.000,00	146.740.064,00	(139.936,00)	99,90	
2.19.01.2.09.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.880.000,00	146.740.064,00	(139.936,00)	99,90	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.146.119.800,00	1.130.733.800,00	(15.386.000,00)	98,66	
2.19.02.2.01	PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA	646.119.800,00	630.733.800,00	(15.386.000,00)	97,62	
2.19.02.2.01.0001	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING PEMUDA PELOPOR	70.310.800,00	65.582.000,00	(4.728.800,00)	93,27	
2.19.02.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	70.310.800,00	65.582.000,00	(4.728.800,00)	93,27	
2.19.02.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.310.800,00	65.582.000,00	(4.728.800,00)	93,27	
2.19.02.2.01.0003	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA	575.809.000,00	565.151.800,00	(10.657.200,00)	98,15	
2.19.02.2.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	575.809.000,00	565.151.800,00	(10.657.200,00)	98,15	
2.19.02.2.01.0003.5.1.01	Belanja Pegawai	24.670.000,00	18.820.000,00	(5.850.000,00)	76,29	
2.19.02.2.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	551.139.000,00	546.331.800,00	(4.807.200,00)	99,13	
2.19.02.2.02	PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00	
2.19.02.2.02.0002	PENINGKATAN KAPASITAS PEMUDA DAN ORGANISASI KEPEMUDAAN KABUPATEN/KOTA	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00	
2.19.02.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00	
2.19.02.2.02.0002.5.1.05	Belanja Hibah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	16.280.225.700,00	16.248.129.425,00	(32.096.275,00)	99,80	
2.19.03.2.01	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.948.678.500,00	1.945.661.700,00	(3.016.800,00)	99,85	
2.19.03.2.01.0002	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN OLAHRAGA DAN PENYELENGGARAAN KOMPETISI OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.19.03.2.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.19.03.2.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.19.03.2.01.0003	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA KABUPATEN/KOTA	1.948.678.500,00	1.945.661.700,00	(3.016.800,00)	99,85	
2.19.03.2.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	108.178.500,00	105.161.700,00	(3.016.800,00)	97,21	
2.19.03.2.01.0003.5.1.01	Belanja Pegawai	30.240.000,00	27.720.000,00	(2.520.000,00)	91,67	
2.19.03.2.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.938.500,00	77.441.700,00	(496.800,00)	99,36	
2.19.03.2.01.0003.5.2	BELANJA MODAL	1.840.500.000,00	1.840.500.000,00	0,00	100,00	
2.19.03.2.01.0003.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.840.500.000,00	1.840.500.000,00	0,00	100,00	
2.19.03.2.02	PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	526.088.800,00	525.596.000,00	(492.800,00)	99,91	
2.19.03.2.02.0003	PARTISIPASI DAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENYELENGGARAAN KEJUARAAN	526.088.800,00	525.596.000,00	(492.800,00)	99,91	
2.19.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	526.088.800,00	525.596.000,00	(492.800,00)	99,91	
2.19.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	526.088.800,00	525.596.000,00	(492.800,00)	99,91	
2.19.03.2.03	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT DAERAH PROVINSI	11.940.250.000,00	11.935.418.000,00	(4.832.000,00)	99,96	
2.19.03.2.03.0001	SELEKSI ATLET DAERAH	68.202.100,00	68.051.700,00	(150.400,00)	99,78	
2.19.03.2.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	68.202.100,00	68.051.700,00	(150.400,00)	99,78	
2.19.03.2.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.202.100,00	68.051.700,00	(150.400,00)	99,78	
2.19.03.2.03.0003	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ATLET BERPRESTASI KABUPATEN/KOTA	8.846.047.900,00	8.841.366.300,00	(4.681.600,00)	99,95	
2.19.03.2.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	8.846.047.900,00	8.841.366.300,00	(4.681.600,00)	99,95	
2.19.03.2.03.0003.5.1.01	Belanja Pegawai	17.210.000,00	14.690.000,00	(2.520.000,00)	85,36	
2.19.03.2.03.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	343.837.900,00	341.676.300,00	(2.161.600,00)	99,37	
2.19.03.2.03.0003.5.1.05	Belanja Hibah	8.485.000.000,00	8.485.000.000,00	0,00	100,00	
2.19.03.2.03.0004	PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA KABUPATEN/KOTA	3.026.000.000,00	3.026.000.000,00	0,00	100,00	
2.19.03.2.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	3.026.000.000,00	3.026.000.000,00	0,00	100,00	
2.19.03.2.03.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.026.000.000,00	3.026.000.000,00	0,00	100,00	
2.19.03.2.05	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI	1.865.208.400,00	1.841.453.725,00	(23.754.675,00)	98,73	
2.19.03.2.05.0002	PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN OLAHRAGA REKREASI	869.560.700,00	854.409.000,00	(15.151.700,00)	98,26	
2.19.03.2.05.0002.5.1	BELANJA OPERASI	869.560.700,00	854.409.000,00	(15.151.700,00)	98,26	
2.19.03.2.05.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.560.700,00	104.409.000,00	(15.151.700,00)	87,33	
2.19.03.2.05.0002.5.1.05	Belanja Hibah	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	100,00	
2.19.03.2.05.0003	PENYEDIAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA REKREASI	995.647.700,00	987.044.725,00	(8.602.975,00)	99,14	
2.19.03.2.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	936.110.100,00	928.164.725,00	(7.945.375,00)	99,15	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.19.03.2.05.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	936.110.100,00	928.164.725,00	(7.945.375,00)	99,15	
2.19.03.2.05.0003.5.2	BELANJA MODAL	59.537.600,00	58.880.000,00	(657.600,00)	98,90	
2.19.03.2.05.0003.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.537.600,00	58.880.000,00	(657.600,00)	98,90	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	100,00	
2.19.04.2.01	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	100,00	
2.19.04.2.01.0008	PARTISIPASI DAN KEIKUTSERTAAN DALAM KEGIATAN KEPRAMUKAAN	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	100,00	
2.19.04.2.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	100,00	
2.19.04.2.01.0008.5.1.05	Belanja Hibah	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	30.999.677.845,00	30.433.136.127,00	(566.541.718,00)	98,17	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(29.749.677.845,00)	(28.879.834.127,00)	869.843.718,00	97,08	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(29.749.677.845,00)	(28.879.834.127,00)	869.843.718,00	97,08	





2.24.2.23.0.00.21.0000

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Satuan Kerja : 2.24.2.23.0.00.21.0000 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	698.486.700,00	693.720.419,00	(4.766.281,00)	99,32	
2.23.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	54.869.700,00	54.473.050,00	(396.650,00)	99,28	
2.23.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	39.832.600,00	39.473.000,00	(359.600,00)	99,10	
2.23.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	39.832.600,00	39.473.000,00	(359.600,00)	99,10	
2.23.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.832.600,00	39.473.000,00	(359.600,00)	99,10	
2.23.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	15.037.100,00	15.000.050,00	(37.050,00)	99,75	
2.23.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	15.037.100,00	15.000.050,00	(37.050,00)	99,75	
2.23.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.037.100,00	15.000.050,00	(37.050,00)	99,75	
2.23.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	62.242.400,00	61.435.000,00	(807.400,00)	98,70	
2.23.01.2.07.0005	PENGADAAN MEBEL	2.516.000,00	2.500.000,00	(16.000,00)	99,36	
2.23.01.2.07.0005.5.2	BELANJA MODAL	2.516.000,00	2.500.000,00	(16.000,00)	99,36	
2.23.01.2.07.0005.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.516.000,00	2.500.000,00	(16.000,00)	99,36	
2.23.01.2.07.0006	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	59.726.400,00	58.935.000,00	(791.400,00)	98,67	
2.23.01.2.07.0006.5.1	BELANJA OPERASI	433.200,00	400.000,00	(33.200,00)	92,34	
2.23.01.2.07.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	433.200,00	400.000,00	(33.200,00)	92,34	
2.23.01.2.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	59.293.200,00	58.535.000,00	(758.200,00)	98,72	
2.23.01.2.07.0006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.293.200,00	58.535.000,00	(758.200,00)	98,72	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.23.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	581.374.600,00	577.812.369,00	(3.562.231,00)	99,39	
2.23.01.2.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	68.280.000,00	67.286.400,00	(993.600,00)	98,54	
2.23.01.2.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	68.280.000,00	67.286.400,00	(993.600,00)	98,54	
2.23.01.2.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.280.000,00	67.286.400,00	(993.600,00)	98,54	
2.23.01.2.09.0009	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	513.094.600,00	510.525.969,00	(2.568.631,00)	99,50	
2.23.01.2.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	513.094.600,00	510.525.969,00	(2.568.631,00)	99,50	
2.23.01.2.09.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	513.094.600,00	510.525.969,00	(2.568.631,00)	99,50	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	364.924.400,00	326.820.950,00	(38.103.450,00)	89,56	
2.23.02.2.01	PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	364.924.400,00	326.820.950,00	(38.103.450,00)	89,56	
2.23.02.2.01.0004	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI SELURUH WILAYAH KABUPATEN/KOTA SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN	190.641.900,00	189.260.350,00	(1.381.550,00)	99,28	
2.23.02.2.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	190.641.900,00	189.260.350,00	(1.381.550,00)	99,28	
2.23.02.2.01.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	100,00	
2.23.02.2.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.281.900,00	187.900.350,00	(1.381.550,00)	99,27	
2.23.02.2.01.0008	PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA	174.282.500,00	137.560.600,00	(36.721.900,00)	78,93	
2.23.02.2.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	47.562.500,00	39.849.800,00	(7.712.700,00)	83,78	
2.23.02.2.01.0008.5.1.01	Belanja Pegawai	16.100.000,00	15.100.000,00	(1.000.000,00)	93,79	
2.23.02.2.01.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.462.500,00	24.749.800,00	(6.712.700,00)	78,66	
2.23.02.2.01.0008.5.2	BELANJA MODAL	126.720.000,00	97.710.800,00	(29.009.200,00)	77,11	
2.23.02.2.01.0008.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	126.720.000,00	97.710.800,00	(29.009.200,00)	77,11	
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.037.235.529,00	9.871.879.761,00	(165.355.768,00)	98,35	
2.24.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	10.425.200,00	10.425.000,00	(200,00)	100,00	
2.24.01.2.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	10.425.200,00	10.425.000,00	(200,00)	100,00	
2.24.01.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	10.425.200,00	10.425.000,00	(200,00)	100,00	
2.24.01.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.425.200,00	10.425.000,00	(200,00)	100,00	
2.24.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	8.097.616.518,00	8.001.667.937,00	(95.948.581,00)	98,82	
2.24.01.2.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	8.048.065.218,00	7.952.116.837,00	(95.948.381,00)	98,81	
2.24.01.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	8.048.065.218,00	7.952.116.837,00	(95.948.381,00)	98,81	
2.24.01.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	8.048.065.218,00	7.952.116.837,00	(95.948.381,00)	98,81	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.24.01.2.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	49.551.300,00	49.551.100,00	(200,00)	100,00	
2.24.01.2.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	49.551.300,00	49.551.100,00	(200,00)	100,00	
2.24.01.2.02.0007.5.1.01	Belanja Pegawai	47.780.000,00	47.780.000,00	0,00	100,00	
2.24.01.2.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.771.300,00	1.771.100,00	(200,00)	99,99	
2.24.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	395.454.700,00	391.068.733,00	(4.385.967,00)	98,89	
2.24.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	23.004.200,00	22.825.000,00	(179.200,00)	99,22	
2.24.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	23.004.200,00	22.825.000,00	(179.200,00)	99,22	
2.24.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.004.200,00	22.825.000,00	(179.200,00)	99,22	
2.24.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	68.852.500,00	67.995.000,00	(857.500,00)	98,75	
2.24.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	68.852.500,00	67.995.000,00	(857.500,00)	98,75	
2.24.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.852.500,00	67.995.000,00	(857.500,00)	98,75	
2.24.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	31.748.000,00	30.721.000,00	(1.027.000,00)	96,77	
2.24.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	31.748.000,00	30.721.000,00	(1.027.000,00)	96,77	
2.24.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.748.000,00	30.721.000,00	(1.027.000,00)	96,77	
2.24.01.2.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	271.850.000,00	269.527.733,00	(2.322.267,00)	99,15	
2.24.01.2.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	271.850.000,00	269.527.733,00	(2.322.267,00)	99,15	
2.24.01.2.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	271.850.000,00	269.527.733,00	(2.322.267,00)	99,15	
2.24.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.325.009.111,00	1.288.433.391,00	(36.575.720,00)	97,24	
2.24.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	509.868.095,00	474.857.855,00	(35.010.240,00)	93,13	
2.24.01.2.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	509.868.095,00	474.857.855,00	(35.010.240,00)	93,13	
2.24.01.2.08.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	19.320.000,00	19.320.000,00	0,00	100,00	
2.24.01.2.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	490.548.095,00	455.537.855,00	(35.010.240,00)	92,86	
2.24.01.2.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	815.141.016,00	813.575.536,00	(1.565.480,00)	99,81	
2.24.01.2.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	815.141.016,00	813.575.536,00	(1.565.480,00)	99,81	
2.24.01.2.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	815.141.016,00	813.575.536,00	(1.565.480,00)	99,81	
2.24.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	208.730.000,00	180.284.700,00	(28.445.300,00)	86,37	
2.24.01.2.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	121.030.000,00	109.873.800,00	(11.156.200,00)	90,78	
2.24.01.2.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	121.030.000,00	109.873.800,00	(11.156.200,00)	90,78	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.24.01.2.09.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.030.000,00	109.873.800,00	(11.156.200,00)	90,78	
2.24.01.2.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	87.700.000,00	70.410.900,00	(17.289.100,00)	80,29	
2.24.01.2.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	87.700.000,00	70.410.900,00	(17.289.100,00)	80,29	
2.24.01.2.09.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.700.000,00	70.410.900,00	(17.289.100,00)	80,29	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	380.298.200,00	375.043.138,00	(5.255.062,00)	98,62	
2.24.02.2.01	PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	295.528.200,00	290.273.138,00	(5.255.062,00)	98,22	
2.24.02.2.01.0002	PEMELIHARAAN DAN PENYUSUTAN ARSIP DINAMIS	274.480.000,00	269.245.438,00	(5.234.562,00)	98,09	
2.24.02.2.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	274.480.000,00	269.245.438,00	(5.234.562,00)	98,09	
2.24.02.2.01.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	7.730.000,00	7.730.000,00	0,00	100,00	
2.24.02.2.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	266.750.000,00	261.515.438,00	(5.234.562,00)	98,04	
2.24.02.2.01.0003	PENGAWASAN ARSIP DINAMIS KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	21.048.200,00	21.027.700,00	(20.500,00)	99,90	
2.24.02.2.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	21.048.200,00	21.027.700,00	(20.500,00)	99,90	
2.24.02.2.01.0003.5.1.01	Belanja Pegawai	6.320.000,00	6.320.000,00	0,00	100,00	
2.24.02.2.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.728.200,00	14.707.700,00	(20.500,00)	99,86	
2.24.02.2.02	PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	84.770.000,00	84.770.000,00	0,00	100,00	
2.24.02.2.02.0002	AKUISISI, PENGOLAHAN, PRESERVASI, DAN AKSES ARSIP STATIS	84.770.000,00	84.770.000,00	0,00	100,00	
2.24.02.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	84.770.000,00	84.770.000,00	0,00	100,00	
2.24.02.2.02.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	8.470.000,00	8.470.000,00	0,00	100,00	
2.24.02.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.300.000,00	76.300.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	11.480.944.829,00	11.267.464.268,00	(213.480.561,00)	98,14	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(11.480.944.829,00)	(11.267.464.268,00)	213.480.561,00	98,14	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(11.480.944.829,00)	(11.267.464.268,00)	213.480.561,00	98,14	





3.26.2.22.0.00.22.0000

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Satuan Kerja : 3.26.2.22.0.00.22.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
3.26.2.22.0.00.22.0000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	45.000.000,00	54.000.000,00	9.000.000,00	120,00	
3.26.2.22.0.00.22.0000.4.1.02	Retribusi Daerah	45.000.000,00	54.000.000,00	9.000.000,00	120,00	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	45.000.000,00	54.000.000,00	9.000.000,00	120,00	
5	BELANJA DAERAH					
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.571.802.631,00	10.296.966.515,00	(274.836.116,00)	97,40	
2.22.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.22.01.2.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.22.01.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.22.01.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.22.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	8.543.550.920,00	8.415.004.827,00	(128.546.093,00)	98,50	
2.22.01.2.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	8.474.787.920,00	8.359.321.827,00	(115.466.093,00)	98,64	
2.22.01.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	8.474.787.920,00	8.359.321.827,00	(115.466.093,00)	98,64	
2.22.01.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	8.474.787.920,00	8.359.321.827,00	(115.466.093,00)	98,64	
2.22.01.2.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	68.763.000,00	55.683.000,00	(13.080.000,00)	80,98	
2.22.01.2.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	68.763.000,00	55.683.000,00	(13.080.000,00)	80,98	
2.22.01.2.02.0007.5.1.01	Belanja Pegawai	68.280.000,00	55.200.000,00	(13.080.000,00)	80,84	
2.22.01.2.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	483.000,00	483.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.22.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	506.110.400,00	483.591.159,00	(22.519.241,00)	95,55	
2.22.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	95.599.100,00	81.431.600,00	(14.167.500,00)	85,18	
2.22.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	95.599.100,00	81.431.600,00	(14.167.500,00)	85,18	
2.22.01.2.06.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
2.22.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.919.100,00	80.751.600,00	(14.167.500,00)	85,07	
2.22.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	16.470.900,00	15.900.000,00	(570.900,00)	96,53	
2.22.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	16.470.900,00	15.900.000,00	(570.900,00)	96,53	
2.22.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.470.900,00	15.900.000,00	(570.900,00)	96,53	
2.22.01.2.06.0006	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	12.000.000,00	11.400.000,00	(600.000,00)	95,00	
2.22.01.2.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	11.400.000,00	(600.000,00)	95,00	
2.22.01.2.06.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.400.000,00	(600.000,00)	95,00	
2.22.01.2.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	382.040.400,00	374.859.559,00	(7.180.841,00)	98,12	
2.22.01.2.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	382.040.400,00	374.859.559,00	(7.180.841,00)	98,12	
2.22.01.2.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	382.040.400,00	374.859.559,00	(7.180.841,00)	98,12	
2.22.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	115.787.200,00	108.069.000,00	(7.718.200,00)	93,33	
2.22.01.2.07.0011	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	115.787.200,00	108.069.000,00	(7.718.200,00)	93,33	
2.22.01.2.07.0011.5.1	BELANJA OPERASI	1.360.000,00	680.000,00	(680.000,00)	50,00	
2.22.01.2.07.0011.5.1.01	Belanja Pegawai	1.360.000,00	680.000,00	(680.000,00)	50,00	
2.22.01.2.07.0011.5.2	BELANJA MODAL	114.427.200,00	107.389.000,00	(7.038.200,00)	93,85	
2.22.01.2.07.0011.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	114.427.200,00	107.389.000,00	(7.038.200,00)	93,85	
2.22.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	986.630.311,00	881.888.936,00	(104.741.375,00)	89,38	
2.22.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	292.004.115,00	188.879.372,00	(103.124.743,00)	64,68	
2.22.01.2.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	292.004.115,00	188.879.372,00	(103.124.743,00)	64,68	
2.22.01.2.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	292.004.115,00	188.879.372,00	(103.124.743,00)	64,68	
2.22.01.2.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	694.626.196,00	693.009.564,00	(1.616.632,00)	99,77	
2.22.01.2.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	694.626.196,00	693.009.564,00	(1.616.632,00)	99,77	
2.22.01.2.08.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	20.680.000,00	20.000.000,00	(680.000,00)	96,71	
2.22.01.2.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	673.946.196,00	673.009.564,00	(936.632,00)	99,86	
2.22.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	419.723.800,00	408.412.593,00	(11.311.207,00)	97,31	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.22.01.2.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	192.690.000,00	184.166.817,00	(8.523.183,00)	95,58	
2.22.01.2.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	192.690.000,00	184.166.817,00	(8.523.183,00)	95,58	
2.22.01.2.09.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.690.000,00	184.166.817,00	(8.523.183,00)	95,58	
2.22.01.2.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	89.500.800,00	88.025.000,00	(1.475.800,00)	98,35	
2.22.01.2.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	89.500.800,00	88.025.000,00	(1.475.800,00)	98,35	
2.22.01.2.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.500.800,00	88.025.000,00	(1.475.800,00)	98,35	
2.22.01.2.09.0009	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	137.533.000,00	136.220.776,00	(1.312.224,00)	99,05	
2.22.01.2.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	137.533.000,00	136.220.776,00	(1.312.224,00)	99,05	
2.22.01.2.09.0009.5.1.01	Belanja Pegawai	680.000,00	0,00	(680.000,00)	0,00	
2.22.01.2.09.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.853.000,00	136.220.776,00	(632.224,00)	99,54	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	877.463.400,00	861.374.308,00	(16.089.092,00)	98,17	
2.22.02.2.01	PENGLOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	251.360.000,00	250.070.000,00	(1.290.000,00)	99,49	
2.22.02.2.01.0001	PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN	151.360.000,00	150.505.000,00	(855.000,00)	99,44	
2.22.02.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	151.360.000,00	150.505.000,00	(855.000,00)	99,44	
2.22.02.2.01.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	1.360.000,00	680.000,00	(680.000,00)	50,00	
2.22.02.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	149.825.000,00	(175.000,00)	99,88	
2.22.02.2.01.0002	PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA, DAN PRANATA KEBUDAYAAN	100.000.000,00	99.565.000,00	(435.000,00)	99,56	
2.22.02.2.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.565.000,00	(435.000,00)	99,56	
2.22.02.2.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.565.000,00	(435.000,00)	99,56	
2.22.02.2.02	PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	626.103.400,00	611.304.308,00	(14.799.092,00)	97,64	
2.22.02.2.02.0001	PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN TRADISI BUDAYA	626.103.400,00	611.304.308,00	(14.799.092,00)	97,64	
2.22.02.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	626.103.400,00	611.304.308,00	(14.799.092,00)	97,64	
2.22.02.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	13.560.000,00	11.950.000,00	(1.610.000,00)	88,13	
2.22.02.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	612.543.400,00	599.354.308,00	(13.189.092,00)	97,85	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	40.795.000,00	40.590.000,00	(205.000,00)	99,50	
2.22.03.2.01	PEMBINAAN KESENIAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	40.795.000,00	40.590.000,00	(205.000,00)	99,50	
2.22.03.2.01.0003	PENINGKATAN KAPASITAS TATA KELOLA LEMBAGA KESENIAN TRADISIONAL	40.795.000,00	40.590.000,00	(205.000,00)	99,50	
2.22.03.2.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	40.795.000,00	40.590.000,00	(205.000,00)	99,50	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.22.03.2.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.795.000,00	40.590.000,00	(205.000,00)	99,50	
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	31.642.000,00	31.378.000,00	(264.000,00)	99,17	
2.22.04.2.01	PEMBINAAN SEJARAH LOKAL DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.642.000,00	31.378.000,00	(264.000,00)	99,17	
2.22.04.2.01.0001	PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN LEMBAGA SEJARAH LOKAL KABUPATEN/KOTA	31.642.000,00	31.378.000,00	(264.000,00)	99,17	
2.22.04.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	31.642.000,00	31.378.000,00	(264.000,00)	99,17	
2.22.04.2.01.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00	
2.22.04.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.632.000,00	30.368.000,00	(264.000,00)	99,14	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	465.139.600,00	448.420.000,00	(16.719.600,00)	96,41	
2.22.05.2.02	PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA	465.139.600,00	448.420.000,00	(16.719.600,00)	96,41	
2.22.05.2.02.0001	PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA	465.139.600,00	448.420.000,00	(16.719.600,00)	96,41	
2.22.05.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	465.139.600,00	448.420.000,00	(16.719.600,00)	96,41	
2.22.05.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	4.830.000,00	3.220.000,00	(1.610.000,00)	66,67	
2.22.05.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	460.309.600,00	445.200.000,00	(15.109.600,00)	96,72	
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	92.420.000,00	91.886.000,00	(534.000,00)	99,42	
2.22.06.2.01	PENGELOLAAN MUSEUM KABUPATEN/KOTA	92.420.000,00	91.886.000,00	(534.000,00)	99,42	
2.22.06.2.01.0005	REVITALISASI SARANA DAN PRASARANA MUSEUM	92.420.000,00	91.886.000,00	(534.000,00)	99,42	
2.22.06.2.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	92.420.000,00	91.886.000,00	(534.000,00)	99,42	
2.22.06.2.01.0005.5.1.01	Belanja Pegawai	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	100,00	
2.22.06.2.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	89.466.000,00	(534.000,00)	99,41	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	100.679.900,00	100.457.900,00	(222.000,00)	99,78	
3.26.02.2.01	PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA KABUPATEN/KOTA	100.679.900,00	100.457.900,00	(222.000,00)	99,78	
3.26.02.2.01.0009	PERENCANAAN DAN PERANCANGAN DAYA TARIK WISATA UNGGULAN KABUPATEN/KOTA	100.679.900,00	100.457.900,00	(222.000,00)	99,78	
3.26.02.2.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	100.679.900,00	100.457.900,00	(222.000,00)	99,78	
3.26.02.2.01.0009.5.1.01	Belanja Pegawai	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	100,00	
3.26.02.2.01.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.579.900,00	97.357.900,00	(222.000,00)	99,77	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	354.724.700,00	348.998.450,00	(5.726.250,00)	98,39	
3.26.03.2.01	PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	354.724.700,00	348.998.450,00	(5.726.250,00)	98,39	
3.26.03.2.01.0003	PENYEDIAAN DATA DAN PENYEBARAN INFORMASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA, BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI	97.868.700,00	97.483.450,00	(385.250,00)	99,61	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.26.03.2.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	97.868.700,00	97.483.450,00	(385.250,00)	99,61	
3.26.03.2.01.0003.5.1.01	Belanja Pegawai	5.510.000,00	5.510.000,00	0,00	100,00	
3.26.03.2.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.358.700,00	91.973.450,00	(385.250,00)	99,58	
3.26.03.2.01.0006	FASILITASI KEGIATAN PEMASARAN PARIWISATA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	209.646.000,00	204.647.000,00	(4.999.000,00)	97,62	
3.26.03.2.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	209.646.000,00	204.647.000,00	(4.999.000,00)	97,62	
3.26.03.2.01.0006.5.1.01	Belanja Pegawai	4.830.000,00	4.830.000,00	0,00	100,00	
3.26.03.2.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.816.000,00	199.817.000,00	(4.999.000,00)	97,56	
3.26.03.2.01.0007	PENGUATAN PROMOSI MELALUI MEDIA CETAK, ELEKTRONIK, DAN MEDIA LAINNYA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI	47.210.000,00	46.868.000,00	(342.000,00)	99,28	
3.26.03.2.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	47.210.000,00	46.868.000,00	(342.000,00)	99,28	
3.26.03.2.01.0007.5.1.01	Belanja Pegawai	5.510.000,00	5.510.000,00	0,00	100,00	
3.26.03.2.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.700.000,00	41.358.000,00	(342.000,00)	99,18	
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	74.110.000,00	61.710.000,00	(12.400.000,00)	83,27	
3.26.04.2.02	PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF&NBSP;	74.110.000,00	61.710.000,00	(12.400.000,00)	83,27	
3.26.04.2.02.0003	FASILITASI PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN	14.110.000,00	12.910.000,00	(1.200.000,00)	91,50	
3.26.04.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	14.110.000,00	12.910.000,00	(1.200.000,00)	91,50	
3.26.04.2.02.0003.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00	
3.26.04.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.100.000,00	11.900.000,00	(1.200.000,00)	90,84	
3.26.04.2.02.0011	FASILITASI PEMBERIAN INSENTIF	60.000.000,00	48.800.000,00	(11.200.000,00)	81,33	
3.26.04.2.02.0011.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	48.800.000,00	(11.200.000,00)	81,33	
3.26.04.2.02.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	48.800.000,00	(11.200.000,00)	81,33	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	419.849.400,00	417.308.186,00	(2.541.214,00)	99,39	
3.26.05.2.01	PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT DASAR	419.849.400,00	417.308.186,00	(2.541.214,00)	99,39	
3.26.05.2.01.0005	FASILITASI PROSES KREASI, PRODUKSI, DISTRIBUSI KONSUMSI DAN KONSERVASI EKONOMI KREATIF	106.895.200,00	105.992.730,00	(902.470,00)	99,16	
3.26.05.2.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	106.895.200,00	105.992.730,00	(902.470,00)	99,16	
3.26.05.2.01.0005.5.1.01	Belanja Pegawai	4.230.000,00	4.230.000,00	0,00	100,00	
3.26.05.2.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.665.200,00	101.762.730,00	(902.470,00)	99,12	
3.26.05.2.01.0008	PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM PARIWISATA BERBASIS SKKNI	51.009.900,00	50.554.900,00	(455.000,00)	99,11	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.26.05.2.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	51.009.900,00	50.554.900,00	(455.000,00)	99,11	
3.26.05.2.01.0008.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00	
3.26.05.2.01.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.989.900,00	48.534.900,00	(455.000,00)	99,07	
3.26.05.2.01.0009	PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT UNTUK PENGEMBANGAN PARIWISATA	211.944.300,00	211.260.556,00	(683.744,00)	99,68	
3.26.05.2.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	211.944.300,00	211.260.556,00	(683.744,00)	99,68	
3.26.05.2.01.0009.5.1.01	Belanja Pegawai	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	100,00	
3.26.05.2.01.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.054.300,00	209.370.556,00	(683.744,00)	99,67	
3.26.05.2.01.0010	FASILITASI SERTIFIKASI KOMPETENSI BAGI TENAGA KERJA BIDANG PARIWISATA	50.000.000,00	49.500.000,00	(500.000,00)	99,00	
3.26.05.2.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.500.000,00	(500.000,00)	99,00	
3.26.05.2.01.0010.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00	
3.26.05.2.01.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.990.000,00	48.490.000,00	(500.000,00)	98,98	
3.26.05.2.02	PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.26.05.2.02.0001	PELATIHAN, BIMBINGAN TEKNIS, DAN PENDAMPINGAN EKONOMI KREATIF	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.26.05.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.26.05.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.26.05.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	13.028.626.631,00	12.699.089.359,00	(329.537.272,00)	97,47	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.983.626.631,00)	(12.645.089.359,00)	338.537.272,00	97,39	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(12.983.626.631,00)	(12.645.089.359,00)	338.537.272,00	97,39	





4.01.2.13.2.10.23.0000

SEKRETARIAT DAERAH

BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Satuan Kerja : 4.01.2.13.2.10.23.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit : 4.01.2.13.2.10.23.0001 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.371.910.150,00	1.317.952.362,00	(53.957.788,00)	96,07	
4.01.01.2.14	PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	1.371.910.150,00	1.317.952.362,00	(53.957.788,00)	96,07	
4.01.01.2.14.0001	FASILITASI KEPROTOKOLAN	578.016.000,00	554.161.987,00	(23.854.013,00)	95,87	
4.01.01.2.14.0001.5.1	BELANJA OPERASI	578.016.000,00	554.161.987,00	(23.854.013,00)	95,87	
4.01.01.2.14.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	578.016.000,00	554.161.987,00	(23.854.013,00)	95,87	
4.01.01.2.14.0002	FASILITASI KOMUNIKASI PIMPINAN	621.676.500,00	601.070.609,00	(20.605.891,00)	96,69	
4.01.01.2.14.0002.5.1	BELANJA OPERASI	621.676.500,00	601.070.609,00	(20.605.891,00)	96,69	
4.01.01.2.14.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	46.080.000,00	44.400.000,00	(1.680.000,00)	96,35	
4.01.01.2.14.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	575.596.500,00	556.670.609,00	(18.925.891,00)	96,71	
4.01.01.2.14.0003	PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN	172.217.650,00	162.719.766,00	(9.497.884,00)	94,48	
4.01.01.2.14.0003.5.1	BELANJA OPERASI	172.217.650,00	162.719.766,00	(9.497.884,00)	94,48	
4.01.01.2.14.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.217.650,00	162.719.766,00	(9.497.884,00)	94,48	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	1.371.910.150,00	1.317.952.362,00	(53.957.788,00)	96,07	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.371.910.150,00)	(1.317.952.362,00)	53.957.788,00	96,07	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(1.371.910.150,00)	(1.317.952.362,00)	53.957.788,00	96,07	





4.01.2.13.2.10.23.0000

SEKRETARIAT DAERAH

BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Satuan Kerja : 4.01.2.13.2.10.23.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit : 4.01.2.13.2.10.23.0002 BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2.779.471.200,00	2.753.518.319,00	(25.952.881,00)	99,07	
4.01.02.2.03	FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	2.779.471.200,00	2.753.518.319,00	(25.952.881,00)	99,07	
4.01.02.2.03.0001	FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH	926.249.500,00	917.517.944,00	(8.731.556,00)	99,06	
4.01.02.2.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	926.249.500,00	917.517.944,00	(8.731.556,00)	99,06	
4.01.02.2.03.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	30.720.000,00	30.720.000,00	0,00	100,00	
4.01.02.2.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	895.529.500,00	886.797.944,00	(8.731.556,00)	99,02	
4.01.02.2.03.0002	FASILITASI BANTUAN HUKUM	1.443.338.300,00	1.434.618.515,00	(8.719.785,00)	99,40	
4.01.02.2.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.443.338.300,00	1.434.618.515,00	(8.719.785,00)	99,40	
4.01.02.2.03.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	34.320.000,00	34.320.000,00	0,00	100,00	
4.01.02.2.03.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.409.018.300,00	1.400.298.515,00	(8.719.785,00)	99,38	
4.01.02.2.03.0003	PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN RNN PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM	409.883.400,00	401.381.860,00	(8.501.540,00)	97,93	
4.01.02.2.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	409.883.400,00	401.381.860,00	(8.501.540,00)	97,93	
4.01.02.2.03.0003.5.1.01	Belanja Pegawai	28.320.000,00	28.320.000,00	0,00	100,00	
4.01.02.2.03.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	381.563.400,00	373.061.860,00	(8.501.540,00)	97,77	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2.779.471.200,00	2.753.518.319,00	(25.952.881,00)	99,07	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.779.471.200,00)	(2.753.518.319,00)	25.952.881,00	99,07	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(2.779.471.200,00)	(2.753.518.319,00)	25.952.881,00	99,07	





4.01.2.13.2.10.23.0000

SEKRETARIAT DAERAH

BAGIAN ORGANISASI



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Satuan Kerja : 4.01.2.13.2.10.23.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit : 4.01.2.13.2.10.23.0003 BAGIAN ORGANISASI

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	607.028.000,00	604.264.423,00	(2.763.577,00)	99,54	
4.01.01.2.13	PENATAAN ORGANISASI	607.028.000,00	604.264.423,00	(2.763.577,00)	99,54	
4.01.01.2.13.0001	PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	231.180.200,00	230.202.340,00	(977.860,00)	99,58	
4.01.01.2.13.0001.5.1	BELANJA OPERASI	231.180.200,00	230.202.340,00	(977.860,00)	99,58	
4.01.01.2.13.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	100,00	
4.01.01.2.13.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.380.200,00	215.402.340,00	(977.860,00)	99,55	
4.01.01.2.13.0002	FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	94.768.400,00	94.149.628,00	(618.772,00)	99,35	
4.01.01.2.13.0002.5.1	BELANJA OPERASI	94.768.400,00	94.149.628,00	(618.772,00)	99,35	
4.01.01.2.13.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	100,00	
4.01.01.2.13.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.968.400,00	79.349.628,00	(618.772,00)	99,23	
4.01.01.2.13.0003	PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	281.079.400,00	279.912.455,00	(1.166.945,00)	99,58	
4.01.01.2.13.0003.5.1	BELANJA OPERASI	281.079.400,00	279.912.455,00	(1.166.945,00)	99,58	
4.01.01.2.13.0003.5.1.01	Belanja Pegawai	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	100,00	
4.01.01.2.13.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	266.279.400,00	265.112.455,00	(1.166.945,00)	99,56	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	607.028.000,00	604.264.423,00	(2.763.577,00)	99,54	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(607.028.000,00)	(604.264.423,00)	2.763.577,00	99,54	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(607.028.000,00)	(604.264.423,00)	2.763.577,00	99,54	





4.01.2.13.2.10.23.0000

SEKRETARIAT DAERAH

BAGIAN PEMERINTAHAN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Satuan Kerja : 4.01.2.13.2.10.23.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit : 4.01.2.13.2.10.23.0004 BAGIAN PEMERINTAHAN

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	75.648.400,00	75.536.708,00	(111.692,00)	99,85	
2.10.04.2.01	PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	75.648.400,00	75.536.708,00	(111.692,00)	99,85	
2.10.04.2.01.0001	INVENTARISASI SENGKETA, KONFLIK, DAN PERKARA PERTANAHAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	75.648.400,00	75.536.708,00	(111.692,00)	99,85	
2.10.04.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	75.648.400,00	75.536.708,00	(111.692,00)	99,85	
2.10.04.2.01.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	6.440.000,00	6.440.000,00	0,00	100,00	
2.10.04.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.208.400,00	69.096.708,00	(111.692,00)	99,84	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	100,00	
2.13.04.2.01	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	100,00	
2.13.04.2.01.0011	FASILITASI PENYUSUNAN PROFIL DESA	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	100,00	
2.13.04.2.01.0011.5.1	BELANJA OPERASI	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	100,00	
2.13.04.2.01.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	100,00	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.838.243.100,00	1.784.843.262,00	(53.399.838,00)	97,10	
4.01.02.2.01	ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	1.407.848.400,00	1.382.350.473,00	(25.497.927,00)	98,19	
4.01.02.2.01.0001	PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	171.935.300,00	171.405.528,00	(529.772,00)	99,69	
4.01.02.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	171.935.300,00	171.405.528,00	(529.772,00)	99,69	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01.02.2.01.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	10.380.000,00	10.270.000,00	(110.000,00)	98,94	
4.01.02.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.555.300,00	161.135.528,00	(419.772,00)	99,74	
4.01.02.2.01.0002	PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	305.960.000,00	298.760.784,00	(7.199.216,00)	97,65	
4.01.02.2.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	305.960.000,00	298.760.784,00	(7.199.216,00)	97,65	
4.01.02.2.01.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	12.380.000,00	11.990.000,00	(390.000,00)	96,85	
4.01.02.2.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	293.580.000,00	286.770.784,00	(6.809.216,00)	97,68	
4.01.02.2.01.0003	FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH	929.953.100,00	912.184.161,00	(17.768.939,00)	98,09	
4.01.02.2.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	929.953.100,00	912.184.161,00	(17.768.939,00)	98,09	
4.01.02.2.01.0003.5.1.01	Belanja Pegawai	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	100,00	
4.01.02.2.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.753.100,00	882.984.161,00	(17.768.939,00)	98,03	
4.01.02.2.04	FASILITASI KERJA SAMA DAERAH	430.394.700,00	402.492.789,00	(27.901.911,00)	93,52	
4.01.02.2.04.0001	FASILITASI KERJA SAMA DALAM NEGERI	265.524.800,00	249.114.800,00	(16.410.000,00)	93,82	
4.01.02.2.04.0001.5.1	BELANJA OPERASI	265.524.800,00	249.114.800,00	(16.410.000,00)	93,82	
4.01.02.2.04.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	21.160.000,00	19.750.000,00	(1.410.000,00)	93,34	
4.01.02.2.04.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.364.800,00	229.364.800,00	(15.000.000,00)	93,86	
4.01.02.2.04.0002	FASILITASI KERJA SAMA LUAR NEGERI	155.696.400,00	144.204.489,00	(11.491.911,00)	92,62	
4.01.02.2.04.0002.5.1	BELANJA OPERASI	155.696.400,00	144.204.489,00	(11.491.911,00)	92,62	
4.01.02.2.04.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	6.260.400,00	2.820.000,00	(3.440.400,00)	45,05	
4.01.02.2.04.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.436.000,00	141.384.489,00	(8.051.511,00)	94,61	
4.01.02.2.04.0003	EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA	9.173.500,00	9.173.500,00	0,00	100,00	
4.01.02.2.04.0003.5.1	BELANJA OPERASI	9.173.500,00	9.173.500,00	0,00	100,00	
4.01.02.2.04.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.173.500,00	9.173.500,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	1.934.291.500,00	1.880.779.970,00	(53.511.530,00)	97,23	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.934.291.500,00)	(1.880.779.970,00)	53.511.530,00	97,23	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(1.934.291.500,00)	(1.880.779.970,00)	53.511.530,00	97,23	





4.01.2.13.2.10.23.0000

SEKRETARIAT DAERAH

BAGIAN PEREKONOMIAN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Satuan Kerja : 4.01.2.13.2.10.23.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit : 4.01.2.13.2.10.23.0005 BAGIAN PEREKONOMIAN

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	384.649.400,00	362.953.022,00	(21.696.378,00)	94,36	
4.01.03.2.01	PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	384.649.400,00	362.953.022,00	(21.696.378,00)	94,36	
4.01.03.2.01.0001	KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD	209.645.000,00	207.989.622,00	(1.655.378,00)	99,21	
4.01.03.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	209.645.000,00	207.989.622,00	(1.655.378,00)	99,21	
4.01.03.2.01.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	18.480.000,00	18.480.000,00	0,00	100,00	
4.01.03.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.165.000,00	189.509.622,00	(1.655.378,00)	99,13	
4.01.03.2.01.0002	PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN	99.176.400,00	79.148.400,00	(20.028.000,00)	79,81	
4.01.03.2.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	99.176.400,00	79.148.400,00	(20.028.000,00)	79,81	
4.01.03.2.01.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	100,00	
4.01.03.2.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.876.400,00	66.848.400,00	(20.028.000,00)	76,95	
4.01.03.2.01.0003	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO KECIL	75.828.000,00	75.815.000,00	(13.000,00)	99,98	
4.01.03.2.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	75.828.000,00	75.815.000,00	(13.000,00)	99,98	
4.01.03.2.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.828.000,00	75.815.000,00	(13.000,00)	99,98	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	384.649.400,00	362.953.022,00	(21.696.378,00)	94,36	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(384.649.400,00)	(362.953.022,00)	21.696.378,00	94,36	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(384.649.400,00)	(362.953.022,00)	21.696.378,00	94,36	





4.01.2.13.2.10.23.0000

**SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Satuan Kerja : 4.01.2.13.2.10.23.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit : 4.01.2.13.2.10.23.0006 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	100.000.000,00	99.332.500,00	(667.500,00)	99,33	
2.13.02.2.01	PENYELENGGARAAN PENATAAN DESA	100.000.000,00	99.332.500,00	(667.500,00)	99,33	
2.13.02.2.01.0006	FASILITASI SARANA DAN PRASARANA DESA	100.000.000,00	99.332.500,00	(667.500,00)	99,33	
2.13.02.2.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.332.500,00	(667.500,00)	99,33	
2.13.02.2.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.332.500,00	(667.500,00)	99,33	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	100.000.000,00	99.863.407,00	(136.593,00)	99,86	
2.13.05.2.01	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	100.000.000,00	99.863.407,00	(136.593,00)	99,86	
2.13.05.2.01.0007	FASILITASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT	100.000.000,00	99.863.407,00	(136.593,00)	99,86	
2.13.05.2.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.863.407,00	(136.593,00)	99,86	
2.13.05.2.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.863.407,00	(136.593,00)	99,86	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	34.945.591.310,00	33.693.756.561,00	(1.251.834.749,00)	96,42	
4.01.02.2.02	PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	34.945.591.310,00	33.693.756.561,00	(1.251.834.749,00)	96,42	
4.01.02.2.02.0001	FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL	10.374.870.400,00	10.225.494.651,00	(149.375.749,00)	98,56	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01.02.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	10.374.870.400,00	10.225.494.651,00	(149.375.749,00)	98,56	
4.01.02.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	100,00	
4.01.02.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.328.070.400,00	10.178.694.651,00	(149.375.749,00)	98,55	
4.01.02.2.02.0002	PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL	24.205.976.610,00	23.124.419.110,00	(1.081.557.500,00)	95,53	
4.01.02.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	24.205.976.610,00	23.124.419.110,00	(1.081.557.500,00)	95,53	
4.01.02.2.02.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	68.150.000,00	68.150.000,00	0,00	100,00	
4.01.02.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	684.471.000,00	609.018.500,00	(75.452.500,00)	88,98	
4.01.02.2.02.0002.5.1.05	Belanja Hibah	17.638.542.110,00	17.001.462.110,00	(637.080.000,00)	96,39	
4.01.02.2.02.0002.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.814.813.500,00	5.445.788.500,00	(369.025.000,00)	93,65	
4.01.02.2.02.0003	PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	364.744.300,00	343.842.800,00	(20.901.500,00)	94,27	
4.01.02.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	364.744.300,00	343.842.800,00	(20.901.500,00)	94,27	
4.01.02.2.02.0003.5.1.01	Belanja Pegawai	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	100,00	
4.01.02.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	347.344.300,00	326.442.800,00	(20.901.500,00)	93,98	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	35.145.591.310,00	33.892.952.468,00	(1.252.638.842,00)	96,44	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(35.145.591.310,00)	(33.892.952.468,00)	1.252.638.842,00	96,44	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(35.145.591.310,00)	(33.892.952.468,00)	1.252.638.842,00	96,44	





4.01.2.13.2.10.23.0000

SEKRETARIAT DAERAH

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Satuan Kerja : 4.01.2.13.2.10.23.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit : 4.01.2.13.2.10.23.0007 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	69.579.300,00	62.077.602,00	(7.501.698,00)	89,22	
4.01.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	69.579.300,00	62.077.602,00	(7.501.698,00)	89,22	
4.01.01.2.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	33.728.800,00	31.515.910,00	(2.212.890,00)	93,44	
4.01.01.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	33.728.800,00	31.515.910,00	(2.212.890,00)	93,44	
4.01.01.2.01.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	3.770.000,00	3.770.000,00	0,00	100,00	
4.01.01.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.958.800,00	27.745.910,00	(2.212.890,00)	92,61	
4.01.01.2.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	35.850.500,00	30.561.692,00	(5.288.808,00)	85,25	
4.01.01.2.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	35.850.500,00	30.561.692,00	(5.288.808,00)	85,25	
4.01.01.2.01.0007.5.1.01	Belanja Pegawai	2.390.000,00	2.390.000,00	0,00	100,00	
4.01.01.2.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.460.500,00	28.171.692,00	(5.288.808,00)	84,19	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	204.190.900,00	197.194.053,00	(6.996.847,00)	96,57	
4.01.03.2.02	PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	204.190.900,00	197.194.053,00	(6.996.847,00)	96,57	
4.01.03.2.02.0002	PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN	51.923.500,00	51.112.540,00	(810.960,00)	98,44	
4.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	51.923.500,00	51.112.540,00	(810.960,00)	98,44	
4.01.03.2.02.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00	100,00	
4.01.03.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.863.500,00	45.052.540,00	(810.960,00)	98,23	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01.03.2.02.0003	PENGLOLAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	152.267.400,00	146.081.513,00	(6.185.887,00)	95,94	
4.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	152.267.400,00	146.081.513,00	(6.185.887,00)	95,94	
4.01.03.2.02.0003.5.1.01	Belanja Pegawai	10.670.000,00	10.670.000,00	0,00	100,00	
4.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.597.400,00	135.411.513,00	(6.185.887,00)	95,63	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	273.770.200,00	259.271.655,00	(14.498.545,00)	94,70	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(273.770.200,00)	(259.271.655,00)	14.498.545,00	94,70	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(273.770.200,00)	(259.271.655,00)	14.498.545,00	94,70	





4.01.2.13.2.10.23.0000

SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN UMUM



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Satuan Kerja : 4.01.2.13.2.10.23.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit : 4.01.2.13.2.10.23.0008 BAGIAN UMUM

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	76.552.553.734,00	74.291.006.206,00	(2.261.547.528,00)	97,05	
4.01.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	47.694.972.351,00	47.074.679.328,00	(620.293.023,00)	98,70	
4.01.01.2.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	47.535.153.351,00	46.923.020.328,00	(612.133.023,00)	98,71	
4.01.01.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	47.535.153.351,00	46.923.020.328,00	(612.133.023,00)	98,71	
4.01.01.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	47.535.153.351,00	46.923.020.328,00	(612.133.023,00)	98,71	
4.01.01.2.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	159.819.000,00	151.659.000,00	(8.160.000,00)	94,89	
4.01.01.2.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	159.819.000,00	151.659.000,00	(8.160.000,00)	94,89	
4.01.01.2.02.0007.5.1.01	Belanja Pegawai	147.000.000,00	138.840.000,00	(8.160.000,00)	94,45	
4.01.01.2.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.819.000,00	12.819.000,00	0,00	100,00	
4.01.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	379.646.000,00	378.309.000,00	(1.337.000,00)	99,65	
4.01.01.2.05.0002	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	379.646.000,00	378.309.000,00	(1.337.000,00)	99,65	
4.01.01.2.05.0002.5.1	BELANJA OPERASI	379.646.000,00	378.309.000,00	(1.337.000,00)	99,65	
4.01.01.2.05.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	379.646.000,00	378.309.000,00	(1.337.000,00)	99,65	
4.01.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	3.725.145.400,00	3.407.110.403,00	(318.034.997,00)	91,46	
4.01.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	244.629.700,00	244.590.700,00	(39.000,00)	99,98	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	244.629.700,00	244.590.700,00	(39.000,00)	99,98	
4.01.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.629.700,00	244.590.700,00	(39.000,00)	99,98	
4.01.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	658.843.200,00	646.418.268,00	(12.424.932,00)	98,11	
4.01.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	658.843.200,00	646.418.268,00	(12.424.932,00)	98,11	
4.01.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	658.843.200,00	646.418.268,00	(12.424.932,00)	98,11	
4.01.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	1.221.250.500,00	1.216.125.020,00	(5.125.480,00)	99,58	
4.01.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.221.250.500,00	1.216.125.020,00	(5.125.480,00)	99,58	
4.01.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.221.250.500,00	1.216.125.020,00	(5.125.480,00)	99,58	
4.01.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	250.000.000,00	246.417.735,00	(3.582.265,00)	98,57	
4.01.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	246.417.735,00	(3.582.265,00)	98,57	
4.01.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	246.417.735,00	(3.582.265,00)	98,57	
4.01.01.2.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	1.350.422.000,00	1.053.558.680,00	(296.863.320,00)	78,02	
4.01.01.2.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	1.350.422.000,00	1.053.558.680,00	(296.863.320,00)	78,02	
4.01.01.2.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.350.422.000,00	1.053.558.680,00	(296.863.320,00)	78,02	
4.01.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.452.159.500,00	3.351.272.356,00	(100.887.144,00)	97,08	
4.01.01.2.07.0005	PENGADAAN MEBEL	654.454.100,00	634.990.500,00	(19.463.600,00)	97,03	
4.01.01.2.07.0005.5.1	BELANJA OPERASI	89.495.000,00	89.270.000,00	(225.000,00)	99,75	
4.01.01.2.07.0005.5.1.01	Belanja Pegawai	26.520.000,00	26.520.000,00	0,00	100,00	
4.01.01.2.07.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.975.000,00	62.750.000,00	(225.000,00)	99,64	
4.01.01.2.07.0005.5.2	BELANJA MODAL	564.959.100,00	545.720.500,00	(19.238.600,00)	96,59	
4.01.01.2.07.0005.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	564.959.100,00	545.720.500,00	(19.238.600,00)	96,59	
4.01.01.2.07.0006	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	2.797.705.400,00	2.716.281.856,00	(81.423.544,00)	97,09	
4.01.01.2.07.0006.5.1	BELANJA OPERASI	8.914.000,00	8.100.000,00	(814.000,00)	90,87	
4.01.01.2.07.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.914.000,00	8.100.000,00	(814.000,00)	90,87	
4.01.01.2.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	2.788.791.400,00	2.708.181.856,00	(80.609.544,00)	97,11	
4.01.01.2.07.0006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.788.791.400,00	2.708.181.856,00	(80.609.544,00)	97,11	
4.01.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.241.652.764,00	7.023.140.515,00	(218.512.249,00)	96,98	
4.01.01.2.08.0001	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	89.298.000,00	88.798.500,00	(499.500,00)	99,44	
4.01.01.2.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	89.298.000,00	88.798.500,00	(499.500,00)	99,44	
4.01.01.2.08.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.298.000,00	88.798.500,00	(499.500,00)	99,44	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	2.408.107.500,00	2.282.677.055,00	(125.430.445,00)	94,79	
4.01.01.2.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	2.408.107.500,00	2.282.677.055,00	(125.430.445,00)	94,79	
4.01.01.2.08.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	22.920.000,00	22.920.000,00	0,00	100,00	
4.01.01.2.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.385.187.500,00	2.259.757.055,00	(125.430.445,00)	94,74	
4.01.01.2.08.0003	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	724.232.000,00	721.292.200,00	(2.939.800,00)	99,59	
4.01.01.2.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	724.232.000,00	721.292.200,00	(2.939.800,00)	99,59	
4.01.01.2.08.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	724.232.000,00	721.292.200,00	(2.939.800,00)	99,59	
4.01.01.2.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	4.020.015.264,00	3.930.372.760,00	(89.642.504,00)	97,77	
4.01.01.2.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	4.020.015.264,00	3.930.372.760,00	(89.642.504,00)	97,77	
4.01.01.2.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.020.015.264,00	3.930.372.760,00	(89.642.504,00)	97,77	
4.01.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.494.569.210,00	6.871.449.301,00	(623.119.909,00)	91,69	
4.01.01.2.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	918.713.300,00	692.347.896,00	(226.365.404,00)	75,36	
4.01.01.2.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	918.713.300,00	692.347.896,00	(226.365.404,00)	75,36	
4.01.01.2.09.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	918.713.300,00	692.347.896,00	(226.365.404,00)	75,36	
4.01.01.2.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	1.728.180.300,00	1.416.060.891,00	(312.119.409,00)	81,94	
4.01.01.2.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.728.180.300,00	1.416.060.891,00	(312.119.409,00)	81,94	
4.01.01.2.09.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.728.180.300,00	1.416.060.891,00	(312.119.409,00)	81,94	
4.01.01.2.09.0005	PEMELIHARAAN MEDEL	127.400.000,00	126.639.000,00	(761.000,00)	99,40	
4.01.01.2.09.0005.5.1	BELANJA OPERASI	127.400.000,00	126.639.000,00	(761.000,00)	99,40	
4.01.01.2.09.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.400.000,00	126.639.000,00	(761.000,00)	99,40	
4.01.01.2.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	1.051.991.200,00	1.041.473.458,00	(10.517.742,00)	99,00	
4.01.01.2.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	1.051.991.200,00	1.041.473.458,00	(10.517.742,00)	99,00	
4.01.01.2.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.051.991.200,00	1.041.473.458,00	(10.517.742,00)	99,00	
4.01.01.2.09.0009	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	3.244.444.410,00	3.172.391.946,00	(72.052.464,00)	97,78	
4.01.01.2.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	3.244.444.410,00	3.172.391.946,00	(72.052.464,00)	97,78	
4.01.01.2.09.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.244.444.410,00	3.172.391.946,00	(72.052.464,00)	97,78	
4.01.01.2.09.0010	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	423.840.000,00	422.536.110,00	(1.303.890,00)	99,69	
4.01.01.2.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	423.840.000,00	422.536.110,00	(1.303.890,00)	99,69	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01.01.2.09.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	423.840.000,00	422.536.110,00	(1.303.890,00)	99,69	
4.01.01.2.11	ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	2.539.792.609,00	2.376.027.916,00	(163.764.693,00)	93,55	
4.01.01.2.11.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	181.755.551,00	64.134.616,00	(117.620.935,00)	35,29	
4.01.01.2.11.0001.5.1	BELANJA OPERASI	181.755.551,00	64.134.616,00	(117.620.935,00)	35,29	
4.01.01.2.11.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	181.755.551,00	64.134.616,00	(117.620.935,00)	35,29	
4.01.01.2.11.0002	PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KELENGKAPAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	349.380.800,00	343.245.300,00	(6.135.500,00)	98,24	
4.01.01.2.11.0002.5.1	BELANJA OPERASI	349.380.800,00	343.245.300,00	(6.135.500,00)	98,24	
4.01.01.2.11.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.380.800,00	343.245.300,00	(6.135.500,00)	98,24	
4.01.01.2.11.0003	PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	0,00	
4.01.01.2.11.0003.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	0,00	
4.01.01.2.11.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	0,00	
4.01.01.2.11.0004	PENYEDIAAN DANA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	1.968.656.258,00	1.968.648.000,00	(8.258,00)	100,00	
4.01.01.2.11.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.968.656.258,00	1.968.648.000,00	(8.258,00)	100,00	
4.01.01.2.11.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	1.968.656.258,00	1.968.648.000,00	(8.258,00)	100,00	
4.01.01.2.12	FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH	4.024.615.900,00	3.809.017.387,00	(215.598.513,00)	94,64	
4.01.01.2.12.0001	PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH	1.550.543.000,00	1.342.253.737,00	(208.289.263,00)	86,57	
4.01.01.2.12.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.550.543.000,00	1.342.253.737,00	(208.289.263,00)	86,57	
4.01.01.2.12.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.550.543.000,00	1.342.253.737,00	(208.289.263,00)	86,57	
4.01.01.2.12.0002	PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA WAKIL KEPALA DAERAH	743.646.000,00	742.365.150,00	(1.280.850,00)	99,83	
4.01.01.2.12.0002.5.1	BELANJA OPERASI	743.646.000,00	742.365.150,00	(1.280.850,00)	99,83	
4.01.01.2.12.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	743.646.000,00	742.365.150,00	(1.280.850,00)	99,83	
4.01.01.2.12.0003	PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA SEKRETARIAT DAERAH	1.730.426.900,00	1.724.398.500,00	(6.028.400,00)	99,65	
4.01.01.2.12.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.730.426.900,00	1.724.398.500,00	(6.028.400,00)	99,65	
4.01.01.2.12.0003.5.1.01	Belanja Pegawai	26.520.000,00	26.520.000,00	0,00	100,00	
4.01.01.2.12.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.703.906.900,00	1.697.878.500,00	(6.028.400,00)	99,65	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	76.552.553.734,00	74.291.006.206,00	(2.261.547.528,00)	97,05	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(76.552.553.734,00)	(74.291.006.206,00)	2.261.547.528,00	97,05	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(76.552.553.734,00)	(74.291.006.206,00)	2.261.547.528,00	97,05	





4.01.2.13.2.10.23.0000

SEKRETARIAT DAERAH

BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Satuan Kerja : 4.01.2.13.2.10.23.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit : 4.01.2.13.2.10.23.0009 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	800.589.250,00	778.179.681,00	(22.409.569,00)	97,20	
4.01.03.2.03	PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	800.589.250,00	778.179.681,00	(22.409.569,00)	97,20	
4.01.03.2.03.0001	PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	602.760.250,00	589.771.821,00	(12.988.429,00)	97,85	
4.01.03.2.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	602.760.250,00	589.771.821,00	(12.988.429,00)	97,85	
4.01.03.2.03.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	302.490.000,00	290.660.000,00	(11.830.000,00)	96,09	
4.01.03.2.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.270.250,00	299.111.821,00	(1.158.429,00)	99,61	
4.01.03.2.03.0002	PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	160.000.000,00	158.090.860,00	(1.909.140,00)	98,81	
4.01.03.2.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	160.000.000,00	158.090.860,00	(1.909.140,00)	98,81	
4.01.03.2.03.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	158.090.860,00	(1.909.140,00)	98,81	
4.01.03.2.03.0003	PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	37.829.000,00	30.317.000,00	(7.512.000,00)	80,14	
4.01.03.2.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	37.829.000,00	30.317.000,00	(7.512.000,00)	80,14	
4.01.03.2.03.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.829.000,00	30.317.000,00	(7.512.000,00)	80,14	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	800.589.250,00	778.179.681,00	(22.409.569,00)	97,20	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(800.589.250,00)	(778.179.681,00)	22.409.569,00	97,20	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(800.589.250,00)	(778.179.681,00)	22.409.569,00	97,20	





4.02.0.00.0.00.24.0000

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Satuan Kerja : 4.02.0.00.0.00.24.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	88.471.631.338,00	86.025.037.607,00	(2.446.593.731,00)	97,23	
4.02.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	116.674.900,00	113.712.200,00	(2.962.700,00)	97,46	
4.02.01.2.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	92.611.400,00	90.330.300,00	(2.281.100,00)	97,54	
4.02.01.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	92.611.400,00	90.330.300,00	(2.281.100,00)	97,54	
4.02.01.2.01.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	14.520.000,00	14.520.000,00	0,00	100,00	
4.02.01.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.091.400,00	75.810.300,00	(2.281.100,00)	97,08	
4.02.01.2.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	13.455.500,00	12.773.900,00	(681.600,00)	94,93	
4.02.01.2.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	13.455.500,00	12.773.900,00	(681.600,00)	94,93	
4.02.01.2.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.455.500,00	12.773.900,00	(681.600,00)	94,93	
4.02.01.2.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	10.608.000,00	10.608.000,00	0,00	100,00	
4.02.01.2.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	10.608.000,00	10.608.000,00	0,00	100,00	
4.02.01.2.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.608.000,00	10.608.000,00	0,00	100,00	
4.02.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	12.166.106.590,00	12.082.141.125,00	(83.965.465,00)	99,31	
4.02.01.2.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	11.789.612.790,00	11.707.276.505,00	(82.336.285,00)	99,30	
4.02.01.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	11.789.612.790,00	11.707.276.505,00	(82.336.285,00)	99,30	
4.02.01.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	11.789.612.790,00	11.707.276.505,00	(82.336.285,00)	99,30	
4.02.01.2.02.0003	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN RENCANA PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	72.636.800,00	72.406.620,00	(230.180,00)	99,68	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.02.01.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	72.636.800,00	72.406.620,00	(230.180,00)	99,68	
4.02.01.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.636.800,00	72.406.620,00	(230.180,00)	99,68	
4.02.01.2.02.0004	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	109.138.000,00	108.648.400,00	(489.600,00)	99,55	
4.02.01.2.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	109.138.000,00	108.648.400,00	(489.600,00)	99,55	
4.02.01.2.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.138.000,00	108.648.400,00	(489.600,00)	99,55	
4.02.01.2.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	9.402.000,00	9.150.000,00	(252.000,00)	97,32	
4.02.01.2.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	9.402.000,00	9.150.000,00	(252.000,00)	97,32	
4.02.01.2.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.402.000,00	9.150.000,00	(252.000,00)	97,32	
4.02.01.2.02.0006	PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	21.648.000,00	21.588.900,00	(59.100,00)	99,73	
4.02.01.2.02.0006.5.1	BELANJA OPERASI	21.648.000,00	21.588.900,00	(59.100,00)	99,73	
4.02.01.2.02.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.648.000,00	21.588.900,00	(59.100,00)	99,73	
4.02.01.2.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	158.661.000,00	158.348.500,00	(312.500,00)	99,80	
4.02.01.2.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	158.661.000,00	158.348.500,00	(312.500,00)	99,80	
4.02.01.2.02.0007.5.1.01	Belanja Pegawai	113.760.000,00	113.760.000,00	0,00	100,00	
4.02.01.2.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.901.000,00	44.588.500,00	(312.500,00)	99,30	
4.02.01.2.02.0008	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	5.008.000,00	4.722.200,00	(285.800,00)	94,29	
4.02.01.2.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	5.008.000,00	4.722.200,00	(285.800,00)	94,29	
4.02.01.2.02.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.008.000,00	4.722.200,00	(285.800,00)	94,29	
4.02.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	615.947.500,00	578.318.380,00	(37.629.120,00)	93,89	
4.02.01.2.05.0004	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	6.129.000,00	6.129.000,00	0,00	100,00	
4.02.01.2.05.0004.5.1	BELANJA OPERASI	6.129.000,00	6.129.000,00	0,00	100,00	
4.02.01.2.05.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.129.000,00	6.129.000,00	0,00	100,00	
4.02.01.2.05.0011	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	609.818.500,00	572.189.380,00	(37.629.120,00)	93,83	
4.02.01.2.05.0011.5.1	BELANJA OPERASI	609.818.500,00	572.189.380,00	(37.629.120,00)	93,83	
4.02.01.2.05.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	609.818.500,00	572.189.380,00	(37.629.120,00)	93,83	
4.02.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	3.086.112.100,00	2.947.769.152,00	(138.342.948,00)	95,52	
4.02.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	215.231.500,00	214.216.000,00	(1.015.500,00)	99,53	
4.02.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	215.231.500,00	214.216.000,00	(1.015.500,00)	99,53	
4.02.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.231.500,00	214.216.000,00	(1.015.500,00)	99,53	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.02.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	755.184.000,00	746.349.000,00	(8.835.000,00)	98,83	
4.02.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	755.184.000,00	746.349.000,00	(8.835.000,00)	98,83	
4.02.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	755.184.000,00	746.349.000,00	(8.835.000,00)	98,83	
4.02.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	179.473.100,00	176.892.109,00	(2.580.991,00)	98,56	
4.02.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	179.473.100,00	176.892.109,00	(2.580.991,00)	98,56	
4.02.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.473.100,00	176.892.109,00	(2.580.991,00)	98,56	
4.02.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	309.965.400,00	309.228.276,00	(737.124,00)	99,76	
4.02.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	309.965.400,00	309.228.276,00	(737.124,00)	99,76	
4.02.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	309.965.400,00	309.228.276,00	(737.124,00)	99,76	
4.02.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	486.922.100,00	463.897.500,00	(23.024.600,00)	95,27	
4.02.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	486.922.100,00	463.897.500,00	(23.024.600,00)	95,27	
4.02.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	486.922.100,00	463.897.500,00	(23.024.600,00)	95,27	
4.02.01.2.06.0006	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	324.460.000,00	303.400.000,00	(21.060.000,00)	93,51	
4.02.01.2.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	295.000.000,00	274.120.000,00	(20.880.000,00)	92,92	
4.02.01.2.06.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	295.000.000,00	274.120.000,00	(20.880.000,00)	92,92	
4.02.01.2.06.0006.5.2	BELANJA MODAL	29.460.000,00	29.280.000,00	(180.000,00)	99,39	
4.02.01.2.06.0006.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	29.460.000,00	29.280.000,00	(180.000,00)	99,39	
4.02.01.2.06.0008	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	600.710.000,00	593.681.267,00	(7.028.733,00)	98,83	
4.02.01.2.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	600.710.000,00	593.681.267,00	(7.028.733,00)	98,83	
4.02.01.2.06.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.710.000,00	593.681.267,00	(7.028.733,00)	98,83	
4.02.01.2.06.0010	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	64.166.000,00	42.280.000,00	(21.886.000,00)	65,89	
4.02.01.2.06.0010.5.1	BELANJA OPERASI	64.166.000,00	42.280.000,00	(21.886.000,00)	65,89	
4.02.01.2.06.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.166.000,00	42.280.000,00	(21.886.000,00)	65,89	
4.02.01.2.06.0011	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	150.000.000,00	97.825.000,00	(52.175.000,00)	65,22	
4.02.01.2.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	97.825.000,00	(52.175.000,00)	65,22	
4.02.01.2.06.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	97.825.000,00	(52.175.000,00)	65,22	
4.02.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.619.767.300,00	1.602.838.050,00	(16.929.250,00)	98,95	
4.02.01.2.07.0005	PENGADAAN MEBEL	471.400.000,00	464.810.000,00	(6.590.000,00)	98,60	
4.02.01.2.07.0005.5.1	BELANJA OPERASI	40.817.000,00	39.815.000,00	(1.002.000,00)	97,55	
4.02.01.2.07.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.817.000,00	39.815.000,00	(1.002.000,00)	97,55	
4.02.01.2.07.0005.5.2	BELANJA MODAL	430.583.000,00	424.995.000,00	(5.588.000,00)	98,70	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.02.01.2.07.0005.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	430.583.000,00	424.995.000,00	(5.588.000,00)	98,70	
4.02.01.2.07.0006	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	1.148.367.300,00	1.138.028.050,00	(10.339.250,00)	99,10	
4.02.01.2.07.0006.5.1	BELANJA OPERASI	90.106.100,00	86.688.650,00	(3.417.450,00)	96,21	
4.02.01.2.07.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.106.100,00	86.688.650,00	(3.417.450,00)	96,21	
4.02.01.2.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	1.058.261.200,00	1.051.339.400,00	(6.921.800,00)	99,35	
4.02.01.2.07.0006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.058.261.200,00	1.051.339.400,00	(6.921.800,00)	99,35	
4.02.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	10.290.616.008,00	9.631.945.568,00	(658.670.440,00)	93,60	
4.02.01.2.08.0001	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	7.715.000,00	7.714.000,00	(1.000,00)	99,99	
4.02.01.2.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	7.715.000,00	7.714.000,00	(1.000,00)	99,99	
4.02.01.2.08.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.715.000,00	7.714.000,00	(1.000,00)	99,99	
4.02.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	3.004.800.000,00	2.407.963.285,00	(596.836.715,00)	80,14	
4.02.01.2.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	3.004.800.000,00	2.407.963.285,00	(596.836.715,00)	80,14	
4.02.01.2.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.004.800.000,00	2.407.963.285,00	(596.836.715,00)	80,14	
4.02.01.2.08.0003	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	174.340.000,00	171.295.200,00	(3.044.800,00)	98,25	
4.02.01.2.08.0003.5.1	BELANJA OPERASI	174.340.000,00	171.295.200,00	(3.044.800,00)	98,25	
4.02.01.2.08.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.340.000,00	171.295.200,00	(3.044.800,00)	98,25	
4.02.01.2.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	7.103.761.008,00	7.044.973.083,00	(58.787.925,00)	99,17	
4.02.01.2.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	7.103.761.008,00	7.044.973.083,00	(58.787.925,00)	99,17	
4.02.01.2.08.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	30.240.000,00	30.240.000,00	0,00	100,00	
4.02.01.2.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.073.521.008,00	7.014.733.083,00	(58.787.925,00)	99,17	
4.02.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.146.215.820,00	5.848.556.401,00	(297.659.419,00)	95,16	
4.02.01.2.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	1.828.679.000,00	1.565.247.181,00	(263.431.819,00)	85,59	
4.02.01.2.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.828.679.000,00	1.565.247.181,00	(263.431.819,00)	85,59	
4.02.01.2.09.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	5.730.000,00	0,00	(5.730.000,00)	0,00	
4.02.01.2.09.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.822.949.000,00	1.565.247.181,00	(257.701.819,00)	85,86	
4.02.01.2.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	891.027.400,00	881.353.900,00	(9.673.500,00)	98,91	
4.02.01.2.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	891.027.400,00	881.353.900,00	(9.673.500,00)	98,91	
4.02.01.2.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	891.027.400,00	881.353.900,00	(9.673.500,00)	98,91	
4.02.01.2.09.0009	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	1.660.974.420,00	1.648.828.235,00	(12.146.185,00)	99,27	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.02.01.2.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	1.660.974.420,00	1.648.828.235,00	(12.146.185,00)	99,27	
4.02.01.2.09.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.660.974.420,00	1.648.828.235,00	(12.146.185,00)	99,27	
4.02.01.2.09.0010	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	1.765.535.000,00	1.753.127.085,00	(12.407.915,00)	99,30	
4.02.01.2.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	1.765.535.000,00	1.753.127.085,00	(12.407.915,00)	99,30	
4.02.01.2.09.0010.5.1.01	Belanja Pegawai	57.720.000,00	57.720.000,00	0,00	100,00	
4.02.01.2.09.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.707.815.000,00	1.695.407.085,00	(12.407.915,00)	99,27	
4.02.01.2.15	LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	49.823.469.320,00	48.638.832.829,00	(1.184.636.491,00)	97,62	
4.02.01.2.15.0001	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD	48.528.469.320,00	47.501.817.844,00	(1.026.651.476,00)	97,88	
4.02.01.2.15.0001.5.1	BELANJA OPERASI	48.528.469.320,00	47.501.817.844,00	(1.026.651.476,00)	97,88	
4.02.01.2.15.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	48.528.469.320,00	47.501.817.844,00	(1.026.651.476,00)	97,88	
4.02.01.2.15.0002	PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD	1.120.000.000,00	1.027.500.000,00	(92.500.000,00)	91,74	
4.02.01.2.15.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.120.000.000,00	1.027.500.000,00	(92.500.000,00)	91,74	
4.02.01.2.15.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.120.000.000,00	1.027.500.000,00	(92.500.000,00)	91,74	
4.02.01.2.15.0003	PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP DPRD	175.000.000,00	109.514.985,00	(65.485.015,00)	62,58	
4.02.01.2.15.0003.5.1	BELANJA OPERASI	175.000.000,00	109.514.985,00	(65.485.015,00)	62,58	
4.02.01.2.15.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	109.514.985,00	(65.485.015,00)	62,58	
4.02.01.2.16	LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	4.606.721.800,00	4.580.923.902,00	(25.797.898,00)	99,44	
4.02.01.2.16.0002	FASILITASI FRAKSI DPRD	1.260.160.000,00	1.256.344.693,00	(3.815.307,00)	99,70	
4.02.01.2.16.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.260.160.000,00	1.256.344.693,00	(3.815.307,00)	99,70	
4.02.01.2.16.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.260.160.000,00	1.256.344.693,00	(3.815.307,00)	99,70	
4.02.01.2.16.0003	FASILITASI RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DPRD	2.987.164.000,00	2.976.368.134,00	(10.795.866,00)	99,64	
4.02.01.2.16.0003.5.1	BELANJA OPERASI	2.987.164.000,00	2.976.368.134,00	(10.795.866,00)	99,64	
4.02.01.2.16.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.987.164.000,00	2.976.368.134,00	(10.795.866,00)	99,64	
4.02.01.2.16.0004	PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DPRD	359.397.800,00	348.211.075,00	(11.186.725,00)	96,89	
4.02.01.2.16.0004.5.1	BELANJA OPERASI	359.397.800,00	348.211.075,00	(11.186.725,00)	96,89	
4.02.01.2.16.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	359.397.800,00	348.211.075,00	(11.186.725,00)	96,89	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	63.002.892.500,00	52.708.815.432,00	(10.294.077.068,00)	83,66	
4.02.02.2.01	PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	9.509.181.000,00	7.789.883.194,00	(1.719.297.806,00)	81,92	
4.02.02.2.01.0001	PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PROGRAMRNNPEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	296.706.100,00	248.234.198,00	(48.471.902,00)	83,66	
4.02.02.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	296.706.100,00	248.234.198,00	(48.471.902,00)	83,66	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.02.02.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	296.706.100,00	248.234.198,00	(48.471.902,00)	83,66	
4.02.02.2.01.0002	PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	7.849.180.300,00	6.249.069.444,00	(1.600.110.856,00)	79,61	
4.02.02.2.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	7.849.180.300,00	6.249.069.444,00	(1.600.110.856,00)	79,61	
4.02.02.2.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.849.180.300,00	6.249.069.444,00	(1.600.110.856,00)	79,61	
4.02.02.2.01.0004	FASILITASI PENYUSUNAN PENJELASAN/KETERANGANRNNNASKAH AKADEMIK	1.363.294.600,00	1.292.579.552,00	(70.715.048,00)	94,81	
4.02.02.2.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.363.294.600,00	1.292.579.552,00	(70.715.048,00)	94,81	
4.02.02.2.01.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00	100,00	
4.02.02.2.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.360.574.600,00	1.289.859.552,00	(70.715.048,00)	94,80	
4.02.02.2.02	PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN	546.418.500,00	474.900.312,00	(71.518.188,00)	86,91	
4.02.02.2.02.0001	PEMBAHASAN KUA DAN PPAS	456.753.500,00	408.165.112,00	(48.588.388,00)	89,36	
4.02.02.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	456.753.500,00	408.165.112,00	(48.588.388,00)	89,36	
4.02.02.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	456.753.500,00	408.165.112,00	(48.588.388,00)	89,36	
4.02.02.2.02.0002	PEMBAHASAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	66.937.000,00	44.025.200,00	(22.911.800,00)	65,77	
4.02.02.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	66.937.000,00	44.025.200,00	(22.911.800,00)	65,77	
4.02.02.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.937.000,00	44.025.200,00	(22.911.800,00)	65,77	
4.02.02.2.02.0005	PEMBAHASAN LAPORAN SEMESTER	22.728.000,00	22.710.000,00	(18.000,00)	99,92	
4.02.02.2.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	22.728.000,00	22.710.000,00	(18.000,00)	99,92	
4.02.02.2.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.728.000,00	22.710.000,00	(18.000,00)	99,92	
4.02.02.2.03	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	7.905.840.800,00	5.213.918.739,00	(2.691.922.061,00)	65,95	
4.02.02.2.03.0006	PENGAWASAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	549.730.000,00	503.605.995,00	(46.124.005,00)	91,61	
4.02.02.2.03.0006.5.1	BELANJA OPERASI	549.730.000,00	503.605.995,00	(46.124.005,00)	91,61	
4.02.02.2.03.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	549.730.000,00	503.605.995,00	(46.124.005,00)	91,61	
4.02.02.2.03.0007	PENGAWASAN PENGGUNAAN ANGGARAN	6.858.366.800,00	4.240.251.231,00	(2.618.115.569,00)	61,83	
4.02.02.2.03.0007.5.1	BELANJA OPERASI	6.858.366.800,00	4.240.251.231,00	(2.618.115.569,00)	61,83	
4.02.02.2.03.0007.5.1.01	Belanja Pegawai	30.240.000,00	30.240.000,00	0,00	100,00	
4.02.02.2.03.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.828.126.800,00	4.210.011.231,00	(2.618.115.569,00)	61,66	
4.02.02.2.03.0008	PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGANRNNPERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH	497.744.000,00	470.061.513,00	(27.682.487,00)	94,44	
4.02.02.2.03.0008.5.1	BELANJA OPERASI	497.744.000,00	470.061.513,00	(27.682.487,00)	94,44	
4.02.02.2.03.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	497.744.000,00	470.061.513,00	(27.682.487,00)	94,44	
4.02.02.2.04	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	7.473.309.500,00	6.752.620.418,00	(720.689.082,00)	90,36	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.02.02.2.04.0001	ORIENTASI DPRD	633.213.000,00	550.991.024,00	(82.221.976,00)	87,02	
4.02.02.2.04.0001.5.1	BELANJA OPERASI	633.213.000,00	550.991.024,00	(82.221.976,00)	87,02	
4.02.02.2.04.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	633.213.000,00	550.991.024,00	(82.221.976,00)	87,02	
4.02.02.2.04.0002	PENDALAMAN TUGAS DPRD	1.927.234.000,00	1.579.718.094,00	(347.515.906,00)	81,97	
4.02.02.2.04.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.927.234.000,00	1.579.718.094,00	(347.515.906,00)	81,97	
4.02.02.2.04.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.927.234.000,00	1.579.718.094,00	(347.515.906,00)	81,97	
4.02.02.2.04.0004	PENYEDIAAN KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI	27.000.000,00	10.000.000,00	(17.000.000,00)	37,04	
4.02.02.2.04.0004.5.1	BELANJA OPERASI	27.000.000,00	10.000.000,00	(17.000.000,00)	37,04	
4.02.02.2.04.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	10.000.000,00	(17.000.000,00)	37,04	
4.02.02.2.04.0005	PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI	558.558.000,00	492.935.700,00	(65.622.300,00)	88,25	
4.02.02.2.04.0005.5.1	BELANJA OPERASI	558.558.000,00	492.935.700,00	(65.622.300,00)	88,25	
4.02.02.2.04.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	558.558.000,00	492.935.700,00	(65.622.300,00)	88,25	
4.02.02.2.04.0006	PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT	540.190.000,00	334.575.000,00	(205.615.000,00)	61,94	
4.02.02.2.04.0006.5.1	BELANJA OPERASI	540.190.000,00	334.575.000,00	(205.615.000,00)	61,94	
4.02.02.2.04.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	540.190.000,00	334.575.000,00	(205.615.000,00)	61,94	
4.02.02.2.04.0007	PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DPRD	50.000.000,00	49.966.200,00	(33.800,00)	99,93	
4.02.02.2.04.0007.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.966.200,00	(33.800,00)	99,93	
4.02.02.2.04.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.966.200,00	(33.800,00)	99,93	
4.02.02.2.04.0008	PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DPRD	3.737.114.500,00	3.734.434.400,00	(2.680.100,00)	99,93	
4.02.02.2.04.0008.5.1	BELANJA OPERASI	3.737.114.500,00	3.734.434.400,00	(2.680.100,00)	99,93	
4.02.02.2.04.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.737.114.500,00	3.734.434.400,00	(2.680.100,00)	99,93	
4.02.02.2.05	PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	2.119.948.000,00	2.020.338.300,00	(99.609.700,00)	95,30	
4.02.02.2.05.0002	PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	177.448.000,00	124.981.300,00	(52.466.700,00)	70,43	
4.02.02.2.05.0002.5.1	BELANJA OPERASI	177.448.000,00	124.981.300,00	(52.466.700,00)	70,43	
4.02.02.2.05.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.448.000,00	124.981.300,00	(52.466.700,00)	70,43	
4.02.02.2.05.0003	PELAKSANAAN RESES	1.942.500.000,00	1.895.357.000,00	(47.143.000,00)	97,57	
4.02.02.2.05.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.942.500.000,00	1.895.357.000,00	(47.143.000,00)	97,57	
4.02.02.2.05.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.942.500.000,00	1.895.357.000,00	(47.143.000,00)	97,57	
4.02.02.2.06	PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK DPRD	2.044.016.300,00	1.218.650.619,00	(825.365.681,00)	59,62	
4.02.02.2.06.0001	PENYUSUNAN KODE ETIK DPRD	250.832.100,00	121.311.928,00	(129.520.172,00)	48,36	
4.02.02.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	250.832.100,00	121.311.928,00	(129.520.172,00)	48,36	
4.02.02.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.832.100,00	121.311.928,00	(129.520.172,00)	48,36	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.02.02.2.06.0002	PENGAWASAN KODE ETIK DPRD	1.793.184.200,00	1.097.338.691,00	(695.845.509,00)	61,19	
4.02.02.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.793.184.200,00	1.097.338.691,00	(695.845.509,00)	61,19	
4.02.02.2.06.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	100,00	
4.02.02.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.785.024.200,00	1.089.178.691,00	(695.845.509,00)	61,02	
4.02.02.2.08	FASILITASI TUGAS DPRD	33.404.178.400,00	29.238.503.850,00	(4.165.674.550,00)	87,53	
4.02.02.2.08.0001	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD	29.077.115.300,00	25.731.603.401,00	(3.345.511.899,00)	88,49	
4.02.02.2.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	29.077.115.300,00	25.731.603.401,00	(3.345.511.899,00)	88,49	
4.02.02.2.08.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	35.040.000,00	35.040.000,00	0,00	100,00	
4.02.02.2.08.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.042.075.300,00	25.696.563.401,00	(3.345.511.899,00)	88,48	
4.02.02.2.08.0002	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DPRD	75.190.000,00	72.051.200,00	(3.138.800,00)	95,83	
4.02.02.2.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	75.190.000,00	72.051.200,00	(3.138.800,00)	95,83	
4.02.02.2.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.190.000,00	72.051.200,00	(3.138.800,00)	95,83	
4.02.02.2.08.0004	FASILITASI TUGAS PIMPINAN DPRD	4.251.873.100,00	3.434.849.249,00	(817.023.851,00)	80,78	
4.02.02.2.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	4.251.873.100,00	3.434.849.249,00	(817.023.851,00)	80,78	
4.02.02.2.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.251.873.100,00	3.434.849.249,00	(817.023.851,00)	80,78	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	151.474.523.838,00	138.733.853.039,00	(12.740.670.799,00)	91,59	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(151.474.523.838,00)	(138.733.853.039,00)	12.740.670.799,00	91,59	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(151.474.523.838,00)	(138.733.853.039,00)	12.740.670.799,00	91,59	





5.01.5.05.0.00.25.0000

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
Satuan Kerja : 5.01.5.05.0.00.25.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.755.985.035,00	17.630.885.838,00	(125.099.197,00)	99,30	
5.01.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	30.052.300,00	22.926.000,00	(7.126.300,00)	76,29	
5.01.01.2.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	18.740.500,00	15.337.800,00	(3.402.700,00)	81,84	
5.01.01.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	18.740.500,00	15.337.800,00	(3.402.700,00)	81,84	
5.01.01.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.740.500,00	15.337.800,00	(3.402.700,00)	81,84	
5.01.01.2.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	7.432.400,00	3.713.100,00	(3.719.300,00)	49,96	
5.01.01.2.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	7.432.400,00	3.713.100,00	(3.719.300,00)	49,96	
5.01.01.2.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.432.400,00	3.713.100,00	(3.719.300,00)	49,96	
5.01.01.2.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	3.879.400,00	3.875.100,00	(4.300,00)	99,89	
5.01.01.2.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	3.879.400,00	3.875.100,00	(4.300,00)	99,89	
5.01.01.2.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.879.400,00	3.875.100,00	(4.300,00)	99,89	
5.01.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	14.698.249.192,00	14.691.709.942,00	(6.539.250,00)	99,96	
5.01.01.2.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	14.616.554.492,00	14.610.834.442,00	(5.720.050,00)	99,96	
5.01.01.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	14.616.554.492,00	14.610.834.442,00	(5.720.050,00)	99,96	
5.01.01.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	14.616.554.492,00	14.610.834.442,00	(5.720.050,00)	99,96	
5.01.01.2.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	5.901.900,00	5.082.700,00	(819.200,00)	86,12	
5.01.01.2.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	5.901.900,00	5.082.700,00	(819.200,00)	86,12	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.01.01.2.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.901.900,00	5.082.700,00	(819.200,00)	86,12	
5.01.01.2.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	75.792.800,00	75.792.800,00	0,00	100,00	
5.01.01.2.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	75.792.800,00	75.792.800,00	0,00	100,00	
5.01.01.2.02.0007.5.1.01	Belanja Pegawai	59.200.000,00	59.200.000,00	0,00	100,00	
5.01.01.2.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.592.800,00	16.592.800,00	0,00	100,00	
5.01.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.126.673.635,00	1.109.755.577,00	(16.918.058,00)	98,50	
5.01.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	12.993.000,00	12.827.300,00	(165.700,00)	98,72	
5.01.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	12.993.000,00	12.827.300,00	(165.700,00)	98,72	
5.01.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.993.000,00	12.827.300,00	(165.700,00)	98,72	
5.01.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	67.769.100,00	67.768.253,00	(847,00)	100,00	
5.01.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	67.769.100,00	67.768.253,00	(847,00)	100,00	
5.01.01.2.06.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
5.01.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.089.100,00	67.088.253,00	(847,00)	100,00	
5.01.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	28.909.000,00	21.848.000,00	(7.061.000,00)	75,58	
5.01.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	28.909.000,00	21.848.000,00	(7.061.000,00)	75,58	
5.01.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.909.000,00	21.848.000,00	(7.061.000,00)	75,58	
5.01.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	23.499.535,00	21.032.000,00	(2.467.535,00)	89,50	
5.01.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	23.499.535,00	21.032.000,00	(2.467.535,00)	89,50	
5.01.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.499.535,00	21.032.000,00	(2.467.535,00)	89,50	
5.01.01.2.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	993.503.000,00	986.280.024,00	(7.222.976,00)	99,27	
5.01.01.2.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	993.503.000,00	986.280.024,00	(7.222.976,00)	99,27	
5.01.01.2.06.0009.5.1.01	Belanja Pegawai	27.200.000,00	27.200.000,00	0,00	100,00	
5.01.01.2.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	966.303.000,00	959.080.024,00	(7.222.976,00)	99,25	
5.01.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	76.422.400,00	74.488.340,00	(1.934.060,00)	97,47	
5.01.01.2.07.0006	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	76.422.400,00	74.488.340,00	(1.934.060,00)	97,47	
5.01.01.2.07.0006.5.1	BELANJA OPERASI	2.181.200,00	680.000,00	(1.501.200,00)	31,18	
5.01.01.2.07.0006.5.1.01	Belanja Pegawai	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
5.01.01.2.07.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.501.200,00	0,00	(1.501.200,00)	0,00	
5.01.01.2.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	74.241.200,00	73.808.340,00	(432.860,00)	99,42	
5.01.01.2.07.0006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.241.200,00	73.808.340,00	(432.860,00)	99,42	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.01.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.133.211.908,00	1.117.719.101,00	(15.492.807,00)	98,63	
5.01.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	154.072.860,00	148.730.393,00	(5.342.467,00)	96,53	
5.01.01.2.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	154.072.860,00	148.730.393,00	(5.342.467,00)	96,53	
5.01.01.2.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.072.860,00	148.730.393,00	(5.342.467,00)	96,53	
5.01.01.2.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	979.139.048,00	968.988.708,00	(10.150.340,00)	98,96	
5.01.01.2.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	979.139.048,00	968.988.708,00	(10.150.340,00)	98,96	
5.01.01.2.08.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
5.01.01.2.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	978.459.048,00	968.308.708,00	(10.150.340,00)	98,96	
5.01.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	691.375.600,00	614.286.878,00	(77.088.722,00)	88,85	
5.01.01.2.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	290.040.000,00	242.019.148,00	(48.020.852,00)	83,44	
5.01.01.2.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	290.040.000,00	242.019.148,00	(48.020.852,00)	83,44	
5.01.01.2.09.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	290.040.000,00	242.019.148,00	(48.020.852,00)	83,44	
5.01.01.2.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	116.199.200,00	88.128.600,00	(28.070.600,00)	75,84	
5.01.01.2.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	116.199.200,00	88.128.600,00	(28.070.600,00)	75,84	
5.01.01.2.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.199.200,00	88.128.600,00	(28.070.600,00)	75,84	
5.01.01.2.09.0009	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	285.136.400,00	284.139.130,00	(997.270,00)	99,65	
5.01.01.2.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	285.136.400,00	284.139.130,00	(997.270,00)	99,65	
5.01.01.2.09.0009.5.1.01	Belanja Pegawai	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
5.01.01.2.09.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	284.456.400,00	283.459.130,00	(997.270,00)	99,65	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.768.902.900,00	2.651.179.550,00	(117.723.350,00)	95,75	
5.01.02.2.01	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	2.458.996.900,00	2.382.609.550,00	(76.387.350,00)	96,89	
5.01.02.2.01.0003	PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK	102.820.800,00	100.856.800,00	(1.964.000,00)	98,09	
5.01.02.2.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	102.820.800,00	100.856.800,00	(1.964.000,00)	98,09	
5.01.02.2.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.820.800,00	100.856.800,00	(1.964.000,00)	98,09	
5.01.02.2.01.0004	KOORDINASI PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH	219.998.000,00	215.524.600,00	(4.473.400,00)	97,97	
5.01.02.2.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	219.998.000,00	215.524.600,00	(4.473.400,00)	97,97	
5.01.02.2.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	219.998.000,00	215.524.600,00	(4.473.400,00)	97,97	
5.01.02.2.01.0005	PELAKSANAAN MUSRENBANG KABUPATEN/KOTA	699.355.800,00	689.409.400,00	(9.946.400,00)	98,58	
5.01.02.2.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	699.355.800,00	689.409.400,00	(9.946.400,00)	98,58	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.01.02.2.01.0005.5.1.01	Belanja Pegawai	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	100,00	
5.01.02.2.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	695.575.800,00	685.629.400,00	(9.946.400,00)	98,57	
5.01.02.2.01.0007	KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.436.822.300,00	1.376.818.750,00	(60.003.550,00)	95,82	
5.01.02.2.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	1.436.822.300,00	1.376.818.750,00	(60.003.550,00)	95,82	
5.01.02.2.01.0007.5.1.01	Belanja Pegawai	28.590.000,00	28.590.000,00	0,00	100,00	
5.01.02.2.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.408.232.300,00	1.348.228.750,00	(60.003.550,00)	95,74	
5.01.02.2.03	PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	185.460.000,00	146.808.000,00	(38.652.000,00)	79,16	
5.01.02.2.03.0001	KOORDINASI PENGENDALIAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN/KOTA	75.988.000,00	55.846.000,00	(20.142.000,00)	73,49	
5.01.02.2.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	75.988.000,00	55.846.000,00	(20.142.000,00)	73,49	
5.01.02.2.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.988.000,00	55.846.000,00	(20.142.000,00)	73,49	
5.01.02.2.03.0002	PENGENDALIAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH	109.472.000,00	90.962.000,00	(18.510.000,00)	83,09	
5.01.02.2.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	109.472.000,00	90.962.000,00	(18.510.000,00)	83,09	
5.01.02.2.03.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.472.000,00	90.962.000,00	(18.510.000,00)	83,09	
5.01.02.2.04	IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH	124.446.000,00	121.762.000,00	(2.684.000,00)	97,84	
5.01.02.2.04.0001	PENGELOLAAN DATA DALAM SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH	124.446.000,00	121.762.000,00	(2.684.000,00)	97,84	
5.01.02.2.04.0001.5.1	BELANJA OPERASI	124.446.000,00	121.762.000,00	(2.684.000,00)	97,84	
5.01.02.2.04.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	100,00	
5.01.02.2.04.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.756.000,00	120.072.000,00	(2.684.000,00)	97,81	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	856.940.800,00	834.717.800,00	(22.223.000,00)	97,41	
5.01.03.2.01	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	574.480.000,00	566.530.000,00	(7.950.000,00)	98,62	
5.01.03.2.01.0005	KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	574.480.000,00	566.530.000,00	(7.950.000,00)	98,62	
5.01.03.2.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	574.480.000,00	566.530.000,00	(7.950.000,00)	98,62	
5.01.03.2.01.0005.5.1.01	Belanja Pegawai	22.920.000,00	19.320.000,00	(3.600.000,00)	84,29	
5.01.03.2.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	551.560.000,00	547.210.000,00	(4.350.000,00)	99,21	
5.01.03.2.03	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	282.460.800,00	268.187.800,00	(14.273.000,00)	94,95	
5.01.03.2.03.0001	KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	41.834.000,00	40.484.000,00	(1.350.000,00)	96,77	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.01.03.2.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	41.834.000,00	40.484.000,00	(1.350.000,00)	96,77	
5.01.03.2.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.834.000,00	40.484.000,00	(1.350.000,00)	96,77	
5.01.03.2.03.0005	KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	225.965.000,00	224.807.000,00	(1.158.000,00)	99,49	
5.01.03.2.03.0005.5.1	BELANJA OPERASI	225.965.000,00	224.807.000,00	(1.158.000,00)	99,49	
5.01.03.2.03.0005.5.1.01	Belanja Pegawai	20.630.000,00	20.630.000,00	0,00	100,00	
5.01.03.2.03.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.335.000,00	204.177.000,00	(1.158.000,00)	99,44	
5.01.03.2.03.0008	KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN	14.661.800,00	2.896.800,00	(11.765.000,00)	19,76	
5.01.03.2.03.0008.5.1	BELANJA OPERASI	14.661.800,00	2.896.800,00	(11.765.000,00)	19,76	
5.01.03.2.03.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.661.800,00	2.896.800,00	(11.765.000,00)	19,76	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.527.510.070,00	1.494.615.890,00	(32.894.180,00)	97,85	
5.05.02.2.01	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN	402.511.100,00	400.335.000,00	(2.176.100,00)	99,46	
5.05.02.2.01.0004	FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG APARATUR DAN REFORMASI BIROKRASI	402.511.100,00	400.335.000,00	(2.176.100,00)	99,46	
5.05.02.2.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	402.511.100,00	400.335.000,00	(2.176.100,00)	99,46	
5.05.02.2.01.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
5.05.02.2.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	401.831.100,00	399.655.000,00	(2.176.100,00)	99,46	
5.05.02.2.02	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN	321.688.200,00	312.319.190,00	(9.369.010,00)	97,09	
5.05.02.2.02.0001	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG ASPEK- ASPEK SOSIAL	100.679.900,00	98.880.590,00	(1.799.310,00)	98,21	
5.05.02.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	100.679.900,00	98.880.590,00	(1.799.310,00)	98,21	
5.05.02.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
5.05.02.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.999.900,00	98.200.590,00	(1.799.310,00)	98,20	
5.05.02.2.02.0005	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA	221.008.300,00	213.438.600,00	(7.569.700,00)	96,57	
5.05.02.2.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	221.008.300,00	213.438.600,00	(7.569.700,00)	96,57	
5.05.02.2.02.0005.5.1.01	Belanja Pegawai	5.710.000,00	2.810.000,00	(2.900.000,00)	49,21	
5.05.02.2.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.298.300,00	210.628.600,00	(4.669.700,00)	97,83	
5.05.02.2.03	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	354.071.070,00	340.300.000,00	(13.771.070,00)	96,11	
5.05.02.2.03.0001	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	354.071.070,00	340.300.000,00	(13.771.070,00)	96,11	
5.05.02.2.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	354.071.070,00	340.300.000,00	(13.771.070,00)	96,11	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.05.02.2.03.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	19.320.000,00	19.320.000,00	0,00	100,00	
5.05.02.2.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	334.751.070,00	320.980.000,00	(13.771.070,00)	95,89	
5.05.02.2.04	PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI	449.239.700,00	441.661.700,00	(7.578.000,00)	98,31	
5.05.02.2.04.0003	DISEMINASI JENIS, PROSEDUR DAN METODE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIFAT INOVATIF	425.059.800,00	418.081.800,00	(6.978.000,00)	98,36	
5.05.02.2.04.0003.5.1	BELANJA OPERASI	425.059.800,00	418.081.800,00	(6.978.000,00)	98,36	
5.05.02.2.04.0003.5.1.01	Belanja Pegawai	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
5.05.02.2.04.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	424.379.800,00	417.401.800,00	(6.978.000,00)	98,36	
5.05.02.2.04.0005	FASILITASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	24.179.900,00	23.579.900,00	(600.000,00)	97,52	
5.05.02.2.04.0005.5.1	BELANJA OPERASI	24.179.900,00	23.579.900,00	(600.000,00)	97,52	
5.05.02.2.04.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.179.900,00	23.579.900,00	(600.000,00)	97,52	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	22.909.338.805,00	22.611.399.078,00	(297.939.727,00)	98,70	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(22.909.338.805,00)	(22.611.399.078,00)	297.939.727,00	98,70	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(22.909.338.805,00)	(22.611.399.078,00)	297.939.727,00	98,70	





5.02.0.00.0.00.26.0000

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Satuan Kerja : 5.02.0.00.0.00.26.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
5.02.0.00.0.00.26.0000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	53.149.505.115,00	54.404.773.437,00	1.255.268.322,00	102,36	
5.02.0.00.0.00.26.0000.4.1.02	Retribusi Daerah	2.034.473.306,00	2.722.640.494,00	688.167.188,00	133,83	
5.02.0.00.0.00.26.0000.4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	34.537.163.762,00	34.287.163.763,00	(249.999.999,00)	99,28	
5.02.0.00.0.00.26.0000.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	16.577.868.047,00	17.394.969.180,00	817.101.133,00	104,93	
5.02.0.00.0.00.26.0000.4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.731.609.984.212,00	1.711.878.175.798,00	(19.731.808.414,00)	98,86	
5.02.0.00.0.00.26.0000.4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.380.642.513.566,00	1.369.427.755.442,00	(11.214.758.124,00)	99,19	
5.02.0.00.0.00.26.0000.4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	350.967.470.646,00	342.450.420.356,00	(8.517.050.290,00)	97,57	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.784.759.489.327,00	1.766.282.949.235,00	(18.476.540.092,00)	98,96	
5	BELANJA DAERAH					
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.176.413.881,00	18.338.738.074,00	(837.675.807,00)	95,63	
5.02.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	56.140.800,00	55.062.940,00	(1.077.860,00)	98,08	
5.02.01.2.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	56.140.800,00	55.062.940,00	(1.077.860,00)	98,08	
5.02.01.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	56.140.800,00	55.062.940,00	(1.077.860,00)	98,08	
5.02.01.2.01.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	100,00	
5.02.01.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.450.800,00	53.372.940,00	(1.077.860,00)	98,02	
5.02.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	13.579.818.148,00	12.991.194.134,00	(588.624.014,00)	95,67	
5.02.01.2.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	13.545.486.148,00	12.957.202.934,00	(588.283.214,00)	95,66	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.02.01.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	13.545.486.148,00	12.957.202.934,00	(588.283.214,00)	95,66	
5.02.01.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	13.545.486.148,00	12.957.202.934,00	(588.283.214,00)	95,66	
5.02.01.2.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	34.332.000,00	33.991.200,00	(340.800,00)	99,01	
5.02.01.2.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	34.332.000,00	33.991.200,00	(340.800,00)	99,01	
5.02.01.2.02.0007.5.1.01	Belanja Pegawai	33.480.000,00	33.480.000,00	0,00	100,00	
5.02.01.2.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	852.000,00	511.200,00	(340.800,00)	60,00	
5.02.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	2.619.505.325,00	2.436.034.887,00	(183.470.438,00)	93,00	
5.02.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	29.587.400,00	24.451.324,00	(5.136.076,00)	82,64	
5.02.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	29.587.400,00	24.451.324,00	(5.136.076,00)	82,64	
5.02.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.587.400,00	24.451.324,00	(5.136.076,00)	82,64	
5.02.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	447.391.100,00	425.181.925,00	(22.209.175,00)	95,04	
5.02.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	447.391.100,00	425.181.925,00	(22.209.175,00)	95,04	
5.02.01.2.06.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	100,00	
5.02.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	445.301.100,00	423.091.925,00	(22.209.175,00)	95,01	
5.02.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	282.649.225,00	277.738.210,00	(4.911.015,00)	98,26	
5.02.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	282.649.225,00	277.738.210,00	(4.911.015,00)	98,26	
5.02.01.2.06.0003.5.1.01	Belanja Pegawai	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	100,00	
5.02.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.759.225,00	275.848.210,00	(4.911.015,00)	98,25	
5.02.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	132.450.000,00	131.013.764,00	(1.436.236,00)	98,92	
5.02.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	132.450.000,00	131.013.764,00	(1.436.236,00)	98,92	
5.02.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.450.000,00	131.013.764,00	(1.436.236,00)	98,92	
5.02.01.2.06.0006	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	91.935.000,00	91.255.500,00	(679.500,00)	99,26	
5.02.01.2.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	91.935.000,00	91.255.500,00	(679.500,00)	99,26	
5.02.01.2.06.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.935.000,00	91.255.500,00	(679.500,00)	99,26	
5.02.01.2.06.0008	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	303.272.800,00	284.195.649,00	(19.077.151,00)	93,71	
5.02.01.2.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	303.272.800,00	284.195.649,00	(19.077.151,00)	93,71	
5.02.01.2.06.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	303.272.800,00	284.195.649,00	(19.077.151,00)	93,71	
5.02.01.2.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	1.332.219.800,00	1.202.198.515,00	(130.021.285,00)	90,24	
5.02.01.2.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	1.332.219.800,00	1.202.198.515,00	(130.021.285,00)	90,24	
5.02.01.2.06.0009.5.1.01	Belanja Pegawai	22.920.000,00	22.920.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.02.01.2.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.309.299.800,00	1.179.278.515,00	(130.021.285,00)	90,07	
5.02.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.499.810.000,00	1.499.033.000,00	(777.000,00)	99,95	
5.02.01.2.07.0001	PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	1.015.923.000,00	1.015.923.000,00	0,00	100,00	
5.02.01.2.07.0001.5.1	BELANJA OPERASI	2.590.000,00	2.590.000,00	0,00	100,00	
5.02.01.2.07.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	2.590.000,00	2.590.000,00	0,00	100,00	
5.02.01.2.07.0001.5.2	BELANJA MODAL	1.013.333.000,00	1.013.333.000,00	0,00	100,00	
5.02.01.2.07.0001.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.013.333.000,00	1.013.333.000,00	0,00	100,00	
5.02.01.2.07.0006	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	483.887.000,00	483.110.000,00	(777.000,00)	99,84	
5.02.01.2.07.0006.5.1	BELANJA OPERASI	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	100,00	
5.02.01.2.07.0006.5.1.01	Belanja Pegawai	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	100,00	
5.02.01.2.07.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.02.01.2.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	481.997.000,00	481.220.000,00	(777.000,00)	99,84	
5.02.01.2.07.0006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	481.997.000,00	481.220.000,00	(777.000,00)	99,84	
5.02.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	754.640.608,00	734.718.787,00	(19.921.821,00)	97,36	
5.02.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	160.396.000,00	157.830.979,00	(2.565.021,00)	98,40	
5.02.01.2.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	160.396.000,00	157.830.979,00	(2.565.021,00)	98,40	
5.02.01.2.08.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	100,00	
5.02.01.2.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.506.000,00	155.940.979,00	(2.565.021,00)	98,38	
5.02.01.2.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	594.244.608,00	576.887.808,00	(17.356.800,00)	97,08	
5.02.01.2.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	594.244.608,00	576.887.808,00	(17.356.800,00)	97,08	
5.02.01.2.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	594.244.608,00	576.887.808,00	(17.356.800,00)	97,08	
5.02.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	666.499.000,00	622.694.326,00	(43.804.674,00)	93,43	
5.02.01.2.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	269.690.000,00	234.006.043,00	(35.683.957,00)	86,77	
5.02.01.2.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	269.690.000,00	234.006.043,00	(35.683.957,00)	86,77	
5.02.01.2.09.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	269.690.000,00	234.006.043,00	(35.683.957,00)	86,77	
5.02.01.2.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	362.400.000,00	354.644.583,00	(7.755.417,00)	97,86	
5.02.01.2.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	362.400.000,00	354.644.583,00	(7.755.417,00)	97,86	
5.02.01.2.09.0006.5.1.01	Belanja Pegawai	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	100,00	
5.02.01.2.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.510.000,00	352.754.583,00	(7.755.417,00)	97,85	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.02.01.2.09.0009	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	34.409.000,00	34.043.700,00	(365.300,00)	98,94	
5.02.01.2.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	34.409.000,00	34.043.700,00	(365.300,00)	98,94	
5.02.01.2.09.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.409.000,00	34.043.700,00	(365.300,00)	98,94	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	16.582.751.717,00	11.338.231.076,00	(5.244.520.641,00)	68,37	
5.02.02.2.01	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH	688.030.600,00	624.188.520,00	(63.842.080,00)	90,72	
5.02.02.2.01.0001	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS	156.353.500,00	149.825.000,00	(6.528.500,00)	95,82	
5.02.02.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	156.353.500,00	149.825.000,00	(6.528.500,00)	95,82	
5.02.02.2.01.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	100,00	
5.02.02.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.143.500,00	148.615.000,00	(6.528.500,00)	95,79	
5.02.02.2.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	4.543.500,00	3.832.000,00	(711.500,00)	84,34	
5.02.02.2.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	4.543.500,00	3.832.000,00	(711.500,00)	84,34	
5.02.02.2.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.543.500,00	3.832.000,00	(711.500,00)	84,34	
5.02.02.2.01.0003	KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI RKA-SKPD	56.620.000,00	49.720.000,00	(6.900.000,00)	87,81	
5.02.02.2.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	56.620.000,00	49.720.000,00	(6.900.000,00)	87,81	
5.02.02.2.01.0003.5.1.01	Belanja Pegawai	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	100,00	
5.02.02.2.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.200.000,00	47.300.000,00	(6.900.000,00)	87,27	
5.02.02.2.01.0004	KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN RKA-SKPD	48.600.000,00	44.700.000,00	(3.900.000,00)	91,98	
5.02.02.2.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	48.600.000,00	44.700.000,00	(3.900.000,00)	91,98	
5.02.02.2.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.600.000,00	44.700.000,00	(3.900.000,00)	91,98	
5.02.02.2.01.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD	153.917.300,00	122.320.200,00	(31.597.100,00)	79,47	
5.02.02.2.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	153.917.300,00	122.320.200,00	(31.597.100,00)	79,47	
5.02.02.2.01.0007.5.1.01	Belanja Pegawai	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	100,00	
5.02.02.2.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.497.300,00	119.900.200,00	(31.597.100,00)	79,14	
5.02.02.2.01.0008	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD	166.628.300,00	153.089.320,00	(13.538.980,00)	91,87	
5.02.02.2.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	166.628.300,00	153.089.320,00	(13.538.980,00)	91,87	
5.02.02.2.01.0008.5.1.01	Belanja Pegawai	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	100,00	
5.02.02.2.01.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.578.300,00	147.039.320,00	(13.538.980,00)	91,57	
5.02.02.2.01.0009	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN REGULASI SERTA KEBIJAKAN BIDANG ANGGARAN	101.368.000,00	100.702.000,00	(666.000,00)	99,34	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.02.02.2.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	101.368.000,00	100.702.000,00	(666.000,00)	99,34	
5.02.02.2.01.0009.5.1.01	Belanja Pegawai	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	100,00	
5.02.02.2.01.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.678.000,00	99.012.000,00	(666.000,00)	99,33	
5.02.02.2.03	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	441.610.000,00	405.490.100,00	(36.119.900,00)	91,82	
5.02.02.2.03.0003	KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BULANAN, TRIWULANAN DAN SEMESTERAN	205.800.000,00	198.065.000,00	(7.735.000,00)	96,24	
5.02.02.2.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	205.800.000,00	198.065.000,00	(7.735.000,00)	96,24	
5.02.02.2.03.0003.5.1.01	Belanja Pegawai	193.800.000,00	193.800.000,00	0,00	100,00	
5.02.02.2.03.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	4.265.000,00	(7.735.000,00)	35,54	
5.02.02.2.03.0004	KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	211.270.000,00	189.670.000,00	(21.600.000,00)	89,78	
5.02.02.2.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	211.270.000,00	189.670.000,00	(21.600.000,00)	89,78	
5.02.02.2.03.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	211.270.000,00	189.670.000,00	(21.600.000,00)	89,78	
5.02.02.2.03.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA	24.540.000,00	17.755.100,00	(6.784.900,00)	72,35	
5.02.02.2.03.0005.5.1	BELANJA OPERASI	24.540.000,00	17.755.100,00	(6.784.900,00)	72,35	
5.02.02.2.03.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.540.000,00	17.755.100,00	(6.784.900,00)	72,35	
5.02.02.2.04	PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	15.453.111.117,00	10.308.552.456,00	(5.144.558.661,00)	66,71	
5.02.02.2.04.0002	ANALISIS INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	350.400.000,00	350.400.000,00	0,00	100,00	
5.02.02.2.04.0002.5.1	BELANJA OPERASI	350.400.000,00	350.400.000,00	0,00	100,00	
5.02.02.2.04.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.02.02.2.04.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.400.000,00	350.400.000,00	0,00	100,00	
5.02.02.2.04.0004	ANALISIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN CICILAN POKOK DAN BUNGA PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH	7.082.008.848,00	6.109.458.571,00	(972.550.277,00)	86,27	
5.02.02.2.04.0004.5.1	BELANJA OPERASI	7.082.008.848,00	6.109.458.571,00	(972.550.277,00)	86,27	
5.02.02.2.04.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	30.240.000,00	30.240.000,00	0,00	100,00	
5.02.02.2.04.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.768.848,00	43.666.643,00	(8.102.205,00)	84,35	
5.02.02.2.04.0004.5.1.03	Belanja Bunga	7.000.000.000,00	6.035.551.928,00	(964.448.072,00)	86,22	
5.02.02.2.04.0008	ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN	1.660.750.000,00	1.660.750.000,00	0,00	100,00	
5.02.02.2.04.0008.5.4	BELANJA TRANSFER	1.660.750.000,00	1.660.750.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.02.02.2.04.0008.5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.660.750.000,00	1.660.750.000,00	0,00	100,00	
5.02.02.2.04.0009	PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK	6.359.952.269,00	2.187.943.885,00	(4.172.008.384,00)	34,40	
5.02.02.2.04.0009.5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.359.952.269,00	2.187.943.885,00	(4.172.008.384,00)	34,40	
5.02.02.2.04.0009.5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.359.952.269,00	2.187.943.885,00	(4.172.008.384,00)	34,40	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.754.077.700,00	5.271.047.137,00	(483.030.563,00)	91,61	
5.02.03.2.01	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.754.077.700,00	5.271.047.137,00	(483.030.563,00)	91,61	
5.02.03.2.01.0001	PENYUSUNAN STANDAR HARGA	622.000.000,00	617.135.000,00	(4.865.000,00)	99,22	
5.02.03.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	622.000.000,00	617.135.000,00	(4.865.000,00)	99,22	
5.02.03.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	622.000.000,00	617.135.000,00	(4.865.000,00)	99,22	
5.02.03.2.01.0005	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH	697.007.500,00	671.378.000,00	(25.629.500,00)	96,32	
5.02.03.2.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	697.007.500,00	671.378.000,00	(25.629.500,00)	96,32	
5.02.03.2.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	697.007.500,00	671.378.000,00	(25.629.500,00)	96,32	
5.02.03.2.01.0007	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH	3.897.771.200,00	3.529.128.443,00	(368.642.757,00)	90,54	
5.02.03.2.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	2.199.301.200,00	1.839.516.149,00	(359.785.051,00)	83,64	
5.02.03.2.01.0007.5.1.01	Belanja Pegawai	52.120.000,00	52.120.000,00	0,00	100,00	
5.02.03.2.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.147.181.200,00	1.787.396.149,00	(359.785.051,00)	83,24	
5.02.03.2.01.0007.5.2	BELANJA MODAL	1.698.470.000,00	1.689.612.294,00	(8.857.706,00)	99,48	
5.02.03.2.01.0007.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	237.728.000,00	235.948.169,00	(1.779.831,00)	99,25	
5.02.03.2.01.0007.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.460.742.000,00	1.453.664.125,00	(7.077.875,00)	99,52	
5.02.03.2.01.0008	PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH	215.000.000,00	143.950.000,00	(71.050.000,00)	66,95	
5.02.03.2.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	215.000.000,00	143.950.000,00	(71.050.000,00)	66,95	
5.02.03.2.01.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.000.000,00	143.950.000,00	(71.050.000,00)	66,95	
5.02.03.2.01.0010	OPTIMALISASI PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH	197.400.000,00	188.775.694,00	(8.624.306,00)	95,63	
5.02.03.2.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	197.400.000,00	188.775.694,00	(8.624.306,00)	95,63	
5.02.03.2.01.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.400.000,00	188.775.694,00	(8.624.306,00)	95,63	
5.02.03.2.01.0013	PEMBINAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	124.899.000,00	120.680.000,00	(4.219.000,00)	96,62	
5.02.03.2.01.0013.5.1	BELANJA OPERASI	124.899.000,00	120.680.000,00	(4.219.000,00)	96,62	
5.02.03.2.01.0013.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.899.000,00	120.680.000,00	(4.219.000,00)	96,62	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	41.513.243.298,00	34.948.016.287,00	(6.565.227.011,00)	84,19	
	SURPLUS / (DEFISIT)	1.743.246.246.029,00	1.731.334.932.948,00	(11.911.313.081,00)	99,32	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
5.02.0.00.0.00.26.0000.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	98.396.220.459,00	98.389.463.440,14	(6.757.018,86)	99,99	
5.02.0.00.0.00.26.0000.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	54.250.445.599,00	54.255.954.664,14	5.509.065,14	100,01	
5.02.0.00.0.00.26.0000.6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	38.648.742.600,00	38.648.742.600,00	0,00	100,00	
5.02.0.00.0.00.26.0000.6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.497.032.260,00	5.484.766.176,00	(12.266.084,00)	99,78	
5.02.0.00.0.00.26.0000.6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.294.145.996,00	5.484.766.176,00	(4.809.379.820,00)	53,28	
5.02.0.00.0.00.26.0000.6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	10.294.145.996,00	5.484.766.176,00	(4.809.379.820,00)	53,28	
PEMBIAYAAN NETTO		88.102.074.463,00	92.904.697.264,14	4.802.622.801,14	105,45	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		1.831.348.320.492,00	1.824.239.630.212,14	(7.108.690.279,86)	99,61	





5.02.0.00.0.00.27.0000

BADAN PENDAPATAN DAERAH



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Satuan Kerja : 5.02.0.00.0.00.27.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
5.02.0.00.0.00.27.0000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	992.688.105.138,00	988.585.338.370,00	(4.102.766.768,00)	99,59	
5.02.0.00.0.00.27.0000.4.1.01	Pajak Daerah	984.800.000.000,00	973.768.860.850,00	(11.031.139.150,00)	98,88	
5.02.0.00.0.00.27.0000.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.888.105.138,00	14.816.477.520,00	6.928.372.382,00	187,83	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	992.688.105.138,00	988.585.338.370,00	(4.102.766.768,00)	99,59	
5	BELANJA DAERAH					
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	43.189.107.136,00	42.166.956.561,00	(1.022.150.575,00)	97,63	
5.02.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	14.201.300,00	13.180.300,00	(1.021.000,00)	92,81	
5.02.01.2.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	6.003.200,00	5.061.600,00	(941.600,00)	84,32	
5.02.01.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	6.003.200,00	5.061.600,00	(941.600,00)	84,32	
5.02.01.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.003.200,00	5.061.600,00	(941.600,00)	84,32	
5.02.01.2.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	7.516.500,00	7.452.700,00	(63.800,00)	99,15	
5.02.01.2.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	7.516.500,00	7.452.700,00	(63.800,00)	99,15	
5.02.01.2.01.0006.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00	
5.02.01.2.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.496.500,00	5.432.700,00	(63.800,00)	98,84	
5.02.01.2.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	681.600,00	666.000,00	(15.600,00)	97,71	
5.02.01.2.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	681.600,00	666.000,00	(15.600,00)	97,71	
5.02.01.2.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	681.600,00	666.000,00	(15.600,00)	97,71	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.02.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	36.509.864.611,00	35.665.279.742,00	(844.584.869,00)	97,69	
5.02.01.2.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	36.480.080.611,00	35.635.534.742,00	(844.545.869,00)	97,68	
5.02.01.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	36.480.080.611,00	35.635.534.742,00	(844.545.869,00)	97,68	
5.02.01.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	36.480.080.611,00	35.635.534.742,00	(844.545.869,00)	97,68	
5.02.01.2.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	681.600,00	666.000,00	(15.600,00)	97,71	
5.02.01.2.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	681.600,00	666.000,00	(15.600,00)	97,71	
5.02.01.2.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	681.600,00	666.000,00	(15.600,00)	97,71	
5.02.01.2.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	29.102.400,00	29.079.000,00	(23.400,00)	99,92	
5.02.01.2.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	29.102.400,00	29.079.000,00	(23.400,00)	99,92	
5.02.01.2.02.0007.5.1.01	Belanja Pegawai	28.080.000,00	28.080.000,00	0,00	100,00	
5.02.01.2.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.022.400,00	999.000,00	(23.400,00)	97,71	
5.02.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	2.071.784.800,00	1.993.042.749,00	(78.742.051,00)	96,20	
5.02.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	38.373.500,00	38.373.500,00	0,00	100,00	
5.02.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	38.373.500,00	38.373.500,00	0,00	100,00	
5.02.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.373.500,00	38.373.500,00	0,00	100,00	
5.02.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	181.817.300,00	181.591.889,00	(225.411,00)	99,88	
5.02.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	181.817.300,00	181.591.889,00	(225.411,00)	99,88	
5.02.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.817.300,00	181.591.889,00	(225.411,00)	99,88	
5.02.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	87.752.800,00	85.128.700,00	(2.624.100,00)	97,01	
5.02.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	87.752.800,00	85.128.700,00	(2.624.100,00)	97,01	
5.02.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.752.800,00	85.128.700,00	(2.624.100,00)	97,01	
5.02.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	20.404.500,00	19.660.540,00	(743.960,00)	96,35	
5.02.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	20.404.500,00	19.660.540,00	(743.960,00)	96,35	
5.02.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.404.500,00	19.660.540,00	(743.960,00)	96,35	
5.02.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	312.402.200,00	311.996.132,00	(406.068,00)	99,87	
5.02.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	312.402.200,00	311.996.132,00	(406.068,00)	99,87	
5.02.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	312.402.200,00	311.996.132,00	(406.068,00)	99,87	
5.02.01.2.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	1.431.034.500,00	1.356.291.988,00	(74.742.512,00)	94,78	
5.02.01.2.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	1.431.034.500,00	1.356.291.988,00	(74.742.512,00)	94,78	
5.02.01.2.06.0009.5.1.01	Belanja Pegawai	22.920.000,00	22.920.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.02.01.2.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.408.114.500,00	1.333.371.988,00	(74.742.512,00)	94,69	
5.02.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	993.173.500,00	983.576.200,00	(9.597.300,00)	99,03	
5.02.01.2.07.0005	PENGADAAN MEBEL	184.631.300,00	183.616.700,00	(1.014.600,00)	99,45	
5.02.01.2.07.0005.5.1	BELANJA OPERASI	2.641.700,00	2.641.700,00	0,00	100,00	
5.02.01.2.07.0005.5.1.01	Belanja Pegawai	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
5.02.01.2.07.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.961.700,00	1.961.700,00	0,00	100,00	
5.02.01.2.07.0005.5.2	BELANJA MODAL	181.989.600,00	180.975.000,00	(1.014.600,00)	99,44	
5.02.01.2.07.0005.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	181.989.600,00	180.975.000,00	(1.014.600,00)	99,44	
5.02.01.2.07.0006	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	808.542.200,00	799.959.500,00	(8.582.700,00)	98,94	
5.02.01.2.07.0006.5.1	BELANJA OPERASI	173.727.800,00	172.109.500,00	(1.618.300,00)	99,07	
5.02.01.2.07.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.727.800,00	172.109.500,00	(1.618.300,00)	99,07	
5.02.01.2.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	634.814.400,00	627.850.000,00	(6.964.400,00)	98,90	
5.02.01.2.07.0006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	634.814.400,00	627.850.000,00	(6.964.400,00)	98,90	
5.02.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.237.822.525,00	2.170.289.769,00	(67.532.756,00)	96,98	
5.02.01.2.08.0001	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	7.425.000,00	6.600.000,00	(825.000,00)	88,89	
5.02.01.2.08.0001.5.1	BELANJA OPERASI	7.425.000,00	6.600.000,00	(825.000,00)	88,89	
5.02.01.2.08.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.425.000,00	6.600.000,00	(825.000,00)	88,89	
5.02.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	874.576.885,00	811.554.349,00	(63.022.536,00)	92,79	
5.02.01.2.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	874.576.885,00	811.554.349,00	(63.022.536,00)	92,79	
5.02.01.2.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	874.576.885,00	811.554.349,00	(63.022.536,00)	92,79	
5.02.01.2.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.355.820.640,00	1.352.135.420,00	(3.685.220,00)	99,73	
5.02.01.2.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.355.820.640,00	1.352.135.420,00	(3.685.220,00)	99,73	
5.02.01.2.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.355.820.640,00	1.352.135.420,00	(3.685.220,00)	99,73	
5.02.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.362.260.400,00	1.341.587.801,00	(20.672.599,00)	98,48	
5.02.01.2.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	410.180.000,00	409.959.600,00	(220.400,00)	99,95	
5.02.01.2.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	410.180.000,00	409.959.600,00	(220.400,00)	99,95	
5.02.01.2.09.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	410.180.000,00	409.959.600,00	(220.400,00)	99,95	
5.02.01.2.09.0005	PEMELIHARAAN MEBEL	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	100,00	
5.02.01.2.09.0005.5.1	BELANJA OPERASI	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	100,00	
5.02.01.2.09.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.02.01.2.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	451.151.100,00	434.873.900,00	(16.277.200,00)	96,39	
5.02.01.2.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	451.151.100,00	434.873.900,00	(16.277.200,00)	96,39	
5.02.01.2.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	451.151.100,00	434.873.900,00	(16.277.200,00)	96,39	
5.02.01.2.09.0009	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	392.312.000,00	388.377.083,00	(3.934.917,00)	99,00	
5.02.01.2.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	392.312.000,00	388.377.083,00	(3.934.917,00)	99,00	
5.02.01.2.09.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	392.312.000,00	388.377.083,00	(3.934.917,00)	99,00	
5.02.01.2.09.0010	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	98.167.300,00	97.927.218,00	(240.082,00)	99,76	
5.02.01.2.09.0010.5.1	BELANJA OPERASI	98.167.300,00	97.927.218,00	(240.082,00)	99,76	
5.02.01.2.09.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.167.300,00	97.927.218,00	(240.082,00)	99,76	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.587.122.700,00	4.531.317.951,00	(55.804.749,00)	98,78	
5.02.04.2.01	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.587.122.700,00	4.531.317.951,00	(55.804.749,00)	98,78	
5.02.04.2.01.0002	ANALISA DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH, SERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH	184.737.500,00	184.317.500,00	(420.000,00)	99,77	
5.02.04.2.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	184.737.500,00	184.317.500,00	(420.000,00)	99,77	
5.02.04.2.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.737.500,00	184.317.500,00	(420.000,00)	99,77	
5.02.04.2.01.0003	PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH	1.041.340.600,00	1.029.845.600,00	(11.495.000,00)	98,90	
5.02.04.2.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.041.340.600,00	1.029.845.600,00	(11.495.000,00)	98,90	
5.02.04.2.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.041.340.600,00	1.029.845.600,00	(11.495.000,00)	98,90	
5.02.04.2.01.0004	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PAJAK DAERAH	1.279.098.300,00	1.250.828.250,00	(28.270.050,00)	97,79	
5.02.04.2.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.279.098.300,00	1.250.828.250,00	(28.270.050,00)	97,79	
5.02.04.2.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.279.098.300,00	1.250.828.250,00	(28.270.050,00)	97,79	
5.02.04.2.01.0005	PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH	5.198.400,00	5.198.400,00	0,00	100,00	
5.02.04.2.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	5.198.400,00	5.198.400,00	0,00	100,00	
5.02.04.2.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.198.400,00	5.198.400,00	0,00	100,00	
5.02.04.2.01.0006	PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN, DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH	877.037.600,00	869.252.600,00	(7.785.000,00)	99,11	
5.02.04.2.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	877.037.600,00	869.252.600,00	(7.785.000,00)	99,11	
5.02.04.2.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	877.037.600,00	869.252.600,00	(7.785.000,00)	99,11	
5.02.04.2.01.0007	PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBBP2) SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	316.732.600,00	316.112.850,00	(619.750,00)	99,80	
5.02.04.2.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	316.732.600,00	316.112.850,00	(619.750,00)	99,80	
5.02.04.2.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.732.600,00	316.112.850,00	(619.750,00)	99,80	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.02.04.2.01.0008	PENETAPAN WAJIB PAJAK DAERAH	89.449.900,00	88.658.800,00	(791.100,00)	99,12	
5.02.04.2.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	89.449.900,00	88.658.800,00	(791.100,00)	99,12	
5.02.04.2.01.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.449.900,00	88.658.800,00	(791.100,00)	99,12	
5.02.04.2.01.0009	PELAYANAN DAN KONSULTASI PAJAK DAERAH	161.266.400,00	160.396.051,00	(870.349,00)	99,46	
5.02.04.2.01.0009.5.1	BELANJA OPERASI	161.266.400,00	160.396.051,00	(870.349,00)	99,46	
5.02.04.2.01.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.266.400,00	160.396.051,00	(870.349,00)	99,46	
5.02.04.2.01.0010	PENELITIAN DAN VERIFIKASI DATA PELAPORAN PAJAK DAERAH	510.575.500,00	505.022.000,00	(5.553.500,00)	98,91	
5.02.04.2.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	510.575.500,00	505.022.000,00	(5.553.500,00)	98,91	
5.02.04.2.01.0010.5.1.01	Belanja Pegawai	3.630.000,00	2.620.000,00	(1.010.000,00)	72,18	
5.02.04.2.01.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	506.945.500,00	502.402.000,00	(4.543.500,00)	99,10	
5.02.04.2.01.0011	PENAGIHAN PAJAK DAERAH	106.716.200,00	106.716.200,00	0,00	100,00	
5.02.04.2.01.0011.5.1	BELANJA OPERASI	104.216.200,00	104.216.200,00	0,00	100,00	
5.02.04.2.01.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.216.200,00	104.216.200,00	0,00	100,00	
5.02.04.2.01.0011.5.2	BELANJA MODAL	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
5.02.04.2.01.0011.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
5.02.04.2.01.0013	PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH	14.969.700,00	14.969.700,00	0,00	100,00	
5.02.04.2.01.0013.5.1	BELANJA OPERASI	14.969.700,00	14.969.700,00	0,00	100,00	
5.02.04.2.01.0013.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.969.700,00	14.969.700,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	47.776.229.836,00	46.698.274.512,00	(1.077.955.324,00)	97,74	
	SURPLUS / (DEFISIT)	944.911.875.302,00	941.887.063.858,00	(3.024.811.444,00)	99,68	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	944.911.875.302,00	941.887.063.858,00	(3.024.811.444,00)	99,68	





5.03.5.04.0.00.28.0000

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN
Satuan Kerja : 5.03.5.04.0.00.28.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.678.175.783,00	19.036.300.321,00	(641.875.462,00)	96,74	
5.03.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	87.964.000,00	85.169.000,00	(2.795.000,00)	96,82	
5.03.01.2.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
5.03.01.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
5.03.01.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
5.03.01.2.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	85.264.000,00	82.469.000,00	(2.795.000,00)	96,72	
5.03.01.2.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	85.264.000,00	82.469.000,00	(2.795.000,00)	96,72	
5.03.01.2.01.0007.5.1.01	Belanja Pegawai	14.490.000,00	12.120.000,00	(2.370.000,00)	83,64	
5.03.01.2.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.774.000,00	70.349.000,00	(425.000,00)	99,40	
5.03.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	15.851.227.715,00	15.654.412.669,00	(196.815.046,00)	98,76	
5.03.01.2.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	15.798.607.715,00	15.601.792.669,00	(196.815.046,00)	98,75	
5.03.01.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	15.798.607.715,00	15.601.792.669,00	(196.815.046,00)	98,75	
5.03.01.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	15.798.607.715,00	15.601.792.669,00	(196.815.046,00)	98,75	
5.03.01.2.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	52.620.000,00	52.620.000,00	0,00	100,00	
5.03.01.2.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	52.620.000,00	52.620.000,00	0,00	100,00	
5.03.01.2.02.0007.5.1.01	Belanja Pegawai	51.120.000,00	51.120.000,00	0,00	100,00	
5.03.01.2.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.03.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.948.792.664,00	1.559.491.914,00	(389.300.750,00)	80,02	
5.03.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	160.457.600,00	158.916.400,00	(1.541.200,00)	99,04	
5.03.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	160.457.600,00	158.916.400,00	(1.541.200,00)	99,04	
5.03.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.457.600,00	158.916.400,00	(1.541.200,00)	99,04	
5.03.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	76.461.700,00	69.205.000,00	(7.256.700,00)	90,51	
5.03.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	76.461.700,00	69.205.000,00	(7.256.700,00)	90,51	
5.03.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.461.700,00	69.205.000,00	(7.256.700,00)	90,51	
5.03.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	92.764.500,00	91.409.000,00	(1.355.500,00)	98,54	
5.03.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	92.764.500,00	91.409.000,00	(1.355.500,00)	98,54	
5.03.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.764.500,00	91.409.000,00	(1.355.500,00)	98,54	
5.03.01.2.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	1.619.108.864,00	1.239.961.514,00	(379.147.350,00)	76,58	
5.03.01.2.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	1.619.108.864,00	1.239.961.514,00	(379.147.350,00)	76,58	
5.03.01.2.06.0009.5.1.01	Belanja Pegawai	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	100,00	
5.03.01.2.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.565.108.864,00	1.185.961.514,00	(379.147.350,00)	75,78	
5.03.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	379.162.900,00	375.500.000,00	(3.662.900,00)	99,03	
5.03.01.2.07.0005	PENGADAAN MEBEL	39.827.100,00	39.200.000,00	(627.100,00)	98,43	
5.03.01.2.07.0005.5.2	BELANJA MODAL	39.827.100,00	39.200.000,00	(627.100,00)	98,43	
5.03.01.2.07.0005.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.827.100,00	39.200.000,00	(627.100,00)	98,43	
5.03.01.2.07.0006	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	339.335.800,00	336.300.000,00	(3.035.800,00)	99,11	
5.03.01.2.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	339.335.800,00	336.300.000,00	(3.035.800,00)	99,11	
5.03.01.2.07.0006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	339.335.800,00	336.300.000,00	(3.035.800,00)	99,11	
5.03.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	684.971.504,00	664.005.554,00	(20.965.950,00)	96,94	
5.03.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	263.053.720,00	250.276.210,00	(12.777.510,00)	95,14	
5.03.01.2.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	263.053.720,00	250.276.210,00	(12.777.510,00)	95,14	
5.03.01.2.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.053.720,00	250.276.210,00	(12.777.510,00)	95,14	
5.03.01.2.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	421.917.784,00	413.729.344,00	(8.188.440,00)	98,06	
5.03.01.2.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	421.917.784,00	413.729.344,00	(8.188.440,00)	98,06	
5.03.01.2.08.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.03.01.2.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	421.917.784,00	413.729.344,00	(8.188.440,00)	98,06	
5.03.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	726.057.000,00	697.721.184,00	(28.335.816,00)	96,10	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.03.01.2.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	184.230.000,00	161.623.925,00	(22.606.075,00)	87,73	
5.03.01.2.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	184.230.000,00	161.623.925,00	(22.606.075,00)	87,73	
5.03.01.2.09.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.230.000,00	161.623.925,00	(22.606.075,00)	87,73	
5.03.01.2.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	38.150.000,00	38.148.120,00	(1.880,00)	100,00	
5.03.01.2.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	38.150.000,00	38.148.120,00	(1.880,00)	100,00	
5.03.01.2.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.150.000,00	38.148.120,00	(1.880,00)	100,00	
5.03.01.2.09.0009	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	503.677.000,00	497.949.139,00	(5.727.861,00)	98,86	
5.03.01.2.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	503.677.000,00	497.949.139,00	(5.727.861,00)	98,86	
5.03.01.2.09.0009.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.03.01.2.09.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	503.677.000,00	497.949.139,00	(5.727.861,00)	98,86	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.784.307.850,00	940.475.950,00	(843.831.900,00)	52,71	
5.03.02.2.01	PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	908.567.800,00	447.120.000,00	(461.447.800,00)	49,21	
5.03.02.2.01.0003	KOORDINASI DAN FASILITASI PENGADAAN PNS DAN PPPK	465.032.400,00	21.505.400,00	(443.527.000,00)	4,62	
5.03.02.2.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	465.032.400,00	21.505.400,00	(443.527.000,00)	4,62	
5.03.02.2.01.0003.5.1.01	Belanja Pegawai	8.410.000,00	5.640.000,00	(2.770.000,00)	67,06	
5.03.02.2.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	456.622.400,00	15.865.400,00	(440.757.000,00)	3,47	
5.03.02.2.01.0006	KOORDINASI PELAKSANAAN ADMINISTRASIRNNPEMBERHENTIAN	30.998.100,00	27.650.000,00	(3.348.100,00)	89,20	
5.03.02.2.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	30.998.100,00	27.650.000,00	(3.348.100,00)	89,20	
5.03.02.2.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.998.100,00	27.650.000,00	(3.348.100,00)	89,20	
5.03.02.2.01.0008	FASILITASI LEMBAGA PROFESI ASN	103.277.300,00	102.626.600,00	(650.700,00)	99,37	
5.03.02.2.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	103.277.300,00	102.626.600,00	(650.700,00)	99,37	
5.03.02.2.01.0008.5.1.01	Belanja Pegawai	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	100,00	
5.03.02.2.01.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.587.300,00	100.936.600,00	(650.700,00)	99,36	
5.03.02.2.01.0010	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	286.170.000,00	284.870.000,00	(1.300.000,00)	99,55	
5.03.02.2.01.0010.5.1	BELANJA OPERASI	286.170.000,00	284.870.000,00	(1.300.000,00)	99,55	
5.03.02.2.01.0010.5.1.01	Belanja Pegawai	9.220.000,00	9.220.000,00	0,00	100,00	
5.03.02.2.01.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	276.950.000,00	275.650.000,00	(1.300.000,00)	99,53	
5.03.02.2.01.0011	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	23.090.000,00	10.468.000,00	(12.622.000,00)	45,34	
5.03.02.2.01.0011.5.1	BELANJA OPERASI	23.090.000,00	10.468.000,00	(12.622.000,00)	45,34	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.03.02.2.01.0011.5.1.01	Belanja Pegawai	4.160.000,00	4.160.000,00	0,00	100,00	
5.03.02.2.01.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.930.000,00	6.308.000,00	(12.622.000,00)	33,32	
5.03.02.2.02	MUTASI DAN PROMOSI ASN	222.277.900,00	113.962.000,00	(108.315.900,00)	51,27	
5.03.02.2.02.0001	PENGELOLAAN MUTASI ASN	115.500.000,00	24.481.000,00	(91.019.000,00)	21,20	
5.03.02.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	115.500.000,00	24.481.000,00	(91.019.000,00)	21,20	
5.03.02.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	5.800.000,00	4.840.000,00	(960.000,00)	83,45	
5.03.02.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.700.000,00	19.641.000,00	(90.059.000,00)	17,90	
5.03.02.2.02.0002	PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT ASN	106.777.900,00	89.481.000,00	(17.296.900,00)	83,80	
5.03.02.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	106.777.900,00	89.481.000,00	(17.296.900,00)	83,80	
5.03.02.2.02.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	4.840.000,00	4.840.000,00	0,00	100,00	
5.03.02.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.937.900,00	84.641.000,00	(17.296.900,00)	83,03	
5.03.02.2.03	PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	583.997.000,00	320.750.700,00	(263.246.300,00)	54,92	
5.03.02.2.03.0002	PENGELOLAAN ASSESSMENT CENTER	129.817.000,00	104.083.800,00	(25.733.200,00)	80,18	
5.03.02.2.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	129.817.000,00	104.083.800,00	(25.733.200,00)	80,18	
5.03.02.2.03.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.817.000,00	104.083.800,00	(25.733.200,00)	80,18	
5.03.02.2.03.0004	PENGELOLAAN PENDIDIKAN LANJUTAN ASN	454.180.000,00	216.666.900,00	(237.513.100,00)	47,71	
5.03.02.2.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	454.180.000,00	216.666.900,00	(237.513.100,00)	47,71	
5.03.02.2.03.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	454.180.000,00	216.666.900,00	(237.513.100,00)	47,71	
5.03.02.2.04	PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	69.465.150,00	58.643.250,00	(10.821.900,00)	84,42	
5.03.02.2.04.0002	PELAKSANAAN PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	54.323.050,00	51.886.750,00	(2.436.300,00)	95,52	
5.03.02.2.04.0002.5.1	BELANJA OPERASI	54.323.050,00	51.886.750,00	(2.436.300,00)	95,52	
5.03.02.2.04.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	100,00	
5.03.02.2.04.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.633.050,00	50.196.750,00	(2.436.300,00)	95,37	
5.03.02.2.04.0004	PENGELOLAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI	8.702.100,00	675.000,00	(8.027.100,00)	7,76	
5.03.02.2.04.0004.5.1	BELANJA OPERASI	8.702.100,00	675.000,00	(8.027.100,00)	7,76	
5.03.02.2.04.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.702.100,00	675.000,00	(8.027.100,00)	7,76	
5.03.02.2.04.0007	PEMBINAAN DISIPLIN ASN	6.440.000,00	6.081.500,00	(358.500,00)	94,43	
5.03.02.2.04.0007.5.1	BELANJA OPERASI	6.440.000,00	6.081.500,00	(358.500,00)	94,43	
5.03.02.2.04.0007.5.1.01	Belanja Pegawai	4.040.000,00	4.040.000,00	0,00	100,00	
5.03.02.2.04.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.041.500,00	(358.500,00)	85,06	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.227.220.518,00	2.051.784.288,00	(175.436.230,00)	92,12	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.04.02.2.01	PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS	991.970.730,00	927.340.263,00	(64.630.467,00)	93,48	
5.04.02.2.01.0001	PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS UMUM, INTI, DAN PILIHAN BAGI JABATAN ADMINISTRASI PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN, PERANGKAT DAERAH PENUNJANG, DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	100,00	
5.04.02.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	100,00	
5.04.02.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	100,00	
5.04.02.2.01.0003	PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS UMUM, INTI, DAN PILIHAN BAGI JABATAN ADMINISTRASI PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN, PERANGKAT DAERAH PENUNJANG, DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	976.070.730,00	911.440.263,00	(64.630.467,00)	93,38	
5.04.02.2.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	976.070.730,00	911.440.263,00	(64.630.467,00)	93,38	
5.04.02.2.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	976.070.730,00	911.440.263,00	(64.630.467,00)	93,38	
5.04.02.2.02	SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL	1.235.249.788,00	1.124.444.025,00	(110.805.763,00)	91,03	
5.04.02.2.02.0001	PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN RENCANA SERTIFIKASI KOMPETENSI, PENGELOLAAN KELEMBAGAAN, TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI, SUMBER BELAJAR, KERJA SAMA, PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI, KEPEMIMPINAN DAN PRAJABATAN, SERTA JABATAN FUNGSIONAL	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00	
5.04.02.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00	
5.04.02.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00	
5.04.02.2.02.0007	PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PIMPINAN DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN FUNGSIONAL, KEPEMIMPINAN, DAN PRAJABATAN	1.218.449.788,00	1.107.644.025,00	(110.805.763,00)	90,91	
5.04.02.2.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	1.218.449.788,00	1.107.644.025,00	(110.805.763,00)	90,91	
5.04.02.2.02.0007.5.1.01	Belanja Pegawai	22.920.000,00	22.920.000,00	0,00	100,00	
5.04.02.2.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.195.529.788,00	1.084.724.025,00	(110.805.763,00)	90,73	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	23.689.704.151,00	22.028.560.559,00	(1.661.143.592,00)	92,99	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(23.689.704.151,00)	(22.028.560.559,00)	1.661.143.592,00	92,99	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(23.689.704.151,00)	(22.028.560.559,00)	1.661.143.592,00	92,99	





6.01.0.00.0.00.29.0000

INSPEKTORAT



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH

Satuan Kerja : 6.01.0.00.0.00.29.0000 INSPEKTORAT

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.017.507.153,00	25.217.744.560,00	(799.762.593,00)	96,93	
6.01.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	150.562.200,00	131.707.750,00	(18.854.450,00)	87,48	
6.01.01.2.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	6.547.800,00	4.694.250,00	(1.853.550,00)	71,69	
6.01.01.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	6.547.800,00	4.694.250,00	(1.853.550,00)	71,69	
6.01.01.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.547.800,00	4.694.250,00	(1.853.550,00)	71,69	
6.01.01.2.01.0007	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	144.014.400,00	127.013.500,00	(17.000.900,00)	88,19	
6.01.01.2.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	144.014.400,00	127.013.500,00	(17.000.900,00)	88,19	
6.01.01.2.01.0007.5.1.01	Belanja Pegawai	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	100,00	
6.01.01.2.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.714.400,00	108.713.500,00	(17.000.900,00)	86,48	
6.01.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	21.303.160.464,00	21.292.744.940,00	(10.415.524,00)	99,95	
6.01.01.2.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	21.259.880.464,00	21.249.784.940,00	(10.095.524,00)	99,95	
6.01.01.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	21.259.880.464,00	21.249.784.940,00	(10.095.524,00)	99,95	
6.01.01.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	21.259.880.464,00	21.249.784.940,00	(10.095.524,00)	99,95	
6.01.01.2.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	43.280.000,00	42.960.000,00	(320.000,00)	99,26	
6.01.01.2.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	43.280.000,00	42.960.000,00	(320.000,00)	99,26	
6.01.01.2.02.0007.5.1.01	Belanja Pegawai	42.960.000,00	42.960.000,00	0,00	100,00	
6.01.01.2.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	320.000,00	0,00	(320.000,00)	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6.01.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	741.740.000,00	539.983.000,00	(201.757.000,00)	72,80	
6.01.01.2.05.0011	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	741.740.000,00	539.983.000,00	(201.757.000,00)	72,80	
6.01.01.2.05.0011.5.1	BELANJA OPERASI	741.740.000,00	539.983.000,00	(201.757.000,00)	72,80	
6.01.01.2.05.0011.5.1.01	Belanja Pegawai	10.140.000,00	5.070.000,00	(5.070.000,00)	50,00	
6.01.01.2.05.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	731.600.000,00	534.913.000,00	(196.687.000,00)	73,12	
6.01.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	988.570.310,00	711.062.420,00	(277.507.890,00)	71,93	
6.01.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	95.295.600,00	77.878.800,00	(17.416.800,00)	81,72	
6.01.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	95.295.600,00	77.878.800,00	(17.416.800,00)	81,72	
6.01.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.295.600,00	77.878.800,00	(17.416.800,00)	81,72	
6.01.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	54.748.710,00	46.081.499,00	(8.667.211,00)	84,17	
6.01.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	54.748.710,00	46.081.499,00	(8.667.211,00)	84,17	
6.01.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.748.710,00	46.081.499,00	(8.667.211,00)	84,17	
6.01.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	44.535.000,00	32.026.000,00	(12.509.000,00)	71,91	
6.01.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	44.535.000,00	32.026.000,00	(12.509.000,00)	71,91	
6.01.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.535.000,00	32.026.000,00	(12.509.000,00)	71,91	
6.01.01.2.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	692.401.000,00	454.747.121,00	(237.653.879,00)	65,68	
6.01.01.2.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	692.401.000,00	454.747.121,00	(237.653.879,00)	65,68	
6.01.01.2.06.0009.5.1.01	Belanja Pegawai	33.540.000,00	31.170.000,00	(2.370.000,00)	92,93	
6.01.01.2.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	658.861.000,00	423.577.121,00	(235.283.879,00)	64,29	
6.01.01.2.06.0011	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	101.590.000,00	100.329.000,00	(1.261.000,00)	98,76	
6.01.01.2.06.0011.5.1	BELANJA OPERASI	101.590.000,00	100.329.000,00	(1.261.000,00)	98,76	
6.01.01.2.06.0011.5.1.01	Belanja Pegawai	6.740.000,00	6.060.000,00	(680.000,00)	89,91	
6.01.01.2.06.0011.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.850.000,00	94.269.000,00	(581.000,00)	99,39	
6.01.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	981.126.300,00	922.191.800,00	(58.934.500,00)	93,99	
6.01.01.2.07.0001	PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	660.000.000,00	616.154.000,00	(43.846.000,00)	93,36	
6.01.01.2.07.0001.5.2	BELANJA MODAL	660.000.000,00	616.154.000,00	(43.846.000,00)	93,36	
6.01.01.2.07.0001.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	660.000.000,00	616.154.000,00	(43.846.000,00)	93,36	
6.01.01.2.07.0005	PENGADAAN MEBEL	88.439.600,00	83.210.000,00	(5.229.600,00)	94,09	
6.01.01.2.07.0005.5.1	BELANJA OPERASI	5.670.000,00	1.890.000,00	(3.780.000,00)	33,33	
6.01.01.2.07.0005.5.1.01	Belanja Pegawai	5.670.000,00	1.890.000,00	(3.780.000,00)	33,33	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6.01.01.2.07.0005.5.2	BELANJA MODAL	82.769.600,00	81.320.000,00	(1.449.600,00)	98,25	
6.01.01.2.07.0005.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.769.600,00	81.320.000,00	(1.449.600,00)	98,25	
6.01.01.2.07.0006	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	232.686.700,00	222.827.800,00	(9.858.900,00)	95,76	
6.01.01.2.07.0006.5.1	BELANJA OPERASI	11.127.800,00	3.369.800,00	(7.758.000,00)	30,28	
6.01.01.2.07.0006.5.1.01	Belanja Pegawai	9.450.000,00	1.890.000,00	(7.560.000,00)	20,00	
6.01.01.2.07.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.677.800,00	1.479.800,00	(198.000,00)	88,20	
6.01.01.2.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	221.558.900,00	219.458.000,00	(2.100.900,00)	99,05	
6.01.01.2.07.0006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	221.558.900,00	219.458.000,00	(2.100.900,00)	99,05	
6.01.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	624.101.279,00	519.774.398,00	(104.326.881,00)	83,28	
6.01.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	190.647.695,00	121.903.744,00	(68.743.951,00)	63,94	
6.01.01.2.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	190.647.695,00	121.903.744,00	(68.743.951,00)	63,94	
6.01.01.2.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.647.695,00	121.903.744,00	(68.743.951,00)	63,94	
6.01.01.2.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	433.453.584,00	397.870.654,00	(35.582.930,00)	91,79	
6.01.01.2.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	433.453.584,00	397.870.654,00	(35.582.930,00)	91,79	
6.01.01.2.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	433.453.584,00	397.870.654,00	(35.582.930,00)	91,79	
6.01.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.228.246.600,00	1.100.280.252,00	(127.966.348,00)	89,58	
6.01.01.2.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	268.190.000,00	199.941.340,00	(68.248.660,00)	74,55	
6.01.01.2.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	268.190.000,00	199.941.340,00	(68.248.660,00)	74,55	
6.01.01.2.09.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	268.190.000,00	199.941.340,00	(68.248.660,00)	74,55	
6.01.01.2.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	67.620.000,00	39.653.800,00	(27.966.200,00)	58,64	
6.01.01.2.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	67.620.000,00	39.653.800,00	(27.966.200,00)	58,64	
6.01.01.2.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.620.000,00	39.653.800,00	(27.966.200,00)	58,64	
6.01.01.2.09.0009	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	892.436.600,00	860.685.112,00	(31.751.488,00)	96,44	
6.01.01.2.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	892.436.600,00	860.685.112,00	(31.751.488,00)	96,44	
6.01.01.2.09.0009.5.1.01	Belanja Pegawai	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
6.01.01.2.09.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	884.636.600,00	852.885.112,00	(31.751.488,00)	96,41	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	245.707.200,00	233.642.500,00	(12.064.700,00)	95,09	
6.01.02.2.01	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	224.549.200,00	213.822.500,00	(10.726.700,00)	95,22	
6.01.02.2.01.0001	PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	20.092.400,00	15.779.500,00	(4.312.900,00)	78,53	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6.01.02.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	20.092.400,00	15.779.500,00	(4.312.900,00)	78,53	
6.01.02.2.01.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	7.070.000,00	7.070.000,00	0,00	100,00	
6.01.02.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.022.400,00	8.709.500,00	(4.312.900,00)	66,88	
6.01.02.2.01.0003	REVIU LAPORAN KINERJA	16.990.000,00	16.900.000,00	(90.000,00)	99,47	
6.01.02.2.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	16.990.000,00	16.900.000,00	(90.000,00)	99,47	
6.01.02.2.01.0003.5.1.01	Belanja Pegawai	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	100,00	
6.01.02.2.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.940.000,00	11.850.000,00	(90.000,00)	99,25	
6.01.02.2.01.0004	REVIU LAPORAN KEUANGAN	68.888.800,00	63.760.000,00	(5.128.800,00)	92,55	
6.01.02.2.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	68.888.800,00	63.760.000,00	(5.128.800,00)	92,55	
6.01.02.2.01.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	5.320.000,00	5.320.000,00	0,00	100,00	
6.01.02.2.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.568.800,00	58.440.000,00	(5.128.800,00)	91,93	
6.01.02.2.01.0006	KERJA SAMA PENGAWASAN INTERNAL	118.578.000,00	117.383.000,00	(1.195.000,00)	98,99	
6.01.02.2.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	118.578.000,00	117.383.000,00	(1.195.000,00)	98,99	
6.01.02.2.01.0006.5.1.01	Belanja Pegawai	14.520.000,00	14.520.000,00	0,00	100,00	
6.01.02.2.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.058.000,00	102.863.000,00	(1.195.000,00)	98,85	
6.01.02.2.02	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	21.158.000,00	19.820.000,00	(1.338.000,00)	93,68	
6.01.02.2.02.0001	PENANGANAN PENYELESAIAN KERUGIANRRNNNEGARA/DAERAH	21.158.000,00	19.820.000,00	(1.338.000,00)	93,68	
6.01.02.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	21.158.000,00	19.820.000,00	(1.338.000,00)	93,68	
6.01.02.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.158.000,00	19.820.000,00	(1.338.000,00)	93,68	
6.01.02.2.02.0002	PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.01.02.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.01.02.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	421.717.000,00	337.873.000,00	(83.844.000,00)	80,12	
6.01.03.2.02	PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	421.717.000,00	337.873.000,00	(83.844.000,00)	80,12	
6.01.03.2.02.0001	PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	308.118.000,00	231.142.000,00	(76.976.000,00)	75,02	
6.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	308.118.000,00	231.142.000,00	(76.976.000,00)	75,02	
6.01.03.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	13.530.000,00	11.840.000,00	(1.690.000,00)	87,51	
6.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	294.588.000,00	219.302.000,00	(75.286.000,00)	74,44	
6.01.03.2.02.0002	PENDAMPINGAN, ASISTENSI, VERIFIKASI, DAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI	65.235.000,00	60.145.000,00	(5.090.000,00)	92,20	
6.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	65.235.000,00	60.145.000,00	(5.090.000,00)	92,20	
6.01.03.2.02.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	12.580.000,00	12.580.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6.01.03.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.655.000,00	47.565.000,00	(5.090.000,00)	90,33	
6.01.03.2.02.0004	PENDAMPINGAN, ASISTENSI DAN VERIFIKASI PENEGAKAN INTEGRITAS	48.364.000,00	46.586.000,00	(1.778.000,00)	96,32	
6.01.03.2.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	48.364.000,00	46.586.000,00	(1.778.000,00)	96,32	
6.01.03.2.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.364.000,00	46.586.000,00	(1.778.000,00)	96,32	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	26.684.931.353,00	25.789.260.060,00	(895.671.293,00)	96,64	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(26.684.931.353,00)	(25.789.260.060,00)	895.671.293,00	96,64	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(26.684.931.353,00)	(25.789.260.060,00)	895.671.293,00	96,64	





7.01.2.13.0.00.31.0000

KECAMATAN BOGOR UTARA



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.31.0000 KECAMATAN BOGOR UTARA

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
2.13.05.2.01	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
2.13.05.2.01.0003	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
2.13.05.2.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
2.13.05.2.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.147.788.115,00	21.798.867.463,00	(348.920.652,00)	98,42	
7.01.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	10.312.200,00	10.312.100,00	(100,00)	100,00	
7.01.01.2.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	7.235.900,00	7.235.900,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	7.235.900,00	7.235.900,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.01.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	4.040.000,00	4.040.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.195.900,00	3.195.900,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	3.076.300,00	3.076.200,00	(100,00)	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01.01.2.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	3.076.300,00	3.076.200,00	(100,00)	100,00	
7.01.01.2.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.076.300,00	3.076.200,00	(100,00)	100,00	
7.01.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	16.836.360.399,00	16.775.149.040,00	(61.211.359,00)	99,64	
7.01.01.2.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	16.782.985.299,00	16.721.773.940,00	(61.211.359,00)	99,64	
7.01.01.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	16.782.985.299,00	16.721.773.940,00	(61.211.359,00)	99,64	
7.01.01.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	16.782.985.299,00	16.721.773.940,00	(61.211.359,00)	99,64	
7.01.01.2.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	4.557.300,00	4.557.300,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	4.557.300,00	4.557.300,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.557.300,00	4.557.300,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	48.817.800,00	48.817.800,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	48.817.800,00	48.817.800,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.02.0007.5.1.01	Belanja Pegawai	42.960.000,00	42.960.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.857.800,00	5.857.800,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.540.890.400,00	1.342.344.252,00	(198.546.148,00)	87,11	
7.01.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10.346.000,00	7.070.000,00	(3.276.000,00)	68,34	
7.01.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	10.346.000,00	7.070.000,00	(3.276.000,00)	68,34	
7.01.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.346.000,00	7.070.000,00	(3.276.000,00)	68,34	
7.01.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	961.300.600,00	782.572.150,00	(178.728.450,00)	81,41	
7.01.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	169.859.100,00	163.697.150,00	(6.161.950,00)	96,37	
7.01.01.2.06.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	40.060.000,00	40.060.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.799.100,00	123.637.150,00	(6.161.950,00)	95,25	
7.01.01.2.06.0002.5.2	BELANJA MODAL	791.441.500,00	618.875.000,00	(172.566.500,00)	78,20	
7.01.01.2.06.0002.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	791.441.500,00	618.875.000,00	(172.566.500,00)	78,20	
7.01.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	12.007.800,00	10.664.000,00	(1.343.800,00)	88,81	
7.01.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	12.007.800,00	10.664.000,00	(1.343.800,00)	88,81	
7.01.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.007.800,00	10.664.000,00	(1.343.800,00)	88,81	
7.01.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	359.235.000,00	357.224.600,00	(2.010.400,00)	99,44	
7.01.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	359.235.000,00	357.224.600,00	(2.010.400,00)	99,44	
7.01.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	359.235.000,00	357.224.600,00	(2.010.400,00)	99,44	
7.01.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	22.733.000,00	20.454.800,00	(2.278.200,00)	89,98	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	22.733.000,00	20.454.800,00	(2.278.200,00)	89,98	
7.01.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.733.000,00	20.454.800,00	(2.278.200,00)	89,98	
7.01.01.2.06.0006	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4.700.000,00	4.620.000,00	(80.000,00)	98,30	
7.01.01.2.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	4.700.000,00	4.620.000,00	(80.000,00)	98,30	
7.01.01.2.06.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	4.620.000,00	(80.000,00)	98,30	
7.01.01.2.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	170.568.000,00	159.738.702,00	(10.829.298,00)	93,65	
7.01.01.2.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	170.568.000,00	159.738.702,00	(10.829.298,00)	93,65	
7.01.01.2.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.568.000,00	159.738.702,00	(10.829.298,00)	93,65	
7.01.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.101.459.116,00	2.079.351.666,00	(22.107.450,00)	98,95	
7.01.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	276.960.300,00	264.213.170,00	(12.747.130,00)	95,40	
7.01.01.2.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	276.960.300,00	264.213.170,00	(12.747.130,00)	95,40	
7.01.01.2.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	276.960.300,00	264.213.170,00	(12.747.130,00)	95,40	
7.01.01.2.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.824.498.816,00	1.815.138.496,00	(9.360.320,00)	99,49	
7.01.01.2.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.824.498.816,00	1.815.138.496,00	(9.360.320,00)	99,49	
7.01.01.2.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.824.498.816,00	1.815.138.496,00	(9.360.320,00)	99,49	
7.01.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.658.766.000,00	1.591.710.405,00	(67.055.595,00)	95,96	
7.01.01.2.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	161.400.000,00	147.986.451,00	(13.413.549,00)	91,69	
7.01.01.2.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	161.400.000,00	147.986.451,00	(13.413.549,00)	91,69	
7.01.01.2.09.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.400.000,00	147.986.451,00	(13.413.549,00)	91,69	
7.01.01.2.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	60.820.000,00	60.700.000,00	(120.000,00)	99,80	
7.01.01.2.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	60.820.000,00	60.700.000,00	(120.000,00)	99,80	
7.01.01.2.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.820.000,00	60.700.000,00	(120.000,00)	99,80	
7.01.01.2.09.0009	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	1.436.546.000,00	1.383.023.954,00	(53.522.046,00)	96,27	
7.01.01.2.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	595.114.000,00	592.226.649,00	(2.887.351,00)	99,51	
7.01.01.2.09.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	595.114.000,00	592.226.649,00	(2.887.351,00)	99,51	
7.01.01.2.09.0009.5.2	BELANJA MODAL	841.432.000,00	790.797.305,00	(50.634.695,00)	93,98	
7.01.01.2.09.0009.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	841.432.000,00	790.797.305,00	(50.634.695,00)	93,98	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	222.101.200,00	217.223.700,00	(4.877.500,00)	97,80	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01.02.2.01	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATANNNPEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	172.244.400,00	167.396.900,00	(4.847.500,00)	97,19	
7.01.02.2.01.0001	KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT	172.244.400,00	167.396.900,00	(4.847.500,00)	97,19	
7.01.02.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	172.244.400,00	167.396.900,00	(4.847.500,00)	97,19	
7.01.02.2.01.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00	
7.01.02.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.224.400,00	165.376.900,00	(4.847.500,00)	97,15	
7.01.02.2.02	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	49.856.800,00	49.826.800,00	(30.000,00)	99,94	
7.01.02.2.02.0001	PERENCANAAN KEGIATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN	47.857.000,00	47.827.000,00	(30.000,00)	99,94	
7.01.02.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	47.857.000,00	47.827.000,00	(30.000,00)	99,94	
7.01.02.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	100,00	
7.01.02.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.827.000,00	44.797.000,00	(30.000,00)	99,93	
7.01.02.2.02.0003	PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	1.999.800,00	1.999.800,00	0,00	100,00	
7.01.02.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.999.800,00	1.999.800,00	0,00	100,00	
7.01.02.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.999.800,00	1.999.800,00	0,00	100,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	374.299.100,00	372.112.900,00	(2.186.200,00)	99,42	
7.01.03.2.03	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	374.299.100,00	372.112.900,00	(2.186.200,00)	99,42	
7.01.03.2.03.0001	PENYELENGGARAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	274.299.700,00	272.435.400,00	(1.864.300,00)	99,32	
7.01.03.2.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	274.299.700,00	272.435.400,00	(1.864.300,00)	99,32	
7.01.03.2.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	274.299.700,00	272.435.400,00	(1.864.300,00)	99,32	
7.01.03.2.03.0002	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN	49.999.800,00	49.799.300,00	(200.500,00)	99,60	
7.01.03.2.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	49.999.800,00	49.799.300,00	(200.500,00)	99,60	
7.01.03.2.03.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	12.120.000,00	12.120.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.03.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.879.800,00	37.679.300,00	(200.500,00)	99,47	
7.01.03.2.03.0004	FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT	39.999.900,00	39.999.900,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	39.999.900,00	39.999.900,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.03.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.03.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.969.900,00	36.969.900,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.03.0005	FASILITASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	9.999.700,00	9.878.300,00	(121.400,00)	98,79	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01.03.2.03.0005.5.1	BELANJA OPERASI	9.999.700,00	9.878.300,00	(121.400,00)	98,79	
7.01.03.2.03.0005.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.03.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.989.700,00	8.868.300,00	(121.400,00)	98,65	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	78.018.400,00	70.393.900,00	(7.624.500,00)	90,23	
7.01.04.2.01	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	78.018.400,00	70.393.900,00	(7.624.500,00)	90,23	
7.01.04.2.01.0001	SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	78.018.400,00	70.393.900,00	(7.624.500,00)	90,23	
7.01.04.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	78.018.400,00	70.393.900,00	(7.624.500,00)	90,23	
7.01.04.2.01.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	11.110.000,00	4.040.000,00	(7.070.000,00)	36,36	
7.01.04.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.908.400,00	66.353.900,00	(554.500,00)	99,17	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	22.828.806.815,00	22.465.197.963,00	(363.608.852,00)	98,41	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(22.828.806.815,00)	(22.465.197.963,00)	363.608.852,00	98,41	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(22.828.806.815,00)	(22.465.197.963,00)	363.608.852,00	98,41	





7.01.2.13.0.00.31.0000

KECAMATAN BOGOR UTARA

KELURAHAN TEGAL GUNDIL



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.31.0000 KECAMATAN BOGOR UTARA
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.31.0001 KELURAHAN TEGAL GUNDIL

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	107.593.600,00	107.423.600,00	(170.000,00)	99,84	
2.13.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	107.593.600,00	107.423.600,00	(170.000,00)	99,84	
2.13.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	13.035.900,00	12.894.000,00	(141.900,00)	98,91	
2.13.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	13.035.900,00	12.894.000,00	(141.900,00)	98,91	
2.13.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.035.900,00	12.894.000,00	(141.900,00)	98,91	
2.13.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	1.363.600,00	1.335.500,00	(28.100,00)	97,94	
2.13.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.363.600,00	1.335.500,00	(28.100,00)	97,94	
2.13.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.363.600,00	1.335.500,00	(28.100,00)	97,94	
2.13.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	86.010.000,00	86.010.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	86.010.000,00	86.010.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	30.120.000,00	30.120.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.890.000,00	55.890.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	7.184.100,00	7.184.100,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	7.184.100,00	7.184.100,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.184.100,00	7.184.100,00	0,00	100,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	804.525.000,00	803.372.138,00	(1.152.862,00)	99,86	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	804.525.000,00	803.372.138,00	(1.152.862,00)	99,86	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	12.375.000,00	12.375.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	12.375.000,00	12.375.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.375.000,00	12.375.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	224.834.500,00	223.877.138,00	(957.362,00)	99,57	
7.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	149.834.500,00	149.360.105,00	(474.395,00)	99,68	
7.01.03.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.834.500,00	149.360.105,00	(474.395,00)	99,68	
7.01.03.2.02.0002.5.2	BELANJA MODAL	75.000.000,00	74.517.033,00	(482.967,00)	99,36	
7.01.03.2.02.0002.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	75.000.000,00	74.517.033,00	(482.967,00)	99,36	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	567.315.500,00	567.120.000,00	(195.500,00)	99,97	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	567.315.500,00	567.120.000,00	(195.500,00)	99,97	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	567.315.500,00	567.120.000,00	(195.500,00)	99,97	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	912.118.600,00	910.795.738,00	(1.322.862,00)	99,85	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(912.118.600,00)	(910.795.738,00)	1.322.862,00	99,85	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(912.118.600,00)	(910.795.738,00)	1.322.862,00	99,85	





7.01.2.13.0.00.31.0000

KECAMATAN BOGOR UTARA

KELURAHAN BANTARJATI



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.31.0000 KECAMATAN BOGOR UTARA
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.31.0002 KELURAHAN BANTARJATI

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	109.364.600,00	107.524.100,00	(1.840.500,00)	98,32	
2.13.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	109.364.600,00	107.524.100,00	(1.840.500,00)	98,32	
2.13.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.608.000,00	3.499.400,00	(108.600,00)	96,99	
2.13.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	3.608.000,00	3.499.400,00	(108.600,00)	96,99	
2.13.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.608.000,00	3.499.400,00	(108.600,00)	96,99	
2.13.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	9.563.300,00	9.563.300,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	9.563.300,00	9.563.300,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.563.300,00	9.563.300,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	7.763.500,00	7.102.000,00	(661.500,00)	91,48	
2.13.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	7.763.500,00	7.102.000,00	(661.500,00)	91,48	
2.13.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.763.500,00	7.102.000,00	(661.500,00)	91,48	
2.13.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	84.785.400,00	83.715.000,00	(1.070.400,00)	98,74	
2.13.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	84.785.400,00	83.715.000,00	(1.070.400,00)	98,74	
2.13.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	30.120.000,00	30.120.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.665.400,00	53.595.000,00	(1.070.400,00)	98,04	
2.13.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.644.400,00	3.644.400,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.13.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	3.644.400,00	3.644.400,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.644.400,00	3.644.400,00	0,00	100,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	649.807.000,00	648.068.700,00	(1.738.300,00)	99,73	
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	649.807.000,00	648.068.700,00	(1.738.300,00)	99,73	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	9.907.300,00	9.907.300,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	9.907.300,00	9.907.300,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.907.300,00	9.907.300,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	224.294.700,00	222.556.400,00	(1.738.300,00)	99,22	
7.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	966.300,00	0,00	(966.300,00)	0,00	
7.01.03.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	966.300,00	0,00	(966.300,00)	0,00	
7.01.03.2.02.0002.5.2	BELANJA MODAL	223.328.400,00	222.556.400,00	(772.000,00)	99,65	
7.01.03.2.02.0002.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	68.000.000,00	67.781.910,00	(218.090,00)	99,68	
7.01.03.2.02.0002.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	155.328.400,00	154.774.490,00	(553.910,00)	99,64	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	415.605.000,00	415.605.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	415.605.000,00	415.605.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	415.605.000,00	415.605.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	759.171.600,00	755.592.800,00	(3.578.800,00)	99,53	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(759.171.600,00)	(755.592.800,00)	3.578.800,00	99,53	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(759.171.600,00)	(755.592.800,00)	3.578.800,00	99,53	





7.01.2.13.0.00.31.0000

KECAMATAN BOGOR UTARA

KELURAHAN CIBULUH



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.31.0000 KECAMATAN BOGOR UTARA
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.31.0003 KELURAHAN CIBULUH

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	96.929.700,00	95.341.650,00	(1.588.050,00)	98,36	
2.13.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	96.929.700,00	95.341.650,00	(1.588.050,00)	98,36	
2.13.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.089.400,00	2.421.600,00	(667.800,00)	78,38	
2.13.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	3.089.400,00	2.421.600,00	(667.800,00)	78,38	
2.13.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.089.400,00	2.421.600,00	(667.800,00)	78,38	
2.13.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	7.567.200,00	6.986.600,00	(580.600,00)	92,33	
2.13.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	7.567.200,00	6.986.600,00	(580.600,00)	92,33	
2.13.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.567.200,00	6.986.600,00	(580.600,00)	92,33	
2.13.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	3.566.400,00	3.228.000,00	(338.400,00)	90,51	
2.13.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	3.566.400,00	3.228.000,00	(338.400,00)	90,51	
2.13.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.566.400,00	3.228.000,00	(338.400,00)	90,51	
2.13.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	77.550.000,00	77.550.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	77.550.000,00	77.550.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	30.120.000,00	30.120.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.430.000,00	47.430.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	5.156.700,00	5.155.450,00	(1.250,00)	99,98	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.13.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	5.156.700,00	5.155.450,00	(1.250,00)	99,98	
2.13.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.156.700,00	5.155.450,00	(1.250,00)	99,98	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	642.658.100,00	637.899.500,00	(4.758.600,00)	99,26	
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	642.658.100,00	637.899.500,00	(4.758.600,00)	99,26	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	11.038.200,00	11.038.200,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	11.038.200,00	11.038.200,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.038.200,00	11.038.200,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	324.043.400,00	321.035.100,00	(3.008.300,00)	99,07	
7.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	120.493.900,00	119.547.900,00	(946.000,00)	99,21	
7.01.03.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.493.900,00	119.547.900,00	(946.000,00)	99,21	
7.01.03.2.02.0002.5.2	BELANJA MODAL	203.549.500,00	201.487.200,00	(2.062.300,00)	98,99	
7.01.03.2.02.0002.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	203.549.500,00	201.487.200,00	(2.062.300,00)	98,99	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	307.576.500,00	305.826.200,00	(1.750.300,00)	99,43	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	307.576.500,00	305.826.200,00	(1.750.300,00)	99,43	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	307.576.500,00	305.826.200,00	(1.750.300,00)	99,43	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	739.587.800,00	733.241.150,00	(6.346.650,00)	99,14	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(739.587.800,00)	(733.241.150,00)	6.346.650,00	99,14	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(739.587.800,00)	(733.241.150,00)	6.346.650,00	99,14	





7.01.2.13.0.00.31.0000

KECAMATAN BOGOR UTARA

KELURAHAN KEDUNG HALANG



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.31.0000 KECAMATAN BOGOR UTARA
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.31.0004 KELURAHAN KEDUNG HALANG

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	109.650.000,00	108.848.200,00	(801.800,00)	99,27	
2.13.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	109.650.000,00	108.848.200,00	(801.800,00)	99,27	
2.13.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.187.000,00	1.150.000,00	(37.000,00)	96,88	
2.13.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.187.000,00	1.150.000,00	(37.000,00)	96,88	
2.13.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.187.000,00	1.150.000,00	(37.000,00)	96,88	
2.13.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	12.926.200,00	12.578.200,00	(348.000,00)	97,31	
2.13.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	12.926.200,00	12.578.200,00	(348.000,00)	97,31	
2.13.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.926.200,00	12.578.200,00	(348.000,00)	97,31	
2.13.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	3.843.600,00	3.426.800,00	(416.800,00)	89,16	
2.13.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	3.843.600,00	3.426.800,00	(416.800,00)	89,16	
2.13.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.843.600,00	3.426.800,00	(416.800,00)	89,16	
2.13.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	88.620.000,00	88.620.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	88.620.000,00	88.620.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	30.120.000,00	30.120.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.500.000,00	58.500.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.073.200,00	3.073.200,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.13.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	3.073.200,00	3.073.200,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.073.200,00	3.073.200,00	0,00	100,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	866.130.500,00	863.558.734,00	(2.571.766,00)	99,70	
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	866.130.500,00	863.558.734,00	(2.571.766,00)	99,70	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	10.357.500,00	10.357.500,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	10.357.500,00	10.357.500,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.357.500,00	10.357.500,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	424.973.000,00	422.401.234,00	(2.571.766,00)	99,39	
7.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	124.973.000,00	124.319.000,00	(654.000,00)	99,48	
7.01.03.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.973.000,00	124.319.000,00	(654.000,00)	99,48	
7.01.03.2.02.0002.5.2	BELANJA MODAL	300.000.000,00	298.082.234,00	(1.917.766,00)	99,36	
7.01.03.2.02.0002.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	300.000.000,00	298.082.234,00	(1.917.766,00)	99,36	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	430.800.000,00	430.800.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	430.800.000,00	430.800.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	430.800.000,00	430.800.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	975.780.500,00	972.406.934,00	(3.373.566,00)	99,65	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(975.780.500,00)	(972.406.934,00)	3.373.566,00	99,65	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(975.780.500,00)	(972.406.934,00)	3.373.566,00	99,65	





7.01.2.13.0.00.31.0000

KECAMATAN BOGOR UTARA

KELURAHAN CIPARIGI



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.31.0000 KECAMATAN BOGOR UTARA
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.31.0005 KELURAHAN CIPARIGI

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	111.137.900,00	109.823.900,00	(1.314.000,00)	98,82	
2.13.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	111.137.900,00	109.823.900,00	(1.314.000,00)	98,82	
2.13.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.236.000,00	4.080.000,00	(156.000,00)	96,32	
2.13.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	4.236.000,00	4.080.000,00	(156.000,00)	96,32	
2.13.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.236.000,00	4.080.000,00	(156.000,00)	96,32	
2.13.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	23.519.500,00	22.878.900,00	(640.600,00)	97,28	
2.13.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	23.519.500,00	22.878.900,00	(640.600,00)	97,28	
2.13.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.519.500,00	22.878.900,00	(640.600,00)	97,28	
2.13.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	10.599.800,00	10.432.400,00	(167.400,00)	98,42	
2.13.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	10.599.800,00	10.432.400,00	(167.400,00)	98,42	
2.13.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.599.800,00	10.432.400,00	(167.400,00)	98,42	
2.13.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	67.320.000,00	67.320.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	67.320.000,00	67.320.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	30.120.000,00	30.120.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	5.462.600,00	5.112.600,00	(350.000,00)	93,59	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.13.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	5.462.600,00	5.112.600,00	(350.000,00)	93,59	
2.13.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.462.600,00	5.112.600,00	(350.000,00)	93,59	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	639.762.100,00	635.565.618,00	(4.196.482,00)	99,34	
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	639.762.100,00	635.565.618,00	(4.196.482,00)	99,34	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	8.862.100,00	8.850.200,00	(11.900,00)	99,87	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	8.862.100,00	8.850.200,00	(11.900,00)	99,87	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.862.100,00	8.850.200,00	(11.900,00)	99,87	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	225.000.000,00	220.815.418,00	(4.184.582,00)	98,14	
7.01.03.2.02.0002.5.2	BELANJA MODAL	225.000.000,00	220.815.418,00	(4.184.582,00)	98,14	
7.01.03.2.02.0002.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	225.000.000,00	220.815.418,00	(4.184.582,00)	98,14	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	405.900.000,00	405.900.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	405.900.000,00	405.900.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	405.900.000,00	405.900.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	750.900.000,00	745.389.518,00	(5.510.482,00)	99,27	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(750.900.000,00)	(745.389.518,00)	5.510.482,00	99,27	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(750.900.000,00)	(745.389.518,00)	5.510.482,00	99,27	





7.01.2.13.0.00.31.0000

KECAMATAN BOGOR UTARA

KELURAHAN CILUAR



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.31.0000 KECAMATAN BOGOR UTARA
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.31.0006 KELURAHAN CILUAR

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	97.200.000,00	97.026.000,00	(174.000,00)	99,82	
2.13.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	97.200.000,00	97.026.000,00	(174.000,00)	99,82	
2.13.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.689.000,00	1.650.000,00	(39.000,00)	97,69	
2.13.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.689.000,00	1.650.000,00	(39.000,00)	97,69	
2.13.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.689.000,00	1.650.000,00	(39.000,00)	97,69	
2.13.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	14.244.000,00	14.130.000,00	(114.000,00)	99,20	
2.13.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	14.244.000,00	14.130.000,00	(114.000,00)	99,20	
2.13.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.244.000,00	14.130.000,00	(114.000,00)	99,20	
2.13.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	1.281.000,00	1.260.000,00	(21.000,00)	98,36	
2.13.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.281.000,00	1.260.000,00	(21.000,00)	98,36	
2.13.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.281.000,00	1.260.000,00	(21.000,00)	98,36	
2.13.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	75.120.000,00	75.120.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	75.120.000,00	75.120.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	30.120.000,00	30.120.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	4.866.000,00	4.866.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.13.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	4.866.000,00	4.866.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.866.000,00	4.866.000,00	0,00	100,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	499.300.000,00	486.521.626,00	(12.778.374,00)	97,44	
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	499.300.000,00	486.521.626,00	(12.778.374,00)	97,44	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	139.450.000,00	138.355.626,00	(1.094.374,00)	99,22	
7.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	71.450.000,00	70.938.000,00	(512.000,00)	99,28	
7.01.03.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.450.000,00	70.938.000,00	(512.000,00)	99,28	
7.01.03.2.02.0002.5.2	BELANJA MODAL	68.000.000,00	67.417.626,00	(582.374,00)	99,14	
7.01.03.2.02.0002.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	68.000.000,00	67.417.626,00	(582.374,00)	99,14	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	349.050.000,00	337.366.000,00	(11.684.000,00)	96,65	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	349.050.000,00	337.366.000,00	(11.684.000,00)	96,65	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.050.000,00	337.366.000,00	(11.684.000,00)	96,65	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	596.500.000,00	583.547.626,00	(12.952.374,00)	97,83	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(596.500.000,00)	(583.547.626,00)	12.952.374,00	97,83	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(596.500.000,00)	(583.547.626,00)	12.952.374,00	97,83	





7.01.2.13.0.00.31.0000

KECAMATAN BOGOR UTARA

KELURAHAN TANAH BARU



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.31.0000 KECAMATAN BOGOR UTARA
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.31.0007 KELURAHAN TANAH BARU

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	111.259.800,00	110.595.500,00	(664.300,00)	99,40	
2.13.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	111.259.800,00	110.595.500,00	(664.300,00)	99,40	
2.13.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.689.000,00	1.650.000,00	(39.000,00)	97,69	
2.13.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.689.000,00	1.650.000,00	(39.000,00)	97,69	
2.13.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.689.000,00	1.650.000,00	(39.000,00)	97,69	
2.13.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	14.244.000,00	13.634.500,00	(609.500,00)	95,72	
2.13.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	14.244.000,00	13.634.500,00	(609.500,00)	95,72	
2.13.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.244.000,00	13.634.500,00	(609.500,00)	95,72	
2.13.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	1.158.300,00	1.142.500,00	(15.800,00)	98,64	
2.13.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.158.300,00	1.142.500,00	(15.800,00)	98,64	
2.13.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.158.300,00	1.142.500,00	(15.800,00)	98,64	
2.13.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	86.820.000,00	86.820.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	86.820.000,00	86.820.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	30.120.000,00	30.120.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.700.000,00	56.700.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	7.348.500,00	7.348.500,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.13.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	7.348.500,00	7.348.500,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.348.500,00	7.348.500,00	0,00	100,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	670.600.000,00	668.919.530,00	(1.680.470,00)	99,75	
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	670.600.000,00	668.919.530,00	(1.680.470,00)	99,75	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	225.000.000,00	223.344.530,00	(1.655.470,00)	99,26	
7.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	225.000.000,00	223.344.530,00	(1.655.470,00)	99,26	
7.01.03.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.000.000,00	223.344.530,00	(1.655.470,00)	99,26	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	438.850.000,00	438.825.000,00	(25.000,00)	99,99	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	438.850.000,00	438.825.000,00	(25.000,00)	99,99	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	438.850.000,00	438.825.000,00	(25.000,00)	99,99	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	781.859.800,00	779.515.030,00	(2.344.770,00)	99,70	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(781.859.800,00)	(779.515.030,00)	2.344.770,00	99,70	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(781.859.800,00)	(779.515.030,00)	2.344.770,00	99,70	





7.01.2.13.0.00.31.0000

KECAMATAN BOGOR UTARA

KELURAHAN CIMAHPAR



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.31.0000 KECAMATAN BOGOR UTARA
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.31.0008 KELURAHAN CIMAHPAR

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	106.766.700,00	105.072.100,00	(1.694.600,00)	98,41	
2.13.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	106.766.700,00	105.072.100,00	(1.694.600,00)	98,41	
2.13.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	977.600,00	960.000,00	(17.600,00)	98,20	
2.13.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	977.600,00	960.000,00	(17.600,00)	98,20	
2.13.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	977.600,00	960.000,00	(17.600,00)	98,20	
2.13.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	19.972.900,00	19.446.400,00	(526.500,00)	97,36	
2.13.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	19.972.900,00	19.446.400,00	(526.500,00)	97,36	
2.13.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.972.900,00	19.446.400,00	(526.500,00)	97,36	
2.13.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	6.429.700,00	5.279.200,00	(1.150.500,00)	82,11	
2.13.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	6.429.700,00	5.279.200,00	(1.150.500,00)	82,11	
2.13.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.429.700,00	5.279.200,00	(1.150.500,00)	82,11	
2.13.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	74.600.000,00	74.600.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	74.600.000,00	74.600.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	25.100.000,00	25.100.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	4.786.500,00	4.786.500,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.13.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	4.786.500,00	4.786.500,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.786.500,00	4.786.500,00	0,00	100,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	696.417.900,00	686.029.379,00	(10.388.521,00)	98,51	
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	696.417.900,00	686.029.379,00	(10.388.521,00)	98,51	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	13.218.000,00	10.200.000,00	(3.018.000,00)	77,17	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	13.218.000,00	10.200.000,00	(3.018.000,00)	77,17	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.218.000,00	10.200.000,00	(3.018.000,00)	77,17	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	244.689.900,00	242.669.379,00	(2.020.521,00)	99,17	
7.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	244.689.900,00	242.669.379,00	(2.020.521,00)	99,17	
7.01.03.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.689.900,00	242.669.379,00	(2.020.521,00)	99,17	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	438.510.000,00	433.160.000,00	(5.350.000,00)	98,78	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	438.510.000,00	433.160.000,00	(5.350.000,00)	98,78	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	438.510.000,00	433.160.000,00	(5.350.000,00)	98,78	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	803.184.600,00	791.101.479,00	(12.083.121,00)	98,50	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(803.184.600,00)	(791.101.479,00)	12.083.121,00	98,50	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(803.184.600,00)	(791.101.479,00)	12.083.121,00	98,50	





7.01.2.13.0.00.32.0000

KECAMATAN BOGOR SELATAN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.32.0000 KECAMATAN BOGOR SELATAN

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	36.346.264.474,00	35.276.352.135,00	(1.069.912.339,00)	97,06	
2.13.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	35.000.000,00	33.303.100,00	(1.696.900,00)	95,15	
2.13.01.2.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	28.935.300,00	27.395.000,00	(1.540.300,00)	94,68	
2.13.01.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	28.935.300,00	27.395.000,00	(1.540.300,00)	94,68	
2.13.01.2.01.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.905.300,00	24.365.000,00	(1.540.300,00)	94,05	
2.13.01.2.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	6.064.700,00	5.908.100,00	(156.600,00)	97,42	
2.13.01.2.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	6.064.700,00	5.908.100,00	(156.600,00)	97,42	
2.13.01.2.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.064.700,00	5.908.100,00	(156.600,00)	97,42	
2.13.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	29.555.068.946,00	28.776.616.285,00	(778.452.661,00)	97,37	
2.13.01.2.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	29.500.407.946,00	28.721.955.285,00	(778.452.661,00)	97,36	
2.13.01.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	29.500.407.946,00	28.721.955.285,00	(778.452.661,00)	97,36	
2.13.01.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	29.500.407.946,00	28.721.955.285,00	(778.452.661,00)	97,36	
2.13.01.2.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	54.661.000,00	54.661.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	54.661.000,00	54.661.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.02.0007.5.1.01	Belanja Pegawai	52.210.000,00	52.210.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.451.000,00	2.451.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.13.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.089.621.100,00	951.940.924,00	(137.680.176,00)	87,36	
2.13.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	96.700.000,00	90.079.500,00	(6.620.500,00)	93,15	
2.13.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	96.700.000,00	90.079.500,00	(6.620.500,00)	93,15	
2.13.01.2.06.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	20.000.000,00	19.320.000,00	(680.000,00)	96,60	
2.13.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.700.000,00	70.759.500,00	(5.940.500,00)	92,25	
2.13.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	64.805.200,00	25.398.000,00	(39.407.200,00)	39,19	
2.13.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	64.805.200,00	25.398.000,00	(39.407.200,00)	39,19	
2.13.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.805.200,00	25.398.000,00	(39.407.200,00)	39,19	
2.13.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	699.270.000,00	640.940.400,00	(58.329.600,00)	91,66	
2.13.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	699.270.000,00	640.940.400,00	(58.329.600,00)	91,66	
2.13.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	699.270.000,00	640.940.400,00	(58.329.600,00)	91,66	
2.13.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	84.426.900,00	73.955.534,00	(10.471.366,00)	87,60	
2.13.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	84.426.900,00	73.955.534,00	(10.471.366,00)	87,60	
2.13.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.426.900,00	73.955.534,00	(10.471.366,00)	87,60	
2.13.01.2.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	144.419.000,00	121.567.490,00	(22.851.510,00)	84,18	
2.13.01.2.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	144.419.000,00	121.567.490,00	(22.851.510,00)	84,18	
2.13.01.2.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.419.000,00	121.567.490,00	(22.851.510,00)	84,18	
2.13.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.409.603.800,00	1.379.973.400,00	(29.630.400,00)	97,90	
2.13.01.2.07.0005	PENGADAAN MEBEL	492.807.400,00	487.575.000,00	(5.232.400,00)	98,94	
2.13.01.2.07.0005.5.1	BELANJA OPERASI	8.360.000,00	6.950.000,00	(1.410.000,00)	83,13	
2.13.01.2.07.0005.5.1.01	Belanja Pegawai	8.360.000,00	6.950.000,00	(1.410.000,00)	83,13	
2.13.01.2.07.0005.5.2	BELANJA MODAL	484.447.400,00	480.625.000,00	(3.822.400,00)	99,21	
2.13.01.2.07.0005.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	484.447.400,00	480.625.000,00	(3.822.400,00)	99,21	
2.13.01.2.07.0006	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	796.046.400,00	785.335.000,00	(10.711.400,00)	98,65	
2.13.01.2.07.0006.5.1	BELANJA OPERASI	11.450.000,00	2.290.000,00	(9.160.000,00)	20,00	
2.13.01.2.07.0006.5.1.01	Belanja Pegawai	11.450.000,00	2.290.000,00	(9.160.000,00)	20,00	
2.13.01.2.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	784.596.400,00	783.045.000,00	(1.551.400,00)	99,80	
2.13.01.2.07.0006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	784.596.400,00	783.045.000,00	(1.551.400,00)	99,80	
2.13.01.2.07.0010	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	120.750.000,00	107.063.400,00	(13.686.600,00)	88,67	
2.13.01.2.07.0010.5.1	BELANJA OPERASI	120.750.000,00	107.063.400,00	(13.686.600,00)	88,67	
2.13.01.2.07.0010.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.13.01.2.07.0010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.750.000,00	107.063.400,00	(13.686.600,00)	88,67	
2.13.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.959.980.628,00	2.917.874.640,00	(42.105.988,00)	98,58	
2.13.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	366.951.700,00	341.338.992,00	(25.612.708,00)	93,02	
2.13.01.2.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	366.951.700,00	341.338.992,00	(25.612.708,00)	93,02	
2.13.01.2.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	366.951.700,00	341.338.992,00	(25.612.708,00)	93,02	
2.13.01.2.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.593.028.928,00	2.576.535.648,00	(16.493.280,00)	99,36	
2.13.01.2.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	2.593.028.928,00	2.576.535.648,00	(16.493.280,00)	99,36	
2.13.01.2.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.593.028.928,00	2.576.535.648,00	(16.493.280,00)	99,36	
2.13.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.296.990.000,00	1.216.643.786,00	(80.346.214,00)	93,81	
2.13.01.2.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	236.100.000,00	169.146.200,00	(66.953.800,00)	71,64	
2.13.01.2.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	236.100.000,00	169.146.200,00	(66.953.800,00)	71,64	
2.13.01.2.09.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.100.000,00	169.146.200,00	(66.953.800,00)	71,64	
2.13.01.2.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	95.400.000,00	95.153.600,00	(246.400,00)	99,74	
2.13.01.2.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	95.400.000,00	95.153.600,00	(246.400,00)	99,74	
2.13.01.2.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.400.000,00	95.153.600,00	(246.400,00)	99,74	
2.13.01.2.09.0009	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	965.490.000,00	952.343.986,00	(13.146.014,00)	98,64	
2.13.01.2.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	965.490.000,00	952.343.986,00	(13.146.014,00)	98,64	
2.13.01.2.09.0009.5.1.01	Belanja Pegawai	10.360.000,00	4.380.000,00	(5.980.000,00)	42,28	
2.13.01.2.09.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	955.130.000,00	947.963.986,00	(7.166.014,00)	99,25	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
2.13.05.2.01	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
2.13.05.2.01.0003	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
2.13.05.2.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
2.13.05.2.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	305.150.900,00	301.731.750,00	(3.419.150,00)	98,88	
7.01.02.2.01	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATANNNPEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	219.060.900,00	217.388.250,00	(1.672.650,00)	99,24	
7.01.02.2.01.0001	KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT	219.060.900,00	217.388.250,00	(1.672.650,00)	99,24	
7.01.02.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	219.060.900,00	217.388.250,00	(1.672.650,00)	99,24	
7.01.02.2.01.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	11.280.000,00	11.280.000,00	0,00	100,00	
7.01.02.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.780.900,00	206.108.250,00	(1.672.650,00)	99,19	
7.01.02.2.02	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	86.090.000,00	84.343.500,00	(1.746.500,00)	97,97	
7.01.02.2.02.0001	PERENCANAAN KEGIATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN	86.090.000,00	84.343.500,00	(1.746.500,00)	97,97	
7.01.02.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	86.090.000,00	84.343.500,00	(1.746.500,00)	97,97	
7.01.02.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00	100,00	
7.01.02.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.030.000,00	78.283.500,00	(1.746.500,00)	97,82	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	373.622.800,00	345.019.400,00	(28.603.400,00)	92,34	
7.01.03.2.03	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	373.622.800,00	345.019.400,00	(28.603.400,00)	92,34	
7.01.03.2.03.0001	PENYELENGGARAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	217.710.000,00	192.710.000,00	(25.000.000,00)	88,52	
7.01.03.2.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	217.710.000,00	192.710.000,00	(25.000.000,00)	88,52	
7.01.03.2.03.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	4.230.000,00	4.230.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	213.480.000,00	188.480.000,00	(25.000.000,00)	88,29	
7.01.03.2.03.0002	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN	60.107.000,00	60.107.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	60.107.000,00	60.107.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.03.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.03.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.287.000,00	57.287.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.03.0004	FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT	75.805.800,00	72.202.400,00	(3.603.400,00)	95,25	
7.01.03.2.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	75.805.800,00	72.202.400,00	(3.603.400,00)	95,25	
7.01.03.2.03.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	9.870.000,00	7.860.000,00	(2.010.000,00)	79,64	
7.01.03.2.03.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.935.800,00	64.342.400,00	(1.593.400,00)	97,58	
7.01.03.2.03.0005	FASILITASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.03.0005.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01.03.2.03.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	119.999.000,00	117.563.000,00	(2.436.000,00)	97,97	
7.01.04.2.01	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	119.999.000,00	117.563.000,00	(2.436.000,00)	97,97	
7.01.04.2.01.0001	SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	119.999.000,00	117.563.000,00	(2.436.000,00)	97,97	
7.01.04.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	119.999.000,00	117.563.000,00	(2.436.000,00)	97,97	
7.01.04.2.01.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	9.680.000,00	9.680.000,00	0,00	100,00	
7.01.04.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.319.000,00	107.883.000,00	(2.436.000,00)	97,79	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	37.151.637.174,00	36.047.266.285,00	(1.104.370.889,00)	97,03	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(37.151.637.174,00)	(36.047.266.285,00)	1.104.370.889,00	97,03	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(37.151.637.174,00)	(36.047.266.285,00)	1.104.370.889,00	97,03	





7.01.2.13.0.00.32.0000

KECAMATAN BOGOR SELATAN

KELURAHAN BATUTULIS



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.32.0000 KECAMATAN BOGOR SELATAN
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.32.0001 KELURAHAN BATUTULIS

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	86.000.000,00	80.442.000,00	(5.558.000,00)	93,54	
2.13.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	86.000.000,00	80.442.000,00	(5.558.000,00)	93,54	
2.13.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	58.860.000,00	53.302.000,00	(5.558.000,00)	90,56	
2.13.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	58.860.000,00	53.302.000,00	(5.558.000,00)	90,56	
2.13.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	20.160.000,00	14.760.000,00	(5.400.000,00)	73,21	
2.13.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.700.000,00	38.542.000,00	(158.000,00)	99,59	
2.13.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.140.000,00	2.140.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	2.140.000,00	2.140.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.140.000,00	2.140.000,00	0,00	100,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	391.600.000,00	390.883.547,00	(716.453,00)	99,82	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	391.600.000,00	390.883.547,00	(716.453,00)	99,82	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	148.800.000,00	148.083.547,00	(716.453,00)	99,52	
7.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	148.800.000,00	148.083.547,00	(716.453,00)	99,52	
7.01.03.2.02.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.760.000,00	146.043.547,00	(716.453,00)	99,51	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	232.800.000,00	232.800.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	232.800.000,00	232.800.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.800.000,00	232.800.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	477.600.000,00	471.325.547,00	(6.274.453,00)	98,69	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(477.600.000,00)	(471.325.547,00)	6.274.453,00	98,69	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(477.600.000,00)	(471.325.547,00)	6.274.453,00	98,69	





7.01.2.13.0.00.32.0000

KECAMATAN BOGOR SELATAN

KELURAHAN BOJONGKERTA



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.32.0000 KECAMATAN BOGOR SELATAN
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.32.0002 KELURAHAN BOJONGKERTA

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	98.000.000,00	95.642.100,00	(2.357.900,00)	97,59	
2.13.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	98.000.000,00	95.642.100,00	(2.357.900,00)	97,59	
2.13.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	20.000.000,00	18.717.700,00	(1.282.300,00)	93,59	
2.13.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	18.717.700,00	(1.282.300,00)	93,59	
2.13.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	18.717.700,00	(1.282.300,00)	93,59	
2.13.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	7.000.000,00	6.912.500,00	(87.500,00)	98,75	
2.13.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	6.912.500,00	(87.500,00)	98,75	
2.13.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	6.912.500,00	(87.500,00)	98,75	
2.13.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	68.000.000,00	67.425.000,00	(575.000,00)	99,15	
2.13.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	68.000.000,00	67.425.000,00	(575.000,00)	99,15	
2.13.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	9.880.000,00	9.870.000,00	(10.000,00)	99,90	
2.13.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.120.000,00	57.555.000,00	(565.000,00)	99,03	
2.13.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.000.000,00	2.586.900,00	(413.100,00)	86,23	
2.13.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.586.900,00	(413.100,00)	86,23	
2.13.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.586.900,00	(413.100,00)	86,23	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	367.700.000,00	364.236.805,00	(3.463.195,00)	99,06	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	367.700.000,00	364.236.805,00	(3.463.195,00)	99,06	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	196.900.000,00	194.836.805,00	(2.063.195,00)	98,95	
7.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	7.849.600,00	7.849.600,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	6.280.000,00	6.280.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.569.600,00	1.569.600,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002.5.2	BELANJA MODAL	189.050.400,00	186.987.205,00	(2.063.195,00)	98,91	
7.01.03.2.02.0002.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	189.050.400,00	186.987.205,00	(2.063.195,00)	98,91	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	160.800.000,00	159.400.000,00	(1.400.000,00)	99,13	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	160.800.000,00	159.400.000,00	(1.400.000,00)	99,13	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.800.000,00	159.400.000,00	(1.400.000,00)	99,13	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	465.700.000,00	459.878.905,00	(5.821.095,00)	98,75	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(465.700.000,00)	(459.878.905,00)	5.821.095,00	98,75	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(465.700.000,00)	(459.878.905,00)	5.821.095,00	98,75	





7.01.2.13.0.00.32.0000

KECAMATAN BOGOR SELATAN

KELURAHAN BONDONGAN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.32.0000 KECAMATAN BOGOR SELATAN
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.32.0003 KELURAHAN BONDONGAN

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	98.000.000,00	95.780.000,00	(2.220.000,00)	97,73	
2.13.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	98.000.000,00	95.780.000,00	(2.220.000,00)	97,73	
2.13.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	19.914.200,00	19.914.200,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	19.914.200,00	19.914.200,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.914.200,00	19.914.200,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	6.616.200,00	6.616.200,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	6.616.200,00	6.616.200,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.616.200,00	6.616.200,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	67.995.000,00	65.775.000,00	(2.220.000,00)	96,74	
2.13.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	67.995.000,00	65.775.000,00	(2.220.000,00)	96,74	
2.13.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	11.520.000,00	9.300.000,00	(2.220.000,00)	80,73	
2.13.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.475.000,00	56.475.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.474.600,00	3.474.600,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	3.474.600,00	3.474.600,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.474.600,00	3.474.600,00	0,00	100,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	880.950.000,00	839.744.332,00	(41.205.668,00)	95,32	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	880.950.000,00	839.744.332,00	(41.205.668,00)	95,32	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.390.000,00	8.390.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	357.950.000,00	317.222.332,00	(40.727.668,00)	88,62	
7.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	357.950.000,00	317.222.332,00	(40.727.668,00)	88,62	
7.01.03.2.02.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	7.090.000,00	7.090.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.860.000,00	310.132.332,00	(40.727.668,00)	88,39	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	513.000.000,00	512.522.000,00	(478.000,00)	99,91	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	513.000.000,00	512.522.000,00	(478.000,00)	99,91	
7.01.03.2.02.0003.5.1.01	Belanja Pegawai	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	510.950.000,00	510.472.000,00	(478.000,00)	99,91	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	978.950.000,00	935.524.332,00	(43.425.668,00)	95,56	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(978.950.000,00)	(935.524.332,00)	43.425.668,00	95,56	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(978.950.000,00)	(935.524.332,00)	43.425.668,00	95,56	





7.01.2.13.0.00.32.0000

KECAMATAN BOGOR SELATAN

KELURAHAN CIKARET



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.32.0000 KECAMATAN BOGOR SELATAN
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.32.0004 KELURAHAN CIKARET

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	98.000.000,00	96.800.000,00	(1.200.000,00)	98,78	
2.13.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	98.000.000,00	96.800.000,00	(1.200.000,00)	98,78	
2.13.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	68.000.000,00	66.800.000,00	(1.200.000,00)	98,24	
2.13.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	68.000.000,00	66.800.000,00	(1.200.000,00)	98,24	
2.13.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	24.980.000,00	23.780.000,00	(1.200.000,00)	95,20	
2.13.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.020.000,00	43.020.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	564.600.000,00	561.553.420,00	(3.046.580,00)	99,46	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	564.600.000,00	561.553.420,00	(3.046.580,00)	99,46	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	214.400.000,00	211.353.420,00	(3.046.580,00)	98,58	
7.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	12.548.800,00	10.618.800,00	(1.930.000,00)	84,62	
7.01.03.2.02.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	8.210.000,00	6.280.000,00	(1.930.000,00)	76,49	
7.01.03.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.338.800,00	4.338.800,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002.5.2	BELANJA MODAL	201.851.200,00	200.734.620,00	(1.116.580,00)	99,45	
7.01.03.2.02.0002.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	201.851.200,00	200.734.620,00	(1.116.580,00)	99,45	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	340.200.000,00	340.200.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	340.200.000,00	340.200.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	340.200.000,00	340.200.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	662.600.000,00	658.353.420,00	(4.246.580,00)	99,36	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(662.600.000,00)	(658.353.420,00)	4.246.580,00	99,36	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(662.600.000,00)	(658.353.420,00)	4.246.580,00	99,36	





7.01.2.13.0.00.32.0000

KECAMATAN BOGOR SELATAN

KELURAHAN CIPAKU



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.32.0000 KECAMATAN BOGOR SELATAN
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.32.0005 KELURAHAN CIPAKU

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	98.000.000,00	97.847.400,00	(152.600,00)	99,84	
2.13.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	98.000.000,00	97.847.400,00	(152.600,00)	99,84	
2.13.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	20.000.000,00	19.892.400,00	(107.600,00)	99,46	
2.13.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.892.400,00	(107.600,00)	99,46	
2.13.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.892.400,00	(107.600,00)	99,46	
2.13.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	67.575.000,00	67.530.000,00	(45.000,00)	99,93	
2.13.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	67.575.000,00	67.530.000,00	(45.000,00)	99,93	
2.13.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.375.000,00	45.330.000,00	(45.000,00)	99,90	
2.13.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.425.000,00	3.425.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	3.425.000,00	3.425.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.425.000,00	3.425.000,00	0,00	100,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	563.750.000,00	551.707.500,00	(12.042.500,00)	97,86	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	563.750.000,00	551.707.500,00	(12.042.500,00)	97,86	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	193.750.000,00	184.857.500,00	(8.892.500,00)	95,41	
7.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	20.399.900,00	20.399.900,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	9.670.000,00	9.670.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.729.900,00	10.729.900,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002.5.2	BELANJA MODAL	173.350.100,00	164.457.600,00	(8.892.500,00)	94,87	
7.01.03.2.02.0002.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	173.350.100,00	164.457.600,00	(8.892.500,00)	94,87	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	360.000.000,00	356.850.000,00	(3.150.000,00)	99,12	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	360.000.000,00	356.850.000,00	(3.150.000,00)	99,12	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.000.000,00	356.850.000,00	(3.150.000,00)	99,12	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	661.750.000,00	649.554.900,00	(12.195.100,00)	98,16	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(661.750.000,00)	(649.554.900,00)	12.195.100,00	98,16	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(661.750.000,00)	(649.554.900,00)	12.195.100,00	98,16	





7.01.2.13.0.00.32.0000

KECAMATAN BOGOR SELATAN

KELURAHAN EMPANG



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.32.0000 KECAMATAN BOGOR SELATAN
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.32.0006 KELURAHAN EMPANG

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	96.900.000,00	95.084.400,00	(1.815.600,00)	98,13	
2.13.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	96.900.000,00	95.084.400,00	(1.815.600,00)	98,13	
2.13.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	20.000.000,00	19.987.900,00	(12.100,00)	99,94	
2.13.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.987.900,00	(12.100,00)	99,94	
2.13.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.987.900,00	(12.100,00)	99,94	
2.13.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	7.000.000,00	6.996.500,00	(3.500,00)	99,95	
2.13.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	6.996.500,00	(3.500,00)	99,95	
2.13.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	6.996.500,00	(3.500,00)	99,95	
2.13.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	66.900.000,00	65.100.000,00	(1.800.000,00)	97,31	
2.13.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	66.900.000,00	65.100.000,00	(1.800.000,00)	97,31	
2.13.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	11.100.000,00	9.300.000,00	(1.800.000,00)	83,78	
2.13.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.800.000,00	55.800.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	781.400.000,00	780.639.658,00	(760.342,00)	99,90	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	781.400.000,00	780.639.658,00	(760.342,00)	99,90	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	203.200.000,00	202.439.658,00	(760.342,00)	99,63	
7.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	203.200.000,00	202.439.658,00	(760.342,00)	99,63	
7.01.03.2.02.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	11.850.000,00	11.850.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.350.000,00	190.589.658,00	(760.342,00)	99,60	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	568.200.000,00	568.200.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	568.200.000,00	568.200.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	568.200.000,00	568.200.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	878.300.000,00	875.724.058,00	(2.575.942,00)	99,71	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(878.300.000,00)	(875.724.058,00)	2.575.942,00	99,71	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(878.300.000,00)	(875.724.058,00)	2.575.942,00	99,71	





7.01.2.13.0.00.32.0000

KECAMATAN BOGOR SELATAN

KELURAHAN GENTENG



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.32.0000 KECAMATAN BOGOR SELATAN
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.32.0007 KELURAHAN GENTENG

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	98.000.000,00	92.600.000,00	(5.400.000,00)	94,49	
2.13.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	98.000.000,00	92.600.000,00	(5.400.000,00)	94,49	
2.13.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	68.000.000,00	62.600.000,00	(5.400.000,00)	92,06	
2.13.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	68.000.000,00	62.600.000,00	(5.400.000,00)	92,06	
2.13.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	34.160.000,00	28.760.000,00	(5.400.000,00)	84,19	
2.13.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.840.000,00	33.840.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	602.700.000,00	598.098.447,00	(4.601.553,00)	99,24	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	602.700.000,00	598.098.447,00	(4.601.553,00)	99,24	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	328.384.000,00	324.079.197,00	(4.304.803,00)	98,69	
7.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	328.384.000,00	324.079.197,00	(4.304.803,00)	98,69	
7.01.03.2.02.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	11.600.000,00	9.800.000,00	(1.800.000,00)	84,48	
7.01.03.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.784.000,00	314.279.197,00	(2.504.803,00)	99,21	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	264.316.000,00	264.019.250,00	(296.750,00)	99,89	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	264.316.000,00	264.019.250,00	(296.750,00)	99,89	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	264.316.000,00	264.019.250,00	(296.750,00)	99,89	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	700.700.000,00	690.698.447,00	(10.001.553,00)	98,57	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(700.700.000,00)	(690.698.447,00)	10.001.553,00	98,57	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(700.700.000,00)	(690.698.447,00)	10.001.553,00	98,57	





7.01.2.13.0.00.32.0000

KECAMATAN BOGOR SELATAN

KELURAHAN HARJASARI



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.32.0000 KECAMATAN BOGOR SELATAN
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.32.0008 KELURAHAN HARJASARI

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	98.000.000,00	96.800.000,00	(1.200.000,00)	98,78	
2.13.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	98.000.000,00	96.800.000,00	(1.200.000,00)	98,78	
2.13.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	68.000.000,00	66.800.000,00	(1.200.000,00)	98,24	
2.13.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	68.000.000,00	66.800.000,00	(1.200.000,00)	98,24	
2.13.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	21.290.000,00	20.090.000,00	(1.200.000,00)	94,36	
2.13.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.710.000,00	46.710.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	465.900.000,00	464.477.799,00	(1.422.201,00)	99,69	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	465.900.000,00	464.477.799,00	(1.422.201,00)	99,69	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	190.100.000,00	188.677.799,00	(1.422.201,00)	99,25	
7.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	190.100.000,00	188.677.799,00	(1.422.201,00)	99,25	
7.01.03.2.02.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	6.280.000,00	5.880.000,00	(400.000,00)	93,63	
7.01.03.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.820.000,00	182.797.799,00	(1.022.201,00)	99,44	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	265.800.000,00	265.800.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	265.800.000,00	265.800.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	265.800.000,00	265.800.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	563.900.000,00	561.277.799,00	(2.622.201,00)	99,53	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(563.900.000,00)	(561.277.799,00)	2.622.201,00	99,53	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(563.900.000,00)	(561.277.799,00)	2.622.201,00	99,53	





7.01.2.13.0.00.32.0000

KECAMATAN BOGOR SELATAN

KELURAHAN KERTAMAYA



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.32.0000 KECAMATAN BOGOR SELATAN
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.32.0009 KELURAHAN KERTAMAYA

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	110.000.000,00	107.200.000,00	(2.800.000,00)	97,45	
2.13.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	110.000.000,00	107.200.000,00	(2.800.000,00)	97,45	
2.13.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	80.000.000,00	77.200.000,00	(2.800.000,00)	96,50	
2.13.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	77.200.000,00	(2.800.000,00)	96,50	
2.13.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	36.350.000,00	33.550.000,00	(2.800.000,00)	92,30	
2.13.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.650.000,00	43.650.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	393.750.000,00	392.407.236,00	(1.342.764,00)	99,66	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	393.750.000,00	392.407.236,00	(1.342.764,00)	99,66	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	223.550.000,00	222.207.236,00	(1.342.764,00)	99,40	
7.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	223.550.000,00	222.207.236,00	(1.342.764,00)	99,40	
7.01.03.2.02.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	221.510.000,00	220.167.236,00	(1.342.764,00)	99,39	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	160.200.000,00	160.200.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	160.200.000,00	160.200.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.200.000,00	160.200.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	503.750.000,00	499.607.236,00	(4.142.764,00)	99,18	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(503.750.000,00)	(499.607.236,00)	4.142.764,00	99,18	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(503.750.000,00)	(499.607.236,00)	4.142.764,00	99,18	





7.01.2.13.0.00.32.0000

KECAMATAN BOGOR SELATAN

KELURAHAN LAWANG GINTUNG



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.32.0000 KECAMATAN BOGOR SELATAN
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.32.0010 KELURAHAN LAWANG GINTUNG

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	85.995.000,00	84.724.800,00	(1.270.200,00)	98,52	
2.13.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	85.995.000,00	84.724.800,00	(1.270.200,00)	98,52	
2.13.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	58.995.000,00	57.725.000,00	(1.270.000,00)	97,85	
2.13.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	58.995.000,00	57.725.000,00	(1.270.000,00)	97,85	
2.13.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	14.040.000,00	12.770.000,00	(1.270.000,00)	90,95	
2.13.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.955.000,00	44.955.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.000.000,00	1.999.800,00	(200,00)	99,99	
2.13.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.999.800,00	(200,00)	99,99	
2.13.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.999.800,00	(200,00)	99,99	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	337.500.000,00	335.137.986,00	(2.362.014,00)	99,30	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	337.500.000,00	335.137.986,00	(2.362.014,00)	99,30	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	126.500.000,00	124.137.986,00	(2.362.014,00)	98,13	
7.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	126.500.000,00	124.137.986,00	(2.362.014,00)	98,13	
7.01.03.2.02.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	7.580.000,00	7.180.000,00	(400.000,00)	94,72	
7.01.03.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.920.000,00	116.957.986,00	(1.962.014,00)	98,35	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	201.000.000,00	201.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	201.000.000,00	201.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.000.000,00	201.000.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	423.495.000,00	419.862.786,00	(3.632.214,00)	99,14	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(423.495.000,00)	(419.862.786,00)	3.632.214,00	99,14	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(423.495.000,00)	(419.862.786,00)	3.632.214,00	99,14	





7.01.2.13.0.00.32.0000

KECAMATAN BOGOR SELATAN

KELURAHAN MUARASARI



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.32.0000 KECAMATAN BOGOR SELATAN
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.32.0011 KELURAHAN MUARASARI

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	85.965.000,00	82.675.000,00	(3.290.000,00)	96,17	
2.13.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	85.965.000,00	82.675.000,00	(3.290.000,00)	96,17	
2.13.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	58.965.000,00	55.675.000,00	(3.290.000,00)	94,42	
2.13.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	58.965.000,00	55.675.000,00	(3.290.000,00)	94,42	
2.13.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	16.800.000,00	13.510.000,00	(3.290.000,00)	80,42	
2.13.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.165.000,00	42.165.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	374.563.970,00	371.965.779,00	(2.598.191,00)	99,31	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	374.563.970,00	371.965.779,00	(2.598.191,00)	99,31	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	171.963.970,00	169.365.779,00	(2.598.191,00)	98,49	
7.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	171.963.970,00	169.365.779,00	(2.598.191,00)	98,49	
7.01.03.2.02.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	11.200.000,00	9.990.000,00	(1.210.000,00)	89,20	
7.01.03.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.763.970,00	159.375.779,00	(1.388.191,00)	99,14	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	192.600.000,00	192.600.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	192.600.000,00	192.600.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.600.000,00	192.600.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	460.528.970,00	454.640.779,00	(5.888.191,00)	98,72	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(460.528.970,00)	(454.640.779,00)	5.888.191,00	98,72	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(460.528.970,00)	(454.640.779,00)	5.888.191,00	98,72	





7.01.2.13.0.00.32.0000

KECAMATAN BOGOR SELATAN

KELURAHAN MULYAHARJA



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.32.0000 KECAMATAN BOGOR SELATAN
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.32.0012 KELURAHAN MULYAHARJA

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	110.000.000,00	107.854.700,00	(2.145.300,00)	98,05	
2.13.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	110.000.000,00	107.854.700,00	(2.145.300,00)	98,05	
2.13.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	9.922.000,00	9.870.500,00	(51.500,00)	99,48	
2.13.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	9.922.000,00	9.870.500,00	(51.500,00)	99,48	
2.13.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.922.000,00	9.870.500,00	(51.500,00)	99,48	
2.13.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	2.359.000,00	2.323.000,00	(36.000,00)	98,47	
2.13.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	2.359.000,00	2.323.000,00	(36.000,00)	98,47	
2.13.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.359.000,00	2.323.000,00	(36.000,00)	98,47	
2.13.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	94.350.000,00	92.292.200,00	(2.057.800,00)	97,82	
2.13.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	94.350.000,00	92.292.200,00	(2.057.800,00)	97,82	
2.13.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.750.000,00	52.692.200,00	(2.057.800,00)	96,24	
2.13.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.369.000,00	3.369.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	3.369.000,00	3.369.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.369.000,00	3.369.000,00	0,00	100,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	650.900.000,00	648.436.120,00	(2.463.880,00)	99,62	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	650.900.000,00	648.436.120,00	(2.463.880,00)	99,62	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	10.000.000,00	9.967.000,00	(33.000,00)	99,67	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.967.000,00	(33.000,00)	99,67	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.967.000,00	(33.000,00)	99,67	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	321.700.000,00	319.269.120,00	(2.430.880,00)	99,24	
7.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	321.700.000,00	319.269.120,00	(2.430.880,00)	99,24	
7.01.03.2.02.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	6.270.000,00	6.270.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	315.430.000,00	312.999.120,00	(2.430.880,00)	99,23	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	319.200.000,00	319.200.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	319.200.000,00	319.200.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	319.200.000,00	319.200.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	760.900.000,00	756.290.820,00	(4.609.180,00)	99,39	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(760.900.000,00)	(756.290.820,00)	4.609.180,00	99,39	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(760.900.000,00)	(756.290.820,00)	4.609.180,00	99,39	





7.01.2.13.0.00.32.0000

KECAMATAN BOGOR SELATAN

KELURAHAN PAKUAN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.32.0000 KECAMATAN BOGOR SELATAN
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.32.0013 KELURAHAN PAKUAN

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	85.970.000,00	84.370.000,00	(1.600.000,00)	98,14	
2.13.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	85.970.000,00	84.370.000,00	(1.600.000,00)	98,14	
2.13.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	58.970.000,00	57.370.000,00	(1.600.000,00)	97,29	
2.13.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	58.970.000,00	57.370.000,00	(1.600.000,00)	97,29	
2.13.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	12.920.000,00	11.320.000,00	(1.600.000,00)	87,62	
2.13.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.050.000,00	46.050.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	292.000.000,00	291.409.236,00	(590.764,00)	99,80	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	292.000.000,00	291.409.236,00	(590.764,00)	99,80	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	136.800.000,00	136.209.236,00	(590.764,00)	99,57	
7.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	136.800.000,00	136.209.236,00	(590.764,00)	99,57	
7.01.03.2.02.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	7.080.000,00	7.080.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.720.000,00	129.129.236,00	(590.764,00)	99,54	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	145.200.000,00	145.200.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	145.200.000,00	145.200.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.200.000,00	145.200.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	377.970.000,00	375.779.236,00	(2.190.764,00)	99,42	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(377.970.000,00)	(375.779.236,00)	2.190.764,00	99,42	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(377.970.000,00)	(375.779.236,00)	2.190.764,00	99,42	





7.01.2.13.0.00.32.0000

KECAMATAN BOGOR SELATAN

KELURAHAN PAMOYANAN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.32.0000 KECAMATAN BOGOR SELATAN
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.32.0014 KELURAHAN PAMOYANAN

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	109.961.300,00	104.897.100,00	(5.064.200,00)	95,39	
2.13.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	109.961.300,00	104.897.100,00	(5.064.200,00)	95,39	
2.13.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	19.999.300,00	19.999.300,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	19.999.300,00	19.999.300,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.999.300,00	19.999.300,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	6.982.000,00	6.982.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	6.982.000,00	6.982.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.982.000,00	6.982.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	79.980.000,00	74.915.800,00	(5.064.200,00)	93,67	
2.13.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	79.980.000,00	74.915.800,00	(5.064.200,00)	93,67	
2.13.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	33.540.000,00	28.590.000,00	(4.950.000,00)	85,24	
2.13.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.440.000,00	46.325.800,00	(114.200,00)	99,75	
2.13.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	541.200.000,00	535.714.754,00	(5.485.246,00)	98,99	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	541.200.000,00	535.714.754,00	(5.485.246,00)	98,99	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	230.600.000,00	225.114.754,00	(5.485.246,00)	97,62	
7.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	230.600.000,00	225.114.754,00	(5.485.246,00)	97,62	
7.01.03.2.02.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	9.810.000,00	5.540.000,00	(4.270.000,00)	56,47	
7.01.03.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.790.000,00	219.574.754,00	(1.215.246,00)	99,45	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	300.600.000,00	300.600.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	300.600.000,00	300.600.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.600.000,00	300.600.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	651.161.300,00	640.611.854,00	(10.549.446,00)	98,38	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(651.161.300,00)	(640.611.854,00)	10.549.446,00	98,38	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(651.161.300,00)	(640.611.854,00)	10.549.446,00	98,38	





7.01.2.13.0.00.32.0000

KECAMATAN BOGOR SELATAN

KELURAHAN RANCAMAYA



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.32.0000 KECAMATAN BOGOR SELATAN
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.32.0015 KELURAHAN RANCAMAYA

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	85.978.600,00	77.578.600,00	(8.400.000,00)	90,23	
2.13.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	85.978.600,00	77.578.600,00	(8.400.000,00)	90,23	
2.13.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	19.998.600,00	19.998.600,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	19.998.600,00	19.998.600,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.998.600,00	19.998.600,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	58.980.000,00	50.580.000,00	(8.400.000,00)	85,76	
2.13.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	58.980.000,00	50.580.000,00	(8.400.000,00)	85,76	
2.13.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	23.160.000,00	14.760.000,00	(8.400.000,00)	63,73	
2.13.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.820.000,00	35.820.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	345.700.000,00	323.619.571,00	(22.080.429,00)	93,61	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	345.700.000,00	323.619.571,00	(22.080.429,00)	93,61	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	162.900.000,00	140.819.571,00	(22.080.429,00)	86,45	
7.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	14.275.800,00	7.435.800,00	(6.840.000,00)	52,09	
7.01.03.2.02.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	8.200.000,00	1.360.000,00	(6.840.000,00)	16,59	
7.01.03.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.075.800,00	6.075.800,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002.5.2	BELANJA MODAL	148.624.200,00	133.383.771,00	(15.240.429,00)	89,75	
7.01.03.2.02.0002.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	148.624.200,00	133.383.771,00	(15.240.429,00)	89,75	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	172.800.000,00	172.800.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	172.800.000,00	172.800.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.800.000,00	172.800.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	431.678.600,00	401.198.171,00	(30.480.429,00)	92,94	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(431.678.600,00)	(401.198.171,00)	30.480.429,00	92,94	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(431.678.600,00)	(401.198.171,00)	30.480.429,00	92,94	





7.01.2.13.0.00.32.0000

KECAMATAN BOGOR SELATAN

KELURAHAN RANGGAMEKAR



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.32.0000 KECAMATAN BOGOR SELATAN
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.32.0016 KELURAHAN RANGGAMEKAR

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	98.000.000,00	84.800.200,00	(13.199.800,00)	86,53	
2.13.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	98.000.000,00	84.800.200,00	(13.199.800,00)	86,53	
2.13.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	20.000.000,00	12.200.200,00	(7.799.800,00)	61,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	12.200.200,00	(7.799.800,00)	61,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	12.200.200,00	(7.799.800,00)	61,00	
2.13.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	68.000.000,00	62.600.000,00	(5.400.000,00)	92,06	
2.13.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	68.000.000,00	62.600.000,00	(5.400.000,00)	92,06	
2.13.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	34.160.000,00	28.760.000,00	(5.400.000,00)	84,19	
2.13.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.840.000,00	33.840.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	506.550.000,00	488.710.100,00	(17.839.900,00)	96,48	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	506.550.000,00	488.710.100,00	(17.839.900,00)	96,48	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	10.000.000,00	9.441.600,00	(558.400,00)	94,42	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.441.600,00	(558.400,00)	94,42	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.441.600,00	(558.400,00)	94,42	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	209.750.000,00	192.468.500,00	(17.281.500,00)	91,76	
7.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	209.750.000,00	192.468.500,00	(17.281.500,00)	91,76	
7.01.03.2.02.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	10.620.000,00	10.620.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.130.000,00	181.848.500,00	(17.281.500,00)	91,32	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	286.800.000,00	286.800.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	286.800.000,00	286.800.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	286.800.000,00	286.800.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	604.550.000,00	573.510.300,00	(31.039.700,00)	94,87	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(604.550.000,00)	(573.510.300,00)	31.039.700,00	94,87	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(604.550.000,00)	(573.510.300,00)	31.039.700,00	94,87	





7.01.2.13.0.00.33.0000

KECAMATAN BOGOR TIMUR



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.33.0000 KECAMATAN BOGOR TIMUR

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
2.13.05.2.01	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
2.13.05.2.01.0003	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
2.13.05.2.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
2.13.05.2.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.465.540.676,00	17.689.619.431,00	(775.921.245,00)	95,80	
7.01.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	46.822.200,00	46.622.200,00	(200.000,00)	99,57	
7.01.01.2.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	43.972.200,00	43.772.200,00	(200.000,00)	99,55	
7.01.01.2.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	43.972.200,00	43.772.200,00	(200.000,00)	99,55	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01.01.2.01.0006.5.1.01	Belanja Pegawai	4.040.000,00	4.040.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.932.200,00	39.732.200,00	(200.000,00)	99,50	
7.01.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	13.616.501.396,00	13.079.046.844,00	(537.454.552,00)	96,05	
7.01.01.2.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	13.564.143.696,00	13.026.689.144,00	(537.454.552,00)	96,04	
7.01.01.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	13.564.143.696,00	13.026.689.144,00	(537.454.552,00)	96,04	
7.01.01.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	13.564.143.696,00	13.026.689.144,00	(537.454.552,00)	96,04	
7.01.01.2.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	2.801.000,00	2.801.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	2.801.000,00	2.801.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.801.000,00	2.801.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	49.556.700,00	49.556.700,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	49.556.700,00	49.556.700,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.02.0007.5.1.01	Belanja Pegawai	47.160.000,00	47.160.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.396.700,00	2.396.700,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	2.145.023.900,00	2.080.716.750,00	(64.307.150,00)	97,00	
7.01.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	11.588.500,00	11.588.500,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	11.588.500,00	11.588.500,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.588.500,00	11.588.500,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	937.933.300,00	928.121.300,00	(9.812.000,00)	98,95	
7.01.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	221.697.600,00	216.471.300,00	(5.226.300,00)	97,64	
7.01.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	221.697.600,00	216.471.300,00	(5.226.300,00)	97,64	
7.01.01.2.06.0002.5.2	BELANJA MODAL	716.235.700,00	711.650.000,00	(4.585.700,00)	99,36	
7.01.01.2.06.0002.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	716.235.700,00	711.650.000,00	(4.585.700,00)	99,36	
7.01.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	18.345.400,00	18.345.400,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	18.345.400,00	18.345.400,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.345.400,00	18.345.400,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	455.115.400,00	455.114.100,00	(1.300,00)	100,00	
7.01.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	455.115.400,00	455.114.100,00	(1.300,00)	100,00	
7.01.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	455.115.400,00	455.114.100,00	(1.300,00)	100,00	
7.01.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	40.877.300,00	40.843.900,00	(33.400,00)	99,92	
7.01.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	40.877.300,00	40.843.900,00	(33.400,00)	99,92	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.877.300,00	40.843.900,00	(33.400,00)	99,92	
7.01.01.2.06.0006	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	673.964.000,00	619.503.550,00	(54.460.450,00)	91,92	
7.01.01.2.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	673.964.000,00	619.503.550,00	(54.460.450,00)	91,92	
7.01.01.2.06.0009.5.1.01	Belanja Pegawai	22.920.000,00	22.920.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	651.044.000,00	596.583.550,00	(54.460.450,00)	91,63	
7.01.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.807.744.680,00	1.661.390.669,00	(146.354.011,00)	91,90	
7.01.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	231.480.000,00	217.771.289,00	(13.708.711,00)	94,08	
7.01.01.2.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	231.480.000,00	217.771.289,00	(13.708.711,00)	94,08	
7.01.01.2.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.480.000,00	217.771.289,00	(13.708.711,00)	94,08	
7.01.01.2.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.576.264.680,00	1.443.619.380,00	(132.645.300,00)	91,58	
7.01.01.2.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.576.264.680,00	1.443.619.380,00	(132.645.300,00)	91,58	
7.01.01.2.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.576.264.680,00	1.443.619.380,00	(132.645.300,00)	91,58	
7.01.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	849.448.500,00	821.842.968,00	(27.605.532,00)	96,75	
7.01.01.2.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	258.484.500,00	242.025.630,00	(16.458.870,00)	93,63	
7.01.01.2.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	258.484.500,00	242.025.630,00	(16.458.870,00)	93,63	
7.01.01.2.09.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.09.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	251.684.500,00	235.225.630,00	(16.458.870,00)	93,46	
7.01.01.2.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	51.450.000,00	50.825.000,00	(625.000,00)	98,79	
7.01.01.2.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	51.450.000,00	50.825.000,00	(625.000,00)	98,79	
7.01.01.2.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.450.000,00	50.825.000,00	(625.000,00)	98,79	
7.01.01.2.09.0009	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	539.514.000,00	528.992.338,00	(10.521.662,00)	98,05	
7.01.01.2.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	539.514.000,00	528.992.338,00	(10.521.662,00)	98,05	
7.01.01.2.09.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	539.514.000,00	528.992.338,00	(10.521.662,00)	98,05	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	165.623.600,00	165.623.600,00	0,00	100,00	
7.01.02.2.01	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATANNNPEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	43.150.000,00	43.150.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01.02.2.01.0001	KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT	43.150.000,00	43.150.000,00	0,00	100,00	
7.01.02.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	43.150.000,00	43.150.000,00	0,00	100,00	
7.01.02.2.01.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	4.040.000,00	4.040.000,00	0,00	100,00	
7.01.02.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.110.000,00	39.110.000,00	0,00	100,00	
7.01.02.2.02	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	122.473.600,00	122.473.600,00	0,00	100,00	
7.01.02.2.02.0001	PERENCANAAN KEGIATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.02.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.02.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	100,00	
7.01.02.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.580.000,00	97.580.000,00	0,00	100,00	
7.01.02.2.02.0003	PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	22.473.600,00	22.473.600,00	0,00	100,00	
7.01.02.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	22.473.600,00	22.473.600,00	0,00	100,00	
7.01.02.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.473.600,00	22.473.600,00	0,00	100,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	239.072.700,00	237.862.700,00	(1.210.000,00)	99,49	
7.01.03.2.03	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	239.072.700,00	237.862.700,00	(1.210.000,00)	99,49	
7.01.03.2.03.0001	PENYELENGGARAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	77.914.800,00	77.914.800,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	77.914.800,00	77.914.800,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.914.800,00	77.914.800,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.03.0002	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN	80.685.000,00	79.475.000,00	(1.210.000,00)	98,50	
7.01.03.2.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	80.685.000,00	79.475.000,00	(1.210.000,00)	98,50	
7.01.03.2.03.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	3.630.000,00	2.420.000,00	(1.210.000,00)	66,67	
7.01.03.2.03.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.055.000,00	77.055.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.03.0004	FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT	60.804.700,00	60.804.700,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	60.804.700,00	60.804.700,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.03.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	4.840.000,00	4.840.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.03.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.964.700,00	55.964.700,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.03.0005	FASILITASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	19.668.200,00	19.668.200,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.03.0005.5.1	BELANJA OPERASI	19.668.200,00	19.668.200,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01.03.2.03.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.668.200,00	19.668.200,00	0,00	100,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	73.999.800,00	70.791.850,00	(3.207.950,00)	95,66	
7.01.04.2.01	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	73.999.800,00	70.791.850,00	(3.207.950,00)	95,66	
7.01.04.2.01.0001	SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	73.999.800,00	70.791.850,00	(3.207.950,00)	95,66	
7.01.04.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	73.999.800,00	70.791.850,00	(3.207.950,00)	95,66	
7.01.04.2.01.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	4.040.000,00	4.040.000,00	0,00	100,00	
7.01.04.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.959.800,00	66.751.850,00	(3.207.950,00)	95,41	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	18.950.836.776,00	18.170.497.581,00	(780.339.195,00)	95,88	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(18.950.836.776,00)	(18.170.497.581,00)	780.339.195,00	95,88	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(18.950.836.776,00)	(18.170.497.581,00)	780.339.195,00	95,88	





7.01.2.13.0.00.33.0000

KECAMATAN BOGOR TIMUR

KELURAHAN BARANANGSIANG



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.33.0000 KECAMATAN BOGOR TIMUR
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.33.0001 KELURAHAN BARANANGSIANG

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	112.324.800,00	112.324.800,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	112.324.800,00	112.324.800,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.766.800,00	4.766.800,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	4.766.800,00	4.766.800,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.766.800,00	4.766.800,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	6.218.200,00	6.218.200,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	6.218.200,00	6.218.200,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.218.200,00	6.218.200,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	2.754.500,00	2.754.500,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	2.754.500,00	2.754.500,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.754.500,00	2.754.500,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	95.420.000,00	95.420.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	95.420.000,00	95.420.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	14.120.000,00	14.120.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.300.000,00	81.300.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.165.300,00	3.165.300,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.13.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	3.165.300,00	3.165.300,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.165.300,00	3.165.300,00	0,00	100,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	746.482.900,00	741.207.736,00	(5.275.164,00)	99,29	
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	746.482.900,00	741.207.736,00	(5.275.164,00)	99,29	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	7.675.000,00	7.675.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	7.675.000,00	7.675.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	308.007.900,00	303.082.736,00	(4.925.164,00)	98,40	
7.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	308.007.900,00	303.082.736,00	(4.925.164,00)	98,40	
7.01.03.2.02.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	290.807.900,00	285.882.736,00	(4.925.164,00)	98,31	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	430.800.000,00	430.450.000,00	(350.000,00)	99,92	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	430.800.000,00	430.450.000,00	(350.000,00)	99,92	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	430.800.000,00	430.450.000,00	(350.000,00)	99,92	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	858.807.700,00	853.532.536,00	(5.275.164,00)	99,39	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(858.807.700,00)	(853.532.536,00)	5.275.164,00	99,39	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(858.807.700,00)	(853.532.536,00)	5.275.164,00	99,39	





7.01.2.13.0.00.33.0000

KECAMATAN BOGOR TIMUR

KELURAHAN SUKASARI



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.33.0000 KECAMATAN BOGOR TIMUR
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.33.0002 KELURAHAN SUKASARI

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	91.581.700,00	91.581.700,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	91.581.700,00	91.581.700,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.008.800,00	1.008.800,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.008.800,00	1.008.800,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.008.800,00	1.008.800,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	6.471.300,00	6.471.300,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	6.471.300,00	6.471.300,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.471.300,00	6.471.300,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	1.288.900,00	1.288.900,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.288.900,00	1.288.900,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.288.900,00	1.288.900,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	81.355.000,00	81.355.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	81.355.000,00	81.355.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	19.930.000,00	19.930.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.425.000,00	61.425.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1.457.700,00	1.457.700,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.13.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	1.457.700,00	1.457.700,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.457.700,00	1.457.700,00	0,00	100,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	726.318.026,00	721.019.604,00	(5.298.422,00)	99,27	
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	726.318.026,00	721.019.604,00	(5.298.422,00)	99,27	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	4.418.300,00	4.418.300,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	4.418.300,00	4.418.300,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.418.300,00	4.418.300,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	517.899.726,00	512.601.304,00	(5.298.422,00)	98,98	
7.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	359.182.856,00	356.118.889,00	(3.063.967,00)	99,15	
7.01.03.2.02.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	8.930.000,00	8.930.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.252.856,00	347.188.889,00	(3.063.967,00)	99,13	
7.01.03.2.02.0002.5.2	BELANJA MODAL	158.716.870,00	156.482.415,00	(2.234.455,00)	98,59	
7.01.03.2.02.0002.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.000.000,00	64.500.000,00	(500.000,00)	99,23	
7.01.03.2.02.0002.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	93.716.870,00	91.982.415,00	(1.734.455,00)	98,15	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	204.000.000,00	204.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	204.000.000,00	204.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.000.000,00	204.000.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	817.899.726,00	812.601.304,00	(5.298.422,00)	99,35	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(817.899.726,00)	(812.601.304,00)	5.298.422,00	99,35	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(817.899.726,00)	(812.601.304,00)	5.298.422,00	99,35	





7.01.2.13.0.00.33.0000

KECAMATAN BOGOR TIMUR

KELURAHAN KATULAMPA



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.33.0000 KECAMATAN BOGOR TIMUR
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.33.0003 KELURAHAN KATULAMPA

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	108.205.000,00	108.205.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	108.205.000,00	108.205.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.262.800,00	3.262.800,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	3.262.800,00	3.262.800,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.262.800,00	3.262.800,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	8.157.300,00	8.157.300,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	8.157.300,00	8.157.300,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.157.300,00	8.157.300,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	1.826.200,00	1.826.200,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.826.200,00	1.826.200,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.826.200,00	1.826.200,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	93.270.000,00	93.270.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	93.270.000,00	93.270.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	34.310.000,00	34.310.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.960.000,00	58.960.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1.688.700,00	1.688.700,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.13.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	1.688.700,00	1.688.700,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.688.700,00	1.688.700,00	0,00	100,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.028.445.000,00	1.019.838.635,00	(8.606.365,00)	99,16	
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	1.028.445.000,00	1.019.838.635,00	(8.606.365,00)	99,16	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	11.795.000,00	11.795.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	11.795.000,00	11.795.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.135.000,00	10.135.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	380.050.000,00	376.843.635,00	(3.206.365,00)	99,16	
7.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	315.050.000,00	312.343.635,00	(2.706.365,00)	99,14	
7.01.03.2.02.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	8.230.000,00	8.230.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	306.820.000,00	304.113.635,00	(2.706.365,00)	99,12	
7.01.03.2.02.0002.5.2	BELANJA MODAL	65.000.000,00	64.500.000,00	(500.000,00)	99,23	
7.01.03.2.02.0002.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.000.000,00	64.500.000,00	(500.000,00)	99,23	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	636.600.000,00	631.200.000,00	(5.400.000,00)	99,15	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	636.600.000,00	631.200.000,00	(5.400.000,00)	99,15	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	636.600.000,00	631.200.000,00	(5.400.000,00)	99,15	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	1.136.650.000,00	1.128.043.635,00	(8.606.365,00)	99,24	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.136.650.000,00)	(1.128.043.635,00)	8.606.365,00	99,24	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.136.650.000,00)	(1.128.043.635,00)	8.606.365,00	99,24	





7.01.2.13.0.00.33.0000

KECAMATAN BOGOR TIMUR

KELURAHAN TAJUR



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.33.0000 KECAMATAN BOGOR TIMUR
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.33.0004 KELURAHAN TAJUR

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	86.000.000,00	86.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	86.000.000,00	86.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.357.000,00	1.357.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.357.000,00	1.357.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.357.000,00	1.357.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.268.700,00	1.268.700,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.268.700,00	1.268.700,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.268.700,00	1.268.700,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	2.348.100,00	2.348.100,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	2.348.100,00	2.348.100,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.348.100,00	2.348.100,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	78.810.000,00	78.810.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	78.810.000,00	78.810.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	38.760.000,00	38.760.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.050.000,00	40.050.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.216.200,00	2.216.200,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.13.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	2.216.200,00	2.216.200,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.216.200,00	2.216.200,00	0,00	100,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	283.450.000,00	282.831.535,00	(618.465,00)	99,78	
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	283.450.000,00	282.831.535,00	(618.465,00)	99,78	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	129.450.000,00	128.831.535,00	(618.465,00)	99,52	
7.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	129.450.000,00	128.831.535,00	(618.465,00)	99,52	
7.01.03.2.02.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.770.000,00	128.151.535,00	(618.465,00)	99,52	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	369.450.000,00	368.831.535,00	(618.465,00)	99,83	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(369.450.000,00)	(368.831.535,00)	618.465,00	99,83	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(369.450.000,00)	(368.831.535,00)	618.465,00	99,83	





7.01.2.13.0.00.33.0000

KECAMATAN BOGOR TIMUR

KELURAHAN SINDANGRASA



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.33.0000 KECAMATAN BOGOR TIMUR
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.33.0006 KELURAHAN SINDANGGRASA

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	98.500.400,00	98.500.400,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	98.500.400,00	98.500.400,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.998.900,00	3.998.900,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	3.998.900,00	3.998.900,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.998.900,00	3.998.900,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	7.998.600,00	7.998.600,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	7.998.600,00	7.998.600,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.998.600,00	7.998.600,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	9.994.100,00	9.994.100,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	9.994.100,00	9.994.100,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.994.100,00	9.994.100,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	72.205.000,00	72.205.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	72.205.000,00	72.205.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	20.940.000,00	20.940.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.265.000,00	51.265.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	4.303.800,00	4.303.800,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.13.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	4.303.800,00	4.303.800,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.303.800,00	4.303.800,00	0,00	100,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	503.950.100,00	502.570.611,00	(1.379.489,00)	99,73	
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	503.950.100,00	502.570.611,00	(1.379.489,00)	99,73	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.890.000,00	7.890.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	204.650.100,00	203.270.611,00	(1.379.489,00)	99,33	
7.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	79.650.100,00	78.950.100,00	(700.000,00)	99,12	
7.01.03.2.02.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	16.360.000,00	16.360.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.290.100,00	62.590.100,00	(700.000,00)	98,89	
7.01.03.2.02.0002.5.2	BELANJA MODAL	125.000.000,00	124.320.511,00	(679.489,00)	99,46	
7.01.03.2.02.0002.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	125.000.000,00	124.320.511,00	(679.489,00)	99,46	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	289.800.000,00	289.800.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	289.800.000,00	289.800.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.800.000,00	289.800.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	602.450.500,00	601.071.011,00	(1.379.489,00)	99,77	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(602.450.500,00)	(601.071.011,00)	1.379.489,00	99,77	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(602.450.500,00)	(601.071.011,00)	1.379.489,00	99,77	





7.01.2.13.0.00.33.0000

KECAMATAN BOGOR TIMUR

KELURAHAN SINDANGSARI



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.33.0000 KECAMATAN BOGOR TIMUR
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.33.0007 KELURAHAN SINDANGSARI

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	86.000.000,00	86.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	86.000.000,00	86.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	836.000,00	836.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	836.000,00	836.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	836.000,00	836.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	4.594.000,00	4.594.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	4.594.000,00	4.594.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.594.000,00	4.594.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	1.491.000,00	1.491.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.491.000,00	1.491.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.491.000,00	1.491.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	25.080.000,00	25.080.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.920.000,00	52.920.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1.079.000,00	1.079.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.13.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	1.079.000,00	1.079.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.079.000,00	1.079.000,00	0,00	100,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	507.631.508,00	504.934.515,00	(2.696.993,00)	99,47	
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	507.631.508,00	504.934.515,00	(2.696.993,00)	99,47	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	318.831.508,00	316.134.515,00	(2.696.993,00)	99,15	
7.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	318.831.508,00	316.134.515,00	(2.696.993,00)	99,15	
7.01.03.2.02.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	10.770.000,00	10.770.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	308.061.508,00	305.364.515,00	(2.696.993,00)	99,12	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	178.800.000,00	178.800.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	178.800.000,00	178.800.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.800.000,00	178.800.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	593.631.508,00	590.934.515,00	(2.696.993,00)	99,55	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(593.631.508,00)	(590.934.515,00)	2.696.993,00	99,55	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(593.631.508,00)	(590.934.515,00)	2.696.993,00	99,55	





7.01.2.13.0.00.34.0000

KECAMATAN BOGOR BARAT



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.34.0000 KECAMATAN BOGOR BARAT

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	25.749.400,00	25.749.400,00	0,00	100,00	
2.13.05.2.01	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.749.400,00	25.749.400,00	0,00	100,00	
2.13.05.2.01.0003	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	25.749.400,00	25.749.400,00	0,00	100,00	
2.13.05.2.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	25.749.400,00	25.749.400,00	0,00	100,00	
2.13.05.2.01.0003.5.1.01	Belanja Pegawai	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	100,00	
2.13.05.2.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.719.400,00	22.719.400,00	0,00	100,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.320.105.604,00	33.633.129.472,00	(686.976.132,00)	98,00	
7.01.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	9.999.800,00	9.999.800,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	6.999.800,00	6.999.800,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	6.999.800,00	6.999.800,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.01.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.989.800,00	5.989.800,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01.01.2.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	28.970.627.642,00	28.510.116.422,00	(460.511.220,00)	98,41	
7.01.01.2.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	28.928.239.742,00	28.467.728.522,00	(460.511.220,00)	98,41	
7.01.01.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	28.928.239.742,00	28.467.728.522,00	(460.511.220,00)	98,41	
7.01.01.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	28.928.239.742,00	28.467.728.522,00	(460.511.220,00)	98,41	
7.01.01.2.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	1.161.300,00	1.161.300,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	1.161.300,00	1.161.300,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.161.300,00	1.161.300,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	41.226.600,00	41.226.600,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	41.226.600,00	41.226.600,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.02.0007.5.1.01	Belanja Pegawai	40.710.000,00	40.710.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	516.600,00	516.600,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.824.279.900,00	1.749.371.960,00	(74.907.940,00)	95,89	
7.01.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	11.962.400,00	11.962.400,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	11.962.400,00	11.962.400,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.962.400,00	11.962.400,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	960.104.400,00	907.600.260,00	(52.504.140,00)	94,53	
7.01.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	130.587.300,00	128.677.300,00	(1.910.000,00)	98,54	
7.01.01.2.06.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	39.240.000,00	37.330.000,00	(1.910.000,00)	95,13	
7.01.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.347.300,00	91.347.300,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0002.5.2	BELANJA MODAL	829.517.100,00	778.922.960,00	(50.594.140,00)	93,90	
7.01.01.2.06.0002.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	829.517.100,00	778.922.960,00	(50.594.140,00)	93,90	
7.01.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	28.188.500,00	28.188.500,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	28.188.500,00	28.188.500,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.188.500,00	28.188.500,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	231.375.000,00	211.815.000,00	(19.560.000,00)	91,55	
7.01.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	231.375.000,00	211.815.000,00	(19.560.000,00)	91,55	
7.01.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.375.000,00	211.815.000,00	(19.560.000,00)	91,55	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	28.647.600,00	27.996.800,00	(650.800,00)	97,73	
7.01.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	28.647.600,00	27.996.800,00	(650.800,00)	97,73	
7.01.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.647.600,00	27.996.800,00	(650.800,00)	97,73	
7.01.01.2.06.0006	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	24.000.000,00	23.780.000,00	(220.000,00)	99,08	
7.01.01.2.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	24.000.000,00	23.780.000,00	(220.000,00)	99,08	
7.01.01.2.06.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	23.780.000,00	(220.000,00)	99,08	
7.01.01.2.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	540.002.000,00	538.029.000,00	(1.973.000,00)	99,63	
7.01.01.2.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	540.002.000,00	538.029.000,00	(1.973.000,00)	99,63	
7.01.01.2.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	540.002.000,00	538.029.000,00	(1.973.000,00)	99,63	
7.01.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.07.0009	PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.07.0009.5.1	BELANJA OPERASI	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.07.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.07.0009.5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.01.2.07.0009.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.811.522.262,00	2.668.868.530,00	(142.653.732,00)	94,93	
7.01.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	313.130.550,00	298.938.606,00	(14.191.944,00)	95,47	
7.01.01.2.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	313.130.550,00	298.938.606,00	(14.191.944,00)	95,47	
7.01.01.2.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	313.130.550,00	298.938.606,00	(14.191.944,00)	95,47	
7.01.01.2.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.498.391.712,00	2.369.929.924,00	(128.461.788,00)	94,86	
7.01.01.2.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	2.498.391.712,00	2.369.929.924,00	(128.461.788,00)	94,86	
7.01.01.2.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.498.391.712,00	2.369.929.924,00	(128.461.788,00)	94,86	
7.01.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	619.676.000,00	610.772.760,00	(8.903.240,00)	98,56	
7.01.01.2.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	158.400.000,00	153.867.250,00	(4.532.750,00)	97,14	
7.01.01.2.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	158.400.000,00	153.867.250,00	(4.532.750,00)	97,14	
7.01.01.2.09.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.400.000,00	153.867.250,00	(4.532.750,00)	97,14	
7.01.01.2.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	60.900.000,00	59.620.000,00	(1.280.000,00)	97,90	
7.01.01.2.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	60.900.000,00	59.620.000,00	(1.280.000,00)	97,90	
7.01.01.2.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.900.000,00	59.620.000,00	(1.280.000,00)	97,90	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01.01.2.09.0009	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	400.376.000,00	397.285.510,00	(3.090.490,00)	99,23	
7.01.01.2.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	400.376.000,00	397.285.510,00	(3.090.490,00)	99,23	
7.01.01.2.09.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.376.000,00	397.285.510,00	(3.090.490,00)	99,23	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	108.540.000,00	108.341.500,00	(198.500,00)	99,82	
7.01.02.2.01	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATANNPemerintahan di tingkat Kecamatan	38.540.000,00	38.540.000,00	0,00	100,00	
7.01.02.2.01.0001	KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT	38.540.000,00	38.540.000,00	0,00	100,00	
7.01.02.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	38.540.000,00	38.540.000,00	0,00	100,00	
7.01.02.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.540.000,00	38.540.000,00	0,00	100,00	
7.01.02.2.02	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	70.000.000,00	69.801.500,00	(198.500,00)	99,72	
7.01.02.2.02.0001	PERENCANAAN KEGIATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN	70.000.000,00	69.801.500,00	(198.500,00)	99,72	
7.01.02.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	69.801.500,00	(198.500,00)	99,72	
7.01.02.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00	
7.01.02.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.980.000,00	67.781.500,00	(198.500,00)	99,71	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	542.935.600,00	542.812.600,00	(123.000,00)	99,98	
7.01.03.2.03	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	542.935.600,00	542.812.600,00	(123.000,00)	99,98	
7.01.03.2.03.0001	PENYELENGGARAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	454.699.700,00	454.576.700,00	(123.000,00)	99,97	
7.01.03.2.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	454.699.700,00	454.576.700,00	(123.000,00)	99,97	
7.01.03.2.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	454.699.700,00	454.576.700,00	(123.000,00)	99,97	
7.01.03.2.03.0002	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN	58.123.200,00	58.123.200,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	58.123.200,00	58.123.200,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.03.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	19.320.000,00	19.320.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.03.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.803.200,00	38.803.200,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.03.0004	FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT	23.112.700,00	23.112.700,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	23.112.700,00	23.112.700,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.03.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.03.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.082.700,00	20.082.700,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.03.0005	FASILITASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01.03.2.03.0005.5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.03.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	102.703.900,00	98.703.685,00	(4.000.215,00)	96,11	
7.01.04.2.01	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	102.703.900,00	98.703.685,00	(4.000.215,00)	96,11	
7.01.04.2.01.0001	SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	102.703.900,00	98.703.685,00	(4.000.215,00)	96,11	
7.01.04.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	102.703.900,00	98.703.685,00	(4.000.215,00)	96,11	
7.01.04.2.01.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	14.520.000,00	14.520.000,00	0,00	100,00	
7.01.04.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.183.900,00	84.183.685,00	(4.000.215,00)	95,46	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	35.100.034.504,00	34.408.736.657,00	(691.297.847,00)	98,03	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(35.100.034.504,00)	(34.408.736.657,00)	691.297.847,00	98,03	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(35.100.034.504,00)	(34.408.736.657,00)	691.297.847,00	98,03	





7.01.2.13.0.00.34.0000

KECAMATAN BOGOR BARAT

KELURAHAN BALUMBANG JAYA



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.34.0000 KECAMATAN BOGOR BARAT
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.34.0001 KELURAHAN BALUMBANG JAYA

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	96.352.700,00	96.259.200,00	(93.500,00)	99,90	
7.01.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	96.352.700,00	96.259.200,00	(93.500,00)	99,90	
7.01.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.975.500,00	3.975.500,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	3.975.500,00	3.975.500,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.975.500,00	3.975.500,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	14.003.000,00	14.003.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	14.003.000,00	14.003.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.003.000,00	14.003.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	9.940.900,00	9.877.400,00	(63.500,00)	99,36	
7.01.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	9.940.900,00	9.877.400,00	(63.500,00)	99,36	
7.01.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.940.900,00	9.877.400,00	(63.500,00)	99,36	
7.01.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	66.450.000,00	66.420.000,00	(30.000,00)	99,95	
7.01.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	66.450.000,00	66.420.000,00	(30.000,00)	99,95	
7.01.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	27.900.000,00	27.900.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.550.000,00	38.520.000,00	(30.000,00)	99,92	
7.01.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1.983.300,00	1.983.300,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	1.983.300,00	1.983.300,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.983.300,00	1.983.300,00	0,00	100,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	455.274.300,00	454.469.350,00	(804.950,00)	99,82	
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	455.274.300,00	454.469.350,00	(804.950,00)	99,82	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	3.915.800,00	3.915.800,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	3.915.800,00	3.915.800,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.915.800,00	3.915.800,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	185.558.500,00	184.753.550,00	(804.950,00)	99,57	
7.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	74.591.900,00	(408.100,00)	99,46	
7.01.03.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	74.591.900,00	(408.100,00)	99,46	
7.01.03.2.02.0002.5.2	BELANJA MODAL	110.558.500,00	110.161.650,00	(396.850,00)	99,64	
7.01.03.2.02.0002.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	110.558.500,00	110.161.650,00	(396.850,00)	99,64	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	265.800.000,00	265.800.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	265.800.000,00	265.800.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	265.800.000,00	265.800.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	551.627.000,00	550.728.550,00	(898.450,00)	99,84	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(551.627.000,00)	(550.728.550,00)	898.450,00	99,84	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(551.627.000,00)	(550.728.550,00)	898.450,00	99,84	





7.01.2.13.0.00.34.0000

KECAMATAN BOGOR BARAT

KELURAHAN BUBULAK



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.34.0000 KECAMATAN BOGOR BARAT
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.34.0002 KELURAHAN BUBULAK

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	108.970.000,00	108.970.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	108.970.000,00	108.970.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.311.600,00	2.311.600,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	2.311.600,00	2.311.600,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.311.600,00	2.311.600,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	15.703.400,00	15.703.400,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	15.703.400,00	15.703.400,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.703.400,00	15.703.400,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	76.555.000,00	76.555.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	76.555.000,00	76.555.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	37.180.000,00	37.180.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.375.000,00	39.375.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	518.437.300,00	517.888.225,00	(549.075,00)	99,89	
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	518.437.300,00	517.888.225,00	(549.075,00)	99,89	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	11.040.000,00	11.040.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	11.040.000,00	11.040.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.040.000,00	11.040.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	150.000.000,00	149.460.925,00	(539.075,00)	99,64	
7.01.03.2.02.0002.5.2	BELANJA MODAL	150.000.000,00	149.460.925,00	(539.075,00)	99,64	
7.01.03.2.02.0002.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	150.000.000,00	149.460.925,00	(539.075,00)	99,64	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	357.397.300,00	357.387.300,00	(10.000,00)	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	357.397.300,00	357.387.300,00	(10.000,00)	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	357.397.300,00	357.387.300,00	(10.000,00)	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	627.407.300,00	626.858.225,00	(549.075,00)	99,91	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(627.407.300,00)	(626.858.225,00)	549.075,00	99,91	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(627.407.300,00)	(626.858.225,00)	549.075,00	99,91	





7.01.2.13.0.00.34.0000

KECAMATAN BOGOR BARAT

KELURAHAN CILENDEK BARAT



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.34.0000 KECAMATAN BOGOR BARAT
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.34.0003 KELURAHAN CILENDEK BARAT

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	103.500.000,00	103.013.300,00	(486.700,00)	99,53	
7.01.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	103.500.000,00	103.013.300,00	(486.700,00)	99,53	
7.01.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.818.400,00	3.798.000,00	(20.400,00)	99,47	
7.01.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	3.818.400,00	3.798.000,00	(20.400,00)	99,47	
7.01.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.818.400,00	3.798.000,00	(20.400,00)	99,47	
7.01.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	14.885.800,00	14.580.500,00	(305.300,00)	97,95	
7.01.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	14.885.800,00	14.580.500,00	(305.300,00)	97,95	
7.01.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.885.800,00	14.580.500,00	(305.300,00)	97,95	
7.01.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	5.081.800,00	4.920.800,00	(161.000,00)	96,83	
7.01.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	5.081.800,00	4.920.800,00	(161.000,00)	96,83	
7.01.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.081.800,00	4.920.800,00	(161.000,00)	96,83	
7.01.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	78.175.000,00	78.175.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	78.175.000,00	78.175.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	31.240.000,00	31.240.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.935.000,00	46.935.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1.539.000,00	1.539.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	1.539.000,00	1.539.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.539.000,00	1.539.000,00	0,00	100,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	655.673.800,00	654.895.017,00	(778.783,00)	99,88	
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	655.673.800,00	654.895.017,00	(778.783,00)	99,88	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	206.917.600,00	206.138.817,00	(778.783,00)	99,62	
7.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	95.177.000,00	94.768.336,00	(408.664,00)	99,57	
7.01.03.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.177.000,00	94.768.336,00	(408.664,00)	99,57	
7.01.03.2.02.0002.5.2	BELANJA MODAL	111.740.600,00	111.370.481,00	(370.119,00)	99,67	
7.01.03.2.02.0002.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	111.740.600,00	111.370.481,00	(370.119,00)	99,67	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	444.256.200,00	444.256.200,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	444.256.200,00	444.256.200,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	444.256.200,00	444.256.200,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	759.173.800,00	757.908.317,00	(1.265.483,00)	99,83	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(759.173.800,00)	(757.908.317,00)	1.265.483,00	99,83	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(759.173.800,00)	(757.908.317,00)	1.265.483,00	99,83	





7.01.2.13.0.00.34.0000

KECAMATAN BOGOR BARAT

KELURAHAN CILENDEK TIMUR



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.34.0000 KECAMATAN BOGOR BARAT
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.34.0004 KELURAHAN CILENDEK TIMUR

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	103.500.000,00	103.373.600,00	(126.400,00)	99,88	
7.01.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	103.500.000,00	103.373.600,00	(126.400,00)	99,88	
7.01.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.480.000,00	4.475.000,00	(5.000,00)	99,89	
7.01.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	4.480.000,00	4.475.000,00	(5.000,00)	99,89	
7.01.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.480.000,00	4.475.000,00	(5.000,00)	99,89	
7.01.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	14.757.800,00	14.691.000,00	(66.800,00)	99,55	
7.01.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	14.757.800,00	14.691.000,00	(66.800,00)	99,55	
7.01.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.757.800,00	14.691.000,00	(66.800,00)	99,55	
7.01.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	6.195.000,00	6.141.000,00	(54.000,00)	99,13	
7.01.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	6.195.000,00	6.141.000,00	(54.000,00)	99,13	
7.01.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.195.000,00	6.141.000,00	(54.000,00)	99,13	
7.01.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	75.750.000,00	75.750.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	75.750.000,00	75.750.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.150.000,00	36.150.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.317.200,00	2.316.600,00	(600,00)	99,97	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	2.317.200,00	2.316.600,00	(600,00)	99,97	
7.01.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.317.200,00	2.316.600,00	(600,00)	99,97	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	533.000.000,00	532.136.624,00	(863.376,00)	99,84	
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	533.000.000,00	532.136.624,00	(863.376,00)	99,84	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	200.900.000,00	200.036.624,00	(863.376,00)	99,57	
7.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	7.400,00	0,00	(7.400,00)	0,00	
7.01.03.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.400,00	0,00	(7.400,00)	0,00	
7.01.03.2.02.0002.5.2	BELANJA MODAL	200.892.600,00	200.036.624,00	(855.976,00)	99,57	
7.01.03.2.02.0002.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.892.600,00	200.036.624,00	(855.976,00)	99,57	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	327.600.000,00	327.600.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	327.600.000,00	327.600.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	327.600.000,00	327.600.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	636.500.000,00	635.510.224,00	(989.776,00)	99,84	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(636.500.000,00)	(635.510.224,00)	989.776,00	99,84	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(636.500.000,00)	(635.510.224,00)	989.776,00	99,84	





7.01.2.13.0.00.34.0000

KECAMATAN BOGOR BARAT

KELURAHAN CURUG



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.34.0000 KECAMATAN BOGOR BARAT
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.34.0005 KELURAHAN CURUG

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	84.230.000,00	84.230.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	84.230.000,00	84.230.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	992.000,00	992.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	992.000,00	992.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	992.000,00	992.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	11.254.300,00	11.254.300,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	11.254.300,00	11.254.300,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.254.300,00	11.254.300,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	3.534.000,00	3.534.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	3.534.000,00	3.534.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.534.000,00	3.534.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	64.265.000,00	64.265.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	64.265.000,00	64.265.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	30.200.000,00	30.200.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.065.000,00	34.065.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	4.184.700,00	4.184.700,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	4.184.700,00	4.184.700,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.184.700,00	4.184.700,00	0,00	100,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	499.498.800,00	496.513.277,00	(2.985.523,00)	99,40	
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	499.498.800,00	496.513.277,00	(2.985.523,00)	99,40	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	150.000.000,00	149.324.477,00	(675.523,00)	99,55	
7.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	149.324.477,00	(675.523,00)	99,55	
7.01.03.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	149.324.477,00	(675.523,00)	99,55	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	339.748.800,00	337.438.800,00	(2.310.000,00)	99,32	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	339.748.800,00	337.438.800,00	(2.310.000,00)	99,32	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	339.748.800,00	337.438.800,00	(2.310.000,00)	99,32	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	583.728.800,00	580.743.277,00	(2.985.523,00)	99,49	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(583.728.800,00)	(580.743.277,00)	2.985.523,00	99,49	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(583.728.800,00)	(580.743.277,00)	2.985.523,00	99,49	





7.01.2.13.0.00.34.0000

KECAMATAN BOGOR BARAT

KELURAHAN CURUG MEKAR



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.34.0000 KECAMATAN BOGOR BARAT
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.34.0006 KELURAHAN CURUG MEKAR

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	104.084.200,00	104.084.200,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	104.084.200,00	104.084.200,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.114.500,00	3.114.500,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	3.114.500,00	3.114.500,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.114.500,00	3.114.500,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	20.704.900,00	20.704.900,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	20.704.900,00	20.704.900,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.704.900,00	20.704.900,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	12.232.300,00	12.232.300,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	12.232.300,00	12.232.300,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.232.300,00	12.232.300,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	65.760.000,00	65.760.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	65.760.000,00	65.760.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	30.090.000,00	30.090.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.670.000,00	35.670.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.272.500,00	2.272.500,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	2.272.500,00	2.272.500,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.272.500,00	2.272.500,00	0,00	100,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	491.827.300,00	490.770.406,00	(1.056.894,00)	99,79	
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	491.827.300,00	490.770.406,00	(1.056.894,00)	99,79	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	3.915.800,00	3.915.800,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	3.915.800,00	3.915.800,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.915.800,00	3.915.800,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	179.511.500,00	178.454.606,00	(1.056.894,00)	99,41	
7.01.03.2.02.0002.5.2	BELANJA MODAL	179.511.500,00	178.454.606,00	(1.056.894,00)	99,41	
7.01.03.2.02.0002.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	179.511.500,00	178.454.606,00	(1.056.894,00)	99,41	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	308.400.000,00	308.400.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	308.400.000,00	308.400.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	308.400.000,00	308.400.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	595.911.500,00	594.854.606,00	(1.056.894,00)	99,82	
SURPLUS / (DEFISIT)		(595.911.500,00)	(594.854.606,00)	1.056.894,00	99,82	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(595.911.500,00)	(594.854.606,00)	1.056.894,00	99,82	





7.01.2.13.0.00.34.0000

KECAMATAN BOGOR BARAT

KELURAHAN GUNUNG BATU



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.34.0000 KECAMATAN BOGOR BARAT
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.34.0007 KELURAHAN GUNUNG BATU

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	103.437.300,00	91.817.300,00	(11.620.000,00)	88,77	
7.01.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	103.437.300,00	91.817.300,00	(11.620.000,00)	88,77	
7.01.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.991.300,00	4.991.300,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	4.991.300,00	4.991.300,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.991.300,00	4.991.300,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	12.199.300,00	12.199.300,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	12.199.300,00	12.199.300,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.199.300,00	12.199.300,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	4.368.200,00	4.368.200,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	4.368.200,00	4.368.200,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.368.200,00	4.368.200,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	78.360.000,00	66.740.000,00	(11.620.000,00)	85,17	
7.01.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	78.360.000,00	66.740.000,00	(11.620.000,00)	85,17	
7.01.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	32.340.000,00	20.720.000,00	(11.620.000,00)	64,07	
7.01.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.020.000,00	46.020.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.518.500,00	3.518.500,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	3.518.500,00	3.518.500,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.518.500,00	3.518.500,00	0,00	100,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	581.750.000,00	580.587.694,00	(1.162.306,00)	99,80	
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	581.750.000,00	580.587.694,00	(1.162.306,00)	99,80	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	217.850.000,00	216.687.694,00	(1.162.306,00)	99,47	
7.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	75.162.600,00	74.682.654,00	(479.946,00)	99,36	
7.01.03.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.162.600,00	74.682.654,00	(479.946,00)	99,36	
7.01.03.2.02.0002.5.2	BELANJA MODAL	142.687.400,00	142.005.040,00	(682.360,00)	99,52	
7.01.03.2.02.0002.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	142.687.400,00	142.005.040,00	(682.360,00)	99,52	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	359.400.000,00	359.400.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	359.400.000,00	359.400.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	359.400.000,00	359.400.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	685.187.300,00	672.404.994,00	(12.782.306,00)	98,13	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(685.187.300,00)	(672.404.994,00)	12.782.306,00	98,13	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(685.187.300,00)	(672.404.994,00)	12.782.306,00	98,13	





7.01.2.13.0.00.34.0000

KECAMATAN BOGOR BARAT

KELURAHAN LOJI



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.34.0000 KECAMATAN BOGOR BARAT
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.34.0008 KELURAHAN LOJI

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	95.075.700,00	94.353.700,00	(722.000,00)	99,24	
7.01.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	95.075.700,00	94.353.700,00	(722.000,00)	99,24	
7.01.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.976.000,00	2.976.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	2.976.000,00	2.976.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.976.000,00	2.976.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	10.885.600,00	10.252.700,00	(632.900,00)	94,19	
7.01.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	10.885.600,00	10.252.700,00	(632.900,00)	94,19	
7.01.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.885.600,00	10.252.700,00	(632.900,00)	94,19	
7.01.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	4.429.800,00	4.340.700,00	(89.100,00)	97,99	
7.01.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	4.429.800,00	4.340.700,00	(89.100,00)	97,99	
7.01.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.429.800,00	4.340.700,00	(89.100,00)	97,99	
7.01.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	74.375.000,00	74.375.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	74.375.000,00	74.375.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	34.100.000,00	34.100.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.275.000,00	40.275.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.409.300,00	2.409.300,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	2.409.300,00	2.409.300,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.409.300,00	2.409.300,00	0,00	100,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	485.004.100,00	483.125.876,00	(1.878.224,00)	99,61	
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	485.004.100,00	483.125.876,00	(1.878.224,00)	99,61	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	8.034.200,00	7.584.200,00	(450.000,00)	94,40	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	8.034.200,00	7.584.200,00	(450.000,00)	94,40	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.034.200,00	7.584.200,00	(450.000,00)	94,40	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	136.001.200,00	135.653.676,00	(347.524,00)	99,74	
7.01.03.2.02.0002.5.2	BELANJA MODAL	136.001.200,00	135.653.676,00	(347.524,00)	99,74	
7.01.03.2.02.0002.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	136.001.200,00	135.653.676,00	(347.524,00)	99,74	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	340.968.700,00	339.888.000,00	(1.080.700,00)	99,68	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	340.968.700,00	339.888.000,00	(1.080.700,00)	99,68	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	340.968.700,00	339.888.000,00	(1.080.700,00)	99,68	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	580.079.800,00	577.479.576,00	(2.600.224,00)	99,55	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(580.079.800,00)	(577.479.576,00)	2.600.224,00	99,55	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(580.079.800,00)	(577.479.576,00)	2.600.224,00	99,55	





7.01.2.13.0.00.34.0000

KECAMATAN BOGOR BARAT

KELURAHAN MARGAJAYA



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.34.0000 KECAMATAN BOGOR BARAT
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.34.0009 KELURAHAN MARGAJAYA

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	89.924.400,00	89.885.200,00	(39.200,00)	99,96	
7.01.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	89.924.400,00	89.885.200,00	(39.200,00)	99,96	
7.01.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.649.500,00	4.649.500,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	4.649.500,00	4.649.500,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.649.500,00	4.649.500,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	16.591.200,00	16.591.200,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	16.591.200,00	16.591.200,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.591.200,00	16.591.200,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	5.322.000,00	5.322.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	5.322.000,00	5.322.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.322.000,00	5.322.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	60.125.000,00	60.085.800,00	(39.200,00)	99,93	
7.01.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	60.125.000,00	60.085.800,00	(39.200,00)	99,93	
7.01.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	22.640.000,00	22.640.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.485.000,00	37.445.800,00	(39.200,00)	99,90	
7.01.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.236.700,00	3.236.700,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	3.236.700,00	3.236.700,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.236.700,00	3.236.700,00	0,00	100,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	299.890.500,00	299.511.550,00	(378.950,00)	99,87	
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	299.890.500,00	299.511.550,00	(378.950,00)	99,87	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	4.790.600,00	4.790.600,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	4.790.600,00	4.790.600,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.790.600,00	4.790.600,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	111.740.600,00	111.361.650,00	(378.950,00)	99,66	
7.01.03.2.02.0002.5.2	BELANJA MODAL	111.740.600,00	111.361.650,00	(378.950,00)	99,66	
7.01.03.2.02.0002.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	111.740.600,00	111.361.650,00	(378.950,00)	99,66	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	183.359.300,00	183.359.300,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	183.359.300,00	183.359.300,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.359.300,00	183.359.300,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	389.814.900,00	389.396.750,00	(418.150,00)	99,89	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(389.814.900,00)	(389.396.750,00)	418.150,00	99,89	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(389.814.900,00)	(389.396.750,00)	418.150,00	99,89	





7.01.2.13.0.00.34.0000

KECAMATAN BOGOR BARAT

KELURAHAN MENTENG



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.34.0000 KECAMATAN BOGOR BARAT
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.34.0010 KELURAHAN MENTENG

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	108.942.800,00	100.961.600,00	(7.981.200,00)	92,67	
7.01.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	108.942.800,00	100.961.600,00	(7.981.200,00)	92,67	
7.01.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.492.700,00	2.338.800,00	(153.900,00)	93,83	
7.01.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	2.492.700,00	2.338.800,00	(153.900,00)	93,83	
7.01.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.492.700,00	2.338.800,00	(153.900,00)	93,83	
7.01.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	14.740.500,00	12.344.300,00	(2.396.200,00)	83,74	
7.01.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	14.740.500,00	12.344.300,00	(2.396.200,00)	83,74	
7.01.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.740.500,00	12.344.300,00	(2.396.200,00)	83,74	
7.01.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	1.298.800,00	979.400,00	(319.400,00)	75,41	
7.01.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.298.800,00	979.400,00	(319.400,00)	75,41	
7.01.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.298.800,00	979.400,00	(319.400,00)	75,41	
7.01.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	87.570.000,00	82.950.000,00	(4.620.000,00)	94,72	
7.01.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	87.570.000,00	82.950.000,00	(4.620.000,00)	94,72	
7.01.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	39.600.000,00	36.300.000,00	(3.300.000,00)	91,67	
7.01.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.970.000,00	46.650.000,00	(1.320.000,00)	97,25	
7.01.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.840.800,00	2.349.100,00	(491.700,00)	82,69	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	2.840.800,00	2.349.100,00	(491.700,00)	82,69	
7.01.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.840.800,00	2.349.100,00	(491.700,00)	82,69	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	617.313.140,00	616.975.006,00	(338.134,00)	99,95	
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	617.313.140,00	616.975.006,00	(338.134,00)	99,95	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	7.558.200,00	7.549.200,00	(9.000,00)	99,88	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	7.558.200,00	7.549.200,00	(9.000,00)	99,88	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.558.200,00	7.549.200,00	(9.000,00)	99,88	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	175.954.940,00	175.625.806,00	(329.134,00)	99,81	
7.01.03.2.02.0002.5.2	BELANJA MODAL	175.954.940,00	175.625.806,00	(329.134,00)	99,81	
7.01.03.2.02.0002.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	175.954.940,00	175.625.806,00	(329.134,00)	99,81	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	433.800.000,00	433.800.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	433.800.000,00	433.800.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	433.800.000,00	433.800.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	726.255.940,00	717.936.606,00	(8.319.334,00)	98,85	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(726.255.940,00)	(717.936.606,00)	8.319.334,00	98,85	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(726.255.940,00)	(717.936.606,00)	8.319.334,00	98,85	





7.01.2.13.0.00.34.0000

KECAMATAN BOGOR BARAT

KELURAHAN PASIR JAYA



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.34.0000 KECAMATAN BOGOR BARAT
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.34.0011 KELURAHAN PASIR JAYA

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	105.957.700,00	104.546.800,00	(1.410.900,00)	98,67	
7.01.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	105.957.700,00	104.546.800,00	(1.410.900,00)	98,67	
7.01.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.816.800,00	4.700.400,00	(116.400,00)	97,58	
7.01.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	4.816.800,00	4.700.400,00	(116.400,00)	97,58	
7.01.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.816.800,00	4.700.400,00	(116.400,00)	97,58	
7.01.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	18.684.400,00	18.545.300,00	(139.100,00)	99,26	
7.01.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	18.684.400,00	18.545.300,00	(139.100,00)	99,26	
7.01.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.684.400,00	18.545.300,00	(139.100,00)	99,26	
7.01.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	9.169.800,00	8.491.200,00	(678.600,00)	92,60	
7.01.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	9.169.800,00	8.491.200,00	(678.600,00)	92,60	
7.01.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.169.800,00	8.491.200,00	(678.600,00)	92,60	
7.01.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	70.950.000,00	70.890.000,00	(60.000,00)	99,92	
7.01.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	70.950.000,00	70.890.000,00	(60.000,00)	99,92	
7.01.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	37.020.000,00	37.020.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.930.000,00	33.870.000,00	(60.000,00)	99,82	
7.01.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.336.700,00	1.919.900,00	(416.800,00)	82,16	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	2.336.700,00	1.919.900,00	(416.800,00)	82,16	
7.01.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.336.700,00	1.919.900,00	(416.800,00)	82,16	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	581.082.600,00	575.453.760,00	(5.628.840,00)	99,03	
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	581.082.600,00	575.453.760,00	(5.628.840,00)	99,03	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	5.042.300,00	5.042.300,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	5.042.300,00	5.042.300,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.042.300,00	5.042.300,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	211.001.200,00	210.422.360,00	(578.840,00)	99,73	
7.01.03.2.02.0002.5.2	BELANJA MODAL	211.001.200,00	210.422.360,00	(578.840,00)	99,73	
7.01.03.2.02.0002.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	136.001.200,00	135.515.258,00	(485.942,00)	99,64	
7.01.03.2.02.0002.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	75.000.000,00	74.907.102,00	(92.898,00)	99,88	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	365.039.100,00	359.989.100,00	(5.050.000,00)	98,62	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	365.039.100,00	359.989.100,00	(5.050.000,00)	98,62	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	365.039.100,00	359.989.100,00	(5.050.000,00)	98,62	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	687.040.300,00	680.000.560,00	(7.039.740,00)	98,98	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(687.040.300,00)	(680.000.560,00)	7.039.740,00	98,98	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(687.040.300,00)	(680.000.560,00)	7.039.740,00	98,98	





7.01.2.13.0.00.34.0000

KECAMATAN BOGOR BARAT

KELURAHAN PASIR KUDA



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.34.0000 KECAMATAN BOGOR BARAT
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.34.0012 KELURAHAN PASIR KUDA

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	102.922.600,00	102.877.600,00	(45.000,00)	99,96	
7.01.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	102.922.600,00	102.877.600,00	(45.000,00)	99,96	
7.01.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	998.200,00	998.200,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	998.200,00	998.200,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	998.200,00	998.200,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	12.715.000,00	12.715.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	12.715.000,00	12.715.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.715.000,00	12.715.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	4.775.600,00	4.775.600,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	4.775.600,00	4.775.600,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.775.600,00	4.775.600,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	82.155.000,00	82.155.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	82.155.000,00	82.155.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.755.000,00	55.755.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.278.800,00	2.233.800,00	(45.000,00)	98,03	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	2.278.800,00	2.233.800,00	(45.000,00)	98,03	
7.01.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.278.800,00	2.233.800,00	(45.000,00)	98,03	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	508.639.370,00	507.169.632,00	(1.469.738,00)	99,71	
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	508.639.370,00	507.169.632,00	(1.469.738,00)	99,71	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	9.262.400,00	9.262.400,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	9.262.400,00	9.262.400,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.262.400,00	9.262.400,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	183.154.470,00	182.684.732,00	(469.738,00)	99,74	
7.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	183.154.470,00	182.684.732,00	(469.738,00)	99,74	
7.01.03.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.154.470,00	182.684.732,00	(469.738,00)	99,74	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	316.222.500,00	315.222.500,00	(1.000.000,00)	99,68	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	316.222.500,00	315.222.500,00	(1.000.000,00)	99,68	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.222.500,00	315.222.500,00	(1.000.000,00)	99,68	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	611.561.970,00	610.047.232,00	(1.514.738,00)	99,75	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(611.561.970,00)	(610.047.232,00)	1.514.738,00	99,75	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(611.561.970,00)	(610.047.232,00)	1.514.738,00	99,75	





7.01.2.13.0.00.34.0000

KECAMATAN BOGOR BARAT

KELURAHAN PASIR MULYA



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.34.0000 KECAMATAN BOGOR BARAT
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.34.0013 KELURAHAN PASIR MULYA

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	92.877.700,00	92.877.700,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	92.877.700,00	92.877.700,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.991.800,00	2.991.800,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	2.991.800,00	2.991.800,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.991.800,00	2.991.800,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	13.980.500,00	13.980.500,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	13.980.500,00	13.980.500,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.980.500,00	13.980.500,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	5.371.400,00	5.371.400,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	5.371.400,00	5.371.400,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.371.400,00	5.371.400,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	68.710.000,00	68.710.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	68.710.000,00	68.710.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	32.950.000,00	32.950.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.760.000,00	35.760.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1.824.000,00	1.824.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	1.824.000,00	1.824.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.824.000,00	1.824.000,00	0,00	100,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	258.595.300,00	257.061.198,00	(1.534.102,00)	99,41	
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	258.595.300,00	257.061.198,00	(1.534.102,00)	99,41	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	3.102.300,00	3.102.300,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	3.102.300,00	3.102.300,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.102.300,00	3.102.300,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	111.499.000,00	109.964.898,00	(1.534.102,00)	98,62	
7.01.03.2.02.0002.5.2	BELANJA MODAL	111.499.000,00	109.964.898,00	(1.534.102,00)	98,62	
7.01.03.2.02.0002.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	111.499.000,00	109.964.898,00	(1.534.102,00)	98,62	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	143.994.000,00	143.994.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	143.994.000,00	143.994.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.994.000,00	143.994.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	351.473.000,00	349.938.898,00	(1.534.102,00)	99,56	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(351.473.000,00)	(349.938.898,00)	1.534.102,00	99,56	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(351.473.000,00)	(349.938.898,00)	1.534.102,00	99,56	





7.01.2.13.0.00.34.0000

KECAMATAN BOGOR BARAT

KELURAHAN SEMPLAK



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.34.0000 KECAMATAN BOGOR BARAT
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.34.0014 KELURAHAN SEMPLAK

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	98.230.000,00	97.390.000,00	(840.000,00)	99,14	
7.01.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	98.230.000,00	97.390.000,00	(840.000,00)	99,14	
7.01.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	992.000,00	992.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	992.000,00	992.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	992.000,00	992.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	11.254.300,00	11.254.300,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	11.254.300,00	11.254.300,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.254.300,00	11.254.300,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	3.534.000,00	3.534.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	3.534.000,00	3.534.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.534.000,00	3.534.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	78.265.000,00	77.425.000,00	(840.000,00)	98,93	
7.01.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	78.265.000,00	77.425.000,00	(840.000,00)	98,93	
7.01.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.665.000,00	48.825.000,00	(840.000,00)	98,31	
7.01.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	4.184.700,00	4.184.700,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	4.184.700,00	4.184.700,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.184.700,00	4.184.700,00	0,00	100,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	511.929.500,00	436.427.558,00	(75.501.942,00)	85,25	
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	511.929.500,00	436.427.558,00	(75.501.942,00)	85,25	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	9.749.900,00	5.998.400,00	(3.751.500,00)	61,52	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	9.749.900,00	5.998.400,00	(3.751.500,00)	61,52	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.749.900,00	5.998.400,00	(3.751.500,00)	61,52	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	138.080.500,00	136.931.358,00	(1.149.142,00)	99,17	
7.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	2.080.500,00	1.500.000,00	(580.500,00)	72,10	
7.01.03.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.080.500,00	1.500.000,00	(580.500,00)	72,10	
7.01.03.2.02.0002.5.2	BELANJA MODAL	136.000.000,00	135.431.358,00	(568.642,00)	99,58	
7.01.03.2.02.0002.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	136.000.000,00	135.431.358,00	(568.642,00)	99,58	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	364.099.100,00	293.497.800,00	(70.601.300,00)	80,61	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	364.099.100,00	293.497.800,00	(70.601.300,00)	80,61	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	364.099.100,00	293.497.800,00	(70.601.300,00)	80,61	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	610.159.500,00	533.817.558,00	(76.341.942,00)	87,49	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(610.159.500,00)	(533.817.558,00)	76.341.942,00	87,49	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(610.159.500,00)	(533.817.558,00)	76.341.942,00	87,49	





7.01.2.13.0.00.34.0000

KECAMATAN BOGOR BARAT

KELURAHAN SINDANG BARANG



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.34.0000 KECAMATAN BOGOR BARAT
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.34.0015 KELURAHAN SINDANG BARANG

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	111.565.000,00	111.565.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	111.565.000,00	111.565.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	7.758.000,00	7.758.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	7.758.000,00	7.758.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.758.000,00	7.758.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	11.166.000,00	11.166.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	11.166.000,00	11.166.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.166.000,00	11.166.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	5.851.000,00	5.851.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	5.851.000,00	5.851.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.851.000,00	5.851.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	82.440.000,00	82.440.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	82.440.000,00	82.440.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.840.000,00	42.840.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	100,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	547.957.800,00	542.087.788,00	(5.870.012,00)	98,93	
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	547.957.800,00	542.087.788,00	(5.870.012,00)	98,93	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	8.435.000,00	8.435.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	8.435.000,00	8.435.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.435.000,00	8.435.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	144.794.000,00	142.127.288,00	(2.666.712,00)	98,16	
7.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	144.794.000,00	142.127.288,00	(2.666.712,00)	98,16	
7.01.03.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.794.000,00	142.127.288,00	(2.666.712,00)	98,16	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	394.728.800,00	391.525.500,00	(3.203.300,00)	99,19	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	394.728.800,00	391.525.500,00	(3.203.300,00)	99,19	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	394.728.800,00	391.525.500,00	(3.203.300,00)	99,19	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	659.522.800,00	653.652.788,00	(5.870.012,00)	99,11	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(659.522.800,00)	(653.652.788,00)	5.870.012,00	99,11	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(659.522.800,00)	(653.652.788,00)	5.870.012,00	99,11	





7.01.2.13.0.00.34.0000

KECAMATAN BOGOR BARAT

KELURAHAN SITU GEDE



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.34.0000 KECAMATAN BOGOR BARAT
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.34.0016 KELURAHAN SITU GEDE

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	104.169.000,00	104.169.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	104.169.000,00	104.169.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.462.400,00	2.462.400,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	2.462.400,00	2.462.400,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.462.400,00	2.462.400,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	18.612.700,00	18.612.700,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	18.612.700,00	18.612.700,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.612.700,00	18.612.700,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	2.739.400,00	2.739.400,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	2.739.400,00	2.739.400,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.739.400,00	2.739.400,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	77.425.000,00	77.425.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	77.425.000,00	77.425.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	29.680.000,00	29.680.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.745.000,00	47.745.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.929.500,00	2.929.500,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	2.929.500,00	2.929.500,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.929.500,00	2.929.500,00	0,00	100,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	411.241.100,00	410.489.066,00	(752.034,00)	99,82	
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	411.241.100,00	410.489.066,00	(752.034,00)	99,82	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	3.735.900,00	3.735.900,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	3.735.900,00	3.735.900,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.735.900,00	3.735.900,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	150.000.000,00	149.247.966,00	(752.034,00)	99,50	
7.01.03.2.02.0002.5.2	BELANJA MODAL	150.000.000,00	149.247.966,00	(752.034,00)	99,50	
7.01.03.2.02.0002.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	150.000.000,00	149.247.966,00	(752.034,00)	99,50	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	257.505.200,00	257.505.200,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	257.505.200,00	257.505.200,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	257.505.200,00	257.505.200,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	515.410.100,00	514.658.066,00	(752.034,00)	99,85	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(515.410.100,00)	(514.658.066,00)	752.034,00	99,85	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(515.410.100,00)	(514.658.066,00)	752.034,00	99,85	





7.01.2.13.0.00.35.0000

KECAMATAN BOGOR TENGAH



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.35.0000 KECAMATAN BOGOR TENGAH

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
2.13.05.2.01	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
2.13.05.2.01.0003	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
2.13.05.2.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
2.13.05.2.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.214.745.237,00	28.419.915.994,00	(794.829.243,00)	97,28	
7.01.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	19.880.500,00	19.880.225,00	(275,00)	100,00	
7.01.01.2.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	4.413.000,00	4.412.975,00	(25,00)	100,00	
7.01.01.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	4.413.000,00	4.412.975,00	(25,00)	100,00	
7.01.01.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.413.000,00	4.412.975,00	(25,00)	100,00	
7.01.01.2.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	15.467.500,00	15.467.250,00	(250,00)	100,00	
7.01.01.2.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	15.467.500,00	15.467.250,00	(250,00)	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01.01.2.01.0006.5.1.01	Belanja Pegawai	11.110.000,00	11.110.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.357.500,00	4.357.250,00	(250,00)	99,99	
7.01.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	21.493.987.244,00	21.293.940.298,00	(200.046.946,00)	99,07	
7.01.01.2.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	21.420.995.744,00	21.220.949.148,00	(200.046.596,00)	99,07	
7.01.01.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	21.420.995.744,00	21.220.949.148,00	(200.046.596,00)	99,07	
7.01.01.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	21.420.995.744,00	21.220.949.148,00	(200.046.596,00)	99,07	
7.01.01.2.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	5.278.500,00	5.278.375,00	(125,00)	100,00	
7.01.01.2.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	5.278.500,00	5.278.375,00	(125,00)	100,00	
7.01.01.2.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.278.500,00	5.278.375,00	(125,00)	100,00	
7.01.01.2.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	67.713.000,00	67.712.775,00	(225,00)	100,00	
7.01.01.2.02.0007.5.1	BELANJA OPERASI	67.713.000,00	67.712.775,00	(225,00)	100,00	
7.01.01.2.02.0007.5.1.01	Belanja Pegawai	67.020.000,00	67.020.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	693.000,00	692.775,00	(225,00)	99,97	
7.01.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	2.124.112.100,00	2.110.382.100,00	(13.730.000,00)	99,35	
7.01.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	25.070.500,00	25.069.500,00	(1.000,00)	100,00	
7.01.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	25.070.500,00	25.069.500,00	(1.000,00)	100,00	
7.01.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.070.500,00	25.069.500,00	(1.000,00)	100,00	
7.01.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	988.247.500,00	978.827.100,00	(9.420.400,00)	99,05	
7.01.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	322.764.100,00	322.593.700,00	(170.400,00)	99,95	
7.01.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	322.764.100,00	322.593.700,00	(170.400,00)	99,95	
7.01.01.2.06.0002.5.2	BELANJA MODAL	665.483.400,00	656.233.400,00	(9.250.000,00)	98,61	
7.01.01.2.06.0002.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	665.483.400,00	656.233.400,00	(9.250.000,00)	98,61	
7.01.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	22.492.400,00	22.488.000,00	(4.400,00)	99,98	
7.01.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	22.492.400,00	22.488.000,00	(4.400,00)	99,98	
7.01.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.492.400,00	22.488.000,00	(4.400,00)	99,98	
7.01.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	250.069.500,00	250.069.500,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	250.069.500,00	250.069.500,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.069.500,00	250.069.500,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	9.010.200,00	9.010.000,00	(200,00)	100,00	
7.01.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	9.010.200,00	9.010.000,00	(200,00)	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.010.200,00	9.010.000,00	(200,00)	100,00	
7.01.01.2.06.0006	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9.100.000,00	9.060.000,00	(40.000,00)	99,56	
7.01.01.2.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	9.100.000,00	9.060.000,00	(40.000,00)	99,56	
7.01.01.2.06.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.100.000,00	9.060.000,00	(40.000,00)	99,56	
7.01.01.2.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	820.122.000,00	815.858.000,00	(4.264.000,00)	99,48	
7.01.01.2.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	820.122.000,00	815.858.000,00	(4.264.000,00)	99,48	
7.01.01.2.06.0009.5.1.01	Belanja Pegawai	39.240.000,00	39.240.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	780.882.000,00	776.618.000,00	(4.264.000,00)	99,45	
7.01.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	147.434.300,00	147.324.500,00	(109.800,00)	99,93	
7.01.01.2.07.0005	PENGADAAN MEBEL	147.434.300,00	147.324.500,00	(109.800,00)	99,93	
7.01.01.2.07.0005.5.2	BELANJA MODAL	147.434.300,00	147.324.500,00	(109.800,00)	99,93	
7.01.01.2.07.0005.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	147.434.300,00	147.324.500,00	(109.800,00)	99,93	
7.01.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.312.345.293,00	2.281.807.336,00	(30.537.957,00)	98,68	
7.01.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	231.998.725,00	225.615.544,00	(6.383.181,00)	97,25	
7.01.01.2.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	231.998.725,00	225.615.544,00	(6.383.181,00)	97,25	
7.01.01.2.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.998.725,00	225.615.544,00	(6.383.181,00)	97,25	
7.01.01.2.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.080.346.568,00	2.056.191.792,00	(24.154.776,00)	98,84	
7.01.01.2.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	2.080.346.568,00	2.056.191.792,00	(24.154.776,00)	98,84	
7.01.01.2.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.080.346.568,00	2.056.191.792,00	(24.154.776,00)	98,84	
7.01.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.116.985.800,00	2.566.581.535,00	(550.404.265,00)	82,34	
7.01.01.2.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	188.750.000,00	175.179.830,00	(13.570.170,00)	92,81	
7.01.01.2.09.0002.5.1	BELANJA OPERASI	188.750.000,00	175.179.830,00	(13.570.170,00)	92,81	
7.01.01.2.09.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.750.000,00	175.179.830,00	(13.570.170,00)	92,81	
7.01.01.2.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	46.040.000,00	45.855.000,00	(185.000,00)	99,60	
7.01.01.2.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	46.040.000,00	45.855.000,00	(185.000,00)	99,60	
7.01.01.2.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.040.000,00	45.855.000,00	(185.000,00)	99,60	
7.01.01.2.09.0009	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	2.882.195.800,00	2.345.546.705,00	(536.649.095,00)	81,38	
7.01.01.2.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	306.038.800,00	305.268.414,00	(770.386,00)	99,75	
7.01.01.2.09.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	306.038.800,00	305.268.414,00	(770.386,00)	99,75	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01.01.2.09.0009.5.2	BELANJA MODAL	2.576.157.000,00	2.040.278.291,00	(535.878.709,00)	79,20	
7.01.01.2.09.0009.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.576.157.000,00	2.040.278.291,00	(535.878.709,00)	79,20	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	154.800.000,00	154.442.500,00	(357.500,00)	99,77	
7.01.02.2.01	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATANNPEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	96.820.000,00	96.791.800,00	(28.200,00)	99,97	
7.01.02.2.01.0001	KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT	96.820.000,00	96.791.800,00	(28.200,00)	99,97	
7.01.02.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	96.820.000,00	96.791.800,00	(28.200,00)	99,97	
7.01.02.2.01.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	4.040.000,00	4.040.000,00	0,00	100,00	
7.01.02.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.780.000,00	92.751.800,00	(28.200,00)	99,97	
7.01.02.2.02	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	57.980.000,00	57.650.700,00	(329.300,00)	99,43	
7.01.02.2.02.0001	PERENCANAAN KEGIATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN	57.980.000,00	57.650.700,00	(329.300,00)	99,43	
7.01.02.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	57.980.000,00	57.650.700,00	(329.300,00)	99,43	
7.01.02.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	9.090.000,00	9.090.000,00	0,00	100,00	
7.01.02.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.890.000,00	48.560.700,00	(329.300,00)	99,33	
7.01.02.2.02.0003	PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.02.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.02.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	357.166.200,00	355.574.200,00	(1.592.000,00)	99,55	
7.01.03.2.03	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	357.166.200,00	355.574.200,00	(1.592.000,00)	99,55	
7.01.03.2.03.0001	PENYELENGGARAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	39.065.400,00	37.473.400,00	(1.592.000,00)	95,92	
7.01.03.2.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	39.065.400,00	37.473.400,00	(1.592.000,00)	95,92	
7.01.03.2.03.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	11.110.000,00	11.110.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.955.400,00	26.363.400,00	(1.592.000,00)	94,31	
7.01.03.2.03.0002	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN	309.070.800,00	309.070.800,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	309.070.800,00	309.070.800,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.03.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	309.070.800,00	309.070.800,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.03.0004	FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT	0,00	0,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01.03.2.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.03.2.03.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.03.2.03.0005	FASILITASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	9.030.000,00	9.030.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.03.0005.5.1	BELANJA OPERASI	9.030.000,00	9.030.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.03.0005.5.1.01	Belanja Pegawai	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.03.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	60.500.000,00	60.499.200,00	(800,00)	100,00	
7.01.04.2.01	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	60.500.000,00	60.499.200,00	(800,00)	100,00	
7.01.04.2.01.0001	SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	60.500.000,00	60.499.200,00	(800,00)	100,00	
7.01.04.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	60.500.000,00	60.499.200,00	(800,00)	100,00	
7.01.04.2.01.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	11.110.000,00	11.110.000,00	0,00	100,00	
7.01.04.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.390.000,00	49.389.200,00	(800,00)	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	29.793.811.437,00	28.997.031.894,00	(796.779.543,00)	97,33	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(29.793.811.437,00)	(28.997.031.894,00)	796.779.543,00	97,33	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(29.793.811.437,00)	(28.997.031.894,00)	796.779.543,00	97,33	





7.01.2.13.0.00.35.0000

KECAMATAN BOGOR TENGAH

KELURAHAN BABAKAN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.35.0000 KECAMATAN BOGOR TENGAH
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.35.0001 KELURAHAN BABAKAN

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	94.716.000,00	94.716.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	94.716.000,00	94.716.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.594.000,00	1.594.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.594.000,00	1.594.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.594.000,00	1.594.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	15.325.900,00	15.325.900,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	15.325.900,00	15.325.900,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.325.900,00	15.325.900,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	3.576.100,00	3.576.100,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	3.576.100,00	3.576.100,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.576.100,00	3.576.100,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	74.220.000,00	74.220.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	74.220.000,00	74.220.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.820.000,00	56.820.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	333.812.010,00	332.702.351,00	(1.109.659,00)	99,67	
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	333.812.010,00	332.702.351,00	(1.109.659,00)	99,67	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	1.312.000,00	1.312.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.312.000,00	1.312.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.312.000,00	1.312.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	139.900.010,00	139.140.351,00	(759.659,00)	99,46	
7.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	139.900.010,00	139.140.351,00	(759.659,00)	99,46	
7.01.03.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.900.010,00	139.140.351,00	(759.659,00)	99,46	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	192.600.000,00	192.250.000,00	(350.000,00)	99,82	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	192.600.000,00	192.250.000,00	(350.000,00)	99,82	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.600.000,00	192.250.000,00	(350.000,00)	99,82	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	428.528.010,00	427.418.351,00	(1.109.659,00)	99,74	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(428.528.010,00)	(427.418.351,00)	1.109.659,00	99,74	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(428.528.010,00)	(427.418.351,00)	1.109.659,00	99,74	





7.01.2.13.0.00.35.0000

KECAMATAN BOGOR TENGAH

KELURAHAN CIBOGOR



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.35.0000 KECAMATAN BOGOR TENGAH
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.35.0002 KELURAHAN CIBOGOR

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	92.325.000,00	92.324.900,00	(100,00)	100,00	
2.13.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	92.325.000,00	92.324.900,00	(100,00)	100,00	
2.13.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.823.200,00	3.823.200,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	3.823.200,00	3.823.200,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.823.200,00	3.823.200,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	14.301.400,00	14.301.400,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	14.301.400,00	14.301.400,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.301.400,00	14.301.400,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	5.976.500,00	5.976.500,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	5.976.500,00	5.976.500,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.976.500,00	5.976.500,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	5.223.900,00	5.223.800,00	(100,00)	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.13.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	5.223.900,00	5.223.800,00	(100,00)	100,00	
2.13.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.223.900,00	5.223.800,00	(100,00)	100,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	291.798.500,00	291.475.000,00	(323.500,00)	99,89	
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	291.798.500,00	291.475.000,00	(323.500,00)	99,89	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	3.675.000,00	3.675.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	3.675.000,00	3.675.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.675.000,00	3.675.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	131.523.500,00	131.200.000,00	(323.500,00)	99,75	
7.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	131.523.500,00	131.200.000,00	(323.500,00)	99,75	
7.01.03.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.523.500,00	131.200.000,00	(323.500,00)	99,75	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	156.600.000,00	156.600.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	156.600.000,00	156.600.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.600.000,00	156.600.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	384.123.500,00	383.799.900,00	(323.600,00)	99,92	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(384.123.500,00)	(383.799.900,00)	323.600,00	99,92	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(384.123.500,00)	(383.799.900,00)	323.600,00	99,92	





7.01.2.13.0.00.35.0000

KECAMATAN BOGOR TENGAH

KELURAHAN CIWARINGIN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.35.0000 KECAMATAN BOGOR TENGAH
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.35.0003 KELURAHAN CIWARINGIN

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	92.670.000,00	92.321.000,00	(349.000,00)	99,62	
2.13.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	92.670.000,00	92.321.000,00	(349.000,00)	99,62	
2.13.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.202.500,00	1.202.500,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.202.500,00	1.202.500,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.202.500,00	1.202.500,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	8.714.100,00	8.365.100,00	(349.000,00)	95,99	
2.13.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	8.714.100,00	8.365.100,00	(349.000,00)	95,99	
2.13.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.714.100,00	8.365.100,00	(349.000,00)	95,99	
2.13.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	6.565.800,00	6.565.800,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	6.565.800,00	6.565.800,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.565.800,00	6.565.800,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	72.570.000,00	72.570.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	72.570.000,00	72.570.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.170.000,00	55.170.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.617.600,00	3.617.600,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.13.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	3.617.600,00	3.617.600,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.617.600,00	3.617.600,00	0,00	100,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	399.064.720,00	395.779.906,00	(3.284.814,00)	99,18	
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	399.064.720,00	395.779.906,00	(3.284.814,00)	99,18	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	139.534.720,00	136.249.906,00	(3.284.814,00)	97,65	
7.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	139.534.720,00	136.249.906,00	(3.284.814,00)	97,65	
7.01.03.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.534.720,00	136.249.906,00	(3.284.814,00)	97,65	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	256.200.000,00	256.200.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	256.200.000,00	256.200.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.200.000,00	256.200.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	491.734.720,00	488.100.906,00	(3.633.814,00)	99,26	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(491.734.720,00)	(488.100.906,00)	3.633.814,00	99,26	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(491.734.720,00)	(488.100.906,00)	3.633.814,00	99,26	





7.01.2.13.0.00.35.0000

KECAMATAN BOGOR TENGAH

KELURAHAN GUDANG



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.35.0000 KECAMATAN BOGOR TENGAH
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.35.0004 KELURAHAN GUDANG

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	92.670.000,00	92.670.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	92.670.000,00	92.670.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.202.500,00	1.202.500,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.202.500,00	1.202.500,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.202.500,00	1.202.500,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	8.714.100,00	8.714.100,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	8.714.100,00	8.714.100,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.714.100,00	8.714.100,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	6.565.800,00	6.565.800,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	6.565.800,00	6.565.800,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.565.800,00	6.565.800,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	72.570.000,00	72.570.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	72.570.000,00	72.570.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	19.920.000,00	19.920.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.650.000,00	52.650.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.617.600,00	3.617.600,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.13.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	3.617.600,00	3.617.600,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.617.600,00	3.617.600,00	0,00	100,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	521.744.970,00	521.162.113,00	(582.857,00)	99,89	
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	521.744.970,00	521.162.113,00	(582.857,00)	99,89	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	196.823.570,00	196.240.713,00	(582.857,00)	99,70	
7.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	196.823.570,00	196.240.713,00	(582.857,00)	99,70	
7.01.03.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	196.823.570,00	196.240.713,00	(582.857,00)	99,70	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	321.591.400,00	321.591.400,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	321.591.400,00	321.591.400,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	321.591.400,00	321.591.400,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	614.414.970,00	613.832.113,00	(582.857,00)	99,91	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(614.414.970,00)	(613.832.113,00)	582.857,00	99,91	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(614.414.970,00)	(613.832.113,00)	582.857,00	99,91	





7.01.2.13.0.00.35.0000

KECAMATAN BOGOR TENGAH

KELURAHAN KEBON KALAPA



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.35.0000 KECAMATAN BOGOR TENGAH
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.35.0005 KELURAHAN KEBON KALAPA

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	90.069.600,00	90.069.600,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	90.069.600,00	90.069.600,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	644.400,00	644.400,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	644.400,00	644.400,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	644.400,00	644.400,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	6.803.000,00	6.803.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	6.803.000,00	6.803.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.803.000,00	6.803.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	1.761.200,00	1.761.200,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.761.200,00	1.761.200,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.761.200,00	1.761.200,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	78.075.000,00	78.075.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	78.075.000,00	78.075.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	21.840.000,00	21.840.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.235.000,00	56.235.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.786.000,00	2.786.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.13.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	2.786.000,00	2.786.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.786.000,00	2.786.000,00	0,00	100,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	400.173.600,00	396.329.200,00	(3.844.400,00)	99,04	
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	400.173.600,00	396.329.200,00	(3.844.400,00)	99,04	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	5.930.400,00	5.930.400,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	5.930.400,00	5.930.400,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.930.400,00	5.930.400,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	125.654.400,00	125.460.000,00	(194.400,00)	99,85	
7.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	125.654.400,00	125.460.000,00	(194.400,00)	99,85	
7.01.03.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.654.400,00	125.460.000,00	(194.400,00)	99,85	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	268.588.800,00	264.938.800,00	(3.650.000,00)	98,64	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	268.588.800,00	264.938.800,00	(3.650.000,00)	98,64	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	268.588.800,00	264.938.800,00	(3.650.000,00)	98,64	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	490.243.200,00	486.398.800,00	(3.844.400,00)	99,22	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(490.243.200,00)	(486.398.800,00)	3.844.400,00	99,22	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(490.243.200,00)	(486.398.800,00)	3.844.400,00	99,22	





7.01.2.13.0.00.35.0000

KECAMATAN BOGOR TENGAH

KELURAHAN PALEDANG



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.35.0000 KECAMATAN BOGOR TENGAH
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.35.0006 KELURAHAN PALEDANG

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	103.478.700,00	100.873.800,00	(2.604.900,00)	97,48	
2.13.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	103.478.700,00	100.873.800,00	(2.604.900,00)	97,48	
2.13.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.233.300,00	3.233.300,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	3.233.300,00	3.233.300,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.233.300,00	3.233.300,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	12.157.500,00	12.157.500,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	12.157.500,00	12.157.500,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.157.500,00	12.157.500,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	6.474.700,00	6.474.700,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	6.474.700,00	6.474.700,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.474.700,00	6.474.700,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	75.840.000,00	75.840.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	75.840.000,00	75.840.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	25.080.000,00	25.080.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.760.000,00	50.760.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	5.773.200,00	3.168.300,00	(2.604.900,00)	54,88	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.13.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	5.773.200,00	3.168.300,00	(2.604.900,00)	54,88	
2.13.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.773.200,00	3.168.300,00	(2.604.900,00)	54,88	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	635.716.160,00	634.666.212,00	(1.049.948,00)	99,83	
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	635.716.160,00	634.666.212,00	(1.049.948,00)	99,83	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	4.521.300,00	4.521.300,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	4.521.300,00	4.521.300,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.521.300,00	4.521.300,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	310.794.860,00	309.744.912,00	(1.049.948,00)	99,66	
7.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	310.794.860,00	309.744.912,00	(1.049.948,00)	99,66	
7.01.03.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	310.794.860,00	309.744.912,00	(1.049.948,00)	99,66	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	320.400.000,00	320.400.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	320.400.000,00	320.400.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	320.400.000,00	320.400.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	739.194.860,00	735.540.012,00	(3.654.848,00)	99,51	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(739.194.860,00)	(735.540.012,00)	3.654.848,00	99,51	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(739.194.860,00)	(735.540.012,00)	3.654.848,00	99,51	





7.01.2.13.0.00.35.0000

KECAMATAN BOGOR TENGAH

KELURAHAN TEGALLEGA



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.35.0000 KECAMATAN BOGOR TENGAH
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.35.0007 KELURAHAN TEGALLEGA

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	104.625.000,00	104.538.600,00	(86.400,00)	99,92	
2.13.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	104.625.000,00	104.538.600,00	(86.400,00)	99,92	
2.13.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.594.600,00	3.594.600,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	3.594.600,00	3.594.600,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.594.600,00	3.594.600,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	7.834.000,00	7.834.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	7.834.000,00	7.834.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.834.000,00	7.834.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	8.520.800,00	8.520.800,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	8.520.800,00	8.520.800,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.520.800,00	8.520.800,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	78.150.000,00	78.150.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	78.150.000,00	78.150.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	19.920.000,00	19.920.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.230.000,00	58.230.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	6.525.600,00	6.439.200,00	(86.400,00)	98,68	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.13.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	6.525.600,00	6.439.200,00	(86.400,00)	98,68	
2.13.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.525.600,00	6.439.200,00	(86.400,00)	98,68	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	469.542.500,00	469.412.500,00	(130.000,00)	99,97	
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	469.542.500,00	469.412.500,00	(130.000,00)	99,97	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	192.567.500,00	192.437.500,00	(130.000,00)	99,93	
7.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	192.567.500,00	192.437.500,00	(130.000,00)	99,93	
7.01.03.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.567.500,00	192.437.500,00	(130.000,00)	99,93	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	273.600.000,00	273.600.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	273.600.000,00	273.600.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	273.600.000,00	273.600.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	574.167.500,00	573.951.100,00	(216.400,00)	99,96	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(574.167.500,00)	(573.951.100,00)	216.400,00	99,96	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(574.167.500,00)	(573.951.100,00)	216.400,00	99,96	





7.01.2.13.0.00.35.0000

KECAMATAN BOGOR TENGAH

KELURAHAN SEMPUR



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.35.0000 KECAMATAN BOGOR TENGAH
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.35.0008 KELURAHAN SEMPUR

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	91.500.000,00	91.500.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	91.500.000,00	91.500.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.694.600,00	3.694.600,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	3.694.600,00	3.694.600,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.694.600,00	3.694.600,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	13.918.800,00	13.918.800,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	13.918.800,00	13.918.800,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.918.800,00	13.918.800,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	6.041.400,00	6.041.400,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	6.041.400,00	6.041.400,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.041.400,00	6.041.400,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	62.625.000,00	62.625.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	62.625.000,00	62.625.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	29.520.000,00	29.520.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.105.000,00	33.105.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	5.220.200,00	5.220.200,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.13.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	5.220.200,00	5.220.200,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.220.200,00	5.220.200,00	0,00	100,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	318.562.100,00	318.156.100,00	(406.000,00)	99,87	
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	318.562.100,00	318.156.100,00	(406.000,00)	99,87	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	114.884.000,00	114.478.000,00	(406.000,00)	99,65	
7.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	112.014.000,00	111.669.700,00	(344.300,00)	99,69	
7.01.03.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.014.000,00	111.669.700,00	(344.300,00)	99,69	
7.01.03.2.02.0002.5.2	BELANJA MODAL	2.870.000,00	2.808.300,00	(61.700,00)	97,85	
7.01.03.2.02.0002.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.870.000,00	2.808.300,00	(61.700,00)	97,85	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	199.178.100,00	199.178.100,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	199.178.100,00	199.178.100,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.178.100,00	199.178.100,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	410.062.100,00	409.656.100,00	(406.000,00)	99,90	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(410.062.100,00)	(409.656.100,00)	406.000,00	99,90	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(410.062.100,00)	(409.656.100,00)	406.000,00	99,90	





7.01.2.13.0.00.35.0000

KECAMATAN BOGOR TENGAH

KELURAHAN BABAKAN PASAR



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.35.0000 KECAMATAN BOGOR TENGAH
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.35.0009 KELURAHAN BABAKAN PASAR

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	79.300.000,00	79.300.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	79.300.000,00	79.300.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	70.200.000,00	70.200.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	70.200.000,00	70.200.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.200.000,00	70.200.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.13.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	391.687.900,00	391.325.500,00	(362.400,00)	99,91	
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	391.687.900,00	391.325.500,00	(362.400,00)	99,91	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	16.700.000,00	16.700.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	16.700.000,00	16.700.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.700.000,00	16.700.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	150.587.900,00	150.225.500,00	(362.400,00)	99,76	
7.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	150.587.900,00	150.225.500,00	(362.400,00)	99,76	
7.01.03.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.587.900,00	150.225.500,00	(362.400,00)	99,76	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	224.400.000,00	224.400.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	224.400.000,00	224.400.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.400.000,00	224.400.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	470.987.900,00	470.625.500,00	(362.400,00)	99,92	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(470.987.900,00)	(470.625.500,00)	362.400,00	99,92	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(470.987.900,00)	(470.625.500,00)	362.400,00	99,92	





7.01.2.13.0.00.35.0000

KECAMATAN BOGOR TENGAH

KELURAHAN PANARAGAN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.35.0000 KECAMATAN BOGOR TENGAH
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.35.0010 KELURAHAN PANARAGAN

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	92.670.000,00	92.670.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	92.670.000,00	92.670.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.202.500,00	1.202.500,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.202.500,00	1.202.500,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.202.500,00	1.202.500,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	8.714.100,00	8.714.100,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	8.714.100,00	8.714.100,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.714.100,00	8.714.100,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	6.565.800,00	6.565.800,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	6.565.800,00	6.565.800,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.565.800,00	6.565.800,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	72.570.000,00	72.570.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	72.570.000,00	72.570.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.170.000,00	55.170.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.617.600,00	3.617.600,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.13.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	3.617.600,00	3.617.600,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.617.600,00	3.617.600,00	0,00	100,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	320.361.100,00	319.839.724,00	(521.376,00)	99,84	
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	320.361.100,00	319.839.724,00	(521.376,00)	99,84	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	129.831.100,00	129.309.724,00	(521.376,00)	99,60	
7.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	129.831.100,00	129.309.724,00	(521.376,00)	99,60	
7.01.03.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.831.100,00	129.309.724,00	(521.376,00)	99,60	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	187.200.000,00	187.200.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	187.200.000,00	187.200.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.200.000,00	187.200.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	413.031.100,00	412.509.724,00	(521.376,00)	99,87	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(413.031.100,00)	(412.509.724,00)	521.376,00	99,87	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(413.031.100,00)	(412.509.724,00)	521.376,00	99,87	





7.01.2.13.0.00.35.0000

KECAMATAN BOGOR TENGAH

KELURAHAN PABATON



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.35.0000 KECAMATAN BOGOR TENGAH
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.35.0011 KELURAHAN PABATON

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	92.624.600,00	92.624.600,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	92.624.600,00	92.624.600,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.899.900,00	1.899.900,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	1.899.900,00	1.899.900,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.899.900,00	1.899.900,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	6.125.700,00	6.125.700,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	6.125.700,00	6.125.700,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.125.700,00	6.125.700,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	5.320.600,00	5.320.600,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	5.320.600,00	5.320.600,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.320.600,00	5.320.600,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	76.245.000,00	76.245.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	76.245.000,00	76.245.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	27.060.000,00	27.060.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.185.000,00	49.185.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.033.400,00	3.033.400,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.13.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	3.033.400,00	3.033.400,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.033.400,00	3.033.400,00	0,00	100,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	186.801.700,00	186.622.600,00	(179.100,00)	99,90	
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	186.801.700,00	186.622.600,00	(179.100,00)	99,90	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	78.426.700,00	78.247.600,00	(179.100,00)	99,77	
7.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	78.426.700,00	78.247.600,00	(179.100,00)	99,77	
7.01.03.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.426.700,00	78.247.600,00	(179.100,00)	99,77	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	279.426.300,00	279.247.200,00	(179.100,00)	99,94	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(279.426.300,00)	(279.247.200,00)	179.100,00	99,94	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(279.426.300,00)	(279.247.200,00)	179.100,00	99,94	





7.01.2.13.0.00.36.0000

KECAMATAN TANAH SAREAL



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.36.0000 KECAMATAN TANAH SAREAL

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	18.880.900,00	17.800.000,00	(1.080.900,00)	94,28	
2.13.05.2.01	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.880.900,00	17.800.000,00	(1.080.900,00)	94,28	
2.13.05.2.01.0004	FASILITASI PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	18.880.900,00	17.800.000,00	(1.080.900,00)	94,28	
2.13.05.2.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	18.880.900,00	17.800.000,00	(1.080.900,00)	94,28	
2.13.05.2.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.880.900,00	17.800.000,00	(1.080.900,00)	94,28	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.130.980.180,00	29.077.546.239,00	(1.053.433.941,00)	96,50	
7.01.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	21.555.281.229,00	21.208.631.097,00	(346.650.132,00)	98,39	
7.01.01.2.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	21.435.726.229,00	21.089.076.097,00	(346.650.132,00)	98,38	
7.01.01.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	21.435.726.229,00	21.089.076.097,00	(346.650.132,00)	98,38	
7.01.01.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	21.435.726.229,00	21.089.076.097,00	(346.650.132,00)	98,38	
7.01.01.2.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	119.555.000,00	119.555.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.02.0005.5.1	BELANJA OPERASI	119.555.000,00	119.555.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01.01.2.02.0005.5.1.01	Belanja Pegawai	57.480.000,00	57.480.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.02.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.075.000,00	62.075.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.170.605.058,00	1.100.401.942,00	(70.203.116,00)	94,00	
7.01.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	28.931.817,00	27.322.000,00	(1.609.817,00)	94,44	
7.01.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	28.931.817,00	27.322.000,00	(1.609.817,00)	94,44	
7.01.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.931.817,00	27.322.000,00	(1.609.817,00)	94,44	
7.01.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	151.626.888,00	149.904.794,00	(1.722.094,00)	98,86	
7.01.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	151.626.888,00	149.904.794,00	(1.722.094,00)	98,86	
7.01.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.626.888,00	149.904.794,00	(1.722.094,00)	98,86	
7.01.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	97.895.892,00	96.480.500,00	(1.415.392,00)	98,55	
7.01.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	97.895.892,00	96.480.500,00	(1.415.392,00)	98,55	
7.01.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.895.892,00	96.480.500,00	(1.415.392,00)	98,55	
7.01.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	263.816.748,00	249.772.000,00	(14.044.748,00)	94,68	
7.01.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	263.816.748,00	249.772.000,00	(14.044.748,00)	94,68	
7.01.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.816.748,00	249.772.000,00	(14.044.748,00)	94,68	
7.01.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	74.434.713,00	68.001.000,00	(6.433.713,00)	91,36	
7.01.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	74.434.713,00	68.001.000,00	(6.433.713,00)	91,36	
7.01.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.434.713,00	68.001.000,00	(6.433.713,00)	91,36	
7.01.01.2.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	553.899.000,00	508.921.648,00	(44.977.352,00)	91,88	
7.01.01.2.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	553.899.000,00	508.921.648,00	(44.977.352,00)	91,88	
7.01.01.2.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	553.899.000,00	508.921.648,00	(44.977.352,00)	91,88	
7.01.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.458.846.479,00	4.013.515.427,00	(445.331.052,00)	90,01	
7.01.01.2.07.0005	PENGADAAN MEBEL	338.707.017,00	335.550.000,00	(3.157.017,00)	99,07	
7.01.01.2.07.0005.5.2	BELANJA MODAL	338.707.017,00	335.550.000,00	(3.157.017,00)	99,07	
7.01.01.2.07.0005.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	338.707.017,00	335.550.000,00	(3.157.017,00)	99,07	
7.01.01.2.07.0006	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	871.848.462,00	870.175.000,00	(1.673.462,00)	99,81	
7.01.01.2.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	871.848.462,00	870.175.000,00	(1.673.462,00)	99,81	
7.01.01.2.07.0006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	871.848.462,00	870.175.000,00	(1.673.462,00)	99,81	
7.01.01.2.07.0009	PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	3.248.291.000,00	2.807.790.427,00	(440.500.573,00)	86,44	
7.01.01.2.07.0009.5.1	BELANJA OPERASI	27.200.000,00	27.200.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01.01.2.07.0009.5.1.01	Belanja Pegawai	27.200.000,00	27.200.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.07.0009.5.2	BELANJA MODAL	3.221.091.000,00	2.780.590.427,00	(440.500.573,00)	86,32	
7.01.01.2.07.0009.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.221.091.000,00	2.780.590.427,00	(440.500.573,00)	86,32	
7.01.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.822.793.856,00	1.722.710.241,00	(100.083.615,00)	94,51	
7.01.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	254.600.000,00	230.906.735,00	(23.693.265,00)	90,69	
7.01.01.2.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	254.600.000,00	230.906.735,00	(23.693.265,00)	90,69	
7.01.01.2.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	254.600.000,00	230.906.735,00	(23.693.265,00)	90,69	
7.01.01.2.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.568.193.856,00	1.491.803.506,00	(76.390.350,00)	95,13	
7.01.01.2.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	1.568.193.856,00	1.491.803.506,00	(76.390.350,00)	95,13	
7.01.01.2.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.568.193.856,00	1.491.803.506,00	(76.390.350,00)	95,13	
7.01.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.123.453.558,00	1.032.287.532,00	(91.166.026,00)	91,89	
7.01.01.2.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	190.500.000,00	175.109.813,00	(15.390.187,00)	91,92	
7.01.01.2.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	190.500.000,00	175.109.813,00	(15.390.187,00)	91,92	
7.01.01.2.09.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.500.000,00	175.109.813,00	(15.390.187,00)	91,92	
7.01.01.2.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	197.887.268,00	138.034.268,00	(59.853.000,00)	69,75	
7.01.01.2.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	197.887.268,00	138.034.268,00	(59.853.000,00)	69,75	
7.01.01.2.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.887.268,00	138.034.268,00	(59.853.000,00)	69,75	
7.01.01.2.09.0009	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	735.066.290,00	719.143.451,00	(15.922.839,00)	97,83	
7.01.01.2.09.0009.5.1	BELANJA OPERASI	735.066.290,00	719.143.451,00	(15.922.839,00)	97,83	
7.01.01.2.09.0009.5.1.01	Belanja Pegawai	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.09.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	733.706.290,00	717.783.451,00	(15.922.839,00)	97,83	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	278.432.100,00	263.887.000,00	(14.545.100,00)	94,78	
7.01.02.2.01	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATANNNPemerintahan di tingkat Kecamatan	206.507.100,00	192.862.000,00	(13.645.100,00)	93,39	
7.01.02.2.01.0001	KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT	206.507.100,00	192.862.000,00	(13.645.100,00)	93,39	
7.01.02.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	206.507.100,00	192.862.000,00	(13.645.100,00)	93,39	
7.01.02.2.01.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	8.470.000,00	8.470.000,00	0,00	100,00	
7.01.02.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.037.100,00	184.392.000,00	(13.645.100,00)	93,11	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01.02.2.02	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	71.925.000,00	71.025.000,00	(900.000,00)	98,75	
7.01.02.2.02.0001	PERENCANAAN KEGIATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN	71.925.000,00	71.025.000,00	(900.000,00)	98,75	
7.01.02.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	71.925.000,00	71.025.000,00	(900.000,00)	98,75	
7.01.02.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00	
7.01.02.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.905.000,00	69.005.000,00	(900.000,00)	98,71	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	463.107.199,00	441.492.288,00	(21.614.911,00)	95,33	
7.01.03.2.03	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	463.107.199,00	441.492.288,00	(21.614.911,00)	95,33	
7.01.03.2.03.0001	PENYELENGGARAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	244.720.000,00	244.220.000,00	(500.000,00)	99,80	
7.01.03.2.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	244.720.000,00	244.220.000,00	(500.000,00)	99,80	
7.01.03.2.03.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	16.920.000,00	16.920.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.800.000,00	227.300.000,00	(500.000,00)	99,78	
7.01.03.2.03.0002	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN	200.337.199,00	179.537.288,00	(20.799.911,00)	89,62	
7.01.03.2.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	200.337.199,00	179.537.288,00	(20.799.911,00)	89,62	
7.01.03.2.03.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.337.199,00	179.537.288,00	(20.799.911,00)	89,62	
7.01.03.2.03.0004	FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT	12.050.000,00	11.735.000,00	(315.000,00)	97,39	
7.01.03.2.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	12.050.000,00	11.735.000,00	(315.000,00)	97,39	
7.01.03.2.03.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.050.000,00	11.735.000,00	(315.000,00)	97,39	
7.01.03.2.03.0005	FASILITASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.03.0005.5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.03.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100.586.500,00	100.001.500,00	(585.000,00)	99,42	
7.01.04.2.01	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100.586.500,00	100.001.500,00	(585.000,00)	99,42	
7.01.04.2.01.0001	SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	100.586.500,00	100.001.500,00	(585.000,00)	99,42	
7.01.04.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	100.586.500,00	100.001.500,00	(585.000,00)	99,42	
7.01.04.2.01.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	8.080.000,00	8.080.000,00	0,00	100,00	
7.01.04.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.506.500,00	91.921.500,00	(585.000,00)	99,37	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	30.991.986.879,00	29.900.727.027,00	(1.091.259.852,00)	96,48	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
SURPLUS / (DEFISIT)		(30.991.986.879,00)	(29.900.727.027,00)	1.091.259.852,00	96,48	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(30.991.986.879,00)	(29.900.727.027,00)	1.091.259.852,00	96,48	





7.01.2.13.0.00.36.0000

KECAMATAN TANAH SAREAL

KELURAHAN TANAH SAREAL



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.36.0000 KECAMATAN TANAH SAREAL
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.36.0001 KELURAHAN TANAH SAREAL

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	84.562.700,00	84.559.300,00	(3.400,00)	100,00	
2.13.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	84.562.700,00	84.559.300,00	(3.400,00)	100,00	
2.13.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.147.800,00	2.147.800,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	2.147.800,00	2.147.800,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.147.800,00	2.147.800,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	10.309.400,00	10.309.400,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	10.309.400,00	10.309.400,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.309.400,00	10.309.400,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	11.248.100,00	11.244.700,00	(3.400,00)	99,97	
2.13.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	11.248.100,00	11.244.700,00	(3.400,00)	99,97	
2.13.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.248.100,00	11.244.700,00	(3.400,00)	99,97	
2.13.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	58.515.000,00	58.515.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	58.515.000,00	58.515.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.115.000,00	41.115.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.342.400,00	2.342.400,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.13.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	2.342.400,00	2.342.400,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.342.400,00	2.342.400,00	0,00	100,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	358.747.100,00	338.034.581,00	(20.712.519,00)	94,23	
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	358.747.100,00	338.034.581,00	(20.712.519,00)	94,23	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	10.897.100,00	10.897.100,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	10.897.100,00	10.897.100,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.897.100,00	10.897.100,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	152.250.000,00	131.537.481,00	(20.712.519,00)	86,40	
7.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	152.250.000,00	131.537.481,00	(20.712.519,00)	86,40	
7.01.03.2.02.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	15.880.000,00	3.100.000,00	(12.780.000,00)	19,52	
7.01.03.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.370.000,00	128.437.481,00	(7.932.519,00)	94,18	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	195.600.000,00	195.600.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	195.600.000,00	195.600.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.600.000,00	195.600.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	443.309.800,00	422.593.881,00	(20.715.919,00)	95,33	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(443.309.800,00)	(422.593.881,00)	20.715.919,00	95,33	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(443.309.800,00)	(422.593.881,00)	20.715.919,00	95,33	





7.01.2.13.0.00.36.0000

KECAMATAN TANAH SAREAL

KELURAHAN KEBON PEDES



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.36.0000 KECAMATAN TANAH SAREAL
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.36.0002 KELURAHAN KEBON PEDES

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	118.858.600,00	116.199.200,00	(2.659.400,00)	97,76	
2.13.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	118.858.600,00	116.199.200,00	(2.659.400,00)	97,76	
2.13.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.235.600,00	2.235.600,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	2.235.600,00	2.235.600,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.235.600,00	2.235.600,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	12.931.800,00	10.701.400,00	(2.230.400,00)	82,75	
2.13.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	12.931.800,00	10.701.400,00	(2.230.400,00)	82,75	
2.13.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.931.800,00	10.701.400,00	(2.230.400,00)	82,75	
2.13.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	3.038.200,00	3.038.200,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	3.038.200,00	3.038.200,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.038.200,00	3.038.200,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	94.620.000,00	94.590.000,00	(30.000,00)	99,97	
2.13.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	94.620.000,00	94.590.000,00	(30.000,00)	99,97	
2.13.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.020.000,00	54.990.000,00	(30.000,00)	99,95	
2.13.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	6.033.000,00	5.634.000,00	(399.000,00)	93,39	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.13.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	6.033.000,00	5.634.000,00	(399.000,00)	93,39	
2.13.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.033.000,00	5.634.000,00	(399.000,00)	93,39	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	818.390.600,00	811.200.123,00	(7.190.477,00)	99,12	
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	818.390.600,00	811.200.123,00	(7.190.477,00)	99,12	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	7.501.400,00	7.140.000,00	(361.400,00)	95,18	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	7.501.400,00	7.140.000,00	(361.400,00)	95,18	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.501.400,00	7.140.000,00	(361.400,00)	95,18	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	363.391.200,00	359.713.123,00	(3.678.077,00)	98,99	
7.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002.5.2	BELANJA MODAL	362.031.200,00	358.353.123,00	(3.678.077,00)	98,98	
7.01.03.2.02.0002.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97.367.500,00	94.775.000,00	(2.592.500,00)	97,34	
7.01.03.2.02.0002.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	264.663.700,00	263.578.123,00	(1.085.577,00)	99,59	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	447.498.000,00	444.347.000,00	(3.151.000,00)	99,30	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	447.498.000,00	444.347.000,00	(3.151.000,00)	99,30	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	447.498.000,00	444.347.000,00	(3.151.000,00)	99,30	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	937.249.200,00	927.399.323,00	(9.849.877,00)	98,95	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(937.249.200,00)	(927.399.323,00)	9.849.877,00	98,95	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(937.249.200,00)	(927.399.323,00)	9.849.877,00	98,95	





7.01.2.13.0.00.36.0000

KECAMATAN TANAH SAREAL

KELURAHAN KEDUNG BADAQ



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.36.0000 KECAMATAN TANAH SAREAL
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.36.0003 KELURAHAN KEDUNG BADAK

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	111.292.500,00	110.768.500,00	(524.000,00)	99,53	
2.13.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	111.292.500,00	110.768.500,00	(524.000,00)	99,53	
2.13.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.677.500,00	2.677.500,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	2.677.500,00	2.677.500,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.677.500,00	2.677.500,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	30.408.000,00	30.408.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	30.408.000,00	30.408.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	3.890.000,00	3.890.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.518.000,00	26.518.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	1.010.400,00	1.010.400,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.010.400,00	1.010.400,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.010.400,00	1.010.400,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	76.275.000,00	75.751.000,00	(524.000,00)	99,31	
2.13.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	76.275.000,00	75.751.000,00	(524.000,00)	99,31	
2.13.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	7.650.000,00	7.360.000,00	(290.000,00)	96,21	
2.13.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.625.000,00	68.391.000,00	(234.000,00)	99,66	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.13.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	921.600,00	921.600,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	921.600,00	921.600,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	921.600,00	921.600,00	0,00	100,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	805.429.300,00	804.664.765,00	(764.535,00)	99,91	
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	805.429.300,00	804.664.765,00	(764.535,00)	99,91	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	8.684.600,00	8.684.600,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	8.684.600,00	8.684.600,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	860.000,00	860.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.824.600,00	7.824.600,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	298.744.700,00	298.013.765,00	(730.935,00)	99,76	
7.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	24.920.000,00	24.820.000,00	(100.000,00)	99,60	
7.01.03.2.02.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	24.920.000,00	24.820.000,00	(100.000,00)	99,60	
7.01.03.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.03.2.02.0002.5.2	BELANJA MODAL	273.824.700,00	273.193.765,00	(630.935,00)	99,77	
7.01.03.2.02.0002.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	273.824.700,00	273.193.765,00	(630.935,00)	99,77	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	498.000.000,00	497.966.400,00	(33.600,00)	99,99	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	498.000.000,00	497.966.400,00	(33.600,00)	99,99	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	498.000.000,00	497.966.400,00	(33.600,00)	99,99	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	916.721.800,00	915.433.265,00	(1.288.535,00)	99,86	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(916.721.800,00)	(915.433.265,00)	1.288.535,00	99,86	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(916.721.800,00)	(915.433.265,00)	1.288.535,00	99,86	





7.01.2.13.0.00.36.0000

KECAMATAN TANAH SAREAL

KELURAHAN KEDUNG JAYA



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.36.0000 KECAMATAN TANAH SAREAL
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.36.0004 KELURAHAN KEDUNG JAYA

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	88.512.000,00	78.355.600,00	(10.156.400,00)	88,53	
2.13.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	88.512.000,00	78.355.600,00	(10.156.400,00)	88,53	
2.13.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	6.812.800,00	6.132.600,00	(680.200,00)	90,02	
2.13.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	6.812.800,00	6.132.600,00	(680.200,00)	90,02	
2.13.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.812.800,00	6.132.600,00	(680.200,00)	90,02	
2.13.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	12.071.400,00	9.610.100,00	(2.461.300,00)	79,61	
2.13.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	12.071.400,00	9.610.100,00	(2.461.300,00)	79,61	
2.13.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.071.400,00	9.610.100,00	(2.461.300,00)	79,61	
2.13.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	3.524.000,00	3.172.300,00	(351.700,00)	90,02	
2.13.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	3.524.000,00	3.172.300,00	(351.700,00)	90,02	
2.13.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.524.000,00	3.172.300,00	(351.700,00)	90,02	
2.13.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	63.390.000,00	57.220.000,00	(6.170.000,00)	90,27	
2.13.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	63.390.000,00	57.220.000,00	(6.170.000,00)	90,27	
2.13.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	31.080.000,00	27.460.000,00	(3.620.000,00)	88,35	
2.13.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.310.000,00	29.760.000,00	(2.550.000,00)	92,11	
2.13.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.713.800,00	2.220.600,00	(493.200,00)	81,83	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.13.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	2.713.800,00	2.220.600,00	(493.200,00)	81,83	
2.13.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.713.800,00	2.220.600,00	(493.200,00)	81,83	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	401.237.945,00	398.192.693,00	(3.045.252,00)	99,24	
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	401.237.945,00	398.192.693,00	(3.045.252,00)	99,24	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	7.488.000,00	7.488.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	7.488.000,00	7.488.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.488.000,00	7.488.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	166.349.945,00	163.654.693,00	(2.695.252,00)	98,38	
7.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	166.349.945,00	163.654.693,00	(2.695.252,00)	98,38	
7.01.03.2.02.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	6.270.000,00	4.390.000,00	(1.880.000,00)	70,02	
7.01.03.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.079.945,00	159.264.693,00	(815.252,00)	99,49	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	227.400.000,00	227.050.000,00	(350.000,00)	99,85	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	227.400.000,00	227.050.000,00	(350.000,00)	99,85	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.400.000,00	227.050.000,00	(350.000,00)	99,85	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	489.749.945,00	476.548.293,00	(13.201.652,00)	97,30	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(489.749.945,00)	(476.548.293,00)	13.201.652,00	97,30	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(489.749.945,00)	(476.548.293,00)	13.201.652,00	97,30	





7.01.2.13.0.00.36.0000

**KECAMATAN TANAH SAREAL
KELURAHAN KEDUNG WARINGIN**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.36.0000 KECAMATAN TANAH SAREAL
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.36.0005 KELURAHAN KEDUNG WARINGIN

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	116.381.400,00	114.545.700,00	(1.835.700,00)	98,42	
2.13.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	116.381.400,00	114.545.700,00	(1.835.700,00)	98,42	
2.13.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.528.000,00	2.528.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	2.528.000,00	2.528.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.528.000,00	2.528.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	15.690.400,00	15.690.300,00	(100,00)	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	15.690.400,00	15.690.300,00	(100,00)	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.690.400,00	15.690.300,00	(100,00)	100,00	
2.13.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	2.915.400,00	2.915.400,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	2.915.400,00	2.915.400,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.915.400,00	2.915.400,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	86.210.000,00	84.375.000,00	(1.835.000,00)	97,87	
2.13.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	86.210.000,00	84.375.000,00	(1.835.000,00)	97,87	
2.13.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	22.220.000,00	22.220.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.990.000,00	62.155.000,00	(1.835.000,00)	97,13	
2.13.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	9.037.600,00	9.037.000,00	(600,00)	99,99	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.13.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	9.037.600,00	9.037.000,00	(600,00)	99,99	
2.13.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.037.600,00	9.037.000,00	(600,00)	99,99	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	646.203.800,00	635.822.047,00	(10.381.753,00)	98,39	
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	646.203.800,00	635.822.047,00	(10.381.753,00)	98,39	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	11.614.800,00	11.614.800,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	11.614.800,00	11.614.800,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.004.800,00	10.004.800,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	243.389.000,00	233.007.247,00	(10.381.753,00)	95,73	
7.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002.5.2	BELANJA MODAL	238.189.000,00	227.807.247,00	(10.381.753,00)	95,64	
7.01.03.2.02.0002.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	238.189.000,00	227.807.247,00	(10.381.753,00)	95,64	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	391.200.000,00	391.200.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	391.200.000,00	391.200.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	391.200.000,00	391.200.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	762.585.200,00	750.367.747,00	(12.217.453,00)	98,40	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(762.585.200,00)	(750.367.747,00)	12.217.453,00	98,40	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(762.585.200,00)	(750.367.747,00)	12.217.453,00	98,40	

WALI KOTA BOGOR,





7.01.2.13.0.00.36.0000

KECAMATAN TANAH SAREAL

KELURAHAN SUKADAMAI



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.36.0000 KECAMATAN TANAH SAREAL
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.36.0006 KELURAHAN SUKADAMAI

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	96.340.200,00	96.340.200,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	96.340.200,00	96.340.200,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.465.700,00	3.465.700,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	3.465.700,00	3.465.700,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.465.700,00	3.465.700,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	13.819.300,00	13.819.300,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	13.819.300,00	13.819.300,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.819.300,00	13.819.300,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	4.164.500,00	4.164.500,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	4.164.500,00	4.164.500,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.164.500,00	4.164.500,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	67.995.000,00	67.995.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	67.995.000,00	67.995.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	28.980.000,00	28.980.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.015.000,00	39.015.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	6.895.700,00	6.895.700,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.13.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	6.895.700,00	6.895.700,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.895.700,00	6.895.700,00	0,00	100,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	778.242.870,00	774.492.153,00	(3.750.717,00)	99,52	
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	778.242.870,00	774.492.153,00	(3.750.717,00)	99,52	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	11.014.800,00	11.014.800,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	11.014.800,00	11.014.800,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.404.800,00	9.404.800,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	388.907.070,00	385.162.353,00	(3.744.717,00)	99,04	
7.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	300.929.600,00	297.943.261,00	(2.986.339,00)	99,01	
7.01.03.2.02.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	11.480.000,00	11.480.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.449.600,00	286.463.261,00	(2.986.339,00)	98,97	
7.01.03.2.02.0002.5.2	BELANJA MODAL	87.977.470,00	87.219.092,00	(758.378,00)	99,14	
7.01.03.2.02.0002.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	87.977.470,00	87.219.092,00	(758.378,00)	99,14	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	378.321.000,00	378.315.000,00	(6.000,00)	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	378.321.000,00	378.315.000,00	(6.000,00)	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	378.321.000,00	378.315.000,00	(6.000,00)	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	874.583.070,00	870.832.353,00	(3.750.717,00)	99,57	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(874.583.070,00)	(870.832.353,00)	3.750.717,00	99,57	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(874.583.070,00)	(870.832.353,00)	3.750.717,00	99,57	





7.01.2.13.0.00.36.0000

KECAMATAN TANAH SAREAL

KELURAHAN SUKARESMI



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.36.0000 KECAMATAN TANAH SAREAL
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.36.0007 KELURAHAN SUKARESMI

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	96.963.000,00	96.948.000,00	(15.000,00)	99,98	
2.13.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	96.963.000,00	96.948.000,00	(15.000,00)	99,98	
2.13.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.111.600,00	4.111.600,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	4.111.600,00	4.111.600,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.111.600,00	4.111.600,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	9.737.200,00	9.737.200,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	9.737.200,00	9.737.200,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.737.200,00	9.737.200,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	1.967.000,00	1.967.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.967.000,00	1.967.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.967.000,00	1.967.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	76.860.000,00	76.845.000,00	(15.000,00)	99,98	
2.13.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	76.860.000,00	76.845.000,00	(15.000,00)	99,98	
2.13.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	33.960.000,00	33.960.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.900.000,00	42.885.000,00	(15.000,00)	99,97	
2.13.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	4.287.200,00	4.287.200,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.13.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	4.287.200,00	4.287.200,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.287.200,00	4.287.200,00	0,00	100,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	395.307.090,00	394.492.129,00	(814.961,00)	99,79	
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	395.307.090,00	394.492.129,00	(814.961,00)	99,79	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	11.037.000,00	11.037.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	11.037.000,00	11.037.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.037.000,00	11.037.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	183.270.090,00	182.455.129,00	(814.961,00)	99,56	
7.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002.5.2	BELANJA MODAL	182.590.090,00	181.775.129,00	(814.961,00)	99,55	
7.01.03.2.02.0002.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	182.590.090,00	181.775.129,00	(814.961,00)	99,55	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	201.000.000,00	201.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	201.000.000,00	201.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.000.000,00	201.000.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	492.270.090,00	491.440.129,00	(829.961,00)	99,83	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(492.270.090,00)	(491.440.129,00)	829.961,00	99,83	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(492.270.090,00)	(491.440.129,00)	829.961,00	99,83	





7.01.2.13.0.00.36.0000

KECAMATAN TANAH SAREAL

KELURAHAN CIBADAK



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.36.0000 KECAMATAN TANAH SAREAL
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.36.0008 KELURAHAN CIBADAK

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	111.173.700,00	110.718.310,00	(455.390,00)	99,59	
2.13.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	111.173.700,00	110.718.310,00	(455.390,00)	99,59	
2.13.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.623.200,00	2.623.200,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	2.623.200,00	2.623.200,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.623.200,00	2.623.200,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	14.781.300,00	14.629.800,00	(151.500,00)	98,98	
2.13.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	14.781.300,00	14.629.800,00	(151.500,00)	98,98	
2.13.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.781.300,00	14.629.800,00	(151.500,00)	98,98	
2.13.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	4.402.000,00	4.402.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	4.402.000,00	4.402.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.402.000,00	4.402.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	81.510.000,00	81.434.910,00	(75.090,00)	99,91	
2.13.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	81.510.000,00	81.434.910,00	(75.090,00)	99,91	
2.13.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	34.620.000,00	34.620.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.890.000,00	46.814.910,00	(75.090,00)	99,84	
2.13.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	7.857.200,00	7.628.400,00	(228.800,00)	97,09	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.13.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	7.857.200,00	7.628.400,00	(228.800,00)	97,09	
2.13.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.857.200,00	7.628.400,00	(228.800,00)	97,09	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	686.926.300,00	684.368.267,00	(2.558.033,00)	99,63	
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	686.926.300,00	684.368.267,00	(2.558.033,00)	99,63	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	8.826.300,00	8.726.300,00	(100.000,00)	98,87	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	8.826.300,00	8.726.300,00	(100.000,00)	98,87	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.826.300,00	8.726.300,00	(100.000,00)	98,87	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	279.700.000,00	277.591.966,00	(2.108.034,00)	99,25	
7.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	211.411.500,00	209.907.222,00	(1.504.278,00)	99,29	
7.01.03.2.02.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.051.500,00	208.547.222,00	(1.504.278,00)	99,28	
7.01.03.2.02.0002.5.2	BELANJA MODAL	68.288.500,00	67.684.744,00	(603.756,00)	99,12	
7.01.03.2.02.0002.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	68.288.500,00	67.684.744,00	(603.756,00)	99,12	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	398.400.000,00	398.050.001,00	(349.999,00)	99,91	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	398.400.000,00	398.050.001,00	(349.999,00)	99,91	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	398.400.000,00	398.050.001,00	(349.999,00)	99,91	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	798.100.000,00	795.086.577,00	(3.013.423,00)	99,62	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(798.100.000,00)	(795.086.577,00)	3.013.423,00	99,62	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(798.100.000,00)	(795.086.577,00)	3.013.423,00	99,62	





7.01.2.13.0.00.36.0000

KECAMATAN TANAH SAREAL

KELURAHAN MEKARWANGI



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.36.0000 KECAMATAN TANAH SAREAL
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.36.0009 KELURAHAN MEKARWANGI

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	109.360.600,00	108.520.000,00	(840.600,00)	99,23	
2.13.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	109.360.600,00	108.520.000,00	(840.600,00)	99,23	
2.13.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.756.000,00	3.756.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	3.756.000,00	3.756.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.756.000,00	3.756.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	10.560.400,00	10.559.800,00	(600,00)	99,99	
2.13.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	10.560.400,00	10.559.800,00	(600,00)	99,99	
2.13.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.560.400,00	10.559.800,00	(600,00)	99,99	
2.13.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	4.833.400,00	4.833.400,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	4.833.400,00	4.833.400,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.833.400,00	4.833.400,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	82.465.000,00	82.435.000,00	(30.000,00)	99,96	
2.13.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	82.465.000,00	82.435.000,00	(30.000,00)	99,96	
2.13.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	28.120.000,00	28.120.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.345.000,00	54.315.000,00	(30.000,00)	99,94	
2.13.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	7.745.800,00	6.935.800,00	(810.000,00)	89,54	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.13.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	7.745.800,00	6.935.800,00	(810.000,00)	89,54	
2.13.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.745.800,00	6.935.800,00	(810.000,00)	89,54	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	652.764.400,00	650.941.892,00	(1.822.508,00)	99,72	
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	652.764.400,00	650.941.892,00	(1.822.508,00)	99,72	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	10.664.400,00	10.304.100,00	(360.300,00)	96,62	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	10.664.400,00	10.304.100,00	(360.300,00)	96,62	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.664.400,00	10.304.100,00	(360.300,00)	96,62	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	249.100.000,00	247.987.792,00	(1.112.208,00)	99,55	
7.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	15.800.000,00	15.120.000,00	(680.000,00)	95,70	
7.01.03.2.02.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	15.800.000,00	15.120.000,00	(680.000,00)	95,70	
7.01.03.2.02.0002.5.2	BELANJA MODAL	233.300.000,00	232.867.792,00	(432.208,00)	99,81	
7.01.03.2.02.0002.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	233.300.000,00	232.867.792,00	(432.208,00)	99,81	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	393.000.000,00	392.650.000,00	(350.000,00)	99,91	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	393.000.000,00	392.650.000,00	(350.000,00)	99,91	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	393.000.000,00	392.650.000,00	(350.000,00)	99,91	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	762.125.000,00	759.461.892,00	(2.663.108,00)	99,65	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(762.125.000,00)	(759.461.892,00)	2.663.108,00	99,65	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(762.125.000,00)	(759.461.892,00)	2.663.108,00	99,65	





7.01.2.13.0.00.36.0000

KECAMATAN TANAH SAREAL

KELURAHAN KENCANA



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.36.0000 KECAMATAN TANAH SAREAL
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.36.0010 KELURAHAN KENCANA

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	110.550.500,00	108.264.900,00	(2.285.600,00)	97,93	
2.13.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	110.550.500,00	108.264.900,00	(2.285.600,00)	97,93	
2.13.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.985.600,00	4.974.500,00	(11.100,00)	99,78	
2.13.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	4.985.600,00	4.974.500,00	(11.100,00)	99,78	
2.13.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.985.600,00	4.974.500,00	(11.100,00)	99,78	
2.13.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	19.532.600,00	19.528.100,00	(4.500,00)	99,98	
2.13.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	19.532.600,00	19.528.100,00	(4.500,00)	99,98	
2.13.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.532.600,00	19.528.100,00	(4.500,00)	99,98	
2.13.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	2.811.200,00	2.811.200,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	2.811.200,00	2.811.200,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.811.200,00	2.811.200,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	77.850.000,00	75.580.000,00	(2.270.000,00)	97,08	
2.13.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	77.850.000,00	75.580.000,00	(2.270.000,00)	97,08	
2.13.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.250.000,00	35.980.000,00	(2.270.000,00)	94,07	
2.13.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	5.371.100,00	5.371.100,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.13.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	5.371.100,00	5.371.100,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.371.100,00	5.371.100,00	0,00	100,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	702.729.600,00	700.886.550,00	(1.843.050,00)	99,74	
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	702.729.600,00	700.886.550,00	(1.843.050,00)	99,74	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	9.364.200,00	8.464.200,00	(900.000,00)	90,39	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	9.364.200,00	8.464.200,00	(900.000,00)	90,39	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.364.200,00	8.464.200,00	(900.000,00)	90,39	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	250.565.400,00	249.622.350,00	(943.050,00)	99,62	
7.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	250.565.400,00	249.622.350,00	(943.050,00)	99,62	
7.01.03.2.02.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.205.400,00	248.262.350,00	(943.050,00)	99,62	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	442.800.000,00	442.800.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	442.800.000,00	442.800.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	442.800.000,00	442.800.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	813.280.100,00	809.151.450,00	(4.128.650,00)	99,49	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(813.280.100,00)	(809.151.450,00)	4.128.650,00	99,49	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(813.280.100,00)	(809.151.450,00)	4.128.650,00	99,49	





7.01.2.13.0.00.36.0000

KECAMATAN TANAH SAREAL

KELURAHAN KAYUMANIS



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Satuan Kerja : 7.01.2.13.0.00.36.0000 KECAMATAN TANAH SAREAL
Sub Unit : 7.01.2.13.0.00.36.0011 KELURAHAN KAYUMANIS

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	113.634.000,00	113.499.950,00	(134.050,00)	99,88	
2.13.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	113.634.000,00	113.499.950,00	(134.050,00)	99,88	
2.13.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASIRNNLISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.236.500,00	3.235.500,00	(1.000,00)	99,97	
2.13.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	3.236.500,00	3.235.500,00	(1.000,00)	99,97	
2.13.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.236.500,00	3.235.500,00	(1.000,00)	99,97	
2.13.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	16.007.900,00	15.981.850,00	(26.050,00)	99,84	
2.13.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	16.007.900,00	15.981.850,00	(26.050,00)	99,84	
2.13.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.007.900,00	15.981.850,00	(26.050,00)	99,84	
2.13.01.2.06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	3.807.600,00	3.750.600,00	(57.000,00)	98,50	
2.13.01.2.06.0003.5.1	BELANJA OPERASI	3.807.600,00	3.750.600,00	(57.000,00)	98,50	
2.13.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.807.600,00	3.750.600,00	(57.000,00)	98,50	
2.13.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	85.325.000,00	85.275.000,00	(50.000,00)	99,94	
2.13.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	85.325.000,00	85.275.000,00	(50.000,00)	99,94	
2.13.01.2.06.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	34.760.000,00	34.760.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.565.000,00	50.515.000,00	(50.000,00)	99,90	
2.13.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	5.257.000,00	5.257.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.13.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	5.257.000,00	5.257.000,00	0,00	100,00	
2.13.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.257.000,00	5.257.000,00	0,00	100,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	524.316.000,00	523.480.076,00	(835.924,00)	99,84	
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	524.316.000,00	523.480.076,00	(835.924,00)	99,84	
7.01.03.2.02.0001	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	6.366.000,00	6.363.000,00	(3.000,00)	99,95	
7.01.03.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	6.366.000,00	6.363.000,00	(3.000,00)	99,95	
7.01.03.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.756.000,00	4.753.000,00	(3.000,00)	99,94	
7.01.03.2.02.0002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	223.950.000,00	223.117.076,00	(832.924,00)	99,63	
7.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0002.5.2	BELANJA MODAL	216.400.000,00	215.567.076,00	(832.924,00)	99,62	
7.01.03.2.02.0002.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	88.850.600,00	88.278.276,00	(572.324,00)	99,36	
7.01.03.2.02.0002.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	127.549.400,00	127.288.800,00	(260.600,00)	99,80	
7.01.03.2.02.0003	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	294.000.000,00	294.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1	BELANJA OPERASI	294.000.000,00	294.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	294.000.000,00	294.000.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	637.950.000,00	636.980.026,00	(969.974,00)	99,85	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(637.950.000,00)	(636.980.026,00)	969.974,00	99,85	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(637.950.000,00)	(636.980.026,00)	969.974,00	99,85	





8.01.0.00.0.00.30.0000

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Satuan Kerja : 8.01.0.00.0.00.30.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.572.170.183,00	9.090.624.508,00	(481.545.675,00)	94,97	
8.01.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	15.458.000,00	14.244.800,00	(1.213.200,00)	92,15	
8.01.01.2.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	15.458.000,00	14.244.800,00	(1.213.200,00)	92,15	
8.01.01.2.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	15.458.000,00	14.244.800,00	(1.213.200,00)	92,15	
8.01.01.2.01.0006.5.1.01	Belanja Pegawai	10.100.000,00	8.888.000,00	(1.212.000,00)	88,00	
8.01.01.2.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.358.000,00	5.356.800,00	(1.200,00)	99,98	
8.01.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.645.536.617,00	5.286.502.205,00	(359.034.412,00)	93,64	
8.01.01.2.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.645.536.617,00	5.286.502.205,00	(359.034.412,00)	93,64	
8.01.01.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	5.645.536.617,00	5.286.502.205,00	(359.034.412,00)	93,64	
8.01.01.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	5.645.536.617,00	5.286.502.205,00	(359.034.412,00)	93,64	
8.01.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	2.095.096.000,00	2.039.547.179,00	(55.548.821,00)	97,35	
8.01.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	236.100.800,00	236.019.580,00	(81.220,00)	99,97	
8.01.01.2.06.0002.5.1	BELANJA OPERASI	236.100.800,00	236.019.580,00	(81.220,00)	99,97	
8.01.01.2.06.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
8.01.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.600.800,00	227.519.580,00	(81.220,00)	99,96	
8.01.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	331.779.200,00	331.049.923,00	(729.277,00)	99,78	
8.01.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	331.779.200,00	331.049.923,00	(729.277,00)	99,78	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
8.01.01.2.06.0005.5.1.01	Belanja Pegawai	42.500.000,00	41.862.500,00	(637.500,00)	98,50	
8.01.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.279.200,00	289.187.423,00	(91.777,00)	99,97	
8.01.01.2.06.0006	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	12.000.000,00	11.980.800,00	(19.200,00)	99,84	
8.01.01.2.06.0006.5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	11.980.800,00	(19.200,00)	99,84	
8.01.01.2.06.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.980.800,00	(19.200,00)	99,84	
8.01.01.2.06.0008	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	224.475.000,00	224.460.000,00	(15.000,00)	99,99	
8.01.01.2.06.0008.5.1	BELANJA OPERASI	224.475.000,00	224.460.000,00	(15.000,00)	99,99	
8.01.01.2.06.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.475.000,00	224.460.000,00	(15.000,00)	99,99	
8.01.01.2.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	1.290.741.000,00	1.236.036.876,00	(54.704.124,00)	95,76	
8.01.01.2.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	1.290.741.000,00	1.236.036.876,00	(54.704.124,00)	95,76	
8.01.01.2.06.0009.5.1.01	Belanja Pegawai	22.920.000,00	22.920.000,00	0,00	100,00	
8.01.01.2.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.267.821.000,00	1.213.116.876,00	(54.704.124,00)	95,69	
8.01.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.234.185.700,00	1.223.737.998,00	(10.447.702,00)	99,15	
8.01.01.2.07.0001	PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	601.040.000,00	591.460.000,00	(9.580.000,00)	98,41	
8.01.01.2.07.0001.5.1	BELANJA OPERASI	2.040.000,00	1.360.000,00	(680.000,00)	66,67	
8.01.01.2.07.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	2.040.000,00	1.360.000,00	(680.000,00)	66,67	
8.01.01.2.07.0001.5.2	BELANJA MODAL	599.000.000,00	590.100.000,00	(8.900.000,00)	98,51	
8.01.01.2.07.0001.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	599.000.000,00	590.100.000,00	(8.900.000,00)	98,51	
8.01.01.2.07.0006	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	128.666.800,00	128.663.200,00	(3.600,00)	100,00	
8.01.01.2.07.0006.5.1	BELANJA OPERASI	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
8.01.01.2.07.0006.5.1.01	Belanja Pegawai	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
8.01.01.2.07.0006.5.2	BELANJA MODAL	127.986.800,00	127.983.200,00	(3.600,00)	100,00	
8.01.01.2.07.0006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	127.986.800,00	127.983.200,00	(3.600,00)	100,00	
8.01.01.2.07.0010	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	504.478.900,00	503.614.798,00	(864.102,00)	99,83	
8.01.01.2.07.0010.5.1	BELANJA OPERASI	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	100,00	
8.01.01.2.07.0010.5.1.01	Belanja Pegawai	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	100,00	
8.01.01.2.07.0010.5.2	BELANJA MODAL	502.438.900,00	501.574.798,00	(864.102,00)	99,83	
8.01.01.2.07.0010.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	193.538.800,00	193.407.759,00	(131.041,00)	99,93	
8.01.01.2.07.0010.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	308.900.100,00	308.167.039,00	(733.061,00)	99,76	
8.01.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	295.793.866,00	276.270.974,00	(19.522.892,00)	93,40	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
8.01.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	295.793.866,00	276.270.974,00	(19.522.892,00)	93,40	
8.01.01.2.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	295.793.866,00	276.270.974,00	(19.522.892,00)	93,40	
8.01.01.2.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	295.793.866,00	276.270.974,00	(19.522.892,00)	93,40	
8.01.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	286.100.000,00	250.321.352,00	(35.778.648,00)	87,49	
8.01.01.2.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	242.850.000,00	208.050.000,00	(34.800.000,00)	85,67	
8.01.01.2.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	242.850.000,00	208.050.000,00	(34.800.000,00)	85,67	
8.01.01.2.09.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	242.850.000,00	208.050.000,00	(34.800.000,00)	85,67	
8.01.01.2.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	43.250.000,00	42.271.352,00	(978.648,00)	97,74	
8.01.01.2.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	43.250.000,00	42.271.352,00	(978.648,00)	97,74	
8.01.01.2.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.250.000,00	42.271.352,00	(978.648,00)	97,74	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.104.985.650,00	1.096.107.659,00	(8.877.991,00)	99,20	
8.01.02.2.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.104.985.650,00	1.096.107.659,00	(8.877.991,00)	99,20	
8.01.02.2.01.0003	PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	1.104.985.650,00	1.096.107.659,00	(8.877.991,00)	99,20	
8.01.02.2.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	1.104.985.650,00	1.096.107.659,00	(8.877.991,00)	99,20	
8.01.02.2.01.0003.5.1.01	Belanja Pegawai	4.330.000,00	0,00	(4.330.000,00)	0,00	
8.01.02.2.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.100.655.650,00	1.096.107.659,00	(4.547.991,00)	99,59	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	43.358.736.200,00	43.219.714.901,00	(139.021.299,00)	99,68	
8.01.03.2.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK	43.358.736.200,00	43.219.714.901,00	(139.021.299,00)	99,68	
8.01.03.2.01.0001	PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	43.358.736.200,00	43.219.714.901,00	(139.021.299,00)	99,68	
8.01.03.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	43.358.736.200,00	43.219.714.901,00	(139.021.299,00)	99,68	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
8.01.03.2.01.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	30.240.000,00	30.240.000,00	0,00	100,00	
8.01.03.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.214.511.600,00	1.143.450.301,00	(71.061.299,00)	94,15	
8.01.03.2.01.0001.5.1.05	Belanja Hibah	42.113.984.600,00	42.046.024.600,00	(67.960.000,00)	99,84	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	827.772.100,00	784.056.200,00	(43.715.900,00)	94,72	
8.01.04.2.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	827.772.100,00	784.056.200,00	(43.715.900,00)	94,72	
8.01.04.2.01.0005	PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	827.772.100,00	784.056.200,00	(43.715.900,00)	94,72	
8.01.04.2.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	827.772.100,00	784.056.200,00	(43.715.900,00)	94,72	
8.01.04.2.01.0005.5.1.01	Belanja Pegawai	17.800.000,00	14.240.000,00	(3.560.000,00)	80,00	
8.01.04.2.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.972.100,00	69.816.200,00	(155.900,00)	99,78	
8.01.04.2.01.0005.5.1.05	Belanja Hibah	740.000.000,00	700.000.000,00	(40.000.000,00)	94,59	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	235.541.900,00	219.734.900,00	(15.807.000,00)	93,29	
8.01.05.2.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	235.541.900,00	219.734.900,00	(15.807.000,00)	93,29	
8.01.05.2.01.0003	PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	235.541.900,00	219.734.900,00	(15.807.000,00)	93,29	
8.01.05.2.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	235.541.900,00	219.734.900,00	(15.807.000,00)	93,29	
8.01.05.2.01.0003.5.1.01	Belanja Pegawai	11.270.000,00	1.610.000,00	(9.660.000,00)	14,29	
8.01.05.2.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.271.900,00	218.124.900,00	(6.147.000,00)	97,26	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	28.434.445.585,00	26.965.887.257,00	(1.468.558.328,00)	94,84	
8.01.06.2.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	28.434.445.585,00	26.965.887.257,00	(1.468.558.328,00)	94,84	
8.01.06.2.01.0004	PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	28.434.445.585,00	26.965.887.257,00	(1.468.558.328,00)	94,84	
8.01.06.2.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	28.434.445.585,00	26.965.887.257,00	(1.468.558.328,00)	94,84	
8.01.06.2.01.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	63.600.000,00	55.795.999,00	(7.804.001,00)	87,73	



KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
8.01.06.2.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	749.951.799,00	705.200.100,00	(44.751.699,00)	94,03	
8.01.06.2.01.0004.5.1.05	Belanja Hibah	27.620.893.786,00	26.204.891.158,00	(1.416.002.628,00)	94,87	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	83.533.651.618,00	81.376.125.425,00	(2.157.526.193,00)	97,42	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(83.533.651.618,00)	(81.376.125.425,00)	2.157.526.193,00	97,42	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(83.533.651.618,00)	(81.376.125.425,00)	2.157.526.193,00	97,42	





PEMERINTAH KOTA BOGOR

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	646.465.864.001,00	632.394.257.049,00	158.632.103.640,00	149.929.407.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	646.465.864.001,00	632.394.257.049,00	158.632.103.640,00	149.929.407.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN	646.465.864.001,00	632.394.257.049,00	158.632.103.640,00	149.929.407.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	425.526.658.164,00	419.007.835.970,00	380.621.300,00	378.688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.660.000,00	67.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	67.660.000,00	67.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	417.248.365.417,00	411.357.999.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	417.172.125.517,00	411.294.939.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	76.239.900,00	63.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.531.527.000,00	4.042.805.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	162.302.500,00	142.692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	122.686.100,00	117.356.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	216.225.000,00	212.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.841.000,00	14.832.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.734.511.400,00	1.412.451.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.280.961.000,00	2.143.149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	41.520.000,00	41.520.000,00	380.621.300,00	378.688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.520.000,00	41.520.000,00	380.621.300,00	378.688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.526.560.747,00	2.419.627.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	387.660.835,00	351.573.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.138.899.912,00	2.068.054.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.111.025.000,00	1.078.313.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	141.900.000,00	138.407.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	369.125.000,00	343.357.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600.000.000,00	596.548.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	220.939.205.837,00	213.386.421.079,00	158.251.482.340,00	149.550.719.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	113.140.569.617,00	109.982.217.699,00	81.500.315.079,00	76.269.587.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	3.909.900,00	3.909.900,00	596.090.100,00	579.877.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2.119.800,00	2.119.800,00	997.880.200,00	967.545.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	166.945.300,00	64.739.500,00	5.301.204.200,00	3.578.873.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	0,00	0,00	5.265.064.000,00	4.899.794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.010.896.500,00	3.004.173.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	22.033.820.000,00	21.863.615.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	235.515.700,00	214.982.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2.906.411.440,00	2.865.625.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	502.210.800,00	500.487.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	332.316.600,00	312.788.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	82.265.933.177,00	79.502.672.942,00	28.527.031.483,00	28.333.100.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	818.919.600,00	803.242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	7.296.000,00	7.296.000,00	11.192.704.000,00	10.194.500.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	824.020.600,00	807.238.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	30.254.200,00	29.325.400,00	29.620.341.096,00	27.715.895.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	70.332.996.568,00	66.834.208.639,00	74.306.788.503,00	71.108.667.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	306.764.000,00	298.953.860,00	56.317.183.321,00	53.717.541.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	113.837.500,00	112.655.000,00	7.978.844.668,00	7.452.103.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	9.088.800,00	9.088.800,00	1.377.740.000,00	1.375.002.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	16.861.500,00	16.307.500,00	987.543.690,00	944.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	35.544.236.000,00	34.652.101.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.357.987.600,00	1.242.283.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.369.588.360,00	2.129.912.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	665.234.800,00	659.274.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	530.091.100,00	504.361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	28.418.787.508,00	26.240.045.018,00	7.645.476.824,00	7.619.790.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	456.058.600,00	447.272.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	544.460.800,00	521.953.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	16.948.275.452,00	16.709.714.541,00	611.135.100,00	514.660.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	324.440.000,00	299.150.000,00	214.103.000,00	186.302.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	4.822.500,00	4.822.500,00	278.874.000,00	217.880.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	9.619.049.552,00	9.432.650.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	5.149.440.000,00	5.148.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	931.198.000,00	921.608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	265.728.100,00	263.359.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	235.891.900,00	236.551.769,00	118.158.100,00	110.478.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	417.705.400,00	402.731.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	20.517.364.200,00	19.860.280.200,00	1.833.243.658,00	1.657.804.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	18.138.910.000,00	17.500.702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.053.599.800,00	1.053.299.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	231.873.900,00	231.168.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	736.480.800,00	727.294.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	84.800.500,00	84.800.500,00	202.779.500,00	202.779.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	92.197.000,00	87.456.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.063.400,00	3.063.000,00	650.464.158,00	566.885.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	176.438.800,00	172.494.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04.0050	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0,00	0,00	980.000.000,00	888.139.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	673.590.919.586,00	670.489.934.500,00	66.591.771.447,00	56.854.492.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	342.709.092.361,00	322.320.205.714,00	14.846.102.757,00	11.432.207.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	186.830.029.538,00	174.637.616.737,00	6.804.443.184,00	4.641.440.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	159.268.100,00	159.268.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	104.536.800,00	104.536.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	54.731.300,00	54.731.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	106.526.661.356,00	104.844.477.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	104.944.091.356,00	103.281.306.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danrnnPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.518.370.000,00	1.498.971.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	64.200.000,00	64.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.507.274.064,00	3.210.413.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiirnnListrik/Penerangan Bangunan Kantor	363.043.900,00	359.306.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	565.245.589,00	556.322.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	384.915.875,00	378.842.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.326.508.700,00	1.279.303.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	867.560.000,00	636.638.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	516.351.900,00	511.883.000,00	3.545.809.415,00	2.843.219.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	956.000,00	0,00	584.115.683,00	458.724.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	1.735.600,00	1.383.000,00	2.646.722.233,00	2.072.114.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	513.660.300,00	510.500.000,00	314.971.499,00	312.380.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.401.646.084,00	2.260.803.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	980.156.012,00	906.145.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.421.490.072,00	1.354.657.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.193.373.500,00	1.969.491.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	455.100.000,00	366.157.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	602.423.500,00	491.340.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.135.850.000,00	1.111.992.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	71.525.454.534,00	61.681.279.820,00	3.258.633.769,00	1.798.221.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	71.525.454.534,00	61.681.279.820,00	3.258.633.769,00	1.798.221.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	136.800.136.593,00	129.723.096.168,00	8.041.659.573,00	6.790.766.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	16.589.493.324,00	13.474.166.784,00	8.041.659.573,00	6.790.766.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	183.475.800,00	156.543.400,00	4.625.510.000,00	3.956.535.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	59.758.490,00	59.674.200,00	99.688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	1.088.519.200,00	1.060.122.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	779.654.000,00	748.295.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	50.039.800,00	47.096.997,00	3.316.461.573,00	2.834.230.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	396.673.900,00	356.210.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	61.855.000,00	60.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	13.829.253.934,00	10.872.132.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	27.765.000,00	27.667.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	112.498.200,00	86.414.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	118.400.561.669,00	114.455.288.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	514.550.000,00	508.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	183.750.000,00	183.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	6.799.800,00	6.799.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	640.850.000,00	620.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	71.356.000,00	68.648.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.613.467.200,00	1.613.267.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	26.280.000,00	24.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.789.332.136,00	1.762.530.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	139.650.000,00	135.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	310.800.000,00	310.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	11.768.171.400,00	10.874.453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.532.671.800,00	1.523.640.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	400.808.700,00	396.867.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	4.999.900,00	4.956.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	397.907.000,00	386.331.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	11.610.000,00	10.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	76.117.800,00	74.555.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.626.737.105,00	2.480.619.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	86.514.920.798,00	83.952.686.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	4.680.000,00	4.428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	325.566.000,00	313.546.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	5.038.331.000,00	4.931.141.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	126.930.000,00	120.689.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	134.220.000,00	132.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Immunisasi dan Pemberian Obat Massal)	27.350.000,00	23.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	128.729.700,00	97.675.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	559.270.330,00	543.840.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	121.000.000,00	116.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	83.400.000,00	69.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	34.358.000,00	32.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	74.500.000,00	73.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.975.047.000,00	2.920.280.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.658.707.200,00	1.652.374.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1.658.707.200,00	1.652.374.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	151.374.400,00	141.266.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	141.263.000,00	131.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	10.111.400,00	10.111.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3.793.080.130,00	3.330.393.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	2.394.637.740,00	2.304.198.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	13.237.200,00	11.622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	2.192.993.040,00	2.108.345.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	188.407.500,00	184.231.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.394.842.390,00	1.022.594.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.394.842.390,00	1.022.594.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	873.649.100,00	754.631.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	82.981.600,00	79.381.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	82.981.600,00	79.381.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	10.185.200,00	2.849.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	10.185.200,00	2.849.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	437.777.400,00	405.395.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	437.777.400,00	405.395.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	82.191.000,00	81.561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	82.191.000,00	81.561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	69.999.900,00	56.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	69.999.900,00	56.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	190.514.000,00	129.198.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	190.514.000,00	129.198.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	14.412.197.000,00	13.874.468.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	56.968.000,00	56.968.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	56.968.000,00	56.968.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	164.990.000,00	162.199.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	164.990.000,00	162.199.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.190.239.000,00	13.655.300.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	14.190.239.000,00	13.655.300.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.03.0000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	330.881.827.225,00	348.169.728.786,00	51.745.668.690,00	45.422.284.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.707.180.401,00	18.258.203.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.707.180.401,00	18.258.203.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.707.180.401,00	18.258.203.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	312.174.646.824,00	329.911.525.450,00	51.745.668.690,00	45.422.284.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	39.381.010.841,00	39.266.988.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	39.381.010.841,00	39.266.988.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	312.174.646.824,00	329.911.525.450,00	12.364.657.849,00	6.155.296.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	312.174.646.824,00	329.911.525.450,00	12.364.657.849,00	6.155.296.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	108.291.817.957,00	104.333.412.016,00	139.408.005.454,00	134.187.854.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.04.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	101.176.974.946,00	97.653.721.349,00	132.325.495.325,00	127.725.304.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	32.219.579.000,00	30.713.045.623,00	16.414.588.900,00	15.552.502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.178.038.896,00	19.921.240.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.003.978.896,00	19.778.620.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	174.060.000,00	142.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	79.151.000,00	77.148.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	79.151.000,00	77.148.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.843.561.900,00	1.751.390.210,00	1.428.866.200,00	1.422.355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	99.906.600,00	99.013.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	424.530.700,00	421.917.450,00	858.369.100,00	854.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	79.857.600,00	76.985.900,00	570.497.100,00	568.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.668.000,00	49.344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	119.869.000,00	118.975.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.069.730.000,00	985.154.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.160.000,00	0,00	14.985.722.700,00	14.130.147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	8.160.000,00	0,00	14.985.722.700,00	14.130.147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.714.212.032,00	4.172.775.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	736.493.488,00	510.372.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.977.718.544,00	3.662.402.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.396.455.172,00	4.790.490.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	402.732.000,00	351.436.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.090.405.172,00	3.586.255.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	697.818.000,00	649.098.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	205.500.000,00	203.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	13.969.606.115,00	13.377.011.285,00	32.856.427.081,00	32.747.246.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.262.806.115,00	3.188.582.995,00	32.856.427.081,00	32.747.246.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	1.428.582.400,00	1.403.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	37.080.000,00	7.200.000,00	15.519.354.845,00	15.479.899.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01.0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	2.720.000,00	2.040.000,00	17.337.072.236,00	17.267.347.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	1.794.423.715,00	1.775.782.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.706.800.000,00	10.188.428.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	10.706.800.000,00	10.188.428.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	19.278.466.721,00	19.008.809.838,00	1.004.810.000,00	918.502.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	19.278.466.721,00	19.008.809.838,00	1.004.810.000,00	918.502.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	2.274.670.000,00	2.220.908.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.05.2.01.0027	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	705.021.500,00	693.281.025,00	98.901.000,00	98.901.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	532.020.000,00	519.846.688,00	905.909.000,00	819.601.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.226.680.000,00	1.188.354.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	14.540.075.221,00	14.386.418.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	3.085.790.710,00	3.047.221.615,00	19.495.752.341,00	19.314.153.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.085.790.710,00	3.047.221.615,00	19.495.752.341,00	19.314.153.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	8.160.000,00	6.800.000,00	10.206.825.450,00	10.082.765.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	8.160.000,00	0,00	9.288.926.891,00	9.231.388.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	1.094.306.710,00	1.073.907.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	1.975.164.000,00	1.966.514.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	903.568.000,00	546.514.000,00	8.776.439.448,00	8.649.886.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	903.568.000,00	546.514.000,00	8.776.439.448,00	8.649.886.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	145.528.000,00	122.154.000,00	8.673.307.448,00	8.550.030.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	2.040.000,00	1.360.000,00	103.132.000,00	99.855.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	756.000.000,00	423.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	30.383.969.850,00	29.753.585.213,00	53.777.477.555,00	50.543.013.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	30.383.969.850,00	29.753.585.213,00	53.777.477.555,00	50.543.013.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	3.638.299.850,00	3.293.492.700,00	3.031.661.220,00	757.870.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	36.250.000,00	35.500.000,00	2.583.635.750,00	2.393.308.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	8.160.000,00	5.440.000,00	24.821.027.893,00	24.505.746.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	0,00	0,00	18.231.670.386,00	18.122.934.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.625.000.000,00	1.616.906.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	0,00	0,00	3.165.573.806,00	3.067.727.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	76.260.000,00	76.260.000,00	1.943.908.500,00	1.695.426.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	25.000.000.000,00	24.725.985.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	435.994.550,00	379.504.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	200.000.000,00	170.210.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	200.000.000,00	170.210.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	160.994.550,00	159.340.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	160.994.550,00	159.340.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	75.000.000,00	49.953.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	75.000.000,00	49.953.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	900.000.000,00	828.029.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	300.000.000,00	279.750.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	300.000.000,00	279.750.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000,00	269.619.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	300.000.000,00	269.619.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000,00	278.659.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	300.000.000,00	278.659.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.1.03.0.00.13.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7.114.843.011,00	6.679.690.667,00	7.082.510.129,00	6.462.550.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	7.114.843.011,00	6.679.690.667,00	7.082.510.129,00	6.462.550.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	7.114.843.011,00	6.679.690.667,00	7.082.510.129,00	6.462.550.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	28.633.871,00	28.360.000,00	1.032.246.129,00	505.700.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.669.364.600,00	1.448.427.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.04.2.01.0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.787.899.700,00	1.619.722.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	3.628.944.840,00	3.583.180.017,00	6.050.264.000,00	5.956.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	180.097.009.879,00	176.452.659.498,00	6.016.584.521,00	5.700.050.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.2.11.0.00.05.0000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	180.097.009.879,00	176.452.659.498,00	6.016.584.521,00	5.700.050.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	39.586.518.288,00	37.437.978.210,00	1.863.358.624,00	1.725.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	107.142.220,00	106.263.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.152.800,00	5.152.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98.839.420,00	97.960.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.282.055.217,00	14.880.216.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.155.464.317,00	14.757.825.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.259.600,00	1.259.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	125.331.300,00	121.131.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	156.338.500,00	153.898.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	156.338.500,00	153.898.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	481.650.000,00	450.661.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.987.500,00	11.927.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	174.217.800,00	170.297.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.428.800,00	40.333.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	84.836.900,00	84.714.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170.179.000,00	143.387.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.766.400,00	16.314.000,00	1.863.358.624,00	1.725.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	0,00	1.376.332.124,00	1.259.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.766.400,00	16.314.000,00	487.026.500,00	465.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.699.781.151,00	18.387.977.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.081.082.315,00	853.021.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.618.698.836,00	17.534.955.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.842.784.800,00	3.442.647.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.320.112.600,00	2.925.865.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	162.580.000,00	162.127.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	360.092.200,00	354.655.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	4.464.216.500,00	4.439.849.542,00	783.116.854,00	665.397.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	292.577.700,00	291.225.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	97.525.900,00	97.319.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	97.525.900,00	96.620.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	97.525.900,00	97.286.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	169.151.800,00	168.614.295,00	783.116.854,00	665.397.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	169.151.800,00	168.614.295,00	783.116.854,00	665.397.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	4.000.461.100,00	3.978.997.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	358.725.800,00	357.007.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	3.641.735.300,00	3.621.989.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	2.025.900,00	1.012.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	2.025.900,00	1.012.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	4.984.132.900,00	4.967.652.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	133.283.000,00	131.843.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.02.0004	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	77.000.000,00	76.925.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	56.283.000,00	54.918.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	4.850.849.900,00	4.835.808.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	97.000.000,00	96.604.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	4.753.849.900,00	4.739.203.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	34.480.562.000,00	33.757.240.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	34.480.562.000,00	33.757.240.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	34.480.562.000,00	33.757.240.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	96.581.580.191,00	95.849.938.478,00	3.370.109.043,00	3.309.552.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	96.581.580.191,00	95.849.938.478,00	3.370.109.043,00	3.309.552.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	92.025.900,00	91.813.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	96.347.394.291,00	95.615.964.678,00	3.370.109.043,00	3.309.552.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	142.160.000,00	142.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	74.248.445.085,00	72.522.114.143,00	1.018.898.200,00	944.427.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.06.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8.554.228.687,00	7.958.691.455,00	579.018.700,00	560.286.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.671.082.987,00	7.149.181.845,00	194.531.000,00	186.946.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.629.600,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.629.600,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.761.826.027,00	3.761.610.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.717.426.027,00	3.717.210.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	220.103.700,00	209.339.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	220.103.700,00	209.339.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	511.063.700,00	346.846.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.915.100,00	8.383.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.713.100,00	52.365.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.269.100,00	12.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	116.603.800,00	85.472.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.822.600,00	8.790.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000,00	11.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	262.740.000,00	167.398.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	194.531.000,00	186.946.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	89.439.900,00	88.178.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	105.091.100,00	98.768.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.165.896.360,00	2.115.014.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.085.000,00	136.665.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.025.811.360,00	1.978.349.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.007.563.600,00	714.071.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.090.000,00	37.022.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	646.802.000,00	378.432.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.985.600,00	72.490.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	227.686.000,00	226.126.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	883.145.700,00	809.509.610,00	384.487.700,00	373.339.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	250.853.500,00	230.539.500,00	196.692.000,00	194.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	250.853.500,00	230.539.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	0,00	0,00	196.692.000,00	194.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	611.292.200,00	557.970.110,00	187.795.700,00	179.339.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	36.800.000,00	29.100.000,00	160.173.800,00	152.197.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	574.492.200,00	528.870.110,00	27.621.900,00	27.142.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.07.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	48.488.505.515,00	48.223.112.690,00	168.608.100,00	126.941.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	45.118.206.176,00	44.994.947.367,00	58.851.400,00	58.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.999.800,00	5.999.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.499.800,00	3.499.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36.350.492.116,00	36.350.449.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36.350.492.116,00	36.350.449.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.611.033.300,00	1.608.136.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	123.636.000,00	123.467.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.995.900,00	29.975.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.226.321.200,00	1.223.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	91.722.200,00	91.681.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	41.600.000,00	41.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	97.758.000,00	97.662.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	58.851.400,00	58.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	58.851.400,00	58.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.328.989.960,00	5.225.028.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	221.675.155,00	130.467.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.107.314.805,00	5.094.560.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.821.691.000,00	1.805.332.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.708.841.200,00	1.693.659.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	82.249.800,00	81.607.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.600.000,00	30.064.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.370.299.339,00	3.228.165.323,00	109.756.700,00	68.541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.070.275.100,00	2.031.452.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1.315.563.800,00	1.315.510.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	185.730.000,00	179.639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	266.803.000,00	240.906.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	150.959.800,00	150.564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	100.499.800,00	99.760.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	45.718.700,00	45.072.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.285.024.239,00	1.181.943.223,00	109.756.700,00	68.541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	550.059.113,00	535.050.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	729.965.226,00	642.778.539,00	109.756.700,00	68.541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4.999.900,00	4.114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	15.000.000,00	14.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	15.000.000,00	14.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	17.205.710.883,00	16.340.309.998,00	271.271.400,00	257.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.464.955.983,00	15.670.023.148,00	58.583.500,00	58.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.168.400,00	7.098.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.168.400,00	7.098.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.136.179.805,00	12.621.750.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.082.899.805,00	12.569.330.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	53.280.000,00	52.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	118.599.500,00	117.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	118.599.500,00	117.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	379.320.900,00	333.639.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.151.500,00	37.204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.306.400,00	17.717.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.515.000,00	28.179.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	287.348.000,00	250.538.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	680.000,00	0,00	58.583.500,00	58.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	680.000,00	0,00	58.583.500,00	58.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.312.021.378,00	1.300.965.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	126.191.290,00	115.322.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.185.830.088,00	1.185.642.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.508.986.000,00	1.288.694.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.111.480.000,00	895.259.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.720.000,00	37.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	358.786.000,00	355.624.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	740.754.900,00	670.286.850,00	212.687.900,00	199.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	210.054.800,00	209.749.200,00	66.423.000,00	63.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	171.198.500,00	171.198.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	38.856.300,00	38.550.700,00	66.423.000,00	63.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	479.534.800,00	417.707.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	269.999.700,00	214.533.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	110.561.100,00	105.194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	98.974.000,00	97.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	51.165.300,00	42.830.000,00	146.264.900,00	136.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	51.165.300,00	42.830.000,00	146.264.900,00	136.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	17.479.317.800,00	16.812.521.531,00	186.859.200,00	182.756.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	DINAS SOSIAL	17.479.317.800,00	16.812.521.531,00	186.859.200,00	182.756.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.074.846.118,00	11.903.246.553,00	186.859.200,00	182.756.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.881.000,00	52.979.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.999.900,00	43.098.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.799.800,00	3.799.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.081.300,00	6.081.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.455.367.617,00	9.392.074.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.423.910.617,00	9.360.618.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	31.457.000,00	31.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	643.200.377,00	614.836.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.610.707,00	21.610.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	323.440.700,00	317.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.128.770,00	41.146.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	254.020.200,00	234.824.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	58.978.400,00	53.493.200,00	186.859.200,00	182.756.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	6.561.300,00	6.561.300,00	74.100.700,00	73.100.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.417.100,00	46.931.900,00	112.758.500,00	109.656.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.150.910.924,00	1.101.018.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	225.714.285,00	212.778.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	116.157.479,00	113.082.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	809.039.160,00	775.156.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	712.507.800,00	688.843.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	272.190.000,00	249.889.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	103.459.800,00	103.449.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	336.858.000,00	335.504.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	272.736.800,00	264.981.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.194.000,00	1.194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1.194.000,00	1.194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	271.542.800,00	263.787.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	183.687.000,00	178.557.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	67.349.600,00	67.349.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	20.506.200,00	17.881.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.536.379.300,00	1.268.232.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.139.063.300,00	877.661.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	52.480.000,00	49.514.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	896.112.300,00	641.242.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	98.400.000,00	98.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	84.871.000,00	81.304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	397.316.000,00	390.571.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	234.000.000,00	234.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang	29.536.000,00	28.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	6.380.000,00	6.356.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	43.400.000,00	37.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2.398.084.182,00	2.221.015.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	67.379.800,00	67.072.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	20.163.800,00	20.163.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar	22.134.000,00	21.826.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	25.082.000,00	25.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.330.704.382,00	2.153.943.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	822.409.900,00	797.396.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	402.489.400,00	387.417.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1.105.805.082,00	969.129.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.147.124.600,00	1.106.483.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	730.595.600,00	690.954.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	608.481.100,00	571.887.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	80.128.500,00	77.856.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	2.287.600,00	2.282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	24.053.400,00	23.284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	15.645.000,00	15.645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	416.529.000,00	415.529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	416.529.000,00	415.529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	50.146.800,00	48.561.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	50.146.800,00	48.561.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	50.146.800,00	48.561.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	18.806.585.126,00	18.355.687.027,00	52.311.998,00	52.010.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	18.806.585.126,00	18.355.687.027,00	52.311.998,00	52.010.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.0.00.0.00.10.0000	DINAS TENAGA KERJA	18.806.585.126,00	18.355.687.027,00	52.311.998,00	52.010.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.062.560.677,00	10.836.152.499,00	52.311.998,00	52.010.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.322.377,00	6.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.322.377,00	6.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.838.886.399,00	8.731.699.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.798.696.399,00	8.691.919.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	40.190.000,00	39.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	866.500.365,00	806.379.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	135.380.700,00	122.007.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.998.400,00	18.691.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57.655.000,00	51.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	653.466.265,00	614.641.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	52.311.998,00	52.010.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	52.311.998,00	52.010.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	889.152.448,00	834.116.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	159.775.000,00	151.361.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	729.377.448,00	682.754.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	460.699.088,00	457.262.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	141.380.000,00	138.598.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.060.000,00	68.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	251.259.088,00	250.604.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	3.361.788.719,00	3.253.003.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	3.332.725.719,00	3.227.585.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	3.332.725.719,00	3.227.585.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	9.627.900,00	9.049.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	9.627.900,00	9.049.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	19.435.100,00	16.369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	19.435.100,00	16.369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	4.252.135.930,00	4.141.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	4.005.379.930,00	3.988.291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	3.999.375.930,00	3.982.955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	3.720.000,00	3.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	2.284.000,00	1.856.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	246.756.000,00	152.989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	50.000.000,00	49.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	192.280.000,00	99.308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	4.476.000,00	4.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	130.099.800,00	125.251.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	113.396.700,00	109.585.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	113.396.700,00	109.585.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	16.703.100,00	15.665.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	16.703.100,00	15.665.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	14.980.204.805,00	14.616.650.441,00	122.139.100,00	122.099.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.13.0.00.11.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	14.980.204.805,00	14.616.650.441,00	122.139.100,00	122.099.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.484.649.850,00	9.369.396.461,00	122.139.100,00	122.099.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.134.600,00	20.134.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.134.600,00	20.134.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.219.240.510,00	7.153.998.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.153.240.510,00	7.087.998.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	940.966.100,00	916.832.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiirnnListrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.222.100,00	3.222.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	143.109.300,00	143.098.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.438.900,00	19.431.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	580.150.000,00	578.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	10.058.800,00	10.058.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	184.987.000,00	162.252.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.080.000,00	4.080.000,00	122.139.100,00	122.099.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.080.000,00	4.080.000,00	122.139.100,00	122.099.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	902.652.640,00	886.109.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	139.212.400,00	129.594.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	763.440.240,00	756.514.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	397.576.000,00	388.241.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.500.000,00	8.570.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	243.550.000,00	243.224.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	136.526.000,00	136.446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	877.818.700,00	869.668.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	64.846.000,00	64.846.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	64.846.000,00	64.846.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	450.189.100,00	447.697.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	450.189.100,00	447.697.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	362.783.600,00	357.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	362.783.600,00	357.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	735.430.200,00	551.230.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	56.526.000,00	56.126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	56.526.000,00	56.126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	678.904.200,00	495.104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	678.904.200,00	495.104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	3.233.134.855,00	3.186.644.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.145.429,00	68.501.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	69.145.429,00	68.501.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.163.989.426,00	3.118.142.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.023.328.426,00	983.167.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.938.408.000,00	1.932.722.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.04.2.02.0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	202.253.000,00	202.253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	112.706.500,00	112.606.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	112.706.500,00	112.606.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	112.706.500,00	112.606.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	536.464.700,00	527.104.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	36.101.900,00	36.101.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	36.101.900,00	36.101.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	500.362.800,00	491.002.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	119.462.800,00	110.102.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	380.900.000,00	380.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	22.779.054.170,00	22.708.316.156,00	15.143.000,00	14.992.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.3.27.3.25.12.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	22.779.054.170,00	22.708.316.156,00	15.143.000,00	14.992.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.578.347.915,00	17.540.320.606,00	15.143.000,00	14.992.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.134.560.367,00	15.122.037.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.084.224.367,00	15.072.940.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	50.336.000,00	49.097.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	487.366.000,00	487.274.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiirnnListrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.112.900,00	23.112.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.746.600,00	32.746.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.247.300,00	19.247.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.003.800,00	25.000.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.541.400,00	14.541.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	372.714.000,00	372.626.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.690.000,00	1.690.000,00	15.143.000,00	14.992.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.690.000,00	1.690.000,00	15.143.000,00	14.992.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.533.836.948,00	1.509.108.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	392.353.500,00	383.709.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.141.483.448,00	1.125.398.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	415.944.600,00	415.260.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	302.308.600,00	301.673.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.656.000,00	63.622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.980.000,00	49.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	13.930.000,00	13.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	13.930.000,00	13.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	13.930.000,00	13.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	4.113.286.052,00	4.089.656.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	4.042.102.500,00	4.018.688.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	4.006.242.500,00	3.984.153.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	35.300.000,00	34.534.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	71.183.552,00	70.967.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	30.421.800,00	30.421.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	40.761.752,00	40.546.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1.054.222.500,00	1.048.575.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	12.650.000,00	12.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	12.650.000,00	12.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.041.572.500,00	1.035.925.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.036.502.500,00	1.030.855.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	5.070.000,00	5.069.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	19.267.703,00	15.993.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	19.267.703,00	15.993.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	19.267.703,00	15.993.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	75.648.400,00	75.536.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.2.13.2.10.23.0000	SEKRETARIAT DAERAH	75.648.400,00	75.536.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	75.648.400,00	75.536.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	75.648.400,00	75.536.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.04.2.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	75.648.400,00	75.536.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	122.961.058.958,00	115.702.101.947,00	13.373.094.103,00	12.982.015.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.2.11.0.00.05.0000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	9.153.348.730,00	9.039.009.679,00	5.871.540.003,00	5.689.318.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	9.153.348.730,00	9.039.009.679,00	5.871.540.003,00	5.689.318.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	9.153.348.730,00	9.039.009.679,00	5.871.540.003,00	5.689.318.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	298.637.700,00	294.684.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	4.810.899.316,00	4.724.627.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.04.2.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	112.009.300,00	107.932.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	3.139.718.300,00	3.121.410.058,00	12.211.000,00	12.059.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	792.084.114,00	790.355.224,00	5.859.329.003,00	5.677.259.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.1.03.0.00.13.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	113.807.710.228,00	106.663.092.268,00	7.501.554.100,00	7.292.697.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	108.502.587.828,00	101.506.181.787,00	591.253.600,00	586.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	118.990.000,00	118.379.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	118.990.000,00	118.379.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35.534.118.051,00	35.036.612.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35.424.198.051,00	34.946.272.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	109.920.000,00	90.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.785.809.300,00	1.671.447.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	859.126.600,00	846.657.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	84.686.800,00	79.427.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	362.310.000,00	322.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.015.099,00	94.374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	379.670.801,00	328.152.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.290.000,00	0,00	591.253.600,00	586.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.290.000,00	0,00	591.253.600,00	586.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.316.462.688,00	41.557.178.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	354.355.000,00	343.781.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.962.107.688,00	41.213.397.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.744.917.789,00	23.122.564.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.957.289.789,00	22.410.440.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	496.788.000,00	468.918.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	290.840.000,00	243.204.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	678.840.000,00	662.159.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	235.840.000,00	223.606.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	235.840.000,00	223.606.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	443.000.000,00	438.553.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	443.000.000,00	438.553.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.040.948.000,00	1.003.026.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	940.948.000,00	908.035.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	790.948.000,00	773.069.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	150.000.000,00	134.966.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100.000.000,00	94.991.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	100.000.000,00	94.991.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	150.000.000,00	146.912.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	150.000.000,00	146.912.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	150.000.000,00	146.912.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	146.536.400,00	128.585.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	146.536.400,00	128.585.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	146.536.400,00	128.585.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	150.000.000,00	148.664.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	148.664.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	150.000.000,00	148.664.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	449.851.500,00	441.529.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	449.851.500,00	441.529.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	7.851.500,00	7.171.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	193.500.000,00	190.087.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	248.500.000,00	244.269.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	507.325.000,00	498.275.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	507.325.000,00	498.275.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	507.325.000,00	498.275.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	30.000.000,00	28.700.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	30.000.000,00	28.700.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	30.000.000,00	28.700.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.151.621.500,00	2.099.055.936,00	6.910.300.500,00	6.706.282.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	2.151.621.500,00	2.099.055.936,00	6.910.300.500,00	6.706.282.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	797.034.500,00	790.183.185,00	6.910.300.500,00	6.706.282.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	1.132.084.500,00	1.121.217.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	222.502.500,00	187.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	17.020.702.930,00	16.608.303.981,00	749.256.600,00	737.063.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	17.020.702.930,00	16.608.303.981,00	749.256.600,00	737.063.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.901.199.430,00	13.789.494.826,00	321.893.600,00	315.173.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	86.746.900,00	86.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	86.746.900,00	86.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.002.931.326,00	10.953.096.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.952.671.326,00	10.907.136.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	50.260.000,00	45.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	666.032.500,00	641.521.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.499.800,00	16.631.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.469.100,00	28.209.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	244.593.500,00	226.661.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.612.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	79.459.800,00	79.379.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	272.398.300,00	269.139.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.498.400,00	1.498.400,00	321.893.600,00	315.173.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.498.400,00	1.498.400,00	321.893.600,00	315.173.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.595.859.104,00	1.570.352.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	288.526.776,00	263.102.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.307.332.328,00	1.307.249.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	548.131.200,00	536.715.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	154.740.000,00	145.675.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	234.296.000,00	232.851.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	159.095.200,00	158.188.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.589.518.800,00	2.292.424.850,00	427.363.000,00	421.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	9.770.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	9.770.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.579.748.800,00	2.283.674.850,00	427.363.000,00	421.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	2.579.748.800,00	2.283.674.850,00	427.363.000,00	421.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	161.138.500,00	159.524.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	116.138.500,00	114.524.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	116.138.500,00	114.524.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	340.376.200,00	338.389.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	237.916.400,00	236.047.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	95.276.400,00	94.276.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.01.0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	142.640.000,00	141.770.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	102.459.800,00	102.342.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	102.459.800,00	102.342.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	28.470.000,00	28.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	28.470.000,00	28.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	28.470.000,00	28.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	40.528.213.174,00	39.373.918.852,00	1.269.043.800,00	1.263.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.2.13.2.10.23.0000	SEKRETARIAT DAERAH	220.400.000,00	219.595.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	100.000.000,00	99.332.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	100.000.000,00	99.332.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	100.000.000,00	99.332.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	100.000.000,00	99.863.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	99.863.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	100.000.000,00	99.863.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.2.13.0.00.31.0000	KECAMATAN BOGOR UTARA	856.502.300,00	848.255.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	849.902.300,00	841.655.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	849.902.300,00	841.655.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.476.000,00	15.411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115.073.000,00	112.111.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	36.005.900,00	33.206.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	640.825.400,00	639.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.522.000,00	41.170.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.2.13.0.00.32.0000	KECAMATAN BOGOR SELATAN	36.626.590.574,00	35.504.378.435,00	1.269.043.800,00	1.263.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	36.619.990.574,00	35.497.778.435,00	1.269.043.800,00	1.263.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.000.000,00	33.303.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.935.300,00	27.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.064.700,00	5.908.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.555.068.946,00	28.776.616.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.500.407.946,00	28.721.955.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	54.661.000,00	54.661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.632.391.000,00	2.437.037.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	406.534.100,00	390.660.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	161.762.400,00	122.228.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.790.840.000,00	1.684.630.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	128.835.500,00	117.950.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144.419.000,00	121.567.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	140.560.000,00	116.303.400,00	1.269.043.800,00	1.263.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	8.360.000,00	6.950.000,00	484.447.400,00	480.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.450.000,00	2.290.000,00	784.596.400,00	783.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120.750.000,00	107.063.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.959.980.628,00	2.917.874.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	366.951.700,00	341.338.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.593.028.928,00	2.576.535.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.296.990.000,00	1.216.643.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	236.100.000,00	169.146.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.400.000,00	95.153.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	965.490.000,00	952.343.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.2.13.0.00.33.0000	KECAMATAN BOGOR TIMUR	589.211.900,00	589.211.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	582.611.900,00	582.611.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	582.611.900,00	582.611.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.230.300,00	15.230.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.708.100,00	34.708.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.702.800,00	19.702.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	499.060.000,00	499.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.910.700,00	13.910.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.2.13.0.00.34.0000	KECAMATAN BOGOR BARAT	25.749.400,00	25.749.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	25.749.400,00	25.749.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	25.749.400,00	25.749.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	25.749.400,00	25.749.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.2.13.0.00.35.0000	KECAMATAN BOGOR TENGAH	1.033.248.900,00	1.030.208.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.026.648.900,00	1.023.608.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.026.648.900,00	1.023.608.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiirnnListrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.941.500,00	23.941.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	106.858.600,00	106.509.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	58.868.700,00	58.868.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	796.065.000,00	796.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.915.100,00	38.223.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.2.13.0.00.36.0000	KECAMATAN TANAH SAREAL	1.176.510.100,00	1.156.519.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.157.629.200,00	1.138.719.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.157.629.200,00	1.138.719.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	38.580.300,00	37.888.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	165.849.700,00	160.975.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	43.721.800,00	43.309.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	851.015.000,00	840.015.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58.462.400,00	56.530.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	18.880.900,00	17.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	18.880.900,00	17.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	18.880.900,00	17.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	19.463.375.188,00	18.933.839.151,00	60.784.000,00	60.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.0.00.0.00.15.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	19.463.375.188,00	18.933.839.151,00	60.784.000,00	60.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.308.282.709,00	8.177.073.563,00	60.784.000,00	60.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.505.332.873,00	6.495.182.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.426.988.873,00	6.416.838.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	78.344.000,00	78.344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	691.505.300,00	604.452.433,00	60.784.000,00	60.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	61.859.700,00	51.943.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86.491.900,00	77.987.500,00	60.784.000,00	60.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.181.700,00	14.181.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	241.420.000,00	236.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.000.000,00	37.684.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	242.552.000,00	186.035.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	467.764.536,00	439.765.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.195.000,00	76.998.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	387.569.536,00	362.766.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	643.680.000,00	637.673.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	289.040.000,00	284.969.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	104.640.000,00	103.014.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	250.000.000,00	249.689.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	660.720.000,00	642.008.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	91.120.000,00	91.104.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.01.0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	51.120.000,00	51.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.01.0018	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	40.000.000,00	39.999.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	569.600.000,00	550.903.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	166.275.000,00	159.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	58.860.000,00	57.143.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	67.200.000,00	67.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	66.000.000,00	61.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	127.415.000,00	121.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	43.050.000,00	42.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4.140.995.779,00	4.068.029.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	934.324.200,00	898.792.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	92.600.000,00	92.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	46.240.000,00	45.908.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	59.200.000,00	58.746.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	90.000.000,00	89.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100.000.000,00	83.333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	546.284.200,00	528.574.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	229.600.000,00	229.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	217.600.000,00	217.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.515.170.280,00	1.485.879.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	50.400.000,00	50.390.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.335.572.280,00	1.324.468.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	94.998.000,00	76.847.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	34.200.000,00	34.173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1.461.901.299,00	1.453.758.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	330.491.999,00	325.158.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	1.127.659.300,00	1.124.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	6.353.376.700,00	6.046.726.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	5.840.178.400,00	5.538.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	300.000.000,00	234.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	5.065.200.000,00	4.828.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	378.150.000,00	378.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	96.828.400,00	96.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	513.198.300,00	508.471.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	513.198.300,00	508.471.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	114.621.571.882,00	109.528.781.945,00	793.394.138,00	747.526.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.16.0000	DINAS PERHUBUNGAN	114.621.571.882,00	109.528.781.945,00	793.394.138,00	747.526.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	87.457.201.477,00	85.484.553.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.396.000,00	20.396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.396.000,00	20.396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36.728.307.231,00	36.551.062.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36.623.463.231,00	36.446.218.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	104.844.000,00	104.844.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	376.506.175,00	350.024.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.042.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.562.400,00	62.528.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	36.213.300,00	30.768.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.658.200,00	41.059.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	221.030.275,00	203.917.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.115.120.571,00	46.019.277.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.524.811.166,00	36.500.591.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.590.309.405,00	9.518.686.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.216.871.500,00	2.543.793.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.165.036.300,00	2.492.193.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.835.200,00	51.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	27.164.370.405,00	24.044.227.994,00	793.394.138,00	747.526.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	25.746.700.374,00	22.685.465.172,00	543.593.160,00	534.121.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	87.552.200,00	86.607.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	25.659.148.174,00	22.598.857.422,00	543.593.160,00	534.121.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	140.320.400,00	140.173.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	140.320.400,00	140.173.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	472.067.200,00	464.829.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	71.000.000,00	70.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	331.067.200,00	325.185.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	70.000.000,00	69.264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	462.638.431,00	414.536.352,00	249.800.978,00	213.405.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	456.338.431,00	408.236.352,00	249.800.978,00	213.405.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	34.400.000,00	34.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.08.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.08.0009	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	213.848.600,00	210.683.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	213.848.600,00	210.683.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	94.395.400,00	94.139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.11.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	94.395.400,00	94.139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	23.757.130.478,00	23.621.914.999,00	15.613.700,00	15.598.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.17.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	23.757.130.478,00	23.621.914.999,00	15.613.700,00	15.598.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.803.048.253,00	15.689.453.742,00	2.561.900,00	2.548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.349.600,00	8.343.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.349.600,00	8.343.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.828.048.892,00	12.816.693.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.775.250.892,00	12.763.895.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	52.798.000,00	52.798.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	364.138.300,00	363.627.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.119.200,00	6.023.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92.265.500,00	92.108.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.218.600,00	15.181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.535.000,00	250.314.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	58.952.669,00	58.918.000,00	2.561.900,00	2.548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.952.669,00	58.918.000,00	611.900,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	1.950.000,00	1.938.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.260.198.792,00	2.165.678.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.000.000,00	3.144.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.251.198.792,00	2.162.534.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	283.360.000,00	276.192.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	223.340.000,00	216.177.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.020.000,00	60.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.553.654.289,00	3.552.595.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.553.654.289,00	3.552.595.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	344.226.132,00	343.497.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	317.664.557,00	317.334.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	2.891.763.600,00	2.891.763.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	4.400.427.936,00	4.379.865.420,00	13.051.800,00	13.050.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.921.293.852,00	2.920.625.065,00	13.051.800,00	13.050.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	66.540.000,00	66.527.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.854.753.852,00	2.854.097.785,00	13.051.800,00	13.050.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.479.134.084,00	1.459.240.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	210.208.400,00	210.008.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	31.328.000,00	31.328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	416.540.184,00	400.569.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	349.971.200,00	349.004.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	413.028.700,00	412.528.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	58.057.600,00	55.801.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	1.039.296.250,00	1.030.450.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.3.30.3.31.18.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	1.039.296.250,00	1.030.450.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	59.830.000,00	59.269.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	59.830.000,00	59.269.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	59.830.000,00	59.269.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	359.863.000,00	358.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	359.863.000,00	358.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	359.863.000,00	358.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	43.030.000,00	43.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	43.030.000,00	43.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	43.030.000,00	43.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	185.652.000,00	184.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	185.652.000,00	184.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	185.652.000,00	184.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	373.421.250,00	368.001.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	373.421.250,00	368.001.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	373.421.250,00	368.001.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	15.249.809.955,00	15.184.345.795,00	131.705.500,00	127.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.19.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	15.249.809.955,00	15.184.345.795,00	131.705.500,00	127.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.699.863.711,00	12.649.653.467,00	130.205.500,00	126.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.175.600,00	33.175.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.175.600,00	33.175.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.069.025.951,00	11.056.903.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.020.995.951,00	11.010.893.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	48.030.000,00	46.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	310.215.900,00	293.081.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.330.300,00	60.330.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	42.848.600,00	42.761.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.812.000,00	14.812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	192.225.000,00	175.177.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	399.500,00	0,00	130.205.500,00	126.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	399.500,00	0,00	130.205.500,00	126.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.027.136.760,00	1.012.291.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.706.000,00	6.670.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.018.430.760,00	1.005.621.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	259.910.000,00	254.201.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	227.340.000,00	221.641.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.570.000,00	32.559.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	142.330.000,00	140.155.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	142.330.000,00	140.155.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	142.330.000,00	140.155.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	39.302.300,00	39.302.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	39.302.300,00	39.302.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	39.302.300,00	39.302.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.853.135.944,00	1.853.135.944,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1.853.135.944,00	1.853.135.944,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1.853.135.944,00	1.853.135.944,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	415.178.000,00	403.608.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	415.178.000,00	403.608.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	405.678.000,00	394.108.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	100.000.000,00	98.490.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	98.490.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100.000.000,00	98.490.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	29.088.878.945,00	28.523.044.827,00	1.910.798.900,00	1.910.091.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.0.00.0.00.20.0000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	29.088.878.945,00	28.523.044.827,00	1.910.798.900,00	1.910.091.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program Tidak Jelas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kegiatan (Jurnal) Tidak Jelas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.662.571.045,00	12.143.561.602,00	10.761.300,00	10.711.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.526.920.520,00	9.466.131.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.526.920.520,00	9.466.131.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.217.953.900,00	1.090.646.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiirnnListrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.272.600,00	30.272.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.459.200,00	60.643.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	33.250.500,00	33.250.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	135.360.000,00	134.902.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	31.497.600,00	31.493.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	926.114.000,00	800.083.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	102.480.000,00	69.300.000,00	10.761.300,00	10.711.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	102.480.000,00	69.300.000,00	10.761.300,00	10.711.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.668.336.625,00	1.370.743.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.341.068.545,00	1.043.687.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.900.000,00	60.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	266.368.080,00	266.155.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.880.000,00	146.740.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	146.880.000,00	146.740.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.146.119.800,00	1.130.733.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	646.119.800,00	630.733.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	70.310.800,00	65.582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	575.809.000,00	565.151.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	14.380.188.100,00	14.348.749.425,00	1.900.037.600,00	1.899.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	108.178.500,00	105.161.700,00	1.840.500.000,00	1.840.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	108.178.500,00	105.161.700,00	1.840.500.000,00	1.840.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	526.088.800,00	525.596.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	526.088.800,00	525.596.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	11.940.250.000,00	11.935.418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.03.0001	Seleksi Atlet Daerah	68.202.100,00	68.051.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	8.846.047.900,00	8.841.366.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.19.03.2.03.0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	3.026.000.000,00	3.026.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	1.805.670.800,00	1.782.573.725,00	59.537.600,00	58.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.05.0002	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	869.560.700,00	854.409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.05.0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	936.110.100,00	928.164.725,00	59.537.600,00	58.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.04.2.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	267.165.500,00	263.967.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.17.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	267.165.500,00	263.967.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	267.165.500,00	263.967.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	267.165.500,00	263.967.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	71.344.000,00	68.997.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	94.218.000,00	93.746.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.02.2.01.0005	Pengembangan Infrastruktur	101.603.500,00	101.224.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	105.655.100,00	105.103.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.17.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	105.655.100,00	105.103.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	105.655.100,00	105.103.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	105.655.100,00	105.103.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	105.655.100,00	105.103.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	11.964.835.431,00	11.663.225.823,00	114.427.200,00	107.389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26.2.22.0.00.22.0000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	11.964.835.431,00	11.663.225.823,00	114.427.200,00	107.389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.457.375.431,00	10.189.577.515,00	114.427.200,00	107.389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.543.550.920,00	8.415.004.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.474.787.920,00	8.359.321.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	68.763.000,00	55.683.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	506.110.400,00	483.591.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95.599.100,00	81.431.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.470.900,00	15.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	382.040.400,00	374.859.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.360.000,00	680.000,00	114.427.200,00	107.389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.360.000,00	680.000,00	114.427.200,00	107.389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	986.630.311,00	881.888.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	292.004.115,00	188.879.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	694.626.196,00	693.009.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	419.723.800,00	408.412.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	192.690.000,00	184.166.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89.500.800,00	88.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	137.533.000,00	136.220.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	877.463.400,00	861.374.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	251.360.000,00	250.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	151.360.000,00	150.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	100.000.000,00	99.565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	626.103.400,00	611.304.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	626.103.400,00	611.304.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	40.795.000,00	40.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	40.795.000,00	40.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	40.795.000,00	40.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	31.642.000,00	31.378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	31.642.000,00	31.378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	31.642.000,00	31.378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	465.139.600,00	448.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	465.139.600,00	448.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	465.139.600,00	448.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	92.420.000,00	91.886.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	92.420.000,00	91.886.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.06.2.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	92.420.000,00	91.886.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	874.881.900,00	861.795.569,00	188.529.200,00	158.745.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.2.23.0.00.21.0000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	874.881.900,00	861.795.569,00	188.529.200,00	158.745.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	636.677.500,00	632.685.419,00	61.809.200,00	61.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	54.869.700,00	54.473.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.832.600,00	39.473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.037.100,00	15.000.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	433.200,00	400.000,00	61.809.200,00	61.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	2.516.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	433.200,00	400.000,00	59.293.200,00	58.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	581.374.600,00	577.812.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.280.000,00	67.286.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	513.094.600,00	510.525.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	238.204.400,00	229.110.150,00	126.720.000,00	97.710.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	238.204.400,00	229.110.150,00	126.720.000,00	97.710.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	190.641.900,00	189.260.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01.0008	Pengembangan Bahan Pustaka	47.562.500,00	39.849.800,00	126.720.000,00	97.710.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	10.417.533.729,00	10.246.922.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.2.23.0.00.21.0000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	10.417.533.729,00	10.246.922.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.037.235.529,00	9.871.879.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.425.200,00	10.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.425.200,00	10.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.097.616.518,00	8.001.667.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.048.065.218,00	7.952.116.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	49.551.300,00	49.551.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	395.454.700,00	391.068.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.24.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.004.200,00	22.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	68.852.500,00	67.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.748.000,00	30.721.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	271.850.000,00	269.527.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.325.009.111,00	1.288.433.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	509.868.095,00	474.857.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	815.141.016,00	813.575.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208.730.000,00	180.284.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	121.030.000,00	109.873.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	87.700.000,00	70.410.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	380.298.200,00	375.043.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	295.528.200,00	290.273.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	274.480.000,00	269.245.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	21.048.200,00	21.027.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	84.770.000,00	84.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	84.770.000,00	84.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.384.060.700,00	3.368.756.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.384.060.700,00	3.368.756.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.3.27.3.25.12.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	3.384.060.700,00	3.368.756.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.322.463.100,00	3.307.548.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	62.306.800,00	62.306.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	62.306.800,00	62.306.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.260.156.300,00	3.245.242.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.239.206.300,00	3.224.762.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.950.000,00	20.479.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	61.597.600,00	61.207.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	61.597.600,00	61.207.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	61.597.600,00	61.207.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	949.364.000,00	928.474.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.22.0000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	949.364.000,00	928.474.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	100.679.900,00	100.457.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	100.679.900,00	100.457.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	100.679.900,00	100.457.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	354.724.700,00	348.998.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	354.724.700,00	348.998.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	97.868.700,00	97.483.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	209.646.000,00	204.647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	47.210.000,00	46.868.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	74.110.000,00	61.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	74.110.000,00	61.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.04.2.02.0003	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	14.110.000,00	12.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.04.2.02.0011	Fasilitasi pemberian insentif	60.000.000,00	48.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	419.849.400,00	417.308.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	419.849.400,00	417.308.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	106.895.200,00	105.992.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	51.009.900,00	50.554.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	211.944.300,00	211.260.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	50.000.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	2.637.940.906,00	2.555.542.890,00	7.647.315.797,00	7.499.758.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.3.27.3.25.12.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	2.637.940.906,00	2.555.542.890,00	7.647.315.797,00	7.499.758.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.012.884.606,00	968.899.306,00	6.468.530.797,00	6.346.159.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	643.501.500,00	642.589.500,00	75.000.000,00	74.355.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	520.000.000,00	519.999.000,00	75.000.000,00	74.355.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	123.501.500,00	122.590.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	369.383.106,00	326.309.806,00	6.393.530.797,00	6.271.804.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	151.496.000,00	138.814.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	217.887.106,00	187.495.206,00	6.393.530.797,00	6.271.804.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	520.638.700,00	499.933.271,00	1.178.785.000,00	1.153.598.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	520.638.700,00	499.933.271,00	1.178.785.000,00	1.153.598.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	520.638.700,00	499.933.271,00	1.178.785.000,00	1.153.598.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	199.438.400,00	190.325.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	92.558.800,00	85.634.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	92.558.800,00	85.634.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	14.491.000,00	14.050.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	14.491.000,00	14.050.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	92.388.600,00	90.639.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	51.618.300,00	51.422.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	40.770.300,00	39.217.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	9.981.900,00	9.614.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	9.981.900,00	9.614.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	9.981.900,00	9.614.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	894.997.300,00	886.770.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	894.997.300,00	886.770.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	9.479.800,00	8.468.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	49.039.800,00	44.589.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	836.477.700,00	833.712.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	201.768.100,00	194.715.075,00	16.657.200,00	16.399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.3.30.3.31.18.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	201.768.100,00	194.715.075,00	16.657.200,00	16.399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	33.840.000,00	33.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	33.840.000,00	33.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	33.840.000,00	33.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	14.310.000,00	14.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	14.310.000,00	14.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	14.310.000,00	14.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	63.667.100,00	63.487.100,00	16.657.200,00	16.399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	63.667.100,00	63.487.100,00	16.657.200,00	16.399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	33.377.100,00	33.377.100,00	16.657.200,00	16.399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	30.290.000,00	30.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	89.951.000,00	83.257.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	89.951.000,00	83.257.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	89.951.000,00	83.257.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	17.677.671.471,00	17.160.516.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.3.30.3.31.18.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	17.677.671.471,00	17.160.516.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.422.660.971,00	16.906.370.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.276.560.339,00	14.038.756.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.238.640.339,00	14.000.836.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.31.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	37.920.000,00	37.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	990.747.800,00	862.023.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.618.000,00	36.618.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	101.395.500,00	101.338.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	77.185.000,00	67.461.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.215.000,00	44.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	104.656.300,00	101.259.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	26.000.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	598.678.000,00	497.446.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.282.656.832,00	1.186.257.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	361.535.120,00	288.959.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	921.121.712,00	897.298.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	872.696.000,00	819.333.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	455.440.000,00	404.630.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	97.290.000,00	97.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	319.966.000,00	317.413.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	255.010.500,00	254.145.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	255.010.500,00	254.145.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	138.080.000,00	137.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	116.930.500,00	116.545.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	116.200.055.844,00	112.591.843.135,00	3.353.750.500,00	3.253.902.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.2.13.2.10.23.0000	SEKRETARIAT DAERAH	116.200.055.844,00	112.591.843.135,00	3.353.750.500,00	3.253.902.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	75.247.320.684,00	73.021.398.237,00	3.353.750.500,00	3.253.902.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.579.300,00	62.077.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.728.800,00	31.515.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.850.500,00	30.561.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	47.694.972.351,00	47.074.679.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	47.535.153.351,00	46.923.020.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	159.819.000,00	151.659.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	379.646.000,00	378.309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	379.646.000,00	378.309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.725.145.400,00	3.407.110.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	244.629.700,00	244.590.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	658.843.200,00	646.418.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.221.250.500,00	1.216.125.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	250.000.000,00	246.417.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.350.422.000,00	1.053.558.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	98.409.000,00	97.370.000,00	3.353.750.500,00	3.253.902.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	89.495.000,00	89.270.000,00	564.959.100,00	545.720.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.914.000,00	8.100.000,00	2.788.791.400,00	2.708.181.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.241.652.764,00	7.023.140.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	89.298.000,00	88.798.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.408.107.500,00	2.282.677.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	724.232.000,00	721.292.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.020.015.264,00	3.930.372.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.494.569.210,00	6.871.449.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	918.713.300,00	692.347.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.728.180.300,00	1.416.060.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	127.400.000,00	126.639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.051.991.200,00	1.041.473.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.244.444.410,00	3.172.391.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	423.840.000,00	422.536.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.539.792.609,00	2.376.027.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	181.755.551,00	64.134.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	349.380.800,00	343.245.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.968.656.258,00	1.968.648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	4.024.615.900,00	3.809.017.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.550.543.000,00	1.342.253.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	743.646.000,00	742.365.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.730.426.900,00	1.724.398.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	607.028.000,00	604.264.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	231.180.200,00	230.202.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	94.768.400,00	94.149.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	281.079.400,00	279.912.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.371.910.150,00	1.317.952.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	578.016.000,00	554.161.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	621.676.500,00	601.070.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	172.217.650,00	162.719.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	39.563.305.610,00	38.232.118.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	1.407.848.400,00	1.382.350.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	171.935.300,00	171.405.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	305.960.000,00	298.760.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	929.953.100,00	912.184.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	34.945.591.310,00	33.693.756.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10.374.870.400,00	10.225.494.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	24.205.976.610,00	23.124.419.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	364.744.300,00	343.842.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	2.779.471.200,00	2.753.518.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	926.249.500,00	917.517.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	1.443.338.300,00	1.434.618.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dannnPengelolaan Informasi Hukum	409.883.400,00	401.381.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	430.394.700,00	402.492.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	265.524.800,00	249.114.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	155.696.400,00	144.204.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	9.173.500,00	9.173.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.389.429.550,00	1.338.326.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	384.649.400,00	362.953.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	209.645.000,00	207.989.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	99.176.400,00	79.148.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	75.828.000,00	75.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	204.190.900,00	197.194.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	51.923.500,00	51.112.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	152.267.400,00	146.081.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	800.589.250,00	778.179.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	602.760.250,00	589.771.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	160.000.000,00	158.090.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	37.829.000,00	30.317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	SEKRETARIAT DPRD	149.956.219.638,00	137.228.238.639,00	1.518.304.200,00	1.505.614.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.0.00.0.00.24.0000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	149.956.219.638,00	137.228.238.639,00	1.518.304.200,00	1.505.614.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	86.953.327.138,00	84.519.423.207,00	1.518.304.200,00	1.505.614.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	116.674.900,00	113.712.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	92.611.400,00	90.330.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.455.500,00	12.773.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.608.000,00	10.608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.166.106.590,00	12.082.141.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.789.612.790,00	11.707.276.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danrnnPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72.636.800,00	72.406.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	109.138.000,00	108.648.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.402.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	21.648.000,00	21.588.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	158.661.000,00	158.348.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.008.000,00	4.722.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	615.947.500,00	578.318.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	6.129.000,00	6.129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	609.818.500,00	572.189.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.056.652.100,00	2.918.489.152,00	29.460.000,00	29.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	215.231.500,00	214.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	755.184.000,00	746.349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	179.473.100,00	176.892.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	309.965.400,00	309.228.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	486.922.100,00	463.897.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	295.000.000,00	274.120.000,00	29.460.000,00	29.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	600.710.000,00	593.681.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	64.166.000,00	42.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	150.000.000,00	97.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	130.923.100,00	126.503.650,00	1.488.844.200,00	1.476.334.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	40.817.000,00	39.815.000,00	430.583.000,00	424.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.106.100,00	86.688.650,00	1.058.261.200,00	1.051.339.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.290.616.008,00	9.631.945.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.715.000,00	7.714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.004.800.000,00	2.407.963.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	174.340.000,00	171.295.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.103.761.008,00	7.044.973.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.146.215.820,00	5.848.556.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.828.679.000,00	1.565.247.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	891.027.400,00	881.353.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.660.974.420,00	1.648.828.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.765.535.000,00	1.753.127.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	49.823.469.320,00	48.638.832.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	48.528.469.320,00	47.501.817.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.120.000.000,00	1.027.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	175.000.000,00	109.514.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	4.606.721.800,00	4.580.923.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	1.260.160.000,00	1.256.344.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	2.987.164.000,00	2.976.368.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	359.397.800,00	348.211.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	63.002.892.500,00	52.708.815.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	9.509.181.000,00	7.789.883.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan ProgramrnnPembentukan Peraturan Daerah	296.706.100,00	248.234.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	7.849.180.300,00	6.249.069.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/KeteranganrnnNaskah Akademik	1.363.294.600,00	1.292.579.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	546.418.500,00	474.900.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	456.753.500,00	408.165.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	66.937.000,00	44.025.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	22.728.000,00	22.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	7.905.840.800,00	5.213.918.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	549.730.000,00	503.605.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	6.858.366.800,00	4.240.251.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan KeterangannnPertanggungjawaban Kepala Daerah	497.744.000,00	470.061.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	7.473.309.500,00	6.752.620.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	633.213.000,00	550.991.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	1.927.234.000,00	1.579.718.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	27.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	558.558.000,00	492.935.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	540.190.000,00	334.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	50.000.000,00	49.966.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	3.737.114.500,00	3.734.434.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.119.948.000,00	2.020.338.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	177.448.000,00	124.981.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	1.942.500.000,00	1.895.357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	2.044.016.300,00	1.218.650.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	250.832.100,00	121.311.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	1.793.184.200,00	1.097.338.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	33.404.178.400,00	29.238.503.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	29.077.115.300,00	25.731.603.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	75.190.000,00	72.051.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4.251.873.100,00	3.434.849.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	21.307.587.535,00	21.042.974.848,00	74.241.200,00	73.808.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	PERENCANAAN	21.307.587.535,00	21.042.974.848,00	74.241.200,00	73.808.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.05.0.00.25.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	21.307.587.535,00	21.042.974.848,00	74.241.200,00	73.808.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.681.743.835,00	17.557.077.498,00	74.241.200,00	73.808.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.052.300,00	22.926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.740.500,00	15.337.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.432.400,00	3.713.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.879.400,00	3.875.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.698.249.192,00	14.691.709.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.616.554.492,00	14.610.834.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.901.900,00	5.082.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	75.792.800,00	75.792.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.126.673.635,00	1.109.755.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.993.000,00	12.827.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.769.100,00	67.768.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.909.000,00	21.848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.499.535,00	21.032.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	993.503.000,00	986.280.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.181.200,00	680.000,00	74.241.200,00	73.808.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.181.200,00	680.000,00	74.241.200,00	73.808.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.133.211.908,00	1.117.719.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	154.072.860,00	148.730.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	979.139.048,00	968.988.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	691.375.600,00	614.286.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	290.040.000,00	242.019.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	116.199.200,00	88.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	285.136.400,00	284.139.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.768.902.900,00	2.651.179.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.458.996.900,00	2.382.609.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	102.820.800,00	100.856.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	219.998.000,00	215.524.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	699.355.800,00	689.409.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.436.822.300,00	1.376.818.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	185.460.000,00	146.808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	75.988.000,00	55.846.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	109.472.000,00	90.962.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	124.446.000,00	121.762.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	124.446.000,00	121.762.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	856.940.800,00	834.717.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	574.480.000,00	566.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	574.480.000,00	566.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	282.460.800,00	268.187.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	41.834.000,00	40.484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	225.965.000,00	224.807.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	14.661.800,00	2.896.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	KEUANGAN	77.255.666.865,00	73.802.106.620,00	4.013.104.000,00	3.995.490.294,00	6.359.952.269,00	2.187.943.885,00	1.660.750.000,00	1.660.750.000,00
5.02.0.00.0.00.26.0000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	30.298.741.029,00	27.915.157.108,00	3.193.800.000,00	3.184.165.294,00	6.359.952.269,00	2.187.943.885,00	1.660.750.000,00	1.660.750.000,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.681.083.881,00	16.844.185.074,00	1.495.330.000,00	1.494.553.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.140.800,00	55.062.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	56.140.800,00	55.062.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.579.818.148,00	12.991.194.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.545.486.148,00	12.957.202.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	34.332.000,00	33.991.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.619.505.325,00	2.436.034.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.587.400,00	24.451.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	447.391.100,00	425.181.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	282.649.225,00	277.738.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	132.450.000,00	131.013.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	91.935.000,00	91.255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	303.272.800,00	284.195.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.332.219.800,00	1.202.198.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.480.000,00	4.480.000,00	1.495.330.000,00	1.494.553.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.590.000,00	2.590.000,00	1.013.333.000,00	1.013.333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.890.000,00	1.890.000,00	481.997.000,00	481.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	754.640.608,00	734.718.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160.396.000,00	157.830.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	594.244.608,00	576.887.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	666.499.000,00	622.694.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	269.690.000,00	234.006.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	362.400.000,00	354.644.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34.409.000,00	34.043.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	8.562.049.448,00	7.489.537.191,00	0,00	0,00	6.359.952.269,00	2.187.943.885,00	1.660.750.000,00	1.660.750.000,00
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	688.030.600,00	624.188.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	156.353.500,00	149.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	4.543.500,00	3.832.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	56.620.000,00	49.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	48.600.000,00	44.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	153.917.300,00	122.320.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	166.628.300,00	153.089.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	101.368.000,00	100.702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	441.610.000,00	405.490.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	205.800.000,00	198.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	211.270.000,00	189.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	24.540.000,00	17.755.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	7.432.408.848,00	6.459.858.571,00	0,00	0,00	6.359.952.269,00	2.187.943.885,00	1.660.750.000,00	1.660.750.000,00
5.02.02.2.04.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	350.400.000,00	350.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	7.082.008.848,00	6.109.458.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.750.000,00	1.660.750.000,00
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0,00	0,00	0,00	0,00	6.359.952.269,00	2.187.943.885,00	0,00	0,00
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	4.055.607.700,00	3.581.434.843,00	1.698.470.000,00	1.689.612.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.055.607.700,00	3.581.434.843,00	1.698.470.000,00	1.689.612.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	622.000.000,00	617.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	697.007.500,00	671.378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	2.199.301.200,00	1.839.516.149,00	1.698.470.000,00	1.689.612.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	215.000.000,00	143.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	197.400.000,00	188.775.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	124.899.000,00	120.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.27.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	46.956.925.836,00	45.886.949.512,00	819.304.000,00	811.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	42.372.303.136,00	41.358.131.561,00	816.804.000,00	808.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.201.300,00	13.180.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.003.200,00	5.061.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.516.500,00	7.452.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	681.600,00	666.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36.509.864.611,00	35.665.279.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36.480.080.611,00	35.635.534.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	681.600,00	666.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	29.102.400,00	29.079.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.071.784.800,00	1.993.042.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiirnnListrik/Penerangan Bangunan Kantor	38.373.500,00	38.373.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	181.817.300,00	181.591.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	87.752.800,00	85.128.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.404.500,00	19.660.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	312.402.200,00	311.996.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.431.034.500,00	1.356.291.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	176.369.500,00	174.751.200,00	816.804.000,00	808.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	2.641.700,00	2.641.700,00	181.989.600,00	180.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	173.727.800,00	172.109.500,00	634.814.400,00	627.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.237.822.525,00	2.170.289.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.425.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	874.576.885,00	811.554.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.355.820.640,00	1.352.135.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.362.260.400,00	1.341.587.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	410.180.000,00	409.959.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	451.151.100,00	434.873.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	392.312.000,00	388.377.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	98.167.300,00	97.927.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.584.622.700,00	4.528.817.951,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.584.622.700,00	4.528.817.951,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	184.737.500,00	184.317.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1.041.340.600,00	1.029.845.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1.279.098.300,00	1.250.828.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	5.198.400,00	5.198.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	877.037.600,00	869.252.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	316.732.600,00	316.112.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	89.449.900,00	88.658.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	161.266.400,00	160.396.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	510.575.500,00	505.022.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	104.216.200,00	104.216.200,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	14.969.700,00	14.969.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	KEPEGAWAIAN	21.083.320.733,00	19.601.276.271,00	379.162.900,00	375.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.04.0.00.28.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	21.083.320.733,00	19.601.276.271,00	379.162.900,00	375.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.299.012.883,00	18.660.800.321,00	379.162.900,00	375.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	87.964.000,00	85.169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.264.000,00	82.469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.851.227.715,00	15.654.412.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.798.607.715,00	15.601.792.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	52.620.000,00	52.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.948.792.664,00	1.559.491.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	160.457.600,00	158.916.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.461.700,00	69.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	92.764.500,00	91.409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.619.108.864,00	1.239.961.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	379.162.900,00	375.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	39.827.100,00	39.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	339.335.800,00	336.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	684.971.504,00	664.005.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	263.053.720,00	250.276.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	421.917.784,00	413.729.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	726.057.000,00	697.721.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	184.230.000,00	161.623.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.150.000,00	38.148.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	503.677.000,00	497.949.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.784.307.850,00	940.475.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	908.567.800,00	447.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	465.032.400,00	21.505.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi dan Pemberhentian	30.998.100,00	27.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	103.277.300,00	102.626.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	286.170.000,00	284.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	23.090.000,00	10.468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	222.277.900,00	113.962.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	115.500.000,00	24.481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	106.777.900,00	89.481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	583.997.000,00	320.750.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	129.817.000,00	104.083.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	454.180.000,00	216.666.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	69.465.150,00	58.643.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	54.323.050,00	51.886.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	8.702.100,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	6.440.000,00	6.081.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.227.220.518,00	2.051.784.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.5.04.0.00.28.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.227.220.518,00	2.051.784.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.227.220.518,00	2.051.784.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	991.970.730,00	927.340.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	976.070.730,00	911.440.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.235.249.788,00	1.124.444.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.2.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.218.449.788,00	1.107.644.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.527.510.070,00	1.494.615.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.05.0.00.25.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	1.527.510.070,00	1.494.615.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.527.510.070,00	1.494.615.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	402.511.100,00	400.335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	402.511.100,00	400.335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	321.688.200,00	312.319.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	100.679.900,00	98.880.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	221.008.300,00	213.438.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	354.071.070,00	340.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	354.071.070,00	340.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	449.239.700,00	441.661.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	425.059.800,00	418.081.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	24.179.900,00	23.579.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	25.720.602.853,00	24.872.328.060,00	964.328.500,00	916.932.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	25.720.602.853,00	24.872.328.060,00	964.328.500,00	916.932.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.0.00.0.00.29.0000	INSPEKTORAT	25.720.602.853,00	24.872.328.060,00	964.328.500,00	916.932.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.053.178.653,00	24.300.812.560,00	964.328.500,00	916.932.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.562.200,00	131.707.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.547.800,00	4.694.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	144.014.400,00	127.013.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.303.160.464,00	21.292.744.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.259.880.464,00	21.249.784.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	43.280.000,00	42.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	741.740.000,00	539.983.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	741.740.000,00	539.983.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	988.570.310,00	711.062.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95.295.600,00	77.878.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.748.710,00	46.081.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.535.000,00	32.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	692.401.000,00	454.747.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	101.590.000,00	100.329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.797.800,00	5.259.800,00	964.328.500,00	916.932.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	0,00	660.000.000,00	616.154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	5.670.000,00	1.890.000,00	82.769.600,00	81.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.127.800,00	3.369.800,00	221.558.900,00	219.458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	624.101.279,00	519.774.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	190.647.695,00	121.903.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	433.453.584,00	397.870.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.228.246.600,00	1.100.280.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	268.190.000,00	199.941.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.620.000,00	39.653.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	892.436.600,00	860.685.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	245.707.200,00	233.642.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	224.549.200,00	213.822.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	20.092.400,00	15.779.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	16.990.000,00	16.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	68.888.800,00	63.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	118.578.000,00	117.383.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	21.158.000,00	19.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian KerugianmnNegara/Daerah	21.158.000,00	19.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	421.717.000,00	337.873.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	421.717.000,00	337.873.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	308.118.000,00	231.142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	65.235.000,00	60.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	48.364.000,00	46.586.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN	159.587.598.541,00	156.791.606.508,00	16.748.876.649,00	15.412.612.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	KECAMATAN	159.587.598.541,00	156.791.606.508,00	16.748.876.649,00	15.412.612.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.2.13.0.00.31.0000	KECAMATAN BOGOR UTARA	25.563.656.015,00	25.393.984.972,00	2.727.751.400,00	2.494.548.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.514.914.615,00	20.389.195.158,00	1.632.873.500,00	1.409.672.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.312.200,00	10.312.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.235.900,00	7.235.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.076.300,00	3.076.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.836.360.399,00	16.775.149.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.782.985.299,00	16.721.773.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.557.300,00	4.557.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	48.817.800,00	48.817.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	749.448.900,00	723.469.252,00	791.441.500,00	618.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.346.000,00	7.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	169.859.100,00	163.697.150,00	791.441.500,00	618.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.007.800,00	10.664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	359.235.000,00	357.224.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.733.000,00	20.454.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.700.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170.568.000,00	159.738.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.101.459.116,00	2.079.351.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	276.960.300,00	264.213.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.824.498.816,00	1.815.138.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	817.334.000,00	800.913.100,00	841.432.000,00	790.797.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	161.400.000,00	147.986.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.820.000,00	60.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	595.114.000,00	592.226.649,00	841.432.000,00	790.797.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	222.101.200,00	217.223.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatannnPemerintahan di Tingkat Kecamatan	172.244.400,00	167.396.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	172.244.400,00	167.396.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	49.856.800,00	49.826.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	47.857.000,00	47.827.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.999.800,00	1.999.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.748.621.800,00	4.717.172.214,00	1.094.877.900,00	1.084.875.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.374.322.700,00	4.345.059.314,00	1.094.877.900,00	1.084.875.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	83.308.100,00	80.278.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	937.407.600,00	930.178.914,00	1.094.877.900,00	1.084.875.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.353.607.000,00	3.334.602.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	374.299.100,00	372.112.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	274.299.700,00	272.435.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	49.999.800,00	49.799.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	39.999.900,00	39.999.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	9.999.700,00	9.878.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	78.018.400,00	70.393.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	78.018.400,00	70.393.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	78.018.400,00	70.393.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.2.13.0.00.32.0000	KECAMATAN BOGOR SELATAN	8.146.660.770,00	8.017.493.244,00	712.875.900,00	685.563.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	305.150.900,00	301.731.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatannnPemerintahan di Tingkat Kecamatan	219.060.900,00	217.388.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	219.060.900,00	217.388.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	86.090.000,00	84.343.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	86.090.000,00	84.343.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.721.510.870,00	7.598.198.494,00	712.875.900,00	685.563.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.347.888.070,00	7.253.179.094,00	712.875.900,00	685.563.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	160.000.000,00	159.408.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.704.372.070,00	2.615.579.244,00	712.875.900,00	685.563.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.483.516.000,00	4.478.191.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	373.622.800,00	345.019.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	217.710.000,00	192.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	60.107.000,00	60.107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	75.805.800,00	72.202.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	119.999.000,00	117.563.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	119.999.000,00	117.563.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	119.999.000,00	117.563.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.2.13.0.00.33.0000	KECAMATAN BOGOR TIMUR	21.675.561.740,00	20.879.347.291,00	1.064.952.570,00	1.056.952.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.749.304.976,00	16.977.969.431,00	716.235.700,00	711.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.822.200,00	46.622.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	43.972.200,00	43.772.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.616.501.396,00	13.079.046.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.564.143.696,00	13.026.689.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.801.000,00	2.801.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	49.556.700,00	49.556.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.428.788.200,00	1.369.066.750,00	716.235.700,00	711.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.588.500,00	11.588.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	221.697.600,00	216.471.300,00	716.235.700,00	711.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.345.400,00	18.345.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	455.115.400,00	455.114.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.877.300,00	40.843.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	673.964.000,00	619.503.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.807.744.680,00	1.661.390.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	231.480.000,00	217.771.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.576.264.680,00	1.443.619.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	849.448.500,00	821.842.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	258.484.500,00	242.025.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.450.000,00	50.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	539.514.000,00	528.992.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	165.623.600,00	165.623.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatannnnPemerintahan di Tingkat Kecamatan	43.150.000,00	43.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	43.150.000,00	43.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	122.473.600,00	122.473.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22.473.600,00	22.473.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.686.633.364,00	3.664.962.410,00	348.716.870,00	345.302.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.447.560.664,00	3.427.099.710,00	348.716.870,00	345.302.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	53.388.300,00	53.388.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.510.172.364,00	1.495.461.410,00	348.716.870,00	345.302.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.884.000.000,00	1.878.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	239.072.700,00	237.862.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	77.914.800,00	77.914.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	80.685.000,00	79.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	60.804.700,00	60.804.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	19.668.200,00	19.668.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	73.999.800,00	70.791.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	73.999.800,00	70.791.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	73.999.800,00	70.791.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.2.13.0.00.34.0000	KECAMATAN BOGOR BARAT	41.888.034.474,00	41.130.803.484,00	2.757.104.640,00	2.698.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	35.104.327.604,00	34.444.580.712,00	829.517.100,00	778.922.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.999.800,00	9.999.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.999.800,00	6.999.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.970.627.642,00	28.510.116.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.928.239.742,00	28.467.728.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.161.300,00	1.161.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	41.226.600,00	41.226.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.608.501.900,00	2.560.823.200,00	829.517.100,00	778.922.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	65.783.100,00	65.487.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	362.726.000,00	357.275.700,00	829.517.100,00	778.922.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	124.032.500,00	122.666.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.418.705.000,00	1.381.935.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	73.253.300,00	71.648.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.000.000,00	23.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	540.002.000,00	538.029.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.811.522.262,00	2.668.868.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	313.130.550,00	298.938.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.498.391.712,00	2.369.929.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	619.676.000,00	610.772.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	158.400.000,00	153.867.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.900.000,00	59.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	400.376.000,00	397.285.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	108.540.000,00	108.341.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatannnPemerintahan di Tingkat Kecamatan	38.540.000,00	38.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	38.540.000,00	38.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	70.000.000,00	69.801.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	70.000.000,00	69.801.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6.572.462.970,00	6.479.177.587,00	1.927.587.540,00	1.919.197.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	6.029.527.370,00	5.936.364.987,00	1.927.587.540,00	1.919.197.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	101.832.400,00	97.621.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	725.375.970,00	719.679.387,00	1.927.587.540,00	1.919.197.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.202.319.000,00	5.119.063.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	542.935.600,00	542.812.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	454.699.700,00	454.576.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	58.123.200,00	58.123.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	23.112.700,00	23.112.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	102.703.900,00	98.703.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	102.703.900,00	98.703.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	102.703.900,00	98.703.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.2.13.0.00.35.0000	KECAMATAN BOGOR TENGAH	30.664.531.997,00	30.401.258.609,00	3.391.944.700,00	2.846.644.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.825.670.537,00	25.576.079.803,00	3.389.074.700,00	2.843.836.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.880.500,00	19.880.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.413.000,00	4.412.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.467.500,00	15.467.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.493.987.244,00	21.293.940.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.420.995.744,00	21.220.949.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.278.500,00	5.278.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	67.713.000,00	67.712.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.458.628.700,00	1.454.148.700,00	665.483.400,00	656.233.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.070.500,00	25.069.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	322.764.100,00	322.593.700,00	665.483.400,00	656.233.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.492.400,00	22.488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	250.069.500,00	250.069.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.010.200,00	9.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.100.000,00	9.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	820.122.000,00	815.858.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	147.434.300,00	147.324.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	147.434.300,00	147.324.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.312.345.293,00	2.281.807.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	231.998.725,00	225.615.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.080.346.568,00	2.056.191.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	540.828.800,00	526.303.244,00	2.576.157.000,00	2.040.278.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	188.750.000,00	175.179.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.040.000,00	45.855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	306.038.800,00	305.268.414,00	2.576.157.000,00	2.040.278.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	154.800.000,00	154.442.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	96.820.000,00	96.791.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	96.820.000,00	96.791.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	57.980.000,00	57.650.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	57.980.000,00	57.650.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.623.561.460,00	4.610.237.106,00	2.870.000,00	2.808.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.266.395.260,00	4.254.662.906,00	2.870.000,00	2.808.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	53.378.700,00	53.378.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.707.658.260,00	1.699.925.906,00	2.870.000,00	2.808.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.505.358.300,00	2.501.358.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	357.166.200,00	355.574.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	39.065.400,00	37.473.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	309.070.800,00	309.070.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	9.030.000,00	9.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	60.500.000,00	60.499.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	60.500.000,00	60.499.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	60.500.000,00	60.499.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.2.13.0.00.36.0000	KECAMATAN TANAH SAREAL	31.649.153.545,00	30.968.718.908,00	6.094.247.439,00	5.630.783.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.699.333.701,00	25.091.230.812,00	4.431.646.479,00	3.986.315.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.555.281.229,00	21.208.631.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.435.726.229,00	21.089.076.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	119.555.000,00	119.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.170.605.058,00	1.100.401.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28.931.817,00	27.322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	151.626.888,00	149.904.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	97.895.892,00	96.480.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	263.816.748,00	249.772.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	74.434.713,00	68.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	553.899.000,00	508.921.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.200.000,00	27.200.000,00	4.431.646.479,00	3.986.315.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	338.707.017,00	335.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	871.848.462,00	870.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.200.000,00	27.200.000,00	3.221.091.000,00	2.780.590.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.822.793.856,00	1.722.710.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	254.600.000,00	230.906.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.568.193.856,00	1.491.803.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.123.453.558,00	1.032.287.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	190.500.000,00	175.109.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	197.887.268,00	138.034.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	735.066.290,00	719.143.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	278.432.100,00	263.887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatannnnnPemerintahan di Tingkat Kecamatan	206.507.100,00	192.862.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	206.507.100,00	192.862.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	71.925.000,00	71.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	71.925.000,00	71.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.570.801.244,00	5.513.599.596,00	1.662.600.960,00	1.644.467.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5.107.694.045,00	5.072.107.308,00	1.662.600.960,00	1.644.467.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	103.458.600,00	101.733.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.137.016.445,00	1.107.395.007,00	1.662.600.960,00	1.644.467.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.867.219.000,00	3.862.978.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	463.107.199,00	441.492.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	244.720.000,00	244.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	200.337.199,00	179.537.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12.050.000,00	11.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100.586.500,00	100.001.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100.586.500,00	100.001.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100.586.500,00	100.001.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	82.304.225.918,00	80.156.467.427,00	1.229.425.700,00	1.219.657.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	82.304.225.918,00	80.156.467.427,00	1.229.425.700,00	1.219.657.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.0.00.0.00.30.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	82.304.225.918,00	80.156.467.427,00	1.229.425.700,00	1.219.657.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.342.744.483,00	7.870.966.510,00	1.229.425.700,00	1.219.657.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.458.000,00	14.244.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.458.000,00	14.244.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.645.536.617,00	5.286.502.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.645.536.617,00	5.286.502.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.095.096.000,00	2.039.547.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	236.100.800,00	236.019.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	331.779.200,00	331.049.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000,00	11.980.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	224.475.000,00	224.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.290.741.000,00	1.236.036.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.760.000,00	4.080.000,00	1.229.425.700,00	1.219.657.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.040.000,00	1.360.000,00	599.000.000,00	590.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	680.000,00	680.000,00	127.986.800,00	127.983.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.040.000,00	2.040.000,00	502.438.900,00	501.574.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	295.793.866,00	276.270.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	295.793.866,00	276.270.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	286.100.000,00	250.321.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	242.850.000,00	208.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.250.000,00	42.271.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.104.985.650,00	1.096.107.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.104.985.650,00	1.096.107.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.104.985.650,00	1.096.107.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	43.358.736.200,00	43.219.714.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	43.358.736.200,00	43.219.714.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	43.358.736.200,00	43.219.714.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	827.772.100,00	784.056.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	827.772.100,00	784.056.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	827.772.100,00	784.056.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	235.541.900,00	219.734.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	235.541.900,00	219.734.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	235.541.900,00	219.734.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	28.434.445.585,00	26.965.887.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	28.434.445.585,00	26.965.887.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	28.434.445.585,00	26.965.887.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		2.846.195.789.921,00	2.774.250.053.629,00	426.595.630.347,00	400.367.986.619,00	6.359.952.269,00	2.187.943.885,00	1.660.750.000,00	1.660.750.000,00

WALI KOTA BOGOR,





PEMERINTAH KOTA BOGOR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PER 31 DESEMBER 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	REF	Anggaran 2024	Realisasi 2024 (Audited)	Realisasi 2023 (Audited)
PENDAPATAN	5.1.1			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1	1.461.100.063.862,00	1.458.619.452.757,24	1.338.618.268.168,80
Pajak Daerah	5.1.1.1.1	984.800.000.000,00	973.768.860.850,00	897.753.380.910,00
Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	417.231.785.419,00	417.445.452.990,24	31.081.390.548,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	34.537.163.762,00	34.287.163.763,00	33.960.776.435,00
Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4	24.531.114.681,00	33.117.975.154,00	375.822.720.275,80
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	1.731.609.984.212,00	1.711.878.175.798,00	1.628.857.302.371,00
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.1.1.2.1	1.352.594.849.566,00	1.341.380.091.442,00	1.243.743.075.523,00
Dana Bagi Hasil	5.1.1.2.1.1	103.238.232.000,00	114.423.344.000,00	102.205.851.687,00
Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.3	858.600.617.000,00	853.803.503.264,00	792.504.632.043,00
Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.1.1.2.1.4	46.140.365.566,00	44.829.645.150,00	55.796.999.805,00
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.1.1.2.1.4	344.615.635.000,00	328.323.599.028,00	293.235.591.988,00
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.1.1.2.2	28.047.664.000,00	28.047.664.000,00	5.912.254.000,00
Dana Insentif Daerah	5.1.1.2.2.1	28.047.664.000,00	28.047.664.000,00	5.912.254.000,00
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	5.1.1.2.3	350.967.470.646,00	342.450.420.356,00	379.201.972.848,00
Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.3.1	311.531.583.096,00	303.076.793.631,00	301.185.316.222,00
Bantuan Keuangan	5.1.1.2.3.2	39.435.887.550,00	39.373.626.725,00	78.016.656.626,00
JUMLAH PENDAPATAN		3.192.710.048.074,00	3.170.497.628.555,24	2.967.475.570.539,80
BELANJA	5.1.2			
BELANJA OPERASI	5.1.2.1	2.846.195.789.921,00	2.774.250.053.629,00	2.508.123.306.971,00
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	1.270.881.665.338,00	1.242.957.964.907,00	1.063.654.426.888,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	1.342.955.429.587,00	1.304.164.987.240,00	1.236.457.277.949,00
Belanja Bunga	5.1.2.1.3	7.500.000.000,00	7.027.746.595,00	6.191.682.700,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.4	180.077.750.496,00	176.519.335.387,00	147.381.004.434,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	44.780.944.500,00	43.580.019.500,00	54.438.915.000,00
BELANJA MODAL	5.1.2.2	426.595.630.347,00	400.367.986.619,00	518.164.968.738,00
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	5.425.147.300,00	2.477.717.100,00	1.287.152.960,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	144.788.452.254,00	133.226.642.367,00	97.928.993.032,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	150.827.313.763,00	141.166.601.172,00	178.951.840.395,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	114.562.031.641,00	112.729.496.656,00	238.985.747.391,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	10.917.685.389,00	10.693.173.754,00	911.157.960,00
Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	75.000.000,00	74.355.570,00	100.077.000,00
BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3	6.359.952.269,00	2.187.943.885,00	1.066.654.400,00
Belanja Tak Terduga	5.1.2.3	6.359.952.269,00	2.187.943.885,00	1.066.654.400,00
JUMLAH BELANJA		3.279.151.372.537,00	3.176.805.984.133,00	3.027.354.930.109,00
BELANJA TRANSFER	5.1.3			
BELANJA BANTUAN KEUANGAN	5.1.3	1.660.750.000,00	1.660.750.000,00	1.660.750.000,00
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	5.1.3	1.660.750.000,00	1.660.750.000,00	1.660.750.000,00
JUMLAH BELANJA TRANSFER		1.660.750.000,00	1.660.750.000,00	1.660.750.000,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		3.280.812.122.537,00	3.178.466.734.133,00	3.029.015.680.109,00
SURPLUS/ (DEFISIT)		(88.102.074.463,00)	(7.969.105.577,76)	(61.540.109.569,20)
PEMBIAYAAN	5.1.4			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1	98.396.220.459,00	225.089.463.440,14	192.611.572.644,34
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	5.1.4.1	54.250.445.599,00	54.255.954.664,14	161.360.978.068,34
Pencairan Dana Cadangan	5.1.4.1	38.648.742.600,00	38.648.742.600,00	25.765.828.400,00
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	5.1.4.1	0,00	126.700.000.000,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.4.1	5.497.032.260,00	5.484.766.176,00	5.484.766.176,00



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRf - BSSN Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>

Uraian	REF	Anggaran 2024	Realisasi 2024 (Audited)	Realisasi 2023 (Audited)
PENGELUARAN DAERAH	5.1.4.2	10.294.145.996,00	132.184.766.176,00	76.821.017.476,00
Pembentukan Dana Cadangan	5.1.4.2	0,00	0,00	71.336.251.300,00
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat	5.1.4.2	5.497.032.260,00	5.484.766.176,00	5.484.766.176,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	5.1.4.2	0,00	126.700.000.000,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.1.4.2	4.797.113.736,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		88.102.074.463,00	92.904.697.264,14	115.790.555.168,34
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.5	0,00	84.935.591.686,38	54.250.445.599,14



Ditandatangani secara elektronik oleh:

WALI KOTA BOGOR,

DEDIE ABDU RACHIM





PEMERINTAH KOTA BOGOR
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	REF	31 DESEMBER 2024 AUDITED	31 DESEMBER 2023 AUDITED
1	SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	5.2.1	54.250.445.599,14	161.358.478.068,34
2	PENGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN JUMLAH SUB TOTAL (1+2)	5.2.2	(54.255.954.664,14) (5.509.065,00)	(161.360.978.068,34) (2.500.000,00)
3	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA) JUMLAH SUB TOTAL (1+2+3)	5.2.3	84.935.591.686,38 84.935.591.686,38	54.250.445.599,14 54.247.945.599,14
4	KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	5.2.4	5.509.065,00	2.500.000,00
5	LAIN-LAIN		0,00	0,00
	SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (1+2+3+4+5)	5.2.5	84.935.591.686,38	54.250.445.599,14

WALI KOTA BOGOR,

	Ditandatangani secara elektronik oleh: WALI KOTA BOGOR, DEDIE ABDU RACHIM





PEMERINTAH KOTA BOGOR
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	REF	2024 (Audited)	2023 (Audited)
ASET	5.3.1		
ASET LANCAR	5.3.1.1		
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	79.503.327.898,00	33.520.359.707,00
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.2	-	922.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3	-	1.810.000,00
Kas di BLUD	5.3.1.1.1.4	2.153.130.596,38	17.674.780.233,14
Kas Dana BOS	5.3.1.1.1.5	947.597.794,00	1.649.723.756,00
Kas Lainnya	5.3.1.1.1.6	1.012.808.839,00	1.108.045.406,00
Setara Kas		-	-
Piutang Pajak	5.3.1.1.2.1	617.775.532.829,00	520.712.992.274,00
Piutang Retribusi	5.3.1.1.2.2	84.392.660.913,70	5.848.053.235,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.1.1.2.3	4.510.852.544,00	4.961.512.690,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.2.4	177.064.672.727,00	207.821.455.185,70
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1.2.5	-	-
Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.2.6	12.733.735.118,00	10.982.003.087,00
Piutang Lainnya	5.3.1.1.3	59.596.923.188,00	65.081.689.452,00
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.4	(389.964.184.114,24)	(327.357.002.657,22)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.5	505.228.167,24	515.022.118,72
Persediaan	5.3.1.1.6	49.525.803.484,97	59.870.448.656,74
JUMLAH ASET LANCAR		699.758.089.985,05	602.391.815.144,08
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.3		
Investasi Non Permanen	5.3.1.3.1	-	-
Investasi kepada BUMN		-	-
Investasi kepada BUMD		-	-
Investasi dalam Obligasi		-	-
Investasi dalam Proyek Pembangunan		-	-
Dana Bergulir	5.3.1.3.1.1	51.753.390,00	-
Penyisihan Dana Bergulir	5.3.1.3.1.2	(51.753.390,00)	-
Investasi Permanen	5.3.1.3.2	1.002.293.416.444,24	835.123.845.482,75
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.3.2	1.002.293.416.444,24	835.123.845.482,75
Investasi - Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		1.002.293.416.444,24	835.123.845.482,75
ASET TETAP	5.3.1.4		
Tanah	5.3.1.4.1	5.796.161.596.908,69	5.938.980.428.024,63
Peralatan dan Mesin	5.3.1.4.2	1.256.136.708.584,89	1.136.877.015.590,06
Gedung dan Bangunan	5.3.1.4.3	1.888.200.567.932,12	1.582.373.719.962,85
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.1.4.4	3.588.464.657.486,93	3.483.468.228.932,92
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.4.5	15.088.820.384,99	11.314.989.293,84
Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.1.4.6	15.583.780.825,00	224.422.793.771,34
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.4.7	(3.521.544.006.794,74)	(3.162.527.131.333,85)
JUMLAH ASET TETAP		9.038.092.125.327,88	9.214.910.044.241,79
DANA CADANGAN		-	-
Dana Cadangan	5.3.1.5	8.398.684.760,00	46.125.787.358,00
JUMLAH DANA CADANGAN		8.398.684.760,00	46.125.787.358,00



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>

Uraian	REF	2024 (Audited)	2023 (Audited)
ASET LAINNYA			
Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.6	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	5.3.1.6.1	770.678.122,00	873.259.125,00
Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.6.2	351.103.844,90	334.362.178,57
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.6.3	11.014.184.310,00	11.014.184.310,00
Aset Tak Berwujud	5.3.1.6.4	16.970.742.403,80	16.945.217.083,80
Aset Lain - lain	5.3.1.6.5	187.940.474.139,24	199.888.450.262,74
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.6.6	(16.493.115.025,80)	(16.066.792.926,55)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.3.1.6.7	(131.320.042.007,03)	(142.870.965.109,14)
Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.6.8	7.169.764.000,00	23.768.880.000,00
JUMLAH ASET LAINNYA		76.403.789.787,11	93.886.594.924,42
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi Tanah		213.767.403.459,00	-
Properti Investasi Gedung dan Bangunan		4.408.486.403,00	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi		-	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		(977.705.908,52)	-
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		217.198.183.953,48	-
JUMLAH ASET		11.042.144.290.257,76	10.792.438.087.151,04
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1		
Utang Bunga	5.3.2.1.1	158.277.901,00	260.050.896,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek		543.668.056,00	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.2	10.281.879.912,00	10.281.879.912,00
Utang Belanja	5.3.2.1.3	2.569.064.213,13	413.113.467,07
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.4	96.531.896.093,66	95.418.767.474,00
		6.666.000,00	900.000,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		110.091.452.175,79	106.374.711.749,07
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2		
Utang kepada Pemerintah Pusat	5.3.2.2.1	43.878.129.419,00	49.362.895.595,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank		-	-
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.3.2.2.2	18.788.693.136,00	23.585.806.872,00
Utang kepada Masyarakat (Obligasi)		-	-
Premium (Diskonto) Obligasi		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		62.666.822.555,00	72.948.702.467,00
JUMLAH KEWAJIBAN		172.758.274.730,79	179.323.414.216,07
EKUITAS			
Ekuitas	5.3.3	10.869.386.015.526,97	10.613.114.672.934,97
JUMLAH EKUITAS		10.869.386.015.526,97	10.613.114.672.934,97
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		11.042.144.290.257,76	10.792.438.087.151,04

WALI KOTA BOGOR,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
WALI KOTA BOGOR,
DEDIE ABDU RACHIM





PEMERINTAH KOTA BOGOR

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2024 (Audited)	2023 (Audited)
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN	5.4.1		
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.4.1.1	1.613.207.035.756,08	1.433.294.780.168,91
Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1.1.1	1.072.592.914.165,00	972.314.483.639,00
Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.1.1.2	429.458.652.647,18	31.421.925.232,38
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.1.1.3	75.711.032.790,57	36.551.189.768,95
Lain-lain PAD yang Sah	5.4.1.1.4	35.444.436.153,33	393.007.181.528,58
PENDAPATAN TRANSFER	5.4.1.2	1.701.821.239.565,00	1.636.490.268.772,00
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.4.1.2.1.	1.329.578.089.178,00	1.255.511.526.314,00
Dana Bagi Hasil	5.4.1.2.1.1	97.824.228.000,00	113.574.543.000,00
Dana Alokasi Umum	5.4.1.2.1.1.3	858.600.617.000,00	792.904.391.521,00
Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.4.1.2.1.1.4	44.829.645.150,00	55.796.999.805,00
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.4.1.2.1.1.4	328.323.599.028,00	293.235.591.988,00
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.4.1.2.1.	28.047.664.000,00	5.912.254.000,00
Insentif fiskal	5.4.1.2.1.2	28.047.664.000,00	5.912.254.000,00
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	5.4.1.2.2.	344.195.486.387,00	375.066.488.458,00
Pendapatan Bagi Hasil	5.4.1.2.2.1	304.828.525.662,00	297.334.928.892,00
Bantuan Keuangan	5.4.1.2.2.2	39.366.960.725,00	77.731.559.566,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.4.1.3	42.961.879.333,77	66.574.926.398,81
Pendapatan Hibah	5.4.1.3.1	42.961.879.333,77	66.574.926.398,81
Pendapatan Lainnya	5.4.1.3.2	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		3.357.990.154.654,85	3.136.359.975.339,72
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL	5.4.2.1	3.295.465.961.046,54	2.977.397.181.746,12
Beban Pegawai	5.4.2.1.1	1.242.262.790.024,00	1.063.356.108.648,00
Beban Persediaan	5.4.2.1.2	361.655.139.056,65	271.413.541.867,89
Beban Jasa	5.4.2.1.3	763.459.300.802,48	759.836.121.957,66
Beban Pemeliharaan	5.4.2.1.4	146.011.452.259,00	161.408.670.532,86
Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.1.5	94.617.582.922,00	86.703.519.468,00
Beban Bunga	5.4.2.1.6	7.571.414.651,00	6.191.682.700,00
Beban Hibah	5.4.2.1.7	176.519.335.387,00	147.381.004.434,00
Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.8	43.580.019.500,00	54.438.915.000,00
Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.9	373.846.048.605,39	47.569.042.893,21
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.1.10	62.607.181.457,02	373.280.306.704,50
Beban Lain-lain	5.4.2.1.11	23.335.696.382,00	5.818.267.540,00
BEBAN TRANSFER	5.4.2.1.12	1.660.750.000,00	1.660.750.000,00
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.4.2.1.12	0,00	0,00
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.4.2.1.12	0,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.4.2.1.12	1.660.750.000,00	1.660.750.000,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.4.2.1.12	0,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.4.2.1.12	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN		3.297.126.711.046,54	2.979.057.931.746,12
SURPLUS/ (DEFISIT) KEGIATAN OPERASIONAL		60.863.443.608,31	157.302.043.593,60

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>

URAIAN	REF	2024 (Audited)	2023 (Audited)
SURPLUS/ (DEFISIT) KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.3.1	14.388.624.170,56	0,00
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	5.4.3.1.1	14.388.624.170,56	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	5.4.3.1	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.3.1	0,00	0,00
DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.3.2	0,00	0,00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	5.4.3.2	0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	5.4.3.2	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.3.2	0,00	0,00
SURPLUS/ (DEFISIT) KEGIATAN NON OPERASIONAL		14.388.624.170,56	0,00
SURPLUS/ (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		75.252.067.778,87	157.302.043.593,60
POS LUAR BIASA			
PENDAPATAN LUAR BIASA	5.4.4.1	0,00	0,00
Pendapatan Luar Biasa	5.4.4.1.1	0,00	0,00
BEBAN LUAR BIASA	5.4.4.2	2.187.043.885,00	1.066.654.400,00
Beban Luar Biasa	5.4.4.2.1	2.187.043.885,00	1.066.654.400,00
SURPLUS/ (DEFISIT) KEGIATAN POS LUAR BIASA		(2.187.043.885,00)	(1.066.654.400,00)
SURPLUS/ (DEFISIT) LO		73.065.023.893,87	156.235.389.193,60

WALI KOTA BOGOR,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
WALI KOTA BOGOR,

DEDIE ABDU RACHIM





PEMERINTAH KOTA BOGOR

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref	2024 (Audited)	2023 (Audited)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.5		
Arus Masuk Kas	5.5.5.1		
Penerimaan Pajak Daerah	5.5.5.1	973.768.860.850,00	897.753.380.910,00
Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.5.1	417.445.452.990,24	31.081.390.548,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.5.5.1	34.287.163.763,00	33.960.776.435,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.5.5.1	31.728.557.279,00	373.734.859.341,80
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.5.1	85.946.116.000,00	82.465.899.156,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.5.5.1	28.477.228.000,00	19.739.952.531,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.5.1	853.803.503.264,00	792.504.632.043,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.5.5.1	373.153.244.178,00	349.032.591.793,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	5.5.5.1	0,00	0,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	5.5.5.1	28.047.664.000,00	5.912.254.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.5.5.1	303.076.793.631,00	301.185.316.222,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	5.5.5.1	0,00	0,00
Penerimaan Hibah	5.5.5.1	0,00	0,00
Penerimaan Dana Darurat	5.5.5.1	0,00	0,00
Penerimaan Lainnya	5.5.5.1	39.373.626.725,00	78.016.656.626,00
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	5.5.5.1	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		3.169.108.210.680,24	2.965.387.709.605,80
Arus Keluar Kas	5.5.5.2		
Pembayaran Pegawai	5.5.5.2	1.242.957.964.907,00	1.063.654.426.888,00
Pembayaran Barang	5.5.5.2	1.304.164.987.240,00	1.236.457.277.949,00
Pembayaran Bunga	5.5.5.2	7.027.746.595,00	6.191.682.700,00
Pembayaran Subsidi	5.5.5.2	0,00	0,00
Pembayaran Hibah	5.5.5.2	176.519.335.387,00	147.381.004.434,00
Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.5.2	43.580.019.500,00	54.438.915.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	5.5.5.2	1.660.750.000,00	1.660.750.000,00
Pembayaran Tidak Terduga	5.5.5.2	2.187.943.885,00	1.066.654.400,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	5.5.5.2	0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	5.5.5.2	0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.5.5.2	0,00	0,00
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	5.5.5.2	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		2.778.098.747.514,00	2.510.850.711.371,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		391.009.463.166,24	454.536.998.234,80



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>

Uraian	Ref	2024 (Audited)	2023 (Audited)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.6		
Arus Masuk Kas	5.5.6.1		
Penjualan atas Tanah	5.5.6.1	24.168.075,00	24.728.650,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.6.1	40.529.200,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.5.6.1	0,00	0,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.6.1	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan Aset Tetap Lainnya	5.5.6.1	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan Aset Lainnya	5.5.6.1	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan Aset Lain-Lain	5.5.6.1	1.324.720.600,00	2.063.132.284,00
Jumlah Arus Masuk Kas		1.389.417.875,00	2.087.860.934,00
Arus Keluar Kas	5.5.6.2		
Belanja Tanah	5.5.6.2	2.477.717.100,00	1.287.152.960,00
Belanja Peralatan dan Mesin	5.5.6.2	133.226.642.367,00	97.928.993.032,00
Belanja Gedung dan Bangunan	5.5.6.2	141.166.601.172,00	178.951.840.395,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.5.6.2	112.729.496.656,00	238.985.747.391,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.5.6.2	10.693.173.754,00	911.157.960,00
Belanja Aset Lainnya	5.5.6.2	74.355.570,00	100.077.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	5.5.6.2	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		400.367.986.619,00	518.164.968.738,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(398.978.568.744,00)	(516.077.107.804,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	5.5.7		
Arus Masuk Kas	5.5.7.1		
Pencairan Dana Cadangan	5.5.7.1	38.648.742.600,00	25.765.828.400,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan	5.5.7.1	126.700.000.000,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	5.5.7.1	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	5.5.7.1	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	5.5.7.1	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	5.5.7.1	5.484.766.176,00	5.484.766.176,00
Penerimaan Kembali Piutang Daerah	5.5.7.1	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	5.5.7.1	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.7.1	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		170.833.508.776,00	31.250.594.576,00



Uraian	Ref	2024 (Audited)	2023 (Audited)
Arus Keluar Kas	5.5.7.2		
Pembentukan Dana Cadangan	5.5.7.2	0,00	71.336.251.300,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.7.2	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.5.7.2	5.484.766.176,00	5.484.766.176,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah	5.5.7.2	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan	5.5.7.2	126.700.000.000,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan	5.5.7.2	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	5.5.7.2	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	5.5.7.2	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	5.5.7.2	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	5.5.7.2	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.7.2	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	5.5.7.2	132.184.766.176,00	76.821.017.476,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		38.648.742.600,00	(45.570.422.900,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.8		
Arus Masuk Kas	5.5.8.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	5.5.8.1	240.844.476.337,48	227.040.381.499,50
Koreksi Silpa	5.5.8.1	5.550.000,00	2.500.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		240.850.026.337,48	227.042.881.499,50
Arus Keluar Kas	5.5.8.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	5.5.8.2	240.946.249.332,48	227.029.633.386,50
Koreksi Silpa	5.5.8.2	40.935,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		240.946.290.267,48	227.029.633.386,50
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(96.263.930,00)	13.248.113,00
Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Selama Periode		30.583.373.092,24	(107.097.284.356,20)
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendaharan Penerimaan dan Kas Lainnya		54.510.496.495,14	161.607.780.851,34
Saldo Akhir Kas		85.093.869.587,38	54.510.496.495,14



Uraian	Ref	2024 (Audited)	2023 (Audited)
Terdiri dari :			
Saldo Akhir Kas di BUD		79.503.327.898,00	33.520.359.707,00
Saldo Kas Di BLUD		2.153.130.596,38	17.674.821.168,14
Saldo Kas di FKTP (Puskesmas)		0,00	0,00
Saldo Kas di Bendahara BOS		947.597.794,00	1.649.723.756,00
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	922.000,00
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	1.260.000,00
Saldo Kas Lainnya		1.012.808.839,00	1.108.045.406,00

WALI KOTA BOGOR,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
WALI KOTA BOGOR,
DEDIE ABDU RACHIM





PEMERINTAH KOTA BOGOR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2024 AUDITED	2023 AUDITED
EKUITAS AWAL	10.613.114.672.934,97	10.174.464.362.679,95
SURPLUS/DEFISIT-LO	73.065.023.893,87	156.235.389.193,60
Kewajiban untuk Dikonsolidasikan	0,00	0,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	183.206.318.698,13	282.414.921.061,42
Koreksi Nilai Persediaan	25.303.013,44	104.721.309,87
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Mutasi Saldo Awal - Aset Lancar	0,00	0,00
Mutasi Saldo Awal - Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
Mutasi Saldo Awal - Aset Tetap	0,00	0,00
Mutasi Saldo Awal - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	0,00
Mutasi Saldo Awal - Dana Cadangan	0,00	0,00
Mutasi Saldo Awal - Aset Lainnya	0,00	0,00
Mutasi Saldo Awal - Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00
Mutasi Saldo Awal - Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Tanah)	73.815.713.760,00	247.125.783.197,00
Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Peralatan dan Mesin)	(6.852.682.613,17)	(9.808.532.275,77)
Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Gedung dan Bangunan)	(509.028.026,00)	(2.304.200.000,00)
Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Jalan Irigasi dan Jaringan)	2.734.814.178,00	34.703.110.048,00
Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Aset Tetap Lainnya)	677.492.474,15	(3.900.000,00)
Hasil Inventarisasi - Aset Lainnya	(12.075.219.301,50)	11.121.085.120,79
Hasil Inventarisasi - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	9.643.553.427,56	(2.100.845.643,27)
Hasil Inventarisasi - Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	11.679.490.047,73	(8.344.381.920,47)
Koreksi ekuitas lainnya	104.066.881.737,92	11.922.081.225,27
EKUITAS AKHIR	10.869.386.015.526,97	10.613.114.672.934,97

WALI KOTA BOGOR,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
WALI KOTA BOGOR,
DEDIE ABDU RACHIM



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah Kota Bogor menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bogor Tahun Anggaran 2024.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Laporan keuangan yang disusun ini meliputi :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- c. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- d. Laporan Operasional
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
- e. Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan.
- f. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang merupakan pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.



LKPD Kota Bogor Tahun Anggaran 2024 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi dari *stakeholders* (antara lain: masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat) mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor selama Tahun Anggaran 2024 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan LRA, Pendapatan LO, belanja, beban, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Bogor serta hasil-hasil yang dicapai;
4. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
5. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kota Bogor berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak, retribusi dan pembiayaan; dan
6. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Kota Bogor sebagai akibat pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bogor disusun berdasarkan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523)
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
 12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 9);
 13. Peraturan Wali Kota Bogor 12 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.3. ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah Kota Bogor, sedangkan Entitas Akuntansi meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.

Entitas Akuntansi tidak termasuk perusahaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor.

SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor meliputi:

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Rumah Sakit Umum Daerah
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Dinas Perumahan dan Permukiman
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Satuan Polisi Pamong Praja
8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
9. Dinas Sosial
10. Dinas Tenaga Kerja
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
13. Dinas Lingkungan Hidup
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16. Dinas Perhubungan



17. Dinas Komunikasi dan Informatika
18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20. Dinas Pemuda dan Olah Raga
21. Dinas Arsip dan Perpustakaan
22. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
23. Sekretariat Daerah
24. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
25. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
26. Badan Keuangan dan Aset Daerah
27. Badan Pendapatan Daerah
28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
29. Inspektorat
30. Kecamatan Bogor Utara
31. Kecamatan Bogor Selatan
32. Kecamatan Bogor Timur
33. Kecamatan Bogor Barat
34. Kecamatan Bogor Tengah
35. Kecamatan Tanah Sereal
36. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BLUD meliputi:

1. BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor
2. BLUD Puskesmas dan BLUD Labkesda yang merupakan unit kerja dibawah Dinas Kesehatan Kota Bogor

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 04 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan, Sistematika Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor disusun sebagai berikut:

Bab I	INFORMASI UMUM
1.1	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
1.2	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
1.3	Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
1.4	Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Bab II	EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
2.1	Ekonomi Makro
2.2	Kebijakan Keuangan Daerah
Bab III	IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
3.1	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
3.2	Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan



Bab IV	DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1	Pendahuluan
4.2	Asumsi Dasar Akuntansi
4.3	Komponen Laporan Keuangan
4.4	Keterbatasan Laporan Keuangan
4.5	Kebijakan Akuntansi
	1. Entitas Pelaporan
	2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	3. Basis Pengukuran yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	4. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Bab V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
5.1	Rincian dan Penjelasan Pos-pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah:
	1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
	2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL);
	3. Neraca;
	4. Laporan Operasional (LO);
	5. Laporan Arus Kas (LAK);
	6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Bab VI	INFORMASI TAMBAHAN
Bab VII	PENUTUP



BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

2.1 Ekonomi Makro

Pembangunan Ekonomi Kota Bogor sangat ditentukan dari aspek daya saing ekonomi masyarakat yang selanjutnya dapat diukur melalui aspek-aspek indikator makro ekonomi yakni:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bogor;
2. Produk domestik regional bruto (PDRB);
3. Pengeluaran Per Kapita (Konsumsi Per Kapita);
4. Tingkat Inflasi daerah;
5. Pemerataan kesejahteraan masyarakat;
6. Angka Kemiskinan; dan
7. Kondisi Ketenagakerjaan.

2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bogor

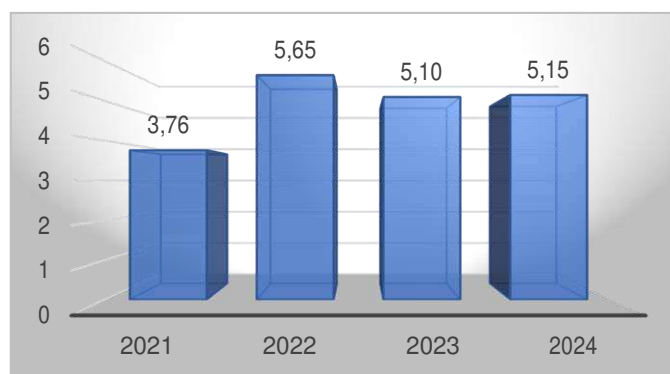
Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kota Bogor pada tahun 2024 adalah sebesar 5,15%. Sektor yang mengalami pertumbuhan paling rendah adalah sektor pengadaan listrik dan gas yang mengalami kontraksi sebesar -2,86%.

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2024 memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Kota Bogor yaitu sebesar 19,09%, dengan laju pertumbuhan sebesar 3,13%. Sektor Industri Pengolahan penyumbang terbesar kedua terhadap perekonomian Kota Bogor yaitu sebesar 18,39% dengan laju pertumbuhan sebesar 2,45%. Pada PDRB menurut komponen pengeluaran, sumbangan yang terbesar adalah Konsumsi Rumah Tangga. Menurut harga konstan, tahun 2024 konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi 90,53% dari total PDRB Kota Bogor atau senilai 34.788,98 miliar rupiah. Penggunaan lain yang cukup besar dari Produk Domestik Regional Bruto adalah untuk pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Menurut harga konstan, tahun 2024 mencapai 12.852,69 miliar rupiah.

Grafik 2.1.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor Tahun 2021 - 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Bogor dalam angka 2025



2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik sebagai akibat berbagai aktivitas ekonomi pada suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dilakukan melalui 3 pendekatan yaitu: pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku atau PDRB nominal berdasarkan harga berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

PDRB pengeluaran yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa. PDRB Kota Bogor Sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT).

PDRB pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku mengalami peningkatan di tahun 2024 sebesar 4.047,91 miliar rupiah dari nilai 61.05,67 miliar rupiah jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 57.003,76 miliar rupiah. Dilihat dari PDRB Pengeluaran atas dasar harga berlaku komponen terbesar adalah dari Konsumsi Rumah Tangga sebesar 61.788,67 miliar rupiah. Komponen PMTB mempunyai kontribusi yang relatif besar, yaitu 34,5%. Komponen net ekspor menunjukkan angka negatif, artinya selama 2020 - 2024 untuk memenuhi pengeluaran Kota Bogor masih dipenuhi oleh banyak impor. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor). Peningkatan PDRB ini dipengaruhi oleh peningkatan harga yang harus dibayarkan pada setiap komponen PDRB. Di tahun 2024 PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 2.1.2
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Miliar)
Kota Bogor Tahun 2020-2024

Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	45.013,83	47.301,11	52.172,90	56.362,06	61.788,67
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	765,21	788,75	860,78	958,04	1.090,26
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4.952,12	4.943,91	4.996,68	5.521,01	5.607,49
Pembentukan Modal Tetap Bruto	14.605,10	16.435,04	17.441,68	19.739,33	21.076,37
Perubahan Inventori	855,79	-529,4	-18,4	7,44	23,68
Net Ekspor Barang dan Jasa	-20.280,18	-20.613,76	-22.539,04	-25.584,13	-28.534,78
Produk Domestik Regional Bruto	45.911,86	48.325,64	52.914,60	57.003,76	61.051,67

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Bogor dalam angka 2025

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai Atas Dasar Harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang dievaluasi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga).



PDRB pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir.

PDRB menurut pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan Kota umumnya mengalami kenaikan, tahun 2024 PDRB pengeluaran mencapai 38.964,67 Miliar, mengalami peningkatan sebesar 1.909,31 miliar Rupiah dari nilai 37.055,36 miliar rupiah jika dibandingkan dengan tahun 2023. Peningkatan yang terjadi pada PDRB Atas Dasar Harga Konstan ini mencerminkan terjadinya peningkatan volume pengeluaran yang terjadi selama tahun 2024 tanpa adanya pengaruh perubahan harga.

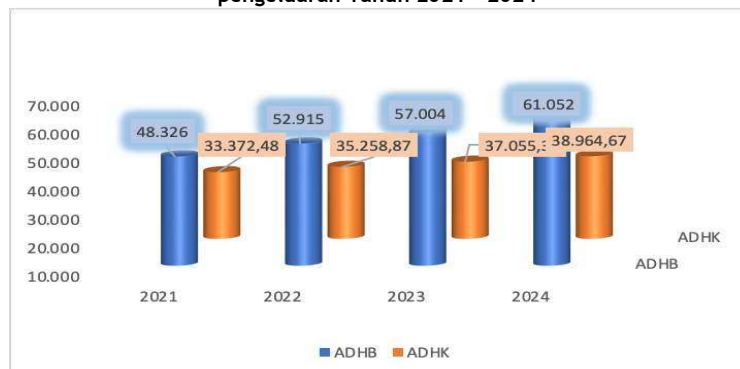
Tabel 2.1.3
PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran (miliar rupiah)
Kota Bogor 2020-2024

Pengeluaran	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	29.734	30.660	32.421	33.546	34.789
Pengeluaran Konsumsi LNPR	553	563	590	627	702
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3.095	3.011	2.983	3.274	3.192
Pembentukan Modal Tetap Bruto	10.483	11.113	11.316	12.381	12.853
Perubahan Inventori	520	(301)	(10)	4	13
Net Ekspor Barang dan Jasa	(12.221)	(11.674)	(12.040)	(12.776)	(12.583)
Produk Domestik Regional Bruto	32.162,74	33.372,48	35.258,87	37.055,36	38.964,67

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Bogor dalam angka 2025

Apabila dibandingkan antara nilai PDRB atas Dasar Harga Berlaku dengan nilai PDRB atas Dasar Harga Konstan, nilai PDRB atas Dasar Harga Berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas Dasar Harga Konstan. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat, sedangkan pada PDRB atas Dasar Harga Konstan pengaruh dari harga tersebut telah diabaikan. Sama halnya PDRB atas Dasar Harga Berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas Dasar Harga Konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 ke 2024, dikarenakan telah terjadi perubahan peningkatan volume yang menyebabkan pertumbuhan nilai PDRB di tahun 2024.

Grafik 2.1.4
Perbandingan PDRB atas Dasar Harga Berlaku dan atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut pengeluaran Tahun 2021 - 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Bogor dalam angka 2025

Untuk melihat pertumbuhan perekonomian kota dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB pengeluaran dan lapangan usaha.



Grafik 2.1.5
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2021-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Bogor dalam angka 2025

Bila dilihat pada grafik di atas, pertumbuhan ekonomi Kota Bogor lebih baik dari Provinsi Jawa Barat, dimana pada tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor sebesar 5,15% sedangkan Provinsi Jawa Barat sebesar 4,95%. Begitupun pada tahun 2021 - 2023 pertumbuhan ekonomi Kota Bogor lebih baik dari Provinsi Jawa Barat.

Tabel 2.1.6
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di (miliar rupiah)
Kota Bogor 2020-2024

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	245,16	258,71	267,41	275,95	279,23
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan/	6.015,39	6.283,63	6.603,00	6.864,58	7.032,53
D	Pengadaan Listrik dan Gas/	725,41	813,13	893,01	869,6	844,77
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	36,05	39,77	42,44	47,06	51,13
F	Konstruksi	3.604,70	3.659,26	3.672,50	4.094,47	4.142,49
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.210,45	6.379,30	6.722,52	6.973,02	7.191,20
H	Transportasi dan Pergudangan/	3.850,16	3.961,65	4.352,35	4.744,10	5.322,75
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan	1.530,33	1.550,68	1.734,17	1.825,38	1.960,93
J	Informasi dan Komunikas	3.047,81	3.182,27	3.344,93	3.563,35	3.951,15
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.214,26	2.245,47	2.223,68	2.246,72	2.327,49
L	Real Estat	719,17	821,06	877,63	896,55	957,85
M,N	Jasa Perusahaan	617,58	598,73	666,39	673,1	693,83
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	721,13	746,4	730,75	745,61	807,29
P	Jasa Pendidikan	1.041,70	1.096,42	1.195,60	1.241,04	1.265,99
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	485,7	540,88	595,55	606,7	621,83
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ Other Services Activities	1.097,74	1.195,11	1.336,93	1.388,12	1.514,21
Produk Domestik Regional Bruto		32.162,74	33.372,48	35.258,87	37.055,36	38.964,67

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Bogor dalam angka 2025



Sektor yang mengalami pertumbuhan paling rendah pada tahun 2024 adalah Sektor Pengadaan Listrik dan Gas mengalami kontraksi yaitu sebesar -2,86%. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2024 memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Kota Bogor sebesar 19,09%, dengan laju pertumbuhan sebesar 3,13 persen. Sektor Industri Pengolahan penyumbang terbesar kedua terhadap perekonomian Kota Bogor yaitu sebesar 18,39 persen dengan laju pertumbuhan sebesar 2,45 persen.

2.1.3 Pengeluaran Per Kapita (Konsumsi Per Kapita)

PDRB per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2021, PDRB perkapita atas dasar harga konstan mengalami peningkatan sebesar 2,74%, diiringi dengan peningkatan jumlah penduduk sebesar 1% menunjukkan pemulihan ekonomi yang sedang menggeliat di Kota Bogor. Tahun 2022 dan 2023 PDRB per kapita tumbuh sebesar 4,66% dan 4,13% menunjukkan semakin stabil dan membaiknya kondisi perekonomian Kota Bogor. Perubahan angka PDRB per kapita yang meningkat ini lebih disebabkan oleh inflasi dan tidak menggambarkan peningkatan kemakmuran secara riil.

Tabel 2.1.7
PDRB dan PDRB per Kapita
Kota Bogor 2021-2023

Uraian	2021	2022*	2023**
Nilai PDRB (Miliar Rp)			
- ADHB	48.326	52.915	57.004
- ADHK 2010	33.372	35.259	37.055
PDRB perkapita			
- ADHB	45.984	49.875	53.239
- ADHK 2010	31.755	33.234	34.608
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010 (%)	2,74	4,66	4,13
Jumlah penduduk (000 org)	1.050	1.061	1.071
Pertumbuhan (%)	1,00	0,95	0,92

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor Menurut Pengeluaran 2019-2023

PDRB per kapita Kota Bogor menunjukkan perubahan dari tahun ke tahun, diiringi dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk rata-rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai PDRB per kapita di masing-masing tahun tersebut. Sementara itu pertumbuhan per kapita secara "riil" juga selalu meningkat. Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk pada tiap tahunnya.



2.1.4 Tingkat Inflasi Daerah

Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang-barang secara umum dan terjadi secara terus menerus. Kenaikan harga satu atau beberapa barang tidak dapat dikatakan bahwa terjadi inflasi. Selain itu, apabila kenaikan harga barang terjadi secara temporer, seperti menjelang hari raya misalnya, maka hal itu tidak dapat dikatakan sebagai inflasi. Dengan naiknya harga barang di satu sisi, hal itu mengandung arti terjadinya penurunan nilai uang di sisi lain.

Indeks Harga konsumen (IHK) Indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa. Secara nasional pengelompokan komoditas terdiri dari 11 kelompok dan 43 sub kelompok. Konkordansi pengelompokan IHK (2012=100) yang sebanyak 7 kelompok, berubah menjadi 11 kelompok pada IHK (2018=100), yaitu: Makanan, minuman dan tembakau; Pakaian dan alas kaki; Perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga; Perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga; Kesehatan; Transportasi; Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; Rekreasi, olahraga dan budaya; Pendidikan; Penyediaan makanan dan minuman/restoran; dan Perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Pada Desember 2024 Kota Bogor terjadi inflasi *year on year* (yoy) sebesar 1,75% dengan IHK sebesar 107,49. Inflasi yoy tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,37% dengan IHK sebesar 116,49 dan terendah pada kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,22 persen dengan IHK sebesar 103,45. Tingkat inflasi *month to month* (mtm) Desember 2024 sebesar 0,49% dan tingkat inflasi *year to date* (ytd) Desember 2024 sebesar 1,75%.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks diseluruh kelompok pengeluaran, yaitu Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 2,35%; Kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 1,5%; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,36%; Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,22%; Kelompok Kesehatan sebesar 2,74%; Kelompok Transportasi sebesar 0,63%; Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,38%; Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya sebesar 1,35%; Kelompok Pendidikan sebesar 4,59%; Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 1,19%; dan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa lainnya sebesar 8,37%. Pada Desember 2024, Kota Bogor mengalami tingkat inflasi yoy sebesar 1,75%; tingkat inflasi ytd sebesar 1,75% dan tingkat inflasi mtm sebesar 0,49%. Tingkat inflasi yoy untuk Desember 2023 dan Desember 2022 masing-masing sebesar 3,36% dan 5,82% . Sedangkan tingkat inflasi ytd Desember 2023 dan Desember 2022 masing-masing sebesar 3,36% dan 5,82%. Perkembangan inflasi tahunan Kota Bogor selengkapnya dapat dilihat di Tabel 2.1.8.

Tabel 2.1.8
Perbandingan Tingkat Inflasi Year on Year 2021-2024 (Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Bogor Perkembangan Indeks Harga Konsumen, Desember 202



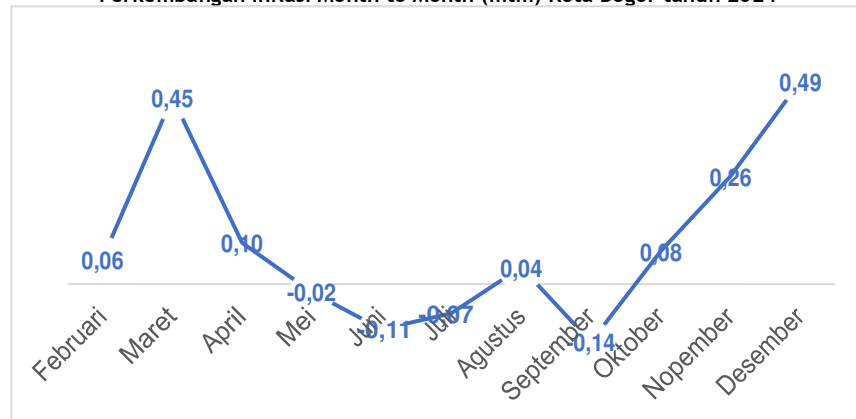
Tabel 2.1.9
Tingkat Inflasi Month to Month (mtm), Year to Date (ytd), dan Year on Year (yoy)
2021-2024 (Persen)

Tingkat Inflasi	2021	2022	2023	2024
Month to Month (mtm) Desember	0,56	0,49	0,22	0,49
Year to Date (ytd) Desember	1,93	5,82	3,36	1,75
Year on Year (yoy) Desember	1,93	5,82	3,36	1,75

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Bogor Perkembangan Indeks Harga Konsumen, Desember 2024

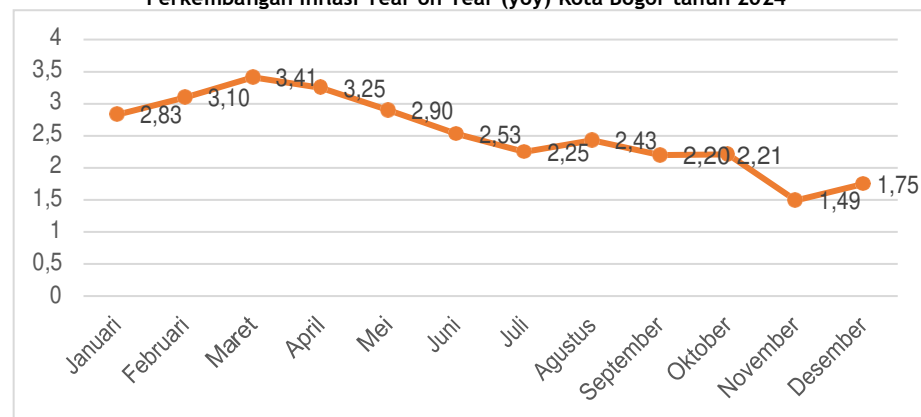
Pergerakan inflasi *month to month* (mtm) Kota Bogor 2024 terlihat pada Gambar 2 Inflasi mtm tertinggi terjadi pada bulan Desember 2024 sebesar 0,49% dan pada bulan September 2024 terjadi deflasi mtm sebesar 0,14%. Sementara pada Gambar 3 dapat dilihat perkembangan inflasi *year on year* (yoy) dari bulan Desember 2023 - Desember 2024.

Grafik 2.1.10
Perkembangan Inflasi Month to Month (mtm) Kota Bogor tahun 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Bogor Perkembangan Indeks Harga Konsumen, Desember 2024

Grafik 2.1.11
Perkembangan Inflasi Year on Year (yoy) Kota Bogor tahun 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Bogor Perkembangan Indeks Harga Konsumen, Desember 2024

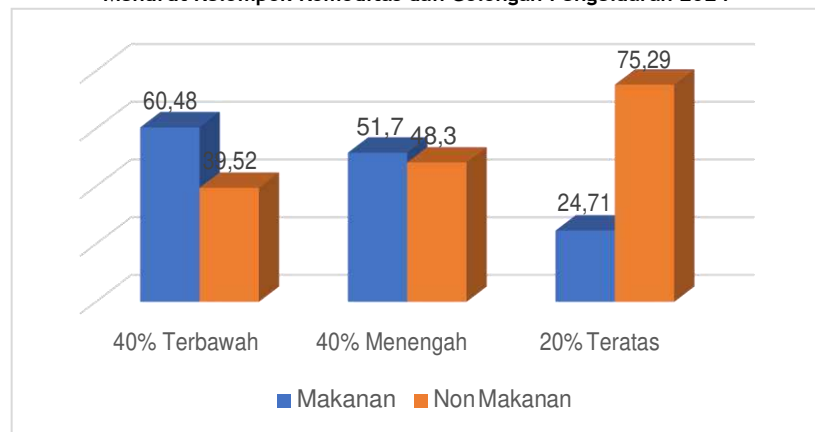


2.1.5 Pemerataan kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan suatu kelompok masyarakat dapat diketahui dari tingkat pendapatan masyarakatnya. Namun, karena data pendapatan yang akurat sulit diperoleh, melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), tingkat kesejahteraan masyarakat diperoleh dengan pendekatan Pengeluaran Rumah Tangga. Rata - rata pengeluaran penduduk per kapita di Kota Bogor pada tahun 2024 adalah sebesar 2.470.557 rupiah per bulan, hal ini menurun dari tahun 2023 sebesar 2.733.270 rupiah per bulan, dengan pengeluaran untuk kelompok makanan sebesar 909.165 rupiah per kapita per bulan atau sebesar 36,80% dari jumlah pengeluaran, sedangkan untuk non makanan rata-rata pengeluaran sebesar 1.561.392 rupiah atau sebesar 63,20%. Baik tahun 2023 maupun 2024, secara rata-rata pengeluaran masyarakat Kota Bogor lebih banyak digunakan untuk pengeluaran non makanan. Hal ini mencirikan sebagian besar masyarakat Kota Bogor sudah beralih ke ciri masyarakat kelas menengah.

Tingkat kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari peningkatan PDRB per Kapita. Tetapi harus dievaluasi juga apakah tingkat kesejahteraan tersebut dinikmati secara merata oleh masyarakat. Dari hasil evaluasi terhadap indikator makro ekonomi Kota Bogor, ternyata Kesenjangan sosial diakibatkan oleh ketimpangan pendapatan masyarakat Kota Bogor yang masih cukup tinggi. Pemenuhan kebutuhan dasar yang terjangkau dan bermutu bagi keluarga miskin belum maksimal, sehingga ketimpangan sosial semakin terlihat jelas. Kesempatan keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya terlihat masih sangat timpang dibandingkan dengan keluarga pada kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan yang lebih baik.

Tabel 2.1.12
Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan
Menurut Kelompok Komoditas dan Golongan Pengeluaran 2024

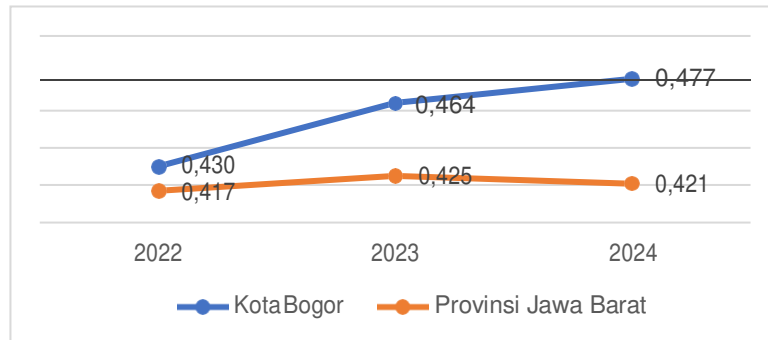


Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Bogor dalam angka 2025

Apabila dilihat dari tabel diatas, kesenjangan antara pengeluaran per kapita penduduk dengan pengeluaran 20% atas dan penduduk dengan pengeluaran 40% bawah masih sangat tinggi dimana ada kesenjangan hampir berkisar 35,77% untuk masing-masing kelompok komoditas. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan kesejahteraan masyarakat masih menjadi masalah yang cukup serius di Kota Bogor. Hal ini juga dapat dibuktikan dari indikator Gini Rasio Kota Bogor yang terus meningkat dalam 3 tahun terakhir, pada tahun 2024 berada di level 0,477. Berikut ini adalah gambaran perbandingan kondisi tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan indeks ketimpangan (gini rasio) sebagai berikut:



Grafik 2.1.13
Perbandingan Gini Rasio Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2022 - 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 2025

Kondisi ketimpangan kesejahteraan masyarakat yang terjadi di Kota Bogor sebagaimana dijelaskan pada grafik diatas terus mengalami peningkatan, pada tahun 2022 berada di level 0,430 tahun 2023 di level 0,464 serta pada tahun 2024 di level 0,477 dalam hal ini indeks gini rasio di Kota Bogor jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat yang dimana pada tahun 2022 angka gini rasio Provinsi Jawa Barat berada dilevel 0,417 dan di tahun 2023 berada dilevel 0,425 serta tahun 2024 berada di level 0,421.

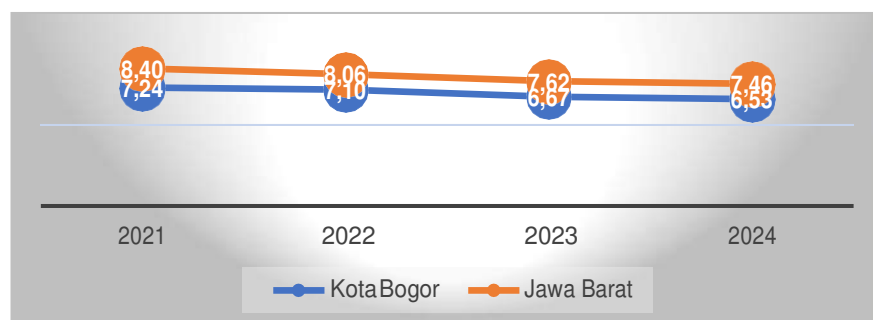
2.1.6 Angka Kemiskinan

Kemiskinan selalu menjadi isu strategis baik di tingkat Kota, di tingkat Provinsi maupun di tingkat nasional. Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Berdasarkan dari hasil evaluasi ada beberapa indikator yang dijadikan parameter untuk penanggulangan kemiskinan antara lain adalah:

1. Angka Kemiskinan

Angka Kemiskinan di Kota Bogor mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Di tahun 2024 dengan adanya berbagai upaya pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan maka persentase penduduk miskin menjadi 6,53%, atau mengalami penurunan sebesar 0,14% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 6,67%. Berikut adalah gambaran perkembangan penduduk miskin dari tahun 2020-2024.

Grafik 2.1.14
Persentase Perkembangan Penduduk Miskin Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2021 - 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 2025

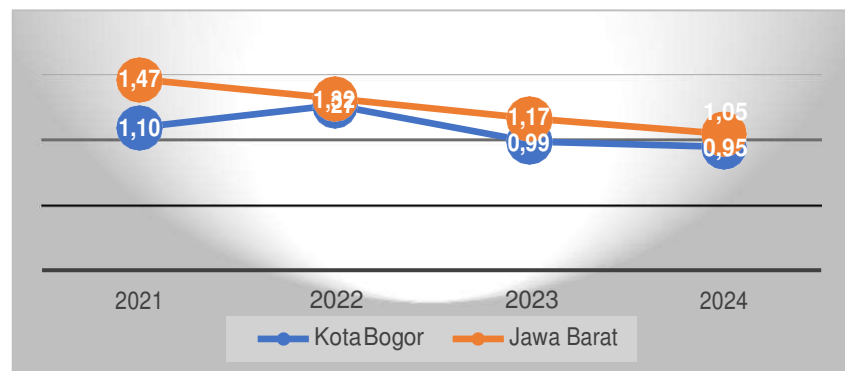


Bila dilihat pada grafik di atas, persentase penduduk miskin Kota Bogor mulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 selalu berada dibawah Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini, dapat dibuktikan persentase penduduk miskin Kota Bogor pada tahun 2024 sebesar 6,53% sedangkan persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat sebesar 7,46%.

2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*)

Merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, Semakin tinggi Indeks Kedalaman Kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit, Kegunaan dari Nilai agregat dari *poverty gap index* adalah untuk mengetahui seberapa besar biaya untuk mengentaskan kemiskinan, Semakin kecil nilai *poverty gap index*, maka semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan untuk target sasaran bantuan dan program. Berikut gambaran indeks kedalaman kemiskinan dari tahun 2021-2024:

Grafik 2.1.15
Persentase Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 - 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 2025

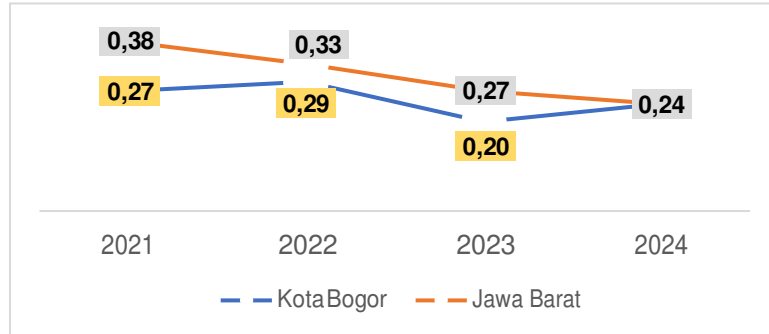
Grafik diatas menggambarkan bahwa untuk tahun 2021 sampai tahun 2024 Indeks kedalaman Kemiskinan Kota Bogor selalu dibawah Jawa Barat. Dalam hal ini indeks kedalaman kemiskinan di Kota Bogor pada tahun 2024 sebesar 0,95% sedangkan indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Jawa Barat di tahun 2023 sebesar 1,05%.

3. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*)

Merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indikator Keparahan Kemiskinan berfungsi untuk memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan, sebagai contoh mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (*poverty gap*) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin. Berdasarkan publikasi dari BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, berikut gambaran Indeks Keparahan kemiskinan dari tahun 2020-2024:



Grafik 2.1.16
Persentase Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2021 - 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 2025

Grafik diatas menggambarkan bahwa pada tahun 2024 Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Bogor sama dengan Jawa Barat, dan mengalami peningkatan dari tahun 2023. Hal ini mengindikasikan semakin lebarnya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin, yang berarti kesenjangan ekonomi di kalangan masyarakat miskin semakin besar. Hal ini akan berimplikasi pada besaran pembiayaan program penanggulangan kemiskinan.

2.1.7 Kondisi Ketenagakerjaan

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Untuk melihat struktur penduduk bekerja, maka perlu diperhatikan karakteristiknya. Karakteristik penduduk bekerja akan disajikan berdasarkan lapangan pekerjaan utama, status pekerjaan utama, dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), penduduk usia kerja pada Agustus 2024 sebanyak 834.478 orang. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 561.986 orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 272.492 orang. Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2024 terdiri dari 516.284 orang penduduk yang bekerja dan 45.702 orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2023, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 27.454 orang. Penduduk bekerja naik sebanyak 31.950, sementara pengangguran turun sebanyak 4.496 orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dibandingkan Agustus 2023. TPAK pada Agustus 2024 sebesar 67,35 persen, naik 2,54 persen poin dibandingkan Agustus 2023. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.

Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2024, TPAK laki-laki sebesar 83,71%, lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan yang sebesar 50,69%. Jika dibandingkan Agustus 2022, TPAK laki-laki mengalami kenaikan sebesar 0,76% poin (dari 82,95% menjadi 83,71%) sedangkan yang perempuan mengalami kenaikan sebesar 1,34% poin (dari 46,32% menjadi 50,69%).



Tabel 2.1.17
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2022 – Agustus 2024

Bulan/ Tahun	Jenis Kelamin	Penduduk Usia Kerja (ribu)	Angkatan Kerja (ribu)	Bekerja (ribu)	Pengangguran Terbuka (ribu)	TPAK (%)	TPT (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
Agustus 2022	Laki-laki	438,1	352,2	315,0	37,2	80,40	10,56
	Perempuan	428,7	204,3	181,6	22,8	47,66	11,15
	Total	866,8	556,5	496,6	60,0	64,21	10,78
Agustus 2023	Laki-laki	416,3	345,3	312,2	33,1	82,95	9,59
	Perempuan	408,5	189,2	172,1	17,1	46,32	9,04
	Total	824,8	534,5	484,3	50,2	64,81	9,39
Agustus 2024	Laki-laki	420,9	352,4	325,0	27,4	83,71	7,77
	Perempuan	413,5	209,6	191,3	18,3	50,69	8,74
	Total	834,5	562,0	516,3	45,7	67,35	8,13

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024

Pada Agustus 2024, penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebesar 56,58%, sementara yang paling sedikit berstatus berusaha dibantu buruh tetap/dibayar yaitu sebesar 2,69%. Dibandingkan Agustus 2023, status pekerjaan yang mengalami kenaikan persentase terbesar adalah status Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar dan Pekerja tak dibayar yaitu sebesar 2,04% poin. Sedangkan status pekerjaan yang mengalami penurunan persentase terbesar adalah status Buruh/ karyawan yaitu sebesar 4,48% poin Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka dengan status berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar).

Pada Agustus 2024, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 210.250 orang (40,72 persen), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 306,040 orang (59,28 persen). Selama periode Agustus 2023 ke Agustus 2024 terjadi pergeseran kegiatan penduduk bekerja dari formal menjadi informal sebesar 3,91 persen poin. Tingginya persentase pekerja informal didorong oleh tingginya peningkatan dan persentase pekerja dengan status pekerja dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar dan pekerja keluarga. Dibandingkan dengan keadaan Agustus 2022, pekerja formal berkurang sebanyak 3,4 persen poin.



Tabel 2.1.18
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2022 – Agustus 2024

Status Pekerjaan	Agustus 2022		Agustus 2023		Agustus 2024	
	ribu orang	persen (%)	ribu orang	persen (%)	ribu orang	persen (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Berusaha sendiri	103,6	20,87	107,5	22,20	116,4	22,55
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar	27,3	5,50	20,9	4,31	32,8	6,35
Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar	16,2	3,27	10,3	2,12	13,9	2,69
Buruh/ karyawan	294,8	59,37	295,8	61,06	292,1	56,58
Pekerja bebas	26,9	5,41	33,7	6,95	33,2	6,43
Pekerja tak dibayar	27,7	5,58	16,2	3,35	27,8	5,39
Jumlah	496,6	100,0	484,3	100,0	516,3	100,0

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2024, adalah rencana kerja di tahun kelima pada masa pelaksanaan yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024, serta dalam konteks sebagai bagian dari perwujudan rencana pembangunan jangka menengah Kota Bogor dan dalam konteks perwujudan tahapan terakhir perencanaan lima tahunan dalam Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025. Arah Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kota Bogor tentunya harus dilakukan penyesuaian dengan Arah Kebijakan Nasional dan Arah Kebijakan Provinsi Jawa Barat agar sinergis dalam pencapaian pembangunan.

Selain menyesuaikan terhadap arah kebijakan tersebut, seluruhnya mengarah pada pencapaian Visi RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 yaitu untuk mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga dan Visi RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025 yaitu mewujudkan Kota jasa yang nyaman dengan masyarakat madani dan pemerintahan yang amanah.

Pada tahapan tahun kelima dalam rencana pembangunan jangka menengah kota Bogor tahun 2019-2024 ini, fokus pembangunan Kota Bogor diarahkan kepada “Membangun Kemandirian Daerah” yang mengandung makna menumbuhkan inovasi secara pentahelix untuk meningkatkan daya saing daerah dan berkeadilan sosial, menciptakan kemampuan daya saing dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan kemandirian sumber daya daerah dan menciptakan kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar. Kebijakan makro ekonomi yang dilakukan kota Bogor pada Tahun 2024 dalam membangun kemandirian daerah adalah sebagai berikut :

- Memberikan stimulus untuk peningkatan daya saing ekonomi masyarakat terutama di bidang jasa, pariwisata, dan ekonomi kreatif.



- b. Mendorong pemerataan pembangunan daerah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi disetiap wilayah yang mendorong pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
- c. Meningkatkan daya tarik investasi dengan melakukan deregulasi dan integrasi perizinan investasi dalam rangka membuka kesempatan kerja seluas luasnya bagi masyarakat kota Bogor.
- d. Mendorong untuk mempekerjakan tenaga kerja lokal kepada investor yang menanamkan modalnya di Kota Bogor.
- e. Penguatan di sektor UMKM dengan mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), serta meningkatkan upaya strategis yang mampu menaikkan kelas UMKM ke dalam supply chain regional, nasional, dan internasional.
- f. Penguatan SDM berkualitas dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pelatihan vokasional.
- g. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi kreatif.

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2024 sebagai pelaksanaan agenda RPJPD Tahun 2005-2025 di tahun ke sembilan belas dan RPJMD Tahun 2019-2024 tahun ke-lima, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber - sumber pendanaan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seperti APBN, APBD Provinsi, Alternatif pembiayaan, maupun kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP).

2.2.1 KEBIJAKAN PENDAPATAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang diundangkan pada tanggal 5 Januari 2022 mempunyai semangat untuk mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu: (1) mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, (2) mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan Pembiayaan Utang Daerah, (3) mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah, serta (4) harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Reklasifikasi pajak 5 jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak yaitu PBJT, pemberian kewenangan pemungutan opsen antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, rasionalisasi jumlah retribusi dari 32 jenis menjadi 18 jenis pelayanan serta penetapan tarif pajak dan retribusi yang berlaku secara nasional akan berdampak besar kepada Pendapatan Asli Daerah. Pengaturan kembali tentang pajak dan retribusi yang akan dipungut, tarif serta tata cara pemungutan dibuat dalam satu peraturan daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang sudah harus terbit paling lama 2 tahun sejak UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah ditetapkan.

Untuk itu, arah kebijakan PAD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor pada tahun 2024 adalah:



1. Melakukan penyesuaian tarif untuk jenis pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir dan pajak penerangan jalan menjadi 10% kecuali pajak hiburan atas spa, karaoke dan diskotek;
2. Melakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak BPHTB dari Rp.60 juta menjadi Rp.80 juta;
3. Melakukan penyesuaian jenis layanan yang dapat dijadikan objek retribusi dengan menghapuskan 8 jenis retribusi yang dipungut pada tahun 2023 ke belakang;
4. Penambahan kesiapan infrastruktur dalam rangka pelaksanaan implementasi Undang-Undang tersebut.

Selain kebijakan-kebijakan tersebut, upaya yang selama ini telah dilakukan dalam hal mengoptimalkan pendapatan asli daerah akan tetap dilakukan seperti:

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah;
2. Meningkatkan koordinasi antar pemerintah daerah untuk mendorong pemerintah provinsi dan atau pusat dalam hal kebijakan atau aturan yang mendukung pemerintah daerah;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan asli daerah serta penatausahaan pendapatan;
4. Mengoptimalkan penagihan piutang pajak dan retribusi daerah;
5. Mengoptimalkan pengelolaan badan usaha milik daerah untuk dapat meningkatkan bagian laba untuk pemerintah daerah melalui pelaksanaan audit kinerja; dan
6. Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah terkait pemanfaatan kekayaan daerah.

Kebijakan pendapatan transfer tahun anggaran 2024 adalah:

1. Mengoptimalkan pelaksanaan Kerjasama antara Pemerintah Kota Bogor dengan Kementerian Keuangan khususnya dalam pengelolaan pajak penghasilan sebagai salah satu sumber pendapatan dana transfer; dan
2. Mengoptimalkan pelaksanaan Kerjasama antara Pemerintah Kota Bogor dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu sumber pendapatan dari dana transfer.

2.2.2 KEBIJAKAN BELANJA

Kebijakan perencanaan belanja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan perencanaan belanja operasi sebagai berikut:
 - A. Belanja Pegawai
 - 1) Penganggaran Belanja Pegawai dengan proporsi sesuai ketentuan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 2) Belanja gaji dan tunjangan disesuaikan dengan kebutuhan tahun 2024 dengan alokasi 14 bulan;
 - 3) Belanja TPP dialokasikan sampai dengan Desember dan memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024;



- 4) Belanja Non ASN dianggarkan maksimal sama dengan jumlah Non ASN Tahun 2023 (Keamanan, Pengemudi, Kebersihan);
 - 5) Belanja Non ASN yang masuk pagu masing-masing perangkat daerah terdiri dari jasa kebersihan, keamanan dan pengemudi yang dihitung 13 bulan serta BPJS yang dihitung selama 12 bulan sesuai dengan standar harga satuan jasa tahun 2024;
 - 6) Non ASN tidak mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai/Insentif Pemungutan Pajak Retribusi;
 - 7) Penganggaran belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan (BUD/Kuasa BUD, PA/KPA, PPK-SKPD, PPTK, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerimaan Pembantu) dan honorarium pengadaan barang dan jasa maksimal sebesar 10% dari Pagu SKPD diluar Sub Kegiatan Gaji dan Tunjangan;
 - 8) Spesifikasi yang dapat diambil untuk honor BUD/Kuasa BUD, PA/KPA, PPK-SKPD, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerimaan Pembantu adalah Pagu SKPD diluar Sub Kegiatan Gaji dan Tunjangan.
- B. Belanja Barang dan Jasa
- 1) Untuk data masyarakat miskin dan penerimaan hibah/bantuan sosial
 - 2) Belanja air, listrik, telepon dianggarkan untuk kebutuhan 12 bulan
 - 3) Penganggaran BLUD alokasi sesuai dengan target pendapatan 2024
 - 4) Alokasi PBI disesuaikan dengan proporsi penyediaan anggaran oleh Kota Bogor sebagaimana surat usulan penganggaran yang diajukan ke Provinsi Jawa Barat tahun 2024
 - 5) Alokasi BOS sesuai dengan jumlah siswa yang ada pada dapodik tahun 2023;
 - 6) Belanja persediaan untuk operasional kantor dialokasikan pada sub kegiatan:
 - a. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah tangga
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 7) Belanja persediaan untuk operasional kantor dialokasikan pada sub kegiatan Pemeliharaan BMD
 - 8) Pemeliharaan BMD dan Pengadaan BMD harus mengacu pada Dokumen RKBMD
 - 9) Pemeliharaan kendaraan hanya untuk kendaraan dinas yang tercatat pada Daftar Barang Milik Daerah Kota Bogor dan masih digunakan menunjang tugas dan fungsi
 - 10) Kendaraan yang rusak berat dan kendaraan yang bersifat rekondisi atau overhaul, tidak dianggarkan lagi untuk pemeliharaan, diusulkan untuk dihapuskan dari daftar inventaris;
 - 11) Harga satuan pemeliharaan kendaraan mengacu pada Standar Harga Satuan Jasa 2024;
 - 12) Harga satuan pemeliharaan kendaraan dinas pejabat atau kendaraan dinas operasional sudah termasuk BBM;
 - 13) Menganggarkan Pajak untuk semua kendaraan yang tercatat pada Daftar Barang Milik Daerah Kota Bogor, kecuali yang rusak berat;
 - 14) Pemberian Honorarium Posyandu, Kader Posbindu, Kader RW Siaga, Kader Kelurahan Siaga Aktif, mengacu pada jumlah kader sesuai dengan tahun anggaran 2023 dan



- Standar Harga Satuan Jasa 2024. Tidak ada penambahan jumlah kader (sesuai kemampuan keuangan daerah
- 15) Pemberian Honorarium RT, RW dan LPM disesuaikan dengan Standar Harga Satuan Jasa 2024;
 - 16) Pemberian Honorarium ASN Kota Bogor hanya diperkenankan untuk:
 - a. Honorarium penanggungjawab pengelolaan keuangan;
 - b. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - c. Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa di luar pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa pada Bagian PBJ.
 - 17) Tidak ada honorarium lembur untuk ASN;
 - 18) Honorarium Lembur dapat diberikan kepada non ASN yang menangani kejadian bencana pada saat kejadian bencana, hari Kemerdekaan RI, Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru;
 - 19) Perjalanan Dinas dalam kota untuk ASN dan Non ASN Pemerintah Kota Bogor diperkenankan hanya untuk anggaran yang bersumber dari dana transfer sesuai juklak dan juknis yang berlaku;
 - 20) Belanja perjalanan dinas untuk mobilitas dari tempat tujuan, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula, dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. untuk pegawai Pemerintah Kota Bogor dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya, dengan ketentuan:
 - i. dalam rangka koordinasi/konsultasi atas inisiatif perangkat daerah dengan jumlah peserta paling banyak 3 (tiga) orang termasuk pengemudi;
 - ii. dalam rangka memenuhi undangan dengan jumlah peserta paling banyak 4 (empat) orang termasuk pengemudi, sepanjang tidak ditentukan lain dalam surat undangan;
 - iii. dalam rangka studi banding, kunjungan kerja, dan atau sejenisnya atas inisiatif sendiri dengan maksimal jumlah peserta 10 (sepuluh) orang, dianggarkan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran untuk 1 (satu) perangkat daerah;
 - b. untuk narasumber pada kegiatan atau saksi yang dibutuhkan dan atau dihadirkan oleh Pemerintah Kota Bogor;
 - 21) Pertemuan di luar kantor yang dilaksanakan oleh perangkat daerah berupa rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan atau sejenisnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 22) Penyediaan makan dan minum, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 23) Setiap aktivitas dalam rincian belanja agar mendukung prioritas penanganan Kemiskinan, Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan, Stunting, Kota Layak Anak (KLA), Pengendalian Inflasi, Peningkatan Potensi Investasi dan Gender.
- C. Belanja bunga
- 1) Pembayaran bunga atas pinjaman PDAM kepada World Bank;
 - 2) Pembayaran bunga atas pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
- D. Belanja hibah dan belanja bantuan sosial:



Belanja hibah bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Belanja Hibah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daftar penerima hibah dan bantuan sosial sudah terdaftar pada aplikasi SAHABAT dan telah dilakukan verifikasi oleh OPD verifikator yang sudah masuk kedalam RKPD Kota Bogor.

2. Kebijakan perencanaan belanja modal sebagai berikut:

- 1) Belanja modal harus memperhatikan batasan nilai kapitalisasi dan masa manfaat lebih dari 12 bulan, batasan nilai kapitalisasi mengacu pada Peraturan tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bogor;
- 2) Pemenuhan fasilitas kendaraan dinas jabatan secara selektif, efektif dan efisien;
- 3) Belanja kegiatan fisik yang anggarannya bersumber bukan dari dana transfer dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan lebih dari 3 (tiga) bulan wajib didasarkan pada sudah tersedianya dokumen perencanaan pada tahun sebelumnya;
- 4) Belanja pengadaan tanah didasarkan pada dokumen Rencana Pengadaan Tanah sesuai ketentuan yang berlaku;
- 5) Rencana Belanja Modal harus didasarkan pada kebutuhan riil dan mengutamakan produksi dalam negeri serta dapat melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.

3. Kebijakan perencanaan belanja tidak terduga sebagai berikut:

Perencanaan anggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2023 dan memperhitungkan kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam Kegiatan dan Sub kegiatan pada tahun anggaran 2024.

4. Kebijakan perencanaan belanja transfer sebagai berikut:

Terlaksananya bantuan kompensasi dampak lingkungan terhadap masyarakat sekitar TPAS Galuga sesuai pasal 9 Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kota Bogor Nomor 119/37/PKS/KS/XII/2020 dan Nomor 658.1-DLH/2020 tentang Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Galuga di Desa Galuga Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor tanggal 30 Desember 2020.

2.2.3 KEBIJAKAN PEMBIAYAAN

2.2.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan Pemerintah Kota Bogor untuk Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dengan memperhitungkan sumber-sumber SiLPA dimaksud;
2. Penerimaan Cicilan Utang PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor; dan



-
3. Penerimaan pembiayaan dari pencairan dana cadangan dianggarkan pada pos-pos belanja sesuai dengan tujuan pembentukan dana cadangan tersebut;

2.2.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kota Bogor untuk Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran cicilan pokok utang terkait
 - a. Penerusan pinjaman dari World Bank kepada Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk PDAM Tirta Pakuan;
 - b. Pinjaman PEN Daerah Kota Bogor
2. Pencairan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Pemerintah Daerah Kota Bogor.



BAB III**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH****3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Dalam Laporan Realisasi APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2024, realisasi Pendapatan Daerah Kota Bogor mencapai Rp 3.170.497.628.555,24 atau mencapai 99,30% dari target semula yang ditetapkan sebesar Rp3.192.710.048.074,00. Pada sisi lain, Realisasi Belanja dan Transfer mencapai Rp3.178.466.734.133,00 atau 96,88% dari anggaran yang ditetapkan semula sebesar Rp3.280.812.122.537,00 sehingga berdasarkan selisih pendapatan dan belanja terdapat defisit sebesar Rp7.969.105.577,76.

Pada aspek pembiayaan terdapat Pembiayaan Neto sebesar Rp92.904.697.264,14 dari yang dianggarkan sebesar Rp88.102.074.463,00. Dengan demikian di dalam Tahun Anggaran 2024 terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp84.935.591.686,38.

Sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, Negara Indonesia memiliki konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang menjamin setiap warganya untuk hidup sesuai dengan hak-haknya dan berupaya untuk mewujudkan tujuan-tujuannya, serta mengatur semua permasalahan yang menyangkut pemerintahan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pelayanan terhadap rakyatnya tidak mungkin terpusat pada pemerintah pusat, tetapi harus didistribusikan pada pemerintah daerah yang menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Pemerintahan daerah dibentuk dengan tujuan mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya otonomi, daerah diharapkan akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan mampu memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan daerah tanpa intervensi dari pihak lain, yang disertai dengan pertanggungjawaban publik, serta pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat, sebagai konsekuensi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menjalankan urusan-urusan pemerintahan di daerah yang merupakan sasaran pembangunan daerah, pemerintah daerah menerima penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (asas desentralisasi). Kewenangan daerah ini mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan yang dikecualikan dalam undang-undang, yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter, dan fiskal nasional dan agama. Selain pemberlakuan asas desentralisasi, penyelenggaraan pemerintahan di daerah pun berprinsip pada asas dekonsentrasi, yaitu urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan ini tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan tugas pembantuan, yaitu tugas-tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya, dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. Urusan yang ditugaskan itu sepenuhnya masih menjadi wewenang pemerintah pusat atau provinsi.

Untuk membiayai belanja rumah tangga pemerintah daerah dalam mengemban penyerahan wewenang pemerintahan, pemerintah pusat memberi sumber-sumber keuangan, pengalokasian dana perimbangan, dan pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintah daerah. Umumnya, sebagian besar sumber keuangan daerah berupa bantuan pemerintah pusat.

Kebijakan keuangan daerah tercermin pada kebijakan fiskal atau anggaran daerah, dan kebijakan ini termasuk bagian dari kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan, sehingga kebijakan penganggaran daerah harus ditangani dengan sebaik-baiknya. Pengumpulan dan penggunaan dana harus



disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Pendapatan pemerintah daerah harus selalu meningkat, sedangkan pengeluaran harus dilakukan seefisien mungkin sehingga sumber-sumber dana daerah dapat dimanfaatkan dengan baik.

Pada Tahun Anggaran 2024 anggaran Belanja dan Transfer Daerah Kota Bogor ditetapkan sebesar Rp3.280.812.122.537,00 direncanakan didanai melalui penerimaan pendapatan yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1.461.100.063.862,00 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp1.731.609.984.212, sehingga akan menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp88.102.074.463,00 yang ditutup melalui pembiayaan netto.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kota Bogor selama Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat secara ringkas pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.1
Ikhtisar Target Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor
Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Daerah	1.461.100.063.862,00	1.458.619.452.757,24	(2.480.611.104,76)	99,83
Pendapatan Transfer	1.731.609.984.212,00	1.711.878.175.798,00	(19.731.808.414,00)	98,86
Jumlah Pendapatan Daerah	3.192.710.048.074,00	3.170.497.628.555,24	(22.212.419.518,76)	99,30
BELANJA				
Belanja Operasi	2.846.195.789.921,00	2.774.250.053.629,00	(71.945.736.292,00)	97,47
Belanja Modal	426.595.630.347,00	400.367.986.619,00	(26.227.643.728,00)	93,85
Belanja Tidak Terduga	6.359.952.269,00	2.187.943.885,00	(4.172.008.384,00)	34,40
Belanja Transfer	1.660.750.000,00	1.660.750.000,00	-	100
Jumlah Belanja Daerah	3.280.812.122.537,00	3.178.466.734.133,00	(102.345.388.404,00)	96,88
Surplus/(Defisit)	(88.102.074.463,00)	(7.969.105.577,76)	80.132.968.885,24	9,05
PEMBIAYAAN DAERAH				
Penerimaan	98.396.220.459,00	225.089.463.440,14	126.693.242.981,14	228,76
Pengeluaran	10.294.145.996,00	132.184.766.176,00	121.890.620.180,00	1.284,08
Pembiayaan Netto	88.102.074.463,00	92.904.697.264,14	4.802.622.801,14	105,45
SILPA	0,00	84.935.591.686,38	84.935.591.686,38	0,00

Tabel diatas memperlihatkan bahwa pada Tahun 2024 realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bogor kurang dari target yang telah ditetapkan. Selisih (kurang) realisasi Pendapatan Daerah adalah sebesar Rp22.007.792.966,76 atau 0,69% dari target tahun 2024 dengan rincian selisih (kurang) realisasi Pendapatan Asli Daerah dari target tahun 2024 sebesar Rp2.275.984.552,76 atau 0,16%, selisih (kurang) realisasi Pendapatan Transfer dari target tahun 2024 sebesar Rp19.731.808.414,00 atau 1,14% dari target tahun 2024.

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Pemerintah Kota Bogor pada Tahun 2024 tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Belanja daerah ini merupakan pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor untuk mendanai seluruh kegiatan/program yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap layanan publik di Kota Bogor.

Realisasi belanja dan transfer Pemerintah Kota Bogor pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp3.178.466.734.133,00 atau 96,88% dari target belanja dan transfer yang telah ditetapkan sebesar Rp3.280.812.122.537,00.

Dalam hal Pembiayaan Daerah sebagai pos untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran, dari target Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp88.102.074.463,00 dapat direalisasikan sebesar Rp224.884.836.888,14 atau 228,55% yang berasal dari Silpa tahun anggaran sebelumnya, pencairan Dana Cadangan, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek, realisasi pembiayaan pada BLUD RSUD Kota Bogor



sebesar Rp126.700.000.000,00 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, struktur anggaran BLUD terdiri dari pendapatan BLUD, belanja BLUD dan pembiayaan BLUD, pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp132.184.766.176,00 dialokasikan untuk Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Jangka Panjang dan Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek dan pembayaran pembiayaan BLUD RSUD Kota Bogor sebesar Rp126.700.000.000,00.

3.2 Alokasi Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2024

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2024, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya, antara lain:

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan secara memadai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - a. dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang kurangnya 40% sampai dengan TA 2027;
 - b. belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.
 - c. belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa adalah belanja bagi hasil dan/atau transfer yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain bagi hasil Pajak provinsi kepada kabupaten/kota, bagi hasil Pajak dan Retribusi kabupaten/kota kepada desa, dan transfer kepada desa yang berasal dari DD dan ADD.

Adapun anggaran dan realisasi hal tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Anggaran Bidang Pendidikan pada Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp895.865.215.557,00 atau 27,31% dari total Belanja Daerah, dengan realisasi sebesar Rp868.740.399.519,00 atau mencapai 27,33% dari total Belanja Daerah. Penjelasan lebih lanjut terkait dengan Anggaran dan Realisasi Bidang Pendidikan sebagaimana tabel berikut:



Tabel 3.2.1
Anggaran dan Realisasi Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2024

No	Komponen Perhitungan	Pagu	Realisasi
1	a. Urusan Bidang Pendidikan	805.097.967.641	782.323.664.578
	1) Belanja Operasi	646.465.864.001	632.394.257.049
	a. belanja pegawai	417.417.805.517	411.523.819.786
	b. belanja barang dan jasa	144.574.032.484	137.910.962.933
	c. belanja hibah	79.332.930.000	77.943.678.330
	d. belanja bantuan sosial	5.141.096.000	5.015.796.000
	2) Belanja Modal	158.632.103.640	149.929.407.529
	b. Urusan Bidang Kebudayaan	1.815.514.200	1.780.063.764
	1) Belanja Operasi		
	a. belanja pegawai	28.100.000	24.200.000
	b. belanja barang dan jasa	1.787.414.200	1.755.863.764
	c. belanja hibah		
	d. belanja bantuan sosial		
	c. Urusan Bidang Perpustakaan	364.924.400	326.820.950
	1) Belanja Operasi		
	a. belanja pegawai	17.460.000	16.460.000
	b. belanja barang dan jasa	220.744.400	212.650.150
	c. belanja hibah		
	d. belanja bantuan sosial		
	2) Belanja Modal	126.720.000	97.710.800
	d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	17.880.012.600	17.837.081.225
	1) Belanja Operasi		
	a. belanja pegawai	72.120.000	61.230.000
	b. belanja barang dan jasa	5.332.392.600	5.300.351.225
	c. belanja hibah	10.635.000.000	10.635.000.000
	d. belanja bantuan sosial		
	2) Belanja Modal	1.840.500.000	1.840.500.000
	e. Belanja diluar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Pe	71.071.721.116	66.799.589.952
	1) Belanja Transfer	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-
	2) Sub Kegiatan pada SKPD		
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	30.240.000	30.240.000
	2 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	43.358.736.200	43.219.714.901
	SEKRETARIAT DAERAH		
	1 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	46.800.000	46.800.000
	2 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10.328.070.400	10.178.694.651
	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		
	1 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	61.597.600	61.207.600
	2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	40.761.752	40.546.100
	3 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	62.306.800	62.306.800
	4 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	49.039.800	44.589.800
	5 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	9.479.800	8.468.400
	6 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	836.477.700	833.712.360
	DINAS KESEHATAN		
	1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5.366.714.000	5.200.400.000
	2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	640.850.000	620.850.000
	3 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.394.842.390	1.022.594.290
	4 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	56.968.000	56.968.000





No	Komponen Perhitungan	Pagu	Realisasi
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	250.853.500	230.539.500
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	269.999.700	214.533.650
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	41.600.000	41.580.000
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	185.652.000	184.455.000
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	1 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	7.851.500	7.171.500
	2 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	507.325.000	498.275.500
	3 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	248.500.000	244.269.800
	4 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	193.500.000	190.087.720
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	-	-
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	36.101.900	36.101.900
	2 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.023.328.426	992.595.200
	3 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	69.145.429	68.501.429
	4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	362.783.600	357.125.000
	5 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.938.408.000	1.932.722.351
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	1 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan	96.828.400	96.790.000
	2 Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	40.000.000	39.999.900
	3 Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	51.120.000	51.105.000
	DINAS SOSIAL		
	1 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan	84.871.000	81.304.000
	2 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	43.400.000	37.990.000
	3 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	67.349.600	67.349.600
	DINAS TENAGA KERJA		
	1 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	9.627.900	9.049.000
	2 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	3.260.590.719	3.227.585.128
2	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b+c+d+e)	895.865.215.557	868.740.399.519
3	Total Belanja Daerah	3.280.812.122.537	3.178.466.734.133
4	Rasio Anggaran Pendidikan (2:3) x 100%	27,31	27,33



2. Anggaran Bidang Kesehatan pada Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp740.182.691.033,00 atau 27,42% dari total Belanja Daerah diluar gaji, dengan realisasi sebesar Rp727.344.426.548,00 atau mencapai 27,92% dari total Belanja Daerah diluar gaji. Penjelasan lebih lanjut terkait dengan Anggaran dan Realisasi Bidang Kesehatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2.2
Anggaran dan Realisasi Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	a Belanja pada Dinas Kesehatan	357.555.195.118,00	333.752.412.788,00	93,34
	1) Belanja Operasi	342.709.092.361,00	322.320.205.714,00	94,05
	a. Belanja Pegawai	149.207.649.336,00	142.386.298.238,00	95,43
	b. Belanja Barang dan Jas	192.305.443.025,00	178.746.028.287,00	92,95
	c. Belanja Hibah	1.196.000.000,00	1.187.879.189,00	99,32
	2) Belanja Modal	14.846.102.757,00	11.432.207.074,00	77,00
	b Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang kesehatan, antara lain	382.627.495.915,00	393.592.013.760,00	102,87
	1) Belanja Transfer			
	Belanja Bantuan Keuangan			
	2) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Rumah Sakit Umum Daerah	18.707.180.401,00	18.258.203.336,00	97,60
	4) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah	39.381.010.841,00	39.266.988.308,00	99,71
	5) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah	324.539.304.673,00	336.066.822.116,00	103,55
2	Anggaran Kesehatan (a+b)	740.182.691.033,00	727.344.426.548,00	98,27
3	Total Belanja Daerah	3.280.812.122.537,00	3.178.466.734.133,00	96,88
4	Gaji ASN	581.730.632.816,00	572.966.490.524,00	98,49
5	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	2.699.081.489.721,00	2.603.880.822.295,00	
	Rasio anggaran Kesehatan (2:5) x 100%	27,42	27,92	

3. Anggaran Belanja infrastruktur pada tahun 2024 mencapai Rp579.537.311.824,00 atau 17,67% dari total belanja daerah dikurangi belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa dengan realisasi sebesar Rp550.210.132.596,00 atau mencapai 17,32%.

Tabel 3.2.3
Anggaran dan Realisasi Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2024

A PERHITUNGAN BELANJA BAGI HASIL DAN/ATAU TRANSFER KEPADA DAERAH/DESA				
No	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	Total Belanja Daerah	3.280.812.122.537,00	3.178.466.734.133,00	96,88
2	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/ atau desa			
	a) belanja bagi hasil	0,00	0,00	
	b) bantuan keuangan	1.660.750.000,00	1.660.750.000,00	100,00
	Jumlah (a+b)	1.660.750.000,00	1.660.750.000,00	100,00
3	Selisih	3.279.151.372.537,00	3.176.805.984.133,00	
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	1.311.660.549.014,80	1.270.722.393.653,20	96,88
B PERHITUNGAN BELANJA INFRASTRUKTUR				
No	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	a) Belanja Modal			
	1) Tanah	5.425.147.300,00	2.477.717.100,00	45,67
	2) peralatan dan mesin	144.788.452.254,00	133.226.642.367,00	92,01
	3) bangunan dan gedung	150.827.313.763,00	141.166.601.172,00	93,59
	4) jalan, jaringan dan irigasi	114.562.031.641,00	112.729.496.656,00	98,40
	5) aset tetap lainnya	10.917.685.389,00	10.693.173.754,00	97,94
	b) Belanja Pemeliharaan	119.191.646.477,00	116.798.066.547,00	97,99
2	a) Belanja Hibah			
	b) Belanja Bantuan Sosial	33.825.035.000,00	33.118.435.000,00	97,91
	c) Bantuan Keuangan			
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	579.537.311.824,00	550.210.132.596,00	94,94
4	Persentase Belanja Infrastruktur	17,67	17,32	



3.3 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Secara umum faktor-faktor yang menjadi hambatan dan kendala dalam pencapaian target kinerja keuangan tahun anggaran 2024, yaitu :

1. Adanya kebutuhan pendanaan untuk belanja daerah yang melebihi dari pendapatan daerah;
2. Pendapatan Daerah pada APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2024 masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah dan pemerintah provinsi yaitu sebesar 54,24%
3. Belum optimalnya kesinambungan antara proses perencanaan dan proses penganggaran, dan belum konsistennya proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran;
4. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi dalam rangka menjamin keselarasan antara dokumen perencanaan dan implementasi pelaksanaan program;
5. Belum optimalnya kinerja pelaksanaan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dalam menyusun Analisa Beban Kerja dan target SKPD.



BAB IV

DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Pendahuluan

4.1.1 Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Bogor untuk tujuan umum dalam rangka membandingkan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Tujuan khusus kebijakan akuntansi adalah memberikan acuan bagi:

- Penyusun laporan keuangan dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
- Pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.1.2 Ruang Lingkup

Dalam pemerintah daerah terdapat 2 (dua) jenis entitas yang menyusun laporan keuangan yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Adapun penjelasan kedua entitas tersebut adalah sebagai berikut:

- Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas Akuntansi yang ada pada Pemerintah Daerah adalah seluruh SKPD pemerintah daerah dan SKPKD selaku entitas yang mengelola keuangan pada level Pemerintah Daerah. Keduanya mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan ini selanjutnya digabungkan menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- Entitas pelaporan adalah satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan keuangan. Dalam hal ini entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah. Adapun laporan keuangan yang harus disajikan oleh Pemerintah Daerah adalah LRA, LPSAL, Neraca, LO, LPE, LAK, dan CALK. Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

4.1.3 Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual. Dalam basis akrual ini, pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, basis kas masih digunakan dalam rangka penyusunan LRA sepanjang dokumen anggaran disusun berdasarkan basis kas.



4.1.4 Aplikasi Akuntansi

Aplikasi Akuntansi yang digunakan sejak tahun anggaran 2018 hingga sekarang adalah Sistem Informasi Perencanaan dan Keuangan Daerah atau SIMRAL.

4.2 Asumsi Dasar Akuntansi

4.2.1 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Penyajian informasi untuk tujuan akuntabilitas ini antara lain dilakukan:

1. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
2. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
3. Menyediakan informasi yang dapat sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai cara entitas pelaporan mendanai mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas;
4. Pendapatan-LRA;
5. Belanja;
6. Transfer;
7. Pembiayaan;
8. Saldo Anggaran Lebih;
9. Pendapatan-LO;
10. Beban; dan
11. Arus Kas.



Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, untuk dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

4.2.2 Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan

Pimpinan entitas baik entitas akuntansi maupun entitas pelaporan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

4.2.3 Komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*) dan laporan finansial (*financial report*) sehingga laporan keuangan pemerintah daerah yang lengkap terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
6. Laporan Arus Kas (LAK); dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas kecuali LAK dan Laporan Perubahan SAL yang hanya dibuat oleh BLUD dan entitas pelaporan.

4.2.4 Bahasa Laporan Keuangan

Laporan keuangan harus disusun dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga disusun dalam bahasa lain selain bahasa Indonesia, maka laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus memuat informasi dan waktu yang sama (tanggal dan posisi dan cakupan periode). Selanjutnya, laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus diterbitkan untuk periode atau waktu yang sama dengan laporan keuangan dalam bahasa Indonesia.

4.2.5 Mata Uang Pelaporan

Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penyajian neraca, aset dan/atau kewajiban dalam mata uang lain selain dari rupiah harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan kurs menggunakan kurs tengah Bank Sentral. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh mata uang asing tersebut. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka :

1. Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;
2. Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal transaksi.

Keuntungan dan kerugian dalam periode berjalan yang terkait dengan transaksi dalam mata uang asing dinilai dengan menggunakan kurs sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAP, IPSAP dan Buletin Teknis SAP serta peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur tentang transaksi dalam mata uang asing.



4.2.6 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi dan praktik-praktik spesifik yang dipakai oleh suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan tersebut mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material sesuai dengan ketentuan dalam PSAP. Kebijakan akuntansi disusun untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang:

1. Relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan;
2. Dapat diandalkan, dengan pengertian:
 - a. Mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan entitas;
 - b. Menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya;
 - c. Netral, yaitu bebas dari keberpihakan;
 - d. Mencerminkan kehati-hatian; dan
 - e. Mencakup semua hal yang material.
3. Dapat dibandingkan, dengan pengertian informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain pada umumnya;
4. Dapat dipahami, dengan pengertian informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman para pengguna.

Dalam melakukan pertimbangan untuk penetapan kebijakan akuntansi, pemerintah daerah memperhatikan :

1. Persyaratan dan pedoman PSAP yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait;
2. Definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, dan penerimaan/pengeluaran pembiayaan yang ditetapkan dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan dan PSAP; dan
3. Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah.

4.2.7 Penyusunan Laporan Keuangan

1. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut ukuran likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan waktu jatuh temponya.
3. Laporan Operasional menggambarkan pendapatan dan beban yang dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama/operasional entitas dan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsinya.
4. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis dengan ukuran penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan perubahan SAL, dan laporan perubahan ekuitas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, termasuk komitmen dan kontijensi serta transaksi-transaksi lainnya.



5. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan tidak diperkenankan menggunakan ukuran kualitatif seperti “sebagian besar” untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.
6. Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perubahan estimasi akuntansi.

Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan kondisi yang mendasarinya. Selain itu, juga wajib diungkapkan pengaruh material dari perubahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun pada periode-periode berikutnya. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan dalam LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Misalnya, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya diungkapkan dalam CaLK.
 - b. Perubahan Kebijakan Akuntansi.

Kebijakan akuntansi dapat diubah apabila :

 - (1) Penetapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau SAP yang berlaku;
 - (2) Diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan.
 - (3) Kesalahan Mendasar.

Koreksi kesalahan mendasar dilakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode penyajian.

4.2.8 Konsistensi

1. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari satu periode ke periode lain oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal), Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi lainnya. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam CaLK.
2. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali :
 - a. Terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas pemerintahan daerah; atau
 - b. Perubahan tersebut diperkenankan oleh PSAP.
3. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka penyajian periode sebelumnya tidak perlu direklasifikasi tetapi harus diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

4.2.9 Materialitas dan Agregasi

1. Penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas.
2. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan. Sedangkan, pos-pos yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi sejenis.
3. Informasi dianggap material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam pencatatan informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil.



4.2.10 Periode Pelaporan

Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwim. Laporan keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun takwim, misalnya pada saat terbentuknya entitas baru. Penyajian laporan keuangan untuk periode yang lebih pendek dari tahun takwim dijelaskan dalam CaLK.

4.2.11 Informasi Komparatif

1. Laporan keuangan tahunan dan interim disajikan secara komparatif dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Khusus neraca interim, disajikan secara komparatif dengan neraca akhir tahun sebelumnya. LO dan LRA interim disajikan mencakup periode sejak awal tahun anggaran sampai dengan akhir periode interim yang dilaporkan.
2. Informasi komparatif yang bersifat negatif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

4.2.12 Laporan Keuangan Interim

1. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan diantara dua laporan keuangan tahunan dan harus dipandang sebagai bagian integral dari laporan periode tahunan. Penyusunan laporan interim dapat dilakukan secara bulanan, triwulanan, atau semesteran.
2. Laporan keuangan interim memuat komponen yang sama seperti laporan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca, LRA, LO, LAK, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan SAL, dan CaLK.

4.2.13 Laporan Keuangan Konsolidasian

Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian untuk mendapatkan laporan keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan, PPKD menggabungkan laporan keuangan entitas satu persatu dengan menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari aset, kewajiban, ekuitas, pembiayaan, belanja, dan beban. Agar laporan keuangan konsolidasian dapat menyajikan informasi keuangan tersebut sebagai satu kesatuan ekonomi, maka perlu dilakukan langkah-langkah berikut :

- a. Transaksi dan saldo resiprokal antara Bendahara Umum Daerah (BUD) dan entitas akuntansi dieliminasi.
- b. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan yang sama untuk transaksi, peristiwa dan keadaan yang sama atau sejenis.
- c. Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

4.3 Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan untuk tujuan umum terdiri dari :

4.3.1 Laporan Realisasi Anggaran

LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. LRA menyajikan informasi mengenai ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/SKPKD/Pemerintah Daerah dalam satu periode pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran Pemerintah Daerah. LRA menggunakan basis kas dalam pencatatannya.



4.3.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

4.3.3 Neraca

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

4.3.4 Laporan Operasional

LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas. Berbeda dengan LRA, LO menggunakan basis akrual dalam pencatatannya.

4.3.5 Laporan Arus Kas

LAK adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi penerimaan, pengeluaran, dan perubahan kas dan setara kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

4.3.6 Laporan Perubahan Ekuitas

LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

4.3.7 Catatan Atas Laporan Keuangan

CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, CaLK sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- 1) informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi makro, pencapaian target peraturan daerah APBD Kota Bogor, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 2) ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- 3) informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- 4) pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;
- 5) informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- 6) daftar dan tabel.



Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh SAP serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau komitmen-komitmen lainnya.

4.4 Keterbatasan Laporan Keuangan

Pengambilan keputusan ekonomi tidak semata-mata didasarkan pada informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan laporan keuangan mempunyai keterbatasan, antara lain yaitu:

1. Bersifat historis, yaitu pencatatan atas transaksi atau peristiwa yang telah lampau akan terus dibawa dalam laporan keuangan. Hal ini berakibat pada revaluasi yang berakibat pada naiknya nilai aset dibandingkan pada periode sebelumnya;
2. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan;
3. Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran;
4. Hanya melaporkan informasi yang bersifat material;
5. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian, yang artinya apabila terdapat beberapa kemungkinan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka dipilih alternatif yang menghasilkan pendapatan bersih atau nilai aset yang paling kecil; dan
6. Lebih menekankan pada penyajian transaksi dan peristiwa sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya (formalitas).

4.5 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

4.5.1 Definisi

Kas Pemerintah Daerah terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Dana BOS, dan Kas Dana Kapitasi. Saldo simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Termasuk dalam kategori kas adalah setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Kas Pemerintah Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah. Kas pemerintah daerah tersebut terdiri dari:

- 1) Saldo rekening kas daerah, yaitu setiap saldo rekening pada bank yang digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah;
- 2) Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN) dan Deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah;
- 3) Uang tunai di bendahara umum daerah.

Kas Pemerintah Daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah terdiri dari:

- 1) Kas di Bendahara Pengeluaran
- 2) Kas di Bendahara Penerimaan.
- 3) Kas di BLUD
- 4) Kas Dana BOS
- 5) Kas Dana Kapitasi
- 6) Kas Lainnya



4.5.2 Pengakuan

Kas diakui pada saat memenuhi definisi kas dan/atau setara kas yaitu ketika kas diterima oleh Bendahara/Rekening Kas Umum Daerah dan pada saat dikeluarkan oleh Bendahara/Rekening Kas Umum Daerah. Selain itu juga, ketika penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih kepada pemerintah. Kas di jurnal di posisi debit jika bertambah dan di posisi kredit jika berkurang

4.5.3 Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca

4.5.4 Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian kas dan setara kas di neraca dan laporan arus kas harus menunjukkan posisi kas pada tanggal laporan keuangan dan menunjukkan asal usul kas.

Selanjutnya informasi terkait pengungkapan kas dan setara kas dijelaskan, diperinci dan diberikan analisa dalam CaLK. Beberapa hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK antara lain:

- a. penjelasan dan sifat serta penggunaan dari rekening yang dimiliki dan dikuasai pemerintah;
- b. pengungkapan informasi penting lainnya terutama yang mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan.

4.6 Kebijakan Akuntansi Piutang

4.6.1 Definisi

Buletin Teknis SAP Nomor 02 tahun 2005 menyatakan piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Piutang juga dapat didefinisikan sebagai hak entitas dan/atau manfaat masa depan yang diakui pada saat ini yang dapat dinilai dengan uang, sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang Pemerintah Daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

- 1) Piutang Jangka Pendek
- 2) Piutang Jangka Panjang

4.6.2 Pengakuan

Pengakuan piutang yang berasal dari pendapatan daerah, didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan yang mempengaruhi piutang tersebut.

Untuk dapat diakui sebagai piutang, harus dipenuhi kriteria:

- 1) Telah diterbitkan surat ketetapan dan/atau
- 2) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan
- 3) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan

4.6.3 Pengukuran

Piutang pajak dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima. Dalam penyusunan neraca, surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima dicatat sebagai Piutang Pajak sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi. Informasi mengenai saldo piutang pajak dapat diperoleh dari SKPD yang menerbitkan surat ketetapan pajak.

Piutang retribusi diukur sesuai nilai yang tercantum dalam SKRD yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dicatat sebesar nilai yang dituangkan dalam risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang disahkan oleh notaris untuk



hasil investasi dari Perseroda atau SK Kuasa Pemilik Modal (KPM) untuk hasil investasi dari Perumda yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

Piutang lain-lain PAD yang Sah dicatat sebesar jumlah pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian Pemerintah Daerah yang belum dibayar yang tertuang dalam dokumen tagihan/ketetapan/kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Termasuk di dalam Piutang Lain-lain PAD yang Sah adalah sanksi administrasi berupa denda pajak dan denda retribusi.

Piutang Transfer dicatat sebesar nilai kurang salur transfer dari pemberi (Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi).

Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

1) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih harus dirumuskan dengan sikap penuh kehati-hatian agar kebijakan ini mampu menghasilkan nilai yang diharapkan dapat ditagih atas piutang yang ada per tanggal neraca.

Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada saat pelaporan keuangan. Metode ini lebih meyakinkan terhadap penyajian nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yang tersaji di neraca.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) klasifikasi, yaitu:

- a) Kualitas piutang lancar;
- b) Kualitas piutang kurang lancar;
- c) Kualitas piutang diragukan;
- d) Kualitas piutang macet.

Penggolongan kualitas piutang dipilah berdasarkan cara pemungutan pajak, yaitu:

- a) Pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*Self Assessment*);
- b) Pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah (*Official Assessment*).

Penggolongan kualitas piutang Pajak Daerah dimana pemungutan pajaknya dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*), dilakukan dengan ketentuan:

- a) kualitas lancar, dengan kriteria:
 - (1) umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun;
 - (2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan;
 - (3) Wajib Pajak kooperatif;
 - (4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - (5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b) kualitas kurang lancar, dengan kriteria:
 - (1) umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - (2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
 - (3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan;
 - (4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) kualitas diragukan, dengan kriteria:
 - (1) umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - (2) Wajib Pajak tidak kooperatif;



- (3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
- (4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - (1) umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun;
 - (2) Wajib Pajak tidak ditemukan;
 - (3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia;
 - (4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak Daerah dimana pemungutan pajaknya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*), dilakukan dengan ketentuan:

- a) kualitas lancar, dengan kriteria:
 - (1) umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun;
 - (2) Wajib Pajak kooperatif;
 - (3) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b) kualitas kurang lancar, dengan kriteria:
 - (1) umur piutang 1(satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - (2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) kualitas diragukan, dengan kriteria:
 - (1) umur piutang 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - (2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) kualitas macet, dengan kriteria:
 - (1) umur piutang diatas 5 (lima) tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang bukan pajak khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilih berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- a) kualitas lancar, jika umur piutang sampai dengan 1 (satu) bulan;
- b) kualitas kurang lancar, jika umur piutang di atas 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan;
- c) kualitas diragukan, jika umur piutang di atas 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
- d) kualitas macet, jika umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan

Penggolongan kualitas piutang bukan pajak selain yang disebutkan retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- a) kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- b) kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan;
- c) kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- d) kualitas macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan.



Besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang ditetapkan sebagai berikut:

Kualifikasi	Besaran Penyisihan
Piutang Lancar	nilai penyisihan sebesar 0.5%
Piutang Kurang Lancar	nilai penyisihan sebesar 10%
Piutang Diragukan	50% setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)
Piutang Macet	100% setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)

2) Penghentian Pengakuan Piutang

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

Pemberhentian pengakuan piutang selain karena pelunasan juga bisa dilakukan karena adanya penghapusan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah, penghapusan piutang dikenal dengan dua cara yaitu: penghapusan bersyarat dan penghapusan mutlak. Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih. Sementara itu penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah.

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya.

Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang. Apabila piutang dihapusbukukan, piutang dialihkan dari pencatatan intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel. Diperlukan laporan *off balance sheet* tentang piutang yang dihapusbukukan namun secara yuridis-formil belum dihapus, dan atau belum diberitahukan kepada pihak berutang serta masih harus terus ditagih secara intensif.

4.6.4 Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian piutang yang timbul karena peraturan perundang-undangan merupakan tagihan yang harus dilunasi oleh para wajib bayar pada periode berjalan tahun dan disajikan di neraca sebagai Aset Lancar.

Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Jumlah penyisihan piutang disajikan sebagai pengurang dari akun piutang (*contra account*) dan disajikan di Neraca, sebagai unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan.

Penyajian piutang dan tagihan yang berasal dari pemberian pinjaman, jual beli, pemberian jasa, dan kemitraan disajikan dalam neraca sebagai Aset Lancar atau Aset Lainnya sesuai dengan tanggal jatuh temponya.

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
- 2) Rincian jenis-jenis, dan saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;



- 3) Perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih;
- 4) Penjelasan atas penyelesaian piutang;
- 5) Jaminan atau sita jaminan jika ada; dan
- 6) Informasi tentang Piutang Pajak yang masih dalam upaya hukum (sengketa) oleh Wajib Pajak, bila ada.

4.7 Kebijakan Akuntansi Beban dibayar dimuka

4.7.1 Definisi

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban atau keperluan yang kemanfaatannya dirasakan dalam tahun buku mendatang, seperti pembayaran sewa, premi asuransi, dan sebagainya. Pengeluaran tersebut belum merupakan biaya dalam tahun buku berjalan sehingga dicatat sebagai Aset Lancar.

4.7.2 Pengakuan

Beban dibayar dimuka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

4.7.3 Pengukuran

Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan sejumlah tagihan atau premi dan manfaatnya belum dinikmati pada periode tahun berjalan.

4.7.4 Penyajian dan Pengungkapan

Beban dibayar dimuka disajikan dalam Neraca sebagai bagian dari Aset Lancar.

4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan

4.8.1 Definisi

Mengacu pada paragraf 8 PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berupa:

- 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
- 2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Daerah.

Adapun beberapa jenis persediaan, yaitu:

- 1) Persediaan berdasarkan sifat pemakaiannya terdiri dari:
 - a) Barang pakai habis;
 - b) Barang tak habis pakai; dan
 - c) Barang bekas dipakai.
- 2) Berdasarkan bentuk dan jenisnya, persediaan dapat terdiri dari:
 - a) Barang konsumsi;
 - b) Amunisi;
 - c) Bahan untuk pemeliharaan;



- d) Suku cadang;
- e) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
- f) Pita cukai dan leges;
- g) Bahan baku;
- h) Barang dalam proses/setengah jadi; dan
- i) Semua pengadaan barang yang akan dijual/diserahkan pada masyarakat baik berupa Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

4.8.2 Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:

- 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga dapat diverifikasi dan bersifat netral.
- 2) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

4.8.3 Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
- 2) Biaya perolehan persediaan hanya meliputi harga pembelian.
- 3) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- 4) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau rampas.

4.8.4 Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar

Persediaan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan berupa:

- 1) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah yang digunakan dalam pengukuran persediaan
- 2) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- 3) Penjelasan atas selisih antara pencatatan dengan hasil inventarisasi fisik; dan
- 4) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.9 Kebijakan Akuntansi Investasi

4.9.1 Definisi

Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.



1) Investasi jangka pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Karakteristik investasi jangka pendek adalah:

- a) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- b) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
- c) Berisiko rendah.

Investasi jangka pendek, terdiri dari:

- a) Deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*); dan
- b) Pembelian Surat Berharga Negara (SBN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) oleh pemerintah pusat.

2) Investasi jangka panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasi dibagi menjadi 2 (dua):

a) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, artinya investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi permanen meliputi:

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/internasional dan badan lainnya; dan
- (2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

b) Investasi Non Permanen

Investasi Non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi non permanen meliputi:

- (1) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- (3) Dana yang disisihkan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan
- (4) Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian.

4.9.2 Pengakuan

Investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

- 1) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah.
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).



4.9.3 Pengukuran

Pengukuran untuk investasi jangka pendek adalah sebagai berikut:

- 1) Beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Untuk jenis investasi yang seperti ini, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- 2) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah dengan komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- 3) Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.
- 4) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- 5) Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang rupiah sebesar kurs tengah bank sentral pada tanggal pelaporan.

Sedangkan pengukuran untuk investasi jangka panjang adalah sebagai berikut:

- 1) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- 2) Investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
- 3) Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- 4) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi diakui sebesar nilai wajar aset yang diperoleh. Jika nilai wajar aset yang diperoleh tidak tersedia, nilai investasi diakui sebesar nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai buku aset yang diserahkan apabila tidak diketahui nilai wajarnya.
- 5) Nilai perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- 6) Diskonto atau premium pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut. Diskonto atau premium merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat (*carrying value*) investasi tersebut. Amortisasi diskonto atau premium akan mengurangi diskonto atau premium. Amortisasi diskonto atau premium akan diakui sebagai pengurang atau penambah pendapatan bunga dalam laporan operasional. Pendapatan bunga LRA tidak dipengaruhi oleh amortisasi diskonto atau premium.

4.9.4 Penyajian dan Pengungkapan

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada LRA dan LO. Transaksi



pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUD, dan tidak dilaporkan dalam LRA. Keuntungan atau kerugian saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam LO dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA.

Sedangkan untuk investasi jangka panjang disajikan pada neraca menurut jenisnya, baik yang bersifat non permanen maupun yang bersifat permanen. Investasi non permanen yang diragukan tertagih/terrealisasi disajikan sebagai pengurang investasi jangka panjang non permanen. Investasi nonpermanen yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi menjadi bagian lancar investasi nonpermanen pada aset lancar.

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah berkaitan dengan investasi jangka pendek, antara lain:

- 1) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah untuk penentuan nilai investasi jangka pendek;
- 2) Jenis-jenis investasi;
- 3) Perubahan harga pasar;
- 4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut; Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
- 5) Perubahan pos investasi.

Sedangkan hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah berkaitan dengan investasi jangka panjang, antara lain:

- 1) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah untuk penentuan nilai investasi.
- 2) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen.
- 3) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang.
- 4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut.
- 5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya.
- 6) Perubahan pos investasi.
- 7) Penjelasan perhitungan penyisihan atas investasi non permanen.

4.10 Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

4.10.1 Definisi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- 1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- 2) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).

Termasuk dalam kategori properti investasi antara lain:

- 1) Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya dimasa depan untuk digunakan sendiri atau dijual dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka peningkatan nilai.



- 3) Bangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.
- 4) Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki pemerintah daerah tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.
- 5) Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang dimasa depan digunakan sebagai properti investasi.

Tidak termasuk dan bukan merupakan bagian dari definisi properti investasi aset-aset sebagai berikut:

- 1) Properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan dan/atau pengembangan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Properti yang masih dalam proses pembangunan dan/atau pengembangan atas nama pihak ketiga.
- 3) Properti yang digunakan sendiri termasuk diantaranya properti yang dikuasai untuk digunakan dimasa depan sebagai properti yang digunakan sendiri.
- 4) Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan.
- 5) Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa dibawah harga pasar, misalnya pemerintah daerah membangun apartemen atau rumah susun yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa dibawah harga pasar.
- 6) Properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.

4.10.2 Pengakuan

Properti investasi diakui sebagai aset jika:

- 1) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- 2) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Dalam menentukan suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Kepastian bahwa entitas akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut.

Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal/saat perolehan.

4.10.3 Pengukuran

Pengukuran Saat Awal Perolehan

- 1) Properti Investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan, termasuk didalamnya biaya transaksi. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
- 2) Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian, biaya transaksi, dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.
- 3) Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:
 - a) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);



- b) Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
- c) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

- 1) Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- 2) Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang mengatur tentang Penyusutan Aset Tetap.
- 3) Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
- 4) Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- 5) Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan.
- 6) Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (*costs and values*) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (*rolling basis*) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.
- 7) Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.
- 8) Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas.

Alih Guna Ke dan Dari Properti Investasi

- 1) Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
 - a) dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
 - b) dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
 - c) berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
 - d) dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer/ direklasifikasi dari persediaan menjadi properti investasi.
- 2) Penggunaan properti oleh pemerintah daerah dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Misal, pemerintah daerah dapat memutuskan untuk menggunakan bangunan yang saat ini diklasifikasikan sebagai properti investasi atau menyewakan kepada pihak ketiga bangunan yang saat ini digunakan untuk tujuan administratif. Dalam contoh pertama, properti



investasi dialihgunakan menjadi aset tetap. Dalam contoh kedua, aset tetap dialihgunakan menjadi properti investasi.

- 3) Entitas mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan jika terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual. Jika entitas memutuskan untuk melepas Properti investasi tanpa dikembangkan, maka entitas tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan.
- 4) Demikian juga jika entitas mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti investasi.
- 5) Entitas dapat secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai Properti investasi. Jika pemerintah daerah memutuskan bangunan tersebut tetap dapat menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.
- 6) Karena entitas menggunakan metode biaya, alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. Nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialihgunakan.

Pelepasan Properti Investasi

- 1) Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.
- 2) Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.
- 3) Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan dari jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
- 4) Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.
- 5) Entitas mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan properti investasi tersebut.
- 6) Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan, kerusakan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

4.10.4 Penyajian dan Pengungkapan

- 1) Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar dan disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
- 2) Karena sifat pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat menjual apabila kenaikan nilai atas properti



investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang.

4.11 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

4.11.1 Definisi

yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat dan fungsinya dalam kegiatan pemerintah. Aset tetap tersebut dibagi menjadi 6 klasifikasi, yaitu:

- 1) Tanah;
- 2) Peralatan dan Mesin;
- 3) Gedung dan Bangunan;
- 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- 5) Aset Tetap Lainnya; dan
- 6) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

1) Tanah

Tanah yang dimaksud sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin yang termasuk aset tetap mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan (memenuhi batasan nilai satuan minimal kapitalisasi) dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai.

Gedung dan bangunan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan yang termasuk aset tetap adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi dan jaringan tersebut, selain digunakan dalam kegiatan pemerintah, juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Jalan, irigasi dan jaringan yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat umum diklasifikasikan sebagai aset yang menambah nilai aset tetap tempat melekatnya jalan, irigasi atau jaringan dimaksud.

Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon. Jalan, irigasi, dan jaringan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

5) Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap Tanah, Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Gedung dan



Bangunan, Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/ olah raga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap dalam Renovasi.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya. Entitas yang melaksanakan pembangunan aset tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintahan dan/atau pelayanan masyarakat, dalam jangka waktu tertentu, baik yang dilaksanakan dengan membangun sendiri (swakelola) maupun oleh pihak ketiga wajib menerapkan standar akuntansi yang ada.

4.11.2 Pengakuan

Aset Tetap diakui pada saat:

- 1) Manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh;
- 2) Terjadi perpindahan kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum;
- 3) Nilainya dapat diukur secara handal.

Aset secara umum diakui sebagai aset tetap jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- 6) Memenuhi batas minimum nilai kapitalisasi

Batasan minimal kapitalisasi aset tetap Pemerintah Daerah ditetapkan dalam tabel berikut:

JENIS ASET TETAP	Batas Nilai Kapitalisasi
Tanah	Rp1 per unit
Peralatan dan Mesin	> Rp1 juta per unit
Gedung dan Bangunan	
Rehabilitasi	> Rp100 juta per unit
Renovasi/Revitalisasi	Rp1 per unit
Jalan Lingkungan	
Rehabilitasi	> Rp100 juta per unit
Renovasi/Revitalisasi	Rp1 per unit
Jalan Kota	
Peningkatan/Perkerasan	Rp1 per unit
Pengairan (Bangunan Irigasi dan Drainase)	
Pemeliharaan Rutin	-
Perbaikan/Rehabilitasi	Rp1 per unit
Aset Tetap Lainnya	
Buku dan Perpustakaan	≥Rp50 ribu per unit



JENIS ASET TETAP	Batas Nilai Kapitalisasi
Barang Bercorak Kesenian & Kebudayaan	≥Rp500 ribu per unit
Alat-alat Olahraga	≥Rp300 ribu per unit
Hewan Ternak dan Tanaman	≥Rp3,4 juta per unit
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp1 per unit

Perolehan dan pengeluaran setelah perolehan yang memenuhi batas kapitalisasi diakui sebagai belanja modal dan masuk dalam perolehan atau kapitalisasi aset tetap. Sedangkan jika tidak memenuhi batas nilai kapitalisasi diakui sebagai belanja barang dan jasa.

Pemeliharaan atau perbaikan yang diklasifikasikan sebagai aset tetap harus memenuhi kriteria memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi dan peningkatan standar kinerja.

Dalam tabel di atas, yang dimaksud dengan:

- Rehabilitasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula.
 - Renovasi/Revitalisasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.
 - Pemeliharaan rutin bangunan irigasi dan drainase diakui sebagai belanja barang dan jasa.
- Pengakuan atas aset tetap berdasarkan jenis transaksinya, antara lain perolehan, pengembangan, pengurangan serta penghentian dan pelepasan.
- Perolehan adalah suatu transaksi perolehan aset tetap sampai dengan aset tersebut dalam kondisi siap digunakan.
 - Pengembangan adalah suatu transaksi peningkatan nilai aset tetap yang berakibat pada peningkatan masa manfaat, peningkatan efisiensi, peningkatan kapasitas, mutu produksi dan kinerja dan/atau penurunan biaya pengoperasian.
 - Pengurangan adalah suatu transaksi penurunan nilai Aset Tetap dikarenakan berkurangnya volume/nilai Aset Tetap tersebut atau dikarenakan penyusutan.
 - Penghentian dan pelepasan adalah suatu transaksi penghentian dari penggunaan aktif atau penghentian permanen suatu aset tetap.

4.11.3 Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih harus dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih harus diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya.

1) Pengukuran Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan tanah mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, pembayaran honor tim (panitia pengadaan), biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurangan, biaya perjalanan dinas, dan biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pengadaan aset tetap tersebut.

Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi Sertifikat Hak Pengelolaan, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.



Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Aset tetap tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh. Aset tetap tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh. Aset tetap tanah tidak disusutkan.

2) Pengukuran Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya selama masa uji coba, biaya perjalanan, dan biaya lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Peralatan dan mesin yang perolehannya melalui pembuatan, pengukuran nilainya adalah sebagai berikut:

- a) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan, biaya perjalanan dan biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembuatan aset tetap tersebut;
- b) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan, biaya perjalanan dan biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembuatan aset tetap tersebut;

3) Pengukuran Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak antara lain meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama, biaya perjalanan dan biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pengadaan aset tetap tersebut.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama, biaya perjalanan, dan biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

4) Pengukuran Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan, biaya perjalanan, dan biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan



dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan, biaya perjalanan dan biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

5) Pengukuran Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya perjalanan dan biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh dengan cara pembangunan/ pembuatan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan dan biaya perizinan.

Sedangkan biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh dengan cara pembangunan/pembuatan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

6) Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

a) Pengukuran Konstruksi Secara Swakelola

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.

Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Bahan dan upah langsung sehubungan dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- (1) biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- (2) biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- (3) biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- (4) biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- (5) biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi

Bahan tidak langsung dan upah tidak langsung dan biaya overhead lainnya yang dapat diatribusikan kepada kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- (1) asuransi, misalnya asuransi kebakaran;
- (2) biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
- (3) biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi



Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

- b) Pengukuran Konstruksi Secara Kontrak Konstruksi Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi:

- (1) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- (2) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
- (3) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi

Kontraktor meliputi kontraktor utama dan subkontraktor, namun demikian penanggung jawab utama tetap kontraktor utama dan pemerintah selaku pemberi kerja hanya berhubungan dengan kontraktor utama. Pembayaran yang dilakukan oleh kontraktor utama kepada subkontraktor tidak berpengaruh pada pemerintah.

Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai KDP.

Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak. Klaim tersebut tentu akan mempengaruhi nilai yang akan diakui sebagai KDP.

- c) Konstruksi Dibiayai dari Pinjaman

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara yang tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure*, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan. Dengan demikian, biaya bunga tersebut tidak ditambahkan sebagai nilai aset. Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Dalam hal ini termasuk juga konstruksi aset tambahan atas permintaan pemerintah, yang mana aset tersebut



berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula dan harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Untuk bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman. Biaya pinjaman setelah konstruksi selesai disajikan sebagai beban pada Laporan Operasional.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait pengukuran aset tetap adalah sebagai berikut:

1) Komponen Biaya Perolehan

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Apabila terdapat potongan harga (diskon) dan rabat, maka harus dikurangkan dari harga pembelian.

Contoh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan secara langsung dengan aset adalah sebagai berikut:

- a) biaya persiapan tempat;
- b) biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
- c) biaya pemasangan (*installation cost*);
- d) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
- e) biaya konstruksi;
- f) biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (*testing cost*);
- g) biaya kepanitiaian;
- h) biaya *Feasibility Study* (FS) dan *Detail Engineering Design* (DED);

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

2) Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Istilah untuk menyebutkan penambahan tersebut adalah kapitalisasi.

Pemerintah Daerah dalam Kebijakan Akuntansi ini menetapkan batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi (*capitalization thresholds*) dan bersifat seragam untuk seluruh entitas akuntansi/entitas pelaporan di lingkungan Pemerintah Daerah. Batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi (*capitalization thresholds*) tersebut diterapkan secara konsisten dan akan diungkapkan dalam CaLK. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap hanya dapat dikapitalisasikan pada nilai aset jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Pengeluaran tersebut menambah efisiensi;
- b) Pengeluaran tersebut memperpanjang umur aset;
- c) Pengeluaran tersebut meningkatkan kapasitas, kualitas dan volume aset;



- d) Pengeluaran tersebut meningkatkan kapasitas atau mutu produksi;
- e) Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi Aset Tetap/aset lainnya.

Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal (selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut) diakui sebagai beban pengeluaran (expenses) pada periode dimana beban pengeluaran tersebut terjadi.

Beban yang dikeluarkan untuk perbaikan atau pemeliharaan Aset Tetap yang ditujukan untuk memulihkan atau mempertahankan economic benefit atau potensi service atas aset dimaksud dari performa standar yang diharapkan diperlakukan sebagai beban pada saat dikeluarkan/terjadi.

4.11.4 Pertukaran

Suatu aset dapat diperoleh melalui pertukaran suatu aset atau sebagian aset yang tidak serupa dan memiliki nilai wajar yang tidak sama. Biaya perolehan aset tersebut diukur dengan nilai wajar aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas lainnya yang ditransfer/diserahkan. Suatu aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa, memiliki masa manfaat dan nilai wajar yang serupa dicatat sebesar nilai tercatat aset tersebut dan tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui atas transaksi tersebut. Hal ini juga berlaku untuk keadaan dimana suatu aset dilepas dan ditukar dengan kepemilikan aset yang serupa.

Dalam hal aset yang diperoleh memiliki nilai wajar yang sama dengan aset yang dilepas namun demikian terdapat indikasi dari nilai wajar aset yang diterima bahwa aset tersebut masih harus dilakukan perbaikan untuk membawa aset dalam kondisi bekerja seperti yang diharapkan, maka biaya perolehan yang diakui adalah sebesar nilai aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas yang harus dikeluarkan untuk perbaikan aset tersebut.

Aset tetap hasil pertukaran bisa diakui apabila kepemilikan atas aset telah berpindah dan nilai perolehan aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal.

4.11.5 Penyusutan

Aset tetap merupakan komponen aset operasi pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional pemerintahan. Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan atau pemanfaatannya. Oleh karena itu pemerintah daerah harus menyajikan informasi tentang nilai aset tetap secara memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset.

Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang terkait dalam pengelolaan aset tetap adalah informasi mengenai nilai wajar aset. Dalam rangka penyajian wajar atas nilai aset tetap tersebut, pemerintah daerah melakukannya melalui penetapan kebijakan penyusutan.

Penyusutan aset tetap dilakukan untuk:

- a. menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah;
- b. mengetahui potensi Barang Milik Daerah dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu Barang Milik Daerah yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan;
- c. memberikan bentuk pendekatan yang sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau menambahkan nilai aset tetap yang sudah dimiliki.

a) Prasyarat Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin



lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.

Tujuan utama dari penyusutan bukan untuk menumpuk sumber daya bagi pembayaran utang atau penggantian aset tetap yang disusutkan. Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya. Di samping itu penyusutan juga dimaksudkan untuk mengalokasikan beban penyusutan yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan.

Untuk menerapkan penyusutan, prasyarat yang perlu dipenuhi adalah:

(1) Identitas Aset yang kapasitasnya menurun

Aset tetap harus dapat diidentifikasi sehingga dapat dibedakan antara aset tetap yang dapat menurun kapasitas dan manfaatnya dengan aset yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya. Aset yang kapasitas dan manfaatnya menurun adalah peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Sedangkan aset yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya atau bahkan bertambah nilainya adalah tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset tetap yang dapat menurun kapasitas dan manfaatnya akan memerlukan penyesuaian nilai, sehingga perlu disusutkan. Sebaliknya, aset tetap yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya tidak perlu disusutkan.

(2) Nilai yang Dapat Disusutkan

Nilai aset tetap menjadi prasyarat dalam penyusutan. Standar akuntansi menganut nilai historis, sehingga kecuali karena kondisi yang tidak memungkinkan perolehan nilai historis, nilai aset tetap yang diakui secara umum adalah nilai perolehannya. Tanpa mengetahui nilai perolehan aset tetap, maka nilai aset tetap yang dapat disusutkan tidak dapat dihitung.

(3) Masa Manfaat dan Kapasitas Aset Tetap

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi. Ukuran manfaat itu sendiri berbeda-beda. Ada yang dapat diukur dengan indikator yang terkuantifikasi dan ada yang tidak. Untuk aset yang tidak mempunyai unit manfaat yang dapat dihitung dengan spesifik, dipakailah indikator pengganti seperti prakiraan potensi masa manfaat.

Hanya dengan terpenuhinya ketiga prasyarat di atas, penyusutan dapat dihitung. Tanpa prasyarat pertama, maka kedua prasyarat terakhir menjadi tidak relevan. Sedangkan perhitungan tiap metode penyusutan memang membutuhkan kuantifikasi prasyarat kedua dan ketiga. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Seluruh Aset Tetap kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

b) Pengelompokan Aset

Identifikasi aset-aset yang dapat dianggap sebagai aset yang harus disusutkan secara berkelompok dengan kriteria sebagai berikut:

- (1) Aset tersebut diperoleh dalam waktu yang bersamaan dan mempunyai masa manfaat yang sama;
- (2) Manfaat secara teknis suatu aset sangat bergantung pada aset lain (peralatan kesehatan seperti kamera sinar X dan alat pencetakan film sinar X, dan lain-lain);
- (3) Pembelian aset dilakukan secara berpasangan dan harga belinya merupakan keseluruhan harga pasangan (misalnya mesin cetak digital, komputer, dan perangkat lunaknya);



(4) Walaupun pemanfaatannya tidak terlalu bergantung dengan aset lain, tetapi demi kemudahan dan efisiensi biaya administrasi, berbagai aset dapat dikelompokkan karena kedekatan teknik dan konteks pemanfaatannya (misalnya peralatan bedah).

Terhadap aset yang tidak memenuhi kriteria yang dibutuhkan di atas, misalnya gedung dan bangunan, disusutkan secara individual.

c) Nilai yang Dapat Disusutkan

Oleh karena aset tetap milik pemerintah diperoleh bukan untuk tujuan dijual, melainkan untuk sepenuhnya digunakan sesuai tugas dan fungsi instansi pemerintah, maka nilai sisa/residu tidak diakui. Dengan demikian, setiap nilai aset tetap, baik yang bersifat individual maupun kelompok, langsung diakui sebagai nilai yang dapat disusutkan.

Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku semesteran dan tahunan, kecuali untuk penyusutan pertama kali, didasarkan pada nilai buku akhir tahun pembukuan sebelum diberlakukannya penyusutan.

d) Metode Penyusutan

Metode penyusutan yang diterapkan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan nilai/besaran aset yang dapat didepresiasi (*depreciable amount*) secara sistematis sepanjang umur aset adalah metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Rumusan tersebut adalah:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Keunggulan metode garis lurus adalah bahwa perhitungannya mudah. Metode ini cocok dipergunakan untuk Aset Tetap yang penggunaannya dari periode ke periode relatif sama. Berdasarkan metode garis lurus, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan beban penyusutan secara merata selama masa manfaatnya. Persentase penyusutan yang dipakai dalam metode ini dipergunakan sebagai pengali nilai yang dapat disusutkan untuk mendapat nilai penyusutan per tahun.

Penyusutan juga tidak dilakukan terhadap aset yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya berupa:

- (1) Aset tetap dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusannya
- (2) Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan

Dalam hal terjadinya perubahan aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan kesalahan dan pencatuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka penyusutan aset tetap tersebut perlu disesuaikan.

Aset tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya Penyusutan Aset Tetap, dikenakan koreksi Penyusutan Aset Tetap, Koreksi Penyusutan Aset Tetap dicatat sebagai penambah nilai akun Akumulasi Penyusutan dan pengurang nilai ekuitas pada neraca serta sebagai transaksi koreksi pada periode diberlakukannya penyusutan.

e) Hal-hal khusus yang terkait dengan penyusutan

- (1) Pemanfaatan Aset Tetap yang Seluruh Nilainya Sudah Disusutkan Walaupun suatu aset sudah disusutkan seluruh nilainya hingga nilai bukunya menjadi Rp0, mungkin secara teknis aset itu masih dapat dimanfaatkan. Jika hal seperti ini terjadi, aset tetap tersebut tetap disajikan dengan menunjukkan baik nilai perolehan maupun akumulasi penyusutannya. Aset tersebut tetap dicatat dalam kelompok aset tetap yang bersangkutan dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang



telah habis masa penyusutannya dapat dihapuskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Penjualan Aset Tetap yang Telah Disusutkan Seluruhnya Dalam hal terjadi aset tetap yang telah disusutkan seluruhnya dilakukan penjualan, maka hasil penjualan tersebut dicatat sebagai surplus/defisit penjualan aset tetap pada Laporan Operasional.

- (3) Tukar-Menukar Aset Tetap

Tukar menukar aset tetap dapat dilakukan antar pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pertukaran dapat dilakukan atas aset tetap dengan jenis seperti:

- (a) Pertukaran aset yang tidak sejenis

Nilai aset yang diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat aset yang diserahkan setelah disesuaikan dengan jumlah kas yang diserahkan. Artinya nilai perolehan dan akumulasi penyusutan aset tetap yang diserahkan harus diketahui.

- (b) Pertukaran aset tetap yang sejenis

Dalam pertukaran aset tetap yang sejenis tidak diakui adanya laba rugi. Dalam keadaan demikian, nilai aset tetap yang diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat aset yang diserahkan. Akan tetapi tetap masih ada penentuan masa manfaat agar dapat ditentukan penyusutan aset yang diperoleh.

- (4) Perbaikan Aset Tetap yang Menambah Masa Manfaat atau Kapasitas Manfaat

Perbaikan yang dilakukan atas suatu aset tetap dapat menambah masa manfaat atau menambah kapasitas aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran yang dilakukan untuk perbaikan semacam ini disebut pengeluaran modal (*capital expenditure*). Pengeluaran seperti ini akan mempengaruhi nilai yang dapat disusutkan, perkiraan output dan bahkan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Pengeluaran seperti ini ditambahkan ke nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan. Artinya, pengeluaran modal seperti ini ditambahkan pada nilai buku aset tetap yang bersangkutan. Nilai buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan.

- (5) Penyusutan atas Aset Tetap Secara Berkelompok Aset tetap bervariasi dalam bentuk dan nilai. Ada aset tetap yang nilai per jenis sangat besar. Misalnya, gedung berupa rumah atau kantor dengan nilai yang relatif besar. Jalan berupa jalan negara atau jalan provinsi misalnya juga memiliki nilai yang signifikan. Akan tetapi ada juga aset tetap yang jenisnya banyak tetapi nilainya relatif kecil. Misalnya, mesin-mesin kecil seperti kalkulator dan peralatan kantor lainnya.

Menghitung besarnya penyusutan untuk aset tetap yang nilai per unitnya besar dapat dilakukan dengan menghitung penyusutan setiap jenis aset tetap yang bersangkutan. Menghitung besarnya penyusutan setiap aset tetap yang jumlahnya banyak tetapi nilainya relatif kecil sangat merepotkan. Bahkan mungkin biaya yang dikeluarkan lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Untuk itu diperlukan cara yang lebih praktis untuk menghitung besarnya penyusutan jenis aset yang nilainya relatif kecil.

Penghitungan penyusutan untuk aset yang nilainya relatif kecil dapat dilakukan dengan mengelompokkan aset-aset tersebut kemudian menghitung besarnya penyusutan dari kelompok aset tersebut. Kelompok aset tersebut harus memiliki persamaan atribut misalnya masa manfaat yang sama. Dengan adanya persamaan atribut dan maka penyusutan dihitung dengan menerapkan persentase penyusutan dengan metode garis lurus terhadap rata-rata aset tetap yang bersangkutan.



(6) Perhitungan Penyusutan Aset Tetap yang Diperoleh Tengah Tahun

Aset tetap diperoleh pada waktu tertentu di sepanjang tahun. Ada kalanya aset tetap diperoleh awal tahun, pertengahan tahun atau akhir tahun. Permasalahan tersebut di atas dialami khusus untuk aset tetap yang akan disusutkan berdasarkan waktu (masa manfaat). Penentuan besarnya penyusutan dilakukan berdasarkan *cut-off* output.

Untuk menentukan waktu yang akan digunakan dalam perhitungan penyusutan aset yang diperoleh di tengah tahun, Pemerintah Daerah menggunakan pendekatan bulan penggunaan dimana waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut diperoleh atau digunakan.

(7) Perubahan Estimasi dan Konsekuensinya

(a) Umur aset sesungguhnya lebih dari estimasi

Ada kalanya masa manfaat aset tetap lebih lama dari perkiraan dalam menentukan penyusutan. Setelah perkiraan masa manfaat dilalui dan akumulasi penyusutan telah sama dengan nilai perolehannya kadang-kadang aset tetap masih dapat digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa aset tetap yang bersangkutan masih memiliki nilai wajar. Oleh karena nilai yang dapat disusutkan (*depreciable cost*) tidak ada lagi maka atas aset ini tidak dapat dilakukan penyusutan. Mengingat bahwa nilai sisa aset tetap tidak diakui maka nilai perolehan aset tetap dan akumulasi penyusutannya tetap dicantumkan dalam neraca.

(b) Penghentian Penggunaan

Aset tetap disusutkan selama aset tersebut memberikan manfaat atau berproduksi. Ada kalanya suatu aset tidak dapat berproduksi atau tidak digunakan karena berbagai alasan. Oleh karena tidak digunakan maka seharusnya aset yang bersangkutan tidak disusutkan bahkan harus dipindahkan ke kelompok aset lain-lain. Peminjaman ke aset lain-lain dapat dilakukan apabila aset tetap tersebut tidak berproduksi atau tidak digunakan secara permanen. Akan tetapi jika hanya tidak berproduksi sementara aset tetap tersebut tidak dipindahkan ke aset lainlain. Karena Pemerintah Daerah menggunakan metode garis lurus, penyusutan atas aset tetap tersebut tetap dihitung. Hal ini dilakukan dengan alasan aset tetap tersebut tetap mengalami penurunan nilai meskipun tidak digunakan.

(8) Perhitungan Penyusutan Aset Tetap yang Dilepaskan di Tengah Periode Akuntansi

Adakalanya suatu aset tetap dihapuskan dari neraca dikarenakan dijual/dipertukarkan/diserahkan kepada entitas pelaporan lainnya. Permasalahan yang muncul adalah perhitungan beban penyusutannya.

4.11.6 Penghentian dan Pelepasan

PSAP Nomor 7 menyatakan jika Aset Tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK. Sedangkan Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Penghentian suatu aset tetap secara permanen umumnya dilakukan karena:

- Rusak berat, terkena bencana alam/*force majeure*
- Tidak dapat digunakan secara optimal (*idle*)
- Terkena planologi kota
- Kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas
- Penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi



- f) Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam
- g) Pertimbangan teknis
- h) Pertimbangan ekonomis

Salah satu cara untuk melakukan penghentian aset tetap adalah dengan menjual atau menukar aset tetap tersebut. Jika penjualan atau penukaran aset tetap terjadi ketika belum seluruh nilai buku Aset Tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku Aset Tetap terkait diperlakukan sebagai penambah atau pengurang ekuitas. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada LO dan LRA Pemerintah Daerah.

Aset Tetap harus dihapuskan dari laporan keuangan entitas pada saat dilakukan penghapusan atau ketika aset tersebut secara permanen tidak lagi digunakan oleh entitas dan tidak ada lagi manfaat ekonomi atau potensi servis/pelayanan yang dapat diharapkan dan telah diterbitkan Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Barang Milik Daerah.

4.11.7 Penilaian Kembali

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

4.11.8 Aset Tetap yang Berasal dari Hibah/Donasi

Aset tetap yang berasal dari hibah/donasi diakui pada saat diterima oleh pemerintah daerah dan diukur sebesar nilai wajar pada saat perolehannya. Pada saat diterima, aset tetap akan bertambah dan di sisi lain mengakui hibah/donasi tersebut sebagai pendapatan hibah-LO.

4.11.9 Aset Tetap yang berasal dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJS LP)

- (a) Saat penyerahan TJS LP berupa barang dibuat berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh perusahaan penyelenggara TJS LP dengan Sekretaris Daerah atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi.
- (b) TJS LP berupa barang disertai dengan Naskah Perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat jenis, jumlah, dan nilai barang, yang ditandatangani oleh perusahaan penyelenggara TJS LP dengan Sekretaris Daerah atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi.
- (c) Aset tetap yang berasal dari TJS LP diakui pada saat diterima oleh pemerintah daerah dan diukur sebesar nilai wajar pada saat perolehannya. Pada saat diterima, aset tetap akan bertambah dan di sisi lain mengakui hibah/donasi tersebut sebagai pendapatan hibah-LO.

4.11.10 Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian Aset Tetap berdasarkan kepada biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Aset Tetap disajikan pada bagian Aset dalam laporan neraca Pemerintah Daerah.

Besarnya penyusutan setiap tahun disajikan dalam Neraca dan LO. Penyusutan disajikan dalam neraca dengan akun akumulasi penyusutan yang mengurangi nilai perolehan aset tetap. Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui. Sedangkan beban penyusutan disajikan dalam LO.

Selain disajikan dalam neraca, penjelasan tentang aset tetap juga harus dituangkan dalam CaLK. Dalam CaLK harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis Aset Tetap secara umum sebagai berikut:

- 1) Dasar penilaian Aset Tetap yang digunakan;
- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan
 - a) Penambahan;



- b) Pelepasan;
- c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
- d) Mutasi Aset Tetap lainnya.
- 3) Informasi penyusutan, meliputi:
 - a) Nilai penyusutan;
 - b) Metode penyusutan yang digunakan;
 - c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- 4) Dalam hal terjadi pertukaran Aset Tetap, meliputi:
 - a) Pihak yang melakukan pertukaran Aset Tetap;
 - b) Jenis Aset Tetap yang diserahkan dan nilainya;
 - c) Jenis Aset Tetap yang diterima beserta nilainya; dan
 - d) Jumlah hibah selisih lebih dari pertukaran Aset Tetap.
- 5) Informasi lainnya, seperti:
 - a) Eksistensi dan batasan hak milik atas Aset Tetap;
 - b) Kebijakan akuntansi Pemda untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap;
 - c) Jumlah pengeluaran pada pos Aset Tetap dalam konstruksi; dan
 - d) Jumlah komitmen untuk akuisisi Aset Tetap.

4.12 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

4.12.1 Definisi

PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 65 mendefinisikan dana cadangan sebagai dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang di dalamnya mencakup:

- 1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- 2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- 3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
- 4) sumber dana cadangan; dan
- 5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

4.12.2 Pengakuan

Pembentukan dana cadangan akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah. Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

4.12.3 Pengukuran

Dana cadangan dicatat sebesar nilai nominal atas besarnya dana yang disisihkan.

4.12.4 Penyajian dan Pengungkapan

Dana cadangan disajikan dalam neraca dan informasi terkait dana cadangan diungkapkan dalam CaLK.



Adapun informasi yang harus diungkapkan dalam CaLK adalah sumber dana cadangan dan peraturan daerah yang mengatur tentang dana cadangan tersebut.

4.13 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Beberapa aset lainnya antara lain:

- a. Tagihan penjualan angsuran;
- b. Tuntutan ganti rugi;
- c. Kemitraan dengan pihak ketiga;
- d. Aset tak berwujud; dan
- e. Aset lain-lain.

4.13.1 Tagihan Penjualan Angsuran

4.13.1.1 Definisi

Tagihan penjualan angsuran adalah penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan. Dalam lingkungan pemerintah daerah, tagihan penjualan angsuran dapat dilakukan berupa Penjualan Barang Milik Daerah seperti Kendaraan Perorangan Dinas yang dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Wali Kota. Pembayaran penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang kepada:

- 1) Pejabat Daerah/mantan Pejabat Daerah, harus dibayar sekaligus;
- 2) pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri, dapat dibayar secara angsuran paling lama 2 (dua) tahun. Pembayaran dilakukan melalui penyetoran ke RKUD:
 - a) paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya surat persetujuan penjualan, untuk pembayaran sekaligus;
 - b) sesuai mekanisme yang diatur dalam perjanjian antara Pengguna Barang dengan pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri, yang membeli, untuk pembayaran secara angsuran.

4.13.1.2 Pengakuan

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

4.13.1.3 Pengukuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

4.13.1.4 Penyajian dan Pengungkapan

“Tagihan Penjualan Angsuran” disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya”.

Pengungkapan “Tagihan Penjualan Angsuran” dalam CaLK sekurang-kurangnya harus mengungkapkan:

- a) Besaran dan rincian Tagihan Penjualan Angsuran
- b) Informasi lainnya yang penting



4.13.2 Tuntutan Ganti Rugi

4.13.2.1 Definisi

Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Terdapat 3 (tiga) sebab kerugian yang dapat terjadi, yaitu:

- a) Kerugian Daerah yang Disebabkan oleh Bendahara Undang-Undang Perbendaharaan Negara secara tegas mengatakan bahwa setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Dengan adanya penyelesaian kerugian tersebut, Negara dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi. Sehubungan dengan itu, setiap pimpinan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian.

Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh Wali Kota. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran administratif dan/atau pidana.

- b) Kerugian Daerah yang Disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara
Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum atau kelalaian yang dilakukan oleh pegawai tersebut dalam melakukan kewajibannya.

- c) Kerugian Daerah berdasarkan Putusan Pengadilan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah sebagaimana ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terdakwa tindak pidana korupsi dapat dipidana, denda, dapat dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya, secara langsung merugikan keuangan daerah wajib mengganti kerugian tersebut dan setiap pimpinan kepala satuan kerja dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam satuan kerja terjadi kerugian akibat perbuatan manapun.

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan terhadap pegawai negeri bendahara/bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah yang penyelesaian tagihannya di atas 12 bulan.

4.13.2.2 Pengakuan

1. Kerugian Daerah yang Disebabkan oleh Bendahara Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian Daerah yang disebabkan oleh Bendahara diakui di neraca menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan pada saat terbit Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan dari BPK.
2. Kerugian Daerah yang Disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara



3. Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian Daerah yang disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara diakui pada saat terbit SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) dan/atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).
4. Kerugian Daerah berdasarkan Putusan Pengadilan
Suatu peristiwa yang mengakibatkan terjadinya kerugian Daerah berdasarkan putusan pengadilan diakui pada saat terbit keputusan pengadilan yang perkara yang berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht*).

4.13.2.3 Pengukuran

1. Kerugian Daerah yang Disebabkan oleh Bendahara
Pengukuran nilai kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara diukur sebesar Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan dari BPK.
2. Kerugian Daerah yang Disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara
Pengukuran nilai kerugian Daerah yang berasal dari kerugian Daerah karena pegawai bukan bendahara diukur sebesar SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) dan/atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K)
3. Kerugian Daerah berdasarkan Putusan Pengadilan Pengukuran nilai kerugian Daerah yang berasal dari kerugian Daerah karena putusan pengadilan sebesar nilai yang tertera dalam putusan pengadilan yang perkara yang berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht*).

4.13.2.4 Penyajian dan Pengungkapan

Tuntutan ganti rugi disajikan dalam neraca sebagai aset lainnya.

Pengungkapan kerugian Daerah pada CaLK antara lain:

1. Kebijakan akuntansi kerugian Daerah.
2. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - (1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran tagihan TGR;
 - (2) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - (3) Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di daerah atau telah diserahkan penagihannya ke PUPN;
 - (4) Tuntutan ganti rugi/perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
3. Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh Daerah sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan.

4.12.4 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

4.12.4.1 Definisi

Berikut adalah beberapa definisi tentang kemitraan dengan pihak ketiga:

1. Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.
2. Bangun, Guna, Serah - BGS (*Build, Operate, Transfer* - BOT), adalah pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain



tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS.

3. Bangun, Serah, Guna- BSG (*Build, Transfer, Operate* - BTO) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.
4. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
5. Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah Daerah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.

4.12.4.2 Pengakuan

Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan pengakuan kemitraan dengan pihak ketiga adalah sebagai berikut:

1. Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
2. Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama Bangun Guna Serah (BGS), diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
3. Dalam rangka kerja sama pola Bangun Serah Guna (BSG)/*Build Transfer Operate* (BTO), harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah pada saat proses pembangunan selesai.
4. Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
5. Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
6. Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
7. Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari "Aset Lainnya" menjadi "Aset Tetap" sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

4.12.4.3 Pengukuran

Aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/ kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

Dana yang ditanamkan Pemerintah Daerah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.



Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

4.12.4.4 Penyajian dan Pengungkapan

Aset kerjasama/kemitraan disajikan dalam neraca sebagai aset lainnya.

Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan atau gedung/bangunan), sesuai perjanjian, digunakan untuk kegiatan operasional SKPD, maka harus diungkapkan dalam CaLK.

Aset kerjasama/kemitraan selain tanah harus dilakukan penyusutan selama masa kerja sama. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka BGS melanjutkan masa penyusutan aset sebelum direklasifikasi menjadi aset kemitraan. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka BSG adalah selama masa kerjasama.

Atas kemitraan dengan pihak ketiga, CaLK setidaknya memuat informasi sebagai berikut:

1. Klasifikasi aset yang membentuk aset kerjasama.
2. Penentuan biaya perolehan aset kerjasama/kemitraan.
3. Penentuan depresiasi/penyusutan aset kerjasama/kemitraan.

Setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, aset hasil kerjasama disajikan dalam neraca dalam klasifikasi aset tetap.

4.12.5 Aset Tak Berwujud

4.12.5.1 Definisi

Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.

4.12.5.1.1 Kriteria Aset Tak Berwujud

Definisi ATB mensyaratkan bahwa ATB harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan. Masing-masing unsur tersebut diuraikan di bawah ini.

1. Aset non-moneter yang dapat diidentifikasi

Yang dimaksud dengan kriteria ini adalah:

- a. Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas. Oleh karena aset ini dapat dipisahkan atau dibedakan dengan aset yang lain, maka ATB dapat dijual, dipindahtangankan, diberikan lisensi, disewakan, ditukarkan, baik secara individual maupun secara bersama-sama.
- b. Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.



2. Dikendalikan oleh entitas Pemerintah Daerah

Pengendalian merupakan syarat yang harus dipenuhi. Tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset maka sumber daya dimaksud tidak dapat diakui sebagai aset suatu entitas. Suatu entitas disebut "mengendalikan aset" jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan aset ini pada umumnya didasarkan pada dokumen hukum yang sah dari lembaga yang berwenang, namun demikian dokumen hukum ini bukanlah sebagai suatu prasyarat yang wajib dipenuhi karena mungkin masih terdapat cara lain yang digunakan entitas untuk mengendalikan hak tersebut.

3. Mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan Manfaat ekonomis dapat menghasilkan aliran masuk atas kas, setara kas, barang, atau jasa ke pemerintah. Jasa yang melekat pada aset dapat saja memberikan manfaat kepada pemerintah dalam bentuk selain kas atau barang, misalnya dalam meningkatkan pelayanan publik sebagai salah satu tujuan utama pemerintah atau peningkatan efisiensi pelaksanaan suatu kegiatan pemerintah.

4.12.5.1.2 Jenis-jenis Aset Tak Berwujud

ATB yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah dapat dibedakan berdasarkan jenis sumber daya, cara perolehan, dan masa manfaat.

Berdasarkan jenis sumber daya, ATB pemerintah dapat berupa:

1. Software komputer

yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti *flash disk*, *compact disk*, disket, pita, dan media penyimpanan lainnya. Software komputer yang masuk dalam kategori ATB adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini dapat digunakan di komputer lain. Oleh karena itu software komputer sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan merupakan ATB.

2. Lisensi dan *franchise*

Lisensi dapat diartikan memberi izin. Pemberian lisensi dilakukan jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima lisensi, melalui sebuah perjanjian. Dapat juga merupakan pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan. *Franchise* merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.

3. Hak Paten dan Hak Cipta

Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama



waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. (UU No 14 Tahun 2001, Pasal 1, ayat 1).

Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan.

Hak-hak tersebut pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual, pengetahuan teknis, suatu cipta karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu Hak Paten dan Hak Cipta sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan merupakan ATB.

4. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat diakui sebagai ATB.

5. ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya
Film dokumenter, misalkan, dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi pemerintah maupun masyarakat. Hal ini berarti film tersebut mengandung nilai tertentu yang dapat mempunyai manfaat di masa depan bagi pemerintah. Film/Karya Seni/Budaya dapat dikategorikan dalam heritage ATB.

6. ATB dalam Pengerjaan
Suatu kegiatan perolehan ATB dalam pemerintahan, khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional pemerintah. Namun dalam hal ini seperti juga aset tetap, aset ini nantinya juga diniatkan untuk digunakan dalam pelaksanaan operasional pemerintahan, sehingga dapat diakui sebagai bagian dari ATB.

Berdasarkan cara perolehan, ATB dapat berasal dari:

1. Pembelian
Pembelian ATB dapat dilakukan secara terpisah (individual) maupun secara gabungan. Hal ini akan berpengaruh pada identifikasi ATB serta pengukuran biaya perolehan.



2. Pengembangan secara internal
ATB dapat diperoleh melalui kegiatan pengembangan yang dilakukan secara internal oleh suatu entitas. Perolehan dengan cara demikian akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan tentang identifikasi kegiatan yang masuk lingkup riset serta kegiatankegiatan yang masuk lingkup pengembangan yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB sehingga dapat dikapitalisasi menjadi harga perolehan ATB.
3. Pertukaran
ATB dapat diperoleh melalui pertukaran dengan aset yang dimiliki oleh suatu entitas lain.
4. Kerjasama
Pengembangan suatu ATB yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan dapat dilakukan melalui kerjasama oleh dua entitas atau lebih. Hak dan kewajiban masing-masing entitas harus dituangkan dalam suatu perjanjian, termasuk hak kepemilikan atas ATB yang dihasilkan. Entitas yang berhak sesuai ketentuan yang akan mengakui kepemilikan ATB yang dihasilkan, sementara entitas yang lain cukup mengungkapkan hak dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya atas ATB tersebut.
5. Donasi/hibah
ATB, dapat berasal dari donasi atau hibah, misalnya suatu perusahaan software memberikan software kepada suatu instansi pemerintah untuk digunakan tanpa adanya imbalan yang harus diberikan.
6. Warisan Budaya/Sejarah (*intangible heritage assets*). Pemerintah dapat memiliki ATB yang berasal dari warisan sejarah, budaya, atau lingkungan masa lalu. Aset ini pada umumnya dipegang oleh instansi pemerintah dengan maksud tidak semata-mata untuk menghasilkan pendapatan, namun ada alasan-alasan lain kenapa aset ini dipegang oleh pemerintah, misalnya karena mempunyai nilai sejarah dan untuk mencegah penyalahgunaan hak atas aset ini oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Suatu entitas harus mengidentifikasi dan mengakui aset warisan ini sebagai ATB jika definisi dan kriteria pengakuan atas ATB telah terpenuhi.

Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. TB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*)
Umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek.
2. ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*)
Dari berbagai faktor relevan yang ada, ATB tertentu diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas. Oleh karena itu, atas ATB yang mempunyai umur manfaat yang tak terbatas, harus dilakukan revaluasi secara berkala untuk melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat.



4.12.5.2 Pengakuan

Untuk dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud maka suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Definisi ATB;
2. Kriteria pengakuan.

Persyaratan pengakuan tersebut berlaku untuk pengeluaran pada saat pengakuan awal dan pengeluaran biaya setelah pengakuan awal. Pada pengakuan awal ATB akan diakui sebesar biaya perolehan untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas. Nilai wajar digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran. Pengeluaran setelah pengakuan awal diakui sebesar biaya yang dikeluarkan untuk menambah dan mengganti ATB yang memenuhi kriteria pengakuan ATB.

4.12.5.2.1 Pengakuan Aset Tak Berwujud Yang Diperoleh Secara Internal Untuk menentukan apakah perolehan internal ATB memenuhi kriteria untuk pengakuan, perolehan ATB dikelompokkan dalam 2 tahap, yaitu:

1. Tahap penelitian atau riset

Pengeluaran untuk kegiatan penelitian/riset (atau tahap penelitian/ riset dari aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi. Dalam tahap ini, pemerintah tidak/belum dapat membuktikan bahwa ATB telah ada dan akan menghasilkan manfaat ekonomi masa datang. Oleh karenanya, pengeluaran ini diakui sebagai beban biaya pada saat terjadi.

Contoh-contoh dari kegiatan penelitian/riset adalah:

- a. Kegiatan/aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan baru (*new knowledge*);
- b. Pencarian, evaluasi dan seleksi akhir untuk penerapan atas penemuan penelitian;
- c. pengetahuan lainnya;
- d. Pencarian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem ataupun layanan;
- e. Formula/rumus, rancangan, evaluasi dan seleksi akhir atas alternatif yang tersedia untuk peningkatan material, peralatan, produk, proses, sistem dan layanan yang baru atau yang diperbaiki.

2. Tahap pengembangan

ATB yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan pengembangan satu kegiatan internal) harus diakui jika, dan hanya jika, pemerintah dapat memperlihatkan seluruh kondisi dibawah ini, yaitu adanya:

- a. Kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
- b. Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;
- c. Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut;



- d. Manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa datang;
- e. Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan ATB tersebut;
- f. Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.

Contoh aktivitas-aktivitas pada tahap pengembangan adalah:

- (a) Desain, konstruksi dan percobaan sebelum proses produksi prototipe atau model;
- (b) Desain, konstruksi dan pengoperasian kegiatan percobaan proses produksi yang belum berjalan pada skala ekonomis yang menguntungkan untuk produksi komersial;
- (c) Desain, konstruksi dan percobaan beberapa alternatif pilihan, untuk bahan, peralatan, produk, proses, sistem atau pelayanan yang sifatnya baru atau sedang dikembangkan.

4.12.5.2.2 Penelitian dibiayai instansi lain

Sesuai dengan konsep belanja dalam pemerintahan dan konsep entitas maka entitas yang memiliki anggaran adalah yang berhak mencatat aset apabila dari belanja yang dikeluarkan dari anggaran tersebut menghasilkan ATB walaupun penelitiannya dilakukan oleh lembaga lain. Namun demikian instansi pemerintah yang memberikan dana tidak dapat serta merta mengakui ATB tersebut, kecuali jika memenuhi karakteristik ATB dan memenuhi kriteria pengakuan. ATB yang berasal dari Penelitian dan Pengembangan harus sesuai dengan kriteria pengakuan ATB dan memenuhi kondisi pengakuan untuk biaya pada tahap pengembangan, bukan biaya dalam tahap penelitian.

Jika pemerintah tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dengan tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB, pemerintah harus memperlakukan seluruh pengeluaran atas aktivitas/ kegiatan tersebut sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset.

4.12.5.2.3 Perlakuan Untuk Hak Paten

Hak Paten adalah salah satu jenis ATB yang kemungkinan dapat dimiliki oleh Pemerintah yang perolehannya dapat berasal dari hasil kajian dan pengembangan atas penelitian yang dilakukan pemerintah atau pendaftaran atas suatu kekayaan/warisan budaya/sejarah yang dimiliki. Hak Paten yang diperoleh untuk melindungi kekayaan/warisan budaya/sejarah, maka atas aset ini secara umum diakui pada saat dokumen hukum yang sah atas Hak Paten tersebut telah diperoleh. Namun untuk mengantisipasi lamanya jangka waktu terbitnya dokumen tersebut, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftarannya, kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam CaLK.

Dalam praktik selama ini di terdapat beberapa perlakuan pencatatan terhadap Hak Paten dari hasil kajian/pengembangan yang memerlukan perlakuan khusus. Untuk Hak Paten yang masih dalam proses pendaftaran



dan dokumen sumber belum terbit, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftaran ditambah nilai Hasil Kajian/ Pengembangan yang telah dikapitalisasi sebagai ATB, kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam CaLK.

4.12.5.2.4 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu ATB yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai ATB dalam pengerjaan (*Intangible Asset-Work In Progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan.

4.12.5.3 Pengukuran

Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

4.12.5.3.1 Pengukuran pada saat perolehan

Secara umum, ATB pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh dengan cara selain pertukaran diukur dengan nilai wajar.

1. Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara eksternal

a. Pembelian

Harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu ATB akan mencerminkan kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang diharapkan di masa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut. Dengan kata lain, entitas pemerintah mengharapkan adanya manfaat ekonomi ataupun jasa potensial yang mengalir masuk ke dalam entitas.

ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Bila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai untuk masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian biasanya dapat diukur secara andal, khususnya bila berkenaan dengan pembelian melalui pertukaran kas atau aset keuangan lainnya.

Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari:

- (1) Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- (2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:



- (3) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- (4) Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- (5) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Contoh dari biaya yang bukan merupakan unsur ATB adalah:

- (1) Biaya untuk memperkenalkan produk atau jasa baru (termasuk biaya advertising dan promosi);
- (2) Biaya untuk melaksanakan operasi pada lokasi baru atau sehubungan dengan pemakai (user) baru atas suatu jasa (misalnya biaya pelatihan pegawai);
- (3) Biaya administrasi dan *overhead* umum lainnya.

Biaya-biaya perolehan ATB meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menjadikan aset tersebut dalam kondisi siap untuk beroperasi seperti yang diinginkan oleh manajemen. Oleh karenanya, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB bukan merupakan bagian dari perolehan ATB.

4.12.5.3.2 Pertukaran

Perolehan ATB dari pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.

4.12.5.3.3 Kerjasama

ATB dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku.

4.12.5.3.3 Donasi/hibah

ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

4.12.5.3.4 Pengembangan secara internal

ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan.

Pengeluaran atas unsur ATB yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban pada suatu periode tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB periode berikutnya.

ATB yang dihasilkan dari pengembangan software komputer yang memerlukan tiga tahap sebagaimana dimaksud dalam Bab III Aspek



Pengakuan mengenai perlakuan khusus untuk *software* komputer, maka tahap yang dapat dilakukan kapitalisasi adalah tahap pengembangan aplikasi, bila telah memenuhi kriteria dimaksud dikapitalisasi dan dinilai sebesar pengeluarannya.

4.12.5.3.5 Aset budaya/bersejarah tak berwujud (*intangible heritage assets*)

ATB yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

4.12.5.3.5 Pengukuran Setelah Perolehan

Sifat alamiah ATB, dalam banyak kasus, adalah tidak adanya penambahan nilai terhadap ATB tertentu atau penggantian dari sebagian ATB dimaksud. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan dari ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi ATB dan kriteria pengakuannya. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai beban operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud. Biaya yang telah dibebankan tidak dapat diakui sebagai ATB.

4.12.5.3.6 Amortisasi

Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap tidak berwujud yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Nilai amortisasi untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap tidak berwujud dalam neraca dan beban amortisasi dalam laporan operasional.

Metode Amortisasi yang digunakan dipilih berdasarkan pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode lainnya. Amortisasi yang dibebankan setiap periode disajikan dengan menyesuaikan akun aset tidak berwujud dan akun diinvestasikan pada aset lainnya. Metode penyusutan yang digunakan yaitu dengan metode garis lurus.

Metode garis lurus merupakan metode yang paling umum digunakan dalam amortisasi. Berdasarkan metode garis lurus, amortisasi nilai aset tidak berwujud dilakukan dengan mengalokasikan beban amortisasi secara merata selama masa manfaatnya.

Masa manfaat aset tidak berwujud yang dapat diamortisasi harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi



sebelumnya, amortisasi periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Masa manfaat untuk menghitung tarif amortisasi untuk masing-masing kelompok aset tidak berwujud adalah sebagai berikut:

MASA MANFAAT BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TIDAK BERWUJUD

URAIAN	TAHUN
Lisensi	10
Franchise	5
Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.I	70
Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.II	50
Hak Cipta Karya Seni Terapan	25
Hak Paten Sederhana	10
Paten Biasa	20
Software Komputer	4
Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan	50
Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran	20
Merek	10
Desain Industri	10
Rahasia Dagang	10
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

4.12.5.3.7 Penghentian dan Pelepasan

ATB diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah. Namun demikian, pada saatnya suatu ATB harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Pelepasan aset tak berwujud mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah.

Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena



berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya. Entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai dengan ketentuan berlaku. Pada saat penghapusan, ATB dihentikan dari pencatatan dan diakui kerugian penghapusan ATB sebesar nilai tercatat neto.

Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai kerugian atau keuntungan non operasional. Penerimaan kas dari penjualan dicatat dan dilaporkan sebagai pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran. Penghentian ATB harus diungkapkan dalam CaLK.

4.12.5.4 Penyajian dan Pengungkapan

Aset Tidak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari "Aset Lainnya".

Amortisasi aset tidak berwujud dibebankan sebagai penambah beban kegiatan operasional. Penyajian beban amortisasi digabung pada pos beban penyusutan dalam Laporan Operasional.

Laporan keuangan harus mengungkapkan hal-hal untuk setiap golongan aset tak berwujud, dengan membedakan antara aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tak berwujud lainnya

4.12.6 Aset lain-lain

4.12.6.1 Definisi

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga. Dalam kebijakan ini yang dimaksud aset lain-lain adalah aset tetap yang diberhentikan penggunaan oleh pemerintah sehingga direklasifikasi menjadi aset lain-lain. Pemberhentian aset tetap dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, atau penyertaan modal).

4.12.6.2 Pengakuan

Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

4.12.6.3 Pengukuran

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lainlain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundangundangan.

4.12.6.4 Penyajian dan Pengungkapan

Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dalam neraca dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.



Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

4.13 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

4.13.1 Definisi

Mengacu pada PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban Pemerintah Daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan waktu jatuh temponya, kewajiban dibagi menjadi dua yaitu kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang jatuh temponya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Kewajiban jangka pendek di SKPKD terdiri dari utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, utang beban, dan utang jangka pendek lainnya. Sedangkan kewajiban jangka pendek di SKPD terdiri dari utang perhitungan pihak ketiga (PFK), pendapatan diterima dimuka, utang beban dan utang jangka pendek lainnya.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang adalah utang atau kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Disamping itu kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban panjang jika:

- Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
- Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang
- Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban jangka panjang di Pemerintah Daerah hanya terdapat pada SKPKD. Adapun kewajiban jangka panjang di SKPKD yaitu utang dalam negeri, utang luar negeri dan utang jangka panjang lainnya.

4.13.2 Pengakuan

Secara umum kewajiban Pemerintah Daerah diakui pada saat:

- Dana pinjaman diterima oleh pemerintah; atau
- Dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan pemerintah daerah; atau
- Pada saat kewajiban timbul

Pengakuan Kewajiban Pemerintah Daerah:

1) Utang Jangka Pendek

a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atau bendahara pengeluaran SKPD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu.



b) Utang Belanja/Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat terdapat klaim yang sah dari pihak ketiga, yang biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan (*invoice*) kepada pemerintah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah. Utang kepada pihak ketiga juga diakui apabila pada akhir tahun masih terdapat dana yang berasal dari SPM-LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum diserahkan kepada Pihak yang berhak.

Dalam transaksi pembelian jasa, utang diakui pada saat jasa/bagian jasa diserahkan sesuai perjanjian tetapi pada tanggal pelaporan belum dibayar. Dalam hal kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, utang diakui pada saat sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Utang Belanja Bagi Hasil dan Utang Belanja Bantuan Keuangan diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c) Utang Bunga

Utang bunga, sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

d) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).

e) Uang Muka dari Kas Umum Daerah

Uang muka dari kas daerah diakui pada saat bendahara pengeluaran menerima UP dari Kas Umum Daerah.

f) Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka dapat diakui dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kewajiban atau pendekatan pendapatan. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan.

2) Utang Jangka Panjang

a) Utang Dalam Negeri - Non Perbankan

(1) Obligasi

Utang Obligasi Daerah diakui pada saat kewajiban timbul yaitu pada saat terjadi transaksi penjualan.

Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi. Obligasi yang telah jatuh tempo tetapi belum dilunasi diakui sebagai kewajiban jangka pendek.



Penerbitan obligasi memerlukan biaya yang terkait dengan pencetakan dokumen, jasa konsultan, jasa hukum, dan jenis biaya lainnya. Jika dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi digunakan untuk membangun aset tetap tertentu, maka biaya - biaya penerbitan obligasi dikapitalisasi dalam nilai aset tetap tersebut. Akan tetapi, jika tidak dapat diatribusikan pada aset tetap tertentu, maka biaya penerbitan tersebut diakui sebagai biaya ditangguhkan yang akan diamortisasi selama umur obligasi yang bersangkutan.

(2) Utang Pembelian Cicilan

Sehubungan dengan utang pembelian cicilan, baik yang mengandung bunga secara eksplisit maupun bunga secara tersamar, utang diakui ketika barang yang dibeli telah diserahkan kepada pembeli dan perjanjian utang selanjutnya secara legal telah mengikat para pihak, yaitu ketika perjanjian utang ditandatangani oleh pihak penjual yang sekaligus bertindak selaku kreditur dan pembeli yang juga menjadi debitur.

(3) Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.

b) Utang Dalam Negeri - Perbankan

Utang dalam negeri-perbankan diakui pada saat pinjaman dari lembaga perbankan diterima pada rekening kas daerah. Biaya-biaya terkait dengan pengurusan pinjaman diakui pada saat terutang yaitu pada saat timbulnya kewajiban berdasarkan kontrak atau kesepakatan.

4.13.3 Pengukuran

Secara umum, kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah Daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

1) Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Ketika Pemerintah Daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.

2) Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga atas utang Pemerintah Daerah dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

3) Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode harus dicatat sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

4) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

5) Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.



Kewajiban atau utang jangka panjang Pemerintah Daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

1) Utang yang tidak diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari World Bank.

2) Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

Pengukuran Kewajiban Pemerintah Daerah:

1) Utang Jangka Pendek

a) Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga dinilai sebesar kewajiban entitas pemerintah atas barang/jasa yang belum dibayar sesuai kesepakatan/perjanjian atau sebesar dana yang belum diserahkan kepada yang berhak. Dalam hal kesepakatan atau perjanjian menyebutkan syarat pembayaran (*terms of payment*) dengan diskon tertentu untuk pembayaran dalam jangka waktu tertentu (misalkan 2/10, n/30) maka nilai utang kepada pihak ketiga ditentukan sebesar jumlah utang dengan atau tanpa memperhitungkan diskon tergantung pada kebijakan akuntansi pembayaran utang yang ditetapkan.

Dalam hal pihak ketiga/kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, dan 4 sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diserahkan tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan, maka transaksi tersebut akan diakui sebagai utang kepada pihak ketiga sebesar jumlah yang belum dibayar.

b) Utang Bunga

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

c) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUN/BUD belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

d) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

e) Uang Muka dari Kas Umum Daerah

Nilai yang dicantumkan di neraca sebesar saldo uang muka yang belum disetorkan/dipertanggungjawabkan ke kas daerah sampai dengan tanggal neraca.



f) Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

2) Utang Jangka Panjang

a) Utang Dalam Negeri - Non Perbankan

(1) Obligasi

Utang Obligasi Daerah dicatat sebesar nilai nominal/ par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi Daerah tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo. Dalam hal utang obligasi yang pelunasannya diangsur, aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (*carrying amount*) utang tersebut. Apabila surat utang obligasi dijual di bawah nilai par (dengan diskon), maupun di atas nilai par (dengan premium), maka nilai pokok utang tersebut adalah sebesar nilai nominalnya atau nilai jatuh temponya, sedangkan diskon atau premium dikapitalisasi untuk diamortisasi sepanjang masa berlakunya surat utang obligasi. Amortisasi premi atau diskonto dapat menggunakan metode garis lurus atau metode bunga efektif. Apabila surat utang obligasi diterbitkan dengan denominasi valuta asing, maka kewajiban tersebut perlu dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

(2) Utang Pembelian Cicilan

Utang pembelian cicilan, baik yang bunganya dinyatakan secara eksplisit maupun yang bunganya disamakan dalam bentuk cicilan anuitas, dicatat sebesar nilai nominal.

Khusus mengenai utang cicilan anuitas, setiap pelunasan harus dipecah menjadi unsur pelunasan pokok utang dan pelunasan bunga.

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

(3) Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSK sebesar nilai yang belum dibayar.

b) Utang Dalam Negeri - Perbankan

Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri-perbankan adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman dan disetorkan ke kas daerah. Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.



4.13.4 Penyajian dan Pengungkapan

Kewajiban jangka pendek dan jangka panjang disajikan di bagian kewajiban dalam neraca. Selain itu, informasi mengenai kewajiban juga harus diungkapkan dalam CaLK Pemerintah Daerah.

Adapun hal-hal yang harus diungkapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan (dirinci) berdasarkan pemberi pinjaman;
- 2) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- 3) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- 4) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
- 5) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - a) Pengurangan pinjaman;
 - b) Modifikasi persyaratan utang;
 - c) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - d) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - e) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - f) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- 6) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- 7) Biaya pinjaman:
 - a) Perlakuan biaya pinjaman;
 - b) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - c) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

4.14 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

4.14.1 Definisi

Mengacu pada PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Dalam akuntansi berbasis akrual, pemerintah daerah hanya menyajikan dua jenis pos Ekuitas, yaitu Ekuitas dan Ekuitas untuk Dikonsolidasikan.

Ekuitas diklasifikasikan ke dalam:

- 1) Ekuitas Awal;
- 2) Surplus/Defisit LO;
- 3) Koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas; dan
- 4) Ekuitas Akhir

Saldo akhir Ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Sedangkan saldo pos Ekuitas untuk Dikonsolidasikan didapat dari transaksi timbal balik antara Entitas Pelaporan (PPKD) dengan Entitas Akuntansi (SKPD dan SKPKD) yang berupa akun Rekening Koran (R/K) pada masing-masing entitas.

Pada penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), pos Ekuitas untuk Dikonsolidasikan tidak muncul karena telah dilakukan eliminasi antara akun R/K PPKD dan akun R/K masing-masing SKPD pada saat proses konsolidasi antara entitas pelaporan dengan entitas akuntansi.

Ekuitas disajikan pada Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.



4.14.2 Pengakuan

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

4.14.3 Pengukuran

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

4.14.4 Penyajian dan Pengungkapan

Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan CaLK.

4.15 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

4.15.1 Definisi

1) Pendapatan LO

Mengacu pada PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

2) Pendapatan-LRA

Mengacu pada PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LRA terdiri dari pendapatan-LRA untuk SKPKD dan pendapatan-LRA untuk SKPD. Pendapatan-LRA di SKPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, LainLain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional. Pendapatan-LRA di SKPD meliputi Pendapatan Asli Daerah.

4.15.2 Pengakuan

1) Pendapatan LO

Pendapatan-LO diakui pada saat hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Secara rinci, Pendapatan- LO diakui pada saat:

- a) Timbulnya hak atas pendapatan;
- b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Pengakuan pendapatan LO dapat terjadi di SKPKD dan SKPD

2) Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat penerimaan Rekening Kas Umum Daerah atau entitas lainnya di bawah pemerintah daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a) Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
- b) Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.



- c) Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
- d) Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
- e) Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

4.15.3 Pengukuran

1) Pendapatan LO

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

2) Pendapatan LRA

Akuntansi pendapatan-LRA Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya berulang (*recurring*) dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan (Pendapatan) yang bersangkutan.

Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan (pendapatan) yang bersangkutan. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening belanja tidak terduga.

4.15.4 Penyajian dan Pengungkapan

1) Pendapatan-LO

Pendapatan LO disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam laporan operasional dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam CaLK. Berikut adalah contoh penyajian pendapatan LO dalam laporan operasional:

Hal-hal yang perlu diungkapkan dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengenai Pendapatan-LO antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan, pengukuran Pendapatan-LO;
- b) Rincian Pendapatan-LO.

2) Pendapatan LRA

Pendapatan disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam CaLK. Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, sangat dianjurkan untuk diungkapkan dalam CaLK.



4.16 Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja

4.16.1 Beban

4.16.1 Beban

4.16.1.1 Definisi

PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8 mendefinisikan beban sebagai penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (menurut kelompok dan jenis beban) yang meliputi:

- a) Beban Operasi, terdiri atas:
 - (1) Beban Pegawai
 - (2) Beban Barang dan Jasa
 - (3) Beban Bunga
 - (4) Beban Subsidi
 - (5) Beban Hibah
 - (6) Beban Bantuan Sosial
- b) Beban Penyisihan Piutang
- c) Beban Penyusutan dan Amortisasi
- d) Beban Transfer
- e) Beban Tak Terduga

4.16.1.2 Pengakuan

Beban diakui pada saat:

- a) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.
- b) Terjadinya konsumsi aset.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset dalam Pemerintah Daerah adalah saat terjadinya:

 - (1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/atau
 - (2) konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.
- c) Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Daerah.



4.16.1.3 Pengukuran

a) Beban Pegawai

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti Dokumen Kepegawaian, Daftar Gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran Daerah kepada pegawai dimaksud.

b) Beban Barang dan Jasa

(1) Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga.

(2) Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas

Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga yang telah mendapatkan persetujuan dari PA/KPA.

c) Beban Bunga

Beban bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi atau jatuh tempo seiring dengan berjalannya waktu. Besaran beban bunga biasanya diukur sebagai besaran persentase tertentu atas pokok utang serta periode pembayaran bunga utang serta hal lain jika ada, sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pemberian utang yang telah disepakati sebelumnya. Pada prinsipnya metode pengukuran besaran pengenaan bunga biasanya tercakup pada pasal dalam naskah perjanjian pemberian pinjaman untuk mencegah dispute/perselisihan di kemudian hari.

d) Beban Subsidi

Pengukuran beban subsidi didasarkan pada nilai nominal sesuai dengan dokumen tagihan yang diajukan pihak ketiga yang telah mendapatkan persetujuan dari pejabat perbendaharaan.

e) Beban Hibah

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi.

f) Beban Bantuan Sosial

Beban bansos diukur sebesar nilai bantuan sosial berupa uang/barang/jasa yang telah diserahkan kepada masyarakat penerima bansos.

Pemerintah Daerah dalam pengukuran Beban Bantuan Sosial perlu memperhatikan peraturan perundangundangan terkait dengan penyaluran Bantuan Sosial. Penyaluran Bantuan Sosial pada praktiknya sesuai peraturan teknis yang ditetapkan pemerintah dapat disalurkan langsung oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada penerima bantuan sosial atau melalui lembaga penyalur yang ditetapkan pemerintah.

Apabila Bantuan Sosial disalurkan melalui lembaga penyalur kepada masyarakat, untuk mengukur nilai Beban Bantuan Sosial, maka Pemerintah Daerah harus mendapatkan informasi mengenai nilai yang telah disalurkan oleh Lembaga Penyalur kepada masyarakat. Nilai Beban Bantuan Sosial tersebut diukur hanya sebesar yang telah disalurkan oleh



lembaga penyalur. Untuk Bantuan Sosial berupa uang yang belum disalurkan tersebut jika Pemerintah Daerah Pemerintah masih menguasai uang yang masih berada di lembaga penyalur, maka Pemerintah Daerah juga harus melaporkan kas tersebut dalam Neraca. Untuk Bansos dalam bentuk barang yang telah dikeluarkan namun belum diserahkan ke masyarakat akan diakui sebagai persediaan.

Persediaan yang berasal dari belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dinilai dan disajikan sebesar:

- (1) biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- (2) biaya standar apabila diproduksi sendiri;
- (3) nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Penyaluran Bantuan Sosial dapat menimbulkan kewajiban apabila Pemerintah Daerah pemerintah belum menyalurkan Bantuan Sosial yang sudah menjadi hak penerima bantuan sosial, dan penerima masih memiliki hak untuk memperoleh bantuan sosial tersebut pada periode berikutnya/masa mendatang.

g) Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang diakui berdasarkan hasil perhitungan melalui aging schedule piutang pada tanggal pelaporan.

Beban penyisihan piutang tak tertagih diukur berdasarkan nilai yang ada di *aging schedule* dibandingkan dengan saldo awal penyisihan piutang tak tertagih.

h) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Pengukuran dan pencatatan beban penyusutan dan amortisasi dijelaskan dalam bagian Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud.

i) Beban Transfer

Beban transfer diakui dan dicatat sebesar kas yang dikeluarkan dan jumlah kewajiban yang belum disalurkan. Nilai pengeluaran kas didasarkan pada penyaluran transfer yang dikeluarkan dari rekening kas umum daerah kepada rekening penerima. Selain itu, kurang bayar/salur merupakan bagian dari beban transfer yang diukur sebesar nilai yang seharusnya disalurkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

j) Beban Tak Terduga

Beban tak terduga dicatat sebesar kas yang dikeluarkan dari Kas Umum Daerah.

Koreksi dan Penerimaan Kembali

Penerimaan kembali atas kelebihan beban/belanja yang sifatnya berulang (*recurring*) dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya dilakukan dengan mengurangkan pada rekening beban dan/atau belanja yang bersangkutan. Penerimaan kembali atas kelebihan beban/belanja yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan mengurangkan pada rekening beban dan/atau belanja yang bersangkutan.



4.16.1.3 Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam Laporan Operasional. Berikut adalah contoh penyajian beban dalam LO:

Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam CaLK sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

4.16.2 Belanja

4.16.2.1 Definisi

Menurut PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (menurut kelompok dan jenis beban) yang meliputi:

- a) Belanja Operasi, terdiri atas:
 - (1) Belanja Pegawai
 - (2) Belanja Barang dan Jasa
 - (3) Belanja Bunga
 - (4) Belanja Subsidi
 - (5) Belanja Hibah
 - (6) Belanja Bantuan Sosial
- b) Belanja Modal
- c) Belanja Tak Terduga
- d) Belanja Transfer

4.16.2.2 Pengakuan

Sesuai dengan paragraf 31 sampai 33 PSAP No. 02, pengakuan belanja dilakukan saat:

- a. terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- c. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD.
- d. Belanja yang tidak melalui RKUD diakui saat belanja telah di sahkan BUD dalam SP2B.

4.16.2.3 Pengukuran

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah (SP2D) dan diukur berdasarkan azas bruto.

4.16.2.4 Penyajian dan Pengungkapan

Belanja Pemerintah Daerah disajikan dan diungkapkan dalam:

- a) Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran daerah;
- b) Laporan Arus Kas masuk kategori Aktivitas Operasi;
- c) Laporan Arus Kas masuk kategori Aktivitas Investasi;
- d) CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi.



4.17 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

4.17.1 Definisi

Menurut PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Jenis-jenis pembiayaan Pemerintah Daerah terdiri dari:

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang perlu dibayar kembali yang antara lain berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) daerah tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman.

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali yang antara lain berupa pembayaran utang, pembentukan dana cadangan, dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

4.17.2 Pengakuan

Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan pengeluaran pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa bendahara Umum Daerah.

4.17.3 Pengukuran

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dicatat sebesar nilai nominal. Apabila penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.17.4 Penyajian dan Pengungkapan

Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan disajikan dalam LRA, Laporan Arus Kas (Aktivitas Investasi atau Aktivitas Pendanaan), serta diungkapkan dalam CaLK.

4.18 Kebijakan Akuntansi SILPA/SIKPA/SAL

4.18.1 Definisi

Mengacu pada PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA/SiKPA disajikan pada LRA dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Sedangkan SAL disajikan pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. SAL dipengaruhi oleh SiLPA/SiKPA dan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih hanya dilaporkan pada Laporan Konsolidasian.



4.18.2 Penyajian

SiLPA/SiKPA disajikan pada LRA dan LPSAL. Sedangkan SAL disajikan pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

4.19 Kebijakan Akuntansi Transaksi Transitoris (Transaksi Yang Tidak Mengubah Posisi Kas)

4.19.1 Definisi

Transaksi Transitoris (non anggaran) adalah transaksi kas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Adapun jenis-jenis transaksi transitoris Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1) Transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah transaksi kas yang berasal dari potongan langsung gaji pokok dan tunjangan keluarga pegawai negeri/pejabat daerah, dan tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil Daerah, serta jenis kas transitoris lainnya untuk disalurkan kepada Pihak Ketiga. Yang termasuk dalam kas transitoris antara lain Taspen, luran Jaminan Kesehatan, luran Jaminan Kecelakaan Kerja, luran Jaminan Kematian, PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 25, PPN Pusat, Taperum, dan luran Wajib Pegawai.

2) Transaksi pemindahbukuan/kiriman uang

3) Transaksi pemindahbukuan/kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening Bendahara Umum Daerah. Dalam hal terjadi pemindahbukuan antar rekening dari rekening valas ke rekening rupiah atau rekening valas lainnya maka perlu diakui adanya selisih kurs terealisasi. Selisih kurs terealisasi tersebut dilaporkan dalam LRA dan Laporan Operasional.

4) Transaksi koreksi kesalahan pemindahbukuan pada Rekening BUD

5) Transaksi koreksi kesalahan pemindahbukuan pada Rekening BUD merupakan transaksi antara rekening BUD dengan rekening pihak ketiga yang disebabkan karena kesalahan pemindahbukuan.

6) Uang jaminan dan/atau Titipan Uang Muka yang diberikan oleh pihak ketiga kepada pemerintah daerah dalam melakukan suatu pekerjaan yang memiliki risiko kegagalan dalam pelaksanaannya atau jaminan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Sebagai contoh uang jaminan dimaksud antara lain uang jaminan pekerjaan, uang jaminan pemeliharaan, uang jaminan bongkar reklame, dan jaminan lainnya; sehingga apabila ada kegagalan dalam pekerjaan atau penyebab lain yang mengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan maka uang jaminan ini menjadi milik pihak pemberi pekerjaan, dalam hal ini pemerintah daerah.

7) Jenis kas transitoris lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.19.2 Penyajian dan Pengungkapan

Transaksi transitoris disajikan dalam Laporan Arus Kas sebagai Aktivitas Transitoris dan diungkapkan dalam CaLK. Hal-hal yang diungkapkan pada CaLK antara lain:

1) Rincian jenis transaksi transitoris;

2) Pengaruh transaksi transitoris terhadap aset atau kewajiban; dan

3) Informasi Mutasi Saldo.

4.20 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Dan Peristiwa Luar Biasa

4.20.1 Definisi

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.



Kesalahan adalah Penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya, yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Koreksi adalah Tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Peristiwa luar biasa adalah Kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas normal Pemerintah Daerah dan karenanya tidak diharapkan terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Daerah sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau aset/kewajiban.

4.20.2 Koreksi Kesalahan

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode mungkin baru ditemukan pada periode berjalan, kesalahan mungkin timbul adanya: keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran; kesalahan dalam penetapan standar dan kebijakan akuntansi; kesalahan interpretasi fakta; dan kecurangan atau kelalaian. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

1. Kesalahan yang tidak berulang;

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

1) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

2) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan. Kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas adalah belanja untuk membeli perabotan kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja, maka koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebet pos aset tetap dan mengkredit pos ekuitas.

2. Kesalahan yang berulang dan sistemik

Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah Kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi, contoh: penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi. Akibat kumulatif dari koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dapat dilaporkan dalam baris tersendiri pada Laporan Arus Kas tahun berjalan.



4.20.3 Perubahan Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Daerah perlu membandingkan laporan keuangan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas, maka kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, arus kas yang lebih relevan dan lebih handal dalam penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
- b. Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
- c. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.20.4 Peristiwa Luar Biasa

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian yang dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat, sehingga memerlukan perubahan/ pergeseran anggaran secara mendasar.

Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran Belanja Tidak Terduga, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal harus menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak dikategorikan peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat dari penyerapan dana sebesar itu, Pemerintah Daerah memerlukan perubahan anggaran atau pergeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa, yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tidak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban Pemerintah Daerah. Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut ini:

1. Tidak merupakan kegiatan normal dari Pemerintah Daerah;
2. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang-ulang;
3. Berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Daerah; dan
4. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Belanja Tak Terduga diakui pada saat keluar dari rekening kas umum daerah, sebesar nilai yang tercantum dalam dokumen SP2D sedangkan pada laporan operasional belanja tak terduga diakui pada pos luar biasa.



Pencatatan pada pos luar biasa dikecualikan apabila belanja tak terduga digunakan untuk pengadaan Aset Tetap, maka akan diakui sebagai Aset Tetap pada SKPD yang menggunakan Aset Tetap tersebut.

4.20 Kebijakan Akuntansi BLUD

4.20.1 Pendahuluan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, satuan kerja dapat ditetapkan menjadi satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLUD). Satuan kerja tersebut diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan tanpa mengutamakan keuntungan, melakukan kegiatannya dengan prinsip efisiensi dan produktivitas. Satuan kerja pemerintah dimaksud memberikan layanan publik, seperti pemberian layanan barang/jasa, pengelolaan dana khusus, dan pengelolaan kawasan.

Sesuai dengan ketentuan, satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan, antara lain pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengelolaan utang-piutang, pengelolaan investasi dan pengadaan barang/jasa, kesempatan untuk mempekerjakan tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya.

4.20.2 Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan

BLUD merupakan instansi di lingkungan pemerintah daerah yang mengelola kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Sebagai instansi pemerintah daerah BLUD menerapkan kebijakan akuntansi berdasarkan standar akuntansi pemerintahan dalam menyusun laporan keuangan.

BLUD adalah entitas pelaporan karena merupakan satuan kerja pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Pendanaan entitas tersebut merupakan bagian dari APBD;
2. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundangundangan;
3. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk;
4. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya dan secara tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran;
5. mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi, dan pinjaman sesuai dengan ketentuan;
6. memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga;
7. mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi/ entitas pelaporan yang membawahnya;
8. mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah; dan
9. laporan keuangan BLUD diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal.

Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBD) yang menyelenggarakan akuntansi, BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya.

4.20.3 Definisi

BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.



4.20.4 Laporan Keuangan BLUD

Laporan keuangan BLUD merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh BLUD. Laporan keuangan setidaknya-tidaknnya terdiri dari komponen-komponen berikut ini:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. CaLK

4.20.5 Tanggung Jawab Pelaporan Keuangan BLUD

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD berada pada pimpinan BLUD atau pejabat yang ditunjuk.

4.20.6 Periode Pelaporan

Laporan keuangan BLUD disajikan paling kurang sekali dalam setahun.

4.20.7 Kebijakan Pelaporan Keuangan dan Kebijakan Akun di BLUD

Kebijakan Pelaporan Keuangan dan Kebijakan Akun di BLUD diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi BLUD.

4.20.8 Penggabungan Laporan Keuangan BLUD Ke Dalam Laporan Keuangan Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya. Seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada LRA BLUD dikonsolidasikan ke dalam LRA entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.

Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Transaksi dalam Laporan Arus Kas BLUD yang dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Laporan Perubahan SAL BLUD digabungkan dalam Laporan Perubahan SAL Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLUD ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah yang membawahnya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik (reciprocal accounts) seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu Pemerintah Daerah kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada LRA yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan.

4.21 Kebijakan Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Daerah Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah

4.21.1 Definisi

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan



pertanggungjawaban keuangan daerah berupa laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Standar akuntansi pemerintahan tersebut telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akural pada Pemerintah Daerah.

Salah satu asas umum pengelolaan keuangan daerah bahwa semua penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui RKUD yang dikelola oleh BUD. Jika terdapat pengaturan lain yang berimplikasi terhadap adanya penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD, pemerintah mengakui pendapatan dan belanja daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan dan pengeluaran Daerah yang tidak melalui RKUD, dapat berupa:

1. pendapatan dan belanja Dana BOS;
2. pendapatan dan belanja dana kapitasi bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
3. pendapatan dan belanja BLUD;
4. pendapatan dan belanja Dana Desa; dan
5. pendapatan dan belanja Hibah langsung.

4.21.1.1 Pendapatan dan belanja Dana BOS

Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan khusus dan satuan pendidikan menengah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.

Pendapatan Dana BOS dikelola oleh Satuan Pendidikan dan digunakan untuk membiayai belanja atau operasional penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.21.1.2 Pendapatan dan belanja Dana Kapitasi bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, disebutkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya;
2. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan;
3. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
4. Pembayaran Dana Kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan diakui sebagai pendapatan dan digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP;

4.21.1.3 Pendapatan pendapatan dan belanja BLUD Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk



untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLUD memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan meliputi pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja, dan pembiayaan.

4.21.1.4 Pendapatan dan belanja Dana Desa Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan dana desa ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

4.21.1.5 Pendapatan dan belanja Hibah Langsung Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menerima hibah yang bersumber sumbangan dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis, berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pendapatan atas penerimaan dana yang bersumber dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk uang/barang tersebut dapat digunakan langsung oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang secara fungsional melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Penggunaan hibah langsung dalam bentuk uang dilakukan tanpa terlebih dahulu disetor ke RKUD dan secara analogis diterapkan pada belanja daerah. Penggunaan hibah langsung dalam bentuk barang digunakan langsung oleh perangkat daerah yang secara fungsional menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

4.21.2 Pihak-pihak terkait dalam sistem akuntansi dan pelaporan terhadap belanja oleh SKPD/Unit SKPD yang tidak melalui RKUD adalah:

4.21.2.1 Penanggungjawab penggunaan dana

Penanggungjawab penggunaan dana atas pendapatan yang diterima dan digunakan langsung oleh SKPD/Unit SKPD yang tidak melalui RKUD adalah Kepala SKPD/Unit SKPD yang diberi tanggungjawab terhadap penggunaan dana yang diterima dan digunakan langsung yang tidak melalui RKUD. Penanggungjawab penggunaan dana mempunyai tugas:

1. Bertanggungjawab terhadap pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD;
2. Menyampaikan laporan pendapatan dan belanja kepada kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.

4.21.2.2 Bendahara SKPD/Unit SKPD

Bendahara SKPD/Unit SKPD atau nama lain yang disetarakan, mempunyai tugas:

1. Mencatat dan membukukan semua pendapatan dan belanja ke dalam Buku Kas Umum (BKU);
2. Menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas pendapatan dan belanja.

4.21.2.3 PPK-SKPD

PPK-SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) yang disampaikan oleh Kepala SKPD kepada PPKD;
2. Mencatat transaksi/kejadian akuntansi atas pendapatan dan belanja berdasarkan bukti yang telah disahkan oleh SKPKD;
3. Melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan dan belanja ke dalam buku besar masing-masing;



4. Menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK.

4.21.2.4 Kepala SKPD

Kepala SKPD selaku pengguna anggaran mempunyai tugas menandatangani dan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) atas pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD kepada SKPKD selaku BUD.

4.21.2.5 BUD

PPKD selaku BUD melakukan pengesahan terhadap pendapatan dan belanja yang diterima langsung oleh SKPD/Unit SKPD yang tidak melalui RKUD berdasarkan SP3B yang diusulkan oleh Kepala SKPD.

4.21.3 Pengakuan

Pendapatan diakui ketika timbul realisasi pendapatan SKPD/Unit SKPD yang tidak melalui RKUD. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran Pemerintah Daerah dengan syarat Pemerintah Daerah wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.

Beban diakui ketika sudah timbul kewajiban atas belanja SKPD/Unit SKPD yang tidak melalui RKUD. Belanja diakui berdasarkan realisasi jenis belanja yang tercantum dalam SP2B yang telah disahkan oleh BUD. Realisasi belanja modal diakui berdasarkan penambahan nilai aset sebesar realisasi belanja modal yang tertera dalam SP2B.

4.21.4 Pengukuran

Pendapatan, beban dan belanja daerah yang tidak melalui RKUD diukur sesuai nilai yang tertera dalam pencatatan dan pengesahan BUD atas pendapatan dan belanja di SP2B. Penerbitan SP2B dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan pemerintah daerah sebagai dasar untuk melakukan akuntansi dan pelaporan terhadap pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD.

4.21.5 Penyajian Dan Pengungkapan

Penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan atas pendapatan dan belanja SKPD/Unit SKPD tidak melalui RKPD, disajikan dalam:

1. LRA, untuk menyajikan laporan pendapatan-LRA dan belanja;
2. Neraca, untuk menyajikan laporan yang berupa aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya;
3. LO, untuk menyajikan laporan pendapatan-LO dan beban;
4. LPE, untuk menyajikan pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir;
5. CaLK, untuk menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam, LRA, Neraca, LO dan LPE

Jika pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD belum ditetapkan dalam perda tentang APBD pada tahun anggaran berkenaan, maka dalam rangka penyusunan laporan keuangan SKPD, paling sedikit disajikan dalam Neraca, LO, dan CaLK.

Penyajian pada laporan keuangan atas pendapatan dan belanja pemerintah daerah yang tidak melalui RKUD, disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK. Jika pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD pada tahun anggaran berkenaan, maka dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, paling sedikit disajikan dalam Neraca, LO, LAK, dan CaLK.



4.22 Masa Manfaat Aset Tetap

Berikut ini adalah tabel masa manfaat terkait aset tetap:

KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	2	01		ALAT BESAR	
1	3	2	01	01	ALAT BESAR DARAT	10
1	3	2	01	02	ALAT BESAR APUNG	8
1	3	2	01	03	ALAT BANTU	7
1	3	2	02		ALAT ANGKUTAN	
1	3	2	02	01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7
1	3	2	02	02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2
1	3	2	02	03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	10
1	3	2	02	04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	3
1	3	2	02	05	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	20
1	3	2	03		ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
1	3	2	03	01	ALAT BENGKEL BERMESIN	10
1	3	2	03	02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5
1	3	2	03	03	ALAT UKUR	5
1	3	2	04		ALAT PERTANIAN	
1	3	2	04	01	ALAT PENGOLAHAN	4
1	3	2	05		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
1	3	2	05	01	ALAT KANTOR	5
1	3	2	05	02	ALAT RUMAH TANGGA	5
1	3	2	05	03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	5
1	3	2	06		ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	
1	3	2	06	01	ALAT STUDIO	5
1	3	2	06	02	ALAT KOMUNIKASI	5
1	3	2	06	03	PERALATAN PEMANCAR	10
1	3	2	06	04	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	5
1	3	2	07		ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	
1	3	2	07	01	ALAT KEDOKTERAN	5
1	3	2	07	02	ALAT KESEHATAN UMUM	5
1	3	2	08		ALAT LABORATORIUM	
1	3	2	08	01	UNIT ALAT LABORATORIUM	8
1	3	2	08	02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	8
1	3	2	08	03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	10
1	3	2	08	04	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	15



KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	2	08	05	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	10
1	3	2	08	06	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA	10
1	3	2	08	07	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	7
1	3	2	08	08	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	15
1	3	2	08	09	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	7
1	3	2	09		ALAT PERSENJATAAN	
1	3	2	09	01	SENJATA API	10
1	3	2	09	02	PERSENJATAAN NON SENJATA API	5
1	3	2	09	03	SENJATA SINAR	3
1	3	2	09	04	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	5
1	3	2	10		KOMPUTER	
1	3	2	10	01	KOMPUTER UNIT	4
1	3	2	10	02	PERALATAN KOMPUTER	4
1	3	2	11		ALAT EKSPLORASI	
1	3	2	11	01	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	7
1	3	2	11	02	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	7
1	3	2	12		ALAT PENGEBORAN	
1	3	2	12	01	ALAT PENGEBORAN MESIN	7
1	3	2	12	02	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	7
1	3	2	13		ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	
1	3	2	13	01	SUMUR	7
1	3	2	13	02	PRODUKSI	7
1	3	2	13	03	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	7
1	3	2	14		ALAT BANTU EKSPLORASI	
1	3	2	14	01	ALAT BANTU EKSPLORASI	7
1	3	2	14	02	ALAT BANTU PRODUKSI	7
1	3	2	15		ALAT KESELAMATAN KERJA	
1	3	2	15	01	ALAT DETEKSI	5



KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	2	15	02	ALAT PELINDUNG	5
1	3	2	15	03	ALAT SAR	5
1	3	2	15	04	ALAT KERJA PENERBANGAN	5
1	3	2	16		ALAT PERAGA	
1	3	2	16	01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	4
1	3	2	17		PERALATAN PROSES/PRODUKSI	
1	3	2	17	01	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	5
1	3	2	18		RAMBU - RAMBU	
1	3	2	18	01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	5
1	3	2	18	02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	5
1	3	2	18	03	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	5
1	3	2	19		PERALATAN OLAH RAGA	
1	3	2	19	01	PERALATAN OLAH RAGA	5
1	3	3	01		BANGUNAN GEDUNG	
1	3	3	01	01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	50
1	3	3	01	02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	50
1	3	3	02		MONUMEN	
1	3	3	02	01	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	50
1	3	3	03		BANGUNAN MENARA	
1	3	3	03	01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	40
1	3	3	04		TUGU TITIK KONTROL/PASTI	
1	3	3	04	01	TUGU/TANDA BATAS	50
1	3	4	01		JALAN DAN JEMBATAN	
1	3	4	01	01	JALAN	10
1	3	4	01	02	JEMBATAN	50
1	3	4	02		BANGUNAN AIR	
1	3	4	02	01	BANGUNAN AIR IRIGASI	50
1	3	4	02	02	BANGUNAN PENGALIRAN PASANG SURUT	50
1	3	4	02	03	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	25
1	3	4	02	04	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	10
1	3	4	02	05	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	30
1	3	4	02	06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	40
1	3	4	02	07	BANGUNAN AIR KOTOR	40



KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	4	03		INSTALASI	
1	3	4	03	01	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	30
1	3	4	03	02	INSTALASI AIR KOTOR	30
1	3	4	03	03	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	10
1	3	4	03	04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	10
1	3	4	03	05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	40
1	3	4	03	06	INSTALASI GARDU LISTRIK	40
1	3	4	03	07	INSTALASI PERTAHANAN	30
1	3	4	03	08	INSTALASI GAS	30
1	3	4	03	09	INSTALASI PENGAMAN	20
1	3	4	03	10	INSTALASI LAIN	
1	3	4	04		JARINGAN	
1	3	4	04	01	JARINGAN AIR MINUM	30
1	3	4	04	02	JARINGAN LISTRIK	40
1	3	4	04	03	JARINGAN TELEPON	20
1	3	4	04	04	JARINGAN GAS	30
1	3	5	01		BAHAN PERPUSTAKAAN	
1	3	5	01	01	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	4
1	3	5	01	02	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	4
1	3	5	01	03	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	4
1	3	5	01	04	MUSIK	4
1	3	5	01	05	KARYA GRAFIKA (GRAPHIC MATERIAL)	4
1	3	5	01	06	THREE DIMENSIONAL ARTEFACS AND REALITA	4



Berikut ini adalah tabel penambahan masa manfaat terkait aset tetap:

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Alat Besar Apung	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Bantu	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	6



Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d 75%	9
		>75% s.d.100%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Bengkel Tak bermesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	Overhaul	>0% s.d. 20%	1
		>21% s.d 40%	2
		>51% s.d 75%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga		>0% s.d. 25%	0
Alat Kantor	Overhaul	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
Alat Studio		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3



Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Peralatan Pemancar	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Kesehatan Umum	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat laboratorium			
Unit Alat laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Laboratorium Fisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	3



Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
<i>Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory</i>	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Persenjataan			
Senjata Api	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1



Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d.100%	1
Senjata Sinar	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d.100%	2
Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Komputer			
Komputer Unit	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Komputer	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6



Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d.100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Produksi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Bantu Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2



Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d.100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Monumen			
Candi/ Tugu Peringatan/ Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Tugu Titik Kontrol/Prasasti			
Tugu/Tanda batas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 60%	5
		>60% s.d 100%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10



Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	3
		>10% s.d 20%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana alam	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Jaringan			
Jaringan air Minum	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Listrik	Overhaul	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Telepon	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Gas	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Alat Musik Modern/Band	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
Aset Tetap Dalam Renovasi			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	Overhaul	>0% s.d. 100%	2



Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d. 100%	5



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah telah ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan, sedangkan teknik penyusunan laporan keuangan telah dilakukan dengan cara konsolidasi yaitu penggabungan laporan keuangan Perangkat Daerah selaku entitas yang secara struktural berada dibawahnya.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sepenuhnya disajikan berdasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

5.1. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.

Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Anggaran yang dimuat dalam Laporan Realisasi Anggaran merupakan anggaran yang diuraikan pada Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 11);
2. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 58 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
3. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tanggal 17 Januari 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
4. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2024 tanggal 12 Februari 2024 tentang Perubahan Kedua Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2024 tanggal 25 Maret 2024 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 29 Mei 2024 tentang Perubahan Keempat Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024 tentang Perubahan Kelima Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 18 Tahun 2024 tanggal 1 Juli 2024 tentang Perubahan Keenam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 30 September 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 10);
10. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 27 Tahun 2024 tanggal 30 September 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 29 Tahun 2024 tanggal 30 Oktober 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;



12. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 34 Tahun 2024 tanggal 22 November 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 38 Tahun 2024 tanggal 20 Desember 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
15. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.

Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

1. Pendapatan;
2. Belanja;
3. Transfer;
4. Surplus atau defisit;
5. Penerimaan pembiayaan;
6. Pengeluaran pembiayaan;
7. Pembiayaan neto; dan
8. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)

5.1.1 PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah.

Pendapatan Kota Bogor Tahun Anggaran 2024 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan anggaran dan realisasi dalam Tahun Anggaran 2024 serta realisasi Tahun Anggaran 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2021 dan 2024								
No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Pendapatan Asli Daerah	1.461.100.063.862,00	1.458.619.452.757,24	99,83	(2.480.611.104,76)	1.338.618.268.168,80	120.001.184.588,44	8,96
2	Pendapatan Transfer	1.731.609.984.212,00	1.711.878.175.798,00	98,86	(19.731.808.414,00)	1.628.857.302.371,00	83.020.873.427,00	5,10
	Jumlah	3.192.710.048.074,00	3.170.497.628.555,24	99,30	(22.212.419.518,76)	2.967.475.570.539,80	203.022.058.015,44	6,84

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Anggaran Pendapatan Daerah TA 2024 sebesar Rp3.192.710.048.074,00 terealisasi sebesar Rp3.170.497.628.555,24 atau 99,30% dari Anggaran, apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp2.967.475.570.539,80 mengalami kenaikan sebesar Rp203.022.058.015,44 atau 6,84%. Realisasi masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:



5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang Sah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.2
Pendapatan Asli Daerah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5)	6	7	8
				(%)			(%)
1	Pajak Daerah	984.800.000.000,00	973.768.860.850,00	98,88	(11.031.139.150,00)	897.753.380.910,00	76.015.479.940,00
2	Retribusi Daerah	417.231.785.419,00	417.445.452.990,24	100,05	213.667.571,24	31.081.390.548,00	386.364.062.442,24
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	34.537.163.762,00	34.287.163.763,00	99,28	(249.999.999,00)	33.960.776.435,00	326.387.328,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	24.531.114.681,00	33.117.975.154,00	135,00	8.586.860.473,00	375.822.720.275,80	(342.704.745.121,80)
	Jumlah	1.461.100.063.862,00	1.458.619.452.757,24	99,83	(2.480.611.104,76)	1.338.618.268.168,80	120.001.184.588,44

Berdasarkan tabel diatas anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.461.100.063.862,00 terealisasi sebesar Rp1.458.824.079.309,24 atau 99,83%, dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.338.618.268.168,80 realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp120.001.184.588,44 atau 8.96%. Pelampauan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 terdapat pada sektor Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah, sedangkan Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

5.1.1.1.1 PAJAK DAERAH

Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis pajak yang dipungut pada tahun 2024 terdiri dari:

1. PBJT Jasa Perhotelan
2. PBJT Makanan dan/atau Minuman
3. PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan
4. Pajak Reklame
5. PBJT Tenaga Listrik
6. PBJT Jasa Parkir
7. Pajak Air Tanah
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)
9. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Penganggaran dan realisasi Pajak Daerah masih disajikan sesuai dengan peraturan daerah tentang penetapan APBD 2024. Anggaran dan realisasi pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 serta realisasi Tahun Anggaran 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.3
Pajak Daerah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5)	6	7	8
				(%)			(%)
1	Pajak Hotel	113.000.000.000,00	123.207.802.097,00	109,03	10.207.802.097,00	111.465.747.482,00	11.742.054.615,00
2	Pajak Restoran	202.500.000.000,00	208.515.593.649,00	102,97	6.015.593.649,00	194.752.128.901,00	13.763.464.748,00
3	Pajak Hiburan	22.900.000.000,00	29.358.580.222,00	128,20	6.458.580.222,00	22.605.708.227,00	6.752.871.995,00
4	Pajak Reklame	9.220.000.000,00	9.736.486.534,00	105,60	516.486.534,00	10.809.834.939,00	(1.073.348.405,00)
5	Pajak Penerangan Jalan	81.080.000.000,00	95.818.548.299,00	118,18	14.738.548.299,00	61.678.951.202,00	34.139.597.097,00
6	Pajak Parkir	6.400.000.000,00	7.859.694.368,00	122,81	1.459.694.368,00	14.652.462.793,00	(6.792.768.425,00)
7	Pajak Air Tanah	1.700.000.000,00	1.924.708.540,00	113,22	224.708.540,00	2.545.938.043,00	(621.229.503,00)
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	200.000.000.000,00	210.911.617.241,00	105,46	10.911.617.241,00	219.099.681.865,00	(8.188.064.624,00)





No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
			(Rp)	(%)			(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	348.000.000.000,00	286.435.829.900,00	82,31	(61.564.170.100,00)	260.142.927.458,00	26.292.902.442,00	10,11
	Jumlah	984.800.000.000,00	973.768.860.850,00	98,88	(11.031.139.150,00)	897.753.380.910,00	76.015.479.940,00	8,47

Target Pajak Daerah tahun 2024 adalah sebesar Rp984.800.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp973.768.860.850,00 atau 98,88%, realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp76.015.479.940,00 atau 8,47%.

Ketercapaian target pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak air tanah dan pajak PBB P2 adalah hasil ekstensifikasi dan intensifikasi Pajak Daerah yang diantaranya adalah:

- Penjaringan Wajib Pajak Baru sehingga selama tahun 2024 terdapat penambahan Wajib Pajak baru sebanyak 150 Wajib Pajak, Wajib Pajak Hotel sebanyak 8, pajak parkir sebanyak 15 Wajib Pajak, 22 Wajib Pajak Kesenian, 129 Wajib Pajak Reklame. Sehingga total keseluruhan terdapat 324 Wajib Pajak baru.
- Sosialisasi dan penyuluhan kewajiban Pajak Daerah terhadap Wajib Pajak;
- Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah;
- Kerjasama dengan Kejaksaan dalam upaya penagihan pajak;
- Kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam rangka pertukaran data perpajakan dan pengawasan Wajib Pajak;
- Penilaian individual dalam rangka penyesuaian NJOP PBB P2;
- Perluasan menjadi 22 kanal pembayaran pajak dan pelaksanaan Kegiatan Mobil keliling pembayaran pajak; dan
- Kegiatan Mobil Keliling dan Operasi Sisir pembayaran PBB P2 yang melibatkan instansi kecamatan dan kelurahan.

BPHTB terealisasi sebesar Rp286.435.829.900,00 atau 82,31% dari target sebesar Rp348.000.000.000,00. Ketidaktercapaian BPHTB diakibatkan karena dalam perencanaan target BPHTB masih memperhitungkan rencana pembayaran BPHTB dari PT. Perkebunan Nasional II. Selain itu perubahan peraturan perundang undangan terkait besaran NPOPTKP BPHTB selain waris mengalami peningkatan yang semula Rp60.000.000,00 menjadi Rp80.000.000,00 yang berpengaruh terhadap realisasi pendapatan dari sektor BPHTB. Terdapat 3.455 bidang tanah dengan luas bidang sebesar 595.729 m² yang sudah bersertifikat melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap namun masih terhutang BPHTB dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4
BPHTB Terhutang

No	Tahun	Sertifikat atas Program PTSL	
		Jumlah Bidang	Luas Bidang (m2)
1	2018	25	6.607
2	2019	2.373	483.458
3	2021	1.023	99.857
4	2022	34	5.807
Jumlah		3.455	595.729

5.1.1.1.2 RETRIBUSI DAERAH

Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2023. Anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 serta Realisasi Tahun Anggaran 2023 disajikan pada tabel berikut:



Tabel 5.1.5
Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(Rp)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Retribusi Jasa Umum	401.315.811.304,00	400.997.137.220,24	99,92	(318.674.083,76)	16.742.835.953,00	384.254.301.267,24	2.295,04
2	Retribusi Jasa Usaha	6.511.761.306,00	7.953.316.342,00	122,14	1.441.555.036,00	6.380.013.963,00	1.573.302.379,00	24,66
3	Retribusi Perizinan Tertentu	9.404.212.809,00	8.494.999.428,00	90,33	(909.213.381,00)	7.958.540.632,00	536.458.796,00	6,74
Jumlah		417.231.785.419,00	417.445.452.990,24	100,05	213.667.571,24	31.081.390.548,00	386.364.062.442,24	1.243,07

Berdasarkan tabel diatas realisasi retribusi daerah tahun 2024 sebesar Rp417.445.452.990,24 atau 100,05% dari anggaran tahun 2024 sebesar Rp417.231.785.419,00 realisasi Tahun Anggaran 2024 tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp386.364.062.442,24. Kenaikan disebabkan oleh adanya perubahan rekening Retribusi Kesehatan yang pada tahun 2023 dicatat sebagai bagian dari Lain-Lain PAD yang sah sedangkan pada tahun 2024 dicatat pada Retribusi Daerah sebagai amanat dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5.1.1.1.2.1 RETRIBUSI JASA UMUM

Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Realisasi retribusi jasa umum pada tahun anggaran 2024 dirinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.6
Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)				
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	381.659.622.704,00	383.213.924.158,24	100,41	1.554.301.454,24	63.630.000,00	383.150.294.158,24	602.153,53	
2	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	240.000.000,00	246.100.000,00	102,54	6.100.000,00	227.050.000,00	19.050.000,00	8,39	
3	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	55.000.000,00	55.027.345,00	100,05	27.345,00	45.368.621,00	9.658.724,00	21,29	
4	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	35.891.500,00	39.171.500,00	109,14	3.280.000,00	636.841.750,00	(597.670.250,00)	(93,85)	
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00	201.657.050,00	(201.657.050,00)	(100,00)	
6	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	14.813.571.600,00	14.682.315.717,00	99,11	(131.255.883,00)	11.903.096.282,00	2.779.219.435,00	23,35	
7	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.504.800.000,00	2.753.673.000,00	61,13	(1.751.127.000,00)	2.133.247.000,00	620.426.000,00	29,08	
8	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184.020.000,00	(1.184.020.000,00)	(100,00)	
9	Retribusi Pelayanan Tera/Tera	0,00	0,00	0,00	0,00	200.302.750,00	(200.302.750,00)	(100,00)	
10	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara	6.925.500,00	6.925.500,00	100,00	0,00	147.622.500,00	(140.697.000,00)	(95,31)	
Jumlah		401.315.811.304,00	400.997.137.220,24	99,92	(318.674.083,76)	16.742.835.953,00	384.254.301.267,24	2.295,04	

Tabel diatas menunjukkan realisasi retribusi jasa umum tahun anggaran 2024 sebesar Rp400.997.137.220,24 atau mencapai 99,92% dari anggaran sebesar Rp401.315.811.304,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan 2.295,04% atau sebesar Rp384.254.301.267,24 dibandingkan dengan tahun anggaran 2023.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan mencapai 99,11% dari target, yang salah satunya disebabkan oleh masih dilaksanakannya pemutakhiran data dan potensi wajib retribusi untuk kode sanitasi 1 di PDAM yang biaya sanitasinya Rp0,00 dengan rata-rata berjumlah 1000 Wajib Retribusi setiap bulannya.

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum hanya mencapai 61,13% dari target, hambatan dan kendala yang dihadapi adalah adanya 16 titik lokasi parkir yang sudah tidak dipungut retribusi dikarenakan alih fungsi menjadi pedestrian, pembangunan pasar, untuk kelancaran lalu lintas dan Toko/ruko sudah tidak



beroperasional lagi, yang pada awalnya berjumlah 113 titik lokasi parkir di tepi jalan umum dan 2 titik lokasi tempat parkir khusus sesuai dengan Keputusan Wali Kota Bogor No. 551.45 - 510 Tahun 2020 tentang Tempat Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus parkir Di Kota Bogor, berikut 16 titik lokasi yang sudah tidak dipungut retribusi:

Tabel 5.1.7
Titik Lokasi yang Tidak Dipungut Retribusi TA 2024

No	Nama Jalan	Titik Lokasi
1	Jalan Dadali	Bahu Jl. Akses Jalan Samping SPBU
2	Jalan Dewi Sartika	Bahu Jl. Depan Gang Batu/Samping Bank UOB
3	Jalan Dewi Sartika	Bahu Jl. Depan Berlian Elektronik
4	Jl. Ir. H Djuanda	Bahu Jl. Sebelah Kiri Bank BCA
5	Jl. Kantor Batu	Bahu Jl. Depan Toko Karpet s/d Samping Perpustakaan LIPI
6	Jl. Batutulis	Bahu Jl. Depan Toko Bangunan Makmur
7	Jl. Otto Iskandardinata	Bahu Jl. Depan Foto Copy Aputis s/d Sebelum Jembatan Sungai Ciliwung
8	Jl. Pandu Raya	Bahu Jl. Dari Jembatan s/d Depan Bank Sinar Mas
9	Jl. RA. Wiranata	Bahu Jl. Samping Alun - Alun Empang
10	Jalan H. Achmad Sobana, SH	Bahu Jl. Depan Sop Ma Emun s/d Simpang Bantarjati
11	Jalan Heulang	Bahu Jl. Samping Kantor Imigrasi (Lajur Kanan)
12	Jalan Merak	Bahu Jl. Depan Rumah Bersalin Pasutri
13	Jalan Pemuda	Bahu Bundaran Air Mancur
14	Jalan R. Saleh Syarif Bustaman	Bahu Jl. Depan Toko Makanan Burung
15	Jl. Salak	Bahu Jl. Seputar Taman Kencana
16	Jl. Mayjen Ishak Juarsa	Bahu Jl. Depan Bubur Kabita

Rincian realisasi Retribusi Jasa Umum pada masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.8
Realisasi Retribusi Jasa Umum per Perangkat Daerah TA 2024 dan 2023

No	SKPD	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DINAS KESEHATAN							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	73.870.500.000,00	0,00	0,00	(73.870.500.000,00)	0,00	0,00	0,00
2	PUSKESMAS BOGOR SELATAN							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	3.161.947.874,00	0,00	3.161.947.874,00	0,00	3.161.947.874,00	0,00
3	PUSKESMAS CIPAKU							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	3.702.704.768,00	0,00	3.702.704.768,00	0,00	3.702.704.768,00	0,00
4	PUSKESMAS BONDONGAN							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	2.442.173.445,00	0,00	2.442.173.445,00	0,00	2.442.173.445,00	0,00
5	PUSKESMAS LAWANG GINTUNG							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	1.772.437.527,00	0,00	1.772.437.527,00	0,00	1.772.437.527,00	0,00
6	PUSKESMAS BOGOR TIMUR							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	4.008.086.693,00	0,00	4.008.086.693,00	0,00	4.008.086.693,00	0,00
7	PUSKESMAS PULO ARMYN							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	2.441.152.903,00	0,00	2.441.152.903,00	0,00	2.441.152.903,00	0,00
8	PUSKESMAS BOGOR TENGAH							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	1.923.955.308,00	0,00	1.923.955.308,00	0,00	1.923.955.308,00	0,00





No	SKPD	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
9	PUSKESMAS SEMPUR							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	1.606.234.873,00	0,00	1.606.234.873,00	0,00	1.606.234.873,00	0,00
10	PUSKESMAS GANG AUT							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	1.078.677.618,00	0,00	1.078.677.618,00	0,00	1.078.677.618,00	0,00
11	PUSKESMAS BELONG							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	684.435.857,00	0,00	684.435.857,00	0,00	684.435.857,00	0,00
12	PUSKESMAS MERDEKA							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	2.120.165.754,00	0,00	2.120.165.754,00	0,00	2.120.165.754,00	0,00
13	PUSKESMAS SEMPLAK							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	2.718.489.760,00	0,00	2.718.489.760,00	0,00	2.718.489.760,00	0,00
14	PUSKESMAS PANCASAN							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	2.463.110.019,00	0,00	2.463.110.019,00	0,00	2.463.110.019,00	0,00
15	PUSKESMAS PASIR MULYA							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	3.035.831.908,00	0,00	3.035.831.908,00	0,00	3.035.831.908,00	0,00
16	PUSKESMAS GANG KELOR							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	2.686.283.153,00	0,00	2.686.283.153,00	0,00	2.686.283.153,00	0,00
17	PUSKESMAS SINDANG BARANG							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	3.392.514.829,00	0,00	3.392.514.829,00	0,00	3.392.514.829,00	0,00
18	PUSKESMAS BOGOR UTARA							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	3.672.242.535,00	0,00	3.672.242.535,00	0,00	3.672.242.535,00	0,00
19	PUSKESMAS TEGAL GUNDIL							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	2.120.285.605,00	0,00	2.120.285.605,00	0,00	2.120.285.605,00	0,00
20	PUSKESMAS WARUNG JAMBU							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	2.669.544.637,00	0,00	2.669.544.637,00	0,00	2.669.544.637,00	0,00
21	PUSKESMAS TANAH SAREAL							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	2.623.495.696,00	0,00	2.623.495.696,00	0,00	2.623.495.696,00	0,00
22	PUSKESMAS PONDOK RUMPUT							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	1.051.734.895,00	0,00	1.051.734.895,00	0,00	1.051.734.895,00	0,00
23	PUSKESMAS KEDUNG BADAQ							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	2.925.399.066,00	0,00	2.925.399.066,00	0,00	2.925.399.066,00	0,00
24	PUSKESMAS KAYU MANIS							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	2.564.318.930,00	0,00	2.564.318.930,00	0,00	2.564.318.930,00	0,00
25	PUSKESMAS MEKARWANGI							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	3.412.892.836,00	0,00	3.412.892.836,00	0,00	3.412.892.836,00	0,00
26	PUSKESMAS MULYAHARJA							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	1.962.519.728,00	0,00	1.962.519.728,00	0,00	1.962.519.728,00	0,00
27	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	1.095.071.700,00	0,00	1.095.071.700,00	0,00	1.095.071.700,00	0,00



No	SKPD	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
28	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	307.789.122.704,00	319.878.216.241,24	103,93	12.089.093.537,24	0,00	319.878.216.241,24	0,00
29	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan	240.000.000,00	246.100.000,00	102,54	6.100.000,00	227.050.000,00	19.050.000,00	8,39
	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	55.000.000,00	55.027.345,00	100,05	27.345,00	45.368.621,00	9.658.724,00	21,29
30	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN							
	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan	35.891.500,00	39.171.500,00	109,14	3.280.000,00	636.841.750,00	(597.670.250,00)	(93,85)
31	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN							
	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00	201.657.050,00	(201.657.050,00)	(100,00)
32	DINAS LINGKUNGAN HIDUP							
	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	14.813.571.600,00	14.682.315.717,00	99,11	(131.255.883,00)	11.903.096.282,00	2.779.219.435,00	23,35
33	DINAS PERHUBUNGAN							
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan	4.504.800.000,00	2.753.673.000,00	61,13	(1.751.127.000,00)	2.133.247.000,00	620.426.000,00	29,08
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184.020.000,00	(1.184.020.000,00)	(100,00)
34	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH,							
	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	0,00	200.302.750,00	(200.302.750,00)	(100,00)
35	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							
	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	6.925.500,00	6.925.500,00	100,00	0,00	147.622.500,00	(140.697.000,00)	(95,31)
Jumlah		401.315.811.304,00	400.997.137.220,24	99,92	(318.674.083,76)	16.679.205.953,00	384.317.931.267,24	2.304,17

5.1.1.1.2.2 RETRIBUSI JASA USAHA

Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha.

Realisasi Retribusi Jasa Usaha per 31 Desember 2024 dan 2023 dirinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.9
Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.433.953.306,00	5.420.786.342,00	122,26	986.833.036,00	4.224.552.643,00	1.196.233.699,00	28,32
2	Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	0,00	118.145.320,00	(118.145.320,00)	(100,00)
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	46.008.000,00	54.970.000,00	119,48	8.962.000,00	52.120.000,00	2.850.000,00	5,47
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	700.000.000,00	813.828.000,00	116,26	113.828.000,00	632.902.000,00	180.926.000,00	28,59
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.331.800.000,00	1.663.732.000,00	124,92	331.932.000,00	1.352.294.000,00	311.438.000,00	23,03
Jumlah		6.511.761.306,00	7.953.316.342,00	122,14	1.441.555.036,00	6.380.013.963,00	1.573.302.379,00	24,66



Tabel diatas menunjukkan realisasi retribusi jasa usaha tahun anggaran 2024 sebesar Rp7.953.316.342,00 atau mencapai 122,14% dari anggaran sebesar Rp6.511.761.306,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan 24,66% atau sebesar Rp1.573.302.379,00 dibandingkan dengan tahun anggaran 2023. Rincian realisasi Retribusi Jasa Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.10
Realisasi Retribusi Jasa Usaha per Perangkat Daerah TA 2024 dan 2023

No	SKPD	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	150.000.000,00	151.750.000,00	101,17	1.750.000,00	146.350.000,00	5.400.000,00	3,69
2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN							
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.854.480.000,00	1.932.775.000,00	104,22	78.295.000,00	1.943.345.000,00	(10.570.000,00)	(0,54)
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	81.800.000,00	110.430.000,00	135,00	28.630.000,00	0,00	0,00	0,00
3	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN							
	Retribusi Rumah Potong Hewan	700.000.000,00	813.828.000,00	116,26	113.828.000,00	632.902.000,00	180.926.000,00	28,59
4	DINAS PERHUBUNGAN							
	Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	0,00	118.145.320	(118.145.320,00)	(100,00)
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	46.008.000	54.970.000	119,48	8.962.000,00	52.120.000	2.850.000,00	5,47
5	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	350.000.000,00	559.620.848,00	159,89	209.620.848,00	216.782.911,00	342.837.937,00	158,15
6	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA							
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.250.000.000,00	1.553.302.000,00	124,26	303.302.000,00	1.352.294.000,00	201.008.000,00	14,86
7	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN							
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	45.000.000,00	54.000.000,00	120,00	9.000.000,00	41.750.000,00	12.250.000,00	29,34
8	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.034.473.306,00	2.722.640.494,00	133,83	688.167.188,00	1.876.324.732,00	846.315.762,00	45,10
	Jumlah	6.511.761.306,00	7.953.316.342,00	122,14	1.441.555.036,00	6.380.013.963,00	1.573.302.379,00	24,66

5.1.1.1.2.3 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Rincian realisasi Retribusi Perizinan Tertentu per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:



Tabel 5.1.11
Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	1.755.337,00	0,00	1.755.337,00	391.230.685,00	(389.475.348,00)	(99,55)
2	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	9.004.212.809,00	8.048.021.591,00	89,38	(956.191.218,00)	7.065.976.947,00	982.044.644,00	13,90
3	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	400.000.000,00	445.222.500,00	111,31	45.222.500,00	420.708.000,00	24.514.500,00	5,83
4	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	80.625.000,00	(80.625.000,00)	(100,00)
Jumlah		9.404.212.809,00	8.494.999.428,00	90,33	(909.213.381,00)	7.958.540.632,00	536.458.796,00	6,74

Tabel diatas menunjukkan realisasi retribusi Perizinan Tertentu tahun anggaran 2024 sebesar Rp8.494.999.428,00 atau mencapai 90,33% dari anggaran sebesar Rp9.404.212.809,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan 6,74% atau sebesar Rp536.458.796,00 dibandingkan dengan tahun anggaran 2023.

Adapun kendala dalam pencapaian target Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung adalah adanya persyaratan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 tahun Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang masih belum dapat diakomodir sepenuhnya sehingga menghambat kelancaran realisasi pendapatan. Rincian realisasi Retribusi Perizinan Tertentu pada masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.12
Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu per Perangkat Daerah TA 2024 dan 2023

No	SKPD	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DINAS PERHUBUNGAN							
	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	80.625.000	(80.625.000,00)	(100,00)
2	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	1.755.337	0,00	1.755.337,00	391.230.685,00	(389.475.348,00)	0,00
	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	400.000.000	445.222.500,00	111,31	45.222.500,00	420.708.000,00	24.514.500,00	0,00
	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	9.004.212.809	8.048.021.591	89,38	(956.191.218,00)	7.065.976.947,00	982.044.644,00	0,00
Jumlah		9.404.212.809,00	8.494.999.428,00	90,33	(909.213.381,00)	7.958.540.632,00	536.458.796,00	6,74

5.1.1.1.3 PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

Keuangan daerah meliputi kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan, Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kepala Daerah selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perseroan daerah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah dari bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kota Bogor pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, Perumda Bank Kota Bogor, Perumda Tirta Pakuan dan Perumda Pasar Pakuan





Jaya.

Pendapatan ini seluruhnya dianggarkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dengan realisasi TA 2024 dan 2023 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.13
Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk	4.750.663.159,00	4.750.663.159,00	100,00	0,00	5.225.479.571,00	(474.816.412,00)	(9,09)
2	Perumda Bank Kota Bogor	2.774.558.399,00	2.774.558.399,00	100,00	0,00	2.383.402.426,00	391.155.973,00	16,41
3	Perumda Tirta Pakuan	25.588.368.239,00	25.588.368.239,00	100,00	0,00	24.957.647.000,00	630.721.239,00	2,53
4	Perumda Pasar Pakuan Jaya	1.423.573.965,00	1.173.573.966,00	82,44	(249.999.999,00)	1.394.247.438,00	(220.673.472,00)	(15,83)
	Jumlah	34.537.163.762,00	34.287.163.763,00	99,28	(249.999.999,00)	33.960.776.435,00	326.387.328,00	0,96

Tabel diatas menunjukkan realisasi Pendapatan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun anggaran 2024 sebesar Rp34.287.163.763,00 atau mencapai 99,28% dari anggaran sebesar Rp34.537.163.762,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan 0,96% atau sebesar Rp326.387.328,00 dibandingkan dengan tahun anggaran 2023.

Realisasi Pendapatan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 sebagian mengalami kenaikan dibandingkan Tahun Anggaran 2023, kecuali untuk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,Tbk yang mengalami penurunan sebesar 9,09% yang disebabkan oleh penurunan laba bersih konsolidasi tahun buku 2023 yang berpengaruh terhadap pembagian deviden dan Perumda Pasar Pakuan Jaya mengalami penurunan sebesar 15,83% yang disebabkan oleh masih adanya deviden hak Pemerintah Kota Bogor yang belum disetorkan atas laba usaha tahun 2023.

5.1.1.1.4 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada tahun anggaran 2024 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 dirinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.14
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.000.000.000,00	1.389.417.875,00	138,94	389.417.875,00	2.087.860.934,00	(698.443.059,00)	(33,45)
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	12.629.016,00	0,00	12.629.016,00	167.802.000,00	(155.172.984,00)	(92,47)
3	Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.135.000,00	(1.361.135.000,00)	(100,00)
4	Jasa Giro	3.315.080.955,00	4.035.307.746,00	121,73	720.226.791,00	5.177.638.309,00	(1.142.330.563,00)	(22,06)
5	Pendapatan Bunga	7.000.000.000,00	7.224.677.557,00	103,21	224.677.557,00	6.997.819.184,00	226.858.373,00	3,24
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	13.441.667,00	0,00	13.441.667,00	24.235.714,00	(10.794.047,00)	(44,54)
7	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	397.410.914,00	0,00	397.410.914,00	454.743.324,00	(57.332.410,00)	(12,61)
8	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	627.473.886,00	0,00	627.473.886,00	474.650.538,00	152.823.348,00	32,20
9	Pendapatan Denda Pajak Daerah	7.888.105.138,00	14.649.420.176,00	185,72	6.761.315.038,00	4.067.750.115,00	10.581.670.061,00	260,14
10	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	75.445.912,00	111.287.554,00	0,00	35.841.642,00	223.447.933,00	(112.160.379,00)	(50,20)
11	Pendapatan dari Pengembalian	5.251.636.097,00	3.836.302.493,00	73,05	(1.415.333.604,00)	3.926.504.331,00	(90.201.838,00)	(2,30)
12	Pendapatan BLUD	0,00	813.022.806,00	0,00	813.022.806,00	350.851.552.368,80	(350.038.529.562,80)	(99,77)
13	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	546.579,00	4.481.604,00	0,00	3930205,00	4.080.525,00	401.079,00	9,83
14	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	300.000,00	3.101.860,00	0,00	2.801.860,00	3.500.000,00	(398.140,00)	(11,38)
	Jumlah	24.531.114.681,00	33.117.975.154,00	135,00	8.586.860.473,00	375.822.720.275,80	(342.704.745.121,80)	(91,19)



Tabel diatas menunjukkan realisasi Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun anggaran 2024 sebesar Rp33.117.975.154,00 atau mencapai 135,00% dari anggaran sebesar Rp24.531.114.681,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan 91,19% atau sebesar Rp342.704.745.121,00 dibandingkan dengan tahun anggaran 2023. Penurunan disebabkan oleh adanya perubahan rekening Retribusi Kesehatan yang pada tahun 2023 dicatat sebagai bagian dari Lain-Lain PAD yang sah sedangkan pada tahun 2024 dicatat pada Retribusi Daerah sebagai amanat dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penjelasan lebih lanjut atas Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah antara lain sebagai berikut:

- a. Realisasi Pendapatan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.389.471.875,00 dan Rp2.087.860.934,00 yang terinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.15
Realisasi Pendapatan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Hasil Penjualan Tanah	24.168.075,00	24.728.650,00
2	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	40.529.200,00	0,00
3	Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
4	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	1.324.720.600,00	2.063.132.284,00
Jumlah		1.389.417.875,00	2.087.860.934,00

- b. Realisasi Pendapatan Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah yang Tidak dipisahkan Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp12.629.016,00 dan Rp167.802.000,00 yang terinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.16
Realisasi Pendapatan Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah yang Tidak dipisahkan TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Hasil dari Bangun Guna Serah	0,00	167.802.000,00
2	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	12.629.016,00	0,00
Jumlah		12.629.016,00	167.802.000,00

- c. Realisasi Jasa Giro Tahun Anggaran 2024 dan 2023 sebesar Rp4.035.307.746,00 dan Rp5.177.638.309,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.17
Realisasi Jasa Giro TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.815.384.199,00	4.941.090.813,00
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	202.022.634,00	236.543.185,00
3	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	4.311,00
4	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	17.900.913,00	0,00
Jumlah		4.035.307.746,00	5.177.638.309,00

- d. Realisasi Pendapatan Bunga Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.224.677.557,00 dan Rp6.997.819.184,00. Pada Tahun Anggaran 2024 pendapatan bunga juga terdiri dari pendapatan bunga dana cadangan atas penempatan dana



Pemerintah Kota Bogor pada Bank DKI sebesar Rp921.640.002,00.

- e. Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp13.441.667,00 dan Rp24.235.714,00.
- f. Realisasi Pendapatan Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp397.410.914,00 dan Rp454.743.324,00.

Tabel 5.1.18

Realisasi Pendapatan Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Temuan Hasil Pemeriksaan	99.700.517,00	77.385.111,00
2	Pengembalian Sisa Belanja Tahun Sebelumnya	0,00	951.400,00
5	Kelebihan Pembayaran Pajak	39.057.344,00	53.929.779,00
6	Kelebihan Pembayaran retribusi	5.000,00	1.774.209,00
7	Penerimaan Jaminan Bongkar	128.000.000,00	313.150.000,00
8	Penerimaan Tidak Teridentifikasi	130.647.292,00	7.552.825,00
9	Kelebihan Pembayaran Bagian Laba Sisetor PDAM TA 2024	761,00	0,00
Jumlah		397.410.914,00	454.743.324,00

- g. Realisasi atas Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tahun 2024 sebesar Rp627.473.886,00 dan pada tahun 2023 sebesar Rp474.650.538,00.
- h. Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp14.649.420.176,00 dan Rp4.067.750.115,00 yang terinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.19

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.848.226.782,00	133.825.252,00
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	1.846.288.975,00	1.096.259.623,00
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	1.096.074.734,00	17.884.060,00
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	154.044.002,00	221.275.208,00
5	Pendapatan Denda Pajak Parkir	78.388.335,00	363.707.777,00
6	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	3.370.009,00	2.694.781,00
7	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	9.610.277.339,00	2.224.603.414,00
8	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	12.750.000,00	7.500.000,00
Jumlah		14.649.420.176,00	4.067.750.115,00

- i. Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp111.287.554,00 dan Rp223.447.933,00 yang terinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.20

Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	2.414.967,00	22.994.929,00
2	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	70.936.740,00	80.652.763,00
3	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	37.935.847,00	119.800.241,00
Jumlah		111.287.554,00	223.447.933,00

- j. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.836.302.493,00 dan Rp3.926.504.331,00 yang terinci sebagai berikut:



Tabel 5.1.21
Realisasi Pendapatan dari Pengembalian TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	38.096.568,00	0,00
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	20.508.895,00	65.745.380,00
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Perjalanan Dinas Biasa	1.051.981.009,00	246.789.583,00
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK	20.767,00	37.490,00
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKM	62.301,00	112.474,00
6	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.355.880,00	0,00
7	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	575.358.160,00	0,00
8	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	3.379.500,00	0,00
9	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	137.823.000,00	0,00
10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	9.500.000,00	0,00
11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Alat Angkutan	38.340.994,00	0,00
12	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan- Bangunan Gedung	878.426.277,00	0,00
13	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi- Jalan dan Jembatan	1.050.601.362,00	0,00
14	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi- Bangunan Air	15.318.823,00	0,00
15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	12.228.957,00	0,00
16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	3.300.000,00	0,00
17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi- Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang- Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	0,00	1.279.500,00
18	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan	0,00	68.324.678,00
19	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	196.095.933,00
20	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	0,00	22.025.000,00
21	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah Persil- Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan / Perusahaan	0,00	473.174.610,00
22	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan	0,00	804.813.158,00
23	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	318.659.034,00
24	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	128.310.319,00
25	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja- Taman	0,00	19.184.758,00
26	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan- Jalan Kota	0,00	1.430.363.961,00
27	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai / Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam- Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai / Pantai	0,00	74.351.255,00
28	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS	0,00	44.700.000,00
29	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	30.572.198,00
30	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	1.965.000,00



No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
	BOS		
	Jumlah	3.836.302.493,00	3.926.504.331,00

- k. Realisasi Pendapatan BLUD Pada tahun Anggaran 2024 sebesar Rp813.022.806,00 dan Rp350.851.552.368,80 pada tahun anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.22
Realisasi Pendapatan BLUD TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan BLUD	0,00	350.851.552.368,80
2	Pendapatan BLUD dari Hibah	668.815.000,00	0,00
3	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	122.290.221,00	0,00
4	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	21.917.585,00	0,00
	Jumlah	813.022.806,00	350.851.552.368,80

- l. Realisasi Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan Pada tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.481.604,00 dan Rp4.080.525,00 pada tahun anggaran 2023, merupakan denda dari hasil penjualan tanah.
- m. Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.101.860,00 dan Rp3.500.000,00 merupakan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

Rincian pendapatan asli daerah yang sah pada masing-masing Perangkat Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.23
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah per Perangkat Daerah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023		Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%) (5=4/3)	Lebih/ (Kurang) (Rp) (6=4-3)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%) (9=8/7)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)	
1	PUSKESMAS BOGOR SELATAN								
	Pendapatan BLUD	0,00	48.589.971,00	0,00	48.589.971,00	2.964.539.040,00	(2.915.949.069,00)	(98,36)	
2	PUSKESMAS CIPAKU								
	Pendapatan BLUD	0,00	58.195.376,00	0,00	58.195.376,00	3.294.700.539,00	(3.236.505.163,00)	(98,23)	
3	PUSKESMAS BONDONGAN								
	Pendapatan BLUD	0,00	9.793.422,00	0,00	9.793.422,00	2.136.637.973,00	(2.126.844.551,00)	(99,54)	
4	PUSKESMAS LAWANG GINTUNG								
	Pendapatan BLUD	0,00	9.953.933,00	0,00	9.953.933,00	1.433.053.666,00	(1.423.099.733,00)	(99,31)	
5	PUSKESMAS BOGOR TIMUR								
	Pendapatan BLUD	0,00	88.693.962,00	0,00	88.693.962,00	4.149.426.579,00	(4.060.732.617,00)	(97,86)	
6	PUSKESMAS PULO ARMYN								
	Pendapatan BLUD	0,00	20.987.955,00	0,00	20.987.955,00	2.163.102.123,00	(2.142.114.168,00)	(99,03)	
7	PUSKESMAS BOGOR TENGAH								
	Pendapatan BLUD	0,00	76.729.658,00	0,00	76.729.658,00	2.059.249.882,00	(1.982.520.224,00)	(96,27)	
8	PUSKESMAS SEMPUR								
	Pendapatan BLUD	0,00	13.823.288,00	0,00	13.823.288,00	1.471.779.676,00	(1.457.956.388,00)	(99,06)	
9	PUSKESMAS GANG AUT								
	Pendapatan BLUD	0,00	6.706.101,00	0,00	6.706.101,00	1.022.287.643,00	(1.015.581.542,00)	(99,34)	
10	PUSKESMAS BELONG								
	Pendapatan BLUD	0,00	9.475.017,00	0,00	9.475.017,00	616.285.661,00	(606.810.644,00)	(98,46)	





No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
11	PUSKESMAS MERDEKA							
	Pendapatan BLUD	0,00	23.602.469,00	0,00	23.602.469,00	2.002.742.450,00	(1.979.139.981,00)	(98,82)
12	PUSKESMAS SEMPLAK							
	Pendapatan BLUD	0,00	11.405.491,00	0,00	11.405.491,00	2.649.504.736,00	(2.638.099.245,00)	(99,57)
13	PUSKESMAS PANCASAN							
	Pendapatan BLUD	0,00	4.194.962,00	0,00	4.194.962,00	2.129.400.407,00	(2.125.205.445,00)	(99,80)
14	PUSKESMAS PASIR MULYA							
	Pendapatan BLUD	0,00	61.901.918,00	0,00	61.901.918,00	2.801.311.919,00	(2.739.410.001,00)	(97,79)
15	PUSKESMAS GANG KELOR							
	Pendapatan BLUD	0,00	19.308.238,00	0,00	19.308.238,00	2.069.051.985,00	(2.049.743.747,00)	(99,07)
16	PUSKESMAS SINDANG BARANG							
	Pendapatan BLUD	0,00	96.302.410,00	0,00	96.302.410,00	3.309.777.808,00	(3.213.475.398,00)	(97,09)
17	PUSKESMAS BOGOR UTARA							
	Pendapatan BLUD	0,00	56.613.358,00	0,00	56.613.358,00	3.879.107.811,00	(3.822.494.453,00)	(98,54)
18	PUSKESMAS TEGAL GUNDIL							
	Pendapatan BLUD	0,00	10.727.810,00	0,00	10.727.810,00	2.004.165.765,00	(1.993.437.955,00)	(99,46)
19	PUSKESMAS WARUNG JAMBU							
	Pendapatan BLUD	0,00	3.849.016,00	0,00	3.849.016,00	2.505.731.822,00	(2.501.882.806,00)	(99,85)
20	PUSKESMAS TANAH SAREAL							
	Pendapatan BLUD	0,00	8.229.797,00	0,00	8.229.797,00	2.732.874.429,00	(2.724.644.632,00)	(99,70)
21	PUSKESMAS PONDOK RUMPUT							
	Pendapatan BLUD	0,00	7.253.245,00	0,00	7.253.245,00	921.355.135,00	(914.101.890,00)	(99,21)
22	PUSKESMAS KEDUNG BADAK							
	Pendapatan BLUD	0,00	41.669.561,00	0,00	41.669.561,00	2.433.066.204,00	(2.391.396.643,00)	(98,29)
23	PUSKESMAS KAYU MANIS							
	Pendapatan BLUD	0,00	21.769.994,00	0,00	21.769.994,00	2.413.719.049,00	(2.391.949.055,00)	(99,10)
24	PUSKESMAS MEKARWANGI							
	Pendapatan BLUD	0,00	55.646.358,00	0,00	55.646.358,00	2.737.225.273,00	(2.681.578.915,00)	(97,97)
25	PUSKESMAS MULYAHARJA							
	Pendapatan BLUD	0,00	3.676.843,00	0,00	3.676.843,00	1.756.828.776,00	(1.753.151.933,00)	(99,79)
26	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH							
	Pendapatan BLUD	0,00	43.922.653,00	0,00	43.922.653,00	984.790.300,00	(940.867.647,00)	(95,54)
27	DINAS KESEHATAN							
	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	176.800,00	(176.800,00)	0,00
28	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH-BLUD							
	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	292.209.835.717,80	(292.209.835.717,80)	(100,00)
29	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	29.730,00	0,00	0,00
30	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN							
	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.178,00	0,00	0,00
	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	22.626.501,00	45.463.975,00	0,00	22.837.474,00	35.971.300,00	9.492.675,00	0,00
31	DINAS LINGKUNGAN HIDUP							
	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1.088.897,00	1.748.337,00	0,00	659.440,00	2.717.049,00	(968.712,00)	(35,65)
32	DINAS PERHUBUNGAN							
	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	20.663.100,00	(20.663.100,00)	(100,00)





No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
33	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							
	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	41.423.598,00	46.285.836,00	0,00	4.862.238,00	119.636.217,00	(73.350.381,00)	(61,31)
34	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN							
	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
35	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							
	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.000.000.000,00	1.389.417.875,00	138,94	389.417.875,00	2.087.860.934,00	(698.443.059,00)	(33,45)
	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	12.629.016,00	0,00	12.629.016,00	167.802.000,00	(155.172.984,00)	(92,47)
	Jasa Giro	3.315.080.955,00	4.035.307.746,00	121,73	720.226.791,00	5.177.638.309,00	(1.142.330.563,00)	(22,06)
	Pendapatan Bunga	7.000.000.000,00	7.224.677.557,00	103,21	224.677.557,00	6.997.819.184,00	226.858.373,00	3,24
	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	13.441.667,00	0,00	13.441.667,00	24.235.714,00	(10.794.047,00)	(44,54)
	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	230.348.570,00	0,00	230.348.570,00	87.653.367,00	142.695.203,00	162,79
	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	627.473.886,00	0,00	627.473.886,00	474.650.538,00	152.823.348,00	32,20
	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	10.304.416,00	17.786.906,00	0,00	7.482.490,00	44.228.737,00	(26.441.831,00)	(59,78)
	Pendapatan dari Pengembalian	5.251.636.097,00	3.836.302.493,00	73,05	(1.415.333.604,00)	3.926.504.331,00	(90.201.838,00)	(2,30)
	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	546579,00	4.481.604,00	0,00	3935025,00	4.080.525,00	401.079,00	9,83
	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	300.000,00	3.101.860,00	0,00	2.801.860,00	3.500.000,00	(398.140,00)	(11,38)
36	BADAN PENDAPATAN DAERAH							
	Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.135.000,00	(1.361.135.000,00)	(100,00)
	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	167.057.344,00	0,00	167.057.344,00	367.079.779,00	(200.022.435,00)	(54,49)
	Pendapatan Denda Pajak Daerah	7.888.105.138,00	14.649.420.176,00	185,72	6.761.315.038,00	4.067.750.115,00	10.581.670.061,00	260,14
JUMLAH		24.531.114.681,00	33.117.975.154,00	135,00	8.586.860.473,00	375.822.720.275,80	(342.704.745.121,80)	(91,19)

5.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pendapatan Transfer meliputi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Pendapatan Transfer Antar Daerah, Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan transfer dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor.

Alokasi Dana Transfer Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota Bogor diatur dalam:

- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;

Realisasi pendapatan transfer pada tahun anggaran 2024 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 dirinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.24
Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.380.642.513.566,00	1.369.427.755.442,00	99,19	(11.214.758.124,00)	1.249.655.329.523,00	119.772.425.919,00	9,58
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	350.967.470.646,00	342.450.420.356,00	97,57	(8.517.050.290,00)	379.201.972.848,00	(36.751.552.492,00)	(9,69)
Jumlah		1.731.609.984.212,00	1.711.878.175.798,00	98,86	(19.731.808.414,00)	1.628.857.302.371,00	83.020.873.427,00	5,10



Berdasarkan tabel diatas menunjukkan realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 mencapai 98,86% atau sebesar Rp1.711.878.175.798,00 dari target sebesar Rp1.731.609.984.212,00. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.628.857.302.371,00 mengalami kenaikan sebesar Rp83.020.873.427,00 atau 5,10%.

5.1.1.2.1 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Transfer Ke Daerah merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kebijakan TKD tahun 2024 berpedoman kepada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) beserta peraturan pelaksanaan turunannya. Secara umum sesuai tujuan pembentukannya, kebijakan TKD diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah, mendukung sektor-sektor prioritas yang akan dilaksanakan oleh daerah, serta meningkatkan sinergi kebijakan fiskal serta harmonisasi belanja pusat dan daerah dalam rangka mendukung kinerja daerah, mengentaskan kemiskinan, dan memajukan perekonomian daerah.

Adapun pokok arah kebijakan TKD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah.
2. Memperkuat kualitas pengelolaan TKD.
3. Memperkuat penggunaan earmarking TKD pada sektor prioritas.
4. Meningkatkan efektivitas dan optimalisasi penggunaan TKD mendukung pencapaian
5. Program prioritas nasional.
6. Meningkatkan harmonisasi kebijakan dan pengalokasian TKD untuk mengatasi stunting, kemiskinan, inflasi, dan investasi.
7. Mendorong Pemerintah Daerah agar menggunakan TKD untuk kegiatan yang produktif dengan *multiplier effect* yang tinggi.

Anggaran dan realisasi Dana Transfer ke Daerah pada Pemerintah Kota Bogor untuk periode tahun anggaran 2024 dan tahun anggaran 2023 dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 5.1.25
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan & Lainnya TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DANA BAGI HASIL PAJAK	73.761.004.000,00	85.946.116.000,00	116,52	12.185.112.000,00	82.465.899.156,00	3.480.216.844,00	4,22
2	DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM	29.477.228.000,00	28.477.228.000,00	96,61	(1.000.000.000,00)	19.739.952.531,00	8.737.275.469,00	44,26
3	DANA ALOKASI UMUM	858.600.617.000,00	853.803.503.264,00	99,44	(4.797.113.736,00)	792.504.632.043,00	61.298.871.221,00	7,73
4	DANA ALOKASI KHUSUS	390.756.000.566,00	373.153.244.178,00	95,50	(17.602.756.388,00)	349.032.591.793,00	24.120.652.385,00	6,91
5	INSENTIF FISKAL	28.047.664.000,00	28.047.664.000,00	100,00	0,00	5.912.254.000,00	22.135.410.000,00	374,40
	Jumlah	1.380.642.513.566,00	1.341.380.091.442,00	97,16	(39.262.422.124,00)	1.243.743.075.523,00	97.637.015.919,00	7,85

Untuk lebih rinci masing-masing penerimaan Transfer ke Daerah pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 dijelaskan pada uraian dibawah ini.

5.1.1.2.1.1 DANA BAGI HASIL PAJAK

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat - Transfer ke Daerah kepada Kota Bogor untuk periode Tahun Anggaran 2024 dan 2023, dengan rincian pada tabel berikut:



Tabel 5.1.26
Dana Bagi Hasil Pajak TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	3.171.963.000,00	14.620.813.000,00	460,94	11.448.850.000,00	4.704.756.064,00	9.916.056.936,00	210,77
2	DBH PPh Pasal 21	54.897.720.000,00	54.897.720.000,00	100,00	0,00	59.405.855.566,00	(4.508.135.566,00)	(7,59)
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	8.471.478.000,00	8.471.478.000,00	100,00	0,00	9.878.818.000,00	(1.407.340.000,00)	(14,25)
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	7.219.843.000,00	7.956.105.000,00	110,20	736.262.000,00	8.476.469.526,00	(520.364.526,00)	(6,14)
Jumlah		73.761.004.000,00	85.946.116.000,00	116,52	12.185.112.000,00	82.465.899.156,00	3.480.216.844,00	4,22

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan realiasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp85.946.116.000,00 atau mencapai 116.52% dari target sebesar Rp73.761.004.000,00, apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp3.480.216.844,00 atau 4,22%.

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak melampaui target yang telah ditetapkan karena adanya penyaluran kurang bayar sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 89 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024.

5.1.1.2.1.2 DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat - Transfer ke Daerah kepada Kota Bogor untuk periode Tahun Anggaran 2024 dan 2023, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.1.27
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	14.970.852.000,00	14.970.852.000,00	100,00	0,00	5.937.485.977,00	9.033.366.023,00	152,14
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	1.451.833.000,00	1.451.833.000,00	100,00	0,00	1.422.922.063,00	28.910.937,00	2,03
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	8.852.128.000,00	8.852.128.000,00	100,00	0,00	8.556.970.811,00	295.157.189,00	3,45
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	(102.000,00)	0,00
5	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.073.803.000,00	1.073.803.000,00	100,00	0,00	1.177.352.919,00	(103.549.919,00)	(8,80)
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	2.031.457.000,00	1.031.457.000,00	50,77	(1.000.000.000,00)	1.067.547.550,00	(36.090.550,00)	(3,38)
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.097.155.000,00	1.097.155.000,00	100,00	0,00	1.577.571.211,00	(480.416.211,00)	(30,45)
Jumlah		29.477.228.000,00	28.477.228.000,00	96,61	(1.000.000.000,00)	19.739.952.531,00	8.737.275.469,00	44,26

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan realiasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp28.477.228.000,00 atau mencapai 96,61% dari target sebesar Rp29.477.228.000,00 namun apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp8.737.275.469,00 atau 44,26%. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak melampaui target yang telah ditetapkan karena adanya penyaluran kurang bayar sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 89 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil



pada Tahun 2024.

5.1.1.2.1.3 DANA ALOKASI UMUM

Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. Rincian Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.28
Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Dana Alokasi Umum (DAU)	746.216.401.000,00	741.419.287.264,00	99,36	(4.797.113.736,00)	792.504.632.043,00	(51.085.344.779,00)	(6,45)
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	13.600.000.000,00	13.600.000.000,00	100,00	0,00	0,00	13.600.000.000,00	0,00
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	36.138.888.000,00	36.138.888.000,00	100,00	0,00	0,00	36.138.888.000,00	0,00
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	31.725.202.000,00	31.725.202.000,00	100,00	0,00	0,00	31.725.202.000,00	0,00
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	17.761.219.000,00	17.761.219.000,00	100,00	0,00	0,00	17.761.219.000,00	0,00
6	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	13.158.907.000,00	13.158.907.000,00	100,00	0,00	0,00	13.158.907.000,00	0,00
	Jumlah	858.600.617.000,00	853.803.503.264,00	99,44	(4.797.113.736,00)	792.504.632.043,00	61.298.871.221,00	(6,45)

Berdasarkan tabel diatas realisasi DAU tahun 2024 sebesar Rp 853.803.503.264,00 atau 99,44% dari target anggaran sebesar Rp845.441.710.000,00, ketidaktercapaian realisasi DAU tersebut dikarenakan untuk pembayaran pokok pinjaman kepada Lembaga Keuangan Non Bank, pembayaran pokok dilakukan dengan cara pemotongan langsung terhadap penyaluran Dana Alokasi Umum yang mengacu kepada perjanjian pengelolaan pinjaman. Besaran DAU dapat diperhitungkan sesuai dengan hasil rekonsiliasi antara pihak pertama dengan DJPK. Besarnya angsuran pokok setiap bulan sebesar 1/12 dari nilai DTU yang dapat diperhitungkan di tahun berkenaan yang dibayarkan setiap akhir bulan setelah masa tenggang terakhir sebesar Rp4.797.113.736,00 atau sebesar Rp399.759.478 setiap bulan.

5.1.1.2.1.4 DANA ALOKASI KHUSUS

Dana Alokasi Khusus (DAK) bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.1.29
Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	46.140.365.566,00	44.829.645.150,00	97,16	(1.310.720.416,00)	55.796.999.805,00	(10.967.354.655,00)	(19,66)
2	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	344.615.635.000,00	328.323.599.028,00	95,27	(16.292.035.972,00)	293.235.591.988,00	35.088.007.040,00	11,97
	Jumlah	390.756.000.566,00	373.153.244.178,00	95,50	(17.602.756.388,00)	349.032.591.793,00	24.120.652.385,00	6,91





Berdasarkan tabel di atas realisasi DAK Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp373.153.244.178,00, atau 95,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp390.756.000.566,00. Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp24.120.652.385,00 atau mencapai 6,91%. Penurunan realisasi DAK Fisik 2024 dibandingkan dengan realisasi 2023 yang disebabkan adanya gagal lelang pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana DAK Fisik sehingga tidak disalurkan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan untuk DAK Non Fisik tahun anggaran 2024 mengalami kenaikan karena pagu alokasi DAK non Fisik lebih besar dibandingkan tahun anggaran 2023, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 dan menjadi saldo kas earmark di RKUD. DAK Fisik realisasinya mencapai 97,16% dan DAK Non Fisik 95,27% dari pagu anggaran karena adanya efisiensi.

Rincian Dana Alokasi Khusus pada masing-masing bidang kegiatan dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.30
Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	240.703.000,00	204.102.129,00	84,79	(36.600.871,00)	0,00	204.102.129,00	0,00
2	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD	3.024.494.000,00	1.977.458.787,00	65,38	(1.047.035.213,00)	1.012.349.920,00	0,00	0,00
3	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	94.998.000,00	77.707.500,00	81,80	(17.290.500,00)	0,00	77.707.500,00	0,00
4	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	9.535.000.000,00	9.534.780.000,00	100,00	(220.000,00)	0,00	9.534.780.000,00	0,00
5	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00	0,00	0,00	0,00	591.507.340,00	(591.507.340,00)	(100,00)
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570.202.300,00	0,00	0,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	33.245.170.566,00	33.035.596.734,00	99,37	(209.573.832,00)	0,00	0,00	0,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Pengawasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768.000.000,00	(1.768.000.000,00)	(100,00)
9	DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Reguler - KB	0,00	0,00	0,00	0,00	74.265.000,00	(74.265.000,00)	(100,00)
10	DAK Fisik - Bidang Sanitasi - Reguler	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439.380.000,00	(10.439.380.000,00)	(100,00)
11	DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Reguler - Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	36.341.295.245,00	(36.341.295.245,00)	(100,00)
12	DAK Non Fisik - BOS Reguler	155.166.040.000,00	152.805.914.824,00	98,48	(2.360.125.176,00)	143.271.043.020,00	9.534.871.804,00	6,66
13	DAK Non Fisik - BOS Kinerja	2.335.000.000,00	2.335.000.000,00	100,00	0,00	1.882.500.000,00	452.500.000,00	24,04
14	DAK Non Fisik - TPG PNSD	103.382.644.000,00	103.382.644.000,00	100,00	0,00	104.353.815.000,00	(971.171.000,00)	(0,93)
15	DAK Non Fisik - Tamsil Guru PNSD	3.816.547.000,00	3.816.547.000,00	100,00	0,00	666.642.000,00	3.149.905.000,00	472,50
16	DAK Non Fisik - BOP PAUD	9.259.320.000,00	9.076.914.900,00	98,03	(182.405.100,00)	8.522.091.000,00	554.823.900,00	6,51
17	DAK Non Fisik - BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	-	12.689.369.200,00	(12.689.369.200,00)	(100,00)





No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
18	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	8.312.420.000,00	8.036.889.807,00	96,69	(275.530.193,00)	5.042.916.209,00	2.993.973.598,00	59,37
19	DAK Non Fisik-BOKKB- Pengawasan Obat dan Makanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	DAK Non Fisik - PK2UKM	0,00	0,00	0,00	0,00	415.324.540,00	(415.324.540,00)	(100,00)
21	DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Kepariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	DAK Non Fisik - Fasilitas Penanaman Modal	415.178.000,00	354.633.800,00	85,42	(60.544.200,00)	269.023.600,00	85.610.200,00	31,82
23	DAK Non Fisik-BOKKB- Akreditasi Puskesmas	0,00	0,00	0,00	0,00	11.406.964.000,00	(11.406.964.000,00)	(100,00)
24	DAK Non Fisik - BOKB - KB	0,00	0,00	0,00	0,00	4.715.903.419,00	(4.715.903.419,00)	(100,00)
25	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00	406.000.000,00	100,00	0,0	0,0	406.000.000,00	0,0
26	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	520.000.000,00	520.000.000,00	100,00	0,0	0,0	520.000.000,00	0,0
27	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	0,0	0,0	90.000.000,00	0,0
28	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	15.869.440.000,00	15.616.122.000,00	98,40	(253.318.000,00)	0,0	15.616.122.000,00	0,0
29	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00	0,0	0,0	180.000.000,00	0,0
30	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	26.860.435.000,00	15.174.498.103,00	56,49	(11.685.936.897,00)	0,0	15.174.498.103,00	0,0
31	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	615.131.000,00	0,0	0,0	(615.131.000,00)	0,0	0,0	0,0
32	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	17.387.480.000,00	16.528.434.594,00	95,06	(859.045.406,00)	0,0	0,0	0,0
Jumlah		390.756.000.566,00	373.153.244.178,00	95,50	(17.602.756.388,00)	349.032.591.793,00	(20.838.285.510,00)	(5,97)

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

5.1.1.2.2.1 Insentif Fiskal

Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Daerah atas pencapaian Kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja pemerintahan daerah antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar, dukungan terhadap kebijakan strategis nasional, dan/ atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. Berikut rincian realisasi Insentif Fiskal tahun anggaran 2024 dan tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.1.31
Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Insentif Fiskal	28.047.664.000,00	28.047.664.000,00	100,00	0,00	5.912.254.000,00	22.135.410.000,00	374,40
Jumlah		28.047.664.000,00	28.047.664.000,00	100,00	0,00	5.912.254.000,00	22.135.410.000,00	374,40

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan realisasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp28.047.664.000,00 atau mencapai 100,00% dari anggaran, sedangkan apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp22.135.410.000,00 atau mencapai 374,40%. Kenaikan disebabkan karena pada tahun anggaran 2024 Pemerintah Kota Bogor mendapatkan 2 (dua)



kategori yaitu insentif fiskal kinerja tahun sebelumnya dan kinerja tahun berjalan.

5.1.1.2.3 PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH

Transfer Antar Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
2. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
4. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
5. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Tabel 5.1.32
Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaiikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	311.531.583.096,00	303.076.793.631,00	97,29	(8.454.789.465,00)	301.185.316.222,00	1.891.477.409,00	0,63
2	Bantuan Keuangan	39.435.887.550,00	39.373.626.725,00	99,84	(62.260.825,00)	78.016.656.626,00	(38.643.029.901,00)	(49,53)
	Jumlah	350.967.470.646,00	342.450.420.356,00	97,57	(8.517.050.290,00)	379.201.972.848,00	(36.751.552.492,00)	(9,69)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah mencapai Rp342.450.420.356,00 atau 97,57% dari Anggaran sebesar Rp350.967.470.646,00. Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 terdapat penurunan sebesar Rp36.751.552.492,00 atau mencapai 9,69%. Sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa barat Nomor 973/Kep.139-Bapenda/2025 tentang Kurang/Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat per 31 Desember 2024 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mendapatkan Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp12.733.735.118,00.yang akan disalurkan pada Tahun Anggaran 2025.

Ketidaktercapaian Bantuan Keuangan yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat disebabkan oleh disalurkannya Bantuan Keuangan sesuai dengan realisasi fisik di Kabupaten/Kota, sisa bantuan keuangan terdiri dari efisiensi belanja, adapun untuk Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta terdapat sisa hasil efisiensi yang masih harus dikembalikan ke RKUD Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp6.666.000,00.

5.1.1.2.3.1 PENDAPATAN BAGI HASIL

Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Tabel 5.1.33
Pendapatan Bagi Hasil Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	110.254.634.061,00	107.078.086.620,00	97,12	(3.176.547.441,00)	104.770.397.085,00	2.307.689.535,00	2,20
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	71.406.794.875,00	66.162.370.710,00	92,66	(5.244.424.165,00)	68.172.519.150,00	(2.010.148.440,00)	(2,95)
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	70.084.028.487,00	70.084.028.487,00	100,00	0,00	64.638.380.437,00	5.445.648.050,00	8,42
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	253.424.659,00	219.606.800,00	86,66	(33.817.859,00)	208.652.187,00	10.954.613,00	5,25
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	59.532.701.014,00	59.532.701.014,00	100,00	0,00	63.395.367.363,00	(3.862.666.349,00)	(6,09)
	Jumlah	311.531.583.096,00	303.076.793.631,00	97,29	(8.454.789.465,00)	301.185.316.222,00	1.891.477.409,00	0,63

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan realisasi pendapatan bagi hasil pajak tahun anggaran 2024 mencapai Rp303.076.793.631,00 atau 97,29% dari anggaran sebesar Rp311.531.583.096,00, realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.891.477.409,00 atau mencapai 0,63% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023.

5.1.1.2.3.2 BANTUAN KEUANGAN

Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Realisasi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.1.34
Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah	39.435.887.550,00	39.373.626.725,00	99,84	(62.260.825,00)	78.016.656.626,00	(38.643.029.901,00)	(49,53)
	Jumlah	39.435.887.550,00	39.373.626.725,00	99,84	(62.260.825,00)	78.016.656.626,00	(38.643.029.901,00)	(49,53)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan realisasi bantuan keuangan tahun anggaran 2023 mencapai Rp39.373.626.725,00 atau 99,84% dari target sebesar Rp39.435.887.550,00. Realisasi tahun anggaran 2024 dibandingkan dengan tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp38.643.029.901,00 atau 49,53%. Realisasi bantuan keuangan tahun anggaran 2024 sesuai dengan realisasi belanja yang bersumber dari bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp39.373.626.725,00 sehingga terdapat sisa bantuan keuangan sebesar rincian realisasi:

1. Efisiensi lelang Revitalisasi RPH Terpadu sebesar Rp22.479.546,00
2. Revitalisasi Posyandu, terdapat perubahan jumlah Pos Yandu yang mendapatkan bantuan sehingga sisanya sebesar Rp36.760.826,00
3. Jaminan Kesehatan bagi PBPU dan PB yang didaftarkan oleh Pemda terdapat sisa koefisien penerima Bantuan Iuran BPJS Kelas sehingga sisanya sebesar Rp20.453,00.

5.1.2 BELANJA

Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2024 disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada tahun anggaran 2023 Pemerintah Kota Bogor telah menerapkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2023 dan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun



2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2024 serta Realisasi Tahun Anggaran 2023 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.35

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(Rp)	(%)
			(Rp)	(%)					
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)	
1	BELANJA OPERASI	2.846.195.789.921,00	2.774.250.053.629,00	97,47	(71.945.736.292,00)	2.508.123.306.971,00	266.126.746.658,00	10,61	
2	BELANJA MODAL	426.595.630.347,00	400.367.986.619,00	93,85	(26.227.643.728,00)	518.164.968.738,00	(117.796.982.119,00)	(22,73)	
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.359.952.269,00	2.187.943.885,00	34,40	(4.172.008.384,00)	1.066.654.400,00	1.121.289.485,00	105,12	
4	BELANJA TRANSFER	1.660.750.000,00	1.660.750.000,00	100,00	0,00	1.660.750.000,00	0,00	0,00	
	Jumlah	3.280.812.122.537,00	3.178.466.734.133,00	96,88	(102.345.388.404,00)	3.029.015.680.109,00	149.451.054.024,00	4,93	

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja tahun anggaran 2024 mencapai Rp3.178.466.734.133,00 atau 96.88% dari anggaran sebesar Rp3.280.812.122.537,00. Realisasi tahun anggaran 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi 2023 sebesar Rp149.451.054.024,00 atau mencapai 4,93% dengan rincian sebagai berikut:

5.1.2.1 BELANJA OPERASI

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 serta Realisasi Tahun Anggaran 2023 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.36

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)				
1	2		4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)	
1	Belanja Pegawai	1.270.881.665.338,00	1.242.957.964.907,00	97,80	(27.923.700.431,00)	1.063.654.426.888,00	179.303.538.019,00	16,86	
2	Belanja Barang dan Jasa	1.342.955.429.587,00	1.304.164.987.240,00	97,11	(38.790.442.347,00)	1.236.457.277.949,00	67.707.709.291,00	5,48	
3	Belanja Bunga	7.500.000.000,00	7.027.746.595,00	93,70	(472.253.405,00)	6.191.682.700,00	836.063.895,00	13,50	
4	Belanja Hibah	180.077.750.496,00	176.519.335.387,00	98,02	(3.558.415.109,00)	147.381.004.434,00	29.138.330.953,00	19,77	
5	Belanja Bantuan Sosial	44.780.944.500,00	43.580.019.500,00	97,32	(1.200.925.000,00)	54.438.915.000,00	(10.858.895.500,00)	(19,95)	
Jumlah		2.846.195.789.921,00	2.774.250.053.629,00	97,47	(71.945.736.292,00)	2.508.123.306.971,00	266.126.746.658,00	10,61	

Tabel diatas menunjukkan realisasi belanja operasi tahun anggaran 2024 mencapai Rp2.774.250.053.629,00 atau 97,47% dari anggaran sebesar Rp2.846.195.789.921,00 Realisasi tahun anggaran 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi 2023 sebesar Rp266.126.746.658,00 atau mencapai 10,61% dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.1.1 BELANJA PEGAWAI

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/ anggota DPRD, dan Pegawai ASN. Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah, wakil kepala daerah, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/ Jasa layanan lainnya dan honorarium yang selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan dalam peraturan perundang-undangan. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 serta Realisasi Tahun Anggaran 2023 dapat disajikan pada tabel berikut:



Tabel 5.1.37
Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaiakan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)		
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	581.730.632.816,00	572.966.490.524,00	98,49	(8.764.142.292,00)	483.142.741.393,00	89.823.749.131,00	18,59
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	398.613.926.442,00	393.170.766.177,00	98,63	(5.443.160.265,00)	314.944.193.159,00	78.226.573.018,00	24,84
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	150.855.513.635,00	148.571.534.471,00	98,49	(2.283.979.164,00)	145.108.326.637,00	3.463.207.834,00	2,39
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	48.135.349.320,00	47.141.457.844,00	97,94	(993.891.476,00)	47.497.252.680,00	(355.794.836,00)	(0,75)
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH / WKDH	181.755.551,00	64.134.616,00	35,29	(117.620.935,00)	179.275.989,00	(115.141.373,00)	(64,23)
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH / WKDH	2.361.776.258,00	2.329.008.000,00	98,61	(32.768.258,00)	2.018.520.000,00	310.488.000,00	15,38
7	Belanja Pegawai BLUD	89.002.711.316,00	78.714.573.275,00	88,44	(10.288.138.041,00)	70.764.117.030,00	7.950.456.245,00	11,24
	Jumlah	1.270.881.665.338,00	1.242.957.964.907,00	97,80	(27.923.700.431,00)	1.063.654.426.888,00	179.303.538.019,00	16,86

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2024 mencapai Rp1.242.957.964.907,00 atau 97,80% dari anggaran sebesar Rp1.270.881.665.338,00. Realisasi tahun anggaran 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi 2023 sebesar Rp179.303.538.019,00 atau mencapai 16,86%.

Penjelasan lebih lanjut atas Belanja Pegawai antara lain sebagai berikut:

- Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp572.966.490.524,00 dan Rp483.142.741.393,00 yang terinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.38
Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Gaji Pokok PNS	313.497.999.701,00	308.167.517.896,00
2	Belanja Gaji Pokok PPPK	84.067.202.433,00	30.805.677.772,00
3	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	28.269.036.359,00	27.536.181.853,00
4	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	6.165.325.644,00	2.475.623.032,00
5	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.683.805.000,00	6.677.640.000,00
6	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	22.188.019.000,00	22.253.536.000,00
7	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	8.152.942.000,00	3.360.077.000,00
8	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.890.084.175,00	4.377.790.000,00
9	Belanja Tunjangan Beras PNS	15.902.200.860,00	16.889.104.410,00
10	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.520.963.340,00	1.922.751.000,00
11	Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS	45.104.192.983,00	27.603.891.998,00
12	Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PPPK	495.994.994,00	8.625.284,00
13	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.195.227,00	4.160.781,00
14	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	977.381,00	362.567,00
15	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	25.903.395.590,00	26.409.586.504,00
16	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	4.842.964.629,00	1.857.050.222,00
17	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	642.881.405,00	631.231.976,00
18	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	176.550.228,00	67.046.557,00
19	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.928.130.353,00	1.893.712.791,00
20	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	529.629.222,00	201.173.750,00
	Jumlah	572.966.490.524,00	483.142.741.393,00

- Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp393.170.766.177,00 dan Rp314.944.193.159,00 yang terinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.39
Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	176.666.170.977,00	84.971.267.022,00
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	8.854.728.313,00	478.406.059,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	72.829.306.904,00	99.631.334.367,00
4	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	2.911.658.886,00	2.873.010.584,00
5	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	131.450.855.666,00	126.766.405.116,00



No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
6	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	265.407.475,00	223.770.011,00
7	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	192.637.956,00	0,00
Jumlah		393.170.766.177,00	314.944.193.159,00

- c. Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp148.571.534.471,00 dan Rp145.108.326.637,00 yang terinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.40
Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan
Objektif Lainnya ASN TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	4.377.192.195,00	4.380.753.191,00
2	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	8.412.494.494,00	8.013.275.505,00
3	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	821.355.539,00	984.304.793,00
4	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	402.067.032,00	440.441.143,00
5	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	3.473.652.848,00	2.337.764.302,00
6	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	251.717.413,00	561.601.967,00
7	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	78.470.726,00	72.988.131,00
8	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	8.811.631.712,00	7.636.659.093,00
9	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	3.301.917.593,00	5.601.502.327,00
10	Belanja TPG PNSD	96.477.790.420,00	102.134.248.685,00
11	Belanja Tamsil Guru PNSD	376.500.000,00	1.439.987.500,00
12	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.559.994.500,00	10.092.040.000,00
13	Belanja Honorarium Pengadaan Barang / Jasa	1.327.401.999,00	1.304.010.000,00
14	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	110.250.000,00	108.750.000,00
15	Belanja TPG PPPK	9.668.698.000,00	0,00
16	Belanja Tamsil Guru PPPK	3.120.400.000,00	0,00
Jumlah		148.571.534.471,00	145.108.326.637,00

- d. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp47.141.457.844,00 dan Rp47.497.252.680,00 yang terinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.41
Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Uang Representasi DPRD	1.111.635.000,00	1.114.260.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	109.384.800,00	111.846.000,00
3	Belanja Tunjangan Beras DPRD	124.996.920,00	125.141.760,00
4	Belanja Uang Paket DPRD	95.245.500,00	95.508.000,00
5	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.611.870.750,00	1.615.677.000,00
6	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	123.002.775,00	134.649.900,00
7	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	16.854.075,00	18.087.300,00
8	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.805.300.000,00	8.820.000.000,00
9	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.440.600.000,00	2.205.000.000,00
10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	599.456,00	653.952,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	272.160.000,00	264.960.000,00
12	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.285.892,00	2.292.192,00
13	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.857.676,00	6.876.576,00
14	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	23.509.000.000,00	23.568.000.000,00
15	Belanja Tunjangan Transportasi	9.442.000.000,00	9.408.000.000,00



No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
16	DPRD		
	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	469.665.000,00	6.300.000,00
	Jumlah	47.141.457.844,00	47.497.252.680,00

- e. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp64.134.616,00 dan Rp179.275.989,00 yang terinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.42

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Gaji Pokok KDH / WKDH	19.500.000,00	54.600.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga KDH / WKDH	2.370.000,00	6.636.000,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan KDH / WKDH	35.100.000,00	98.280.000,00
4	Belanja Tunjangan Beras KDH / WKDH	2.172.600,00	6.083.280,00
5	Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus KDH / WKDH	1.001.616,00	1.705.589,00
6	Belanja Pembulatan Gaji KDH / WKDH	640,00	1.840,00
7	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH / WKDH	3.840.000,00	11.520.000,00
8	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH / WKDH	37.440,00	112.320,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH / WKDH	112.320,00	336.960,00
	Jumlah	64.134.616,00	179.275.989,00

- f. Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.329.008.000,00 dan Rp2.018.520.000,00 yang terinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.43

Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.360.000,00	393.120.000,00
2	Belanja Dana Operasional KDH / WKDH	1.968.648.000,00	1.625.400.000,00
	Jumlah	2.329.008.000,00	2.018.520.000,00

- g. Realisasi Belanja Pegawai BLUD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp78.714.573.275,00 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp70.764.117.030,00.

Rincian Belanja Pegawai pada masing-masing Perangkat Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.44

Realisasi Belanja Pegawai per Perangkat Daerah TA 2024 dan 2023

No	SKPD	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang) (Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DINAS PENDIDIKAN	417.417.805.517,00	411.523.819.786,00	98,59	(5.893.985.731,00)	347.744.732.035,00	63.779.087.751,00	18,34
2	DINAS KESEHATAN	149.207.649.336,00	142.386.298.238,00	95,43	(6.821.351.098,00)	118.768.482.491,00	23.617.815.747,00	19,89
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	63.892.333.737,00	58.260.354.926,00	91,19	(5.631.978.811,00)	50.282.142.702,00	7.978.212.224,00	15,87
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	20.497.508.896,00	20.071.820.511,00	97,92	(425.688.385,00)	18.014.127.623,00	2.057.692.888,00	11,42
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	15.577.214.317,00	15.162.005.625,00	97,33	(415.208.692,00)	13.886.851.718,00	1.275.153.907,00	9,18
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.808.196.027,00	3.799.820.095,00	99,78	(8.375.932,00)	3.246.025.259,00	553.794.836,00	17,06
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	36.526.712.116,00	36.514.749.564,00	99,97	(11.962.552,00)	31.210.204.002,00	5.304.545.562,00	17,00
8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	13.194.949.805,00	12.663.890.558,00	95,98	(531.059.247,00)	11.379.425.803,00	1.284.464.755,00	11,29
9	DINAS SOSIAL	9.566.030.617,00	9.498.958.668,00	99,30	(67.071.949,00)	7.814.140.617,00	1.684.818.051,00	21,56
10	DINAS TENAGA KERJA	8.951.946.399,00	8.818.719.257,00	98,51	(133.227.142,00)	7.153.276.589,00	1.665.442.668,00	23,28





No	SKPD	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7.336.360.510,00	7.262.658.599,00	99,00	(73.701.911,00)	6.089.850.350,00	1.172.808.249,00	19,26
12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	15.257.693.367,00	15.240.760.148,00	99,89	(16.933.219,00)	12.883.268.934,00	2.357.491.214,00	18,30
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	35.877.108.051,00	35.283.732.859,00	98,35	(593.375.192,00)	30.208.457.978,00	5.075.274.881,00	16,80
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	11.041.161.326,00	10.991.326.702,00	99,55	(49.834.624,00)	9.106.518.171,00	1.884.808.531,00	20,70
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.547.018.873,00	6.528.028.309,00	99,71	(18.990.564,00)	5.529.581.072,00	998.447.237,00	18,06
16	DINAS PERHUBUNGAN	36.907.213.231,00	36.728.058.543,00	99,51	(179.154.688,00)	31.106.829.608,00	5.621.228.935,00	18,07
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	13.016.590.892,00	13.004.555.063,00	99,91	(12.035.829,00)	10.056.662.932,00	2.947.892.131,00	29,31
18	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN	14.335.020.339,00	14.097.216.289,00	98,34	(237.804.050,00)	12.763.659.754,00	1.333.556.535,00	10,45
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	11.109.125.951,00	11.092.593.087,00	99,85	(16.532.864,00)	9.415.533.298,00	1.677.059.789,00	17,81
20	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	9.703.890.520,00	9.598.351.556,00	98,91	(105.538.964,00)	8.486.133.802,00	1.112.217.754,00	13,11
21	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	8.155.145.218,00	8.058.196.837,00	98,81	(96.948.381,00)	6.869.256.346,00	1.188.940.491,00	17,31
22	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	8.618.757.920,00	8.484.271.827,00	98,44	(134.486.093,00)	7.085.649.254,00	1.398.622.573,00	19,74
23	SEKRETARIAT DAERAH	50.666.695.560,00	49.909.912.944,00	98,51	(756.782.616,00)	40.407.418.922,00	9.502.494.022,00	23,52
24	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	60.616.212.110,00	59.501.494.349,00	98,16	(1.114.717.761,00)	57.808.128.472,00	1.693.365.877,00	2,93
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	14.810.354.492,00	14.798.134.442,00	99,92	(12.220.050,00)	12.096.400.736,00	2.701.733.706,00	22,34
26	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	13.905.766.148,00	13.317.482.934,00	95,77	(588.283.214,00)	10.716.081.034,00	2.601.401.900,00	24,28
27	BADAN PENDAPATAN DAERAH	36.537.410.611,00	35.691.854.742,00	97,69	(845.555.869,00)	36.956.307.352,00	(1.264.452.610,00)	(3,42)
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	15.980.987.715,00	15.778.072.669,00	98,73	(202.915.046,00)	13.759.896.161,00	2.018.176.508,00	14,67
29	INSPEKTORAT	21.452.550.464,00	21.421.304.940,00	99,85	(31.245.524,00)	16.027.698.740,00	5.393.606.200,00	33,65
30	KECAMATAN BOGOR UTARA	17.138.305.299,00	17.070.023.940,00	99,60	(68.281.359,00)	14.492.182.073,00	2.577.841.867,00	17,79
31	KECAMATAN BOGOR SELATAN	30.145.097.946,00	29.285.615.285,00	97,15	(859.482.661,00)	24.695.566.644,00	4.590.048.641,00	18,59
32	KECAMATAN BOGOR TIMUR	13.884.663.696,00	13.345.999.144,00	96,12	(538.664.552,00)	10.718.821.079,00	2.627.178.065,00	24,51
33	KECAMATAN BOGOR BARAT	29.570.259.742,00	29.092.918.522,00	98,39	(477.341.220,00)	24.734.004.605,00	4.358.913.917,00	17,62
34	KECAMATAN BOGOR TENGAH	21.789.685.744,00	21.589.639.148,00	99,08	(200.046.596,00)	18.414.870.979,00	3.174.768.169,00	17,24
35	KECAMATAN TANAH SAREAL	21.976.686.229,00	21.610.686.097,00	98,33	(366.000.132,00)	18.592.389.436,00	3.018.296.661,00	16,23
36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.861.556.617,00	5.474.638.704,00	93,40	(386.917.913,00)	5.133.850.317,00	340.788.387,00	6,64
Jumlah		1.270.881.665.338,00	1.242.957.964.907,00	97,80	(27.923.700.431,00)	1.063.654.426.888,00	179.303.538.019,00	16,86

5.1.2.1.2 BELANJA BARANG DAN JASA

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain. Pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 serta Realisasi Tahun Anggaran 2023 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.45
Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Barang	254.886.025.281,00	237.760.321.885,00	93,28	(17.125.703.396,00)	175.422.007.590,00	62.338.314.295,00	35,54
2	Belanja Jasa	435.636.872.229,00	414.617.730.955,00	95,18	(21.019.141.274,00)	423.062.067.821,00	(8.444.336.866,00)	(2,00)
3	Belanja Pemeliharaan	119.191.646.477,00	116.798.066.547,00	97,99	(2.393.579.930,00)	129.645.432.722,00	(12.847.366.175,00)	(9,91)
4	Belanja Perjalanan Dinas	98.263.810.665,00	85.268.016.110,00	86,77	(12.995.794.555,00)	85.890.101.324,00	(622.085.214,00)	(0,72)
5	Belanja Uang dan / atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat	47.637.620.800,00	46.269.973.715,00	97,13	(1.367.647.085,00)	56.273.712.418,00	(10.003.738.703,00)	(17,78)
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	75.754.584.093,00	75.033.649.408,00	99,05	(720.934.685,00)	81.091.691.202,00	(6.058.041.794,00)	(7,47)
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	294.197.390.042,00	311.886.037.328,00	106,01	17.688.647.286,00	285.072.264.872,00	26.813.772.456,00	9,41
8	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	17.387.480.000,00	16.531.191.292,00	95,00	(856.288.708,00)	16.531.191.292,00	0,00	0,00
Jumlah		1.342.955.429.587,00	1.304.164.987.240,00	97,11	(38.790.442.347,00)	1.236.457.277.949,00	67.707.709.291,00	5,48



Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2024 mencapai Rp1.304.164.987.240,00 atau 97,11% dari anggaran sebesar Rp1.342.955.429.587,00. Realisasi tahun anggaran 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi 2023 sebesar Rp67.707.709.291,00 atau mencapai 5,48%.

Penjelasan lebih lanjut atas Belanja Barang dan Jasa antara lain sebagai berikut:

- a. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp237.760.321.885,00 dan Rp175.422.007.590,00 yang terinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.46
Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	25.026.384.824,00	18.545.828.023,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	857.616.794,00	2.491.984.600,00
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	23.211.237.995,00	26.400.355.446,00
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	17.238.400,00	31.140,00
5	Belanja Bahan-Bahan / Bibit Tanaman	1.485.632.693,00	1.028.203.088,00
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	78.261.580,00	10.438.800,00
7	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	91.385.800,00	87.038.200,00
8	Belanja Bahan-Bahan / Bibit Ternak / Bibit Ikan	84.456.100,00	62.469.200,00
9	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	23.790.997,00	5.063.080.701,00
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	6.934.596.162,00	6.377.413.395,00
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	1.007.446.900,00	397.781.820,00
12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	63.901.500,00	39.859.800,00
13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	157.444.500,00	14.417.000,00
14	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	492.945.500,00	258.258.900,00
15	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	4.935.500,00	4.559.880,00
16	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	85.962.285,00	6.980.000,00
17	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.743.323.305,00	12.707.930.083,00
18	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.483.294.736,00	1.975.897.694,00
19	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	301.562.500,00	243.578.260,00
20	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	130.859.500,00	69.680.000,00
21	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen / Administrasi Tender	0,00	600.000,00
22	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.047.890.088,00	5.035.677.829,00
23	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.648.005.970,00	1.137.383.851,00
24	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	12.507.618.756,00	7.542.410.588,00
25	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	3.770.180.910,00	1.280.719.356,00
26	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	666.319.525,00	173.294.600,00
27	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir / Cendera Mata	1.483.594.450,00	1.839.231.762,00
28	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.168.920.605,00	2.916.500.395,00
29	Belanja Obat-Obatan-Obat	9.296.454.388,00	3.069.950.488,00
30	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	6.511.845.076,00	75.083.000,00
31	Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat	64.223.539.412,00	36.776.436.508,00
32	Belanja Natura dan Pakan-Natura	9.053.422.401,00	2.284.155.120,00
33	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	180.019.250,00	80.065.780,00
34	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	0,00	25.868.700,00
35	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	11.878.624,00	4.119.000,00
36	Belanja Makanan dan Minuman		20.042.576.577,00



No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
	Rapat	19.608.205.236,00	
37	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.926.024.167,00	4.525.205.570,00
38	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	114.172.000,00	69.975.000,00
39	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	0,00	2.179.554.084,00
40	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	206.120.000,00	55.700.000,00
41	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.414.855.510,00	5.972.917.920,00
42	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	1.027.500.000,00	912.500.000,00
43	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	645.188.598,00	933.870.355,00
44	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	627.649.530,00	790.158.752,00
45	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	99.000.000,00	705.618.560,00
46	Belanja Pakaian Penyelamatan	34.000.000,00	0,00
47	Belanja Pakaian Siaga	23.550.000,00	65.614.660
48	Belanja Pakaian Teknik	38.074.665,00	36.973.700
49	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	84.609.000,00	68.369.920
50	Belanja Pakaian Adat Daerah	87.127.000,00	56.440.000
51	Belanja Pakaian Batik Tradisional	112.500.000,00	0,00
52	Belanja Pakaian Olahraga	43.050.000,00	455.995.700
53	Belanja Pakaian Paskibraka	176.383.200,00	0,00
54	Belanja Pakaian Jas / Safari	5.100.000,00	58.354.065,0
55	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	367.599.650,00	135.258.800,0
56	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	13.085.459.723,00	104.839.500,0
57	Belanja Pipa-Pipa Beton Pratekan	0,00	199.047.420,00
58	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	0,00	25.754.000,00
59	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	30.360.000,00	0,00
60	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	6.530.000,00	0,00
61	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel TakBermesin-Perkakas Bengkel Kerja	1.225.600,00	0,00
62	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	450.300,00	0,00
63	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	788.540,00	0,00
64	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-AlatLaboratorium Farmasi	51.846.220,00	0,00
65	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	58.238.000,00	0,00
66	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-PeralatanJaringan	8.737.920,00	0,00
67	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-SepatuLapangan	24.010.000,00	0,00
Jumlah		237.760.321.885,00	175.422.007.590,00

b. Realisasi Belanja Jasa Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp414.617.730.955,00 dan Rp423.062.067.821,00 yang terinci sebagai berikut :

Tabel 5.1.47

Realisasi Belanja Jasa Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.047.189.800,00	6.104.465.000,00
2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.467.430.000,00	6.886.345.000,00
3	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	529.200.000,00	302.400.000,00
4	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	5.600.000,00	2.739.720.000,00
5	Honorarium Rohaniwan		11.800.000,00





No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
		8.900.000,00	
6	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	6.000.000,00	4.250.000,00
7	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	21.600.000,00	48.000.000,00
8	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.663.600.000,00	21.300.000,00
9	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	567.100.000,00	601.700.000,00
10	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	23.383.003.720,00	40.836.910.000,00
11	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	7.785.762.920,00	18.713.652.956,00
12	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	1.704.049.448,00	1.183.474.150,00
13	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	17.122.554.712,00	14.268.305.301,00
14	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	4.989.566.749,00	4.306.400.000,00
15	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	975.000.000,00	975.000.000,00
16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	1.817.500.000,00	1.101.196.394,00
17	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	770.800.000,00	714.400.000,00
18	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	0,00	1.959.450.000,00
19	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	0,00	7.768.116.000,00
20	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	520.000.000,00	343.400.000,00
21	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	0,00	1.433.280.000,00
22	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	826.650.000,00	995.450.000,00
23	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	34.831.042.061,00	21.744.339.181,00
24	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	333.308.000,00	628.950.000,00
25	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.919.781.844,00	7.550.394.232,00
26	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.351.140.467,00	3.334.121.448,00
27	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	62.609.537.408,00	61.048.203.715,00
28	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	16.704.253.644,00	10.060.213.353,00
29	Belanja Jasa Tenaga Caraka	120.000.000,00	137.030.000,00
30	Belanja Jasa Tenaga Supir	3.588.901.511,00	2.798.240.270,00
31	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	192.240.150,00	143.500.000,00
32	Belanja Jasa Audit / Surveillance ISO	407.468.340,00	865.507.890,00
33	Belanja Jasa Juri Perlombaan / Pertandingan	362.850.000,00	457.750.000,00
34	Belanja Jasa Tata Rias	11.000.000,00	12.000.000,00
35	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	2.497.869.146,00	4.127.753.912,00
36	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	43.666.643,00	51.768.848,00
37	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	0,00	336.000.000,00
38	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	199.973.738,00	69.730.200,00
39	Belanja Jasa Konversi Aplikasi / Sistem Informasi	1.996.282.510,00	3.773.034.510,00
40	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.782.025.484,00	4.625.175.788,00
41	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	490.267.685,00	214.966.060,00
42	Belanja Jasa Kalibrasi	435.990.500,00	77.197.500,00
43	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	74.639.000,00	0,00
44	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	265.600.700,00	0,00
45	Belanja Jasa Jalan / Tol	2.107.500,00	0,00
46	Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film, dan Pemetretan	6.595.345.400,00	8.205.372.225,00
47	Belanja Tagihan Telepon	276.216.162,00	299.173.815,00
48	Belanja Tagihan Air	3.156.202.695,00	2.921.397.116,00
49	Belanja Tagihan Listrik	46.720.799.405,00	48.787.292.736,00
50	Belanja Langganan Jurnal / Surat Kabar / Majalah	592.667.800,00	662.983.899,00
51	Belanja Kawat / Faksimili / Internet / TV Berlangganan	6.324.280.737,00	6.199.338.493,00
52	Belanja Paket / Pengiriman	4.428.000,00	1.790.500,00





No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
53	Belanja Registrasi / Keanggotaan	2.624.337.000,00	996.127.500,00
54	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.244.009.054,00	2.350.498.722,00
55	Belanja Pengolahan Air Limbah	28.754.900,00	59.762.678,00
56	Belanja Lembur	0,00	150.000.000,00
57	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	200.000.000,00	
58	Belanja Medical Check Up	128.162.985,00	72.131.685,00
59	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	0,00	119.642.882,00
60	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	75.063.978.740,00	60.111.815.660,00
61	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	7.756.162.400,00	7.968.234.960,00
62	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.463.264.411,00	5.132.484.383,00
63	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	304.077.987,00	338.674.357,00
64	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	380.234.910,00	443.793.744,00
65	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	822.509.469,00	1.811.765.428,00
66	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	829.523.200,00	0,00
67	Belanja Sewa Tanah Kering	80.500.000,00	80.000.000,00
68	Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga	49.000.000,00	26.000.000,00
69	Belanja Sewa Tanah Lapangan Parkir	38.880.000,00	37.800.000,00
70	Belanja Sewa Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam	77.167.800,00	72.000.000,00
71	Belanja Sewa Electric Generating Set	0,00	7.000.000,00
72	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.839.897.856,00	1.003.775.000,00
73	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	42.180.000,00	0,00
74	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	6.836.000,00	0,00
75	Belanja Sewa Mebel	321.359.100,00	238.327.960,00
76	Belanja Sewa Alat Pendingin	0,00	35.309.700,00
77	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.790.239.993,00	821.239.200,00
78	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	15.324.600,00	460.800.200,00
79	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	0,00	28.000.000,00
80	Belanja Sewa Sumber Tenaga	149.002.100,00	104.248.300,00
81	Belanja Sewa Peralatan Umum	7.434.000,00	588.856.200,00
82	Belanja Sewa Komputer Jaringan	702.798.120,00	575.476.299,00
83	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	722.000.000,00	0,00
84	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	912.047.400,00	1.946.951.944,00
85	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	27.000.000,00
86	Belanja Sewa Taman	22.826.200,00	0,00
87	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.339.821.944,00	26.000.000,00
88	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	152.500.000,00	225.000.000,00
89	Belanja Sewa Audio Visual	0,00	5.000.000,00
90	Belanja Sewa Tanaman	171.295.200,00	142.548.420,00
91	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	2.009.154.723,00	572.835.900,00
92	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	34.247.940,00	0,00
93	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	1.017.096.099,00	457.590.179,00
94	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	6.762.695.634,00	6.092.550.240,00
95	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil	5.727.037.915,00	1.234.082.460,00





No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
	Transportasi		
96	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	0,00	331.695.750,00
97	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	0,00	78.510.300,00
98	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	279.750.525,00	0,00
99	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	755.748.935,00	2.719.782.746,00
100	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	648.019.110,00	219.780.000,00
101	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	434.543.910,00	434.184.270,00
102	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	2.051.546.298,00	1.998.742.839,00
103	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	2.504.719.212,00	1.300.468.281,00
104	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	3.424.900.597,00	938.975.195,00
105	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	59.995.500,00	0,00
106	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	0,00	99.589.000,00
107	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	0,00	163.922.050,00
108	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	476.478.600,00	2.317.719.780,00
109	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	1.345.648.325,00	1.614.464.676,00
110	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	0,00	639.169.084,00
111	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	1.268.828.390,00	1.088.624.000,00
112	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	269.643.420,00	490.586.700,00
113	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	91.697.100,00	98.750.484,00
114	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	282.239.700,00	335.228.214,00
115	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	4.846.563.624,00	6.853.243.129,00
116	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	1.152.002.250,00	1.581.420.240,00
117	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	136.463.400,00	0,00
118	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	0,00	99.240.660,00
119	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Industri Pariwisata	0,00	0,00
120	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisata	90.742.500,00	85.164.750,00
121	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata	0,00	172.993.500,00
122	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Kepariwisata	0,00	79.753.500,00
123	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	8.000.000,00	11.000.000,00
124	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	135.000.000,00	82.000.000,00
125	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	72.000.000,00	114.000.000,00
126	Belanja Kursus Singkat /		1.974.957.000,00



No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
	Pelatihan	843.877.000,00	
127	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	1.775.681.000,00
128	Belanja Diklat Kepemimpinan	501.571.000,00	546.856.180,00
Jumlah		414.617.730.955,00	423.062.067.821,00

c. Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp116.798.066.547,00 dan Rp129.645.432.722,00 yang terinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.48
Belanja Pemeliharaan Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	107.920.000,00	0,00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	158.000.000,00	1.345.192.350,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder	87.409.000,00	429.101.165,00
4	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	268.457.300,00	277.805.050,00
5	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	299.546.700,00	298.809.120,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.447.838.048,00	1.107.730.616,00
7	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	9.065.546.712,00	9.285.954.052,00
8	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	130.495.843,00	308.142.471,00
9	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	287.128.080,00	179.343.400,00
10	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.591.256.283,00	1.520.574.206,00
11	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	31.999.500,00	25.957.400,00
12	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	12.350.000,00	0,00
13	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	158.500.000,00	0,00
14	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman / Ikan / Ternak	2.580.000,00	294.152.250,00
15	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	98.927.000,00	288.643.000,00
16	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	768.661.218,00	433.043.420,00
17	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	357.451.750,00	297.408.028,00
18	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.113.826.302,00	1.453.302.384,00
19	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	148.019.850,00	33.856.943,00
20	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	116.077.400,00
21	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	165.101.710,00	239.583.100,00
22	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	259.442.500,00	286.512.010,00
23	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak	17.275.000,00	0,00
24	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat	0,00	199.600.200,00





No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
	Studio-Alat Studio Lainnya		
25	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	49.190.760,00	0,00
26	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi	0,00	15.307.500,00
27	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	567.977.642,00	595.680.886,00
28	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.331.028.487,00	1.528.259.311,00
29	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	661.340.800,00	280.018.550,00
30	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	410.883.690,00	53.170.040,00
31	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	215.628.485,00	688.753.211,00
32	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya	0,00	37.020.000,00
33	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	159.688.152,00	523.911.621,00
34	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	21.817.211.008,00	17.666.001.336,00
35	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	199.540.060,00
36	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	25.641.000,00	88.846.620,00
37	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	2.876.584.354,00	8.255.975.168,00
38	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel / Hanggar	243.667.909,00	0,00
39	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	1.969.487.091,00	0,00
40	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.475.857.562,00	0,00
41	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya	0,00	10.547.876.571,00
42	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	74.784.918,00	0,00
43	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	370.406.232,00	0,00
44	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa	281.124.742,00	0,00
45	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	39.035.881.342,00	43.326.112.583,00
46	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota	181.285.200,00	49.239.600,00
47	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur	0,00	575.142.234,00
48	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi	0,00	1.873.489.271,00
49	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya	302.463.969,00	0,00
50	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	24.165.153.348,00	23.110.926.784,00
51	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	153.542.818,00	0,00
52	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	1.718.099.705,00	0,00
53	Belanja Pemeliharaan Bangunan	0,00	882.131.103,00



No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
	Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya		
54	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	49.764.618,00	49.772.010,00
55	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	703.409.419,00	877.469.698,00
56	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	380.230.500,00	0,00
Jumlah		116.798.066.547,00	129.645.432.722,00

- d. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp85.268.016.110,00 dan Rp85.890.101.324,00 yang terinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.49

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	57.514.851.625,00	41.283.907.263,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0,00	0,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.967.853.850,00	11.617.414.032,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15.802.146.287,00	14.771.875.061,00
5	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.692.573.810,00	4.192.970.600,00
6	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	2.290.590.538,00	14.023.934.368,00
Jumlah		85.268.016.110,00	85.890.101.324,00

- e. Realisasi Belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp46.269.973.715,00 dan Rp56.273.712.418,00 yang terinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.50

Realisasi Belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	4.983.670.000,00	23.568.440.008,00
2	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	105.000.000,00	105.000.000,00
3	Belanja Beasiswa	1.050.110.000,00	880.050.000,00
4	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	14.985.216.401,00	0,00
5	Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain	4.237.200.000,00	0,00
6	Belanja Uang yang Diberikan kepada Karang Taruna	175.200.000,00	0,00
7	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	481.250.000,00	0,00
8	Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu	8.598.200.000,00	0,00
9	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	0,00	43.200.000,00
10	Belanja Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian	0,00	2.917.440,00
11	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	719.200.000,00	1.783.371.860,00
12	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	10.934.927.314,00	29.890.733.110,00
Jumlah		46.269.973.715,00	56.273.712.418,00

Rincian Belanja Barang dan Jasa pada masing-masing Perangkat Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:





Tabel 5.1.51
Realisasi Belanja Barang dan Jasa per Perangkat Daerah

No	SKPD	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DINAS PENDIDIKAN	144.574.032.484,00	137.910.962.933,00	95,39	(6.663.069.551,00)	155.793.070.676,00	(17.882.107.743,00)	(11,48)
2	DINAS KESEHATAN	192.305.443.025,00	178.746.028.287,00	92,95	(13.559.414.738,00)	155.790.553.677,00	22.955.474.610,00	14,73
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	266.489.493.488,00	288.917.179.193,00	108,42	22.427.685.705,00	262.281.771.629,00	26.635.407.564,00	10,16
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	80.679.466.050,00	77.581.900.838,00	96,16	(3.097.565.212,00)	63.614.619.124,00	13.967.281.714,00	21,96
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	139.848.109.292,00	137.211.228.552,00	98,11	(2.636.880.740,00)	135.415.461.410,00	1.795.767.142,00	1,33
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.746.032.660,00	4.158.871.360,00	87,63	(587.161.300,00)	4.347.754.587,00	(188.883.227,00)	(4,34)
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	11.961.793.399,00	11.708.363.126,00	97,88	(253.430.273,00)	10.538.394.418,00	1.169.968.708,00	11,10
8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	4.010.761.078,00	3.676.419.440,00	91,66	(334.341.638,00)	3.332.950.056,00	343.469.384,00	10,31
9	DINAS SOSIAL	7.683.787.183,00	7.084.062.863,00	92,19	(599.724.320,00)	3.816.337.168,00	3.267.725.695,00	85,62
10	DINAS TENAGA KERJA	9.854.638.727,00	9.536.967.770,00	96,78	(317.670.957,00)	4.044.523.326,00	5.492.444.444,00	135,80
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7.262.944.295,00	6.973.091.842,00	96,01	(289.852.453,00)	4.292.242.404,00	2.680.849.438,00	62,46
12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	13.543.362.409,00	13.391.855.444,00	98,88	(151.506.965,00)	3.951.329.023,00	9.440.526.421,00	238,92
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	85.045.445.188,00	78.059.050.076,00	91,79	(6.986.395.112,00)	76.821.968.307,00	1.237.081.769,00	1,61
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.979.541.604,00	5.616.977.279,00	93,94	(362.564.325,00)	6.057.656.759,00	(440.679.480,00)	(7,27)
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	12.766.356.315,00	12.255.810.842,00	96,00	(510.545.473,00)	10.890.347.730,00	1.365.463.112,00	12,54
16	DINAS PERHUBUNGAN	77.714.358.651,00	72.800.723.402,00	93,68	(4.913.635.249,00)	73.726.168.252,00	(925.444.850,00)	(1,26)
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	11.113.360.186,00	10.986.430.788,00	98,86	(126.929.398,00)	11.833.802.935,00	(847.372.147,00)	(7,16)
18	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	4.543.715.482,00	4.248.465.973,00	93,50	(295.249.509,00)	6.334.385.838,00	(2.085.919.865,00)	(32,93)
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.140.684.004,00	4.091.752.708,00	98,82	(48.931.296,00)	4.547.700.193,00	(455.947.485,00)	(10,03)
20	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	8.749.988.425,00	8.289.693.271,00	94,74	(460.295.154,00)	29.028.071.092,00	(20.738.377.821,00)	(71,44)
21	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	3.137.270.411,00	3.050.521.631,00	97,23	(86.748.780,00)	2.924.583.493,00	125.938.138,00	4,31
22	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	4.295.441.511,00	4.107.428.532,00	95,62	(188.012.979,00)	6.237.962.005,00	(2.130.533.473,00)	(34,15)
23	SEKRETARIAT DAERAH	42.376.053.074,00	40.529.812.196,00	95,64	(1.846.240.878,00)	40.046.372.750,00	483.439.446,00	1,21
24	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	89.340.007.528,00	77.726.744.290,00	87,00	(11.613.263.238,00)	75.912.754.285,00	1.813.990.005,00	2,39
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	8.024.743.113,00	7.739.456.296,00	96,44	(285.286.817,00)	8.794.667.049,00	(1.055.210.753,00)	(12,00)
26	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	9.392.974.881,00	8.562.122.246,00	91,15	(830.852.635,00)	9.457.511.859,00	(895.389.613,00)	(9,47)
27	BADAN PENDAPATAN DAERAH	10.419.515.225,00	10.195.094.770,00	97,85	(224.420.455,00)	10.742.707.177,00	(547.612.407,00)	(5,10)
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	7.329.553.536,00	5.874.987.890,00	80,15	(1.454.565.646,00)	6.760.307.901,00	(885.320.011,00)	(13,10)
29	INSPEKTORAT	4.268.052.389,00	3.451.023.120,00	80,86	(817.029.269,00)	3.348.419.063,00	102.604.057,00	3,06
30	KECAMATAN BOGOR UTARA	9.281.853.016,00	9.172.216.082,00	98,82	(109.636.934,00)	6.077.518.087,00	3.094.697.995,00	50,92
31	KECAMATAN BOGOR SELATAN	14.628.153.398,00	14.236.256.394,00	97,32	(391.897.004,00)	9.740.103.292,00	4.496.153.102,00	46,16
32	KECAMATAN BOGOR TIMUR	8.380.109.944,00	8.122.560.047,00	96,93	(257.549.897,00)	4.708.873.895,00	3.413.686.152,00	72,49
33	KECAMATAN BOGOR BARAT	12.343.524.132,00	12.063.634.362,00	97,73	(279.889.770,00)	8.846.868.979,00	3.216.765.383,00	36,36
34	KECAMATAN BOGOR TENGAH	9.908.095.153,00	9.841.827.961,00	99,33	(66.267.192,00)	6.643.569.996,00	3.198.257.965,00	48,14
35	KECAMATAN TANAH SAREAL	10.848.977.416,00	10.514.552.471,00	96,92	(334.424.945,00)	6.830.285.970,00	3.684.266.501,00	53,94
36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.967.790.915,00	5.730.912.965,00	96,03	(236.877.950,00)	2.925.663.544,00	2.805.249.421,00	95,88
Jumlah		1.342.955.429.587,00	1.304.164.987.240,00	97,11	(38.790.442.347,00)	1.236.457.277.949,00	67.707.709.291,00	5,48



5.1.2.1.3 BELANJA BUNGA

Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Kota seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda. Realisasi Belanja Bunga Tahun Anggaran 2024 serta Realisasi Tahun Anggaran 2023 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.52
Belanja Bunga Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri - Jangka Panjang	7.000.000.000,00	6.035.551.928,00	86,22	(964.448.072,00)	6.144.188.950,00	(108.637.022,00)	(1,77)
2	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN- Jangka Pendek	500.000.000,00	992.194.667,00	198,44	492.194.667,00	47.493.750,00	944.700.917,00	0,00
Jumlah		7.500.000.000,00	7.027.746.595,00	93,70	(472.253.405,00)	6.144.188.950,00	883.557.645,00	14,38

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja bunga tahun anggaran 2024 sebesar Rp7.027.746.595,00 atau mencapai 93,70% dari anggaran sebesar Rp7.500.000.000,00. Realisasi tahun anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp883.557.645,00 atau 14,38% dari realisasi tahun anggaran 2023.

Realisasi belanja bunga utang pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri - Jangka Panjang Tahun 2024 sebesar Rp6.035.551.928,00 merupakan bunga utang pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang atas dana pinjaman dari *International Bank For Reconstruction and Development*, *Loan Agreement* Nomor 7730-ID tanggal 1 September 2009 dalam rangka pembiayaan *Urban Water Supply And Sanitation Project* sesuai dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA-1226/DSMI/2009 tanggal 02 November 2009.

Metode perhitungan tingkat bunga sesuai amandemen terhadap SLA-1226/DSMI/2009 tanggal 02 November 2009 sesuai dengan surat Nomor S-88/MK.5/2023 tanggal 12 September 2023 tentang Penandatanganan Perubahan (Amandemen) Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA-1226/DSMI/2009 tanggal 02 November 2009 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Bogor, semula Pemkot Bogor wajib membayar bunga dalam mata uang Rupiah kepada Pemerintah atas jumlah pinjaman penerusan yang telah ditarik dan masih terutang dari waktu ke waktu, sebesar tingkat bunga NPPLN LIBOR + *Variable Spread* +5,02 % (lima koma nol dua perseratus) per tahun terhitung sejak penarikan pinjaman didasarkan pada ketetapan yang disampaikan oleh IBRD kepada pemerintah, menjadi Pemkot Bogor membayar bunga dalam mata uang Rupiah kepada Pemerintah atas jumlah pinjaman penerusan yang telah ditarik dan masih terutang dari waktu ke waktu sebesar tingkat bunga Pinjaman Luar Negeri ditambah 5,02% (lima koma nol dua perseratus) berdasarkan tagihan yang disampaikan oleh *The World Bank* kepada pemerintah.

Rincian Belanja Bunga pada masing-masing Perangkat Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:



Tabel 5.1.53
Realisasi Belanja Bunga per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	SKPD	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	300.000.000,00	992.194.667,00	330,73	692.194.667,00	0,00	992.194.667,00	0,00
2	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6.144.188.950,00	6.035.551.928,00	98,23	(108.637.022,00)	4.282.366.790,00	1.753.185.138,00	40,94
	Jumlah	6.444.188.950,00	7.027.746.595,00	109,06	583.557.645,00	4.282.366.790,00	2.745.379.805,00	64,11

5.1.2.1.4 BELANJA HIBAH

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan.

pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Tata cara penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial di Pemerintah Kota Bogor diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 2022. Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 serta Realisasi Tahun Anggaran 2023 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.54
Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	66.269.636.386,00	64.853.633.758,00	97,86	(1.416.002.628,00)	41.728.854.095,00	23.124.779.663,00	55,42
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	39.691.102.110,00	38.968.786.299,00	98,18	(722.315.811,00)	60.856.007.008,00	(21.887.220.709,00)	(35,97)
3	Belanja Hibah Dana BOS	45.894.640.000,00	44.978.226.430,00	98,00	(916.413.570,00)	41.508.389.331,00	3.469.837.099,00	0,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.465.242.000,00	3.397.282.000,00	98,04	0,00	3.287.754.000,00	0,00	0,00
5	Belanja Hibah Dana BOSP	24.757.130.000,00	24.321.406.900,00	98,24	(435.723.100,00)	0,00	24.321.406.900,00	0,00
	Jumlah	180.077.750.496,00	176.519.335.387,00	98,02	(3.558.415.109,00)	147.381.004.434,00	29.138.330.953,00	19,77

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja hibah tahun anggaran 2024 sebesar Rp176.519.335.387,00 atau mencapai 98,02% dari anggaran 2024 sebesar Rp180.077.750.496,00 realisasi hibah tahun anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp29.138.330.953,00 atau sebesar 19,77% dibandingkan realisasi tahun 2023.

Penjelasan lebih lanjut atas Belanja Hibah antara lain sebagai berikut:

- Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp64.853.633.758,00 dan Rp41.728.854.095,00 yang terinci sebagai berikut:



Tabel 5.1.55

Realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	53.933.637.450,00	40.929.414.447,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	10.919.996.308,00	799.439.648,00
Jumlah		64.853.633.758,00	41.728.854.095,00

Hibah kepada Pemerintah Pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Kota Bogor sebesar Rp53.933.637.450,00, rincian Hibah berupa uang diberikan kepada :

Tabel 5.1.56

Realisasi Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Satuan Tugas Saber Pungli Kota Bogor	875.000.000,00	500.000.000,00
2	Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor	28.858.713.600,00	22.813.717.579,00
3	Badan Pengawasan Pemilu Kota Bogor	9.790.029.000,00	7.673.791.088,00
4	Polresta Bogor Kota Bogor	8.576.071.000,00	4.994.406.480,00
5	Denpom III/I Kota Bogor	350.000.000,00	1.347.499.300,00
6	Komando Resor Militer 061 Kota Bogor	100.000.000,00	400.000.000,00
7	Komando Distrik Militer 0606 Kota Bogor	2.926.375.000,00	1.500.000.000,00
8	TNI AU Atang Sendjaja	0,00	500.000.000,00
9	Garnisun Kota Bogor	250.000.000,00	200.000.000,00
10	Kementerian Agama Kota Bogor	150.000.000,00	500.000.000,00
11	Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat	0,00	500.000.000,00
12	Kejaksaan Negeri Kota Bogor	1.732.448.850,00	0,00
13	Lanud Atang Sanjaya	150.000.000,00	0,00
14	LP KELAS IIA	75.000.000,00	0,00
15	Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	100.000.000,00	0,00
Jumlah		53.933.637.450,00	40.929.414.447,00

Sedangkan Hibah barang sebesar Rp10.919.966.308,00 diberikan berupa sarana dan prasarana kantor kepada :

Tabel 5.1.57

Realisasi Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pengadilan Negeri Kota Bogor kelas IA	0,00	199.057.028,00
2	Satinduk BAIK TNI Kota Bogor	0,00	47.341.500,00
3	Kejaksaan Negeri Kota Bogor	6.950.943.077,00	503.100.000,00
4	Polresta Bogor Kota sebesar	0,00	49.941.120,00
5	Sapras Bawaslu Kota Bogor	0,00	0,00
6	BPN Kota Bogor	1.805.083.556,00	0,00
7	Komando Distrik Militer 0606	1.348.500.000,00	0,00
8	Kantor Pengadilan Bogor Kelas IA	781.068.000,00	0,00
9	Hibah Barang	34.401.675,00	0,00
Jumlah		10.919.996.308,00	799.439.648,00

- b. Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp38.968.786.299,00 dan Rp60.856.007.008,00 yang terinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.58

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan	18.128.279.189,00	18.770.796.708,00
2	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	486.350.000,00	21.345.035.200,00
3	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,	20.314.157.110,00	20.601.575.100,00



No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
	Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		
4	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	40.000.000,00	138.600.000,00
Jumlah		38.968.786.299,00	60.856.007.008,00

- c. Realisasi Belanja Hibah Dana BOS Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp44.978.226.430,00 dan Rp41.508.389.331,00 merupakan realisasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Sekolah Dasar (SD) Swasta dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta yang penyalurannya langsung diberikan oleh Pemerintah Pusat ke sekolah penerima.
- d. Realisasi Belanja Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.397.282.000,00 dan Rp3.287.754.000,00. Dengan rincian realisasi Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.1.59

Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	478.508.000,00	508.644.000,00
2	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	224.092.000,00	220.698.000,00
3	Partai Bulan Bintang (PBB)	49.256.000,00	73.884.000,00
4	Partai Amanat Nasional (PAN)	250.658.000,00	224.028.000,00
5	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	136.904.000,00	115.224.000,00
6	Partai Hati Nurani Rakyat	95.380.000,00	143.070.000,00
7	Partai Demokrat	246.650.000,00	238.950.000,00
8	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	554.124.000,00	594.540.000,00
9	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	410.016.000,00	344.976.000,00
10	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	680.850.000,00	623.340.000,00
11	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	228.500.000,00	200.400.000,00
12	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	42.344.000,00	0,00
Jumlah		3.397.282.000,00	3.287.754.000,00

Rincian Belanja Hibah pada masing-masing Perangkat Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.60

Realisasi Belanja Hibah per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	SKPD	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)				
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)	
1	DINAS PENDIDIKAN	79.332.930.000,00	77.943.678.330,00	98,25	(1.389.251.670,00)	69.784.076.331,00	8.159.601.999,00	11,69	
2	DINAS KESEHATAN	1.196.000.000,00	1.187.879.189,00	99,32	(8.120.811,00)	1.180.430.908,00	7.448.281,00	0,63	
3	DINAS SOSIAL	229.500.000,00	229.500.000,00	100,00	0,00	258.520.000,00	(29.020.000,00)	(11,23)	
4	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	380.900.000,00	380.900.000,00	100,00	0,00	305.000.000,00	75.900.000,00	24,89	
5	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
6	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	0,00	138.600.000,00	(98.600.000,00)	(71,14)	
7	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	10.635.000.000,00	10.635.000.000,00	100,00	0,00	10.723.800.000,00	(88.800.000,00)	(0,83)	
8	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	266.914.100,00	(266.914.100,00)	(100,00)	
9	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000.000,00	(92.000.000,00)	(100,00)	
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	0,00	0,00	64.400.000,00	(64.400.000,00)	(100,00)	
11	SEKRETARIAT DAERAH	17.638.542.110,00	17.001.462.110,00	96,39	(637.080.000,00)	18.150.655.000,00	(1.149.192.890,00)	(6,33)	
12	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	70.474.878.386,00	68.950.915.758,00	97,84	(1.523.962.628,00)	46.416.608.095,00	22.534.307.663,00	48,55	
Jumlah		180.077.750.496,00	176.519.335.387,00	98,02	(3.558.415.109,00)	147.381.004.434,00	29.138.330.953,00	19,77	

5.1.2.1.5 BANTUAN SOSIAL

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya



tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata cara penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial di Pemerintah Kota Bogor diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 2022.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 serta Realisasi Tahun Anggaran 2023 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.61
Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	33.825.035.000,00	33.118.435.000,00	97,91	(706.600.000,00)	46.032.665.000,00	(12.914.230.000,00)	(28,05)
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	10.955.909.500,00	10.461.584.500,00	95,49	(494.325.000,00)	8.406.250.000,00	2.055.334.500,00	24,45
Jumlah		44.780.944.500,00	43.580.019.500,00	97,32	(1.200.925.000,00)	54.438.915.000,00	(10.858.895.500,00)	(19,95)

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja bantuan sosial Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp43.580.019.500,00 atau mencapai 97,32% dari anggaran sebesar Rp44.780.944.500,00 Realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp10.858.895.500,00 atau mencapai 19,65% dibandingkan dengan tahun 2023. Penjelasan lebih lanjut atas Belanja Bantuan Sosial antara lain sebagai berikut:

- Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp33.118.435.000,00 dan Rp46.032.665.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.62
Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	33.118.435.000,00	46.032.665.000,00
	Jumlah	33.118.435.000,00	46.032.665.000,00

Adapun Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu diberikan dalam rangka perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

- Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp10.461.584.500,00 dan Rp8.406.250.000,00 diberikan kepada Lembaga Pendidikan Swasta.

Rincian Belanja Bantuan Sosial pada masing-masing Perangkat Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:



Tabel 5.1.63

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	SKPD	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DINAS PENDIDIKAN	5.141.096.000,00	5.015.796.000,00	97,56	(125.300.000,00)	3.071.250.000,00	1.944.546.000,00	63,31
2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	33.825.035.000,00	33.118.435.000,00	97,91	(706.600.000,00)	46.032.665.000,00	(12.914.230.000,00)	(28,05)
3	SEKRETARIAT DAERAH	5.814.813.500,00	5.445.788.500,00	93,65	(369.025.000,00)	5.335.000.000,00	110.788.500,00	2,08
	Jumlah	44.780.944.500,00	43.580.019.500,00	97,32	(1.200.925.000,00)	54.438.915.000,00	(10.858.895.500,00)	(19,95)

5.1.2.2 BELANJA MODAL

Mengacu pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Modal diatur sebagai berikut:

- Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
 - Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - Batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- Berwujud;
 - Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah
 - Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 serta Realisasi Tahun Anggaran 2023 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.64

Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Tanah	5.425.147.300,00	2.477.717.100,00	45,67	(2.947.430.200,00)	1.287.152.960,00	1.190.564.140,00	92,50
2	Belanja Peralatan dan Mesin	144.788.452.254,00	133.226.642.367,00	92,01	(11.561.809.887,00)	97.928.993.032,00	35.297.649.335,00	36,04
3	Belanja Gedung dan Bangunan	150.827.313.763,00	141.166.601.172,00	93,59	(9.660.712.591,00)	178.951.840.395,00	(37.785.239.223,00)	(21,11)
4	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	114.562.031.641,00	112.729.496.656,00	98,40	(1.832.534.985,00)	238.985.747.391,00	(126.256.250.735,00)	(52,83)
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	10.917.685.389,00	10.693.173.754,00	97,94	(224.511.635,00)	911.157.960,00	9.782.015.794,00	1.073,58
6	Belanja Aset Lainnya	75.000.000,00	74.355.570,00	99,14	(644.430,00)	100.077.000,00	(25.721.430,00)	(25,70)
	Jumlah	426.595.630.347,00	400.367.986.619,00	93,85	(26.227.643.728,00)	518.164.968.738,00	(117.796.982.119,00)	(22,73)

5.1.2.2.1 BELANJA MODAL TANAH

Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2024 serta Realisasi Tahun Anggaran 2023 dapat disajikan pada tabel berikut:



Tabel 5.1.65
Belanja Tanah Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Modal Tanah	5.425.147.300,00	2.477.717.100,00	45,67	(2.947.430.200,00)	1.287.152.960,00	1.190.564.140,00	92,50
	Jumlah	5.425.147.300,00	2.477.717.100,00	45,67	(2.947.430.200,00)	1.287.152.960,00	1.190.564.140,00	92,50

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja tanah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.477.717.100,00 atau mencapai 45,67% dari anggaran sebesar Rp5.425.147.300,00 realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.190.564.140,00 atau 92,50%. Dari anggaran sebesar Rp5.425.147.300,00 terealisasi sebesar Rp2.477.717.100,00 atau 45,67% yang disebabkan oleh adanya kendala dalam Pengadaan tanah untuk Jalan R3 Lanjutan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dikarenakan perlu dilakukan appraisal ulang untuk mendapatkan nilai propertinya, dan adanya efisiensi hasil negosiasi untuk pengadaan bidang tanah SD Negeri Cibuluh 3 pada Dinas Pendidikan.

Penjelasan lebih lanjut atas Belanja Tanah antara lain sebagai berikut:

Tabel 5.1.66
Rincian Realisasi Belanja Tanah Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	813.680.000,00	139.105.200,00
2	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	560.621.000,00	0,00
3	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Bersejarah	0,00	0,00
4	Belanja Modal Tanah untuk Taman	1.103.416.100,00	1.148.047.760,00
	Jumlah	2.477.717.100,00	1.287.152.960,00

Rincian Belanja Modal Tanah pada masing-masing Perangkat Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.67
Realisasi Belanja Modal Tanah per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	SKPD	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DINAS PENDIDIKAN	1.470.681.300,00	813.680.000,00	0,00	0,00	0,00	813.680.000,00	0,00
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.834.412.000,00	560.621.000,00	0,00	0,00	0,00	560.621.000,00	0,00
3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1.120.054.000,00	1.103.416.100,00	98,51	(16.637.900,00)	1.148.047.760,00	(44.631.660,00)	(3,89)
4	KECAMATAN BOGOR SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	89.266.200,00	(89.266.200,00)	(100,00)
5	KECAMATAN BOGOR BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	49.839.000,00	(49.839.000,00)	(100,00)
	Jumlah	5.425.147.300,00	2.477.717.100,00	45,67	(16.637.900,00)	1.287.152.960,00	1.190.564.140,00	92,50

5.1.2.2.2 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 serta Realisasi Tahun Anggaran 2023 dapat disajikan pada tabel berikut:



Tabel 5.1.68

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran (Rp)	Realisasi		Lebih/(Kurang) (Rp)		(Rp)	(Rp)	(%)
			(Rp)	(%)					
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)	
1	Belanja Modal Alat Besar	26.626.684.200,00	25.553.015.350,00	95,97	(1.073.668.850,00)	754.294.100,00	24.798.721.250,00	3.287,67	
2	Belanja Modal Alat Angkutan	7.347.210.524,00	6.625.361.000,00	90,18	(721.849.524,00)	9.542.783.000,00	(2.917.422.000,00)	(30,57)	
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	181.486.900,00	173.421.950,00	95,56	(8.064.950,00)	245.811.160,00	(72.389.210,00)	(29,45)	
4	Belanja Modal Alat Pertanian	10.490.000,00	10.050.000,00	95,81	(440.000,00)	126.183.138,00	(116.133.138,00)	(92,04)	
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	15.157.964.940,00	14.090.525.351,00	92,96	(1.067.439.589,00)	10.416.257.313,00	3.674.268.038,00	35,27	
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.151.223.802,00	3.097.244.816,00	98,29	(53.978.986,00)	3.031.383.934,00	65.860.882,00	2,17	
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	40.054.736.546,00	39.547.226.381,00	98,73	(507.510.165,00)	34.471.251.245,00	5.075.975.136,00	14,73	
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.570.522.568,00	1.570.522.568,00	100,00	-	2.522.332.000,00	(951.809.432,00)	(37,74)	
9	Belanja Modal Komputer	8.570.621.860,00	8.221.395.190,00	95,93	(349.226.670,00)	6.278.880.656,00	1.942.514.534,00	30,94	
10	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	0,00	107.800.000,00	(107.800.000,00)	0,00	
11	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	166.887.800,00	154.000.000,00	92,28	(12.887.800,00)	462.364.098,00	(308.364.098,00)	(66,69)	
12	Belanja Modal Rambu - Rambu	249.800.978,00	213.405.714,00	85,43	(36.395.264,00)	934.304.649,00	(720.898.935,00)	(77,16)	
13	Belanja Modal Peralatan Olahraga	345.590.000,00	316.990.400,00	91,72	(28.599.600,00)	43.550.000,00	273.440.400,00	627,88	
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	25.731.940.518,00	25.699.965.311,00	99,88	(31.975.207,00)	22.723.850.707,00	2.976.114.604,00	13,10	
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	15.623.291.618,00	7.953.518.336,00	50,91	(7.669.773.282,00)	6.267.947.032,00	1.685.571.304,00	26,89	
	Jumlah	144.788.452.254,00	133.226.642.367,00	92,01	(11.561.809.887,00)	97.928.993.032,00	35.297.649.335,00	36,04	

Berdasarkan tabel diatas, realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp133.230.562.367,00 atau 92,01% dari anggaran sebesar Rp144.788.452.254,00. Realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp35.297.649.335,00 atau mencapai 36.04% dibandingkan Tahun Anggaran 2023.

Penjelasan lebih lanjut atas Belanja Peralatan dan Mesin antara lain sebagai berikut:

- a. Realisasi Belanja Modal Alat Berat Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp25.553.015.350,00 dan Rp754.294.100,00 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5.1.69

Realisasi Belanja Modal Alat Berat Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Tractor	3.853.920.000,00	0,00
2	Belanja Modal Excavator	1.789.320.000,00	0,00
3	Belanja Modal Hauler	6.257.177.000,00	0,00
4	Belanja Modal Asphalt Equipment	9.271.200.000,00	0,00
5	Belanja Modal Loader	2.094.570.000,00	0,00
6	Belanja Modal Alat Pengangkat	0,00	0,00
7	Belanja Modal Mesin Proses	194.400.000,00	3.400.000,00
	Belanja Modal Compressor	5.850.000,00	0,00
8	Belanja Modal Electric Generating Set	1.098.250.000,00	564.000.000
9	Belanja Modal Pompa	33.200.000,00	46.895.000,00
10	Belanja Modal Mesin Bor	0,00	6.220.000,00
11	Belanja Modal Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator	0,00	0,00
12	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	9.973.350,00	0,00
13	Belanja Modal Peralatan Selam	21.900.000,00	0,00
14	Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering	53.255.000,00	128.779.100,00
15	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	870.000.000,00	5.000.000,00
	Jumlah	25.553.015.350,00	754.294.100,00

- b. Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.625.619.200,00 dan Rp9.542.783.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.70

Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.886.083.000,00	0,00
2	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.044.179.000,00	0,00
3	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	936.000.000,00	253.000.000,00
4	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	128.500.000,00	381.723.000,00



No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
5	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	38.000.000,00	0,00
6	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	2.527.050.000,00	8.863.310.000,00
7	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	0,00	44.750.000,00
8	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	64.400.000,00	0,00
9	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	1.407.200,00	0,00
Jumlah		6.625.619.200,00	9.542.783.000,00

- c. Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp173.421.950,00 dan Rp245.811.160,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.71

Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	0,00	0,00
2	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	0,00	172.750.410,00
3	Belanja Modal Peralatan Las	0,00	15.562.000,00
4	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	0,00	4.964.000,00
5	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	0,00	4.652.000,00
6	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	4.750.000,00	27.222.750,00
7	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	149.596.990,00	0,00
8	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	10.900.000,00	0,00
	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	2.500.000,00	0,00
9	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	0,00	0,00
10	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	0,00	20.660.000,00
11	Belanja Modal Alat Ukur/Tes Klinis Lain	1.283.800,00	0,00
12	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	4.391.160,00	0,00
Jumlah		173.421.950,00	245.811.160,00

- d. Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp10.050.000,00 dan Rp126.183.138,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.72

Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	0,00	126.183.138,00
2	Belanja Modal Alat Processing	10.050.000,00	0,00
Jumlah		10.050.000,00	126.183.138,00

- e. Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp14.090.525.351,00 dan Rp10.416.257.313,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.73

Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Mesin Ketik	17.250.000,00	0,00
2	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	0,00
3	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	129.100.000,00	24.697.500,00
4	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.131.482.414,00	1.297.862.043,00
5	Belanja Modal Mebel	8.248.087.559,00	5.132.180.165,00
6	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	0,00	3.800.000,00
7	Belanja Modal Alat Pembersih	100.780.000,00	810.476.600,00
8	Belanja Modal Alat Pendingin	1.076.684.480,00	752.256.100,00
		142.697.540,00	81.816.555,00
9	Belanja Modal Alat Dapur		
10	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.141.127.000,00	937.995.290,00
11	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	80.837.500,00	23.999.998,00



No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
12	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	99.711.409,00	10.335.000,00
13	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	215.826.900,00	6.660.000,00
14	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	595.247.300,00	813.115.236,00
15	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	0,00	16.095.000,00
16	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	798.075.000,00	177.193.300,00
17	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	313.618.249,00	327.774.526,00
Jumlah		14.090.525.351,00	10.416.257.313,00

- f. Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.097.244.816,00 dan Rp3.031.383.934,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.74

Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	642.728.316,00	1.783.020.300,00
2	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	1.667.512.400,00	279.884.600,00
3	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	6.800.000,00	157.913.700,00
4	Belanja Modal Peralatan Cetak	210.660.000,00	497.751.814,00
5	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	48.327.100,00	41.593.220,00
6	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	133.627.000,00	5.000.550,00
7	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	52.900.000,00	30.219.750,00
8	Belanja Modal Humidity Control	29.750.000,00	0,00
9	Belanja Modal Sumber Tenaga	304.940.000,00	236.000.000,00
Jumlah		3.097.244.816,00	3.031.383.934,00

- g. Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp34.547.226.381,00 dan Rp34.471.251.245,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.75

Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.068.827.600,00	341.287.200,00
2	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	420.000.000,00	0,00
3	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	0,00	69.716.000,00
4	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	11.166.563.475,00	24.700.000.000,00
5	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	258.277.506,00	0,00
6	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	12.844.150.759,00	0,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	9.029.800.000,00	0,00
8	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	275.820.000,00	0,00
9	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	1.675.000.000,00	0,00
10	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	1.474.000.000,00	0,00
11	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.334.787.041,00	9.360.248.045,00
Jumlah		39.547.226.381,00	34.471.251.245,00

- h. Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.570.522.568,00 dan Rp2.522.332.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.76

Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	0,00	414.920.000,00
2	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	0,00	158.000.000,00
3	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	0,00	1.610.000.000,00
4	Belanja Modal Alat Laboratorium Metrologi	15.250.000,00	11.700.000,00
5	Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	186.000.000,00



No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
	Lingkungan Perairan		
6	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	1.555.272.568,00	0,00
7	Belanja Modal System/Power Supply	0,00	141.712.000,00
	Jumlah	1.570.522.568,00	2.522.332.000,00

- i. Realisasi Belanja Modal Komputer Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp8.221.395.190,00 dan Rp6.278.880.656,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.77
Realisasi Belanja Modal Komputer Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Komputer Jaringan	475.250.000,00	363.495.000,00
2	Belanja Modal Personal Computer	6.163.697.800,00	4.514.529.880,00
3	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0,00	88.800.000,00
4	Belanja Modal Peralatan Mainframe	0,00	0,00
5	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	0,00	0,00
6	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.416.277.260,00	951.167.979,00
7	Belanja Modal Peralatan Jaringan	134.978.230,00	188.515.722,00
8	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	31.191.900,00	172.372.075,00
	Jumlah	8.221.395.190,00	6.278.880.656,00

- j. Realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp154.000.000,00 dan Rp462.364.098,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.78
Realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Sepatu Lapangan	0,00	0,00
2	Belanja Modal Baju Pengaman	154.000.000,00	91.800.000,00
3	Belanja Modal Alat Penolong	0,00	134.841.048,00
4	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	0,00	8.252.850,00
5	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	0,00	227.470.200,00
	Jumlah	154.000.000,00	462.364.098,00

- k. Realisasi Belanja Modal Rambu-Rambu Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp213.405.714,00 dan Rp934.304.649,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.79
Realisasi Belanja Modal Rambu-Rambu Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	213.405.714,00	934.304.649,00
	Jumlah	213.405.714,00	934.304.649,00

- l. Realisasi Belanja Modal Peralatan Olahraga Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp316.990.400,00 dan Rp43.550.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.80
Realisasi Belanja Modal Peralatan Olahraga Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Peralatan Permainan	211.800.000,00	6.000.000,00
2	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	105.190.400,00	37.550.000,00
	Jumlah	316.990.400,00	43.550.000,00

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada masing-masing Perangkat Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:



Tabel 5.1.81

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	SKPD	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(Rp)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DINAS PENDIDIKAN	33.548.548.628,00	32.832.656.811,00	97,87	(715.891.817,00)	28.859.620.507,00	3.973.036.304,00	13,77
2	DINAS KESEHATAN	10.120.904.757,00	7.475.671.330,00	73,86	(2.645.233.427,00)	15.252.539.983,00	(7.776.868.653,00)	(50,99)
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	51.745.668.690,00	45.422.284.974,00	87,78	(6.323.383.716,00)	29.480.322.560,00	15.941.962.414,00	54,08
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	16.517.720.900,00	15.652.357.325,00	94,76	(865.363.575,00)	4.481.998.550,00	11.170.358.775,00	249,23
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1.897.990.424,00	1.759.559.040,00	92,71	(138.431.384,00)	6.193.668.626,00	(4.434.109.586,00)	(71,59)
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	579.018.700,00	560.286.260,00	96,76	(18.732.440,00)	597.161.498,00	(36.875.238,00)	(6,18)
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	168.608.100,00	126.941.000,00	75,29	(41.667.100,00)	138.928.000,00	(11.987.000,00)	(8,63)
8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	271.271.400,00	257.200.000,00	94,81	(14.071.400,00)	3.657.006.500,00	(3.399.806.500,00)	(92,97)
9	DINAS SOSIAL	186.859.200,00	182.756.400,00	97,80	(4.102.800,00)	100.680.000,00	82.076.400,00	81,52
10	DINAS TENAGA KERJA	52.311.998,00	52.010.160,00	99,42	(301.838,00)	118.093.344,00	(66.083.184,00)	(55,96)
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	122.139.100,00	122.099.500,00	99,97	(39.600,00)	62.344.000,00	59.755.500,00	95,85
12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	20.143.000,00	19.742.999,00	98,01	(400.001,00)	93.905.000,00	(74.162.001,00)	(78,98)
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	12.496.620.400,00	12.198.505.000,00	97,61	(298.115.400,00)	1.233.251.600,00	10.965.253.400,00	889,13
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	749.256.600,00	737.063.200,00	98,37	(12.193.400,00)	237.049.500,00	500.013.700,00	210,93
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	60.784.000,00	60.620.000,00	99,73	(164.000,00)	107.956.800,00	(47.336.800,00)	(43,85)
16	DINAS PERHUBUNGAN	249.800.978,00	213.405.714,00	85,43	(36.395.264,00)	1.108.374.649,00	(894.968.935,00)	(80,75)
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	15.613.700,00	15.598.270,00	0,00	0,00	0,00	15.598.270,00	0,00
18	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	16.657.200,00	16.399.000,00	98,45	(258.200,00)	173.112.315,00	(156.713.315,00)	(90,53)
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	131.705.500,00	127.500.000,00	96,81	(4.205.500,00)	178.600.000,00	(51.100.000,00)	(28,61)
20	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	70.298.900,00	69.591.300,00	98,99	-707600,00	60.000.000,00	9.591.300,00	15,99
21	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	61.809.200,00	61.035.000,00	98,75	(774.200,00)	36.196.000,00	24.839.000,00	68,62
22	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	114.427.200,00	107.389.000,00	93,85	(7.038.200,00)	166.334.500,00	(58.945.500,00)	(35,44)
23	SEKRETARIAT DAERAH	3.353.750.500,00	3.253.902.356,00	97,02	(99.848.144,00)	1.530.379.082,00	1.723.523.274,00	112,62
24	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	1.488.844.200,00	1.476.334.400,00	99,16	(12.509.800,00)	1.561.986.738,00	(85.652.338,00)	(5,48)
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	74.241.200,00	73.808.340,00	99,42	(432.860,00)	163.195.350,00	(89.387.010,00)	(54,77)
26	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.733.058.000,00	1.730.501.169,00	99,85	(2.556.831,00)	480.879.890,00	1.249.621.279,00	259,86
27	BADAN PENDAPATAN DAERAH	819.304.000,00	811.325.000,00	99,03	(7.979.000,00)	860.177.740,00	(48.852.740,00)	(5,68)
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	379.162.900,00	375.500.000,00	99,03	(3.662.900,00)	298.000.000,00	77.500.000,00	26,01
29	INSPEKTORAT	964.328.500,00	916.932.000,00	95,09	(47.396.500,00)	531.467.300,00	385.464.700,00	72,53
30	KECAMATAN BOGOR UTARA	791.441.500,00	618.875.000,00	78,20	(172.566.500,00)	7.755.000,00	611.120.000,00	7.880,34
31	KECAMATAN BOGOR SELATAN	1.269.043.800,00	1.263.670.000,00	99,58	(5.373.800,00)	158.008.000,00	1.105.662.000,00	699,75
32	KECAMATAN BOGOR TIMUR	846.235.700,00	840.650.000,00	0,00	(5.585.700,00)	0,00	840.650.000,00	0,00
33	KECAMATAN BOGOR BARAT	829.517.100,00	778.922.960,00	0,00	(50.594.140,00)	0,00	778.922.960,00	0,00
34	KECAMATAN BOGOR TENGAH	812.917.700,00	803.557.900,00	0,00	(9.359.800,00)	0,00	803.557.900,00	0,00
35	KECAMATAN TANAH SAREAL	1.307.922.979,00	1.300.500.000,00	0,00	(7.422.979,00)	0,00	1.300.500.000,00	0,00
36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	920.525.600,00	911.490.959,00	0,00	(9.034.641,00)	0,00	911.490.959,00	0,00
Jumlah		144.788.452.254,00	133.226.642.367,00	92,01	(11.561.809.887,00)	97.928.993.032,00	35.297.649.335,00	36,04

5.1.2.2.3 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 serta Realisasi Tahun Anggaran 2023 dapat disajikan pada tabel berikut:



Tabel 5.1.82
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023		Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)				
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)	
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	147.461.759.693,00	137.821.755.710,00	93,46	(9.640.003.983,00)	166.292.422.095,00	(28.470.666.385,00)	(17,12)	
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	87.193.090,00	86.900.104,00	99,66	(292.986,00)	10.040.561.126,00	(9.953.661.022,00)	0,00	
3	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	543.593.160,00	534.121.026,00	0,00	(9.472.134,00)	0,00	534.121.026,00	0,00	
4	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.734.767.820,00	2.723.824.332,00	99,60	(10.943.488,00)	2.618.857.174,00	104.967.158,00	0,00	
	Jumlah	150.827.313.763,00	141.166.601.172,00	93,59	(9.660.712.591,00)	178.951.840.395,00	(37.785.239.223,00)	(21,11)	

Berdasarkan tabel diatas realisasi belanja gedung dan bangunan tahun anggaran 2024 sebesar Rp141.166.601.172,00 atau mencapai 93,59% dari anggaran sebesar Rp150.827.313.763,00. Realisasi tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp37.785.239.223,00 atau mencapai 21,11% dari realisasi tahun 2023.

- a. Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp137.821.755.710,00 dan Rp166.292.422.095,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.83
Rincian Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	14.574.142.168,00	13.235.689.189,00
2	Belanja Modal Bangunan Gudang	0,00	85.692.000,00
3	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	0,00	7.691.794.316,00
4	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	287.787.221,00	39.303.987.672,00
5	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	4.941.441.161,00	31.159.415.152,00
6	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	6.923.144.191,00	0,00
7	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	104.333.432.219,00	49.968.303.832,00
8	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.840.500.000,00	7.696.948.510,00
9	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi / Pool	0,00	175.285.512,00
10	Belanja Modal Bangunan Gedung Museum	0,00	15.232.850.867,00
11	Belanja Modal Taman	4.921.308.750,00	1.742.455.045,00
	Jumlah	137.821.755.710,00	166.292.422.095,00

- b. Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp86.900.104,00 dan Rp10.040.561.126,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.84
Rincian Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	86.900.104,00	10.040.561.126,00
	Jumlah	86.900.104,00	10.040.561.126,00

- c. Realisasi Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp534.121.026,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.85
Rincian Realisasi Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya	534.121.026,00	0,00
	Jumlah	534.121.026,00	0,00

- d. Realisasi Belanja Modal Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.723.824.332,00 dan Rp2.618.857.174,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.1.86

Rincian Realisasi Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Pagar	2.723.824.332,00	1.916.167.313,00
Jumlah		2.723.824.332,00	1.916.167.313,00

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada masing-masing Perangkat Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.87

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	SKPD	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DINAS PENDIDIKAN	112.403.386.965,00	105.326.273.527,00	93,70	(7.077.113.438,00)	50.486.733.253,00	54.839.540.274,00	108,62
2	DINAS KESEHATAN	4.725.198.000,00	3.956.535.744,00	83,73	(768.662.256,00)	12.564.735.554,00	(8.608.199.810,00)	(68,51)
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	46.928.271.883,00	(46.928.271.883,00)	(100,00)
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8.673.307.448,00	8.550.030.791,00	98,58	(123.276.657,00)	39.290.249.860,00	(30.740.219.069,00)	(78,24)
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	4.955.158.813,00	4.788.815.359,00	96,64	(166.343.454,00)	1.742.455.045,00	3.046.360.314,00	174,83
6	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	7.367.315.797,00	7.222.717.570,00	98,04	(144.598.227,00)	0,00	7.222.717.570,00	0,00
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	917.159.200,00	586.396.251,00	63,94	(330.762.949,00)	81.111.030,00	505.285.221,00	622,96
8	DINAS PERHUBUNGAN	543.593.160,00	534.121.026,00	98,26	(9.472.134,00)	154.595.250,00	379.525.776,00	245,50
9	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.840.500.000,00	1.840.500.000,00	100,00	0,00	7.696.948.510,00	(5.856.448.510,00)	(76,09)
10	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	15.549.367.867,00	(15.549.367.867,00)	(100,00)
11	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.460.742.000,00	1.453.664.125,00	99,52	(7.077.875,00)	1.483.429.892,00	(29.765.767,00)	(2,01)
12	KECAMATAN BOGOR UTARA	977.432.000,00	925.996.841,00	94,74	(51.435.159,00)	0,00	925.996.841,00	0,00
13	KECAMATAN BOGOR SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	67.510.105,00	(67.510.105,00)	(100,00)
14	KECAMATAN BOGOR BARAT	583.957.340,00	582.226.098,00	99,70	(1.731.242,00)	0,00	582.226.098,00	0,00
15	KECAMATAN BOGOR TIMUR	93.716.870,00	91.982.415,00	98,15	0,00	1.464.268.444,00	(1.372.286.029,00)	(93,72)
16	KECAMATAN BOGOR TENGAH	2.579.027.000,00	2.043.086.591,00	79,22	(535.940.409,00)	0,00	2.043.086.591,00	0,00
17	KECAMATAN TANAH SAREAL	3.397.919.070,00	2.956.087.795,00	87,00	(2.647.187.695,00)	1.442.163.702,00	1.513.924.093,00	104,98
18	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	308.900.100,00	308.167.039,00	99,76	(150.519.146.724,00)	0,00	308.167.039,00	0,00
Jumlah		150.827.313.763,00	141.166.601.172,00	93,59	(9.660.712.591,00)	178.951.840.395,00	(37.785.239.223,00)	(21,11)

5.1.2.2.4 BELANJA MODAL JALAN, IIRIGASI DAN JARINGAN

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 serta Realisasi Tahun Anggaran 2023 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.88

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	54.430.632.890,00	53.400.131.735,00	98,11	(1.030.501.155,00)	154.469.165.522,00	(101.069.033.787,00)	(65,43)
2	Belanja Modal Bangunan Air	56.926.014.122,00	56.419.934.712,00	99,11	(506.079.410,00)	78.283.480.362,00	(21.863.545.650,00)	(27,93)
3	Belanja Modal Instalasi	3.205.384.629,00	2.909.430.209,00	90,77	(295.954.420,00)	6.233.101.507,00	(3.323.671.298,00)	(53,32)
Jumlah		114.562.031.641,00	112.729.496.656,00	98,40	(1.832.534.985,00)	238.985.747.391,00	(126.256.250.735,00)	(52,83)

Berdasarkan tabel diatas, realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp112.729.496.656,00 atau mencapai 98,40% dari anggaran sebesar Rp114.562.031.641,00. Realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp126.256.250.735,00 atau mencapai 52,83% dari anggaran 2023.

Penjelasan lebih lanjut atas Jalan, Irigasi dan Jaringan antara lain sebagai berikut:



- a. Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp53.400.131.735,00 dan Rp154.469.165.522,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.89

Belanja Modal Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Jalan Kota	45.323.254.124,00	94.589.717.028,00
2	Belanja Modal Jalan Desa	584.747.171,00	0,00
3	Belanja Modal Jalan Lainnya	2.728.976.267,00	1.827.588.317,00
4	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	4.763.154.173,00	57.854.247.433,00
5	Belanja Modal Jembatan Penyeberangan	0,00	197.612.744,00
Jumlah		53.400.131.735,00	154.469.165.522,00

- b. Realisasi Belanja Modal Bangunan Air Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp56.419.934.712,00 dan Rp79.283.480.362,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.90

Realisasi Belanja Modal Bangunan Air Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	550.409.443,00	1.752.680.207,00
2	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	792.040.095,00	619.874.400,00
3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	922.150.556,00	1.246.495.474,00
4	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	33.004.511.126,00	55.307.958.567,00
5	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	19.314.153.989,00	16.297.894.098,00
6	Belanja Modal Bangunan Pengaman Air Kotor	0,00	225.330.348,00
7	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	1.836.669.503,00	2.833.247.268,00
Jumlah		56.419.934.712,00	78.283.480.362,00

- c. Realisasi Belanja Modal Instalasi Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.909.430.209,00 dan Rp6.233.101.507,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.91

Realisasi Belanja Modal Instalasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	759.079.075,00
2	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	989.734.442,00	159.913.921,00
3	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	1.701.782.491,00	5.314.108.511,00
4	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	217.913.276,00	0,00
Jumlah		2.909.430.209,00	6.233.101.507,00

Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada masing-masing Perangkat Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.92

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	SKPD	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang) (Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DINAS PENDIDIKAN	447.981.358,00	390.614.237,00	87,19	(57.367.121,00)	0,00	390.614.237,00	0,00
2	DINAS KESEHATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	785.000.000,00	(785.000.000,00)	(100,00)
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	104.300.054.977,00	102.962.295.119,00	98,72	(1.337.759.858,00)	231.316.159.382,00	(128.353.864.263,00)	(55,49)
4	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	3.914.921.287,00	3.737.578.307,00	95,47	(177.342.980,00)	3.891.570.935,00	(153.992.628,00)	(3,96)
5	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	200.000.000,00	197.935.738,00	98,97	(2.064.262,00)	0,00	197.935.738,00	0,00
6	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.170.284.629,00	970.346.631,00	82,92	(199.937.998,00)	129.804.344,00	840.542.287,00	647,55
7	KECAMATAN BOGOR UTARA	958.877.900,00	949.676.375,00	99,04	(9.201.525,00)	501.612.299,00	448.064.076,00	89,32





No	SKPD	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
8	KECAMATAN BOGOR SELATAN	712.875.900,00	685.563.196,00	96,17	(27.312.704,00)	0,00	685.563.196,00	0,00
9	KECAMATAN BOGOR TIMUR	125.000.000,00	124.320.511,00	99,46	(679.489,00)	431.094.600,00	(306.774.089,00)	(71,16)
10	KECAMATAN BOGOR BARAT	1.343.630.200,00	1.336.970.942,00	99,50	(6.659.258,00)	1.148.395.981,00	188.574.961,00	16,42
11	KECAMATAN TANAH SAREAL	1.388.405.390,00	1.374.195.600,00	98,98	(14.209.790,00)	782.109.850,00	592.085.750,00	75,70
Jumlah		114.562.031.641,00	112.729.496.656,00	98,40	(1.832.534.985,00)	238.985.747.391,00	(126.256.250.735,00)	(52,83)

5.1.2.2.5 BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA

Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Tabel 5.1.93

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	156.180.000,00	126.990.800,00	81,31	(29.189.200,00)	220.412.700,00	(93.421.900,00)	(42,38)
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	10.761.505.389,00	10.566.182.954,00	98,18	(195.322.435,00)	690.745.260,00	9.875.437.694,00	1.429,68
Jumlah		10.917.685.389,00	10.693.173.754,00	97,94	(224.511.635,00)	911.157.960,00	9.782.015.794,00	1.073,58

Berdasarkan tabel diatas realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya tahun 2024 mencapai Rp10.693.173.754,00 atau 97,94% dari anggaran sebesar Rp10.917.685.389,00. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.782.015.794,00 atau mencapai 1.073,58%.

- a. Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp126.990.800,00 dan 2023 sebesar Rp220.412.700,00 dan Rp178.664.372,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.94

Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Buku Umum	97.710.800,00	114.063.600,00
2	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	29.280.000,00	0,00
3	Belanja Modal Terekam Dan Bentuk Mikro Lainnya	0,00	106.349.100,00
Jumlah		126.990.800,00	220.412.700,00

- b. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp10.566.182.954,00 dan 2023 sebesar Rp690.745.260.

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada masing-masing Perangkat Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.95

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	SKPD	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DINAS PENDIDIKAN	10.761.505.389,00	10.566.182.954,00	98,18	(195.322.435,00)	690.745.260,00	9.875.437.694,00	1.429,68
2	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	126.720.000,00	97.710.800,00	77,11	(29.009.200,00)	220.412.700,00	(122.701.900,00)	0,00
3	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	29.460.000,00	29.280.000,00	99,39	(180.000,00)	0,00	29.280.000,00	0,00
Jumlah		10.917.685.389,00	10.693.173.754,00	97,94	(224.511.635,00)	911.157.960,00	9.782.015.794,00	1.073,58



5.1.2.2.6 BELANJA MODAL ASET LAINNYA

Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:

- 1) Dapat diidentifikasi;
- 2) Tidak mempunyai wujud fisik;
- 3) Dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
- 4) Dapat dikendalikan oleh entitas; dan
- 5) Memiliki manfaat ekonomi masa depan.

Tabel 5.1.96
Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	75.000.000,00	74.355.570,00	99,14	(644.430,00)	100.077.000,00	(25.721.430,00)	(25,70)
	Jumlah	75.000.000,00	74.355.570,00	99,14	(644.430,00)	100.077.000,00	(25.721.430,00)	(25,70)

Berdasarkan tabel diatas realisasi Belanja Aset Lainnya Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp74.355.570,00 atau mencapai 99,14% dari anggaran sebesar Rp75.000.000,00. Realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp25.721.430,00 atau mencapai 25,70% dibandingkan Tahun Anggaran 2023.

- a. Realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp74.355.570,00 dan Rp100.077.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.97
Realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Lisensi dan Franchise	0,00	100.077.000,00
2	Belanja Modal Software	74.355.570,00	0,00
	Jumlah	74.355.570,00	100.077.000,00

Rincian Belanja Modal Aset Tidak Berwujud pada masing-masing Perangkat Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.98
Realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	SKPD	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	75.000.000,00	74.355.570,00	99,14	(644.430,00)	0,00	74.355.570,00	0,00
2	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	100.077.000,00	(100.077.000,00)	(100,00)
	Jumlah	75.000.000,00	74.355.570,00	99,14	(644.430,00)	100.077.000,00	(25.721.430,00)	(25,70)



5.1.2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2024 direalisasikan untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya, serta untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 mengacu pada Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga diatur sebagai berikut:

- a. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Keadaan darurat meliputi:
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau
 - 2) kejadian luar biasa;
 - 3) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 4) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu
 - 5) kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.

Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

- d. Keperluan mendesak meliputi:
 - 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - a) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - (1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - (2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet
 - b) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain: pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- 3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.
- e. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.
 - f. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
 - g. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut:
 - 1) kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD);
 - 2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.
 - h. Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.
 - i. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan:
 - 1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - 2) memanfaatkan kas yang tersedia.
 - j. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:
 - 1) Kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD;
 - 3) berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.
 - k. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan:
 - 1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
 - 2) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
 - 3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
 - L. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan:



- 1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
 - 2) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
 - 3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
- M. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Realisasi belanja tak terduga seluruhnya terdapat di Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan Realisasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.99
Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Tidak Terduga	6.359.952.269,00	2.187.943.885,00	34,40	(4.172.008.384,00)	1.066.654.400,00	1.121.289.485,00	105,12
	Jumlah	6.359.952.269,00	2.187.943.885,00	34,40	(4.172.008.384,00)	1.066.654.400,00	1.121.289.485,00	105,12

Berdasarkan tabel diatas realisasi belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp2.187.943.885,00 dari anggaran sebesar Rp6.359.952.269,00 atau mencapai 34,40%. Realisasi tahun anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.121.289.485,00 atau 80,12% dibandingkan dengan tahun anggaran 2023.

5.1.3 BELANJA TRANSFER

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024 direalisasikan untuk kompensasi dampak lingkungan terhadap masyarakat sekitar TPAS Galuga yaitu Desa Galuga, Desa Cijujung dan Desa Dukuh sesuai dengan SK Walikota Bogor Nomor 900.1.3/Kep.236-DLH/2024 tanggal 10 Juli 2024.

Realisasi belanja transfer seluruhnya terdapat di Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan Realisasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.100
Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa							
	Dana Kompensasi Dampak Lingkungan Terhadap Masyarakat Sekitar Tempat Pembuangan Sampah Akhir Galuga	1.660.750.000,00	1.660.750.000,00	100,00	0,00	1.660.750.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.660.750.000,00	1.660.750.000,00	100,00	0,00	1.660.750.000,00	0,00	0,00

Berdasarkan tabel diatas realisasi belanja transfer Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp1.660.750.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp1.660.750.000,00.

5.1.4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dengan anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023 sebagai berikut:



Tabel 5.1.101
Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	98.396.220.459,00	225.089.463.440,14	228,76	126.693.242.981,14	192.611.572.644,34	32.477.890.795,80	16,86
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.294.145.996,00	132.184.766.176,00	1.284,08	121.890.620.180,00	76.821.017.476,00	55.363.748.700,00	72,07
	Pembiayaan Netto	88.102.074.463,00	92.904.697.264,14	105,45	4.802.622.801,14	115.790.555.168,34	(22.885.857.904,20)	(19,76)

Realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.4.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan pembiayaan daerah berasal dari penggunaan Sisa lebih Perhitungan APBD (SiLPA) tahun lalu, Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD.

Anggaran dan realisasi Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2024 serta realisasi tahun 2023 dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 5.1.102
Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	54.250.445.599,00	54.255.954.664,14	100,01	5.509.065,14	161.360.978.068,34	(107.105.023.404,20)	(66,38)
2	Pencairan Dana Cadangan	38.648.742.600,00	38.648.742.600,00	100,00	0,00	25.765.828.400,00	12.882.914.200,00	50,00
3	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	126.700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD	5.497.032.260,00	5.484.766.176,00	99,78	(12.266.084,00)	5.484.766.176,00	0,00	0,00
	Jumlah	98.396.220.459,00	225.089.463.440,14	228,76	126.693.242.981,14	192.611.572.644,34	32.477.890.795,80	16,86

Berdasarkan tabel diatas realisasi penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp225.089.463.440,14 atau mencapai 228,76% dari anggaran sebesar Rp98.396.220.459,00. Realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp32.477.890.795,80 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp54.051.328.112,14 Tahun 2024 dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.103
SiLPA Anggaran tahun sebelumnya Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Rincian SiLPA	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4
1	Kas di Kas Daerah	33.724.986.259,00	130.401.482.495,00	(96.676.496.236,00)	0,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	922.000,00	0,00	922.000,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	0,00
4	Kas di BLUD	17.663.729.337,14	28.762.040.587,34	(11.098.311.250,20)	(38,59)
5	Kas Lainnya	859.045.406	204.120.800,00	654.924.606,00	320,85
6	Kas Dana BOS Pusat	1.450.647.204	1.993.334.186,00	(542.686.982,00)	(27,23)
7	Bunga atas Dana Cadangan	555.364.458	0,00	555.364.458,00	0,00
	Jumlah	54.255.954.664,14	161.360.978.068,34	(107.105.023.404,20)	(66,38)

Realisasi Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD sebesar Rp5.484.766.176,00 merupakan realisasi Penerimaan Pinjaman BUMD untuk dana pinjaman dari *International Bank For Reconstruction and Development*, *Loan Agreement* Nomor 770-ID tanggal 1 September 2009 dalam rangka pembiayaan *Urban Water Supply And Sanitation Project* sesuai dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA-1226/DSMI/2009 tanggal 02 November 2009 sebagaimana telah diamandemen sesuai dengan surat nomor S-88/MK.5/2023 tanggal 12 September 2023 tentang Penandatanganan Perubahan (Amandemen) Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA-1226/DSMI/2009 tanggal 02 November 2009 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Bogor.



Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek, realisasi pembiayaan pada BLUD RSUD Kota Bogor sebesar Rp126.700.000.000,00 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, struktur anggaran BLUD terdiri dari pendapatan BLUD, belanja BLUD dan pembiayaan BLUD, pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya dan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 67 tentang 2018 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor.

5.1.4.2 PENGELUARAN DAERAH

Anggaran dan realisasi Pengeluaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 serta realisasi tahun 2023 dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 5.1.104
Pengeluaran Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	71.336.251.300,00	(71.336.251.300,00)	0,00
3	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	5.497.032.260,00	5.484.766.176,00	99,78	(12.266.084,00)	5.484.766.176,00	0,00	0,00
4	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek	0,00	126.700.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		5.497.032.260,00	132.184.766.176,00	2.404,66	(12.266.084,00)	76.821.017.476,00	(71.336.251.300,00)	(92,86)

Berdasarkan tabel diatas realisasi pengeluaran daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp132.184.766.176,00 atau mencapai 2.404,66% dari Anggaran sebesar Rp5.497.032.260,00. Realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp71.336.251.300,00 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023.

Realisasi Pengeluaran Daerah yang berasal dari Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp5.484.766.176,00 adalah Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat untuk dana pinjaman dari *International Bank For Reconstruction and Development*, *Loan Agreement* Nomor 770-ID tanggal 1 September 2009 dalam rangka pembiayaan *Urban Water Supply And Sanitation Project* sesuai dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA-1226/DSMI/2009 tanggal 02 November 2009 sebagaimana telah diamandemen sesuai dengan Surat Nomor S-88/MK.5/2023 tanggal 12 September 2023 tentang Penandatanganan Perubahan (Amandemen) Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA-1226/DSMI/2009 tanggal 02 November 2009 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Bogor.

Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Jangka Panjang dan Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek dan pembayaran pembiayaan BLUD RSUD Kota Bogor sebesar Rp126.700.000.000,00.

5.1.5 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan selisih antara surplus/ (defisit) anggaran dengan pembiayaan netto, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp84.935.591.686,38 dengan rincian tahun anggaran 2024 dan tahun anggaran 2023 sebagai berikut:



Tabel 5.1.105

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(Rp)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Pendapatan	3.192.710.048,074,00	3.170.497.628.555,24	99,30	(22.212.419.518,76)	2.967.475.570.539,80	203.022.058.015,44	6,84
2	Belanja dan Transfer	3.280.812.122.537,00	3.178.466.734.133,00	96,88	(102.345.388.404,00)	3.029.015.680.109,00	149.451.054.024,00	4,93
3	Surplus/ (Defisit) (1-2)	(88.102.074.463,00)	(7.969.105.577,76)	9,05	80.132.968.885,24	(61.540.109.569,20)	53.571.003.991,44	(87,05)
4	Penerimaan Pembiayaan	98.396.220.459,00	225.089.463.440,14	228,76	126.693.242.981,14	192.611.572.644,34	32.477.890.795,80	16,86
5	Pengeluaran Pembiayaan	10.294.145.996,00	132.184.766.176,00	1.284,08	121.890.620.180,00	76.821.017.476,00	55.363.748.700,00	72,07
6	Pembiayaan Netto (4-5)	88.102.074.463,00	92.904.697.264,14	105,45	4.802.622.801,14	115.790.555.168,34	(22.885.857.904,20)	(19,76)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) = (3 + 6)		0,00	84.935.591.686,38		84.935.591.686,38	54.250.445.599,14	30.685.146.087,24	56,56

Tabel diatas menunjukkan SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp84.935.591.686,38 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp54.250.445.599,14 mengalami kenaikan sebesar Rp30.685.146.087,24 atau mencapai 56,56%, SILPA Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.106

Rincian SILPA Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Rincian SiLPA	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4
1	Kas di Kas Daerah	79.503.327.898,00	33.520.359.707,00	45.982.968.191,00	0,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	922.000,00	(922.000,00)	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	1.260.000,00	(1.260.000,00)	0,00
4	Kas di BLUD	2.144.352.695,38	17.663.770.272,14	(15.519.417.576,76)	(87,86)
5	Kas Lainnya	863.308.839	859.045.406	4.263.433,00	0,50
6	Kas Dana BOS Pusat	951.554.744	1.649.723.756	(698.169.012,00)	(42,32)
7	Bunga atas Dana Cadangan	1.473.047.510	555.364.458	917.683.052,00	0,00
Jumlah		84.935.591.686,38	54.250.445.599,14	30.685.146.087,24	56,56



5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP - SAL)

Penyajian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang diperkenankan.

Nilai Saldo Anggaran Lebih (SAL) per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp84.935.591.686,38 dengan rincian sebagai berikut:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal tahun 2024 sebesar Rp54.250.445.599,14 merupakan SiLPA per 31 Desember 2023, sedangkan Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2023 sebesar Rp161.358.478.068,34 merupakan SiLPA per 31 Desember 2022. Saldo Anggaran Lebih Awal tahun 2024 mengalami penurunan 66,38% atau (Rp107.108.032.469,20) dibandingkan Saldo Anggaran Lebih awal tahun 2023. Saldo Anggaran Lebih Awal tersebut terdiri dari:

Tabel 5.2.1
Rincian Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2024 dan 2023

No	Rincian SiLPA	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4
1	Kas di Kas Daerah	33.520.359.707,00	130.401.482.495,00	(96.881.122.788,00)	0,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	922.000,00	0,00	922.000,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	0,00
4	Kas di BLUD	17.663.770.272,14	28.762.040.587,34	(11.098.270.315,20)	(38,59)
5	Kas Lainnya	859.045.406	204.120.800,00	654.924.606,00	320,85
6	Kas Dana BOS Pusat	1.649.723.756	1.990.834.186,00	(341.110.430,00)	(17,13)
7	Bunga atas Dana Cadangan	555.364.458	0,00	555.364.458,00	0,00
Jumlah		54.250.445.599,14	161.358.478.068,34	(107.108.032.469,20)	(66,38)

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan, Tahun 2024 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp54.255.954.664,14 atau mengalami penurunan 66,38% yaitu sebesar (Rp107.105.023.404,20) dari Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan tahun 2023 sebesar Rp161.360.978.068,34. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan tersebut terdiri dari:

Tabel 5.2.2
Rincian Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2024 dan 2023

No	Rincian SiLPA	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4
1	Kas di Kas Daerah	33.724.986.259,00	130.401.482.495,00	(96.676.496.236,00)	0,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	922.000,00	0,00	922.000,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	0,00
4	Kas di BLUD	17.663.729.337,14	28.762.040.587,34	(11.098.311.250,20)	(38,59)
5	Kas Lainnya	859.045.406	204.120.800,00	654.924.606,00	320,85
6	Kas Dana BOS Pusat	1.450.647.204	1.993.334.186,00	(542.686.982,00)	(27,23)





No	Rincian SiLPA	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4
6	Kas Dana BOS Pusat	951.554.744	1.649.723.756	(698.169.012,00)	(42,32)
7	Bunga atas Dana Cadangan	1.473.047.510	555.364.458	917.683.052,00	0,00
Jumlah		84.935.591.686,38	54.250.445.599,14	30.685.146.087,24	56,56

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2024 sebesar Rp84.935.591.686,38 , dengan rincian Tahun 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.2.5
Rincian Saldo Anggaran Lebih TA 2024 dan 2023

No	Rincian SiLPA	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	54.250.445.599,14	161.358.478.068,34	(107.108.032.469,20)	(66,38)
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	54.255.954.664,14	161.360.978.068,34	(107.105.023.404,20)	(66,38)
3	Sub Total (1-2)	(5.509.065,00)	(2.500.000,00)	(3.009.065,00)	120,36
4	SiLPA/ (SiKPA)				
5	Pendapatan Asli Daerah	1.458.619.452.757,24	1.338.618.268.168,80	120.001.184.588,44	8,96
6	Pendapatan Transfer	1.711.878.175.798,00	1.628.857.302.371,00	83.020.873.427,00	5,10
7	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Jumlah (5 s.d.7)	3.170.497.628.555,24	2.967.475.570.539,80	203.022.058.015,44	6,84
9	Belanja Operasi	2.774.250.053.629,00	2.508.123.306.971,00	266.126.746.658,00	10,61
10	Belanja Modal	400.367.986.619,00	518.164.968.738,00	(117.796.982.119,00)	(22,73)
11	Belanja Tak Terduga	2.187.943.885,00	1.066.654.400,00	1.121.289.485,00	105,12
12	Transfer	1.660.750.000,00	1.660.750.000,00	0,00	0,00
13	Jumlah (9 s.d.12)	3.178.466.734.133,00	3.029.015.680.109,00	149.451.054.024,00	4,93
14	Penerimaan Pembiayaan	225.089.463.440,14	192.611.572.644,34	32.477.890.795,80	16,86
15	Pengeluaran Pembiayaan	132.184.766.176,00	76.821.017.476,00	55.363.748.700,00	72,07
16	Jumlah (14 - 15)	92.904.697.264,14	115.790.555.168,34	(22.885.857.904,20)	(19,76)
17	Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya : Lain - lain	5.509.065,00	2.500.000,00	3.009.065,00	0,00
18	Koreksi Tahun Sebelumnya (17)	5.509.065,00	2.500.000,00	3.009.065,00	0,00
SiLPA Tahun Berkenaan (8-13+16-18)		84.935.591.686,38	54.250.445.599,14	30.685.146.087,24	56,56

Tabel 5.2.6
Rincian Saldo Anggaran Lebih TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Sisa s/d Tahun 2024	Ket
	SILPA		84.935.591.686,38
1	KAS DI RKUD		79.503.327.898,00
1,1	KAS EARMARK		17.970.506.105,00
1.1.1	DAK NON FISIK	3.481.503.081,00	
1.1.1.1	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	2.248.432.064,00	
1.1.1.2	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana	343.142.341,00	
1.1.1.3	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru	128.060.020,00	
1.1.1.4	DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru	447.983.700,00	
1.1.1.5	DAK Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	183.800.000,00	
1.1.1.6	DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal	72.113.556,00	
1.1.1.7	DAK Non Fisik Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.000,00	
1.1.1.8	DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	57.970.400,00	
1.1.2	DAK FISIK	3.167.245.504,00	
1.1.2.1	DAK Reguler Bidang Kesehatan	1.125.635.135,00	
1.1.2.2	DAK Reguler Bidang Sanitasi	2.829.732,00	
1.1.2.3	DAK Reguler Cadangan Bidang Jalan	8.200.000,00	
1.1.2.4	DAK Penugasan Bidang Kesehatan	5.320.251,00	





No	Uraian	Sisa s/d Tahun 2024	Ket
1.1.2.5	DAK Penugasan Bidang Air Minum	788.403.001,00	
1.1.2.6	DAK Penugasan Bidang Sanitasi	523.076.450,00	
1.1.2.7	DAK Tambahan Bidang Jalan	112.590.935,00	
1.1.2.8	DAK Tambahan Bidang Irigasi	601.190.000,00	
1.1.3	DAU	10.024.321.755,00	
1.1.3.1	DAU SG Pendidikan	8.432.231.280,00	
1.1.3.2	DAU SG Kesehatan	809.984.456,00	
1.1.3.3	DAU SG PU	40.346.359,00	
1.1.3.4	DAU SG Kelurahan	741.759.660,00	
1.1.4	IF	329.891.382,00	
1.1.5	DBHCHT	828.944.463,00	
1.1.6	DBH SAWIT	138.599.920,00	
1.2	KAS NON-EARMARKED		61.532.821.793,00
2	NON RKUD		5.432.263.788,00
2.1	KAS DI BENDAHARA BOS	947.597.794,00	
2.2	KAS DI BLUD PUSKESMAS DAN LABKESDA	1.582.776.601,00	
2.3	KAS DI BLUD RSUD	561.576.094,38	
2.4	KAS LAINNYA DI BENDAHARA BOP PAUD	7.020.131,00	
2.5	KAS LAINNYA DI BENDAHARA BOK KESEHATAN	856.288.708,00	
2.6	BUNGA DANA CADANGAN	1.477.004.460,00	



5.3 PENJELASAN POS - POS NERACA

Untuk memberikan gambaran yang lebih ringkas mengenai Posisi Keuangan Pemerintah Kota Bogor, berikut ini kami sajikan Penjelasan Pos-pos Neraca Pemerintah Kota Bogor yang menggambarkan posisi keuangan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas secara komparatif pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.3.1
Neraca

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Aset				
2	Aset Lancar	699.758.089.985,05	602.391.815.144,08	97.366.274.840,97	16,16
3	Investasi Jangka Panjang	1.002.293.416.444,24	835.123.845.482,75	167.169.570.961,49	20,02
4	Aset tetap	9.038.092.125.327,88	9.214.910.044.241,79	(176.817.918.913,91)	(1,92)
5	Dana Cadangan	8.398.684.760,00	46.125.787.358,00	(37.727.102.598,00)	(81,79)
6	Aset Lainnya	76.403.789.787,11	93.886.594.924,42	(17.482.805.137,31)	(18,62)
7	Properti Investasi	217.198.183.953,48	0,00	217.198.183.953,48	0,00
8	Jumlah Aset	11.042.144.290.257,76	10.792.438.087.151,04	249.706.203.106,72	2,31
9	Kewajiban				
10	Kewajiban Jangka Pendek	110.091.452.175,79	106.374.711.749,07	3.716.740.426,72	3,49
11	Kewajiban Jangka Panjang	62.666.822.555,00	72.948.702.467,00	(10.281.879.912,00)	(14,09)
12	Jumlah Kewajiban	172.758.274.730,79	179.323.414.216,07	(6.565.139.485,28)	(3,66)
13	Ekuitas				
14	Ekuitas	10.869.386.015.526,97	10.613.114.672.934,97	256.271.342.591,99	2,41
15	Jumlah Ekuitas	10.869.386.015.526,97	10.613.114.672.934,97	256.271.342.591,99	2,41
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	11.042.144.290.257,76	10.792.438.087.151,04	249.706.203.106,72	2,31

5.3.1 ASET

Aset merupakan salah satu pos yang terdapat dalam Neraca Pemerintah Kota Bogor. Total aset Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.042.144.290.257,76 naik sebesar Rp249.706.203.106,72 atau 2,31% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.792.438.087.151,04 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.2
Aset TA 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Aset				
2	Aset Lancar	699.758.089.985,05	602.391.815.144,08	97.366.274.840,97	16,16
3	Investasi Jangka Panjang	1.002.293.416.444,24	835.123.845.482,75	167.169.570.961,49	20,02
4	Aset tetap	9.038.092.125.327,88	9.214.910.044.241,79	(176.817.918.913,91)	(1,92)
5	Dana Cadangan	8.398.684.760,00	46.125.787.358,00	(37.727.102.598,00)	(81,79)
6	Aset Lainnya	76.403.789.787,11	93.886.594.924,42	(17.482.805.137,31)	(18,62)
7	Properti Investasi	217.198.183.953,48	0,00	217.198.183.953,48	0,00
8	Jumlah Aset	11.042.144.290.257,76	10.792.438.087.151,04	249.706.203.106,72	2,31
9	Kewajiban				
10	Kewajiban Jangka Pendek	110.091.452.175,79	106.374.711.749,07	3.716.740.426,72	3,49
11	Kewajiban Jangka Panjang	62.666.822.555,00	72.948.702.467,00	(10.281.879.912,00)	(14,09)
12	Jumlah Kewajiban	172.758.274.730,79	179.323.414.216,07	(6.565.139.485,28)	(3,66)
13	Ekuitas				
14	Ekuitas	10.869.386.015.526,97	10.613.114.672.934,97	256.271.342.591,99	2,41
15	Jumlah Ekuitas	10.869.386.015.526,97	10.613.114.672.934,97	256.271.342.591,99	2,41
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	11.042.144.290.257,76	10.792.438.087.151,04	249.706.203.106,72	2,31



Kenaikan sebagian besar disebabkan oleh penambahan aset tetap dari Belanja Modal serta adanya penambahan investasi jangka panjang sesuai dengan nilai ekuitas pada Badan Usaha Milik Daerah. Berikut komposisi aset Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2024.

5.3.1.1 ASET LANCAR

Aset lancar terdiri atas kas dan setara kas serta aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bogor pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 pada tabel berikut.

Tabel 5.3.3
Aset Lancar TA 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Aset Lancar				
2	Kas dan Setara Kas	83.616.865.127,38	53.955.641.102,14	29.661.224.025,24	54,97
3	Piutang Pajak	617.775.532.829,00	520.712.992.274,00	97.062.540.555,00	18,64
4	Piutang Retribusi	84.392.660.913,70	5.848.053.235,00	78.544.607.678,70	1.343,09
5	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.510.852.544,00	4.961.512.690,00	(450.660.146,00)	(9,08)
6	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	177.064.672.727,00	207.821.455.185,70	(30.756.782.458,70)	(14,80)
7	Piutang Transfer Antar Daerah	12.733.735.118,00	10.982.003.087,00	1.751.732.031,00	15,95
8	Piutang Lainnya	59.596.923.188,00	65.081.689.452,00	(5.484.766.264,00)	(8,43)
9	Penyisihan Piutang	(389.964.184.114,24)	(327.357.002.657,22)	(62.607.181.457,02)	19,13
10	Beban Dibayar Dimuka	505.228.167,24	515.022.118,72	(9.793.951,48)	(1,90)
11	Persediaan	49.525.803.484,97	59.870.448.656,74	(10.344.645.171,77)	(17,28)
	Jumlah Aset Lancar	699.758.089.985,05	602.391.815.144,08	97.366.274.840,97	16,16

Berdasarkan tabel rincian Aset Lancar di atas, Aset lancar Pemerintah Kota Bogor 31 Desember 2024 sebesar Rp699.758.089.985,05 secara umum terjadi kenaikan nilai Aset Lancar sebesar Rp97.366.274.840,97 atau 16,16% jika dibandingkan dengan nilai Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp602.391.815.144,08.

5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

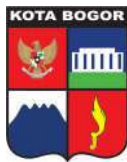
Rekening ini menggambarkan saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2023 yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), BLUD RSUD, BLUD Puskesmas, Bendahara BOS pada Dinas Pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.4
Kas dan Setara Kas TA 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Kas dan Setara Kas				
2	Kas di Kas Daerah	79.503.327.898,00	33.520.359.707,00	45.982.968.191,00	137,18
3	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	922.000,00	(922.000,00)	
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	1.810.000,00	(1.810.000,00)	
5	Kas di BLUD	2.153.130.596,38	17.674.780.233,14	(15.521.649.636,76)	(87,82)
6	Kas Lainnya	1.012.808.839,00	1.108.045.406,00	(95.236.567,00)	(8,60)
7	Kas di Bendahara BOS Pusat	947.597.794,00	1.649.723.756,00	(702.125.962,00)	(42,56)
	Jumlah Kas dan Setara Kas	83.616.865.127,38	53.955.641.102,14	29.661.224.025,24	54,97

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp83.616.865.127,38 naik sebesar Rp29.661.224.025,24 atau 54,97% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023





sebesar Rp53.955.641.102,14 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.3.5
Kas dan Setara Kas Per Perangkat Daerah

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaiikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Kas dan Setara Kas				
2	Kas di Kas Daerah	79.503.327.898,00	33.520.359.707,00	45.982.968.191,00	137,18
	- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	79.503.327.898,00	33.520.359.707,00	45.982.968.191,00	137,18
3	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	922.000,00	(922.000,00)	-
	- Dinas Perhubungan	0,00	922.000,00	(922.000,00)	-
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	1.810.000,00	(1.810.000,00)	-
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	1.260.000,00	(1.260.000,00)	-
	- Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	550.000,00	(550.000,00)	-
5	Kas di BLUD	2.153.130.596,38	17.674.780.233,14	(15.521.649.636,76)	(87,82)
	Rumah Sakit Umum Daerah	570.353.995,38	16.750.181.969,14	(16.179.827.973,76)	(96,59)
	Puskesmas Bogor Selatan	65.981.575	39.645.070,00	26.336.505,00	66,43
	Puskesmas Cipaku	130.635.416	1.722.803,00	128.912.613,00	7.482,73
	Puskesmas Bondongan	46.288.543	60.583.946,00	(14.295.403,00)	(23,60)
	Puskesmas Lawangintung	110.734.890	75.719.801,00	35.015.089,00	46,24
	Puskesmas Bogor Timur	19.666.167	70.128.820,00	(50.462.653,00)	(71,96)
	Puskesmas Pulo Armin	94.073.214	5.688.667,00	88.384.547,00	1.553,70
	Puskesmas Bogor Tengah	51.744.594	76.731.229,00	(24.986.635,00)	(32,56)
	Puskesmas Sempur	37.364.555	3.847.737,00	33.516.818,00	871,08
	Puskesmas Gang Aut	13.157.615	82.178.272,00	(69.020.657,00)	(83,99)
	Puskesmas Belong	2.269.180	9.449.710,00	(7.180.530,00)	(75,99)
	Puskesmas Merdeka	68.770.529	55.419.495,00	13.351.034,00	24,09
	Puskesmas Semplak	30.356.626	30.114.427,00	242.199,00	0,80
	Puskesmas Pancasan	50.175.253	12.747.359,00	37.427.894,00	293,61
	Puskesmas Pasir Mulya	79.625.567	199.543.404,00	(119.917.837,00)	(60,10)
	Puskesmas Gang Kelor	3.863.561	1.714.164,00	2.149.397,00	125,39
	Puskesmas Sindang Barang	5.777.814	1.733.987,00	4.043.827,00	233,21
	Puskesmas Bogor Utara	12.516.734	10.505.806,00	2.010.928,00	19,14
	Puskesmas Tegal Gundil	35.057.009	10.823.743,00	24.233.266,00	223,89
	Puskesmas Warung Jambu	23.621.526	11.601.793,00	12.019.733,00	103,60
	Puskesmas Tanah Sareal	984.597	770.234,00	214.363,00	27,83
	Puskesmas Pondok Rumpit	73.398.940	39.171.085,00	34.227.855,00	87,38
	Puskesmas Kedung Badak	181.830.764	9.146.006,00	172.684.758,00	1.888,09
	Puskesmas Kayu Manis	10.963.139	11.497.682,00	(534.543,00)	(4,65)
	Puskesmas Mekarwangi	329.988.366	78.100.731,00	251.887.635,00	322,52
	Puskesmas Mulyaharja	7.287.732	2.608.877,00	4.678.855,00	179,34
	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	96.642.695	23.403.416,00	73.239.279,00	312,94
6	Kas Lainnya	1.012.808.839,00	1.108.045.406,00	(95.236.567)	(8,60)
	Dinas Pendidikan	7.020.131,00	-	7.020.131,00	
	Puskesmas Bogor Selatan	1.400.000,00	29.423.074,00	(28.023.074,00)	(95,24)
	Puskesmas Cipaku	69.941.520,00	50.981.683,00	18.959.837,00	37,19
	Puskesmas Bondongan	20.586.020,00	32.073.331,00	(11.487.311,00)	(35,82)
	Puskesmas Lawangintung	38.537.212,00	79.505.992,00	(40.968.780,00)	(51,53)
	Puskesmas Bogor Timur	7.650.020,00	14.367.600,00	(6.717.580,00)	(46,76)
	Puskesmas Pulo Armin	94.610.639,00	38.923.883,00	55.686.756,00	143,07
	Puskesmas Bogor Tengah	16.883.986,00	37.819.277,00	(20.935.291,00)	(55,36)
	Puskesmas Sempur	0,00	42.462.736,00	(42.462.736,00)	(100,00)
	Puskesmas Gang Aut	4.350.000,00	30.381.242,00	(26.031.242,00)	(85,68)
	Puskesmas Belong	32.839,00	20.916.478,00	(20.883.639,00)	(99,84)
	Puskesmas Merdeka	92.328.419,00	83.670.784,00	8.657.635,00	10,35
	Puskesmas Semplak	13.755.020,00	27.135.863,00	(13.380.843,00)	(49,31)
	Puskesmas Pancasan	27.406.520,00	27.204.385,00	202.135,00	0,74
	Puskesmas Pasir Mulya	56.668.500,00	54.153.738,00	2.514.762,00	4,64
	Puskesmas Gang Kelor	3.725.826,00	22.728.634,00	(19.002.808,00)	(83,61)
	Puskesmas Sindang Barang	167.632.520,00	89.037.559,00	78.594.961,00	88,27
	Puskesmas Bogor Utara	35.217.120,00	19.267.702,00	15.949.418,00	82,78
	Puskesmas Tegal Gundil	10.903.520,00	27.732.610,00	(16.829.090,00)	(60,68)
	Puskesmas Warung Jambu	61.300.402,00	28.141.971,00	33.158.431,00	117,83
	Puskesmas Tanah Sareal	5.483.520,00	14.717.000,00	(9.233.480,00)	(62,74)
	Puskesmas Pondok Rumpit	6.368.520,00	14.517.800,00	(8.149.280,00)	(56,13)
	Puskesmas Kedung Badak	18.150.000,00	23.761.003,00	(5.611.003,00)	(23,61)
	Puskesmas Kayu Manis	15.006.720,00	16.604.964,00	(1.598.244,00)	(9,63)
	Puskesmas Mekarwangi	78.089.020,00	17.221.648,00	60.867.372,00	353,44
	Puskesmas Mulyaharja	10.260.845,00	16.294.449,00	(6.033.604,00)	(37,03)
	PPKD	149.500.000,00	249.000.000,00	(99.500.000,00)	(39,96)
7	Kas di Bendahara BOS Pusat	947.597.794,00	1.649.723.756,00	(702.125.962,00)	(42,56)
	- Dinas Pendidikan	947.597.794,00	1.649.723.756,00	(702.125.962,00)	(42,56)
	Jumlah Kas dan Setara Kas	83.616.865.127,38	53.955.641.102,14	29.661.224.025,24	54,97



5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 sesuai dengan Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp79.652.827.898,00 sedangkan saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 pada Neraca sebesar Rp79.503.327.898,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp149.500.000,00 yaitu utang jaminan bongkar reklame yang merupakan kas transitoris yang dicatat pada akun kas lainnya.

Adapun pada tahun 2024 utang jaminan bongkar reklame sebesar Rp28.500.000,00 direklasifikasi dari kas di kas daerah ke kas lainnya. Berikut mutasi kas di kas daerah sesuai dengan neraca tahun 2024 dan 2023:

Tabel 5.3.6
Mutasi Kas di Kas Daerah

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Saldo awal Kas di Kas Daerah	33.520.359.707,00	130.401.382.495,00
2	Penerimaan Kas	2.852.026.719.815,00	2.684.927.240.206,00
3	Pengeluaran Kas	2.806.015.251.624,00	2.781.559.262.994,00
4	Utang Jaminan Bongkar yang direklas ke kas lainnya	(28.500.000,00)	(249.000.000,00)
5	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	79.503.327.898,00	33.520.359.707,00

(Rincian kas di kas daerah disajikan pada lampiran 1.1 dan 1.2)

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp922.000,00. Saldo kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp922.000,00 tahun 2023 adalah saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan yang berasal dari Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan usaha sebesar Rp180.000,00 dan Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas lainnya di Lingkungan Terminal sebesar Rp742.000,00. Mutasi Kas di Bendahara Penerimaan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.7
Mutasi Kas di Bendahara Penerimaan

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Saldo awal Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
2	Penerimaan Kas	18.634.541.399,00	15.468.198.372,00
3	Pengeluaran Kas	18.634.541.399,00	15.467.276.372,00
4	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	922.000,00

5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.810.000,00. Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran selama tahun 2024 adalah sebagai berikut.



Tabel 5.3.8
Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Saldo awal Kas di Bendahara Pengeluaran	1.810.000,00	0,00
2	Penerimaan Kas	531.060.924.715,48	584.107.179.265,50
3	Pengeluaran Kas	531.062.734.715,48	584.105.369.265,50
4	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	1.810.000,00

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.810.000,00 terdiri dari saldo kas di bendahara pengeluaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.260.000,00 dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp550.000,00.

5.3.1.1.4 Kas di BLUD

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.153.130.596,38 turun sebesar Rp15.521.649.636,76 atau 87,82% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp17.674.780.233,14 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.9
Kas di BLUD per Perangkat Daerah

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Kas di BLUD	2.153.130.596,38	17.674.780.233,14	(15.521.649.636,76)	(87,82)
	Puskesmas Bogor Selatan	65.981.575,00	39.645.070,00	(16.684.200.394,14)	(99,61)
	Puskesmas Cipaku	130.635.416,00	1.722.803,00	90.990.346,00	229,51
	Puskesmas Bondongan	46.288.543,00	60.583.946,00	44.565.740,00	2.586,82
	Puskesmas Lawangintung	110.734.890,00	75.719.801,00	50.150.944,00	82,78
	Puskesmas Bogor Timur	19.666.167,00	70.128.820,00	(56.053.634,00)	(74,03)
	Puskesmas Pulo Armyn	94.073.214,00	5.688.667,00	23.944.394,00	34,14
	Puskesmas Bogor Tengah	51.744.594,00	76.731.229,00	46.055.927,00	809,61
	Puskesmas Sempur	37.364.555,00	3.847.737,00	(39.366.674,00)	(51,30)
	Puskesmas Gang Aut	13.157.615,00	82.178.272,00	9.309.878,00	241,96
	Puskesmas Belong	2.269.180,00	9.449.710,00	(79.909.092,00)	(97,24)
	Puskesmas Merdeka	68.770.529,00	55.419.495,00	59.320.819,00	627,75
	Puskesmas Semplak	30.356.626,00	30.114.427,00	(25.062.869,00)	(45,22)
	Puskesmas Pancasan	50.175.253,00	12.747.359,00	20.060.826,00	66,62
	Puskesmas Pasir Mulya	79.625.567,00	199.543.404,00	66.878.208,00	524,64
	Puskesmas Gang Kelor	3.863.561,00	1.714.164,00	(195.679.843,00)	(98,06)
	Puskesmas Sindang Barang	5.777.814,00	1.733.987,00	4.063.650,00	237,06
	Puskesmas Bogor Utara	12.516.734,00	10.505.806,00	10.782.747,00	621,85
	Puskesmas Tegal Gundil	35.057.009,00	10.823.743,00	24.551.203,00	233,69
	Puskesmas Warung Jambu	23.621.526,00	11.601.793,00	12.797.783,00	118,24
	Puskesmas Tanah Sareal	984.597,00	770.234,00	(10.617.196,00)	(91,51)
	Puskesmas Pondok Rumput	73.398.940,00	39.171.085,00	72.628.706,00	9.429,43
	Puskesmas Kedung Badak	181.830.764,00	9.146.006,00	142.659.679,00	364,20
	Puskesmas Kayu Manis	10.963.139,00	11.497.682,00	1.817.133,00	19,87
	Puskesmas Mekarwangi	329.988.366,00	78.100.731,00	318.490.684,00	2.770,04
	Puskesmas Mulyaharja	7.287.732,00	2.608.877,00	(70.812.999,00)	(90,67)
	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	96.642.695,00	23.403.416,00	94.033.818,00	3.604,38
	Rumah Sakit Umum Daerah	570.353.995,38	16.750.181.969,14	546.950.579,38	2.337,05
	Jumlah Kas di BLUD	2.153.130.596,38	17.674.780.233,14	(15.521.649.636,76)	(87,82)

Saldo Kas di BLUD tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp2.153.130.596,38 dan Rp17.674.780.233,14 dengan rincian mutasi sebagai berikut:



Tabel 5.3.10
Mutasi Kas di BLUD

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Saldo awal Kas di BLUD	17.674.780.233,14	29.011.343.370,34
2	Penerimaan Kas	535.756.334.350,24	382.106.696.457,80
3	Pengeluaran Kas	551.277.983.987,00	393.443.259.595,00
4	Saldo Akhir Kas di BLUD	2.153.130.596,38	17.674.780.233,14

Saldo Kas di BLUD Tahun Anggaran 2024 dan 2023 sebesar Rp2.153.130.596,38 dan Rp17.674.780.233,14 terdapat pada unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yaitu Puskesmas dan Labkesda serta Rumah Sakit Umum Daerah.

Saldo Kas di BLUD Puskesmas dan Labkesda Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.582.776.601,00 adalah pembentuk SILPA.

Saldo Kas di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp570.353.955,38 terdiri dari kas pembentuk SILPA sebesar Rp561.576.094,38 dan utang PFK yang akan disetor pada tahun 2024 sebesar Rp8.777.901,00. Rincian saldo kas di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.3.11
Rincian Kas di BLUD pada RSUD

No	Uraian	No Rekening	Peruntukan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Kas Tunai	-		30.609.500,00	69.945.000,00
2	Bank BJB	00601878287001	Operasional	454.708.118,00	293.877.991,14
3	Bank Mandiri	1330070807066	Tampungan Asuransi	23.232.324,38	659.515.510,00
4	Bank BNI	352582588	Tampungan Asuransi	61.804.053,00	15.726.843.468,00
Total				570.353.995,38	16.750.181.969,14

5.3.1.1.1.5 Kas di Bendahara BOS Pusat

Saldo Kas di Bendahara BOS Pusat per 31 Desember 2024 adalah Rp947.597.794,00 turun sebesar Rp702.125.962,00 atau mencapai 42,56% dibandingkan saldo 31 Desember 2023 sebesar Rp1.649.723.756,00 dengan mutasi pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.3.12
Mutasi Kas di Bendahara BOS Pusat

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Koreksi Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
							(Rp)	%
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7=6-3)	(8=7/6)
1	Sekolah Dasar	902.450.325,00	(199.626.552,00)	84.423.161.825,00	84.542.802.745,00	583.182.853,00	(319.267.472,00)	(35,38)
2	Sekolah Menengah Pertama	747.273.431,00		25.739.526.569,00	26.122.385.059,00	364.414.941,00	(382.858.490,00)	(51,23)
Jumlah Saldo Kas di Bendahara BOS Pusat		1.649.723.756,00	(199.626.552,00)	110.162.688.394,00	110.665.187.804,00	947.597.794,00	(702.125.962,00)	(42,56)

(Rincian kas di bendahara BOS pusat disajikan pada Lampiran 2.)

5.3.1.1.1.6 Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.012.808.839,00 dan Rp1.108.045.406,00 dengan mutasi pada tahun 2024 sebagai berikut:



Tabel 5.3.13
Mutasi Kas Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Saldo awal Kas Lainnya	1.108.045.406,00	204.120.800,00
2	Penerimaan Kas	41.519.971.494,00	32.978.574.200,00
3	Pengeluaran Kas	41.615.208.061,00	32.074.649.594,00
4	Saldo Akhir Kas Lainnya	1.012.808.839,00	1.108.045.406,00

Kas lainnya pada tahun 2024 sebesar Rp1.012.808.839,00 terdiri dari saldo kas Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas sebesar Rp856.288.708,00, Saldo BOP PAUD pada Dinas Pendidikan sebesar Rp7.020.131,00 dan uang jaminan bongkar sebesar Rp149.500.000,00.

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.012.808.839,00 naik sebesar Rp95.236.567,00 atau 8,60% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.108.045.406,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.14
Kas Lainnya per Perangkat Daerah

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Kas Lainnya	1.012.808.839,00	1.108.045.406,00	(95.236.567,00)	(8,60)
	Dinas Pendidikan	7.020.131,00	0,00	7.020.131,00	
	Puskesmas Bogor Selatan	1.400.000,00	29.423.074,00	(28.023.074,00)	(95,24)
	Puskesmas Cipaku	69.941.520,00	50.981.683,00	18.959.837,00	37,19
	Puskesmas Bondongan	20.586.020,00	32.073.331,00	(11.487.311,00)	(35,82)
	Puskesmas Lawangintung	38.537.212,00	79.505.992,00	(40.968.780,00)	(51,53)
	Puskesmas Bogor Timur	7.650.020,00	14.367.600,00	(6.717.580,00)	(46,76)
	Puskesmas Pulo Armin	94.610.639,00	38.923.883,00	55.686.756,00	143,07
	Puskesmas Bogor Tengah	16.883.986,00	37.819.277,00	(20.935.291,00)	(55,36)
	Puskesmas Sempur	0	42.462.736,00	(42.462.736,00)	(100,00)
	Puskesmas Gang Aut	4.350.000,00	30.381.242,00	(26.031.242,00)	(85,68)
	Puskesmas Belong	32.839,00	20.916.478,00	(20.883.639,00)	(99,84)
	Puskesmas Merdeka	92.328.419,00	83.670.784,00	8.657.635,00	10,35
	Puskesmas Semplak	13.755.020,00	27.135.863,00	(13.380.843,00)	(49,31)
	Puskesmas Pancasan	27.406.520,00	27.204.385,00	202.135,00	0,74
	Puskesmas Pasir Mulya	56.668.500,00	54.153.738,00	2.514.762,00	4,64
	Puskesmas Gang Kelor	3.725.826,00	22.728.634,00	(19.002.808,00)	(83,61)
	Puskesmas Sindang Barang	167.632.520,00	89.037.559,00	78.594.961,00	88,27
	Puskesmas Bogor Utara	35.217.120,00	19.267.702,00	15.949.418,00	82,78
	Puskesmas Tegal Gundil	10.903.520,00	27.732.610,00	(16.829.090,00)	(60,68)
	Puskesmas Warung Jambu	61.300.402,00	28.141.971,00	33.158.431,00	117,83
	Puskesmas Tanah Sareal	5.483.520,00	14.717.000,00	(9.233.480,00)	(62,74)
	Puskesmas Pondok Rumpit	6.368.520,00	14.517.800,00	(8.149.280,00)	(56,13)
	Puskesmas Kedung Badak	18.150.000,00	23.761.003,00	(5.611.003,00)	(23,61)
	Puskesmas Kayu Manis	15.006.720,00	16.604.964,00	(1.598.244,00)	(9,63)
	Puskesmas Mekarwangi	78.089.020,00	17.221.648,00	60.867.372,00	353,44
	Puskesmas Mulyaharja	10.260.845,00	16.294.449,00	(6.033.604,00)	(37,03)
	PPKD	149.500.000,00	249.000.000,00	(99.500.000,00)	(39,96)
	Jumlah Kas Lainnya	1.012.808.839,00	1.108.045.406,00	(95.236.567,00)	(8,60)

Tabel 5.3.15
Mutasi Kas Lainnya pada Dinas Pendidikan

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penerimaan	Pengeluaran	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=6-3)	(8=7/6)
1	TK NEGERI MEXINDO	0,00	169.360.000,00	165.305.776,00	4.054.224,00	4.054.224,00	-
2	TK NEGERI MOTOKAR	0,00	65.700.000,00	62.734.093,00	2.965.907,00	2.965.907,00	-
3	SKB PAUD	0,00	118.990.000,00	118.990.000,00	-	0,00	-
4	SKB KESETARAAN	0,00	287.580.000,00	287.580.000,00	-	0,00	-
	Jumlah Saldo Kas di Bendahara BOS Pusat	0,00	641.630.000,00	634.609.869,00	7.020.131,00	7.020.131,00	-



5.3.1.1.2 Piutang

Piutang menggambarkan hak Pemerintah Kota Bogor terhadap penerimaan kas, baik pendapatan yang belum diterima secara kas maupun tagihan-tagihan lainnya, saldo rekening tersebut per 31 Desember 2024 sebesar Rp956.074.377.319,70 mengalami penurunan sebesar Rp140.666.671.396,00 atau 17,25% dibandingkan posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp815.407.705.923,70. Adapun rincian Piutang dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.16
Piutang

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Piutang				
2	Piutang Pajak Daerah	617.775.532.829,00	520.712.992.274,00	97.062.540.555,00	18,64
3	Piutang Retribusi Daerah	84.392.660.913,70	5.848.053.235,00	78.544.607.678,70	1.343,09
4	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.510.852.544,00	4.961.512.690,00	(450.660.146,00)	(9,08)
5	Piutang Lain - lain PAD yang Sah	177.064.672.727,00	207.821.455.185,70	(30.756.782.458,70)	(14,80)
6	Piutang Transfer Antar Daerah	12.733.735.118,00	10.982.003.087,00	1.751.732.031,00	15,95
7	Piutang Lainnya	49.425.995.593,00	65.081.689.452,00	(15.655.693.859,00)	(24,06)
	Jumlah Piutang	945.903.449.724,70	815.407.705.923,70	130.495.743.801,00	16,00

5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak merupakan pos untuk menampung saldo tagihan pajak daerah kepada Wajib Pajak yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 bulan. Piutang Pajak terjadi dikarenakan adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), sampai dengan batas waktu tertentu pada tanggal Neraca belum dibayar oleh Wajib Pajak Daerah (WP).

Tabel 5.3.17
Piutang Pajak Daerah

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Piutang				
2	Piutang Pajak Hotel	14.623.197.503,00	8.840.201.413,00	5.782.996.090,00	65,42
3	Piutang Pajak Restoran	12.515.948.758,00	6.929.794.814,00	5.586.153.944,00	80,61
4	Piutang Pajak Hiburan	1.000.174.810,00	73.666.436,00	926.508.374,00	1.257,71
5	Piutang Pajak Reklame	1.960.325.995,00	1.568.514.060,00	391.811.935,00	24,98
6	Piutang Pajak Parkir	273.039.183,00	167.315.385,00	105.723.798,00	63,19
7	Piutang Pajak Air Tanah	351.031.902,00	261.270.048,00	89.761.854,00	34,36
8	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	586.951.846.128,00	502.792.700.118,00	84.159.146.010,00	16,74
9	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	99.968.550,00	79.530.000,00	20.438.550,00	25,70
	Jumlah Piutang Pajak	617.775.532.829,00	520.712.992.274,00	97.062.540.555,00	18,64

Saldo Piutang Pajak Per 31 Desember 2024 sebesar Rp617.775.532.829,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp97.062.540.555,00 atau 18,64% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp520.712.992.274,00 lebih lengkap rincian mutasi piutang pajak daerah disajikan pada tabel berikut:



Tabel 5.3.18
Mutasi Piutang Pajak Daerah

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2023	Penambahan / Pengurangan Masa Pajak s/d th 2023	Penerbitan Ketetapan Baru	Penambahan / Ketetapan th 2024	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3+4+5+6-7)
1	Piutang Pajak						
2	Piutang Pajak Hotel	8.840.201.413,00			128.990.798.187,00	123.207.802.097,00	14.623.197.503,00
3	Piutang Pajak Restoran	6.929.794.814,00		4.557.934,00	214.097.189.659,00	208.515.593.649,00	12.515.948.758,00
4	Piutang Pajak Hiburan	73.666.436,00			30.285.088.596,00	29.358.580.222,00	1.000.174.810,00
5	Piutang Pajak Reklame	1.568.514.060,00		3.110.000,00	10.125.188.469,00	9.736.486.534,00	1.960.325.995,00
6	Piutang Pajak Parkir	167.315.385,00			7.965.418.166,00	7.859.694.368,00	273.039.183,00
7	Piutang Pajak Air Tanah	261.270.048,00			2.014.470.394,00	1.924.708.540,00	351.031.902,00
8	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	79.530.000,00			286.824.983.161,00	286.804.544.611,00	99.968.550,00
9	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	502.792.700.118,00	(1.761.512.760,00)		296.832.276.011,00	210.911.617.241,00	586.951.846.128,00
	Jumlah Piutang Pajak	520.712.992.274,00	(1.761.512.760,00)	7.667.934,00	977.135.412.643,00	878.319.027.262,00	617.775.532.829,00

(Rincian piutang pajak disajikan pada Lampiran 3)

Pada tahun 2024 terdapat koreksi piutang pajak PBB P2 masa pajak sampai dengan tahun 2023 yang mempengaruhi nilai piutang dengan total sebesar Rp(1.761.512.760,00) yang terdiri dari faktor penambah dan pengurang sebagai berikut:

1. Faktor penambah sebesar Rp182.843.713,00 terdiri dari adanya penerbitan kembali SPPT PBB P2 melalui SK kepala badan atas permohonan dari WP sebesar Rp1.182.612.053,00 (174 SPPT), pemindahbukuan pembayaran PBB P2 yang salah NOP sebesar Rp231.660,00 (1 SPPT).
2. Faktor pengurang sebesar Rp1.944.356.473,00 terdiri dari adanya pembatalan NOP dan SPPT PBB P2 berdasarkan SK Kepala Badan karena alasan tertentu sebesar Rp401.960.027,00 (2.842 SPPT), pembatalan NOP PBBP2 karena double anslah sehingga mengurangi piutang yang diakui sebesar Rp4.459.085 (18 SPPT), koreksi piutang karena adanya data pembayaran tahun 2023 yang baru masuk di tahun 2024 sebesar Rp26.454.457 (17 SPPT) , adanya penetapan ulang ketetapan PBB pada tahun 2024 untuk Wajib Pajak yang sudah diakui piutang nya pada tahun 2023 sebesar Rp1.493.575.676,00 (36 SPPT), penyesuaian status bayar atas 1 NOP yang sebelumnya masuk data piutang sebesar Rp242.344,00 (10 SPPT), penyesuaian status bayar atas 1 NOP yang sebelumnya masuk data piutang sebesar Rp318.168 (8 SPPT), pembatalan NOP dan SPPT PBB P2 berdasarkan SK Kepala Badan atas Objek Pajak yang terdampak pelebaran jalur kereta api sebesar Rp17.346.716,00 (90 SPPT).

5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi Daerah

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp84.392.660.913,70 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp5.848.053.235,00 adalah nilai Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan tetapi belum diterima pembayarannya. Mutasi piutang retribusi daerah tahun 2024 sebagai berikut:



Tabel 5.3.19
Mutasi Piutang Retribusi Daerah

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Saldo awal Piutang Retribusi	5.848.053.235,00	5.253.999.412,00
2	Penerimaan	419.447.484.596,70	31.812.588.038,00
3	Pengeluaran	340.902.876.918,00	31.218.534.215,00
4	Saldo Akhir Piutang Retribusi	84.392.660.913,70	5.848.053.235,00

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 sebesar Rp84.392.660.913,70 atau naik sebesar Rp78.544.607.678,704 atau 1.343,09% dibandingkan saldo 2023 sebesar Rp5.848.053.235,00. Saldo Piutang Retribusi Pemerintah Kota Bogor terdapat pada perangkat daerah berikut:

Tabel 5.3.20
Piutang Retribusi Daerah Per Perangkat Daerah

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
	Piutang Retribusi				
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD	78.180.963.263,70	0,00	78.180.963.263,70	
	- Rumah Sakit Umum Daerah	78.180.963.263,70	0,00	78.180.963.263,70	
2	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian an dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	265.720.500,00	272.646.000,00	(6.925.500,00)	(2,54)
	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	265.720.500,00	272.646.000,00	(6.925.500,00)	(2,54)
3	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	3.318.645.023,00	2.543.504.543,00	775.140.480,00	30,48
	- Dinas Perumahan dan Permukiman	1.113.355.000,00	977.860.000,00	135.495.000,00	13,86
	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	270.579.776,00	199.442.186,00	71.137.590,00	35,67
	- BKAD	1.934.710.247,00	1.366.202.357,00	568.507.890,00	41,61
4	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.150.570.160,00	2.191.425.414,00	(40.855.254,00)	(1,86)
	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.150.570.160,00	2.191.425.414,00	(40.855.254,00)	(1,86)
5	Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	117.195.125,00	117.195.125,00	0,00	0,00
	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	117.195.125,00	117.195.125,00	0,00	0,00
6	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	359.566.842,00	723.282.153,00	(363.715.311,00)	-
	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	359.566.842,00	723.282.153,00	(363.715.311,00)	-
	Jumlah Piutang Retribusi	84.392.660.913,70	5.848.053.235,00	78.544.607.678,70	1.343,09

(Rincian piutang retribusi per perangkat daerah disajikan pada Lampiran 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4)

5.3.1.1.2.3 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.510.852.544,00 dan tahun 2023 sebesar Rp4.961.512.690,00 adalah piutang Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD. Mutasi pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.3.21
Mutasi Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Saldo awal	4.961.512.690,00	5.225.479.571,00
2	koreksi saldo awal	250.000.000,00	632.548.599,00
3	Penerimaan	4.260.852.544,00	4.750.663.159,00
4	Pengeluaran	4.961.512.690,00	5.647.178.639,00
5	Saldo Akhir	4.510.852.544,00	4.961.512.690,00



Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.510.852.544,00 mengalami penurunan sebesar Rp450.660.146,00 atau mencapai 9,08% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp4.961.512.690,00. Adapun rincian Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.3.22
Piutang Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen)
atas Penyertaan Modal pada BUMD

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
1	Piutang Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.260.852.544,00	4.750.663.159,00	(489.810.615,00)	(10,31)
2	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	250.000.000,00	210.849.531,00	39.150.469,00	18,57
	Jumlah	4.510.852.544,00	4.961.512.690,00	(450.660.146,00)	(9,08)

5.3.1.1.2.4 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 Rp177.064.672.727,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp207.821.455.185,70 adalah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang belum diterima pembayarannya, dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 5.3.23
Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Saldo awal	207.821.455.185,70	176.171.954.035,86
2	Penerimaan	44.098.484.942,00	319.415.144.873,70
3	Pengeluaran	74.855.267.400,70	287.765.643.723,86
4	Saldo Akhir	177.064.672.727,00	207.821.455.185,70

Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp177.064.672.727,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp310.756.782.458 atau 14,80% dibandingkan saldo 2023 sebesar Rp207.821.455.185,70. Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Pemerintah Kota Bogor terdapat pada perangkat daerah berikut:



Tabel 5.3.24
Piutang Lain-lain PAD yang Sah per Perangkat Daerah

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah				
1	Piutang Pendapatan Bunga	543.668.056,00	0,00	543.668.056,00	-
	- Badan Keuangan dan Aset Daerah	543.668.056,00	0,00	543.668.056,00	
2	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	175.510.440.021,00	142.433.320.647,00	33.077.119.374,00	0,23
	- Badan Pendapatan Daerah	175.510.440.021,00	142.433.320.647,00	33.077.119.374,00	0,23
3	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1.010.564.650,00	1.006.450.763,00	4.113.887,00	0,00
	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.010.564.650,00	1.006.450.763,00	4.113.887,00	0,00
4	Piutang Pendapatan BLUD	0,00	64.381.683.775,70	(64.381.683.775,70)	(1,00)
	- Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	64.381.683.775,70	(64.381.683.775,70)	(1,00)
	Jumlah Piutang	177.064.672.727,00	207.821.455.185,70	(30.756.782.458,70)	(14,80)

(Rincian piutang lain-lain PAD yang sah per perangkat daerah disajikan pada lampiran 5.1 dan 5.2)

Tabel 5.3.25
Mutasi Piutang Denda Pajak

No	Jenis Pajak	Piutang Denda 31 Desember 2023	Penambahan/ Pengurangan Denda Masa Pajak s/d 2023	Penambahan Denda Masa Pajak Tahun 2023	Realisasi Penerimaan Denda Pajak 2024	Saldo Piutang 2023	Piutang Denda Berjalan 2024	Saldo Piutang Denda Per 31 Desember 2024
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 + 5 - 6	8	9 = 7 + 8
1	Pajak Hotel	76.752.258		337.432.122	394.914.877	19.269.503	1.453.311.905	1.472.581.408
2	Pajak Restoran	1.586.234.756		-	238.990.375	1.347.244.381	1.607.298.600	2.954.542.981
3	Pajak Reklame	253.542.649		-	46.395.529	207.147.120	1.093.925.267	1.301.072.387
4	Pajak Parkir	31.222.523			1.844.581	29.377.942	107.648.473	137.026.415
5	Pajak Hiburan	4.050.493		145.855	2.149.467	2.046.881	76.543.754	78.590.635
6	Pajak Air Tanah	40.617.155			778.085	39.839.070	2.591.924	42.430.994
7	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	140.440.900.813	31.288.477.656		8.963.290.173	162.766.088.296	6.758.106.905	169.524.195.201
	JUMLAH	142.433.320.647	31.288.477.656	337.577.977	9.648.363.087	164.411.013.193	11.099.426.828	175.510.440.021

Pada tahun 2024 terdapat koreksi piutang denda PBB P2 masa pajak sampai dengan tahun 2023 yang mempengaruhi saldo piutang dengan total sebesar Rp31.288.477.656,00 yang terdiri dari faktor penambah dan pengurang sebagai berikut:

- Faktor penambah sebesar Rp32.074.120.935,00 merupakan penambahan denda dari keterlambatan pembayaran sebesar Rp31.988.737.413,00, penerbitan kembali SPPT PBB P2 melalui Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah atas permohonan dari WP sebesar Rp85.301.887,00 (174 SPPT), pemindahbukuan pembayaran PBB P2 yang salah NOP sebesar Rp69.498,00 (1 SPPT), pembulatan angka desimal denda ke bilangan bulat terdekat sebesar Rp12.137,00 (12.137 SPPT).
- Faktor pengurang sebesar Rp785.643.279,00 pembatalan NOP PBB P2 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah karena alasan tertentu Rp117.884.277,00 (174 SPPT), pembatalan NOP PBBP2 karena double anslah sehingga mengurangi piutang yang diakui sebesar Rp2.052.058,00 (27 SPPT), adanya penetapan ulang ketetapan PBB pada tahun 2024 untuk Wajib Pajak yang sudah diakui piutang nya pada tahun 2023 sebesar Rp626.144.106,00 (36 SPPT), pembulatan angka desimal denda ke bilangan bulat terdekat sebesar Rp3.546,00 (12.137 SPPT), penyesuaian nilai denda karena salah perhitungan sebesar Rp34.303.127,00, koreksi piutang karena adanya data pembayaran tahun 2023 yang baru masuk di tahun 2024 sebesar Rp3.174.536,00 (17 SPPT), pembatalan NOP dan SPPT PBB P2 berdasarkan Keputusan Kepala Badan



Pendapatan Daerah atas Objek Pajak yang terdampak pelebaran jalur kereta api sebesar Rp2.081.629,00 (90 SPPT)

5.3.1.1.2.5 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Piutang Piutang Transfer Pemerintah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

Tabel 5.3.26
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Saldo awal	0,00	0,00
2	Penerimaan	0,00	0,00
3	Pengeluaran	0,00	0,00
4	Saldo Akhir	0,00	0,00

5.3.1.1.2.6 Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2024 Rp12.733.735.118,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.982.003.087,00. Saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya tahun 2024 sebesar Rp12.733.735.118,00 merupakan piutang kurang salur bagi hasil pajak tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa barat Nomor 973/Kep.139-Bapenda/2025 tentang Kurang/Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat per 31 Desember 2024 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.27
Rincian Piutang Transfer Antar Daerah

No	Jenis Piutang	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan 2024 (Rp)	Pengurangan/ pembayaran (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	Piutang Transfer Antar Daerah				
1	Piutang Bagi Hasil				
	- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	3.277.418.190,00	5.174.285.040,00	3.277.418.190,00	5.174.285.040,00
	- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	2.325.876.900,00	4.666.803.750,00	2.325.876.900,00	4.666.803.750,00
	- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	5.356.324.047,00	1.295.204.745,00	5.356.324.047,00	1.295.204.745,00
	- Air Permukaan (APER)	22.383.950,00	14.569.900,00	22.383.950,00	14.569.900,00
	- Pajak Rokok	0,00	1.582.871.683,00	0,00	1.582.871.683,00
	Jumlah	10.982.003.087,00	12.733.735.118,00	10.982.003.087,00	12.733.735.118,00
2	Piutang Bantuan Keuangan				
	- Bantuan keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	10.982.003.087,00	12.733.735.118,00	10.982.003.087,00	12.733.735.118,00

5.3.1.1.3 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp59.596.923.188,00 dan pada tahun 2023 sebesar Rp65.081.689.452,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.28
Mutasi Piutang Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Saldo awal	65.081.689.452,00	70.566.455.628,00
2	Penerimaan		
3	Pengeluaran	5.484.766.264,00	5.484.766.176,00
4	Saldo Akhir	59.596.923.188,00	65.081.689.452,00

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp59.596.923.188,00 atau turun 8,43% dibandingkan saldo 2023 sebesar Rp65.081.689.452,00 karena adanya



pembayaran pada tahun 2023 sebesar Rp5.484.766.264,00. Saldo piutang lainnya Pemerintah Kota Bogor terdapat pada perangkat daerah berikut:

Tabel 5.3.29
Piutang Lainnya per Perangkat Daerah

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Piutang Lainnya				
	- Dinas Perhubungan	63.100.000,00	63.100.000,00	0,00	0,00
	(Pemutusan Kontrak Konsultan PT. Indocitra Intiperkasa)				
	- Badan Keuangan dan Aset Daerah	59.533.823.188,00	65.018.589.452,00	(5.484.766.264,00)	(8,44)
	Jumlah Piutang	59.596.923.188,00	65.081.689.452,00	(5.484.766.264,00)	(8,43)

Saldo Piutang Lainnya pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp59.533.823.276,00 pada tahun 2024 terdiri dari:

Tabel 5.3.30
Rincian Piutang Lainnya pada BKAD

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Piutang ke PDAM TP terkait setoran bagian laba PDAM	0,00	88,00
2	Piutang Hasil Pemeriksaan (Temuan) BPK-RI yang timbul berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Tahun 2004 (Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun Anggaran 2005 atas Laporan Keuangan Kota Bogor Tahun 2004)	10.140.927.595,00	10.140.927.595,00
3	Penggunaan langsung Kontribusi PT. Bina Citra atas Pengelolaan Plaza Bogor kegiatan operasional Kantor Pengelolaan Pasar	30.000.000,00	30.000.000,00
4	Piutang ke PDAM terkait dana penerusan pinjaman	49.362.895.593,00	54.847.661.769,00
	Jumlah	59.533.823.188,00	65.018.589.452,00

Piutang kepada PDAM Tirta Pakuan terkait penerusan dana pinjaman sesuai Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Bogor Nomor SLA-1226/DSMI/2009 tanggal 2 November 2009 tentang Dana Pinjaman dari *International Bank for Reconstruction and Development* No.7730-ID tanggal 1 September 2009 dalam rangka pembiayaan *Urban Water Supply and Sanitation Project*.

Pemerintah Kota Bogor sebagai pihak yang menandatangani NPPP wajib menganggarkan di dalam APBD pembayaran cicilan pinjaman yang terdiri atas pokok pinjaman dan bunga pinjaman, dengan mengakui adanya utang jangka panjang terlebih dahulu. Adapun sumber dana untuk pembayaran cicilan hutang jangka panjang tersebut berasal dari PDAM Tirta Pakuan. Atas dasar inilah maka Pemerintah Kota Bogor mencatat sebagai piutang kepada PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. Pada tahun 2015 pinjaman dari pemerintah pusat secara keseluruhan sudah diterima yaitu sebesar Rp85.013.875.740,00.



5.3.1.1.4 Penyisihan Piutang

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp(389.964.184.114,24) atau meningkat sebesar Rp62.607.181.457,02 atau 19,13% dibandingkan saldo 2023 sebesar Rp(327.357.002.657,22). Jumlah Penyisihan Piutang sebesar Rp(389.964.184.114,24) terdiri dari penyisihan:

Tabel 5.3.31
Rincian Penyisihan Piutang

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Penyisihan Piutang				
2	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(290.953.447.046,00)	(250.916.176.908,00)	(40.037.270.138,00)	15,96
3	Penyisihan Piutang Retribusi	(13.373.378.274,50)	(4.658.447.799,44)	(8.714.930.475,06)	187,08
4	Penyisihan Piutang Lain - lain PAD yang Sah	(85.390.544.315,74)	(71.457.285.002,78)	(13.933.259.312,96)	19,50
5	Penyisihan Piutang Lainnya - Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat	(246.814.478,00)	(325.092.947,00)	78.278.469,00	(24,08)
	Jumlah Penyisihan Piutang	(389.964.184.114,24)	(327.357.002.657,22)	(62.607.181.457,02)	19,13

5.3.1.1.4.1 Penyisihan Piutang Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp(290.953.447.046,00) atau meningkat sebesar Rp(40.037.270.138,00) atau 15,96% dibandingkan saldo 2023 sebesar Rp(250.916.176.908,00). Jumlah Penyisihan Piutang Pajak sebesar Rp(290.953.447.046,00) terdiri dari penyisihan:

Tabel 5.3.32
Rincian Penyisihan Piutang Pajak

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Penyisihan Piutang Pajak				
2	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	(8.580.808.067,00)	(4.028.025.840,00)	(4.552.782.227,00)	113,03
3	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	(2.737.469.106,00)	(2.692.857.188,00)	(44.611.918,00)	1,66
4	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	(296.339.256,00)	(36.491.833,00)	(259.847.423,00)	712,07
5	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(1.076.393.391,00)	(1.066.372.003,00)	(10.021.388,00)	0,94
6	Penyisihan Piutang Pajak Parkir	(122.181.717,00)	(116.616.600,00)	(5.565.117,00)	4,77
7	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(136.352.201,00)	(68.819.108,00)	(67.533.093,00)	98,13
8	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	(278.003.403.465,00)	(242.906.596.686,00)	(35.096.806.779,00)	14,45
9	Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	(499.843,00)	(397.650,00)	(102.193,00)	25,70
	Jumlah Penyisihan Piutang	(290.953.447.046,00)	(250.916.176.908,00)	(40.037.270.138,00)	15,96

(Rincian penyisihan piutang pajak disajikan pada lampiran 3)

5.3.1.1.4.2 Penyisihan Piutang Retribusi

Saldo Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 sebesar Rp(13.373.378.274,50) atau menurun sebesar Rp8.714.930.475,06 atau 187,08% dibandingkan saldo 2023 sebesar Rp(4.658.447.799,44). Jumlah Penyisihan piutang retribusi sebesar Rp(13.373.378.274,50) terdiri dari:



Tabel 5.3.33
Penyisihan Piutang Retribusi

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD				
	- Rumah Sakit Umum Daerah	(8.011.966.481,00)	0,00	(8.011.966.481,00)	-
2	Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi				
	- Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu	(265.720.500,00)	(167.305.500,00)	(98.415.000,00)	58,82
3	Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				
	- Dinas Perumahan dan Permukiman	(982.508.725,00)	(809.057.925,00)	(173.450.800,00)	21,44
	- Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu	(172.702.484,75)	(155.132.576,00)	(17.569.908,75)	11,33
	- Badan Keuangan dan Aset Daerah	(1.615.108.249,20)	(1.158.368.418,00)	(456.739.831,20)	39,43
4	Penyisihan Piutang Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan				
	- Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu	(2.150.570.160,00)	(2.191.425.414,00)	40.855.254,00	(1,86)
5	Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol				
	- Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu	(117.195.125,00)	(117.195.125,00)	0,00	0,00
6	Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu Persetujuan Bangunan Gedung				
	- Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu	(57.606.549,55)	(59.962.841,44)	2.356.291,89	
	Jumlah Penyisihan Piutang	(13.373.378.274,50)	(4.658.447.799,44)	(8.714.930.475,06)	187,08

(Rincian penyisihan piutang retribusi disajikan pada lampiran 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4)

5.3.1.1.4.3 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Saldo Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp(85.390.544.314,74) atau meningkat sebesar Rp13.933.259.311,96 atau 19,50% dibandingkan saldo 2023 sebesar Rp(71.457.285.002,78) Adapun Penyisihan Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp(85.390.544.314,74) terdiri dari:

Tabel 5.3.34
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah				
	- Rumah Sakit umum daerah - BLUD	0,00	(6.015.342.733,00)	6.015.342.733,00	(100,00)
	- Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu	(1.012.697.599,74)	(996.112.090,78)	(16.585.508,96)	1,67
	- Badan Pendapatan Daerah	(84.377.846.715,00)	(64.445.830.179,00)	(19.932.016.536,00)	30,93
	Jumlah Penyisihan Piutang	(85.390.544.314,74)	(71.457.285.002,78)	(13.933.259.311,96)	19,50

(Rincian penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah disajikan pada lampiran 5.1 dan 5.2)



5.3.1.1.4 Penyisihan Piutang Lainnya - Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat

Saldo Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp(246.814.478,00) atau naik sebesar Rp54.847.662,00 atau 18,18% dibandingkan saldo 2023 sebesar Rp(301.662.140,00). Adapun Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp(246.814.478,00) terdiri dari:

Tabel 5.3.35
Penyisihan Piutang Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Penyisihan Piutang Lainnya - Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat				
	- Badan Keuangan dan Aset Daerah	(246.814.478,00)	(301.662.140,00)	54.847.662,00	(18,18)
	Jumlah Penyisihan Piutang	(246.814.478,00)	(301.662.140,00)	54.847.662,00	(18,18)

Tabel 5.3.36
Perhitungan Penyisihan Piutang Lainnya

No.	Nama Piutang	Piutang 2024	Kriteria Kualitas Piutang				Penyisihan Piutang				Jumlah Penyisihan Piutang
			Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1	Piutang ke PDAM TP terkait dana penerusan pinjaman (pokok+bunga+biaya jasa bank)	49.362.895.505,00	49.362.895.505,00				246.814.477,53				246.814.477,53
	Jumlah	49.362.895.505,00	49.362.895.505,00	-	-	-	246.814.477,53	-	-	-	246.814.477,53

5.3.1.1.5 Beban Dibayar Dimuka

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp505.228.167,24 atau turun sebesar Rp9.793.951,48 atau 1,90% dibandingkan saldo 2023 sebesar Rp515.022.118,72. Adapun rincian Beban Dibayar Dimuka Rp505.228.167,24 terdiri dari:

Tabel 5.3.37
Beban Dibayar Dimuka per Perangkat Daerah

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Beban dibayar dimuka				
	- Rumah Sakit Umum Daerah - BLUD	6.278.182,36	4.028.306,01	2.249.876,35	55,85
	- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	49.862.597,26	(49.862.597,26)	(100,00)
	- Dinas Perumahan dan Permukiman	87.671.232,88	65.573.770,49	22.097.462,39	33,70
	- Badan Keuangan dan Aset Daerah	317.733.547,00	310.483.674,47	7.249.872,53	2,34
	- Kecamatan Bogor Selatan	93.545.205,00	85.073.770,49	8.471.434,51	9,96
	Jumlah Beban Dibayar Dimuka	505.228.167,24	515.022.118,72	(9.793.951,48)	(1,90)

(Rincian disajikan pada Lampiran 6)

5.3.1.1.6 Persediaan

Persediaan merupakan aset lancar berupa barang pakai habis dan barang tak habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan menggambarkan nilai persediaan yang dimiliki/dikuasai oleh Kota Bogor per 31 Desember 2024 dan 2023. Saldo Persediaan Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp49.525.803.484,97 dan Rp59.870.448.656,74. Saldo Persediaan 2024 mengalami penurunan sebesar Rp10.344.645.171,77 atau 17,28% dibandingkan tahun 2023. Pada





tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp305.417.863.071,43 dan pengurangan persediaan sebesar Rp315.762.508.243,20.

Tabel 5.3.38
Rincian Persediaan

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan 2024 (Rp)	Pengurangan 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan) (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	% (8=7/3)
1	Bahan						
	Bahan Bangunan Dan Konstruksi	1.079.895.169,71	25.036.091.971,00	25.255.989.935,60	859.997.205,11	(219.897.964,60)	(20,36)
	Bahan Kimia	597.343.681,32	3.892.103.310,01	4.240.793.964,11	248.653.027,22	(348.690.654,10)	(58,37)
	Bahan Bakar Dan Pelumas	579.834.009,00	780.236.900,00	711.870.869,00	648.200.040,00	68.366.031,00	11,79
	Bahan Baku	35.417.606,00	7.952.000,00	27.089.606,00	16.280.000,00	(19.137.606,00)	(54,03)
	Bahan/Bibit Tanaman	7.483.539,00	1.560.021.013,00	1.547.047.872,00	20.456.680,00	12.973.141,00	173,36
	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	47.371.879,01	47.371.879,01	-	-	0,00
	Isi Tabung Gas	-	49.444.000,00	47.734.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00	100,00
	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	-	84.456.100,00	84.456.100,00	-	-	0,00
	Bahan Lainnya	10.202.073.979,09	12.811.226.628,72	17.772.099.519,78	5.241.201.088,03	(4.960.872.891,06)	(48,63)
	Bahan	12.502.047.984,12	44.268.903.801,74	49.734.453.745,50	7.036.498.040,36	(5.465.549.943,76)	(43,72)
2	Suku Cadang						
	Suku Cadang Alat Angkutan	385.304.500,00	4.782.220.772,00	3.936.155.822,00	1.231.369.450,00	846.064.950,00	219,58
	Suku Cadang Alat Besar	-	1.007.446.900,00	1.005.456.300,00	1.990.600,00	1.990.600,00	100,00
	Suku Cadang Alat Kedokteran	11.819.526,00	95.745.452,00	72.170.964,00	35.394.014,00	23.574.488,00	199,45
	Suku Cadang Alat Laboratorium	-	201.538.220,00	201.538.220,00	-	-	0,00
	Suku Cadang Alat Pertanian	91.573.388,00	492.945.500,00	468.614.002,00	115.904.886,00	24.331.498,00	26,57
	Suku Cadang Alat Bengkel	-	6.096.600,00	6.096.600,00	-	-	0,00
	Suku Cadang Lainnya	5.550.000,00	103.451.821,00	104.123.207,00	4.878.614,00	(671.386,00)	(12,10)
	Suku Cadang	494.247.414,00	6.689.445.265,00	5.794.155.115,00	1.389.537.564,00	895.290.150,00	181,14
3	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor						
	Alat Tulis Kantor	3.399.486.043,70	14.571.006.309,46	15.016.019.073,05	2.954.473.280,11	(445.012.763,59)	(13,09)
	Kertas Dan Cover	378.300.235,29	4.815.123.058,31	4.785.570.596,60	407.852.697,00	29.552.461,71	7,81
	Bahan Cetak	53.808.635,00	1.319.717.355,00	1.157.688.907,00	215.837.083,00	162.028.448,00	301,12
	Benda Pos	6.100.000,00	88.779.940,00	90.134.440,00	4.745.500,00	(1.354.500,00)	(22,20)
	Bahan Komputer	704.416.792,00	7.586.368.427,00	6.751.188.535,00	1.539.596.684,00	835.179.892,00	118,56
	Perabot Kantor	396.040.108,60	6.483.607.618,55	6.038.145.085,44	841.502.641,71	445.462.533,11	112,48
	Alat Listrik	1.769.953.579,46	13.717.513.588,01	12.000.252.318,97	3.487.214.848,50	1.717.261.269,04	97,02
	Perlengkapan Dinas	-	5.244.817.741,00	4.723.251.241,00	521.566.500,00	521.566.500,00	100,00
	Perlengkapan Pendukung Olah Raga	25.540.616,00	1.523.494.405,60	1.546.809.891,60	2.225.130,00	(23.315.486,00)	(91,29)
	Suvenir/Cendera Mata	26.327.285,00	1.119.672.150,00	1.077.740.535,00	68.258.900,00	41.931.615,00	159,27
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	484.740.847,96	3.565.060.058,54	3.420.674.853,13	629.126.053,37	144.385.205,41	29,79
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	7.244.714.143,01	60.035.160.651,47	56.607.475.476,79	10.672.399.317,69	3.427.685.174,68	47,31
4	Obat-Obatan						
	Obat	14.728.805.362,40	98.506.815.746,43	94.461.863.207,86	18.773.757.900,97	4.044.952.538,57	27,46
	Obat-Obatan Lainnya	4.780.887.638,31	64.000.364.750,05	60.936.387.381,73	7.844.865.006,63	3.063.977.368,32	64,09
	Obat-Obatan	19.509.693.000,71	162.507.180.496,48	155.398.250.589,59	26.618.622.907,60	7.108.929.906,89	36,44
5	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan						
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	19.996.823.518,90	16.538.197.207,00	35.292.823.523,84	1.242.197.202,06	(18.754.626.316,84)	(93,79)
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	19.996.823.518,90	16.538.197.207,00	35.292.823.523,84	1.242.197.202,06	(18.754.626.316,84)	(93,79)
6	Natura dan Pakan						
	Natura	10.759.076,00	14.825.037.979,74	12.395.032.762,48	2.440.764.293,26	2.430.005.217,26	22.585,63
	Pakan	-	180.019.250,00	180.019.250,00	-	-	0,00
	Natura dan Pakan	10.759.076,00	15.005.057.229,74	12.575.052.012,48	2.440.764.293,26	2.430.005.217,26	22.585,63
7	Komponen						
	Komponen Peralatan	112.163.520,00	367.053.650,00	357.941.170,00	121.276.000,00	9.112.480,00	8,12
	Komponen Lainnya	-	6.864.770,00	2.356.610,00	4.508.160,00	4.508.160,00	100,00
	Komponen	112.163.520,00	373.918.420,00	360.297.780,00	125.784.160,00	13.620.640,00	12,14
-	JUMLAH PERSEDIAAN	59.870.448.656,74	305.417.863.071,43	315.762.508.243,20	49.525.803.484,97	(10.344.645.171,77)	(17,28)

Penambahan dan Pengurangan Persediaan Kota Bogor selama tahun 2024, terdiri dari:

1. Penambahan yang merupakan perolehan persediaan melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 dan perolehan lain yang sah seperti hibah
2. Penggunaan persediaan untuk kegiatan operasional dan diserahkan kepada masyarakat
3. Perpindahan persediaan antar Perangkat Daerah
4. Reklasifikasi persediaan antar jenis sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5. Koreksi atas pencatatan Persediaan sebelumnya

Rincian Persediaan pada masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:



Tabel 5.3.39
Persediaan per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023	Penambahan 2024	Pengurangan 2024	31 Desember 2024	Kenaikan/ (penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	769.724.291,46	16.701.356.862,61	17.143.246.190,40	327.834.963,67	(441.889.327,79)	(57,41)
2	Dinas Kesehatan	18.715.749.962,39	98.090.465.545,48	91.718.161.816,86	25.088.053.691,01	6.372.303.728,62	34,05
3	Rumah Sakit Umum Daerah	611.920.340,49	3.543.635.119,20	3.152.862.518,83	1.002.692.940,86	390.772.600,37	63,86
4	Rumah Sakit Umum Daerah-BLUD	11.838.132.719,19	97.208.193.783,16	99.431.216.630,45	9.615.109.871,90	(2.223.022.847,29)	(18,78)
5	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	875.498.553,00	27.084.753.428,00	27.356.454.382,00	603.797.599,00	(271.700.954,00)	(31,03)
6	Dinas Perumahan Dan Permukiman	19.977.143.396,91	4.852.072.863,00	24.202.562.873,91	626.653.386,00	(19.350.490.010,91)	(96,86)
7	Satuan Polisi Pamong Praja	3.629.100,00	1.727.228.450,00	1.723.236.050,00	7.621.500,00	3.992.400,00	110,01
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.253.100,00	801.422.720,00	649.100.310,00	153.575.510,00	152.322.410,00	12.155,65
9	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	10.219.500,00	619.952.903,00	555.645.153,00	74.527.250,00	64.307.750,00	629,27
10	Dinas Sosial	205.522.507,00	2.509.243.477,00	1.846.431.117,00	868.334.867,00	662.812.360,00	322,50
11	Dinas Tenaga Kerja	15.782.313,00	2.403.412.515,00	2.373.666.478,00	45.528.350,00	29.746.037,00	188,48
12	Dinas Lingkungan Hidup	1.833.194.228,61	10.376.274.768,79	8.256.867.272,34	3.952.601.725,06	2.119.407.496,45	115,61
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	301.794.295,00	4.098.873.248,00	3.388.373.216,00	1.012.294.327,00	710.500.032,00	235,43
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	55.748.988,00	198.402.700,00	231.047.938,00	23.103.750,00	(32.645.238,00)	(58,56)
15	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	289.854.476,00	737.286.952,00	670.301.378,00	356.840.050,00	66.985.574,00	23,11
16	Dinas Perhubungan	2.354.736.975,50	8.792.875.169,00	7.711.897.898,50	3.435.714.246,00	1.080.977.270,50	45,91
17	Dinas Komunikasi Dan Informatika	2.412.200,00	434.363.630,00	434.971.545,00	1.804.285,00	(607.915,00)	(25,20)
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian	255.500,00	554.850.060,00	547.011.960,00	8.093.600,00	7.838.100,00	3.067,75
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.671.500,00	106.487.300,00	109.135.500,00	1.023.300,00	(2.648.200,00)	(72,13)
20	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	1.848.900,00	1.399.322.795,00	1.400.625.195,00	546.500,00	(1.302.400,00)	(70,44)
21	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	2.185.100,00	72.635.600,00	72.310.200,00	2.510.500,00	325.400,00	14,89
22	Dinas Arsip Dan Perpustakaan	1.614.000,00	279.242.500,00	280.856.500,00	0,00	(1.614.000,00)	(100,00)
23	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	2.058.600,00	7.492.547.585,00	7.487.617.885,00	6.988.300,00	4.929.700,00	239,47
24	Sekretariat Daerah	58.265.400,00	5.733.671.211,00	5.735.455.038,00	56.481.573,00	(1.783.827,00)	(3,06)
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	24.588.166,61	1.367.027.679,00	1.308.909.605,61	82.706.240,00	58.118.073,39	236,37
26	Kecamatan Bogor Selatan	11.991.350,00	2.748.813.516,00	2.730.393.726,00	30.411.140,00	18.419.790,00	153,61
27	Kecamatan Bogor Timur	35.133.600,00	507.292.125,00	411.651.025,00	130.774.700,00	95.641.100,00	272,22
28	Kecamatan Bogor Tengah	33.977.500,00	461.227.200,00	416.411.700,00	78.793.000,00	44.815.500,00	131,90
29	Kecamatan Bogor Barat	1.300.800,00	561.046.185,00	561.041.485,00	1.305.500,00	4.700,00	0,36
30	Kecamatan Bogor Utara	46.622.300,00	263.539.400,00	209.585.900,00	100.575.800,00	53.953.500,00	115,72
31	Kecamatan Tanah Sareal	48.454.289,66	592.917.744,01	552.713.789,67	88.658.244,00	40.203.954,34	82,97
32	Inspektorat	67.753.447,00	138.654.300,00	170.844.522,00	35.563.225,00	(32.190.222,00)	(47,51)
33	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	5.784.610,00	116.634.953,00	122.212.468,00	207.095,00	(5.577.515,00)	(96,42)
34	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	191.273.372,50	749.121.163,18	602.887.491,51	337.507.044,17	146.233.671,67	76,45
35	Badan Pendapatan Daerah	1.405.542.389,42	1.316.005.921,00	1.424.342.049,12	1.297.206.261,30	(108.336.128,12)	(7,71)
36	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	64.932.885,00	310.558.700,00	307.352.435,00	68.139.150,00	3.206.265,00	4,94
37	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	878.000,00	466.453.000,00	465.107.000,00	2.224.000,00	1.346.000,00	153,30
	Jumlah	59.870.448.656,74	305.417.863.071,43	315.762.508.243,20	49.525.803.484,97	(10.344.645.171,77)	(17,28)

Persediaan Kota Bogor Periode Januari - Desember 2024 pada umumnya diperoleh melalui pembelian (belanja) dan dikeluarkan sebagai penggunaan perangkat daerah. Terdapat penerimaan dan pengeluaran persediaan yang berasal dari sumber lainnya sebagai berikut:

I. Penerimaan Persediaan dari Hibah:

a. Dinas Kesehatan

Bahan Lainnya sebesar Rp3.964.919.375,08

Alat Tulis Kantor sebesar Rp138.888.000,00

Obat sebesar Rp27.019.391.962,10

b. Rumah Sakit Umum Daerah

Bahan Lainnya sebesar Rp1.140.900,00

Obat sebesar Rp78.429.252,20

Obat-Obatan Lainnya sebesar Rp22.452.910,94

c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp32.940.000,00

d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Alat Tulis Kantor sebesar Rp1.298.728.523,00

e. Terdapat Hibah pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Obat sebesar 434.994.894,00

II. Penerimaan Persediaan Mutasi Masuk:

a. Rumah Sakit Umum Daerah

Bahan Lainnya sebesar Rp624.531.368,81

Obat pada sebesar Rp2.618.570.687,25

Obat-Obatan Lainnya sebesar Rp198.510.000,00



III. Penerimaan Persediaan melalui Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa Lainnya:

- a. Dinas Kesehatan
 - Bahan Lainnya sebesar Rp450.300,00
 - Suku Cadang Alat Kedokteran sebesar Rp788.540,00
 - Suku Cadang Alat Laboratorium sebesar Rp51.846.220,00
 - Bahan Komputer sebesar Rp1.043.400,00
- b. Dinas Tenaga Kerja
 - Perlengkapan Dinas sebesar Rp84.609.000,00
- c. Badan Keuangan dan Aset Daerah
 - Perlengkapan Dinas sebesar Rp59.615.880,00

IV. Penerimaan Persediaan melalui Reklasifikasi dari Aset Tetap:

- a. Dinas Pendidikan
 - Bahan Komputer sebesar Rp4.677.000,00
- b. Dinas Kesehatan
 - Suku Cadang Alat Kedokteran sebesar Rp18.000.000,00
- c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - Perlengkapan Dinas sebesar Rp31.500.000,00
- d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp5.894.100,00
- e. Sekretariat Daerah
 - Bahan Komputer sebesar Rp18.200.000,00
- f. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - Alat Listrik sebesar Rp48.000.000,00
- g. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 - Perlengkapan Dinas sebesar Rp63.005.000,00

V. Pengeluaran Persediaan Mutasi Keluar:

- a. Dinas Kesehatan
 - Bahan Lainnya sebesar Rp624.531.368,81
 - Obat pada sebesar Rp2.618.570.687,25
 - Obat-Obatan Lainnya sebesar Rp198.510.000,00

VI. Pengeluaran Persediaan Reklasifikasi ke Aset Tetap:

- a. Badan Pendapatan Daerah
 - Perabot Kantor sebesar Rp2.950.000,00
 - Alat Listrik sebesar Rp168.331.500,00
- b. Dinas Sosial
 - Alat Listrik sebesar Rp41.152.000,00

VII. Penyesuaian Reklasifikasi Kode Barang:

- a. Rumah Sakit Umum Daerah-BLUD
 - Bahan Bangunan dan Konstruksi sebesar -Rp77.940.130,00
 - Bahan Lainnya sebesar Rp58.058.819,00
 - Alat Tulis Kantor sebesar -Rp113.129.696,00
 - Bahan Cetak sebesar Rp113.129.696,00
 - Perabot Kantor sebesar -Rp58.058.819,00
 - Alat Listrik sebesar Rp60.084.746,50
 - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp17.855.383,50



VIII. Penyesuaian atau Koreksi Saldo Awal akibat Kesalahan Sistem:

- a. Dinas Pendidikan
 - Alat Tulis Kantor sebesar Rp6.620.915,00
 - Kertas dan Cover sebesar Rp2.522.180,00
 - Bahan Komputer sebesar Rp1.835.000,00
 - Perabot Kantor sebesar Rp914.994,00
 - Alat Listrik sebesar Rp212.999,00
 - Perlengkapan Pendukung Olahraga sebesar Rp600.000,00
 - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp1.254.000,00
- b. Dinas Kesehatan
 - Bahan Lainnya sebesar -Rp0,01
 - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar -Rp0,03
 - Obat sebesar -Rp0,01
- c. Dinas Tenaga Kerja
 - Alat Tulis Kantor sebesar Rp1.086.187,00
- d. Kecamatan Bogor Utara
 - Alat Tulis Kantor sebesar Rp121.000,00
 - Kertas dan Cover sebesar Rp51.000,00
 - Bahan Komputer sebesar Rp333.000,00
 - Perabot Kantor sebesar Rp45.500,00
 - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp174.500,00
- e. Kecamatan Tanah Sareal
 - Alat Tulis Kantor sebesar -Rp0,01
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp5.894.100,00
- g. Sekretariat Daerah
 - Bahan Komputer sebesar Rp18.200.000,00
- h. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - Alat Listrik sebesar Rp48.000.000,00
- i. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 - Perlengkapan Dinas sebesar Rp63.005.000,00

5.3.1.1.6.1 Bahan Bangunan dan Konstruksi

Saldo Persediaan Bahan Bangunan dan Konstruksi Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp859.997.205,11 dan Rp1.079.895.169,71. Saldo Persediaan 2024 mengalami penurunan nilai sebesar Rp219.897.964,60 atau 20,36% dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp25.036.091.971,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp25.255.989.935,60. Rincian Persediaan Bahan Bangunan dan Konstruksi pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:



Tabel 5.3.40
Persediaan Bahan Bangunan dan Konstruksi per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023	Penambahan 2024	Pengurangan 2024	31 Desember 2024	Kenaikan/ (penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	444.555,00	120.982.472,00	120.650.777,00	776.250,00	331.695,00	74,61
2	Rumah Sakit Umum Daerah-BLUD	229.179.476,00	470.712.498,00	579.982.917,89	119.909.056,11	(109.270.419,89)	(47,68)
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	744.675.581,00	23.895.301.901,00	24.063.295.333,00	576.682.149,00	(167.993.432,00)	(22,56)
4	Dinas Perumahan Dan Permukiman	0,00	360.039.500,00	311.329.900,00	48.709.600,00	48.709.600,00	100,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	3.663.000,00	3.663.000,00	0,00	-	0,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	30.402.767,71	143.247.600,00	111.875.167,71	61.775.200,00	31.372.432,29	103,19
7	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	787.800,00	787.800,00	0,00	-	0,00
8	Dinas Perhubungan	75.192.790,00	0,00	23.047.840,00	52.144.950,00	(23.047.840,00)	(30,65)
9	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	0,00	38.067.200,00	38.067.200,00	0,00	-	0,00
10	Badan Pendapatan Daerah	0,00	3.290.000,00	3.290.000,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	1.079.895.169,71	25.036.091.971,00	25.255.989.935,60	859.997.205,11	(219.897.964,60)	(20,36)

5.3.1.1.6.2 Bahan Kimia

Saldo Persediaan Bahan Kimia Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp248.653.027,22 dan Rp597.343.681,32. Saldo Persediaan 2024 mengalami penurunan nilai sebesar Rp348.690.654,10 atau 58,37% dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp3.892.103.310,01 dan pengurangan persediaan sebesar Rp4.240.793.964,11. Rincian Persediaan Bahan Kimia pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.41
Persediaan Bahan Kimia per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023	Penambahan 2024	Pengurangan 2024	31 Desember 2024	Kenaikan/ (penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	99.900,00	41.282.050,00	40.871.950,00	510.000,00	410.100,00	410,51
2	Dinas Kesehatan	597.243.781,32	2.452.327.192,01	2.837.148.352,11	212.422.621,22	(384.821.160,10)	(64,43)
3	Rumah Sakit Umum Daerah-BLUD	0,00	551.190.078,00	515.469.672,00	35.720.406,00	35.720.406,00	100,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0,00	132.503.475,00	132.503.475,00	0,00	-	0,00
5	Dinas Perumahan Dan Permukiman	0,00	20.066.500,00	20.066.500,00	0,00	-	0,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	117.995.220,00	117.995.220,00	0,00	-	0,00
7	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	0,00	548.273.995,00	548.273.995,00	0,00	-	0,00
8	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	28.464.800,00	28.464.800,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	597.343.681,32	3.892.103.310,01	4.240.793.964,11	248.653.027,22	(348.690.654,10)	(58,37)

5.3.1.1.6.3 Bahan Bakar dan Pelumas

Saldo Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp648.200.040,00 dan Rp579.834.009,00. Saldo Persediaan 2024 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp68.366.031,00 atau 11,79% dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp780.236.900,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp711.870.869,00. Rincian Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.42
Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023	Penambahan 2024	Pengurangan 2024	31 Desember 2024	Kenaikan/ (penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0,00	164.280.000,00	164.280.000,00	0,00	-	0,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	579.834.009,00	606.875.000,00	538.508.969,00	648.200.040,00	68.366.031,00	11,79
3	Sekretariat Daerah	0,00	9.081.900,00	9.081.900,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	579.834.009,00	780.236.900,00	711.870.869,00	648.200.040,00	68.366.031,00	11,79

5.3.1.1.6.4 Bahan Baku

Saldo Persediaan Bahan Baku Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp16.280.000,00 dan Rp35.417.606,00. Saldo Persediaan 2024 mengalami penurunan nilai sebesar Rp19.137.606,00 atau 54,03% dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp7.952.000,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp27.089.606,00. Rincian Persediaan Bahan Baku pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:



Tabel 5.3.43
Persediaan Bahan Baku per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023	Penambahan 2024	Pengurangan 2024	31 Desember 2024	Kenaikan/ (penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Sosial	35.417.606,00	7.952.000,00	27.089.606,00	16.280.000,00	(19.137.606,00)	(54,03)
	Jumlah	35.417.606,00	7.952.000,00	27.089.606,00	16.280.000,00	(19.137.606,00)	(54,03)

5.3.1.1.6.5 Bahan/Bibit Tanaman

Saldo Persediaan Bahan/Bibit Tanaman Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp20.456.680,00 dan Rp7.483.539,00. Saldo Persediaan 2024 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp12.973.141,00 atau 173,36% dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp1.560.021.013,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp1.547.047.872,00. Rincian Persediaan Bahan/Bibit Tanaman pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.44
Persediaan Bahan/Bibit Tanaman per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023	Penambahan 2024	Pengurangan 2024	31 Desember 2024	Kenaikan/ (penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	246.450,00	77.467.820,00	77.224.270,00	490.000,00	243.550,00	98,82
2	Dinas Perumahan Dan Permukiman	0,00	1.249.108.993,00	1.229.142.313,00	19.966.680,00	19.966.680,00	100,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	7.237.089,00	44.861.900,00	52.098.989,00	0,00	(7.237.089,00)	(100,00)
4	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	188.582.300,00	188.582.300,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	7.483.539,00	1.560.021.013,00	1.547.047.872,00	20.456.680,00	12.973.141,00	173,36

5.3.1.1.6.6 Isi Tabung Pemadam Kebakaran

Saldo Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Persediaan 2024 tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp47.371.879,01 dan pengurangan persediaan sebesar Rp47.371.879,01. Rincian Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.45
Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023	Penambahan 2024	Pengurangan 2024	31 Desember 2024	Kenaikan/ (penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Kesehatan	0,00	926.699,01	926.699,01	0,00	-	0,00
2	Dinas Perumahan Dan Permukiman	0,00	46.445.180,00	46.445.180,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	0,00	47.371.879,01	47.371.879,01	0,00	-	0,00

5.3.1.1.6.7 Isi Tabung Gas

Saldo Persediaan Isi Tabung Gas Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.710.000,00 dan Rp0,00. Saldo Persediaan 2024 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp1.710.000,00 atau 100,00% dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp49.444.000,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp47.734.000,00. Rincian Persediaan Isi Tabung Gas pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.46
Persediaan Isi Tabung Gas per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023	Penambahan 2024	Pengurangan 2024	31 Desember 2024	Kenaikan/ (penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Kesehatan	0,00	1.435.000,00	835.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah-BLUD	0,00	40.404.000,00	39.294.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	100,00
3	Dinas Tenaga Kerja	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	-	0,00
4	Sekretariat Daerah	0,00	3.255.000,00	3.255.000,00	0,00	-	0,00
5	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	0,00	49.444.000,00	47.734.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00	100,00



5.3.1.1.6.8 Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan

Saldo Persediaan Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Persediaan 2024 tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp84.456.100,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp84.456.100,00. Rincian Persediaan Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.47
Persediaan Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan 2024 (Rp)	Pengurangan 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	84.456.100,00	84.456.100,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	0,00	84.456.100,00	84.456.100,00	0,00	-	0,00

5.3.1.1.6.9 Bahan Lainnya

Saldo Persediaan Bahan Lainnya Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.241.201.088,03 dan Rp10.202.073.979,09. Saldo Persediaan 2024 mengalami penurunan nilai sebesar Rp4.960.872.891,06 atau 48,63% dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp12.811.226.628,72 dan pengurangan persediaan sebesar Rp17.772.099.519,78. Rincian Persediaan Bahan Lainnya pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.48
Persediaan Bahan Lainnya per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan 2024 (Rp)	Pengurangan 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	10.885.577,00	199.682.621,00	209.455.298,00	1.112.900,00	(9.772.677,00)	(89,78)
2	Dinas Kesehatan	9.742.427.587,09	10.782.211.619,91	15.678.986.683,94	4.845.652.523,06	(4.896.775.064,03)	(50,26)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	367.623.677,00	625.672.268,81	823.811.558,59	169.484.387,22	(198.139.289,78)	(53,90)
4	Rumah Sakit Umum Daerah-BLUD	0,00	1.200.185.819,00	998.381.995,25	201.803.823,75	201.803.823,75	100,00
5	Dinas Sosial	22.986.468,00	0,00	12.145.616,00	10.840.852,00	(12.145.616,00)	(52,84)
6	Dinas Lingkungan Hidup	30.641.000,00	0,00	30.641.000,00	0,00	(30.641.000,00)	(100,00)
7	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	27.509.670,00	0,00	15.203.068,00	12.306.602,00	(15.203.068,00)	(55,26)
8	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	3.474.300,00	3.474.300,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	10.202.073.979,09	12.811.226.628,72	17.772.099.519,78	5.241.201.088,03	(4.960.872.891,06)	(48,63)

5.3.1.1.6.10 Suku Cadang Alat Angkutan

Saldo Persediaan Suku Cadang Alat Angkutan Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.231.369.450,00 dan Rp385.304.500,00. Saldo Persediaan 2024 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp846.064.950,00 atau 219,58% dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp4.782.220.772,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp3.936.155.822,00. Rincian Persediaan Suku Cadang Alat Angkutan pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.49
Persediaan Suku Cadang Alat Angkutan per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan 2024 (Rp)	Pengurangan 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0,00	905.421.672,00	905.421.672,00	0,00	-	0,00
2	Dinas Perumahan Dan Permukiman	0,00	80.370.000,00	61.770.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00	100,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	385.304.500,00	3.090.575.300,00	2.263.110.350,00	1.212.769.450,00	827.464.950,00	214,76
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	0,00	49.015.800,00	49.015.800,00	0,00	-	0,00
5	Sekretariat Daerah	0,00	656.838.000,00	656.838.000,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	385.304.500,00	4.782.220.772,00	3.936.155.822,00	1.231.369.450,00	846.064.950,00	219,58

5.3.1.1.6.11 Suku Cadang Alat Besar

Saldo Persediaan Suku Cadang Alat Besar Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.990.600,00 dan Rp0,00. Saldo Persediaan 2024 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp1.990.600,00 atau 100,00% dibandingkan



tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp1.007.446.900,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp1.005.456.300,00. Rincian Persediaan Suku Cadang Alat Besar pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.50
Persediaan Suku Cadang Alat Besar per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan 2024 (Rp)	Pengurangan 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	1.007.446.900,00	1.005.456.300,00	1.990.600,00	1.990.600,00	100,00
	Jumlah	0,00	1.007.446.900,00	1.005.456.300,00	1.990.600,00	1.990.600,00	100,00

5.3.1.1.6.12 Suku Cadang Alat Kedokteran

Saldo Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp35.394.014,00 dan Rp11.819.526,00. Saldo Persediaan 2024 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp23.574.488,00 atau 199,45% dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp95.745.452,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp72.170.964,00. Rincian Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.51
Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan 2024 (Rp)	Pengurangan 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Kesehatan	11.819.526,00	64.444.452,00	72.170.964,00	4.093.014,00	(7.226.512,00)	(65,37)
2	Kecamatan Bogor Timur	0,00	31.301.000,00	0,00	31.301.000,00	31.301.000,00	100,00
	Jumlah	11.819.526,00	95.745.452,00	72.170.964,00	35.394.014,00	23.574.488,00	199,45

5.3.1.1.6.13 Suku Cadang Alat Laboratorium

Saldo Persediaan Suku Cadang Alat Laboratorium Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Persediaan 2024 tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp201.538.220,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp201.538.220,00. Rincian Persediaan Suku Cadang Alat Laboratorium pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.52
Persediaan Suku Cadang Alat Laboratorium per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan 2024 (Rp)	Pengurangan 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Kesehatan	0,00	56.196.220,00	56.196.220,00	0,00	-	0,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0,00	132.830.000,00	132.830.000,00	0,00	-	0,00
3	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	12.512.000,00	12.512.000,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	0,00	201.538.220,00	201.538.220,00	0,00	-	0,00

5.3.1.1.6.14 Suku Cadang Alat Pertanian

Saldo Persediaan Suku Cadang Alat Pertanian Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp115.904.886,00 dan Rp91.573.388,00. Saldo Persediaan 2024 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp24.331.498,00 atau 26,57% dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp492.945.500,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp468.614.002,00. Rincian Persediaan Suku Cadang Alat Pertanian pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:



Tabel 5.3.53
Persediaan Suku Cadang Alat Pertanian per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023	Penambahan 2024	Pengurangan 2024	31 Desember 2024	Kenaikan/ (penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0,00	368.736.450,00	368.736.450,00	0,00	-	0,00
2	Dinas Perumahan Dan Permukiman	38.912.738,00	0,00	27.175.052,00	11.737.686,00	(27.175.052,00)	(69,84)
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	6.358.050,00	6.358.050,00	0,00	-	0,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	52.660.650,00	115.652.000,00	64.145.450,00	104.167.200,00	51.506.550,00	97,81
5	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	2.199.000,00	2.199.000,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	91.573.388,00	492.945.500,00	468.614.002,00	115.904.886,00	24.331.498,00	26,57

5.3.1.1.6.15 Suku Cadang Alat Bengkel

Saldo Persediaan Suku Cadang Alat Bengkel Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Persediaan 2024 tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp6.096.600,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp6.096.600,00. Rincian Persediaan Suku Cadang Alat Bengkel pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.54
Persediaan Suku Cadang Alat Bengkel per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023	Penambahan 2024	Pengurangan 2024	31 Desember 2024	Kenaikan/ (penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Badan Pendapatan Daerah	0,00	6.096.600,00	6.096.600,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	0,00	6.096.600,00	6.096.600,00	0,00	-	0,00

5.3.1.1.6.16 Suku Cadang Lainnya

Saldo Persediaan Suku Cadang Lainnya Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.878.614,00 dan Rp5.550.000,00. Saldo Persediaan 2024 mengalami penurunan nilai sebesar Rp671.386,00 atau 12,10% dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp103.451.821,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp104.123.207,00. Rincian Persediaan Suku Cadang Lainnya pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

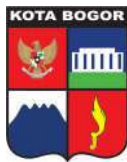
Tabel 5.3.55
Persediaan Suku Cadang Lainnya per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023	Penambahan 2024	Pengurangan 2024	31 Desember 2024	Kenaikan/ (penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Kesehatan	0,00	17.489.536,00	12.610.922,00	4.878.614,00	4.878.614,00	100,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	5.550.000,00	0,00	5.550.000,00	0,00	(5.550.000,00)	(100,00)
3	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	85.962.285,00	85.962.285,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	5.550.000,00	103.451.821,00	104.123.207,00	4.878.614,00	(671.386,00)	(12,10)

5.3.1.1.6.17 Alat Tulis Kantor

Saldo Persediaan Alat Tulis Kantor Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.954.473.280,11 dan Rp3.399.486.043,70. Saldo Persediaan 2024 mengalami penurunan nilai sebesar Rp445.012.763,59 atau 13,09% dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp14.571.006.309,46 dan pengurangan persediaan sebesar Rp15.016.019.073,05. Rincian Persediaan Alat Tulis Kantor pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:





Tabel 5.3.56
Persediaan Alat Tulis Kantor per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023	Penambahan 2024	Pengurangan 2024	31 Desember 2024	Kenaikan/ (penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	348.870.110,34	5.652.701.723,10	5.881.987.454,44	119.584.379,00	(229.285.731,34)	(65,72)
2	Dinas Kesehatan	174.861.003,26	2.029.434.437,33	1.871.404.666,45	332.890.774,14	158.029.770,88	90,37
3	Rumah Sakit Umum Daerah-BLUD	345.233.418,00	979.958.233,00	1.107.872.681,00	217.318.970,00	(127.914.448,00)	(37,05)
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	48.993.590,00	182.051.850,00	223.014.040,00	8.031.400,00	(40.962.190,00)	(83,61)
5	Dinas Perumahan Dan Permukiman	10.008.454,91	248.230.200,00	240.792.154,91	17.446.500,00	7.438.045,09	74,32
6	Satuan Polisi Pamong Praja	1.921.800,00	170.425.800,00	168.002.100,00	4.345.500,00	2.423.700,00	126,12
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	118.400,00	33.947.100,00	31.183.200,00	2.882.300,00	2.763.900,00	2.334,38
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	7.748.000,00	212.611.628,00	190.380.778,00	29.978.850,00	22.230.850,00	286,92
9	Dinas Sosial	8.194.600,00	73.593.600,00	67.602.200,00	14.186.000,00	5.991.400,00	73,11
10	Dinas Tenaga Kerja	5.793.913,00	182.851.287,00	185.285.200,00	3.360.000,00	(2.433.913,00)	(42,01)
11	Dinas Lingkungan Hidup	114.264.232,00	130.430.400,00	119.421.930,00	125.272.702,00	11.008.470,00	9,63
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	295.894.295,00	1.622.290.498,00	1.676.687.266,00	241.497.527,00	(54.396.768,00)	(18,38)
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	13.419.200,00	37.476.000,00	49.441.550,00	1.453.650,00	(11.965.550,00)	(89,17)
14	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	8.413.200,00	72.917.900,00	67.041.700,00	14.289.400,00	5.876.200,00	69,85
15	Dinas Perhubungan	543.240.718,00	19.667.500,00	161.013.935,00	401.894.283,00	(141.346.435,00)	(26,02)
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika	154.700,00	25.798.610,00	25.204.510,00	748.800,00	594.100,00	384,03
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian	0,00	43.459.100,00	41.982.500,00	1.476.600,00	1.476.600,00	100,00
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	770.500,00	15.738.400,00	16.136.800,00	372.100,00	(398.400,00)	(51,71)
19	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	1.007.600,00	21.580.700,00	22.483.900,00	104.400,00	(903.200,00)	(89,64)
20	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	393.500,00	26.666.600,00	25.037.600,00	2.022.500,00	1.629.000,00	413,98
21	Dinas Arsip Dan Perpustakaan	0,00	91.474.700,00	91.474.700,00	0,00	0,00	0,00
22	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	987.300,00	21.578.400,00	22.467.900,00	97.800,00	(889.500,00)	(90,09)
23	Sekretariat Daerah	21.700.000,00	996.491.548,00	965.961.275,00	52.230.273,00	30.530.273,00	140,69
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	14.995.066,61	214.256.000,00	225.795.866,61	3.455.200,00	(11.539.866,61)	(76,96)
25	Kecamatan Bogor Selatan	3.409.100,00	201.746.424,00	193.917.724,00	11.237.800,00	7.828.700,00	229,64
26	Kecamatan Bogor Timur	12.701.500,00	104.573.200,00	91.812.200,00	25.462.500,00	12.761.000,00	100,47
27	Kecamatan Bogor Tengah	21.452.100,00	119.766.500,00	118.394.700,00	22.823.900,00	1.371.800,00	6,39
28	Kecamatan Bogor Barat	1.030.000,00	118.310.100,00	119.254.400,00	85.700,00	(944.300,00)	(91,68)
29	Kecamatan Bogor Utara	15.416.300,00	58.898.100,00	49.351.600,00	24.962.800,00	9.546.500,00	61,92
30	Kecamatan Tanah Sareal	14.306.739,66	147.887.219,01	136.581.914,67	25.612.044,00	11.305.304,34	79,02
31	Inspektorat	11.905.900,00	52.617.000,00	49.093.400,00	15.429.500,00	3.523.600,00	29,60
32	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	4.907.960,00	13.927.952,00	18.628.817,00	207.095,00	(4.700.865,00)	(95,78)
33	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	40.333.242,50	105.269.539,02	99.774.719,85	45.828.061,67	5.494.819,17	13,62
34	Badan Pendapatan Daerah	1.269.918.915,42	380.917.861,00	481.815.155,12	1.169.021.621,30	(100.897.294,12)	(7,95)
35	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	37.070.685,00	151.951.200,00	170.470.535,00	18.551.350,00	(18.519.335,00)	(49,96)
36	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	50.000,00	9.509.000,00	9.248.000,00	311.000,00	261.000,00	522,00
	Jumlah	3.399.486.043,70	14.571.006.309,46	15.016.019.073,05	2.954.473.280,11	(445.012.763,59)	(13,09)

5.3.1.1.6.18 Kertas dan Cover

Saldo Persediaan Kertas dan Cover Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp407.852.697,00 dan Rp378.300.235,29. Saldo Persediaan 2024 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp29.552.461,71 atau 7,81% dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp4.815.123.058,31 dan pengurangan persediaan sebesar Rp4.785.570.596,60. Rincian Persediaan Kertas dan Cover pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.57
Persediaan Kertas dan Cover per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023	Penambahan 2024	Pengurangan 2024	31 Desember 2024	Kenaikan/ (penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	131.048.264,29	2.393.458.882,31	2.447.257.610,60	77.249.536,00	(53.798.728,29)	(41,05)
2	Dinas Kesehatan	28.571.584,00	200.337.146,00	161.443.174,00	67.465.556,00	38.893.972,00	136,13
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	20.811.769,00	172.735.000,00	185.794.419,00	7.752.350,00	(13.059.419,00)	(62,75)
4	Dinas Perumahan Dan Permukiman	8.162.618,00	113.179.900,00	98.017.018,00	23.325.500,00	15.162.882,00	185,76
5	Satuan Polisi Pamong Praja	360.000,00	108.907.550,00	108.229.550,00	1.038.000,00	678.000,00	188,33
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	255.500,00	11.396.800,00	11.222.300,00	430.000,00	174.500,00	68,30
7	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.471.500,00	162.751.675,00	127.608.975,00	37.614.200,00	35.142.700,00	1.421,92
8	Dinas Sosial	7.577.500,00	51.675.200,00	31.991.800,00	27.260.900,00	19.683.400,00	259,76
9	Dinas Tenaga Kerja	5.212.200,00	36.695.800,00	18.737.200,00	23.170.800,00	17.958.600,00	344,55
10	Dinas Lingkungan Hidup	21.741.850,00	89.506.000,00	105.590.520,00	5.657.330,00	(16.084.520,00)	(73,98)
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5.900.000,00	20.585.000,00	26.335.000,00	150.000,00	(5.750.000,00)	(97,46)
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	3.585.000,00	33.361.400,00	36.946.400,00	0,00	(3.585.000,00)	(100,00)
13	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	717.000,00	717.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Perhubungan	40.486.200,00	66.129.000,00	91.617.150,00	14.998.050,00	(25.488.150,00)	(62,96)
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika	870.000,00	18.936.350,00	19.806.350,00	0,00	(870.000,00)	(100,00)
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian	255.500,00	47.752.200,00	44.483.300,00	3.524.400,00	3.268.900,00	1.279,41
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	664.300,00	23.831.600,00	24.059.100,00	436.800,00	(227.500,00)	(34,25)
18	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	255.500,00	17.219.000,00	17.325.300,00	149.200,00	(106.300,00)	(41,60)
19	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	306.600,00	18.450.000,00	18.366.600,00	390.000,00	83.400,00	27,20
20	Dinas Arsip Dan Perpustakaan	1.614.000,00	25.980.000,00	27.594.000,00	0,00	(1.614.000,00)	(100,00)
21	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	20.094.200,00	19.536.200,00	558.000,00	558.000,00	100,00
22	Sekretariat Daerah	33.968.000,00	263.803.700,00	295.118.800,00	2.652.900,00	(31.315.100,00)	(92,19)
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.425.000,00	199.400.000,00	195.931.000,00	4.894.000,00	3.469.000,00	243,44
24	Kecamatan Bogor Selatan	3.645.700,00	142.151.110,00	137.239.010,00	8.557.800,00	4.912.100,00	134,74
25	Kecamatan Bogor Timur	7.103.000,00	79.107.600,00	79.381.500,00	6.829.100,00	(273.900,00)	(3,86)
26	Kecamatan Bogor Tengah	2.047.000,00	50.398.400,00	42.417.400,00	10.028.000,00	7.981.000,00	389,89
27	Kecamatan Bogor Barat	270.800,00	112.182.000,00	111.233.000,00	1.219.800,00	949.000,00	350,44
28	Kecamatan Bogor Utara	8.911.500,00	60.226.700,00	42.923.000,00	26.215.200,00	17.303.700,00	194,17
29	Kecamatan Tanah Sareal	8.985.150,00	94.625.700,00	88.191.650,00	15.419.200,00	6.434.050,00	71,61
30	Inspektorat	10.234.500,00	28.913.000,00	30.105.900,00	9.041.600,00	(1.192.900,00)	(11,66)
31	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	403.050,00	22.921.195,00	23.324.245,00	0,00	(403.050,00)	(100,00)
32	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	16.780.450,00	22.743.750,00	21.653.000,00	17.871.200,00	1.090.750,00	6,50
33	Badan Pendapatan Daerah	2.790.000,00	67.544.900,00	58.328.425,00	12.006.475,00	9.216.475,00	330,34
34	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.586.200,00	30.905.300,00	30.674.700,00	1.816.800,00	230.600,00	14,54
35	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	6.500.000,00	6.370.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
	Jumlah	378.300.235,29	4.815.123.058,31	4.785.570.596,60	407.852.697,00	29.552.461,71	7,81



**5.3.1.1.6.19 Bahan Cetak**

Saldo Persediaan Bahan Cetak Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp215.837.083,00 dan Rp53.808.635,00. Saldo Persediaan 2024 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp162.028.448,00 atau 301,12% dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp1.319.717.355,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp1.157.688.907,00. Rincian Persediaan Bahan Cetak pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.58
Persediaan Bahan Cetak per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023	Penambahan 2024	Pengurangan 2024	31 Desember 2024	Kenaikan/ (penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	0,00	53.807.425,00	53.807.425,00	0,00	-	0,00
2	Dinas Kesehatan	52.483.635,00	207.352.439,00	246.327.674,00	13.508.400,00	(38.975.235,00)	(74,26)
3	Rumah Sakit Umum Daerah-BLUD	0,00	811.228.791,00	614.778.908,00	196.449.883,00	196.449.883,00	100,00
4	Dinas Perumahan Dan Permukiman	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	0,00	(1.325.000,00)	(100,00)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	26.700.000,00	26.700.000,00	0,00	-	0,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	43.830.000,00	37.951.200,00	5.878.800,00	5.878.800,00	100,00
7	Dinas Arsip Dan Perpustakaan	0,00	6.449.100,00	6.449.100,00	0,00	-	0,00
8	Sekretariat Daerah	0,00	170.349.600,00	170.349.600,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	53.808.635,00	1.319.717.355,00	1.157.688.907,00	215.837.083,00	162.028.448,00	301,12

5.3.1.1.6.20 Benda Pos

Saldo Persediaan Benda Pos Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.745.500,00 dan Rp6.100.000,00. Saldo Persediaan 2024 mengalami penurunan nilai sebesar Rp1.354.500,00 atau 22,20% dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp88.779.940,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp90.134.440,00. Rincian Persediaan Benda Pos pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.59
Persediaan Benda Pos per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023	Penambahan 2024	Pengurangan 2024	31 Desember 2024	Kenaikan/ (penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	0,00	8.663.600,00	8.663.600,00	0,00	-	0,00
2	Dinas Kesehatan	660.000,00	17.247.840,00	16.787.840,00	1.120.000,00	460.000,00	69,70
3	Rumah Sakit Umum Daerah-BLUD	0,00	11.350.000,00	11.350.000,00	0,00	-	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0,00	14.190.000,00	13.867.500,00	322.500,00	322.500,00	100,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	50.000,00	6.450.000,00	6.150.000,00	350.000,00	300.000,00	600,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	2.900.000,00	2.400.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
7	Dinas Sosial	1.000.000,00	1.290.000,00	1.387.000,00	903.000,00	(97.000,00)	(9,70)
8	Dinas Lingkungan Hidup	3.220.000,00	0,00	2.870.000,00	350.000,00	(2.870.000,00)	(89,13)
9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	1.612.500,00	1.612.500,00	0,00	-	0,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	830.000,00	645.000,00	1.475.000,00	0,00	(830.000,00)	(100,00)
11	Sekretariat Daerah	0,00	1.256.000,00	1.256.000,00	0,00	-	0,00
12	Kecamatan Bogor Selatan	0,00	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00	-	0,00
13	Inspektorat	340.000,00	2.500.000,00	1.640.000,00	1.200.000,00	860.000,00	252,94
14	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	-	0,00
15	Badan Pendapatan Daerah	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	-	0,00
16	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	3.390.000,00	3.390.000,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	6.100.000,00	88.779.940,00	90.134.440,00	4.745.500,00	(1.354.500,00)	(22,20)

5.3.1.1.6.21 Bahan Komputer

Saldo Persediaan Bahan Komputer Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.539.596.684,00 dan Rp704.416.792,00. Saldo Persediaan 2024 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp835.179.892,00 atau 118,56% dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp7.586.368.427,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp6.751.188.535,00. Rincian Persediaan Bahan Komputer pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:



Tabel 5.3.60
Persediaan Bahan Komputer per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023	Penambahan 2024	Pengurangan 2024	31 Desember 2024	Kenaikan/ (penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	125.062.086,00	2.634.647.759,00	2.702.697.745,00	57.012.100,00	(68.049.986,00)	(54,41)
2	Dinas Kesehatan	11.840.650,00	120.753.814,00	104.746.210,00	27.848.254,00	16.007.604,00	135,19
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	40.337.018,00	193.983.000,00	230.287.018,00	4.033.000,00	(36.304.018,00)	(90,00)
4	Dinas Perumahan Dan Permukiman	3.639.579,00	38.513.000,00	32.063.579,00	10.089.000,00	6.449.421,00	177,20
5	Satuan Polisi Pamong Praja	648.500,00	15.720.000,00	16.050.500,00	318.000,00	(330.500,00)	(50,96)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	879.200,00	12.154.200,00	12.143.400,00	890.000,00	10.800,00	1,23
7	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	51.796.900,00	46.256.900,00	5.540.000,00	5.540.000,00	100,00
8	Dinas Sosial	33.074.300,00	23.754.000,00	20.059.900,00	36.768.400,00	3.694.100,00	11,17
9	Dinas Tenaga Kerja	3.186.200,00	48.665.300,00	41.806.150,00	10.045.350,00	6.859.150,00	215,28
10	Dinas Lingkungan Hidup	9.494.000,00	55.951.700,00	64.328.100,00	1.117.600,00	(8.376.400,00)	(88,23)
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	2.245.667.000,00	1.499.359.200,00	746.307.800,00	746.307.800,00	100,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	34.955.988,00	26.088.700,00	40.577.488,00	20.467.200,00	(14.488.788,00)	(41,45)
13	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	42.842.000,00	42.842.000,00	0,00	-	0,00
14	Dinas Perhubungan	104.125.550,00	50.953.550,00	66.926.750,00	88.152.350,00	(15.973.200,00)	(15,34)
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1.387.500,00	145.272.563,00	146.164.063,00	496.000,00	(891.500,00)	(64,25)
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian	0,00	24.163.000,00	24.012.900,00	150.100,00	150.100,00	100,00
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.236.700,00	20.760.300,00	22.782.600,00	214.400,00	(2.022.300,00)	(90,41)
18	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	0,00	12.677.500,00	12.677.500,00	0,00	-	0,00
19	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	1.380.000,00	20.040.000,00	21.420.000,00	0,00	(1.380.000,00)	(100,00)
20	Dinas Arsip Dan Perpustakaan	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	-	0,00
21	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	440.800,00	16.938.900,00	13.560.700,00	3.819.000,00	3.378.200,00	766,38
22	Sekretariat Daerah	2.597.400,00	169.807.150,00	172.404.550,00	0,00	(2.597.400,00)	(100,00)
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2.052.000,00	359.910.000,00	360.027.000,00	1.935.000,00	(117.000,00)	(5,70)
24	Kecamatan Bogor Selatan	2.485.300,00	160.139.000,00	155.278.960,00	7.345.340,00	4.860.040,00	195,55
25	Kecamatan Bogor Timur	6.908.000,00	16.743.600,00	9.854.400,00	13.797.200,00	6.889.200,00	99,73
26	Kecamatan Bogor Tengah	0,00	55.785.500,00	36.922.000,00	18.863.500,00	18.863.500,00	100,00
27	Kecamatan Bogor Barat	0,00	95.249.900,00	95.249.900,00	0,00	-	0,00
28	Kecamatan Bogor Utara	6.338.500,00	81.869.600,00	59.084.900,00	29.123.200,00	22.784.700,00	359,47
29	Kecamatan Tanah Sareal	3.605.800,00	166.307.625,00	158.956.325,00	10.957.100,00	7.351.300,00	203,87
30	Inspektorat	15.171.147,00	21.952.800,00	31.088.322,00	6.035.625,00	(9.135.522,00)	(60,22)
31	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	0,00	38.559.606,00	38.559.606,00	0,00	-	0,00
32	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	132.676.700,00	374.596.000,00	234.181.700,00	273.091.000,00	140.414.300,00	105,83
33	Badan Pendapatan Daerah	132.789.874,00	124.455.260,00	141.066.969,00	116.178.165,00	(16.611.709,00)	(12,51)
34	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	26.276.000,00	103.462.200,00	81.967.200,00	47.771.000,00	21.495.000,00	81,80
35	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	828.000,00	15.787.000,00	15.384.000,00	1.231.000,00	403.000,00	48,67
	Jumlah	704.416.792,00	7.586.368.427,00	6.751.188.535,00	1.539.596.684,00	835.179.892,00	118,56

5.3.1.1.6.22 Perabot Kantor

Saldo Persediaan Perabot Kantor Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp841.502.641,71 dan Rp396.040.108,60. Saldo Persediaan 2024 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp445.462.533,11 atau 112,48% dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp6.483.607.618,55 dan pengurangan persediaan sebesar Rp6.038.145.085,44. Rincian Persediaan Perabot Kantor pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.61
Persediaan Perabot Kantor per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023	Penambahan 2024	Pengurangan 2024	31 Desember 2024	Kenaikan/ (penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	63.354.409,67	2.541.200.734,60	2.568.410.526,60	36.144.617,67	(27.209.792,00)	(42,95)
2	Dinas Kesehatan	31.060.220,93	880.028.319,00	764.487.269,89	146.601.270,04	115.541.049,11	371,99
3	Rumah Sakit Umum Daerah-BLUD	58.058.819,00	0,00	58.058.819,00	0,00	(58.058.819,00)	(100,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0,00	150.390.100,00	150.390.100,00	0,00	-	0,00
5	Dinas Perumahan Dan Permukiman	7.462.820,00	477.274.200,00	430.767.400,00	53.969.620,00	46.506.800,00	623,18
6	Satuan Polisi Pamong Praja	423.800,00	20.755.100,00	20.088.900,00	1.090.000,00	666.200,00	157,20
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	12.495.000,00	10.265.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	100,00
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	11.459.500,00	10.065.300,00	1.394.200,00	1.394.200,00	100,00
9	Dinas Sosial	1.525.269,00	17.835.200,00	6.385.500,00	12.974.969,00	11.449.700,00	750,67
10	Dinas Tenaga Kerja	0,00	40.373.800,00	38.362.100,00	2.011.700,00	2.011.700,00	100,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	165.244.970,00	507.320.098,79	206.718.588,79	465.846.480,00	300.601.510,00	181,91
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	10.880.000,00	10.880.000,00	0,00	-	0,00
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	0,00	18.009.500,00	16.826.600,00	1.182.900,00	1.182.900,00	100,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	19.934.100,00	13.231.200,00	6.702.900,00	6.702.900,00	100,00
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika	0,00	10.366.857,00	10.239.372,00	127.485,00	127.485,00	100,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian	0,00	47.176.300,00	45.470.800,00	1.705.500,00	1.705.500,00	100,00
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	20.584.100,00	20.584.100,00	0,00	-	0,00
18	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	0,00	54.478.500,00	54.355.000,00	123.500,00	123.500,00	100,00
19	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	0,00	2.499.000,00	2.499.000,00	0,00	-	0,00
20	Dinas Arsip Dan Perpustakaan	0,00	67.995.000,00	67.995.000,00	0,00	-	0,00
21	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	21.409.300,00	20.767.800,00	641.500,00	641.500,00	100,00
22	Sekretariat Daerah	0,00	479.766.970,00	479.766.970,00	0,00	-	0,00
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	146.780.679,00	141.805.679,00	4.975.000,00	4.975.000,00	100,00
24	Kecamatan Bogor Selatan	556.650,00	89.462.900,00	87.935.950,00	2.083.600,00	1.526.950,00	274,31
25	Kecamatan Bogor Timur	4.832.000,00	132.543.200,00	101.784.500,00	35.590.700,00	30.758.700,00	636,56
26	Kecamatan Bogor Tengah	10.478.400,00	115.111.400,00	105.833.500,00	19.756.300,00	9.277.900,00	88,54
27	Kecamatan Bogor Barat	0,00	121.955.400,00	121.955.400,00	0,00	-	0,00
28	Kecamatan Bogor Utara	5.997.400,00	39.889.500,00	35.297.900,00	10.589.000,00	4.591.600,00	76,56
29	Kecamatan Tanah Sareal	19.095.300,00	120.590.200,00	106.964.600,00	32.720.900,00	13.625.600,00	71,36
30	Inspektorat	27.766.900,00	28.583.500,00	53.309.900,00	3.040.500,00	(24.726.400,00)	(89,05)
31	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	0,00	2.415.000,00	2.415.000,00	0,00	-	0,00
32	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	183.150,00	82.362.460,16	82.545.610,16	0,00	(183.150,00)	(100,00)
33	Badan Pendapatan Daerah	0,00	67.078.700,00	67.078.700,00	0,00	-	0,00
34	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	16.223.000,00	16.223.000,00	0,00	-	0,00
35	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	108.380.000,00	108.380.000,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	396.040.108,60	6.483.607.618,55	6.038.145.085,44	841.502.641,71	445.462.533,11	112,48



**5.3.1.1.6.23 Alat Listrik**

Saldo Persediaan Alat Listrik Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.487.214.848,50 dan Rp1.769.953.579,46. Saldo Persediaan 2024 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp1.717.261.269,04 atau 97,02% dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp13.717.513.588,01 dan pengurangan persediaan sebesar Rp12.000.252.318,97. Rincian Persediaan Alat Listrik pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.62
Persediaan Alat Listrik per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan 2024 (Rp)	Pengurangan 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	33.127.691,00	1.090.270.786,00	1.102.858.667,00	20.539.810,00	(12.587.881,00)	(38,00)
2	Dinas Kesehatan	19.541.114,46	519.207.299,01	447.155.347,47	91.593.066,00	72.051.951,54	368,72
3	Rumah Sakit Umum Daerah-BLUD	17.855.383,50	590.995.153,00	449.967.609,50	158.882.927,00	141.027.543,50	789,83
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	4.400.595,00	147.607.000,00	145.539.395,00	6.468.200,00	2.067.605,00	46,98
5	Dinas Perumahan Dan Permukiman	64.316.948,00	1.182.797.940,00	971.060.688,00	276.054.200,00	211.737.252,00	329,21
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	8.383.600,00	8.383.600,00	0,00	-	0,00
7	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	-	0,00
8	Dinas Sosial	13.653.300,00	62.762.707,00	71.474.097,00	4.941.910,00	(8.711.390,00)	(63,80)
9	Dinas Tenaga Kerja	1.590.000,00	15.665.000,00	10.314.500,00	6.940.500,00	5.350.500,00	336,51
10	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	48.403.400,00	48.403.400,00	0,00	-	0,00
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	16.174.500,00	16.174.500,00	0,00	-	0,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	0,00	3.222.100,00	3.222.100,00	0,00	-	0,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	51.943.750,00	51.943.750,00	0,00	-	0,00
14	Dinas Perhubungan	1.591.691.717,50	8.656.125.119,00	7.369.292.223,50	2.878.524.613,00	1.286.832.895,50	80,85
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika	0,00	166.662.200,00	166.230.200,00	432.000,00	432.000,00	100,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian	0,00	36.618.000,00	35.381.000,00	1.237.000,00	1.237.000,00	100,00
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	11.022.900,00	11.022.900,00	0,00	-	0,00
18	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	585.800,00	30.272.600,00	30.689.000,00	169.400,00	(416.400,00)	(71,08)
19	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	105.000,00	4.980.000,00	4.987.000,00	98.000,00	(7.000,00)	(6,67)
20	Dinas Arsip Dan Perpustakaan	0,00	22.825.000,00	22.825.000,00	0,00	-	0,00
21	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	630.500,00	22.744.700,00	21.503.200,00	1.872.000,00	1.241.500,00	196,91
22	Sekretariat Daerah	0,00	244.590.700,00	244.590.700,00	0,00	-	0,00
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	6.116.100,00	276.516.000,00	277.150.060,00	5.482.040,00	(634.060,00)	(10,37)
24	Kecamatan Bogor Selatan	614.900,00	31.981.400,00	31.409.700,00	1.186.600,00	571.700,00	92,97
25	Kecamatan Bogor Timur	3.589.100,00	26.818.800,00	18.143.400,00	12.264.500,00	8.675.400,00	241,72
26	Kecamatan Bogor Tengah	0,00	48.765.400,00	41.444.100,00	7.321.300,00	7.321.300,00	100,00
27	Kecamatan Bogor Barat	0,00	65.487.400,00	65.487.400,00	0,00	-	0,00
28	Kecamatan Bogor Utara	5.522.100,00	22.481.000,00	20.830.100,00	7.173.000,00	1.650.900,00	29,90
29	Kecamatan Tanah Sareal	2.461.300,00	63.507.000,00	62.019.300,00	3.949.000,00	1.487.700,00	60,44
30	Inspektorat	2.335.000,00	4.088.000,00	5.607.000,00	816.000,00	(1.519.000,00)	(65,05)
31	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	473.600,00	6.540.800,00	7.014.400,00	0,00	(473.600,00)	(100,00)
32	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.299.830,00	14.851.334,00	15.434.381,50	716.782,50	(583.047,50)	(44,86)
33	Badan Pendapatan Daerah	43.600,00	206.705.000,00	206.748.600,00	0,00	(43.600,00)	(100,00)
34	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	1.477.000,00	1.477.000,00	0,00	-	0,00
35	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	10.070.000,00	9.518.000,00	552.000,00	552.000,00	100,00
	Jumlah	1.769.953.579,46	13.717.513.588,01	12.000.252.318,97	3.487.214.848,50	1.717.261.269,04	97,02

5.3.1.1.6.24 Perlengkapan Dinas

Saldo Persediaan Perlengkapan Dinas Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp521.566.500,00 dan Rp0,00. Saldo Persediaan 2024 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp521.566.500,00 atau 100,00% dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp5.244.817.741,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp4.723.251.241,00. Rincian Persediaan Perlengkapan Dinas pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.63
Persediaan Perlengkapan Dinas per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan 2024 (Rp)	Pengurangan 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0,00	531.665.515,00	531.665.515,00	0,00	-	0,00
2	Dinas Perumahan Dan Permukiman	0,00	636.256.000,00	549.939.500,00	86.316.500,00	86.316.500,00	100,00
3	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	1.305.300.000,00	1.305.300.000,00	0,00	-	0,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	262.725.210,00	262.725.210,00	0,00	-	0,00
5	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	176.383.200,00	176.383.200,00	0,00	-	0,00
6	Dinas Tenaga Kerja	0,00	93.541.000,00	93.541.000,00	0,00	-	0,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	529.925.000,00	110.725.000,00	419.200.000,00	419.200.000,00	100,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	0,00	16.263.400,00	16.263.400,00	0,00	-	0,00
9	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	16.050.000,00	0,00	16.050.000,00	16.050.000,00	100,00
10	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	14.550.000,00	14.550.000,00	0,00	-	0,00
11	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	0,00	7.845.000,00	7.845.000,00	0,00	-	0,00
12	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	2.031.000,00	2.031.000,00	0,00	-	0,00
13	Sekretariat Daerah	0,00	975.795.936,00	975.795.936,00	0,00	-	0,00
14	Kecamatan Bogor Selatan	0,00	4.460.000,00	4.460.000,00	0,00	-	0,00
15	Kecamatan Bogor Timur	0,00	70.600.000,00	70.600.000,00	0,00	-	0,00
16	Kecamatan Bogor Tengah	0,00	71.400.000,00	71.400.000,00	0,00	-	0,00
17	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	0,00	59.615.880,00	59.615.880,00	0,00	-	0,00
18	Badan Pendapatan Daerah	0,00	170.105.600,00	170.105.600,00	0,00	-	0,00
19	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	300.305.000,00	300.305.000,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	0,00	5.244.817.741,00	4.723.251.241,00	521.566.500,00	521.566.500,00	100,00



5.3.1.1.6.25 Perlengkapan Pendukung Olah Raga

Saldo Persediaan Perlengkapan Pendukung Olah Raga Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.225.130,00 dan Rp25.540.616,00. Saldo Persediaan 2024 mengalami penurunan nilai sebesar Rp23.315.486,00 atau 91,29% dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp1.523.494.405,60 dan pengurangan persediaan sebesar Rp1.546.809.891,60. Rincian Persediaan Perlengkapan Pendukung Olah Raga pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.64
Persediaan Perlengkapan Pendukung Olah Raga per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan 2024 (Rp)	Pengurangan 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	25.540.616,00	1.048.961.405,60	1.072.276.891,60	2.225.130,00	(23.315.486,00)	(91,29)
2	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	63.750.000,00	63.750.000,00	0,00	-	0,00
3	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	0,00	374.969.000,00	374.969.000,00	0,00	-	0,00
4	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	33.150.000,00	33.150.000,00	0,00	-	0,00
5	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	2.664.000,00	2.664.000,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	25.540.616,00	1.523.494.405,60	1.546.809.891,60	2.225.130,00	(23.315.486,00)	(91,29)

5.3.1.1.6.26 Suvenir/Cendera Mata

Saldo Persediaan Suvenir/Cendera Mata Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp68.258.900,00 dan Rp26.327.285,00. Saldo Persediaan 2024 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp41.931.615,00 atau 159,27% dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp1.119.672.150,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp1.077.740.535,00. Rincian Persediaan Suvenir/Cendera Mata pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

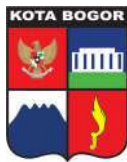
Tabel 5.3.65
Persediaan Suvenir/Cendera Mata per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan 2024 (Rp)	Pengurangan 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	2.929.410,00	87.585.000,00	90.514.410,00	0,00	(2.929.410,00)	(100,00)
2	Dinas Kesehatan	7.117.875,00	4.750.000,00	8.542.875,00	3.325.000,00	(3.792.875,00)	(53,29)
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	16.280.000,00	15.240.000,00	31.012.000,00	508.000,00	(15.772.000,00)	(96,88)
4	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	8.741.250,00	2.913.750,00	5.827.500,00	5.827.500,00	100,00
5	Dinas Arsip Dan Perpustakaan	0,00	64.118.700,00	64.118.700,00	0,00	-	0,00
6	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	7.310.000,00	7.310.000,00	0,00	-	0,00
7	Sekretariat Daerah	0,00	540.479.800,00	538.881.400,00	1.598.400,00	1.598.400,00	100,00
8	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	97.200.000,00	40.200.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	100,00
9	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	0,00	32.270.400,00	32.270.400,00	0,00	-	0,00
10	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	0,00	38.115.000,00	38.115.000,00	0,00	-	0,00
11	Badan Pendapatan Daerah	0,00	223.862.000,00	223.862.000,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	26.327.285,00	1.119.672.150,00	1.077.740.535,00	68.258.900,00	41.931.615,00	159,27

5.3.1.1.6.27 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

Saldo Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp629.126.053,37 dan Rp484.740.847,96. Saldo Persediaan 2024 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp144.385.205,41 atau 29,79% dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp3.565.060.058,54 dan pengurangan persediaan sebesar Rp3.420.674.853,13. Rincian Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:





Tabel 5.3.66
Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023	Penambahan 2024	Pengurangan 2024	31 Desember 2024	Kenaikan/ (penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	8.764.713,16	534.259.326,00	534.777.298,16	8.246.741,00	(517.972,16)	(5,91)
2	Dinas Kesehatan	22.589.551,80	111.064.390,04	116.909.595,47	16.744.346,37	(5.845.205,43)	(25,88)
3	Rumah Sakit Umum Daerah-BLUD	211.224.834,00	1.253.371.367,50	1.265.054.896,50	199.541.305,00	(11.683.529,00)	(5,53)
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0,00	20.298.465,00	20.298.465,00	0,00	-	0,00
5	Dinas Perumahan Dan Permukiman	2.823.190,00	56.400.000,00	55.833.190,00	3.390.000,00	566.810,00	20,08
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	22.366.500,00	22.366.500,00	0,00	-	0,00
7	Dinas Sosial	4.005.950,00	0,00	3.065.700,00	940.250,00	(3.065.700,00)	(76,53)
8	Dinas Tenaga Kerja	0,00	19.119.000,00	19.119.000,00	0,00	-	0,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	226.657.609,00	732.509.000,00	596.249.498,00	362.917.111,00	136.259.502,00	60,12
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	180.875.950,00	156.536.950,00	24.339.000,00	24.339.000,00	100,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2.958.800,00	270.200,00	3.229.000,00	0,00	(2.958.800,00)	(100,00)
12	Dinas Komunikasi Dan Informatika	0,00	67.327.050,00	67.327.050,00	0,00	-	0,00
13	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	0,00	148.000,00	148.000,00	0,00	-	0,00
14	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	37.491.400,00	37.491.400,00	0,00	-	0,00
15	Sekretariat Daerah	0,00	285.080.000,00	285.080.000,00	0,00	-	0,00
16	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	39.815.000,00	34.850.000,00	4.965.000,00	4.965.000,00	100,00
17	Kecamatan Bogor Selatan	1.279.700,00	62.163.000,00	63.442.700,00	0,00	(1.279.700,00)	(100,00)
18	Kecamatan Bogor Timur	0,00	17.977.525,00	12.447.825,00	5.529.700,00	5.529.700,00	100,00
19	Kecamatan Bogor Barat	0,00	47.861.385,00	47.861.385,00	0,00	-	0,00
20	Kecamatan Bogor Utara	4.436.500,00	174.500,00	2.098.400,00	2.512.600,00	(1.923.900,00)	(43,37)
21	Badan Pendapatan Daerah	0,00	63.250.000,00	63.250.000,00	0,00	-	0,00
22	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	13.238.000,00	13.238.000,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	484.740.847,96	3.565.060.058,54	3.420.674.853,13	629.126.053,37	144.385.205,41	29,79

5.3.1.1.6.28 Obat

Saldo Persediaan Obat Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp18.773.757.900,97 dan Rp14.728.805.362,40. Saldo Persediaan 2024 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp4.044.952.538,57 atau 27,46% dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp98.506.815.746,43 dan pengurangan persediaan sebesar Rp94.461.863.207,86. Rincian Persediaan Obat pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.67
Persediaan Obat per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023	Penambahan 2024	Pengurangan 2024	31 Desember 2024	Kenaikan/ (penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	17.053.989,00	155.710.551,00	169.169.040,00	3.595.500,00	(13.458.489,00)	(78,92)
2	Dinas Kesehatan	7.973.861.363,53	59.240.412.224,17	54.102.446.270,78	13.111.827.316,92	5.137.965.953,39	64,44
3	Rumah Sakit Umum Daerah	244.296.663,49	2.696.999.939,45	2.271.455.000,19	669.841.602,75	425.544.939,26	174,19
4	Rumah Sakit Umum Daerah-BLUD	6.239.661.740,38	35.841.919.329,81	37.359.098.586,89	4.722.482.483,30	(1.517.179.257,08)	(24,32)
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	0,00	14.050.600,00	14.050.600,00	0,00	-	0,00
6	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	253.931.606,00	484.674.802,00	472.595.410,00	266.010.998,00	12.079.392,00	4,76
7	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	0,00	18.958.500,00	18.958.500,00	0,00	-	0,00
8	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	54.089.800,00	54.089.800,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	14.728.805.362,40	98.506.815.746,43	94.461.863.207,86	18.773.757.900,97	4.044.952.538,57	27,46

5.3.1.1.6.29 Obat-Obatan Lainnya

Saldo Persediaan Obat-Obatan Lainnya Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp7.844.865.006,63 dan Rp4.780.887.638,31. Saldo Persediaan 2024 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp3.063.977.368,32 atau 64,09% dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp64.000.364.750,05 dan pengurangan persediaan sebesar Rp60.936.387.381,73. Rincian Persediaan Obat-Obatan Lainnya pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.68
Persediaan Obat-Obatan Lainnya per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023	Penambahan 2024	Pengurangan 2024	31 Desember 2024	Kenaikan/ (penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	2.296.520,00	53.742.907,00	55.691.427,00	348.000,00	(1.948.520,00)	(84,85)
2	Dinas Kesehatan	41.672.070,00	9.104.690.618,00	5.126.390.338,74	4.019.972.349,26	3.978.300.279,26	9.546,68
3	Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	220.962.910,94	57.595.960,05	163.366.950,89	163.366.950,89	100,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah-BLUD	4.736.919.048,31	54.575.087.564,11	55.676.153.655,94	3.635.852.956,48	(1.101.066.091,83)	(23,24)
5	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0,00	8.175.000,00	8.175.000,00	0,00	-	0,00
6	Dinas Tenaga Kerja	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	-	0,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	-	0,00
8	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	32.052.000,00	6.727.250,00	25.324.750,00	25.324.750,00	100,00
9	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	2.913.750,00	2.913.750,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	4.780.887.638,31	64.000.364.750,05	60.936.387.381,73	7.844.865.006,63	3.063.977.368,32	64,09



5.3.1.1.6.30 Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat

Saldo Persediaan Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.242.197.202,06 dan Rp19.996.823.518,90. Saldo Persediaan 2024 mengalami penurunan nilai sebesar Rp18.754.626.316,84 atau 93,79% dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp16.538.197.207,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp35.292.823.523,84. Rincian Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.69
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan 2024 (Rp)	Pengurangan 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan) (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	0,00	6.931.800,00	6.931.800,00	0,00	-	0,00
2	Dinas Perumahan Dan Permukiman	19.838.992.049,00	0,00	19.838.992.049,00	0,00	(19.838.992.049,00)	(100,00)
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	404.498.260,00	257.855.050,00	146.643.210,00	146.643.210,00	100,00
4	Dinas Sosial	67.553.438,00	1.803.609.070,00	1.259.167.728,00	611.994.780,00	544.441.342,00	805,94
5	Dinas Tenaga Kerja	0,00	1.618.919.128,00	1.618.919.128,00	0,00	-	0,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	90.278.031,90	3.100.804.000,00	2.723.678.219,84	467.403.812,06	377.125.780,16	417,74
7	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	16.155.400,00	0,00	16.155.400,00	16.155.400,00	100,00
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian	0,00	355.681.460,00	355.681.460,00	0,00	-	0,00
9	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	0,00	312.900.000,00	312.900.000,00	0,00	-	0,00
10	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	6.669.173.600,00	6.669.173.600,00	0,00	-	0,00
11	Sekretariat Daerah	0,00	169.399.807,00	169.399.807,00	0,00	-	0,00
12	Kecamatan Bogor Selatan	0,00	2.055.624.682,00	2.055.624.682,00	0,00	-	0,00
13	Kecamatan Bogor Timur	0,00	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	19.996.823.518,90	16.538.197.207,00	35.292.823.523,84	1.242.197.202,06	(18.754.626.316,84)	(93,79)

5.3.1.1.6.31 Natura

Saldo Persediaan Natura Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.440.764.293,26 dan Rp10.759.076,00. Saldo Persediaan 2024 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp2.430.005.217,26 atau 22.585,63% dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp14.825.037.979,74 dan pengurangan persediaan sebesar Rp12.395.032.762,48. Rincian Persediaan Natura pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.70
Persediaan Natura per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan 2024 (Rp)	Pengurangan 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan) (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Kesehatan	0,00	12.273.291.530,00	10.090.289.104,00	2.183.002.426,00	2.183.002.426,00	100,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah-BLUD	0,00	881.790.949,74	755.752.888,48	126.038.061,26	126.038.061,26	100,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0,00	49.344.000,00	49.344.000,00	0,00	-	0,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	225.000,00	9.220.000,00	8.965.000,00	480.000,00	255.000,00	113,33
5	Dinas Sosial	10.534.076,00	466.771.700,00	346.061.970,00	131.243.806,00	120.709.730,00	1.145,90
6	Dinas Tenaga Kerja	0,00	345.842.200,00	345.842.200,00	0,00	-	0,00
7	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	31.102.500,00	31.102.500,00	0,00	-	0,00
8	Sekretariat Daerah	0,00	767.675.100,00	767.675.100,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	10.759.076,00	14.825.037.979,74	12.395.032.762,48	2.440.764.293,26	2.430.005.217,26	22.585,63

5.3.1.1.6.32 Pakan

Saldo Persediaan Pakan Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Persediaan 2024 tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp180.019.250,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp180.019.250,00. Rincian Persediaan Pakan pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.71
Persediaan Pakan per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan 2024 (Rp)	Pengurangan 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan) (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	180.019.250,00	180.019.250,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	0,00	180.019.250,00	180.019.250,00	0,00	-	0,00



5.3.1.1.6.33 Komponen Peralatan

Saldo Persediaan Komponen Peralatan Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp121.276.000,00 dan Rp112.163.520,00. Saldo Persediaan 2024 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp9.112.480,00 atau 8,12% dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp367.053.650,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp357.941.170,00. Rincian Persediaan Komponen Peralatan pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.72
Persediaan Komponen Peralatan per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023	Penambahan 2024	Pengurangan 2024	31 Desember 2024	Kenaikan/ (penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Perumahan Dan Permukiman	1.500.000,00	343.391.450,00	287.843.350,00	57.048.100,00	55.548.100,00	3.703,21
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	20.535.000,00	20.535.000,00	0,00	-	0,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	110.663.520,00	0,00	46.435.620,00	64.227.900,00	(46.435.620,00)	(41,96)
4	Kecamatan Bogor Timur	0,00	3.127.200,00	3.127.200,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	112.163.520,00	367.053.650,00	357.941.170,00	121.276.000,00	9.112.480,00	8,12

5.3.1.1.6.34 Komponen Lainnya

Saldo Persediaan Komponen Lainnya Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.508.160,00 dan Rp0,00. Saldo Persediaan 2024 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp4.508.160,00 atau 100,00% dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp6.864.770,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp2.356.610,00. Rincian Persediaan Komponen Lainnya pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.73
Persediaan Komponen Lainnya per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023	Penambahan 2024	Pengurangan 2024	31 Desember 2024	Kenaikan/ (penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Kesehatan	0,00	6.864.770,00	2.356.610,00	4.508.160,00	4.508.160,00	100,00
	Jumlah	0,00	6.864.770,00	2.356.610,00	4.508.160,00	4.508.160,00	100,00

5.3.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang dan merupakan kelompok aset lancar. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan dan merupakan kelompok aset non lancar. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

Nilai Investasi Jangka Panjang Kota Bogor per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.002.293.416.444,24 mengalami kenaikan sebesar Rp167.169.570.961,49 atau 20,02% dari Tahun 2023 sebesar Rp835.123.845.482,75 yang disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.3.74
Investasi Jangka Panjang

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Investasi Jangka Panjang				
2	Investasi Jangka Panjang Non Permanen				
3	Dana Bergulir	51.753.390,00	63.742.100,00	11.988.710,00	18,81
4	Penyisihan Dana Bergulir	(51.753.390,00)	(63.742.100,00)	(11.988.710,00)	18,81
5	Investasi Jangka Panjang Permanen	1.002.293.416.444,24	835.123.845.482,75	167.169.570.961,49	20,02
6	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.002.293.416.444,24	835.123.845.482,75	167.169.570.961,49	20,02
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	1.002.293.416.444,24	835.123.845.482,75	167.169.570.961,49	20,02

5.3.1.3.1.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen - Dana Bergulir

Saldo Investasi Non Permanen - Dana Bergulir per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp51.753.390,00 dan Rp63.742.100,00. Jumlah dana bergulir per 31 Desember 2024 sebesar Rp51.753.390,00 adalah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yang terdiri dari saldo dana bergulir yang dapat tertagih.

Nilai semula Dana Bergulir adalah sebesar Rp1.750.000.000,00. Jumlah tersebut merupakan dana yang disalurkan melalui Program Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Garda Emas). Jumlah tersebut merupakan akumulasi realisasi pencairan SPMU sejak tahun 2000 sampai dengan 2003, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.75
Dana Bergulir

No	Uraian	Nilai
1	Tahun 2000	300.000.000,00
2	Tahun 2001	300.000.000,00
3	Tahun 2002	550.000.000,00
4	Tahun 2003	600.000.000,00
5	Jumlah	1.750.000.000,00
6	Jumlah yang telah diselesaikan sebesar	(1.686.257.900,00)
7	Saldo sampai akhir tahun 2024 sebesar	51.753.390,00
8	Penyisihan Dana Bergulir Tahun 2024	(51.753.390,00)
9	Saldo Dana Bergulir Tahun 2024	0,00

Program Dana Bergulir Garda Emas dilaksanakan oleh Tim Kerja yang dibentuk dengan SK Wali Kota Bogor dengan Pelaksana Teknis diketuai oleh Direktur PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil), selain itu PINBUK ditunjuk sebagai Konsultan Pelaksanaan Program Garda Emas.

Dana bergulir tahun 2006 sampai dengan 2007 yang masih dapat ditagih sebesar Rp152.721.000,00 dan periode tahun 2008 sampai dengan 2009 terdapat pengembalian ke kas daerah sebesar Rp88.978.900,00. sehingga sisa dana bergulir yang masih dapat ditagih sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar Rp63.742.100,00. Atas saldo sebesar Rp63.742.100,00 Pemerintah Kota Bogor melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bogor telah menyampaikan permohonan untuk dilaksanakan proses penghapusan piutang daerah Program Garda Emas Kota Bogor ke KPKNL berdasarkan surat No. 588/1220-Ekon tanggal 11 Juni 2010 yang dilampiri dengan daftar debitur piutang negara yang berasal dari Program Garda Emas. Daftar debitur piutang tersebut terdiri dari 100 nama debitur dengan total nilai sebesar



Rp55.012.950,00. Hasil proses pemeriksaan oleh KPKNL dari 100 berkas tersebut hanya 74 berkas yang dapat diproses lebih lanjut dengan diterbitkannya Surat Pernyataan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Tertagih (PSBDT). Keputusan PSBDT tersebut dikeluarkan oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Barat tanggal 26 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2011.

5.3.1.3.1.2 Investasi Jangka Panjang Non Permanen - Penyisihan Dana Bergulir

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2024 Rp51.753.390,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp63.742.100,00.

Tabel 5.3.76
Penyisihan Dana Bergulir

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Saldo awal	63.742.100,00	63.742.100,00
2	Penerimaan	0,00	0,00
3	Pengeluaran	11.988.710,00	0,00
4	Saldo Akhir	51.753.390,00	63.742.100,00

5.3.1.3.2 Investasi Jangka Panjang Permanen - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Dalam pengakuan nilai penyertaan modal, digunakan metode akuntansi yang disebut Metode Biaya atau *Cost Method* dan Metode Ekuitas atau *Equity Method*.

Metode Biaya diterapkan pada Penyertaan Modal pada PT Bank Jabar sedangkan Metode Ekuitas diterapkan pada Penyertaan Modal pada PD BPR Bank Pasar, PDAM Kota Bogor, PD Jasa Transportasi, dan pada PD Pasar Pakuan Jaya. Perhitungan nilai penyertaan modal dengan metode ekuitas berdasarkan pada laporan keuangan perusahaan daerah yang bersangkutan.

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada masing-masing perusahaan daerah sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.002.293.416.444,24 atau mengalami kenaikan sebesar Rp167.169.570.961,49 atau 20,02% dari saldo tahun lalu sebesar Rp835.123.845.482,75 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.77
Rincian Penyertaan Modal Pemerintah

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Modal yang telah disetor pada Bank BJB	16.078.535.753,00	16.078.535.753,00	-	-
2	Modal yang telah disetor pada PDAM Kota Bogor	536.282.344.004,24	286.594.932.339,65	249.687.411.664,59	87,12
3	Modal yang telah disetor pada BPR Bank Kota Bogor	87.827.113.151,00	61.189.662.448,50	26.637.450.702,50	43,53
4	Modal yang telah disetor pada PD Jasa Transportasi	0,00	5.879.112.472,10	(5.879.112.472,10)	(100,00)
5	Modal yang disetor pada PD Pasar Pakuan Jaya	362.105.423.536,00	465.381.602.469,50	(103.276.178.933,50)	(22,19)
6	Jumlah	1.002.293.416.444,24	835.123.845.482,75	167.169.570.961,49	20,02

(Rincian penyertaan modal disajikan pada Lampiran 7)

5.3.1.3.2.1 Penyertaan Modal pada PT Bank Jabar Cabang Bogor

Penyertaan modal pada PT Bank Jabar Cabang Bogor sebesar Rp16.078.535.753,00 merupakan setoran modal tunai sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk yang dapat dirinci sebagai berikut:



Tab el 5.3.78
Mutasi Penyertaan Modal BJB

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Saldo Awal	16.078.535.753,00	16.078.535.753,00
2	Modal disetor	0,00	0,00
3	Penambah Ekuitas	0,00	0,00
4	Pembagian laba pengurang Modal Pemda	0,00	0,00
5	Saldo Akhir	16.078.535.753,00	16.078.535.753,00

Sejak tahun 2011 Pemerintah Kota Bogor tidak menambah penyertaan modalnya kepada PT Bank Jabar Banten Cabang Bogor dengan alasan kepemilikan saham pada PT Bank Jabar Banten sudah *Go Public*.

5.3.1.3.2.2 Penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Penyertaan modal pada PDAM didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor dengan modal dasar yang ditetapkan yaitu sebesar Rp100.000.000.000,00. Jumlah tersebut ditetapkan kembali dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah.

Penyertaan modal daerah kepada PDAM Tirta Pakuan diubah kembali dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2011 dan ditetapkan menjadi Rp182.000.000.000,00.

Penyertaan modal daerah kepada PDAM Tirta Pakuan diubah kembali dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2019 dan ditetapkan menjadi Rp280.132.242.000,00, pada tahun 2024 terdapat penyertaan modal berupa Barang Milik Daerah sebesar Rp47.819.268.000,00 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor, Berita Acara Serah Terima Nomor: 000.2.3.2/BA.1043-BKAD/2024 dan Nomor: BA/03-Perumda.TPKB/2024 dan Keputusan Wali Kota Nomor 000.2.4/Kep.12-BKAD/2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kota Bogor Berupa Tanah dan Jalan, Jaringan dan Irigasi yang Telah Disertakan Modal Kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor.

Berdasarkan persentase kepemilikan Pemerintah Kota Bogor sebesar 91,84% maka jumlah penyertaan modal Pemerintah Kota Bogor sesuai dengan ekuitas pada Laporan Keuangan PDAM Kota Bogor Audited KAP tahun 2024 adalah sebesar Rp536.282.344.004,24 Berikut mutasi Penyertaan Modal PDAM Kota Bogor terdiri dari:



Tabel 5.3.79
Mutasi Penyertaan Modal PDAM

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Saldo Awal	286.594.932.339,65	283.405.374.277,30
2	Koreksi	168.643.863.793,02	-
3	Penambah Investasi	47.819.268.000,00	0,00
4	Laba BUMD penambah Ekuitas	58.812.648.110,57	28.147.205.062,35
5	Pembagian laba pengurang Modal Pemda	25.588.368.239,00	24.957.647.000,00
6	Saldo Akhir (6 = 1 + 2 + 3 + 4 - 5)	536.282.344.004,24	286.594.932.339,65

5.3.1.3.2.3 Penyertaan Modal pada PD BPR Bank Kota Bogor

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bogor, modal dasar Perumda BPR Bank Kota Bogor ditetapkan sebesar Rp54.000.000.000,00 dan telah dipenuhi secara keseluruhan dan telah tercatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Nomor S-145/KR.0211/2019 tanggal 16 April 2019

Dengan persentase kepemilikan Pemerintah Kota Bogor sebesar 100%, maka jumlah penyertaan modal pada PD BPR Bank Kota Bogor sesuai dengan ekuitas pada Laporan Keuangan PD BPR Bank Kota per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp87.827.113.151,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.3.80
Mutasi Penyertaan Modal Bank Kota

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Saldo Awal	61.189.662.448,50	60.798.506.475,25
2	Koreksi	25.324.599.731,50	-
3	Penambah Investasi	0,00	0,00
4	Laba BUMD penambah Ekuitas	4.087.409.370,00	2.774.558.399,25
5	Pembagian laba pengurang Modal Pemda	2.774.558.399,00	2.383.402.426,00
6	Saldo Akhir (6 = 1 + 2 + 3 + 4 - 5)	87.827.113.151,00	61.189.662.448,50

5.3.1.3.2.4 Penyertaan modal pada PD Jasa Transportasi

Penyertaan modal pada PD Jasa Transportasi didasarkan pada Peraturan Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi dengan modal dasar yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp30.000.000.000,00. Jumlah tersebut ditetapkan kembali dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Jasa Transportasi Kota Bogor ditetapkan kembali modal dasar sebesar Rp35.519.390,00, dengan komposisi kepemilikan sebesar 100%, jumlah modal Pemerintah Kota Bogor sesuai dengan ekuitas pada Laporan Keuangan PD Jasa Transportasi Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.3.81
Penyertaan Modal PD Jasa Transportasi

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Saldo Awal	5.879.112.472,10	5.791.374.690,65
2	Koreksi	(5.879.112.472,10)	0,00
3	Penambah Investasi	0,00	
4	Laba BUMD penambah Ekuitas	0,00	87.737.781,45
5	Pembagian laba pengurang Modal Pemda	0,00	0,00
6	Saldo Akhir (6 = 1 + 2 + 3 + 4 - 5)	0,00	5.879.112.472,10

Berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Jasa Transportasi Kota Bogor Tahun 2024, total modal sebesar Rp35.519.390.000,00 dengan komposisi kepemilikan modal Pemerintah Kota Bogor adalah 100%.

5.3.1.3.2.5 Penyertaan modal pada PD Pasar Pakuan Jaya

Penyertaan modal pada PD Pasar Pakuan Jaya didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya, dengan modal dasar yang ditetapkan sebesar Rp241.792.583.600,00 yang terdiri dari modal disetor sebesar Rp5.000.000.000,00 dan aset daerah yang dipisahkan sebesar Rp236.792.583.600,00.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah, penyertaan modal kepada PD Pasar Pakuan Jaya ditetapkan menjadi Rp238.279.924.240,00 berupa:

- Uang Sebesar Rp 5.000.000.000,00
- Tanah, Bangunan, serta Peralatan dan Mesin Rp 233.279.924.240,00
- Jumlah Rp 238.279.924.240,00

Penyertaan modal daerah kepada PD Pasar Pakuan Jaya diubah kembali dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2011 dan ditetapkan menjadi Rp145.488.132.240,00 terdiri dari:

- Uang Sebesar Rp 5.000.000.000,00
- Tanah, Bangunan, serta Peralatan dan Mesin Rp 100.361.083.000,00

Penyertaan modal daerah kepada PD Pasar Pakuan Jaya diubah kembali dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2022 dan ditetapkan menjadi Rp503.111.384.240,00 dan sudah terpenuhi seluruhnya terdiri dari:

- Uang Sebesar Rp 45.000.000.000,00
- Tanah, Bangunan, serta Peralatan dan Mesin Rp 458.111.384.240,00

Dengan persentase kepemilikan Pemerintah Kota Bogor sebesar 100%, maka jumlah penyertaan modal pada PD Pasar Pakuan Jaya sesuai dengan ekuitas pada Laporan Keuangan PD Pasar Pakuan Jaya Tahun



Anggaran 2024 adalah sebesar Rp362.105.423.536,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.82
Penyertaan Modal PD Pasar Pakuan Jaya

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Saldo Awal	465.381.602.469,50	465.563.125.472,60
2	Koreksi	(110.613.577.264,50)	0,00
3	Penambah Investasi	0,00	0,00
4	Laba BUMD penambah Ekuitas	8.300.122.766,00	1.212.724.434,90
5	Pembagian laba pengurang Modal Pemda	962.724.435,00	1.394.247.438,00
6	Saldo Akhir (6 = 1 + 2 + 3 + 4 - 5)	362.105.423.536,00	465.381.602.469,50

5.3.1.3 ASET TETAP

Aset Tetap menggambarkan jumlah dan nilai perolehan Aset Tetap yang dimiliki/ dikuasai oleh Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dan 2023. Perolehan Aset Tetap Pemerintah Kota Bogor berasal dari kapitalisasi belanja modal dan/atau belanja lainnya yang diatribusikan dalam nilai Aset Tetap tahun anggaran berkenaan. Aset Tetap merupakan aset berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan digunakan dalam kegiatan operasional.

Aset Tetap
Tabel 5.3.83

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
		Tambah	Kurang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2+3-4)
1. Tanah	5.938.980.428.024,63	84.767.760.238,06	227.586.591.354,00	5.796.161.596.908,69
2. Peralatan dan Mesin	1.136.877.015.590,06	174.138.442.423,67	54.878.749.428,84	1.256.136.708.584,89
3. Gedung dan Bangunan	1.582.373.719.962,85	369.133.763.992,37	63.306.916.023,10	1.888.200.567.932,12
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.483.468.228.932,92	146.690.739.503,01	41.694.310.949,00	3.588.464.657.486,93
5. Aset Tetap Lainnya	11.314.989.293,84	12.674.429.326,15	8.900.598.235,00	15.088.820.384,99
6. KDP	224.422.793.771,34	445.372.660,06	209.284.385.606,40	15.583.780.825,00
Jumlah	12.377.437.175.575,60	787.850.508.143,32	605.651.551.596,34	12.559.636.132.122,62
7. Akumulasi Penyusutan	3.162.527.131.333,85	404.471.713.373,18	45.454.837.912,29	3.521.544.006.794,74
Nilai Buku	9.214.910.044.241,79	-	-	9.038.092.125.327,88

Mutasi Aset Tetap Pemerintah Kota Bogor selama tahun 2024, terdiri dari:

1. Penambahan yang merupakan perolehan aset tetap melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 dan perolehan lain yang sah seperti hibah, dan penerimaan fasilitas umum
2. Pengurangan yang merupakan nilai Aset Tetap yang dihapuskan
3. Karena perpindahan (*reclass*) antar Perangkat Daerah dan antar jenis karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan
4. Koreksi atas pencatatan Aset Tetap sebelumnya

Rincian Aset Tetap pada masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:



Tabel 5.3.84
Aset tetap per perangkat daerah

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(5=4/3)
1	Dinas Pendidikan	868.054.962.936,16	743.849.633.839,79	124.205.329.096,37	16,70
2	Dinas Kesehatan	253.588.634.322,50	239.541.976.249,13	14.046.658.073,37	5,86
3	Rumah Sakit Umum Daerah (PD)	556.951.121.752,49	519.444.710.706,07	37.506.411.046,42	7,22
4	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	68.510.806.962,31	61.213.301.441,02	7.297.505.521,29	11,92
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.671.797.699.150,86	5.551.697.542.628,83	120.100.156.522,03	2,16
6	Dinas Perumahan dan Permukiman	1.916.666.939.084,74	1.902.005.023.098,74	14.661.915.986,00	0,77
7	Satuan Polisi Pamong Praja	9.439.694.261,59	8.960.083.366,59	479.610.895,00	5,35
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.685.601.250,05	11.281.737.415,05	403.863.835,00	3,58
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.861.884.500,00	2.735.879.583,00	1.126.004.917,00	41,16
10	Dinas Sosial	9.571.585.070,46	9.199.258.270,46	372.326.800,00	4,05
11	Dinas Tenaga Kerja	15.318.220.175,68	15.727.118.968,46	(408.898.792,78)	(2,60)
12	Dinas Lingkungan Hidup	168.464.135.660,84	173.208.712.623,01	(4.744.576.962,17)	(2,74)
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19.580.407.828,38	18.455.852.392,38	1.124.555.436,00	6,09
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.732.493.235,04	8.610.393.735,04	122.099.500,00	1,42
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.200.416.039,68	6.139.796.039,68	60.620.000,00	0,99
16	Dinas Perhubungan	277.131.708.199,92	267.308.324.180,92	9.823.384.019,00	3,67
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	34.178.802.921,74	33.894.516.991,18	284.285.930,56	0,84
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	41.366.316.327,72	59.423.087.258,72	(18.056.770.931,00)	(30,39)
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.285.276.887,14	9.641.022.878,07	(355.745.990,93)	(3,69)
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	172.042.669.674,78	165.979.216.763,78	6.063.452.911,00	3,65
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	36.714.637.101,22	34.997.133.060,24	1.717.504.040,98	4,91
22	Dinas Arsip dan Perpustakaan	45.539.805.974,90	45.400.368.972,90	139.437.002,00	0,31
23	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	68.762.285.546,11	61.572.927.069,11	7.189.358.477,00	11,68
24	Sekretariat Daerah	123.302.762.224,00	124.027.842.381,90	(725.080.157,90)	(0,58)
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	170.113.713.845,64	169.401.925.308,20	711.788.537,44	0,42
26	Kecamatan Bogor Selatan	89.808.371.763,07	90.572.758.337,07	(764.386.574,00)	(0,84)
27	Kecamatan Bogor Timur	35.358.580.820,27	34.425.826.097,27	932.754.723,00	2,71
28	Kecamatan Bogor Tengah	43.598.810.429,83	40.861.701.057,01	2.737.109.372,82	6,70
29	Kecamatan Bogor Barat	74.798.834.355,83	71.868.953.303,43	2.929.881.052,40	4,08
30	Kecamatan Bogor Utara	49.533.083.180,69	46.936.702.740,82	2.596.380.439,87	5,53
31	Kecamatan Tanah Sereal	53.679.232.478,79	48.120.054.440,93	5.559.178.037,86	11,55
32	Inspektorat	9.169.269.136,92	8.757.334.498,61	411.934.638,31	4,70
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.373.489.167,74	12.570.135.108,86	(196.645.941,12)	(1,56)
34	Badan Keuangan dan Aset Daerah	30.326.426.664,88	16.361.221.487,17	13.965.205.177,71	85,36
35	Badan Pendapatan Daerah	48.759.609.558,48	58.392.602.656,09	(9.632.993.097,61)	(16,50)
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.956.163.560,06	9.273.404.485,93	(317.240.925,87)	(3,42)
37	PPKD	1.511.516.709.536,77	1.669.595.830.604,77	(158.079.121.068,00)	(9,47)
38	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	24.894.970.535,34	25.983.265.535,41	(1.088.295.000,07)	(4,19)
	Jumlah	12.559.636.132.122,60	12.377.437.175.575,60	182.198.956.546,98	1,47



Sedangkan Mutasi Aset Tetap Pemerintah Kota Bogor Tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.85
Mutasi Aset Tetap

URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)
Saldo per 31 Desember 2023	12.377.437.175.575,60
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal Tahun Anggaran 2024	400.293.631.049,00
Belanja Operasional yang dikapitalisasi Menjadi Aset tetap	97.607.295,00
Kewajiban kepada Pihak ketiga TA 2024 yang asetnya Telah diakui Tahun Berjalan	1.709.369.921,00
Belanja Modal yang dimutasi antar Perangkat Daerah	15.771.072.190,00
Hibah BMD tahun berjalan	5.981.817.722,00
Belanja Modal yang di reklasifikasi antar KIB	2.275.000,00
Belanja operasional (BOP) yang dikapitalisasi Menjadi Aset tetap	814.370.520,00
Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi)	89.750.574.999,51
Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi)	206.818.988.748,49
Reklasifikasi dari aset lainnya (inventarisasi) :	
- Reklasifikasi dari Aset Rusak Berat	852.338.861,32
- Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain (Penelusuran)	3.958.267.356,00
Hibah BMD sebelum Tahun 2024	21.973.414.791,00
BMD belum tercatat (inventarisasi)	75.727.896.094,00
Jumlah Mutasi Tambah	823.751.624.547,32
Mutasi Kurang :	
Belanja Modal yang dimutasi antar Perangkat Daerah	15.771.072.190,00
Belanja Modal yang di reklasifikasi antar KIB	2.275.000,00
Belanja Modal yang dikapitalisasi Menjadi aset ekstrakomtabel	22.925.358.059,00
Belanja Modal yang direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud	-
Belanja Modal tidak menjadi aset tetap	569.486.579,00
Kewajiban kepada pihak ketiga th 2024 yg asetnya telah diakui di tahun 2023	18.783.779.409,00
Belanja Modal yang direklasifikasikan menjadi Aset lain lain	-
Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi)	89.750.574.999,51
Reklasifikasi menjadi Aset Ekstrakomtabel (Inventarisasi)	10.591.098,00
Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi)	206.818.988.748,49
Reklasifikasi menjadi aset lainnya (Inventarisasi) :	
- Reklasifikasi menjadi Aset Rusak Berat	14.703.611.578,86
- Reklasifikasi menjadi Aset Lain-Lain (Penelusuran)	42.486.563,00
Reklasifikasi menjadi Aset Kemitraan dengan Pihak ke Tiga	-
BMD belum tercatat (inventarisasi)	
Koreksi Nilai perolehan	-
Penghapusan BMD (inventarisasi)	51.440.364.534,12
Reklasifikasi Kondisi BMD (inventarisasi)	1.375.637.190,36
BMD Tidak menjadi Aset Tetap (Inventarisasi)	-
Reklas ke properti investasi	219.358.442.051,00
Jumlah Mutasi Kurang	641.552.668.000,34
Total Mutasi	182.198.956.546,98
Saldo per 31 Desember 2024	12.559.636.132.122,60
Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2024	(3.521.544.006.794,74)
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	9.038.092.125.327,88

Perubahan nilai aset tetap adalah sebesar Rp182.198.956.546,98 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan nilai Aset Tetap sebesar Rp823.751.624.547,32 terdiri dari :
 - a. Realisasi Belanja Modal adalah sebesar Rp400.293.631.049,00 terdiri dari :
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp149.929.407.529,00
 - ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp11.432.207.074,00
 - iii. Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp39.266.988.308,00
 - iv. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp6.155.296.666,00
 - v. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp127.725.304.235,00
 - vi. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp11.389.368.806,00
 - vii. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp126.941.000,00
 - viii. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp560.286.260,00
 - ix. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp1.219.657.998,00
 - x. Dinas Sosial sebesar Rp182.756.400,00



- xi. Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp52.010.160,00
- xii. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp13.755.247.882,00
- xiii. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp737.063.200,00
- xiv. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp122.099.500,00
- xv. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp60.620.000,00
- xvi. Dinas Perhubungan sebesar Rp747.526.740,00
- xvii. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp15.598.270,00
- xviii. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp16.399.000,00
- xix. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp127.500.000,00
- xx. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp1.910.091.300,00
- xxi. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp107.389.000,00
- xxii. Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp158.745.800,00
- xxiii. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp7.440.396.307,00
- xxiv. Sekretariat Daerah sebesar Rp3.253.902.356,00
- xxv. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp1.505.614.400,00
- xxvi. Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp1.949.233.196,00
- xxvii. Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp1.056.952.926,00
- xxviii. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp2.846.644.491,00
- xxix. Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp2.698.120.000,00
- xxx. Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp2.494.548.216,00
- xxxi. Kecamatan Tanah Sereal sebesar Rp5.630.783.395,00
- xxxii. Inspektorat sebesar Rp916.932.000,00
- xxxiii. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp73.808.340,00
- xxxiv. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp3.184.165.294,00
- xxxv. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp811.325.000,00
- xxxvi. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur sebesar Rp375.500.000,00
- xxxvii. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp257.200.000,00
- b. Belanja Modal yang di reklas antar KIB sebesar Rp2.275.000,00 yaitu berupa Dinas Pendidikan sebesar Rp2.275.000,00
- c. Belanja Operasional yang dikapitalisasi Menjadi Aset tetap sebesar Rp814.370.520,00 terdiri dari :
 - i. Dinas Kesehatan sebesar Rp511.817.570
 - ii. Dinas Sosial sebesar Rp41.152.000
 - iii. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp58.238.000
 - iv. Inspektorat sebesar Rp31.881.450
 - v. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp171.281.500
- d. Belanja modal yang dimutasikan dari perangkat daerah lain sebesar Rp15.771.072.190,00 terdiri dari :
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp3.680.713.000
 - ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp7.024.067.524
 - iii. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp688.200
 - iv. Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp1.074.092.000
 - v. Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp1.201.575
 - vi. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp2.510.726.291



- vii. Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp194.000.000
- viii. Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp888.404.600
- ix. PPKD sebesar Rp397.179.000
- e. Hibah tahun perolehan berjalan 2024 sebesar Rp5.981.817.722,00 terdiri dari :
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp51.215.916,00
 - ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp145.295.500,00
 - iii. Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp5.300.000,00
 - iv. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp41.049.000,00
 - v. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp4.186.097.000,00
 - vi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp111.842.000,00
 - vii. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp139.500.000,00
 - viii. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp17.806.306,00
 - ix. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp14.972.000,00
 - x. PPKD sebesar Rp1.268.740.000,00
- f. Belanja Operasi yang dikapitalisasi sebesar Rp97.607.295,00 terdiri dari Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp97.607.295,00
- g. Kewajiban pihak ketiga yang asetnya telah diakui ditahun 2024 sebesar Rp1.709.369.921,00 terdiri dari Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp1.709.369.921
- h. Mutasi dari OPD lain (Inventarisasi) sebesar Rp53.849.458.595,51 terdiri dari :
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp2.768.366.491,79
 - ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp5.523.458.058,00
 - iii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.415.467.500,00
 - iv. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp979.876.800,00
 - v. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp430.284.895,00
 - vi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp205.000.000,00
 - vii. Dinas Sosial sebesar Rp67.718.400,00
 - viii. Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp41.150.000,00
 - ix. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp6.837.567.808,00
 - x. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp431.426.923,00
 - xi. Dinas Perhubungan sebesar Rp9.578.088.654,00
 - xii. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp532.747.930,56
 - xiii. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp434.600.000
 - xiv. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp362.782.000
 - xv. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp723.572.649,00
 - xvi. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp2.785.646.783,00
 - xvii. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp83.125.000,00
 - xviii. Sekretariat Daerah sebesar Rp205.000.000,00
 - xix. Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp1.475.268.444,00
 - xx. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp135.930.000,00
 - xxi. Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp65.806.052,40
 - xxii. Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp2.724.304,87
 - xxiii. Kecamatan Tanah Sereal sebesar Rp21.359.642,86
 - xxiv. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp14.132.556.377,00
 - xxv. PPKD sebesar Rp4.609.933.882,00
- i. Reklas antar KIB (Inventarisasi) sebesar Rp206.818.988.748,49 terdiri dari :
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp773.092.032,21
 - ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp266.041.200,00



- iii. Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp48.658.504.434,00
- iv. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp148.705.699.712,28
- v. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp254.199.870,00
- vi. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp69.806.500,00
- vii. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp7.943.590.000
- viii. Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp47.950.000,00
- ix. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp100.105.000,00
- j. Reklas ke Aset Rusak Berat (Inventarisasi) sebesar Rp852.338.861,32 terdiri dari :
 - i. Dinas Kesehatan sebesar Rp14.987.250,00
 - ii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp20.307.340,00
 - iii. Dinas Sosial sebesar Rp80.700.000,00
 - iv. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp263.600.000,00
 - v. Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp1.448.000,00
 - vi. Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp1.500.624,00
 - vii. Kecamatan Tanah Sereal sebesar Rp4.535.000,00
 - viii. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp310.872.427,32
 - ix. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp40.338.220,00
 - x. PPKD sebesar Rp114.050.000,00
- k. Reklas dari aset lain-lain sebesar Rp3.958.267.356,00 terdiri dari :
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp468.000,00
 - ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp114.750.000,00
 - iii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp192.900.000,00
 - iv. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp3.257.185.000,00
 - v. Sekretariat Daerah sebesar Rp392.964.356,00
- l. Hibah aset tahun perolehan sebelum 2024 (Inventarisasi) sebesar Rp21.973.414.791,00 terdiri dari :
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp183.486.240,00
 - ii. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp748.599.775,00
 - iii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp11.060.227.303,00
 - iv. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp357.602.180,00
 - v. Dinas Perhubungan sebesar Rp570.541.815,00
 - vi. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp5.530.668.962,00
 - vii. PPKD sebesar Rp3.522.288.516,00
- m. Aset belum tercatat (Inventarisasi) sebesar Rp75.727.896.094,00 terdiri dari :
 - i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.573.175.568,00
 - ii. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp1.504.524.700,00
 - iii. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp11.900.000,00
 - iv. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp3.393.957.826,00
 - v. PPKD sebesar Rp68.244.338.000,00
- 2. Pengurangan nilai Aset Tetap sebesar Rp641.552.668.000,34 terdiri dari :
 - a. Dropping antar SKPD (BM) sebesar Rp15.771.072.190,00 terdiri dari :
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp3.680.713.000,00
 - ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp7.025.269.099,00
 - iii. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp688.200,00
 - iv. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp194.000.000,00
 - v. Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp7.432.000,00
 - vi. Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp1.066.660.000,00
 - vii. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp2.510.726.291,00



- viii. Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp888.404.600,00
- ix. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp397.179.000,00
- b. Reklasifikasi antar KIB (BM) sebesar Rp2.275.000,00 yaitu pada Dinas Pendidikan sebesar Rp2.275.000,00
- c. Belanja Modal yang dikapitalisasi Menjadi aset ekstrakomtabel Rp22.925.358.059,00 terdiri dari :
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp22.373.051.040
 - ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp114.752.936,00
 - iii. Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp5.300.000,00
 - iv. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp197.753.407,00
 - v. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp6.193.800,00
 - vi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp9.879.000,00
 - vii. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp29.445.000,00
 - viii. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp970.000,00
 - ix. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp688.200,00
 - x. Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp2.733.700,00
 - xi. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp125.370.000,00
 - xii. Kecamatan Tanah Sereal sebesar Rp14.375.000,00
 - xiii. Inspektorat sebesar Rp30.624.600,00
 - xiv. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp14.221.376,00
- d. Belanja modal yang tidak jadi aset sebesar Rp569.486.579,00 terdiri dari :
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp7.177.000,00
 - ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp18.000.000,00
 - iii. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp37.394.100,00
 - iv. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp172.224.509,00
 - v. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp15.598.270,00
 - vi. Sekretariat Daerah sebesar Rp18.200.000,00
 - vii. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp235.079.400,00
 - viii. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp2.808.300,00
 - ix. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp63.005.000,00
- e. Kewajiban pihak ketiga yang asetnya telah diakui ditahun 2024 sebesar Rp18.783.779.409,00 terdiri dari :
 - i. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp268.422.114,00
 - ii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp16.617.803.295,00
 - iii. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp57.054.000,00
 - iv. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp1.840.500.000,00
- f. Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi) Rp89.750.574.999,51 terdiri dari :
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp2.550.352.280,10
 - ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp3.364.197.964
 - iii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp5.727.138.800,00
 - iv. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp14.008.200,00
 - v. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp126.428.572,00
 - vi. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp6.837.567.808,03,00
 - vii. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp306.700.000,00
 - viii. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp2.276.578.528,00
 - ix. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp479.318.750,00



- x. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp260.380.000,00
- xi. Sekretariat Daerah sebesar Rp3.982.182.921,40
- xii. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp433.376.462,56
- xiii. Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp2.721.051.770,00
- xiv. Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp1.600.668.222,00
- xv. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp135.930.000,00
- xvi. Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp28.045.000,00
- xvii. Kecamatan Tanah Sereal sebesar Rp83.125.000,00
- xviii. Inspektorat sebesar Rp506.254.211,69
- xix. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp2.410.232.524,73
- xx. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp13.466.707.627,00
- xxi. PPKD sebesar Rp42.440.330.358,00
- g. Aset yang dikapitalisasi (Inventarisasi) sebesar Rp10.591.098,00 yaitu Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp10.591.098,00
- h. Reklas antar KIB (Inventarisasi) sebesar Rp206.818.988.748,49 terdiri dari :
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp773.092.032,21
 - ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp266.041.200,00
 - iii. Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp48.658.504.434,00
 - iv. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp148.705.699.712,28
 - v. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp254.199.870,00
 - vi. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp69.806.500,00
 - vii. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp7.943.590.000,00
 - viii. Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp47.950.000,00
 - ix. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp100.105.000,00
- i. Reklas ke Aset Rusak Berat (Inventarisasi) sebesar Rp14.703.611.578,86 terdiri dari :
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp3.207.764.872,32
 - ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp115.661.753,63
 - iii. Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp1.690.792.546,29
 - iv. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp849.585.319,71
 - v. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp553.612.328,97
 - vi. Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp221.238.952,78
 - vii. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp3.902.154.274,17
 - viii. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp28.643.124,00
 - ix. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp366.709.240,93
 - x. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp1.175.531.742,02
 - xi. Sekretariat Daerah sebesar Rp565.516.949,50
 - xii. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp106.726.818,18
 - xiii. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp177.112.000,00
 - xiv. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp884.683.701,88
 - xv. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp531.396.029,61
 - xvi. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur sebesar Rp326.481.925,87
- j. Reklas dari aset lain-lain sebesar Rp42.486.563,00 terdiri dari :
 - i. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp28.165.000,00
 - ii. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp14.321.563,00
- k. Penghapusan BMD dan Double Catat sebesar Rp51.440.364.534,12 terdiri dari :
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp1.150.000,00
 - ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp70.750.000,00



- iii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp5.613.944.900,00
- iv. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp2.025.126.270,00
- v. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp49.450.000,00
- vi. Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp280.820.000,00
- vii. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp16.571.000,00
- viii. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp12.385.713.000,00
- ix. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp93.342.281,12
- x. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp52.542.611,00
- xi. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur sebesar Rp366.259.000,00
- xii. PPKD sebesar Rp30.388.395.472,00
- xiii. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp96.300.000,00
- l. Reklasifikasi kondisi asset tetap (Inventarisasi) sebesar Rp1.375.637.190,36 terdiri dari :
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp70.331.000,00
 - ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp11.293.150,00
 - iii. Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp69.784.715,00
 - iv. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp26.991.325,00
 - v. Sekretariat Daerah sebesar Rp11.047.000,00
 - vi. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp1.186.190.000,07
- m. Reklas aset tetap tanah menjadi properti investasi tanah sebesar Rp219.358.442.051,00 terdiri dari :
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp517.788.888,00
 - ii. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp1.294.880.850,00
 - iii. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp18.569.541.750,00
 - iv. Dinas Perhubungan sebesar Rp1.072.773.190,00
 - v. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp3.845.478.403,00
 - vi. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp334.162.830,00
 - vii. PPKD sebesar Rp193.723.816.140,00

5.3.1.3.1 Tanah

Saldo Aset Tetap berupa Tanah Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.796.161.596.908,69 dan Rp5.938.980.428.024,63 mengalami penurunan nilai sebesar Rp142.818.831.115,94 atau -2,40%.

Tanah yang dikelompokkan sebagai Aset Tetap adalah Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Berikut tabel perbandingan Aset Tetap Tanah Per Perangkat Daerah pada periode Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.



Tabel 5.3.86
Tanah per perangkat daerah

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2-3)	(6=4/3)
1	Dinas Pendidikan	127.657.803.933,34	127.116.486.361,28	541.317.572,06	0,43
2	Dinas Kesehatan	31.924.855.450,00	29.516.095.356,00	2.408.760.094,00	8,16
3	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	367.320.000,00	367.320.000,00	-	-
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.905.396.615.386,00	2.904.688.641.886,00	707.973.500,00	0,02
5	Dinas Perumahan dan Permukiman	1.005.437.408.524,00	999.134.674.714,00	6.302.733.810,00	0,63
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	462.013.000,00	462.013.000,00	-	-
7	Dinas Sosial	1.967.398.000,00	1.934.598.000,00	32.800.000,00	1,70
8	Dinas Tenaga Kerja	6.553.399.812,00	6.553.399.812,00	-	-
9	Dinas Lingkungan Hidup	38.143.413.940,00	56.712.955.690,00	(18.569.541.750,00)	(32,74)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	417.239.114,00	417.239.114,00	-	-
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	917.985.750,00	917.985.750,00	-	-
12	Dinas Perhubungan	20.845.615.397,00	21.318.403.587,00	(472.788.190,00)	(2,22)
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	11.259.619.914,35	11.919.968.130,35	(660.348.216,00)	(5,54)
14	Dinas Pemuda dan Olahraga	93.100.320.000,00	93.100.320.000,00	-	-
15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5.177.389.588,00	5.177.389.588,00	-	-
16	Dinas Arsip dan Perpustakaan	964.254.062,00	964.254.062,00	-	-
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	20.444.181.075,00	20.695.218.905,00	(251.037.830,00)	(1,21)
18	Sekretariat Daerah	28.642.503.804,00	28.642.503.804,00	-	-
19	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	47.348.887.770,00	47.348.887.770,00	-	-
20	Kecamatan Bogor Selatan	27.732.809.249,00	30.453.861.019,00	(2.721.051.770,00)	(8,93)
21	Kecamatan Bogor Timur	1.756.086.324,00	1.795.486.102,00	(39.399.778,00)	(2,19)
22	Kecamatan Bogor Tengah	4.613.591.659,00	4.613.591.659,00	-	-
23	Kecamatan Bogor Barat	12.903.827.468,00	12.903.827.468,00	-	-
24	Kecamatan Bogor Utara	8.315.430.354,00	8.315.430.354,00	-	-
25	Kecamatan Tanah Sareal	5.550.973.150,00	5.634.098.150,00	(83.125.000,00)	(1,48)
26	Inspektorat	133.800.000,00	133.800.000,00	-	-
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.920.000.000,00	1.920.000.000,00	-	-
28	Badan Keuangan dan Aset Daerah	317.196.000,00	317.196.000,00	-	-
29	Badan Pendapatan Daerah	798.624.000,00	798.624.000,00	-	-
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.745.600.000,00	1.745.600.000,00	-	-
31	PPKD	1.383.103.734.469,00	1.513.118.858.027,00	(130.015.123.558,00)	(8,59)
32	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	241.699.716,00	241.699.716,00	-	-
Jumlah		5.796.161.596.908,69	5.938.980.428.024,63	(142.818.831.115,94)	(2,40)

Mutasi Aset Tetap berupa Tanah Pemerintah Kota Bogor Tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut :



Tabel 5.3.87
Rincian Mutasi Tanah

URAIAN	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)
Saldo per 31 Desember 2023	5.938.980.428.024,63
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal Tahun Anggaran 2024	2.477.717.100,00
Belanja Modal yang dimutasi antar Perangkat Daerah	813.680.000,00
Hibah BMD tahun berjalan	4.186.097.000,00
Mutasi/ Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi)	11.765.901.706,00
Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi)	307.232.720,06
BMD belum tercatat (inventarisasi)	69.548.963.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	89.099.591.526,06
Mutasi Kurang :	
Belanja Modal yang dimutasi antar Perangkat Daerah	813.680.000,00
Kewajiban kepada pihak ketiga th 2024 yg asetnya telah diakui di tahun 2023	57.054.000,00
Mutasi/ Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi)	11.765.901.706,00
Penghapusan BMD (inventarisasi)	4.331.831.288,00
Reklas ke properti investasi tanah	214.949.955.648,00
Jumlah Mutasi Kurang	231.918.422.642,00
Total Mutasi	(142.818.831.115,94)
Saldo per 31 Desember 2024	5.796.161.596.908,69

Perubahan nilai aset tetap tanah senilai Rp142.818.831.115,94 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penambahan nilai tanah sebesar Rp89.099.591.526,06 terdiri dari :
 - a. Realisasi Belanja Modal adalah sebesar Rp2.477.717.100,00 terdiri dari :
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp813.680.000,00
 - ii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp560.621.000,00
 - iii. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp1.103.416.100,00
 - b. Belanja modal yang dimutasikan dari perangkat daerah lain sebesar Rp813.680.000,00 terdiri yaitu Dinas Pendidikan sebesar Rp813.680.000
 - c. Hibah tahun perolehan berjalan 2024 sebesar Rp4.186.097.000,00 yaitu Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp4.186.097.000
 - d. Mutasi dari OPD lain (Inventarisasi) sebesar Rp11.765.901.706,00 terdiri dari :
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp670.129.440,00
 - ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp2.592.645.608,00
 - iii. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp979.876.800,00
 - iv. Dinas Sosial sebesar Rp32.800.000,00
 - v. Dinas Perhubungan sebesar Rp599.985.000,00
 - vi. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp83.125.000,00
 - vii. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp4.331.831.288,00
 - viii. PPKD sebesar Rp2.475.508.570,00
 - e. Reklas antar KIB (Inventarisasi) sebesar Rp307.232.720,06 terdiri dari :



- i. Dinas Pendidikan sebesar Rp79.226.460,06
- ii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp147.352.500,00
- iii. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp80.653.760,00
- f. Aset belum tercatat (Inventarisasi) sebesar Rp69.548.963.000,00 terdiri dari :
 - i. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp1.304.625.000,00
 - ii. PPKD sebesar Rp68.244.338.000,00
- 2. Pengurangan nilai tanah sebesar Rp231.918.422.642,00 terdiri dari :
 - a. Dropping antar SKPD (BM) sebesar Rp813.680.000,00 yaitu Dinas Pendidikan sebesar Rp813.680.000
 - b. Kewajiban pihak ketiga yang asetnya telah diakui ditahun 2024 sebesar Rp57.054.000,00 yaitu pada Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp57.054.000
 - c. Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi) Rp11.765.901.706,00 terdiri dari :
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp503.929.440,00
 - ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp183.885.514,00
 - iii. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp660.348.216,00
 - iv. Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp2.721.051.770,00
 - v. Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp39.399.778,00
 - vi. Kecamatan Tanah Sereal sebesar Rp83.125.000,00
 - vii. PPKD sebesar Rp7.574.161.988,00
 - d. Penghapusan BMD dan Double Catat sebesar Rp4.331.831.288,00 yaitu pada PPKD sebesar Rp4.331.831.288,00
 - e. Reklas aset tetap tanah menjadi properti investasi tanah sebesar Rp214.949.955.648,00 terdiri dari :
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp517.788.888,00
 - ii. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp1.294.880.850,00
 - iii. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp18.569.541.750,00
 - iv. Dinas Perhubungan sebesar Rp1.072.773.190,00
 - v. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp334.162.830,00
 - vi. PPKD sebesar Rp193.160.808.140,00

Sampai dengan 31 Desember 2024 dari total perumahan di Kota Bogor, sebanyak 28 perumahan dengan 38 Berita Acara Serah Terima telah diserahkan PSU ke Pemerintah Kota Bogor, sedangkan sebanyak 261 perumahan belum menyerahkan PSU. Dari 299 perumahan, sebanyak 28 PSU telah dicatat sebagai aset Pemerintah Kota Bogor dan sebanyak 261 PSU belum dicatat. Rincian 28 PSU yang sudah diserahkan terdapat pada lampiran dan rincian PSU yang belum diserahkan terdapat pada lampiran 17.

5.3.1.4.1.1. Tanah yang Telah Bersertifikat

Dari total 3.940 bidang tanah pada Pemerintah Kota Bogor telah dilakukan pensertifikatan tanah sebagai upaya pengamanan Barang Milik Daerah dengan total 1.196 bidang tanah dengan total nilai tanah Rp1.919.554.780.981,17. Pensertifikatan tanah hingga saat ini sedang berproses dengan total 299 bidang tanah dengan nilai tanah Rp 442.183.840.608,00. Rincian perkembangan pensertifikatan tanah pada Pemerintah Kota Bogor sebagaimana pada tabel di bawah ini.



Tabel 5.3.88
Bidang Tanah yang Bersertifikat

Uraian	Jumlah Bidang	Luas Bidang	Nilai Perolehan
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,00	1.600,00	1.273.600.000,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1,00	780,00	462.013.000,00
Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1,00	6.210,00	317.196.000,00
Badan Pendapatan Daerah	1,00	6.210,00	798.624.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	1,00	4.734,00	1.920.000.000,00
Dinas Arsip Dan Perpustakaan	2,00	1.000,00	964.254.062,00
Dinas Kesehatan	45,00	55.481,00	30.782.452.317,00
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	6,00	89.039,00	18.495.518.905,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian	4,00	3.848,00	10.974.619.914,35
Dinas Lingkungan Hidup	24,00	376.093,00	38.289.328.144,54
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	3,00	2.232,00	227.489.588,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	280,00	416.445,45	270.181.286.219,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2,00	1.362,00	417.239.114,00
Dinas Pemuda Dan Olahraga	3,00	90.499,00	93.100.320.000,00
Dinas Pendidikan	223,00	400.508,00	119.921.897.459,28
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	2,00	1.155,00	917.985.750,00
Dinas Perhubungan	5,00	28.643,00	21.020.865.637,00
Dinas Perumahan Dan Permukiman	385,00	535.005,00	348.189.895.566,00
Dinas Sosial	2,00	2.676,00	1.967.398.000,00
Dinas Tenaga Kerja	2,00	2.356,00	6.553.399.812,00
Inspektorat	1,00	535,00	133.800.000,00
Kecamatan Bogor Barat	17,00	15.051,00	8.064.200.047,00
Kecamatan Bogor Selatan	23,00	47.131,00	21.329.622.086,00
Kecamatan Bogor Tengah	9,00	4.268,00	2.932.333.809,00
Kecamatan Bogor Timur	5,00	2.869,00	692.674.432,00
Kecamatan Bogor Utara	11,00	8.361,00	5.389.458.610,00
Kecamatan Tanah Sareal	26,00	14.964,00	3.837.484.987,00
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	104,00	486.620,00	836.880.616.672,00
Rumahsakit Umum Daerah (Blud)	1,00	30.610,00	367.320.000,00
Sekretariat Daerah	3,00	17.606,00	25.802.999.080,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	3,00	15.377,00	47.348.887.770,00
Total	1.196,00	2.669.268,45	1.919.554.780.981,17

Tabel 5.3.89
Bidang Tanah yang Dalam Proses Pensertifikatan

Uraian	Jumlah Bidang	Luas Bidang	Nilai Perolehan
Dinas Kesehatan	2,00	1.871,00	818.024.016,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	283,00	550.417,00	303.531.337.152,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	1,00	964,00	241.699.716,00
Dinas Pendidikan	1,00	6.918,00	3.469.191.000,00
Kecamatan Bogor Barat	1,00	400,00	76.500.000,00
Kecamatan Tanah Sareal	1,00	400,00	48.000.000,00
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	9,00	43.785,00	131.159.584.000,00
Sekretariat Daerah	1,00	545,00	2.839.504.724,00
Total	299,00	605.300,00	442.183.840.608,00



Tabel 5.3.90
Bidang Tanah yang Belum Bersertifikat

Uraian	Jumlah Bidang	Luas Bidang	Nilai Perolehan
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,00	707,00	472.000.000,00
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	2,00	12.488,00	2.282.825.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian	1,00	1.000,00	285.000.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	6,00	174.897,00	18.423.627.545,46
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	1,00	667,00	4.949.900.000,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.830,00	5.147.290,00	2.331.683.992.015,00
Dinas Perhubungan	1,00	7.000,00	897.522.950,00
Dinas Perumahan Dan Permukiman	304,00	942.233,00	658.542.393.808,00
Dinaskesehatan	3,00	809,00	324.379.117,00
Dinaspendidikan	9,00	16.274,00	4.784.504.362,06
Kecamatan Bogor Barat	9,00	28.175,00	5.425.823.280,00
Kecamatan Bogor Selatan	8,00	27.388,00	6.403.187.163,00
Kecamatan Bogor Tengah	4,00	2.288,00	435.770.000,00
Kecamatan Bogor Timur	1,00	397,00	1.010.312.200,00
Kecamatan Bogor Utara	13,00	16.375,00	2.322.747.190,00
Kecamatan Tanah Sareal	8,00	23.420,00	2.904.604.400,00
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	244,00	572.737,00	612.556.173.225,00
Total	2.445,00	6.974.145,00	3.653.704.762.255,52

5.3.1.4.1.2. Aset Tanah yang Perlu Perhatian Khusus

Sampai dengan 31 Desember 2024 dari total perumahan di Kota Bogor, sebanyak 28 perumahan dengan 38 Berita Acara Serah Terima telah diserahkan PSU ke Pemerintah Kota Bogor, sedangkan sebanyak 261 perumahan belum menyerahkan PSU. Dari 299 perumahan, sebanyak 28 PSU telah dicatat sebagai aset Pemerintah Kota Bogor dan sebanyak 261 PSU belum dicatat. Rincian 28 PSU yang sudah diserahkan terdapat pada lampiran dan rincian PSU yang belum diserahkan terdapat pada lampiran 17.

a. Double Pencatatan Tanah SDN Kedung Badak I, Kedung Badak II dan SDN Sempur Kidul

Tanah SDN Kedung Badak I yang berlokasi di Jalan Kolonel Martadisastra No. 3 Kel. Kedung Badak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor tercatat di Neraca Pemerintah Kota Bogor dengan luas 2.037 dan No Sertifikat Hak Pakai 26 Kedung Badak Tanggal 6 Desember 2021 dengan nilai perolehan Rp228.525.000 masuk ke pencatatan Aset Kementerian Pertahanan Republik Indonesia c.q TNI-AD cq Kodam III/Slw dengan Sertifikat Hak Pakai No. 5 Tahun 1999.

Tanah SDN Kedung Badak II yang berlokasi di Jalan Kolonel Martadisastra No. 46 Kel. Kedung Badak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor tercatat di neraca Pemerintah Kota Bogor dengan luas 1.396 dan No Sertifikat Hak Pakai 27 Kedung Badak Tanggal 14 Desember 2021 dengan nilai perolehan Rp110.505.500 masuk ke pencatatan Aset Kementerian Pertahanan Republik Indonesia c.q TNI-AD cq Kodam III/Slw dengan Sertifikat Hak Pakai No. 5 Tahun 1999.

Tanah SDN Sempur Kidul yang berlokasi di Jalan Sempur Kidul No. 40 Kel. Sempur Kec. Bogor Tengah Kota Bogor tercatat di Neraca Pemerintah Kota Bogor dengan luas 1.494 dan No. Sertifikat Hak Pakai 15 Sempur Tanggal 23 September 2019 dengan nilai perolehan Rp114.959.500 masuk ke pencatatan Aset Kementerian Pertahanan Republik Indonesia c.q TNI-AD cq Kodam III/Slw dengan Sertifikat Hak Pakai No. 3 Tahun 1998.



Dalam Permendagri No 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 19 Tahun Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada pasal 433 dimana disebutkan Penghapusan BMD terkait dengan masalah ini adalah dengan melalui mekanisme putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.

Menanggapi Permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah Kota Bogor telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Mengirimkan Surat Pada BPN melalui Surat Kepala BKAD Nomor 000.2.3.2/2502-Bid.BMD tanggal 24 Juni 2024 perihal Permohonan Konfirmasi yang pada intinya menanyakan konfirmasi tertulis terkait status sertifikat Barang Milik Daerah(BMD) dimaksud dengan jawaban Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor No HP.03.01/3296-32.71/VIII/2024 Tanggal 20 Agustus 2024 Hal Permohonan Konfirmasi yang pada intinya memohon konfirmasi dengan kondisi sekarang kronologis bidang tanah tersebut dan menanyakan apakah termasuk asset yang disita/diblokir;
2. Bahwa menjawab surat BPN Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor No HP.03.01/3296-32.71/VIII/2024 Tanggal 20 Agustus 2024 Hal Permohonan Konfirmasi melalui Surat BKAD Nomor 000.2.3.2/4953-Bid.BMD tanggal 14 Oktober 2025 terkait Tanggapan atas Permohonan Konfirmasi yang pada intinya menjelaskan terkait kronologis pensertipikatan melalui program PTSL dan info pencatatan Aset Tersebut Dalam KIB;
3. Bahwa telah dilaksanakan rapat untuk membahas permasalahan tumpang tindih sertipikat melalui Surat Undangan Kepala BKAD Nomor. 500.16.6.4/5923-Bid.BMD Tanggal 24 Desember 2025 perihal undangan Rapat yang dihadiri oleh unsur Komandan Korem 061/Suryakencana dan unsur Zibang Kota Bogor dan isi notulensi antara lain menjelaskan terkait mekanisme penghapusan sertipikat Pemerintah Kota Bogor yang tumpang tindih dengan Sertipikat an Departemen Pertanahan Cq. Tentara Nasional Angkatan Darat Komandan Daerah Militer III/Siliwangi yang antara lain Sertipikat Hak Pakai No 27/Kedung Badak, Sertipikat Hak Pakai No 15/Sempur dan Sertipikat No. 27/ Kelurahan Sempur secara aturan dalam Permendagri No 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 19 Tahun Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada pasal 433 dimana disebutkan Penghapusan BMD terkait dengan masalah ini yaitu dengan melalui mekanisme putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, namun mengingat permasalahan adalah antar instansi pemerintah hal ini akan menjadi bahan diskusi lebih lanjut dengan BPK; Unsur Komandan Korem 061/Suryakencana mengatakan apabila harus melalui persidangan perlu mempersiapkan anggaran yang belum direncanakan pada tahun ini.



5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.256.136.716.584,89 dan Rp1.136.877.015.590,06 mengalami peningkatan sebesar Rp119.259.700.994,83 atau 10,49%.

Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Adapun rincian peralatan mesin per perangkat daerah sebagai berikut:

Tabel 5.3.91
Peralatan Mesin Per Perangkat Daerah

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Dinas Pendidikan	176.929.378.201,09	161.291.953.069,87	15.637.425.131,22	9,70
2	Dinas Kesehatan	126.470.560.094,50	118.539.697.859,13	7.930.862.235,37	6,69
3	Rumah Sakit Umum Daerah (PD)	277.764.492.813,44	240.258.081.767,02	37.506.411.046,42	15,61
4	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	55.460.282.818,31	48.124.977.297,02	7.335.305.521,29	15,24
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	59.737.136.034,01	39.692.763.374,98	20.044.372.659,03	50,50
6	Dinas Perumahan dan Permukiman	27.719.365.292,03	25.780.796.752,03	1.938.568.540,00	7,52
7	Satuan Polisi Pamong Praja	8.811.857.261,59	8.282.796.366,59	529.060.895,00	6,39
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.680.073.750,05	11.276.209.915,05	403.863.835,00	3,58
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.813.475.772,00	1.941.479.894,00	871.995.878,00	44,91
10	Dinas Sosial	4.796.652.467,46	4.492.044.067,46	304.608.400,00	6,78
11	Dinas Tenaga Kerja	6.237.872.274,68	6.365.951.067,46	(128.078.792,78)	(2,01)
12	Dinas Lingkungan Hidup	97.326.296.125,34	85.111.309.719,51	12.214.986.405,83	14,35
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.270.972.630,38	15.146.417.194,38	1.124.555.436,00	7,42
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.127.435.471,04	4.005.335.971,04	122.099.500,00	3,05
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.538.803.139,68	4.478.183.139,68	60.620.000,00	1,35
16	Dinas Perhubungan	51.349.526.123,21	50.565.578.594,21	783.947.529,00	1,55
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	34.167.819.139,74	33.883.533.209,18	284.285.930,56	0,84
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	14.656.456.616,11	14.568.239.616,11	88.217.000,00	0,61
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.285.276.887,14	9.641.022.878,07	(355.745.990,93)	(3,69)
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	4.819.194.896,78	4.286.410.947,78	532.783.949,00	12,43
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6.924.600.858,90	7.672.035.400,92	(747.434.542,02)	(9,74)
22	Dinas Arsip dan Perpustakaan	9.607.991.649,55	9.548.008.649,55	59.983.000,00	0,63
23	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	14.626.017.829,11	14.606.274.830,11	19.742.999,00	0,14
24	Sekretariat Daerah	60.178.262.571,00	58.438.404.145,90	1.739.858.425,10	2,98
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	42.864.401.636,64	42.181.893.099,20	682.508.537,44	1,62
26	Kecamatan Bogor Selatan	10.758.878.672,35	9.495.208.672,35	1.263.670.000,00	13,31
27	Kecamatan Bogor Timur	7.502.970.236,08	6.650.118.661,08	852.851.575,00	12,82
28	Kecamatan Bogor Tengah	8.378.906.173,81	7.682.075.091,99	696.831.081,82	9,07
29	Kecamatan Bogor Barat	9.555.698.774,74	8.545.014.762,34	1.010.684.012,40	11,83
30	Kecamatan Bogor Utara	9.026.160.481,30	8.403.060.552,43	623.099.928,87	7,42
31	Kecamatan Tanah Sereal	8.938.498.439,03	7.626.478.796,17	1.312.019.642,86	17,20
32	Inspektorat	5.761.051.760,92	5.349.117.122,61	411.934.638,31	7,70
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.424.119.867,74	6.620.765.808,86	(196.645.941,12)	(2,97)
34	Badan Keuangan dan Aset Daerah	10.888.301.884,88	10.428.000.959,17	460.300.925,71	4,41
35	Badan Pendapatan Daerah	18.623.478.915,48	14.789.764.386,09	3.833.714.529,39	25,92
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.870.744.648,06	5.821.726.573,93	49.018.074,13	0,84
37	PPKD	5.562.594.305,38	4.516.888.305,38	1.045.706.000,00	23,15
38	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	19.681.102.071,34	20.769.397.071,41	(1.088.295.000,07)	(5,24)
	Jumlah	1.256.136.708.584,89	1.136.877.015.590,06	119.259.692.994,83	10,49

Mutasi Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Pemerintah Kota Bogor tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:



Tabel 5.3.92
Mutasi Aset Tetap Peralatan Mesin

URAIAN	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)
Saldo per 31 Desember 2023	1.136.877.015.590,06
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal Tahun Anggaran 2024	133.226.642.367,00
Kewajiban kepada Pihak ketiga TA 2024 yang asetnya Telah diakui Tahun Berjalan	1.709.369.921,00
Belanja Modal yang dimutasi antar Perangkat Daerah	8.064.741.555,00
Hibah BMD tahun berjalan	526.980.722,00
Belanja Operasional (BOP) yang dikapitalisasi Menjadi Aset tetap	814.370.520,00
Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi)	14.817.840.262,35
Reklasifikasi dari aset lainnya (inventarisasi) :	
- Reklasifikasi dari Aset Rusak Berat	852.338.861,32
- Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain (Penelusuran)	3.957.799.356,00
Hibah BMD sebelum Tahun 2024	6.562.601.333,00
BMD belum tercatat (inventarisasi)	3.605.757.526,00
Jumlah Mutasi Tambah	174.138.442.423,67
Mutasi Kurang :	
Belanja Modal yang dimutasi antar Perangkat Daerah	8.064.741.555,00
Belanja Modal yang di reklasifikasi antar KIB	2.275.000,00
Belanja Modal yang dikapitalisasi Menjadi aset ekstrakomtabel	14.059.507.922,00
Belanja Modal tidak menjadi aset tetap	512.520.279,00
Kewajiban kepada pihak ketiga th 2024 yg asetnya telah diakui di tahun 2023	268.422.114,00
Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi)	14.817.840.262,35
Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi)	763.672.072,15
Reklasifikasi menjadi aset lainnya (Inventarisasi) :	
- Reklasifikasi menjadi Aset Rusak Berat	14.657.561.578,86
- Reklasifikasi menjadi Aset Lain-Lain (Penelusuran)	42.486.563,00
Penghapusan BMD (inventarisasi)	314.084.892,12
Reklasifikasi Kondisi BMD (inventarisasi)	1.375.637.190,36
Jumlah Mutasi Kurang	54.878.749.428,84
Total Mutasi 2024	119.259.692.994,83
Saldo per 31 Desember 2024	1.256.136.708.584,89
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(1.013.699.588.886,23)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	242.437.119.698,66

Nilai Aset Peralatan dan Mesin mengalami peningkatan sebesar Rp119.259.700.994,83 terdiri dari:

1. Penambahan peralatan mesin sebesar Rp174.138.450.423,67 terdiri dari :
 - a. Realisasi Belanja Modal adalah sebesar Rp133.226.642.367,00 terdiri dari :
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp32.832.656.811
 - ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp7.475.671.330
 - iii. Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp39.266.988.308
 - iv. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp6.155.296.666
 - v. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp15.652.357.325
 - vi. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp1.759.559.040



- vii. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp126.941.000
- viii. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp560.286.260
- ix. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp911.490.959
- x. Dinas Sosial sebesar Rp182.756.400
- xi. Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp52.010.160
- xii. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp12.198.505.000
- xiii. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp737.063.200
- xiv. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp122.099.500
- xv. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp60.620.000
- xvi. Dinas Perhubungan sebesar Rp213.405.714
- xvii. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp15.598.270
- xviii. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp16.399.000
- xix. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp127.500.000
- xx. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp69.591.300
- xxi. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp107.389.000
- xxii. Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp61.035.000
- xxiii. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp19.742.999
- xxiv. Sekretariat Daerah sebesar Rp3.253.902.356
- xxv. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp1.476.334.400
- xxvi. Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp1.263.670.000
- xxvii. Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp840.650.000
- xxviii. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp803.557.900
- xxix. Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp778.922.960
- xxx. Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp618.875.000
- xxxi. Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp1.300.500.000
- xxxii. Inspektorat sebesar Rp916.932.000
- xxxiii. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp73.808.340
- xxxiv. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp1.730.501.169
- xxxv. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp811.325.000
- xxxvi. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur sebesar Rp375.500.000
- xxxvii. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp257.200.000
- b. Belanja Operasional yang dikapitalisasi Menjadi Aset tetap sebesar Rp814.370.520,00 terdiri dari :
 - i. Dinas Kesehatan sebesar Rp511.817.570,00
 - ii. Dinas Sosial sebesar Rp41.152.000,00
 - iii. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp58.238.000,00
 - iv. Inspektorat sebesar Rp31.881.450,00
 - v. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp171.281.500,00
- c. Belanja modal yang dimutasikan dari perangkat daerah lain sebesar Rp8.064.741.555,00 terdiri dari :
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp2.867.033.000
 - ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp3.067.531.780
 - iii. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp688.200



- iv. Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp1.066.660.000
- v. Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp1.201.575
- vi. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp470.448.000
- vii. Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp194.000.000
- viii. PPKD sebesar Rp397.179.000
- d. Hibah tahun perolehan berjalan 2024 sebesar Rp526.980.722,00 terdiri dari :
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp51.215.916
 - ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp145.295.500
 - iii. Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp5.300.000
 - iv. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp41.049.000
 - v. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp111.842.000
 - vi. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp139.500.000
 - vii. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp17.806.306
 - viii. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp14.972.000
- e. Kewajiban pihak ketiga yang asetnya telah diakui ditahun 2024 sebesar Rp1.709.369.921,00 yaitu pada Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp1.709.369.921,00
- f. Mutasi dari OPD lain (Inventarisasi) sebesar Rp14.817.840.262,35 terdiri dari :
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp291.187.857,00
 - ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp2.664.771.250,00
 - iii. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp430.284.895,00
 - iv. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp205.000.000,00
 - v. Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp41.150.000,00
 - vi. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp6.837.567.808,00
 - vii. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp431.426.923,00
 - viii. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp532.747.931,00
 - ix. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp434.600.000,00
 - x. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp362.782.000,00
 - xi. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp723.572.649,00
 - xii. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp320.708.200,00
 - xiii. Sekretariat Daerah sebesar Rp205.000.000,00
 - xiv. Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp11.000.000,00
 - xv. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp35.825.000,00
 - xvi. Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp65.806.052,40
 - xvii. Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp2.724.304,87
 - xviii. Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp21.359.642,86
 - xix. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp665.848.750,00
 - xx. PPKD sebesar Rp534.477.000,00
- g. Reklas antar KIB (Inventarisasi) sebesar Rp33.057.967.695,57 terdiri dari :
 - i. Dinas Kesehatan sebesar Rp14.987.250,00
 - ii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp20.307.340,00
 - iii. Dinas Sosial sebesar Rp80.700.000,00
 - iv. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp263.600.000,00
 - v. Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp1.448.000,00
 - vi. Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp1.500.624,00
 - vii. Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp4.535.000,00



- viii. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp310.872.427,32
- ix. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp40.338.220,00
- x. PPKD sebesar Rp114.050.000,00
- h. Reklas ke Aset Rusak Berat (Inventarisasi) sebesar Rp858.374.485,32 terdiri dari:
 - i. Dinas Kesehatan sebesar Rp14.987.250,00
 - ii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp20.307.340,00
 - iii. Dinas Sosial sebesar Rp80.700.000,00
 - iv. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp263.600.000,00
 - v. Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp1.448.000,00
 - vi. Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp1.500.624,00
 - vii. Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp4.535.000,00
 - viii. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp316.908.051,00
 - ix. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp40.338.220,00
 - x. PPKD sebesar Rp114.050.000,00
- i. Reklas dari aset lain-lain sebesar Rp3.957.799.356,00 terdiri dari :
 - i. Dinas Kesehatan sebesar Rp114.750.000,00
 - ii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp192.900.000,00
 - iii. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp3.257.185.000,00
 - iv. Sekretariat Daerah sebesar Rp392.964.356,00
- j. Hibah aset tahun perolehan sebelum 2024 (Inventarisasi) sebesar Rp6.562.601.333,00 terdiri dari :
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp183.486.240,00
 - ii. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp748.599.775,00
 - iii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp4.702.371.323,00
 - iv. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp357.602.180,00
 - v. Dinas Perhubungan sebesar Rp570.541.815,00
- k. Aset belum tercatat (Inventarisasi) sebesar Rp3.605.757.526,00 terdiri dari :
 - i. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp199.899.700,00
 - ii. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp11.900.000,00
 - iii. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp3.393.957.826,00
- 2. Pengurangan peralatan mesin sebesar Rp54.878.749.428,84 terdiri dari :
 - a. Dropping antar SKPD (BM) sebesar Rp8.064.741.555,00 terdiri dari :
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp2.867.033.000,00
 - ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp3.068.733.355,00
 - iii. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp688.200,00
 - iv. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp194.000.000,00
 - v. Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp1.066.660.000,00
 - vi. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp470.448.000,00
 - vii. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp397.179.000,00
 - b. Reklasifikasi antar KIB (BM) sebesar Rp2.275.000,00 yaitu pada Dinas Pendidikan sebesar Rp2.275.000,00
 - c. Belanja Modal yang dikapitalisasi Menjadi aset ekstrakomtabel Rp14.059.507.922,00 terdiri dari :
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp13.507.434.603,00
 - ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp114.752.936,00
 - iii. Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp5.300.000,00
 - iv. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp197.753.407,00



- v. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp6.193.800,00
- vi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp9.879.000,00
- vii. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp29.445.000,00
- viii. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp970.000,00
- ix. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp688.200,00
- x. Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp2.500.000,00
- xi. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp125.370.000,00
- xii. Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp14.375.000,00
- xiii. Inspektorat sebesar Rp30.624.600,00
- xiv. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp14.221.376,00
- d. Belanja modal yang tidak jadi aset sebesar Rp512.520.279,00 terdiri dari :
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp7.177.000,00
 - ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp18.000.000,00
 - iii. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp37.394.100,00
 - iv. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp118.066.509,00
 - v. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp15.598.270,00
 - vi. Sekretariat Daerah sebesar Rp18.200.000,00
 - vii. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp235.079.400,00
 - viii. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp63.005.000,00
- e. Kewajiban pihak ketiga yang asetnya telah diakui ditahun 2024 sebesar Rp268.422.114,00 yaitu pada Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp268.422.114
- f. Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi) Rp14.817.840.262,35 terdiri dari :
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp239.373.644,94
 - ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp2.664.771.250,00
 - iii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp11.000.000,00
 - iv. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp14.008.200,00
 - v. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp126.428.572,00
 - vi. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp6.837.567.808,00
 - vii. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp306.700.000,00
 - viii. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp362.782.000,00
 - ix. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp479.318.750,00
 - x. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp260.380.000,00
 - xi. Sekretariat Daerah sebesar Rp1.517.244.338,40
 - xii. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp433.376.462,56
 - xiii. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp35.825.000,00
 - xiv. Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp28.045.000,00
 - xv. Inspektorat sebesar Rp506.254.211,69
 - xvi. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp994.765.024,73
- g. Reklas antar KIB (Inventarisasi) sebesar Rp763.672.072,15 terdiri dari :
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp693.865.572,15
 - ii. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp69.806.500,00
- h. Reklas ke Aset Rusak Berat (Inventarisasi) sebesar Rp14.657.561.578,86 terdiri dari :
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp3.199.514.872,32



- ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp115.661.753,63
- iii. Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp1.690.792.546,29
- iv. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp811.785.319,71
- v. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp553.612.328,97
- vi. Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp221.238.952,78
- vii. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp3.902.154.274,17
- viii. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp28.643.124,00
- ix. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp366.709.240,93
- x. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp1.175.531.742,02
- xi. Sekretariat Daerah sebesar Rp565.516.949,50
- xii. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp106.726.818,18
- xiii. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp177.112.000,00
- xiv. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp884.683.701,88
- xv. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp531.396.029,61
- xvi. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur sebesar Rp326.481.925,87
- i. Reklas dari aset lain-lain sebesar Rp42.486.563,00 terdiri dari :
 - i. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp28.165.000,00
 - ii. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp14.321.563,00
- j. Penghapusan BMD dan Double Catat sebesar Rp314.084.892,12 terdiri dari :
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp1.150.000,00
 - ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp70.750.000,00
 - iii. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp93.342.281,12
 - iv. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp52.542.611,00
 - v. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp96.300.000,00
- k. Reklasifikasi kondisi asset tetap (Inventarisasi) sebesar Rp1.375.637.190,36 terdiri dari :
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp70.331.000,00
 - ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp11.293.150,00
 - iii. Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp69.784.715,29
 - iv. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp26.991.325,00
 - v. Sekretariat Daerah sebesar Rp11.047.000,00
 - vi. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp1.186.190.000,07

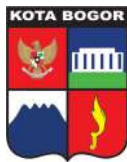
5.3.1.4.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.888.200.567.932,12 dan Rp1.582.373.719.962,85 mengalami peningkatan nilai sebesar Rp305.826.847.969,27 atau 19,33%.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Berikut tabel perbandingan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per Perangkat Daerah pada periode Tahun Anggaran 2024 dan 2023.





Tabel 5.3.93
Gedung Bangunan per Perangkat Daerah

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2-3)	(6=4/3)
1	Dinas Pendidikan	548.176.766.184,71	442.850.492.657,71	105.326.273.527,00	23,78
2	Dinas Kesehatan	94.345.132.278,00	90.372.055.334,00	3.973.076.944,00	4,40
3	Rumah Sakit Umum Daerah (PD)	276.286.443.669,05	227.627.939.235,05	48.658.504.434,00	21,38
4	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	5.586.079.344,00	5.623.879.344,00	(37.800.000,00)	(0,67)
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	138.874.488.105,36	11.711.992.753,09	127.162.495.352,27	1.085,75
6	Dinas Perumahan dan Permukiman	130.931.504.207,53	126.130.781.348,53	4.800.722.859,00	3,81
7	Satuan Polisi Pamong Praja	627.837.000,00	627.837.000,00	-	-
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	586.395.728,00	332.386.689,00	254.009.039,00	76,42
10	Dinas Sosial	2.751.779.603,00	2.716.861.203,00	34.918.400,00	1,29
11	Dinas Tenaga Kerja	2.482.647.776,00	2.482.647.776,00	-	-
12	Dinas Lingkungan Hidup	17.614.881.214,82	16.958.678.463,82	656.202.751,00	3,87
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.275.605.198,00	3.275.605.198,00	-	-
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.187.818.650,00	4.187.818.650,00	-	-
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	743.627.150,00	743.627.150,00	-	-
16	Dinas Perhubungan	179.944.380.473,49	170.564.069.693,49	9.380.310.780,00	5,50
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	14.806.067.972,26	32.274.957.687,26	(17.468.889.715,00)	(54,13)
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	67.514.025.680,00	54.039.766.718,00	13.474.258.962,00	24,93
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	24.245.939.416,65	21.781.000.833,65	2.464.938.583,00	11,32
22	Dinas Arsip dan Perpustakaan	32.120.788.874,50	32.120.788.874,50	-	-
23	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	29.152.705.169,00	21.929.987.599,00	7.222.717.570,00	32,94
24	Sekretariat Daerah	32.899.231.094,00	35.364.169.677,00	(2.464.938.583,00)	(6,97)
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	79.623.826.839,00	79.623.826.839,00	-	-
26	Kecamatan Bogor Selatan	24.153.371.769,00	24.153.371.769,00	-	-
27	Kecamatan Bogor Timur	17.903.142.313,00	17.860.209.898,00	42.932.415,00	0,24
28	Kecamatan Bogor Tengah	17.946.216.153,00	15.805.832.862,00	2.140.383.291,00	13,54
29	Kecamatan Bogor Barat	27.478.193.378,34	26.895.967.280,34	582.226.098,00	2,16
30	Kecamatan Bogor Utara	19.896.174.663,41	18.872.570.527,41	1.023.604.136,00	5,42
31	Kecamatan Tanah Sareal	22.272.721.416,00	19.316.633.621,00	2.956.087.795,00	15,30
32	Inspektorat	3.230.367.376,00	3.230.367.376,00	-	-
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.029.369.300,00	4.029.369.300,00	-	-
34	Badan Keuangan dan Aset Daerah	19.035.236.780,00	5.530.332.528,00	13.504.904.252,00	244,20
35	Badan Pendapatan Daerah	29.337.506.643,00	42.804.214.270,00	(13.466.707.627,00)	(31,46)
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.339.818.912,00	1.339.818.912,00	-	-
37	PPKD	9.879.018.853,00	14.272.402.147,00	(4.393.383.294,00)	(30,78)
38	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	4.921.458.748,00	4.921.458.748,00	-	-
	Jumlah	1.888.200.567.932,12	1.582.373.719.962,85	305.826.847.969,27	19,33

Mutasi Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan Pemerintah Kota Bogor tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut.



Tabel 5.3.94
Mutasi Aset Tetap Gedung Bangunan

URAIAN	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)
Saldo per 31 Desember 2023	1.582.373.719.962,85
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal Tahun Anggaran 2024	141.166.601.172,00
Belanja Operasional yang dikapitalisasi Menjadi Aset tetap	97.607.295,00
Belanja Modal yang dimutasi antar Perangkat Daerah	6.885.218.635,00
Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi)	31.011.786.355,10
Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi)	174.561.737.077,27
Reklasifikasi dari aset lainnya (inventarisasi) :	
Hibah BMD sebelum Tahun 2024	15.410.813.458,00
Jumlah Mutasi Tambah	369.133.763.992,37
Mutasi Kurang :	
Belanja Modal yang dimutasi antar Perangkat Daerah	6.885.218.635,00
Belanja Modal tidak menjadi aset tetap	56.966.300,00
Kewajiban kepada pihak ketiga th 2024 yg asetnya telah diakui di tahun 2023	8.465.191.362,00
Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi)	31.011.786.355,10
Reklasifikasi menjadi aset lainnya (Inventarisasi) :	
- Reklasifikasi menjadi Aset Rusak Berat	37.800.000,00
BMD belum tercatat (inventarisasi)	
Penghapusan BMD (inventarisasi)	12.441.466.968,00
Reklasifikasi menjadi properti investasi gedung bangunan	4.408.486.403,00
Jumlah Mutasi Kurang	63.306.916.023,10
Total Mutasi 2024	305.826.847.969,27
Saldo per 31 Desember 2024	1.888.200.567.932,12
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(335.901.820.675,70)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	1.552.298.747.256,42

Nilai Aset Gedung dan Bangunan mengalami peningkatan sebesar Rp224.741.334.895,68 terdiri dari:

1. Penambahan gedung bangunan sebesar Rp391.672.968.127,37 terdiri dari :
 - a. Realisasi Belanja Modal adalah sebesar Rp141.166.601.172,00 terdiri dari :
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp105.326.273.527,00
 - ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp3.956.535.744,00
 - iii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp8.550.030.791,00
 - iv. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp4.788.815.359,00
 - v. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp308.167.039,00
 - vi. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp586.396.251,00
 - vii. Dinas Perhubungan sebesar Rp534.121.026,00
 - viii. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp1.840.500.000,00
 - ix. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp7.222.717.570,00
 - x. Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp91.982.415,00
 - xi. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp2.043.086.591,00
 - xii. Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp582.226.098,00
 - xiii. Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp925.996.841,00
 - xiv. Kecamatan Tanah Sereal sebesar Rp2.956.087.795,00
 - xv. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp1.453.664.125,00
 - b. Belanja modal yang dimutasi dari perangkat daerah lain sebesar Rp6.885.218.635,00 terdiri dari :
 - i. Dinas Kesehatan sebesar Rp3.956.535.744,00
 - ii. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp2.040.278.291,00



- iii. Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp888.404.600,00
 - c. Belanja Operasi yang dikapitalisasi sebesar Rp97.607.295,00 yaitu pada Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp97.607.295,00
 - d. Mutasi dari OPD lain (Inventarisasi) sebesar Rp31.011.786.355,10 terdiri dari:
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp1.719.347.735,10
 - ii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.415.467.500,00
 - iii. Dinas Sosial sebesar Rp34.918.400,00
 - iv. Dinas Perhubungan sebesar Rp8.846.189.754,00
 - v. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp2.464.938.583,00
 - vi. Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp1.464.268.444,00
 - vii. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp13.466.707.627,00
 - viii. PPKD sebesar Rp1.599.948.312,00
 - e. Reklas antar KIB (Inventarisasi) sebesar Rp174.561.737.077,27 terdiri dari :
 - i. Dinas Kesehatan sebesar Rp266.041.200,00
 - ii. Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp48.658.504.434,00
 - iii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp117.463.832.443,27
 - iv. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp11.907.500,00
 - v. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp69.806.500,00
 - vi. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp7.943.590.000,00
 - vii. Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp47.950.000,00
 - viii. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp100.105.000,00
 - f. Hibah aset tahun perolehan sebelum 2024 (Inventarisasi) sebesar Rp15.410.813.458,00 terdiri dari :
 - i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp6.357.855.980,00
 - ii. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp5.530.668.962,00
 - iii. PPKD sebesar Rp3.522.288.516,00
2. Pengurangan gedung bangunan sebesar Rp63.306.916.023,10 terdiri dari :
- a. Dropping antar SKPD (BM) sebesar Rp6.885.218.635,00 terdiri dari :
 - i. Dinas Kesehatan sebesar Rp3.956.535.744,00
 - ii. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp2.040.278.291,00
 - iii. Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp888.404.600,00
 - b. Belanja modal yang tidak jadi aset sebesar Rp56.966.300,00 terdiri dari :
 - i. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp54.158.000,00
 - ii. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp2.808.300,00
 - c. Kewajiban pihak ketiga yang asetnya telah diakui ditahun 2024 sebesar Rp8.465.191.362,00 terdiri dari :
 - i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp6.624.691.362,00
 - ii. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp1.840.500.000,00
 - d. Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi) Rp31.011.786.355,10 terdiri dari :
 - i. Dinas Kesehatan sebesar Rp3.956.535.744,00
 - ii. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp2.040.278.291,00
 - iii. Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp888.404.600,00
 - e. Reklas ke Aset Rusak Berat (Inventarisasi) sebesar Rp37.800.000,00 yaitu pada Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp37.800.000,00
 - f. Penghapusan BMD dan Double Catat sebesar Rp12.441.466.968,00 terdiri dari:



- i. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp12.369.963.000,00
- ii. PPKD sebesar Rp71.503.968,00
- g. Reklas aset tetap tanah menjadi properti investasi tanah sebesar Rp4.408.486.403,00 terdiri dari :
 - i. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp3.845.478.403,00
 - ii. PPKD sebesar Rp563.008.000,00

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.588.464.657.486,93 dan Rp3.483.468.228.932,92 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp104.996.428.554,01 atau 3,01%.

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut: (a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan; (b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya; (c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan (d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

Berikut disajikan tabel perbandingan Aset Tetap Jalan dan Irigasi Per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

Tabel 5.3.95
Jaringan, Irigasi dan Jalan per Perangkat Daerah

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Lebih/Kurang	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2-3)	(6=4/3)
1	Dinas Pendidikan	4.039.355.021,30	3.648.740.784,30	390.614.237,00	10,71
2	Dinas Kesehatan	785.000.000,00	785.000.000,00	-	0,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah (PD)	1.257.855.350,00	1.257.855.350,00	-	0,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	7.052.568.800,00	7.052.568.800,00	-	0,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.562.315.104.520,49	2.441.394.369.797,48	120.920.734.723,01	4,95
6	Dinas Perumahan dan Permukiman	752.325.011.061,18	748.425.794.144,18	3.899.216.917,00	0,52
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.527.500,00	5.527.500,00	-	0,00
8	Dinas Tenaga Kerja	44.300.313,00	44.300.313,00	-	0,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	15.283.473.880,68	14.313.127.249,68	970.346.631,00	6,78
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	33.830.000,00	33.830.000,00	-	0,00
11	Dinas Perhubungan	24.794.536.206,22	24.662.622.306,22	131.913.900,00	0,53
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.983.782,00	10.983.782,00	-	0,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	34.549.400,00	34.549.400,00	-	0,00
14	Dinas Pemuda dan Olahraga	678.042.823,00	678.042.823,00	-	0,00
15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	221.632.237,67	221.632.237,67	-	0,00
16	Dinas Arsip dan Perpustakaan	62.331.600,00	62.331.600,00	-	0,00
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.508.076.473,00	4.310.140.735,00	197.935.738,00	4,59
18	Sekretariat Daerah	1.386.167.315,00	1.386.167.315,00	-	0,00
19	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	34.903.000,00	34.903.000,00	-	0,00
20	Kecamatan Bogor Selatan	27.056.312.232,00	26.370.749.036,00	685.563.196,00	2,60
21	Kecamatan Bogor Timur	8.192.925.824,00	8.068.605.313,00	124.320.511,00	1,54
22	Kecamatan Bogor Tengah	12.643.649.029,00	12.643.649.029,00	-	0,00
23	Kecamatan Bogor Barat	24.746.311.471,00	23.409.340.529,00	1.336.970.942,00	5,71
24	Kecamatan Bogor Utara	12.287.118.894,00	11.337.442.519,00	949.676.375,00	8,38
25	Kecamatan Tanah Sareal	16.911.758.844,00	15.537.563.244,00	1.374.195.600,00	8,84
26	PPKD	111.702.621.909,39	137.687.682.125,39	(25.985.060.216,00)	0,00
27	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	50.710.000,00	50.710.000,00	-	0,00
	Jumlah	3.588.464.657.486,93	3.483.468.228.932,92	104.996.428.554,01	3,01



Mutasi Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kota Bogor tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.96
Mutasi Aset Tetap Jaringan Irigasi Jalan

URAIAN	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)
Saldo per 31 Desember 2023	3.483.468.228.932,92
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal Tahun Anggaran 2024	112.729.496.656,00
Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi)	31.701.199.016,00
Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi)	31.256.153.379,01
BMD belum tercatat (inventarisasi)	2.573.175.568,00
Reklasifikasi Kondisi BMD (inventarisasi)	-
Jumlah Mutasi Tambah	178.260.024.619,01
Mutasi Kurang :	
Kewajiban kepada pihak ketiga th 2024 yg asetnya telah diakui di tahun 2023	9.993.111.933,00
Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi)	31.701.199.016,00
Penghapusan BMD (inventarisasi)	31.569.285.116,00
Jumlah Mutasi Kurang	73.263.596.065,00
Total Mutasi 2024	104.996.428.554,01
Saldo per 31 Desember 2024	3.588.464.657.486,93
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(2.171.942.597.232,81)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	1.416.522.060.254,12

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan mengalami Peningkatan sebesar Rp104.996.428.554,01 terdiri dari :

1. Penambahan Jalan,jaringan, dan Irigasi sebesar Rp178.260.024.619,01 terdiri dari:
 - a. Realisasi Belanja Modal adalah sebesar Rp112.729.496.656,00 terdiri dari :
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp390.614.237,00
 - ii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp102.962.295.119,00
 - iii. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp3.737.578.307,00
 - iv. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp970.346.631,00
 - v. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp197.935.738,00
 - vi. Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp685.563.196,00
 - vii. Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp124.320.511,00
 - viii. Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp1.336.970.942,00
 - ix. Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp949.676.375,00
 - x. Kecamatan Tanah Sereal sebesar Rp1.374.195.600,00
 - b. Mutasi dari OPD lain (Inventarisasi) sebesar Rp31.701.199.016,00 terdiri dari Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp31.569.285.116,00 dan Dinas Perhubungan sebesar Rp131.913.900,00
 - c. Reklas antar KIB (Inventarisasi) sebesar Rp31.256.153.379,01 terdiri dari :
 - i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp31.094.514.769,01
 - ii. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp161.638.610,00
 - d. Aset belum tercatat (Inventarisasi) sebesar Rp2.573.175.568,00 terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.573.175.568,00



2. Pengurangan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp73.263.596.065,00 terdiri dari:
 - a. Kewajiban pihak ketiga yang asetnya telah diakui ditahun 2024 sebesar Rp9.993.111.933,00 terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp9.993.111.933,00
 - b. Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi) Rp1.701.199.016,00 terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp5.716.138.800,00 dan PPKD sebesar Rp25.985.060.216,00
 - c. Penghapusan BMD sebesar Rp31.569.285.116,00 terdiri dari:
 - i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp5.584.224.900,00
 - ii. PPKD sebesar Rp25.985.060.216,00

5.3.1.3.3 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap berupa Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp15.088.820.384,99 dan Rp11.314.989.293,84 mengalami peningkatan nilai sebesar Rp3.773.831.091,15 atau 33,35%.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Berikut tabel perbandingan Aset Tetap Lainnya Per Perangkat Daerah pada periode Tahun Anggaran 2024.

Tabel 5.3.97
Aset tetap Lainnya per Perangkat Daerah

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Dinas Pendidikan	9.972.481.095,72	7.583.556.006,57	2.388.925.089,15	31,50
2	Dinas Kesehatan	4.171.500,00	4.171.500,00	-	0,00
3	Dinas Perumahan dan Permukiman	197.880.000,00	197.880.000,00	-	0,00
4	Dinas Perhubungan	147.232.500,00	147.232.500,00	-	0,00
5	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	145.075.000,00	145.075.000,00	-	0,00
6	Dinas Arsip dan Perpustakaan	2.784.439.788,85	2.704.985.786,85	79.454.002,00	2,94
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	31.305.000,00	31.305.000,00	-	0,00
8	Sekretariat Daerah	196.597.440,00	196.597.440,00	-	0,00
9	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	241.694.600,00	212.414.600,00	29.280.000,00	13,78
10	Kecamatan Bogor Selatan	17.733.640,72	10.301.640,72	7.432.000,00	72,14
11	Kecamatan Bogor Timur	3.456.123,19	3.456.123,19	-	0,00
12	Kecamatan Bogor Tengah	4.947.415,02	4.947.415,02	-	0,00
13	Kecamatan Bogor Barat	15.536.863,75	15.536.863,75	-	0,00
14	Kecamatan Bogor Utara	8.198.787,98	8.198.787,98	-	0,00
15	Kecamatan Tanah Sareal	5.280.629,76	5.280.629,76	-	0,00
16	Inspektorat	44.050.000,00	44.050.000,00	-	0,00
17	PPKD	1.268.740.000,00	-	1.268.740.000,00	0,00
Jumlah		15.088.820.384,99	11.314.989.293,84	3.773.831.091,15	33,35

Mutasi Aset Tetap berupa Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kota Bogor tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:



Tabel 5.3.98
Mutasi Aset Tetap Lainnya

URAIAN	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)
Saldo per 31 Desember 2023	11.314.989.293,84
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal Tahun Anggaran 2024	10.693.173.754,00
Belanja Modal yang dimutasi antar Perangkat Daerah	7.432.000,00
Hibah BMD tahun berjalan	1.268.740.000,00
Belanja Modal yang di reklasifikasi antar KIB	2.275.000,00
Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi)	8.475.000,00
Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi)	693.865.572,15
Reklasifikasi dari aset lainnya (inventarisasi) :	
- Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain (Penelusuran)	468.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	12.674.429.326,15
Mutasi Kurang :	
Belanja Modal yang dimutasi antar Perangkat Daerah	7.432.000,00
Belanja Modal yang dikapitalisasi Menjadi aset ekstrakomtabel	8.865.850.137,00
Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi)	8.475.000,00
Reklasifikasi menjadi Aset Ekstrakomtabel (Inventarisasi)	10.591.098,00
Reklasifikasi menjadi aset lainnya (Inventarisasi) :	
- Reklasifikasi menjadi Aset Rusak Berat	8.250.000,00
BMD belum tercatat (inventarisasi)	
Jumlah Mutasi Kurang	8.900.598.235,00
Total Mutasi 2024	3.773.831.091,15
Saldo per 31 Desember 2024	15.088.820.384,99
Nilai Buku per 31 Desember 2024	15.088.820.384,99

Nilai Aset Tetap Berupa Aset Tetap Lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp3.773.831.091,15 terdiri dari:

1. Penambahan aset tetap lainnya sebesar Rp12.674.429.326,15 terdiri dari :
 - a. Realisasi Belanja Modal adalah sebesar Rp10.693.173.754,00 terdiri dari :
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp10.566.182.954,00
 - ii. Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp97.710.800,00
 - iii. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp29.280.000,00
 - b. Belanja Modal yang di reklas antar KIB sebesar Rp2.275.000,00 yaitu pada Dinas Pendidikan sebesar Rp2.275.000,00
 - c. Belanja modal yang dimutasikan dari perangkat daerah lain sebesar Rp7.432.000,00 terdiri dari Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp7.432.000,00
 - d. Hibah tahun perolehan berjalan 2024 sebesar Rp1.268.740.000,00 terdiri dari PPKD sebesar Rp1.268.740.000,00
 - e. Mutasi dari OPD lain (Inventarisasi) sebesar Rp8.475.000,00 terdiri dari Dinas Pendidikan sebesar Rp8.475.000,00
 - f. Reklas antar KIB (Inventarisasi) sebesar Rp693.865.572,15 terdiri dari Dinas Pendidikan sebesar Rp693.865.572,15
 - g. Reklas dari aset lain-lain sebesar Rp468.000,00 terdiri dari Dinas Pendidikan sebesar Rp468.000,00
2. Pengurangan aset tetap lainnya sebesar Rp8.900.598.235,00 terdiri dari :
 - a. Dropping antar SKPD (BM) sebesar Rp7.432.000,00 terdiri dari Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp7.432.000,00
 - b. Belanja Modal yang dikapitalisasi Menjadi aset ekstrakomtabel Rp8.865.850.137,00 terdiri dari :



- i. Dinas Pendidikan sebesar Rp8.865.616.437,00
- ii. Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp233.700,00
- c. Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi) Rp8.475.000,00 terdiri dari Dinas Pendidikan sebesar Rp8.475.000,00
- d. Aset yang dikapitalisasi (Inventarisasi) sebesar Rp10.591.098,00 terdiri dari Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp10.591.098,00
- e. Reklas ke Aset Rusak Berat (Inventarisasi) sebesar Rp8.250.000,00 terdiri dari Dinas Pendidikan sebesar Rp8.250.000,00

5.3.1.3.4 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp15.583.780.825,00 dan Rp224.422.793.771,34 mengalami penurunan nilai sebesar Rp208.839.012.946,34 atau 93,06%.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap Lainnya, yang proses perolehannya dan/ atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Berikut tabel perbandingan Konstruksi Dalam Pengerjaan Per Perangkat Daerah pada periode Tahun Anggaran 2024.

Tabel 5.3.99
Konstruksi Dalam Pengerjaan per Perangkat Daerah

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Lebih/Kurang	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Dinas Pendidikan	1.279.178.500,00	1.358.404.960,06	(79.226.460,06)	(5,83)
2	Dinas Kesehatan	58.915.000,00	324.956.200,00	(266.041.200,00)	(81,87)
3	Rumah Sakit Umum Daerah (PD)	1.642.329.920,00	50.300.834.354,00	(48.658.504.434,00)	(96,73)
4	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	44.556.000,00	44.556.000,00	-	-
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.474.355.105,00	154.209.774.817,28	(148.735.419.712,28)	(96,45)
6	Dinas Perumahan dan Permukiman	55.770.000,00	2.335.096.140,00	(2.279.326.140,00)	(97,61)
7	Satuan Polisi Pamong Praja	-	49.450.000,00	(49.450.000,00)	(100,00)
8	Dinas Sosial	55.755.000,00	55.755.000,00	-	-
9	Dinas Tenaga Kerja	-	280.820.000,00	(280.820.000,00)	(100,00)
10	Dinas Lingkungan Hidup	96.070.500,00	112.641.500,00	(16.571.000,00)	(14,71)
11	Dinas Perhubungan	50.417.500,00	50.417.500,00	-	-
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	609.622.425,00	625.372.425,00	(15.750.000,00)	(2,52)
13	Dinas Pemuda dan Olahraga	5.931.086.275,00	13.874.676.275,00	(7.943.590.000,00)	(57,25)
14	Kecamatan Bogor Selatan	89.266.200,00	89.266.200,00	-	-
15	Kecamatan Bogor Timur	-	47.950.000,00	(47.950.000,00)	(100,00)
16	Kecamatan Bogor Tengah	11.500.000,00	111.605.000,00	(100.105.000,00)	(89,70)
17	Kecamatan Bogor Barat	99.266.400,00	99.266.400,00	-	-
18	Badan Keuangan dan Aset Daerah	85.692.000,00	85.692.000,00	-	-
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	366.259.000,00	(366.259.000,00)	-
Jumlah		15.583.780.825,00	224.422.793.771,34	(208.839.012.946,34)	(93,06)

Mutasi Aset Tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kota Bogor tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut.



Tabel 5.3.100
Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

URAIAN	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)
Saldo per 31 Desember 2023	224.422.793.771,34
Mutasi Tambah:	
Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi)	445.372.660,06
Jumlah Mutasi Tambah	445.372.660,06
Mutasi Kurang :	
Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi)	445.372.660,06
Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi)	206.055.316.676,34
Reklasifikasi menjadi aset lainnya (Inventarisasi) :	
BMD belum tercatat (inventarisasi)	
Penghapusan BMD (inventarisasi)	2.783.696.270,00
Jumlah Mutasi Kurang	209.284.385.606,40
Total Mutasi 2024	(208.839.012.946,34)
Saldo per 31 Desember 2024	15.583.780.825,00

Perubahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp208.839.012.946,34 terdiri dari:

1. Penambahan konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp445.372.660,06 terdiri dari :
 - a. Mutasi dari OPD lain (Inventarisasi) sebesar Rp445.372.660,06 terdiri dari :
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp79.226.460,06
 - ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp266.041.200,00
 - iii. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp100.105.000,00
2. Pengurangan konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp209.284.385.606,40 terdiri dari:
 - a. Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi) Rp445.372.660,06 terdiri dari :
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp79.226.460,06
 - ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp266.041.200,00
 - iii. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp100.105.000,00
 - b. Reklas antar KIB (Inventarisasi) sebesar Rp206.055.316.676,34 terdiri dari :
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp79.226.460,06
 - ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp266.041.200,00
 - iii. Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp48.658.504.434,00
 - iv. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp148.705.699.712,28
 - v. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp254.199.870,00
 - vi. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp7.943.590.000,00
 - vii. Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp47.950.000,00
 - viii. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp100.105.000,00
 - c. Penghapusan BMD dan Double Catat sebesar Rp2.783.696.270,00 terdiri dari:
 - i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp29.720.000,00
 - ii. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp2.025.126.270,00
 - iii. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp49.450.000,00



- iv. Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp280.820.000,00
- v. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp16.571.000,00
- vi. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp15.750.000,00
- vii. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur sebesar Rp366.259.000,00

5.3.1.3.5 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar RpRp3.521.544.006.794,74 dan Rp3.162.527.131.333,85 mengalami peningkatan nilai sebesar Rp359.016.875.460,89 atau 11,35%.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.101
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Uraian - Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Peralatan dan Mesin	1.013.699.588.886,23	895.065.903.274,93	118.633.685.611,30	13,25
2	Gedung dan Bangunan	335.901.820.675,70	301.499.745.236,69	34.402.075.439,01	11,41
3	Jalan, Irigasi, dan jaringan	2.171.942.597.232,81	1.965.961.482.822,23	205.981.114.410,58	10,48
	Jumlah	3.521.544.006.794,74	3.162.527.131.333,85	359.016.875.460,89	11,35

Tabel 5.3.102
Rincian Beban Penyusutan

No	Uraian	Perubahan Akumulasi Penyusutan per 31 Des 2024	Beban Penyusutan per 31 Des 2024	Selisih Lebih/ (Kurang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)
1	Peralatan dan Mesin	1.013.699.588.886,23	121.272.053.305,14	892.427.535.581,09
2	Gedung dan Bangunan	335.901.820.675,70	36.659.773.287,72	299.242.047.387,98
3	Jalan, Irigasi, dan jaringan	2.171.942.597.232,81	215.277.266.080,06	1.956.665.331.152,75
	Jumlah	3.521.544.006.794,74	373.209.092.672,92	3.148.334.914.121,82

Rincian nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku kelompok aset tetap tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 5.3.103
Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap

Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan		Nilai Buku	
		Rp	%	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4=3/2)	(5=2-3)	(6=5/2)
Tanah	5.796.161.596.908,69	-	-	5.796.161.596.908,69	100,00
Peralatan dan Mesin	1.256.136.708.584,89	1.013.699.588.886,23	80,70	242.437.119.698,66	19,30
Gedung dan Bangunan	1.888.200.567.932,12	335.901.820.675,70	17,79	1.552.298.747.256,42	82,21
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.588.464.657.486,93	2.171.942.597.232,81	60,53	1.416.522.060.254,12	39,47
Aset Tetap Lainnya	15.088.820.384,99	-	-	15.088.820.384,99	100,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	15.583.780.825,00	-	-	15.583.780.825,00	100,00
Jumlah	12.559.636.132.122,60	3.521.544.006.794,74	28,04	9.038.092.125.327,88	71,96



5.3.1.4 DANA CADANGAN

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.398.684.760,00 untuk keperluan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2023 dalam bentuk deposito pada PT Bank DKI Cabang Pembantu Bogor sesuai SK Wali Kota No. 900/Kep.256-BKAD/2023 tanggal 24 Agustus 2023. Dana cadangan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.398.684.760,00 sedangkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp46.125.787.358,00 terdiri dari:

Tabel 5.3.104
Dana Cadangan

No	Uraian	Saldo Awal 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dana Cadangan				
	Pembentukan Dana Cadangan	71.336.251.300,00	0,00	0,00	71.336.251.300,00
	Pencairan Dana Cadangan	(25.765.828.400,00)	0,00	38.648.742.600,00	(64.414.571.000,00)
	Bunga	555.364.458,00	921.640.002,00	0,00	1.477.004.460,00
	Jumlah Dana Cadangan	46.125.787.358,00	921.640.002	38.648.742.600	8.398.684.760,00

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor Tahun 2024 bahwa Dana Cadangan ditetapkan paling sedikit Rp71.336.251.300,00 (tujuh puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah) yang dipenuhi pada Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. APBD Tahun Anggaran 2023 paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)
2. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 paling sedikit Rp21.336.251.300,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah).

Pencairan Dana Cadangan pada tanggal 15 Mei 2024 sebesar Rp38.648.742.600,00 sehingga Pencairan Dana Cadangan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp64.414.571.000,00, sedangkan bunga dana cadangan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.477.004.460,00 sehingga Saldo Dana Cadangan Tahun 2024 adalah Rp8.398.684.760,00

5.3.1.5 ASET LAINNYA

Aset Tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau Aset Tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Saldo Aset Lainnya berupa Aset Lain-lain Kota Bogor per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp76.403.789.787,11 dan Rp93.886.594.924,42 mengalami penurunan sebesar Rp17.482.805.137,31 atau 18,62%.



Tabel 5.3.105
Aset Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Aset Lainnya				
2	Tagihan Penjualan Angsuran	770.678.122,00	873.259.125,00	(102.581.003,00)	(11,75)
3	Tuntutan Ganti Rugi	351.103.844,90	334.362.178,57	16.741.666,33	5,01
4	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	11.014.184.310,00	11.014.184.310,00	-	-
5	Aset Tak Berwujud	16.970.742.403,80	16.945.217.083,80	25.525.320,00	0,15
6	Aset Lain-lain	187.940.474.139,24	199.888.450.262,74	(11.947.976.123,50)	(5,98)
7	Akumulasi Amortisasi aset Tak Berwujud	(16.493.115.025,80)	(16.066.792.926,55)	(426.322.099,25)	2,65
8	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(131.320.042.007,03)	(142.870.965.109,14)	11.550.923.102,11	(8,08)
9	Treasury Deposit Facility (TDF)	7.169.764.000,00	23.768.880.000,00	(16.599.116.000,00)	(69,84)
	Jumlah	76.403.789.787,11	93.886.594.924,42	(17.482.805.137,31)	(18,62)

5.3.1.5.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo tagihan jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp770.678.122,00 mengalami penurunan sebesar Rp102.581.003,00 atau turun sebesar 11,75% dibanding saldo 2023 sebesar Rp873.259.125,00. Adapun tagihan jangka panjang Kota Bogor sebesar Rp770.678.122,00 terdiri dari:

Tabel 5.3.106
Tagihan Jangka Panjang

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Tagihan Penjualan Angsuran				
2	Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III	745.101.557,00	847.682.560,00	(102.581.003,00)	(12,10)
3	Tagihan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas	25.576.565,00	25.576.565,00	0,00	-
	Jumlah	770.678.122,00	873.259.125,00	(102.581.003,00)	(11,75)

(Rincian tagihan jangka Panjang disajikan pada lampiran 8)

5.3.1.5.2 Tuntutan Ganti Rugi

Saldo tagihan jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp351.103.844,90 atau naik sebesar Rp16.741.665,43 atau 5,01% dibanding saldo 2023 sebesar Rp334.362.178,57. Adapun tagihan jangka panjang Kota Bogor sebesar Rp334.362.178,57 terdiri dari:

Tabel 5.3.107
Tuntutan Ganti Rugi

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Tuntutan Ganti Rugi				
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	0,00	0,00	-	
3	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	351.103.844,90	334.362.178,57	16.741.666,33	5,01
	Jumlah	351.103.844,90	334.362.178,57	16.741.666,33	5,01

(Rincian tagihan jangka Panjang disajikan pada lampiran 9)

5.3.1.6.3 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Saldo kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.014.184.310,00 atau turun sebesar 0,00% dibanding saldo 2023 sebesar Rp11.014.184.310,00. Adapun rincian kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp11.014.184.310,00 sebagai berikut:



Tabel 5.3.109
Kemitraan dengan Pihak Ketiga

No	Lokasi	Luas	Nilai
1	Tanah Pasar Kebon Kembang Blok C & D	6.054,00	4.871.684.310,00
2	Tanah Plasa Lippo Keboen Raya (ex. Pangrango Plasa) Jl. Raya Pajajaran	12.285,00	6.142.500.000,00
	Jumlah	18.339,00	11.014.184.310,00

(Rincian kemitraan dengan pihak ketiga disajikan pada lampiran 10)

5.3.1.6.4 Aset Tak Berwujud

Saldo aset tidak berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp16.970.742.403,80 atau naik sebesar Rp16.945.217.083,80 atau 0,15% dibanding saldo 2023 sebesar Rp25.525.320,00 Adapun rincian aset tidak berwujud sebesar Rp16.970.742.403,80 sebagai berikut:

Tabel 5.3.110
Aset Tidak Berwujud

No.	Perangkat Daerah	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Dinas Pendidikan	648.454.690,00	648.454.690,00	-	0,00
2	Dinas Kesehatan	1.183.714.800,00	1.183.714.800,00	-	0,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah (PD)	62.009.600,00	62.009.600,00	-	0,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	54.500.000,00	54.500.000,00	-	0,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	136.895.500,00	117.227.500,00	19.668.000,00	16,78
6	Dinas Perumahan dan Permukiman	1.851.443.350,00	1.851.443.350,00	-	0,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	0,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	394.021.000,00	394.021.000,00	-	0,00
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	0,00
10	Dinas Sosial	173.582.500,00	173.582.500,00	-	0,00
11	Dinas Tenaga Kerja	44.220.000,00	44.220.000,00	-	0,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	163.128.500,00	163.128.500,00	-	0,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	632.961.853,86	632.961.853,86	-	0,00
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	135.827.500,00	135.827.500,00	-	0,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	245.233.500,00	245.233.500,00	-	0,00
16	Dinas Perhubungan	736.158.074,94	736.158.074,94	-	0,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.297.006.625,00	3.297.006.625,00	-	0,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	490.093.925,00	490.093.925,00	-	0,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	911.560.000,00	911.560.000,00	-	0,00
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	45.055.000,00	45.055.000,00	-	0,00
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	48.000.000,00	-	48.000.000,00	0,00
22	Dinas Arsip dan Perpustakaan	242.900.000,00	242.900.000,00	-	0,00
23	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	133.975.570,00	59.620.000,00	74.355.570,00	124,72
24	Sekretariat Daerah	1.157.107.732,00	1.157.107.732,00	-	0,00
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	213.315.000,00	213.315.000,00	-	0,00
26	Kecamatan Bogor Selatan	40.210.000,00	40.210.000,00	-	0,00
27	Kecamatan Bogor Timur	148.950.000,00	148.950.000,00	-	0,00
28	Kecamatan Bogor Tengah	-	-	-	0,00
29	Kecamatan Bogor Barat	-	-	-	0,00
30	Kecamatan Bogor Utara	-	-	-	0,00
31	Kecamatan Tanah Sereal	-	-	-	0,00
32	Inspektorat	99.000.000,00	99.000.000,00	-	0,00
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	197.657.500,00	197.657.500,00	-	0,00
34	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.728.159.112,00	1.844.657.362,00	(116.498.250,00)	(6,32)
35	Badan Pendapatan Daerah	1.245.281.571,00	1.245.281.571,00	-	0,00
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	510.319.500,00	510.319.500,00	-	0,00
37	PPKD	-	-	-	0,00
38	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	-	-	0,00
	Jumlah	16.970.742.403,80	16.945.217.083,80	25.525.320,00	0,15



Tabel 5.3.111
Mutasi Aset Tidak Berwujud

URAIAN	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)
Saldo per 31 Desember 2023	16.945.217.083,80
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal Tahun Anggaran 2024	74.355.570,00
BMD belum tercatat (inventarisasi)	67.668.000,00
Reklasifikasi Kondisi BMD (inventarisasi)	-
Jumlah Mutasi Tambah	142.023.570,00
Mutasi Kurang :	
Reklasifikasi Kondisi BMD (inventarisasi)	116.498.250,00
Jumlah Mutasi Kurang	116.498.250,00
Total Mutasi 2024	25.525.320,00
Saldo per 31 Desember 2024	16.970.742.403,80
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(16.493.115.025,80)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	477.627.378,00

Nilai Aset Tetap Berupa Aset Tidak Berwujud mengalami peningkatan sebesar Rp25.525.320,00 terdiri dari :

1. Penambahan Aset Tidak Berwujud sebesar Rp142.023.570 terdiri dari :
 - a. Realisasi Belanja Modal adalah sebesar Rp74.355.570,00 terdiri dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp74.355.570,00
 - b. Aset belum tercatat (Inventarisasi) sebesar Rp67.668.000,00 terdiri dari :
 - i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp19.668.000,00
 - ii. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp48.000.000,00
2. Pengurangan Aset Tidak Berwujud sebesar Rp116.498.250 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp116.498.250,00.

5.3.1.6.5 Aset Lain Lain

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp187.940.474.137,64 atau turun sebesar Rp11.947.976.121,51 atau 5,98% dibanding saldo 2023 sebesar Rp199.888.450.259,15. Aset Tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau Aset Tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Adapun rincian aset lain-lain per perangkat daerah sebagai berikut:



Tabel 5.3.112
Rincian Aset Lain-lain per Perangkat Daerah

NO	Perangkat Daerah	Jumlah	Jumlah	Kenaikan/ (Penurunan)	
		31 Desember 2024	31 Desember 2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Dinas Pendidikan	50.290.488.224,56	46.725.656.100,82	3.564.832.123,74	7,63
2	Dinas Kesehatan	10.543.931.818,11	12.771.731.314,48	(2.227.799.496,37)	(17,44)
3	Rumah Sakit Umum Daerah (PD)	3.734.266.906,71	2.042.597.815,62	1.691.669.091,09	82,82
4	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	4.762.669.445,28	3.910.148.117,57	852.521.327,71	21,80
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.449.032.218,66	9.376.307.229,69	72.724.988,97	0,78
6	Dinas Perumahan dan Permukiman	4.873.567.720,98	4.873.567.720,98	-	-
7	Satuan Polisi Pamong Praja	3.491.653.085,41	3.629.663.085,41	(138.010.000,00)	(3,80)
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.180.665.720,66	2.180.665.720,66	-	-
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	211.360.710,00	211.360.710,00	-	-
10	Dinas Sosial	1.538.045.364,59	1.538.045.364,59	-	-
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	439.775.966,32	216.987.013,54	222.788.952,78	102,67
12	Dinas Lingkungan Hidup	14.713.311.110,06	26.156.356.646,05	(11.443.045.535,99)	(43,75)
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.129.739.674,23	1.086.774.987,23	42.964.687,00	3,95
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	754.776.652,20	754.776.652,20	-	-
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.326.601.870,48	2.425.585.968,48	(98.984.098,00)	(4,08)
16	Dinas Perhubungan	3.644.436.970,52	3.644.436.970,52	-	-
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	2.283.073.259,71	2.283.073.259,71	-	-
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	2.041.381.541,96	2.041.381.541,96	-	-
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.076.761.564,70	1.513.321.469,11	(436.559.904,41)	(28,85)
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	635.754.468,52	635.754.468,52	-	-
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6.115.593.479,35	5.002.061.737,33	1.113.531.742,02	22,26
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.328.262.872,11	1.537.710.872,11	(209.448.000,00)	(13,62)
23	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.598.020.636,70	4.598.020.636,70	-	-
24	Sekretariat Daerah	34.518.114.768,52	34.901.679.448,02	(383.564.679,50)	(1,10)
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	838.817.819,00	838.817.819,00	-	-
26	Kecamatan Bogor Selatan	1.831.804.351,89	1.831.804.351,89	-	-
27	Kecamatan Bogor Timur	824.923.907,00	824.923.907,00	-	-
28	Kecamatan Bogor Tengah	2.149.133.781,54	2.042.406.963,36	106.726.818,18	5,23
29	Kecamatan Bogor Barat	995.751.829,84	1.172.694.782,84	(176.942.953,00)	(15,09)
30	Kecamatan Bogor Utara	1.003.817.379,00	1.003.817.379,00	-	-
31	Kecamatan Tanah Sareal	1.690.740.994,01	1.690.740.994,01	-	-
32	Inspektorat	248.882.288,34	278.782.288,34	(29.900.000,00)	(10,73)
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.695.246.276,53	2.562.027.402,58	(866.781.126,05)	(33,83)
34	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.410.129.893,51	1.861.747.100,78	548.382.792,73	29,46
35	Badan Pendapatan Daerah	2.619.019.943,94	2.441.480.905,33	177.539.038,61	7,27
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	631.506.120,08	239.782.458,50	391.723.661,58	163,37
37	PPKD	3.399.691.052,00	3.660.755.603,00	(261.064.551,00)	(7,13)
38	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	919.722.452,22	5.381.003.452,22	(4.461.281.000,00)	-
JUMLAH		187.940.474.139,24	199.888.450.259,15	(11.947.976.119,91)	(5,98)



Tabel 5.3.113
Mutasi Aset Lain-lain

URAIAN	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)
Saldo per 31 Desember 2023	199.888.450.259,15
Mutasi Tambah:	
Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi)	1.918.452.106,00
- Reklasifikasi dari Aset Rusak Berat	14.703.611.578,86
- Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain (Penelusuran)	6.394.935.571,00
Reklasifikasi Kondisi BMD (inventarisasi)	2.358.164.682,00
Jumlah Mutasi Tambah	25.375.163.937,86
Mutasi Kurang :	
Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi)	1.918.452.106,00
- Reklasifikasi menjadi Aset Rusak Berat	852.338.861,32
- Reklasifikasi menjadi Aset Lain-Lain (Penelusuran)	10.310.716.364,00
Penghapusan BMD (inventarisasi)	23.501.765.454,45
Reklasifikasi Kondisi BMD (inventarisasi)	739.867.272,00
Jumlah Mutasi Kurang	37.323.140.057,77
Total Mutasi 2024	(11.947.976.119,91)
Saldo per 31 Desember 2024	187.940.474.139,24
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(131.320.042.007,03)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	56.620.432.132,21

Nilai Aset Tetap berupa Aset lain-lain mengalami penurunan sebesar Rp11.947.976. 119,91 yang terdiri dari:

1. Penambahan Aset Lain-lain (RB & Aset lain-lain lainnya) sebesar Rp25.375.163.937,86 terdiri dari :
 - a. Mutasi dari OPD lain (Inventarisasi) sebesar Rp1.918.452.106,00 terdiri dari :
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp15.330.408,00
 - ii. Dinas Sosial sebesar Rp80.700.000,00
 - iii. Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp1.500.624,00
 - iv. Kecamatan Tanah Sereal sebesar Rp4.535.000,00
 - v. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp12.603.125,00
 - vi. PPKD sebesar Rp933.426.177,00
 - vii. Dinas Pendidikan sebesar Rp3.239.500,00
 - viii. Dinas Kesehatan sebesar Rp114.750.000,00
 - ix. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp12.500.000,00
 - x. PPKD sebesar Rp739.867.272,00
 - b. Reklas ke Aset Rusak Berat (Inventarisasi) sebesar Rp14.703.611.578,86 terdiri dari :
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp3.207.764.872,32
 - ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp115.661.753,63
 - iii. Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp1.690.792.546,29
 - iv. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp849.585.319,71
 - v. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp553.612.328,97
 - vi. Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp221.238.952,78
 - vii. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp3.902.154.274,17
 - viii. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp28.643.124,00



- ix. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp366.709.240,93
- x. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp1.175.531.742,02
- xi. Sekretariat Daerah sebesar Rp565.516.948,50
- xii. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp106.726.818,18
- xiii. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp177.112.000,00
- xiv. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp884.683.701,88
- xv. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp531.396.029,61
- xvi. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur sebesar Rp326.481.925,87
- c. Reklas dari aset lain-lain sebesar Rp6.394.935.571,00 terdiri dari :
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp529.690.343,00
 - ii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp123.750.000,00
 - iii. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp28.165.000,00
 - iv. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp144.375.000,00
 - v. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp96.006.800,00
 - vi. Sekretariat Daerah sebesar Rp324.000.000,00
 - vii. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp55.550.675,00
 - viii. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp767.470,00
 - ix. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur sebesar Rp78.838.400,00
 - x. PPKD sebesar Rp2.588.187.410,00
 - xi. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp28.165.000,00
 - xii. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp14.321.563,00
 - xiii. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp2.411.282.910,00
- d. Reklasifikasi kondisi asset tetap (Inventarisasi) sebesar Rp2.358.164.682,00 terdiri dari :
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp1.459.997.833,82
 - ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp2.612.000,00
 - iii. Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp29.441.246,30
 - iv. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp17.196.230,00
 - v. Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp1.550.000,00
 - vi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp700.000,00
 - vii. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp35.869.017,17
 - viii. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp5.689.347,00
 - ix. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur sebesar Rp65.241.735,71
 - x. PPKD sebesar Rp739.867.272,00
- 2. Pengurangan Aset Lain-lain (RB & Aset lain-lain lainnya) sebesar Rp37.323.140.057,77 terdiri dari :
 - a. Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi) Rp1.918.452.106,00 terdiri dari :
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp351.135.584,00
 - ii. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp104.000.000,00
 - iii. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar



- Rp52.050.000,00
- iv. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp62.000.000,00
 - v. Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp208.000.000,00
 - vi. Sekretariat Daerah sebesar Rp126.000.000,00
 - vii. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp132.750.001,00
 - viii. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp6.035.624,00
 - ix. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp12.603.125,00
 - x. Dinas Kesehatan sebesar Rp437.000.000,00
 - xi. Sekretariat Daerah sebesar Rp430.117.272,00
- b. Reklas ke Aset Rusak Berat (Inventarisasi) sebesar Rp852.338.861,32 terdiri dari:
- i. Dinas Kesehatan sebesar Rp14.987.250,00
 - ii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp20.307.340,00
 - iii. Dinas Sosial sebesar Rp80.700.000,00
 - iv. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp263.600.000,00
 - v. Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp1.448.000,00
 - vi. Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp1.500.624,00
 - vii. Kecamatan Tanah Sereal sebesar Rp4.535.000,00
 - viii. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp310.872.427,32
 - ix. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp40.338.220,00
 - x. PPKD sebesar Rp114.050.000,00
- c. Reklas dari aset lain-lain sebesar Rp10.310.716.364,00 terdiri dari :
- i. Dinas Pendidikan sebesar Rp530.158.343,00
 - ii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp316.650.000,00
 - iii. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp3.401.560.000,00
 - iv. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp96.006.800,00
 - v. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp2.411.282.910,00
 - vi. Sekretariat Daerah sebesar Rp716.964.356,00
 - vii. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp55.550.675,00
 - viii. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp767.470,00
 - ix. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur sebesar Rp78.838.400,00
 - x. PPKD sebesar Rp2.588.187.410,00
- d. Penghapusan BMD dan Double Catat sebesar Rp23.501.765.454,45 terdiri dari :
- i. Dinas Pendidikan sebesar Rp773.136.406,40
 - ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp1.894.086.000,00
 - iii. Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp28.564.701,50
 - iv. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp14.260.222,00
 - v. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp280.180.000,00
 - vi. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp35.600.000,00
 - vii. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp11.199.014.810,16
 - viii. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp23.634.098,00
 - ix. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp803.969.145,34
 - x. Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp159.933.436,00
 - xi. Inspektorat sebesar Rp29.900.000,00
 - xii. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp911.143.125,05



- xiii. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp67.865.000,00
- xiv. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp235.604.993,00
- xv. PPKD sebesar Rp1.820.308.000,00
- xvi. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp4.461.281.000,00
- xvii. Dinas Pendidikan sebesar Rp5.962.118,00
- xviii. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp26.575.000,00
- xix. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp625.400.000
- xx. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp23.300.000,00
- xxi. Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp17.009.517,00
- xxii. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp71.000.000,00
- e. Reklasifikasi kondisi asset tetap (Inventarisasi) sebesar Rp437.000.000,00 terdiri dari :
 - i. PPKD sebesar Rp437.000.000,00

5.3.1.6.6 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Saldo akumulasi amortisasi aset tak berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp16.493.115.025,80 naik sebesar Rp426.322.099,25 atau 2,65% dibanding saldo 2023 sebesar Rp16.066.792.926,55. Adapun rincian Aset lain-lain sebesar Rp16.493.115.025,80 sebagai berikut:

Tabel 5.3.114
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Aset Tidak Berwujud	(16.493.115.025,80)	(16.066.792.926,55)	(426.322.099,25)	2,65
	Jumlah	(16.493.115.025,80)	(16.066.792.926,55)	(426.322.099,25)	2,65

Tabel 5.3.115
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

URAIAN	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)
Saldo per 31 Desember 2023	16.066.792.926,55
Mutasi Tambah:	
Beban amortisasi Aset Tidak Berwujud	528.069.349,25
Jumlah Mutasi Tambah	528.069.349,25
Mutasi Kurang :	
Koreksi Akumulasi Amortisasi karena pengurangan Aset Tidak Berwujud	101.747.250,00
Jumlah Mutasi Kurang	101.747.250,00
Total Mutasi 2024	426.322.099,25
Saldo per 31 Desember 2024	16.493.115.025,80

Nilai Aset Tetap Berupa Amortisasi mengalami peningkatan sebesar Rp 426.359.224,25 terdiri dari :

1. Penambahan Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp528.069.349,25 terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan sebesar Rp139.613.673
 - b. Dinas Kesehatan sebesar Rp90.453.700
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp15.411.375
 - d. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp73.441.625
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp52.891.500
 - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp16.970.000



- g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp20.123.125
- h. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp17.379.931
- i. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp36.000.000
- j. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp26.068.893
- k. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp14.790.528
- l. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp24.925.000
2. Pengurangan Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp101.747.250,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp101.747.250

5.3.1.6.7 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Saldo akumulasi amortisasi aset tak berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp16.493.115.025,80 naik sebesar Rp426.322.099,25 atau 2,65% dibanding saldo 2023 sebesar Rp16.066.792.926,55. Adapun rincian Aset lain-lain sebesar Rp16.493.115.025,80 sebagai berikut:

Tabel 5.3.116
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Aset Lainnya (Rusak Berat dan Aset Lain-Lain Lainnya)	(131.320.042.007,03)	(142.870.965.109,14)	11.550.923.102,11	-8,08
	Jumlah	(131.320.042.007,03)	(142.870.965.109,14)	11.550.923.102,11	-8,08

Nilai Aset Tetap Berupa Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp11.550.923.102,11 terdiri dari :

1. Penambahan akumulasi penyusutan aset lainnya sebesar Rp20.393.761.919,65 terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan sebesar Rp3.496.251.013,75
 - b. Dinas Kesehatan sebesar Rp225.255.503,62
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp627.987.328,96
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp42.964.687,00
 - e. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp3.091.237.498,68
 - f. PPKD sebesar Rp1.479.734.544,00
 - g. Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp1.580.665.317,67
 - h. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp730.781.073,44
 - i. Dinas Sosial sebesar Rp80.700.000,00
 - j. Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp221.238.952,78
 - k. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp4.005.584.858,61
 - l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp28.643.124,00
 - m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp455.666.040,81
 - n. Sekretariat Daerah sebesar Rp889.516.948,50
 - o. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp106.726.818,18
 - p. Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp1.500.624,00
 - q. Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp4.535.000,00
 - r. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp145.202.100,00



- s. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp947.752.209,01
 - t. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp530.913.499,61
 - u. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur sebesar Rp380.120.069,23
 - v. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp28.165.000,00
2. Pengurangan akumulasi penyusutan aset lainnya sebesar Rp31.944.685.021,76 terdiri dari :
- a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur sebesar Rp76.363.400,00
 - b. Dinas Pendidikan sebesar Rp1.109.534.838,00
 - c. Dinas Kesehatan sebesar Rp2.460.823.250,00
 - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp555.262.340,00
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp154.785.714,28
 - f. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp14.746.107.829,21
 - g. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp98.984.098,00
 - h. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp871.492.249,50
 - i. Sekretariat Daerah sebesar Rp1.204.421.449,14
 - j. Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp165.052.846,92
 - k. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp426.937.224,61
 - l. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp353.112.022,28
 - m. PPKD sebesar Rp1.911.956.170,00
 - n. Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp5.712.940,30
 - o. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp13.486.000,00
 - p. Dinas Sosial sebesar Rp80.700.000,00
 - q. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp1.977.705.756,67
 - r. Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp209.448.000,00
 - s. Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp1.500.624,00
 - t. Kecamatan Tanah Sereal sebesar Rp4.535.000,00
 - u. Inspektorat sebesar Rp29.900.000,00
 - v. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp1.025.582.268,85
 - w. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp4.461.281.000,00

5.3.1.6.8 Dana *Transfer Treasury Deposit Facility* (TDF)

Saldo *Dana Transfer Treasury Deposit Facility* tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp7.169.764.000,00 dan Rp23.768.880.000,00 yang merupakan Dana Bagi Hasil yang disalurkan ke rekening *Treasury Deposit Facility* sesuai surat dari DJP Kementerian Keuangan RI No. S-35/PK/PK.2/2025 tanggal 17 April 2025.

Tabel 5.3.117
Dana Transfer Treasury Deposit Facility

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Saldo awal TDF	23.768.880.000,00	12.400.188.687,00
2	Penambahan	7.169.764.000,00	23.768.880.000,00
3	Pengurangan	23.768.880.000,00	12.400.188.687,00
4	Saldo Akhir TDF	7.169.764.000,00	23.768.880.000,00



5.3.1.6 PROPERTI INVESTASI

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAP) Berbasis Akrua Nomor 17 tentang Properti Investasi dan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).

Termasuk dalam kategori properti investasi antara lain:

1. Tanah yang dikuasai dan/atau dikuasai dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya dimasa depan untuk digunakan sendiri atau dijual dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka peningkatan nilai.
3. Bangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.
4. Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki pemerintah daerah tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.
5. Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang dimasa depan digunakan sebagai properti investasi.

Tidak termasuk dan bukan merupakan bagian dari definisi properti investasi aset-aset sebagai berikut:

1. Properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan dan/atau pengembangan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Properti yang masih dalam proses pembangunan dan/atau pengembangan atas nama pihak ketiga.
3. Properti yang digunakan sendiri termasuk diantaranya properti yang dikuasai untuk digunakan dimasa depan sebagai properti yang digunakan sendiri.
4. Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan.
5. Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa dibawah harga pasar, misalnya pemerintah daerah membangun apartemen atau rumah susun yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa dibawah harga pasar.
6. Properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.

Properti investasi diakui sebagai aset jika:

1. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan



2. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Dalam menentukan suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Kepastian bahwa entitas akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut.

Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal/saat perolehan.

Pada Tahun Anggaran 2024 senilai Rp218.175.889.862,00, menjadi potensi properti investasi tanah Pemerintah Kota Bogor. Sebanyak 49 bidang tanah tersebut dengan total nilai perolehan Rp213.767.403.459,00 dan 2 gedung bangunan dengan total nilai perolehan Rp4.408.486.403,00. Rincian 51 bidang aset properti investasi sebagaimana tabel dalam lampiran 15.

5.3.2 KEWAJIBAN

Kewajiban merupakan salah satu pos yang termuat dalam Neraca Pemerintah Kota Bogor. Kewajiban Kota Bogor pada tahun 2024 sebesar Rp172.758.274.730,79 mengalami penurunan sebesar Rp6.565.139.485,28 atau 3,66% dibanding dengan tahun 2023 sebesar Rp179.323.414.216,07.

Tabel 5.3.118
Kewajiban

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Kewajiban				
2	Kewajiban Jangka Pendek	110.091.452.175,79	106.374.711.749,07	3.716.740.426,72	3,49
3	Kewajiban Jangka Panjang	62.666.822.555,00	72.948.702.467,00	(10.281.879.912,00)	(14,09)
	Jumlah Kewajiban	172.758.274.730,79	179.323.414.216,07	(6.565.139.485,28)	(3,66)

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 sebesar Rp110.091.452.175,79 mengalami penurunan sebesar Rp3.716.740.426,72 atau 3,49% dari saldo 31 Desember 2023 sebesar Rp106.374.711.749,07 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.119
Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Kewajiban Jangka Pendek				
2	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	158.277.901,00	260.050.896,00	(101.772.995,00)	(39,14)
3	Utang Bunga	543.668.056,00	-	543.668.056,00	-
4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	10.281.879.912,00	10.281.879.912,00	-	-
5	Pendapatan Diterima Dimuka	2.569.064.213,13	413.113.467,07	2.155.950.746,06	521,88
6	Utang Belanja	96.531.896.093,66	95.418.767.474,00	1.113.128.619,66	1,17
7	Utang Jangka Pendek Lainnya	6.666.000,00	900.000,00	5.766.000,00	640,67
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	110.091.452.175,79	106.374.711.749,07	3.716.740.426,72	3,49

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Saldo utang perhitungan pihak ketiga (PFK) per 31 Desember 2024 sebesar Rp158.277.901,00 atau turun sebesar Rp101.772.995,00 atau 39,14% dibanding saldo 2023 sebesar Rp260.050.896,00. Adapun rincian utang perhitungan pihak ketiga sebagai berikut:



Tabel 5.3.120
Utang Perhitungan Pihak Ketiga per Perangkat Daerah

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)				
2	Utang PPN				
	- Rumah Sakit Umum Daerah - BLUD	8.777.901,00	0,00	8.777.901,00	-
	- Puskesmas Bogor Timur	0,00	11.050.896,00	(11.050.896,00)	(100,00)
3	Utang Jaminan Bongkar Reklame				
	- Badan Pendapatan Daerah	149.500.000,00	249.000.000,00	(99.500.000,00)	(39,96)
	Jumlah Utang PFK	158.277.901,00	260.050.896,00	(101.772.995,00)	(39,14)

(Rincian utang perhitungan pihak ketiga (PFK) disajikan pada lampiran 11, dan 12)

5.3.2.1.1 Utang Bunga

Saldo utang bunga per 31 Desember 2024 sebesar Rp543.668.056,00 sedangkan saldo 2023 sebesar Rp0,00. Adapun utang bunga merupakan utang bunga atas penerusan pinjaman jangka Panjang ke Lembaga Keuangan sesuai dengan Laporan Keuangan Audited PDAM Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.121
Utang Bunga

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
	Utang Bunga				
1	Utang Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Negeri-Jangka Panjang	543.668.056,00	0,00	543.668.056,00	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	543.668.056,00	0,00	543.668.056,00	-

5.3.2.1.2 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Saldo bagian lancar utang jangka Panjang Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.281.879.912,00 tidak mengalami kenaikan atau penurunan dari saldo 31 Desember 2023 sebesar Rp10.281.879.912,00. Adapun rincian bagian lancar utang jangka Panjang sebagai berikut.

Tabel 5.3.122
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang				
2	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Penerusan Pinjaman Luar Negeri - Jangka Panjang	5.484.766.176,00	5.484.766.176,00	0,00	0,00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) - BUMD - Jangka Panjang	4.797.113.736,00	4.797.113.736,00	0,00	0,00
	Jumlah Bagian Lancar	10.281.879.912,00	10.281.879.912,00	0,00	0,00

Saldo bagian lancar utang jangka panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.797.113.736,00 terdiri dari bagian lancar utang atas penerusan pinjaman luar negeri berasal dari dana pinjaman sesuai Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kota Bogor Nomor: SLA-1226/DSMI/2009 tanggal 2 November 2009 tentang Dana Pinjaman dari *International Bank For Reconstruction and Development* No. 7730-10 Tanggal 1 September 2009 dalam rangka



pembiayaan *Urban Water Supply and Sanitation Project* sebesar Rp5.484.766.176,00 dan bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bukan bank sesuai dengan Risalah Rapat Rekonsiliasi Pinjaman Antara PT Sarana Mukti Infrastruktur (Persero) dengan Pemerintah Kota Bogor sebesar Rp4.797.879.912,00

5.3.2.1.3 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pos untuk mencatat pendapatan yang seharusnya belum diterima sampai dengan tanggal neraca tetapi sudah diterima didepan/dimuka, pada Tahun Anggaran 2024 ini terdapat pendapatan diterima dimuka total senilai Rp2.569.064.213,13 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.123
Pendapatan Diterima Dimuka per Perangkat Daerah

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pendapatan Diterima Dimuka				
2	Pendapatan Diterima Dimuka BLUD				
	- Rumah Sakit Umum Daerah - BLUD	2.312.520.955,64	159.594.328,45	2.152.926.627,19	1.349,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah				
	- Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu	256.543.257,49	253.519.138,62	3.024.118,87	-
	Jumlah Pendapatan diterima dimuka	2.569.064.213,13	413.113.467,07	2.155.950.746,06	521,88

(Rincian pendapatan diterima dimuka disajikan pada lampiran 13.1 dan 13.2)

5.3.2.1.4 Utang Belanja

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp96.531.896.093,66 atau naik sebesar Rp1.113.128.619,66 atau 1,17% dibanding saldo 2023 sebesar Rp95.418.767.474,00. Adapun rincian utang belanja sebagai berikut:

Tabel 5.3.124
Rincian Utang Belanja Per Objek

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
2	Utang Belanja Pegawai	2.753.356.083,00	3.448.530.966,00	(695.174.883,00)	(20,16)
3	Utang Belanja Barang dan Jasa	92.069.170.089,66	73.186.457.099,00	18.882.712.990,66	25,80
4	Utang Belanja Modal Tanah	0,00	57.054.000,00	(57.054.000,00)	-
5	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.709.369.921,00	268.422.114,00	1.440.947.807,00	536,82
6	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan (KDP)	0,00	8.465.191.362,00	(8.465.191.362,00)	(100,00)
7	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	9.993.111.933,00	(9.993.111.933,00)	(100,00)
	Jumlah Utang Belanja	96.531.896.093,66	95.418.767.474,00	1.113.128.619,66	1,17

(Rincian utang belanja per perangkat daerah disajikan pada lampiran 14.1 dan 14.2)

5.3.2.1.5 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.666.000,00 sedangkan Utang Belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp900.000,00 merupakan Utang Transfer Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi atas sisa dana Kegiatan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 yang belum dikembalikan ke RKUD Provinsi. Adapun mutasi Utang Transfer Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi sebagai berikut:



Tabel 5.3.125
Utang Jangka Pendek Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
	Utang Jangka Pendek Lainnya				
1	Utang Transfer Bantuan Keuangan antar Daerah	6.666.000,00	900.000,00	5.766.000,00	640,67
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	6.666.000,00	900.000,00	5.766.000,00	640,67

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp72.948.702.467,00 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari saldo 31 Desember 2023 sebesar Rp72.948.702.467,00. Adapun rincian kewajiban jangka panjang sebagai berikut:

Tabel 5.3.126
Kewajiban Jangka Panjang

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Kewajiban Jangka Panjang				
2	Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri				
	-Badan Keuangan dan Aset Daerah	43.878.129.419,00	49.362.895.595,00	(5.484.766.176,00)	(11,11)
3	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) - BUMD				
	-Badan Keuangan dan Aset Daerah	18.788.693.136,00	23.585.806.872,00	(4.797.113.736,00)	(20,34)
	Jumlah Utang	62.666.822.555,00	72.948.702.467,00	(10.281.879.912,00)	(14,09)

5.3.2.2.1 Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri

Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri berasal dari dana pinjaman sesuai Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kota Bogor Nomor: SLA-1226/DSMI/2009 tanggal 2 November 2009 tentang Dana Pinjaman dari *International Bank For Reconstruction and Development* No. 7730-10 Tanggal 1 September 2009 dalam rangka pembiayaan *Urban Water Supply and Sanitation Project*. Pemerintah Kota Bogor sebagai pihak yang menandatangani NPPP wajib menganggarkan didalam APBD Pembiayaan cicilan pinjaman yang terdiri dari atas pokok pinjaman dan bunga pinjaman, dengan mengakui adanya hutang jangka panjang terlebih dahulu. Adapun sumber dana untuk pembayaran cicilan hutang jangka panjang tersebut berasal dari PDAM Tirta Pakuan. Mekanisme penyetoran uang pinjaman langsung dari Pusat ke PDAM dan tidak melalui rekening Kas Daerah.

Pembayaran utang pokok sesuai jadwal pembayaran dari bulan Nopember 2018 s.d. Nopember 2023 /tahunnya, sebesar Rp2.748.516.129,03 dan untuk bunganya baru dapat diketahui setelah Surat Tagihan Pembayaran Jatuh tempo dari Dirjen Perbendaharaan/ Kanwil Perbendaharaan.

Tabel 5.3.127
Mutasi Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri

Jenis Kewajiban	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pembayaran s/d tahun 2024 (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban Jangka Panjang (Rp)
Utang Jangka Panjang atas Pinjaman World Bank No SLA-1226/DSMI/2009						
- 2017	85.013.875.741,00	0,00	0,00	85.013.875.741,00	0,00	85.013.875.741,00
- 2018		0,00	2.742.383.088,00	82.271.492.653,00	0,00	82.271.492.653,00
- 2019		0,00	5.484.766.176,00	76.786.726.477,00	5.484.766.176,00	71.301.960.301,00
- 2020		0,00	5.484.766.176,00	71.301.960.301,00	5.484.766.176,00	65.817.194.125,00
- 2021		0,00	5.484.766.176,00	65.817.194.125,00	5.484.766.176,00	60.332.427.949,00
- 2022		0,00	5.484.766.176,00	60.332.427.949,00	5.484.766.176,00	54.847.661.773,00
- 2023		0,00	5.484.766.176,00	54.847.661.773,00	5.484.766.176,00	49.362.895.597,00
- 2024		0,00	5.484.766.176,00	49.362.895.597,00	5.484.766.176,00	43.878.129.421,00



5.3.2.2.2 Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) - BUMD

Utang kepada Lembaga keuangan bukan bank merupakan perjanjian pemberian pinjaman Nomor: 45 untuk membiayai kegiatan Peningkatan Jalan Suryakencana (Kawasan Suryakencana).

Pembayaran pokok dilakukan dengan cara pemotongan langsung terhadap penyaluran Dana Transfer Umum (DTU) yang mengacu kepada perjanjian pengelolaan pinjaman. Besaran DTU dapat diperhitungkan sesuai dengan hasil rekonsiliasi antara pihak pertama dengan DJPK. Besarnya angsuran pokok setiap bulan sebesar 1/12 dari nilai DTU yang dapat diperhitungkan di tahun berkenaan yang dibayarkan setiap akhir bulan setelah masa tenggang terakhir

Utang atas penerusan pinjaman luar negeri per 31 Desember 2024 sebesar Rp18.788.693.136,00 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp23.585.806.872,00. Adapun pada tahun 2024 utang kepada Lembaga keuangan bukan bank direklasifikasi ke bagian lancar kewajiban jangka Panjang sebesar Rp4.797.113.736,00. Berikut mutasi utang atas penerusan pinjaman luar negeri tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.3.128
Mutasi Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) - BUMD

Jenis Kewajiban	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pembayaran (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban Jangka Panjang (Rp)
Utang kepada Lembaga keuangan bukan bank merupakan perjanjian pemberian pinjaman nomor : 45 untuk membiayai kegiatan Peningkatan Jalan Suryakencana (Kawasan Suryakencana)						
- 2021	0,00	30.405.414.751,00	0,00	30.405.414.751,00	0,00	30.405.414.751,00
- 2022	30.405.414.751,00	0,00	1.622.734.665,00	28.782.680.086,00	799.518.956,00	27.983.161.130,00
- 2023	27.983.161.130,00	0,00	399.759.478,00	28.382.920.608,00	4.797.113.736,00	23.585.806.872,00
- 2024	23.585.806.872,00	0,00	4.797.113.736,00	23.585.806.872,00	4.797.113.736,00	18.788.693.136,00

5.3.3 EKUITAS

Saldo Ekuitas Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.869.386.015.526,97 mengalami kenaikan sebesar Rp256.271.342.592,00 atau sebesar 2,41% dibanding saldo 31 Desember 2023 sebesar Rp10.613.114.672.934,97. Adapun rincian ekuitas sebagai berikut:

Tabel 5.3.129
Ekuitas

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Ekuitas				
2	Ekuitas Awal	10.613.114.672.934,97	10.174.464.362.679,95	438.650.310.255,00	4,31
3	Surplus / Defisit - LO	58.676.399.723,31	156.235.389.193,60	(97.558.989.470,29)	(62,44)
4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	197.594.942.868,69	282.414.921.061,42	(84.819.978.192,73)	(30,03)
5	Ekuitas Akhir	10.869.386.015.526,97	10.613.114.672.934,97	256.271.342.592,00	2,41



5.4 PENJELASAN ATAS POS - POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Transfer, dan Pos - Pos Luar Biasa.

Laporan Operasional Pemerintah Kota Bogor diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu *kegiatan operasional*, *kegiatan non operasional*, dan *pos luar biasa*.

5.4.1 Pendapatan Daerah - LO

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Bogor dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan LO pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing masing dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.1

Pendapatan Daerah LO TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.613.207.035.756,08	1.433.294.780.168,91	179.912.255.587,17	12,55
2	Pendapatan Transfer	1.701.821.239.565,00	1.636.490.268.772,00	65.330.970.793,00	3,99
3	Lain - Lain Pendapatan yang Sah	42.961.879.333,77	66.574.926.398,81	(23.613.047.065,04)	(35,47)
	Jumlah	3.357.990.154.654,85	3.136.359.975.339,72	221.630.179.315,13	7,07

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Pendapatan Daerah - LO TA 2024 sebesar Rp3.357.990.154.654,85 mengalami peningkatan sebesar Rp221.630.179.315,13 atau 7,07% dibandingkan Pendapatan - LO TA 2023 sebesar Rp3.136.359.975.339,72.

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode TA 2024 dan 2023, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.2

Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pajak Daerah	1.072.592.914.165,00	972.314.483.639,00	100.278.430.526,00	10,31
2	Retribusi Daerah	429.458.652.647,18	31.421.925.232,38	398.036.727.414,80	1.266,75
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	75.711.032.790,57	36.551.189.768,95	39.159.843.021,62	107,14
4	Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah	35.444.436.153,33	393.007.181.528,58	(357.562.745.375,25)	(90,98)
	Jumlah	1.613.207.035.756,08	1.433.294.780.168,91	179.912.255.587,17	12,55

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Pendapatan Asli Daerah - LO TA 2024 sebesar Rp1.613.207.035.756,08 mengalami kenaikan sebesar Rp179.912.255.587,17 atau 12,55% dari Pendapatan - LO TA 2023 sebesar Rp1.433.294.780.168,91.

Rincian masing-masing Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut;

5.4.1.1.1 Pajak Daerah - LO

Pajak Daerah - LO adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola Pemerintah Kota Bogor, pendapatan pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2024, sehingga nilai pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang ditetapkan



pada tahun 2024 dan bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang ditetapkan tahun 2024, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.3
Pajak Daerah - LO TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pajak Hotel	128.990.798.187,00	120.127.841.958,00	8.862.956.229,00	7,38
2	Pajak Restoran	214.101.747.593,00	193.851.366.374,00	20.250.381.219,00	10,45
3	Pajak Hiburan	30.285.088.596,00	22.617.679.228,00	7.667.409.368,00	33,90
4	Pajak Reklame	10.128.298.469,00	10.898.485.520,00	(770.187.051,00)	(7,07)
5	Pajak Penerangan Jalan	95.818.548.299,00	61.678.951.202,00	34.139.597.097,00	55,35
6	Pajak Parkir	7.965.418.166,00	14.628.794.964,00	(6.663.376.798,00)	(45,55)
7	Pajak Air Tanah	2.014.470.394,00	2.518.760.477,00	(504.290.083,00)	(20,02)
8	PBB P2	296.832.276.011,00	285.770.146.458,00	11.062.129.553,00	3,87
9	Pajak BPHTB	286.456.268.450,00	260.222.457.458,00	26.233.810.992,00	10,08
	Jumlah	1.072.592.914.165,00	972.314.483.639,00	100.278.430.526,00	10,31

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan PAD Pajak Daerah - LO TA 2024 sebesar Rp1.072.592.914.165,00 mengalami peningkatan sebesar Rp100.278.430.526,00 atau 10,31% dari PAD Pajak Daerah - LO TA 2023 sebesar Rp972.314.483.639,00.

Berikut rincian PAD - Pajak Daerah per Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.4
Rincian PAD - Pajak Daerah - LO Per Perangkat Daerah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
	Badan Pendapatan Daerah				
1	Pajak Hotel	128.990.798.187,00	120.127.841.958,00	8.862.956.229,00	7,38
2	Pajak Restoran	214.101.747.593,00	193.851.366.374,00	20.250.381.219,00	10,45
3	Pajak Hiburan	30.285.088.596,00	22.617.679.228,00	7.667.409.368,00	33,90
4	Pajak Reklame	10.128.298.469,00	10.898.485.520,00	(770.187.051,00)	(7,07)
5	Pajak Penerangan Jalan	95.818.548.299,00	61.678.951.202,00	34.139.597.097,00	55,35
6	Pajak Parkir	7.965.418.166,00	14.628.794.964,00	(6.663.376.798,00)	(45,55)
7	Pajak Air Tanah	2.014.470.394,00	2.518.760.477,00	(504.290.083,00)	(20,02)
8	PBB P2	296.832.276.011,00	285.770.146.458,00	11.062.129.553,00	3,87
9	Pajak BPHTB	286.456.268.450,00	260.222.457.458,00	26.233.810.992,00	10,08
	Jumlah	1.072.592.914.165,00	972.314.483.639,00	100.278.430.526,00	10,31

Adapun perbandingan nilai PAD - Pajak Daerah antara LO dan LRA TA 2024 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.5
Perbandingan Nilai PAD - Pajak Daerah pada LO dan LRA TA 2024

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan/Selisih
1	Pajak Hotel	128.990.798.187,00	123.207.802.097,00	5.782.996.090,00
2	Pajak Restoran	214.101.747.593,00	208.515.593.649,00	5.586.153.944,00
3	Pajak Hiburan	30.285.088.596,00	29.358.580.222,00	926.508.374,00
4	Pajak Reklame	10.128.298.469,00	9.736.486.534,00	391.811.935,00



No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan/Selisih
5	Pajak Penerangan Jalan	95.818.548.299,00	95.818.548.299,00	-
6	Pajak Parkir	7.965.418.166,00	7.859.694.368,00	105.723.798,00
7	Pajak Air Tanah	2.014.470.394,00	1.924.708.540,00	89.761.854,00
8	PBB P2	296.832.276.011,00	210.911.617.241,00	85.920.658.770,00
9	Pajak BPHTB	286.456.268.450,00	286.435.829.900,00	20.438.550,00
Jumlah		1.072.592.914.165,00	973.768.860.850,00	98.824.053.315,00

Selisih/perbedaan PAD - Pajak Daerah antara LO dan LRA sebesar Rp98.824.053.315,00 terdiri atas:

1. Perbedaan Pajak Hotel antara LO dan LRA sebesar Rp5.782.996.090,00, merupakan piutang berjalan tahun 2024 sebesar Rp8.759.322.301,00 dan adanya pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp2.976.326.211,00;
2. Perbedaan Pajak Restoran antara LO dan LRA sebesar Rp5.586.153.944,00. Perbedaan tersebut merupakan piutang berjalan tahun 2024 sebesar Rp9.588.172.522,00 dan adanya pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp4.002.018.578,00;
3. Perbedaan Pajak Hiburan antara LO dan LRA sebesar Rp926.508.374,00. Perbedaan tersebut merupakan piutang berjalan tahun 2024 sebesar Rp953.925.678,00 dan adanya pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp27.417.304,00;
4. Perbedaan Pajak Reklame antara LO dan LRA sebesar Rp391.811.935,00. Perbedaan tersebut merupakan piutang berjalan tahun 2024 sebesar Rp767.991.196,00 dan adanya pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp376.179.261,00;
5. Perbedaan Pajak Parkir antara LO dan LRA sebesar Rp105.723.798,00. Perbedaan tersebut merupakan piutang berjalan tahun 2024 sebesar Rp129.114.756,00 dan adanya pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp23.390.958;
6. Perbedaan Pajak Air Tanah antara LO dan LRA sebesar Rp89.761.854,00. Perbedaan tersebut merupakan piutang berjalan tahun 2024 sebesar Rp151.966.984,00 dan adanya pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp62.205.130;
7. Perbedaan PBB P2 antara LO dan LRA sebesar Rp85.920.658.770,00. Perbedaan tersebut merupakan piutang berjalan tahun 2024 sebesar Rp112.033.757.579,00 dan adanya pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp26.113.098.809,00;
8. Perbedaan Pajak BPHTB antara LO dan LRA sebesar Rp20.438.550,00. Perbedaan tersebut merupakan piutang berjalan tahun 2024 sebesar Rp99.968.550,00 dan adanya pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp79.530.000,00,00.

5.4.1.1.2 Retribusi Daerah - LO

Retribusi Daerah - LO dipungut oleh beberapa Perangkat Daerah penghasil retribusi yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bogor. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bogor. Pemungutan Retribusi Daerah Kota Bogor didasarkan atas Perda tentang Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.6

Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Retribusi Jasa Umum	412.636.564.581,05	16.756.686.953,00	395.879.877.628,05	2.362,52
2	Retribusi Jasa Usaha	8.734.683.322,00	6.628.165.318,00	2.106.518.004,00	31,78
3	Retribusi Perizinan Tertentu	8.087.404.744,13	8.037.072.961,38	50.331.782,75	0,63
Jumlah		429.458.652.647,18	31.421.925.232,38	398.036.727.414,80	1.266,75



Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Pendapatan Retribusi Daerah - LO TA 2024 sebesar Rp429.458.652.647,18 mengalami kenaikan sebesar Rp398.036.727.414,80 atau 1.266,75% dari PAD Retribusi Daerah - LO TA 2023 sebesar Rp31.421.925.232,38.

Adapun perbandingan nilai PAD - Retribusi Daerah antara LO dan LRA TA 2024 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.7
Perbandingan Nilai PAD - Retribusi Daerah pada LO dan LRA TA 2024

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan/Selisih
1	Retribusi Jasa Umum	412.636.564.581,05	400.997.137.220,24	11.639.427.360,81
2	Retribusi Jasa Usaha	8.734.683.322,00	7.953.316.342,00	781.366.980,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	8.087.404.744,13	8.494.999.428,00	(407.594.683,87)
Jumlah		429.458.652.647,18	417.445.452.990,24	12.013.199.656,94

Selisih/perbedaan PAD - Retribusi Daerah antara LO dan LRA sebesar Rp12.013.199.656,94 terdiri atas:

1. Perbedaan Retribusi Jasa Umum antara LO dan LRA sebesar Rp11.639.427.360,81 terdiri dari :
 - a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
 - Perbedaan tersebut merupakan pembayaran atas piutang tahun 2023 pada retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp6.925.500,00.
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah- BLUD
 - Perbedaan retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah - BLUD antara LRA dan LO sebesar Rp11.646.352.860,81. Perbedaan tersebut merupakan piutang berjalan tahun 2024 sebesar Rp67.876.193.775 dan adanya pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp56.229.840.914.
2. Perbedaan Retribusi Jasa Usaha antara LO dan LRA sebesar Rp781.366.980,00 terdapat pada:
 - a. Dinas Perumahan dan Permukiman
 - Perbedaan retribusi penyewaan tanah dan bangunan pada Dinas Perumahan dan Permukiman antara LRA dan LO sebesar Rp135.495.000,00. Perbedaan tersebut merupakan piutang berjalan tahun 2024 sebesar 516.655.000,00 dan adanya pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar 381.160.000,00.
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - Perbedaan retribusi penyewaan tanah dan bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara LRA dan LO sebesar Rp568.507.890,00. Perbedaan tersebut merupakan piutang berjalan tahun 2024 sebesar Rp88.548.000,00 dan adanya pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp11.183.910,00.
 - c. Badan Keuangan dan Aset Daerah
 - Perbedaan retribusi penyewaan tanah dan bangunan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah antara LRA dan LO sebesar Rp568.507.890,00. Perbedaan tersebut merupakan piutang berjalan tahun 2024 sebesar Rp627.839.746,00 dan adanya pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp59.331.856,00.
3. Perbedaan Retribusi Perizinan Tertentu antara LO dan LRA sebesar Rp407.594.683,87 terdapat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu karena adanya pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp1.755.337,00 untuk retribusi izin mendirikan bangunan, adanya pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp740.445.788,00 dan piutang tahun 2024 sebesar Rp337.630.560,00 untuk retribusi persetujuan bangunan gedung, adanya pendapatan retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing (IMTA) tahun 2024 sebesar Rp253.519.138,62 atas pembayaran pendapatan



diterima dimuka tahun sebelumnya, dan adanya pembayaran pendapatan diterima dimuka retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) pada tahun 2024 sebesar Rp256.543.257,49.

5.4.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum - LO

Retribusi Jasa Umum - LO merupakan sumber PAD yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum pemerintah Kota Bogor, Retribusi Jasa Umum dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.4.8

Pendapatan Retribusi Jasa Umum TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pelayanan Kesehatan	394.860.277.019,05	63.630.000,00	394.796.647.019,05	620.456,78
2	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	14.682.315.717,00	11.903.096.282,00	2.779.219.435,00	23,35
3	Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	39.171.500,00	636.841.750,00	(597.670.250,00)	(93,85)
4	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.753.673.000,00	2.133.247.000,00	620.426.000,00	29,08
5	Pengujian Kendaraan Bermotor	-	1.184.020.000,00	(1.184.020.000,00)	(100,00)
6	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	-	201.657.050,00	(201.657.050,00)	(100,00)
7	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	246.100.000,00	227.050.000,00	19.050.000,00	8,39
8	Pengolahan Limbah Cair	55.027.345,00	45.368.621,00	9.658.724,00	21,29
9	Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	200.302.750,00	(200.302.750,00)	(100,00)
10	Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	161.473.500,00	(161.473.500,00)	(100,00)
Jumlah		412.636.564.581,05	16.756.686.953,00	395.879.877.628,05	2.362,52

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Pendapatan Retribusi Jasa Umum - LO TA 2024 sebesar Rp412.636.564.581,05 mengalami peningkatan sebesar Rp395.879.877.628,05 atau 2.362,52% dari PAD Retribusi Jasa Umum - LO TA 2023 sebesar Rp16.756.686.953,00.

Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Umum pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.9

Pendapatan Retribusi Jasa Umum TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	DINAS KESEHATAN				
	Pelayanan Kesehatan	63.335.707.917,00	63.630.000,00		
	Jumlah	63.335.707.917,00	63.630.000,00	63.272.077.917,00	99.437,49
2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH - BLUD				
	Pelayanan Kesehatan	331.524.569.102,05	-		
	Jumlah	331.524.569.102,05	-	331.524.569.102,05	100,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	246.100.000,00	227.050.000,00		
	Pengolahan Limbah Cair	55.027.345,00	45.368.621,00		
	Jumlah	301.127.345,00	272.418.621,00	28.708.724,00	10,54
4	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN				
	Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	39.171.500,00	636.841.750,00		
	Jumlah	39.171.500,00	636.841.750,00	(597.670.250,00)	(93,85)
5	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				
	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	-	201.657.050,00		
	Jumlah	-	201.657.050,00	(201.657.050,00)	(100,00)
6	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	14.682.315.717,00	11.903.096.282,00		
	Jumlah	14.682.315.717,00	11.903.096.282,00	2.779.219.435,00	23,35



No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
7	DINAS PERHUBUNGAN				
	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.753.673.000,00	2.133.247.000,00		
	Pengujian Kendaraan Bermotor	-	1.184.020.000,00		
	Jumlah	2.753.673.000,00	3.317.267.000,00	(563.594.000,00)	(16,99)
8	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN				
	Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	200.302.750,00		
	Jumlah	-	200.302.750,00	(200.302.750,00)	(100,00)
9	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
	Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	161.473.500,00		
	Jumlah	-	161.473.500,00	(161.473.500,00)	(100,00)
	TOTAL	412.636.564.581,05	16.756.686.953,00	395.879.877.628,05	2.362,52

5.4.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha - LO

Retribusi Jasa Usaha - LO merupakan sumber PAD yang berhubungan dengan pemakaian aset daerah Kota Bogor, Retribusi Jasa Usaha dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.4.10

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pemakaian Kekayaan Daerah	6.202.153.322,00	4.472.703.998,00	1.729.449.324,00	38,67
2	Terminal	-	118.145.320,00	(118.145.320,00)	(100,00)
3	Tempat Khusus Parkir	54.970.000,00	52.120.000,00	2.850.000,00	5,47
4	Rumah Potong Hewan	813.828.000,00	632.902.000,00	180.926.000,00	28,59
5	Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.663.732.000,00	1.352.294.000,00	311.438.000,00	23,03
	Jumlah	8.734.683.322,00	6.628.165.318,00	2.106.518.004,00	31,78

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Retribusi Jasa Usaha - LO TA 2024 sebesar Rp8.734.683.322,00 mengalami peningkatan sebesar Rp2.106.518.004,00 atau 31,78% dari PAD Retribusi Jasa Usaha - LO TA 2023 sebesar Rp6.628.165.318,00.

Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.11
Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha per Perangkat Daerah
TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN				
	Pemakaian Kekayaan Daerah	2.068.270.000,00	2.084.105.000,00		
	Tempat Rekreasi dan Olahraga	110.430.000,00	-		
	Jumlah	2.178.700.000,00	2.084.105.000,00	94.595.000,00	4,54
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	Pemakaian Kekayaan Daerah	151.750.000,00	146.350.000,00		
	Jumlah	151.750.000,00	146.350.000,00	5.400.000,00	3,69



No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
3	DINAS PERHUBUNGAN				
	Terminal	-	118.145.320,00		
	Tempat Khusus Parkir	54.970.000,00	52.120.000,00		
	Jumlah	54.970.000,00	170.265.320,00	(115.295.320,00)	(67,72)
4	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN				
	Rumah Potong Hewan	813.828.000,00	632.902.000,00		
	Jumlah	813.828.000,00	632.902.000,00	180.926.000,00	28,59
5	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				
	Pemakaian Kekayaan Daerah	54.000.000,00	41.750.000,00		
	Jumlah	54.000.000,00	41.750.000,00	12.250.000,00	29,34
6	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	Pemakaian Kekayaan Daerah	3.291.148.384,00	1.934.411.177,00		
	Jumlah	3.291.148.384,00	1.934.411.177,00	1.356.737.207,00	70,14
7	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
	Pemakaian Kekayaan Daerah	636.984.938,00	266.087.821,00		
	Jumlah	636.984.938,00	266.087.821,00	370.897.117,00	139,39
8	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA				
	Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.553.302.000,00	1.352.294.000,00		
	Jumlah	1.553.302.000,00	1.352.294.000,00	201.008.000,00	14,86
	Jumlah Keseluruhan	8.734.683.322,00	6.628.165.318,00	2.106.518.004,00	31,78

5.4.1.1.2.3 Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu - LO

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan sumber PAD yang berhubungan dengan fungsi Pemerintah Kota Bogor sebagai Regulator dan Otorisasi untuk memberikan izin terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Retribusi Perizinan Tertentu dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.4.12
Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	-	80.625.000,00	(80.625.000,00)	(100,00)
2	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	253.519.138,62	167.188.861,38	86.330.277,24	51,64
3	Persetujuan Bangunan Gedung	7.645.206.363,00	7.789.259.100,00	(144.052.737,00)	(1,85)
4	Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	188.679.242,51	-	188.679.242,51	100,00
	Jumlah	8.087.404.744,13	8.037.072.961,38	50.331.782,75	0,63

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Retribusi Perizinan Tertentu - LO TA 2024 sebesar Rp8.087.404.744,13 mengalami peningkatan sebesar Rp50.331.782,75 atau 0,63% dari PAD Retribusi Perizinan Tertentu - LO TA 2023 sebesar Rp8.037.072.961,38.

Rincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 dijelaskan pada tabel berikut.



Tabel 5.4.13
Rincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu per Perangkat Daerah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	253.519.138,62	167.188.861,38	86.330.277,24	51,64
	Persetujuan Bangunan Gedung	7.645.206.363,00	7.789.259.100,00	(144.052.737,00)	(1,85)
	Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	188.679.242,51	-	188.679.242,51	100,00
	Jumlah	8.087.404.744,13	7.956.447.961,38	(57.722.459,76)	(0,73)
2	DINAS PERHUBUNGAN				
	Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	-	80.625.000,00	(80.625.000,00)	(100,00)
	Jumlah	-	80.625.000,00	(80.625.000,00)	(100,00)
	TOTAL	8.087.404.744,13	8.037.072.961,38	(138.347.459,76)	(1,72)

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah - LO yang Dipisahkan merupakan sumber PAD dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kota Bogor pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dengan realisasi TA 2024 dan 2023 dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.14
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) - LO - Bank Kota	4.087.409.370,00	2.774.558.399,25	1.312.850.970,75	47,32
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) - LO - Bank BJB	4.260.852.544,00	4.750.663.159,00	(489.810.615,00)	(10,31)
3	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) - LO - PD Pasar Pakuan Jaya	8.550.122.766,00	791.025.366,90	7.759.097.399,10	980,89
4	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) - LO - PD Jasa Transportasi	-	87.737.781,45	(87.737.781,45)	(100,00)
5	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) - LO - PERUMDA Tirta Pakuan	58.812.648.110,57	28.147.205.062,35	30.665.443.048,22	108,95
	Jumlah	75.711.032.790,57	36.551.189.768,95	39.159.843.021,62	107,14

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO TA 2024 sebesar Rp75.711.032.790,57 mengalami peningkatan sebesar Rp39.159.843.021,62 atau 107,14% dari PAD Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO TA 2023 sebesar Rp36.551.189.768,95.

Adapun perbandingan nilai PAD - Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah - LO antara LO dan LRA TA 2024 yang disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.4.15
Perbandingan Nilai PAD - Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
pada LO dan LRA TA 2024

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan/Selisih
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) - LO - Bank Kota	4.087.409.370,00	2.774.558.399,00	1.312.850.971,00
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) - LO - Bank BJB	4.260.852.544,00	4.750.663.159,00	(489.810.615,00)
3	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) - LO - PD Pasar Pakuan Jaya	8.550.122.766,00	1.173.573.966,00	7.376.548.800,00
4	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) - LO - PD Jasa Transportasi	-	-	-
5	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) - LO - PERUMDA Tirta Pakuan	58.812.648.110,57	25.588.368.239,00	33.224.279.871,57
Jumlah		75.711.032.790,57	34.287.163.763,00	41.423.869.027,57

Selisih/perbedaan PAD - Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO antara LO dan LRA sebesar Rp41.423.869.027,57 terdiri atas:

1. Perbedaan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) - *Bank Kota* antara LO dan LRA merupakan setoran bagian laba yang dibagikan atas penyertaan modal Pemda pada BUMD pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp2.774.558.399,00 dan penyertaan modal Pemda pada BUMD sebesar Rp4.087.409.370,00.
2. Perbedaan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada *PT Bank BJB Banten* antara LO dan LRA merupakan pemindahbukuan atas dividen sebesar Rp4.750.663.159,00 dan piutang bagian laba (dividen) TA 2024 sebesar Rp4.260.852.544,00.
3. Perbedaan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Aneka Usaha) - PD Pasar Pakuan Jaya antara LO dan LRA merupakan penyertaan modal Pemda pada BUMD sebesar Rp8.300.122.766,00, bagian laba yang dibagikan atas penyertaan modal Pemda pada BUMD Tahun 2024 sebesar Rp962.724.435,00, setoran atas kekurangan laba yang dibagikan atas penyertaan modal Pemda tahun 2017 sebesar Rp210.849.531,00 dan piutang bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp250.000.000,00.
4. Perbedaan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Bidang Air Minum) - PERUMDA Tirta Pakuan antara LO dan LRA merupakan penyertaan modal Pemda pada BUMD sebesar Rp58.812.648.110,57 dan bagian laba yang dibagikan atas penyertaan modal Pemda pada BUMD tahun 2024 sebesar Rp25.588.369.000,00 serta terdapat koreksi kelebihan setor bagian laba sebesar Rp761,00.

5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah - LO

Lain-lain PAD yang Sah - LO merupakan Pendapatan Asli Daerah selain Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang diterima Pemerintah Kota Bogor dengan realisasi TA 2024 dapat disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.4.16
Lain-lain PAD yang Sah - LO TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.365.249.800,00	2.069.346.709,00	(704.096.909,00)	(34,03)
	Hasil Penjualan Tanah - LO	-	6.214.425,00	(6.214.425,00)	(100,00)
	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin - LO	40.529.200,00	-	40.529.200,00	100,00
	Hasil Penjualan Aset Lainnya - Aset Lain - Lain - Aset Rusak Berat / Usang - LO	1.324.720.600,00	2.063.132.284,00	(738.411.684,00)	(35,79)
2	Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	12.629.016,00	167.802.000,00	(155.172.984,00)	(92,47)
	Hasil dari Bangun Guna Serah - LO	-	167.802.000,00	(167.802.000,00)	(100,00)
	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	12.629.016,00	-	12.629.016,00	100,00
3	Hasil Kerja Sama Daerah	-	1.361.135.000,00	(1.361.135.000,00)	(100,00)
	Hasil Kerja Sama Daerah - LO	-	1.361.135.000,00	(1.361.135.000,00)	(100,00)
4	Jasa Giro	4.035.307.746,00	5.177.638.309,00	(1.142.330.563,00)	(22,06)
	Jasa Giro pada Kas Daerah - LO	3.815.384.199,00	4.941.090.813,00	(1.125.706.614,00)	(22,78)
	Jasa Giro pada Kas di Bendahara - LO	202.022.634,00	236.543.185,00	(34.520.551,00)	(14,59)
	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS - LO	-	4.311,00	(4.311,00)	(100,00)
	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas-LO	17.900.913,00	-	17.900.913,00	100,00
5	Pendapatan Bunga	7.768.345.613,00	6.994.811.761,14	773.533.851,86	11,06
	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah - LO	7.768.345.613,00	6.994.811.761,14	773.533.851,86	11,06
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - LO	30.183.333,33	204.756.749,57	(174.573.416,24)	(85,26)
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - LO	30.183.333,33	204.756.749,57	(174.573.416,24)	(85,26)
7	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	397.410.826,00	454.743.324,00	(57.332.498,00)	(12,61)
	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LO	397.410.826,00	454.743.324,00	(57.332.498,00)	(12,61)
8	Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	627.473.886,00	474.650.538,00	152.823.348,00	32,20
	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	627.473.886,00	474.650.538,00	152.823.348,00	32,20
	Pendapatan Denda Pajak Daerah	16.438.061.894,00	12.054.815.837,00	4.383.246.057,00	36,36
9	Pendapatan Denda Pajak Hotel - LO	3.244.055.932,00	161.757.503,00	3.082.298.429,00	1.905,51
	Pendapatan Denda Pajak Hotel - LO	3.140.153.308,00	125.352.086,00	3.014.801.222,00	2.405,07
	Pendapatan Denda Pajak Motel - LO	47.882.788,00	5.255.790,00	42.626.998,00	811,05
	Pendapatan Denda Pajak Losmen - LO	-	472.891,00	(472.891,00)	(100,00)
	Pendapatan Denda Pajak Wisma Pariwisata - LO	35.715.158,00	21.023.038,00	14.692.120,00	69,89
	Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) - LO	20.304.678,00	9.653.698,00	10.650.980,00	110,33
10	Pendapatan Denda Pajak Restoran - LO	3.214.597.200,00	878.509.386,00	2.336.087.814,00	265,91
	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya - LO	1.978.177.460,00	399.738.617,00	1.578.438.843,00	394,87
	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya - LO	789.017.894,00	334.328.582,00	454.689.312,00	136,00
	Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya - LO	434.557.862,00	104.869.861,00	329.688.001,00	314,38
	Pendapatan Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya - LO	12.843.984,00	39.572.326,00	(26.728.342,00)	(67,54)
11	Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LO	2.187.996.389,00	17.252.599,00	2.170.743.790,00	12.582,13
	Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film - LO	22.721.538,00	82.228,00	22.639.310,00	27.532,36
	Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/ Musik/Tari/Busana - LO	-	43.350,00	(43.350,00)	(100,00)
	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya - LO	20.277.030,00	3.822.645,00	16.454.385,00	430,45



No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
	Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling - LO	7.076.228,00	932.402,00	6.143.826,00	658,92
	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan - LO	1.327.363.446,00	1.688.843,00	1.325.674.603,00	78.496,02
	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) - LO	810.558.147,00	10.683.131,00	799.875.016,00	7.487,27
12	Pendapatan Denda Pajak Reklame - LO	215.296.946,00	198.012.497,00	17.284.449,00	8,73
	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron - LO	208.396.888,00	185.115.799,00	23.281.089,00	12,58
	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain - LO	3.273.058,00	7.057.198,00	(3.784.140,00)	(53,62)
	Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat / Stiker - LO	34.500,00	34.500,00	-	-
	Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan - LO	3.592.500,00	5.805.000,00	(2.212.500,00)	(38,11)
13	Pendapatan Denda Pajak Parkir - LO	153.087.508,00	357.390.225,00	(204.302.717,00)	(57,17)
	Pendapatan Denda Pajak Parkir - LO	153.087.508,00	357.390.225,00	(204.302.717,00)	(57,17)
14	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LO	5.183.848,00	4.171.272,00	1.012.576,00	24,27
	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LO	5.183.848,00	4.171.272,00	1.012.576,00	24,27
15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) - LO	7.405.094.071,00	10.430.222.355,00	(3.025.128.284,00)	(29,00)
	Pendapatan Denda PBBP2 - LO	7.405.094.071,00	10.430.222.355,00	(3.025.128.284,00)	(29,00)
16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	12.750.000,00	7.500.000,00	5.250.000,00	70,00
	Pendapatan Denda BPHTB - Pemberian Hak Baru - LO	12.750.000,00	7.500.000,00	5.250.000,00	70,00
	Denda Retribusi Daerah	112.865.276,00	136.899.297,00	(24.034.021,00)	(17,56)
17	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum - LO	1.999.437,00	23.825.989,00	(21.826.552,00)	(91,61)
	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	-	176.800,00	(176.800,00)	(100,00)
	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	1.748.337,00	2.717.049,00	(968.712,00)	(35,65)
	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO	248.600,00	45.750,00	202.850,00	443,39
	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	-	20.025.600,00	(20.025.600,00)	(100,00)
	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LO	-	29.730,00	(29.730,00)	(100,00)
	Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	-	831.060,00	(831.060,00)	(100,00)
	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus - LO	2.500,00	-	2.500,00	100,00
18	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	70.080.578,00	82.036.427,00	(11.955.849,00)	(14,57)
	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	50.064.491,00	80.154.287,00	(30.089.796,00)	(37,54)
	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO	20.016.087,00	1.857.140,00	18.158.947,00	977,79
	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan - LO	-	25.000,00	(25.000,00)	(100,00)
19	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	40.785.261,00	31.036.881,00	9.748.380,00	31,41
	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum - LO	-	637.500,00	(637.500,00)	(100,00)
	Pendapatan Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	40.785.261,00	30.399.381,00	10.385.880,00	34,16



No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
20	Pendapatan dari Pengembalian	3.836.302.493,00	3.926.504.331,00	(90.201.838,00)	(2,30)
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS - LO	38.096.568,00	-	38.096.568,00	100,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LO	20.508.895,00	65.745.380,00	(45.236.485,00)	(68,81)
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa - LO	-	246.789.583,00	(246.789.583,00)	(100,00)
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Negeri-Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri - LO	1.051.981.009,00	-	1.051.981.009,00	100,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK - LO	20.767,00	37.490,00	(16.723,00)	(44,61)
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKM - LO	62.301,00	112.474,00	(50.173,00)	(44,61)
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS - LO	1.355.880,00	-	1.355.880,00	100,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang - LO	575.358.160,00	-	575.358.160,00	100,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa - LO	-	1.279.500,00	(1.279.500,00)	(100,00)
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat - LO	3.379.500,00	-	3.379.500,00	100,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia - LO	137.823.000,00	264.420.611,00	(126.597.611,00)	(47,88)
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu - LO	9.500.000,00	22.025.000,00	(12.525.000,00)	100,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah - LO	-	473.174.610,00	(473.174.610,00)	(100,00)
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Alat Angkutan - LO	38.340.994,00	-	38.340.994,00	100,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan- Bangunan Gedung - LO	878.426.277,00	1.270.967.269,00	(392.540.992,00)	(30,89)
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi- Jalan dan Jembatan - LO	1.050.601.362,00	1.430.363.961,00	(379.762.599,00)	(26,55)
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi- Bangunan Air - LO	15.318.823,00	74.351.255,00	(59.032.432,00)	(79,40)
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS - LO	12.228.957,00	77.237.198,00	(65.008.241,00)	(84,17)
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas-LO	3.300.000,00	-	3.300.000,00	100,00
21	Pendapatan dari BLUD:	813.022.806,00	359.976.497.147,87	(359.163.474.341,87)	(99,77)
	Pendapatan dari BLUD - LO	-	359.976.497.147,87	(359.976.497.147,87)	(100,00)
	Pendapatan BLUD dari Hibah - LO	668.815.000,00	-	668.815.000,00	100,00
	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain - LO	122.290.221,00	-	122.290.221,00	100,00
	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah - LO	21.917.585,00	-	21.917.585,00	100,00



No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
22	Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	4.481.604,00	4.080.525,00	401.079,00	9,83
	Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD - LO	4.481.604,00	4.080.525,00	401.079,00	9,83
23	Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	3.101.860,00	3.500.000,00	(398.140,00)	(11,38)
	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - LO	3.101.860,00	3.500.000,00	(398.140,00)	(11,38)
	Jumlah	35.444.436.153,33	393.007.181.528,58	(357.562.745.375,25)	(90,98)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 sebesar 35.444.436.153,33 mengalami penurunan sebesar Rp357.562.745.375,25 atau 90,98% dari Lain-lain PAD yang Sah TA 2023 sebesar Rp393.007.181.528,58.

Rincian Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.17

Lain-lain PAD yang Sah - LO per Perangkat Daerah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	DINAS KESEHATAN				
	Denda Retribusi Daerah	-	176.800,00		
	Pendapatan dari BLUD - LO	813.022.806,00	-		
	Jumlah	813.022.806,00	176.800,00	812.846.006,00	459.754,53
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	Denda Retribusi Daerah	2.500,00	29.730,00		
	Jumlah	2.500,00	29.730,00	(27.230,00)	(91,59)
3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN				
	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LO	5.000,00	10.178,00		
	Denda Retribusi Daerah	45.463.975,00	35.971.300,00		
	Jumlah	45.468.975,00	35.981.478,00	9.487.497,00	26,37
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
	Denda Retribusi Daerah	1.748.337,00	2.717.049,00		
	Jumlah	1.748.337,00	2.717.049,00	(968.712,00)	(35,65)
5	DINAS PERHUBUNGAN				
	Denda Retribusi Daerah	-	20.663.100,00		
	Jumlah	-	20.663.100,00	(20.663.100,00)	(100,00)
6	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
	Kerja sama Daerah	-	1.361.135.000,00		
	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	167.057.344,00	367.079.779,00		
	Denda Pajak Daerah	16.438.061.894,00	12.054.815.837,00		
	Jumlah	16.605.119.238,00	13.783.030.616,00	2.822.088.622,00	20,48
7	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.365.249.800,00	2.069.346.709,00	(704.096.909,00)	(0,34)
	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	12.629.016,00	167.802.000,00	(155.172.984,00)	(0,92)
	Jasa Giro	4.035.307.746,00	5.177.638.309,00	(1.142.330.563,00)	(0,22)
	Pendapatan Bunga	7.768.345.613,00	6.994.811.761,14	773.533.851,86	0,11
	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - LO	30.183.333,33	204.756.749,57	(174.573.416,24)	(0,85)
	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	230.348.482,00	87.653.367,00	142.695.115,00	1,63
	Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	627.473.886,00	474.650.538,00	152.823.348,00	0,32
	Denda Retribusi Daerah	17.786.906,00	44.228.737,00	(26.441.831,00)	(0,60)



No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
	Pendapatan dari Pengembalian	3.836.302.493,00	3.926.504.331,00	(90.201.838,00)	(0,02)
	Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	4.481.604,00	4.080.525,00	401.079,00	0,10
	Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	3.101.860,00	3.500.000,00	(398.140,00)	(0,11)
	Jumlah	17.931.210.739,33	19.154.973.026,71	(1.223.762.287,38)	(0,06)
8	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
	Denda Retribusi Daerah	47.863.558,00	33.087.581,00		
	Jumlah	47.863.558,00	33.087.581,00	14.775.977,00	44,66
9	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				
	Denda Retribusi Daerah	-	25.000,00		
	Jumlah	-	25.000,00	(25.000,00)	(100,00)
10	RSUD, PUSKESMAS DAN LABKESDA				
	Pendapatan dari BLUD	-	359.976.497.147,87		
	Jumlah	-	359.976.497.147,87	(359.976.497.147,87)	(100,00)
	Jumlah Keseluruhan	35.444.436.153,33	393.007.181.528,58	(357.562.745.375,25)	(90,98)

5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan transfer meliputi transfer pemerintah pusat, transfer pemerintah pusat - lainnya dan transfer pemerintah provinsi.

Tabel 5.4.18
Pendapatan Transfer - LO TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat :				
	Dana Perimbangan LO	1.329.578.089.178,00	1.255.511.526.314,00	74.066.562.864,00	5,90
	Insentif Fiskal-LO	28.047.664.000,00	5.912.254.000,00	22.135.410.000,00	374,40
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah :				
	Pendapatan Bagi Hasil	304.828.525.662,00	297.334.928.892,00	7.493.596.770,00	2,52
	Bantuan Keuangan	39.366.960.725,00	77.731.559.566,00	(38.364.598.841,00)	(49,36)
	Jumlah	1.701.821.239.565,00	1.636.490.268.772,00	65.330.970.793,00	3,99

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Pendapatan Transfer-LO TA 2024 sebesar Rp1.701.821.239.565,00 mengalami peningkatan sebesar Rp65.330.970.793,00 atau 3,99% dari Pendapatan Transfer TA 2023 sebesar Rp1.636.490.268.772,00. Adapun realisasi masing-masing akun pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut.

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

5.4.1.2.1.1 Transfer Pemerintah Pusat - LO (Dana Perimbangan)

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Pemerintah Kota Bogor untuk Periode TA 2024 dan TA 2023 dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.4.19
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Dana Bagi Hasil (DBH)	97.824.228.000,00	113.574.543.000,00	(15.750.315.000,00)	(13,87)
2	Dana Alokasi Umum	858.600.617.000,00	792.904.391.521,00	65.696.225.479,00	8,29
3	DAK Fisik	44.829.645.150,00	55.796.999.805,00	(10.967.354.655,00)	(19,66)
4	DAK Non Fisik	328.323.599.028,00	293.235.591.988,00	35.088.007.040,00	11,97
	Jumlah	1.329.578.089.178,00	1.255.511.526.314,00	74.066.562.864,00	5,90



Adapun perbandingan nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO (Dana Perimbangan) antara LO dan LRA TA 2024 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.20
Perbandingan Nilai Pendapatan Transfer Pusat - LO (Dana Perimbangan)
pada LO dan LRA TA 2024

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan/Selisih
1	Dana Bagi Hasil (DBH)	97.824.228.000,00	114.423.344.000,00	(16.599.116.000,00)
2	Dana Alokasi Umum	858.600.617.000,00	853.803.503.264,00	4.797.113.736,00
3	DAK Fisik	44.829.645.150,00	44.829.645.150,00	-
4	DAK Non Fisik	328.323.599.028,00	328.323.599.028,00	-
Jumlah		1.329.578.089.178,00	1.341.380.091.442,00	(11.802.002.264,00)

Selisih/perbedaan Pendapatan Transfer Pusat - LO (Dana Perimbangan) antara LO dan LRA sebesar Rp11.802.002.264,00 terdiri atas:

1. Perbedaan Dana Bagi Hasil (DBH) antara LO dan LRA merupakan pembayaran Dana Transfer *Treasury Deposit facility* tahun 2024 sebesar Rp7.870.190.000,00 yang merupakan Dana Bagi Hasil yang disalurkan dari rekening *Treasury Deposit Facility* dan adanya penarikan dana *Treasury Deposit Facility* sebesar Rp24.469.306.000,00.
2. Perbedaan Dana Alokasi Umum antara LO dan LRA sebesar Rp4.797.113.736,00 merupakan pembayaran bagian lancar utang jangka Panjang Lembaga keuangan bukan bank tahun 2023.

5.4.1.2.1.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan kepada Kota Bogor untuk periode TA 2024 dan 2023, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.21
Dana Perimbangan - DBH Pajak TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	PBB	3.582.925.000,00	15.137.671.000,00	(11.554.746.000,00)	(76,33)
2	PPh Pasal 21	57.889.358.000,00	52.800.042.167,00	5.089.315.833,00	9,64
3	PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPDN	7.908.567.000,00	9.631.760.833,00	(1.723.193.833,00)	(17,89)
4	Cukai Hasil Tembakau	7.956.105.000,00	7.826.434.000,00	129.671.000,00	1,66
Jumlah		77.336.955.000,00	85.395.908.000,00	(8.058.953.000,00)	(9,44)

5.4.1.2.1.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA)

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan kepada Kota Bogor untuk periode TA 2024 dan 2023, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.22
Dana Perimbangan - DBH Sumber Daya Alam TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Minyak Bumi	3.560.692.000,00	16.945.467.000,00	(13.384.775.000,00)	(78,99)
2	Gas Bumi	1.805.424.000,00	1.160.660.000,00	644.764.000,00	55,55
3	Pengusahaan Panas Bumi	11.540.845.000,00	6.868.605.000,00	4.672.240.000,00	68,02
4	A Mineral dan Batubara - Landrent	-	102.000,00	(102.000,00)	(100,00)
5	Mineral dan Batubara-Royalty	1.448.455.000,00	781.299.000,00	667.156.000,00	85,39
6	Kehutanan - PSDH	1.034.702.000,00	1.056.684.000,00	(21.982.000,00)	(2,08)
7	Perikanan	1.097.155.000,00	1.365.818.000,00	(268.663.000,00)	(19,67)
Jumlah		20.487.273.000,00	28.178.635.000,00	(7.691.362.000,00)	(27,30)



5.4.1.2.1.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan kepada Kota Bogor untuk periode TA 2024 dan 2023, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.23
Dana Alokasi Umum TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Dana Alokasi Umum	746.216.401.000,00	792.904.391.521,00	(46.687.990.521,00)	(5,89)
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan LO	13.600.000.000,00	-	13.600.000.000,00	100,00
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - LO	36.138.888.000,00	-	36.138.888.000,00	100,00
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan-LO	31.725.202.000,00	-	31.725.202.000,00	100,00
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan-LO	17.761.219.000,00	-	17.761.219.000,00	100,00
6	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum-LO	13.158.907.000,00	-	13.158.907.000,00	100,00
	Jumlah	858.600.617.000,00	792.904.391.521,00	65.696.225.479,00	8,29

5.4.1.2.1.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat - DAK kepada Kota Bogor untuk periode TA 2024 dan TA 2023, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.24
Dana Alokasi Khusus TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Dana Alokasi Khusus Fisik	44.829.645.150,00	55.796.999.805,00	(10.967.354.655,00)	(19,66)
2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	328.323.599.028,00	293.235.591.988,00	35.088.007.040,00	11,97
	Jumlah	373.153.244.178,00	349.032.591.793,00	24.120.652.385,00	6,91

Rincian Dana Alokasi Khusus pada masing-masing bidang kegiatan dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.25
Dana Alokasi Khusus per Bidang Kegiatan TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	DAK FISIK	44.829.645.150,00	55.796.999.805,00	(10.967.354.655,00)	(19,66)
	DAK FISIK REGULER :				
	- Pendidikan - PAUD	204.102.129,00	-	204.102.129,00	100,00
	- Pendidikan - SD	1.977.458.787,00	1.012.349.920,00	965.108.867,00	95,33
	- Pendidikan - SKB	-	591.507.340,00	(591.507.340,00)	(100,00)
	- Kesehatan & KB: KB	77.707.500,00	74.265.000,00	3.442.500,00	4,64
	- Kesehatan & KB: Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	-	36.341.295.245,00	(36.341.295.245,00)	(100,00)
	- Kesehatan & KB: Penguatan Sistem Kesehatan	33.035.596.734,00	-	33.035.596.734,00	100,00
	- Sanitasi	9.534.780.000,00	10.439.380.000,00	(904.600.000,00)	(8,67)
	Jumlah	44.829.645.150,00	48.458.797.505,00	(3.629.152.355,00)	(7,49)



No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
	DAK PENUGASAN				
	- Penugasan - Penguatan Intervensi Stunting	-	5.570.202.300,00	(5.570.202.300,00)	(100,00)
	- Penugasan - Kes & KB : Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	-	1.768.000.000,00	(1.768.000.000,00)	(100,00)
	Jumlah	-	7.338.202.300,00	(7.338.202.300,00)	(100,00)
2	DAK NON FISIK	328.323.599.028,00	293.235.591.988,00	35.088.007.040,00	11,97
	- BOS Regular	152.805.914.824,00	143.271.043.020,00	9.534.871.804,00	6,66
	- BOS Kinerja	-	1.882.500.000,00	(1.882.500.000,00)	(100,00)
	- TPG PNSD	103.382.644.000,00	104.353.815.000,00	(971.171.000,00)	(0,93)
	- Tamsil Guru PNSD	3.816.547.000,00	666.642.000,00	3.149.905.000,00	100,00
	- BOP PAUD	9.076.914.900,00	8.522.091.000,00	554.823.900,00	6,51
	- BOP Pendidikan Kesenjangan	-	12.689.369.200,00	(12.689.369.200,00)	(100,00)
	- BOKKB BOK	8.036.889.807,00	5.042.916.209,00	2.993.973.598,00	59,37
	- Akreditasi Puskesmas	-	11.406.964.000,00	(11.406.964.000,00)	100,00
	- Fasilitasi Penanaman Modal	354.633.800,00	269.023.600,00	85.610.200,00	31,82
	- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00	-	406.000.000,00	100,00
	- BOKKB BOKB	-	4.715.903.419,00	(4.715.903.419,00)	(100,00)
	- PKZUKM	-	415.324.540,00	(415.324.540,00)	(100,00)
	- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	520.000.000,00	-	520.000.000,00	100,00
	- Dana BOSP-BOS Kinerja-LO	2.335.000.000,00	-	-	100,00
	- Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja-LO	90.000.000,00	-	90.000.000,00	100,00
	- Dana BOSP-BOP Kesenjangan Reguler-LO	15.616.122.000,00	-	15.616.122.000,00	100,00
	- Dana BOSP-BOP Kesenjangan Kinerja-LO	180.000.000,00	-	180.000.000,00	100,00
	- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota-LO	15.174.498.103,00	-	15.174.498.103,00	100,00
	- Dana BOK-BOK Puskesmas-LO	16.528.434.594,00	-	16.528.434.594,00	100,00
	Jumlah	328.323.599.028,00	293.235.591.988,00	35.088.007.040,00	11,97
	Total	373.153.244.178,00	349.032.591.793,00	24.120.652.385,00	6,91

5.4.1.2.1.2 Insentif Fiskal

Insentif Fiskal adalah dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai bentuk penghargaan atas kinerja yang dicapai. Insentif ini diberikan berdasarkan kriteria tertentu, seperti: Pengelolaan keuangan daerah, Pelayanan umum pemerintahan, Pelayanan dasar, Dukungan terhadap kebijakan nasional. Berikut rincian Dana Insentif Daerah dan Insentif Fiskal.

Tabel 5.4.26
Insentif Fiskal TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Insentif Fiskal-LO	28.047.664.000,00	5.912.254.000,00	22.135.410.000,00	374,40
	Jumlah	28.047.664.000,00	5.912.254.000,00	22.135.410.000,00	374,40



Adapun perbandingan nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO (Insentif Fiskal) antara LO dan LRA TA 2024 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.27
Perbandingan Nilai Pendapatan Transfer Pusat - LO (Dana Insentif Daerah)
pada LO dan LRA TA 2024

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan/Selisih
1	Insentif Fiskal-LO	28.047.664.000,00	28.047.664.000,00	-
	Jumlah	28.047.664.000,00	28.047.664.000,00	-

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

Penerimaan Transfer Antar Daerah merupakan transfer Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dialokasikan pada Pemerintah Kota Bogor untuk dikelola oleh pemerintah daerah, dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Meliputi Pendapatan Bagi Hasil - LO dan Bantuan Keuangan dan Bantuan Keuangan - LO.

5.4.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil - LO

Pendapatan Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil Pemerintah Kota Bogor untuk Periode TA 2024 dan TA 2023 dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.4.28
Pendapatan Bagi Hasil-LO TA. 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pendapatan Bagi Hasil - LO	304.828.525.662,00	297.334.928.892,00	7.493.596.770,00	2,52
	Jumlah	304.828.525.662,00	297.334.928.892,00	7.493.596.770,00	2,52

Rincian Pendapatan bagi hasil dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.29
Rincian Pendapatan Bagi Hasil-LO TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - LO	108.974.953.470,00	103.840.048.665,00	5.134.904.805,00	4,95
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	68.503.297.560,00	68.251.281.510,00	252.016.050,00	0,37
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	66.022.909.185,00	66.691.547.125,00	(668.637.940,00)	(1,00)
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan - LO	211.792.750,00	221.442.600,00	(9.649.850,00)	(4,36)
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - LO	61.115.572.697,00	58.330.608.992,00	2.784.963.705,00	4,77
	Jumlah	304.828.525.662,00	297.334.928.892,00	7.493.596.770,00	2,52

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Pendapatan Bagi Hasil - LO TA 2024 sebesar Rp304.828.525.662,00 mengalami peningkatan sebesar Rp7.493.596.770,00 atau 2,52% dari Pendapatan Bagi Hasil - LO TA 2023 sebesar Rp297.334.928.892,00.

Adapun perbandingan nilai Pendapatan Bagi Hasil - LO antara LO dan LRA TA 2024 yang disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.4.30
Perbandingan Nilai Pendapatan Bagi Hasil-LO
Pada LO dan LRA Tahun 2024

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan/Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - LO	108.974.953.470,00	107.078.086.620,00	1.896.866.850,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	68.503.297.560,00	66.162.370.710,00	2.340.926.850,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	66.022.909.185,00	70.084.028.487,00	(4.061.119.302,00)
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan - LO	211.792.750,00	219.606.800,00	(7.814.050,00)
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - LO	61.115.572.697,00	59.532.701.014,00	1.582.871.683,00
	Jumlah	304.828.525.662,00	303.076.793.631,00	1.751.732.031,00

Selisih/perbedaan Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO (Pendapatan Bagi Hasil-LO) antara LO dan LRA sebesar Rp1.751.732.031,00 terdiri atas:

1. Perbedaan pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor (PKB) antara LO dan LRA merupakan piutang transfer antar daerah tahun 2023 yang telah dibayarkan kepada RKUD Kota Bogor sebesar Rp3.277.418.190,00 sesuai dengan sesuai Keputusan Gubernur No 973/Kep.116-Bapenda/2024 tgl 05 April 2024 dan adanya piutang transfer antar daerah sebesar Rp5.174.285.040,00 sesuai Keputusan Gubernur No. 973/Kep.139-Bapenda/2025.
2. Perbedaan pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor (BBN KB) antara LO dan LRA merupakan piutang transfer antar daerah tahun 2023 yang telah dibayarkan kepada RKUD Kota Bogor sebesar Rp2.325.876.900,00 sesuai Keputusan Gubernur No 973/Kep.116-Bapenda/2024 tgl 05 April 2024 dan adanya piutang transfer antar daerah sebesar Rp4.666.803.750,00 sesuai Keputusan Gubernur No. 973/Kep.139-Bapenda/2025.
3. Perbedaan pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB KB) antara LO dan LRA merupakan piutang transfer antar daerah tahun 2023 yang telah dibayarkan kepada RKUD Kota Bogor sebesar Rp5.356.324.047,00 sesuai Keputusan Gubernur No 973/Kep.116-Bapenda/2024 tgl 05 April 2024 dan adanya piutang transfer antar daerah sebesar Rp1.295.204.745,00 sesuai Keputusan Gubernur No. 973/Kep.139-Bapenda/2025.
4. Perbedaan pendapatan bagi hasil pajak air permukaan antara LO dan LRA merupakan piutang transfer antar daerah tahun 2023 yang telah dibayarkan kepada RKUD Kota Bogor sebesar Rp22.383.950,00 sesuai Keputusan Gubernur No 973/Kep.116-Bapenda/2024 tgl 05 April 2024 dan adanya piutang transfer antar daerah sebesar Rp14.569.900,00 sesuai Keputusan Gubernur No. 973/Kep.139-Bapenda/2025.
5. Perbedaan pendapatan bagi hasil pajak rokok antara LO dan LRA merupakan piutang transfer antar daerah sebesar Rp1.582.871.683,00 sesuai Keputusan Gubernur No. 973/Kep.139-Bapenda/2025

5.4.1.2.2.2 Bantuan Keuangan - LO

Pendapatan Transfer Antar Daerah - Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Bogor untuk Periode TA 2024 dan TA 2023 dapat dirinci pada tabel berikut.



Tabel 5.4.31
Bantuan Keuangan TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Bantuan Keuangan - LO	39.366.960.725,00	77.731.559.566,00	(38.364.598.841,00)	(49,36)
	Jumlah	39.366.960.725,00	77.731.559.566,00	(38.364.598.841,00)	(49,36)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Bantuan Keuangan-LO TA 2024 sebesar Rp39.366.960.725,00 mengalami penurunan sebesar Rp38.364.598.841,00 atau 49,36% dari Bantuan Keuangan - LO TA 2023 sebesar Rp77.731.559.566,00.

Adapun perbandingan nilai Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO (Bantuan Keuangan) antara LO dan LRA TA 2024 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.32
Perbandingan Nilai Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO (Bantuan Keuangan - LO)
Pada LO dan LRA Tahun 2024

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan/Selisih
1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	39.366.960.725,00	39.373.626.725,00	(6.666.000,00)
	Jumlah	39.366.960.725,00	39.373.626.725,00	(6.666.000,00)

Selisih/perbedaan Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO (Bantuan Keuangan) antara LO dan LRA sebesar Rp6.666.000,00 merupakan utang transfer bantuan keuangan dari Provinsi DKI Jakarta.

5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah - LO

Penerimaan Pendapatan Hibah - LO Pemerintah Kota Bogor untuk periode TA 2024 dan 2023, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.33
Pendapatan Hibah - LO TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pendapatan Hibah	42.961.879.333,77	66.574.926.398,81	(23.613.047.065,04)	(35,47)
	Jumlah	42.961.879.333,77	66.574.926.398,81	(23.613.047.065,04)	(35,47)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Pendapatan Hibah - LO TA 2024 sebesar Rp42.961.879.333,77 mengalami penurunan sebesar Rp23.613.047.065,04 atau 35,47% dari Bantuan Keuangan - LO TA 2023 sebesar Rp66.574.926.398,81.

Rincian Pendapatan Hibah - LO dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.34
Rincian Pendapatan Hibah - LO TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	41.235.040.882,17	42.485.384.426,31	(1.250.343.544,14)	(2,94)
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	154.925.460,00	-	154.925.460,00	100,00
3	Pendapatan Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Dalam Negeri	303.172.991,60	842.831.252,00	(539.658.260,40)	(64,03)
4	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	1.268.740.000,00	23.246.710.720,50	(21.977.970.720,50)	(94,54)
	Jumlah	42.961.879.333,77	66.574.926.398,81	(23.613.047.065,04)	(35,47)



Pendapatan Hibah - LO sebesar Rp42.961.879.333,77 per Perangkat Daerah terdiri atas:

Tabel 5.4.35

Rincian Pendapatan Hibah - LO TA 2024 Per Perangkat Daerah

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Dinas Pendidikan				
	Pendapatan Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Dalam Negeri	208.715.916,00	-		
	Jumlah	208.715.916,00	-	208.715.916,00	100,00
2	Dinas Kesehatan				
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	31.268.494.837,18	27.974.858.462,31		
	Jumlah	31.268.494.837,18	27.974.858.462,31	3.293.636.374,87	11,77
3	Rumah Sakit Umum Daerah				
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	8.162.788,99	68.980.340,00		
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	10.143.460,00	250.600.852,00		
	Pendapatan Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Dalam Negeri	79.485.075,60	2.318.166.175,00		
	Jumlah	97.791.324,59	2.637.747.367,00	(2.539.956.042,41)	(96,29)
4	Dinas Perumahan dan Permukiman				
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	-	9.669.945.302,00		
	Jumlah	-	9.669.945.302,00	(9.669.945.302,00)	(100,00)
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	144.782.000,00	-		
	Jumlah	144.782.000,00	-	144.782.000,00	100,00
6	Dinas Lingkungan Hidup				
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	715.068.000,00		
	Jumlah	-	715.068.000,00	(715.068.000,00)	(100,00)
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.298.728.523,00	1.242.204.000,00		
	Jumlah	1.298.728.523,00	1.242.204.000,00	56.524.523,00	4,55
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	434.994.894,00	494.872.386,00		
	Jumlah	434.994.894,00	494.872.386,00	(59.877.492,00)	(12,10)
9	Dinas Perhubungan				
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	6.490.000.000,00		
	Pendapatan Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Dalam Negeri	-	4.641.650.076,00		
	Jumlah	-	11.131.650.076,00	(11.131.650.076,00)	(100,00)
10	Dinas Arsip dan Perpustakaan				
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	175.500.000,00		
	Pendapatan Hibah dari Lembaga / Organisasi Swasta Dalam Negeri	-	1.312.574.167,50		
	Jumlah	-	1.488.074.167,50	(1.488.074.167,50)	(100,00)
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	4.702.371.323,00			
	Jumlah	4.702.371.323,00	-	4.702.371.323,00	100,00



No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
12	Badan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)				
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3.522.288.516,00	5.323.901.238,00		
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	-	592.230.400,00		
	Pendapatan Hibah dari Lembaga / Organisasi Swasta Dalam Negeri	1.268.740.000,00	5.304.375.000,00		
	Jumlah	4.791.028.516,00	11.220.506.638,00	(6.429.478.122,00)	(57,30)
13	Badan Pendapatan Daerah				
	Pendapatan Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Dalam Negeri	14.972.000,00			
	Jumlah	14.972.000,00	-	14.972.000,00	100,00
	TOTAL	42.961.879.333,77	66.574.926.398,81	(23.613.047.065,04)	(35,47)



5.4.2 Beban Daerah

5.4.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi merupakan belanja atau beban yang telah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan yang digunakan untuk menunjang operasional kegiatan Pemerintah Kota Bogor, dengan realisasi pada TA 2024 dan 2023 pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.4.37
Beban Operasi TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Beban Pegawai	1.242.262.790.024,00	1.063.356.108.648,00	178.906.681.376,00	16,82
2	Beban Persediaan	361.655.139.056,65	271.413.541.867,89	90.241.597.188,76	33,25
3	Beban Jasa	763.459.300.802,48	759.836.121.957,66	3.623.178.844,82	0,48
4	Beban Pemeliharaan	146.011.452.259,00	161.408.670.532,86	(15.397.218.273,86)	(9,54)
5	Beban Perjalanan Dinas	94.617.582.922,00	86.703.519.468,00	7.914.063.454,00	9,13
6	Beban Bunga	7.571.414.651,00	6.191.682.700,00	1.379.731.951,00	22,28
7	Beban Hibah	176.519.335.387,00	147.381.004.434,00	29.138.330.953,00	19,77
8	Beban Bantuan Sosial	43.580.019.500,00	54.438.915.000,00	(10.858.895.500,00)	(19,95)
9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	373.846.048.605,39	373.280.306.704,50	565.741.900,89	0,15
10	Beban Penyisihan Piutang	62.607.181.457,02	47.569.042.893,21	15.038.138.563,81	31,61
11	Beban Lain-Lain	23.335.696.382,00	5.818.267.540,00	17.517.428.842,00	301,08
Jumlah		3.295.465.961.046,54	2.977.397.181.746,12	318.068.779.300,42	10,68

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan Beban Operasi TA 2024 sebesar Rp3.295.465.961.046,54 mengalami peningkatan sebesar Rp318.068.779.300,42 atau 10,68% jika dibandingkan dari Belanja Operasi TA 2023 sebesar Rp2.979.057.931.764,12.

Berikut penjelasan rincian masing masing Beban Operasi.

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah beban Pemerintah Kota Bogor dalam pengeluaran yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Kota Bogor yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban pegawai Kota Bogor TA 2024 sebesar Rp 1.242.262.790.024,00 mengalami peningkatan sebesar Rp178.906.681.376,00 atau 16,82% dari TA 2023 sebesar Rp1.063.356.108.648,00. Berikut beban pegawai disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.4.38
Beban Pegawai TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	572.966.490.524,00	483.142.741.393,00	89.823.749.131,00	18,59
2.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	393.260.379.090,00	314.944.193.159,00	78.316.185.931,00	24,87
3.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	148.688.467.311,00	145.108.326.637,00	3.580.140.674,00	2,47
4.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	47.141.457.844,00	47.497.252.680,00	(355.794.836,00)	(0,75)
5.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	64.134.616,00	179.275.989,00	(115.141.373,00)	(64,23)
6.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.329.008.000,00	2.018.520.000,00	310.488.000,00	15,38
7.	Beban Pegawai BLUD	77.812.852.639,00	70.465.798.790,00	7.347.053.849,00	10,43
Jumlah		1.242.262.790.024,00	1.063.356.108.648,00	178.906.681.376,00	16,82



Adapun perbandingan nilai Beban Pegawai antara LO dan LRA TA 2024 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.39
Perbandingan Nilai Beban Pegawai pada LO dan LRA Tahun 2024

No	Uraian	LO	LRA	Selisih/Perbedaan
1.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	572.966.490.524,00	572.966.490.524,00	0,00
2.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	393.260.379.090,00	393.170.766.177,00	89.612.913,00
3.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	148.688.467.311,00	148.571.534.471,00	116.932.840,00
4.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	47.141.457.844,00	47.141.457.844,00	0,00
5.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	64.134.616,00	64.134.616,00	0,00
6.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.329.008.000,00	2.329.008.000,00	0,00
7.	Beban Pegawai BLUD	77.812.852.639,00	78.710.603.275,00	(897.750.636,00)
Jumlah		1.242.262.790.024,00	1.242.953.994.907,00	(691.204.883,00)

Selisih/perbedaan Beban Pegawai antara LO dan LRA sebesar 691.204.883,00 merupakan Utang belanja pegawai BLUD pada Puskesmas dan pembayaran utang belanja pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) - BLUD yang timbul pada periode TA 2024.

5.4.2.1.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah beban pemakaian persediaan atau konsumsi persediaan barang tertentu untuk menunjang operasional kegiatan Pemerintah Kota Bogor, pada TA 2024 terdapat Beban Persediaan sebesar Rp361.655.139.056,65. Jika dibandingkan dengan beban persediaan TA 2023 sebesar Rp271.413.541.867,89 maka mengalami peningkatan sebesar Rp90.241.597.188,76 atau 33,25%.

Berikut beban persediaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.40
Beban Persediaan TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
	BEBAN PERSEDIAAN				
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	26.019.025.651,60	18.770.338.661,29	7.248.686.990,31	38,62
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	4.214.346.014,11	5.500.631.693,44	(1.286.285.679,33)	(23,38)
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	23.480.239.414,00	26.737.452.418,50	(3.257.213.004,50)	(12,18)
4	Beban Bahan-Bahan Baku	36.376.006,00	91.761.284,00	(55.385.278,00)	(60,36)
5	Beban Bahan-Bahan / Bibit Tanaman	1.613.783.572,00	1.236.734.810,00	377.048.762,00	30,49
6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	115.183.899,00	92.227.790,00	22.956.109,00	24,89
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	140.423.631,00	163.253.900,00	(22.830.269,00)	(13,98)
8	Beban Bahan-Bahan / Bibit Ternak / Bibit Ikan	84.456.100,00	62.469.200,00	21.986.900,00	35,20
9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	12.271.520.628,09	12.884.228.035,59	(612.707.407,50)	(4,76)
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	6.088.531.212,00	6.043.415.145,00	45.116.067,00	0,75
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	1.005.456.300,00	397.781.820,00	607.674.480,00	152,77
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	3.270.422.569,00	1.656.324.502,00	1.614.098.067,00	97,45
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	213.277.720,00	14.417.000,00	198.860.720,00	1.379,35
14	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	469.134.002,00	399.877.780,00	69.256.222,00	17,32
15	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	4.935.500,00	42.715.380,00	(37.779.880,00)	(88,45)



No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
16	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	110.013.207,00	176.297.666,00	(66.284.459,00)	(37,60)
17	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	22.622.384.472,55	32.189.137.736,22	(9.566.753.263,67)	(29,72)
18	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	5.478.611.089,30	4.513.859.881,71	964.751.207,59	21,37
19	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.530.743.055,00	885.987.028,00	644.756.027,00	72,77
20	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	181.379.040,00	100.072.800,00	81.306.240,00	81,25
21	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen / Administrasi Tender	-	600.000,00	(600.000,00)	(100,00)
22	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	7.384.340.891,00	7.767.891.032,50	(383.550.141,50)	(4,94)
23	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	6.390.899.411,88	7.911.554.622,34	(1.520.655.210,46)	(19,22)
24	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	12.734.035.408,47	10.827.202.823,46	1.906.832.585,01	17,61
25	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	3.508.598.290,00	1.465.764.676,00	2.042.833.614,00	139,37
26	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	1.721.910.966,00	1.092.315.416,00	629.595.550,00	57,64
27	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir / Cendera Mata	1.657.432.852,00	1.949.891.864,00	(292.459.012,00)	(15,00)
28	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.989.915.503,10	6.089.268.530,54	(2.099.353.027,44)	(34,48)
29	Beban Obat-Obatan-Obat	54.812.443.046,51	72.635.309.397,40	(17.822.866.350,89)	(24,54)
30	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	58.108.454.272,72	28.021.309.006,80	30.087.145.265,92	107,37
31	Beban Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat	81.468.616.560,84	18.564.604.043,10	62.904.012.517,74	338,84
32	Beban Natura dan Pakan-Natura	7.279.299.394,48	2.373.404.744,00	4.905.894.650,48	206,70
33	Beban Natura dan Pakan-Pakan	180.019.250,00	82.388.780,00	97.630.470,00	118,50
34	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	4.218.000,00	25.868.700,00	(21.650.700,00)	(83,69)
35	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	11.878.624,00	4.119.000,00	7.759.624,00	188,39
36	Beban Komponen-Komponen Peralatan	358.487.170,00	313.423.780,00	45.063.390,00	14,38
37	Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu	13.085.459.723,00	104.839.500,00	12.980.620.223,00	12.381,42
38	Beban Komponen - Komponen Lainnya	2.356.610,00	-	2.356.610,00	100,00
39	Beban Pipa-Pipa Beton Pratekan	-	199.047.420,00	(199.047.420,00)	(100,00)
40	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	-	25.754.000,00	(25.754.000,00)	(100,00)
41	Beban Pipa-Pipa Lainnya	6.530.000,00	-	6.530.000,00	100,00
Jumlah		361.655.139.056,65	271.413.541.867,89	90.241.597.188,76	33,25

Adapun perbandingan nilai Beban Persediaan antara LO dan LRA TA 2024 yang disajikan pada tabel berikut .

Tabel 5.4.41
Perbandingan Nilai Beban Persediaan pada LO dan LRA Tahun 2024

No	Uraian	LO	LRA	Selisih/Perbedaan
	BEBAN PERSEDIAAN			
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	26.019.025.651,60	25.026.384.824,00	992.640.827,60
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	4.214.346.014,11	857.616.794,00	3.356.729.220,11
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	23.480.239.414,00	23.211.237.995,00	269.001.419,00
4	Beban Bahan-Bahan Baku	36.376.006,00	17.238.400,00	19.137.606,00
5	Beban Bahan-Bahan / Bibit Tanaman	1.613.783.572,00	1.485.632.693,00	128.150.879,00



No	Uraian	LO	LRA	Selisih/Perbedaan
6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	115.183.899,00	78.261.580,00	36.922.319,00
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	140.423.631,00	91.385.800,00	49.037.831,00
8	Beban Bahan-Bahan / Bibit Ternak / Bibit Ikan	84.456.100,00	84.456.100,00	0,00
9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	12.271.520.628,09	23.790.997,00	12.247.729.631,09
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	6.088.531.212,00	6.934.596.162,00	(846.064.950,00)
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	1.005.456.300,00	1.007.446.900,00	(1.990.600,00)
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	3.270.422.569,00	63.901.500,00	3.206.521.069,00
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	213.277.720,00	157.444.500,00	55.833.220,00
14	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	469.134.002,00	492.945.500,00	(23.811.498,00)
15	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	4.935.500,00	4.935.500,00	-
16	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	110.013.207,00	85.962.285,00	24.050.922,00
17	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	22.622.384.472,55	11.743.323.305,00	10.879.061.167,55
18	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	5.478.611.089,30	2.483.294.736,00	2.995.316.353,30
19	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.530.743.055,00	301.562.500,00	1.229.180.555,00
20	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	181.379.040,00	130.859.500,00	50.519.540,00
21	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	7.384.340.891,00	5.047.890.088,00	2.336.450.803,00
22	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	6.390.899.411,88	3.648.005.970,00	2.742.893.441,88
23	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	12.734.035.408,47	12.507.618.756,00	226.416.652,47
24	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	3.508.598.290,00	3.770.180.910,00	(261.582.620,00)
25	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	1.721.910.966,00	666.319.525,00	1.055.591.441,00
26	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir / Cendera Mata	1.657.432.852,00	1.483.594.450,00	173.838.402,00
27	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.989.915.503,10	2.168.920.605,00	1.820.994.898,10
28	Beban Obat-Obatan-Obat	54.812.443.046,51	9.296.454.388,00	45.515.988.658,51
29	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	58.108.454.272,72	6.511.845.076,00	51.596.609.196,72
30	Beban Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat	81.468.616.560,84	64.223.539.412,00	17.245.077.148,84
31	Beban Natura dan Pakan-Natura	7.279.299.394,48	9.053.422.401,00	(1.774.123.006,52)
32	Beban Natura dan Pakan-Pakan	180.019.250,00	180.019.250,00	-
33	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	4.218.000,00	-	4.218.000,00
34	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	11.878.624,00	11.878.624,00	-
35	Beban Komponen-Komponen Peralatan	358.487.170,00	367.599.650,00	(9.112.480,00)
36	Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu	13.085.459.723,00	13.085.459.723,00	-
37	Beban Komponen - Komponen Lainnya	2.356.610,00	-	2.356.610,00
38	Beban Pipa-Pipa Lainnya	6.530.000,00	6.530.000,00	-
Jumlah		361.655.139.056,65	206.311.556.399,00	155.343.582.657,65



Selisih/perbedaan Beban Persediaan antara LO dan LRA sebesar Rp132.921.359.140,89 terdiri atas:

1. Anggaran yang bersumber dari beban barang jasa BLUD yang di rinci ke dalam rekening sub rincian objek beban persediaan.
2. Anggaran yang bersumber dari barang jasa BOS yang di rinci ke dalam rekening sub rincian objek beban persediaan.
3. Persediaan yang bersumber dari hibah pemerintah provinsi/pusat serta lembaga/organisasi.
4. Persediaan yang berasal dari belanja modal yang tidak menjadi aset.
5. Reklasifikasi beban pemeliharaan ke beban persediaan

5.4.2.1.3 Beban Jasa

Beban Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Pada TA 2024 terdapat beban jasa sebesar Rp763.459.300.802,48 jika dibandingkan dengan beban jasa TA 2023 sebesar Rp759.836.121.957,66 maka mengalami peningkatan sebesar Rp3.623.178.844,82 atau 0,48% disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.42
Beban Jasa TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Beban Makanan dan Minuman	53.682.898.848,00	47.594.985.799,50	6.087.913.048,50	12,79
2	Beban Pakaian Dinas	3.198.398.489,00	4.676.958.980,00	(1.478.560.491,00)	(31,61)
3	Beban Jasa Kantor	478.503.096.959,61	486.021.557.333,48	(7.518.460.373,87)	(1,55)
4	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	96.645.980.490,38	82.034.205.025,17	14.611.775.465,21	17,81
5	Beban Sewa Tanah	356.097.800,00	393.016.000,00	(36.918.200,00)	(9,39)
6	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	6.296.625.379,00	4.092.784.959,00	2.203.840.420,00	53,85
7	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.842.682.109,49	2.534.000.286,51	308.681.822,98	12,18
8	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	171.295.200,00	147.548.420,00	23.746.780,00	16,09
9	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	-	1.874.810.704,00	(1.874.810.704,00)	(100,00)
10	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	23.959.911.450,00	17.977.521.985,00	5.982.389.465,00	33,28
11	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	9.532.646.909,00	16.116.180.091,00	(6.583.533.182,00)	(40,85)
12	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	39.415.058.975,00	34.398.858.387,00	5.016.200.588,00	14,58
13	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	215.000.000,00	802.623.872,00	(587.623.872,00)	(73,21)
14	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.024.814.164,00	4.367.139.829,00	(2.342.325.665,00)	(53,64)
15	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	34.959.181.016,00	24.871.786.923,00	10.087.394.093,00	40,56
16	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/pihak Lain/Masyarakat	11.655.613.013,00	31.932.143.363,00	(20.276.530.350,00)	(63,50)
Jumlah		763.459.300.802,48	759.836.121.957,66	3.623.178.844,82	0,48

Adapun perbandingan nilai Beban Jasa antara LO dan LRA TA 2024 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.43
Perbandingan Nilai Beban Jasa pada LO dan LRA Tahun 2024

No	Uraian	LO	LRA	Selisih/Perbedaan
1	Beban Makanan dan Minuman	53.682.898.848,00	28.269.376.913,00	25.413.521.935,00
2	Beban Pakaian Dinas	3.198.398.489,00	3.034.091.993,00	164.306.496,00
3	Beban Jasa Kantor	478.503.096.959,61	414.617.730.955,00	63.885.366.004,61



No	Uraian	LO	LRA	Selisih/Perbedaan
4	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	96.645.980.490,38	90.619.751.117,00	6.026.229.373,38
5	Beban Sewa Tanah	356.097.800,00	245.547.800,00	110.550.000,00
6	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	6.296.625.379,00	5.597.071.769,00	699.553.610,00
7	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.842.682.109,49	2.427.195.544,00	415.486.565,49
8	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	171.295.200,00	171.295.200,00	-
9	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	-	-	-
10	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	23.959.911.450,00	25.709.456.398,00	(1.749.544.948,00)
11	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	9.532.646.909,00	9.960.307.309,00	(427.660.400,00)
12	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	39.415.058.975,00	-	39.415.058.975,00
13	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	215.000.000,00	215.000.000,00	-
14	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.024.814.164,00	1.345.448.000,00	679.366.164,00
15	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	34.959.181.016,00	34.615.846.401,00	343.334.615,00
16	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.655.613.013,00	11.654.127.314,00	1.485.699,00
Jumlah		763.459.300.802,48	628.482.246.713,00	134.977.054.089,48

Selisih/perbedaan Beban Jasa antara LO dan LRA sebesar Rp134.977.054.089,48 terdiri atas:

1. Anggaran yang bersumber dari beban barang jasa BLUD yang di rinci ke dalam rekening sub rincian objek beban jasa.
2. Anggaran yang bersumber barang jasa BOS yang di rinci ke dalam rekening sub rincian objek beban jasa.
3. Utang jasa kantor tahun 2024.
4. Beban barang jasa yang menjadi beban dibayar dimuka.

5.4.2.1.4 Beban Pemeliharaan

Beban yang dikeluarkan untuk perbaikan atau pemeliharaan untuk menjaga aset tetap agar terjaga nilai ekonominya. Pada TA 2024 terdapat beban pemeliharaan sebesar Rp146.011.452.259,00 jika dibandingkan dengan beban pemeliharaan TA 2023 sebesar Rp161.788.901.032,86 maka mengalami penurunan sebesar Rp15.777.448.773,86 atau 9,75% disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.44
Beban Pemeliharaan TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Beban Pemeliharaan Tanah	100.835.984,00	64.843.330,00	35.992.654,00	55,51
2.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	28.491.055.567,00	27.858.646.050,00	632.409.517,00	2,27
3.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	51.731.467.969,00	58.891.444.492,86	(7.159.976.523,86)	(12,16)
4.	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	65.296.933.439,00	74.575.576.660,00	(9.278.643.221,00)	(12,44)
5.	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	10.928.800,00	18.160.000,00	(7.231.200,00)	(39,82)
6.	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	380.230.500,00	380.230.500,00	-	-
Jumlah		146.011.452.259,00	161.788.901.032,86	(15.777.448.773,86)	(9,75)

Adapun perbandingan nilai Beban Pemeliharaan antara LO dan LRA TA 2024 yang disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.4.45
Perbandingan Nilai Beban Pemeliharaan pada LO dan LRA tahun 2024

No	Uraian	LO	LRA	Selisih/Perbedaan
1.	Beban Pemeliharaan Tanah	100.835.984,00	-	100.835.984,00
2.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	28.491.055.567,00	19.973.470.812,00	8.517.584.755,00
3.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	51.731.467.969,00	29.483.233.842,00	22.248.234.127,00
4.	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	65.296.933.439,00	66.961.131.393,00	(1.664.197.954,00)
5.	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	10.928.800,00	-	10.928.800,00
6.	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	380.230.500,00	380.230.500,00	-
Jumlah		146.011.452.259,00	116.798.066.547,00	29.213.385.712,00

Selisih/perbedaan Beban Pemeliharaan antara LO dan LRA sebesar Rp29.213.385.712,00 terdiri atas:

1. Anggaran yang bersumber dari beban barang jasa BLUD yang di rinci ke dalam rekening sub rincian objek beban pemeliharaan.
2. Anggaran yang bersumber barang jasa BOS yang di rinci ke dalam rekening sub rincian objek beban pemeliharaan.
3. Reklasifikasi beban pemeliharaan ke beban persediaan.

5.4.2.1.5 Beban Perjalanan dinas

Beban Perjalanan dinas Pemerintah Kota Bogor pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp94.617.582.922,00, sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp86.703.519.468,00,00. Terdapat peningkatan sebesar Rp7.914.063.454,00 atau 9,13%. Disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.46
Beban Perjalanan Dinas TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	58.247.062.579,00	41.378.236.545,00	16.868.826.034,00	40,77
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.506.888.709,00	11.941.097.100,00	2.565.791.609,00	21,49
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15.809.716.287,00	14.773.175.061,00	1.036.541.226,00	7,02
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.763.324.809,00	4.587.076.394,00	(823.751.585,00)	(17,96)
5	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	2.290.590.538,00	14.023.934.368,00	(11.733.343.830,00)	(83,67)
Jumlah		94.617.582.922,00	86.703.519.468,00	7.914.063.454,00	9,13

Adapun perbandingan nilai Beban Perjalanan Dinas antara LO dan LRA TA 2024 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.47
Perbandingan Nilai Beban Perjalanan Dinas pada LO dan LRA Tahun 2024

No	Uraian	LO	LRA	Selisih/Perbedaan
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	58.247.062.579,00	57.514.851.625,00	732.210.954,00
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.506.888.709,00	5.967.853.850,00	8.539.034.859,00
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15.809.716.287,00	15.802.146.287,00	7.570.000,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.763.324.809,00	3.692.573.810,00	70.750.999,00
5	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	2.290.590.538,00	2.290.590.538,00	-
Jumlah		94.617.582.922,00	85.268.016.110,00	9.349.566.812,00



Selisih/perbedaan Beban Perjalanan Dinas antara LO dan LRA sebesar Rp9.349.566.812,00 terdiri atas:

1. Anggaran yang bersumber dari beban barang jasa BLUD yang di rinci ke dalam rekening sub rincian objek beban perjalanan dinas.
2. Anggaran yang bersumber dari beban barang jasa BOS yang di rinci ke dalam rekening sub rincian objek beban perjalanan dinas.

5.4.2.1.6 Beban Bunga

Beban ini merupakan beban bunga yang harus dibayarkan/ dikeluarkan akibat dari peminjaman uang kepada pihak lain, pada TA 2024 terdapat beban bunga sebesar Rp7.027.746.595,00 jika dibandingkan dengan beban bunga TA 2023 sebesar Rp6.191.682.700,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp836.063.895,00 atau 13,50% pada tabel berikut.

Tabel 5.4.48
Beban Bunga TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Panjang	6.035.551.928,00	6.144.188.950,00	(108.637.022,00)	(1,77)
2.	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri- Jangka Panjang	543.668.056,00	-	543.668.056,00	100,00
3.	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) - BUMN - Jangka Pendek	992.194.667,00	47.493.750,00	944.700.917,00	1.989,11
Jumlah		7.571.414.651,00	6.191.682.700,00	1.379.731.951,00	22,28

Adapun perbandingan nilai Beban Bunga antara LO dan LRA TA 2024 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.49
Perbandingan Nilai Beban Bunga pada LO dan LRA Tahun 2024

No	Uraian	LO	LRA	Selisih/Perbedaan
1.	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Panjang	6.035.551.928,00	6.035.551.928,00	-
2.	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri- Jangka Panjang	543.668.056,00	-	543.668.056,00
3.	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) - BUMN - Jangka Pendek	992.194.667,00	992.194.667,00	-
Jumlah		7.571.414.651,00	7.027.746.595,00	543.668.056,00

Selisih/perbedaan Beban bunga antara LO dan LRA sebesar Rp543.668.056,00 merupakan utang bunga penerusan pinjaman luar negeri sesuai dengan Laporan Keuangan PDAM Audited 2024.

5.4.2.1.7 Beban Hibah

Beban Hibah adalah beban Pemerintah Kota Bogor dalam bentuk uang/ barang atau jasa kepada pemerintah daerah lainnya/ masyarakat yang timbul karena adanya perikatan, pada TA 2024 terdapat beban hibah sebesar Rp176.519.335.387,00. Jika dibandingkan dengan beban hibah TA 2023 sebesar Rp147.381.004.434,00 mengalami peningkatan sebesar Rp29.138.330.953,00 atau 19,77%, beban hibah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.50
Beban Hibah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat	64.853.633.758,00	41.728.854.095,00	23.124.779.663,00	55,42
	- Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	53.933.637.450,00	40.929.414.447,00	13.004.223.003,00	31,77
	- Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	10.919.996.308,00	799.439.648,00	10.120.556.660,00	1.265,96



No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
2	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	38.968.786.299,00	60.856.007.008,00	(21.887.220.709,00)	(35,97)
	- Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	18.128.279.189,00	18.770.796.708,00	(642.517.519,00)	(3,42)
	- Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	486.350.000,00	21.345.035.200,00	(20.858.685.200,00)	(97,72)
	- Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	20.314.157.110,00	20.601.575.100,00	(287.417.990,00)	(1,40)
	- Beban Hibah Uang kepada Koperasi	40.000.000,00	138.600.000,00	(98.600.000,00)	(71,14)
3	Beban Hibah Dana BOS	44.978.226.430,00	41.508.389.331,00	3.469.837.099,00	8,36
	- Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	44.978.226.430,00	41.508.389.331,00	3.469.837.099,00	8,36
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	3.397.282.000,00	3.287.754.000,00	109.528.000,00	3,33
	- Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	3.397.282.000,00	3.287.754.000,00	109.528.000,00	3,33
5	Beban Hibah Dana BOSP	24.321.406.900,00	-	24.321.406.900,00	100,00
	- Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	8.812.864.900,00	-	8.812.864.900,00	100,00
	- Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	15.508.542.000,00	-	15.508.542.000,00	100,00
	Jumlah	176.519.335.387,00	147.381.004.434,00	29.138.330.953,00	19,77

Adapun perbandingan nilai Beban Hibah antara LO dan LRA TA 2024 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.51
Perbandingan Nilai Beban Hibah pada LO dan LRA Tahun 2024

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan/Selisih
1	Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat	64.853.633.758,00	64.853.633.758,00	-
2	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	38.968.786.299,00	38.968.786.299,00	-
3	Beban Hibah Dana BOS	44.978.226.430,00	44.978.226.430,00	-
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	3.397.282.000,00	3.397.282.000,00	-
5	Beban Hibah Dana BOSP	24.321.406.900,00	24.321.406.900,00	-
	Jumlah	176.519.335.387,00	176.519.335.387,00	-

5.4.2.1.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial adalah beban Pemerintah Kota Bogor dalam bentuk uang/barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, pada TA 2024 beban bantuan sosial sebesar Rp43.580.019.500,00 apabila dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp54.438.915.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp10.858.895.500,00 atau 19,95%.



Tabel 5.4.52
Beban Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	33.118.435.000,00	46.032.665.000,00	(12.914.230.000,00)	(28,05)
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya	10.461.584.500,00	8.406.250.000,00	2.055.334.500,00	24,45
Jumlah		43.580.019.500,00	54.438.915.000,00	(10.858.895.500,00)	(19,95)

Adapun perbandingan nilai Beban Bantuan Sosial antara LO dan LRA TA 2024 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.53
Perbandingan Nilai Beban Bantuan Sosial pada LO dan LRA Tahun 2024

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan / selisih
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	33.118.435.000,00	33.118.435.000,00	-
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya	10.461.584.500,00	10.461.584.500,00	-
Jumlah		43.580.019.500,00	43.580.019.500,00	-

5.4.2.1.9 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari entitas lain, penghitungan beban penyisihan piutang tergantung jenis piutang dan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Kota Bogor tentang Akuntansi Piutang. Pada tahun 2024 beban penyisihan piutang sebesar Rp62.607.181.457,02. Jika dibandingkan dengan beban penyisihan pada TA 2023 sebesar Rp47.569.042.893,21 maka mengalami peningkatan sebesar Rp15.038.138.563,81 atau 31,61%. Beban penyisihan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.54a
Beban Penyisihan Piutang TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	40.037.270.138,00	31.430.348.679,00	8.606.921.459,00	27,38
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	702.963.994,06	(39.311.104,12)	742.275.098,18	(1.888,21)
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	21.945.225.793,96	16.154.574.511,33	5.790.651.282,63	35,85
4	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	(78.278.469,00)	23.430.807,00	(101.709.276,00)	(434,08)
Jumlah		62.607.181.457,02	47.569.042.893,21	15.038.138.563,81	31,61

Adapun perangkat daerah yang memiliki beban penyisihan piutang tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.4.54b
Beban Penyisihan Piutang TA 2024 dan 2023
Per Perangkat Daerah

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (BLUD)				
	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	1.996.623.748,00	1.995.843.117,00	780.631,00	0,04
Jumlah		1.996.623.748,00	1.995.843.117,00	780.631,00	0,04



No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
2	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN				
	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	173.450.800,00	150.689.300,00	22.761.500,00	15,10
	Jumlah	173.450.800,00	150.689.300,00	22.761.500,00	15,10
3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	98.415.000,00	(45.744.750,00)	144.159.750,00	(315,14)
	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	17.569.908,75	5.868.412,50	11.701.496,25	199,40
	Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	(43.211.545,89)	(110.330.651,52)	67.119.105,63	(60,83)
	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	16.585.508,96	(91.801.946,67)	108.387.455,63	(118,07)
	Jumlah	89.358.871,82	(242.008.935,69)	331.367.807,51	(136,92)
4	BADAN KEUANGAN DAN ASET DADRAH				
	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	456.739.831,20	(39.793.415,10)	496.533.246,30	(1.247,78)
	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang	(78.278.469,00)	23.430.807,00	(101.709.276,00)	(434,08)
	Jumlah	378.461.362,20	(16.362.608,10)	394.823.970,30	(2.412,96)
5	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	4.552.782.227,00	3.964.252.323,00	588.529.904,00	14,85
	Penyisihan Pajak Restoran	44.611.918,00	(26.609.343,00)	71.221.261,00	(267,66)
	Penyisihan Pajak Hiburan	259.847.423,00	553.143,00	259.294.280,00	46.876,54
	Penyisihan Pajak Reklame	10.021.388,00	12.714.158,00	(2.692.770,00)	(21,18)
	Penyisihan Piutang Pajak Parkir	5.565.117,00	10.441.492,00	(4.876.375,00)	(46,70)
	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	67.533.093,00	69.085,00	67.464.008,00	97.653,63
	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	35.096.806.779,00	27.468.530.171,00	7.628.276.608,00	27,77
	Beban Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	102.193,00	397.650,00	(295.457,00)	(74,30)
	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	19.932.016.537,00	14.250.533.341,00	5.681.483.196,00	39,87
	Jumlah	59.969.286.675,00	45.680.882.020,00	14.288.404.655,00	31,28
	TOTAL	62.607.181.457,02	47.569.042.893,21	15.038.138.563,81	31,61

5.4.2.1.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama manfaat aset yang ada pada Kota Bogor. Beban penyusutan TA 2024 sebesar Rp373.846.048.605,39. Jika dibandingkan dengan beban penyusutan TA 2023 sebesar Rp373.280.306.704,50 maka mengalami peningkatan sebesar Rp565.741.900,89 atau 0,15%.

Beban Penyusutan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.55

Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	121.272.053.305,14	118.811.713.291,28	2.460.340.013,86	2,07
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	36.659.773.287,72	30.611.092.959,66	6.048.680.328,06	19,76
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	215.277.266.080,06	222.840.832.178,99	(7.563.566.098,93)	(3,39)
4	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	504.069.349,25	863.053.200,50	(358.983.851,25)	(41,59)
5	Beban Penyusutan Aset Lain - Lain	50.819.695,62	153.615.074,07	(102.795.378,45)	(66,92)
6	Beban Penyusutan Properti Investasi	82.066.887,60	-	82.066.887,60	100,00
	Jumlah	373.846.048.605,39	373.280.306.704,50	565.741.900,89	0,15



5.4.2.1.11 Beban Lain-Lain

Beban lain-lain merupakan beban yang tidak termasuk beban pegawai, beban barang dan jasa, beban transfer dan beban hibah. Beban lain-lain ini sebagian besar adalah beban reklasifikasi Belanja Modal yang tidak dapat dikapitalisasi menjadi aset karena harga beli dibawah nilai minimum kapitalisasi, pada TA 2024 terdapat beban lain-lain sebesar Rp23.288.538.862,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp17.470.271.322,00 atau 300,27% dari TA 2023 sebesar Rp5.818.267.540,00 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.56

Beban Lain-lain TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Beban Lain-Lain	23.288.538.862,00	5.818.267.540,00	17.470.271.322,00	300,27
	- Reklas dari Peralatan Mesin	14.422.688.725,00	5.376.043.414,00	9.046.645.311,00	168,28
	- Reklas dari Jalan Irigasi dan Jalan	-	324.597.926,00	(324.597.926,00)	(100,00)
	- Reklas dari Aset Tetap Lainnya	8.865.850.137,00	17.549.200,00	8.848.300.937,00	50.419,97
	- Reklas dari Aset tidak berwujud	-	100.077.000,00	(100.077.000,00)	(100,00)
	Jumlah	23.288.538.862,00	5.818.267.540,00	17.470.271.322,00	300,27

5.4.2.1.12 Beban Transfer

Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh suatu peraturan perundang-undangan.

Beban Transfer pada TA 2024 sebesar Rp1.660.750.000,00 tidak mengalami perubahan nilai dengan beban transfer pada TA 2023 yaitu sebesar Rp1.660.750.000,00. Beban Transfer disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.57

Beban Transfer TA 2024 dan 2023

No	Keterangan	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Beban Bantuan Keuangan umum antar Daerah Kabupaten/Kota	1.660.750.000,00	1.660.750.000,00	-	-
	Jumlah	1.660.750.000,00	1.660.750.000,00	-	-

Adapun rincian beban transfer bantuan keuangan TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bantuan Keuangan kepada Desa Galuga Kabupaten Bogor dalam rangka Kompensasi dampak lingkungan terhadap masyarakat disekitar TPAS Galuga sebesar Rp913.412.500,00.
2. Bantuan Keuangan kepada Desa Cijujung Kabupaten Bogor dalam rangka Kompensasi dampak lingkungan terhadap masyarakat disekitar TPAS Galuga sebesar Rp498.225.000,00.
3. Bantuan Keuangan kepada Desa Dukuh Kabupaten Bogor dalam rangka Kompensasi dampak lingkungan terhadap masyarakat disekitar TPAS Galuga sebesar Rp249.112.500,00.

Adapun perbandingan nilai Beban transfer antara LO dan LRA TA 2024 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.58

Perbandingan Nilai Beban Transfer pada LO dan LRA Tahun 2024

No	Uraian	LO	LRA	Perbandingan/setisih
1.	Bantuan Keuangan umum antar Daerah Kabupaten/Kota	1.660.750.000,00	1.660.750.000,00	-
	Jumlah	1.660.750.000,00	1.660.750.000,00	-



5.4.3 Surplus/ (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional

5.4.3.1 Surplus Dari Kegiatan Non Operasional - LO

5.4.3.1.1 Surplus Penjualan / Pertukaran / Pelepasan Aset Non Lancar - LO

Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas kegiatan non operasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Pada TA 2024 terdapat Surplus Pelepasan Penyertaan Modal - LO sebesar Rp14.388.624.170,56 dan TA 2023 sebesar Rp0,00. Adapun Surplus Pelepasan Penyertaan Modal - LO merupakan selisih lebih atas pelepasan aset tetap dari Pemerintah Daerah Kota Bogor kepada Perusahaan Daerah Air Minum (BUMD) Kota Bogor.

5.4.3.2 Defisit Dari Kegiatan Non Operasional - LO

5.4.3.2.1 Defisit Penjualan / Pertukaran / Pelepasan Aset Non Lancar - LO

Digunakan untuk mencatat selisih kurang dari kegiatan non operasional lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Defisit dari kegiatan non operasional lainnya - LO Tahun 2024 sebesar Rp0,00.

5.4.4 Pos Luar Biasa

5.4.4.1 Pendapatan Luar Biasa - LO

5.4.4.1.1 Pendapatan Luar Biasa - LO

Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pendapatan luar biasa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Pada TA 2024 dan 2023 Pemerintah Kota Bogor tidak memiliki pendapatan luar biasa - LO.

5.4.4.2 Beban Luar Biasa - LO

5.4.4.2.1. Beban Luar Biasa - LO

Penurunan ekuitas akibat peristiwa luar biasa yaitu kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Beban luar biasa ini terdiri atas beban tidak terduga dan beban luar biasa lainnya.

Beban Luar Biasa - LO Tahun 2024 sebesar Rp2.187.043.885,00 mengalami peningkatan Rp1.120.389.485,00 atau 105,04% dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp1.066.654.400,00 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.59
Rincian Beban Luar Biasa TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Beban Tidak Terduga	2.187.043.885,00	1.066.654.400,00	1.120.389.485,00	105,04
	Jumlah	2.187.043.885,00	1.066.654.400,00	1.120.389.485,00	105,04

Adapun realisasi penggunaan beban tidak terduga tahun anggaran 2024 merupakan:

1. Pengembalian Sisa Bantuan Keuangan Provinsi Periode Tahun 2023 sebesar Rp900.000,00
2. Pengembalian atas kelebihan pembayaran kerugian daerah hasil pemeriksaan BPK-RI sebesar Rp489.843.885,00.
3. Bantuan tidak terduga dan bantuan sosial tidak terencana sebesar Rp1.696.300.000,00.

5.4.5 Surplus/Defisit-LO.

Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Surplus/Defisit-LO Kota Bogor Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp73.065.023.893,87 mengalami penurunan dibandingkan Surplus/Defisit-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp156.235.389.193,60



5.5 PENJELASAN POS-POS ARUS KAS

5.5.1 Tujuan Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas bertujuan memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

5.5.2 Definisi Arus Kas

1. Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.
2. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.
3. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

5.5.3 Aktivitas Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran.

1. Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Penerimaan aktivitas operasi antara lain berupa penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak, penerimaan hibah, penerimaan bagian laba BUMD, investasi lainnya dan penerimaan transfer, sedangkan pengeluaran aktivitas operasi antara lain berupa belanja pegawai, belanja barang.
2. Aktivitas investasi aset non keuangan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset non keuangan lainnya. Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset non keuangan terdiri dari penjualan aset tetap dan penjualan aset lainnya. Sedangkan arus keluar kas terdiri dari perolehan aset tetap dan perolehan aset lainnya.
3. Aktivitas Pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain penerimaan pinjaman, penerimaan hasil penjualan surat utang Negara, penerimaan dari divestasi, penerimaan kembali pinjaman dan pencairan dana cadangan. Sedangkan arus keluar kas antara lain penyertaan modal pemerintah, pembayaran pokok pinjaman, dan pembentukan dana cadangan.
4. Aktivitas nonanggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah. Arus masuk kas dari aktivitas nonanggaran meliputi penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang masuk. Arus keluar kas dari aktivitas non anggaran meliputi pengeluaran PFK dan kiriman uang keluar. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening di Kas Daerah.



5.5.4 Posisi Kas

Posisi saldo awal kas pada Laporan Arus Kas tahun 2024 sebesar Rp54.510.496.495,14 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.1
Rincian Saldo Awal Kas Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Rincian SiLPA	Saldo Awal 2024	Saldo Awal 2023
		(Rp)	(Rp)
1	2	3	4
1	Kas di Kas Daerah	33.520.359.707,00	130.401.482.495,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	922.000,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.260.000,00	0,00
4	Kas di BLUD	17.674.821.168,14	29.011.343.370,34
5	Kas Lainnya	1.108.045.406,00	204.120.800,00
6	Kas Dana BOS Pusat	1.649.723.756,00	1.990.834.186,00
7	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
8	Bunga Dana Cadangan	555.364.458,00	0,00
Total		54.510.496.495,14	161.607.780.851,34

Posisi Kas pada 31 Desember 2024 sebesar Rp83.616.865.127,38 mengalami kenaikan sebesar Rp30.583.373.092,24 dibandingkan saldo kas pada tahun 2023 Rp54.510.496.495,14 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.2
Arus Kas Masuk Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Aktivitas Operasi	3.169.108.210.680,24	2.965.387.709.605,80
2	Aktivitas Investasi	1.389.417.875,00	2.087.860.934,00
3	Aktivitas Pembiayaan	170.833.508.776,00	31.250.594.576,00
4	Aktivitas Transitoris	240.850.026.337,48	227.042.881.499,50
Jumlah		3.582.181.163.668,72	3.225.769.046.615,30

Tabel 5.5.3
Arus Kas Keluar Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Aktivitas Operasi	2.778.098.747.514,00	2.510.850.711.371,00
2	Aktivitas Investasi	400.367.986.619,00	518.164.968.738,00
3	Aktivitas Pembiayaan	132.184.766.176,00	76.821.017.476,00
4	Aktivitas Transitoris	240.946.290.267,48	227.029.633.386,50
Jumlah		3.551.597.790.576,48	3.332.866.330.971,50

Tabel 5.5.4
Kenaikan/ (Penurunan Kas) Tahun Anggaran 2024 dan 2023

	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Arus Kas Masuk	3.582.181.163.668,72	3.006.233.851.498,92
2	Arus Kas Keluar	3.551.597.790.576,48	3.209.673.877.638,00
Arus Kas Bersih		30.583.373.092,24	(203.440.026.139,08)



5.5.5 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi tahun 2024 adalah sebesar Rp391.009.463.166,24 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp454.536.998.234,80 yang diperoleh dari selisih antara arus masuk kas dengan arus keluar kas sebagai berikut:

Tabel 5.5.5
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Arus Kas Masuk	3.169.108.210.680,24	2.965.387.709.605,80
2	Arus Kas Keluar	2.778.098.747.514,00	2.510.850.711.371,00
	Arus Kas Bersih	391.009.463.166,24	454.536.998.234,80

5.5.5.1 Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari Aktivitas Operasi tahun 2024 sebesar Rp3.169.108.210.680,24 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp2.965.387.709.605,80 terdiri dari:

Tabel 5.5.6
Arus masuk kas dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	973.768.860.850,00	897.753.380.910,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	417.445.452.990,24	31.081.390.548,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	34.287.163.763,00	33.960.776.435,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	31.728.557.279,00	373.734.859.341,80
5	Dana Bagi Hasil Pajak	85.946.116.000,00	82.465.899.156,00
6	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	28.477.228.000,00	19.739.952.531,00
7	Dana Alokasi Umum (DAU)	853.803.503.264,00	792.504.632.043,00
8	Dana Alokasi Khusus	373.153.244.178,00	349.032.591.793,00
9	Dana Penyesuaian	28.047.664.000,00	5.912.254.000,00
10	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	303.076.793.631,00	301.185.316.222,00
11	Pendapatan Hibah	0,00	0,00
12	Penerimaan Lainnya	39.373.626.725,00	78.016.656.626,00
	Jumlah	3.169.108.210.680,24	2.965.387.709.605,80

Arus masuk kas dari Penerimaan Pajak Daerah tahun 2024 sebesar Rp973.768.860.850,00 sedangkan 2023 sebesar Rp897.753.380.910,00 terdiri dari:

Tabel 5.5.7
Arus masuk kas dari Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Pajak Hotel	123.207.802.097,00	111.465.747.482,00
2	Pajak Restoran	208.515.593.649,00	194.752.128.901,00
3	Pajak Hiburan	29.358.580.222,00	22.605.708.227,00
4	Pajak Reklame	9.736.486.534,00	10.809.834.939,00
5	Pajak Penerangan Jalan	95.818.548.299,00	61.678.951.202,00
6	Pajak Parkir	7.859.694.368,00	14.652.462.793,00
7	Pajak Air Tanah	1.924.708.540,00	2.545.938.043,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	210.911.617.241,00	219.099.681.865,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	286.435.829.900,00	260.142.927.458,00
	Jumlah	973.768.860.850,00	897.753.380.910,00

Arus masuk kas dari Penerimaan Retribusi Daerah tahun 2024 sebesar Rp417.445.452.990,24 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp31.081.390.548,00 terdiri dari:

Tabel 5.5.8
Arus masuk kas dari Penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	400.997.137.220,24	16.742.835.953,00
2	Retribusi Jasa Usaha	7.953.316.342,00	6.380.013.963,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	8.494.999.428,00	7.958.540.632,00
	Jumlah	417.445.452.990,24	31.081.390.548,00



Arus masuk kas dari Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2024 sebesar Rp34.287.163.763,00 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp33.960.776.435,00 terdiri dari:

Tabel 5.5.9
Arus masuk kas dari Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Bagian Laba PDAM Kota Bogor	25.588.368.239,00	24.957.647.000,00
2	Bagian Laba PT Bank Jabar Banten	4.750.663.159,00	5.225.479.571,00
3	Bagian Laba Bank Kota Bogor	2.774.558.399,00	2.383.402.426,00
4	Bagian Laba PD Pasar Pakuan Jaya	1.173.573.966,00	1.394.247.438,00
	Jumlah	34.287.163.763,00	33.960.776.435,00

Arus masuk kas dari Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah tahun 2024 sebesar Rp31.728.557.279,00 sedangkan tahun 2023 Rp373.734.859.341,80. Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari:

Tabel 5.5.10
Arus masuk kas dari Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	167.802.000,00
	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	12.629.016,00	0,00
2	Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	1.361.135.000,00
3	Jasa Giro	4.035.307.746,00	5.177.638.309,00
4	Pendapatan Bunga	7.224.677.557,00	6.997.819.184,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	13.441.667,00	24.235.714,00
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	397.410.914,00	454.743.324,00
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	627.473.886,00	474.700.538,00
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	14.649.420.176,00	4.067.750.115,00
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	111.287.554,00	223.447.933,00
10	Pendapatan dari Pengembalian	3.836.302.493,00	3.926.504.331,00
11	Pendapatan BLUD	813.022.806,00	350.851.552.368,80
12	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	4.481.604,00	4.080.525,00
13	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	3.101.860,00	3.450.000,00
	Jumlah	31.728.557.279,00	373.734.859.341,80

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak sebesar tahun 2024 Rp85.946.116.000,00 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp82.465.899.156,00 terdiri dari:

Tabel 5.5.11
Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Dana Bagi Hasil PBB	14.620.813.000,00	4.704.756.064,00
2	Dana Bagi Hasil PPh pasal 21	54.897.720.000,00	59.405.855.566,00
3	Dana Bagi Hasil PPh 25 dan PPh 29	8.471.478.000,00	9.878.818.000,00
4	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	7.956.105.000,00	8.476.469.526,00
	Jumlah	85.946.116.000,00	82.465.899.156,00

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam tahun 2024 sebesar Rp28.477.228.000,00 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp19.739.952.531,00 merupakan Bagi Hasil dari:

Tabel 5.5.12
Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	14.970.852.000,00	5.937.485.977,00
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	1.451.833.000,00	1.422.922.063,00
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	8.852.128.000,00	8.556.970.811,00



No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara - <i>Landrent</i>	0,00	102.000,00
5	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara - <i>Royalty</i>	1.073.803.000,00	1.177.352.919,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.031.457.000,00	1.067.547.550,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.097.155.000,00	1.577.571.211,00
Jumlah		28.477.228.000,00	19.739.952.531,00

Arus masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2024 sebesar Rp853.803.503.264,00 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp792.504.632.043,00.

Arus masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024 sebesar Rp373.153.244.178,00 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp349.032.591.793,00, merupakan Dana Alokasi Khusus dari :

Tabel 5.5.13
Arus masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	44.829.645.150,00	55.796.999.805,00
2	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	328.323.599.028,00	293.235.591.988,00
Jumlah		373.153.244.178,00	349.032.591.793,00

Arus masuk Kas dari Penerimaan Dana Penyesuaian tahun 2024 sebesar Rp28.047.664.000,00 sedangkan tahun 2024 sebesar Rp5.912.254.000,00.

Arus Masuk dari Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak tahun 2023 sebesar Rp303.076.793.631,00 , Rp301.185.316.222,00

Tabel 5.5.14
Arus masuk Kas dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	107.078.086.620,00	104.770.397.085,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	66.162.370.710,00	68.172.519.150,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	70.084.028.487,00	64.638.380.437,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	219.606.800,00	208.652.187,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	59.532.701.014,00	63.395.367.363,00
Jumlah		303.076.793.631,00	301.185.316.222,00

Arus Masuk dari penerimaan lainnya tahun 2024 sebesar Rp39.373.626.725,00 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp78.016.656.626,00 dengan rincian:

Tabel 5.5.15
Arus Masuk dari penerimaan lainnya Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	39.373.626.725,00	78.016.656.626,00
Jumlah		39.373.626.725,00	78.016.656.626,00

5.5.5.2 Arus Keluar Kas

Arus keluar kas untuk Aktivitas Operasi tahun 2024 adalah sebesar Rp2.778.098.747.514,00 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp2.510.850.711.371,00. Jumlah tersebut merupakan pengeluaran-



pengeluaran dalam kaitannya dengan pengeluaran untuk aktivitas operasional, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.16
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Pegawai	1.242.957.964.907,00	1.063.654.426.888,00
2	Belanja Barang dan jasa	1.304.164.987.240,00	1.236.457.277.949,00
3	Belanja Bunga	7.027.746.595,00	6.191.682.700,00
4	Belanja Hibah	176.519.335.387,00	147.381.004.434,00
5	Bantuan Sosial	43.580.019.500,00	54.438.915.000,00
6	Belanja Bantuan Keuangan	1.660.750.000,00	1.660.750.000,00
7	Belanja Tidak Terduga	2.187.943.885,00	1.066.654.400,00
Jumlah		2.778.098.747.514,00	2.510.850.711.371,00

5.5.6 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Penurunan Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi tahun 2024 adalah sebesar Rp398.978.568.744,00 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp516.077.107.804,00 yang merupakan selisih antara arus masuk kas dengan arus keluar kas sebagai berikut:

Tabel 5.5.17
Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Arus Masuk Kas	1.389.417.875,00	2.087.860.934,00
2	Arus Keluar Kas	400.367.986.619,00	518.164.968.738,00
Arus Kas Bersih		(398.978.568.744,00)	(516.077.107.804,00)

5.5.6.1 Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari Aktivitas Investasi tahun 2024 sebesar Rp1.389.417.875,00 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp2.087.860.934,00 Arus masuk tersebut diperoleh dari:

Tabel 5.5.18
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Hasil Penjualan Tanah	24.168.075,00	24.728.650,00
2	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	40.529.200,00	0,00
3	Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	2.063.132.284,00
4	Hasil Penjualan Aset Lain-lain	1.324.720.600,00	0,00
Jumlah		1.389.417.875,00	2.087.860.934,00

5.5.6.2 Arus Keluar Kas

Arus kas keluar dari Aktivitas Investasi tahun 2024 sebesar Rp400.367.986.619,00 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp518.164.968.738,00 yang merupakan belanja modal/aset tetap yang dilaksanakan pada Dinas/Kantor/Badan Pemerintah Kota Bogor, yang terdiri dari:

Tabel 5.5.19
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Tanah	2.477.717.100,00	1.287.152.960,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	133.226.642.367,00	97.928.993.032,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	141.166.601.172,00	178.951.840.395,00
4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	112.729.496.656,00	238.985.747.391,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	10.693.173.754,00	911.157.960,00
6	Belanja Aset Lainnya	74.355.570,00	100.077.000,00
Jumlah		400.367.986.619,00	518.164.968.738,00

5.5.7 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Arus Kas bersih dari Aktivitas Pembiayaan tahun 2024 sebesar Rp38.648.742.600,00 sedangkan tahun 2023 sebesar (Rp45.570.422.900,00) yang merupakan selisih antara arus masuk kas dengan arus keluar kas sebagai berikut:



Tabel 5.5.20
Arus Kas bersih dari Aktivitas Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Arus Kas masuk	170.833.508.776,00	31.250.594.576,00
2	Arus Kas Keluar	132.184.766.176,00	76.821.017.476,00
	Arus Kas Bersih	38.648.742.600,00	(45.570.422.900,00)

5.5.7.1 Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan tahun 2024 adalah sebesar Rp170.833.508.776,00 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp31.250.594.576,00 terdiri dari:

Tabel 5.5.21
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Pencairan Dana Cadangan	38.648.742.600,00	25.765.828.400,00
2	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan	126.700.000.000,00	0,00
3	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD	5.484.766.176,00	5.484.766.176,00
	Jumlah	170.833.508.776,00	31.250.594.576,00

5.5.7.2 Arus Keluar Kas

Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan tahun 2024 adalah sebesar Rp132.184.766.176,00 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp76.821.017.476,00 yang terdiri dari penyertaan modal pemda dan pemberian pinjaman daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.22
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	71.336.251.300,00
2	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah	5.484.766.176,00	5.484.766.176,00
3	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	126.700.000.000,00	0,00
	Jumlah	132.184.766.176,00	76.821.017.476,00

5.5.8. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas bersih dari Aktivitas Transitoris tahun 2024 adalah sebesar (Rp96.263.930,00) sedangkan tahun 2023 sebesar Rp13.248.113,00 Rincian arus masuk dan keluar kas adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.23
Arus Kas bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Arus Kas masuk	240.850.026.337,48	227.042.881.499,50
2	Arus Kas Keluar	240.946.290.267,48	227.029.633.386,50
	Arus Kas Bersih	(96.263.930,00)	13.248.113,00

5.5.8.1 Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari Aktivitas Transitoris tahun 2024 adalah sebesar Rp240.850.026.337,48 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp227.042.881.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.24
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Utang Taspen	527.485.149,00	482.055
2	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	32.767.962.848,00	30.570.537.097
3	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	821.437.502,00	695.511.753
4	Utang Iuran Jaminan Kematian	2.464.307.763,00	2.099.936.992
5	Utang PPh Pusat	88.426.580.829,29	74.169.827.138
6	Utang PPN Pusat	79.276.207.939,19	86.162.725.848
7	Utang Iuran Wajib Pegawai	36.531.994.307,00	32.981.210.617
8	Uang Jaminan	28.500.000,00	360.150.000
9	Koreksi Kas di BOS	5.550.000,00	2.500.000
	Jumlah	240.850.026.337,48	227.042.881.500,00



5.5.8.2 Arus Keluar Kas

Arus keluar kas dari Aktivitas Transitoris tahun 2024 adalah sebesar Rp240.946.290.267,48 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp213.440.595.029,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.25
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Utang Taspen	527.485.149,00	482.055,00
2	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	32.767.962.848,00	30.617.839.880,00
3	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	821.437.502,00	695.511.753,00
4	Utang Iuran Jaminan Kematian	2.464.307.763,00	2.099.936.992,00
5	Utang PPh Pusat	88.437.631.725,29	74.158.776.241,50
6	Utang PPN Pusat	79.267.430.038,19	86.162.725.848,00
7	Utang Iuran Wajib Pegawai	36.531.994.307,00	32.981.210.617,00
8	Utang Jaminan Bongkar	128.000.000,00	313.150.000,00
9	Koreksi SILPA	40.935,00	0,00
Jumlah		240.946.290.267,48	227.029.633.386,50

5.5.9 Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas pada 31 Desember 2024 sebesar Rp83.616.865.127,38 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.26
Rincian Saldo Akhir Kas Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Rincian SiLPA	Saldo 2024	Saldo 2023
		(Rp)	(Rp)
1	2	3	4
1	Kas di Kas Daerah	79.503.327.898,00	33.520.359.707,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	2.153.130.596,38	922.000,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	1.260.000,00
4	Kas di BLUD	0,00	17.674.821.168,14
5	Kas Lainnya	1.012.808.839,00	1.108.045.406,00
6	Kas Dana BOS Pusat	947.597.794,00	1.649.723.756,00
Total		83.616.865.127,38	53.955.132.037,14

Terdapat selisih Saldo Akhir Kas BUD Tahun 2024 dengan saldo Akhir Kas sebesar Rp1.477.004.460,00 (Rp85.093.869.587,38 - Rp83.616.865.127,38) yang berasal dari pendapatan atas bunga dana cadangan, dimana bunga dana cadangan tersebut dicatat sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang menambah dana cadangan.



5.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/(defisit) - LO, koreksi dan ekuitas akhir, dimana ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 berasal dari Saldo Ekuitas Awal ditambah/dikurang dengan Surplus/(Defisit) LO dan Perubahan ekuitas lainnya.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Saldo awal ekuitas Tahun 2024 sebesar Rp10.613.114.672.934,97 Surplus/(Defisit) - LO sebesar Rp73.065.023.893,87 merupakan surplus atas kegiatan operasional yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kota Bogor. Dampak kumulatif karena perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar sebesar Rp183.206.318.698,13 sehingga Ekuitas Akhir Tahun 2024 sebesar Rp10.869.386.015.526,97 dapat dirinci sebagai berikut.

5.6.1 Ekuitas Awal

Ekuitas awal pada tahun 2024 sebesar Rp10.613.114.672.934,97 sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp10.174.464.362.679,95 sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp438.650.310.255,00 atau 4,31%.

5.6.2 Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit - LO TA 2024 sebesar Rp73.065.023.893,87 sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp156.235.389.193,60 mengalami penurunan sebesar (Rp83.170.365.299,73) atau sebesar (53,23%).

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif merupakan kumpulan dari dampak-dampak yang terjadi akibat dari adanya perubahan kebijakan akuntansi ataupun kegiatan-kegiatan pada periode sebelumnya, saat ini dan yang diperkirakan akan terjadi di masa mendatang.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp183.206.318.698,13 sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp282.414.921.061,42, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.1
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar TA 2024

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	2	3	4
1	Koreksi Nilai Persediaan	25.303.013,44	104.721.309,87
2	Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Tanah)	73.815.713.760,00	247.125.783.197,00
3	Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Peralatan dan Mesin)	(6.852.682.613,17)	(9.808.532.275,77)
4	Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Gedung dan Bangunan)	(509.028.026,00)	(2.304.200.000,00)
5	Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Jalan Irigasi dan Jaringan)	2.734.814.178,00	34.703.110.048,00
6	Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Aset Tetap Lainnya)	677.492.474,15	(3.900.000,00)
7	Hasil Inventarisasi - Aset Lainnya	(12.075.219.301,50)	11.121.085.120,79
8	Hasil Inventarisasi - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	9.643.553.427,56	(2.100.845.643,27)
9	Hasil Inventarisasi - Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	11.679.490.047,73	(8.344.381.920,47)
10	Koreksi Ekuitas Lainnya	104.066.881.737,92	11.922.081.225,27
	Jumlah	183.206.318.698,13	282.414.921.061,42



5.6.3.a. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar - Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi nilai persediaan pada tahun 2024 sebesar Rp25.303.012,44 sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp104.721.309,87 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.2
Koreksi Nilai Persediaan

No	Uraian	Saldo TA 2024			Saldo TA 2023
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan	13.960.088,02	0,03	13.960.087,99	0,00
2	Dinas Kesehatan	7.265.381.945,24	7.677.242.581,55	(411.860.636,31)	(13.695.545.835,38)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	421.392.374,76	0,01	421.392.374,75	693.330.392,90
4	Dinas Tenaga Kerja	1.086.187,00	0,00	1.086.187,00	0,00
5	Kecamatan Bogor Utara	725.000,00	0,00	725.000,00	0,00
6	Kecamatan Tanah Sareal	0,01	0,00	0,01	0,00
	Jumlah	7.702.545.598,03	7.677.242.585,59	25.303.012,44	104.721.309,87

5.6.3.b. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar - Selisih Revaluasi Aktiva Tetap

Selisih revaluasi aktiva tetap pada tahun 2024 sebesar Rp0,00 dan pada tahun 2023 juga sebesar Rp0,00.

5.6.3.c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar - Lain lain

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar - lain lain tahun anggaran 2024 sebesar Rp183.181.015.684,68 sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp282.310.199.751,55 mengalami penurunan sebesar (Rp99.129.184.066,87) atau sebesar (35,11%).

Tabel 5.6.3
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar - Lain lain

No	Uraian	Saldo TA 2024			Saldo TA 2023
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Tanah)	80.745.854.738,00	6.930.140.978,00	73.815.713.760,00	247.125.783.197,00
2	Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Peralatan dan Mesin)	29.782.915.238,23	36.635.597.851,40	(6.852.682.613,17)	(9.808.532.275,77)
3	Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Gedung dan Bangunan)	40.005.651.669,56	40.514.679.695,56	(509.028.026,00)	(2.304.200.000,00)
4	Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Jalan Irigasi dan Jaringan)	2.866.728.078,00	131.913.900,00	2.734.814.178,00	34.703.110.048,00
5	Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Aset Tetap Lainnya)	922.176.524,93	244.684.050,78	677.492.474,15	(3.900.000,00)
6	Hasil Inventarisasi - Aset Lainnya	34.402.955.289,33	46.478.174.590,83	(12.075.219.301,50)	11.121.085.120,79
7	Hasil Inventarisasi - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	43.657.981.570,57	34.014.428.143,02	9.643.553.427,55	(2.100.845.643,27)
8	Hasil Inventarisasi - Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	35.085.017.732,77	23.405.527.685,04	11.679.490.047,73	(8.344.381.920,47)
9	Koreksi Ekuitas Lainnya	229.557.418.906,27	125.490.537.168,35	104.066.881.737,92	11.922.081.225,27
	Jumlah	497.026.699.747,66	313.845.684.062,98	183.181.015.684,68	282.310.199.751,55

Salah satu faktor terjadinya perubahan ekuitas melalui inventarisasi karena adanya perubahan batasan nilai kapitalisasi sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bogor No. 12 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bogor.

5.6.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir pada tahun 2024 sebesar Rp10.869.386.015.526,97 pada tahun 2023 sebesar Rp10.613.114.672.934,97 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp256.271.342.592,00 atau sebesar 2,00%. Ekuitas Akhir merupakan jumlah dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO serta Koreksi Ekuitas.





BAB VI

INFORMASI TAMBAHAN

6.1. Visi dan Misi Kota Bogor

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Bogor Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Bogor Tahun 2019-2024. Pernyataan Visi Kota Bogor Tahun 2019-2024 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang.

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bogor Tahun 2019-2024 dirumuskan sebagai berikut:

“Terwujudnya kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga”

Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal, maka ditetapkan 3 (tiga) Misi untuk mewujudkan Visi Kota Bogor pada Tahun 2024.

Adapun 3 (tiga) Misi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Bogor 2019-2024 yaitu:

1. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat, Kota Bogor Yang Sehat adalah suatu kondisi kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Kota yang sehat dapat dicapai melalui upaya menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan baik fisik, sosial, dan budaya serta mengintegrasikan berbagai aspek tersebut untuk mewujudkan kondisi Kota yang bersih nyaman, aman dan sehat.
2. Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas, Kota Bogor Yang Cerdas adalah kota yang bisa mengelola sumber dayanya, termasuk sumber daya alam dan manusia, sehingga warganya dapat hidup aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat diperlukan untuk membantu pengelolaan kota. Kota Cerdas dapat mengetahui permasalahan yang ada di dalamnya (*sensing*), memahami kondisi permasalahannya (*understanding*), dan mengatur/mengambil tindakan (*acting*) berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Kota Cerdas bukan “kota” ditambah “teknologi” namun penggunaan solusi cerdas untuk mengatasi permasalahan kota. Teknologi merupakan salah satu alat bantu untuk pengelolaan guna mengatasi permasalahan kota.
3. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera, Kota Bogor Yang Sejahtera adalah suatu kondisi Kota dimana kehidupan masyarakatnya aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam sosial ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan kemudahan masyarakat untuk menjangkau pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Kondisi Adil dan makmur dapat diukur dari tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakatnya. Semakin rendah kesenjangan sosial ekonomi masyarakat merupakan tolok ukur dari keberhasilan perwujudan kota yang sejahtera. Kota yang sejahtera dapat terwujud apabila kondisi perekonomian masyarakat kota meningkat. Ekonomi masyarakat yang adil dan sejahtera sebagaimana dicita-citakan akan dapat diwujudkan dengan upaya meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi daerah. Daya saing daerah sendiri merupakan kemampuan daerah untuk menumbuhkembangkan daerah yang bersangkutan yang direfleksikan pada adanya





pertumbuhan ekonomi yang kuat, peningkatan daya beli, kemakmuran rakyat, dan kualitas diri rakyat (masyarakat), tingginya daya tarik daerah bersangkutan bagi para investor luar untuk berinvestasi dan berbisnis, dan kemampuan daerah itu menghasilkan *output*-nya (produk atau jasa) untuk bersaing dan menang dalam persaingan dengan output (produk atau jasa) yang dihasilkan pihak lain di luar daerah yang bersangkutan secara global.

6.2 Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bogor pada tahun 2024 adalah sejumlah 7.717 orang dengan rincian jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin adalah 3.093 Laki-laki dan 4.624 Perempuan, adapun rincian jumlah pegawai setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor terdapat dalam tabel sebagai berikut

Tabel 6.2.1
Rekapitulasi Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor

OPD	Laki-laki	Perempuan	Total
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	28	22	50
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19	3	22
Badan Keuangan dan Aset Daerah	28	20	48
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor	15	4	19
Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor	54	29	83
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor	24	22	46
Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor	9	21	30
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor	31	17	48
Dinas Kesehatan Kota Bogor	119	845	964
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor	32	36	68
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor	32	26	58
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor	38	20	58
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	227	23	250
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	16	18	34
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor	84	17	101
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor	63	2	65
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor	11	18	29
Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor	32	12	44
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor	28	14	42
Dinas Pendidikan Kota Bogor	1.136	2.911	4.047
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor	7	19	26
Dinas Perhubungan Kota Bogor	193	18	211
Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor	70	14	84
Dinas Sosial Kota Bogor	25	14	39
Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor	25	10	35
Inspektorat Daerah Kota Bogor	27	26	53
Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor	65	52	117
Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor	80	42	122
Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor	61	30	91
Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor	41	14	55
Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor	46	25	71
Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor	48	38	86
RSUD Kota Bogor	72	142	214
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor	181	4	185
Sekretariat Daerah Kota Bogor	94	75	169
Sekretariat DPRD Kota Bogor	32	21	53
Jumlah	3.093	4.624	7.717



6.3 Kondisi Geografis

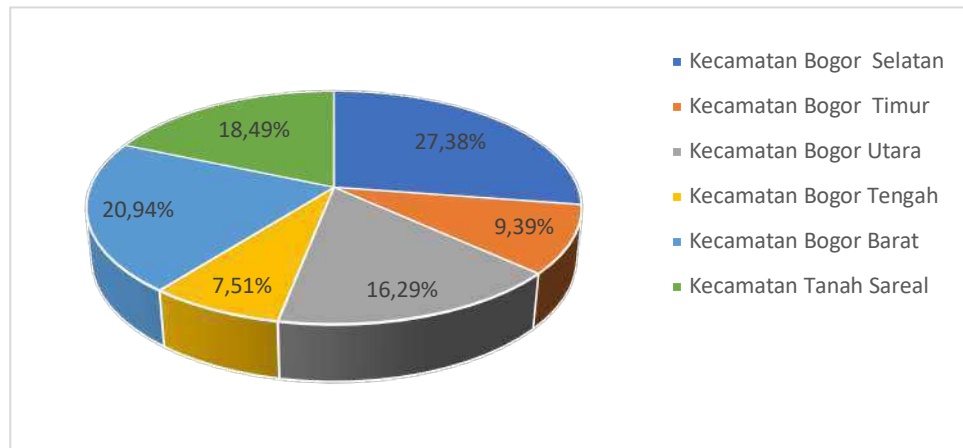
Secara geografis Kota Bogor terletak di antara 106 48' BT dan 6 26' LS. Posisi geografis Kota Bogor di tengah wilayah Kabupaten Bogor serta lokasinya sangat dekat dengan Ibukota Negara, merupakan potensi yang strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Kota Bogor mempunyai rata-rata ketinggian minimum 190 m dan maksimum 330 m dari permukaan laut.

Luas Wilayah Kota Bogor sebesar 111,39 km² terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Luas wilayah masing-masing kecamatan, yaitu: Kecamatan Bogor Selatan (30,50 km²), Kecamatan Bogor Timur (10,46 km²), Kecamatan Bogor Utara (18,14 km²), Kecamatan Bogor Tengah (8,37 km²), Kecamatan Bogor Barat (23,32 km²) dan Kecamatan Tanah Sereal (20,60 km²).

Jika dilihat dari persentase luas wilayah kecamatan terhadap luas wilayah Kota Bogor, Kecamatan Bogor Selatan merupakan Kecamatan terluas yakni sebesar 27,38 persen dan Kecamatan terkecil yakni Kecamatan Bogor Tengah sebesar 7,51 persen.

Tabel 6.3.1

Luas daerah per kecamatan (%)



Tabel 6.3.2

Luas Daerah menurut Kecamatan

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Area (km ²)	Persentase terhadap Luas Kota
1	2	3	4
Kecamatan Bogor Selatan	Empang	30,50	27,38%
Kecamatan Bogor Timur	Baranangsiang	10,46	9,39%
Kecamatan Bogor Utara	Tegal Gundil	18,14	16,29%
Kecamatan Bogor Tengah	Pabaton	8,37	7,51%
Kecamatan Bogor Barat	Loji	23,32	20,94%
Kecamatan Tanah Sereal	Kebonpedes	20,60	18,49%
Kota Bogor	Bogor Tengah - Pabaton	111,39	100,00%





Suhu rata-rata tiap bulan 25,50°-27,70°C dengan suhu terendah 19,50°-22,20°C dan suhu tertinggi 32,3°-36,0°C. Kelembaban udara rata-rata antara 72,20%-86,30%. Kota Bogor dijuluki kota hujan, karena banyaknya hari hujan di setiap bulannya. Tahun 2023 rata-rata jumlah hari hujan sebesar 18 hari per bulan.

Curah hujan tertinggi pada tahun 2023 terjadi pada bulan November dan Desember masing-masing tercatat sebesar 1.068 mm/bulandan 563,60 mm/bulan, sedangkan curah hujan terendah pada bulan September dan Oktober tercatat sebesar 62,20 mm/bulan dan 102,10 mm/bulan.





BAB VII
PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan karena berisi penjelasan dari pos-pos Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo (LP-SAL), Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta kebijakan akuntansinya.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 ini, dapat dijadikan bahan evaluasi atas pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam rangka pelayanan kepada masyarakat Kota Bogor. Serta, dapat dijadikan pijakan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan baru di tahun-tahun berikutnya. Untuk mewujudkan visi dan misi Kota Bogor.

WALI KOTA BOGOR,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

WALI KOTA BOGOR,

DEDIE ABDU RACHIM



PEMERINTAH KOTA BOGOR
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SKPD	JENIS PIUTANG	SALDO AWAL PIUTANG	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
1	Badan Pendapatan Daerah	Piutang Pajak Daerah	520.712.992.274,00	1.097.474.367.210,00	1.000.411.826.655,00	617.775.532.829,00
2	Dinas Perumahan Dan Permukiman	Piutang Retribusi Daerah	977.860.000,00	2.210.225.000,00	2.074.730.000,00	1.113.355.000,00
3	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu	Piutang Retribusi Daerah	3.503.990.878,00	8.766.513.718,00	9.106.872.193,00	3.163.632.403,00
4	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Piutang Retribusi Daerah	1.366.202.357,00	3.103.212.904,00	2.534.705.014,00	1.934.710.247,00
5	Rumah Sakit Umum Daerah - BLUD	Piutang Retribusi Daerah	64.381.683.775,70	320.675.858.137,00	306.876.578.649,00	78.180.963.263,70
6	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.961.512.690,00	4.510.852.544,00	4.961.512.690,00	4.510.852.544,00
7	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.006.450.763,00	43.670.816,00	39.556.929,00	1.010.564.650,00
9	Badan Pendapatan Daerah	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	142.433.320.647,00	43.511.146.070,00	10.434.026.696,00	175.510.440.021,00
10	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-	543.668.056,00	0,00	543.668.056,00
11	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Piutang Transfer Antar Daerah	10.982.003.087,00	13.330.603.492,00	11.578.871.461,00	12.733.735.118,00
12	Dinas Perhubungan	Piutang Lainnya	63.100.000,00	-	-	63.100.000,00
13	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Piutang Lainnya	65.018.589.452,00	-	5.484.766.264,00	59.533.823.188,00
J U M L A H			815.407.705.923,70	1.494.170.117.947,00	1.353.503.446.551,00	956.074.377.319,70

WALI KOTA BOGOR,



KOTA BOGOR

Ditandatangani secara elektronik oleh:
WALI KOTA BOGOR,

DEDIE ABDU RACHIM



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN.Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>

PEMERINTAH KOTA BOGOR

DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	Piutang Pajak Daerah	617.775.532.829,00	(290.953.447.046)	326.822.085.783,00
2	Piutang Retribusi Daerah	84.392.660.913,70	(13.373.378.274,50)	71.019.282.639,20
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.510.852.544,00	-	4.510.852.544,00
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	177.064.672.727,00	(85.390.544.315,74)	91.674.128.411,26
5	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-	0,00
6	Piutang Transfer Antar Daerah	12.733.735.118,00	-	12.733.735.118,00
7	Piutang Lainnya	59.596.923.188,00	(246.814.478,00)	59.350.108.710,00
J U M L A H		956.074.377.319,70	(389.964.184.114,24)	566.110.193.205,46

WALI KOTA BOGOR,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
WALI KOTA BOGOR,

DEDIE ABDU RACHIM



PEMERINTAH KOTA BOGOR

DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR

TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SKPD	JUMLAH DANA BERGULIR	JUMLAH PENYISIHAN DANA BERGULIR	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPKD)	51.753.390,00	(51.753.390,00)	0,00
J U M L A H		51.753.390,00	(51.753.390,00)	0,00

WALI KOTA BOGOR,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

WALI KOTA BOGOR,

DEDIE ABDU RACHIM



PEMERINTAH KOTA BOGOR

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

NO	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA BADAN/LEMBAGA/ PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTAAN MODAL	BENTUK PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH PENYERTAAN MODAL DAERAH	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI DENGAN AWAL TAHUN	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG DISERTAKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN	HASIL PENYERTAAN MODAL DAERAH TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH SISA MODAL YANG DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 6 - 9	11	12	13 = 9 - 12
1	2024	Penyertaan Modal di PD BPR Bank Kota Bogor	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017	PMP	54.000.000.000	54.000.000.000	-	54.000.000.000	-	-	-	54.000.000.000
2	2024	Penyertaan Modal di Bank Jabar Cabang Bogor	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021	PMP	16.078.535.753	16.078.535.753	-	16.078.535.753	-	-	-	16.078.535.753
3	2024	Penyertaan Modal di PDAM Kota Bogor	Perda Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2015	PMP	327.951.510.000	327.951.510.000	-	327.951.510.000	-	-	-	327.951.510.000
4	2024	Penyertaan Modal di PD Jasa Transportasi	Perda Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2015	PMP	35.519.390.000	35.519.390.000	-	35.519.390.000	-	-	-	35.519.390.000
5	2024	Penyertaan Modal di PD Pasar Pakuan Jaya	Perda Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2022	PMP	503.111.384.240	503.111.384.240	-	503.111.384.240	-	-	-	503.111.384.240
JUMLAH					936.660.819.993	936.660.819.993	-	936.660.819.993	-	-	-	936.660.819.993

WALI KOTA BOGOR,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
WALI KOTA BOGOR,

DEDIE ABDU RACHIM



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN.Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>

PEMERINTAH KOTA BOGOR

DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1	Dinas Pendidikan	743.849.633.839,79	157.389.024.209,00	33.183.695.112,63	868.054.962.936,16
2	Dinas Kesehatan	239.541.976.249,13	25.032.624.176,00	10.985.966.102,63	253.588.634.322,50
3	Rumah Sakit Umum Daerah (PD)	519.444.710.706,07	87.930.792.742,00	50.424.381.695,58	556.951.121.752,49
4	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	61.213.301.441,02	8.613.266.362,00	1.315.760.840,71	68.510.806.962,31
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.551.697.542.628,83	291.734.130.658,28	171.633.974.136,25	5.671.797.699.150,86
6	Dinas Perumahan dan Permukiman	1.902.005.023.098,74	18.314.067.176,00	3.652.151.190,00	1.916.666.939.084,74
7	Satuan Polisi Pamong Praja	8.960.083.366,59	557.225.895,00	77.615.000,00	9.439.694.261,59
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.281.737.415,05	672.128.260,00	268.264.425,00	11.685.601.250,05
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.735.879.583,00	1.424.657.998,00	298.653.081,00	3.861.884.500,00
10	Dinas Sosial	9.199.258.270,46	372.326.800,00	-	9.571.585.070,46
11	Dinas Tenaga Kerja	15.727.118.968,46	93.160.160,00	502.058.952,78	15.318.220.175,68
12	Dinas Lingkungan Hidup	173.208.712.623,01	24.680.509.370,03	29.425.086.332,20	168.464.135.660,84
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18.455.852.392,38	1.168.490.123,00	43.934.687,00	19.580.407.828,38
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	8.610.393.735,04	122.099.500,00	-	8.732.493.235,04
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.139.796.039,68	60.620.000,00	-	6.200.416.039,68
16	Dinas Perhubungan	267.308.324.180,92	10.896.157.209,00	1.072.773.190,00	277.131.708.199,92
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	33.894.516.991,18	606.584.200,56	322.298.270,00	34.178.802.921,74
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	59.423.087.258,72	450.999.000,00	18.507.769.931,00	41.366.316.327,72
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.641.022.878,07	490.282.000,00	846.027.990,93	9.285.276.887,14
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	165.979.216.763,78	16.107.922.911,00	10.044.470.000,00	172.042.669.674,78
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	34.997.133.060,24	2.893.723.983,00	1.176.219.942,02	36.714.637.101,22
22	Dinas Arsip dan Perpustakaan	45.400.368.972,90	160.193.800,00	20.756.798,00	45.539.805.974,90
23	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	61.572.927.069,11	7.523.521.307,00	334.162.830,00	68.762.285.546,11
25	Sekretariat Daerah	124.027.842.381,90	3.851.866.712,00	4.576.946.869,90	123.302.762.224,00
26	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	169.401.925.308,20	1.505.614.400,00	793.825.862,56	170.113.713.845,64
27	Kecamatan Bogor Selatan	90.572.758.337,07	3.023.325.196,00	3.787.711.770,00	89.808.371.763,07
28	Kecamatan Bogor Timur	34.425.826.097,27	2.581.372.945,00	1.648.618.222,00	35.358.580.820,27
29	Kecamatan Bogor Tengah	40.861.701.057,01	5.593.405.782,00	2.856.296.409,18	43.598.810.429,83
30	Kecamatan Bogor Barat	71.868.953.303,43	2.957.926.052,40	28.045.000,00	74.798.834.355,83
31	Kecamatan Bogor Utara	46.936.702.740,82	3.484.785.039,87	888.404.600,00	49.533.083.180,69
32	Kecamatan Tanah Sereal	48.120.054.440,93	5.656.678.037,86	97.500.000,00	53.679.232.478,79
	Inspektorat	8.757.334.498,61	948.813.450,00	536.878.811,69	9.169.269.136,92
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.670.835.108,86	72.896.340,00	270.451.281,12	12.473.489.167,74
	Badan Kearsifan dan Dokumentasi Daerah	16.361.221.487,17	53.558.416.808,32	39.593.211.630,61	30.326.426.664,88



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QR Code dan pastikan diarahkan ke alamat <https://www.kotabogor.go.id>

NO	SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
36	Badan Pendapatan Daerah	58.392.602.656,09	4.431.874.546,00	14.064.867.643,61	48.759.609.558,48
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.273.404.485,93	375.500.000,00	692.740.925,87	8.956.163.560,06
38	PPKD	1.669.595.830.604,77	78.156.529.398,00	236.235.650.466,00	1.511.516.709.536,77
39	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	25.983.265.535,41	257.200.000,00	1.345.495.000,07	24.894.970.535,34
JUMLAH		12.377.437.175.575,60	823.751.624.547,32	641.552.668.000,34	12.559.636.132.122,60

WALI KOTA BOGOR,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
WALI KOTA BOGOR,
DEDIE ABDU RACHIM



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRé - BSSN.Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>

PEMERINTAH KOTA BOGOR
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	NILAI ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2023	MUTASI		NILAI ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2024
			TAMBAH	KURANG	
1	TANAH	5.938.980.428.024,63	89.099.591.526,06	231.918.422.642,00	5.796.161.596.908,69
2	PERALATAN DAN MESIN	1.136.877.015.590,06	174.138.442.423,67	54.878.749.428,84	1.256.136.708.584,89
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.582.373.719.962,85	369.133.763.992,37	63.306.916.023,10	1.888.200.567.932,12
4	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	3.483.468.228.932,92	178.260.024.619,01	73.263.596.065,00	3.588.464.657.486,93
5	ASET TETAP LAINNYA	11.314.989.293,84	12.674.429.326,15	8.900.598.235,00	15.088.820.384,99
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	224.422.793.771,34	445.372.660,06	209.284.385.606,40	15.583.780.825,00
J U M L A H		12.377.437.175.575,60	823.751.624.547,32	641.552.668.000,34	12.559.636.132.122,60

WALI KOTA BOGOR,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
WALI KOTA BOGOR,

DEDIE ABDU RACHIM



PEMERINTAH KOTA BOGOR
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN
PER 31 DESEMBER 2024

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI								REKLASIFIKASI/ PENGHAPUSAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2024
			TAMBAH				KURANG					
			TANAH	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN	TANAH	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN		
1	Dinas Pendidikan	1.358.404.960,06	79.226.460,06	266.041.200,00			158.452.920,12					1.279.178.500,00
2	Dinas Kesehatan	324.956.200,00					532.082.400,00				58.915.000,00	
3	Rumah Sakit Umum Daerah (PD)	50.300.834.354,00					48.658.504.434,00				1.642.329.920,00	
4	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	44.556.000,00									44.556.000,00	
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	154.209.774.817,28					147.352.500,00	117.463.832.443,27	31.124.234.769,01		5.474.355.105,00	
6	Dinas Perumahan dan Permukiman	2.335.096.140,00					80.653.760,00	11.907.500,00	2.186.764.880,00		55.770.000,00	
7	Satuan Polisi Pamong Praja	49.450.000,00						49.450.000,00			-	
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-									-	
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-									-	
10	Dinas Sosial	55.755.000,00									55.755.000,00	
11	Dinas Tenaga Kerja	280.820.000,00						280.820.000,00			-	
12	Dinas Lingkungan Hidup	112.641.500,00							16.571.000,00		96.070.500,00	
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-									-	
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	-									-	
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-									-	
16	Dinas Perhubungan	50.417.500,00									50.417.500,00	
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	-									-	
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	625.372.425,00								15.750.000,00	609.622.425,00	
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-									-	
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	13.874.676.275,00								7.943.590.000,00	5.931.086.275,00	
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-									-	
22	Dinas Arsip dan Perpustakaan	-									-	
23	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-									-	
25	Sekretariat Daerah	-									-	
26	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-									-	
27	Kecamatan Bogor Selatan	89.266.200,00									89.266.200,00	
28	Kecamatan Bogor Timur	47.950.000,00									-	
29	Kecamatan Bogor Tengah	111.605.000,00		100.105.000,00					200.210.000,00	47.950.000,00	11.500.000,00	
30	Kecamatan Bogor Barat	99.266.400,00									99.266.400,00	
31	Kecamatan Bogor Utara	-									-	
32	Kecamatan Tanah Sareal	-									-	
33	Inspektorat	-									-	
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-									-	
35	Badan Keuangan dan Aset Daerah	85.692.000,00									85.692.000,00	
36	Badan Pendapatan Daerah	-									-	
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	366.259.000,00									-	
38	PPKD	-									-	
39	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-									-	
J U M L A H		224.422.793.771,34	79.226.460,06	366.146.200,00	-	-	386.459.180,12	175.522.405.777,27	33.375.520.649,01	-	-	15.583.780.825,00

WALI KOTA BOGOR,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN.Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>

PEMERINTAH KOTA BOGOR
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
PER 31 DESEMEBER 2024

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	Dinas Pendidikan	47.374.110.790,82	5.216.022.957,14	1.651.190.833,40	50.938.942.914,56
2	Dinas Kesehatan	13.955.446.114,48	233.023.753,63	2.460.823.250,00	11.727.646.618,11
3	Rumah Sakit Umum Daerah (PD)	2.104.607.415,62	1.720.233.792,59	28.564.701,50	3.796.276.506,71
4	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	3.964.648.117,57	866.781.549,71	14.260.222,00	4.817.169.445,28
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.493.534.729,69	709.530.328,97	617.137.340,00	9.585.927.718,66
6	Dinas Perumahan dan Permukiman	6.725.011.070,98	-	-	6.725.011.070,98
7	Satuan Polisi Pamong Praja	3.629.663.085,41	28.165.000,00	166.175.000,00	3.491.653.085,41
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.574.686.720,66	-	-	2.574.686.720,66
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	211.360.710,00	-	-	211.360.710,00
10	Dinas Sosial	1.711.627.864,59	80.700.000,00	80.700.000,00	1.711.627.864,59
11	Dinas Tenaga Kerja	261.207.013,54	222.788.952,78	-	483.995.966,32
12	Dinas Lingkungan Hidup	26.319.485.146,05	4.046.529.274,17	15.489.574.810,16	14.876.439.610,06
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.719.736.841,09	42.964.687,00	-	1.762.701.528,09
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	890.604.152,20	-	-	890.604.152,20
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.670.819.468,48	-	98.984.098,00	2.571.835.370,48
16	Dinas Perhubungan	4.380.595.045,46	-	-	4.380.595.045,46
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.580.079.884,71	-	-	5.580.079.884,71
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	2.531.475.466,96	-	-	2.531.475.466,96
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.424.881.469,11	463.416.040,93	899.975.945,34	1.988.321.564,70
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	680.809.468,52	-	-	680.809.468,52
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5.002.061.737,33	3.634.814.652,02	2.473.282.910,00	6.163.593.479,35
22	Dinas Arsip dan Perpustakaan	1.780.610.872,11	-	209.448.000,00	1.571.162.872,11
23	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.657.640.636,70	74.355.570,00	-	4.731.996.206,70
25	Sekretariat Daerah	36.058.787.180,02	889.516.948,50	1.273.081.628,00	35.675.222.500,52
26	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.052.132.819,00	-	-	1.052.132.819,00
27	Kecamatan Bogor Selatan	1.872.014.351,89	-	-	1.872.014.351,89
28	Kecamatan Bogor Timur	973.873.907,00	-	-	973.873.907,00
29	Kecamatan Bogor Tengah	2.042.406.963,36	106.726.818,18	-	2.149.133.781,54
30	Kecamatan Bogor Barat	1.172.694.782,84	-	176.942.953,00	995.751.829,84
31	Kecamatan Bogor Utara	1.003.817.379,00	1.500.624,00	1.500.624,00	1.003.817.379,00
32	Kecamatan Tanah Sereal	1.690.740.994,01	4.535.000,00	4.535.000,00	1.690.740.994,01
33	Inspektorat	377.782.288,34	-	29.900.000,00	347.882.288,34
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.759.684.902,58	177.112.000,00	1.043.893.126,05	1.892.903.776,53
35	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3.706.404.462,78	988.706.519,05	556.821.976,32	4.138.289.005,51
36	Badan Pendapatan Daerah	3.686.762.476,33	537.852.846,61	360.313.808,00	3.864.301.514,94
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	750.101.958,50	470.562.061,58	78.838.400,00	1.141.825.620,08
38	PPKD	14.674.939.913,00	5.001.348.131,00	5.262.412.682,00	14.413.875.362,00
39	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5.381.003.452,22	-	4.461.281.000,00	919.722.452,22
J U M L A H		227.847.851.652,95	25.517.187.507,86	37.439.638.307,77	215.925.400.853,04



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN.Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>

WALI KOTA BOGOR,
Dedie Rachim
WALI KOTA BOGOR,
DEDIE ABDU RACHIM

PEMERINTAH KOTA BOGOR
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
PER 31 DESEMBER 2024

NO	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN	SALDO AWAL	TRANSFER DARI KAS DAERAH	TRANSFER KE KAS DAERAH	SALDO AKHIR	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Untuk Pendanaan Kegiatan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024	Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor Tahun 2024	71.336.251.300	45.570.422.900	-	38.648.742.600	6.921.680.300	-
J U M L A H			71.336.251.300	45.570.422.900	-	38.648.742.600	6.921.680.300	-

WALI KOTA BOGOR,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
WALI KOTA BOGOR,

DEDIE ABDU RACHIM



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN.Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>

PEMERINTAH KOTA BOGOR
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
PER 31 DESEMBER 2024

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	260.050.896,00	240.852.799.402,48	240.954.572.397,48	158.277.901,00
2	Utang Bunga	-	543.668.056,00	-	543.668.056,00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	10.281.879.912,00	10.281.879.912,00	10.281.879.912,00	10.281.879.912,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka	413.113.467,07	2.795.802.448,49	639.851.702,43	2.569.064.213,13
5	Utang Belanja	95.418.767.474,00	933.320.379.581,66	932.207.250.962,00	96.531.896.093,66
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	900.000,00	6.666.000,00	900.000,00	6.666.000,00
JUMLAH		106.374.711.749,07	1.187.801.195.400,63	1.184.084.454.973,91	110.091.452.175,79

WALI KOTA BOGOR,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
WALI KOTA BOGOR,

DEDIE ABDU RACHIM



PEMERINTAH KOTA BOGOR
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
PER 31 DESEMBER 2024

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1	Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri	49.362.895.595,00		5.484.766.176,00	43.878.129.419,00
2	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	23.585.806.872,00		4.797.113.736,00	18.788.693.136,00
JUMLAH		72.948.702.467,00	0,00	10.281.879.912,00	62.666.822.555,00

WALI KOTA BOGOR,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
WALI KOTA BOGOR,
DEDIE ABDU RACHIM



PEMERINTAH KOTA BOGOR
DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TA 2024
DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/ KURANG	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					-			
					-			
					-			
					-			
JUMLAH			-	-	-	-	-	-

WALI KOTA BOGOR,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
WALI KOTA BOGOR,

DEDIE ABDU RACHIM

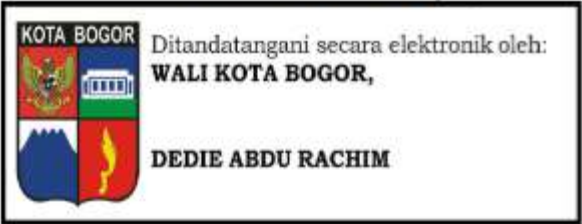


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN.Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>

PEMERINTAH KOTA BOGOR
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

	No	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun 2024	Sumber	Status	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Aset Lainnya	Total Aset	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal Saham	BPYDS	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan Daerah
	1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11 = 9 + 10	12	13	14	15	16	17	18	19=17x18
	1	Bidang Transportasi PD. JASA TRANSPORTASI	BUMD	Audited	805.446.116,00	69.392.964,00	-	874.839.080,00	2.278.463.132,00	-	2.278.463.132,00	35.519.390.000,00	-	-	-	-	-	100%	-
	2	Bidang Pengelola Pasar PD. PASAR PAKUAN JAYA	BUMD	Audited	20.100.193.478,00	342.005.230.058,00	-	362.105.423.536,00	4.433.138.117,00	9.669.996.185,00	14.103.134.302,00	503.111.384.240,00	-	-	(155.109.095.006,00)	-	348.002.289.234,00	100%	348.002.289.234,00
	3	Bidang Penyediaan Air Bersih PDAM TIRTA PAKUAN	BUMD	Audited	214.707.442.978,00	576.200.938.275,00	-	790.908.381.253,00	82.398.071.509,00	127.638.150.710,00	210.036.222.219,00	327.951.510.000,00	-	-	255.979.613.698,00	-	583.931.123.698,00	91,84%	536.282.344.004,24
	4	Bidang Perbankan BANK KOTA BOGOR	BUMD	Audited	257.220.898.147,00	5.644.536.011,00	168.718.604,00	263.034.152.762,00	175.207.039.611,00	-	175.207.039.611,00	54.000.000.000,00	-	-	33.827.113.151,00	-	87.827.113.151,00	100%	87.827.113.151,00
		Total Seluruh Bidang Industri			492.833.980.719,00	923.920.097.308,00	168.718.604,00	1.416.922.796.631,00	264.316.712.369,00	137.308.146.895,00	401.624.859.264,00	920.582.284.240,00	-	-	134.697.631.843,00	-	1.019.760.526.083,00		972.111.746.389,24

WALI KOTA BOGOR,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN.Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>

PEMERINTAH KOTA BOGOR
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

No	BUMD/Perusahaan daerah Tahun 2022	Sumber	Status	Pendapatan	Beban	Laba (Rugi) Kotor	Pendapatan di Luar Usaha	Beban di Luar Usaha	Laba (Rugi) Sebelum Pajak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bidang Transpostasi PD. JASA TRANSPORTASI	BUMD	Audited	2.908.250.458,00	2.832.289.710,00	75.960.748,00	142.014.354,00	56.276.399,00	161.698.703,00
2	Bidang Pengelola Pasar PD. PASAR PAKUAN JAYA	BUMD	Audited	34.102.658.494,00	32.371.746.448,00	1.730.912.046,00	1.588.255.311,00	788.567.243,00	2.530.600.114,00
3	Bidang Penyediaan Air Bersih PDAM TIRTA PAKUAN	BUMD	Audited	399.776.094.059,00	332.334.898.116,00	67.441.195.943,00	12.095.158.947,00	20.418.153.621,00	59.118.201.269,00
4	Bidang Perbankan BANK KOTA BOGOR	BUMD	Audited	27.989.333.754,00	21.081.812.610,00	6.907.521.144,00	148.856.377,00	1.707.805.243,00	5.348.572.278,00
Total Seluruh Bidang Industri				464.776.336.765,00	388.620.746.884,00	76.155.589.881,00	13.974.284.989,00	22.970.802.506,00	67.159.072.364,00

WALI KOTA BOGOR,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
WALI KOTA BOGOR,
DEDIE ABDU RACHIM

